Annual Report
2025
Laporan Tahunan

PELINDO
MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN



Developing an Integrated Vehicle Logistics Ecosystem

Mengembangkan Ekosistem Logistik Kendaraan yang Terintegrasi

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Tahunan serta Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Information Presented in the Annual Report and Disclaimer

Penyusunan Laporan Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, disebut juga "IPCC" atau "Perseroan", tahun 2025 menggunakan referensi dan standar yang berlaku di Indonesia, tempat di mana IPCC berdomisili dan mengembangkan kegiatan operasi dan bisnisnya. Parameter dan kriteria standar mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Penyampaian laporan tahunan ini juga mengelaborasi beberapa dokumen Perseroan, baik itu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Laporan Keuangan teraudit. Penggunaan berbagai dokumen ini diharapkan memberikan landasan argumentasi yang kuat dalam menghadirkan informasi dan data yang *valid*.

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, hingga kemungkinan perbedaan dengan perkembangan yang aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait lingkungan bisnis Perseroan. IPCC tidak dapat menjamin bahwa berbagai dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil yang pasti.

Laporan Tahunan ini memuat kata "IPCC" atau "Perseroan" yang mengacu pada PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Selain itu, kata "Kami" juga digunakan pada beberapa kesempatan dengan fungsi yang sama atas pertimbangan kemudahan penyebutan. Untuk dapat meraih pembaca yang lebih beragam dan sesuai ketentuan yang berlaku, laporan ini disajikan dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di situs web resmi korporat yaitu www.indonesiacarterminal.co.id. Selain itu, laporan ini juga memberikan penanda kinerja untuk mempermudah pembaca dan pengguna laporan.

The preparation of the 2025 Annual Report of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, hereinafter referred to as "IPCC" or "The Company", is based on applicable references and standards in Indonesia, where IPCC is domiciled and carries out its operational and business activities. The parameters and criteria for these standards refer to the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 29/POJK.04/2016 on Annual Reports of Issuers or Public Companies, as well as OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

This Annual Report also elaborates on several Company documents, including the Company's Work Plan and Budget (RKAP), Long-Term Company Plan (RJPP), audited Financial Statements. The use of these documents is expected to provide a solid argument for presenting valid information and data.

This Annual Report contains statements related to the Company's financial condition, operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives, which are classified as forward-looking statements in compliance with applicable laws. These statements involve risks and uncertainties, and there may be differences from actual developments. Various forward-looking statements in this report are based on assumptions regarding current conditions and projections of future business environments. IPCC cannot guarantee that these validated documents will result in definitive outcomes.

This Annual Report uses the terms "IPCC" or "the Company" to refer to PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Additionally, the word "We" is also used occasionally for ease of reference. To reach a broader audience and in accordance with applicable regulations, this report is presented in 2 (two) languages, namely Indonesian and English. The Annual Report can be viewed and downloaded from the official corporate website at www.indonesiacarterminal.co.id. Furthermore, the report includes performance markers to make it easier for readers and users.

Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di website resmi IPCC, yaitu:
This Annual Report can be viewed and downloaded on the official IPCC website, namely:

www.indonesiacarterminal.co.id



Tema Sampul
Cover Theme



PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) pada tahun 2025 memperkuat posisinya sebagai solusi otomotif terintegrasi yang mendorong efisiensi dan daya saing industri otomotif nasional. Perseroan terus mengembangkan ekosistem logistik kendaraan yang berstandar global melalui modernisasi fasilitas, peningkatan kapasitas terminal, serta digitalisasi proses layanan. Sejak berdiri di tahun 2012 hingga 2025, volume kendaraan ekspor yang dilayani IPCC tercatat meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan peran strategis Perseroan dalam mendukung kinerja ekspor industri otomotif nasional serta turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Inovasi diarahkan untuk menghadirkan rantai pasok otomotif yang semakin terhubung, mulai dari layanan terminal, penyimpanan, hingga distribusi kendaraan. Kolaborasi strategis dengan pelaku industri dan pemangku kepentingan menjadi landasan untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat nilai tambah bagi pelanggan. Dengan fondasi operasional yang kuat dan orientasi pada keberlanjutan, IPCC berkomitmen menjadi mitra utama dalam pertumbuhan industri otomotif Indonesia.

In 2025, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) strengthened its position as an integrated automotive solutions provider that enhances efficiency and competitiveness in the national automotive industry. The Company continued to develop a globally standardized vehicle logistics ecosystem through facility modernization, increased terminal capacity, and the digitalization of service processes. Since its establishment in 2012 through 2025, the volume of export vehicles handled by IPCC has increased every year. This indicates the Company's strategic role in supporting the export performance of the national automotive industry and contributing to Indonesia's economic growth. Innovation efforts are focused on creating a more connected automotive supply chain, ranging from terminal services and storage to vehicle distribution. Strategic collaboration with industry players and stakeholders serves as the foundation for expanding service reach and enhancing value creation for customers. With a strong operational foundation and a sustainability-oriented approach, IPCC is committed to becoming a leading partner in the growth of Indonesia's automotive industry.

Kesinambungan Tema
Theme Continuity



2024 Digitalization Through Optimizing Vehicle Ecosystem

Tema ini mencerminkan peran strategis IPCC dalam mempercepat transformasi digital guna mengoptimalkan ekosistem kendaraan di seluruh rantai logistik. IPCC berfokus pada penerapan teknologi digital yang mendukung efisiensi operasional, peningkatan transparansi, serta integrasi layanan berbasis data untuk memastikan kelancaran pergerakan kendaraan dari hulu ke hilir. Melalui sistem PTOS-C yang semakin disempurnakan, IPCC mampu menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam satu ekosistem digital yang lebih terstruktur, memungkinkan monitoring real-time, optimalisasi kapasitas terminal, serta peningkatan akurasi data logistik. Selain itu, IPCC terus memperluas layanan dengan mengakomodasi tren kendaraan listrik (EV) yang membutuhkan penyesuaian infrastruktur dan pola distribusi baru. Dengan pendekatan digitalisasi ini, IPCC tidak hanya meningkatkan daya saingnya dalam industri pelabuhan dan logistik, tetapi juga memperkuat ekosistem kendaraan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan di Indonesia.

This theme reflects IPCC's strategic role in accelerating digital transformation to optimize the vehicle ecosystem across the logistics chain. IPCC focuses on implementing digital technologies that support operational efficiency, improve transparency, and integrate data-driven services to ensure smooth vehicle movement from upstream to downstream. Through the increasingly enhanced PTOS-C system, IPCC can connect a variety of stakeholders within a more structured digital ecosystem, enabling real-time monitoring, terminal capacity optimization, and improved logistics data accuracy. In addition, IPCC continues to expand its services by accommodating the electric vehicle (EV) trend, which requires infrastructure adjustments and new distribution patterns. Through this digitalization approach, IPCC is not only strengthening its competitiveness in the port and logistics industry but also fortifies a more efficient, integrated, and sustainable vehicle ecosystem in Indonesia.



2023 Enhancement & Expansion

IPCC berupaya merespon potensi dan tantangan yang muncul di sepanjang tahun 2023 dengan tujuan menciptakan operasional yang unggul, layanan yang prima, kinerja keuangan yang solid, dan nilai tambah bagi pemegang saham. Kerja sama dengan prinsipal yang terus terbangun di sepanjang tahun 2023 menjadi salah satu capaian penting, hal ini menunjukkan kepercayaan pelanggan dan pengalaman pelanggan atas produk dan layanan yang diberikan IPCC. Di samping itu, ekspansi IPCC atas Terminal Satelit Balikpapan di tahun 2023 menjadi hal positif yang akan memberikan tambahan cakupan jaringan konektivitas terminal kendaraan yang dikelola Perseroan.

Tema "Membangun Kemitraan dan Ekspansi Wilayah Bisnis" berupaya menekankan berbagai upaya yang dilakukan IPCC untuk dapat mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Terutama dengan pembukuan laba dengan kenaikan yang cukup baik, hal ini tentu menjadi faktor fundamental bagi pemegang saham dalam menilai prospek IPCC ke depan.

IPCC seeks to respond to the potential and challenges that arise throughout 2023 with the aim of creating superior operations, excellent service, solid financial performance and added value for shareholders. Collaboration with principals that continues to be built throughout 2023 is one of the important achievements, this shows customer trust and customer experience with the products and services provided by IPCC. In addition, IPCC's expansion of the Balikpapan Satellite Terminal in 2023 is a positive thing that will provide additional coverage for the vehicle terminal connectivity network managed by the Company.

The theme "Enhancement & Expansion" seeks to emphasize the various efforts made by the IPCC to realize sustainable growth. Especially with recorded profits with a fairly good increase, this is certainly a fundamental factor for shareholders in assessing IPCC's future prospects.







2022

Komitmen untuk Menjaga Keunggulan Bisnis dan Operasional

Commitment to Maintain Business and Operational Excellence

Pada tahun 2022, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perseroan" atau "IPCC") berhasil melanjutkan turnaround pertumbuhan kinerja yang positif, ditopang oleh perkembangan yang terus membaik pada industri otomotif, pertambangan dan aktivitas logistik. Pencapaian positif ini diyakini akan semakin memantapkan posisi Perseroan dalam merealisasikan visinya "menjadi Pengelola Ekosistem Terminal Kendaraan Berkelas Dunia". Untuk menjaga stabilitas bisnis, Perseroan telah berinvestasi pada berbagai aspek untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional pelayanan secara fisik serta memastikan tersedianya sistem digitalisasi dalam rangka mempercepat proses bisnis sehingga pemberian layanan kepada para mitra pun dapat berjalan efektif. Dengan menerapkan berbagai inisiatif strategis, Perseroan optimis dapat meraih pertumbuhan kinerja unggul yang berkelanjutan secara konsisten.

In 2022, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("the Company" or "IPCC") has succeeded in continuing its turnaround in positive performance growth, supported by developments that continue to improve in the automotive industry, mining and logistics activities. This positive achievement is believed to further strengthen the Company's position in realizing its vision of "becoming a WorldClass Car Terminal Ecosystem Manager". To maintain business stability, the Company has invested in various aspects to guarantee the smooth operation of services in person, as well as ensuring the availability of a digitized system in order to accelerate business processes, to ensure that the provision of services to partners can run effectively. By implementing a variety of strategic initiative, the Company is optimistic that it will be able to consistently achieve superior performance growth.



2021

Memperkuat Digitalisasi untuk Mewujudkan Strategi Pengembangan Bisnis yang Terintegrasi

Strengthening Digitalization upon Realizing an Integrated Business Development Strategies

Sebagai salah satu operator terminal khusus kendaraan di Indonesia, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perseroan atau IPCC") berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang dimiliki untuk mewujudkan hadirnya terminal kendaraan yang berdaya saing tinggi. Pengembangan atas strategi bisnis terus dikaji agar pelayanan yang disediakan Perseroan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Tahun 2021, Perseroan mengejawantahkan komitmen tersebut dengan memperkuat digitalisasi untuk mempercepat proses bisnis sehingga pemberian layanan kepada para mitra pun dapat berjalan efektif. Didukung oleh performa yang menjanjikan di tengah tantangan industri dan makroekonomi, serta sinergi grup yang terjalin bersama Pelindo Group, Perseroan optimis dapat meraih pertumbuhan yang berkelanjutan secara konsisten sehingga turut berkontribusi dalam mendorong tumbuhnya ekosistem maritim logistik yang terintegrasi dan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

As one of Terminal Operators specialized in car in Indonesia, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (the "Company or IPCC") has committed to continuously improve its services and facilities to be a highly competitive car terminal. The development of business strategies continues to be reviewed that the services provided by the Company are able to meet the market needs. In 2021, the Company embodied the commitment through strengthening digitalization to accelerate business processes that the service provided delivered effectively to partners. Driven by promising performances in the midst of industry and macroeconomic challenges, as well as a good synergy of the Pelindo Group, the Company optimist to achieve a consistent sustainable growth that will contribute to encouraging the growth of an integrated maritime logistics ecosystem and have positive impacts on the Indonesian economy as a whole.



Daftar Isi
Table of Contents

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Tahunan serta Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Information Presented in the Annual Report and Disclaimer	2
Tema Sampul Cover Theme	3
Kesinambungan Tema Theme Continuity	4
Daftar Isi Table of Contents	6
Mengembangkan Konektivitas dalam Jaringan Kepelabuhanan Nasional Developing Connectivity in the National Port Network	10
Pencapaian 2025 Achievements in 2025	12
Sekilas Tentang IPCC About IPCC	15

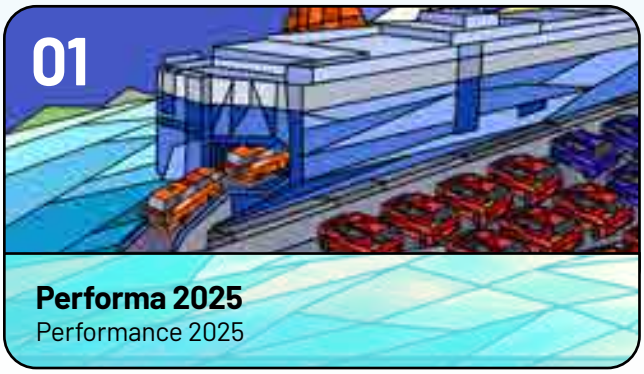

01

Performa 2025
Performance 2025

Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights	18
Ikhtisar Operasi dan Usaha Operational and Business Highlights	23
Ikhtisar Organisasi Organization Highlights	24
Ikhtisar Saham Shares Highligts	25
Informasi tentang Efek Bersifat Utang dan/atau Pendanaan Berbasis Efek Utang Lainnya dan/atau Pendanaan Berbasis Efek Utang Lainnya	27
Information on Debt Securities and/or Other Debt-Based Financing Instruments Debt-Based Financing Instruments	27
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	28
Kilas Peristiwa 2025 2025 Event Highlights	32



02

Laporan Manajemen
Management Report

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Reports	40
Laporan Direksi Board of Directors Report	50
Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Statement of Board of Commissioners on Accountability for the 2025 Annual Report of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	68
Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Statement of Board of Directors on Accountability for the 2025 Annual Report of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	69

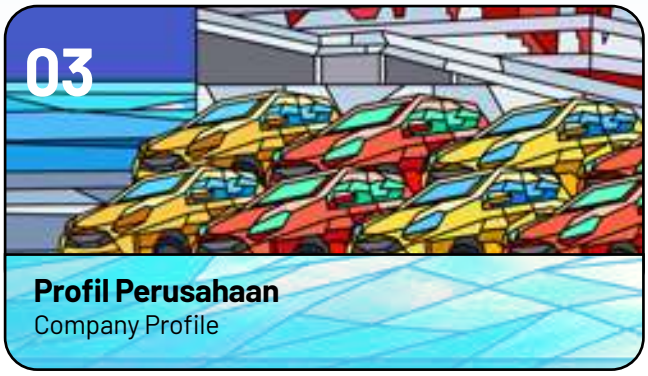

03

Profil Perusahaan
Company Profile

Informasi Umum Perusahaan General Information About The Company	72
Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company	75
Jejak Langkah Milestones	78
Identitas dan Logo Perusahaan Company Identity and Logo	80

Identitas Perusahaan Company Identity	81
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Values	82
Kegiatan Usaha Business Activities	92
Keanggotaan pada Asosiasi Industri Membership in Industry Associations	99
Wilayah Operasional Operational Area	100
Struktur Organisasi Perusahaan Organizational Structure of the Company	102
Profil Direksi Board of Directors Profile	104
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	108
Profil Pejabat Eksekutif Executive Officers Profile	116
Demografi Karyawan Employee Demographics	126
Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Structure and Composition Of Shareholders	130
Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	135
Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham Chronology of Share Issuance and/or Listing	136
Kronologis Penerbitan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Issuance	137
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Public Accountant and Public Accounting Firm	137
Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Institutions and/or Supporting Professional	138
Informasi Pada Situs Web Perusahaan Information on The Company Website	139





04
Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Capital Management	144
Teknologi Informasi Information Technology	161



05
Analisa dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tinjauan Perekonomian dan Industri Economic and Industrial Overview	182
Kebijakan Strategis Tahun 2025 dan Penyelesaian Permasalahan yang Terjadi Strategic Policies for 2025 and Resolution of Issues Encountered	183
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Operational Overview by Business Segment	184
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	199
Teknologi Technology	203
Penelitian dan Pengembangan Research and Development	205
Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis	206
Kemampuan Membayar Utang Ability to Pay Debt	219

Rata-rata Kolektibilitas Piutang Usaha atau Perputaran Piutang Usaha Average Trade Receivables Collectibility or Trade Receivables Turnover	221
Struktur Modal Perusahaan dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Capital Structure of the Company and Management Policy on Capital Structure	222
Investasi Barang Modal Capital Expenditures	223
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Information and Material Facts Occurring after the Date of the Accountant's Report	224
Pencapaian Target Tahun 2025 Target Achievement In 2025	225
Kebijakan Dividen dan Pembagiannya Dividend Policy and the Distribution	227
Kontribusi Kepada Negara Contribution to the Nation	229
Informasi tentang Tambahan Penanaman Modal Negara (PMN) dan Proyek Strategis Nasional atau Penugasan Lain Information on Additional State Capital Investment (PMN) And National Strategic Projects or Other Assignments	230
Informasi tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Information on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering	231 231
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal, Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Material Information on Investments, Expansions, Divestments, Mergers, Acquisitions, and/or Debt/Capital Restructurings, Material Transactions, Affiliated Transactions, and Transactions Containing Conflicts of Interest	231
Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events	232
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Terhadap Perusahaan Changes in Legislation that Affect the Company	232
Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan Accounting Policy Changes and the Impact for the Company	233
Prospek Usaha Tahun 2026 Business Prospects For 2026	234
Rencana Strategis dan Proyeksi Kinerja Perseroan Tahun 2026 Company Strategic Plan and Performance Projection for 2026	234
Peta Jalan Usaha 2025-2029 Business Roadmap 2025-2029	236



06

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Pencapaian Terbaik Praktik Tata Kelola Tahun 2025 Best Governance Practices Achievement 2025	240
Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan secara Berkelanjutan Commitment to The Implementation of Sustainable Corporate Governance	241 241
Penerapan Tata Kelola Perusahaan secara Berkelanjutan Sustainable Implementation of Corporate Governance	244
Penerapan 8 (Delapan) Prinsip Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 Implementation of 8 (Eight) of 2021 Principles Indonesian General Guidelines on Corporate Governance (PUGKI)	266
Struktur Organ GCG dan Mekanisme Hubungan Antar Organ GCG Organ Structure and Inter-Organ Relationship Mechanism	294
Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Shareholders and General Meeting of Shareholders	299
Direksi Board of Directors	316
Dewan Komisaris Board of Commissioners	330
Komisaris Independen Independent Commissioner	343
Transparansi Informasi tentang Direksi dan Dewan Komisaris Transparency of Information about Board of Directors and Board of Commissioners	344

Organ Pendukung Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs	372
Organ Pendukung Direksi Board of Directors Supporting Organs	400
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	409
Audit Internal Internal Audit	416
Akuntan Publik Public Accountants	427
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	430
Manajemen Risiko Risk Management	440
Sistem Manajemen Risiko Risk Management System	446
Perkara Hukum yang Berdampak Material yang dihadapi oleh Perseroan, Entitas Anak, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Legal Cases with Material Impact Faced by the Company, Subsidiaries, Members of Board of Directors and Members of Board of Commissioners	468
Transparansi Kondisi Keuangan Transparency of Financial Conditions	470
Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data	473
Kode Etik Code of Conduct	477
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan Policy on Long-Term Performance-Based Compensation to Management and/or Employees	485
Informasi Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Information on Share Ownership of Members of Board of Directors and Board of Commissioners	486
Kebijakan Terkait Perencanaan atas Suksesi Anggota Direksi dan Manajemen Kunci Policy on Succession Planning for Board of Directors and Key Management	487
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	488
Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services	494
Kebijakan Anti-Korupsi dan Anti-Gratifikasi Anti-Corruption and Anti-Gratification Policy	498
Kebijakan Untuk Mencegah Terjadinya Insider Trading Policy to Prevent Insider Trading	502
Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Implementation of State Official Wealth Reporting (LHKPN)	504
Informasi Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik Donation to Political Activity	505
Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Direksi dan Dewan Komisaris Apabila Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan Policy for Dismissal of Board of Directors and Board of Commissioners if Engaged in Financial Crimes	505
Transparansi Praktik Bad Governance Transparency on Bad Governance Practices	506



07

Laporan Keuangan
Financial Report

Laporan Keuangan Financial Report	510
Referensi Silang SEOJK No. 16 /SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Cross-Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing the Annual Report of Issuers or Public Companies	600



Mengembangkan Konektivitas dalam Jaringan Kepelabuhanan Nasional

Developing Connectivity in the National Port Network

IPCC telah menjadi bagian dari perkembangan Pelindo dalam mengembangkan konektivitas jaringan kepelabuhanan nasional, khususnya dalam pengelolaan terminal kendaraan.

IPCC has become part of Pelindo's development in enhancing the connectivity of the national port network, particularly in vehicle terminal management.

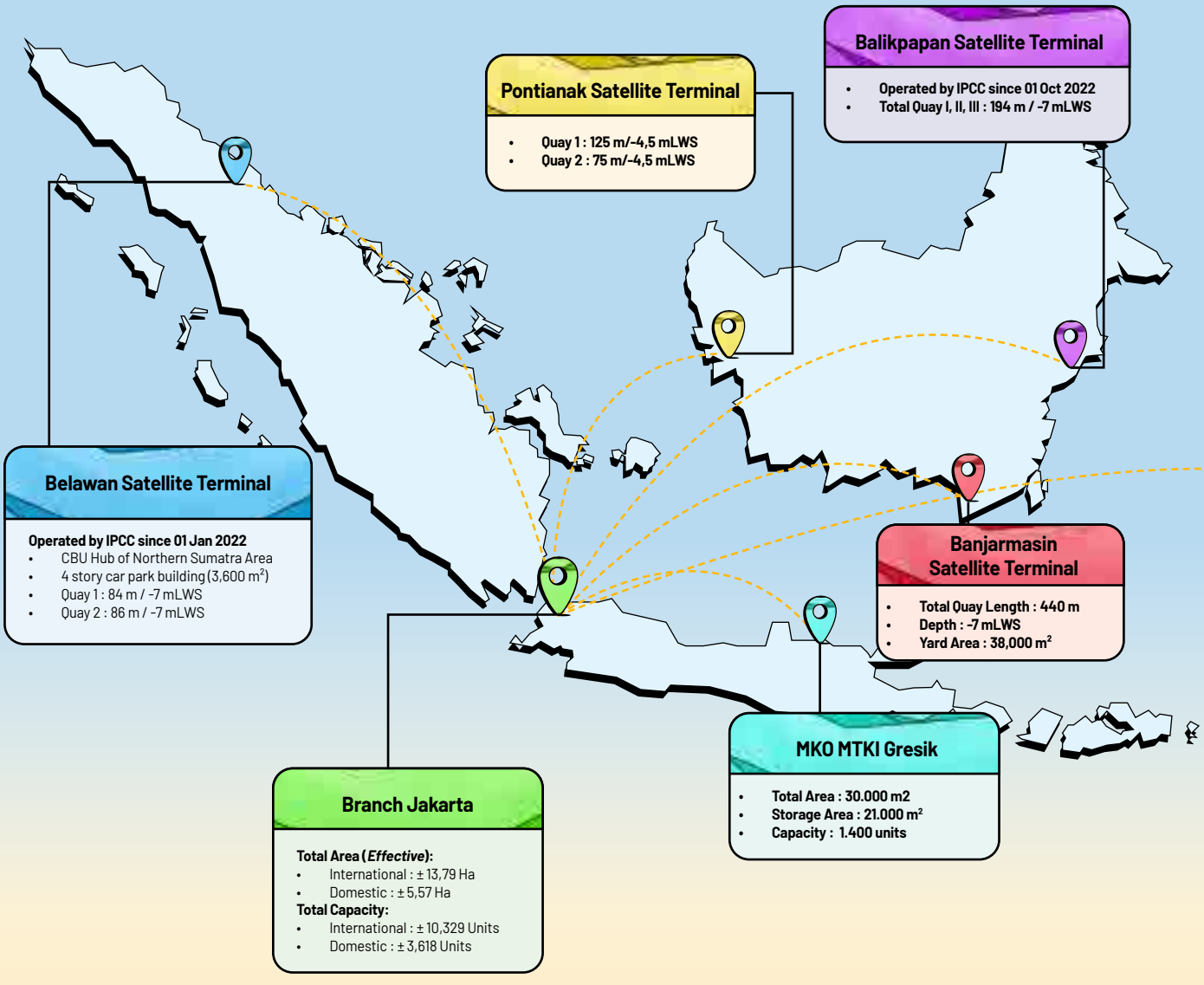



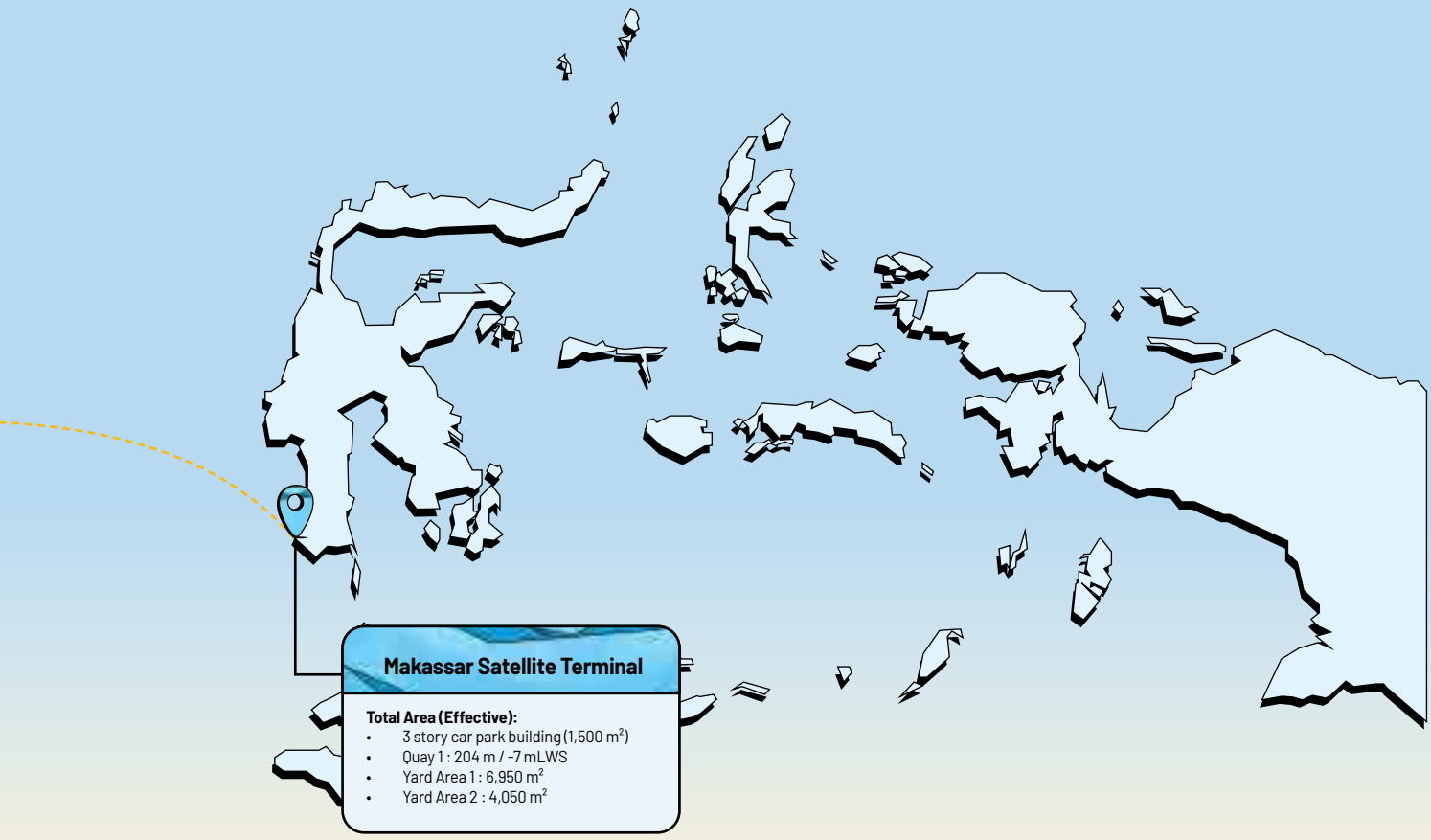

Makassar Satellite Terminal

Total Area (Effective):
- 3 story car park building (1,500 m^2)
- Quay 1 : 204 m / -7 mLWS
- Yard Area 1 : 6,950 m^2
- Yard Area 2 : 4,050 m^2

Pencapaian 2025
Achievements in 2025

Pertumbuhan berkelanjutan menjadi komitmen IPCC untuk terus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.
Sustainable growth has become IPCC's commitment to continuously deliver added value to shareholders and all stakeholders.



Bongkar Muat Mobil
Car Loading and Unloading

957.661 unit | units
Meningkat 11,76% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 856.870 unit.
An increase of 11.76% compared to the previous year's 856,870 units.

Bongkar Muat Kendaraan Berat
Heavy Vehicle Loading and Unloading

288.179 unit | units
Peningkatan hingga 43,40% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 200.961 unit.
An increase of 43.40% compared to the previous year's 200,961 units.

Bongkar Muat *Sparepart*
Sparepart Loading and Unloading

156.599 PKGS
Meningkat 154,01% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 61.651 PKGS.
A 154.01% increase compared to the previous year's 61,651 PKGS.

Bongkar Muat Motor
Motorcycle Loading and Unloading

387.069 unit | units
Peningkatan 15,85% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 334.122 unit.
A 15.85% increase compared to the previous year's 334,122 units.

Jumlah Pendapatan Operasi
Total Operating Revenue

Rp929,96 miliar | billion
Meningkat 12,78% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp824,60 miliar.
Increased by 12.78% compared to the previous year of Rp824.60 billion.

Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

Rp256,51 miliar | billion
Tumbuh 20,87% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp212,22 miliar.
Grew by 20.87% compared to the previous year of Rp212.22 billion.

Laba per Saham
Earnings per Share

Rp141,07 per saham | per share
Tumbuh 20,87% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp116,71 per saham.
Grew by 20.87% compared to the previous year of Rp116.71 per share.

Jumlah Aset
Total Assets

Rp2,06 triliun | trillion
Meningkat 11,21% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,85 triliun.
Increased by 11.21% compared to the previous year of Rp1.85 trillion.

Jumlah Liabilitas
Total Liabilities

Rp697,43 miliar | billion
Meningkat 21,61% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp573,51 miliar.
Increased by 21.61% compared to the previous year of Rp573.51 billion.

Jumlah Ekuitas
Total Equity

Rp1.36 triliun | trillion
Peningkatan 6,54% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,28 triliun.
Increased by 6.54% compared to the previous year of Rp1.28 trillion.

Saldo Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalents Balance

Rp1,08 triliun | trillion
Tumbuh 33,55% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp810,40 miliar.
Grew by 33.55% compared to the previous year of Rp810.40 billion.

Rasio Kas
Cash Ratio

3,91 kali | times
Menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,37 kali.
Decreased compared to the previous year of 4.37x.

Imbal Hasil Aset
Return on Assets

12,46 %
Meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,47%.
Increased compared to the previous year of 11.47%.

Imbal Hasil Ekuitas
Return on Equity

18,85 %
Meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 16,62%.
Increased compared to the previous year of 16.62%.



Pencapaian Terbaik Penerapan Tata Kelola Perusahaan 2025

IPCC kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam penerapan tata kelola perusahaan dengan meraih skor ASEAN *Corporate Governance Scorecard* sebesar **115,89** poin, berpredikat "*Excellent*" dan diklasifikasikan sebagai "(ASEAN *Asset Class*)". Capaian ini menjadi bukti nyata atas konsistensi IPCC dalam mengimplementasikan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas (ITA) secara berkelanjutan, sekaligus mencerminkan kematangan tata kelola Perseroan yang telah melampaui standar kawasan ASEAN. Skor Risk Management Index (RMI) sebesar 2,71 turut menegaskan komitmen IPCC dalam mengelola risiko secara sistematis dan terukur dalam setiap aktivitas bisnis dan operasional.

Best Achievement in Corporate Governance Implementation in 2025

IPCC once again recorded an outstanding achievement in corporate governance implementation by attaining an ASEAN Corporate Governance Scorecard of 115,89 points, earning an "Excellent" rating and being classified under "Leadership in Corporate Governance (ASEAN Asset Class)." This achievement reflects IPCC's consistent commitment to implementing the principles of integrity, transparency, and accountability (ITA) in a sustainable manner, while also demonstrating the Company's governance maturity that has exceeded ASEAN regional standards. A Risk Management Index (RMI) score of 2.71 further underscores IPCC's commitment to managing risks in a systematic and measurable manner across all business and operational activities.

Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Assessment

Skor
Score

115,89
poin | points

Predikat
Predicate

"Excellent"

Klasifikasi
Classification

"Leadership in Corporate Governance (ASEAN Asset Class)"

Risk Management Index (RMI)

Skor
Score

2,71
Managed

Sekilas Tentang IPCC
About IPCC



Bidang Usaha
Field of Business

Penyediaan dan/atau pelayanan bongkar-muat kargo (CBU, Alat Berat, Bus/Truck dan General Cargo) dari dan ke kapal di pelabuhan.
Provision and/or cargo loading-unloading services (CBU, Heavy Equipment, Bus/Truck, and General Cargo) from and to ships at the port.

Pemegang saham
Shareholders

- PT Pelindo Multi Terminal **(71,28%)**
- PT Pelabuhan Indonesia Investama **(5,54%)**
- PT Multi Terminal Indonesia **(0,72%)**
- Publik | Public **(22,46%)**

PELINDO MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN

Wilayah Operasi
Operational Area

- **6 Terminal Kendaraan di wilayah kerja Pelindo dan 1 Manajemen Kerjasama Operasi. "disajikan selengkapnya pada bab Profil Perusahaan di bagian Wilayah Operasional Laporan ini".**
- 6 Vehicle Terminals in Pelindo's operational areas and 1 Operational Cooperation Management.
  "more detail can be seen in the Company Profile chapter in the Operational Area section of this report."

Produk dan Jasa
Products and Services

- **Pelayanan Jasa Terminal**
- **Pelayanan Jasa Barang**
- **Pelayanan Jasa Rupa-rupa**
- **Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik**
- Terminal Services
- Cargo Services
- Miscellaneous Services
- Land, Building, Water, and Electricity Management

PELINDO
MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN

01

Performa 2025
Performance 2025

IPCC mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif sepanjang tahun 2025 melalui eksekusi strategi yang konsisten. Capaian ini memperkuat posisi Perseroan sebagai penyedia layanan terminal kendaraan yang kompetitif di pasar global.
IPCC recorded positive performance growth throughout 2025 through consistent execution of its strategies. This achievement further strengthens the Company's position as a competitive vehicle terminal service provider in the global market.





Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Highlights

Laba (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain
Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In Millions of Rupiah, unless otherwise stated	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Pendapatan Operasi Operating Revenue							
Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang Terminal and Cargo Services	**910.791**	796.750	711.763	709.507	510.701	14,31 ↑	12,27 ↑
Pelayanan Jasa Rupa-rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas Miscellaneous, Facilities and Utilities Services	**19.169**	27.846	23.442	17.066	6.136	(31,16) ↓	25,59 ↑
Jumlah Pendapatan Operasi Total Operating Revenue	**929.960**	824.596	735.205	726.573	516.837	12,78 ↑	12,47 ↑
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	**(530.702)**	(477.079)	(408.728)	(379.727)	(318.590)	11,24 ↑	10,74 ↑
Laba Bruto Gross Profit	**399.259**	347.517	326.477	346.847	198.247	14,89 ↑	15,03 ↑
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	**(95.811)**	(89.424)	(76.343)	(88.904)	(69.638)	7,14 ↑	6,59 ↑
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya Other Operating Income (Expenses)	**(2.588)**	(1.504)	(4.926)	(12.886)	(15.481)	72,11 ↑	(30,07) ↓
Laba Usaha Operating Profit	**300.859**	256.589	245.208	245.057	113.128	17,25 ↑	21,61 ↑
Pendapatan (Beban) Keuangan Financial Income (Expenses)	**23.077**	13.257	(8.388)	(32.070)	(31.887)	74,08 ↑	(193,74) ↓
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Profit Before Corporate Income Tax	**323.937**	269.846	236.820	212.987	81.241	20,04 ↑	31,87 ↑
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax Benefit (Expense)	**(67.424)**	(57.630)	(45.966)	(51.262)	(21.185)	16,99 ↑	26,05 ↑
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**256.513**	212.216	190.855	161.725	60.056	20,87 ↑	33,69 ↑
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	**-**	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**256.513**	212.216	190.855	161.725	60.056	20,87 ↑	33,69 ↑
Laba per Saham (Rupiah penuh) Earnings per Share (full Rupiah)	**141,07**	116,71	104,96	88,94	33,03	20,87 ↑	33,69 ↑

Komposisi Pendapatan per Segmen
Composition of Revenue per Segment



Pelayanan Jasa Rupa-rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas
Miscellaneous, Facilities and Utilities Services

Pelayanan Jasa Terminal dan Barang
Terminal and Cargo Services

Pendapatan
Revenue

Rp-Juta
Rp-Million

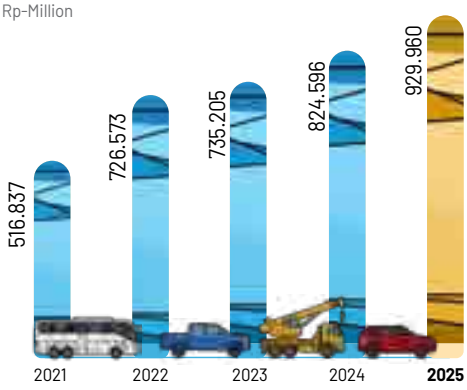

Laba (Rugi) per Saham
Earnings (Loss) per Share

Rp-Juta
Rp-Million

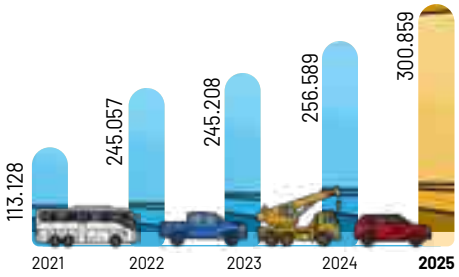

Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Profit (Loss) for the Year

Rp-Juta
Rp-Million

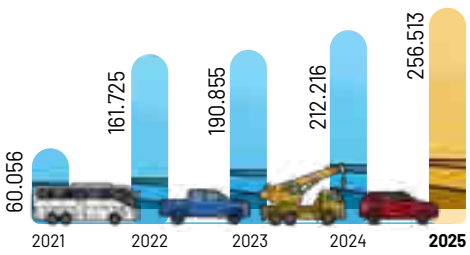

Laba (Rugi) per Saham
Earnings (Loss) per Share

(Rupiah penuh)
(in full Rupiah)

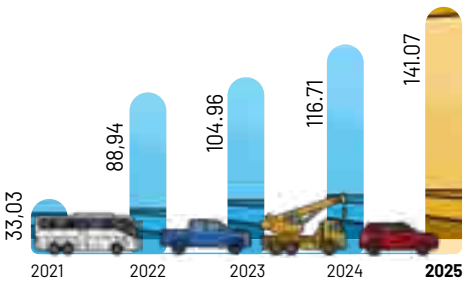

Posisi Keuangan

Financial Position

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In Millions of Rupiah, unless otherwise stated	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Aset Assets							
Aset Lancar Current Assets							
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	**1.082.282**	810.397	670.182	1.019.761	768.869	33,55 ↑	7,08 ↑
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	**88.925**	91.038	88.940	76.216	58.076	(2,32) ↓	8,89 ↑
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**1.171.207**	901.436	759.122	1.095.977	826.945	29,93 ↑	7,21 ↑
Aset Tidak Lancar **Non-Current Assets**							
Aset Tetap - Neto Fixed Assets - Net	**340.338**	348.651	359.356	362.665	368.232	(2,38) ↓	(1,56) ↓
Aset Hak Guna - Neto Right-of-Use Assets - Net	**488.841**	536.361	606.287	675.417	718.287	(8,86) ↓	(7,41) ↓
Aset Tidak lancar Lainnya Other Non-Current Assets	**57.845**	64.291	63.549	57.769	49.413	(10,03) ↓	3,20 ↑
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	**887.025**	949.303	1.029.192	1.095.851	1.135.932	(6,56) ↓	(4,83) ↓
Jumlah Aset Total Assets	**2.058.232**	**1.850.738**	**1.788.314**	**2.191.828**	**1.962.878**	**11,21** ↑	**0,95** ↑
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity							
Liabilitas Liabilities							
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**276.565**	185.272	205.968	634.871	171.289	49,27 ↑	10,06 ↑
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	**420.866**	388.238	359.480	394.987	726.596	8,40 ↑	(10,35) ↓
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**697.431**	**573.510**	**565.448**	**1.029.858**	**897.885**	**21,61** ↑	**(4,93)** ↓
Ekuitas Equity							
Jumlah Ekuitas Total Equity	**1.360.801**	1.277.228	1.222.867	1.161.970	1.064.993	6,54 ↑	5,02 ↑
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**2.058.232**	**1.850.738**	**1.788.314**	**2.191.828**	**1.962.878**	**11,21** ↑	**0,95** ↑

Jumlah Aset
Total Assets

Rp-Juta
Rp-Million

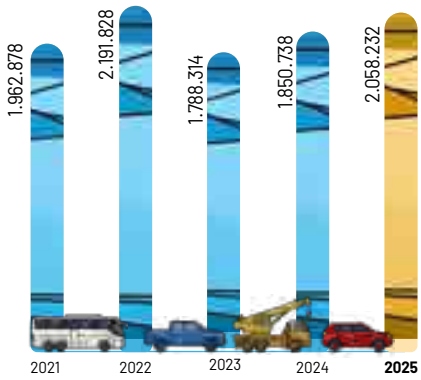

Liabilitas dan Ekuitas
Liabilities and Equity

Liabilitas Liabilities
Ekuitas Equity

Rp-Juta
Rp-Million

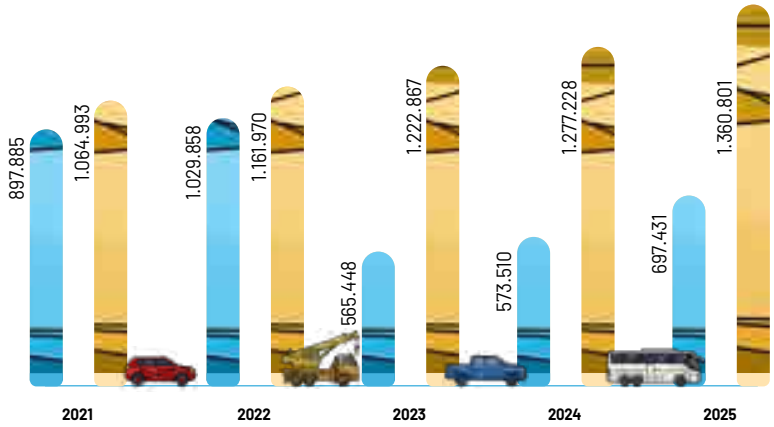

Arus Kas
Cash Flows

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In Millions of Rupiah, unless otherwise stated	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	**423.183**	380.190	249.113	343.943	305.237	11,31 ↑	6,75 ↑
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	**(5.279)**	(24.866)	(27.239)	(32.880)	(44.642)	(78,77) ↓	(34,75) ↓
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	**(146.018)**	(215.108)	(571.453)	(60.172)	(11.381)	(32,12) ↓	66,59 ↑
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas Net Increase in Cash and Cash Equivalents	**271.885**	140.216	(349.579)	250.891	249.214	93,90 ↑	1,76 ↑
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents Balance at Beginning of the Year	**810.397**	670.182	1.019.761	768.870	519.656	20,92 ↑	9,29 ↑
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents Balance at End of the Year	**1.082.282**	810.397	670.182	1.019.761	768.870	33,55 ↑	7,08 ↑

Kas dan Setara Kas di Akhir Tahun
Cash and Cash Equivalents at End of the Year

Rp-Juta
Rp-Million

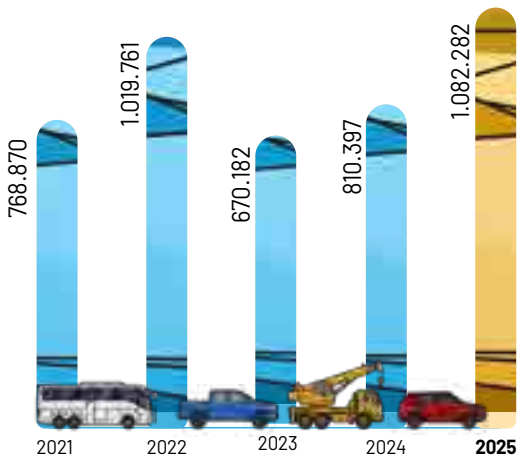

Rasio-rasio Keuangan

Financial Ratios

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease) 2024-2025 (%)	
Profitabilitas Profitability								
Margin Laba Bruto Gross Profit Margin	%	**42,93**	42,14	44,41	47,74	38,36	1,88	↑
Margin Laba Usaha Operating Profit Margin	%	**32,35**	31,12	33,35	33,73	21,89	3,96	↑
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	%	**27,58**	25,74	25,96	22,26	11,62	7,16	↑
Imbal Hasil Ekuitas Return on Equity	%	**18,85**	16,62	15,61	13,92	5,80	13,42	↑
Imbal Hasil Aset Return on Assets	%	**12,46**	11,47	10,67	7,38	3,06	8,66	↑
Likuiditas Liquidity								
Rasio Kas Cash Ratio	kali times	**3,91**	4,37	3,25	1,61	4,49	(10,45)	↓
Rasio Cepat Quick Ratio	kali times	**4,23**	4,87	3,69	1,73	4,83	(13,04)	↓
Rasio Lancar Current Ratio	kali times	**4,23**	4,87	3,69	1,73	4,83	(13,04)	↓
Solvabilitas Solvency								
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset Debt to Asset Ratio	%	**33,89**	30,99	31,62	46,99	45,74	2,90	↑
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas Debt to Equity Ratio	%	**51,20**	44,90	46,24	88,63	84,31	6,30	↑
Kolektabilitas Piutang Receivables Collectability								
Kolektabilitas Piutang Receivables Collectability	kali times	**27,25**	35,50*	11,59	12,38	8,82	(8,25)	↓
Rata-Rata Hari Kolektabilitas Piutang Average Days of Receivables Collectibility	hari days	**29,37**	31.32	31,48	29,49	41,38	(1,95)	↓

*) disajikan kembali
*) restated

Margin Laba Bersih
Net Profit Margin

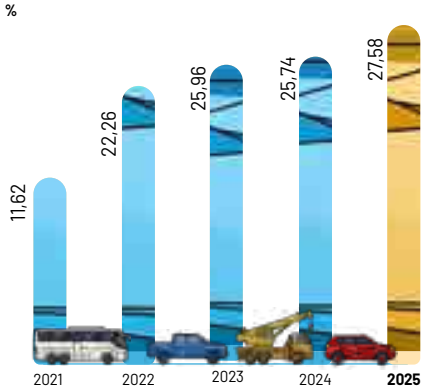

Rasio Kas
Cash Ratio

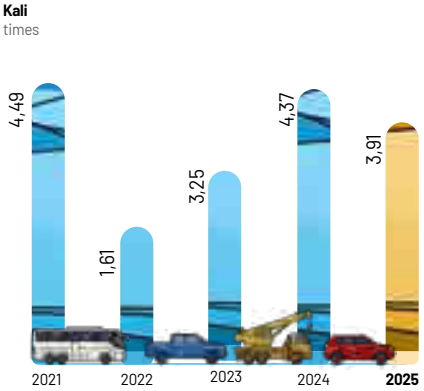

Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset
Debt to Asset Ratio

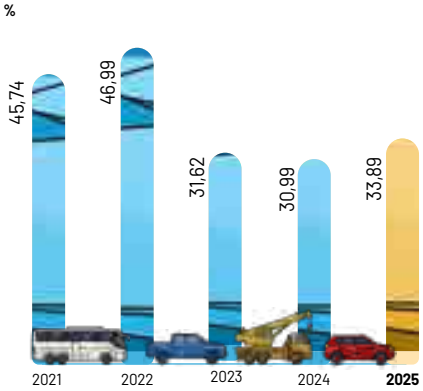

Ikhtisar Operasi dan Usaha
Operational and Business Highlights

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024*	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Jasa Terminal Terminal Services								
Bongkar Muat Mobil Car Loading and Unloading	unit	**957.661**	856.870	797.137	746.064	522.917	11,76 ↑	12,86 ↑
Kendaraan Berat (Alat Berat dan Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment and Trucks/ Buses)	unit	**288.179**	200.961	122.189	114.354	51.127	43,40 ↑	41,32 ↑
	m^3	**12.601.502**	8.627.493	5.233.537	5.281.244	2.902.116	46,06 ↑	34,13 ↑
Sparepart	PKGS	**156.599**	61.651	56.866	13.642	18.445	154,01 ↑	53,38 ↑
Bongkar Muat Motor Motorcycle Loading and Unloading	unit	**387.069**	334.122	315.513	306.695	78.932	15,85 ↑	37,44 ↑
Jasa Barang Cargo Services								
Impor Import								
Mobil Car	unit	**158.472**	80.272	70.167	69.706	47.010	97,42 ↑	27,51 ↑
Kendaraan Berat (Alat Berat dan Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment and Trucks/ Buses)	unit	**8.094**	7.917	9.965	13.056	10.023	2,24 ↑	(4,19) ↓
	m^3	**746.305**	718.483	910.972	1.202.579	868.922	3,87 ↑	(3,00) ↓
Sparepart	PKGS	**6.051**	5.315	7.071	9.494	10.343	13,85 ↑	(10,17) ↓
	m^3	**41.998**	54.635	51.984	42.232	42.645	(23,13) ↓	(0,31) ↓
Ekspor Export								
Mobil Car	unit	**390.803**	359.688	380.872	367.488	290.276	8,65 ↑	6,13 ↑
Kendaraan Berat (Alat Berat dan Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment and Trucks/ Buses)	unit	**2.723**	2.838	2.725	3.137	5.440	(4,05) ↓	(12,93) ↓
	m3	**260.496**	240.889	220.110	212.100	329.511	8,14 ↑	(4,59) ↓
Sparepart	PKGS	**1.647**	1.791	2.096	3.723	6.435	(8,04) ↓	(23,86) ↓
	m^3	**21.896**	28.849	21.313	33.647,22	37.706	(24,10) ↓	(10,30) ↓
Jasa Barang Berdasarkan Pelanggan Dalam Negeri Cargo Services Based on Domestic Trading								
Bongkar Unloading								
Mobil Car	unit	**8.478**	10.035	180.808	147.999	14.410	(15,52) ↓	(10,07) ↓
Kendaraan Berat (Alat Berat dan Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment and Trucks/ Buses)	unit	**13.626**	15.096	52.841	45.044	11.586	(9,74) ↓	3,30 ↑
	m^3	**486.926**	571.621	1.984.515	1.702.134	510.836	(14,82) ↓	(0,95) ↓
Sparepart	PKGS	**667**	1.010	46.610	418	224	(33,96) ↓	24,39 ↑
	m^3	**3.269**	3.177	59.401	2.198	2.527	2,90 ↑	5,28 ↑

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024*	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Motor Motorcycle	unit	2.816	2.767	213.459	192.033	27.263	1,77 ↑	(36,49) ↓
Muat Loading								
Mobil Car	unit	109.250	129.811	165.290	160.871	171.221	(15,84) ↓	(8,59) ↓
Kendaraan Berat (Alat Berat dan Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment and Trucks/ Buses)	unit	21.719	24.204	56.658	53.117	24.078	(10,27) ↓	(2,04) ↓
	m3	905.462	1.022.960	2.117.940	2.164.431	1.192.846	(11,49) ↓	(5,36) ↓
Sparepart	PKGS	242	306	1.089	398	1.443	(20,92) ↓	(30,03) ↓
	m^3	21.638	6.985	12.890	14.856	22.869	209,78 ↑	(1,10) ↓
Motor Motorcycle	unit	87.276	79.376	102.054	114.271	51.669	9,95 ↑	11,05 ↑
Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik Land, Building, Water, and Electricity Services								
Sewa Ruangan Kantor Office Rent Services	m3	257	257	254	269	236	- -	1,72 ↑

*) Disajikan kembali
*) Restated

Ikhtisar Organisasi
Organization Highlights

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)
Jumlah Karyawan Number of Employees							
Karyawan Tetap Permanent Employees	Orang	85	78	85	75	70	8,97 ↑
Karyawan Kontrak Contract Employees	Orang	2	2	1	3	2	-
Karyawan Alihdaya Outsourced Employees	Orang	358	338	349	340	324	5,92 ↑
Jumlah Total	Orang	445	418	435	418	396	6,46 ↑
Penilaian Penerapan Sistem Pengendalian Internal Internal Control System Assessment	Skor	90,23	85,80	88,82	88,82	84,27	5,16 ↑
Penilaian Penerapan GCG Assessment of the Implementation of Corporate Governance							
Penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS)* ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Assessment (score)*	Skor	115,89	110,52	107,26	93,21	83,55	

*) Perangkat dan metode evaluasi dan *assessment* atas penerapan GCG menggunakan basis ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).
*) Evaluation and assessment tools and methods for GCG implementation use the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) basis.

Ikhtisar Saham
Shares Highligts

Kode Saham:
Stock Code
IPCC

"Pada tanggal 9 Juli 2018, Perusahaan resmi memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia."
"On July 9, 2018, the Company officially traded its shares on the Indonesia Stock Exchange."

Sekilas Kinerja Saham IPCC Periode 2021-2025
IPCC Stock Performance Overview for 2021-2025 Period

Perihal Description	2025	2024	2023	2022	2021
Harga Pembukaan (Rp/lembar saham) Purchase Price (Rp/share)	705	715	575	515	530
Harga Tertinggi (Rp/lembar saham) Highest Price (Per share)	1.450	765	865	675	900
Harga Terendah (Rp/lembar saham) Lowest Price (Rp/share)	700	600	530	470	472
Harga Penutupan (Rp/lembar saham) Closing Price (Rp/share)	1.385	705	715	570	515
Jumlah Saham Beredar (juta lembar saham) Number of Shares Outstanding (million shares)	1.818.384.820	1.818.384.820	1.818.384.820	1.818.384.820	1.818.384.820
Bursa Saham Stock Exchange	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange				

Informasi Perdagangan Saham IPCC Periode 2021-2025
IPCC Stock Trading Information for 2021-2025 Period

Periode Period	Jumlah Saham Beredar (lembar saham) Number of Shares Outstanding (shares)	Harga Pembukaan (Rp/lembar saham) Opening Price (Rp/share)	Harga Tertinggi (Rp/lembar saham) Highest Price (Rp/share)	Harga Terendah (Rp/lembar saham) Lowest Price (Rp/share)	Harga Penutupan (Rp/lembar saham) Closing Price (Rp/share)	Volume Perdagangan (lembar saham) Trading Volume (shares)	Kapitalisasi Pasar (Rp) Market Capitalization (Rp)
2025							
Triwulan I 1st Quarter	1.818.384.820	705	805	700	775	103.083.200	1.409.248.235.500
Triwulan II 2nd Quarter	1.818.384.820	775	1.230	700	1.010	235.219.900	1.836.568.668.200
Triwulan III 3rd Quarter	1.818.384.820	1.010	1.225	990	1.065	144.020.900	1.936.579.833.300
Triwulan IV 4th Quarter	1.818.384.820	1.065	1.450	1.025	1.385	173.478.800	2.518.462.975.700
2024							
Triwulan I 1st Quarter	1.818.384.820	715	730	680	690	72.421.200	1.276.506.143.640
Triwulan II 2nd Quarter	1.818.384.820	690	720	600	670	121.957.900	1.232.864.907.960
Triwulan III 3rd Quarter	1.818.384.820	680	705	650	685	120.370.500	1.232.864.907.960
Triwulan IV 4th Quarter	1.818.384.820	685	765	655	705	138.188.500	1.291.053.222.200

Informasi Perdagangan Saham IPCC Periode 2021-2025
IPCC Stock Trading Information for 2021-2025 Period

Periode Period	Jumlah Saham Beredar (lembar saham) Number of Shares Outstanding (shares)	Harga Pembukaan (Rp/lembar saham) Opening Price (Rp/share)	Harga Tertinggi (Rp/lembar saham) Highest Price (Rp/share)	Harga Terendah (Rp/lembar saham) Lowest Price (Rp/share)	Harga Penutupan (Rp/lembar saham) Closing Price (Rp/share)	Volume Perdagangan (lembar saham) Trading Volume (shares)	Kapitalisasi Pasar (Rp) Market Capitalization (Rp)
2023							
Triwulan I 1st Quarter	1.818.384.820	575	665	530	625	123.248.500	1.305.600.300.760
Triwulan II 2nd Quarter	1.818.384.820	630	800	615	765	164.330.000	1.378.335.693.560
Triwulan III 3rd Quarter	1.818.384.820	770	865	680	710	176.035.400	1.227.409.753.500
Triwulan IV 4th Quarter	1.818.384.820	715	790	675	715	148.200.200	1.089.212.507.180
2022							
Triwulan I 1st Quarter	1.818.384.820	515	555	478	550	127.294.600	914.647.564.460
Triwulan II 2nd Quarter	1.818.384.820	540	675	500	615	261.713.900	1.063.755.119.700
Triwulan III 3rd Quarter	1.818.384.820	615	620	496	505	134.095.200	989.201.342.080
Triwulan IV 4th Quarter	1.818.384.820	505	660	492	570	226.572.600	1.034.660.962.580
2021							
Triwulan I 1st Quarter	1.818.384.820	530	900	496	530	1.185.920.000	1.120.125.049.120
Triwulan II 2nd Quarter	1.818.384.820	590	615	472	585	223.850.000	972.835.878.700
Triwulan III 3rd Quarter	1.818.384.820	510	710	496	498	1.073.640.000	1.078.302.198.260
Triwulan IV 4th Quarter	1.818.384.820	590	615	496	515	346.570.000	1.007.385.190.280

Grafik Pergerakan Harga Penutupan Saham dan Volume Perdagangan Saham IPCC Periode Januari 2021 s.d Desember 2025
Closing Price Movement of IPCC Stock and Trading Volume for January 2021 to December 2025 Period

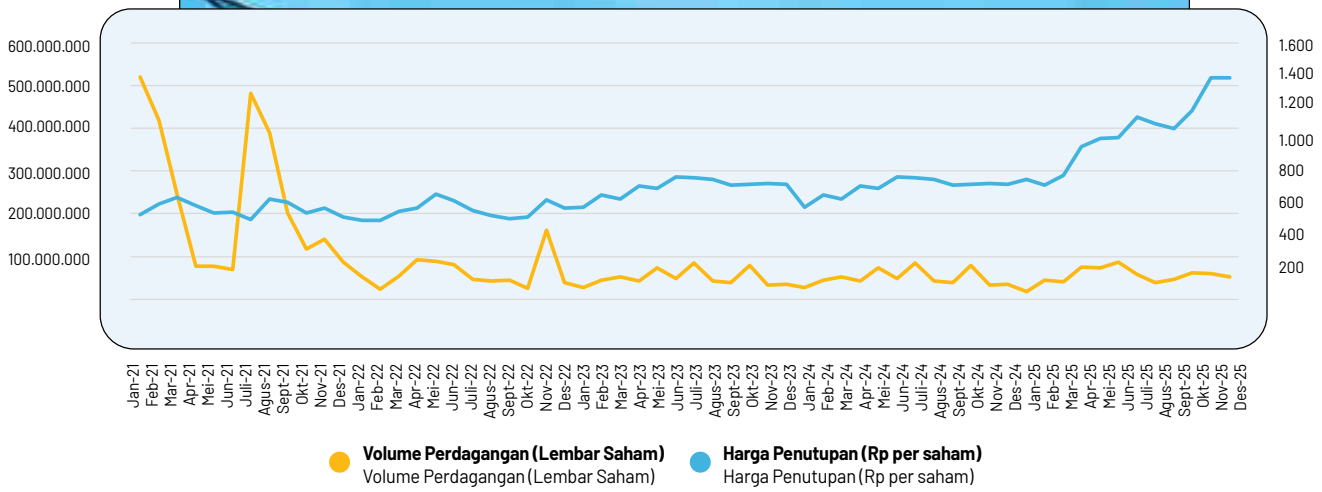

Volume Perdagangan (Lembar Saham)
Volume Perdagangan (Lembar Saham)

Harga Penutupan (Rp per saham)
Harga Penutupan (Rp per saham)

Informasi tentang Aksi Korporasi

Pada tahun buku berjalan, Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi seperti penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock split*), pembagian saham bonus, maupun pembelian kembali saham (*buyback*). Dengan demikian, tidak terdapat informasi material terkait aksi korporasi yang perlu diungkapkan dalam periode ini.

Information on Corporate Actions

During the current fiscal year, the Company evaluated its share buyback plan by considering the increase in market share prices as well as current conditions. The Company decided not to proceed with the buyback while continuing to uphold the principles of prudence and good corporate governance.

Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak pernah dikenakan sanksi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek tempat Perseroan mencatatkan saham dan memperdagangkan saham, baik penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*).

Information on Trading Suspension and/or Delisting

Throughout 2025, the Company was not subject to any sanctions that could affect its share trading activities on the stock exchange where its shares are listed and traded, including trading suspension and/or delisting.

Informasi tentang Efek Bersifat Utang dan/atau Pendanaan Berbasis Efek Utang Lainnya
Information on Debt Securities and/or Other Debt-Based Financing Instruments

Sampai dengan akhir tahun 2025 Perseroan tidak menerbitkan efek lain dalam bentuk apapun selain yang telah dijelaskan pada Kronologis Penerbitan dan Pencatatan saham di atas. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan efek, *corporate action*, perubahan jumlah efek, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan, serta peringkat efek.

As of the end of 2025, the Company has not issued any securities in any form other than those described in the Chronology of Share Issuance and Listing above. Therefore, there is no information regarding the chronology of securities listing, corporate actions, changes in the number of securities, the name of the exchange where such securities are listed, or securities ratings.

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Penghargaan Tahun 2025 Berskala Nasional
2025 National Scale Awards



01

460 days without accident/incident

Deskripsi Penghargaan: Pemberian apresiasi terhadap IPCC yang telah berhasil menciptakan pekerjaan dengan *zero defect zero accident*.
Pemberi Penghargaan: PT Astra Daihatsu Motor
Acara/Kegiatan: Anugerah 460 *days without accident/incident*
Tanggal Diberikan: 9 Januari 2025
Award Description: This award recognizes IPCC for its success in creating jobs with zero defects and zero accidents.
Awarded by: PT Astra Daihatsu Motor
Event/Activity: 460 Days Without Accident Award
Awarding Date: January 9, 2025



02

Performance K3 Terbaik Anak Perusahaan
Best OHS Performance of Subsidiaries

Deskripsi Penghargaan: Pemberian apresiasi terhadap anak usaha yang berhasil menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan produktif dengan mengimplementasikan K3
Pemberi Penghargaan: PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Acara/Kegiatan: *Performance* K3 Terbaik
Tanggal Diberikan: 19 Februari 2025
Award Description: Recognition granted to subsidiaries that have successfully created a safe, comfortable, and productive work environment through the implementation of Occupational Health and Safety (OHS).
Awarded by: PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Event/Activity: Best OHS Performance
Awarding Date: February 19, 2025



03

TMMIN Vendor Jishuken

Deskripsi Penghargaan: Pemberian apresiasi terhadap program lokakarya praktis (belajar sambil melakukan) berbasis *Toyota Production System* (TPS) yang bertujuan untuk mentransfer keahlian dan keterampilan dari TMMIN kepada pemasok lokal (vendor). Juara 1 Suggestion System.
Pemberi Penghargaan: Toyota Motor Manufacturing Indonesia
Acara/Kegiatan: Penganugerahan TMMIN Vendor Jishuken
Tanggal Diberikan: 20 Maret 2025
Award Description: Recognition granted for a practical workshop program (learning by doing) based on Toyota Production System (TPS), aimed at transferring expertise and skills from TMMIN to local suppliers (vendors). 1st Place Suggestions.
Awarded by: Toyota Motor Manufacturing Indonesia
Event/Activity: TMMIN Vendor Jishuken Award Ceremony
Awarding Date: March 20, 2025



04

TMMIN Logistic Skill Contest ke-14

Deskripsi Penghargaan: Meningkatkan kompetensi, keamanan (*safety*), dan efisiensi operasional para pengemudi serta operator logistik dengan tujuan memperkuat SDM, mengurangi kecelakaan kerja hingga 90%, serta mendorong penggunaan teknologi digital dan AI dalam rantai pasok otomotif. Juara 1 & Juara 3 Kategori Best Dispatcher Handling.
Pemberi Penghargaan: Toyota Motor Manufacturing Indonesia
Acara/Kegiatan: Penganugerahan TMMIN Logistics Skill Contest
Tanggal Diberikan: 21 Juni 2025
Award Description: Recognition for enhancing the competence, safety, and operational efficiency of drivers and logistics operators, aimed at strengthening human capital, reducing workplace accidents by up to 90%, and promoting the use of digital technology and AI in the automotive supply chain. 1st Place & 3rd Place in the Best Dispatcher Handling Category.
Awarded by: Toyota Motor Manufacturing Indonesia
Event/Activity: TMMIN Logistics Skill Contest Award Ceremony
Awarding Date: June 21, 2025

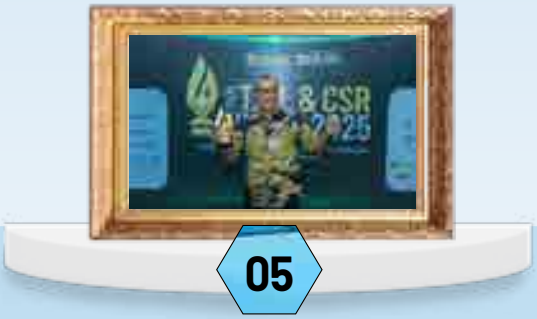

05

TJSL dan CSR Award
TJSL and CSR Award

Deskripsi Penghargaan: Pemberian apresiasi kepada perusahaan (terutama BUMN/ anak perusahaan) yang berhasil menerapkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan berdampak nyata, berkelanjutan, serta sejalan dengan 4 pilar (sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola) dan TPB/SDGs. Strong Leadership on Social Economic Program, Gold Medal, Silver Medal TJSL and CSR Award.
Pemberi Penghargaan: BUMN Track
Acara/Kegiatan: Penganugerahan TJSL dan CSR Award
Tanggal Diberikan: 26 Juni 2025
Award Description: Recognition granted to companies (particularly SOEs/ subsidiaries) that have successfully implemented social and environmental responsibility programs with tangible and sustainable impact, aligned with the four pillars (social, economic, environmental, and governance) as well as the SDGs. Strong Leadership on Social Economic Program, Gold Medal, Silver Medal TJSL and CSR Award.
Awarded by: BUMN Track
Event/Activity: TJSL and CSR Award Ceremony
Awarding Date: June 26, 2025



06

Anugerah Inovasi Indonesia
Indonesia Innovation Award

Deskripsi Penghargaan: Pemberian apresiasi kepada korporasi serta lembaga yang berhasil menciptakan terobosan dan inovasi di berbagai sektor. Inovasi terbaik Kategori Sektor Infrastruktur Transportasi.
Pemberi Penghargaan: IDX Channel
Acara/Kegiatan: Penganugerahan Inovasi Indonesia
Tanggal Diberikan: 14 Oktober 2025
Award Description: Recognition granted to corporations and institutions that have successfully created breakthroughs and innovations across various sectors. Best Innovation in the Transportation Infrastructure Sector Category.
Awarded by: IDX Channel
Event/Activity: Indonesia Innovation Award Ceremony
Awarding Date: October 14, 2025

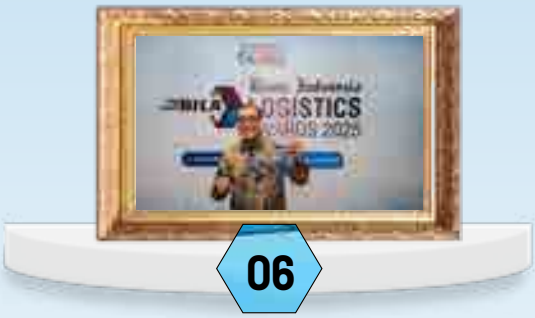

06

Bisnis Indonesia Logistics Award

Deskripsi Penghargaan: Bentuk apresiasi kepada perusahaan di sektor transportasi dan logistik yang berperan aktif dalam meningkatkan kinerja, efisiensi serta inovasi rantai pasok nasional. Emiten terbaik sektor Pelabuhan.
Pemberi Penghargaan: Bisnis Indonesia
Acara/Kegiatan: Penganugerahan Bisnis Indonesia Logistics Award
Tanggal Diberikan: 7 November 2025
Award Description: Recognition granted to companies in the transportation and logistics sector that actively contribute to improving performance, efficiency, and innovation in the national supply chain. The best companies in the port sector.
Awarded by: Bisnis Indonesia
Event/Activity: Bisnis Indonesia Logistics Award Ceremony
Awarding Date: November 7, 2025



07

Economic Review Award

Deskripsi Penghargaan: Pemberian apresiasi, rekognisi kepada perusahaan atau emiten yang menunjukkan kinerja unggul dan penerapan standar terbaik dalam bisnis. Platinum Award Kategori Perusahaan Publik - Aset>1,9T
Pemberi Penghargaan: Majalah Economic Review
Acara/Kegiatan: Penganugerahan Economic Review Award
Tanggal Diberikan: 18 November 2025
Award Description: Recognition granted to companies or listed entities that demonstrate outstanding performance and the implementation of best practices in business. Platinum Award, Public Company Category - Assets > 1.9 Trillion
Awarded by: Economic Review Magazine
Event/Activity: Economic Review Award Ceremony
Awarding Date: November 18, 2025



09

BUMN Branding dan Marketing Award
SOE Branding and Marketing Award

Deskripsi Penghargaan: Pemberian apresiasi atas strategi *branding* dan pemasaran yang efektif di lingkungan BUMN. Best CEO Leadership and Team Work, Best Sustainable Branding Initiative, Best Data Driven Marketing Strategy, Best Customer Experience Personalization.
Pemberi Penghargaan: BUMN Track
Acara/Kegiatan: Penganugerahan BUMN Branding dan Mareting Award
Tanggal Diberikan: 3 Desember 2025
Award Description: Recognition granted for effective branding and marketing strategies within the SOE environment. Best CEO Leadership and Team Work, Best Sustainable Branding Initiative, Best Data Driven Marketing Strategy, Best Customer Experience Personalization.
Awarded by: BUMN Track
Event/Activity: SOE Branding and Marketing Award Ceremony
Awarding Date: December 3, 2025



10

Annual Report Award

Deskripsi Penghargaan: Penghargaan ini diberikan untuk mendorong perusahaan di Indonesia meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan. Juara 2 Kategori Perusahaan BUMN Publik dengan Pendapatan hingga 1 trilliun.
Pemberi Penghargaan: Komite Nasional Kebijakan Governansi
Acara/Kegiatan: Penganugerahan Annual Report Award
Tanggal Diberikan: 8 Desember 2025
Award Description: This award is presented to encourage companies in Indonesia to improve the quality of their information disclosure and corporate governance. 2nd Place in the Category of Publicly Listed State-Owned Enterprises with Revenue of Up to 1 Trillion.
Awarded by: National Committee on Governance Policy
Event/Activity: Annual Report Award Ceremony
Awarding Date: December 8, 2025

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2025
Valid Certifications in 2025



01

SNI ISO 37001:2016

Deskripsi Sertifikasi: Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi: Sucofindo
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi: 7 Maret 2022
Masa Berlaku Hingga: 6 Maret 2028
Certification Description: Anti-Bribery Management System
Issuing Agency: Sucofindo
Certification Date: March 7, 2022
Validity Period: March 6, 2028



02

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health Management System

Deskripsi Sertifikasi: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi: 9 Juni 2023
Masa Berlaku Hingga: 9 Juni 2026
Certification Description: Occupational Safety and Health Management System
Issuing Agency: Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia
Certification Date: June 9, 2023
Validity Period: June 9, 2026

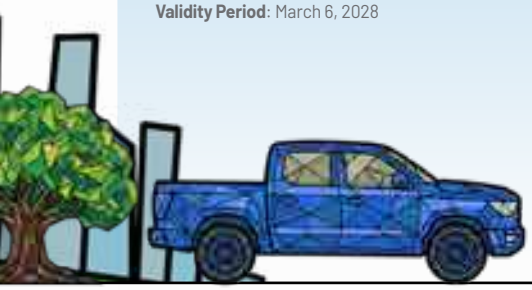



SNI ISO 9001:2015

Deskripsi Sertifikasi: Sistem Manajemen Mutu
Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi: Sucifindo
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi: 7 Mei 2024
Masa Berlaku Hingga: 28 Desember 2026
Certification Description: Quality Management System
Issuing Agency: Sucifindo
Certification Issue Date: May 7, 2024
Validity Period: December 28, 2026



SNI ISO 45001:2018

Deskripsi Sertifikasi: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi: 7 Mei 2024
Masa Berlaku Hingga: 28 Desember 2026
Certification Description: Occupational Safety and Health Management System
Issuing Agency: Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia
Certification Issue Date: May 7, 2024
Validity Period: December 28, 2026



SNI ISO 14001:2015

Deskripsi Sertifikasi: Sistem Manajemen Lingkungan
Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi: Sucifindo
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi: 7 Mei 2024
Masa Berlaku Hingga : 28 Desember 2026
Certification Description: Environmental Management System
Issuing Agency: Sucifindo
Certification Issue Date: May 7, 2024
Validity Period: December 28, 2026

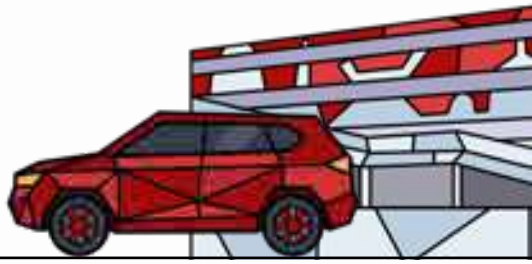

Kilas Peristiwa 2025
2025 Event Highlights



8 Januari 2025
January 8, 2025

***Management walkthrough* BOC, BOD dan Komite IPCC di Terminal Internasional Branch Jakarta**
Management Walkthrough by IPCC Board of Commissioners (BOC), Board of Directors (BOD), and Committees at Jakarta International Terminal Branch



9 Januari 2025
January 9, 2025

IPCC menerima sertifikat apresiasi dari Astra Daihatsu "460 days without accident/incident".
IPCC receiveD a certificate of appreciation from Astra Daihatsu for "460 days without an accident/incident".



12 Januari 2025
January 12, 2025

IPCC tandatangani MoU dengan PT Arto Sugih Abadi (ASA)
IPCC Signed an MoU with PT Arto Sugih Abadi (ASA)



23 Januari 2025
January 23, 2025

***Management walkthrough* BOC dan Komite Pelindo Multi Terminal di Terminal Internasional Branch Jakarta**
Management Walkthrough by Board of Commissioners (BOC) and Committees of Pelindo Multi Terminal at Jakarta International Terminal Branch





17 Februari 2025
February 17, 2025

Rapat Kerja Nasional IPCC
IPCC National Working Meeting



26 Februari 2025
February 26, 2025

***Management walkthrough* BOC dan BOD ke Terminal Satelit Pontianak**
Management Walkthrough by Board of Commissioners (BOC) and Board of Directors (BOD) to Pontianak Satellite Terminal



27 Februari 2025
February 27, 2025

Kunjungan Toyota Motor Asia dan Toyota Motor Thailand ke Terminal Internasional Branch Jakarta
Visit by Toyota Motor Asia and Toyota Motor Thailand to Jakarta International Terminal Branch



27 Maret 2025
March 27, 2025

Program Mudik Gratis 2025 tujuan Jakarta – Solo dan Jakarta – Jogja
Free Homecoming Program 2025 for Jakarta-Solo and Jakarta-Yogyakarta routes



12 April 2025
April 12, 2025

Perpanjangan kontrak IPCC dengan ILCS
IPCC Contract Extension with ILCS



2 Mei 2025
May 2, 2025

IPCC Menerima kunjungan dari STIP
IPCC Received a Visit from STIP



12 Mei 2025
May 12 , 2025

IPCC menerima kunjungan komunitas Belajar Saham
IPCC Received a Visit from the Stock Learning Community



21 Mei 2025
May 21, 2025

IPCC menerima kunjungan Toyota Motor Manufacturing Indonesia
IPCC Received a Visit from Toyota Motor Manufacturing Indonesia



3 Juni 2025
June 3, 2025

IPCC menerima kunjungan Kiwoom dan Mahasiswa Universitas Trisakti
IPCC Received a Visit from Kiwoom and Trisakti University Students



12 Juni 2025
June 12, 2025

Kunjungan prime investor Stockbit
Visit by Stockbit Prime Investors



18 Juni 2025
June 18, 2025

RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 IPCC
IPCC Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2024



8 Juli 2025
July 8, 2025

Penandatanganan perpanjangan pengoperasian Terminal Satelit Pontianak
Signing of the Extension of Operation of Pontianak Satellite Terminal



12 Juli 2025
July 12, 2025

IPCC menerima Kunjungan Yokohama Port Authority
IPCC Received Visit from Yokohama Port Authority



31 Juli 2025
July 31, 2025

***Management walkthrough* BOC dan BOD IPCC ke Terminal Satelit Balikpapan**
Management Walkthrough by Board of Commissioners (BOC) and Board of Directors to Balikpapan Satellite Terminal



2 Agustus 2025
August 2, 2025

IPCC menerima kunjungan perdana kapal BYD Zhengzhou
IPCC Received First Visit from BYD Zhengzhou



8 Agustus 2025
August 8 , 2025

IPCC menerima kunjungan Kiwoom Sekuritas
IPCC Received Visit from Kiwoom Securities



21 Agustus 2025
August 21, 2025

IPCC kolaborasi dengan IPCM menerima *Site visit* dan *market talk* emiten
IPCC Collaborated with IPCM to Conduct Site Visits and Market Talks for Issuers



5 September 2025
September 5, 2025

IPCC menerima kunjungan ASDP bersama mitra IFCS
IPCC Received Visit from ASDP and Partners with IFCS



17 September 2025
September 17, 2025

IPCC menerima kunjungan ITS
IPCC Received Visit from ITS



1 Oktober 2025
October 1, 2025

IPCC menangani bisnis *inland transportation* kargo BYD dengan rute IPCC – RFD Cakung
IPCC Handles BYD's Inland Cargo Transportation Business on IPCC-RFD Cakung Route



29 Oktober 2025
October 29, 2025

IPCC helat Public Expose
IPCC Held Public Expose



8 November 2025
November 8, 2025

IPCC terima kunjungan HIPMI
IPCC Received Visit from HIPMI



11 November 2025
November 11, 2025

IPCC terima kunjungan Sinarmas
IPCC Received Visit from Sinarmas



18 November 2025
November 18, 2025

IPCC tandatangani MoU dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terkait pendampingan hukum
IPCC Signed an MoU with North Jakarta District Attorney's Office Regarding Legal Assistance



25 November 2025
November 25, 2025

IPCC bersama PT PTP gelar *port connect* di Universitas Negeri Jakarta
IPCC and PT PTP Held Port Connect at Jakarta State University



25 November 2025
November 25, 2025

***Coffee Morning* bersama CNBC Indonesia dan Bank DBS**
Coffee Morning with CNBC Indonesia and DBS Bank



3 Desember 2025
December 3, 2025

IPCC salurkan bantuan bencana alam Sumatra
IPCC Distributed Disaster Relief in Sumatra



5 Desember 2025
December 5, 2025

Customer appreciation
Customer Appreciation



17 Desember 2025
December 17, 2025

Direktur Utama IPCC menjadi Narasumber pada Bennix Investor Summit 2025
IPCC President Director Became a Speaker at Bennix Investor Summit 2025



31 Desember 2025
December 31, 2025

Seremoni pelepasan kapal terakhir yang sandar di dermaga IPCC pada tahun 2025.
Ceremonial release of the last ship to berth at the IPCC dock in 2025

PELINDO
MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN

02

Laporan Manajemen
Management Report

Dewan Komisaris dan Direksi bersinergi memastikan seluruh agenda strategis Perseroan diimplementasikan secara terukur dan adaptif, dengan tata kelola yang baik sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusan sepanjang tahun.
The Board of Commissioners and Board of Directors worked in synergy to ensure that all strategic agendas of the Company were implemented in a measurable and adaptive manner, with good corporate governance serving as the foundation for every decision-making process throughout the year.

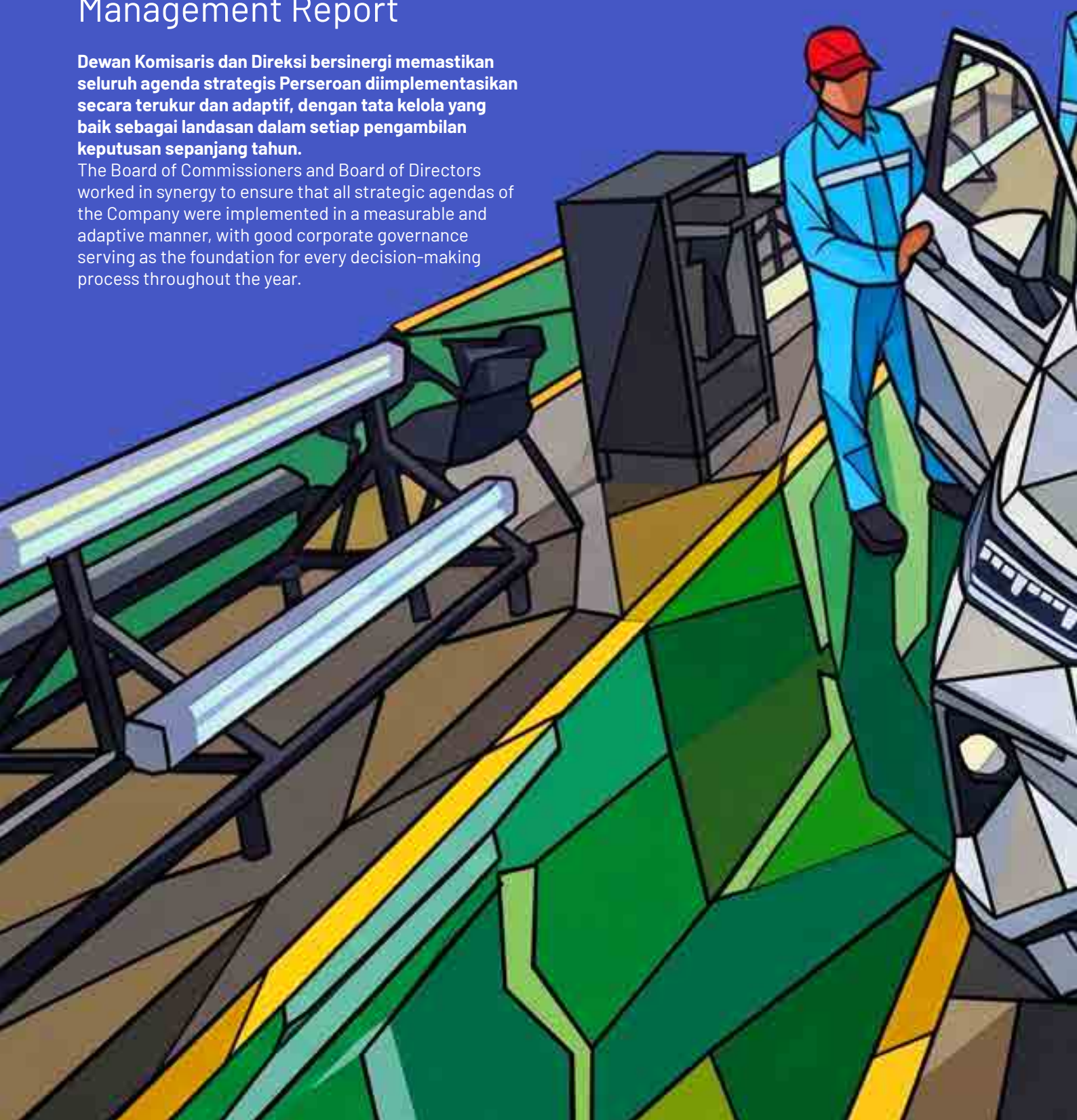



Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Reports



M. Said Bakhri
Komisaris Utama
President Commissioner

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IPCC" atau "Perseroan") dapat melalui tahun 2025 dengan kinerja yang baik di tengah dinamika industri logistik, kepelabuhanan, dan berbagai tantangan ekonomi sepanjang tahun.

Sepanjang tahun tersebut, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kesinambungan usaha serta perlindungan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Komisaris senantiasa menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan usaha, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris mencermati bahwa sepanjang tahun 2025 Perseroan terus melanjutkan penguatan arah strategisnya melalui pengembangan ekosistem logistik kendaraan yang semakin terintegrasi, penguatan kualitas layanan, peningkatan kapasitas operasional, dan percepatan digitalisasi proses bisnis. Dalam pandangan Dewan Komisaris, langkah-langkah tersebut merupakan fondasi penting untuk memperkuat daya saing Perseroan secara berkelanjutan.

Melalui Laporan Tahunan ini, Dewan Komisaris menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun buku 2025 sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada Direksi, seluruh insan IPCC, serta para pemangku kepentingan atas kontribusi dan dukungan yang telah diberikan bagi keberlanjutan Perseroan.

Kondisi Eksternal dan Tantangan Industri

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris mencermati bahwa Perseroan beroperasi di tengah lingkungan eksternal yang dinamis, ditandai oleh ketidakpastian geopolitik, perubahan pola perdagangan internasional, tekanan pada rantai pasok global, serta tuntutan efisiensi yang semakin tinggi dalam industri logistik dan otomotif. Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* IMF edisi Januari 2025, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan sebesar 3,3%, berada di bawah rata-rata historis jangka menengah sebesar 3,7%. Di dalam negeri, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional dalam kisaran 4,7%–5,5%, didukung oleh konsumsi domestik, stabilitas inflasi, serta perbaikan kinerja ekspor dan industri manufaktur.

Let us extend our utmost praise and gratitude to Almighty God for His blessings and grace, which have enabled PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IPCC" or the "Company") to navigate through 2025 with favourable performance amid the dynamics of logistics and port industries, as well as numerous economic challenges throughout the year.

During the course of the year, Board of Commissioners has carried out its supervisory and advisory functions to the Board of Directors in good faith, with full responsibility, and with thoughtful attention to business sustainability and the protection of the interests of all stakeholders. In performing these functions, Board of Commissioners consistently emphasizes the importance of maintaining a balance between business growth, the implementation of good corporate governance, risk management, and compliance with prevailing laws and regulations.

Board of Commissioners notes that throughout 2025, the Company continued to strengthen its strategic direction through the development of an increasingly integrated vehicle logistics ecosystem, enhancement of service quality, expansion of operational capacity, and acceleration of business process digitalization. In the view of Board of Commissioners, these initiatives constitute an important foundation for strengthening the Company's competitiveness in a sustainable manner.

Through this Annual Report, Board of Commissioners presents the implementation of its supervisory duties during the 2025 fiscal year as a reflection of its commitment to transparency and accountability. Board of Commissioners also expresses its appreciation to the Board of Directors, all IPCC people, and stakeholders for their contributions and support toward the sustainability of the Company.

External Conditions and Industry Challenges

Throughout 2025, Board of Commissioners observed that the Company has been operating within a dynamic external environment, marked by geopolitical uncertainties, shifts in international trade patterns, pressures on global supply chains, and increasing demands for efficiency in the logistics and automotive industries. Based on the International Monetary Fund's World Economic Outlook report (January 2025 edition), global economic growth was projected at 3.3%, below the medium-term historical average of 3.7%. Domestically, Bank Indonesia projected national economic growth in the range of 4.7%–5.5%, supported by domestic consumption, stable inflation, and improved export performance and manufacturing sector activity.

Dewan Komisaris juga mencermati bahwa perkembangan industri kendaraan, termasuk meningkatnya penetrasi kendaraan listrik dan perubahan komposisi arus logistik, menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi Perseroan. Dalam konteks tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah merespons perkembangan eksternal dengan langkah-langkah yang relevan, terutama melalui penguatan konektivitas terminal, peningkatan kesiapan operasional, digitalisasi proses layanan, serta pengembangan kolaborasi dalam ekosistem logistik kendaraan. Kemampuan Perseroan dalam merespons perubahan lingkungan usaha secara terukur menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan usaha dan mendukung pencapaian target pada tahun berjalan.

Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Direksi atas Pengelolaan Perseroan, dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Direksi sepanjang tahun buku 2025 berada pada kategori Sangat Baik. Penilaian tersebut didasarkan pada pencapaian KPI, realisasi RKAP, implementasi strategi usaha, kualitas pengelolaan operasional dan keuangan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal, dan manajemen risiko. Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah menunjukkan kapasitas yang memadai dalam menjalankan fungsi pengurusan Perseroan, termasuk dalam menjaga kesinambungan usaha, merespons dinamika eksternal, dan mengarahkan pelaksanaan agenda strategis Perseroan. Dewan Komisaris memandang bahwa capaian tersebut perlu terus dijaga melalui konsistensi kualitas pengelolaan, kedisiplinan eksekusi, dan kehati-hatian dalam merespons perubahan lingkungan usaha.

Penilaian tersebut turut diperkuat oleh kinerja keuangan Perseroan yang tercermin dalam Laporan Keuangan Audited tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Selain itu, Dewan Komisaris juga mempertimbangkan capaian atas sejumlah target utama tahun 2025, baik dari sisi pertumbuhan usaha, profitabilitas, posisi keuangan, maupun pelaksanaan strategi dan pengembangan usaha. Dalam kaitan tersebut, Dewan Komisaris menekankan pentingnya agar kualitas pengelolaan yang tercermin dalam capaian tahun 2025 dapat dipertahankan secara berkelanjutan, tidak hanya dalam konteks pencapaian target jangka pendek, tetapi juga dalam memperkuat fondasi usaha jangka panjang.

Dari sisi keuangan, Dewan Komisaris mencermati bahwa Perseroan membukukan pertumbuhan yang positif sepanjang tahun 2025. Pendapatan operasi meningkat 12,78% menjadi Rp929,96 miliar, sementara laba bersih tahun berjalan tumbuh 20,87% menjadi Rp256,51 miliar. Posisi keuangan Perseroan juga tetap terjaga, tercermin dari total aset sebesar Rp2,06 triliun, ekuitas sebesar Rp1,36 triliun, dan kas serta setara kas sebesar Rp1,08 triliun pada akhir tahun buku 2025. Dalam pandangan Dewan Komisaris, capaian tersebut menunjukkan bahwa Direksi mampu menjaga pertumbuhan usaha, meningkatkan efisiensi, dan mengelola kapasitas keuangan Perseroan secara memadai untuk mendukung kesinambungan usaha. Dewan Komisaris tetap memberikan perhatian agar pertumbuhan

Board of Commissioners also noted that developments in the vehicle industry, including the increasing penetration of electric vehicles and changes in logistics flow composition, present both opportunities and challenges for the Company. In this context, Board of Commissioners views that the Board of Directors has responded to external developments with relevant measures, particularly through strengthening terminal connectivity, enhancing operational readiness, digitalizing service processes, and developing collaboration within the vehicle logistics ecosystem. The Company's ability to respond to changes in the business environment in a measured manner is a key factor in maintaining business sustainability and supporting the achievement of targets during the year.

Board of Commissioners' Assessment on The Performance of Board of Directors In Managing The Company, And The Basis of Assessment

Board of Commissioners assesses that the performance of the Board of Directors throughout the 2025 fiscal year was in "Very Good" category. This assessment is based on the achievement of KPIs, realization of the RKAP, implementation of business strategies, quality of operational and financial management, as well as the application of good corporate governance, internal control, and risk management. In the view of Board of Commissioners, the Board of Directors has demonstrated adequate capacity in carrying out the Company's management function, including maintaining business continuity, responding to external dynamics, and directing the implementation of the Company's strategic agenda. Board of Commissioners considers that these achievements need to be sustained through consistency in management quality, disciplined execution, and prudence in responding to changes in business environment.

This assessment is further supported by the Company's financial performance as reflected in the audited Financial Statements for the 2025 fiscal year, which were audited by Public Accounting Firm Purwanto, Susanti & Surja with an unqualified opinion, in all material respects, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia. In addition, Board of Commissioners also takes into account the achievement of several key targets in 2025, both in terms of business growth, profitability, financial position, as well as strategy implementation and business development. In this regard, Board of Commissioners emphasizes the importance of maintaining the quality of management reflected in the 2025 achievements on a sustainable basis, not only in the context of short-term target attainment but also in strengthening the Company's long-term business foundation.

From a financial perspective, Board of Commissioners observes that the Company recorded positive growth throughout 2025. Operating revenue increased by 12.78% to Rp929.96 billion, while profit for the year grew by 20.87% to Rp256.51 billion. The Company's financial position also remained solid, as reflected in total assets of Rp2.06 trillion, equity of Rp1.36 trillion, and cash and cash equivalents of Rp1.08 trillion at the end of the 2025 financial year. In the view of Board of Commissioners, these achievements demonstrate that the Board of Directors has been able to maintain business growth, improve efficiency, and manage the Company's financial capacity adequately to support business continuity. Board of Commissioners continues to emphasize that such growth must be balanced with disciplined cost

tersebut senantiasa diimbangi dengan disiplin pengelolaan biaya, kualitas arus kas, dan ketepatan prioritas investasi, sehingga struktur keuangan Perseroan tetap sehat dan resilien.

Dewan Komisaris juga mencermati bahwa sejumlah indikator utama tercatat melampaui target yang ditetapkan dalam RKAP. Realisasi pendapatan operasi mencapai 109,48% dari target, laba bersih tahun berjalan mencapai 125,03% dari target, aset mencapai 104,48% dari target, dan ekuitas mencapai 100,52% dari target tahun 2025. Di samping itu, bongkar muat mobil perdagangan luar negeri terealisasi sebesar 123,03% dari target. Dalam pandangan Dewan Komisaris, pencapaian tersebut menunjukkan kualitas eksekusi yang baik atas rencana kerja tahun berjalan. Meski demikian, Dewan Komisaris menekankan agar Direksi terus menjaga kualitas perencanaan dan akurasi eksekusi, sehingga pencapaian terhadap RKAP tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dari sisi kesinambungan hasil dan pengelolaan risiko.

Dari perspektif KPI, Dewan Komisaris menilai bahwa sebagian besar indikator utama Direksi menunjukkan capaian yang baik dan pada sejumlah aspek melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator yang menjadi perhatian Dewan Komisaris antara lain mencakup pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, produktivitas bongkar muat, utilisasi lapangan, implementasi tata kelola perusahaan yang baik, penyerapan investasi, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dalam pandangan Dewan Komisaris, capaian tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menilai bahwa Direksi telah menjalankan pengelolaan Perseroan secara efektif sepanjang tahun buku 2025. Ke depan, Dewan Komisaris mendorong agar pencapaian KPI tidak hanya dipertahankan sebagai ukuran hasil, tetapi juga terus digunakan sebagai instrumen penguatan kualitas pengelolaan, peningkatan akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan di seluruh fungsi Perseroan.

Meskipun demikian, Dewan Komisaris tetap mencermati bahwa beberapa indikator operasional tertentu masih memerlukan perhatian dan tindak lanjut, antara lain pada segmen kendaraan berat perdagangan luar negeri dan arus *sparepart* dalam meter kubik. Hal ini menjadi bagian dari evaluasi Dewan Komisaris agar Direksi terus meningkatkan konsistensi eksekusi, kualitas pengelolaan, dan ketepatan respons terhadap dinamika usaha yang berkembang. Dengan demikian, penilaian Dewan Komisaris tidak hanya didasarkan pada capaian yang telah diraih, tetapi juga pada kemampuan Direksi dalam menjaga keseimbangan antara pencapaian kinerja, pengelolaan risiko, dan kesinambungan usaha. Dewan Komisaris mendorong agar area-area yang belum mencapai target tersebut ditindaklanjuti melalui evaluasi yang lebih mendalam, langkah perbaikan yang terukur, serta penguatan koordinasi antar fungsi yang relevan.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa Direksi mampu menjaga posisi kompetitif Perseroan di industri terminal kendaraan. Hal ini antara lain tercermin dari penguasaan pangsa pasar kargo kendaraan internasional sebesar 79% dari total pasar di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan strategi usaha sepanjang tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang baik, terutama dalam penguatan ekosistem logistik kendaraan, pengembangan jaringan operasional, peningkatan kualitas layanan, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung efektivitas proses bisnis. Dalam pandangan Dewan Komisaris, capaian tersebut

management, strong cash flow quality, and appropriate investment prioritization to ensure that the Company's financial structure remains healthy and resilient.

Board of Commissioners also notes that several key indicators exceeded the targets set in the RKAP. Operating revenue realization reached 109.48% of the target, profit for the year reached 125.03% of the target, assets reached 104.48% of the target, and equity reached 100.52% of the 2025 target. In addition, international car cargo handling reached 123.03% of the target. In the view of Board of Commissioners, these achievements reflect strong execution quality of the annual work plan. Nevertheless, Board of Commissioners emphasizes that the Board of Directors must continue to maintain planning quality and execution accuracy, so that RKAP achievements are not only high quantitatively but also sustainable and well-managed in terms of risk.

From the KPI perspective, Board of Commissioners assesses that most of the Directors' key indicators showed good performance and, in several aspects, exceeded the established targets. Indicators of concern to Board of Commissioners include revenue growth, profitability, cargo handling productivity, yard utilization, implementation of good corporate governance, investment realization, and human capital development. In the view of Board of Commissioners, these achievements provide a sufficient basis to conclude that the Board of Directors has effectively managed the Company throughout the 2025 fiscal year. Going forward, Board of Commissioners encourages that KPI achievements should not only be maintained as outcome measures but also continuously utilized as instruments to strengthen management quality, enhance accountability, and drive continuous improvement across all Company functions.

Nevertheless, Board of Commissioners notes that certain operational indicators still require attention and follow-up, particularly in the segment of international heavy vehicle cargo and spare parts flow measured in cubic meters. This forms part of Board of Commissioners' evaluation to ensure that the Board of Directors continues to improve execution consistency, management quality, and responsiveness to evolving business dynamics. Accordingly, Board of Commissioners' assessment is based not only on achieved results but also on the Directors' ability to balance performance achievement, risk management, and business sustainability. Board of Commissioners encourages that areas not yet meeting targets be addressed through deeper evaluation, measurable corrective actions, and strengthened cross-functional coordination.

Board of Commissioners also assesses that the Board of Directors has been able to maintain the Company's competitive position in the vehicle terminal industry. This is reflected, among others, in the Company's 79% share of the international vehicle cargo market in Indonesia. Furthermore, the implementation of business strategies throughout 2025 has shown positive progress, particularly in strengthening the vehicle logistics ecosystem, expanding operational networks, improving service quality, and leveraging technology to enhance business process effectiveness. In the view of Board of

mencerminkan bahwa Direksi tidak hanya mampu menjalankan agenda jangka pendek secara efektif, tetapi juga memperkuat fondasi pengembangan jangka panjang Perseroan. Dewan Komisaris menekankan agar penguatan posisi kompetitif tersebut terus dijaga melalui kualitas layanan yang konsisten, pengelolaan hubungan pelanggan yang baik, serta pengembangan strategi yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar dan dinamika industri.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai fungsi masing-masing. Secara kolegial maupun individual, Direksi dinilai telah memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian sasaran Perseroan sepanjang tahun 2025. Hasil penilaian individual menunjukkan bahwa seluruh anggota Direksi memperoleh kategorisasi Sangat Baik, yang mencerminkan bahwa masing-masing telah menjalankan perannya dengan baik sesuai bidang tugasnya masing-masing. Dewan Komisaris berharap agar capaian yang telah diraih pada tahun 2025 dapat menjadi landasan bagi penguatan kualitas pengurusan Perseroan pada periode berikutnya, dengan tetap mengedepankan tata kelola, integritas, dan kesinambungan usaha.

Pengawasan Dewan Komisaris dalam Perumusan dan Implementasi Strategi Perusahaan

Dewan Komisaris berperan aktif dalam memastikan bahwa strategi Perseroan dirumuskan selaras dengan arah jangka panjang yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan dijabarkan secara tahunan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Pada tahap perumusan strategi, Dewan Komisaris mencermati berbagai asumsi yang digunakan Direksi, termasuk kondisi makroekonomi dan mikroekonomi, dinamika industri logistik kendaraan, arah pengembangan usaha, rencana investasi, serta kesiapan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya. Atas rancangan strategi dan RKAP yang diajukan Direksi, Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap asumsi dasar, proyeksi kinerja, prioritas program kerja, serta kelayakan implementasi strategi, lalu menyampaikan saran, masukan, dan catatan penyempurnaan kepada Direksi guna memastikan bahwa strategi yang ditetapkan memiliki dasar yang memadai dan dapat dijalankan secara efektif.

Pada tahap implementasi, Dewan Komisaris melakukan pengawasan melalui rapat internal Dewan Komisaris, rapat gabungan dengan Direksi, pembahasan atas laporan manajemen, serta masukan dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 12 kali dan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 12 kali. Melalui forum-forum tersebut, Dewan Komisaris mencermati perkembangan kinerja Perseroan, konsistensi pelaksanaan strategi, kualitas pengelolaan usaha, serta efektivitas pengambilan keputusan Direksi.

Pengawasan atas implementasi strategi Perseroan sepanjang tahun 2025 difokuskan pada agenda-agenda strategis yang dinilai material bagi kesinambungan usaha dan pencapaian target, terutama pengembangan ekosistem logistik kendaraan, peningkatan kualitas layanan terminal kendaraan, penguatan kolaborasi dalam ekosistem logistik, serta pengembangan terminal satelit di wilayah potensial.

Commissioners, these achievements indicate that the Board of Directors is not only capable of executing short-term agendas effectively but also strengthening the Company's long-term development foundation. Board of Commissioners emphasizes that this competitive advantage must continue to be maintained through consistent service quality, strong customer relationship management, and adaptive strategies aligned with evolving market needs and industry dynamics.

Based on this assessment, Board of Commissioners concludes that the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities effectively in accordance with their respective roles. Both collectively and individually, the Board of Directors have made positive contributions to achieving the Company's objectives throughout 2025. Individual assessments show that all members of Board of Directors achieved a "Very Good" rating, reflecting that each has performed their role well in accordance with their respective responsibilities. Board of Commissioners expects that the achievements in 2025 will serve as a foundation for strengthening the quality of the Company's management in the coming period, while continuing to uphold governance, integrity, and business sustainability.

Board Of Commissioners' Oversight in the Formulation and Implementation of The Company's Strategy

Board of Commissioners plays an active role in ensuring that the Company's strategy is formulated in alignment with the long-term direction set out in the Company's Long-Term Plan (RJPP) and translated annually into the Company's Work Plan and Budget (RKAP). During the strategy formulation stage, Board of Commissioners reviews various assumptions used by the Board of Directors, including macroeconomic and microeconomic conditions, dynamics in the vehicle logistics industry, business development direction, investment plans, and the readiness of resources required to support implementation. For the proposed strategy and RKAP submitted by the Board of Directors, Board of Commissioners evaluates the underlying assumptions, performance projections, work program priorities, and feasibility of implementation, and provides recommendations, inputs, and improvement notes to ensure that the strategy has a sound basis and can be executed effectively.

During the implementation stage, Board of Commissioners conducts oversight through internal Board meetings, joint meetings with Board of Directors, discussions of management reports, and inputs from committees under Board of Commissioners in accordance with their respective scopes of duties. Throughout 2025, Board of Commissioners held 12 internal meetings and 12 joint meetings with Board of Directors. Through these forums, Board of Commissioners monitors the Company's performance development, consistency in strategy execution, quality of business management, and effectiveness of the Board of Directors' decision-making.

Oversight of the Company's strategy implementation throughout 2025 focused on strategic agendas considered material to business continuity and target achievement, particularly the development of the vehicle logistics ecosystem, improvement of vehicle terminal service quality, strengthening collaboration within the logistics ecosystem, and development of satellite terminals in potential

Selain melalui rapat dan pembahasan formal, Dewan Komisaris juga melakukan peninjauan langsung ke wilayah operasional Perseroan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai kesiapan fasilitas, kondisi operasional, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta dukungan sumber daya manusia terhadap pelaksanaan strategi.

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Dewan Komisaris menaruh perhatian khusus pada kesiapan fasilitas operasional, kecukupan sumber daya manusia, efektivitas pemanfaatan teknologi, dan kualitas pengawasan lapangan. Untuk memperkuat implementasi strategi, Dewan Komisaris menyampaikan berbagai rekomendasi kepada Direksi, antara lain terkait perbaikan fasilitas operasional, penguatan kesiapan organisasi, peningkatan efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko, serta pemanfaatan inovasi layanan secara lebih optimal.

Berdasarkan hasil pengawasan sepanjang tahun berjalan, Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi strategi Direksi secara umum telah selaras dengan arah yang ditetapkan dalam RJPP dan sasaran yang dijabarkan dalam RKAP. Melalui pengawasan tersebut, Dewan Komisaris berupaya memastikan bahwa strategi Perseroan tidak hanya dirumuskan secara tepat, tetapi juga diimplementasikan secara konsisten, terukur, dan selaras dengan kepentingan jangka panjang Perseroan.

Pandangan atas Prospek Usaha Perseroan

Dewan Komisaris memandang bahwa meskipun tantangan eksternal masih membayangi perekonomian nasional dan global, rencana kerja dan strategi yang disusun Direksi untuk tahun 2026 menunjukkan arah yang realistis dan adaptif terhadap dinamika industri. Proyeksi pertumbuhan *throughput*, pendapatan operasi, dan laba bersih mencerminkan fondasi kinerja yang cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari ekosistem Pelindo, Perseroan memiliki keunggulan strategis dalam hal pengalaman, jaringan usaha, dan posisi dalam industri kepelabuhanan nasional. Dewan Komisaris memandang bahwa kolaborasi dalam ekosistem logistik Pelindo dan penguatan strategi di seluruh rantai layanan akan menjadi faktor penting bagi Perseroan untuk menjaga relevansi dan daya saingnya di masa mendatang.

Dewan Komisaris juga mendukung arah strategis Direksi untuk memperkuat kemitraan dengan para *car maker*, mendorong ekspansi usaha ke pasar-pasar potensial, serta mengembangkan diversifikasi lini bisnis guna menjawab kebutuhan pelanggan yang semakin beragam, termasuk tren kendaraan elektrifikasi yang terus meningkat. Dengan memperhatikan seluruh dinamika tersebut, Dewan Komisaris meyakini bahwa target dan proyeksi kinerja Perseroan untuk tahun 2026 dapat dicapai secara optimal, dengan tetap memerlukan disiplin eksekusi dan kewaspadaan terhadap perubahan lingkungan usaha.

regions. In addition to formal meetings and discussions, Board of Commissioners also conducted site visits to operational areas to gain a more comprehensive understanding of facility readiness, operational conditions, implementation of occupational health and safety (OHS), and the support of human capital in executing the strategy.

Based on the results of this oversight, Board of Commissioners pays particular attention to the readiness of operational facilities, adequacy of human capital, effectiveness of technology utilization, and quality of field supervision. To strengthen strategy implementation, Board of Commissioners provides various recommendations to the Board of Directors, including improvements in operational facilities, strengthening organizational readiness, enhancing the effectiveness of internal control and risk management, and optimizing the use of service innovation.

Based on its oversight throughout the year, Board of Commissioners concludes that the implementation of the Board of Directors' strategy has generally been aligned with the direction set out in the RJPP and the targets outlined in the RKAP. Through this oversight, Board of Commissioners seeks to ensure that the Company's strategy is not only well formulated but also implemented consistently, measurably, and in alignment with the Company's long-term interests.

Views on The Company's Business Outlook

Board of Commissioners considers that, despite ongoing external challenges affecting both national and global economy, the work plan and strategy prepared by the Board of Directors for 2026 reflect a realistic and adaptive approach to industry dynamics. Projections for throughput growth, operating revenue, and net profit indicate a sufficiently strong performance foundation to support sustainable business growth.

As part of Pelindo ecosystem, the Company has strategic advantages in terms of experience, business network, and position within the national port industry. Board of Commissioners views that collaboration within Pelindo logistics ecosystem and strengthening strategies across the entire service chain will be key factors in maintaining the Company's relevance and competitiveness going forward.

Board of Commissioners also supports the strategic direction of the Board of Directors to strengthen partnerships with car makers, expand into potential markets, and develop business line diversification to meet increasingly diverse customer needs, including the growing trend of vehicle electrification. Taking into account these dynamics, Board of Commissioners believes that the Company's targets and performance projections for 2026 can be achieved optimally, provided there is disciplined execution and vigilance toward changes in the business environment.

Pengawasan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris meyakini bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan usaha dan penciptaan nilai jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris terus mendorong agar Perseroan mengedepankan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, *fairness*, dan *trusted* (TARIFT), serta penguatan perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan (ETAK), dipandang Dewan Komisaris sebagai landasan penting dalam menjaga kualitas pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan usaha Perseroan. Dewan Komisaris mencatat bahwa penerapan tata kelola perusahaan sepanjang tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang baik, termasuk yang tercermin dari hasil asesmen GCG berdasarkan standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dan indikator Risk Management Index (RMI). Dalam pandangan Dewan Komisaris, capaian tersebut perlu terus dijaga dan ditingkatkan agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak berhenti pada pemenuhan formal, tetapi benar-benar mendukung keberlanjutan usaha Perseroan.

Pandangan Dewan Komisaris atas Perangkat Tata Kelola dan Keterlibatan Dalam Implementasinya

Sebagai bagian dari tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris secara konsisten mendorong Direksi agar seluruh proses pengurusan Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris memberikan masukan yang mencakup penguatan mitigasi risiko dan transparansi pelaporan, peningkatan efektivitas pengendalian internal melalui konsep kendali berlapis (*three lines of defense*), penanaman budaya manajemen risiko di seluruh lini organisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi, penguatan kualitas layanan kepada pelanggan, pengelolaan sumber daya manusia yang adil dan harmonis, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan komitmen Perseroan kepada para pemangku kepentingan.

Melalui masukan tersebut, Dewan Komisaris berupaya memastikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya dipenuhi sebagai kewajiban formal, tetapi benar-benar menjadi bagian dari praktik pengelolaan Perseroan sehari-hari.

Pengawasan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris memandang bahwa sistem pengendalian internal memiliki peran fundamental dalam menjaga keandalan informasi keuangan, efisiensi operasional, serta perlindungan terhadap aset Perseroan. Sepanjang tahun 2025, pengawasan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dilaksanakan secara berkala melalui koordinasi dengan Komite Audit dan Audit Internal. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan peninjauan ke lokasi operasional untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap implementasi pengendalian internal di lapangan.

Oversight on The Implementation of Corporate Governance

Board of Commissioners believes that the implementation of good corporate governance is a fundamental foundation for business sustainability and long-term value creation. Therefore, Board of Commissioners continues to encourage the Company to uphold integrity, transparency, accountability, and compliance with all applicable laws and regulations in every aspect of its operations.

The application of good corporate governance principles, including transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and trust (TARIFT), as well as the reinforcement of ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability (ETAK), is viewed by Board of Commissioners as essential in maintaining the quality of strategic decision-making and overall business management. Board of Commissioners notes that governance practices throughout 2025 have shown positive progress, including the results reflected in GCG assessments based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) and the Risk Management Index (RMI). Board of Commissioners emphasizes that these achievements should be maintained and further enhanced, hence governance practices go beyond formal compliance and truly support the Company's sustainability.

Board of Commissioners' View On Governance Structures and Its Involvement In Implementation

As part of its oversight responsibilities, Board of Commissioners consistently encourages the Board of Directors to ensure that all management processes are carried out in accordance with good corporate governance principles. Throughout 2025, Board of Commissioners provided input covering strengthening risk mitigation and reporting transparency, improving the effectiveness of internal control through the "three lines of defense" concept, embedding a risk management culture across all organizational levels, optimizing technology utilization, enhancing service quality to customers, managing human capital fairly and harmoniously, and ensuring compliance with legal requirements and commitments to stakeholders.

Through these inputs, Board of Commissioners seeks to ensure that good corporate governance is not merely a formal obligation but becomes an integral part of the Company's day-to-day management practices.

Oversight on The Effectiveness of Internal Control System

Board of Commissioners views the internal control system as having a fundamental role in ensuring the reliability of financial information, operational efficiency, and the safeguarding of the Company's assets. Throughout 2025, oversight of internal control effectiveness was carried out periodically through coordination with the Audit Committee and Internal Audit. In addition, Board of Commissioners conducted site visits to gain a more comprehensive understanding of the implementation of internal controls in operational areas.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal Perseroan berada dalam kondisi yang memadai, baik dari sisi struktur organisasi, prosedur operasional, maupun mekanisme kontrol yang diterapkan di seluruh unit kerja. Dewan Komisaris juga mendorong agar sistem pengendalian internal tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kepatuhan, tetapi juga menjadi instrumen manajerial yang efektif untuk mendukung kualitas proses bisnis, ketepatan pelaporan, dan kemampuan adaptasi terhadap risiko operasional yang terus berkembang.

Pandangan atas Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bersama Komite Pemantau Risiko secara aktif melakukan evaluasi atas kebijakan, proses, dan mitigasi risiko yang diterapkan oleh Direksi sepanjang tahun 2025. Berdasarkan evaluasi tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko Perseroan telah dikembangkan secara memadai dan proporsional dengan kompleksitas bisnis yang dihadapi. Profil risiko telah dipetakan dengan baik, mencakup risiko operasional, keuangan, kepatuhan, strategis, dan digital.

Dewan Komisaris memandang bahwa penguatan manajemen risiko tetap perlu dilanjutkan, terutama melalui penanaman pendekatan *risk-based thinking* dalam setiap lini kegiatan, agar Perseroan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan masa depan, termasuk yang berkaitan dengan transformasi ekosistem kendaraan listrik dan dinamika geopolitik global.

Pandangan atas Penerapan Whistleblowing System

Dewan Komisaris memandang bahwa sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System* / WBS) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas perusahaan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemangku kepentingan. Pengelolaan WBS di lingkungan Perseroan dilakukan melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), dengan pengawasan dari Komite Audit.

Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara rutin melakukan reviu atas efektivitas sistem, termasuk pembahasan dengan UPG untuk memperkuat kapabilitas deteksi dan respons terhadap potensi pelanggaran. Hingga akhir tahun 2025, Tim UPG Perseroan tidak menerima adanya laporan pengaduan terkait tindakan pelanggaran aturan dan/atau kode etik, tindakan gratifikasi, ataupun korupsi. Dewan Komisaris menilai bahwa integrasi sistem WBS Perseroan dengan sistem dan saluran yang terhubung dengan Pelindo serta KPK memperkuat kredibilitas mekanisme pelaporan pelanggaran, sekaligus mendukung budaya integritas dan keterbukaan di lingkungan Perseroan.

Based on the monitoring and evaluation conducted, Board of Commissioners concludes that the Company's internal control system is adequate, both in terms of organizational structure, operational procedures, and control mechanisms implemented across all work units. Board of Commissioners also encourages that the internal control system not only serves as a compliance tool but also functions as an effective managerial instrument to support business process quality, reporting accuracy, and adaptability to evolving operational risks.

Views on The Implementation Of Risk Management

In carrying out its functions, Board of Commissioners, together with the Risk Monitoring Committee, actively evaluated the policies, processes, and risk mitigation implemented by the Board of Directors throughout 2025. Based on this evaluation, Board of Commissioners assessed that the Company's risk management system had been adequately developed and proportionate to the complexity of the business. The risk profile had been well mapped, encompassing operational, financial, compliance, strategic, and digital risks.

Board of Commissioners believes that the strengthening of risk management needs to be continuously pursued, particularly through embedding a risk-based thinking approach across all lines of activities, hence the Company can build greater resilience in facing future challenges, including those related to the transformation of electric vehicle ecosystem and global geopolitical dynamics.

Views on The Implementation of Whistleblowing System

Board of Commissioners views the Whistleblowing System (WBS) as a crucial instrument in maintaining corporate integrity and protecting stakeholder rights. The Company's WBS management is carried out through the Gratification Control Unit (UPG), under the supervision of Audit Committee.

Board of Commissioners, through the Audit Committee, regularly reviews the effectiveness of this system, including discussions with the UPG to strengthen detection and response capabilities for potential violations. As of the end of 2025, the Company's UPG Team had not received any complaints related to violations of regulations and/or the code of conduct, acts of gratification, or corruption. Board of Commissioners believes that the integration of the Company's WBS system with the systems and channels connected to Pelindo and the Corruption Eradication Commission (KPK) strengthens the credibility of the violation reporting mechanism, while also supporting a culture of integrity and openness within the Company.

Frekuensi dan Mekanisme Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Sepanjang tahun 2025, mekanisme pemberian nasihat kepada Direksi dilaksanakan secara terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi komite dengan divisi atau manajemen terkait untuk membahas hal-hal yang dipandang penting atau strategis bagi Perseroan, yang kemudian dibawa ke dalam Rapat Komisaris dan selanjutnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Komisaris dan Direksi sebagai forum penyampaian nasihat dan masukan kepada Direksi.

Hasil rapat tersebut dituangkan dalam risalah dan menjadi dasar *monitoring* atas tindak lanjut Direksi. Sepanjang tahun 2025, mekanisme pemberian nasihat tersebut dijalankan secara konsisten sejalan dengan pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 12 kali dan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 12 kali. Dewan Komisaris memandang bahwa mekanisme ini efektif untuk memastikan bahwa setiap nasihat dan masukan yang diberikan dapat dipahami, ditindaklanjuti, dan dievaluasi secara akuntabel.

Evaluasi Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris serta komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan piagam masing-masing. Evaluasi dilakukan terhadap kinerja, efektivitas rekomendasi, serta kontribusi masing-masing komite terhadap fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Dalam pandangan Dewan Komisaris, komite-komite tersebut telah memberikan masukan yang memadai dan mendukung pengambilan keputusan strategis yang berbasis tata kelola dan mitigasi risiko.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun buku 2025, terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris melalui RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2025. RUPS memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Drajat Sulistyo sebagai Komisaris Utama, Abdur Rahim Hasan sebagai Komisaris Independen, dan LM. Arya Bima Yudiantara sebagai Komisaris Independen, serta mengangkat M. Said Bakhri sebagai Komisaris Utama, Herry Ardianto sebagai Komisaris Independen, dan Tri Hidayat sebagai Komisaris Independen. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2025 terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) Komisaris Independen.

Frequency and Mechanism for Providing Advice to The Board of Directors

Throughout 2025, the mechanism for providing advice to the Board of Directors was carried out in a structured, transparent, and accountable manner. The process was carried out through coordination between committees and relevant divisions or management to discuss matters considered important or strategic for the Company, which were then brought to the Board of Commissioners' meetings and subsequently discussed in coordination meetings between Board of Commissioners and Board of Directors as a forum for delivering advice and input to the Board of Directors.

The results of these meetings were documented in minutes and served as the basis for monitoring the follow-up actions of the Board of Directors. Throughout 2025, this advisory mechanism has been conducted consistently, in line with the holding of 12 internal meetings of Board of Commissioners and 12 joint meetings with Board of Directors. Board of Commissioners considers this mechanism effective in ensuring that all advice and input provided are well understood, properly followed up, and evaluated in an accountable manner.

Evaluation of Performance Of Committees Under Board Of Commissioners

In carrying out its supervisory duties and responsibilities, Board of Commissioners is supported by the Corporate Secretary of Board of Commissioners and committees under its supervision. Throughout 2025, Board of Commissioners assessed that all committees had performed their duties well and in accordance with their respective charters. The evaluation covered performance, effectiveness of recommendations, and each committee's contribution to the supervisory function of Board of Commissioners. In Board of Commissioners' view, these committees have provided adequate input and supported strategic decision-making based on sound governance and risk mitigation.

Changes In The Composition Of Board of Commissioners

In the 2025 fiscal year, there were changes in the composition and structure of Board of Commissioners through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on June 17, 2025. The AGMS resolved to honorably discharge Drajat Sulistyo as President Commissioner, Abdur Rahim Hasan as Independent Commissioner, and LM. Arya Bima Yudiantara as Independent Commissioner, and to appoint M. Said Bakhri as President Commissioner, Herry Ardianto as Independent Commissioner, and Tri Hidayat as Independent Commissioner. Accordingly, the composition of Board of Commissioners as of December 31, 2025 consists of 1 (one) President Commissioner and 2 (two) Independent Commissioners.

Dewan Komisaris memandang bahwa perubahan komposisi ini dilakukan untuk memastikan pengawasan yang efektif, objektif, dan independen terhadap jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, serta untuk memperkuat kapasitas pemberian nasihat strategis yang selaras dengan dinamika dan tantangan bisnis Perseroan ke depan.

Board of Commissioners views that these changes were made to ensure effective, objective, and independent oversight of the Company's management by the Board of Directors, as well as to strengthen the capacity to provide strategic advice aligned with the Company's future business dynamics and challenges.

Penutup dan Apresiasi

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi, manajemen, dan seluruh karyawan IPCC atas dedikasi, kolaborasi, dan kerja keras yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2025. Upaya yang konsisten dalam menjaga kinerja, meningkatkan layanan, mengembangkan ekosistem logistik kendaraan yang terintegrasi, serta menjalankan transformasi strategis telah menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan ke depan.

Kami juga menghaturkan terima kasih kepada para Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan, sehingga memungkinkan Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dengan baik dan independen. Penghargaan yang sama kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan atas hubungan yang konstruktif dan kolaborasi yang terjalin sepanjang tahun berjalan.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus menjalankan amanah ini secara profesional dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas, guna mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan.

Closing and Appreciation

Board of Commissioners would like to extend its highest appreciation to the Board of Directors, management, and all IPCC employees for their dedication, collaboration, and hard work throughout 2025. Consistent efforts in maintaining performance, improving services, developing an integrated vehicle logistics ecosystem, and executing strategic transformation have become a strong foundation in facing future challenges.

We would also like to express our gratitude to the Shareholders for their trust and support, which have enabled Board of Commissioners to carry out its supervisory and advisory functions effectively and independently. We would like to extend the same appreciation to all stakeholders for their constructive relationships and collaboration throughout the year.

Board of Commissioners remains committed to carrying out this mandate professionally by upholding the principles of integrity, transparency, and accountability, in order to support the achievement of the Company's vision and mission.

Jakarta, 30 April 2026 | April 30, 2026
Atas nama Dewan Komisaris
On behalf of Board of Commissioners

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

M. Said Bakhri
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi
Board of Directors Report



Sugeng Mulyadi
Direktur Utama,
merangkap Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
President Director,
Acting Director of Commercial and Business Development

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut tahun 2025 dengan tekad yang kuat untuk mewujudkan visi IPCC. Tahun 2025 merupakan tahun penuntasan sekaligus peralihan strategis bagi Perseroan. Di satu sisi, tahun ini menandai berakhirnya periode Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021–2025, di mana seluruh fondasi yang telah dibangun dalam empat tahun sebelumnya, mulai dari standardisasi operasional, digitalisasi proses, hingga penguatan kemitraan. Kini, telah terangkai menjadi ekosistem logistik kendaraan yang lebih terintegrasi dan berdaya saing.

Di sisi lain, tahun 2025 sekaligus menjadi awal dari RJPP periode baru 2025–2029 dengan visi "Menjadi Pemimpin Ekosistem Logistik Kendaraan", yang menandai transformasi Perseroan menuju pendekatan layanan yang lebih komprehensif di bawah strategi *Integrated Auto Solutions* (IAS), sebuah konsep layanan logistik kendaraan yang mengintegrasikan pengelolaan terminal, distribusi darat, dan ekosistem digital dalam satu *platform* yang *seamless*.

Dinamika pasar yang terus bergerak juga mendorong IPCC untuk tidak hanya berfokus pada integrasi ekosistem, tetapi sekaligus memperkuat kapasitas dan meningkatkan kualitas terminal kendaraan yang dikelola. Perpaduan antara pengembangan konektivitas dan penguatan kapasitas inilah yang menjadi karakteristik strategi IPCC di tahun 2025, adaptif terhadap peluang, namun tetap konsisten pada arah jangka panjang.

Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan Saya mewakili Direksi menyampaikan Laporan Tahunan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengelolaan Perseroan sepanjang tahun buku 2025, sekaligus sebagai sarana komunikasi strategis kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan mengenai arah kebijakan, pencapaian kinerja, serta prospek usaha IPCC ke depan.

By expressing our highest gratitude to Allah SWT, the Almighty God, we welcomed 2025 with a strong determination to realize IPCC's vision. The year 2025 marks both a completion phase and a strategic transition for the Company. On one hand, it signifies the conclusion of the 2021–2025 Long-Term Corporate Plan (RJPP), during which all foundations built over the previous four years, ranging from operational standardization and process digitalization to partnership strengthening, have now been integrated into a more cohesive and competitive vehicle logistics ecosystem.

On the other hand, 2025 was also the beginning of the new 2025–2029 RJPP period, with the vision of "Becoming the Leader of the Vehicle Logistics Ecosystem", which marks the Company's transformation toward a more comprehensive service approach under the Integrated Auto Solutions (IAS) strategy, a vehicle logistics service concept that integrates terminal operations, land distribution, and digital ecosystem into one seamless platform.

The continuously evolving market dynamics have also driven IPCC not only to focus on ecosystem integration but also to strengthen capacity and enhance the quality of the vehicle terminals being managed. The combination of connectivity development and capacity enhancement defines IPCC's strategic approach in 2025, adaptive to opportunities while remaining consistent with its long-term direction.

On this valuable occasion, please allow me, on behalf of Board of Directors, to present this Annual Report as a form of accountability for the management of the Company throughout the 2025 fiscal year, as well as a strategic communication medium to shareholders and stakeholders regarding IPCC's policy direction, performance achievements, and future business outlook.

Perkembangan Perusahaan di Tahun 2025

Di tengah dinamika industri otomotif dan logistik, IPCC terus melangkah memperkuat posisinya sebagai operator terminal kendaraan menuju penyedia layanan *Integrated Auto Solutions* (IAS), yaitu solusi logistik kendaraan yang semakin terintegrasi, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pelanggan.

Company Development In 2025

Amid the dynamics of automotive and logistics industries, IPCC continues to move forward in strengthening its position from a vehicle terminal operator to a provider of Integrated Auto Solutions (IAS), namely a more integrated, efficient, and customer-relevant vehicle logistics solution.

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, stabilitas perekonomian nasional, pertumbuhan aktivitas ekspor-impor otomotif, percepatan adopsi kendaraan listrik, serta meningkatnya tuntutan efisiensi rantai pasok telah membentuk kebutuhan baru terhadap layanan logistik kendaraan yang lebih terkoneksi dan bernilai tambah. Dari sisi internal, Perseroan merespons dinamika tersebut melalui penguatan ekosistem layanan, percepatan digitalisasi proses bisnis, peningkatan kualitas operasional, serta pengelolaan keuangan yang sehat dan terukur.

Melalui arah tersebut, tahun 2025 menjadi fase yang menegaskan transformasi IPCC ke model usaha yang lebih komprehensif. Perseroan tidak hanya berfokus pada kelancaran aktivitas terminal, tetapi juga pada penguatan peran dalam rantai logistik kendaraan secara lebih menyeluruh. Langkah ini memperluas ruang penciptaan nilai bagi pelanggan dan menjadi fondasi yang semakin kokoh bagi upaya mewujudkan visi IPCC "Menjadi Pemimpin Ekosistem Logistik Kendaraan".

Tinjauan Ekonomi Dan Industri

Kondisi ekonomi global sepanjang 2025 masih dibayangi oleh tekanan geopolitik yang berkepanjangan, moderasi pertumbuhan perdagangan internasional, serta percepatan transisi energi yang mengubah lanskap industri secara struktural. Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* IMF edisi Januari 2025, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan sebesar 3,3%, berada di bawah rata-rata historis jangka menengah sebesar 3,7%. Situasi ini mendorong perusahaan-perusahaan logistik di seluruh dunia untuk semakin mempercepat efisiensi operasional dan membangun ketahanan rantai pasok yang lebih adaptif.

Namun di tengah tekanan global tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional dalam kisaran 4,7%–5,5%, didukung oleh kuatnya konsumsi domestik, stabilitas inflasi, serta perbaikan kinerja ekspor dan industri manufaktur. Industri otomotif nasional, yang menjadi *backbone* aktivitas terminal kendaraan IPCC, turut menunjukkan tren yang positif. Percepatan adopsi kendaraan listrik, pertumbuhan segmen kendaraan komersial, serta meningkatnya aktivitas ekspor otomotif Indonesia ke berbagai negara tujuan menjadi pendorong utama yang memperluas basis layanan dan volume *throughput* IPCC secara signifikan.

Perkembangan industri otomotif ini secara langsung berdampak positif terhadap aktivitas bongkar muat kendaraan di terminal yang dikelola IPCC, baik dari sisi volume domestik maupun ekspor-impor. Khususnya, segmen impor mobil mencatat pertumbuhan yang sangat kuat sepanjang 2025, mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar dan permintaan konsumen nasional. IPCC merespons peluang ini secara strategis dengan mengoptimalkan kapasitas layanan, memperluas jaringan terminal, serta mempercepat implementasi sistem digital guna meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan di seluruh titik operasional.

This development is influenced by a combination of external and internal factors. From an external perspective, national economic stability, growth in automotive export-import activities, accelerated adoption of electric vehicles, and increasing demands for supply chain efficiency have shaped new needs for more connected and value-added vehicle logistics services. From an internal perspective, the Company has responded to these dynamics by strengthening its service ecosystem, accelerating business process digitalization, enhancing operational quality, and maintaining sound and measured financial management.

Through this direction, 2025 has become a defining phase in IPCC's transformation toward a more comprehensive business model. The Company is no longer solely focused on ensuring smooth terminal operations but is also strengthening its role across the broader vehicle logistics chain. This step expands value creation opportunities for customers and establishes a stronger foundation for realizing IPCC's vision of "Becoming the Leader of the Vehicle Logistics Ecosystem."

Economic and Industry Overview

Global economic conditions throughout 2025 continued to be overshadowed by prolonged geopolitical pressures, moderation in international trade growth, and acceleration of energy transition, which is structurally reshaping the industrial landscape. Based on the World Economic Outlook report issued by the IMF in January 2025, global economic growth is projected at 3.3%, below the medium-term historical average of 3.7%. This situation has driven logistics companies worldwide to further accelerate operational efficiency and build more adaptive supply chain resilience.

Amid these global pressures, Indonesia's economy has demonstrated solid resilience. Bank Indonesia (BI) projects national economic growth in the range of 4.7%–5.5%, supported by strong domestic consumption, stable inflation, and improved export performance and manufacturing activity. The national automotive industry, which serves as the backbone of IPCC's vehicle terminal operations, has also shown a positive trend. The acceleration of electric vehicle adoption, growth in commercial vehicle segment, and increasing automotive export activities to a number of destination countries have become key drivers in significantly expanding IPCC's service base and throughput volume.

These developments in the automotive industry have directly contributed positively to vehicle loading and unloading activities at terminals managed by IPCC, both in terms of domestic and export-import volumes. In particular, the car import segment recorded very strong growth throughout 2025, reflecting rising market confidence and domestic consumer demand. IPCC responded strategically to this opportunity by optimizing service capacity, expanding its terminal network, and accelerating the implementation of digital systems to improve efficiency and service speed across all operational points.

Momentum pertumbuhan 2025 juga menjadi cerminan bagi IPCC bahwa strategi yang dijalankan bukan hanya transformasional, tetapi juga berorientasi hasil. Kolaborasi lintas divisi, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta komitmen terhadap layanan pelanggan bertaraf internasional menjadi katalis utama yang mendorong pencapaian kinerja usaha yang berkelanjutan.

Strategi dan Kebijakan Strategis Tahun 2025

Menghadapi dinamika perkembangan makroekonomi yang diikuti oleh industri otomotif dan logistik yang semakin kompleks, Direksi menetapkan strategi tahun 2025 yang berfokus pada penguatan posisi Perseroan sesuai dengan RJPP 2025–2029. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2025 Perseroan telah resmi beralih dari RJPP 2021–2025 ke RJPP 2025–2029 dengan visi "Menjadi Pemimpin Ekosistem Logistik Kendaraan" dan tema strategis *Integrated Auto Solutions* (IAS). Strategi yang dijalankan bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu Standarisasi Operasional & Peningkatan Komersial, Membangun Kemitraan, Sinergi dan Konektivitas, serta Penataan Struktur Korporasi dan Bisnis, yang didukung oleh sejumlah *strategic enablers* mulai dari pengembangan model bisnis, penguatan infrastruktur, optimalisasi aset, *governance & risk management*, hingga implementasi IT *Master Plan*. Seluruh strategi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan volume, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang melalui integrasi ekosistem yang komprehensif.

Lima area fokus utama yang menjadi prioritas pelaksanaan strategi tahun 2025, yaitu pertama, peningkatan kapasitas dan fasilitas terminal kendaraan untuk menampung proyeksi pertumbuhan *throughput* sekaligus menyediakan fasilitas layanan tambahan bagi pemilik barang; kedua, pengoperasian terminal kendaraan di area kerja Pelindo dan integrasi antar-terminal yang dikelola dalam satu platform operasional yang terstandarisasi; ketiga, kolaborasi dengan pemilik barang dan pelaku logistik dalam ekosistem logistik kendaraan untuk menciptakan layanan di luar terminal kendaraan yang unggul; keempat, implementasi *dedicated car* terminal dan peningkatan kualitas layanan terminal kendaraan; serta kelima, peningkatan *market share* layanan terminal kendaraan.

Implementasi dari kelima area fokus tersebut dijalankan secara sinergis dan terstruktur. Sejalan dengan agenda integrasi antar-terminal, PTOS-C (Pelindo Terminal Operating System Car) berhasil diimplementasikan secara penuh di *Branch* Jakarta Internasional dan Terminal Satelit Makassar, melengkapi cakupan yang sebelumnya telah berjalan di Branch Jakarta Domestik dan Terminal Satelit Belawan.

Sementara itu, kolaborasi dengan pemilik barang dan pelaku logistik diperluas melalui penguatan layanan *Pre-Delivery Center* (PDC), *stevedoring*, *cargodoring*, dan transportasi darat, yang memberikan nilai tambah dalam ekosistem logistik kendaraan secara menyeluruh.

The growth momentum in 2025 also reflects that IPCC's strategy is not only transformational but also results-oriented. The cross-divisional collaboration, strengthening of human capital competencies, and commitment to international-standard customer service have become main catalysts in driving sustainable business performance.

Strategy and Strategic Policies for 2025

In response to macroeconomic developments and increasing complexity of the automotive and logistics industries, Board of Directors established the 2025 strategy focusing on strengthening the Company's position in line with the 2025–2029 RJPP. As known, in 2025 the Company officially transitioned from the 2021–2025 RJPP to the 2025–2029 RJPP, with the vision of "Becoming the Leader of the Vehicle Logistics Ecosystem" and the strategic theme of Integrated Auto Solutions (IAS). The strategy is built upon three main pillars: Operational Standardization & Commercial Enhancement; Building Partnerships, Synergies, and Connectivity; and Structuring Corporate and Business Architecture, supported by several strategic enablers including business model development, infrastructure strengthening, asset optimization, governance & risk management, and implementation of IT Master Plan. These strategies are not only aimed at volume growth but also at long-term value creation through comprehensive ecosystem integration.

Five main focus areas were prioritized in executing the 2025 strategy: First, enhancing capacity and facilities of vehicle terminals to accommodate projected throughput growth while providing additional service facilities for cargo owners; Second, operating vehicle terminals within Pelindo's working areas and integrating inter-terminal operations under a standardized operational platform; Third, strengthening collaboration with cargo owners and logistics players within the vehicle logistics ecosystem to create superior services beyond terminal operations; Fourth, implementing dedicated car terminals and improving the quality of vehicle terminal services; and Fifth, increasing the market share of vehicle terminal services.

The implementation of these five focus areas has been carried out in a synergistic and structured manner. In line with the inter-terminal integration agenda, PTOS-C (Pelindo Terminal Operating System Car) has been fully implemented at Jakarta International Branch and Makassar Satellite Terminal, complementing previous implementations at Jakarta Domestic Branch and Belawan Satellite Terminal.

Meanwhile, collaboration with cargo owners and logistics players has been expanded through strengthening services such as Pre-Delivery Center (PDC), stevedoring, cargodoring, and land transportation, creating added value across the vehicle logistics ecosystem.

Kelima area fokus tersebut tidak hanya disusun untuk mendorong pertumbuhan usaha, tetapi juga dirancang agar tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan. Integrasi prinsip integritas dan keberlanjutan dalam perumusan strategi jangka panjang dilakukan melalui keterkaitan yang erat antara arah RJPP 2025–2029, kebijakan tata kelola, pengelolaan risiko, dan agenda transformasi Perseroan.

Dalam proses perumusannya, Direksi tidak hanya mempertimbangkan target pertumbuhan usaha dan peluang pasar, tetapi juga memastikan bahwa setiap arah strategis yang ditetapkan tetap berada dalam koridor tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan, manajemen risiko, serta tanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Dengan pendekatan tersebut, integritas dan keberlanjutan tidak ditempatkan sebagai inisiatif yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari pertimbangan substantif dalam penetapan prioritas investasi, pengembangan ekosistem layanan, digitalisasi operasional, dan perluasan jaringan terminal, sehingga memperkuat ketahanan usaha dan kapasitas Perseroan dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.

Transformasi Digital Sebagai Pilar Pertumbuhan

Di tengah tuntutan efisiensi, kecepatan, dan keandalan layanan logistik kendaraan, digitalisasi terus menjadi faktor kunci yang menguatkan daya saing IPCC sekaligus menjadi *enabler* utama pencapaian visi "Menjadi Pemimpin Ekosistem Terminal Kendaraan". Tonggak paling signifikan transformasi digital IPCC pada tahun 2025 adalah rampungnya implementasi PTOS-C di seluruh terminal utama, mencakup *Branch* Jakarta Internasional dan Terminal Satelit Makassar, sehingga seluruh kegiatan terminal dari perencanaan, *booking*, realisasi operasional, pengendalian, hingga penerbitan tagihan kini dikelola secara *real-time* dalam satu platform terpadu. Untuk *Site*/Terminal Pontianak dan Balikpapan, implementasi dilakukan secara bertahap dengan fokus pada fungsi *billing* PTOS-C sebagai langkah awal integrasi.

Selagi PTOS-C memperkuat fondasi digital di sisi operasional utama, IPCC juga terus mengembangkan dan menyempurnakan *Car Terminal Operating System* (CARTOS) serta *Integrated Billing System* (IBS) yang menghubungkan data realisasi layanan operasional dengan sistem ERP SAP secara otomatis. Penerapan *Automatic Gate System* yang telah mencakup Terminal Internasional dan Terminal Domestik terus memberikan dampak nyata dalam mengurangi waktu tunggu, meningkatkan produktivitas, serta meminimalkan potensi penyimpangan di area terminal. Inovasi terbaru berupa implementasi *Face Recognition* untuk pengamanan akses serta migrasi VPN ke SDWAN turut memperkuat aspek keamanan dan konektivitas infrastruktur TI Perseroan secara substansial.

Penguatan infrastruktur digital juga tercermin dari realisasi investasi teknologi informasi sepanjang 2025 sebesar Rp3,82 miliar, yang difokuskan pada peningkatan kapasitas perangkat teknologi

These five focus areas are not only prepared to drive business growth but are also designed to be aligned within the framework of good governance and sustainability principles. The integration of integrity and sustainability principles into long-term strategy formulation is reflected in the strong linkage between the 2025–2029 RJPP direction, governance policies, risk management, and transformation agenda of the Company.

In the formulation process, Board of Directors did not only consider business growth targets and market opportunities but also ensured that every strategic direction remains within the framework of good corporate governance, compliance, risk management, and social and environmental responsibility.

With this approach, integrity and sustainability are not treated as standalone initiatives but are embedded as substantive considerations in determining investment priorities, service ecosystem development, operational digitalization, and terminal network expansion, thereby strengthening business resilience and the Company's capacity to create sustainable value.

Digital Transformation As A Growth Pillar

Amid increasing demands for efficiency, speed, and reliability in vehicle logistics services, digitalization continues to be a key factor in strengthening IPCC's competitiveness as well as a primary enabler in achieving its vision of "Becoming the Leader of the Vehicle Terminal Ecosystem." The most significant milestone in IPCC's digital transformation in 2025 was the completion of PTOS-C implementation across all major terminals, including Jakarta International Branch and Makassar Satellite Terminal. As a result, all terminal activities, from planning, booking, operational execution, and control to billing, are now managed in real time within a single integrated platform. For Pontianak and Balikpapan sites/terminals, implementation is being carried out gradually, with an initial focus on PTOS-C billing function as the first step toward full integration.

While PTOS-C strengthens the digital foundation on the core operational side, IPCC continues to develop and enhance Car Terminal Operating System (CARTOS) and Integrated Billing System (IBS), which automatically connect operational service realization data with the SAP ERP system. The implementation of Automatic Gate System, now covering both International and Domestic Terminals, has delivered tangible impacts in reducing waiting times, improving productivity, and minimizing potential irregularities within terminal areas. Recent innovations, including the implementation of Face Recognition for access security and the migration from VPN to SD-WAN, have further strengthened the Company's IT infrastructure in terms of security and connectivity.

The strengthening of digital infrastructure is also reflected in the realization of information technology investment throughout 2025 amounting to Rp3.82 billion, focused on enhancing IT equipment

informasi. *Dashboard* Operasional dan Strategis yang menyajikan data trafik kargo dalam format visual interaktif terus menjadi andalan manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis data secara *real-time*. Seluruh implementasi ini berjalan sesuai dengan *roadmap* IT Master Plan 2024–2029 yang mengacu pada prinsip *value chain integration* berbasis *single source of truth*—menjadi tulang punggung konektivitas ekosistem terminal kendaraan IPCC yang sesungguhnya.

Peranan Direksi Dalam Perumusan Strategi Dan Kebijakan Strategis

Direksi memegang peranan sentral dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perseroan, dengan menjalankan fungsi kepemimpinan secara kolektif dan kolegial sesuai lingkup tugas masing-masing. Dalam konteks pengembangan usaha yang semakin kompleks, setiap anggota Direksi memberikan kontribusi substantif agar strategi yang ditetapkan selaras dengan perkembangan industri, kondisi pasar, kapasitas internal, dan kebutuhan transformasi Perseroan menuju penyedia *Integrated Auto Solutions*.

Direktur Utama berperan dalam menetapkan arah kebijakan makro, memastikan kesinambungan antara strategi jangka pendek dan jangka panjang, serta memimpin transformasi usaha agar tetap sejalan dengan visi IPCC "Menjadi Pemimpin Ekosistem Logistik Kendaraan". Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis berperan dalam merumuskan strategi pertumbuhan usaha, pengembangan pasar, penguatan kerja sama dengan mitra strategis, serta pengembangan layanan bernilai tambah yang mendukung integrasi ekosistem logistik kendaraan.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Teknik berperan dalam memastikan kesiapan operasional, penguatan infrastruktur, standardisasi proses, dan percepatan digitalisasi agar strategi dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh titik layanan. Sementara itu, Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko memastikan tersedianya dukungan pendanaan yang optimal, pengelolaan keuangan yang sehat dan disiplin, efektivitas alokasi modal, penguatan penerapan manajemen risiko, serta kesiapan kapabilitas organisasi dalam mendukung keberlanjutan transformasi Perseroan.

Proses perumusannya dilakukan secara terstruktur melalui evaluasi terhadap perkembangan makroekonomi, industri otomotif, kebutuhan pelanggan, peluang pengembangan usaha, serta risiko yang dapat memengaruhi pencapaian target Perseroan. Hasil evaluasi tersebut dibahas dalam rapat manajemen dan rapat Direksi untuk memastikan seluruh fungsi memberikan perspektif yang komprehensif dan tidak berjalan dalam silo. Selanjutnya, arah strategi yang telah disepakati diterjemahkan ke dalam RKAP dengan memperhatikan prioritas investasi, target pertumbuhan, kesiapan operasional, dan profil risiko Perseroan. Dalam proses tersebut, Direksi juga melakukan pembahasan dan koordinasi bersama Dewan Komisaris melalui forum rapat gabungan sebagai bagian dari mekanisme check and balance dalam pengambilan keputusan strategis.

capacity. Operational and Strategic Dashboards presenting cargo traffic data in interactive visual formats continue to serve as key tools for management in making real-time, data-driven decisions. All these implementations are carried out in accordance with the IT Master Plan 2024–2029 roadmap, which adopts the principle of value chain integration based on a single source of truth—serving as the backbone of connectivity for IPCC's vehicle terminal ecosystem.

Board of Directors' Role In Formulating Strategy and Strategic Policies

Board of Directors plays a central role in formulating the Company's strategy and strategic policies, exercising leadership functions collectively and collegially in accordance with their respective scopes of responsibility. In the context of increasingly complex business development, each member of Board of Directors contributes substantively to ensure that the strategies established are aligned with industry developments, market conditions, internal capabilities, and the Company's transformation needs toward becoming an Integrated Auto Solutions provider.

The President Director is responsible for setting macro policy directions, ensuring alignment between short-term and long-term strategies, and leading business transformation in line with IPCC's vision of "Becoming the Leader of the Vehicle Logistics Ecosystem." The Director of Commercial and Business Development is responsible for formulating business growth strategies, market development, strengthening partnerships with strategic partners, and developing value-added services that support the integration of vehicle logistics ecosystem.

Meanwhile, the Director of Operations and Engineering is responsible for ensuring operational readiness, strengthening infrastructure, standardizing processes, and accelerating digitalization so that strategies can be effectively implemented across all service points. Meanwhile, the Director of Finance, Human Resources, and Risk Management ensures optimal financial support, sound and disciplined financial management, effective capital allocation, strengthened risk management practices, and the readiness of the organization's capabilities to support the Company's ongoing transformation.

The formulation process is conducted in a structured manner through evaluations of macroeconomic developments, automotive industry, customer needs, business development opportunities, and risks that may affect the Company's target achievements. The results of these evaluations are discussed in management meetings and Board of Directors meetings to ensure that all functions provide comprehensive perspectives and do not operate in silos. Subsequently, the agreed strategic direction is translated into the RKAP, taking into account investment priorities, growth targets, operational readiness, and the Company's risk profile. In this process, Board of Directors also conducts discussions and coordination with the Board of Commissioners through joint meeting forums as part of the check and balance mechanism in strategic decision-making.

Proses yang Dilakukan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi

Direksi memastikan implementasi strategi Perseroan tahun 2025 berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui proses pengawalan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Setelah strategi tahunan ditetapkan, Direksi melakukan penurunan sasaran ke seluruh lini organisasi melalui cascading target dan indikator kinerja utama, sehingga setiap unit kerja memiliki kejelasan kontribusi terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

Untuk mendukung pengawasan pelaksanaan strategi, Direksi memanfaatkan *dashboard* operasional dan strategis yang memungkinkan pemantauan kinerja secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Melalui instrumen tersebut, Direksi dapat memantau perkembangan realisasi operasional, efektivitas layanan, serta pencapaian target usaha secara berkala, termasuk mengidentifikasi lebih dini potensi deviasi yang memerlukan tindak lanjut manajerial. Pendekatan ini menjadi sangat penting terutama dalam mengawal implementasi transformasi menuju *Integrated Auto Solutions*, yang menuntut keselarasan antara pengembangan layanan, kesiapan operasional, dan disiplin eksekusi di lapangan.

Evaluasi atas implementasi strategi dilakukan secara bertingkat. Pada level operasional, Direksi menyelenggarakan rapat rutin mingguan dan bulanan untuk membahas perkembangan kegiatan usaha, isu taktis, dan hambatan pelaksanaan program kerja. Pada level kinerja korporat, Direksi melakukan penelaahan berkala atas pencapaian RKAP, termasuk melalui *quarterly performance review* untuk menilai kesesuaian antara realisasi dan target, mengidentifikasi penyebab selisih, serta menetapkan langkah perbaikan yang diperlukan.

Selain itu, Direksi juga melakukan pembahasan bersama Dewan Komisaris dalam rapat gabungan berkala untuk menyampaikan perkembangan implementasi strategi dan memperoleh masukan terhadap langkah-langkah penguatan yang diperlukan.

Pengawasan implementasi strategi turut didukung oleh peran Satuan Pengawasan Intern yang membantu memastikan bahwa pelaksanaan program dan proses bisnis berjalan sesuai kebijakan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. Dengan mekanisme tersebut, Direksi dapat menjaga agar strategi yang telah dirumuskan tetap berada pada jalurnya, sekaligus cukup adaptif untuk merespons perubahan kondisi usaha sepanjang tahun berjalan.

Kinerja Perusahaan Tahun 2025

Berbekal penguatan strategi, akselerasi implementasi digital, dan ekspansi layanan sebagaimana disampaikan di atas, IPCC berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang sangat solid sepanjang tahun 2025, baik dari sisi operasional maupun keuangan. Laporan keuangan IPCC tahun buku 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen dan memperoleh opini Wajar Dalam Semua Hal Yang Material. Opini ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan disusun secara andal sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan menjadi cerminan dari tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel.

Process Undertaken by Board of Directors to Ensure Strategy Implementation

Board of Directors ensures that the implementation of the Company's 2025 strategy proceeds as planned through a systematic, measurable, and continuous monitoring process. Following the establishment of the annual strategy, Board of Commissioners cascades targets and key performance indicators throughout all levels of the organization, assuring that each unit clearly understands its contribution to achieving the Company's objectives.

To support oversight of strategy execution, Board of Directors utilizes operational and strategic dashboards that enable faster, more accurate, and data-driven performance monitoring. Through these tools, Board of Directors can regularly track operational performance, service effectiveness, and the achievement of business targets, while also identifying early any potential deviations that require managerial follow-up. This approach is particularly critical in overseeing the transformation toward Integrated Auto Solutions, which demands alignment between service development, operational readiness, and execution discipline on the ground.

The evaluation of strategy implementation is conducted in stages. At the operational level, Board of Directors holds regular weekly and monthly meetings to review business activities, tactical issues, and challenges in executing work programs. At the corporate performance level, Board of Directors conducts periodic reviews of RKAP achievement, including quarterly performance reviews to assess alignment between realization and targets, identify the causes of variances, and determine necessary corrective actions.

In addition, Board of Directors also holds discussion with the Board of Commissioners in periodic joint meetings to report on strategy implementation progress and obtain input on necessary strengthening measures.

The supervision of strategy implementation is further supported by the Internal Audit Unit, which helps ensure that program execution and business processes are carried out in accordance with established policies, procedures, and regulations. Through this mechanism, Board of Directors ensures that the defined strategies remain on track while maintaining sufficient adaptability to respond to changing business conditions throughout the year.

Company Performance In 2025

Supported by strengthened strategies, accelerated digital implementation, and service expansion as described above, IPCC successfully recorded very solid performance growth throughout 2025, both operationally and financially. IPCC's 2025 financial statements have been audited by an independent public accounting firm and received an "Unqualified Opinion." This opinion indicates that the financial statements are reliably prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and reflect transparent and accountable financial governance.

Salah satu pencapaian paling signifikan adalah peningkatan volume bongkar muat kendaraan secara konsisten di seluruh segmen layanan utama. Volume bongkar muat kendaraan roda empat tercatat sebesar 957.661 unit, tumbuh 11,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan paling signifikan terjadi pada segmen kendaraan berat yang melonjak hingga 44,89% menjadi 288.179 unit atau setara 12.601.502 m^3—tumbuh 47,55%. Aktivitas bongkar muat motor juga mengalami pertumbuhan sebesar 16,19% dengan total volume mencapai 387.069 unit, sementara segmen *spare parts* mencatat peningkatan yang signifikan sebesar 154,01% menjadi 156.599 PKGS, mencerminkan keberhasilan strategi diversifikasi layanan yang dijalankan secara agresif.

One of the most significant achievements was the consistent increase in vehicle handling volumes across all major service segments. The volume of four-wheeled vehicle handling reached 957,661 units, growing by 11.93% compared to the previous year. The most significant increase occurred in the heavy vehicle segment, which surged by 44.89% to 288,179 units, equivalent to 12,601,502 m^3—an increase of 47.55%. Motorcycle handling activities also grew by 16.19% to a total of 387,069 units, while the spare parts segment recorded a substantial increase of 154.01% to 156,599 packages (PKGS), reflecting the success of the Company's aggressive service diversification strategy.

Capaian tersebut turut mendorong peningkatan pendapatan usaha sebesar 12,78% menjadi Rp929,96 miliar, dengan laba tahun berjalan mencapai Rp256,51 miliar, tumbuh 20,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Arus kas Perseroan semakin kuat dengan saldo kas dan setara kas sebesar Rp1,08 triliun, tumbuh 33,55% dari Rp810,40 miliar pada tahun sebelumnya, mencerminkan peningkatan kapasitas finansial yang signifikan untuk mendukung rencana ekspansi dan investasi ke depan.

These achievements contributed to a 12.78% increase in operating revenue to Rp929.96 billion, with net profit for the year reaching Rp256.51 billion, up 20.87% from the previous year. The Company's cash flow position also strengthened, with cash and cash equivalents reaching Rp1.08 trillion, an increase of 33.55% from Rp810.40 billion in the previous year, indicating a significantly enhanced financial capacity to support future expansion and investment plans.

Dari sisi non-keuangan, IPCC juga mencatat sejumlah pencapaian penting. Pengakuan atas kualitas layanan, inovasi, dan tata kelola Perseroan terwujud melalui serangkaian penghargaan bergengsi sepanjang 2025, di antaranya Performance K3 Terbaik dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero), TMMIN Vendor Jishuken dan TMMIN Logistics Skill Contest dari Toyota Motor Manufacturing Indonesia, TJSL dan CSR Award dari BUMN Track, Inovasi Indonesia dari IDX Channel, Bisnis Indonesia Logistics Award, BUMN Branding dan Marketing Award. Seluruh penghargaan ini menjadi bukti atas kepercayaan pasar dan pemangku kepentingan terhadap kualitas serta integritas Perseroan.

From a non-financial perspective, IPCC also recorded several notable achievements. Recognition of the Company's service quality, innovation, and governance was reflected in a series of prestigious awards throughout 2025, including the Best OHS Performance Award from PT Pelabuhan Indonesia (Persero), TMMIN Vendor Jishuken and TMMIN Logistics Skill Contest from Toyota Motor Manufacturing Indonesia, TJSL and CSR Awards from BUMN Track, Inovasi Indonesia from IDX Channel, Bisnis Indonesia Logistics Award, and BUMN Branding and Marketing Award. These accolades serve as strong evidence of the trust placed by the market and stakeholders in the Company's quality and integrity.

Pencapaian Kinerja 2025 dan Perbandingannya Dengan Target

Sepanjang tahun 2025, IPCC berhasil mempertahankan dan bahkan meningkatkan performa usaha yang solid, dengan sejumlah indikator utama mencatat pencapaian yang menggembirakan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025, realisasi kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan beberapa indikator kunci melampaui target yang telah ditetapkan di awal tahun. Dari sisi pendapatan usaha, IPCC berhasil membukukan pendapatan operasi sebesar Rp929,96 miliar, atau 109,5% dari target RKAP 2025 sebesar Rp849,47 miliar.

2025 Performance Achievements and Comparison with Targets

Throughout 2025, IPCC successfully maintained and even improved its solid business performance, with several key indicators delivering encouraging results. Based on the evaluation of the 2025 Work Plan and Budget (RKAP), performance realization showed very strong results, with several key indicators exceeding the targets established at the beginning of the year. In terms of operating revenue, IPCC successfully recorded operating revenue of Rp929.96 billion, or 109.5% of the 2025 RKAP target of Rp849.47 billion.

Segmen Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang—yang merupakan tulang punggung bisnis Perseroan—mencatat pendapatan sebesar Rp910,79 miliar, juga melampaui target RKAP 2025. Kinerja ini ditopang oleh strategi diversifikasi layanan, peningkatan *throughput* kendaraan di seluruh segmen, serta implementasi sistem digital yang meningkatkan efisiensi proses layanan dan akurasi *billing*, sekaligus didukung oleh perluasan jangkauan jaringan terminal.

The Terminal Services and Cargo Services segment—serving as the backbone of the Company's business—generated revenue of Rp910.79 billion, also surpassing the RKAP 2025 target. This performance was supported by service diversification strategies, increased vehicle throughput across all segments, and the implementation of digital systems that improved service efficiency and billing accuracy, along with the expansion of the terminal network.

Keberhasilan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan biaya berdampak positif terhadap perolehan laba. Laba usaha tercatat sebesar Rp300,86 miliar, atau 109,9% dari target RKAP 2025 sebesar Rp273,84 miliar, dengan margin laba usaha sebesar 32,35%, sedikit di atas target. Laba tahun berjalan mencapai Rp256,51 miliar, melampaui target RKAP 2025 sebesar Rp205,15 miliar, dengan margin laba bersih 27,58% yang juga berada di atas target. Laba per saham dasar (EPS) meningkat menjadi Rp141,07 dan melampaui target RKAP 2025. Imbal hasil aset (ROA) dan imbal hasil ekuitas (ROE) masing-masing meningkat menjadi 12,46% dan 18,85%, atau lebih tinggi dari target RKAP 2025, mencerminkan peningkatan efisiensi Perseroan yang substansial dalam menghasilkan nilai bagi pemegang saham.

Di sisi keuangan neraca, jumlah aset IPCC per akhir 2025 tercatat sebesar Rp2,06 triliun, lebih tinggi dari target RKAP 2025 sebesar Rp1,97 triliun, dengan total ekuitas sebesar Rp1,36 triliun atau sedikit di atas target. Seluruh kebutuhan pendanaan tahun 2025 dipenuhi melalui pembiayaan internal, tanpa bergantung pada utang perbankan, yang menunjukkan struktur permodalan yang sehat dan mandiri. Secara umum, keberhasilan IPCC dalam mencatatkan pertumbuhan kinerja yang konsisten mencerminkan efektivitas strategi bisnis yang dijalankan. Ke depan, Direksi akan terus melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian strategis guna memastikan keberlanjutan pertumbuhan usaha di tengah dinamika industri otomotif dan logistik global yang terus berkembang.

Tantangan, Kendala, dan Upaya Penyelesaiannya

Perjalanan transformasi dan ekspansi IPCC di tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi secara strategis dan adaptif. Seiring dengan komitmen untuk meningkatkan standar layanan terminal kendaraan, IPCC dihadapkan pada dinamika eksternal dan tantangan internal yang memerlukan respons yang cepat dan terukur.

Dalam proses integrasi antar-terminal dan perluasan implementasi sistem digital ke seluruh jaringan operasional, IPCC menghadapi tantangan dalam hal harmonisasi data dan standarisasi proses di terminal-terminal yang memiliki tingkat kematangan operasional berbeda. Perbedaan kondisi infrastruktur dan kesiapan sistem di berbagai lokasi memerlukan pendekatan implementasi yang terdiferensiasi. Untuk mengatasi hal tersebut, IPCC secara aktif memperkuat mekanisme *quality control data*, menyempurnakan protokol integrasi sistem, serta menyelenggarakan program pelatihan teknis yang intensif agar seluruh tim operasional mampu memanfaatkan platform digital secara optimal dan seragam.

The success in enhancing operational efficiency and cost management positively impacted profitability. Operating profit reached Rp300.86 billion, or 109.9% of the 2025 RKAP target of Rp273.84 billion, with an operating margin of 32.35%, slightly above target. Net profit for the year amounted to Rp256.51 billion, exceeding the RKAP 2025 target of Rp205.15 billion, with a net profit margin of 27.58%, also above target. Earnings per share (EPS) increased to Rp141.07, surpassing the RKAP 2025 target. Return on assets (ROA) and return on equity (ROE) rose to 12.46% and 18.85%, respectively, both above the RKAP 2025 targets, reflecting a substantial improvement in the Company's efficiency in generating value for shareholders.

From a balance sheet perspective, total assets as of the end of 2025 reached Rp2.06 trillion, exceeding the RKAP 2025 target of Rp1.97 trillion, with total equity of Rp1.36 trillion, slightly above target. All financing requirements in 2025 were fulfilled through internal funding, without reliance on bank loans, indicating a healthy and independent capital structure. Overall, IPCC's consistent performance growth reflects the effectiveness of its business strategies. Going forward, Board of Directors will continue to conduct periodic evaluations and strategic adjustments to ensure sustainable growth amid the evolving dynamics of global automotive and logistics industries.

Challenges, Constraints, and Mitigation Efforts

IPCC's transformation and expansion journey in 2025 was not without challenges, which required strategic and adaptive responses. In line with its commitment to enhancing vehicle terminal service standards, the Company faced both external dynamics and internal challenges that demanded timely and measured actions.

In the process of inter-terminal integration and expansion of digital system implementation across the operational network, IPCC encountered challenges related to data harmonization and process standardization among terminals with varying levels of operational maturity. Differences in infrastructure conditions and system readiness across locations required a differentiated implementation approach. To address this, IPCC actively strengthened data quality control mechanisms, refined system integration protocols, and conducted intensive technical training programs to ensure that all operational teams could utilize digital platforms optimally and consistently.

Tantangan eksternal lainnya muncul dari meningkatnya intensitas persaingan di industri terminal kendaraan, di mana pemain-pemain baru semakin aktif mengembangkan layanan serupa di berbagai wilayah Indonesia. Dalam menjawab tantangan ini, IPCC terus memperkuat keunggulan kompetitif melalui peningkatan kualitas dan kecepatan layanan, penguatan kemitraan jangka panjang dengan prinsipal otomotif terkemuka, serta pemanfaatan ekosistem data terintegrasi yang menciptakan nilai tambah layanan yang sulit direplikasi oleh pesaing.

Di sisi internal, akselerasi implementasi sistem digital secara serentak di berbagai terminal menuntut kesiapan sumber daya manusia yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Direksi menyadari bahwa perubahan ke sistem kerja yang lebih terotomatisasi dan terintegrasi membutuhkan program pengembangan kompetensi yang intensif dan berkelanjutan. Sebagai respons, IPCC secara konsisten menyelenggarakan program pelatihan teknis, digitalisasi, dan manajerial yang komprehensif, menerapkan HC Roadmap 2025–2029 sebagai kerangka pengembangan SDM jangka panjang, serta melaksanakan *management walkthrough* secara berkala ke berbagai area operasional untuk memahami kendala lapangan secara langsung dan mempercepat pengambilan keputusan yang tepat.

Dengan semangat kolaborasi, pendekatan yang inklusif, dan penguatan budaya kerja yang adaptif dan berorientasi pada keunggulan layanan, IPCC mampu menghadapi tantangan sepanjang 2025 sebagai bagian dari proses bertumbuh menjadi penyedia layanan terminal kendaraan modern, terpercaya, dan siap bersaing secara global.

Prospek Usaha dan Arah Strategis Perseroan 2026

Memasuki tahun 2026, Perseroan melangkah dengan landasan yang lebih kokoh setelah berhasil menuntaskan RJPP 2021–2025 dengan pencapaian yang solid. Lebih dari sekadar menutup satu periode, tahun 2025 sekaligus menjadi tahun peralihan strategis menuju RJPP 2025–2029, yang telah resmi berlaku dan menjadi panduan arah pengembangan Perseroan untuk lima tahun ke depan. RJPP baru ini membawa visi yang lebih ambisius, yakni "Menjadi Pemimpin Ekosistem Logistik Kendaraan", dengan *roadmap* yang terbagi dalam tiga fase: *Business Alignment & Consolidation* (2025–2026), *Business Enhancement* (2027–2028), dan *Integrated Ecosystem* (2029). Tantangan ekonomi global dan nasional diperkirakan masih akan membayangi kinerja berbagai sektor industri, termasuk logistik dan otomotif. Namun demikian, fundamental industri kendaraan nasional tetap solid, ditopang oleh percepatan elektrifikasi kendaraan, pengembangan infrastruktur nasional, meningkatnya aktivitas ekspor otomotif Indonesia, serta pertumbuhan segmen kendaraan berat yang sangat signifikan.

Another external challenge arose from increasing competition in the vehicle terminal industry, with new players actively developing similar services across various regions in Indonesia. In response, IPCC continued to strengthen its competitive advantage through improvements in service quality and speed, the reinforcement of long-term partnerships with leading automotive principals, and the utilization of an integrated data ecosystem that creates value-added services difficult for competitors to replicate.

Internally, the simultaneous acceleration of digital system implementation across multiple terminals required readiness from human capital progressing at different paces. Board of Directors recognizes that transitioning to a more automated and integrated working system requires intensive and continuous competency development programs. As a response, IPCC consistently organized comprehensive technical, digital, and managerial training programs, applied the HC Roadmap 2025–2029 as a long-term human capital development framework, and conducted regular management walkthroughs across operational areas to better understand on-site challenges and accelerate effective decision-making.

Through a spirit of collaboration, an inclusive approach, and the strengthening of an adaptive, service-excellence-oriented work culture, IPCC successfully navigated the challenges of 2025 as part of its journey to become a modern, reliable, and globally competitive vehicle terminal service provider.

Business Outlook and Strategic Direction of The Company In 2026

Entering 2026, the Company moves forward on a stronger foundation following the successful completion of the 2021–2025 Long-Term Corporate Plan (RJPP) with solid achievements. More than merely closing a period, 2025 also marked a strategic transition toward the 2025–2029 RJPP, which has officially come into effect and now serves as the Company's development roadmap for the next five years. This new RJPP carries a more ambitious vision—"To Become a Leader in the Vehicle Logistics Ecosystem"—with a roadmap divided into three phases: Business Alignment & Consolidation (2025–2026), Business Enhancement (2027–2028), and Integrated Ecosystem (2029). Global and domestic economic challenges are expected to continue influencing various industry sectors, including logistics and automotive. Nevertheless, the fundamentals of national vehicle industry remain solid, supported by the acceleration of vehicle electrification, national infrastructure development, increasing automotive export activities from Indonesia, and significant growth in the heavy vehicle segment.

Optimisme atas kondisi domestik juga tercermin dari konsistensi pertumbuhan volume yang dicapai IPCC sepanjang 2025. Berdasarkan proyeksi yang telah disusun, IPCC menargetkan pertumbuhan *throughput* yang berkelanjutan pada tahun 2026, didorong oleh ekspansi kapasitas terminal, pengoperasian terminal baru, pendalaman konektivitas ekosistem, dan penguatan layanan nilai tambah. Hal ini diharapkan akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan pendapatan operasi dan profitabilitas Perseroan yang terukur dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pencapaian tersebut, IPCC merencanakan alokasi investasi yang difokuskan pada pengembangan terminal dan penguatan sistem digitalisasi, di mana seluruh kebutuhan pendanaan direncanakan dipenuhi melalui pendanaan internal.

Untuk mencapai target tersebut, IPCC telah menetapkan prioritas strategis yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan fasilitas terminal melalui penambahan lahan dan pengembangan gedung parkir baru; ekspansi jaringan terminal ke wilayah operasional baru; pendalaman konektivitas ekosistem logistik kendaraan melalui kolaborasi yang lebih erat dengan pemilik barang dan pelaku logistik; serta peningkatan kualitas SDM melalui program pengembangan berbasis kompetensi digital dan internalisasi nilai-nilai AKHLAK.

Penguatan strategi ini turut didukung oleh pengembangan layanan terintegrasi Perseroan salah satunya *Car Distribution Management*, yaitu layanan logistik transportasi kendaraan yang mendukung ekosistem distribusi melalui penggunaan *car carrier, towing*, dan *tansya*. Dalam konteks ini, Perseroan juga menjalin kerja sama strategis dalam pengembangan distribusi kendaraan BYD dari terminal pelabuhan menuju jaringan *dealer* serta berbagai titik distribusi di wilayah Indonesia, sebagai langkah konkret memperkuat rantai pasok kendaraan secara *end-to-end*. Seluruh arah strategis ini akan menjadi fondasi bagi RJPP periode berikutnya, dengan komitmen IPCC untuk terus memperkuat posisinya sebagai pengelola terminal kendaraan berkelas dunia di tengah dinamika industri logistik kendaraan yang terus berkembang.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Perusahaan

Berbagai inisiatif penguatan tata kelola perusahaan yang baik terus diterapkan sepanjang tahun 2025, mulai dari penyempurnaan kebijakan internal, penguatan peran Direksi dan Dewan Komisaris, hingga peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan strategis. Komunikasi yang konstruktif antara manajemen dan pemegang saham melalui forum seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga terus mendorong praktik pengelolaan Perseroan yang lebih seimbang, responsif, dan selaras dengan dinamika usaha.

Optimism regarding domestic conditions is also reflected in the consistent volume growth achieved by IPCC throughout 2025. Based on the projections that have been established, IPCC targets sustainable throughput growth in 2026, driven by terminal capacity expansion, operation of new terminals, deeper ecosystem connectivity, and strengthening of value-added services. This is expected to directly contribute to measurable and sustainable growth in operating revenue and profitability of the Company. To support these targets, IPCC plans to allocate investments focused on terminal development and digital system enhancement, with all funding requirements to be met through internal financing.

To achieve these targets, IPCC has established key strategic priorities, including increasing terminal capacity and facilities through land expansion and the development of new parking buildings; expanding the terminal network into new operational areas; deepening connectivity within the vehicle logistics ecosystem through closer collaboration with cargo owners and logistics players; and enhancing human capital quality through competency-based development programs and the internalization of AKHLAK core values.

These strategic initiatives are further supported by the development of integrated services, including Car Distribution Management, a vehicle logistics transportation service that supports the distribution ecosystem through the use of car carriers, towing, and car transport units. In this context, the Company has also established strategic partnerships for the distribution of BYD vehicles from port terminals to dealer networks and various distribution points across Indonesia, as a concrete step in strengthening the end-to-end vehicle supply chain. All of these strategic directions will serve as a foundation for the next RJPP period, reflecting IPCC's commitment to continuously strengthening its position as a world-class vehicle terminal operator amid the evolving dynamics of vehicle logistics industry.

Development Of Good Corporate Governance Implementation Within The Company

Numerous initiatives to strengthen good corporate governance continued to be applied throughout 2025, ranging from the refinement of internal policies, the strengthening of the roles of Board of Directors and Board of Commissioners, to enhancing transparency and accountability in strategic decision-making. Constructive communication between management and shareholders through forums such as the General Meeting of Shareholders (GMS) has also contributed to fostering more balanced, responsive, and business-aligned corporate management practices.

Penguatan tata kelola tersebut turut ditopang oleh penerapan nilai-nilai ETAK, yaitu Perilaku Beretika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan, yang menjadi landasan perilaku dan pengambilan keputusan di lingkungan IPCC. Melalui penerapan ETAK, Perseroan mendorong setiap insan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawabnya secara profesional, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, tata kelola tidak hanya ditempatkan sebagai kerangka kepatuhan, tetapi juga dihidupi dalam budaya kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari.

Pengawasan dan evaluasi internal atas jalannya operasional Perseroan didukung oleh sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang saling melengkapi sebagai mekanisme deteksi dini atas potensi risiko usaha, sekaligus untuk memastikan bahwa proses bisnis yang dijalankan senantiasa sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan regulasi yang berlaku. IPCC secara aktif memetakan potensi risiko dari seluruh aspek operasional maupun non-operasional serta menyusun langkah mitigasi yang relevan berdasarkan tingkat eksposur risiko, selaras dengan kebijakan dan arah strategis Pelindo Group. Penerapan pengendalian internal dan manajemen risiko tersebut juga diarahkan untuk mendukung efektivitas operasional, menjaga kepatuhan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam mendukung pencapaian sasaran Perseroan.

Perseroan juga terus memperkuat pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran yang aman, mudah diakses, dan menjaga kerahasiaan pelapor. Keberadaan WBS menjadi bagian penting dalam membangun budaya keterbukaan dan integritas, sekaligus mendukung upaya pencegahan terhadap penyimpangan dalam kegiatan usaha. Sepanjang tahun 2025, Perseroan terus melanjutkan sosialisasi atas mekanisme WBS agar pemanfaatannya semakin efektif dan pemahaman mengenai pentingnya budaya *speak up* semakin mengakar di lingkungan perusahaan.

Sebagai bentuk evaluasi atas efektivitas penerapan GCG, IPCC secara berkala melakukan assessment menggunakan parameter ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Pada tahun 2025, Perseroan membukukan skor 115,89 dan memperoleh pengakuan "Leadership in Corporate Governance (ASEAN Asset Class)". Capaian ini mencerminkan bahwa praktik governansi korporat Perseroan telah berada pada level yang sangat baik dan selaras dengan standar tata kelola yang diakui di tingkat kawasan. Sementara itu, pada aspek manajemen risiko, Perseroan mencatat skor Risk Management Index (RMI) sebesar 2,71, yang menunjukkan bahwa pengelolaan risiko terus dijalankan secara terstruktur untuk mendukung ketahanan usaha dan kualitas pengambilan keputusan.

These governance improvements are further supported by the implementation of ETAK values, namelu Ethical Behavior, Transparency, Accountability, and Sustainability, which serve as the foundation for conduct and decision-making within IPCC. Through the application of ETAK, the Company encourages all personnel to carry out their responsibilities in a professional, transparent, accountable, and long-term oriented manner. As such, governance is not merely positioned as a compliance framework but is embedded within the corporate culture and daily business practices.

Internal supervision and evaluation of the Company's operations are supported by an integrated internal control system and risk management framework, functioning as an early detection mechanism for potential business risks while ensuring that business processes consistently comply with applicable policies, procedures, and regulations. IPCC actively identifies potential risks across both operational and non-operational aspects and formulates relevant mitigation measures based on risk exposure levels, in alignment with the policies and strategic direction of Pelindo Group. The implementation of internal control and risk management is also aimed at supporting operational effectiveness, maintaining compliance, and enhancing the quality of decision-making in achieving corporate objectives.

The Company also continues to strengthen the management of its Whistleblowing System (WBS) as a secure, accessible, and confidential reporting channel for alleged violations. The WBS plays an important role in fostering a culture of openness and integrity, as well as supporting efforts to prevent irregularities in business activities. Throughout 2025, the Company continued to promote awareness of the WBS mechanism to enhance its effectiveness and reinforce the importance of a speak-up culture across the organization.

As part of evaluating the effectiveness of GCG implementation, IPCC periodically conducts assessments using the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) parameters. In 2025, the Company achieved a score of 115.89 and received the recognition "Leadership in Corporate Governance (ASEAN Asset Class)." This achievement reflects that the Company's corporate governance practices are at an excellent level and aligned with regionally recognized governance standards. Meanwhile, in terms of risk management, the Company recorded a Risk Management Index (RMI) score of 2.71, indicating that risk management is being implemented in a structured manner to support business resilience and decision-making quality.

Sebagai bagian dari Pelindo Group dan perusahaan terbuka, IPCC terus memperkuat sistem pengawasan serta menyempurnakan kebijakan internal secara berkelanjutan agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik senantiasa terjaga. Melalui langkah tersebut, IPCC berkomitmen untuk mengelola perusahaan secara transparan, adil, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penguatan tata kelola tersebut tidak hanya diarahkan untuk menjaga kepatuhan dan efektivitas pengawasan, tetapi juga untuk membentuk nilai dan budaya kerja yang menopang keberlanjutan usaha Perseroan. Bagi Perseroan, governansi perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai kerangka kepatuhan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan nilai dan budaya organisasi.

Melalui penguatan penerapan prinsip governansi korporat ETAK (Perilaku yang Baik, Transparansi, Akuntabilitas dan Keberlanjutan), nilai-nilai AKHLAK, kebijakan anti-korupsi dan anti-gratifikasi, *Whistleblowing System*, serta pengembangan praktik keberlanjutan berbasis ESG, Perseroan mendorong agar integritas dan keberlanjutan dihidupi secara konsisten dalam perilaku kerja, proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan operasional di seluruh lini organisasi.

Implementasi nilai tersebut didukung melalui sosialisasi kebijakan, penandatanganan pakta integritas, penguatan budaya *speak up*, pengembangan kompetensi, serta pengawasan atas kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, Perseroan berupaya membangun budaya perusahaan yang tidak hanya adaptif dan berorientasi hasil, tetapi juga bertumpu pada etika, akuntabilitas, dan tanggung jawab jangka panjang.

Sejalan dengan penguatan budaya integritas dan akuntabilitas tersebut, Perseroan terus menjaga kualitas pelaporan korporat sebagai bagian penting dari praktik tata kelola yang baik. Direksi memandang bahwa keandalan, konsistensi, dan kredibilitas pelaporan merupakan bagian penting dari pengelolaan Perseroan yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, Perseroan terus memperkuat sistem pengendalian internal, fungsi Audit Internal, mekanisme manajemen risiko, serta pengawasan oleh organ perusahaan yang relevan agar proses penyusunan laporan keuangan, laporan tahunan, dan pengungkapan keberlanjutan didukung oleh data, verifikasi, dan pengendalian yang memadai.

Dalam penguatan pengendalian tersebut, Perseroan mendorong agar sistem pengendalian internal berjalan secara berjenjang melalui konsep kendali berlapis (*three lines of defense*), sehingga fungsi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dapat berjalan secara saling melengkapi dalam menjaga kualitas pelaporan.

As part of Pelindo Group and a publicly listed company, IPCC continues to strengthen its supervisory system and refine internal policies on an ongoing basis to ensure the consistent implementation of good corporate governance. Through these efforts, IPCC is committed to managing the Company in a transparent, fair, accountable, and sustainable manner.

These governance enhancements are not only aimed at maintaining compliance and supervisory effectiveness but also at shaping values and a corporate culture that supports long-term sustainability. For the Company, corporate governance functions not only as a compliance framework but also as a means of shaping organizational values and culture.

Through the strengthening of ETAK corporate governance principles (Ethical Behavior, Transparency, Accountability, and Sustainability), AKHLAK values, anti-corruption and anti-gratification policies, the Whistleblowing System, and the development of ESG-based sustainability practices, the Company encourages integrity and sustainability to be consistently embedded in work behavior, decision-making processes, and operational activities across all organizational levels.

The implementation of these values is supported through policy dissemination, the signing of integrity pacts, strengthening of the speak-up culture, competency development, and monitoring of compliance and program effectiveness in the field. Through this approach, the Company strives to build a corporate culture that is not only adaptive and results-oriented but also grounded in ethics, accountability, and long-term responsibility.

In line with strengthening integrity and accountability, the Company continues to maintain the quality of corporate reporting as an integral part of good governance practices. Board of Directors views the reliability, consistency, and credibility of reporting as essential components of transparent and accountable corporate management. To this end, the Company continues to enhance its internal control systems, Internal Audit function, risk management mechanisms, and oversight by relevant corporate organs to ensure that the preparation of financial statements, annual reports, and sustainability disclosures is supported by adequate data, verification, and controls.

Within this framework, the Company promotes the implementation of a layered internal control system based on the three lines of defense concept, ensuring that execution, control, and evaluation functions complement one another in maintaining reporting quality.

Di sisi lain, fungsi Audit Internal berperan dalam mendukung efektivitas pengendalian internal, pengawasan kepatuhan, dan pelaksanaan audit internal, sementara koordinasi dengan organ pengawasan, termasuk Komite Audit, menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pengawasan dan tindak lanjut atas proses pelaporan. Keterlibatan berbagai fungsi tersebut diarahkan untuk menjaga agar pelaporan korporat disusun secara lebih tertib, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen dan memperoleh opini Wajar Dalam Semua Hal yang Material menjadi salah satu indikator penting atas kualitas dan kredibilitas pelaporan keuangan Perseroan. Melalui penguatan tersebut, Perseroan berupaya menjaga agar pelaporan keuangan, laporan tahunan, dan pengungkapan keberlanjutan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas dan akuntabilitas pengelolaan Perseroan.

Penerapan Kebijakan Anti-Korupsi dan Anti-Gratifikasi

Kami, seluruh Insan IPCC menjunjung tinggi prinsip integritas dan transparansi. Kami memiliki komitmen kuat untuk membangun organisasi yang bersih, bebas dari praktik korupsi, suap, gratifikasi, dan penyimpangan etika lainnya. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan kebijakan anti-korupsi yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta adopsi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, yang mengatur tata kelola pencegahan praktik penyuapan secara sistematis dan berkelanjutan. Komitmen ini diperkuat melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh insan IPCC, serta tingkat kepatuhan 100% dalam pelaporan LHKPN bagi pejabat yang diwajibkan, sebagai bentuk nyata integritas dan keterbukaan.

Sepanjang tahun 2025, IPCC terus memperkuat pelaksanaan pengendalian gratifikasi, baik melalui pemutakhiran pedoman internal, sosialisasi secara berkala kepada seluruh karyawan, hingga pemantauan aktif atas saluran *Whistleblowing System* (WBS) Pelindo Bersih yang aman dan terverifikasi. Laporan gratifikasi juga dapat disampaikan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui sistem Gratifikasi Online (GOL), didukung prosedur pelaporan yang rinci dan mekanisme penyaluran barang gratifikasi yang transparan dan akuntabel oleh Tim UPG IPCC.

Kegiatan sosialisasi terus diintensifkan untuk membangun budaya sadar hukum di seluruh level organisasi. Sebagai hasil dari pelaksanaan sistem pengendalian yang kuat dan penerapan kebijakan secara konsisten, tidak terdapat kasus hukum, pelanggaran etika, maupun insiden yang berdampak negatif terhadap reputasi, operasional, maupun citra IPCC sepanjang tahun 2025.

The Internal Audit function also plays a key role in supporting the effectiveness of internal controls, compliance oversight, and the execution of internal audits, while coordination with oversight bodies, including the Audit Committee, remains essential in strengthening supervision and follow-up actions related to reporting processes. The involvement of these functions ensures that corporate reporting is prepared in a more orderly, consistent, and accountable manner.

Furthermore, the Company's financial statements for the 2025 fiscal year, which were audited by an independent Public Accounting Firm and received an unqualified opinion, serve as a key indicator of the quality and credibility of the Company's financial reporting. Through these continuous improvements, the Company aims to ensure that its financial reporting, annual reporting, and sustainability disclosures not only meet compliance requirements but also strengthen stakeholder confidence in the integrity and accountability of the Company's management.

Implementation of Anti-Corruption and Anti-Gratification Policies

We, all IPCC personnel, uphold the principles of integrity and transparency. We are strongly committed to building a clean organization free from corruption, bribery, gratuities, and other ethical violations. This commitment is realized through the implementation of an anti-corruption policy in line with Law Number 31 of 1999 and the adoption of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP), which regulates the governance of systematic and sustainable bribery prevention. This commitment is reinforced by the signing of an Integrity Pact by all IPCC personnel and a 100% compliance rate in reporting the State Officials Wealth Report (LHKPN) for required officials, demonstrating integrity and openness.

Throughout 2025, IPCC continued to strengthen the implementation of gratification control, including updating internal guidelines, organizing regular outreach to all employees, and active monitoring of the secure and verified Pelindo Bersih Whistleblowing System (WBS). Gratification reports can also be submitted directly to the Corruption Eradication Commission (KPK) through the Online Gratification (GOL) system, supported by detailed reporting procedures and a transparent and accountable distribution mechanism for gratuities by IPCC UPG Team.

Socialization activities continue to be intensified to build a culture of legal awareness at all levels of the organization. As a result of the implementation of a robust control system and consistent policy, there were no legal cases, ethical violations, or incidents that negatively impacted IPCC's reputation, operations, or image throughout 2025.

Penguatan Praktik Keberlanjutan Berbasis ESG

IPCC berupaya kuat melakukan pengelolaan usaha yang selaras dengan praktik-praktik yang berkelanjutan, di antaranya dengan mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam seluruh proses bisnis. Dalam rangka mengakselerasi agenda keberlanjutan tersebut, Perseroan telah merancang dan menyusun *roadmap* implementasi ESG secara komprehensif sejak awal tahun 2025, yang proses penyusunannya berhasil dirampungkan pada bulan Desember 2025. *Roadmap* ini menjadi panduan strategis jangka panjang yang memastikan setiap inisiatif keberlanjutan dijalankan secara terstruktur, terukur, dan selaras dengan arah RJPP 2025–2029.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan melanjutkan dan memperdalam berbagai inisiatif strategis keberlanjutan yang telah dirintis sebelumnya, dengan fokus pada peningkatan efisiensi sumber daya, penguatan program mitigasi dampak lingkungan, serta peningkatan dampak sosial positif bagi karyawan, masyarakat, dan mitra usaha.

Dalam aspek lingkungan, program digitalisasi proses bisnis yang semakin komprehensif terus mendorong pengurangan konsumsi kertas secara signifikan di seluruh operasional terminal. Program penanaman pohon sebagai bagian dari inisiatif keanekaragaman hayati dan konservasi lingkungan dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Komitmen terhadap tanggung jawab ekologis juga tercermin dari konsistensi alokasi biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda keberlanjutan Perseroan.

Dari sisi sosial, IPCC terus membangun sistem ketenagakerjaan yang inklusif, aman, dan mendukung pengembangan kompetensi. Investasi pelatihan dan pengembangan karyawan tetap menjadi prioritas, dengan biaya pengembangan kompetensi yang direalisasikan sebesar Rp1,03 miliar sepanjang 2025. Perseroan juga mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi serta aktif menyalurkan dana untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Pengakuan atas komitmen keberlanjutan ini tercermin dari diraihnya TJSL dan CSR Award dari BUMN Track pada bulan Juni 2025.

Melalui seluruh inisiatif keberlanjutan tersebut, IPCC berkomitmen untuk terus meningkatkan perannya sebagai korporasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, dalam perjalanannya menjadi perusahaan terminal kendaraan berkelas dunia yang tangguh dan beretika.

Sementara itu, seiring dengan meningkatnya tuntutan atas kualitas keterbukaan informasi, Perseroan terus memperkuat kesiapan prosedur, koordinasi lintas fungsi, dan dukungan sistem informasi untuk menunjang pengungkapan keberlanjutan yang semakin andal. Kesiapan tersebut diarahkan agar selaras dengan perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan, termasuk PSPK 1 dan PSPK 2, melalui penguatan empat pilar utama, yaitu *Governance, Strategy, Risk Management,* serta *Metrics and Targets*. Pada pilar *Governance*, Perseroan memperkuat peran organ perusahaan dan koordinasi lintas fungsi dalam pengelolaan isu keberlanjutan dan pelaporannya.

Strengthening ESG-Based Sustainability Practices

IPCC strives to manage its business in line with sustainable practices, including by integrating environmental, social, and governance (ESG) principles into all business processes. To accelerate its sustainability agenda, the Company has designed and developed a comprehensive ESG implementation roadmap since early 2025, with the development process successfully completed in December 2025. This roadmap serves as a long-term strategic guide that ensures that every sustainability initiative is carried out in a structured, measurable manner, and aligned with the direction of the 2025–2029 Long-Term Development Plan (RJPP).

Throughout 2025, the Company continued and deepened a number of strategic sustainability initiatives previously initiated, with a focus on improving resource efficiency, strengthening environmental impact mitigation programs, and enhancing positive social impacts for employees, the community, and business partners.

Regarding the environmental aspect, a more comprehensive business process digitalization program continues to drive significant paper consumption reductions across all terminal operations. The tree-planting program, as part of the biodiversity and environmental conservation initiative, is being continued and expanded. The commitment to ecological responsibility is also reflected in the consistent allocation of environmental management and monitoring costs, which are an integral part of the Company's sustainability agenda.

From a social perspective, IPCC continues to build an inclusive, safe, and supportive employment system that supports competency development. Investment in employee training and development remains a priority, with realized competency development costs totaling Rp1.03 billion throughout 2025. The Company also maintains a high level of customer satisfaction and actively disburses funds to support various social, educational, and community empowerment activities in its operational areas. Recognition of this sustainability commitment is reflected in the achievement of TJSL and CSR Award from BUMN Track in June 2025.

Through all these sustainability initiatives, IPCC is committed to continuously enhancing its role as an environmentally and socially responsible corporation, on its journey to becoming a resilient and ethical world-class vehicle terminal company.

Meanwhile, in line with increasing demands for quality information disclosure, the Company continues to strengthen the readiness of its procedures, cross-functional coordination, and information system to support increasingly reliable sustainability disclosures. This readiness is aimed at aligning with evolving sustainability disclosure standards, including PSPK 1 and PSPK 2, by strengthening four main pillars: Governance, Strategy, Risk Management, and Metrics and Targets. Under the Governance pillar, the Company strengthens the role of corporate organs and cross-functional coordination in managing sustainability issues and reporting.

Pada pilar *Strategy*, Perseroan mendorong keterhubungan antara arah strategis dan pengembangan usaha jangka panjang. Pada pilar *Risk Management*, Perseroan meningkatkan integrasi antara pengelolaan risiko dan identifikasi isu keberlanjutan yang relevan terhadap model bisnis. Sementara pada pilar *Metrics and Targets*, Perseroan terus mengembangkan kualitas data, indikator kinerja, dan kesiapan sistem informasi untuk mendukung pengungkapan yang lebih konsisten, kredibel, dan relevan bagi pemangku kepentingan.

Melalui pendekatan tersebut, Perseroan berupaya memastikan kesiapan yang memadai atas seluruh instrumen Perseroan yang terkait dengan penerapan PSPK 1 dan PSPK 2, baik pada aspek tata kelola, prosedur kerja, koordinasi lintas fungsi, sistem informasi, maupun kualitas data dan indikator kinerja yang mendukung proses pelaporan.

Penilaian Direksi atas Kinerja Komite di Bawah Direksi

Sepanjang tahun buku, dalam melakukan tugas pengelolaan Perseroan, Direksi dibantu oleh komite dan organ pendukung Direksi, yaitu Komite Investasi, Sekretaris Perusahaan, dan Audit Internal. Direksi menilai bahwa komite dan organ pendukung tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam mendukung efektivitas pengelolaan Perseroan.

Penilaian tersebut didasarkan pada kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, dukungan terhadap pengambilan keputusan manajerial, responsivitas terhadap kebutuhan organisasi, serta kontribusinya dalam memperkuat tata kelola, pengendalian internal, dan pencapaian sasaran strategis Perseroan.

Terhadap Komite Investasi, Direksi menilai bahwa komite ini telah memberikan dukungan yang baik terhadap proses pengambilan keputusan investasi. Sepanjang tahun 2025, Komite Investasi melaksanakan 9 kali rapat untuk mengevaluasi usulan investasi dan memastikan kesesuaiannya dengan arah strategis Perseroan, RJPP, Rencana Kerja Manajemen, serta ketentuan yang berlaku. Keaktifan tersebut mendukung proses kajian investasi yang lebih terstruktur, akuntabel, dan selaras dengan prioritas pengembangan usaha Perseroan.

Direksi juga memberikan penilaian yang sangat baik terhadap Sekretaris Perusahaan atas perannya dalam mendukung keterbukaan informasi, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, serta membangun komunikasi yang efektif dengan pemegang saham, regulator, dan publik. Dalam konteks perusahaan terbuka, fungsi ini turut memperkuat kredibilitas Perseroan dalam menyampaikan agenda strategis, perkembangan usaha, dan informasi material secara tepat dan bertanggung jawab.

Under the Strategy pillar, the Company promotes the link between strategic direction and long-term business development. Under the Risk Management pillar, the Company enhances the integration between risk management and risk identification. sustainability issues relevant to the business model. Meanwhile, under the Metrics and Targets pillar, the Company continues to develop data quality, performance indicators, and information system readiness to support more consistent, credible, and relevant disclosures for stakeholders.

Through this approach, the Company strives to ensure adequate readiness of all Company instruments related to the implementation of PSPK 1 and PSPK 2, including governance, work procedures, cross-functional coordination, information systems, and data quality and performance indicators that support the reporting process.

Board of Directors' Assessment of the Performance Of Committees Under Board Of Directors

Throughout the fiscal year, in carrying out the management of the Company, Board of Directors was supported by committees and supporting organs, namely Investment Committee, Corporate Secretary, and Internal Audit. Board of Directors assesses that these committees and supporting organs have performed their duties and responsibilities effectively in supporting the Company's management.

This assessment is based on the quality of execution of duties and functions, support for managerial decision-making, responsiveness to organizational needs, and contributions to strengthening governance, internal control, and the achievement of the Company's strategic objectives.

With respect to the Investment Committee, Board of Directors considers that it has provided strong support in the investment decision-making process. Throughout 2025, the Investment Committee held 9 meetings to evaluate investment proposals and ensure their alignment with the Company's strategic direction, the Long-Term Corporate Plan (RJPP), the Management Work Plan, and applicable regulations. This level of activity supported a more structured, accountable, and strategically aligned investment review process.

Board of Directors also gives a very positive assessment of the Corporate Secretary for its role in supporting information disclosure, maintaining regulatory compliance, and building effective communication with shareholders, regulators, and the public. In the context of a publicly listed company, this function further strengthens the Company's credibility in delivering strategic agendas, business developments, and material information in a timely and responsible manner.

Sementara itu, terhadap Audit Internal, Direksi memberikan penilaian yang sangat baik atas kontribusinya dalam mendukung efektivitas pengendalian internal, pengawasan kepatuhan, dan pelaksanaan audit internal. Peran Audit Internal juga dinilai penting dalam membantu Direksi menjaga kualitas tata kelola serta memastikan bahwa berbagai kebijakan dan program kerja dijalankan sesuai koridor yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, Direksi menilai bahwa komite dan organ pendukung di bawah Direksi telah memberikan dukungan yang signifikan bagi penguatan tata kelola, kualitas pengambilan keputusan, dan pencapaian sasaran usaha Perseroan. Ke depan, Direksi akan terus mendorong peningkatan kapabilitas dan efektivitas organ-organ pendukung tersebut seiring kebutuhan pengelolaan perusahaan yang semakin dinamis.

Penjelasan Direksi Terkait Perubahan Komposisi Direksi

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi IPCC. Seluruh anggota Direksi yang menjabat pada awal tahun tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya hingga laporan tahunan ini diterbitkan. Berikut susunan dan komposisi Direksi IPCC:

Meanwhile, Board of Directors gives a very strong assessment of Internal Audit for its contribution to enhancing the effectiveness of internal controls, compliance oversight, and the execution of internal audit activities. The role of Internal Audit is also considered essential in helping Board of Directors maintain governance quality and ensure that policies and work programs are implemented within the established framework.

Overall, Board of Directors concludes that the committees and supporting organs under its supervision have provided significant support in strengthening governance, improving the quality of decision-making, and achieving the Company's business objectives. Going forward, Board of Directors will continue to enhance the capabilities and effectiveness of these supporting organs in line with the increasingly dynamic demands of corporate management.

Board of Directors' Explanation Regarding Changes in The Composition of Board Of DirectorS

Throughout 2025, there were no changes in the composition of IPCC's Board of Directors. All members serving at the beginning of the year continued to perform their duties and responsibilities until the issuance of this Annual Report. The composition of IPCC's Board of Directors is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Period of Office	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama merangkap Plt Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director and Acting Director of Commercial and Business Development	Juni 2025 – Penutupan RUPST 2030 June 2025 – Closing of the 2030 AGMS	Ke-2 2nd	Akta Nomor 42 tanggal 17 Juni 2025 Deed Number 42 dated June 17, 2025
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Engineering	Juni 2025 – Penutupan RUPST 2030 June 2025 – Closing of the 2030 AGMS	Ke-2 2nd	Akta Nomor 42 tanggal 17 Juni 2025 Deed Number 42 dated June 17, 2025
Wing Megantoro	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	Juni 2025 – Penutupan RUPST 2030 June 2025 – Closing of the 2030 AGMS	Ke-2 2nd	Akta Nomor 42 tanggal 17 Juni 2025 Deed Number 42 dated June 17, 2025

Stabilitas dalam struktur kepemimpinan ini memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap kesinambungan implementasi strategi, penguatan tata kelola, serta pelaksanaan agenda transformasi dan ekspansi yang telah direncanakan. Direksi meyakini bahwa konsistensi kepemimpinan merupakan faktor penting dalam menciptakan kolaborasi lintas fungsi yang efektif, memperkuat budaya organisasi yang adaptif, serta menjaga momentum pertumbuhan berkelanjutan menuju terwujudnya visi IPCC sebagai "Menjadi Pemimpin Ekosistem Logistik Kendaraan".

The stability in this leadership structure has made a significant positive contribution to the continuity of strategy implementation, the strengthening of governance, and the execution of planned transformation and expansion agendas. Board of Directors believes that leadership consistency is a key factor in fostering effective cross-functional collaboration, strengthening an adaptive organizational culture, and maintaining sustainable growth momentum toward realizing IPCC's vision of "Becoming the Leader of the Vehicle Logistics Ecosystem."

Penutup

Sebelum Kami menutup Laporan ini, izinkan Kami menegaskan kembali komitmen Kami dan seluruh Insan IPCC untuk terus membawa Perseroan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik, integritas, serta profesionalisme dalam setiap langkah. Keberhasilan yang telah diraih sepanjang tahun 2025 yang sekaligus menandai penuntasan RJPP 2021–2025 secara penuh, tidak semata menjadi tujuan akhir, melainkan menjadi pijakan yang lebih kokoh untuk melanjutkan perjalanan strategis di bawah RJPP 2025–2029. Dengan visi "Menjadi Pemimpin Ekosistem Logistik Kendaraan" dan semangat *Integrated Auto Solutions* sebagai arah transformasi, Perseroan berkomitmen untuk terus memperluas ekosistem, memperkuat konektivitas layanan, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pelanggan, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan, menuju ekosistem logistik kendaraan yang lebih terintegrasi, tangguh, digital, dan berdaya saing global.

Kami meyakini bahwa keberlanjutan usaha hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang solid, kepemimpinan yang adaptif, serta kepercayaan yang terjaga dari para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Kami akan berupaya keras untuk terus memperkuat fondasi tata kelola, pengelolaan risiko, serta strategi berbasis nilai jangka panjang yang memberikan manfaat luas tidak hanya bagi Perseroan, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan.

Akhirnya, atas nama Direksi, Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemegang saham, Dewan Komisaris, mitra usaha, pelanggan, dan terkhusus karyawan, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kepercayaan yang tiada henti kepada Kami. Kami berharap, sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat untuk mewujudkan IPCC sebagai pengelola terminal kendaraan berkelas dunia yang berintegritas, inovatif, dan berkelanjutan.

Final Words

Before concluding this Report, we would like to reaffirm our commitment, together with all IPCC People, to continuously drive the Company's sustainable growth and development by upholding the principles of good corporate governance, integrity, and professionalism in every step we take. The achievements attained throughout 2025, which also mark the full completion of the 2021–2025 Long-Term Corporate Plan (RJPP), are not merely an end goal but rather a stronger foundation for continuing the Company's strategic journey under the 2025–2029 RJPP. Guided by the vision of "Becoming the Leader of the Vehicle Logistics Ecosystem" and the spirit of Integrated Auto Solutions as the direction of transformation, the Company is committed to further expanding its ecosystem, strengthening service connectivity, and delivering greater added value to customers, shareholders, and all stakeholders, toward a more integrated, resilient, digital, and globally competitive vehicle logistics ecosystem.

We believe that business sustainability can only be achieved through strong collaboration, adaptive leadership, and sustained trust from shareholders and all stakeholders. Therefore, we will continue striving to strengthen the foundations of governance, risk management, and long-term value-based strategies that provide broad benefits not only to the Company but also to society and the environment.

Finally, on behalf of Board of Directors, we would like to express our deepest appreciation and gratitude to all shareholders, the Board of Commissioners, business partners, customers, and especially employees, as well as all stakeholders, for their continuous support, cooperation, and trust. We hope that the synergy that has been established will continue to be strengthened to realize IPCC as a world-class vehicle terminal operator that is driven by integrity, innovation, and sustainability.

Jakarta, 30 April 2026 | April 30, 2026
Atas Nama Direksi
On behalf of Board of Directors

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk



Sugeng Mulyadi
Direktur Utama,
merangkap Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
President Director,
Acting Director of Commercial and Business Development

PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2025 PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

Statement of Board of Commissioners on Accountability for the 2025 Annual Report of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Dengan ini, kami menyatakan bahwa seluruh informasi yang disajikan dalam Laporan Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Tahun Buku 2025 telah melalui proses penelaahan dan disajikan secara lengkap. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran isi Laporan tersebut.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 30 April 2026

We hereby declare that all information presented in the 2025 Annual Report of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk has undergone a thorough review process and has been presented in a complete manner. We assume full responsibility for the accuracy of the contents of this Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, April 30, 2026

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



M. Said Bakhri
Komisaris Utama
President Commissioner



Herry Ardianto
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Tri Hidayat
Komisaris Independen
Independent Commissioner

PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2025 PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

Statement of Board of Directors on Accountability for the 2025 Annual Report of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Melalui pernyataan ini, kami yang bertanda tangan di bawah menyampaikan bahwa seluruh informasi dalam Laporan Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Tahun Buku 2025 telah ditelaah dan disajikan secara lengkap. Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan tersebut.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 30 April 2026

Through this statement, we, the undersigned, declare that all information contained in the 2025 Annual Report of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk has been reviewed and presented in a complete manner. We assume full responsibility for the accuracy of the contents of this Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, April 30, 2026

Direksi
Board of Directors

Sugeng Mulyadi
Direktur Utama,
merangkap Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
President Director,
Acting Director of Commercial and Business Development

Bagus Dwipoyono
Direktur Operasi dan Teknik
Director of Operations and Engineering

Wing Megantoro
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Human Capital and Risk Management

PELINDO
MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN

03

Profil Perusahaan
Company Profile

IPCC terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk menghadirkan layanan yang profesional dan berdaya saing global.
IPCC continues to enhance its capacity and capabilities to deliver professional services with global competitiveness.





Informasi Umum Perusahaan
General Information About The Company





Nama Perusahaan Company Name	**PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk**
Informasi Perubahan Nama pada Tahun Buku Information on Name Changes in Fiscal Year	Tidak terdapat perubahan nama Perseroan pada tahun buku 2025. Informasi terperinci terkait perubahan nama sejak awal berdiri, disampaikan pada pembahasan Riwayat Singkat Perusahaan, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini. No name change in 2025 Fiscal Year. Detailed information regarding the changes in the Company's name since its establishment is presented in the discussion on the Company's Brief History in the Company Profile section of this Annual Report.
Tanggal Pendirian dan Beroperasi Date of Establishment and Operation	5 November 2012 November 5, 2012
Kegiatan Usaha Business Activities	Pengelolaan terminal kendaraan dan menjalankan usaha-usaha di bidang bongkar muat kendaraan, bus, truk, alat berat dan kargo *high & heavy* yang meliputi pelaksanaan *stevedoring, cargodoring, receiving* dan *delivery*, pelayanan penumpukan serta pelayanan logistik dan *value added* lainnya sebagai *one stop services*. Management of vehicle terminals and running businesses in the field of loading and unloading of vehicles, buses, trucks, heavy equipment and high & heavy cargo which includes carrying out stevedoring, cargodoring, receiving and delivery, stacking services and logistics services and other value added as one stop services.
Badan Hukum Legal Entity	Perseroan Terbatas Limited Liability Company
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Pendirian Nomor 10 tahun 2012 tanggal 5 November 2012, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-58515. AH.01.01.Tahun 2012. Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 18 Juli 2023 yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0101406 tanggal 24 Juli 2023. Deed of Establishment Number 10 of 2012, dated November 5, 2012, has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Number AHU-58515. AH.01.01.2012. The Company's Articles of Association have been amended, with the most recent amendment based on Deed No. 45 dated July 18, 2023, and the notification of the amendment to the Articles of Association has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-AH.01.03-0101406 dated July 24, 2023.
Status Perusahaan Company Status	Status perusahaan berubah sejak 1 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: S-38/ MBU/01/2022 tentang Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia 02 tanggal 09 Februari 2022, yang disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 00147753. AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 01 Maret 2022. The Company's status has changed since October 1, 2021 in accordance with the Deed of Statement of Resolution of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Number: S-38/ MBU/01/2022 concerning Changes in Capital Structure and Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia 02 dated February 9, 2022, which was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU- 00147753.AH.01.02.YEAR 2022 dated March 1, 2022.



Modal Dasar Authorized Capital	Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus rupiah). Rp500,000,000,000 (five hundred billion Rupiah) divided into 5,000,000,000 (five billion) shares, each share with a nominal value of Rp100 (one hundred rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-up Capital	Rp1.818.384.820 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) lembar saham dengan nilai nominal Rp181.838.482.000 (seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Rp1,818,384,820 (one billion eight hundred eighteen million three hundred eighty four thousand eight hundred twenty rupiah) shares with a nominal value of Rp181,838,482,000 (one hundred eighty one billion eight hundred thirty eight million four hundred eighty two thousand rupiah).
Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition	• PT Pelindo Multi Terminal **(71,28%)** • PT Pelabuhan Indonesia Investama **(5,54%)** • PT Multi Terminal Indonesia **(0,72%)** • Publik/Common Shareholder **(22,46%)**
Jumlah Karyawan 2025 Number of Employees in 2025	• Organik : 82 Orang • PKWT : 2 Orang • TAD : 358 Orang • Organic: 82 employees • Fixed-Term Contract: 2 employees • Outsourced: 358 employees
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia Listing Date on the Indonesia Stock Exchange	9 Juli 2018 July 9, 2018
Kode Saham Stock Code	IPCC
Jaringan Kantor Office Network	• 1 Kantor Pusat • 1 Kantor Branch Jakarta • 5 Kantor Satelit • 1 Manajemen Kerja Sama Operasi • 1 Head Office • 1 Office Branch Jakarta • 5 Satellite Offices • 1 Joint Operation Management

Akses Terhadap Perseroan Termasuk Kantor Cabang Atau Perwakilan

Access to the Company Including Branch or Representative Offices

JARINGAN KANTOR OFFICE NETWORK	ALAMAT ADDRESS
Kantor Pusat Head Office	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Jalan Sindang Laut No.100, Cilincing, Jakarta Utara, 14110 Telp: +62 21 4393 2251
Situs Web Website	www.indonesiacarterminal.co.id
Kontak Perusahaan Contact	**Sekretaris Perusahaan** Corporate Secretary PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Jalan Sindang Laut No.100, Cilincing, Jakarta Utara, 14110 Telp: +62 21 4393 2251 E-mail : corsec@indonesiacarterminal.co.id info@indonesiacarterminal.co.id komersial@indonesiacarterminal.co.id **Media Sosial** Social Media X : @IPCC Terminal Kendaraan Facebook : IPCC Terminal Kendaraan Instagram : @IPCC Terminal Kendaraan Youtube: IPCC Terminal Kendaraan Tiktok: IPCC Terminal Kendaraan LinkedIn: IPCC Terminal Kendaraan
Whistleblowing System	e-mail: pelindobersih@whistleblowing.link Telp: +62 2782 2345 atau +62 811 933 2345)

KANTOR SATELIT SATELLITE OFFICE	ALAMAT ADDRESS
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk –Pelabuhan Pontianak PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk –Pontianak Port	Jalan Pak Kasih Nomor 11, Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat, 78112
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Pelabuhan Belawan Medan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Belawan Medan Port	Jalan Stasiun Kereta Api (Gedung Car Terminal), Medan Belawan Kota, Kota Medan, Sumatra Utara, 20412
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Pelabuhan Makassar PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Makassar Port	Jalan Nusantara No.329 Melayu Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, 90164
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Pelabuhan Balikpapan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Balikpapan Port	Jl. Yos Sudarso No.30 Balikpapan, Kalimantan Timur 76111
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Pelabuhan Banjarmasin PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Banjarmasin Port	Jalan Barito Hilir No. 6, Telaga Biru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70119.

KANTOR MANAJEMEN KERJA SAMA OPERASI JOINT OPERATION MANAGEMENT OFFICE	ALAMAT ADDRESS
Kantor MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia Office	Jalan Beta Kawasan Industri Maspion V, Sukomulyo, Manyar, Gresik, Jawa Timur

Riwayat Singkat Perusahaan
Brief History of the Company



PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perseroan" atau "IPCC") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 5 November 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-58515.AH.01.01.Tahun 2012. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 18 Juli 2023 yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0101406 tanggal 24 Juli 2023.

Sebelum berdiri sebagai badan hukum tersendiri, IPCC merupakan *Strategic Business Unit* (SBU) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II dengan nama Tanjung Priok Car Terminal (TPT). TPT mulai beroperasi secara khusus pada 28 November 2007 untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor kendaraan serta kargo secara *Roll on-Roll off* (Ro-Ro), sekaligus menyediakan layanan bongkar muat di Terminal Kendaraan Tanjung Priok.

Seiring dengan perkembangan usaha dan meningkatnya kebutuhan layanan terminal kendaraan di pelabuhan, pada 5 November 2012 TPT resmi berdiri sebagai entitas bisnis dengan nama PT Indonesia Kendaraan Terminal. Perseroan didirikan untuk menyediakan layanan terminal kendaraan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, serta sejumlah pelabuhan/terminal Ro-Ro lainnya di Indonesia. Dengan fasilitas dan peralatan khusus untuk melayani kargo kendaraan

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("the Company" or "IPCC") was established pursuant to Deed of Establishment Number 10 dated November 5, 2012, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision No. AHU-58515.AH.01.01.2012. The Company's Articles of Association have undergone several amendments, with the most recent amendment based on Deed No. 45 dated July 18, 2023, and the notification of the amendment to the Articles of Association was received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-AH.01.03-0101406 dated July 24, 2023.

Before officially establishing itself as a legal entity, IPCC was a Strategic Business Unit (SBU) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or Pelindo II called Tanjung Priok Car Terminal (TPT). TPT has been operating specifically since November 28, 2007, to support the export and import of vehicles and cargo by Roll on-Roll off (Ro-Ro) as well as provide loading and unloading services at Tanjung Priok Vehicle Terminal.

In line with business development and increasing need for vehicle terminal services at ports, on November 5, 2012 TPT was officially established as a business entity under the name of PT Indonesia Kendaraan Terminal. The Company was established to provide vehicle terminal services operating at the Port of Tanjung Priok, Jakarta, and a number of other Ro-Ro ports/terminals in Indonesia. With special facilities and equipment to serve cargo in the form of vehicles and

dan barang secara Ro-Ro, Perseroan memperoleh penetapan status sebagai terminal kendaraan *(car terminal)* dari Departemen Perhubungan.

goods by Ro-Ro, the Company obtained status as a vehicle terminal (car terminal) by the Ministry of Transportation.

Layanan Perseroan meliputi Terminal *Handling* dan *Value Added Services*. Terminal *Handling* mencakup *stevedoring, cargodoring, receiving*, dan *delivery*, sedangkan *Value Added Services* meliputi *Car Processing Center, Equipment Processing Center, Road Freight Services*, dan *Port Stock*. Perseroan juga mendukung program Pemerintah untuk meminimalkan pengangkutan barang melalui jalur darat.

The Company's services include Terminal Handling and Value Added Services. Terminal Handling include Stevedoring, Cargodoring, Receiving, and Delivery, meanwhile, the Value Added Services include Car Processing Center, and Equipment Processing Center, Road Freight Services, and Port Stock. The Company has also stated its commitment to supporting the Government's program in minimizing the transportation of goods by land.

Pada 9 Juli 2018, Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 509.147.700 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar, yang mewakili 28,0% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Sejak saat itu, saham Perseroan diperdagangkan dengan kode IPCC.

On July 9, 2018, the Company listed its shares on the Indonesia Stock Exchange through an Initial Public Offering of 509,147,700 shares with a nominal value of Rp100 per share, representing 28.0% of the issued and fully paid-up capital. Since then, the Company's shares have been traded under stock code IPCC.

Memasuki tahun 2021, Perseroan bersama PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan *soft launching* penggunaan *Radio Frequency Identification* (RFID) pada unit kendaraan Toyota. Langkah ini menjadi bagian dari pengembangan digitalisasi layanan Perseroan untuk mendukung proses operasional dan pengelolaan layanan kendaraan.

Entering 2021, the Company has collaborated with PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) to soft launch of Radio Frequency Identification (RFID) on Toyota vehicles. This step is part of the Company's digitalization of services to support operational processes and vehicle service management.

Pada 1 Oktober 2021, *merger* Pelindo resmi terlaksana melalui penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai *surviving entity*. Penggabungan tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan *value creation* BUMN kepelabuhanan serta efektivitas dan efisiensi layanan kepelabuhanan nasional.

On October 1, 2021, Pelindo merger was officially completed through the merger of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) merged into PT Pelabuhan Indonesia (Persero) which became the surviving entity. The merger was carried out to increase value creation for SOE port companies and improve the effectiveness and efficiency of national port services.

Pada tahun 2022, Perseroan terus menjajaki peluang usaha dalam rantai pasok industri otomotif. Pada tahun yang sama, *merger* Pelindo diikuti perubahan logo dan *branding* pada 30 Juni 2022, serta pembentukan struktur organisasi baru yang menempatkan IPCC pada klaster Nonpetikemas di bawah PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) sebagai *subholding*, setelah pengalihan 71,3% saham IPCC dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada SPMT.

In 2022, the Company continued to explore business opportunities in the automotive industry value chain. That same year, the Pelindo merger was followed by a logo and branding change on June 30, 2022, and the establishment of a new organizational structure that placed IPCC in the Non-Container Cluster under PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) as a subholding, following the transfer of 71.3% of IPCC shares from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to SPMT.

Perseroan juga melakukan sosialisasi serah terima operasi Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar kepada PT Pelindo Multi Terminal. Serah terima Belawan efektif berlaku sejak 1 Januari 2022, sedangkan Makassar sejak 1 Mei 2022. Selain itu, Perseroan mengembangkan layanan *Cargo Distribution Management*, salah satunya melalui *Pre-Delivery Center* (PDC), yaitu layanan lapangan penumpukan kargo sebelum didistribusikan melalui jalur darat. Dalam pengembangannya, Hyundai Motor Indonesia menjadi pelanggan perdana yang menggunakan layanan tersebut.

The Company also socialized the handover of operations at Makassar Port and Belawan Port to PT Pelindo Multi Terminal. The handover for Belawan became effective on January 1, 2022, while Makassar followed on May 1, 2022. Furthermore, the Company developed Cargo Distribution Management services, one of which is through the Pre-Delivery Center (PDC), namely stacking field service before being distributed by land. During this development, Hyundai Motor Indonesia became the first customer to use this service.

Pada tahun 2023, Perseroan mulai mengoperasikan Terminal RoRo dan Kendaraan Pelabuhan Semayang, Balikpapan, serta membangun Ruang *Integrated Planning & Control*. Untuk mendukung peningkatan layanan kepada pelanggan, Perseroan juga mulai mengimplementasikan *Single System* ERP-SAP, Sistem *Billing* Praya, dan pembangunan Portal *Customer Care System* (CCS).

In 2023, the Company began operating RoRo Terminal and Port Vehicles of Semayang, Balikpapan and the construction of an Integrated Planning & Control room. To improve customer service, the Company began implementing ERP-SAP Single System, Praya Billing System, and began building Customer Care System (CCS) Portal.

Sepanjang tahun 2024, Perseroan menjalankan sejumlah langkah pengembangan usaha, antara lain penerapan pola kerja sama *Single Billing* untuk pelayanan bongkar muat terminal internasional dan ekspansi pelayanan operasi terminal di Terminal RoRo dan Kendaraan Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, yang dimulai pada 30 September 2024 dan efektif beroperasi pada 7 Oktober 2024. Pada tahun yang sama, IPCC juga mengimplementasikan PTOS-C di Terminal Domestik *Branch* Jakarta dan Terminal Satelit Belawan, serta memperluas layanan *Pre-Delivery Center* (PDC) untuk kargo Subaru, BMW, dan Toyota.

Perseroan terus berupaya memperkuat sinergi di lingkungan Pelindo Group serta meningkatkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelayanan pelanggan dan efisiensi proses bisnis.

Pada tahun 2025, Perseroan memperkenalkan *tagline* baru, yaitu "*Integrated Auto Solutions*", yang mencerminkan arah pengembangan layanan IPCC dalam ekosistem logistik otomotif. Pada tahun yang sama, Perseroan melakukan ekspansi bisnis *Car Distribution Management* melalui kerja sama strategis dalam pengembangan distribusi kendaraan BYD dari terminal pelabuhan menuju jaringan *dealer* dan titik distribusi lainnya di berbagai wilayah Indonesia.

Kerja sama tersebut difokuskan pada penyediaan layanan transportasi darat untuk distribusi kendaraan BYD serta menjadi bagian dari pengembangan portofolio layanan logistik kendaraan Perseroan, termasuk pada segmen kendaraan listrik. Melalui kerja sama ini, IPCC mengembangkan cakupan layanan yang mencakup bongkar muat, penumpukan (*yard storage*), hingga distribusi darat, sedangkan ASA mendukung penyediaan armada *trucking* sesuai kebutuhan operasional pengangkutan kendaraan. Ke depan, kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan layanan distribusi kendaraan ke wilayah yang lebih luas.

Throughout 2024, the Company has undertaken a number of business strategies including the implementation of Single Billing cooperation pattern for loading and unloading services at the International Terminal and the expansion of terminal operation service business at RORO and Vehicle Terminals at Trisakti Port, Banjarmasin started on September 30, 2024, which was effectively start operating on October 7, 2024. In the same year, IPCC has also implemented PTOS-C at Jakarta Branch Domestic Terminal and Belawan Satellite Terminal and provided Pre-Delivery Center (PDC) value-added services for Subaru, BMW and Toyota cargo.

The Company continues to strengthen synergy within the Pelindo Group and enhancing the utilization of digital technology to support customer service and business process efficiency.

In 2025, the Company introduced a new tagline, "Integrated Auto Solutions," which reflects the direction of IPCC's service development within the automotive logistics ecosystem. In the same year, the Company expanded its Car Distribution Management business through a strategic partnership to develop the distribution of BYD vehicles from port terminals to dealer networks and other distribution points across various regions of Indonesia.

This collaboration focuses on providing land transportation services for BYD vehicle distribution and forms part of the Company's efforts to develop its vehicle logistics service portfolio, including electric vehicle segment. Through this partnership, IPCC has expanded its service scope to include stevedoring, yard management, and land distribution, while ASA supports the provision of trucking fleets in accordance with operational requirements. Going forward, the collaboration is expected to support the expansion of vehicle distribution services to broader regions.

Informasi Perubahan Nama Emiten

Sejak awal Perseroan berdiri hingga laporan tahunan ini diterbitkan, IPCC mengalami satu kali perubahan badan hukum dan nama, sebagai berikut:

Information on Issuer Name Changes

From the beginning of the Company's establishment until the publication of this annual report, IPCC has undergone one change of legal entity and name, as follows:

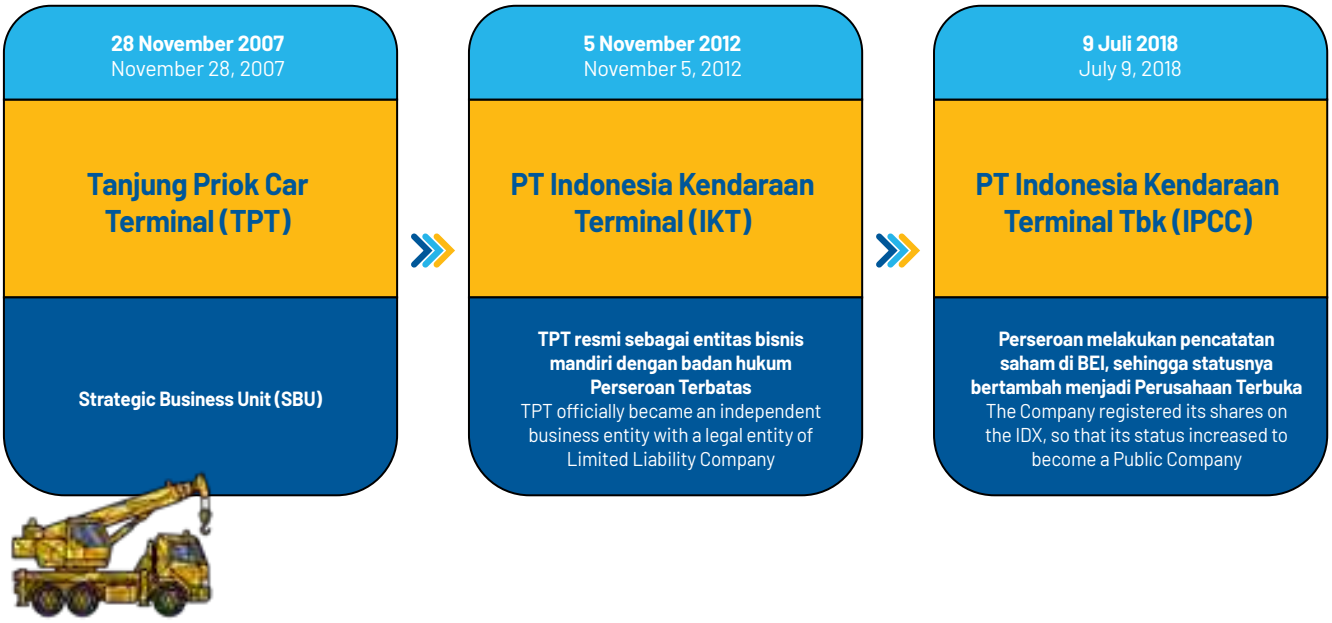

Jejak Langkah
Milestones

2007

Pembentukan Tanjung Priok Car Terminal (TPT) sebagai *Strategic Business* Unit dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Establishment of Tanjung Priok Car Terminal (TPT) as a Strategic Business Unit of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

2012

Tanjung Priok Car Terminal (TPT) resmi berbadan hukum dengan status Perseroan Terbatas dan melakukan perubahan nama menjadi PT Indonesia Kendaraan Terminal.

Tanjung Priok Car Terminal (TPT) officially became a legal entity with the status of a Limited Liability Company and changed its name to PT Indonesia Kendaraan Terminal.

PELINDO MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN

2022

- **Kerja sama layanan *Vehicle Distribution Centre* (VDC) antara IPCC dan Glovis INDO Internasional guna menyajikan layanan terpadu;**
- **Pengoperasian terminal kendaraan di Pelabuhan Belawan Medan, pengoperasian tersebut merupakan bagian proses pasca *merger*, di mana pengelolaan operasi Pelabuhan Belawan, Medan secara bertahap akan diserahkan kepada Subholding Pelindo Multi Terminal (SPMT);**
- **Pengoperasian terminal kendaraan di Pelabuhan Makassar, pengoperasian tersebut merupakan bagian proses pascamerger, di mana pengelolaan operasi Pelabuhan Makassar secara bertahap akan diserahkan kepada *Subholding* Pelindo Multi Terminal (SPMT);**
- **IPCC Resmikan Layanan *Customer Care Station* (CSS) di Tanjung Priok;**
- **Penanganan kargo Hyunda Genesis untuk perhelatan G20 yang diselenggarakan di Bali, Indonesia.**
- A partnership between IPCC and Glovis INDO International for Vehicle Distribution Center (VDC) services to provideintegrated services;
- Operation of the vehicle terminal at Belawan Port in Medan; this operation is part of the post-merger process, in which management of Belawan Port operations in Medan will be gradually transferred to the Pelindo Multi Terminal Subholding (SPMT);
- Operation of the vehicle terminal at Makassar Port; this operation is part of the post-merger process, in which the management of Makassar Port operations will be gradually transferred to the Pelindo Multi Terminal Subholding (SPMT);
- IPCC Inaugurates Customer Care Station (CSS) at Tanjung Priok;
- Handling of Hyundai Genesis cargo for the G20 summit held in Bali, Indonesia.

2023

- **Pengoperasian terminal Semayang, Balikpapan pada Oktober 2023;**
- **Implementasi *Single System* ERP-SAP;**
- **Pembangunan Ruang *Integrated Planning and Control*;**
- **Implementasi Sistem *Billing* Praya;**
- **Pembangunan Portal *Customer Care System* (CCS).**
- Operation of Semayang Terminal, Balikpapan in October 2023;
- Implementation of Single ERP-SAP System;
- Construction of Integrated Planning and Control;
- Implementation of Praya Billing System;
- Development of a Customer Care System (CCS) Portal.

2024

- **IPCC menangani ekspor perdana Mitsubishi X Force sebanyak 500 unit dengan tujuan negara Vietnam;**
- **Peresmian *Automatic Gate* Terminal Domestik IPCC Branch Jakarta;**
- **Go-Live Pengoperasian PTOS-C Terminal Domestik;**
- **Implementasi Single Billing untuk pelayanan bongkar muat Terminal Internasional IPCC Branch Jakarta;**
- **Pengoperasian Terminal RORO dan Kendaraan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.**
- IPCC handles the first export of Mitsubishi X Force as many as 500 units to Vietnam;
- Inauguration of Automatic Gate Domestic Terminal IPCC Branch Jakarta;
- Go-Live Operation of PTOS-C Domestic Terminal;
- Implementation of Single Billing for loading and unloading services International Terminal IPCC Branch Jakarta;
- Operation of the RORO Terminal and Port Vehicles at Trisakti Port in Banjarmasin.

2025

- **Layanan cargo *handling* dan penumpukan BYD;**
- **Layanan *trucking;***
- **Revitalisasi infrastruktur tekonologi informasi;**
- **Penandatanganan Perjanjian Jasa Layanan *Handling* dengan PT Solusi Express Logistics;**
- **Penandatanganan Perjanjian Jasa Logistik dengan PT BYD Auto Indonesia;**
- **Penandatanganan Perjanjian Pelayanan Penanganan dan Penumpukan Kargo dengan PT BYD Auto Indonesia.**
- BYD cargo handling and warehousing services;
- Trucking services
- Revitalization of information technology infrastructure;
- Signing of a Cargo Handling Services Agreement with PT Solusi Express Logistics;
- Signing of a Logistics Services Agreement with PT BYD Auto Indonesia;
- Signing of a Cargo Handling and Warehousing Services Agreement with PT BYD Auto Indonesia.



2017

Peresmian pelayaran perdana rute Jakarta–Surabaya.
Inauguration of the inaugural voyage of Jakarta-Surabaya route.

2018

Resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan ticker code:
Officially listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with the stock code:

IPCC

2019

Penerapan simplifikasi Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk CBU.
Implementation of the simplification of Motor Vehicle Exports in the form of CBU.

2020

Implementasi *Auto Gate System* terintegrasi.
Implementation of an integrated Auto Gate System.

2021



- **IPCC dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) meluncurkan penggunaan *Radio Frequency Identification* (RFID);**
- **Pengembangan aplikasi *dashboard* operasional sebagai media penyampaian informasi secara *real-time* kepada manajemen untuk membantu pengambilan keputusan;**
- **Implementasi dan Integrasi aplikasi Terminal Operating System (TOS) dengan *Billing System* dan *E-Invoice* yang terintegrasi dengan aplikasi ERP Finance;**
- **Penyusunan IT Master Plan tahun 2020-2024 yang berfungsi sebagai acuan Rencana Kerja Manajemen Sistem Informasi di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;**
- **Penambahan dan Pengembangan Perangkat Jaringan IT dan CCTV *Surveillance System* untuk kebutuhan Lapangan Eks-DKP guna mendukung kegiatan operasi di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;**
- **Keamanan IT yang berfungsi untuk mengantisipasi terhadap tindakan *cyber attack*.**
- **Pekerjaan Perapihan dan Pemetaan Jalur Jaringan Fiber Optic di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;**
- **Melakukan *Upgrade* Lisensi Email Corporate dari Microsoft Exchange menjadi Microsoft 365 yang menyediakan instalasi;**
- **Pengembangan dan integrasi dengan platform INSW untuk kegiatan impor di Terminal sebagai bagian dari program pemerintah dalam meningkatkan *ease of doing business* di Indonesia;**
- **Implementasi CARDOM yaitu implementasi pada kegiatan operasional di terminal domestik, mulai dari tally sampai RBM;**
- **SKEP *Autogate* yaitu penerbitan Surat Keputusan penerapan *autogate* di terminal internasional oleh Bea Cukai;**
- **Penanganan *receiving* and *delivery* serta *Cargodoring* unit PT Suzuki Indomobil Motor;**
- ***Full cashless* TFS Internasional yaitu penerapan *full cashless* Terminal Facility Services (TFS) di terminal internasional.**
- IPCC and PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) launched the use of Radio Frequency Identification (RFID);
- Development of operational dashboard applications as a medium for delivering real-time information to management to assist decision making;
- Implementation and integration of Terminal Operating System (TOS) application with Billing and E-Invoice system that is integrated with ERP Finance application;
- Preparation of the 2020-2024 IT Master Plan which served as a reference for Information System Management Work Plan at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- Addition and Development of IT Network Equipment and CCTV Surveillance System for the needs of Ex-DKP Yard to support operations within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- Procurement, Installation, Setup and Configuration of IT Security Devices which function to anticipate cyber-attacks.;
- Work on Smoothing and Mapping Fiber Optic Network Paths at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- Upgrading the Company Email License from Microsoft Exchange to Microsoft 365 which provides installation;
- Development and integration with the INSW platform for import activities at Terminal as part of the government's program to improve ease of doing business in Indonesia;
- CARDOM implementation, namely the implementation of operational activities in domestic terminals, from tally to RBM;
- SKEP Autogate, namely the issuance of a Decree on the application of autogate at international terminals by Customs;
- Handling of receiving and delivery as well as Cargodoring unit of PT Suzuki Indomobil Motor;
- Full cashless TFS International, namely the implementation of full cashless Terminal Facility Services (TFS) in international terminals.



Identitas dan Logo Perusahaan
Company Identity and Logo

Logogram IPCC
IPCC LOGOGRAM

PELINDO
MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN

Logogram mengambil inspirasi dari bentuk jalur atau rute yang sibuk, padat, dan simpang siur, yang menggambarkan Pelindo sebagai penyedia jasa kepelabuhanan dan logistik terintegrasi yang selalu aktif dan berperan besar dalam transportasi laut sebagai urat nadi perekonomian nasional - sekaligus mendukung terwujudnya tol laut Indonesia.

The logogram is inspired from the shape of a busy, crowded, and complex passage or route, which illustrates Pelindo as an integrated port and logistics service provider that is always active and has a major role in sea transportation, as the artery of the national economy while supporting the realization of the Indonesia sea highway.



Mengambil huruf P yang menjadi inisial Pelindo sebagai *Holding* Perusahaan sekaligus berbentuk ikan, yang menjadi lambang habitat makhluk hidup laut penting bagi Indonesia yang merupakan negara maritim. Ini juga menjadi simbol dari komitmen Pelindo untuk menjaga kekayaan alam Indonesia dengan terus berkontribusi dalam mendukung kelestarian ekosistem laut di wilayah operasinya.
Taking the letter "P" as the initial of Pelindo, representing the Holding Company, while also forming the shape of a fish, which symbolizes the marine habitat, an essential part of Indonesia as a maritime nation. This also serves as a symbol of Pelindo's commitment to preserving Indonesia's natural wealth by continuously contributing to the sustainability of marine ecosystems in its operational areas.



Warna biru adalah warna laut Indonesia, yang sangat dekat dengan Pelindo. Warna ini melambangkan stabilitas, kepercayaan, integritas, profesionalisme, dan pengabdian. Warna ini juga melambangkan simbolisasi dari upaya Pelindo, sebagai bagian dari BUMN untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh *stakeholders*.
The blue color represents Indonesia's seas, which are deeply connected to Pelindo. This color symbolizes stability, trust, integrity, professionalism, and dedication. The color also reflects Pelindo's efforts, as part of an SOE, to consistently provide the best for all stakeholders.



Warna Merah melambangkan aksi, antusiasme, kecepatan, keberanian, dan bagian dari warna simbol negara Indonesia. Merepresentasikan Perusahaan yang kuat, berkomunikasi secara terbuka, serta mampu memberikan semangat persatuan dan energi antar perusahaan-perusahaan di Pelindo Group.
The red color symbolizes action, enthusiasm, speed, courage, and is also part of Indonesia's national colors. Represent a strong company that communicates openly and fosters unity and energy among the companies within Pelindo Group.

Identitas Perusahaan
Company Identity



Perseroan merupakan anak perusahaan PT Pelindo Multi Terminal yang merupakan salah satu anak Perseroan dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Sehingga seluruh identitas Perseroan merujuk kepada identitas PT Pelindo Multi Terminal terutama pada logogram. Logo Perseroan memiliki makna yaitu *friendly, spirit, energy*, dan *agility*.

Pada 30 Juni 2022, Perseroan melakukan perubahan logo dan *branding* setelah terjadinya penggabungan Pelindo I, II, III, IV. Perubahan logo dan branding yang dilakukan Perseroan merupakan bagian terpenting dari proses mencapai cita-cita PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC untuk menjadi Pengelola Ekosistem Terminal Kendaraan Berkelas Dunia.

Logo Perseroan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai merek jasa penyediaan lahan dan penumpukan untuk ekspor impor sejak tanggal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal tanggal 30 Juni 2022 tentang Penetapan Pedoman Identitas Visual dan Brand PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

The Company is a subsidiary of PT Pelindo Multi Terminal, which is one of the subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Therefore, the Company's entire identity aligns with the identity of PT Pelindo Multi Terminal, particularly in its logogram. The Company's logo embodies the meanings of friendliness, spirit, energy, and agility.

On June 30, 2022, the Company underwent a logo and branding change following the merger of Pelindo I, II, III, and IV. This transformation was a crucial step in achieving the aspiration of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) to become a World-Class Vehicle Terminal Ecosystem Operator.

The Company's logo has been officially registered with Directorate General of Intellectual Property as a service mark for land provision and storage for export-import activities since the date stated in the Decree of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal on June 30, 2022, regarding Establishment of Visual Identity and Brand Guidelines for PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Values



Visi | Vision

"Menjadi Pemimpin Ekosistem Logistik Kendaraan"

"Becoming a Leader in the Vehicle Logistics Ecosystem"

Penjelasan Visi

"Menjadi Pengelola"
Perseroan mampu menjadi perusahaan pengelola terminal kendaraan profesional dan dapat disejajarkan serta bersaing dengan penyedia layanan terminal kendaraan terbaik di dunia.
- *Image* perusahaan yang baik;
- Fasilitas dan infrastruktur yang modern;
- Sistem yang terintegrasi.

"Terminal Kendaraan Berkelas Dunia"
IPCC mampu membangun kepemimpinan tingkat nasional dan regional, dengan ekspansi bisnis secara global dalam menjadi pengelola terminal kendaraan (*car terminal*) kelas dunia yang berkontribusi terhadap ekosistem. Pembangunan bisnis secara berkesinambungan dengan penguatan kerjasama dengan pemain ekosistem logistik maritim lainnya.

IPCC sebagai Perseroan kelas dunia memiliki kualitas utama:
- Memiliki kinerja dan citra perusahaan yang baik;
- Memiliki fasilitas infrastruktur yang modern dan sistem yang terintegrasi;
- Memiliki dampak positif bagi pemangku kepentingan.

Di samping itu, IPCC diharapkan tidak hanya mampu mengelola jasa operasional layanan kepelabuhanan yang unggul namun juga melakukan pengembangan bisnis dan pengelolaan usaha di sektor-sektor yang merupakan rantai pasok dan pendukung sektor kepelabuhanan, dalam rangka menciptakan jasa *end to end logistic* dan tumbuh secara anorganik serta mendorong tumbuhnya ekosistem terminal kendaraan yang terintegrasi sehingga memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Vision Explanation

"Becoming an Operator"
The Company aspires to be a professional vehicle terminal operator that is on par with and capable of competing with the world's best vehicle terminal service providers.
- A strong corporate image;
- Modern facilities and infrastructure;
- An integrated system.

"A World-Class Car Terminal"
IPCC aims to establish national and regional leadership, expanding its business globally to become a world-class vehicle terminal operator that contributes to the ecosystem. This includes sustainable business development through strengthened collaboration with other players in the maritime logistics ecosystem.

As a world-class company, IPCC possesses the following key qualities:
- Strong performance and corporate image;
- Modern infrastructure facilities and an integrated system;
- Positive impact on stakeholders.

Furthermore, IPCC is expected not only to manage excellent port service operations but also to develop business and manage operations in sectors related to the supply chain and port supporting industries. This strategy aims to create end-to-end logistics services, achieve inorganic growth, and foster the development of an integrated vehicle terminal ecosystem, ultimately providing positive benefits for Indonesia.

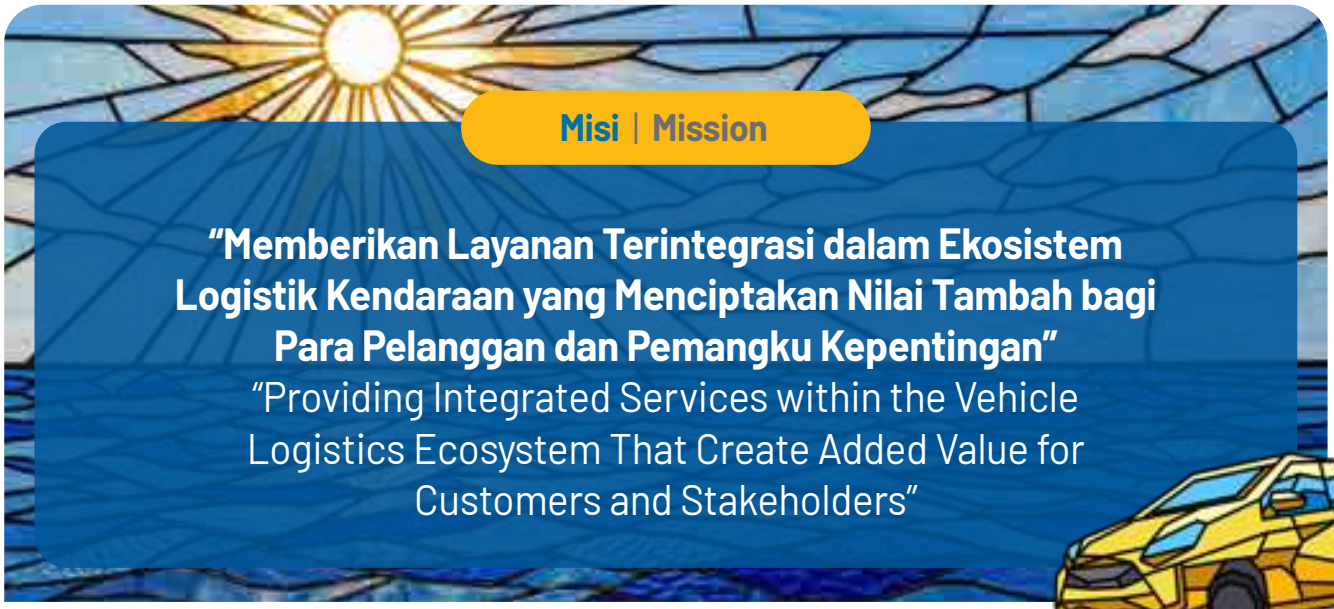

Misi | Mission

"Memberikan Layanan Terintegrasi dalam Ekosistem Logistik Kendaraan yang Menciptakan Nilai Tambah bagi Para Pelanggan dan Pemangku Kepentingan"

"Providing Integrated Services within the Vehicle Logistics Ecosystem That Create Added Value for Customers and Stakeholders"

Penjelasan Misi

"Nilai Tambah"
Peningkatan finansial dan operasional, sehingga akan terjadi peningkatan kinerja yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah atau *value added* pada setiap pelayanan di setiap terminal kendaraan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis IPCC.

"Pelanggan dan Mitra"
Meningkatkan kualitas layanan dan produk dengan menggunakan teknologi dan kapabilitas termutakhir dan memaksimalkan aksesibilitas melalui integrasi produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan mitra.

"Pemegang Saham"
Memaksimalkan penciptaan nilai bagi pemegang saham melalui peningkatan kinerja keuangan dan optimalisasi manajemen tata kelola melalui *best practice* GCG.

"Karyawan"
Memaksimalkan kepuasan pegawai dengan berfokus pada kapabilitas dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memperkuat integritas dan inovasi.

Reviu Visi dan Misi oleh Direksi/Dewan Komisaris

Visi dan misi Perseroan telah disahkan melalui Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor:HK.01/1/7/1/SKPR/DIRUT/IKT-22 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Logo, Visi, Misi, Karakter, dan Nilai-Nilai Perseroan PT Indonesia Kendaraan Terminal. Visi dan misi Perseroan ditetapkan dan ditinjau secara berkala dengan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan jajaran manajemen lainnya

Mission Explanation

"Added Value"
Financial and operational improvements will lead to enhanced performance, which in turn will provide added value to every service at each vehicle terminal in order to support the growth of IPCC's business.

"Customers and Partners"
Improving service and product quality by leveraging the latest technology and capabilities, while maximizing accessibility through product integration to ensure customer and partner satisfaction.

"Shareholders"
Maximizing value creation for shareholders through improved financial performance and optimizing governance management by implementing best practices in Good Corporate Governance (GCG).

"Employees"
Maximizing employee satisfaction by focusing on capability development and improving employee welfare through strengthened integrity and innovation.

Review of Vision and Mission by Board of Directors/Board of Commissioners

The Company's vision and mission were officially ratified through the Decree of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No: HK.01/1/7/1/SKPR/DIRUT/IKT-22 date July 1, 2022, concerning the Establishment of Logo, Vision, Mission, Character, and Corporate Values of PT Indonesia Kendaraan Terminal. The vision and mission are periodically reviewed with the involvement of Board of Directors, Board of

untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan lingkungan bisnis Perseroan. Hingga akhir tahun pelaporan, Manajemen Perseroan menetapkan bahwa Visi dan Misi Perseroan masih relevan dengan perkembangan Perseroan.

Strategi Pencapaian Visi dan Misi

Visi dan Misi Perseroan menjadi landasan Perseroan dalam menyusun rencana Perseroan baik dalam jangka panjang dalam yaitu Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), maupun jangka pendek, dalam hal ini Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP). Kemudian Perseroan menyusun strategi pencapaian Visi dan Misi setiap tahunnya yang dituangkan dalam RJPP 2025-2029.

Commissioners, and other management teams to ensure their relevance to the Company's business environment. As of the end of reporting year, the Company's management has confirmed that vision and mission remain relevant to the Company's growth and development.

Strategy for Achieving Vision and Mission

The Company's Vision and Mission serve as the foundation for developing both long-term plans, known as Corporate Long-Term Plan (RJPP), and short-term plans, specifically Corporate Work Plan and Budget (RKAP). Each year, the Company formulates strategies to achieve its vision and mission, as outlined in RJPP 2025-2029.

Strategi Pencapaian Visi dan Misi
Strategy for Achieving Vision and Mission

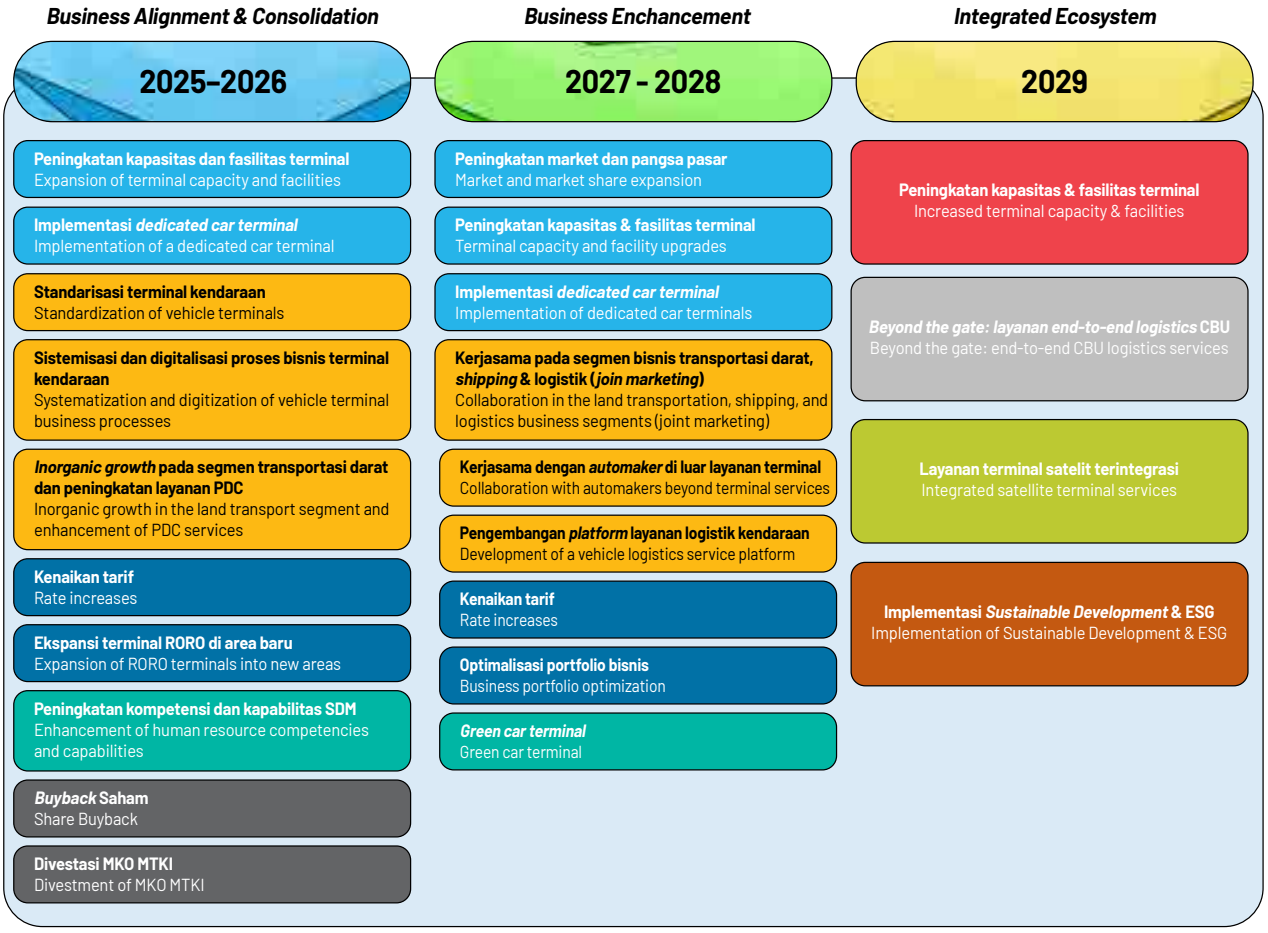

Dalam *roadmap* IPCC periode 2025–2026, inisiatif penyelarasan dan konsolidasi bisnis ditetapkan sebagai prioritas strategis untuk memastikan keselarasan menyeluruh antara aktivitas operasional, sasaran kinerja, serta alokasi sumber daya dengan visi dan misi perusahaan. Langkah ini juga mencakup pengintegrasian unit bisnis, sistem, dan proses yang sebelumnya berjalan secara terpisah atau tumpang tindih, guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasional secara berkelanjutan.

Melalui pendekatan ini, IPCC memastikan bahwa seluruh elemen organisasi bergerak dalam satu arah strategis yang terpadu. Konsolidasi yang dilakukan turut berperan dalam menyederhanakan struktur operasional, mengoptimalkan biaya, serta memperkuat

In the IPCC's 2025–2026 roadmap, business alignment and consolidation initiatives have been identified as strategic priorities to ensure comprehensive alignment between operational activities, performance targets, and resource allocation with the company's vision and mission. This initiative also involves integrating business units, systems, and processes that previously operated separately or overlapped, to enhance operational efficiency and effectiveness on a sustainable basis.

Through this approach, IPCC ensures that all elements of the organization move in a single, integrated strategic direction. The consolidation also plays a role in simplifying operational structures, optimizing costs, and strengthening synergies among business

sinergi antarunit bisnis. Dengan demikian, perusahaan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan kelincahan dalam merespons dinamika industri.

Implementasi penyelarasan dan konsolidasi bisnis ini diharapkan dapat memperkuat posisi daya saing IPCC, sekaligus mendukung agenda transformasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, inisiatif ini berpotensi menciptakan nilai tambah yang signifikan melalui penyediaan layanan yang lebih cepat, transparan, dan berwawasan lingkungan, sehingga semakin meningkatkan daya saing pelabuhan dalam ekosistem logistik global.

Adapun fokus aktivitas yang dapat diterapkan antara lain:
1. Peningkatan kapasitas dan fasilitas terminal
2. Implementasi *dedicated car terminal*
3. Standardisasi terminal kendaraan
4. Sistemisasi dan digitalisasi proses bisnis terminal kendaraan
5. *Inorganic growth* pada segmen transportasi darat dan peningkatan layanan PDC
6. Kenaikan tarif
7. Ekspansi terminal RORO di area baru
8. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas SOM
9. *Buyback* Saham
10. Divestasi MKO MTKI

Dalam pembuatan rumah strategi, PT Indonesia mengacu pada rumah strategi dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Pelindo Multi Terminal sebagai *holding* Pelindo Group dan pemegang saham utama.

units. As a result, the company is able to accelerate decision-making processes while enhancing agility in responding to industry dynamics.

The implementation of this business alignment and consolidation is expected to strengthen IPCC's competitive position while supporting the agenda for transformation and sustainable growth. Additionally, this initiative has the potential to create significant added value through the provision of faster, more transparent, and environmentally conscious services, thereby further enhancing the port's competitiveness within the global logistics ecosystem.

The key activities to be implemented include:
1. Enhancement of terminal capacity and facilities
2. Implementation of a dedicated car terminal
3. Standardization of vehicle terminals
4. Systematization and digitization of vehicle terminal business processes
5. Inorganic growth in the land transport segment and improvement of PDC services
6. Tariff increases
7. Expansion of RORO terminals into new areas
8. Enhancement of SOM competencies and capabilities
9. Share buyback
10. Divestment of MKO MTKI

In developing its strategic roadmap, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk draws on the strategic roadmaps of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Pelindo Multi Terminal, as the holding company of the Pelindo Group and its major shareholder.



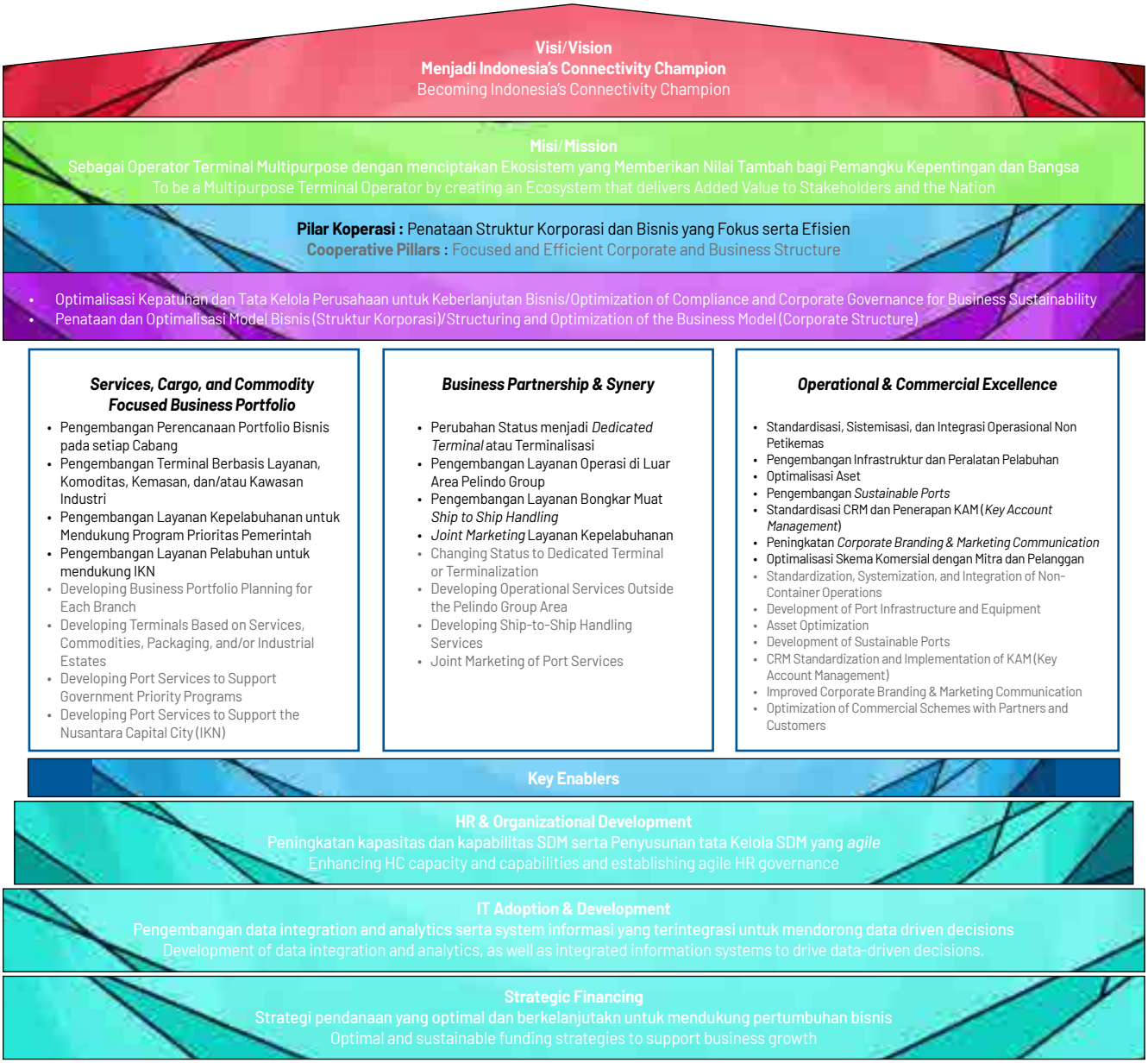

Strategi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk merupakan turunan dari visi dan misi perusahaan yang telah diformulasikan ke dalam 3 (tiga) pilar strategis, yaitu:

1. Standardisasi Operasional & Peningkatan Komersial;
2. Membangun Kemitraan, Sinergi dan Konektivitas;
3. Penataan Struktur Korporasi dan Bisnis.

The strategy of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk is derived from the Company's vision and mission, which have been formulated into 3 (three) strategic pillars, namely:

1. Operational Standardization & Commercial Enhancement;
2. Building Partnerships, Synergy, and Connectivity;
3. Corporate and Business Structure Optimization.

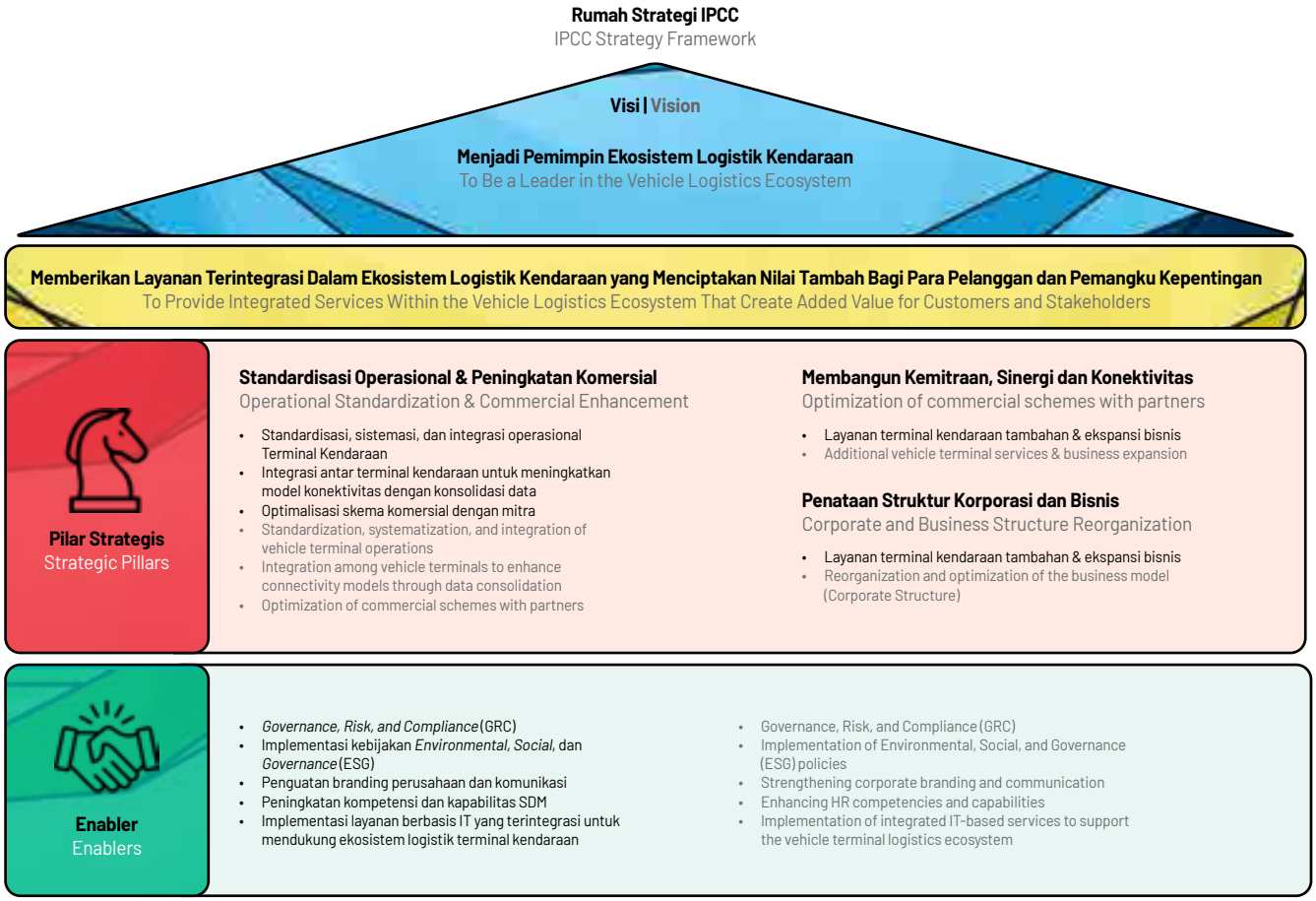

Tema strategis tersebut menjadi acuan untuk mendefinisikan inisiatif strategis IPCC selama 5 tahun ke depan. Untuk mendukung ketercapaian pilar strategis utama, telah dirancang juga *key enablers* yang harus dipenuhi. *Key enablers* merupakan sekumpulan tindakan dan aktivitas utama yang akan mendorong kelancaran implementasi strategi IPCC dan memperkuat fondasi perusahaan dalam mencapai visi "Menjadi Pemimpin Ekosistem Logistik Kendaraan".

IPCC berkomitmen untuk menciptakan ekosistem logistik kendaraan yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan teknologi terbaru, standar operasional yang lebih tinggi, serta inovasi di berbagai aspek pengelolaan logistik kendaraan. Visi Perusahaan "Menjadi Pemimpin Ekosistem Logistik Kendaraan" bertujuan untuk memberikan layanan terintegrasi dalam ekosistem logistik kendaraan yang menciptakan nilai tambah bagi para pelanggan dan pemangku kepentingan.

Di samping itu, IPCC diharapkan tidak hanya mampu mengelola jasa operasional layanan kepelabuhanan yang unggul namun juga melakukan pengembangan bisnis dan pengelolaan usaha di sektor-sektor yang merupakan rantai pasok dan pendukung sektor kepelabuhanan, dalam rangka menciptakan jasa *end-to-end* logistic (*Integrated Auto Solution*) dan tumbuh secara anorganik serta mendorong tumbuhnya ekosistem terminal kendaraan yang terintegrasi sehingga memberikan dampak positif bagi Indonesia.

This strategic theme serves as a reference for defining IPCC's strategic initiatives over the next five years. To support the achievement of the main strategic pillars, key enablers have also been designed. These key enablers represent a set of core actions and activities that will drive the effective implementation of IPCC's strategy and strengthen the Company's foundation in achieving its vision of "Becoming the Leader in the Vehicle Logistics Ecosystem."

IPCC is committed to creating an integrated and sustainable vehicle logistics ecosystem by leveraging the latest technologies, higher operational standards, and innovations across various aspects of vehicle logistics management. The Company's vision, "Becoming the Leader in the Vehicle Logistics Ecosystem," aims to deliver integrated services within the vehicle logistics ecosystem that create added value for customers and stakeholders.

In addition, IPCC is expected not only to manage superior port service operations but also to develop business activities and manage operations in sectors that are part of supply chain and supporting industries of the port sector. This is intended to create end-to-end logistics services (Integrated Auto Solution), enable inorganic growth, and foster the development of an integrated vehicle terminal ecosystem, thereby generating positive impacts for Indonesia.



Budaya Perseroan

Budaya Perseroan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Visi dan Misi Perseroan. Di tengah dinamika industri logistik dan terminal kendaraan yang terus berkembang, budaya kerja yang kuat menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, serta membangun kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis.

Sebagai bagian dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui PT Pelindo Multi Terminal, Perseroan menginternalisasi nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai pedoman utama dalam setiap aktivitas kerja. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi standar perilaku insan Perseroan, tetapi juga menjadi landasan dalam menghadapi tantangan industri secara profesional dan berintegritas. Budaya Perseroan yang kuat turut menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis.

Dengan menjunjung tinggi nilai AKHLAK, IPCC senantiasa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, meningkatkan daya saing, serta memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Penerapan budaya yang konsisten juga memperkuat sinergi antara karyawan, manajemen, dan seluruh pemangku kepentingan, guna mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Berlandaskan budaya kerja yang kokoh, Perseroan optimistis mampu menghadapi tantangan industri, memperkuat daya saing, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sektor logistik kendaraan di Indonesia.

Corporate Culture

Corporate culture is the main foundation for realizing the Company's Vision and Mission. Amidst the ever-evolving dynamics of logistics and vehicle terminal industries, a strong work culture is key to improve performance, drive innovation, and build trust among customers and business partners.

As part of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) through PT Pelindo Multi Terminal, the Company internalizes the AKHLAK values (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) as the main guidelines in every work activity. These values serve not only as behavioral standards for the Company's people but also serve as the foundation for facing industry challenges professionally and with integrity. A strong corporate culture contributes to creating a productive and harmonious work environment.

By upholding the AKHLAK values, IPCC continuously adapts to technological development, enhances its competitiveness, and delivers the best services to customers. The consistent implementation of this culture also strengthens synergy among employees, management, and all stakeholders, thereby driving sustainable business growth. Based on a strong work culture, the Company remains optimistic in its ability to face industry challenges, strengthen its competitiveness, and make meaningful contributions to the advancement of the vehicle logistics sector in Indonesia.



A — Amanah
Trustworthy

Amanah berarti memegang teguh kepercayaan yang diberikan, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:
Trustworthy means holding firmly to the trust given, with the following expected behavior:

- Memenuhi janji dan komitmen;
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan;
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- Meeting promises and commitments;
- Responsible for tasks, decisions and actions taken;
- Adhere to moral and ethical values.

K — Kompeten
Competent

Kompeten berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:
Competent means continuing to learn and develop capabilities, with the following expected behavior:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
- Improve personal competence to answer ever-changing challenges
- Help others learn
- Complete tasks with the best quality.

H — Harmonis
Harmonious

Harmonis berarti saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:
Harmonious means caring for each other and respecting differences, with the following expected behavior:

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- Respect everyone regardless of background;
- Likes to help other people;
- Building a conducive work environment.

L — Loyal
Loyal

Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:
Loyal means being dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State, with the expected behavior as follows:

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara;
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
- Patuh pada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etik.
- Maintain the reputation of fellow employees, leaders, SOEs and the State;
- Willing to sacrifices to achieve bigger goals;
- Obey the leadership as long as it is not against the law and ethics.

A — Adaptif
Adaptive

Adaptif berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:
Adaptive means continuing to innovate and be enthusiastic in driving or facing change, with the following expected behavior:

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;
- Bertindak proaktif.
- Quickly adapt to get better;
- Continuously make improvements following technological developments;
- Act proactively.

K — Kolaboratif
Collaborative

Kolaboratif berarti membangun kerjasama yang sinergis dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:
Collaborative means building synergistic cooperation with the following expected behavior:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka bekerja sama menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
- Provide opportunities for various parties to contribute;
- Open to working together to produce added value;
- Mobilize the utilization of various resources for common goals.

Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Perseroan

Sepanjang tahun 2025, Perseroan secara konsisten melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya perusahaan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai inti "AKHLAK" di lingkungan kerja. Kegiatan ini tidak hanya ditujukan kepada seluruh pegawai, tetapi juga menyasar pihak eksternal sebagai bentuk promosi budaya organisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi dan internalisasi budaya dikoordinasikan oleh Divisi Budaya dan dirancang selaras dengan indikator kinerja utama (KPI) Perseroan terkait *Employee Well-Being*, yang mencakup empat aspek utama, yaitu: fisik, mental, sosial, dan finansial. Seluruh program dilaksanakan melalui kolaborasi lintas divisi guna menciptakan keterlibatan menyeluruh di berbagai lini organisasi.

Rincian kegiatan berdasarkan aspek *Employee Well-Being* adalah sebagai berikut:

1. Aspek Fisik:
   a. Senam Pagi Sehat
   b. Senam Bersama HUT IPCC ke-13
   c. Jalan Bersama & Jumat Bersih
   d. Jumat Bersih Mandiri (Program 5R)
2. Aspek Mental:
   a. Tausiyah Islam
   b. Buka Bersama Ramadhan 1446 H
   c. Halal Bihalal IPCC
   d. Program PRAQTIS (Belajar Al-Qur'an Sistematis) oleh Maziska IPCC
   e. Program PRAQTIS Bahasa Arab oleh Maziska IPCC
   f. Pemutaran Lagu Indonesia Raya di Lingkungan IPCC
3. Aspek Sosial:
   a. BREATH Session IPCC
   b. Donor Darah bersama PMI
   c. Pembagian Daging Kurban Idul Adha 2025
   d. #HSETalk
   e. Ramah Tamah HUT ke-13 IPCC
   f. Santunan untuk Anak Yatim
4. Aspek Finansial:
   a. Talkshow bersama Kiwoom Sekuritas
   b. Market Review IPCC
   c. Bennix Investor Summit 2025
   d. Public Expose IPCC 2025
   e. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Perseroan berharap nilai-nilai budaya kerja dapat tertanam secara mendalam dan menjadi landasan dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar Terakhir

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor 45 tanggal 18 Juli 2023, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-010146 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha kegiatan pelayanan kepelabuhan laut, yang

Socialization And Internalization Of Corporate Culture

Throughout 2025, the Company consistently carried out socialization and internalization of corporate culture as part of the efforts to strengthen the understanding and application of the core values of "AKHLAK" in the work environment. This activity is not only aimed at all employees, but also targets external parties as a form of promoting an inclusive and sustainable organizational culture.
Socialization and internalization activities of culture are coordinated by the Culture Division and are designed in line with the Company's key performance indicators (KPIs) related to Employee Well-Being, which cover four main aspects, namely: physical, mental, social, and financial. All programs are carried out through cross-divisional collaboration to create comprehensive involvement across various lines of the organization.

Details of activities based on Employee Well-Being aspects are as follows:

1. Physical Aspect:
   a. Healthy Morning Exercise
   b. Funwalk for IPCC's 13th Anniversary
   c. Joint Walk & Clean Friday
   d. Independent Clean Friday (5R Program)
2. Mental Aspect:
   a. Islamic Tausiyah
   b. Breaking Fast Together for Ramadhan 1446 H
   c. IPCC Halal Bihalal
   d. PRAQTIS Program (Systematic Al-Quran Learning) by Maziska IPCC
   e. PRAQTIS Program – Arabic by Maziska IPCC
   f. Playing the Indonesian Raya Song in IPCC Environment
3. Social Aspect:
   a. IPCC BREATH Session
   b. Blood Donation with PMI
   c. Distribution of Qurban Meat for Eid al-Adha 2025
   d. #HSETalk
   e. IPCC 13th Anniversary Gathering
   f. Donations for Orphans
4. Financial Aspect
   a. Talk show with Kiwoom Securities
   b. Market Review IPCC
   c. Bennix Investor Summit 2025
   d. 2025 IPCC Public Expose
   e. Through this series of activities, the Company hopes that the values of work culture can be deeply embedded and become the foundation for every action and decision- making at all levels of the organization.

Business Activities According to the Latest Articles of Association

Based on Article 3, paragraph 2, Deed of Articles of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. 45 dated July 18, 2023, executed before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., a notary in South Jakarta, and the notification of the amendment to its Articles of Association has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Number AHU-AH.01.03-010146 regarding the Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, the purposes and objectives

berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan mengutamakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.

of the Company are to carry out sea port service activities, which relate to water transportation for passengers, animals or goods, such as the operation of facilities terminals, for example ports and docks, navigation, inspection of cargo in cargo and/or containers by prioritizing sources of ionizing radiation (radioactive substances and ionizing radiation generators), shipping and berthing activities, mooring services, pilotage and towing services.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Pada Tahun Buku

Business Activities Carried Out in the Fiscal Year

Untuk mencapai maksud dan tujuan yang tertera pada Anggaran Dasar Perseroan tersebut, kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan pada tahun 2025 antara lain adalah:

To achieve the purposes and objectives stated in the Company's Articles of Association, the business activities carried out by the Company in 2025 include:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on the Articles of Association	**Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pada Tahun 2025** Information on Implementation of Business Activities in 2025	
	Sudah Already	**Belum Not yet**
Kegiatan Usaha Utama Core Business Activities		
Menjalankan kegiatan usaha penyediaan dan /atau pelayanan usaha bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring, cargodoring,* serta *receiving/delivery* atas kendaraan, alat berat dan suku cadang, termasuk namun tidak terbatas mendirikan/menjalankan anak perusahaan dan usaha lainnya yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha utama, Penyediaan clan pengembangan fasilitas pelabuhan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki IPCC untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait bidang usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yaitu sebagai berikut: Carrying out business activities of providing and/or loading and unloading business services to and from ships at the port which includes stevedoring, cargodoring, and receiving/delivery of vehicles, heavy equipment and spare parts, including but not limited to establishing/running subsidiaries and other businesses that has a direct or indirect relationship with the main business activities, Providing and developing port facilities and optimizing the use of resources owned by IPCC to produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness to obtain/ pursue profits to increase the value of the Company as long as appropriate and does not conflict with the provisions of applicable laws and regulations, especially regarding the maritime port services business sector, namely as follows:	✓	
Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; Provision and/or services of dock for mooring;	✓	
Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih; Provision and/or services of fuel filling and clean water services;	✓	
Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan; Provision and/or services of boarding and disembarking facilities for passengers and/or vehicles	✓	
Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas; Provision and/or services of dock for carrying out loading and unloading activities of goods and containers;		✗
Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; Providing and/or services of warehouse and goods storage, loading and unloading equipment and port equipment;	✓	
Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro; Provision and/or services of terminal for container, liquid bulk, dry bulk and ro-ro;	✓	
Penyediaan dan/atau jasa bongkar muat barang; Provision and/or services of loading and unloading for goods;	✓	
Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang. Provision and/or services for distribution centre and goods consolidation.	✓	
Kegiatan Usaha Penunjang/Pendukung Supporting Business Activities		
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yaitu Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal. To achieve the aforementioned purposes and objectives, the Company can carry out supporting business activities, namely the provision and/or service of ship towing services.		✗

Kegiatan Usaha
Business Activities



Produk dan/atau Jasa yang Dihasilkan

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Perseroan didukung oleh fasilitas-fasilitas bongkar muat kendaraan di terminal kendaraan milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero), antara lain:

1. Fasilitas Pokok
   a. Dermaga
   b. Total Lahan 31 Ha terdiri dari lapangan dan 5 Ha penumpukan dari gedung parkir
   c. *Gate In/Out*: 4 lines (Internasional) dan 3 lines (Domestik)
   d. *Car Carrier Loading/Unloading Area*
   e. *Warehouse*
   f. *Yard, Berth & Resource Planning System*
   g. *Central Inspection Facility*
   h. *Autogate System*
   i. *Integrated Planning and Control*

Products and/or Services

In carrying out operational activities, the Company is supported by vehicle loading and unloading facilities, including:

1. Main Facilities
   a. Berth
   b. Total Land Area of 31 Ha consisting of a field and 5 Ha of parking building storage
   c. Gate In/Out: 4 Lines (International) and 3 Line (Domestic)
   d. Car Carrier Loading/Unloading Area
   e. Warehouse
   f. Yard, Berth & Resource Planning System
   g. Central Inspection Facility
   h. Autogate System
   i. Integrated Planning and Control

2. Fasilitas Penunjang
   a. Gedung kantor
   b. Parkir Kendaraan Karyawan
   c. Sistem Informasi Layanan Operasional Berbasis IT (CARTOS)
   d. Sistem Informasi Layanan Operasional Berbasis IT (PTOS-C)
   e. *Car Wash*
   f. *Simulator Room*
   g. Dojo Room (Tempat pelatihan)
3. Peralatan
   a. Pokok: Tug Master 3 unit, Taxi Car 8 Unit, *forklift* 3 unit, *roll trailers* 4 unit
   b. Penunjang: *Shuttle Service* 3 Unit, *Yard Sweeper* 2 unit, *Road Sweeper* 1 unit *Fire Rescue* 1 Unit, *golf* car 3 unit

Adapun jasa dan layanan yang dihadirkan oleh Perseroan adalah:
1. Pelayanan Jasa Terminal
2. Pelayanan Jasa Barang
3. Pelayanan Rupa-rupa Usaha
4. Pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik.

Pelayanan Jasa Terminal

Pelayanan jasa terminal adalah pelayanan untuk kegiatan bongkar muat mobil, alat berat, truk/bus, motor dan general cargo yang sebagian besar merupakan part dari alat berat yang berstatus *Completely Knock Down* (CKD) maupun *Completely Build Unit* (CBU). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Terminal Internasional dan Terminal Domestik yang meliputi wilayah dermaga domestik Perseroan, dermaga eks. Presiden, dermaga 107–109, MKO Gresik area Pelabuhan Pontianak, Belawan, Medan, Makassar, Balikpapan dan Banjarmasin. Pelayanan jasa terminal meliputi:

1. ***Stevedoring***
   Stevedoring adalah pelayanan operasi pembongkaran atau pemuatan kargo dari kapal ke lapangan penumpukan/*last point* of rest sebaliknya baik di terminal Internasional maupun Domestik. Pelayanan *Stevedoring* ini dilakukan di dalam terminal dengan didukung oleh sistem yang terintegrasi.

2. ***Cargodoring***
   Cargodoring adalah pelayanan operasi pemindahan kargo dari *buffer* area ke area lapangan penumpukan/*last point of rest* atau sebaliknya dari *last point of rest ke buffer* area atau *load lane* (dibelakang *car carrier*) baik di terminal Internasional maupun Domestik. Pelayanan *cargodoring* ini dilakukan di dalam terminal dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki tersertifikasi.

3. ***Storage Area***
   Storage area adalah suatu area yang digunakan sebagai tempat penumpukan di dalam terminal sebelum *cargo* dimuat ke kapal atau setelah dibongkar dari kapal.

4. ***Receiving***
   Receiving adalah kegiatan penerimaan unit secara sistem PTOS-C dengan *Auto Gate System*, verifikasi dokumen oleh pihak Bea Cukai, supervisi kegiatan penurunan kargo/unit di *stall car carrier* oleh *driver*, pemeriksaan kargo di *Central Inspection Facilities* oleh LQ gate, pemberian *marking* pada setiap kargo sesuai negara tujuan dan kapal yang mengangkutnya.

2. Supporting Facilities
   a. Office Building
   b. Vehicle Parking for Employee
   c. IT-Based Operational Service Information System (CARTOS)
   d. IT-Based Operational Service Information System (PTOS-C)
   e. Car Wash
   f. Simulator Room
   g. Dojo Room (Training Hall)
3. Equipment
   a. Main: Tug Master 3 Units, Taxi Car 8 Units, forklift 3 units, roll trailers 4 units
   b. Supporting: Shuttle Service 3 Units, Yard Sweeper 2 Units, Road Sweeper 1 units, Fire Rescue 1 Unit, golf car 3 units

The services provided by the Company are:
1. Terminal Services
2. Cargo Services
3. Miscellaneous Services
4. Land, Building, Water, and Electricity Services

Terminal Services

Terminal services are services for loading and unloading of cars, heavy equipment, trucks/buses, motorcycles and general cargo, most of which are parts of heavy equipment with Completely Knock Down (CKD) status or Completely Built Unit (CBU). These activities are carried out at the International Terminal and Domestic Terminal which includes the Company's domestic dock area, ex-President pier, port 107–109 Tanjung Priok, MKO Gresik, RORO Terminal Area and Car Terminal in Pontianak, Belawan, Medan, Makassar and, Balikpapan and Banjarmasin Port areas. Terminal services include:

1. **Stevedoring**
   Stevedoring is an operational service for unloading or loading cargo from ships to the stacking yard/last point of rest or vice versa at both international and domestic terminals. Stevedoring services are carried out in the terminal and are supported by an integrated system.

2. **Cargodoring**
   Cargodoring is an operational service for moving cargo from buffer area to the stacking field area/last point of rest or vice versa from the last point of rest to the buffer area or load lane (behind the car carrier) at both international and domestic terminals. This cargodoring service is carried out in the terminal and is supported by certified Human Capital.

3. **Storage Area**
   Storage Area is an area used as a stacking area within a terminal before cargo is loaded onto a ship or after being unloaded from a ship.

4. **Receiving**
   Receiving is the activity of receiving units using the PTOS-C system with the Auto Gate System, document verification by Customs, supervision of cargo/unit unloading activities at the car carrier stall by the driver, inspection of cargo at the Central Inspection Facilities by LQ gate, marking of each cargo according to destination country and the ship carrying it.

5. ***Delivery***
   Delivery adalah kegiatan pemindahan unit dari *last point of rest* ke *load line* dan pengecekan unitnya, supervisi proses pemuatan unit ke *car carrier* oleh *driver*, proses *thread* in unit ke sarana pengangkut di sistem PTOS-C, *print out* surat jalan dan *verified* kargo di sistem PTOS-C di saat *auto gate open* dan unit dinyatakan *left terminal*.

Pelayanan jasa *Receiving* dan *Delivery* IPCC memiliki keunggulan, antara lain:
1. Kargo di terminal dapat dilacak secara *real time*
2. Informasi kargo dapat diterima dari awal
3. Mengurangi biaya logistik
4. Semua aktivitas di IPCC diasuransikan
5. Terintegrasi dengan PTOS-C sehingga pengiriman informasi lebih cepat
6. Mempercepat *truck turn around time* di terminal sehingga meningkatkan numlah ritase *car carrier* dan pengiriman
7. IPCC membantu proses perizinan dengan Bea Cukai
8. IPCC membantu mencarikan pengangkutan untuk membawa kargo dari dan ke terminal

Pelayanan Jasa Barang

Pelayanan jasa barang, adalah pelayanan jasa bongkar muat mobil, motor, alat berat, truk, bus, dan *general cargo*. Barang tersebut didistribusikan melalui dermaga umum baik untuk keperluan ekspor maupun impor di Terminal Internasional untuk perdagangan luar negeri serta kegiatan bongkar dan muat di Terminal Domestik pada perdagangan dalam negeri.

Pelayanan Jasa Rupa-rupa Usaha

Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan, Perseroan juga memberikan Pelayanan rupa-rupa usaha atau *value added service* kepada produk yang ditangani oleh Perseroan. Terminal Kendaraan ini tidak hanya sekadar memuat dan menampung debit kendaraan, Perseroan juga menawarkan *finishing*, perbaikan dan layanan *retrofitting*, menginstal peralatan khusus individu atau perakitan akhir yang semuanya akan dikerjakan di Ruang VPC. Jasa tersebut dilaksanakan dalam rangka menyediakan *one stop service* di lingkungan pelabuhan. Berikut ini merupakan daftar atas jasa yang dilakukan Perseroan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan:
1. Perbaikan minor (menghilangkan goresan kecil dengan pemolesan/pengecatan)
2. *Fitting* Aksesoris (memasang aksesoris tambahan seperti kaca film, mudguard, talang air dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan-biasanya dilakukan untuk kargo impor)
3. Pencucian (mencuci mobil menggunakan *automatic car wash*)
4. Manajemen Suku Cadang (menyediakan gudang untuk penyimpanan suku cadang mobil)
5. *Marking dan Labelling* (memasang label pada kargo yang bertuliskan nomor rangka, nomor mesin dan tujuan kargo)
6. *Pre Delivery Inspection* (melakukan pengecekan interior dan eksterior kargo untuk mempertahankan kualitas sesuai dengan yang diinginkan *automaker*)
7. *Port Stock* (menyediakan lapangan penumpukan *nonbounded*–cargo yang belum memiliki surat)
8. PDC (*Pre Delivery Center*) merupakan layanan lapangan penumpukan kargo sebelum didistribusikan lewat darat

5. **Delivery**
   Delivery is activities of moving the unit from the last point of rest to load line and checking unit, supervising the process of loading the unit onto car carrier by driver, threading the unit to the means of transport using PTOS-C system, printing out waybill and verifying cargo in PTOS-C system at auto gate open and unit is declared left terminal.

IPCC Receiving and Delivery services has several advantages:

1. Cargo at the terminal can be tracked online
2. Cargo information can be received from the start
3. Reducing logistics costs
4. All activities in IPCC are insured
5. Integrated with PTOS-C system, hence information delivery is faster
6. Speed up the time to turn around, thereby increasing the number of car carrier and delivery routes
7. IPCC assists with the customs clearance process
8. IPCC helps find transport to carry cargo to and from the terminal.

Cargo Services

Cargo services are loading and unloading services for cars, motorcycles, heavy equipment, trucks, buses and general cargo. These cargos are distributed through public docks for both export and import purposes at the International Terminal for International Trade as well as loading and unloading activities at the Domestic Terminal for domestic trade.

Miscellaneous Services

To give the best service to customers, the Company also provides miscellaneous services or Value-Added Services for products handled by the Company. This Car Terminal does not just load and accommodate vehicle discharges, the Company also offers finishing, repair and retrofitting services, installing individual special equipment or final assembly which will all be done in the VPC (Vehicle Processing Center). This service is carried out in order to provide one stop service in the port environment. The following is a list of services provided by the Company to meet various customer needs:

1. Minor repairs (removing minor scratches by polishing/painting)
2. Fitting Accessories (installing additional accessories such as window film, mudguards, water gutters and others according to needs - usually done for imported cargo)
3. Washing (washing the car using an automatic car wash)
4. Spare Parts Management (providing a warehouse for storing car spare parts)
5. Marking and Labeling (putting a label on the cargo that says the frame number, engine number and destination of the cargo)
6. Pre Delivery Inspection (checking the interior and exterior of the cargo to maintain the quality as desired by the automaker)
7. Port Stock (provides a non-bounded storage yard – cargo that does not yet have documents)
8. PDC (Pre Delivery Center) merupakan layanan lapangan penumpukan kargo sebelum didistribusikan lewat darat

9. CDM (*Car Distribution Management*) merupakan layanan distribusi kendaraan menggunakan *car carrier*, towing, dan tansya

Pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik

Dalam rangka memanfaatkan aset yang dimiliki secara optimal, Perseroan melakukan jasa pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik berupa sewa ruangan kantor yang mencakup fasilitas air dan listrik.

Pasar yang Dilayani

Perdagangan Luar Negeri

Ekspor

9. CDM (Car Distribution Management) merupakan layanan distribusi kendaraan menggunakan car carrier, towing, dan tansya

Land, Buildings, Water and Electricity Services

In order to optimally utilize the assets owned, the Company provides land, building, water and electricity management services in the form of office space rental which includes water and electricity facilities.

Markets Served

International Trade

Export

Alur Ekspor
Export Flow



Penjelasan:

1. Proses pembuatan CBU (Completely Build Up) di perusahaan manufaktur.
2. Pengiriman CBU dari perusahaan manufaktur dengan menggunakan *car carrier* ke pelabuhan.
3. Proses pengurusan dokumen perizinan bea cukai barang dan administrasi oleh logistik kemudian dilakukan proses Re*ceiving/ Delivery* oleh Perseroan, Kargo masuk ke Pelabuhan dengan *car carrier*, kemudian kargo dioperasikan oleh Tenaga Kerja Perusahaan / *Forwarder* dari *car carrier* menuju lapangan penumpukan.
4. Kargo yang akan dimuat ke kapal dilakukan *quality check*, kemudian kargo dipindahkan ke lapangan penumpukan *(cargodoring)*
5. Proses pemuatan kargo ke kapal dilakukan oleh Tenaga Kerja Perseroan *(stevedoring).*

Explanation:

1. The process of making a CBU (Completely Built Up) in a manufacturing company.
2. Delivery of CBU from manufacturing companies using car carriers to the port.
3. The process of processing customs clearance documents for goods and administration by logistics is then carried out by Receiving/Delivery process by the Company, Cargo enters the Port by car carrier, then the cargo is operated by the Company's Workers/ Forwarders from the car carrier to stacking yard.
4. The cargo will be loaded need to be quality checked and the cargo will be moved to the port (cargodoring).
5. The process of loading cargo onto the ship is carried out by Company workers (stevedoring)

Impor

Import

Alur Impor
Import Flow



Penjelasan:

1. Proses bongkaran kargo kapal ke lapangan penumpukan/*last point of rest* sebaliknya baik di terminal Internasional maupun Domestik. Pelayanan *Stevedoring* ini dilakukan di dalam terminal dengan didukung oleh sistem yang terintegrasi.
2. Kemudian kargo dipindahkan oleh Tenaga Kerja Perusahaan dari lapangan penumpukan/*last point of rest* ke buffer area *(cargodoring)* khusus kargo impor.
3. Selanjutnya dilakukan inspeksi atas kondisi kargo oleh Tenaga Kerja Perusahaan.
4. Setelah itu dilakukan proses pembersihan/pencucian kargo oleh Perseroan (fasilitas ini adalah fasilitas penunjang dari Perseroan, pelayanan ini dapat difasilitasi sesuai permintaan pelanggan).
5. Pengurusan dokumen perizinan bea cukai barang dan administrasi oleh perusahaan logistik, kemudian dilakukan *Receiving/Delivery* oleh Perusahaan.
6. Proses pemuatan kargo ke *Car Carrier* dilakukan oleh Pekerja Perseroan *Trucking/Forwarder* dan dikirim ke *cargo owner/ receiver*.

Adapun barang yang dilayani Perseroan, yaitu mobil, alat berat, truk/ bus, dan *sparepart* dan motor.

Explanation:

1. The process of unloading ship cargo to the storage yard/last point of rest, whether at the international or domestic terminal. This stevedoring service is performed within the terminal and supported by an integrated system.
2. The cargo is then moved by the company's workforce from the storage yard/last point of rest to a dedicated buffer area (cargodoring) for imported cargo.
3. Next, an inspection of the condition of the cargo is carried out by the Company's workforce.
4. After that, the cargo cleaning/washing process is carried out by the Company (this facility is a supporting facility from the Company, This service can be facilitated according to customer requests).
5. Processing of customs clearance documents for goods and administration by the logistics company, then Receiving/ Delivery is carried out by the Company.
6. Process of loading cargo onto the Car Carrier is carried out by the Company's Workers/Forwarders and sent to the cargo owner/ receiver.

The goods served by the Company are cars, heavy equipment, trucks/ buses, spare parts, and motorcycles.

Perdagangan Dalam Negeri

Pelayanan yang diberikan di Domestik memiliki standar pelayanan yang sama dengan Pelayanan Internasional baik dari segi operasional atau administrasi. Namun, pada Pelayanan Domestik tidak diperlukan dokumen perizinan bea cukai sehingga pelayanan domestik memiliki arus perpindahan barang yang lebih cepat.

Setelah tiba di Perseroan dengan muatan kendaraan, dilaksanakan inspeksi truk untuk dilaksanakan serah terima kargo dari pengemudi truk ke Perseroan dengan didampingi oleh perwakilan dari pelayaran. Setelah kapal tiba, perusahaan bongkar muat/*driver* melaksanakan pemuatan diatas kapal. Setelah sampai di atas kapal, pihak kapal melaksanakan kegiatan *lashing*.

Pihak pelayaran mengajukan jadwal kedatangan kapal dan kargonya kepada perencanaan Perseroan. Lalu, perencanaan Perseroan menetapkan lokasi penumpukan dan waktu alokasi tambat kapal. Setelah kapal tiba di pelabuhan dilaksanakan pelayanan pandu dan tunda menuju dermaga Perseroan. Setelah kapal merapat, dilaksanakan pengikatan tali kapal ke *border* dermaga dan *ramp door* siap untuk dibuka.

1. Melaksanakan kegiatan pengiriman dokumen perencanaan kapal dan kargo 48 jam sebelum kapal tiba.
2. Melaksanakan kegiatan rapat kapal dan kargo.
3. Penetapan alokasi waktu tambat kapal dan penumpukan.

Keunggulan Jasa Layanan IPCC

1. *Quality of Service;*
2. *Competitive Price;*
3. *Landlord Terminal;*
4. *Comply with Regulations;*
5. *Exclusive Yard;*
6. *Modern Equipment;*
7. *Full Insurance Cover;*
8. *Concern to Safety.*

Dalam memberikan pelayanan jasa terminal dan jasa barang, Perseroan menyiapkan Tenaga Kerja yang profesional dan berpengalaman di bidangnya. Tenaga kerja yang disiapkan juga bersertifikasi dan memiliki produktivitas yang tinggi (250 unit/jam). untuk Terminal Internasional. Dalam menunjang aktivitas bongkar muat, Perseroan juga menyiapkan alat bantu penunjang dengan kualitas baik dan telah tersertifikasi. Selain itu, Perseroan memiliki sistem berbasis IT yaitu Pelindo *Terminal Operating System*-Car (PTOS-C) sebagai aplikasi terintegrasi yang berguna untuk menyimpan data kargo secara akurat ke dalam *database* perusahaan, pelayanan *billing, tracking and tracing* kargo secara *real time*.

Dalam menjalankan kerja sama usaha dengan pelanggan, Perseroan membuat perjanjian yang berisikan kontrak dengan pelanggan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang kerja sama yang terjadi antara Perseroan dengan pelanggan. Perjanjian tersebut berisi tentang ruang lingkup pekerjaan, Jangka Waktu Pelaksanaan Perjanjian, Hak dan Kewajiban, Tarif, Tata Cara Pembayaran, Asuransi dan hal-hal lainnya yang terkait tentang hubungan kerja sama antara Perseroan dan pelanggan. Adapun seandainya ada perubahan atau penambahan poin pada perjanjian, dapat dituangkan ke dalam *Addendum* perjanjian.

Domestic Trade

The services provided for Domestic have the same service standards as International Services both in terms of operations and administration. However, in Domestic Services, customs permit documents are not required so that domestic services have a faster flow of goods.

After arriving at the Company with vehicle load, the truck is inspected to hand over cargo from truck driver to the Company accompanied by a representative from shipping company. After the ship arrives, loading and unloading company/driver carries out loading on the ship. After arriving on the ship, the ship carries out lashing activities.

Shipping company submits arrival schedule of the ship and its cargo to the Company's planning company. Then, the Company's planning determines the storage location and allocation time for the ship's mooring. After the ship arrives at the port, a guide and tug service is carried out to the Company's dock. After the ship docks, the ship's rope is tied to the dock border and the ramp door is ready to be opened.

1. Carry out activities for sending ship planning documents and cargo 48 hours before the ship arrives.
2. Carry out ship and cargo meeting activities.
3. Determining the allocation of ship mooring and stacking times.

Advantages of IPCC Services Markets Served

1. Quality of Service;
2. Competitive Price;
3. Landlord Terminal;
4. Comply with Regulations;
5. Exclusive Yard;
6. Modern Equipment;
7. Full Insurance Cover;
8. Concern to Safety.

In providing terminal services and cargo services, the Company prepares workforce who are professional and experienced in their field. The workforce prepared is also certified and has high productivity (250 units/hour) for International Terminal. To support loading and unloading activities, the Company also prepares supporting tools of good quality and certification. Apart from that, the Company has an IT-based system, namely Pelindo Terminal Operating System-Car (PTOS-C) as an integrated application that is useful for storing cargo data accurately into the company database, billing services, tracking and tracing cargo in real time.

In carrying out business cooperation with customers, the Company enters into an agreement containing a contract with customer relating to applicable provisions regarding cooperation between the Company and customer. The agreement contains scope of work, period of implementation of agreement, rights and obligations, tariffs, payment procedures, insurance and other matters related to cooperative relationship between the Company and customers. If there are changes or additional points to the agreement, they can be included in Addendum to agreement.

Pengendalian Kualitas Layanan

Perseroan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggannya. Pelayanan tersebut akan senantiasa dijaga dan dikembangkan kualitasnya demi meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Beberapa pengendalian kualitas layanan yang dilakukan Perseroan antara lain dengan memastikan bahwa jasa pelayanan yang diberikan oleh Perseroan dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten, dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan terverifikasi oleh pelanggan.

Selain itu Perseroan juga menyediakan sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan bongkar muat, sehingga apabila dalam suatu waktu terdapat arus barang yang tinggi, tidak terjadi penumpukkan di lapangan ataupun di kapal. Kecepatan dalam membongkar muat barang juga dilakukan dengan standar kecepatan yang tinggi, yaitu 250 unit per jam. Guna menjamin pelayanan yang diberikan Perseroan sesuai dengan SLA/SLG, DBM Perencanaan dan Pengendalian pada IPCC Branch Jakarta mengarahkan, merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan, perencanaan dan pengendalian, kegiatan pelayanan mencakup *stevedoring, cargodoring, receiving/delivery, stacking cargo* baik Terminal Domestik maupun Terminal Internasional. Sedangkan pada Terminal Satelit, fungsi pengawasan dilakukan oleh Koordinator Terminal Satelit yang bertugas mengoordinasikan, mengelola, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelayanan operasional, laporan kinerja operasional dan *monitoring* pelayanan sesuai standar kinerja untuk mendukung tercapainya tujuan Perseroan serta aspirasi Pemegang Saham.

Di samping sumber daya manusia yang memadai, Perseroan juga terus melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap peralatan yang digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan sehari-hari. Untuk pemeliharaan, umumnya dilakukan secara berkala yang dilakukan oleh pihak ketiga. Selain itu, peralatan yang digunakan juga diuji kelayakannya secara berkala yang dilakukan oleh instansi pihak ketiga yang kompeten. Pengadaan atas peralatan tersebut juga dilakukan secara ketat, dengan memperhatikan kualitas dan keamanan dari peralatan tersebut.

Selain itu, sebagai upaya pengendalian kualitas layanan, Perseroan juga telah membangun jaring pengaman *(safety net)* untuk menahan debu atau partikel lainnya yang berpotensi menurunkan kualitas kendaraan di area lapangan penumpukan, sehingga kendaraan yang melalui pelabuhan Perseroan akan terjaga kualitasnya. Guna menunjang *monitoring* kegiatan operasional secara *real time*, telah dilengkapi dengan CCTV di seluruh area operasional dengan *monitoring* 24/7 yang dikontrol dari *Integrated Planning and Control Room.*

Service Quality Control

The Company is committed to providing the best service to its customers. The quality of these services will always be maintained and developed in order to increase customer satisfaction. Some of the service quality controls carried out by the Company include ensuring that services provided by the Company are carried out by competent Human Capital, with a certificate issued by Manpower Service and verified by customer.

Apart from that, the Company also provides sufficient Human Capital to carry out loading and unloading, so that if at any time there is a high flow of goods, there will be no build-up in field or on ship. Speed in loading and unloading goods is also carried out at a high-speed standard, namely 250 units per hour. In order to ensure the services provided by the Company are in accordance with the SLA/SLG, Planning and Control DBM at IPCC Jakarta Branch directs, formulates and coordinates implementation, planning and control activities, service activities include stevedoring, cargodoring, receiving/delivery, stacking cargo both at Domestic and International Terminal. While at Satellite Terminal, the supervisory function is carried out by Satellite Terminal Coordinator who is tasked with coordinating, managing, implementing and reporting operational service activities, operational performance reports and service monitoring according to performance standards to support the achievement of the Company's goals and the aspirations of Shareholders.

Besides adequate Human Capital, the Company also continues to supervise and maintain the equipment used for the Company's daily operational activities. Maintenance is generally carried out periodically by a third party. Apart from that, the equipment used is also periodically tested for suitability by competent third-party agencies. Procurement of this equipment is also carried out strictly, paying attention to the quality and safety of the equipment.

In addition, as an effort to control the quality of service, the Company has also built a safety net to hold dust or other particles that have potential to reduce the quality of vehicles in stacking yard area, so that vehicles passing through the Company's port will maintain their quality. In order to support real-time monitoring of operational activities, it has been equipped with CCTV in all operational areas with 24/7 monitoring controlled from Integrated Planning and Control Room.

Keanggotaan pada Asosiasi Industri
Membership in Industry Associations

Perseroan terus memperluas jaringan bisnis serta menjalin komunikasi yang lebih luas dengan berpartisipasi secara aktif sebagai anggota asosiasi dan organisasi serta diharapkan juga dapat meningkatkan kredibilitas Perseroan di industri sejenis. Keanggotaan dalam asosiasi dan organisasi ini juga menjadi bagian dari upaya pelibatan pemangku kepentingan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan operasional. Hingga tahun 2025, Perseroan telah tergabung dalam keanggotaan asosiasi industri, yakni sebagai berikut:

The Company continues to expand its business network and establish wider communication by actively participating as a member of associations and organizations and is also expected to increase the Company's credibility in similar industries. Membership in these associations and organizations is also part of the effort to involve stakeholders in resolving any problems faced in carrying out operational activities. Until 2025, the Company has joined the membership of the following industry associations:

Daftar Keanggotaan pada Asosiasi
Association Membership List

Nama Asosiasi Association Name	**Status**	**Lingkup Asosiasi** Association Scope
Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia DKI Jakarta Association of Indonesia Stevedoring and Unloading Companies DKI Jakarta	Anggota Aktif Active Member	Nasional National
Asosiasi Emiten Indonesia Association of Indonesia Issuers	Anggota Aktif Active Member	Nasional National

Wilayah Operasional
Operational Area

Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional Perseroan. Wilayah operasional IPCC hingga akhir tahun 2025 tercermin pada peta berikut ini:



1 Kantor Pusat:
Head Office

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Jalan Sindang Laut No. 100
Customer Care : +62 811933 9930
Tel. : +62 21 4394 2251
Web : www.indonesiacarterminal.co.id
Email : corsec@indonesiacarterminal.co.id /
komersial@indonesiacarterminal.co.id

2 Kantor Branch Jakarta
Office Branch Jakarta

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Jalan Sindang Laut No. 100
Customer Care : +62 811933 9930
Telp. : +62 21 4393 2251

3 Kantor Satelit Belawan
Belawan Satellite Office

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Pelabuhan Belawan | Belawan Port

Jalan Stasiun Kereta Api (Gedung Car Terminal),
Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara 20411
Tel. : +62 21 4394 2251

4 Kantor Satelit Pontianak
Pontianak Satellite Office

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Pelabuhan Pontianak | Pontianak Port

Jalan Pak Kasih No. 11, Pontianak Kota,
Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78112
Customer Care : (123) 456 - 7890
Tel. : +62 21 4393 2251

Operational area is the area or region where operational activities are carried out or the scope of the company's operational activities. IPCC operational area until the end of 2025 is illustrated in the following map:



5 Kantor Satelit Banjarmasin
Banjarmasin Satellite Office

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin | Trisakti Port, Banjarmasin

Jalan Barito Hilir No. 6,
Telaga Biru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Tel. : +62 21 4394 2251

6 Kantor Satelit Balikpapan
Balikpapan Satellite Office

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Pelabuhan Semayang, Balikpapan | Semayang Port, Balikpapan

Jl. Yos Sudarso No.30
Balikpapan, Kalimantan Timur
Tel. : +62 21 4394 2251

7 Kantor Satelit Makassar
Makassar Satellite Office

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Pelabuhan Makassar | Makassar Port

Jalan Makassar
Makassar, Sulawesi Selatan
Tel. : +62 21 4394 2251

8 Kantor Manajemen Kerjasama Operasi
Joint Operation Management Office

Kantor MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia
MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia Office

Jalan Beta Kawasan Industri Maspion V
Sukomulyo, Manyar Gresik - Jawa TImur
Tel. : +62 21 4394 2251

Struktur Organisasi Perusahaan
Organizational Structure of the Company

Struktur Organisasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk per 31 Desember 2025
Organizational Structure of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk as of December 31, 2025

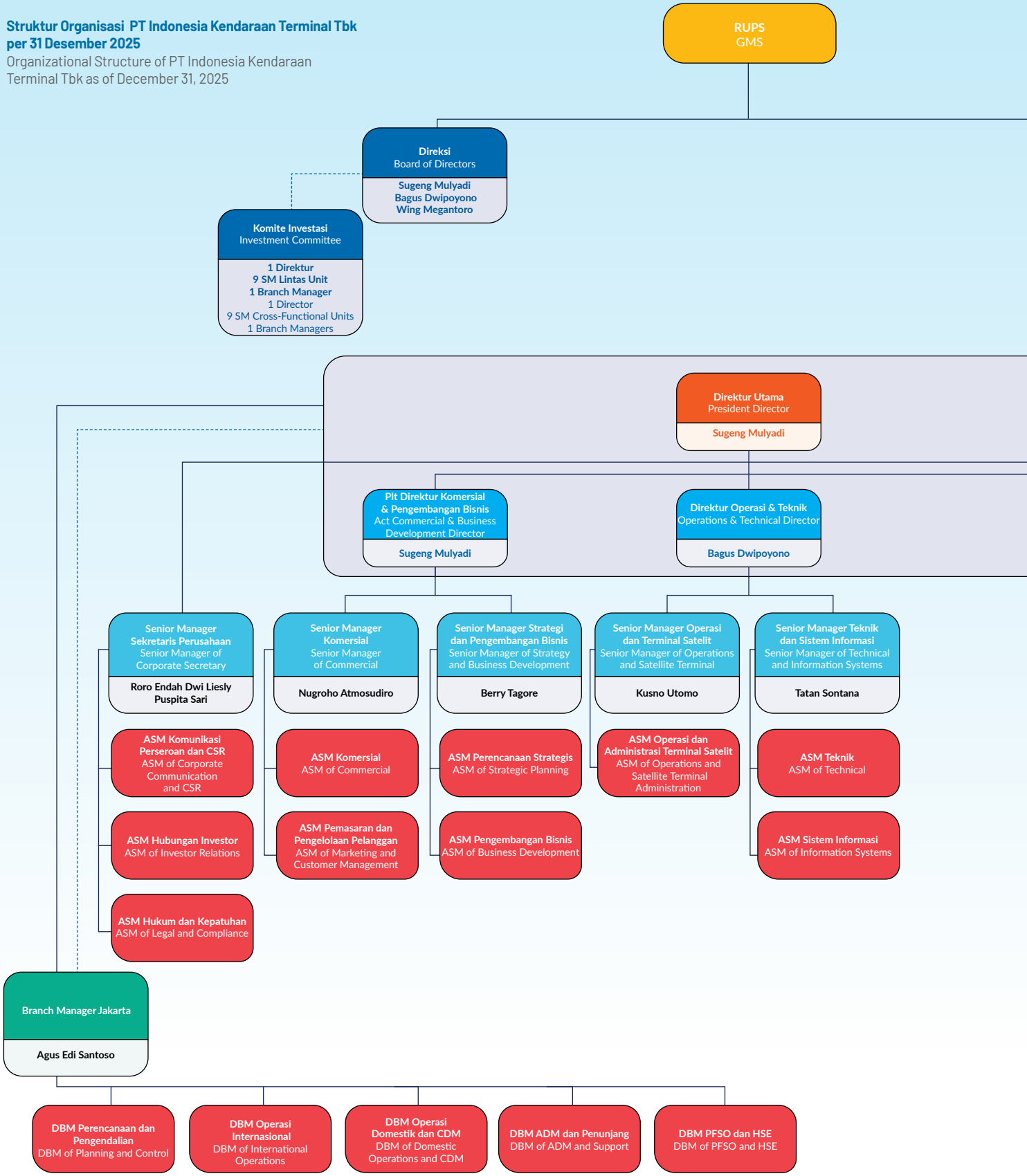

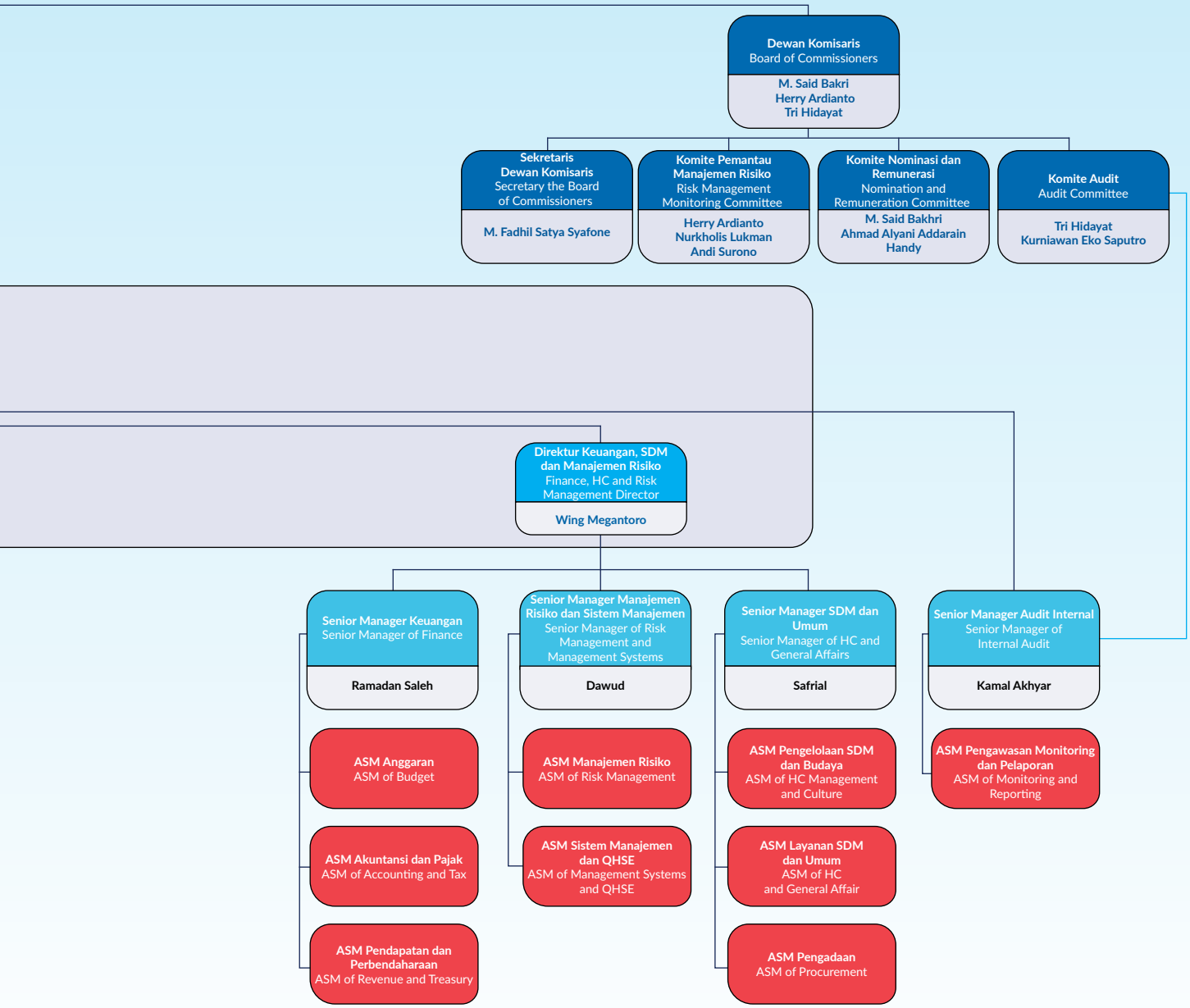

Garis Konfirmasi dan Penyampaian Informasi
Confirmation and Information Delivery Line

Garis Koordinasi dan Supervisi
Coordination and Supervision Line

Garis Koordinasi antara Komite Audit sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris dengan Audit Internal sebagai Organ Direksi
Coordination Line between the Audit Committee as a Supporting Organ of the Board of Commissioners and Internal Audit as an Organ of the Board of Directors

Profil Direksi
Board of Directors Profile





Sugeng Mulyadi

Direktur Utama merangkap Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
President Director and Acting Commercial and Business Development Director

Periode Jabatan | Term of Office

2025 - Penutupan RUPST 2030, Periode Kedua.

2025 - Closing of AGMS 2030, Second Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 53 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Jombang, 5 April 1972
Domisili: Jakarta, Indonesia

Indonesian citizen
53 years old as of December 31, 2025
Born in Jombang, April 5, 1972
Domicile: Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat sebagai Direktur Utama melalui Akta No. 42 tanggal 17 Juni 2025 dan merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan melalui Risalah Rapat Direksi No.SK.02/18/6/2/SKPR/DIRUT/IKT-25 tanggal 18 Juni 2025

Appointed as President Director pursuant to Deed No. 42 dated June 17, 2025, and concurrently serving as Acting Director of Commercial and Business Development of the Company pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. SK.02/18/6/2/SKPR/DIRUT/IKT-25 dated June 18, 2025

Riwayat Pendidikan | Educational Background

- Master of Shipping and Transport from Netherland Maritime University, Rotterdam-Netherlands (2013);
- Master of Finance from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia (2008);
- Bachelor of Economic Management from Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia (1996).

- Master of Shipping and Transport from Netherland Maritime University, Rotterdam-Netherlands (2013)
- Master of Finance from Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia (2008)
- Bachelor of Economic Management from Brawijaya University, Malang, Indonesia (1996)

Sertifikasi | Certification

- LKP Anshana Coaching Indonesia
- Certified Management Port Modern-UNCTAD
- Certified Risk Management Professional (CRMP)
- Certified Integrity Development Policy Expert
- Certified Risk Governance Professional (CRGP)

- LKP Anshana Coaching Indonesia
- Certified Management Port Modern-UNCTAD
- Certified Risk Management Professional (CRMP)
- Certified Integrity Development Policy Expert
- Certified Risk Governance Professional (CRGP)

Riwayat Pekerjaan | Work Experience

- Direktur Utama merangkap Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis (2023 - saat ini);
- Direktur PT Pelindo Investama (2020 – 2023);
- Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2018 – 2019);
- VP Keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2017 – 2018).

- President Director concurrently Acting Commercial and Business Development Director (2023-present)
- Director at PT Pelindo Investama (2020 – 2023)
- Finance and Human Capital Director at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2018 – 2019)
- VP of Finance at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2017 – 2018)

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

Di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
Di Lembaga/Perusahaan lain
Tidak ada

At PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Acting Commercial and Business Development Director
At other Institutions/Companies
None

Hubungan Afiliasi | Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Has no affiliation with either members of Board of Commissioners or other Board of Directors.

Kepemilikan Saham IPCC | IPCC Share Ownership

531.200 Lembar saham (0,029%)

531,200 Shares (0,029%)





Bagus Dwipoyono

Direktur Operasi dan Teknik
Director of Operations and Technical

Periode Jabatan | Term of Office

2025 - Penutupan RUPST 2030, Periode Kedua.

2025 - Closing of AGMS 2030, Second Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 53 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Surabaya, 21 Desember 1972
Domisili: Jakarta, Indonesia

Indonesian citizen
53 years old as of December 31, 2025
Born in Surabaya, December 21, 1972
Domicile: Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat sebagai Direktur Operasi dan Teknik Perseroan melalui Akta Nomor 42 tanggal 17 Juni 2025

Appointed as Director of Operations and Technical of the Company based on Deed Number 42 dated June 17, 2025

Riwayat Pendidikan | Educational Background

- Engineering Profession Program from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia (2020);
- Master of International Transport and Logistic from Shanghai Maritime University, China (2011);
- Master of Management from Sekolah Tinggi Manajemen IMMI, Jakarta (2002);
- Bachelor Industrial Engineering from Universitas Pasundan, Bandung (1996).

- Engineering Profession Program from University of Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia (2020)
- Master of International Transport and Logistic from University of Shanghai Maritime, China (2011)
- Master of Management from College of Management IMMI, Jakarta (2002)
- Bachelor Industrial Engineering from University of Pasundan, Bandung (1996)

Sertifikasi | Certification

- Qualified Risk Governance Professional (QRGP).
- Star Track Executive Development-Strategic Human Resources Leadership
- Certified Digital Marketing Specialist (CDMS)

- Qualified Risk Governance Professional (QRGP).
- Star Track Executive Development-Strategic Human Resources Leadership
- Certified Digital Marketing Specialist (CDMS)

Riwayat Pekerjaan | Work Experience

- Direktur Operasi dan Teknik PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2023 - saat ini);
- Direktur Utama PT Menara Maritim Indonesia (2018 - 2023);
- Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PT Terminal Petikemas Indonesia (2016-2018);
- Manajer Operasi Pendukung 1 PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015- 2016);
- ASM Pengembangan dan Pengendalian I PT PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Kantor Pusat (2012-2015).

- Operations and Technical Director at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2023 - present)
- President Director of PT Menara Maritim Indonesia (2018 - 2023)
- Commercial & Business Development Director of PT Terminal Petikemas Indonesia (2016-2018)
- Supporting Operations Manager 1 of PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2016)
- ASM Development and Control I of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Head Office (2012-2015)

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

Di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Tidak ada
Di Lembaga/Perusahaan lain
Tidak ada

At PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
None
At other Institutions/Companies
None

Hubungan Afiliasi | Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Has no affiliation with either members of Board of Commissioners or other Board of Directors.

Kepemilikan Saham IPCC | IPCC Share Ownership

316.500 Lembar saham (0,017%)

316,500 Shares (0.017%)





Wing Megantoro

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko
Director of Finance, HC and Risk Management

Periode Jabatan | Term of Office

2025 - Penutupan RUPST 2030, Periode Kedua.

2025 - Closing of AGMS 2030, First Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 53 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Semarang, 6 Juli 1972
Domisili: Jakarta, Indonesia

Indonesian citizen
53 years old as of December 31, 2025
Born in Semarang, July 6, 1972
Domicile: Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Perseroan melalui Akta Nomor 42 tanggal 17 Juni 2025

Appointed as Director of Finance, HC and Risk Management of the Company based on Deed Number 42 dated June 17, 2025

Riwayat Pendidikan | Educational Background

- Master of Business Administration from Kuhne Logistic University (2015);
- Bachelor of Accountancy from University of Jayabaya (1997).

- Master of Business Administration from University of Kuhne Logistic (2015)
- Bachelor of Accountancy from University of Jayabaya (1997)

Sertifikasi | Certification

- Qualified Risk Governance Professional (QRGP).
- Chartered Accountant

- Qualified Risk Governance Professional (QRGP).
- Chartered Accountant

Riwayat Pekerjaan | Work Experience

- Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2023 – saat ini);
- Regional Division Head Management Finance & Tax Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021 – 2023);
- SVP Manajemen Keuangan PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) (2019 – 2021);
- SVP Pengendalian & Perencanaan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) (2018 – 2019);
- VP Layanan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) (2016 – 2018).

- Director of Finance, HC and Risk Management at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2023-present)
- Regional Division Head Management Finance & Tax Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2021 - 2023
- SVP of Finance Management at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) 2019 – 2021
- SVP of Finance Control & Planning at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) 2018 – 2019
- VP of Finance Services at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) 2016 –2018

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

Di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Tidak ada
Di Lembaga/Perusahaan lain
Tidak ada

At PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
None
At other Institutions/Companies
None

Hubungan Afiliasi | Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Has no affiliation with either members of Board of Commissioners or other Board of Directors.

Kepemilikan Saham IPCC | IPCC Share Ownership

53.100 Lembar saham (0,003%)

53,100 Shares (0.003%)

Perubahan Komposisi Anggota Direksi serta Alasan Perubahannya

Hingga akhir tahun pelaporan 2025, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi keanggotaan Direksi Perseroan . Komposisi Direksi Perseroan terdiri dari 1(satu) orang Direktur Utama, dan 2 (dua) orang Direktur, sebagaimana didetailkan pada tabel berikut:

Changes In The Composition of Board of Directors and Reasons for the Changes

Until the end of 2025 reporting year, there were no changes in the composition and membership of the Company's Board of Directors. The composition of the Company's Board of Directors consists of 1 (one) President Director and 2 (two) Directors, as detailed in the following table:

Tabel Susunan dan Komposisi Direksi Per 31 Desember 2025
Structure and Composition of Board of Directors As of December 31, 2025

Nama Name	**Jabatan** Position	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Office Period	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama merangkap Plt Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director and Acting Commercial and Business Development Director	Juni 2025 – Penutupan RUPST 2030 June 2025 – Closing of AGMS 2030	Ke-2 2nd	Akta Nomor 42 tanggal 17 Juni 2025 Deed Number 42 dated June 17, 2025
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technical	Juni 2025 – Penutupan RUPST 2030 June 2025 – Closing of AGMS 2030	Ke-2 2nd	Akta Nomor 42 tanggal 17 Juni 2025 Deed Number 42 dated June 17, 2025
Wing Megantoro	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC and Risk Management	Juni 2025 – Penutupan RUPST 2030 June 2025 – Closing of AGMS 2030	Ke-2 2nd	Akta Nomor 42 tanggal 17 Juni 2025 Deed Number 42 dated June 17, 2025

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile





M. Said Bakhri

Komisaris Utama
President Commissioner

Periode Jabatan | Term of Office

17 Juni 2025 - Penutupan RUPST 2030, Periode Pertama.

June 25, 2025 - Closing of AGMS 2030, First Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 46 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Riau, 10 Desember 1979
Domisili: Jakarta, Indonesia

Indonesian Citizen
46 years old as of December 31, 2025
Born in Riau December 10, 1979
Domicile: Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan melalui Akta Nomor 42 tanggal 17 Juni 2025

Appointed as President Commissioner of the Company based on Deed Number 42 dated June 17, 2025

Riwayat Pendidikan | Educational Background

- Strata 3 Hukum di Universitas Jaya Baya (2025);
- Strata 2 Hukum di Jayabaya (2010-2012);
- Strata 1 Hukum di Jayabaya (1999-2003) dan Universitas Indonesia (2009-2010).

- Doctor of Law at University of Jayabaya (2025)
- Master of Law at University of University of Jayabaya (2010-2012)
- Bachelor of Law at University of Jayabaya (1999-2003) and University of Indonesia (2009-2010

Sertifikasi | Certification

Tidak ada

None

Riwayat Pekerjaan | Work Experience

- Komisaris Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2025- saat ini);
- Anggota Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya (2024-2025);
- Head Legal Corporate PT Jaga Nusantara (2013-2020).

- President Comissioners at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2025- present);
- Member of the Supervisory Board of Perumda Pasar Jaya (2024-2025);
- Head Legal Corporate of PT Jaga Nusantara (2013-2020)

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

Di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Tidak ada
Di Lembaga/Perusahaan lain
Tidak ada

At PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
None
At other Institutions/Companies
None

Hubungan Afiliasi | Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Has no affiliation with either members of Board of Commissioners or other Board of Directors.

Kepemilikan Saham IPCC | IPCC Share Ownership

Tidak memiliki saham di IPCC

None



Herry Ardianto

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode Jabatan | Term of Office

17 Juni 2025 - Penutupan RUPST 2030, Periode Pertama.

June 25, 2025 - Closing of AGMS 2030, First Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 58 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Jakarta, 31 Januari 1967
Domisili: Jakarta, Indonesia

Indonesian Citizen
58 years old as of December 31, 2025
Born in Jakarta January 31, 1967
Domicile: Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui Akta Nomor 42 tanggal 17 Juni 2025

Appointed as Independent Commissioner of the Company based on Deed Number 42 dated June 17, 2025

Riwayat Pendidikan | Educational Background

Strata 1 Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa (2010).

Bachelor of Economic at Pelita Bangsa College of Economics (2010)

Sertifikasi | Certification

Tidak ada

None

Riwayat Pekerjaan | Work Experience

- Komisaris Independen PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2025- saat ini);
- Direktur Operasi PT Target Persadajaya (1999-2010);
- Manager Operasi PT Target Transemesta (1991-2000).

- Independent Commissioner at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2025- present);
- Director of Operations of PT Target Persadajaya (1999-2010)
- Manager of Operations of PT Target Transemesta (1991-2000)

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

Di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Tidak ada
Di Lembaga/Perusahaan lain
Tidak ada

At PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
None
At other Institutions/Companies
None

Hubungan Afiliasi | Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Has no affiliation with either members of Board of Commissioners or other Board of Directors.

Kepemilikan Saham IPCC | IPCC Share Ownership

Tidak memiliki saham di IPCC

None





Tri Hidayat

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode Jabatan | Term of Office

17 Juni 2025 - Penutupan RUPST 2030, Periode Pertama.

June 17, 2025 - Closing of AGMS 2030, First Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 39 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Wonogiri, 17 Maret 1986
Domisili: Jakarta, Indonesia

Indonesian Citizen
39 years old as of December 31, 2025
Born in Wonogiri March 17, 2986
Domicile: Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui Akta Nomor 42 tanggal 17 Juni 2025

Appointed as Independent Commissioner based on Deed Number 42 dated June 17, 2025

Riwayat Pendidikan | Educational Background

- Strata 1 Sistem Informasi di Universitas Mercubuana Jakarta (2013).
- Diploma 3 Akademi Manajemen dan Informatika di Bina Sarana Informatika Jakarta (2010)

- Bachelor of Information Systems at University of Mercubuana Jakarta (2013)
- Associate Degree in Management and Information Technology at Bina Sarana Informatika Jakarta (2010)

Sertifikasi | Certification

Tidak ada

None

Riwayat Pekerjaan | Work Experience

- Komisaris Independen PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2025- saat ini);
- Tenaga Ahli Anggota DPR RI (2013-2025);
- Junior Officer Bank Danamon (2007-2008)

- Independent Commissioner at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2025- present);
- Expert Staff to a Member of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (2013–2025);
- Junior Officer Bank Danamon (2007-2008)

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

Di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Tidak ada
Di Lembaga/Perusahaan lain
Tidak ada

At PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
None
At other Institutions/Companies
None

Hubungan Afiliasi | Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Has no affiliation with either members of Board of Commissioners or other Board of Directors.

Kepemilikan Saham IPCC | IPCC Share Ownership

Tidak memiliki saham di IPCC

None





Drajat Sulistyo*

Komisaris Utama
President Commissioner

*) Berhenti menjabat per 17 Juni 2025
*) resign as of June 17, 2025

Periode Jabatan | Term of Office

2022 - Penutupan RUPST 2025, Periode Pertama.

2022 - Closing of AGMS 2025, First Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 46 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Purworejo 27 Oktober 1979
Domisili: Jakarta, Indonesia

Indonesian Citizen
46 years old as of December 31, 2025
Born in Purworejo October 27, 1979
Domicile: Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan melalui Akta Berita Acara RUPSLB No. 27 Tanggal 13 April 2022.

Appointed as President Commissioner of the Company based on Deed of Minutes of EGMS No. 27 April 13, 2022

Riwayat Pendidikan | Educational Background

- Master in Logistic dari Kuhne Logistic University (2014);
- Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Jakarta (2012);
- Diploma Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada (2002).

- Master in Logistic from University of Kuhne Logistic (2014)
- Bachelor of Civil Engineering from University of Jakarta (2012)
- Diploma in Civil Engineering from University of Gadjah Mada (2002)

Sertifikasi | Certification

BNSP SDM Level General Manager.

BNSP SDM Level General Manager

Riwayat Pekerjaan | Work Experience

- Komisaris Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal (2022-2025);
- Regional Head 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023 – Sekarang);
- Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020 – September 2021);
- General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Lampung (2020 – 2021);
- General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu (2016 – 2018).

- President Commissioner at PT Indonesia Kendaraan Terminal (2022-2025)
- Regional Head 2 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023 – Present)
- President Director at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020 – September 2021)
- General Manager t PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Panjang Lampung Branch (2020 – 2021).
- General Manager at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bengkulu Branch (2016 – 2018)

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

Di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Tidak ada
Di Lembaga/Perusahaan lain
Executive Directors Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

At PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
None
At other Institutions/Companies
Executive Directors Regional 2 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Hubungan Afiliasi | Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Has no affiliation with either members of Board of Commissioners or other Board of Directors.

Kepemilikan Saham IPCC | IPCC Share Ownership

Tidak memiliki saham di IPCC

None





Abdur Rahim Hasan*

Komisaris Independen
Independent Commissioner

*) Berhenti menjabat per 17 Juni 2025
*) resign as of June 17, 2025

Periode Jabatan | Term of Office

2020 - Penutupan RUPST 2025, Periode Pertama.

2020 - Closing of AGMS 2025, First Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 46 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Purbalingga 13 Januari 1979
Domisili: Jakarta, Indonesia

Indonesian Citizen
46 years old as of December 31, 2025
Born in Purbalingga January 13, 1979
Domicile: Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui Akta Notaris Nomor 48 tanggal 26 Agustus 2020.

Appointed as of Independent Commissioner of the Company based on Notarial Deed Number 48 dated August 26, 2020

Riwayat Pendidikan | Educational Background

Sarjana Hukum Universitas Azzahra Jakarta (2012).

Bachelor of Law, University of Azzahra, Jakarta (2012)

Sertifikasi | Certification

Qualified Risk Governance Professional (QRGP).

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Riwayat Pekerjaan | Work Experience

- Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020-2025);
- Dewan Komisaris PT JPPI (2019-2020);
- Komisaris Utama PT JPPI (2018-2019);
- Dewan Komisaris PT Madina Mitra Teknik (2014-2019);
- Dewan Komisaris PT JPPI (2014-2018);
- Dewan Komisaris PT Raja Tiga Sila (2014-2015);
- Dewan Komisaris PT Srandil Steel (2012-2014).

- Board of Commissioners at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020-2025)
- Board of Commissioners at PT JPPI (2019-2020)
- President Commissioner at PT JPPI (2018-2019)
- Board of Commissioners at PT Madina Mitra Teknik (2014-2019)
- Board of Commissioners at PT JPPI (2014-2018)
- Board of Commissioners at PT Raja Tiga Sila (2014-2015)
- Board of Commissioners at PT Srandil Steel (2012-2014)

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

Di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Tidak ada
Di Lembaga/Perusahaan lain
Tidak ada

At PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
None
At other Institutions/Companies
None

Hubungan Afiliasi | Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Has no affiliation with either members of Board of Commissioners or other Board of Directors.

Kepemilikan Saham IPCC | IPCC Share Ownership

Tidak memiliki saham di IPCC

None





LM. Arya Bima Yudiantara*

Komisaris Independen
Independent Commissioner

*) Berhenti menjabat per 17 Juni 2025
*) resign as of June 17, 2025

Periode Jabatan | Term of Office

2021 - Penutupan RUPST 2025, Periode Pertama

2021 - Closing of AGMS 2025, First Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 58 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Surakarta 19 Agustus 1967
Domisili: Jakarta, Indonesia

Indonesian Citizen
58 years old as of December 31, 2025
Born in Surakarta August 19, 1967
Domicile: Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: 27 tanggal 14 Juni 2021.

Appointed as of Independent Commissioner of the Company based on Minutes of Extraordinary GMS of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: 27 dated June 14, 2021.

Riwayat Pendidikan | Educational Background

Sarjana Hukum dari Universitas Atmajaya (1997).

Bachelor of Law, University of Atmajaya, (1997).

Sertifikasi | Certification

Qualified Risk Governance Professional (QRGP).

Qualified Risk Governance Professional (QRGP).

Riwayat Pekerjaan | Work Experience

- Dewan Komisaris PT Indonesia kendaraan Terminal Tbk (2021-2025)
- VP Marketing Project PT Gistec Prima (September 2014 – 2021);
- Manager Operasional PT Lumbung Mas (September 2009 – Juli 2014);
- Direktur PT Prada Yasa (September 2007 – Agustus 2009);
- HRD PT Ning Pacific Motor, PT Wallsin Lippo Cikarang, PT Lippo Land, PT KYMCO Group (1997 – 2007).

- Board of Commissioners at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020-2025)
- VP Marketing Project at PT Gistec Prima (September 2014 – 2021)
- Operational Manager at PT Lumbung Mas (September 2009 – July 2014)
- Director at PT Prada Yasa (September 2007 – August 2009)
- HRD at PT Ning Pacific Motor, PT Wallsin Lippo Cikarang, PT Lippo Land, PT KYMCO Group (1997 – 2007)

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

Di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Tidak ada
Di Lembaga/Perusahaan lain
Tidak ada

At PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
None
At other Institutions/Companies
None

Hubungan Afiliasi | Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Has no affiliation with either members of Board of Commissioners or other Board of Directors.

Kepemilikan Saham IPCC | IPCC Share Ownership

Tidak memiliki saham di IPCC

None

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris serta Alasan Perubahannya

Hingga akhir tahun 2025, komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan sebagai bagian dari upaya penyegaran dan penyesuaian kompetensi pengawasan sesuai dengan arah strategis Perseroan ke depan.

Changes in the Composition of Board of Commissioners and Reasons for the Changes

At the end of 2025, the composition of the Company's Board of Commissioners underwent changes as part of efforts to revitalize the board and align its oversight capabilities with the Company's future strategic direction.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan 2025

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan 2025 berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Composition and Legal Basis for Appointment of Board of Commissioners Prior to 2025 Annual GMS

The composition of Board of Commissioners prior to 2025 Annual GMS consisted of 3 (three) members, comprising 1 (one) President Commissioner and 2 (two) Independent Commissioners. The composition and legal basis for appointment of Board of Commissioners are presented in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan 2025
Composition and Legal Basis for Appointment of Board of Commissioners Prior to 2025 Annual GMS

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Office Period	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Drajat Sulistyo	Komisaris Utama President Commissioner	April 2022 – Penutupan RUPST 2025 April 2022 – Closing of AGMS 2025	Ke-1 1st	Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 27 Tanggal 13 April 2022 Deed of Minutes of Extraordinary GMS No. 27 Dated April 13, 2022
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Agustus 2020 – Penutupan RUPST 2025 August 2020 - Closing of AGMS 2025	Ke-1 1st	Akta Notaris Nomor: 48 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Notarial Deed Number: 48 dated August 26, 2020 concerning the Statement of Meeting Resolutions of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	Juni 2021 - Penutupan RUPST 2025 June 2021 - Closing of AGMS 2025	Ke-1 1st	Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: 27 tanggal 14 Juni 2021 Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: 27 dated June 14, 2021.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan 2025

Pada tanggal 17 Juni 2025, RUPS Tahunan 2025 memutuskan:
1. Memberhentikan dengan hormat Drajat Sulistyo sebagai Komisaris Utama;
2. Memberhentikan dengan hormat Abdur Rahim Hasan sebagai Komisaris Independen;
3. Memberhentikan dengan hormat LM. Arya Bima Yudiantara sebagai Komisaris Independen;
4. Mengangkat M. Said Bakhri sebagai Komisaris Utama;
5. Mengangkat Herry Ardianto sebagai Komisaris Independen;
6. Mengangkat Tri Hidayat sebagai Komisaris Independen.

Composition and Basis for Appointment of Board of Commissioners After 2025 Annual GMS

On June 17, 2025, 2025 Annual GMS resolved to:
1. Honorably dismiss Drajat Sulistyo as President Commissioner;
2. Honorably dismiss Abdur Rahim Hasan as Independent Commissioner;
3. Honorably dismiss LM. Arya Bima Yudiantara as Independent Commissioner;
4. Appoint M. Said Bakhri as President Commissioner;
5. Appoint Herry Ardianto as Independent Commissioner;
6. Appoint Tri Hidayat as Independent Commissioner.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan 2025
Composition and Basis for Appointment of Board of Commissioners After 2025 Annual GMS

Nama Name	**Jabatan** Position	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Office Period	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
M. Said Bakhri	Komisaris Utama President Commissioner	Juni 2025 – Penutupan RUPST 2030 June 2025- Closing of AGMS 2030	Ke-1 1st	Akta Nomor 42 tanggal 17 Juni 2025 Deed Number 42 dated June 17, 2025
Herry Ardianto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Juni 2025 – Penutupan RUPST 2030 June 2025- Closing of AGMS 2030	Ke-1 1st	Akta Nomor 42 tanggal 17 Juni 2025 Deed Number 42 dated June 17, 2025
Tri Hidayat	Komisaris Independen Independent Commissioner	Juni 2025 – Penutupan RUPST 2030 June 2025- Closing of AGMS 2030	Ke-1 1st	Akta Nomor 42 tanggal 17 Juni 2025 Deed Number 42 dated June 17, 2025

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG TERJADI SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR

Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS THAT OCCURRED AFTER THE END OF THE FISCAL YEAR

Until this Annual Report was published, there were no changes in the composition of Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officers Profile

Direktorat Utama
Main Directorate



Roro Endah Dwi Liesly Puspita Sari

Senior Manager Sekretaris Perusahaan
Senior Manager of Corporate Secretary

Menjabat sejak 31 Januari 2024 | Served since January 31, 2024

Kewarganegaraan **Citizenship**	Indonesia Indonesian
Usia **Age**	45 tahun per 31 Desember 2025 45 years old as of December 31, 2025
Domisili **Domicile**	Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan **Educational Background**	• S2 Maritime Economics and Logistics, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2014 • S1 Manajemen Universitas Gadjah Mada, 2004 • Master of Science in Maritime Economics and Logistics, Erasmus University Rotterdam, 2014 • Bachelor Degree in Management, Gadjah Mada University, 2004
Pengalaman Kerja **Work Experience**	• Senior Manager Sekretaris Perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2022- saat ini) • Senior Manager Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2022- Jan 2024) • Department Head Pemasaran Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2022) • Deputy Vice President Hubungan Pelanggan Non Peti Kemas PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2021) • Deputy Vice President Pelayanan Pelanggan PT Pelabuhan Tanjung Priok (2018-2019) • Asisten Manager Customer Service PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2018) • Asisten Manager Komersial & Pengembangan Bisnis Tanjung Priok (2014-2015) • Senior Manager of Corporate Secretary at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2022- Present) • Senior Manager of Strategy and Business Development at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2022- Jan 2024) • Head of Regional Marketing Department 2 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2022) • Deputy Vice President of Non-Container Customer Relations at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2021) • Deputy Vice President of Customer Service at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2018-2019) • Assistant Manager of Customer Service at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2018) • Assistant Manager of Commercial & Business Development of Tanjung Priok (2014-2015)
Dasar Hukum Pengangkatan **Legal Basis for Appointment**	Menjabat sebagai Senior Manager Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.KP.10.02/31/1/1/RKTK/SDMA/PLND-24 tanggal 31 Januari 2024 Served as Senior Manager Corporate Secretary based on the Decree of Board of Directors No. KP.10.02/31/1/1/RKTK/SDMA/PLND-24 dated January 31, 2024
Kepemilikan Saham IPCC **IPCC Share Ownership**	25.000 lembar saham 25,000 Shares



Kamal Akhyar

Senior Manager Audit Internal
Senior Manager of Internal Audit

Menjabat sejak 1 Januari 2023 | Served since January 1, 2023

Kewarganegaraan **Citizenship**	Indonesia Indonesian
Usia **Age**	50 tahun per 31 Desember 2025 50 years old as of December 31, 2025
Domisili **Domicile**	Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia North Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan **Educational Background**	• S1 Manajemen, Universitas Sumatera Utara, 1998 • S2 Sains, Universitas Sumatera Utara, 2005 • S2 Manajemen Transportasi, Universitas Trisakti, 2010 • Bachelor of Economics majoring in Management, University of North Sumatra, 1998 • Master of Science, University of North Sumatra, 2005 • Master of Transportation Management, University of Trisakti, 2010
Pengalaman Kerja **Work Experience**	• Senior Manager Audit Internal PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2022- saat ini) • Vice President Pengendalian Internal Supporting SPI pada Subholding Pelindo Multi Terminal (2021-2022) • Deputy Senior Vice President SPI Pengawasan SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020-2021) • Wakil Kepala Satuan Pengawasan Internal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2019-2020 • Pengawas Bidang Khusus pada Satuan Pengawasan Internal Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2016-2019) • Sekretaris Project Manajemen Office (PMO) Alur Pelayaran PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2014-2016) • Staf Bidang Project Manajemen Office (PMO) Pengelolaan Alur PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2014) • Senior Manager of Internal Audit at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2022- Present) • Vice President of Internal Control Supporting SPI at Pelindo Multi Terminal Subholding (2021-2022) • Deputy Senior Vice President SPI HR and General Supervision of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020-2021) • Deputy Head of the Internal Audit Unit of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2019-2020) • Supervisor of Special Fields in the Internal Supervision Unit of the Head Office of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2016-2019) • Secretary of the Project Management Office (PMO) of the Shipping Channel of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2014-2016) • Staff of Project Management Office (PMO) Alur Management of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2014)
Dasar Hukum Pengangkatan **Legal Basis for Appointment**	Menjabat sebagai Senior Manager Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/1/1/1/RKTK/SDMA//PLND-23 tanggal 1 Januari 2023 Served as Senior Manager of Internal Audit based on the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/1/1/1/RKTK/SDMA//PLND-23 dated January 1, 2023
Kepemilikan Saham IPCC **IPCC Share Ownership**	0 (Nol) Lembar saham 0 (Zero) Shares



Agus Edi Santoso

Branch Manager Jakarta
Branch Manager Jakarta

Menjabat sejak 1 Oktober 2025 | Served since October 1, 2025

Kewarganegaraan **Citizenship**	Indonesia Indonesian
Usia **Age**	53 tahun per 31 Desember 2025 53 years old as of December 31, 2025
Domisili **Domicile**	Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia North Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan **Educational Background**	• S2 Sains, World Maritime University 2006 • S1 Manajemen, Universitas Gadjah Mada, 1997 • Master of Science, World Maritime University, 2006 • Bachelor of Science in Management, Gadjah Mada University, 1997
Pengalaman Kerja **Work Experience**	• Branch Manager Jakarta PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Tanjung Priok (2025 – saat ini) • General Manager Sunda Kelapa Regional 2 – Cabang Sunda Kelapa (2023 – 2025) • Division Head Komersial Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (2021 – 2023) • Direktur Keuangan & Administrasi PT Akses Pelabuhan Indonesia (2019 – 2021) • General Manager Cabang Pelabuhan Palembang (2018 – 2019) • VP Komersial Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016 – 2018) • Senior Manager Marketing & Pentarifan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2015 – 2016) • Branch Manager, Jakarta Branch, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Tanjung Priok (2025 – present) • General Manager, Sunda Kelapa Regional 2 – Sunda Kelapa Branch (2023 – 2025) • Head of Commercial Division, Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (2021 – 2023) • Director of Finance & Administration, PT Akses Pelabuhan Indonesia (2019 – 2021) • General Manager, Palembang Port Branch (2018 – 2019) • Vice President of Commercial Affairs, Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016 – 2018) • Senior Manager of Marketing & Tariff Setting, Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2015 – 2016)
Dasar Hukum Pengangkatan **Legas Basis for Appointment**	Menjabat sebagai Senior Manager Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/1/10/3/RKTK/SDMA//PLND-25 tanggal 1 Oktober 2025 Served as Senior Manager of Internal Audit based on the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/1/10/3/RKTK/SDMA//PLND-25 dated October 1, 2025
Kepemilikan Saham IPCC **IPCC Share Ownership**	0 (Nol) Lembar saham 0 (Zero) Shares

Direktorat Komersial dan Pengembangan Bisnis
Commercial and Business Development Directorate



Nugroho Atmosudiro

Senior Manager Komersial
Senior Manager of Commercial

Menjabat sejak 1 Oktober 2021 | Served since October 1, 2021

Kewarganegaraan **Citizenship**	Indonesia Indonesian
Usia **Age**	41 tahun per 31 Desember 2025 41 years old as of December 31, 2025
Domisili **Domicile**	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan **Educational Background**	• S1 Ekonomi, Universitas Diponegoro, 2008 • S2 Transportasi dan Perkapalan, Netherlands Maritime University, 2014 • Bachelor degree in Economics, University of Diponegoro, 2008 • Master degree in Shipping and Transport, University of Netherlands Maritime, 2014
Pengalaman Kerja **Work Experience**	• Senior Manager Komersial PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2021- saat ini) • Deputy General Manager Komersial Cabang Pelabuhan Panjang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021) • Asisten Senior Manager Pengembangan Bisnis Pendukung PT IPC Terminal Petikemas (2018-2020) • Asisten Manager Lini II PT Pelabuhan Tanjung Priok (2014-2018) • Senior Manager of Commercial at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2021- Present) • Deputy General Manager Komersial Cabang Pelabuhan Panjang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021) • Asisten Senior Manager Pengembangan Bisnis Pendukung PT IPC Terminal Petikemas (2018-2020) • Asisten Manager Lini II PT Pelabuhan Tanjung Priok (2014-2018)
Dasar Hukum Pengangkatan **Legal Basis for Appointment**	Menjabat sebagai Senior Manager Komersial berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.10.02/1/1/1/RKTK/SDMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 Served as Senior Manager of Commercial based on Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. 10.02/1/1/1/RKTK/SDMA/PLND-21 dated October 1, 2021
Kepemilikan Saham IPCC **IPCC Share Ownership**	0 (Nol) Lembar saham 0 (Zero) Shares

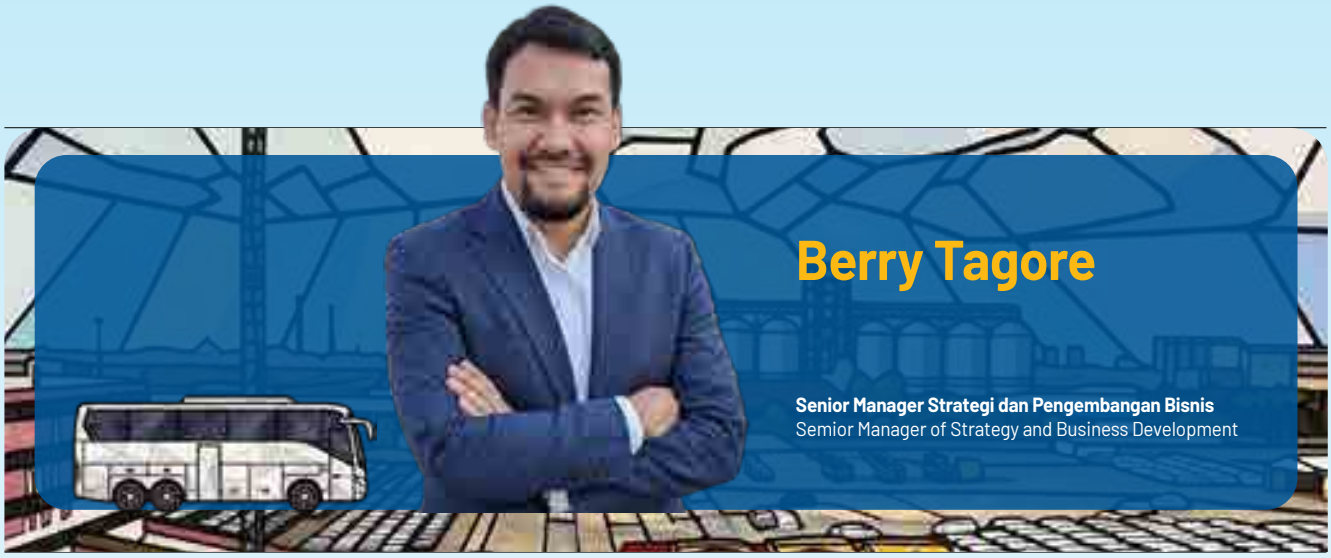

Berry Tagore

Senior Manager Strategi dan Pengembangan Bisnis
Semior Manager of Strategy and Business Development

Menjabat Menjabat sejak 31 Januari 2024 | Served since January 31, 2024

Kewarganegaraan **Citizenship**	Indonesia Indonesian
Usia **Age**	43 tahun per 31 Desember 2025 43 years old as of December 31, 2025
Domisili **Domicile**	DKI Jakarta, Indonesia DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan **Educational Background**	• S1 Manajemen, Universitas Mercubuana, 2007 • S2 Logistik dan Kepemimpinan, Kuhne Logistics University, 2017 • Bachelor of Management, University of Mercubuana, 2007 • Master of Logistic and Leadership, University of Kuhne Logistic, 2017
Pengalaman Kerja **Work Experience**	• Senior Manager Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2024 – saat ini) • Manager Pengusahaan Properti Kantor Pusat (2022 - 2024) • Manager Pengusahaan Properti Regional 2 (2021 - 2022) • Assistant DGM Properti Cabang Pelabuhan Tanjung Priok Regional 2 (2021 - 2021) • Senior Manager of Strategy and Business Development at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2024 - present) • Head Office Property Business Manager (2022 - 2024) • Regional Property Business Manager 2 (2021 - 2022) • Assistant DGM Property Branch of Tanjung Priok Port Regional 2 (2021 - 2021)
Dasar Hukum Pengangkatan **Legal Basis of Appointment**	Menjabat sebagai Senior Manager Strategi dan Pengembangan Bisnis berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.10.02/31/1/1/RKTK/SDMA/PLND-24 tanggal 31 Januari 2024 Served as Senior Manager of Strategy and Business Development based on Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. 10.02/31/1/1/RKTK/SDMA/PLND-24 dated January 31, 2024
Kepemilikan Saham IPCC **IPCC Share Ownership**	0 (Nol) Lembar saham 0 (Zero) Shares

Direktorat Operasi dan Teknik
Operations and Technical Directorate



Tatan Sontana

Senior Manager Teknik dan Sistem Informasi
Senior Manager of Technical and SI

Menjabat sejak 28 November 2022 | Served since November 28, 2022

Kewarganegaraan **Citizenship**	Indonesia Indonesia
Usia **Age**	54 tahun per 31 Desember 2025 54 years old as of December 31, 2025
Domisili **Domicile**	Bogor, Jawa Barat, Indonesia Bogor, East Java, Indonesia
Riwayat Pendidikan **Educational Background**	S1 Universitas Persada Indonesia YAI, 2001 Bachelor Degree, University of Persada Indonesia YAI, 2001
Pengalaman Kerja **Work Experience**	• Senior Manager Teknik dan Sistem Informasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020- saat ini) • Project Manager Kantor Pusat (2020) • Senior Manager Sistem Informasi IPC Terminal Petikemas (2017) • Manager Sistem Informasi IPC Terminal Petikemas (2016) • Strategi Bisnis & Manajemen Informasi Kantor Pusat (2014 – 2015) • Senior Manager of Technical and SI at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2021- Present) • Head Office Project Manager (2020) • Senior Manager of Information System at IPC Terminal Petikemas (2017) • Manager of Information System at IPC Terminal Petikemas (2016) • Head Office Business Strategy & Information Management (2014 – 2015)
Dasar Hukum Pengangkatan **Legal Basis of Appointment**	Menjabat sebagai Senior Manager Teknik dan Sistem Informasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.KP.10.02/28/11/6/RKTK/SDMA/PLND-22 tanggal 28 November 2022 Served as Senior Manager of Engineering and Information Systems based on Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/28/11/6/RKTK/SDMA/PLND-22 dated November 28, 2022
Kepemilikan Saham IPCC **IPCC Share Ownership**	0 (Nol) Lembar saham 0 (Zero) Shares



Kusno Utomo

Senior Manager Operasi dan Terminal Satelit
Senior Manager of Operations and Satellite Terminals

Menjabat sejak 1 Oktober 2021 | Served since October 1, 2021

Kewarganegaraan **Citizenship**	Indonesia Indonesian
Usia **Age**	55 tahun per 31 Desember 2025 55 years old as of december 31, 2025
Domisili **Domicile**	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Riwayat Pendidikan **Educational Background**	S1 Universitas Jember, 1995 Bachelor Degree, University of Jember 1995
Pengalaman Kerja **Work Experience**	• Senior Manager Operasi dan Terminal Satelit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2021- saat ini) • Senior Manager Terminal Satelit (2021) • VP Terminal Domestik PT Indonesia Kendaraan Terminal (2017) • Senior Manager of Operations and Satellite Terminals at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2024 - present) • Senior Manager of Satellite Terminal (2021) • VP Domestic Terminal at PT Indonesia Kendaraan Terminal (2017)
Dasar Hukum Pengangkatan **Legal Basis of Appointment**	Menjabat sebagai Senior Manager Operasi dan Terminal Satelit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 Served as Senior Manager of Operations and Satellite Terminal based on Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021
Kepemilikan Saham IPCC **IPCC Share Ownership**	0 (Nol) Lembar saham 0 (Zero) Shares

Direktorat Keuangan dan SDM
Finance and HC Directorate



Ramadan Saleh

Senior Manager Keuangan
Senior Manager of Finance

Menjabat sejak 1 Maret 2025 | Served since March 1, 2025

Kewarganegaraan **Citizenship**	Indonesia Indonesian
Usia **Age**	49 tahun per 31 Desember 2025 49 years old as of December 31, 2025
Domisili **Domicile**	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Riwayat Pendidikan **Educational Background**	• S2 Manajemen Keuangan Universitas Bandar Lampung, 2014 • S1 Akuntansi Universitas Lampung, 2006 • Master of Science in Financial Management, Bandar Lampung University, 2014 • Bachelor of Science in Accounting, Lampung University, 2006
Pengalaman Kerja **Work Experience**	• Senior Manager Keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2025-saat ini) • Senior Manager Keuangan dan Manajemen Risiko PT IPC Terminal Petikemas (2022-2025) • Senior Manager Keuangan PT IPC Terminal Petikemas (2021-2022) • Deputy General Manager Keuangan & Sumber Daya Manusia Cabang Pelabuhan Palembang (2020-2021) • Deputy General Manager Keuangan & Sumber Daya Manusia Cabang Pelabuhan Teluk Bayur (2018-2020) • Asisten Manajer Anggaran & Akuntansi PT Pelabuhan Tanjung Priok (2017-2018) • Asisten Manajer Anggaran & Akuntansi Cabang Pelabuhan Panjang (2012-2016) • Senior Finance Manager at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2025–present) • Senior Finance and Risk Management Manager at PT IPC Terminal Petikemas (2022–2025) • Senior Finance Manager at PT IPC Terminal Petikemas (2021–2022) • Deputy General Manager of Finance & Human Resources, Palembang Port Branch (2020–2021) • Deputy General Manager of Finance & Human Resources, Teluk Bayur Port Branch (2018–2020) • Assistant Manager of Budgeting & Accounting at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2017–2018) • Assistant Manager of Budgeting & Accounting at the Panjang Port Branch (2012–2016)
Dasar Hukum Pengangkatan **Legal Basis of Appointment**	Menjabat sebagai Senior Manager Operasi dan Terminal Satelit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.KP.10.02/1/3/1/SDMA/UTMA/PLND-25 tanggal 1 Maret 2025 Served as Senior Manager of Operations and Satellite Terminal based on Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.KP.10.01/1/3/1/SDMA/UTMA/PLND-25 dated March 1, 2025
Kepemilikan Saham IPCC **IPCC Share Ownership**	0 (Nol) Lembar saham 0 (Zero) Shares



Safrial

Senior Manager SDM dan Umum
Senior Manager of HC and General Affairs

Menjabat sejak 1 Januari 2023 | Served since January 1, 2023

Kewarganegaraan **Citizenship**	Indonesia Indonesian
Usia **Age**	55 tahun per 31 Desember 2025 55 years old as of December 31, 2025
Domisili **Domicile**	Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia North Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan **Educational Background**	• S1 Teknik dan Manajemen Industri, Universitas Sumatera Utara, 1998 • S2 Universitas Gadjah Mada, 2013 • Bachelor of Industrial Engineering & Management, University of North Sumatra, 1998 • Master of Science, University of Gadjah Mada, 2013
Pengalaman Kerja **Work Experience**	• Senior Manager SDM dan Umum PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2021- saat ini) • Senior Vice President Kerjasama Usaha dan Pembinaan Perusahaan pada divisi Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan-Direktorat Strategi dan Komersial (2021-2022) • SVP Pengadaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)(2019-2021) • Senior Manager Pembinaan Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)(2018-2019) • Senior Manager Perencanaan & Pengembangan Usaha pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)(2013-2018) • Senior Manager of HC and General Affairs at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2024 - present) • Senior Vice President of Business Cooperation and Corporate Development in the Business Cooperation and Subsidiary Development Division-Directorate of Strategy and Commercial (2021-2022) • SVP Procurement of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)(2019-2021) • Senior Manager of Subsidiary Development of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)(2018-2019) • Senior Manager of Business Planning & Development at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)(2013-2018)
Dasar Hukum Pengangkatan **Legal Basis of Appointment**	Menjabat sebagai Senior Manager SDM dan Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.KP.10.02/1/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 tanggal 1 Januari 2023 Served as Senior Manager of HC and General Affairs based on the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/1/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 dated January 1, 2023
Kepemilikan Saham IPCC **IPCC Share Ownership**	0 (Nol) Lembar saham 0 (Zero) Shares



Dawud

Senior Manager Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen
Senior Manager of Risk Management and Management System

Menjabat sejak 1 Agustus 2024 | Served since August 1, 2024

Kewarganegaraan **Citizenship**	Indonesia Indonesian
Usia **Age**	50 tahun per 31 Desember 2025 50 years old as of December 31, 2025
Domisili **Domicile**	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan **Educational Background**	S1 Hukum, Universitas Jakarta,2008 Bachelor of Law, University of Jakarta (2008)
Pengalaman Kerja **Work Experience**	• Plt. Senior Manager Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2024 - saat ini) • Deputy Branch Manager PFSO dan HSE PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2024 - 2024) • Asisten Senior Manager PFSO PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2022 - 2024) • Asisten Senior Manager PFSO Regional 2 PT IKT (2021 - 2022) • Acting Senior Manager of Risk Management and Management System PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2024 - present) • Deputy Branch Manager of PFSO and HSE PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2024 - 2024) • Assistant Senior Manager of PFSO PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2022 - 2024) • Assistant Senior Manager of PFSO Regional 2 PT IKT (2021 - 2022)
Dasar Hukum Pengangkatan **Legal Basis of Appointment**	Menjabat sebagai Senior Manager Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.KP.10.05/1/8/3//RKTK/SDMA/PLND-24 tanggal 1 Agustus 2024 Served as Senior Manager of Risk Management and Management Systems based on the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.05/1/8/3//RKTK/SDMA/PLND-24 dated August 1, 2024
Kepemilikan Saham IPCC **IPCC Share Ownership**	0 (Nol) Lembar saham 0 (Zero) Shares

Demografi Karyawan
Employee Demographics

Per 31 Desember 2025, jumlah pegawai Perseroan mencapai 445 orang pegawai, mengalami peningkatan sebanyak 6,46% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 418 orang pegawai. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya pengalihan operasi Trisakti Banjarmasin.

Berikut data demografi karyawan IPCC per 31 Desember 2025 dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya.

As of December 31, 2025, total employees of the Company's reached 445 employees, an increase of 6.46% from previous year which amounted to 435 employees. This increase was due to the transfer of Trisakti Banjarmasin operations.

The following is IPCC employee demographics data as of December 31, 2025, and a comparison with the previous year.

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan (Orang)
Number and Composition of Employees by Employment Status (People)

Status Status	2025				2024				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (people)	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (people)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Amount (people)	Persentase Percentage (%)	
Organik Organic	75	10	85	19,10%	68	10	78	18,66%	7	8,97%	↑
Kontrak Contract	1	1	2	0,45%	2	-	2	0,48%	-	0,00%	-
Alih Daya Outsourcing	341	17	358	80,45%	324	14	338	80,86%	20	5,92%	↑
Jumlah Total	**417**	**28**	**445**	**100,00%**	**394**	**24**	**418**	**100,00%**	**27**	**6,46%**	↑

L=Laki-laki; P=Perempuan
M=Male, F= Female

Jumlah dan Komposisi Karyawan Organik Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang)
Number and Composition of Organic Employees by Education Level (People)

Pendidikan Education	2025				2024				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (people)	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (people)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Amount (people)	Persentase Percentage (%)	
S3 – Doktor Doctorate	-	-	-	-	1	-	1	1.28	(1)	(100,00%)	-
S2 – Pascasarjana Postgraduate	12	1	13	15,29%	11	2	13	16.67	-	0,00%	-
S1 – Sarjana Bachelor	34	9	43	50,59%	29	8	37	47.44	6	16,22%	↑
Diploma	6	-	6	7,06%	7	-	7	8.97	(1)	(14,29%)	↓
SLTA dan SLTP Senior High School and Junior High School	23	-	23	27,06%	20	-	20	25.64	3	15,00%	↑
Jumlah Total	**75**	**10**	**85**	**100,00%**	**68**	**10**	**78**	**100,00%**	**7**	**8,97%**	↑

L=Laki-laki; P=Perempuan
M=Male, F= Female

Jumlah dan Komposisi Karyawan Organik Berdasarkan Usia (Orang)
Number and Composition of Organic Employees by Age (People)

Rentang Usia Age Range	2025				2024				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (people)	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (people)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Amount (people)	Persentase Percentage (%)	
>55 tahun >55 years old	1	-	1	1,18%	-	-	-	-	1	100,00%	↑
51-55 tahun 51-55 years old	17	1	18	21,18%	13	1	14	17,95%	4	28,57%	↑
47-50 tahun 47-50 years old	11	-	11	12,94%	9	-	9	11,54%	2	22,22%	↑
37-46 tahun 37-46 years old	37	3	40	47,06%	36	3	39	50,00%	1	2,56%	↑
26-36 tahun 26-36 years old	9	6	15	17,65%	-	6	16	7,69%	(1)	(6,25%)	↓
<26 tahun <26 years old	-	-	-	-	10	-	10	12,82%	(10)	(100,00%)	↓
Jumlah Total	**75**	**10**	**85**	**100,00%**	**68**	**10**	**78**	**100,00%**	**7**	**8,97%**	↑

L=Laki-laki; P=Perempuan
M=Male, F= Female

Jumlah dan Komposisi Karyawan Organik Berdasarkan Kelas Jabatan
Number and Composition of Organic Employees Based on Job Class

Golongan Grade	2025				2024				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (people)	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (people)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Amount (people)	Persentase Percentage (%)	
22	2	-	2	2,35%	-	-	-	-	2	100,00%	↑
21	3	-	3	3,53%	2	-	2	2,56%	1	50,00%	↑
20	4	1	5	5,88%	3	-	3	3,85%	2	66,67%	↑
19	4	-	4	4,71%	-	-	-	-	4	100,00%	↑
17	5	3	8	9,41%	5	1	6	7,69%	2	33,33%	↑
16	11	4	15	17,65%	3	-	3	3,85%	12	400,00%	↑
15	3	0	3	3,53%	9	5	14	17,95%	(11)	(78,57%)	↓
14	5	1	6	7,06%	10	2	12	15,38%	(6)	(50,00%)	↓
13	2	0	2	2,35%	4	1	5	6,41%	(3)	(60,00%)	↓
12	3	0	3	3,53%	2	-	2	2,56%	1	50,00%	↑
11	3	1	4	4,71%	4	1	5	6,41%	(1)	(20,00%)	↓
10	15	0	15	17,65%	13	-	13	16,67%	2	15,38%	↑
9	12	0	12	14,12%	10	-	10	12,82%	2	20,00%	↑
8	2	0	2	2,35%	2	-	2	2,56%	0	0,00%	-
6	1	0	1	1,18%	1	-	1	1,28%	0	0,00%	-
Jumlah Total	**65**	**10**	**85**	**100,00%**	**68**	**10**	**78**	**100,00%**	**7**	**8,97%**	↑

L=Laki-laki; P=Perempuan
M=Male, F= Female

Jumlah dan Komposisi Karyawan Organik Berdasarkan Unit Kerja (Orang)
Number and Composition of Organic Employees by Work Unit (People)

Unit Kerja Work Unit	2025				2024				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (people)	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (people)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Amount (people)	Persentase Percentage (%)	
Direksi Board of Directors	3	-	3	3,53%	3	-	3	3,85%	-	0,00%	-
Audit Internal Internal Auditor	4	-	4	4,71%	4	-	4	5,13%	-	0,00%	-
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	1	3	4	4,71%	1	3	4	5,13%	-	0,00%	-
Branch Jakarta Jakarta Branch	24	-	24	28,24%	23	-	23	29,49%	1	4,35%	↑
Divisi Komersial Commercial Division	2	1	3	3,53%	2	1	3	3,85%	-	-	-
Divisi Strategi & Pengembangan Bisnis Strategy &Business Development Division	4	-	4	4,71%	2	1	3	3,85%	1	33,33%	↑
Divisi Operasi dan Terminal Satelit Operation and Satellite Terminal Division	23	-	23	27,06%	19	-	19	24,36%	4	21,05%	↑
Divisi Teknik & Sistem Informasi Technical & Information System Division	6	-	7	7,06%	6	-	6	7,69%	1	16,67%	↑
Divisi Keuangan Finance Division	3	2	5	5,88%	3	2	5	6,41%	-	0,00%	-
Divisi SDM dan Umum HC & General Affairs Division	4	2	6	7,06%	4	1	5	6,41%	1	20,00%	↑
Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Risk Management & Management System	1	2	3	3,53%	1	2	3	3,85%	-	0,00%	-
Jumlah Total	**75**	**10**	**85**	**100,00%**	**68**	**10**	**78**	**100,00%**	**7**	**8,97%**	↑

L=Laki-laki; P=Perempuan
M=Male, F= Female

Jumlah dan Komposisi Berdasarkan Wilayah Kerja (Orang)
Number and Composition by Work Area (People)

Wilayah Kerja Work Area	2025				2024				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (people)	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (people)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Amount (people)	Persentase Percentage (%)	
Kantor Pusat di Jakarta Head Office in Jakarta	55	10	65	76,47%	53	10	63	80,77%	2	3,17%	↑
Kantor Satelit di Makassar Satellite Office in Makassar	3	-	3	3,53%	6	-	6	7,69%	(3)	(50,00%)	↓
Kantor Satelit di Pontianak Satellite Office in Pontianak	2	-	2	2,35%	3	-	3	3,85%	(1)	(33,33%)	↓
Kantor Satelit di Medan Satellite Office in Medan	6	-	6	7,06%	1	-	1	1,28%	5	500,00%	↑
Kantor Satelit Balikpapan Satellite Office in Balikpapan	5	-	5	5,88%	5	-	5	6,41%	-	0,00%	-
Kantor Satelit Banjarmasin Satellite Office in Banjarmasni	4	-	4	4,71%	-	-	-	-	4	100,00%	-
Jumlah Total	**75**	**10**	**85**	**100,00%**	**68**	**10**	**78**	**100,00%**	**7**	**8,97%**	↑

L=Laki-laki; P=Perempuan
M=Male, F= Female

Jumlah dan Komposisi Berdasarkan Jenis Kelamin (Orang)
Number and Composition by Gender (People)

Jenis Kelamin Gender	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (orang) Amount (people)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Amount (people)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Amount (people)	Persentase Percentage (%)	
Laki-laki Male	75	88,24%	68	87,18%	7	10,29%	↑
Perempuan Female	10	11,76%	10	12,82%	-	0,00%	-
Jumlah Total	**85**	**100,00%**	**78**	**100,00%**	**7**	**8,97%**	↑

L=Laki-laki; P=Perempuan
M=Male, F= Female

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Structure and Composition Of Shareholders

Struktur Pemegang Saham IPCC per 31 Desember 2025
Structure of IPCC Share Ownership As of December 31, 2025

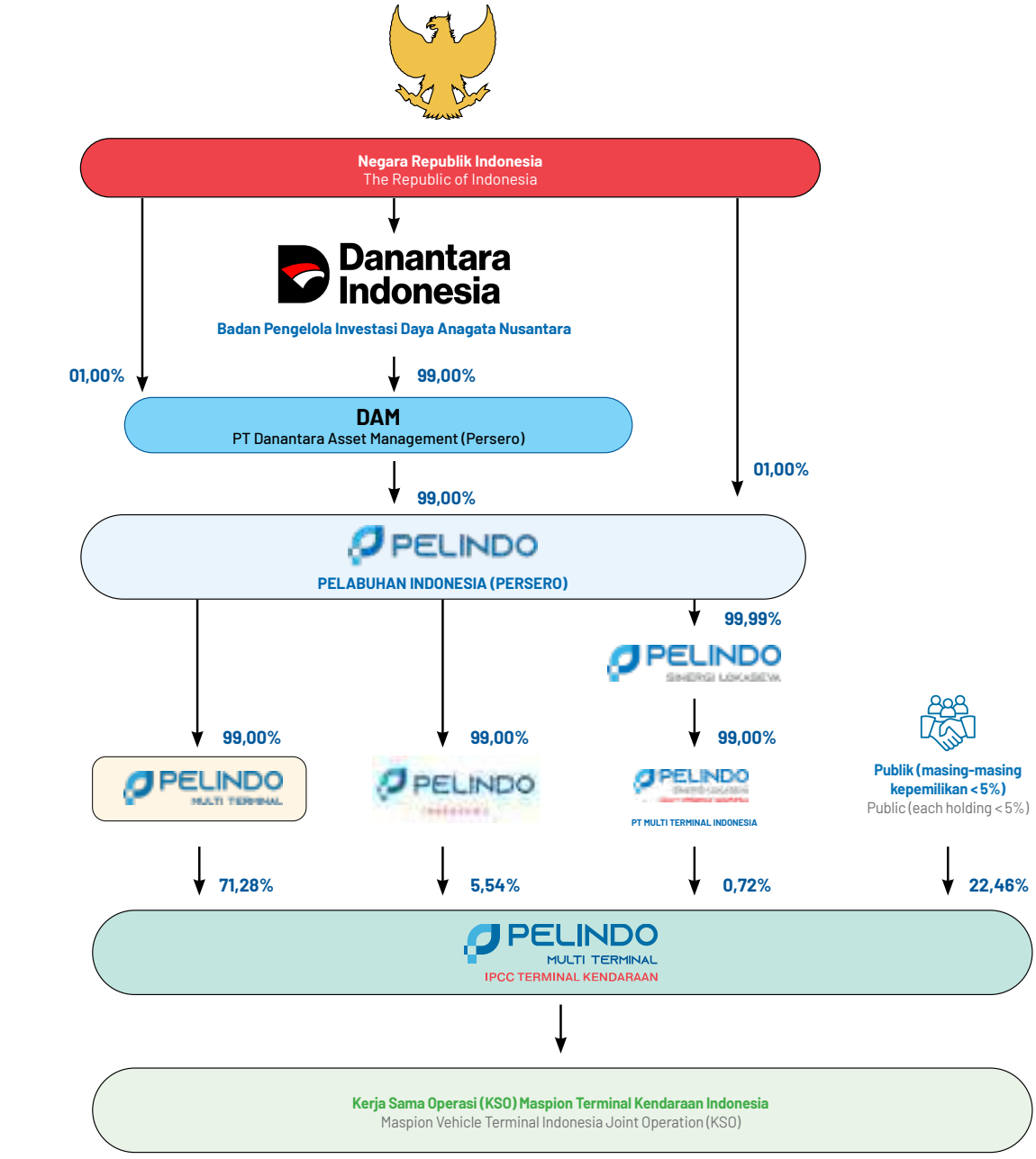

- **Entitas Pemilik Akhir**
  Owner Entity
- **Entitas Induk/*Holding* BUMN Pelabuhan**
  Holding Entity / State-Owned Port Holding Company
- **Entitas Induk/*Subholding* Pelindo**
  Holding Entity / Pelindo Subholding
- **Ventura Bersama / Kerja Sama Operasi (KSO)**
  Joint Venture / Joint Operation (KSO)

Kepemilikan Saham IPCC pada Awal dan Akhir Tahun Buku
IPCC Share Ownership at Beginning and End of Fiscal Year

Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2025 January 1, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025		
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp-ribu)** Issued and Fully Paid-up Capital (Rp-thousand)	**Persentase Kepemilikan (%)** Ownership Percentage (%)	**Jumlah Saham (lembar)** Number of Shares (shares)	**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp-ribu)** Issued and Fully Paid-up Capital (Rp-thousand)	**Persentase Kepemilikan (%)** Ownership Percentage (%)
Nilai Nominal Saham = Rp100/lembar saham Par Nominal Value = Rp100/share						
Kepemilikan saham 5% atau lebih Share ownership of 5% or more						
PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT")	**1.296.144.749**	**129.614.474.900**	**71,28%**	1.296.144.749	129.614.474.900	71,28%
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	**100.682.600**	**10.068.260.000**	**5,54%**	100.682.600	10.068.260.000	5,54%
Kepemilikan di bawah 5% **Ownership below 5%**						
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	**13.092.371**	**1.309.237.100**	**5,54%**	13.092.371	1.309.237.100	0,72%
Publik (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%) Public (each with ownership below 5%)	**408.465.100**	**40.846.510.000**	**22,46%**	408.465.100	40.846.510.000	22,46%
Jumlah Total	**1.818.384.820**	**181.838.482.000**	**100%**	**1.818.384.820**	**181.838.482.000**	**100%**

Komposisi Pemegang Saham IPCC Per 31 Desember 2025
IPCC Shareholders Composition as of December 31, 2025

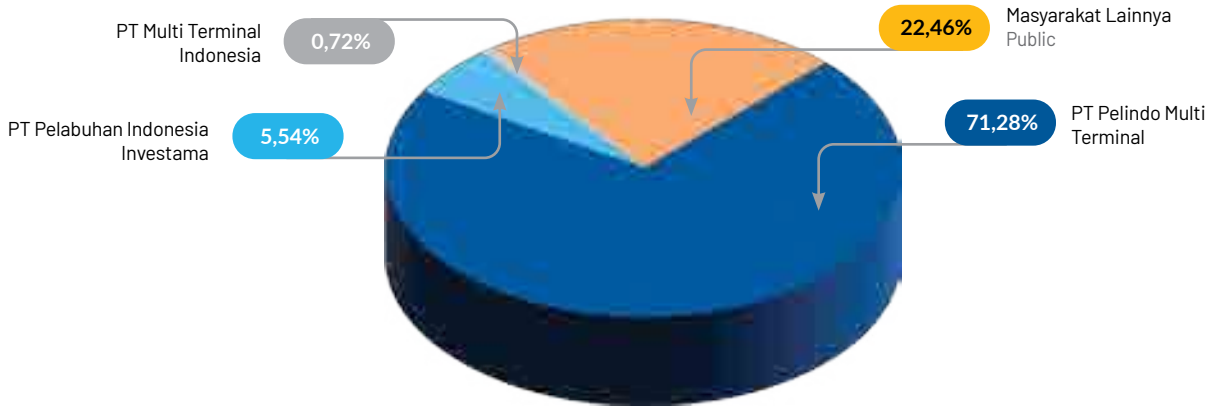

Informasi Persentase Kepemilikan Saham Langsung atau Tidak Langsung atas Saham IPCC oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada Awal dan Akhir Tahun Buku

Information on Percentage Of Direct Or Indirect Ownership Of IPCC Shares By Board Of Directors And Board Of Commissioners at Beginning and End of the Fiscal Year

Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2025 January 1, 2025				31 Desember 2025 December 31, 2025			
		Kepemilikan Langsung Direct Ownership		Kepemilikan Tidak Langsung Indirect Ownership		Kepemilikan Langsung Direct Ownership		Kepemilikan Tidak Langsung Indirect Ownership	
		Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Direksi Board of Directors									
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama merangkap Plt Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director and Acting Commercial and Business Development Director	354.000	0,02	-	-	531.200	0.029	-	-
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Technical and Operation	200.000	0,01	-	-	316.500	0.017	-	-
Wing Megantoro	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC and Risk Management	-	-	-	-	53.100	0.0030	-	-
Dewan Komisaris Board of Commissioner									
M. Said Bakhri	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-
Herry Ardianto	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-
Tri Hidayat	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-
Drajat Sulistyo*	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-
Abdur Rahim Hasan*	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-
LM. Arya Bima Yudiantara*	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Berhenti menjabat per 17 Juni 2025
*) Resign on June 17, 205

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan pada Awal dan Akhir Tahun Buku

Number of Shareholders and Percentage of Ownership At Beginning and End of the Fiscal Year

Status Pemilik Status of Shareholders	1 Januari 2025 January 1, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025		
	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Ritel Domestik Domestic Retail						
Perorangan Indonesia Indonesian Individuals	**8.363**	**331.687.500**	**18,24%**	13.507	283.929.600	15,61%
Institusi Domestik Domestic Intitutions						
Lembaga Indonesia Indonesian Institutions	**10**	**1.438.013.00**	**79,08%**	40	1.437.065.920	79,03%
Sub Total	**8.373**	**1.769.700.50**	**97,32%**	13.547	1.720.995.520	94,64%
Pemodal Asing Foreign Investors						
Ritel Retail	**10**	**86.800**	**0,005%**	12	27.800	0,00%
Institusi/Badan Usaha/ Pemerintah Institution/Business/ Government	**24**	**48.597.500**	**2,67%**	59	97.361.500	5.35%
Sub Total	**34**	**48.684.300**	**2,68%**	**71**	**97.389.300**	**5.35%**
Total	**8.427**	**1.818.384.820**	**100,00%**	**13.618**	**1.818.384.820**	**100,00%**

Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perusahaan, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, Sampai Kepada Pemilik Individu

Hingga akhir tahun 2025, Negara Republik Indonesia merupakan pemilik 100% saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero), sehingga tidak terdapat pemegang saham pengendali individu baik secara langsung maupun tidak langsung; Selanjutnya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki 99,99% saham PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), memiliki 99,00% saham PT Pelabuhan Indonesia Investama, dan memiliki juga 99,99% saham PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL). Lalu, SPSL memiliki 99,00% saham PT Multi Terminal Indonesia. Sehingga berdasarkan struktur kepemilikan saham Perseroan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Pelindo Solusi Logistik ditetapkan sebagai Pemegang Saham Pengendali tidak langsung, sedangkan PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), PT Pelabuhan Indonesia Investama, dan PT Multi Terminal Indonesia bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali langsung. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tidak terdapat pemegang saham pengendali individu baik langsung maupun tidak langsung di Perseroan.

Major and Controlling Shareholders of the Company, Both Directly and Indirectly, up to Individual Owners

As of the end of 2025, the Republic of Indonesia holds 100% of the shares in PT Pelabuhan Indonesia (Persero), meaning there is no individual controlling shareholder, either directly or indirectly; Furthermore, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) holds 99.99% of the shares in PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), holds 99.00% of the shares in PT Pelabuhan Indonesia Investama, and also holds 99.99% of the shares in PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL). Furthermore, SPSL holds 99.00% of the shares in PT Multi Terminal Indonesia. Therefore, based on the Company's shareholding structure, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Pelindo Solusi Logistik are designated as indirect Controlling Shareholders, while PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), PT Pelabuhan Indonesia Investama, and PT Multi Terminal Indonesia act as direct Controlling Shareholders. Thus, it can be affirmed that there are no individual controlling shareholders, either directly or indirectly, in the Company.

Nama Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Bersama

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, perusahaan ventura bersama. Perseroan memiliki entitas operasi bersama, yaitu Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia dengan kepemilikan sebesar 45,00%.

Name of Subsidiaries, Associates, Joint Venture Company

Until the end of 2025, the Company does not have any subsidiaries, associates, nor joint venture companies. The Company has a joint operation entity, namely Maspion Terminal Kendaraan Indonesia Joint Operation Management with ownership of 45.00%.

Nama Perusahaan Company Name	Tempat Kedudukan Domicile	Kegiatan Usaha Business Activities	Tahun Pendirian Year of Establishment	Tahun Penyertaan Year of Participation	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage	Aset Asset		Status Operasi Operational Status
						2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	
Manajemen Kerja Sama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia ("MKO MTKI") Maspion Terminal Kendaraan Indonesia Joint Operation Management ("MKO MTKI")	Gresik, Jawa Timur Gresik, East Java	Terminal Kendaraan Car Terminal	2015	2015	45%	**3.264**	3.234	Beroperasi Operating

Manajemen Kerja Sama Operasi Maspion Kendaraan Terminal Indonesia

Maspion Terminal Kendaraan Indonesia Joint Operation Management

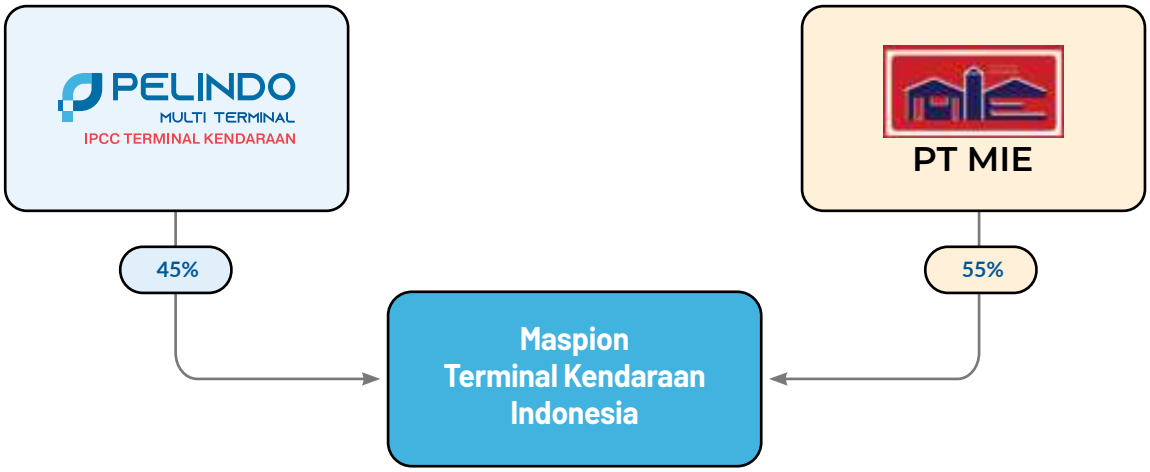

Pada 21 Agustus 2015, Perusahaan dan PT Maspion Industrial Estate ("MIE") membentuk perusahaan joint operation bernama Manajemen Kerja Sama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia ("MKO Maspion") yang berkedudukan di Gresik. Porsi kepemilikan saham Perusahaan terhadap MKO Maspion adalah sebesar 45%.

On August 21, 2015, the Company and PT Maspion Industrial Estate ("MIE") formed a joint operation company called Maspion Terminal Kendaraan Indonesia Joint Operation Management ("MKO Maspion") domiciled in Gresik. The Company's share ownership portion in MKO Maspion is 45%.

Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure

Perseroan adalah bagian dari Pelindo Group dimana pasca merger Pelindo, posisi Perseroan berada di bawah *Sub Holding* PT Pelindo Multi Terminal yang merupakan bagian dari kluster Non Peti Kemas. Berikut adalah bagan Struktur Grup Pelindo:

The Company is part of Pelindo Group where after Pelindo merger, the Company's position is under the Sub Holding PT Pelindo Multi Terminal which is part of the Non Container cluster. The following is a chart of Pelindo Group Structure:

Struktur Grup Pelindo
Pelindo Group Structure

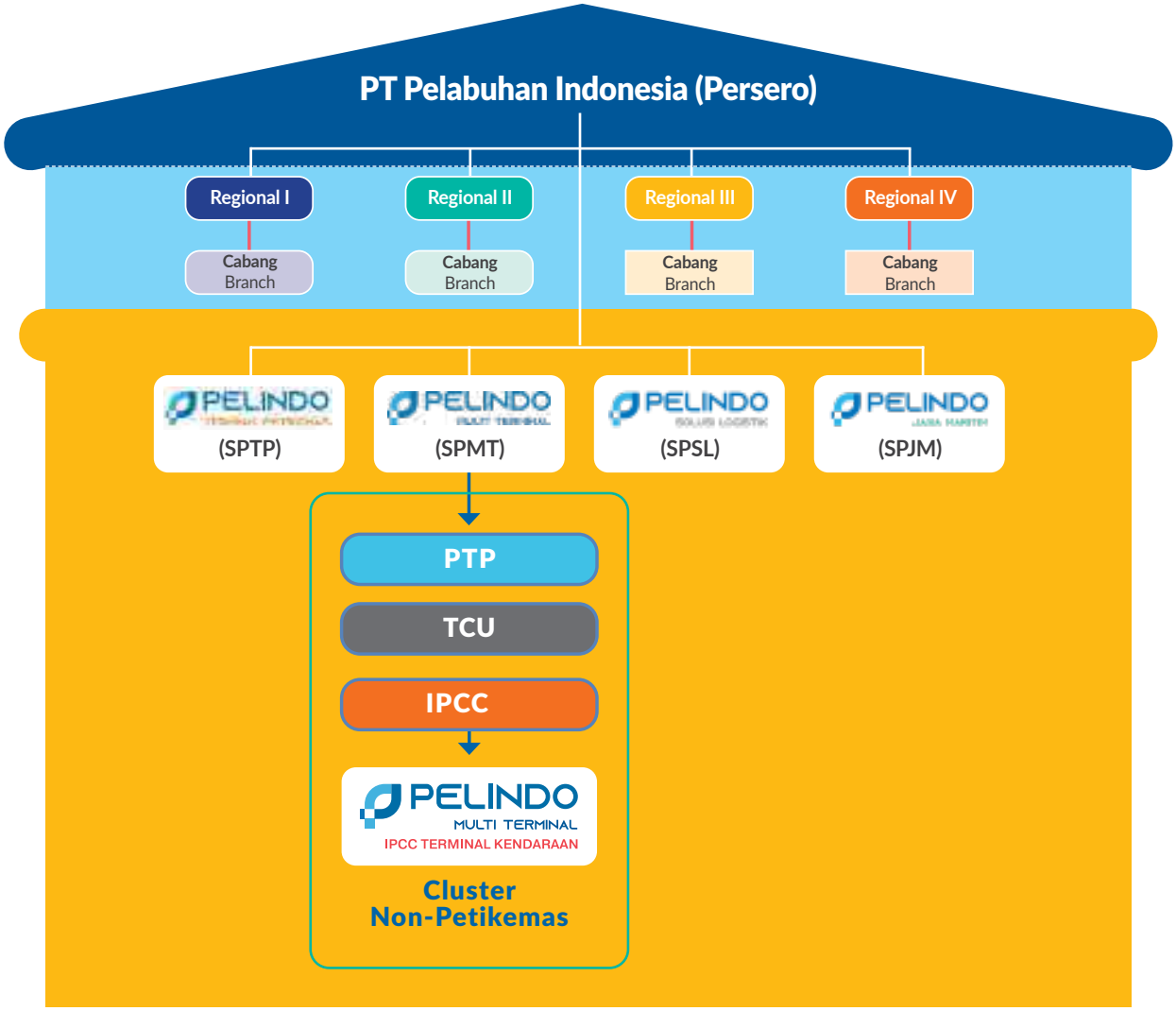

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham
Chronology of Share Issuance and/or Listing

Penawaran Saham Perdana

17 April 2018
Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Indonesia Kendaraan Terminal Tahun 2018 melalui Surat No. PR09/4117/IKT-18 tertanggal 17 April 2018 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta.

Penyampaian tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM") dan perubahan-perubahannya, antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

28 Juni 2018
Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK atas Penawaran Umum Perdana Saham.

9 Juli 2018
Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial *Public Offering*/"IPO") sebanyak 509.147.700 lembar saham biasa atas nama, atau sebesar 28% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100/lembar saham, dan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.640/lembar saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Melalui aksi korporasi ini, Perseroan berhasil memperoleh dana sebesar Rp835.002.228.000 (delapan ratus tiga puluh lima miliar dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) yang seluruhnya telah digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja Perseroan.

10 Juli 2018
Saham Perseroan secara resmi dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham "IPCC".

Initial Public Offering

April 17, 2018
The Company submitted a Registration Statement in connection with 2018 Initial Public Offering of Indonesia Terminal Vehicle Shares through Letter No. PR09/4117/IPCC-18 dated April 17, 2018 to Financial Services Authority ("OJK") in Jakarta.

This submission is in accordance with the requirements stipulated by Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 dated November 10, 1995 concerning Capital Markets, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 64 of 1995, Supplement No. 3608 along with its implementing regulations ("UUPM") and amendments, including OJK Regulation no. 7/POJK.04/2017 concerning Registration Statement Documents for the Public Offering of Equity Securities, Debt Securities, and/or Sukuk and OJK Regulation no. 8/POJK.04/2017 concerning Form and Content of Prospectus and Abridged Prospectus for Public Offerings of Equity Securities.

June 28, 2018
The Company received an effective statement from OJK.

July 9, 2018
The Company conducted an Initial Public Offering (IPO) of 509,147,700 ordinary shares in its name, or 28% of the total issued and fully paid capital with a nominal value of Rp100/share, and offered it to the public at a price Offer Rp1,640/share, which must be paid in full when submitting the Share Purchase Order Form (FPPS). The Company obtained funds amounting to Rp835.002.228.000(eight hundred thirty-five billion two million two hundred twenty-eight thousand rupiah) from this Company action. All of these funds have been used as working capital for the Company.

July 10, 2018
The Company's shares were officially listed and started trading on Indonesia Stock Exchange (IDX) with the stock code "IPCC".

Kronologis Penerbitan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Issuance

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan tidak menerbitkan efek lain dalam bentuk apapun selain yang telah dijelaskan pada Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham di atas. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan efek, *corporate action*, perubahan jumlah efek, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan, serta peringkat efek.

Until December 31, 2025, the Company did not issue other securities in any form other than those described in the Share Issuance and Listing Chronology above. Therefore, there is no information regarding the chronology of securities listings, Company actions, changes in the number of securities, names of exchanges where other securities are listed, and securities ratings.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Public Accountant and Public Accounting Firm

Akuntan Publik Public Accountant	Mento
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Purwanto Susanti dan Surja
Alamat Address	Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 7th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, Indonesia Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 7th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, Indonesia
Jasa Audit Audit Services	Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Annual Historical Financial Information Audit Services
Biaya Jasa Audit (Rp) Audit Service Fee	Rp1.190.000.000
Jasa Lainnya Other Services	Tidak ada None
Biaya Jasa Lainnya (Rp) Other Services Fee (Rp)	Tidak ada None
Periode Penugasan (Assignment Period)	Tahunan Annual

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Institutions and/or Supporting Professional

Biro Administrasi Efek dan Informasi Pencatatan Saham
Share Registrar and Share Registration Information

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Profession	PT Electronic Data Interchange Indonesia
Alamat Address	10th Floor, Wisma SMR, Jl. Yos Sudarso Kav 85 No.89, Sunter Jaya, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14360 10th Floor, Wisma SMR, Jl. Yos Sudarso Kav 85 No. 89, Sunter Jaya, Tj. Priok District, North Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 14360
Jasa yang Diberikan Services Provided	Jasa Fee Tahunan Pengelolaan Administrasi Saham Annual Fee Service for Stock Administration Management
Periode Penugasan Assignment Period	Tahunan Annual
Biaya (Rp) Fee (Rp)	Rp38.500.000

Kustodian
Custodian

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Profession	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, 5th Floor, JL. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta, 12190, RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta City, Jakarta 12190 Jakarta Stock Exchange Building Tower I, 5th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta, 12190, RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta City, Jakarta 12190
Jasa yang Diberikan Services Provided	Pembayaran Annual fee for security IPCC Payment of annual fee for IPCC security
Periode Penugasan Assignment Period	Tahunan Annual
Biaya (Rp) Fee (Rp)	Rp10.000.000

Notaris
Notary

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Profession	Notaris dan PPAT Ashoya Ratam S.H., M.Kn Notary and PPAT Ashoya Ratam S.H., M.Kn
Alamat Address	Jl. Suryo No. 54. Blok S Kebayoran Baru 12180 Jl. Suryo No. 54, Block S, Kebayoran Baru 12180
Jasa yang Diberikan Services Provided	Jasa Notaris RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Notary Services for Annual GMS for Fiscal Year 2024
Periode Penugasan Assignment Period	Tahun 2025 Year 2025
Biaya (Rp) Fee (Rp)	Rp30.500.000

Informasi Pada Situs Web Perusahaan
Information on The Company Website

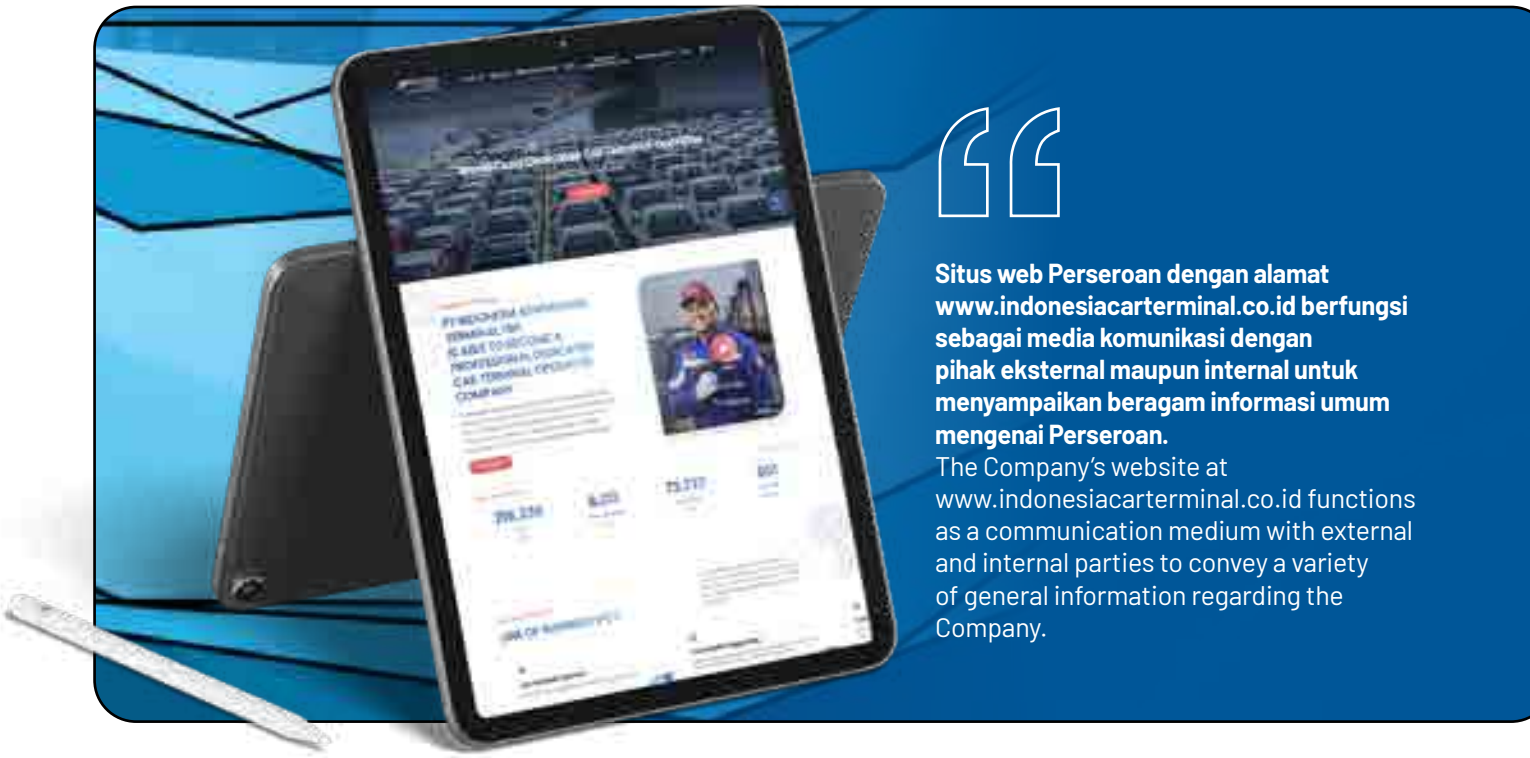

Situs web Perseroan dengan alamat www.indonesiacarterminal.co.id berfungsi sebagai media komunikasi dengan pihak eksternal maupun internal untuk menyampaikan beragam informasi umum mengenai Perseroan.
The Company's website at www.indonesiacarterminal.co.id functions as a communication medium with external and internal parties to convey a variety of general information regarding the Company.

Situs web Perseroan dengan alamat www.indonesiacarterminal.co.id berfungsi sebagai media komunikasi dengan pihak eksternal maupun internal untuk menyampaikan beragam informasi umum mengenai Perseroan. Seluruh informasi yang ditampilkan pada situs web Perseroan dikelola secara profesional dan transparan sesuai dengan Prinsip Keterbukaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) khususnya kepada pemegang saham, pelanggan, masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya, dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No: 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atas Perusahaan Publik.

Seluruh informasi yang dimuat pada situs web Perseroan disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Perseroan senantiasa memperbarui informasi secara berkala agar senantiasa menampilkan informasi yang terkini dan akurat bagi para pemangku kepentingan.

Situs web Perseroan menyajikan beragam informasi yang relevan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik, antara lain, informasi laporan keuangan tahunan, laporan keuangan per triwulan dan laporan keuangan tengah tahunan, kinerja saham, presentasi dari manajemen untuk setiap triwulan atas kinerja Perseroan serta informasi dan kegiatan Perseroan lainnya.

The Company's website at www.indonesiacarterminal.co.id functions as a communication medium with external and internal parties to convey a variety of general information regarding the Company. The entire information displayed on the Company's website is managed professionally and transparently in accordance with Principle of Transparency as mandated by Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market and to improve the implementation of good corporate governance, especially to shareholders, customers, the public, the government, and other stakeholders, and the provisions of Financial Services Authority Regulation (POJK) No: 8/POJK.04/2015 concerning Issuer Websites for Public Companies.

All information in the Company's website is accessible in 2 (two) languages, namely Indonesian and English. The Company continuously updates information periodically in order to always reveal the latest and accurate information for stakeholders.

The Company's website presents various relevant information as a form of information disclosure to the public, including, among others, annual financial statements information, quarterly financial statements and semi-annual financial statements, stock performance, management presentations for each quarter on the Company's performance and other information and activities of the Company.

Berikut tabel pemenuhan informasi pada situs Perseroan sesuai dengan Pasal 6, POJK No. 8/POJK.4/2015, materi yang wajib disampaikan, antara lain:

Pengungkapan Keterbukaan Informasi di *Website*

The following is a table of information fulfillment on the Company's website in accordance with Article 6, POJK No. 8/POJK.4/2015, the material that must be submitted, among others:

Information Disclosure on the Website

No	Informasi yang Wajib ditampilkan dalam *Website* Information that must be displayed on the Website	Keterangan Remark
1	Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu. Shareholder information up to individual ultimate owners.	✓
2	Kode Etik. Code of Ethics	✓
3	Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) at least includes material on agenda discussed in the GMS, a summary of the minutes of the GMS, and information on important dates, namely date of announcement of the GMS, the date of invitation to the GMS, the date of the GMS, the date on which summary of minutes of the GMS is announced.	✓
4	Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir). Separate annual Financial Statements (last 5 years).	✓
5	Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of Board of Commissioners and Board of Directors	✓
6	Piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan Satuan Kerja Audit Internal Charter of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees and Internal Audit Unit	✓

Website Perseroan terdiri dari 6 (enam) kanal dengan konten sebagai berikut:

1. **Tentang Kami**
   Section ini menampilkan beragam informasi mengenai Perseroan, profil Perseroan, struktur organisasi, manajemen perseroan, sejarah perseroan, *corporate roadmap*, anak perusahaan, informasi pemegang saham, *e-procurement*, dan lembaga dan profesi penunjang pasar modal.
2. **Layanan**
   Section ini menampilkan beragam informasi mengenai operator terminal kendaraan, *car terminal handling* dan *supporting*, manajemen distribusi kendaraan, fasilitas, tarif layanan, maklumat pelayanan, *quality* HSSE.
3. **Hubungan Investor**
   Section ini menampilkan beragam informasi mengenai relasi media, informasi saham, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), informasi keuangan, presentasi perusahaan, prospektus, dan keterbukaan informasi.
4. **GCG**
   Section ini menampilkan beragam informasi mengenai tata kelola perusahaan, pedoman dewan komisaris dan direksi perseroan, kode etik perusahaan, *form* sistem pengaduan pelanggaran, akuntan publik, manajemen risiko, anggaran dasar, kebijakan dan peraturan perusahaan, dan penghargaan program GCG.

The Company's website consists of 6 (six) channels with the following content:

1. **About Us**
   This section displays various information regarding the Company, the Company profile, organizational structure, management, corporate history, corporate roadmap, subsidiaries, shareholder information, e-procurement, and supporting institutions and professions in the capital market.
2. **Service**
   This section displays various information on vehicle terminal operations, car terminal handling and supporting, vehicle distribution management, facilities, service tariffs, service charters, and HSSE quality.
3. **Investor Relations**
   This section displays various information regarding Media Relations, share information, General Meeting of Shareholders, financial information, company presentation, prospectus, and information disclosure.
4. **GCG**
   This section displays various information on corporate governance, the guidelines for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, the Company's code of ethics, the whistleblowing system form, public accountants, risk management, articles of association, company policies and regulations, and GCG program awards.

5. **Komunikasi Perusahaan & CSR**
   Section ini menampilkan beragam informasi mengenai IPCC peduli, pendidikan, lingkungan, dan pengembangan usaha mikro dan kecil.
6. **Pelayanan Konsumen**
   Section ini menampilkan pelayanan konsumen, kritik & saran pelanggan, pelanggan kami, dan form pengambilan gambar.
7. **PPID**
   Section ini menampilkan layanan *online* yang ditujukan untuk memudahkan pemohon informasi publik dalam menyampaikan permohonan informasi dan dokumentasi kepada PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IDX:IPCC). Di mana pun berada, Anda dapat mengajukan permohonan Informasi Publik dengan mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan.

IPCC senantiasa memperbarui informasi yang disajikan di dalam *website* secara berkala untuk memberikan informasi terkini bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. IPCC juga memiliki akun media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, di antaranya X, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, dan LinkedIn.

5. **Corporate Communication & CSR**
   This section displays various information regarding IPCC care, education, the environment, and the development of micro and small businesses.
6. **Customer Service**
   This section displays customer servicer customer criticism and suggestions, our customers, and image taking form.
7. **PPID**
   This section displays online services aimed at facilitating public information applicants in submitting information and documentation requests to PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IDX:IPCC). Wherever you are, you can submit a Public Information request by filling out the available information request form.

IPCC regularly updates the information presented on its website to provide the latest updates to all stakeholders and the general public. IPCC also maintains social media accounts as part of its commitment to information disclosure and communication with all stakeholders, including X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and LinkedIn.



PELINDO
MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN

04

Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function

Akselerasi digitalisasi dan pengembangan sumber daya manusia yang berjalan beriringan menjadi kekuatan utama Perseroan dalam menghadapi tantangan industri, sekaligus membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.
The acceleration of digitalization alongside human capital development has become a key strength for the Comoany in addressing industry challenges, while also building a solid foundation for sustainable long-term growth.





Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Capital Management

Sumber daya manusia (SDM) yang profesional, adaptif, inovatif, dan berintegritas merupakan fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, IPCC terus memperkuat pengelolaan SDM untuk mengembangkan talenta Insan IPCC yang unggul dan siap menghadapi dinamika industri serta persaingan usaha. Upaya tersebut dijalankan melalui strategi dan kebijakan pengelolaan SDM yang disusun secara terarah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan bisnis.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PENGELOLAAN SDM

Perubahan lanskap teknologi, intensitas persaingan global, serta dinamika perekonomian nasional menuntut adanya strategi pengembangan SDM yang berkelanjutan agar Perseroan tetap memiliki daya saing. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan menyusun rencana pengembangan SDM secara berkesinambungan dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan lingkungan bisnis.

1. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi:
   a. Program pelatihan berbasis teknologi, seperti penggunaan perangkat lunak manajemen terminal dan analitik data;
   b. Pelatihan pengelolaan kendaraan listrik dan teknologi terkait (PM);
   c. *Workshop* tentang *sustainability* dan *green logistics* (PM);
   d. Peningkatan literasi digital untuk seluruh karyawan;
   e. Optimalisasi penggunaan platform pembelajaran *online*.
2. Penguatan Budaya Perseroan:
   a. Kampanye internal untuk mendorong kolaborasi dan inovasi;
   b. Program penghargaan untuk ide-ide kreatif;
   c. Kegiatan *team-building* untuk meningkatkan kebersamaan.
3. Pengembangan Kepemimpinan:
   a. Program *coaching & mentoring* untuk pengembangan kepemimpinan;
   b. Pelatihan kepemimpinan berbasis *agility*;
   c. Pemberian tanggung jawab proyek untuk pengembangan kemampuan manajerial.
4. Manajemen Talenta:
   a. Pemetaan *high potensial talent* untuk posisi strategis;
   b. Penilaian kinerja berbasis KPI yang terintegrasi;
   c. Program pengembangan SDM yang berkelanjutan.

VISI DAN MISI PENGELOLAAN SDM

Visi
Membangun Sumber Daya Manusia yang profesional, adaptif, inovatif, dan berintegritas guna mendukung pertumbuhan perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif.

Professional, adaptive, innovative, and integrity-driven human capital (HC) are a key foundation in supporting the Company's business sustainability. Therefore, IPCC continues to strengthen its human capital management to develop outstanding IPCC personnel who are ready to face industry dynamics and business competition. These efforts are carried out through Human Capital management strategies and policies that are systematically designed in alignment with organizational needs and evolving business environments.

STRATEGIES AND STRATEGIC POLICIES FOR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Changes in the technological landscape, the intensity of global competition, and national economic dynamics require continuous human capital development strategies to ensure the Company remains competitive. In line with this, the Company formulates sustainable human capital development plans by considering current conditions and developments in the business environment.

1. Training and Competency Development:
   a. Technology-based training programs, such as the use of terminal management software and data analytics;
   b. Training on electric vehicle management and related technologies (PM);
   c. Workshops on sustainability and green logistics (PM);
   d. Enhancement of digital literacy for all employees;
   e. Optimization of online learning platforms utilization.
2. Strengthening Corporate Culture:
   a. Internal campaigns to encourage collaboration and innovation;
   b. Reward programs for creative ideas;
   c. Team-building activities to enhance cohesiveness.
3. Leadership Development:
   a. Coaching and mentoring programs for leadership development;
   b. Agility-based leadership training;
   c. Assignment of project responsibilities to develop managerial capabilities.
4. Talent Management:
   a. Mapping of high-potential talents for strategic positions;
   b. Integrated KPI-based performance assessments;
   c. Continuous human capital development programs.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT VISION AND MISSION

Vision
Building Human Capital that are professional, adaptive, innovative, and have integrity to support the growth of the Company with competitive advantages.

Misi

1. Peningkatan kompetensi SDM
2. Manajemen SDM yang mandiri
3. Transformasi organisasi dan manajemen SDM
4. Peningkatan *talent management*
5. Peningkatan produktivitas pekerja di atas rata-rata industri

Mission

1. Increasing Cuman Capital competency
2. Independent Human Capital management
3. Organizational transformation and management of Human Capital
4. Improved talent management
5. Increased worker productivity above the industry average

PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pengembangan organisasi tidak hanya difokuskan pada aspek penataan struktur, melainkan juga mencakup upaya transformasi budaya kerja serta perubahan pola pikir. Pengembangan organisasi adalah proses sistematis untuk meningkatkan efektivitas, fleksibilitas, dan daya saing perusahaan. Berikut adalah tahapan utama dalam pengembangan organisasi agar *agile*, adaptif, dan kompetitif. Proses tersebut meliputi:

1. Diagnosa Organisasi (*Organizational Diagnosis*)
2. Perencanaan Perubahan (*Planning for Change*)
3. Implementasi Perubahan (*Implementation & Execution*)
4. Evaluasi dan Penyesuaian (*Evaluation & Adjustment*)
5. *Institutionalization & Sustainability.*

Dalam rangka mendukung efektivitas operasional, Direksi menetapkan struktur organisasi yang dirancang secara efisien dan efektif serta dapat disesuaikan dengan dinamika kondisi yang dihadapi Perseroan. Penyesuaian terhadap struktur organisasi tersebut dapat dilakukan oleh Direksi dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Struktur organisasi Perseroan diharapkan mampu membentuk lingkungan kerja yang berorientasi pada proses, tegas dan tepat sasaran namun tetap fleksibel, serta mendukung terciptanya hubungan kerja tanpa sekat.

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

Organizational development is not only focused on structural restructuring but also encompasses efforts to transform work culture and change mindsets. Organizational development is a systematic process to increase a company's effectiveness, flexibility, and competitiveness. The following are the main stages in developing an organization to be agile, adaptive, and competitive. This process includes:

1. Organizational Diagnosis
2. Planning for Change
3. Implementation & Execution
4. Evaluation & Adjustment
5. Institutionalization & Sustainability.

To support operational effectiveness, Board of Directors establishes an organizational structure designed to be efficient and effective and adaptable to the dynamic conditions faced by the Company. Adjustments to this organizational structure can be made by the Board of Directors while adhering to the principles of good corporate governance. The Company's organizational structure is expected to foster a process-oriented, firm, and targeted yet flexible work environment, and support the creation of no-boundaries working relationships.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA SDM

Pengelolaan SDM di Perseroan dilaksanakan oleh Divisi SDM dan Umum yang dipimpin oleh Senior Manager SDM dan Umum. Secara struktural, Divisi SDM dan Umum bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Human capital management in the Company is carried out by the Human Capital and General Affairs Division, led by the Senior Manager of Human Capital and General Affairs. Structurally, the Human Capital and General Affairs Division reports directly to the Director of Finance, Human Capital, and Risk Management.

Struktur Organisasi Direktorat Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko IPCC
Organizational Structure of IPCC Directorate of Finance, Human Capital, and Risk Management

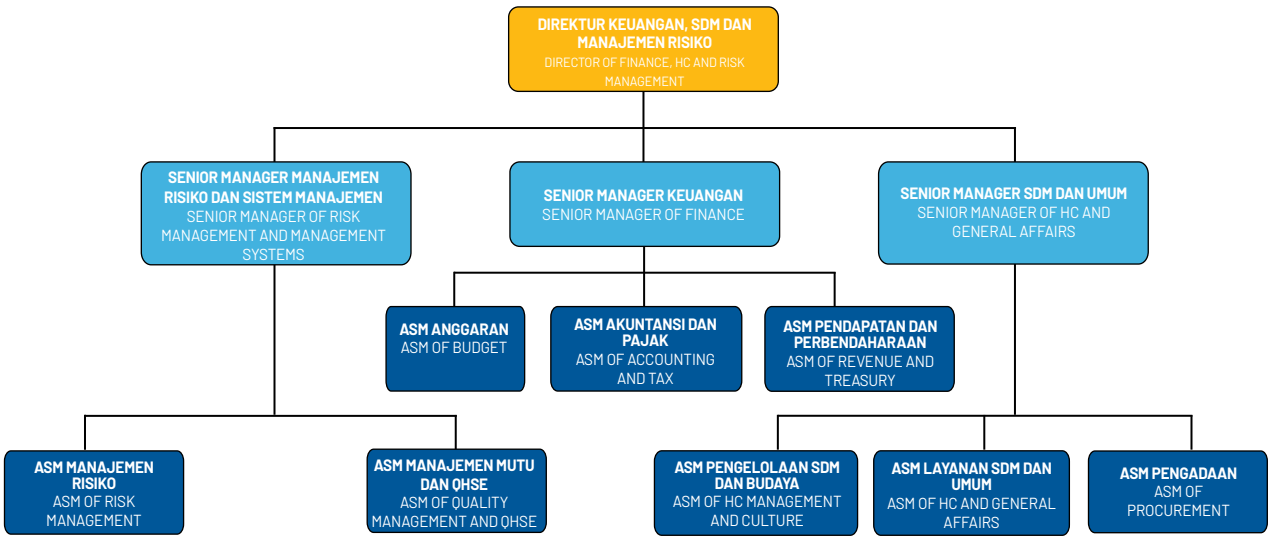

Divisi SDM dan Umum dipimpin oleh Safrial sebagai Senior Manager Sumber Daya Manusia dan Umum, yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/3/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 tanggal 3 Januari 2023 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

The Human Capital and General Affairs Division is led by Safrial as Senior Manager of Human Capital and General Affairs, appointed through the Board of Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/3/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 dated January 3, 2023, concerning the Transfer of Duties/Positions of Employees within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Safrial
Senior Manager Sumber Daya Manusia dan Umum
Menjabat Sejak : 3 Januari 2023
Senior Manager of Human Capital and General Affairs
Served since January 3, 2023

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia, 55 tahun, domisili di DKI Jakarta Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Direksi No. KP.10.02/3/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 tanggal 1 Januari 2023 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Riwayat Pendidikan
- S1 Teknik & Manajemen Industri dari Universitas Sumatera Utara (1997)
- S2 Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (2003)

Riwayat Pekerjaan
- Senior Manage SDM dan Umum (2023-saat ini)
- SVP Pengadaan (2019-2021), dan SVP Kerja Sama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan pada Divisi Kerja Sama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan, Direktorat Strategi dan Komersial (2021-2022)
- Senior Manager Pembinaan Anak Perusahaan (2018-2019)
- Senior Manager Perencanaan & Pengembangan Usaha (2013-2018)
- ASM Perencanaan Investasi (2006-2013)
- Quality MR (2002-2006)
- Staf Audit Mutu (1999-2002)

Personal Data
Indonesian citizen, 55 years old, domiciled in DKI Jakarta

Legal Basis for Appointment
Board of Directors Decree No.KP.10.02/3/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 dated January 1, 2023 concerning the Transfer of Duties/Positions of Employees within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Education Background
- Bachelor's Degree in Industrial Engineering & Management from University of Sumatera Utara (1997)
- Master of Marketing from Gadjah Mada University (2003)

Work Experience
- Senior Manager of HC and General Affairs (2023-present)
- SVP Procurement (2019-2021), and SVP Business Cooperation and Subsidiary Development in the Business Cooperation and Subsidiary Development Division, Strategy and Commercial Directorate (2021-2022)
- Senior Manager of Subsidiary Development (2018-2019)
- Senior Manager of Business Planning & Development (2013-2018)
- ASM Investment Planning (2006-2013)
- Quality MR (2022-2006)
- Quality Audit Staff (199-2002)

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi SDM dan Umum

Tugas dan tanggung jawab Senior Manager SDM dan Umum adalah sebagai berikut:

1. *Planning, Budgeting,* dan Pengelolaan Anggaran
   Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan *monitoring* Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) unit kerja/*branch*/fungsi dan pengelolaan anggaran.
2. Pengelolaan Pekerja
   a. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan penilaian kinerja pekerja, serta menyelenggarakan bimbingan pekerja di unit kerja/fungsi termasuk pada perilaku indisipliner pekerja;
   b. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan pekerja di unit kerja/fungsi;
   c. Budaya Organisasi.
3. *Quality Management* dan Prosedur (SOP)
   Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan sosialisasi dan memonitor pelaksanaan kebijakan dan prosedur di unit kerja/fungsi serta melakukan dan memonitor kegiatan *improvement* dan *transfer knowledge* di unit kerja/fungsi.
4. *Health, Safety, & Environment* (HSE)
   Mengarahkan, melakukan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan implementasi budaya dan program HSE di departemen.

Duties and Responsibilities of HC and General Affairs Division

The duties and responsibilities of Senior Manager of HC and General Affairs are as follows:

1. Planning, Budgeting, and Budget Management
   Directing and coordinating budget preparation and monitoring the work plan and budget (RKA) for work units/branches/functions and budget management.
2. Employee Management
   a. Directing and coordinating activities related to employee performance planning and evaluation, as well as employee guidance within work units/functions, including addressing employee disciplinary issues.
   b. Directing and coordinating training and development needs for employees within work units/functions.
   c. Organizational culture development.
3. Quality Management and Procedures (SOPs)
   Directing and coordinating the preparation of socialization and monitoring the implementation of policies and procedures in work units/functions as well as overseeing and monitoring improvement and knowledge transfer activities in work units/functions.
4. Health, Safety & Environment (HSE)
   Directing, implementing, monitoring, and evaluating HSE culture and programs in the department.

5. Pengembangan *System Information & Communication Technology.*
6. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pengajuan usulan kebutuhan pengembangan layanan dan solusi ICT serta kegiatan *User Acceptance Test* (UAT).
7. Rencana *Procurement*
   Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pengadaan sesuai dengan kewenangan tertentu untuk kebutuhan unit kerja/fungsi.
8. Pengelolaan Risiko
   Mengarahkan dan mengkoordinasikan pengelolaan risiko yang meliputi identifikasi, mitigasi dan *monitoring* risiko di unit kerja/fungsi.
9. Melaksanakan *Assessment* GCG dan Tindak Lanjut Hasil Audit
   Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan *Assessment* GCG dan audit serta *monitoring* dan tindak lanjut hasil audit di unit kerja/fungsi.

Program Kerja Divisi SDM dan Umum 2025

Program kerja Divisi SDM dan Umum tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Tata Kelola Inovasi dan Penghargaan Inovasi;
2. *Refreshment* & *Monitoring Change Catalyst Time*;
3. Internalisasi Core Values AKHLAK;
4. Tindak Lanjut Human Capital (HC) *Roadmap* 2025-2029;
5. *Updating Critical Knowledge, Knowledge Toxonomy,* & Utilisasi *Portaverse*;
6. Implementasi Multi Terminal Academy;
7. Program *Coaching* & *Mentoring* Pekerja.

RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN SDM 2025

Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan fungsi umum dilaksanakan dengan berlandaskan pada kebutuhan organisasi Perseroan, dengan tetap memperhatikan kecukupan jumlah, kualitas, serta kualifikasi tenaga kerja secara tepat. Perseroan meyakini bahwa penerapan perencanaan SDM yang efektif akan menghasilkan pegawai yang unggul, bertalenta, dan profesional. Upaya tersebut merupakan bagian integral dari strategi bisnis Perseroan dalam mewujudkan visi, misi, serta pencapaian target tahunan, sekaligus mendukung keberlanjutan usaha di masa depan, sehingga Perseroan perlu memastikan tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang selaras dengan RKAP yang telah ditetapkan pada awal tahun, Perseroan melakukan koordinasi dengan Direktorat SDM PT Pelindo Multi Terminal. Hasil dari perencanaan SDM tersebut berupa daftar kebutuhan tenaga kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan proses rekrutmen serta mendukung ketepatan penempatan pekerja.

Pengelolaan SDM dan Budaya dalam perencanaan strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Tata Kelola Inovasi dan Penghargaan Inovasi;
2. *Refreshment* & Monitoring *Change Catalyst Time*;

5. Development of Information & Communication Technology Systems.
6. Directing and coordinating the submission of proposals for the development of ICT services and solutions, as well as User Acceptance Testing (UAT) activities.
7. Procurement Planning
   Directing and coordinating procurement activities within a specific scope of authority to meet the needs of work units/functions.
8. Risk Management
   Directing and coordinating risk management, including risk identification, mitigation, and monitoring in work units/functions.
9. GCG and Audit Follow-up
   Directing and coordinating the implementation of GCG assessments and audits, as well as monitoring and following up on audit results within work units/functions.

Work Program of HC and General Affairs Division in 2025

The work program of HC and General Affairs Division in 2024 includes:

1. Establishing Innovation Governance and Innovation Awards;
2. Refreshment and Monitoring of Change Catalyst Time;
3. Internalizing AKHLAK Core Values;
4. Follow-up on the 2025-2029 Human Capital (HC) Roadmap;
5. Updating Critical Knowledge, Knowledge Toxonomy, and Utilizing Portaverse;
6. Implementing the Multi-Terminal Academy;
7. Employee Coaching and Mentoring Program.

STRATEGIC PLAN FOR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT AND GENERAL AFFAIRS IN 2025

The management of Human Capital and general affairs functions is carried out based on the Company's organizational needs, while ensuring the adequacy in terms of manpower quantity, quality, and qualifications. The Company believes that the implementation of effective Human Capital planning will produce employees who are excellent, talented, and professional. These efforts form an integral part of the Company's business strategy in realizing its vision, mission, and annual targets, while also supporting long-term business sustainability. Therefore, the Company must ensure the availability of manpower that aligns with its business needs.

In preparing manpower planning aligned with the Work Plan and Budget (RKAP) established at the beginning of the year, the Company coordinates with the Directorate of Human Capital of PT Pelindo Multi Terminal. The result of this Human Capital planning is a manpower requirement list, which serves as a reference for recruitment processes and supports accurate employee placement.

The management of Human Capital and Culture in the 2025 strategic plan includes:

1. Development of Innovation Governance and Innovation Award programs;
2. Refreshment & Monitoring of Change Catalyst Time;

3. Internalisasi Core Values AKHLAK;
4. Tindak Lanjut Human Capital (HC) *Roadmap* 2025-2029;
5. *Updating Critical Knowledge, Knowledge Toxonomy,* & Utilisasi *Portaverse*;
6. Implementasi Multi Terminal Academy;
7. Program *Coaching* & *Mentoring* Pekerja.

Target pengelolaan SDM dan budaya dalam rencana strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan aturan, pelaksanaan pelatihan dan lomba inovasi;
2. Pembuatan dan pelaksanaan program budaya;
3. Memastikan bahwa nilai-nilai inti (AKHLAK) benar-benar menjadi pedoman dalam setiap tindakan, keputusan, dan interaksi di organisasi;
4. Pembuatan rencana program HC *Roadmap* dengan *Subholding*;
5. Pembuatan rencana program penyusunan KMAP & monitoring;
6. Pengembangan modul pembelajaran pekerja operasional;
7. Untuk menciptakan tim yang lebih kuat, lebih produktif, dan lebih terlibat, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang Perusahaan.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REKRUTMEN SDM

Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi akan Sumber Daya Manusia yang andal dan berkompeten, Perseroan melaksanakan proses rekrutmen dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan. Tahapan seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan keselarasan antara kompetensi dan keahlian calon karyawan dengan kebutuhan jabatan yang tersedia.

Tenaga kerja yang berkualitas memiliki peran strategis dalam menjaga dan meningkatkan daya saing Perseroan. Oleh karena itu, proses seleksi dirancang untuk menghasilkan karyawan yang mampu memberikan nilai tambah serta keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Perseroan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh kandidat untuk mengembangkan karier, tanpa membedakan gender, ras, suku, maupun agama, dengan tetap berlandaskan pada kompetensi dan bidang keahlian masing-masing.

Pelaksanaan program rekrutmen dilakukan secara komprehensif melalui tahapan evaluasi yang ketat. Setiap kandidat menjalani proses penilaian yang mendalam, meliputi pemeriksaan latar belakang, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja, aktivitas media sosial, serta kondisi kesehatan. Proses seleksi tersebut dilakukan secara cermat guna memastikan kesesuaian antara kebutuhan jumlah tenaga kerja dan kompetensi yang dimiliki calon karyawan.

Dalam penerapannya, Perseroan menggunakan dua jalur rekrutmen, yaitu internal dan eksternal. Rekrutmen internal dilaksanakan melalui mekanisme promosi dan mutasi bagi karyawan yang telah bergabung dengan Perseroan, sedangkan rekrutmen eksternal dilakukan melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Proses rekrutmen dilakukan secara terencana dan sesuai kebutuhan, di mana pada tahun 2025, Perseroan tidak melakukan rekrutmen

3. Internalization of AKHLAK Core Values;
4. Follow-up on the Human Capital (HC) Roadmap 2025–2029;
5. Updating Critical Knowledge, Knowledge Taxonomy, and utilization of Portaverse;
6. Implementation of Multi Terminal Academy;
7. Employee Coaching & Mentoring Programs.

The targets for Human Capital and culture management in the 2025 strategic plan are as follows:
1. Formulation of regulations, implementation of training, and innovation competitions;
2. Development and implementation of cultural programs;
3. Ensuring that core values (AKHLAK) are fully embedded as guidelines in every action, decision, and interaction within the organization;
4. Development of Human Capital Roadmap program plans with the Subholding;
5. Preparation of program plans for KMAP development and monitoring;
6. Development of learning modules for operational employees;
7. To create stronger, more productive, and more engaged teams that ultimately contribute to the Company's long-term success.

HUMAN CAPITAL RECRUITMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

In fulfilling the organization's need for reliable and competent Human Capital, the Company conducts its recruitment process by upholding the principles of fairness and equality. The selection stages are carried out by considering the alignment between candidates' competencies and expertise with the requirements of the available positions.

A high-quality workforce plays a strategic role in maintaining and enhancing the Company's competitiveness. Therefore, the selection process is designed to produce employees who can deliver added value and competitive advantage to the Company. The Company provides equal opportunities for all candidates to develop their careers, without discrimination based on gender, race, ethnicity, or religion, while remaining grounded in individual competencies and areas of expertise.

The recruitment program is carried out comprehensively through rigorous evaluation stages. Each candidate undergoes a thorough assessment process, including background checks, educational and work experience verification, social media activity review, and health evaluation. This selection process is conducted carefully to ensure alignment between manpower requirements and the competencies of prospective employees.

In practice, the Company utilizes two recruitment channels: internal and external. Internal recruitment is carried out through promotion and rotation mechanisms for existing employees, while external recruitment is conducted through Fixed-Term Employment Agreements (PKWT).

Recruitment is conducted in a planned manner and based on actual needs. In 2025, the Company did not carry out any recruitment, as

di mana SDM yang tersedia telah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menunjang kinerja Perseroan.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, Perseroan berkomitmen menghadirkan tenaga kerja dengan kualitas terbaik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Perseroan secara berkelanjutan menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan serta mengembangkan kompetensi pekerja. Perseroan memberikan kesempatan yang sama pada setiap pekerja, mulai dari level *officer* hingga ke *top level* untuk dapat meningkatkan serta mengembangkan kemampuan diri melalui program pendidikan, dan atau pelatihan dengan menganut beberapa prinsip sesuai Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor HK.56/4/5/IKT-17 tanggal 15 Juni 2017.

Prinsip-prinsip yang berlaku di Perseroan adalah:
1. Terfokus berdasarkan strategi pengelolaan SDM;
2. Terencana sesuai hasil pemetaan, arah dan prioritas pengembangan;
3. Efektif dan efisien, pemilihan atau mengutamakan program pengembangan yang tepat dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Dalam rangka membangun kualitas SDM yang berlandaskan tata nilai Perseroan, Direksi menetapkan proses pembelajaran dan pengembangan karyawan yang diarahkan untuk mendukung serta menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan operasional, sekaligus mendorong peningkatan kinerja SDM.

Perseroan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi di seluruh lini operasional secara terencana dan berkesinambungan. Pelaksanaan peningkatan kompetensi tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan kesempatan sebagaimana diatur dalam kode etik Perseroan.

Per 31 Desember 2025, Perseroan telah melaksanakan program pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan dengan realisasi biaya pelatihan yang ditanggung oleh Perseroan.

the existing Human Capital was deemed sufficient to support the Company's operational performance.

POLICY AND IMPLEMENTATION OF EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

In supporting optimal task execution, the Company is committed to creating human capital with the highest quality. To meet this objective, the Company continuously organizes various education and training programs to enhance and develop employee competencies. The Company provides equal opportunities for all employees, from officer level to top management, to improve and develop their capabilities through education and/or training programs, in accordance with the principles outlined in the Board of Directors Regulation of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number HK.56/4/5/IKT-17 dated June 15, 2017.

The principles applied by the Company are as follows:
1. Focused on Human Capital management strategy;
2. Well-planned based on mapping results, development direction, and priorities;
3. Effective and efficient, prioritizing appropriate development programs while considering budget availability.

In building Human Capital quality based on the Company's core values, the Board of Directors establishes learning and employee development processes aimed at supporting and guiding operational decision-making, while also encouraging improved Human Capital performance.

The Company organizes training and competency development programs across all operational lines in a structured and continuous manner. The competency development is carried out by upholding the principle of equal opportunity as stipulated in the Company's code of ethics.

As of December 31, 2025, the Company has implemented training and development programs organized by both internal and external parties, with training costs fully borne by the Company.

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan Gender Tahun 2025
Competency Development by Job Level and Gender Equality in 2025

Level Jabatan Job Level	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pelatihan** Training Subject	**Jumlah Peserta** Number of Participants		
			L M	**P** F	**Jumlah** Total
BOD	*Workshop*	*Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth* bersama Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP dan Kukuh Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth with Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP, and Kukuh	3	-	3
	Podcast	*Leadership Forum* Vol. 6 "*Felt Leadership* - Peran *Leader* dalam Perubahan Budaya" Leadership Forum Vol. 6 "Felt Leadership - The Role of Leaders in Cultural Change"	3	-	3
	Workshop	Kearsipan 2025 2025 Archives	1	-	1

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan Gender Tahun 2025
Competency Development by Job Level and Gender Equality in 2025

Level Jabatan Job Level	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pelatihan Training Subject	Jumlah Peserta Number of Participants		
			L M	P F	Jumlah Total
	Studi Banding Comparative Study	*Learning Center* TMMIN	1	-	1
	Sertifikasi Certification	Praktisi *Coaching* Coaching Practitioner	2	-	2
	Sertifikasi Certification	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko XI, Toward Golden Indonesia 2024: *Risk Management As A Competitive Edge in A Complex World* 11th National Conference of Risk Management Professionals - Toward Golden Indonesia 2045: Risk Management as a Competitive Edge in a Complex World	1	-	1
	Pelatihan Training	*Fundamental Risk Management & Risk Assessment Techniques* (Kelas 2-Lini 1) Fundamental Risk Management & Risk Assessment Techniques (Class 2-Line 1)	1	-	1
	Pelatihan Training	Pelatihan AI *For Productivity* AI For Productivity Training	2	-	2
	Workshop	*Premium Offline Workshop Scale* UP 2.0	1	-	1
	Pelatihan Training	Pelatihan Auditor Internal Terintegrasi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & SMK3 PP RI 50/2012 Tahun 2025 Integrated Internal Auditor Training for ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & SMK3 (Government Regulation No. 50/2012) 2025	1	-	1
	Pelatihan Training	International Seminar IAI 68th Anniversary "Indonesian Accountants: Resilient, Sustainable,and Future Ready-Beyond Numbers Building the Golden Future"	1	-	1
Senior Manager/ Branch Manager	*Workshop*	*Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth* bersama Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP dan Kukuh Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth with Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP, and Kukuh	9	1	10
	Podcast	*Leadership Forum* Vol. 6 "*Felt Leadership* - Peran *Leader* Dalam Perubahan Budaya" Leadership Forum Vol. 6 "Felt Leadership - The Role of Leaders in Cultural Change"	2	1	3
	Pelatihan dan *Workshop* Training and Workshop	IcoFR	2	-	1
	Pelatihan Training	Dasar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Basis of Domestic Component Level (TKDN) for Company Procurement of Goods and Services	7	1	8
	Studi Banding Comparative Study	*Learning Center* TMMIN	2	-	2
	Pelatihan Training	*Awareness* IMO Model Course 3.21	2	-	2
	Pelatihan Training	Bimtek Penambahan Skema Baru LSP Pelindo Technical Guidance on the Addition of New Pelindo LSP Schemes	1	-	1
	In House Training	Implementasi ICOFR PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2025 Implementation of ICOFR at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in 2025	2	-	2
	Pelatihan Training	*Refreshment Investigator*	1	-	1
	Pelatihan Training	*Awareness* SMK3 Tahun 2025 SMK3 Awareness 2025	1	-	1
	Workshop	Kearsipan 2025 2025 Archives	1	-	1
	Pelindo E-Talks	(*Empowering Talks*) Vol. 8 Talk Forward Ask The CEO Raise The Voice Of Generation	1	-	1
	Workshop	*Premium Offline Workshop Scale* UP 2.0	2	-	2
	Workshop	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2025 National Internal Audit Seminar (SNIA) 2025	1	-	1
	Pelatihan Training	*Fundamental Risk Management & Risk Assessment Techniques* (Kelas 2-Lini 1) Fundamental Risk Management & Risk Assessment Techniques (Class 2 - Line 1)	5	1	6

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan Gender Tahun 2025
Competency Development by Job Level and Gender Equality in 2025

Level Jabatan Job Level	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pelatihan** Training Subject	**Jumlah Peserta** Number of Participants		
			L M	**P** F	**Jumlah** Total
	Workshop	*Strengthening Negotiation Skills For Strategic Collaboration In 6 Port & Logistics Industry*	1	-	1
	Pelatihan dan *Workshop* Training and Workshop	Pelatihan dan *Workshop* IcoFR ICoFR Training and Workshop	4	-	4
	Pelatihan Training	Pelatihan AI *For Productivity* AI For Productivity Training	9	1	10
	Pelatihan Training	Pelatihan Auditor Internal Terintegrasi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & SMK3 PP RI 50/2012 Tahun 2025 Integrated Internal Auditor Training for ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & SMK3 (Government Regulation No. 50/2012) 2025	1	-	1
Asisten Senior Manager/Deputi Branch Manager Assistant Senior Manager/Deputy Branch Manager	*Workshop*	*Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth* bersama Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP dan Kukuh Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth with Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP, and Kukuh	12	1	13
	Podcast	*Leadership Forum* Vol. 6 "*Felt Leadership* - Peran *Leader* Dalam Perubahan Budaya" Leadership Forum Vol. 6 "Felt Leadership - The Role of Leaders in Cultural Change"	6	2	8
	Pelatihan Training	*Refreshment Knowledge Map* & *Updating Critical Knowledge*	9	6	15
	Pelatihan dan *Workshop* Training and Workshop	ICoFR	3	-	3
	Workshop	Kearsipan 2025 Archives 2025	1	-	1
	Pelindo E-Talks	(*Empowering Talks*) Vol. 8 *Talk Forward Ask The CEO Raise The Voice Of Generation*	7	5	12
	Pelatihan Training	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko XI - Toward Golden Indonesia 2045 : *Risk Management As A Competitive Edge in A Complex World* 11th National Conference of Risk Management Professionals - Toward Golden Indonesia 2045: Risk Management as a Competitive Edge in a Complex World	-	1	1
	Pelatihan Training	*Fundamental Risk Management & Risk Assessment Techniques* (Kelas 2-Lini 1) Fundamental Risk Management & Risk Assessment Techniques (Class 2 - Line 1)	7	3	10
	Sertifikasi Certification	*Community Development Officer* (CDO)	1	-	1
	Workshop	*Innovation Experience*	1	-	1
	Pelatihan Training	Dasar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Basis of Domestic Component Level (TKDN) for Company Procurement of Goods and Services	6	3	9
	Pelatihan Training	*Awareness* SMK3 Tahun 2025 2025 Occupational Health and Safety Management System (SMK3) Awareness	5	3	8
	Studi Banding Comparative Study	*Learning Center* TMMIN	4	1	5
	Workshop	*Safety Operation* dan *Quality Control* 2025 Satelit Belawan Safety Operation and Quality Control 2025 Belawan Satellite	2	-	2
	Pelatihan Training	*Refreshment Investigator*	1	1	2
	Pelatihan Training	*Awareness* IMO Model Course 3.21	1	-	1
	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 Government Goods/Services Procurement Competency (PBJP) Level 1	1	-	1

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan Gender Tahun 2025
Competency Development by Job Level and Gender Equality in 2025

Level Jabatan Job Level	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pelatihan Training Subject	Jumlah Peserta Number of Participants		
			L M	P F	Jumlah Total
	In House Training	Implementasi ICOFR PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2025 Implementation of ICOFR PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in 2025	1	2	3
	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Nasional CRMO CRMO National Certification	-	1	1
	Pelatihan Training	*Manpower Planning* Pelindo Pelindo Manpower Planning	-	1	1
	Pelatihan Training	Pembahasan Lanjutan Metode Analisis Data *Manpower Planning* Advanced Discussion of Manpower Planning Data Analysis Methods	-	1	1
	Pelatihan Training	*Refresher* (Penyegaran) *Training* SAP HCM - *Time Evaluation* terkait Evaluasi Kehadiran Pekerja SAP HCM Time Evaluation Training Refresher for Employee Attendance Evaluation	1	1	2
	Sertifikasi Certification	Tenaga Ahli Strategi Pemasaran (*Marketing Strategist*) Marketing Strategist	-	1	1
	Sertifikasi Certification	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko XI, Toward Golden Indonesia 2024: *Risk Management As A Competitive Edge in A Complex World* 11th National Conference of Risk Management Professionals, Toward Golden Indonesia 2024: Risk Management as a Competitive Edge in a Complex World	-	1	1
	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	Pendidikan Sertifikasi Auditor Hukum Indonesia Indonesian Legal Auditor Certification Education	-	1	1
	Sertifikasi Certification	Perpanjangan Lisensi Sertifikasi Ahli K3 Umum General OHS Expert License Extension	2	-	2
	Pelatihan Training	*Financial Modeling For Feasibility Study*	1	-	1
	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	QRMO Training and Certification	1	-	1
	Pelatihan Training	*Fundamental Risk Management & Risk Assessment Techniques* (Kelas 1-*Beginner*) Fundamental Risk Management & Risk Assessment Techniques (Class 1 - Beginner)	9	2	11
	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Tenaga Ahli Strategi Pemasaran (*Marketing Strategist*) By BNSP Marketing Strategist Certification by BNSP	-	1	1
	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Manajer Pengolahan LB3 (PLB3) dan Operator Penyimpanan LB3 (OPLB3) LB3 Processing Manager (PLB3) and LB3 Storage Operator (OPLB3) Certification	-	1	1
	Pelatihan dan Workshop Training and Workshop	Pelatihan dan *Workshop* IcoFR IcoFR Training and Workshop	9	4	13
	Pelatihan Training	Pelatihan AI *For Productivity* AI for Productivity Training	16	7	23
	Pelatihan Training	Pelatihan Auditor Internal Terintegrasi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & SMK3 PP RI 50/2012 Tahun 2025 Integrated Internal Auditor Training for ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & SMK3 PP RI 50/2012, 2025	4	3	7
Staf/Pelaksana Staff/Officer	*Workshop*	*The Catalyst Workshop: Refresh Your Energy*	2	-	2
	Pelatihan Training	Pelatihan Auditor Internal Terintegrasi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & SMK3 PP RI 50/2012 Tahun 2025 Integrated Internal Auditor Training for ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & SMK3 PP RI 50/2012, 2025	2	1	3
	Pelatihan dan Workshop Training and Workshop	Pelatihan dan *Workshop* IcoFR IcoFR Training and Workshop	2	-	2

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan Gender Tahun 2025
Competency Development by Job Level and Gender Equality in 2025

Level Jabatan Job Level	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pelatihan Training Subject	Jumlah Peserta Number of Participants		
			L M	P F	Jumlah Total
	Pelatihan Training	*Fundamental Risk Management & Risk Assessment Techniques* (Kelas 2-Lini 1) Fundamental Risk Management & Risk Assessment Techniques (Class 2 - Line 1)	-	1	1
	Pelatihan Training	*Fundamental Risk Management & Risk Assessment Techniques* (Kelas 1-Beginner) Fundamental Risk Management & Risk Assessment Techniques (Class 1 - Beginner)	2	-	2
	Workshop	*Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth* bersama Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP dan Kukuh Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth with Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP, and Kukuh	35	1	36
	In House Training	Implementasi ICOFR PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2025 Implementation of ICOFR at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in 2025	2	-	2
	Pelatihan dan Workshop Training and Workshop	ICoFR	2	1	3
	Pelatihan Training	*Refreshment Knowledge Map & Updating Critical Knowledge*	6	1	7
	Pelatihan Training	Bahasa Inggris English	5	-	5
	Studi Banding Comparative study	*Learning Center* TMMIN	3	1	4
	Pelatihan Training	*Awareness* SMK3 Tahun 2025 SMK3 Awareness 2025	1	-	1
	Workshop	*The Catalyst Workshop: Refresh Your Energy*	2	-	2
	Pelatihan Training	Safety Operation dan *Quality Control* 2025 Satelit Belawan Safety Operation and Quality Control 2025 Belawan Satellite	2	-	2
	Pelatihan Training	Dasar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Basis for Domestic Component Level (TKDN) in Company Procurement of Goods and Services	2	-	2
	Workshop	*Innovation Experience*	1	-	1
	Pelindo E-Talks	(*Empowering Talks*) Vol. 8 *Talk Forward Ask The* CEO *Raise The Voice Of Generation*	-	2	2
	Pelatihan Training	*Refresher* (Penyegaran) *Training* SAP HCM - *Time Evaluation* terkait Evaluasi Kehadiran Pekerja SAP HCM Time Evaluation RefreshmentTraining related to Employee Attendance Evaluation	1	-	1
	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	Pendidikan Sertifikasi Auditor Hukum Indonesia Indonesian Legal Auditor Certification Education	1	-	1
	Sertifikasi Certification	Perpanjangan Lisensi Sertifikasi Ahli K3 Umum General OHS Expert License Extension	2	-	2
	Pelatihan Training	*Financial Modeling For Feasibility Study*	1	-	1
	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	*QRMO Training and Certification*	1	-	1

Biaya Pengembangan Kompetensi
Competency Development Costs

Deskripsi Description	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference (Rp)	Persentase Percentage (%)
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	1.028.147.427	1.156.584.152	128.436.725	11,10%

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karier

Dalam kerangka pengelolaan SDM, pengembangan karier merupakan suatu proses yang mencakup kebijakan dan pelaksanaan program guna meningkatkan keterampilan, pengalaman, serta jenjang karier karyawan agar mampu mencapai potensi optimalnya dalam organisasi.

Kebijakan pengembangan karier yang baik tidak hanya memberikan kejelasan jenjang karier, tetapi juga meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan.

1. Tujuan Kebijakan Pengembangan Karier
   a. Meningkatkan Kompetensi Karyawan → Agar karyawan selalu relevan dengan kebutuhan bisnis.
   b. Membangun Loyalitas dan Motivasi → Memberikan kesempatan pertumbuhan akan meningkatkan keterlibatan karyawan.
   c. Memastikan Kesiapan Suksesi (*Succession Planning*) → Mengisi posisi kunci dengan talenta internal.
   d. Menyesuaikan Kebutuhan Bisnis dan Talenta → Agar organisasi lebih *agile* dan kompetitif.
2. Kebijakan Pengembangan Karier yang Efektif
   Agar kebijakan pengembangan karier berjalan efektif, perlu diterapkan prinsip-prinsip berikut:
   a. Kesempatan Karier yang Transparan → Perseroan harus memiliki sistem yang jelas tentang promosi, rotasi, dan pengembangan.
   b. Kombinasi Pengalaman dan Pelatihan → Karier tidak hanya berkembang melalui pelatihan formal tetapi juga dari pengalaman kerja langsung.
   c. Karyawan Sebagai Pemilik Kariernya → Perseroan memfasilitasi, tetapi karyawan juga harus proaktif dalam mengembangkan diri.
   d. Fokus pada Kebutuhan Organisasi dan Individu → Menyesuaikan pengembangan karier dengan strategi bisnis.
   e. Evaluasi dan Penyesuaian Berkala → Program pengembangan karier harus selalu dievaluasi agar tetap relevan.
3. Strategi dan Pelaksanaan Pengembangan Karier
   a. *Career Path & Career Ladder* (Jenjang Karier yang Jelas)
      Menetapkan jalur karier yang bisa ditempuh karyawan berdasarkan kompetensi dan pengalaman.
      i) *Career Ladder* → Jenjang vertikal (misalnya dari Junior Staff → Senior Staff → Supervisor → Manager).
      ii) *Career Lattice* → Perpindahan ke posisi lain yang setara untuk memperluas pengalaman sebelum promosi.
      iii) *Succession Planning* → Menyiapkan talenta untuk menggantikan posisi strategis dalam organisasi.

Career Development Policy and Implementation

Within the framework of Human Capital management, career development is a process that includes policies and program implementation to improve employees' skills, experience, and career paths hence they can achieve their optimal potential within the organization.

A well-structured career development policy not only provides clarity on career paths but also boosts employee motivation, productivity, and retention.

1. Objectives of Career Development Policy
   a. Enhancing Employee Competency → Ensuring employees remain relevant to business needs.
   b. Building Loyalty and Motivation → Providing growth opportunities to increase employee engagement.
   c. Ensuring Succession Planning → Filling key positions with internal talent.
   d. Aligning Business and Talent Needs → Making the organization more agile and competitive.
2. Effective Career Development Policy
   To ensure the effectiveness of career development policies, the following principles must be applied:
   a. Transparent Career Opportunities → The Company must have a clear system for promotions, rotations, and development.
   b. Combination of Experience and Training → Career growth comes not only from formal training but also from hands-on work experience.
   c. Employees as Owners of Their Careers → The Company facilitates development, but employees must proactively enhance their skills.
   d. Focus on Both Organizational and Individual Needs → Aligning career development with business strategy.
   e. Regular Evaluation and Adjustments → Career development programs should be continuously evaluated to remain relevant.
3. Career Development Strategies and Implementation
   a. Career Path & Career Ladder (Clear Career Progression)
      Establish career paths that employees can take based on competency and experience.
      i) Career Ladder → Vertical progression (e.g., Junior Staff → Senior Staff → Supervisor → Manager).
      ii) Career Lattice → Lateral moves to equivalent positions to broaden experience before promotion.
      iii) Succession Planning → Preparing talent to take on strategic roles within the organization.

b. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan (*Learning & Development*)
Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar siap untuk jenjang karier berikutnya.
   i) *On-the-Job Training* → Pembelajaran langsung di tempat kerja.
   ii) *Training & Certification Program* → Pelatihan formal, seminar, atau sertifikasi profesional.
   iii) E-*Learning & Self-Development* → Karyawan diberi akses ke kursus *online*.
   iv) *Cross-Functional Training* → Pelatihan di berbagai departemen untuk meningkatkan fleksibilitas.

c. Program *Coaching & Mentoring*
Membantu karyawan dalam merencanakan dan mengembangkan karier dengan bimbingan langsung.
   i) *Coaching* → Pembinaan yang dilakukan oleh atasan langsung atau profesional eksternal.
   ii) *Mentoring* → Pendampingan oleh senior atau manajer yang lebih berpengalaman.
   iii) *Reverse Mentoring* → Senior belajar dari junior, terutama dalam bidang teknologi dan inovasi.

d. *Job Rotation & Stretch Assignment*
Memberikan tantangan baru dengan perpindahan tugas atau tanggung jawab tambahan.
   i) *Job Rotation* → Pemindahan ke unit kerja lain untuk memperkaya pengalaman.
   ii) *Stretch Assignment* → Menugaskan proyek baru yang menantang untuk meningkatkan keterampilan.
   iii) *Secondment Program* → Menugaskan karyawan di anak perusahaan atau proyek lintas fungsi.

e. Sistem Penilaian Kinerja (*Performance Appraisal*)
Evaluasi kinerja secara berkala untuk menentukan kesiapan promosi atau pengembangan lebih lanjut.
   i) 360-*Degree Feedback* → Evaluasi dari atasan, rekan kerja, bawahan.
   ii) *Individual Development Plan* (IDP) → Rencana pengembangan berbasis hasil evaluasi kinerja.
   iii) *Performance Review Meeting* → Diskusi berkala antara karyawan dan manajer terkait progres karier.

Sistem Manajemen Kinerja Karyawan

Dalam praktik pengelolaan organisasi, Sistem Manajemen Kinerja berfungsi sebagai suatu proses strategis yang digunakan untuk menetapkan, memantau, mengevaluasi, serta meningkatkan kinerja individu, tim, dan Perseroan secara menyeluruh. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi organisasi diterjemahkan ke dalam tindakan yang terukur dan dapat dikelola secara efektif.

Kebijakan Remunerasi dan Pemberian Manfaat Bagi Karyawan

Perseroan menetapkan komposisi remunerasi yang proporsional dan seimbang antara komponen tetap dan berbasis kinerja, termasuk remunerasi yang dibayarkan secara langsung maupun yang bersifat ditangguhkan. Indikator kinerja, termasuk indikator non-keuangan,

b. Employee Learning & Development

Enhancing employees' skills and knowledge to prepare them for the next level in their careers.
   i) On-the-Job Training → Learning directly in the workplace.
   ii) Training & Certification Programs → Formal training, seminars, or professional certifications.
   iii) E-Learning & Self-Development → Employees have access to online courses.
   iv) Cross-Functional Training → Training in different departments to increase flexibility.

c. Coaching & Mentoring Program
Helping employees plan and develop their careers with direct guidance.
   i) Coaching → Guidance from direct supervisors or external professionals.
   ii) Mentoring → Support from senior employees or managers with more experience.
   iii) Reverse Mentoring → Senior employees learning from junior employees, especially in technology and innovation.

d. Job Rotation & Stretch Assignment
Providing new challenges through task reassignment or additional responsibilities.
   i) Job Rotation → Moving employees to different units to enrich their experience.
   ii) Stretch Assignment → Assigning challenging new projects to enhance skills.
   iii) Secondment Program → Assigning employees to subsidiaries or cross-functional projects.

e. Performance Appraisal System
Regular performance evaluations to assess promotion readiness or further development.
   i) 360-Degree Feedback → Evaluations from supervisors, peers, and subordinates.
   ii) Individual Development Plan (IDP) → Development plan based on performance evaluations.
   iii) Performance Review Meetings → Periodic discussions between employees and managers regarding career progress.

Employee Performance Management System

In organizational management practice, a Performance Management System serves as a strategic process used to define, monitor, evaluate, and improve the performance of individuals, teams, and the Company as a whole. This system aims to ensure that organizational strategy is translated into measurable and effectively manageable actions.

Remuneration and Benefits Policy For Employees

The Company establishes a proportional and balanced remuneration composition between fixed and performance-based components, including both direct and deferred remuneration. Performance indicators, including non-financial indicators, are ensured to be

dipastikan relevan serta dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja korporasi dalam jangka panjang. Pemberian insentif remunerasi juga diselaraskan dengan kebijakan manajemen risiko Perseroan.

Sebagai wujud komitmen Perseroan dalam memperlakukan karyawan sebagai mitra strategis, seluruh jajaran manajemen senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, khususnya terkait penerapan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/K) yang berlaku pada masing-masing unit kerja Perseroan.

Perseroan juga menetapkan kompensasi program kesejahteraan dan fasilitas bagi karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas setiap karyawan, seperti:
1. *Base Salary*;
2. Tunjangan Kelas Individu;
3. Tunjangan Representasi;
4. Tunjangan Jabatan;
5. Insentif Produktivitas;
6. Tunjangan Hari Raya;
7. Tunjangan Pendidikan;
8. Tunjangan Cuti;
9. Bonus Tahunan;
10. Gaji ke 13;
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
12. *Employee Gathering*.

Penilaian Kinerja Karyawan

Dalam rangka mengidentifikasi potensi serta talenta yang dimiliki karyawan, Perseroan melaksanakan penilaian kinerja secara berkala. Hasil penilaian tersebut digunakan sebagai dasar dalam penetapan program pengembangan serta pemenuhan kebutuhan organisasi Perseroan. Penilaian kinerja karyawan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI), yaitu metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu individu, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. KPI membantu perusahaan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja dalam berbagai aspek seperti keuangan, operasional, SDM, dan inovasi.

Kebijakan *Reward* dan *Punishment*

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pekerja, Perseroan menerapkan mekanisme *reward* dan *punishment*. Pemberian *reward* dimaksudkan untuk memotivasi pekerja agar mencapai target kinerja secara optimal sehingga berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

Perseroan memberikan *reward* yang bersifat finansial maupun non-finansial dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan. Salah satu bentuk *reward* tersebut adalah insentif performansi yang diberikan berdasarkan hasil Penilaian Performansi Bulanan serta pencapaian target *Key Performance Indicator* (KPI) yang diklasifikasikan ke dalam lima kategori sesuai dengan persentase kelas jabatan. Selain itu, Perseroan juga memberikan apresiasi kepada pekerja dengan kinerja istimewa berupa sertifikat serta paket ibadah umrah atau bentuk apresiasi sejenis.

relevant and designed to support long-term corporate performance. Remuneration incentives are also aligned with the Company's risk management policy.

As a manifestation of the Company's commitment to treating employees as strategic partners, all levels of management consistently comply with applicable laws and regulations in the employment sector, particularly regarding the implementation of the Provincial/Regency/City Minimum Wage (UMP/K) applicable to each of the Company's work units.

The Company also establishes employee welfare programs and benefits to improve the well-being and productivity of each employee, such as:
1. Base Salary;
2. Individual Class Allowance;
3. Representation Allowance;
4. Position Allowance;
5. Productivity Incentive;
6. Holiday Allowance;
7. Education Allowance;
8. Leave Allowance;
9. Annual Bonus;
10. 13 Month Salary;
11. Healthcare Facilities;
12. Employee Gathering.

Employee Performance Appraisal

To identify employee potential and talents, the Company conducts regular performance appraisal. The results of these assessments are used as the basis for establishing development programs and meeting the Company's organizational needs. Employee performance appraisal utilizes Key Performance Indicators (KPIs), metrics used to measure the performance of an individual, team, or organization in achieving specific goals. KPIs help the company monitor, evaluate, and improve performance across various aspects, including finance, operations, human capital, and innovation.

Reward and Punishment Policy

In an effort to drive employee performance improvement, the Company applies a reward and punishment mechanism. The provision of rewards is intended to motivate employees to achieve performance targets optimally, thereby contributing to the achievement of the Company's objectives.

The Company provides both financial and non-financial rewards, taking into account its financial capacity. One form of reward is performance incentives granted based on Monthly Performance Assessments and the achievement of Key Performance Indicator (KPI) targets, which are classified into five categories according to job grade percentages. In addition, the Company also recognizes outstanding employees through certificates and umrah pilgrimage packages or similar forms of appreciation.

Di sisi lain, penerapan *punishment* dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh pekerja sehingga potensi hambatan atau gangguan terhadap kelancaran aktivitas kerja dapat diminimalkan.

Pemberian *punishment* dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan jenis sanksi yang berlaku, meliputi teguran, surat peringatan, serta sanksi lainnya yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Dalam kerangka pengelolaan SDM, fasilitas dan kesejahteraan karyawan merupakan rangkaian manfaat, kompensasi, serta dukungan lingkungan kerja yang disediakan Perseroan untuk meningkatkan kepuasan, kesehatan, dan produktivitas karyawan. Program ini memiliki peran penting dalam menjaga motivasi, meningkatkan tingkat retensi, serta membangun budaya kerja yang positif dan berdaya saing.

Fasilitas dan kesejahteraan karyawan juga menjadi komponen strategis dalam manajemen Sumber Daya Manusia yang ditujukan untuk mendorong kepuasan, produktivitas, dan keberlangsungan tenaga kerja. Perseroan yang mampu menyediakan fasilitas dan program kesejahteraan yang memadai akan memiliki karyawan yang lebih loyal, termotivasi, serta menunjukkan kinerja yang optimal.

1. Jenis-Jenis Fasilitas Karyawan
   a. Fasilitas fisik di tempat kerja.
   b. Fasilitas digital & teknologi.
   c. Fasilitas fleksibilitas kerja yang diterapkan secara parsial dan momen tertentu.
2. Program Kesejahteraan Karyawan (*Employee Well-being* Program)
   a. Kesejahteraan Finansial
      i) Program yang membantu stabilitas keuangan karyawan.
      ii) Gaji yang Kompetitif → Sesuai dengan standar industri dan jabatan.
      iii) Bonus dan Insentif Kinerja → Berdasarkan pencapaian target individu/tim.
      iv) Tunjangan Hari Raya (THR) → Khususnya di negara dengan kebijakan THR.
      v) Program Dana Pensiun → Jaminan keuangan untuk karyawan setelah pensiun.
   b. Kesejahteraan Kesehatan
      i) Asuransi Kesehatan → Untuk karyawan dan keluarganya.
      ii) *Medical Check-Up* Rutin → Pemeriksaan kesehatan berkala.
      iii) Program Kesehatan (*Wellness* Program) → Yoga, *gym*, dan kampanye gaya hidup sehat.
   c. Kesejahteraan Pengembangan Karier
      i) Pelatihan & Sertifikasi → Mendukung pengembangan kompetensi dan keterampilan.
      ii) Beasiswa & Program Pendidikan → Bantuan untuk studi lanjutan atau kursus profesional.
      iii) *Coaching & Mentoring* → Dukungan dari atasan atau mentor dalam pengembangan karier.
      iv) Promosi & *Career Path* yang Jelas → Struktur jenjang karier yang transparan dan adil.

On the other hand, the implementation of punishment aims to prevent employee violations, thereby minimizing potential obstacles or disruptions to work activities.

The punishment is carried out in accordance with applicable levels and types of sanctions, including verbal warnings, written warning letters, and other sanctions adjusted to the severity of the violations committed.

Employee Facilities and Welfare

Within the Human Capital management, employee facilities and welfare represent a series of benefits, compensation, and workplace support provided by the Company to enhance employee satisfaction, health, and productivity. This program plays an important role in maintaining motivation, improving retention rates, and fostering a positive and competitive work culture.

Employee facilities and welfare also constitute a strategic component of Human Capital management aimed at promoting satisfaction, productivity, and workforce sustainability. Companies that are able to provide adequate facilities and welfare programs tend to have more loyal, motivated employees who demonstrate optimal performance.

1. Types of Employee Facilities
   a. Physical Workplace Facilities
   b. Digital & Technology Facilities
   c. Work Flexibility Facilities that are applied partially and on specific occasions
2. Employee Well-being Programs
   a. Financial Well-being
      i) Programs that support employees' financial stability
      ii) Competitive Salary → In line with industry standards and job positions
      iii) Bonuses and Performance Incentives → Based on individual/team achievements
      iv) Religious Holiday Allowance (THR) → especially in countries with THR policies
      v) Pension Fund Programs → Financial security for employees after retirement
   b. Health & Wellness Well-being
      i) Health Insurance → Coverage for employees and their families
      ii) Regular Medical Check-Ups → Periodic health screenings
      iii) Wellness Programs → Yoga, gym access, and healthy lifestyle campaigns
   c. Career Development Well-being
      i) Training & Certification → Supporting skill and competency development
      ii) Scholarships & Education Programs → Assistance for further studies or professional courses
      iii) Coaching & Mentoring → Support from supervisors or mentors for career growth
      iv) Promotion & Clear Career Path → A transparent and fair career progression structure

Turnover Karyawan

Dalam rangka memastikan tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas guna mendukung pencapaian kinerja Perseroan secara optimal, Perseroan melaksanakan proses rekrutmen sebagai tindak lanjut pemenuhan kebutuhan tenaga kerja pada sejumlah posisi. Rekrutmen tersebut dilakukan untuk mengantisipasi perputaran karyawan yang terjadi akibat memasuki masa pensiun, pengunduran diri, maupun penambahan personel, sehingga komposisi pegawai tetap terjaga secara proporsional.

Per 31 Desember 2025, terdapat penambahan/pengurangan karyawan dengan uraian sebagai berikut:

EMPLOYEE TURNOVER

In order to ensure the availability of qualified Human Capital to support optimal achievement of the Company's performance, the Company is carrying out recruitment processes as a follow-up to fulfill manpower requirements for several positions. This recruitment is conducted to anticipate employee turnover due to retirement, resignation, as well as manpower additions, thereby maintaining a proportional employee composition.

As of December 31, 2025, there were additions/reductions in employees with the following details:

Perihal About	**2025 (orang)** (people)	**2024 (orang)** (people)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Jumlah (orang) (people)	**Persentase** Percentage **(%)**
Jumlah Karyawan yang Masuk Number of New Employees	**16**	8	8	100,00%

Uraian Description	**2025**		**2024**		**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
	Jumlah (orang) Amount (people)	**Persentase** Percentage (%)	**Jumlah (orang)** Amount (people)	**Persentase** Percentage (%)	**Jumlah (orang)** Amount (people)	**Persentase** Percentage (%)
Mengundurkan diri Resign	**-**	**-**	1	4,17%	-	-
Pensiun Retire	**-**	**-**	2	8,33%	-	-
Meninggal Dunia Passed Away	**-**	**-**	1	4,17%	-	-
Pemutusan Hubungan Kerja Termination of Employment	**1**	**4,00%**	1	4,17%	-	-
Pindah ke Cabang/Unit Lain Transfer to Other Branch/Unit	**8**	**32,00%**	11	45,83%	-3	-27,27%
Pindah dari cabang/unit lain Transfer from Other Branch/Unit	**16**	**64,00%**	8	33,33%	8	100,00%
Jumlah Total	**25**	**100,00%**	**24**	**100,00%**	**1**	**4,17%**

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang kondusif, Perseroan menjamin keberadaan Serikat Pekerja (SP) di lingkungan kerja sebagai perwujudan pemenuhan hak berserikat bagi karyawan. Serikat pekerja di lingkungan Perseroan bernama Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu dan telah tercatat pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 9998/-1;831 tanggal 6 Oktober 2021.

Perseroan mendukung aktivitas Serikat Pekerja. Hubungan yang harmonis dan konstruktif yang saling menghormati tersebut dimanifestasikan dalam bentuk butir-butir kesepakatan dan aturan sebagaimana tercantum pada Nomor KP.08.03/10/11/2/HBUP/UTMA/PLND-23 dan Nomor 01/XI/SKEP/SPPI-B/2023, yang ditinjau dan diperbaharui secara berkala serta ditandatangani oleh Manajemen dan Serikat Pekerja.

Dalam memelihara hubungan yang konstruktif dengan Serikat Pekerja, Perseroan secara rutin menyelenggarakan pertemuan berkala untuk mensosialisasikan kebijakan dan program Manajemen, sekaligus sebagai sarana penyelesaian permasalahan hubungan industrial serta penanganan keluhan karyawan.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENSIUN

Dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan pascakerja, Perseroan untuk sementara waktu menerapkan kebijakan yang sebelumnya berlaku di PT Pelindo I, II, III, dan IV, dengan mengacu pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/15/10/1/KIRF/UTMA/PLND-21 tanggal 15 Oktober 2021.

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN KERJA YANG KONDUSIF

Dalam upaya menciptakan hubungan kerja yang kondusif, Perseroan menerapkan metode *coaching* dan *mentoring* yang efektif serta secara rutin menyelenggarakan pertemuan berkala untuk mensosialisasikan kebijakan dan program Manajemen sebagai sarana penyelesaian permasalahan di lingkungan IPCC.

SURVEI KETERIKATAN/KEPUASAN PEGAWAI

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan survei kepuasan pegawai untuk mengukur tingkat kepuasan dan keterikatan pegawai terhadap Perseroan. Tingkat kepuasan dan keterikatan pegawai merujuk pada sikap umum seorang pegawai terhadap pekerjaan dan Perseroan. Tingkat kepuasan dan keterikatan yang tinggi akan menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan tersebut. Sebaliknya, ketidakpuasan dan keterikatan pegawai menunjukkan sikap yang kontraproduktif terhadap pekerjaannya.

Melalui survei ini, pekerja mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mengenai kondisi atau faktor-faktor yang berhubungan dengan mereka. Survei kemudian digunakan Perseroan sebagai media komunikasi dari pekerja ke Manajemen Perseroan.

INDUSTRIAL RELATIONS

In order to create a conducive industrial relations environment, the Company ensures the presence of a Labor Union within the workplace as a form of fulfilling employees' right to organize. The labor union within the Company is named Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu and has been officially registered with the North Jakarta Sub-Department of Manpower, Transmigration, and Energy under Number: 9998/-1;831 dated October 6, 2021.

The Company supports the activities of the Labor Union. This harmonious and constructive relationship, built on mutual respect, is manifested in agreements and regulations as stipulated in Number KP.08.03/10/11/2/HBUP/UTMA/PLND-23 and Number 01/XI/SKEP/SPPI-B/2023, which are periodically reviewed and updated, and signed by both Management and the Labor Union.

To maintain a constructive relationship with the Labor Union, the Company regularly holds periodic meetings to socialize Management policies and programs, as well as to serve as a forum for resolving industrial relations issues and addressing employee grievances.

RETIREMENT POLICY AND PROGRAM

In implementing post-employment welfare policies, the Company temporarily adopts the policies previously applied in PT Pelindo I, II, III, and IV, referring to the Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number HK.01/15/10/1/KIRF/UTMA/PLND-21 dated October 15, 2021.

ESTABLISHMENT OF A CONDUCIVE WORK ENVIRONMENT

To foster a conducive working environment, the Company implements effective coaching and mentoring methods and regularly conducts periodic meetings to communicate Management policies and programs, as well as to resolve issues within the IPCC environment.

EMPLOYEE ENGAGEMENT/ SATISFACTION SURVEY

Throughout 2025, the Company conducted employee satisfaction surveys to measure the level of employee satisfaction and engagement with the Company. Employee satisfaction and engagement reflect an individual's overall attitude toward their job and the Company. High levels of satisfaction and engagement indicate a positive attitude toward the job. Conversely, employee dissatisfaction and low levels of engagement may reflect a counterproductive attitude toward the job.

Through this survey, employees are given the opportunity to express their views regarding conditions or factors affecting them. The survey also serves as a communication channel from employees to Management.

Selain itu, di sepanjang tahun 2025 Perseroan menyelenggarakan survei kepuasan dan keterikatan pegawai dengan skor 4,19.

RENCANA PENGEMBANGAN SDM 2026

Memasuki tahun 2026, Perseroan menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan SDM melalui peningkatan kompetensi teknis yang bersifat spesifik melalui berbagai program pilihan yang disesuaikan dengan bidang usaha Perseroan, serta pelaksanaan sertifikasi keahlian pada bidang-bidang bisnis yang memerlukan kompetensi khusus dengan melibatkan lembaga keahlian yang kredibel.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Perseroan pada tahun 2026, baik dari aspek operasional maupun komersial, Perseroan telah menyusun sejumlah rencana sebagai langkah proaktif, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Inovasi IPCC;
2. Peningkatan Kompetensi Pekerja Tahun 2026;
3. Implementasi *Integrated Culture*;
4. Human Capital Roadmap Tahun 2025-2029;
5. *Coaching* & *Mentoring* Pekerja Tahun 2026;
6. Implementasi *Knowledge Management*.

In addition, throughout 2025, the company conducted an employee satisfaction and engagement survey, which yielded a score of 4.19.

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PLAN FOR 2026

Entering 2026, the Company reaffirms its commitment to supporting Human Capital development through the enhancement of specific technical competencies via various tailored programs aligned with the Company's business sectors, as well as the implementation of professional certification in areas requiring specialized expertise, involving credible professional institutions.

To support the achievement of the Company's performance in 2026, both operationally and commercially, the Company has formulated several plans as proactive measures, including:

1. Implementation of IPCC Innovation Program;
2. Enhancement of Employee Competencies in 2026;
3. Implementation of Integrated Culture;
4. Human Capital Roadmap 2025–2029;
5. Employee Coaching & Mentoring Program 2026;
6. Implementation of Knowledge Management.

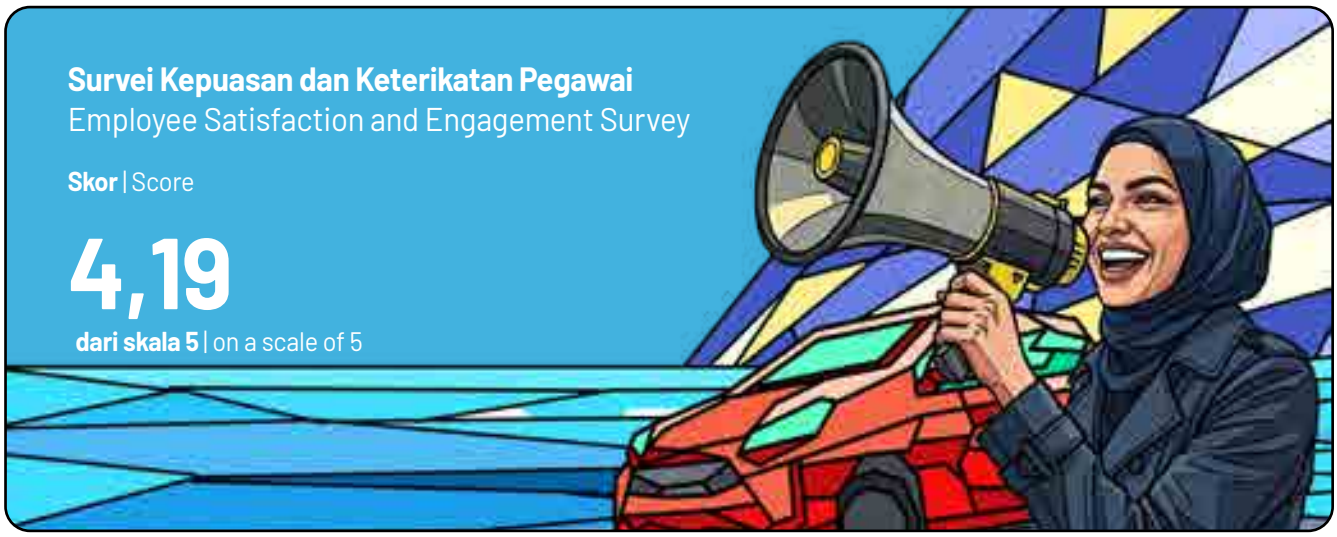

Teknologi Informasi
Information Technology

Dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Perseroan, pengembangan teknologi informasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan serta efisiensi operasional terminal kendaraan pelabuhan yang berstandar internasional. Teknologi informasi Perseroan diarahkan untuk berperan sebagai tulang punggung operasional terminal kendaraan pelabuhan yang terintegrasi dengan jaringan internasional.

Karena itu, Direksi menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif serta menyusun dan melakukan evaluasi secara berkala, master plan teknologi informasi yang berfungsi sebagai pedoman pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi untuk mencapai tujuan Perseroan.

Sistem teknologi informasi di lingkup Perseroan juga didukung dengan SDM yang mumpuni dan unggul yang berperan dalam mengawasi dan mengendalikan sistem tersebut.

Adapun visi dan misi Perseroan dalam pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja dan perkembangan Perseroan adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

In realizing the Company's Vision and Mission, the development of information technology is carried out to improve service quality and operational efficiency of internationally standardized vehicle terminal operations. The Company's information technology is directed to serve as the backbone of integrated vehicle terminal operations connected to international networks.

Accordingly, the Board of Directors establishes effective information technology governance and prepares and periodically evaluates an information technology master plan that serves as a guideline for the utilization and development of information technology to achieve the Company's objectives.

The Company's information technology systems are also supported by competent and highly capable Human Capital responsible for overseeing and controlling these systems.

The Company's vision and mission regarding the utilization of information technology systems to support its performance and growth are outlined as follows.

VISI TI
IT VISION

Tersedianya ekosistem layanan bisnis dan operasional *Car Terminal* kelas dunia dengan pondasi Teknologi Informasi yang terintegrasi, adaptif serta *agile* mengikuti perkembangan dan kebutuhan bisnis serta *trend* teknologi.
Availability of a world-class Car Terminal business and operational services ecosystem with an integrated, adaptive and agile Information Technology foundation following developments and business needs and technological trends.

MISI TI
IT MISSION

- Mendukung transformasi dan terwujudnya ekosistem *Car Terminal* dengan implementasi program digitalisasi system.
- Melakukan pengembangan dan penerapan integrasi layanan- layanan IT untuk ekosistem *Car Terminal*.
- Peningkatan dan pemenuhan Human Capital IT yang memiliki kompetensi untuk mengikuti perkembangan bisnis dan kebutuhan bisnis berbasis teknologi informasi.
- Supporting the transformation and realization of the Car Terminal ecosystem by implementing a system digitalization program.
- Develop and implement integrated IT services for the Car Terminal ecosystem.
- Increasing and fulfilling IT Human Capital which has the competence to keep up with business developments and information technology-based business needs.

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam upaya menciptakan nilai tambah bagi Perseroan, IPCC mengembangkan pemanfaatan teknologi yang tepat guna untuk mempercepat akselerasi bisnis melalui penerapan pendekatan dan kebijakan strategis di bidang teknologi informasi. Pengembangan serta implementasi teknologi informasi tersebut dirancang agar selaras dengan strategi korporasi Pelindo, Sub-Holding SPMT, serta IPCC sebagai operator

INFORMATION TECHNOLOGY POLICY AND GOVERNANCE

In an effort to create added value for the Company, IPCC is developing the utilization of appropriate technology to accelerate business acceleration through the implementation of strategic approaches and policies in information technology sector. The development and implementation of this information technology are designed to align with the corporate strategies of Pelindo, SPMT Sub-Holding, and IPCC as the operator

Terminal Kendaraan. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses bisnis, sekaligus menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan manajemen.

Dalam implementasinya, pengembangan teknologi informasi di IPCC berpedoman pada Dokumen IT *Master Plan* PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk untuk periode 2025 - 2029.

of Vehicle Terminal. This effort is aimed at improving the quality and efficiency of business processes while providing information to support management decision-making.

In its implementation, information technology development at IPCC is guided by the IT Master Plan Document of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk for the period of 2025-2029.

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi berada di bawah tanggung jawab Divisi Teknik dan Sistem Informasi yang berada dalam lingkup Direktorat Operasi dan Teknik, yang bertugas melaksanakan seluruh proses pengelolaan serta pengembangan teknologi informasi Perseroan.

UNIT IN CHARGE FOR INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

Information Technology Systems Management is under the responsibility of the Engineering and Information Systems Division within the Directorate of Operations and Engineering, which is responsible for implementing all processes for managing and developing the Company's information technology.

Struktur Organisasi Pengelola Sistem Teknologi Informasi IPCC
Organizational Structure of IPCC Information Technology Systems Management

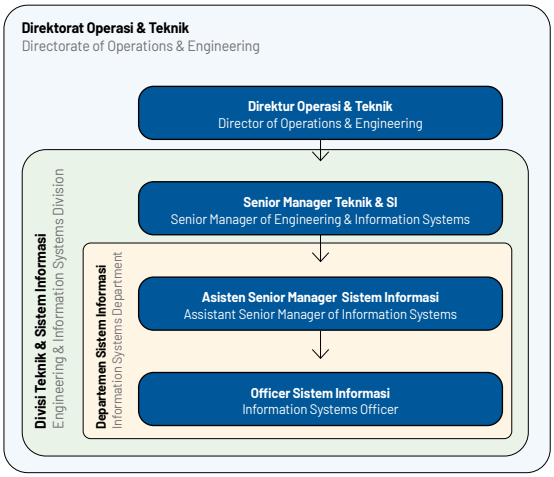

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Engineering
2	Tatan Sontana	Senior Manager Teknik & SI Senior Manager of Engineering & Information Systems
3	Irfan Cahyono	Asisten Senior Manager Sistem Informasi Senior Assistant Manager of Information Systems
4	Kresna Ridwan	Officer Sistem Informasi Information Systems Officer

Peran tugas dan tanggung jawab Sub Divisi Sistem Informasi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan strategis dan operasional sistem informasi yang meliputi program perencanaan dan penggunaan optimal dari sumber daya teknologi informasi.
2. Pengembangan sistem dan implementasi solusi teknologi informasi meliputi pengelolaan proyek sistem informasi, pengembangan sistem, serta pengujian dan validasi sistem.
3. Dukungan layanan Sistem Informasi yang berkualitas dan layanan yang memadai kepada pengguna meliputi layanan monitoring operasional TI, dukungan keamanan sistem, dan layanan kontinuitas bisnis.

The roles and responsibilities of the Information Systems Sub Division are as follows:

1. Strategic and operational planning of information systems which includes planning programs and optimal use of information technology resources.
2. System development and implementation of information technology solutions including information system project management, system development, and system testing and validation.
3. Quality Information System service support and adequate services to users including IT operational monitoring services, system security support and business continuity services.

TRANSFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI IPCC

Dalam mendukung kelancaran aktivitas bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), teknologi informasi telah menjadi komponen yang tidak terpisahkan. Strategi pengembangan dan penerapan teknologi informasi harus selaras serta mendukung strategi korporasi Pelindo, Sub-Holding SPMT, dan IPCC sebagai operator Terminal Kendaraan, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas dan efisiensi proses bisnis, sekaligus menyediakan dukungan informasi bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Adapun standarisasi program transformasi yang diterapkan mencakup lima elemen utama dalam mewujudkan transformasi yang bersifat holistik, sebagai berikut:

IPCC INFORMATION TECHNOLOGY TRANSFORMATION

In supporting the smooth operation of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC)'s business activities, information technology has become an integral component. The strategy for developing and implementing information technology must be aligned with and support the corporate strategies of Pelindo, Sub-Holding SPMT, and IPCC as a vehicle terminal operator, thereby contributing to improving the quality and efficiency of business processes, while also providing information support for management decision-making.

The standardization of the transformation program implemented encompasses five main elements in achieving a holistic transformation, as follows:

Proses Bisnis Business process	**Infrastruktur & Peralatan** Infrastructure & Equipment	**Sumber Daya** Resource	**Teknologi Informasi** Technology Information	**HSSE** HSSE
Standardisasi proses bisnis **Standardization of business processes** Berdasarkan P&C untuk meningkatkan kinerja operasional Standardisasi komersial Based on P&C to improve operational performance Commercial standardization	**Standardisasi infrastruktur, sarana dan peralatan** **Standardization of infrastructure, facilities and equipment** Untuk mengakomodasi atau pelanggan atau komoditas yang ditargetkan To accommodate or target customers or commodities	Mengembangkan skills dan kompetensi dalam organisasi untuk menyelaraskan dengan standar industri serta mendukung organisasi berbasis P&C Develop skills and competencies within the organization to align with industry standards and support P&C-based organizations	Standardisasi teknologi informasi untuk mendukung arus informasi & operasi Standardisation of information technology to support the flow of information & operations	Membangun budaya kesehatan dan keselamatan di terminal melalui standardisasi praktik keselamatan Building a culture of health and safety in the terminal through standardizing safety practices
Implementasi Planning & Control **Implementation of Planning & Controlling** Di seluruh proses bisnis: 1. *Flow* bongkar-muat yang terstandar untuk kecepatan 2. Kinerja operasional 3. *Yard preferred area* 4. *Deployment of equipment* 5. *Rostering* dan *deployment* tenaga kerja 6. *Control* untuk memastikan target kinerja tercapai operasional Standardisasi komersial Across business processes: 1. Standardized loading and unloading flow for speed 2. Operational performance 3. Yard preferred area 4. Deployment of equipment 5. Rostering and deployment of workforce 6. Control to ensure performance targets are achieved	**Infrastruktur** **Infrastructure** Yang andal dengan desain dan tata letak yang dioptimalkan berdasarkan model operasi standar (misalnya kedalaman draf, ketersediaan penyimpanan) Reliable infrastructure with optimized design and layout based on standard operating models (e.g. draft depth, storage availability)	Pelatihan khusus/ bersertifikat dan *essential skills* Special/certified training and essential skills Pelatihan *Advanced Knowledge* Advanced Knowledge Traini	**Sistem** **Sistem** Untuk memfasilitasi kelancaran pertukaran informasi To facilitate the smooth exchange of information	Alat Pelindung Diri (APD) Personal Protective Equipment (PPE) Terminal steril dengan sistem keamanan modern Sterile terminal with modern security system
Komersial: **Commercial:** Standardisasi penawaran kualitas layanan, tarif, Kerjasama dengan PBM luar Pelindo untuk *single billing* dan *agreement fee/revenue sharing* Standardisation of offerings service quality, tariffs, Cooperation with PBM outside Pelindo for single billing and agreement fee/revenue sharing agreement	**Peralatan Pelabuhan** **Port Equipment** Industri yang andal dengan produktivitas lebih tinggi dan O&M yang lebih rendah Reliable industrial port equipment with higher productivity and lower O&M	Pelatihan Kepemimpinan untuk Manajer & Supervisor Terminal Leadership Training for Terminal Managers & Supervisors Pelatihan dasar terminal non-kontainer Non-container terminal basic training Struktur organisasi berdasarkan P&C Organizational structure based on P&C	**Persyaratan minimum** **Minimum requirements** Standar teknologi (misalnya sensor, sistem operasi terminal) untuk mendukung operasi terminal Technology standards (e.g. sensors, terminal terminal operating system) to support operation terminal	Rencana Tanggap Darurat Emergency Response Plan Induksi dan Pelatihan Keselamatan Induction and Safety Training

Tahapan Transformasi
Transformation Stages

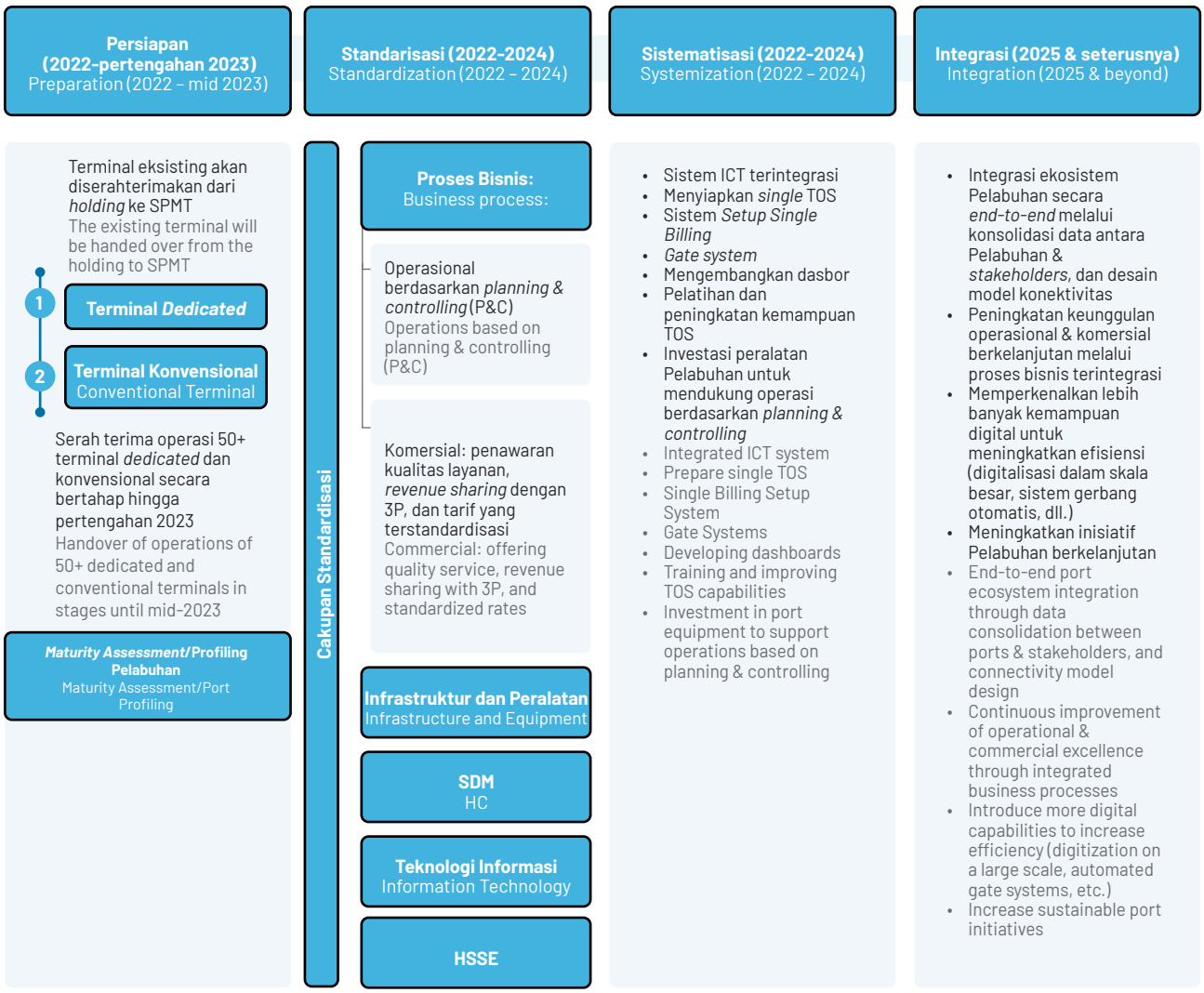

ROADMAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sebagai bagian dari penguatan arah strategis pengembangan teknologi informasi, Perseroan telah menyusun *Roadmap* TI yang diselaraskan dengan kebutuhan bisnis serta tantangan industri logistik kendaraan yang terus berkembang. *Roadmap* TI tersebut dirancang untuk memperkuat digitalisasi layanan, meningkatkan integrasi sistem informasi, serta mengembangkan kapabilitas analitik dan keamanan siber. Penyusunannya turut mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi, kompleksitas kebutuhan pelanggan, serta aspirasi Perseroan untuk menjadi terminal kendaraan berkelas dunia yang berlandaskan efisiensi dan inovasi teknologi.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT ROADMAP

As part of strengthening the strategic direction of information technology development, the Company's has established an IT Roadmap aligned with business needs and the evolving challenges of vehicle logistics industry. This IT Roadmap is designed to enhance service digitalization, improve information system integration, and develop analytical and cybersecurity capabilities. Its formulation was also taking into account technological advancements, the increasing complexity of customer needs, and the Company's aspiration to become a world-class vehicle terminal grounded in efficiency and technological innovation.

Melalui penerapan *roadmap* ini, Perseroan menegaskan komitmennya untuk menjadikan teknologi informasi tidak hanya sebagai fungsi pendukung, tetapi sebagai penggerak utama dalam meningkatkan efektivitas operasional dan keunggulan kompetitif layanan bongkar muat kendaraan.

Through the implementation of this roadmap, the Company's reaffirms its commitment to positioning information technology not merely as a supporting function, but as a key driver in improving operational effectiveness and achieving competitive advantage in vehicle loading and unloading services.

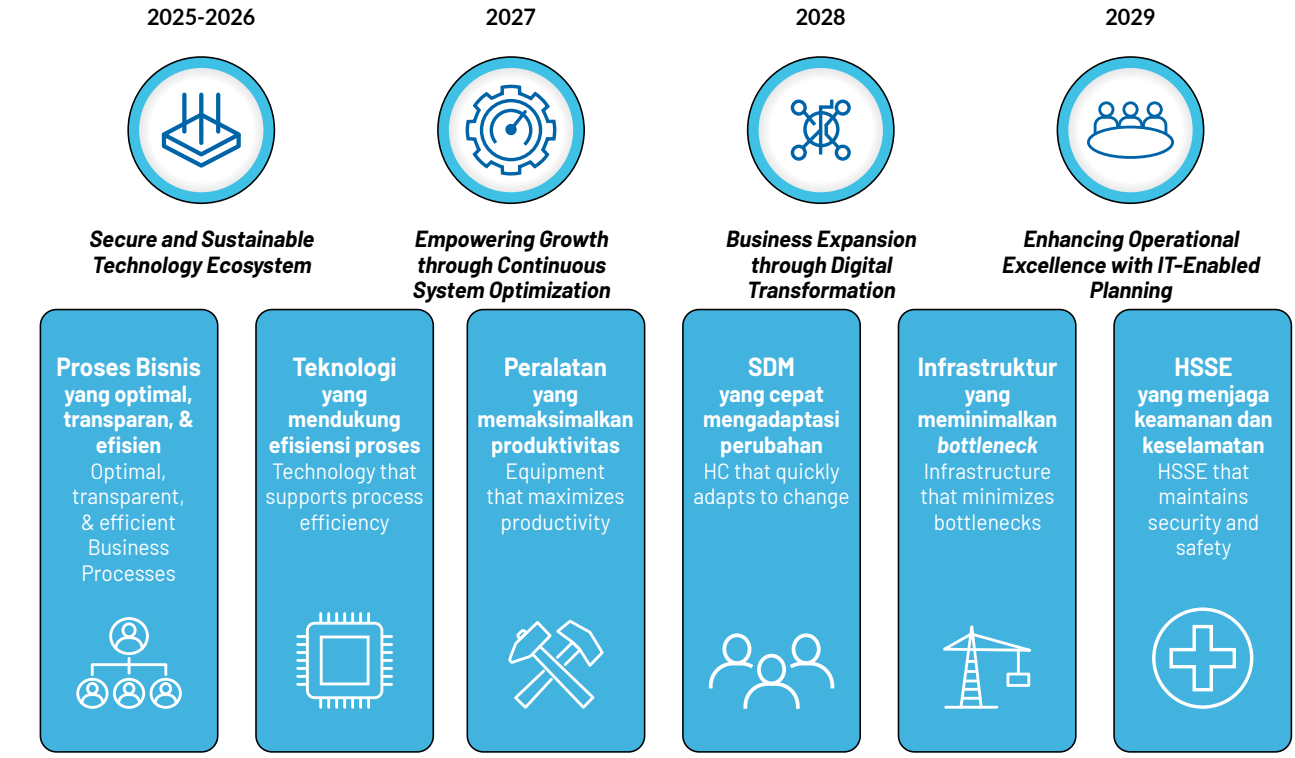



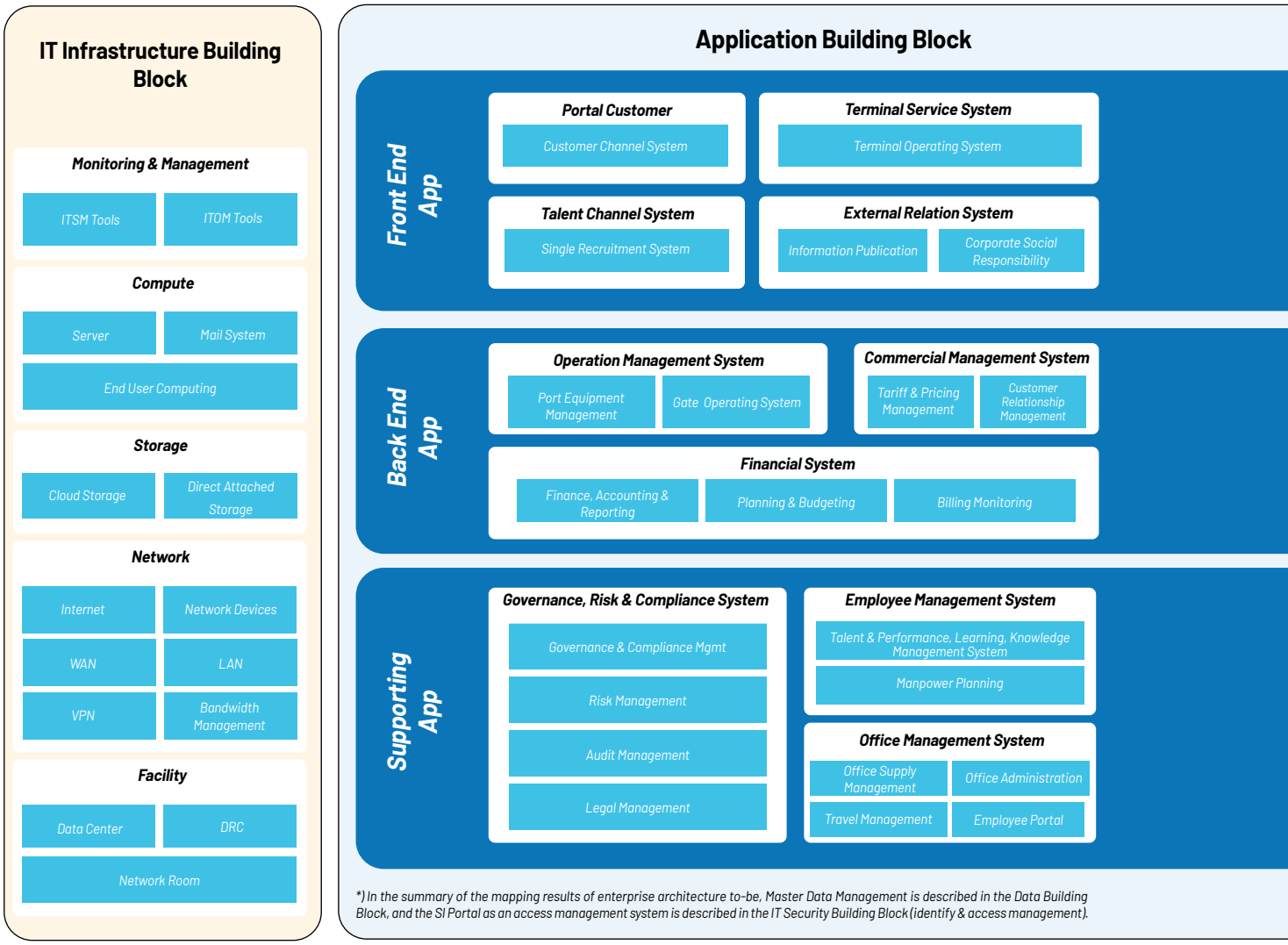

*) In the summary of the mapping results of enterprise architecture to-be, Master Data Management is described in the Data Building Block, and the SI Portal as an access management system is described in the IT Security Building Block (identify & access management).

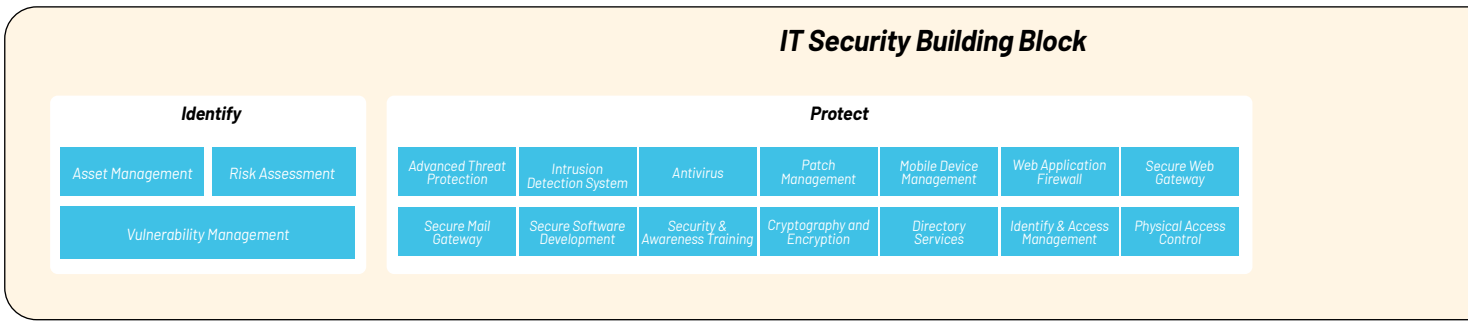

Implementasi sistem PTOS-C

PTOS-C atau Pelindo *Terminal Operating System Car* merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan terminal secara *real-time*, mulai dari proses perencanaan, *booking*, realisasi kegiatan, pengendalian dan pengawasan, hingga penerbitan laporan kinerja serta *billing*. Sistem ini mencatat kargo atau *Vehicle Identification Number* (VIN) dalam bentuk *barcode* dan terintegrasi dengan sistem *Car Maker* untuk mengotomasi proses *booking* dari pelanggan, serta dengan sistem TPS *Online* Bea Cukai CEISA guna mengotomasi proses *clearance* dokumen dan mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan di terminal.

Implementation of PTOS-C system

PTOS-C, or Pelindo Terminal Operating System Car, is a system used to support terminal operations in real time, from planning and booking, activity implementation, control and supervision, to issuing performance reports and billing. This system records cargo or Vehicle Identification Numbers (VINs) in barcode form and is integrated with the Car Maker system to automate customer booking processes, and with the CEISA Customs and Excise Online TPS system to automate document clearance and optimize planning, implementation, and monitoring of terminal activities.

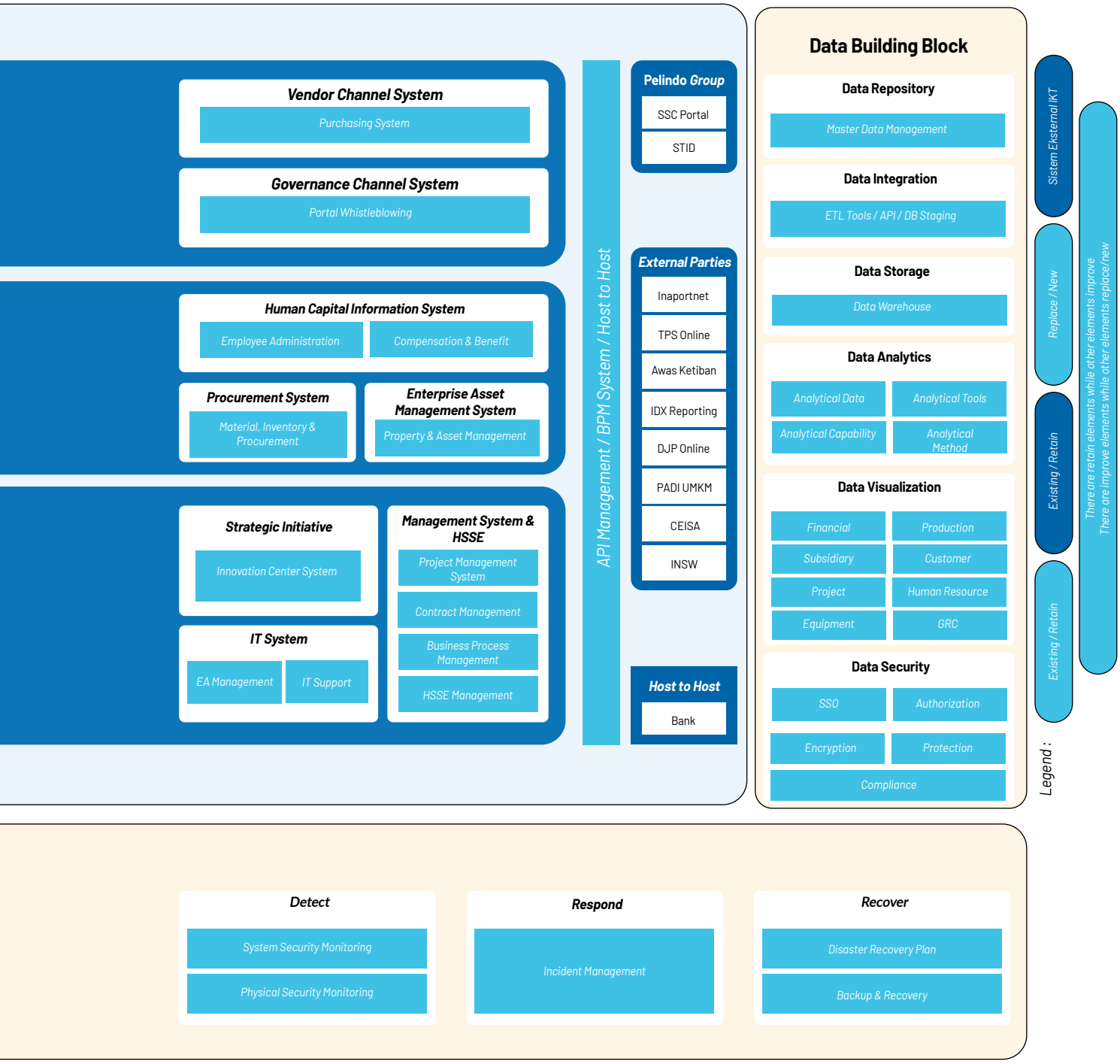

Melalui pencatatan data secara *real-time*, pemilik kargo dapat memantau pergerakan kargo di dalam terminal, yang selanjutnya dapat diteruskan ke sistem milik pemilik barang, dalam hal ini *Car Maker*, melalui sistem yang digunakan oleh pelanggan, yaitu sistem IBS.

Through real-time data recording, cargo owners can monitor cargo movement within the terminal, which can then be forwarded to the goods owner's system, in this case, Car Maker, via the customer's system, the IBS system.

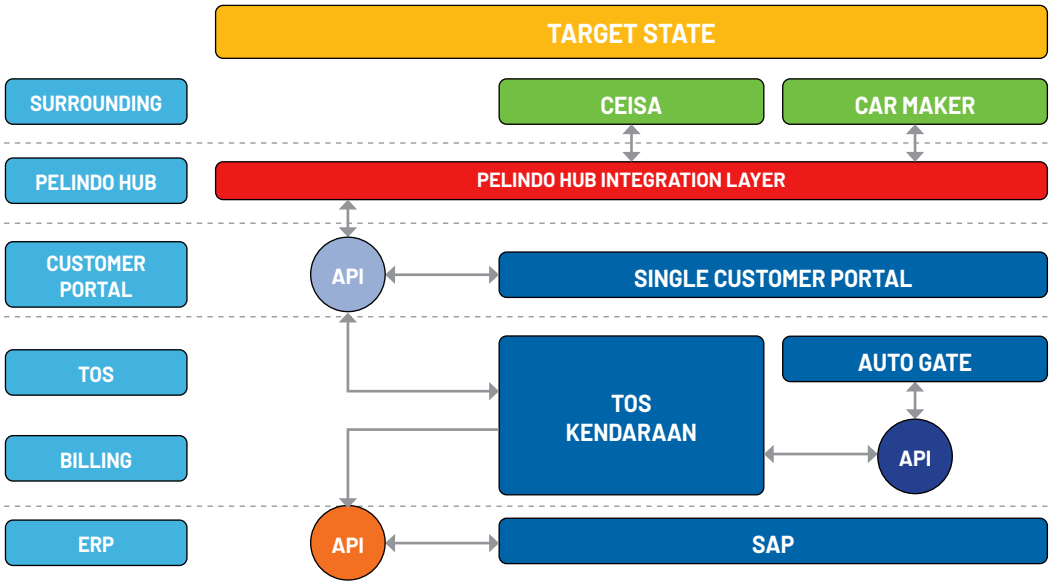

Implementasi Teknologi Informasi IPCC

Dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi proses, IPCC menerapkan 3 (tiga) solusi teknologi informasi, yaitu:
1. *Terminal Operation Management;*
2. *Terminal Enterprise Management*; dan
3. Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi.

Sampai dengan periode pelaporan, Perseroan secara konsisten melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi, khususnya dalam mendukung ekspansi bisnis Perseroan yang diarahkan pada integrasi seluruh layanan terminal guna memberikan kemudahan bagi seluruh pelanggan Perseroan.

Terminal Operation Management

Dalam mendukung layanan inti (*core business*) Perseroan, *Terminal Operation Management* (TOM) dikembangkan sebagai suatu klaster aplikasi yang berperan penting dalam operasional. Klaster aplikasi ini mendukung peningkatan kinerja kegiatan terminal melalui pencatatan transaksi secara *real-time* serta integrasi pertukaran data dengan sistem aplikasi pemerintah (CEISA Bea Cukai) dan *Car Maker* guna mempercepat proses operasional di terminal. Adapun aplikasi yang termasuk dalam klaster ini antara lain sebagai berikut:

Pelindo Terminal Operating Sistem Car (PTOS-C)

Sejalan dengan agenda transformasi dan digitalisasi operasional sejak tahun 2024 Perseroan mulai mengimplementasikan Pelindo Terminal Operating System Car (PTOS-C) secara keseluruhan yang dimulai dari Branch Jakarta Domestik, lalu di lanjutkan ke Terminal Satelit Belawan, Branch Jakarta Internasional, dan Terminal Satelit Makssar. Implementasi ini juga mencakup penerapan sistem pendukung berupa Billing System IBS serta integrasi dengan sistem SAP dan berbagai kanal pembayaran. Untuk Site/Terminal Pontianak dan Balikpapan dilakukan implementasi bertahap yaitu sebatas pada fungsi billing pada PTOS-C saja.

PTOS-C merupakan *platform* operasi terminal kendaraan yang dikembangkan untuk mewujudkan proses layanan yang terstandarisasi, terintegrasi, dan berbasis data secara *real-time*.

Implementation of IPCC Information Technology

To support improvements in process effectiveness and efficiency, IPCC applies 3 (three) information technology solutions:
1. Terminal Operation Management;
2. Terminal Enterprise Management; and
3. Information Technology Infrastructure and Security.

Up to the reporting period, the Company's has consistently carried out the development and implementation of information technology, particularly to support the Company's business expansion, which is directed toward the integration of all terminal services to provide greater convenience for all the Company's customers.

Terminal Operation Management

To support the Company's core business, Terminal Operation Management (TOM) was developed as an application cluster that plays a critical role in operations. This application cluster supports the improvement of terminal activity performance through real-time transaction recording and data exchange integration with government application systems (CEISA, Customs, Excise) and Car Makers to accelerate operational processes at the terminal. The applications included in this cluster include the following:

Pelindo Terminal Operating Sistem Car (PTOS-C)

In line with the operational transformation and digitalization agenda, the Company began implementing Pelindo Terminal Operating System Car (PTOS-C) comprehensively in 2024, starting with Jakarta Domestic Branch, then continuing to Belawan Satellite Terminal, Jakarta International Branch, and Makassar Satellite Terminal. This also includes the implementation of supporting systems, namely IBS Billing System, and integration with SAP system and various payment channels. For Pontianak and Balikpapan Sites/Terminals, the implementation is being carried out in stages, limited to the billing function within PTOS-C only.

PTOS-C is a vehicle terminal operations platform developed to realize a standardized, integrated, and real-time data-driven service process. The Company will gradually expand the implementation of this system

Perseroan secara bertahap akan memperluas implementasi sistem ini pada terminal kendaraan lainnya di lingkungan Perseroan.

PTOS-C digunakan untuk mendukung pengelolaan kegiatan operasional terminal kendaraan secara terpadu, mulai dari perencanaan kegiatan, proses pemesanan layanan (*booking*), realisasi pelayanan, pengendalian dan pengawasan operasional, hingga penyusunan laporan kinerja dan penerbitan tagihan. Sistem ini melakukan pencatatan unit kendaraan berdasarkan *Vehicle Identification Number* (VIN) berbasis *barcode* sehingga memungkinkan identifikasi unit secara akurat. PTOS-C juga terintegrasi dengan sistem pelanggan (*car maker*) untuk otomasi proses pemesanan layanan serta terhubung dengan TPS *Online* Bea Cukai (CEISA) guna mendukung proses *clearance* dokumen secara elektronik.

Implementasi PTOS-C memberikan peningkatan visibilitas terhadap aktivitas operasional terminal secara menyeluruh. Pencatatan kegiatan secara *real-time* memungkinkan pemilik kargo memantau pergerakan kendaraan di dalam terminal serta memperoleh informasi operasional secara langsung melalui sistem pelanggan (IBS).

Selain meningkatkan kualitas layanan pelanggan, penerapan sistem ini turut mendukung:
1. Peningkatan akurasi data operasional dan penagihan;
2. Percepatan proses pelayanan terminal;
3. Penguatan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional;
4. Peningkatan transparansi transaksi; dan
5. Integrasi dengan ekosistem logistik nasional.

Perseroan akan melanjutkan implementasi PTOS-C secara bertahap pada terminal kendaraan lainnya sebagai bagian dari *roadmap* transformasi digital Perseroan. Standarisasi proses operasional melalui PTOS-C diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat tata kelola layanan terminal, serta mendukung pertumbuhan bisnis kendaraan Perseroan secara berkelanjutan.

Implementasi PTOS-C telah berjalan pada beberapa lokasi operasional Perseroan dan akan terus diperluas secara bertahap sesuai rencana pengembangan sistem sebagaimana ditunjukkan pada *timeline* berikut.

to other vehicle terminals within the Company's environment.

PTOS-C is used to support the integrated management of vehicle terminal operations, from activity planning and booking processes, service delivery, operational control and supervision, to performance report preparation and invoice issuance. This system records vehicle units based on barcode-based Vehicle Identification Numbers (VINs), enabling accurate unit identification. PTOS-C is also integrated with customer systems (car manufacturers) to automate the service ordering process and is connected to the Customs and Excise Online Terminal (TPS Online Customs and Excise) to support electronic document clearance.

The implementation of PTOS-C provides increased visibility into terminal operational activities across the board. Real-time activity recording allows cargo owners to monitor vehicle movements within the terminal and obtain operational information directly through the customer system (IBS).

In addition to improving customer service quality, this system implementation also supports:
1. Improving the accuracy of operational and billing data;
2. Accelerating terminal service processes;
3. Strengthening operational control and oversight;
4. Increasing transaction transparency; and
5. Integration with the national logistics ecosystem.

The Company will continue to gradually implement PTOS-C at other vehicle terminals as part of its digital transformation roadmap. Standardizing operational processes through PTOS-C is expected to improve operational efficiency, strengthen terminal service governance, and support sustainable growth of the Company's vehicle business.

The implementation of PTOS-C has been running at several of the Company's operational locations and will continue to be expanded gradually in accordance with the system development plan as shown in the following timeline.

PTOS-C Journey

***Timeline* Implementasi PTOS-C**
PTOS-C Implementation Timeline
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

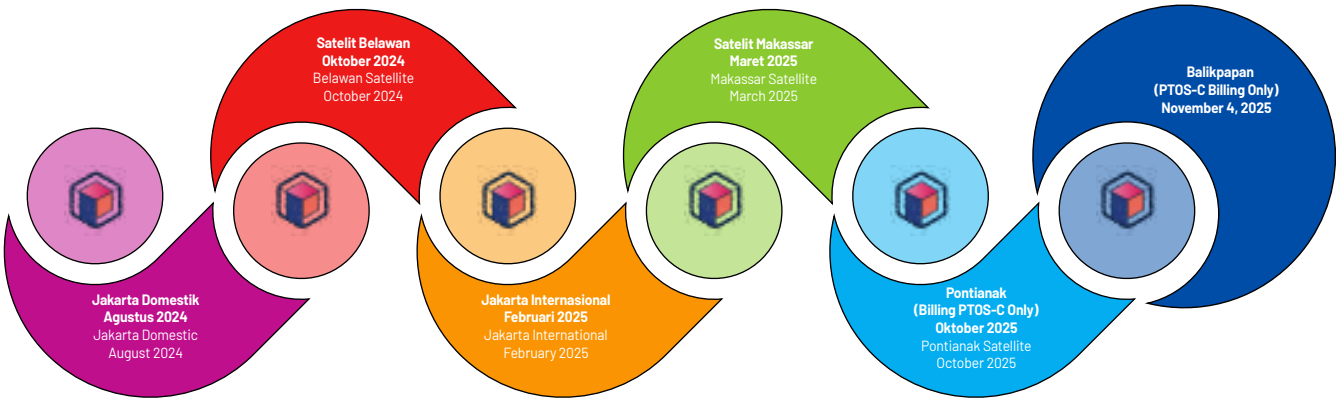

Automatic Gate

1. **Terminal Internasional**
   Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian akses di Terminal Internasional, Perseroan mengembangkan sistem *automatic gate* yang terintegrasi dengan *Pelindo Terminal Operating System Car* (PTOS-C) Terminal Internasional IPCC, sehingga proses keluar masuk sarana angkutan dapat dilakukan tanpa keterlibatan operator *gate*. Sistem *automatic gate* berfungsi untuk memverifikasi kesesuaian data perencanaan truk dan kargo, sekaligus melakukan pemeriksaan dokumen kepabeanan atas setiap kargo yang diangkut guna memastikan bahwa seluruh kargo yang memasuki area Perseroan telah dilengkapi dengan dokumen kepabeanan yang dipersyaratkan.

   Penerapan sistem tersebut turut meningkatkan aspek keamanan dan keselamatan, mendorong peningkatan produktivitas, menciptakan pelayanan operasional yang lebih efisien, serta meminimalkan potensi terjadinya *fraud* atau kecurangan oleh operator.

2. **Terminal Domestik**
   Sejak September 2022, Perseroan telah menerapkan sistem *automatic gate* di Terminal Domestik untuk mendukung pengendalian akses keluar masuk sarana angkutan tanpa keterlibatan operator *gate*. Sistem ini berfungsi untuk melakukan verifikasi kesesuaian data perencanaan truk dan kargo. Penerapan *automatic gate* tersebut turut meningkatkan aspek keamanan dan keselamatan, mendorong peningkatan produktivitas, meningkatkan efisiensi proses pelayanan operasional, serta meminimalkan potensi terjadinya *fraud* atau kecurangan oleh operator.

Pelindo Service Now

Untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional terminal, Perseroan memanfaatkan aplikasi layanan *help desk* Pelindo Service Now sebagai sarana pengelolaan gangguan dan permasalahan teknologi informasi yang digunakan dalam operasional terminal.

Melalui sistem ini, setiap kendala pada aplikasi operasional utama maupun aplikasi pendukung dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti secara terstruktur melalui mekanisme pencatatan tiket (*ticketing system*). Proses pemantauan dilakukan secara terpusat sehingga mempercepat respons penanganan serta memastikan penyelesaian permasalahan sesuai tingkat prioritas layanan.

Pemanfaatan Pelindo Service Now membantu meminimalkan potensi gangguan terhadap aktivitas pelayanan terminal, khususnya pada proses penerimaan, penumpukan, dan pengeluaran kendaraan. Dengan demikian, keberlangsungan operasional dan kualitas layanan kepada pengguna jasa dapat tetap terjaga.

TPS *Online*

Dalam mendukung kelancaran proses kepabeanan, Perseroan mengimplementasikan sistem TPS *Online* sebagai sarana pertukaran data elektronik antara Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Melalui sistem ini, penyampaian laporan kegiatan barang serta penerimaan dokumen persetujuan pemasukan dan pengeluaran kendaraan dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan sistem

Automatic Gate

1. **International Terminal**
   To enhance the effectiveness of access control at the International Terminal, the Company has developed an automatic gate system integrated with Pelindo Terminal Operating System Car (PTOS-C) at IPCC International Terminal. This enables the entry and exit of transport vehicles to be carried out without the involvement of gate operators. The automatic gate system functions to verify the conformity of truck and cargo planning data, as well as to perform customs document checks for each transported cargo, ensuring that all cargo entering the Company area is equipped with the required customs documentation.

   The implementation of this system also enhances security and safety aspects, increases productivity, creates more efficient operational services, and minimizes the potential for fraud or misconduct by operators.

2. **Domestic Terminal**
   Since September 2022, the Company has implemented an automatic gate system at the Domestic Terminal to support access control for incoming and outgoing transport vehicles without gate operator involvement. This system functions to verify the conformity of truck and cargo planning data. The implementation of the automatic gate has also improved security and safety, boosted productivity, enhanced the efficiency of operational service processes, and minimized the potential for fraud or misconduct by operators.

Pelindo Service Now

To ensure smooth terminal operations, the Company utilizes Pelindo Service Now help desk application as a tool for managing disruptions and issues related with information technology used in terminal operations.

Through this system, any issues in core operational applications and supporting applications can be reported and followed up in a structured manner through a ticketing system. Monitoring is conducted centrally, enabling faster response times and ensuring that issues are resolved according to service priority levels.

The use of Pelindo Service Now helps minimize potential disruptions to terminal service activities, particularly in vehicle receiving, stacking, and dispatch processes. As a result, operational continuity and service quality for customers can be maintained.

TPS Online

To support smooth customs process, the Company has implemented TPS Online system as a means of electronic data exchange between temporary storage facilities (TPS) and the Directorate General of Customs and Excise.

Through this system, the submission of cargo activity reports and the receipt of approval documents for vehicle entry and exit are conducted electronically and integrated with customs systems at the

kepabeanan di Kantor Pabean. Integrasi tersebut memungkinkan proses verifikasi dan clearance dokumen berjalan lebih cepat dan akurat.

Penerapan TPS *Online* membantu memperlancar arus keluar masuk kendaraan di terminal serta mengurangi potensi keterlambatan pelayanan akibat proses administrasi manual. Dengan demikian, kualitas layanan terminal dan kepastian waktu pelayanan kepada pengguna jasa dapat semakin ditingkatkan.

Dashboard Operasional dan Keuangan

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan data dan pengambilan keputusan berbasis data, Perseroan mengimplementasikan *Dashboard* Operasional dan Keuangan yang terintegrasi dengan data *warehouse* terpusat. *Dashboard* ini berfungsi sebagai sarana pemantauan kinerja operasional dan keuangan secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur.

Implementasi dashboard tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan inisiatif IT *Masterplan* 2025–2029, khususnya pada program *Application & Data Enhancement* yang bertujuan meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data perusahaan. Melalui visualisasi data dalam bentuk grafik dan indikator kinerja, manajemen dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif.

Terminal Enterprise Management

Terminal Enterprise Management (TEM) dikembangkan sebagai *cluster* aplikasi yang menunjang aktivitas *back-office* serta layanan pendukung *core business*. *Cluster* aplikasi ini berperan sebagai *Enterprise Resource Planning* (ERP) di bidang keuangan dan sumber daya manusia, dengan tujuan mentransformasikan proses manual ke dalam sistem digital sekaligus mengotomasi proses agar berjalan lebih efektif dan efisien.

Adapun aplikasi yang termasuk dalam *cluster* ini antara lain:

Enterprise Resource Planning (ERP) SAP

Sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang mencakup modul FI, CO, HCM, PS, serta PR/PO telah dibangun dan diimplementasikan untuk mengoptimalkan proses transaksi, manajemen keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Sistem ini mendukung peningkatan akurasi informasi keuangan atas seluruh transaksi perusahaan.

Adapun fungsi yang tersedia dalam sistem ERP meliputi *General Ledger, Account Payable* dan *Account Receivable, asset management, collection management, employee management*, serta *revenue management*. Selain itu, penerapan ERP mempermudah proses pengendalian dan pemantauan aktivitas bisnis, sehingga alur proses bisnis dapat berlangsung secara lebih sederhana dan responsif.

Financial Accounting (FI) adalah modul akuntansi keuangan dalam sistem SAP (*System, Applications, and Products in Data Processing*). Berikut beberapa fungsi utama dari FI SAP:

1. Pengelolaan Akun: FI SAP memungkinkan pengelolaan akun keuangan, termasuk pembuatan, pengubahan, dan penghapusan akun.

Customs Office. This integration enables faster and more accurate document verification and clearance processes.

The implementation of TPS Online facilitates the flow of vehicles in and out of the terminal and reduces the risk of service delays due to manual administrative processes. As a result, service quality and timeliness for customers can be further improved.

Operational and Financial Dashboard

Operational and Financial Dashboard As part of efforts to improve the quality of data management and data-driven decision-making, the Company has implemented an Operational and Financial Dashboard integrated with a centralized data warehouse. This dashboard serves as a tool for monitoring operational and financial performance in a faster, more accurate, and structured manner.

The implementation of this dashboard is also in line with the execution of the IT Masterplan 2025–2029 initiative, specifically the Application & Data Enhancement program, which aims to improve the management and utilization of corporate data. Through data visualization in the form of graphs and performance indicators, management can obtain more comprehensive information, thereby supporting a more precise and responsive decision-making proces.

Terminal Enterprise Management

Terminal Enterprise Management (TEM) is developed as a cluster of applications that support back-office activities and core business support services. This application cluster serves as an Enterprise Resource Planning (ERP) system in the areas of finance and human capital, aiming to transform manual processes into digital systems while automating processes to become more effective and efficient.

Applications included in this cluster are as follows:

Enterprise Resource Planning (ERP) SAP

The Enterprise Resource Planning (ERP) system, which includes modules FI, CO, HCM, PS, and PR/PO, has been developed and implemented to optimize transaction processes, financial management, and human capital management. This system supports improved accuracy of financial information for all company transactions.

The ERP system includes functions such as General Ledger, Accounts Payable and Accounts Receivable, asset management, collection management, employee management, and revenue management. In addition, ERP implementation simplifies the control and monitoring of business activities, enabling more streamlined and responsive business processes.

Financial Accounting (FI) is a financial accounting module in the SAP system (System, Applications, and Products in Data Processing). The main functions of SAP FI include:

1. Account Management: SAP FI allows the management of financial accounts, including creation, modification, and deletion of accounts.

2. Pengelolaan Transaksi: FI SAP memungkinkan pengelolaan transaksi keuangan, termasuk pembuatan, pengubahan, dan penghapusan transaksi.
3. Pengelolaan Neraca: FI SAP memungkinkan pengelolaan neraca keuangan, termasuk pembuatan, pengubahan, dan penghapusan neraca.
4. Pengelolaan Laporan Keuangan: FI SAP memungkinkan pengelolaan laporan keuangan, termasuk pembuatan, pengubahan, dan penghapusan laporan.

Human Capital Management (HCM) adalah modul pengelolaan sumber daya manusia dalam sistem SAP. Berikut beberapa fungsi utama dari HCM SAP:
1. Pengelolaan Data Karyawan: HCM SAP memungkinkan pengelolaan data karyawan, termasuk informasi pribadi, riwayat kerja, dan keterampilan.
2. Pengelolaan Proses Rekrutmen: HCM SAP memungkinkan pengelolaan proses rekrutmen, termasuk pembuatan lowongan kerja, pengelolaan aplikasi, dan seleksi kandidat.
3. Pengelolaan Proses Penggajian: HCM SAP memungkinkan pengelolaan proses penggajian, termasuk perhitungan gaji, pajak, dan tunjangan.
4. Pengelolaan Proses Pelatihan dan Pengembangan: HCM SAP memungkinkan pengelolaan proses pelatihan dan pengembangan, termasuk pembuatan rencana pelatihan, pengelolaan kursus, dan evaluasi kinerja.

PR (*Purchase Requisition*) dan PO (*Purchase Order*) adalah dua modul yang terkait dalam sistem SAP, yang digunakan untuk mengelola proses pembelian barang dan jasa. Berikut beberapa fungsi utama dari PR/PO SAP:
1. Membuat Permintaan Pembelian: PR memungkinkan pengguna untuk membuat permintaan pembelian barang atau jasa.
2. Mengelola Data Pembelian: PR memungkinkan pengguna untuk mengelola data pembelian, termasuk informasi tentang barang atau jasa yang dibeli.
3. Mengirimkan Permintaan Pembelian: PR memungkinkan pengguna untuk mengirimkan permintaan pembelian ke departemen pembelian.

Sementara fungsi utama PO, yaitu:
1. Membuat Pesanan Pembelian: PO memungkinkan pengguna untuk membuat pesanan pembelian barang atau jasa.
2. Mengelola Data Pesanan Pembelian: PO memungkinkan pengguna untuk mengelola data pesanan pembelian, termasuk informasi tentang barang atau jasa yang dibeli.
3. Mengirimkan Pesanan Pembelian: PO memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesanan pembelian ke *supplier*.

CO (*Controlling*) adalah modul dalam sistem SAP yang digunakan untuk mengelola biaya dan anggaran keuangan. Berikut beberapa fungsi utama dari CO SAP:
1. Mengelola Biaya: CO SAP memungkinkan perusahaan untuk mengelola biaya yang terkait dengan produksi, penjualan, dan operasional lainnya.
2. Mengelola Anggaran: CO SAP memungkinkan perusahaan untuk membuat dan mengelola anggaran keuangan yang terkait dengan biaya dan pendapatan.

2. Transaction Management: SAP FI allows the management of financial transactions, including creation, modification, and deletion of transactions.
3. Balance Sheet Management: SAP FI allows the management of financial balance sheets, including creation, modification, and deletion of balance sheets.
4. Financial Report Management: SAP FI allows the management of financial reports, including the creation, modification, and deletion of financial reports.

Human Capital Management (HCM) is a human capital management module within the SAP system. The main functions of SAP HCM include:
1. Employee Data Management: SAP HCM allows the management of employee data, including personal information, work history, and skills.
2. Recruitment Process Management: SAP HCM allows the management of recruitment process, including job vacancy creation, application management, and candidate selection.
3. Payroll Process Management: SAP HCM allows payroll process management, including salary calculation, taxes, and benefits.
4. Training and Development Process Management: SAP HCM allows training and development processes management, including training plan creation, course management, and performance evaluations.

Purchase Requisition (PR) and Purchase Order (PO) are two related modules in the SAP system, which are used to manage the process of purchasing goods and services. Key Functions of SAP PR/PO are as follows:
1. Creating Purchase Requisition: PR allows users to create purchase request for goods or services.
2. Managing Purchase Data: PR allows users to manage purchase data, including information about the goods or services purchased.
3. Submitting Purchase Requisition: PR allows users to send a purchase request to the purchasing department.

While Key Functions of PO (Purchase Order) are:
1. Creating Purchase Orders: PO allows users to create purchase orders for goods or services.
2. Managing Purchase Order Data: PO allows users to oversee purchase order data, including information about goods or services purchased.
3. Sending Purchase Orders: PO allows users to send purchase orders to suppliers.

CO (Controlling) is a module in the SAP system used for managing financial costs and budgets. The main functions of SAP CO include:
1. Cost Management: SAP CO allows companies to manage costs related to production, sales, and other operations.
2. Budget Management: SAP CO allows companies to create and manage financial budgets related to costs and revenues.

3. Mengelola Kinerja: CO SAP memungkinkan perusahaan untuk mengelola kinerja keuangan dan operasional, termasuk pengukuran kinerja dan analisis data.
4. Mengelola Risiko: CO SAP memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko keuangan dan operasional, termasuk identifikasi risiko dan pengembangan strategi mitigasi.

PS (*Project System*) adalah modul dalam sistem SAP yang digunakan untuk mengelola proyek-proyek dalam sebuah perusahaan. Berikut beberapa fungsi utama dari PS SAP:

1. Mengelola Proyek: PS SAP memungkinkan perusahaan untuk mengelola proyek-proyek dari awal hingga akhir, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek.
2. Mengelola Sumber Daya: PS SAP memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang terkait dengan proyek, termasuk sumber daya manusia, material, dan peralatan.
3. Mengelola Biaya: PS SAP memungkinkan perusahaan untuk mengelola biaya yang terkait dengan proyek, termasuk biaya material, biaya tenaga kerja, dan biaya *overhead*.
4. Mengelola Jadwal: PS SAP memungkinkan perusahaan untuk mengelola jadwal proyek, termasuk perencanaan jadwal, pemantauan jadwal, dan pengaturan jadwal.

Pelindo E-Office (PEO)

1. PEO merupakan aplikasi yang mentransformasikan seluruh proses korespondensi yang bersifat kedinasan, dari yang asalnya berbasis kertas menjadi berbasis elektronik. Korespondensi yang bersifat kedinasan ini mencakup Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Undangan, Memo, dan Disposisi. Dengan E-Office, proses mulai pembuatan *draft*, persetujuan berjenjang, penomoran hingga distribusi dilakukan secara elektronik.
2. P Travel merupakan aplikasi yang mentransformasikan seluruh proses layanan kegiatan perjalanan dinas mencakup proses usulan perjalanan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dinas.
3. P Cico merupakan aplikasi yang mentransformasikan seluruh proses layanan kegiatan presensi kehadiran pegawai secara *self service* dengan menggunakan *Geo Location* dan *Geo Fencing*.
4. P Eats merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat pembayaran makan dan minum secara elektronik.
5. P Eproc merupakan aplikasi yang mentransformasikan seluruh proses layanan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dimulai dari pemilihan penyedia sampai terbit kontrak.
6. Portaverse merupakan *platform* yang mentransformasikan seluruh proses layanan kegiatan *learning system*, KPI, *Knowledge Management*, dan informasi tentang Perseroan.

Integrated Billing System (IBS)

Perseroan mengimplementasikan *Integrated Billing System* (IBS) sebagai sistem penagihan terintegrasi yang terhubung dengan *Terminal Operating System* (PTOS-C) dalam mendukung pelayanan jasa kepelabuhanan. Melalui IBS, pengguna jasa dapat melakukan pengajuan layanan secara mandiri (*self-service*) serta menerima nota dan dokumen pendukung secara elektronik.

Sistem ini menghubungkan data realisasi layanan operasional dengan sistem ERP sehingga menjadi dasar otomatis penerbitan tagihan. Penyampaian *invoice* secara digital mempercepat proses penagihan, meningkatkan akurasi pencatatan pendapatan, serta mendukung pengendalian transaksi dan efisiensi administrasi penagihan di lingkungan Perseroan.

3. Performance Management: CO SAP allows companies to manage financial and operational performance, including performance measurement and data analysis.
4. Risk Management: CO SAP allows companies to manage financial and operational risks, including risk identification and development of mitigation strategies.

PS (Project System) is a module in the SAP system used for managing corporate projects. The main functions of SAP PS include:

1. Project Management: SAP PS allows companies to manage projects from the start to finish, including project planning, execution, and monitoring.
2. Resource Management: SAP PS allows companies to manages project-related resources, including human capital, materials, and equipment.
3. Cost Management: SAP PS allows companies to manage project-related costs, including material costs, labor costs, and overhead costs.
4. Schedule Management: SAP PS allows companies to manage project schedules, including planning, tracking, and setting.

Pelindo E-Office (PEO)

1. PEO is an application that transforms the entire official correspondence process from paper-based to electronic. This official correspondence includes incoming and outgoing letters, official memos, invitations, memos, and dispositions. With E-Office, the process, from drafting and tiered approvals, numbering, and distribution, is done electronically.
2. P Travel is an application that transforms the entire official travel service process, including travel proposals, implementation, and accountability.
3. P Cico is an application that transforms the entire employee attendance service process into a self-service system using Geo Location and Geo Fencing.
4. P Eats is an application used as an electronic payment tool for meals and beverages.
5. P Eproc is an application that transforms the entire procurement process for goods and services electronically, from supplier selection to contract issuance.
6. Portaverse is a platform that transforms the entire service process for learning systems, KPIs, Knowledge Management, and Company information.

Integrated Billing System (IBS)

The Company has implemented an Integrated Billing System (IBS) as an integrated billing system connected to the Terminal Operating System (PTOS-C) to support port services. Through IBS, service users can submit service requests independently (self-service) and receive invoices and supporting documents electronically.

This system connects operational service realization data with the ERP system, providing the basis for automated billing. Digital invoice submission accelerates the billing process, improves revenue recording accuracy, and supports transaction control and billing administration efficiency within the Company.

Portal *Customer Care Station* (CCS)

Perseroan menyediakan Portal CCS sebagai portal layanan pelanggan berbasis web yang menjadi kanal interaksi digital antara Perseroan dan pengguna jasa. Melalui portal ini, pelanggan dapat melakukan pendaftaran, pengajuan layanan, serta penyampaian keluhan dan permintaan informasi secara terintegrasi.

Pemanfaatan Portal CCS memungkinkan proses pelayanan dilakukan secara daring sehingga memudahkan akses layanan terminal, sekaligus meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan serta mempercepat administrasi pelayanan jasa di lingkungan Perseroan.

Customer Care Station (CCS) Portal

The Company provides the CCS Portal as a web-based customer service portal that serves as a digital interaction channel between the Company and service users. Through this portal, customers can register, submit service requests, and submit complaints and information requests in an integrated manner.

Utilizing the CCS Portal enables online service processes, facilitating access to terminal services, while simultaneously improving service quality and customer experience, and accelerating service administration within the Company.

Infrastruktur Teknologi Informasi

Dalam konteks organisasi, *Enterprise Architecture* merupakan cetak biru konseptual yang menggambarkan struktur serta operasional organisasi pada suatu periode tertentu. *Enterprise Architecture* bertujuan untuk merumuskan cara paling efektif bagi organisasi dalam mencapai sasaran saat ini maupun di masa mendatang. Penerapan *Enterprise Architecture* menjadi kebutuhan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, meningkatnya integrasi dan kolaborasi, percepatan perubahan, serta tuntutan pengelolaan risiko yang semakin kompleks.
Terdapat 4 (empat) domain di dalam enterprise architecture, antara lain:

Information Technology Infrastructure

In an organizational context, Enterprise Architecture is a conceptual blueprint that describes the structure and operations of an organization at over a specific period. Enterprise Architecture aims to determine the most effective way for the organization to achieve its current and future objectives. The implementation of Enterprise Architecture has become essential in response to rapid technological advancements, increasing integration and collaboration, accelerated change, and growing complexity in risk management.

There are 4 (four) domains within enterprise architecture, namely:

Arsitektur bisnis
Business architecture

- Konsep blueprint yang menggambarkan kapabilitas bisnis
- Memberikan pandangan terhadap seluruh segmen bisnis, fungsi-gunsi utama, dan ringkasan aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing fungsi
- Blueprint concept that describes business capabilities
- Provides a view of all business segments, main functions, and a summary of activities carried out by each function

Arsitektur Aplikasi
Application Architecture

- Konsep blueprint yang menggambarkan platform aplikasi TI
- Memberikan pandangan terhadap kelompok aplikasi yang terdapat di dalam organisasi, selaras dengan blueprint bisnis beserta informasi
- Concept blueprint that describes the IT application platform
- Provides a view of the application groups within the organization, in line with the business blueprint and information

Arsitektur Infrastruktur
Infrastructure Architecture

- Konsep *blueprint* yang menggambarkan infrastruktur dan perangkat keras TI
- Memberikan pandangan terhadap platform infrastruktur yang mendukung aplikasi digunakan dalam organisasi
- Concept blueprint that describes IT infrastructure and hardware
- Provides insight into the infrastructure platforms that support applications used within the organization

Arsitektur Data
Data Architecture

- Konsep *blueprint* yang menggambarkan alur data dan informasi
- Memberikan pandangan terhadap objek informasi utama yang tersirkulasi dalam organisasi
- A blueprint that illustrates the flow of data and information
- Provides an overview of the key information objects circulating within the organization

Sebagai kerangka strategis, *Enterprise Architecture* memetakan kebutuhan bisnis beserta dukungan teknologi informasi terhadap kegiatan usaha, mencakup domain aplikasi, infrastruktur, dan data. Keberadaan *Enterprise Architecture* juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan bisnis dan dukungan teknologi informasi sehingga mempermudah perencanaan pengembangan teknologi informasi.

As a strategic framework, Enterprise Architecture maps business needs and information technology support for business activities, encompassing application, infrastructure, and data domains. Enterprise Architecture also serves to identify gaps between business needs and information technology support, thus facilitating IT development planning.

Berikut ini merupakan gambaran *high-level Enterprise Architecture* Perseroan:

The following is an overview of high-level the Company Enterprise Architecture:

Summary Interaksi Antar Arsitektur
Summary of Interactions Between Architectures

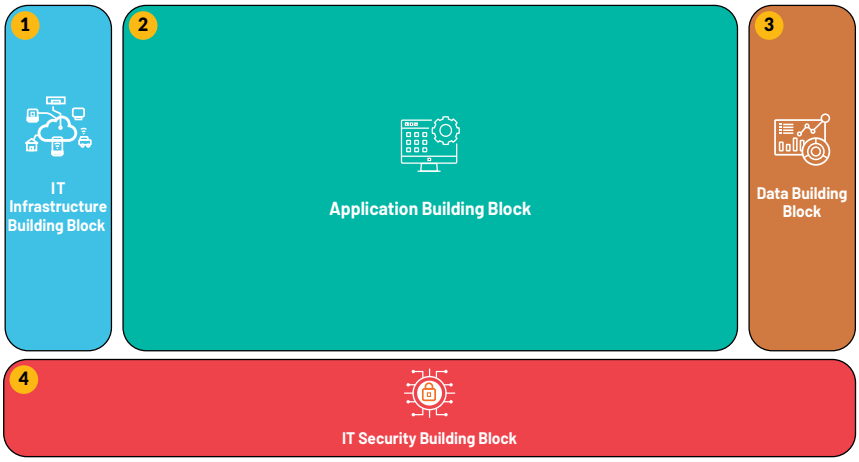

1. IT Infrastructure Building Block memberikan gambaran representatif dari hasil pemetaan infrastruktur teknologi eksisting yang digunakan di IKT.
2. Application Building Block memberikan gambaran representatif dari hasil pemetaan aplikasi eksisting yang oleh user di IKT.
3. Data Building Block memberikan gambaran representatif dari hasil pemetaan aliran data yang digunakan di IKT.
4. IT Security Building Block memberikan gambaran representatif dari hasil pemetaan keamanan teknologi yang digunakan di IKT.

1. The IT Infrastructure Building Block provides a representative overview of the results of the mapping of the existing IT infrastructure used at IKT.
2. The Application Building Block provides a representative overview of the results of the mapping of the existing applications used by users at IKT.
3. The Data Building Block provides a representative overview of the results of the mapping of the data flows used at IKT.
4. The IT Security Building Block provides a representative overview of the results of the mapping of the security technologies used at IKT.

Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi

Sebagai acuan pengelolaan, Perseroan menerapkan Framework NIST (*National Institute of Standards and Technology*) dalam pengelolaan infrastruktur dan keamanan teknologi informasi.

Information Technology Infrastructure and Security

As a governance reference, the Company adopts the National Institute of Standards and Technology (NIST) Framework for managing its information technology infrastructure and security.

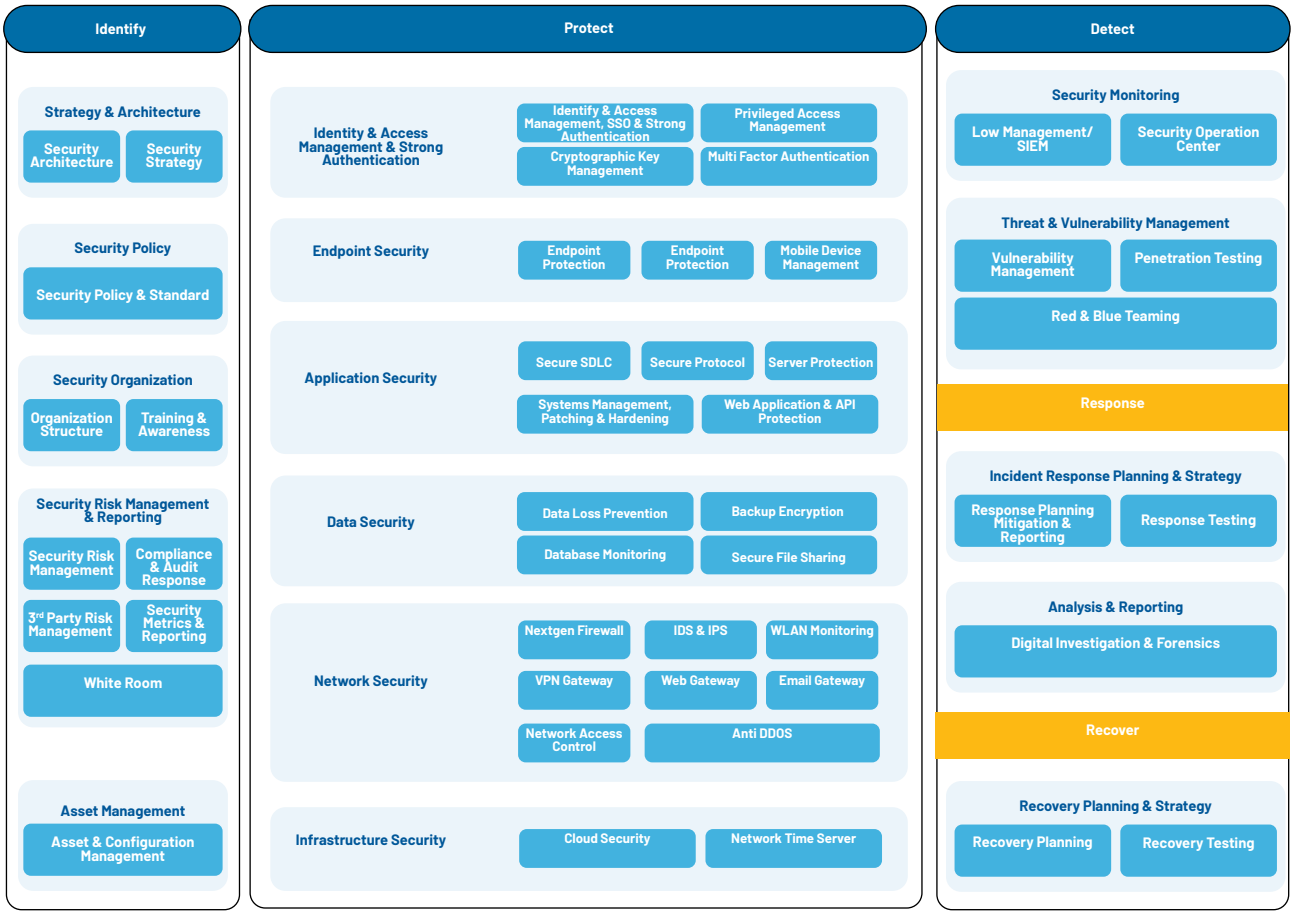

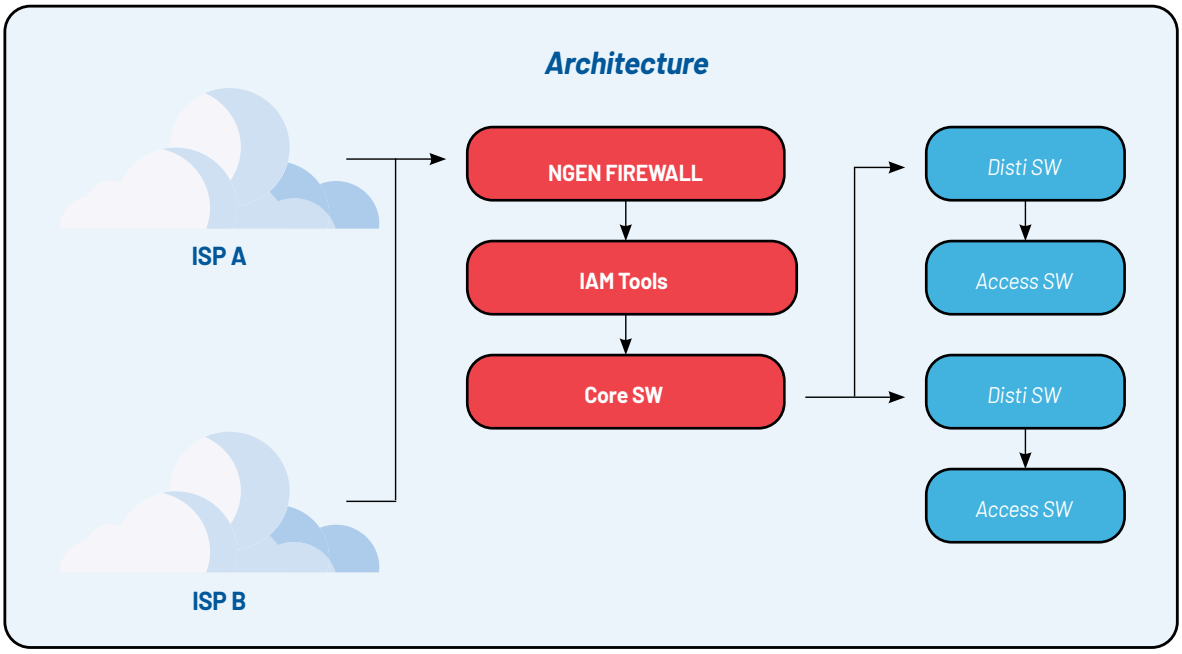

ISP A / ISP B

Internet Service Provider (ISP) merupakan perusahaan yang memberikan layanan akses internet kepada pelanggan. Berikut beberapa fungsi utama yang dijalankan oleh ISP:

1. Menghubungkan Pelanggan ke Internet: ISP menyediakan akses internet kepada pelanggan melalui berbagai teknologi seperti DSL, kabel, fiber optik, atau *wireless*.
2. Menyediakan Alamat IP: ISP menyediakan alamat IP (*Internet Protocol*) kepada pelanggan untuk mengakses internet.
3. Mengatur Lalu Lintas Data: ISP mengatur lalu lintas data antara pelanggan dan internet untuk memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima secara akurat dan efisien.
4. Menyediakan Layanan Email: ISP menyediakan layanan email kepada pelanggan untuk mengirim dan menerima email.
5. Menyediakan Layanan DNS: ISP menyediakan layanan DNS (*Domain Name System*) untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP.

NGEN *Firewall* adalah sebuah perangkat keamanan jaringan yang dirancang untuk melindungi jaringan dari berbagai ancaman keamanan. Berikut beberapa fungsi utama dari NGEN *Firewall*:

1. Pengamanan Jaringan: NGEN *Firewall* berfungsi sebagai pengaman jaringan dengan memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan.
2. Pemblokiran Akses Tidak Sah: *Firewall* dapat memblokir akses tidak sah ke jaringan, termasuk serangan dari luar dan dalam jaringan.
3. Pengamanan Aplikasi: NGEN *Firewall* dapat mengidentifikasi dan memblokir aplikasi yang tidak sah atau berbahaya.
4. Pengamanan Konten: *Firewall* dapat memblokir konten yang tidak sah atau berbahaya, seperti *malware*, virus, dan *phishing*.
5. Pengamanan Jaringan Wi-Fi: NGEN *Firewall* dapat mengamankan jaringan Wi-Fi dengan memantau dan mengontrol akses ke jaringan.

ISP A / ISP B

An Internet Service Provider (ISP) is a company that provides internet access services to customers. Here are some of the key functions performed by ISP:

1. Connecting Customers to the Internet: ISPs provide internet access to customers through various technologies such as DSL, cable, fiber optic, or wireless.
2. Providing IP Addresses: ISPs assign Internet Protocol (IP) addresses to customers for internet access.
3. Managing Data Traffic: ISPs regulate data traffic between customers and the internet to ensure accurate and efficient data transmission.
4. Providing Email Services: ISPs offer email services to customers for sending and receiving emails.
5. Providing DNS Services: ISPs supply Domain Name System (DNS) services, which translate domain names into IP addresses.

NGEN Firewall is a network security device designed to protect networks from various security threats. The key functions of NGEN Firewall include:

1. Network Security: NGEN Firewall acts as a network security barrier by monitoring and controlling incoming and outgoing data traffic.
2. Unauthorized Access Blocking: The firewall prevents unauthorized access to the network, including external and internal threats.
3. Application Security: NGEN Firewall can identify and block unauthorized or malicious applications.
4. Content Security: The firewall blocks harmful or unauthorized content, such as malware, viruses, and phishing attempts.
5. Wi-Fi Network Protection: NGEN Firewall secures Wi-Fi networks by monitoring and controlling access to the network.

***Identity and Access Management* (IAM)**

IAM *tools* merupakan perangkat lunak yang dimanfaatkan untuk mengelola identitas pengguna beserta hak aksesnya di dalam organisasi. Melalui IAM *tools*, organisasi dapat mengendalikan pihak yang berwenang mengakses sumber daya, aplikasi, dan data, sekaligus memastikan bahwa pemberian akses tersebut telah selaras dengan kebijakan keamanan yang berlaku. Adapun fungsi utama IAM *tools* adalah sebagai berikut:

1. Autentikasi: IAM *tools* memungkinkan pengguna untuk melakukan autentikasi dengan menggunakan kredensial seperti username dan password, atau metode autentikasi lainnya seperti biometrik atau token.
2. Otorisasi: IAM *tools* memungkinkan organisasi untuk mengatur akses pengguna ke sumber daya, aplikasi, dan data berdasarkan peran, departemen, atau kebijakan keamanan lainnya.
3. Manajemen Identitas: IAM *tools* memungkinkan organisasi untuk mengelola identitas pengguna, termasuk penciptaan, pengubahan, dan penghapusan akun pengguna.
4. Audit dan Pelaporan: IAM *tools* memungkinkan organisasi untuk melakukan audit dan pelaporan terhadap aktivitas pengguna, sehingga memungkinkan organisasi untuk memantau dan mengoptimalkan kebijakan keamanan mereka.

Core SW adalah sebuah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai pusat penghubung antara beberapa *switch* lainnya dalam sebuah jaringan. Berikut beberapa fungsi utama dari *core switch*:

1. Menghubungkan *Switch* Lainnya: *Core switch* menghubungkan beberapa *switch* lainnya dalam sebuah jaringan, sehingga memungkinkan komunikasi antara perangkat yang terhubung ke switch tersebut.
2. Mengatur Lalu Lintas Data: *Core switch* mengatur lalu lintas data antara switch lainnya, sehingga memungkinkan data untuk dikirimkan dengan efisien dan efektif.
3. Meningkatkan Kecepatan Jaringan: *Core switch* dapat meningkatkan kecepatan jaringan dengan mengurangi latency dan meningkatkan *throughput*.
4. Mengatur Akses ke Jaringan: *Core switch* dapat mengatur akses ke jaringan, sehingga memungkinkan hanya perangkat yang berhak untuk mengakses jaringan.

Investasi Teknologi Informasi

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan telah melakukan realisasi investasi untuk pengembangan teknologi sebesar Rp3.820.000.000. Investasi ini difokuskan pada peningkatan kapasitas perangkat teknologi informasi.

Realisasi Program Teknologi Informasi 2025

Per 31 Desember 2025, realisasi program kerja Teknologi Informasi di Perseroan yakni seperti berikut:

1. *Managed Service* CCS dan *Surrounding Terminal Operating System* (TOS) PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
2. Perawatan *Autogate System Internasional* dan Domestik Branch Jakarta PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
3. Pekerjaan Perawatan Perangkat Keras dan Infrastruktur Sistem Informasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
4. Penggunaan PTOS-C Periode 2025;
5. Pekerjaan Sewa Layanan *Settlement* Sistem *Autogate*;
6. Perpanjangan Layanan Abonemen *Main* Internet Kantor Pusat;

Identity and Access Management (IAM)

IAM tools are software used to manage user identities and access rights within an organization. Through IAM tools, organizations can control who is authorized to access resources, applications, and data, while ensuring that such access is aligned with applicable security policies. The key functions of IAM tools are as follows:

1. Authentication: IAM tools allows users to authenticate using credentials such as usernames and passwords or advanced methods like biometrics or tokens.
2. Authorization: IAM tools enable organizations to regulate user access to resources, applications, and data based on roles, departments, or other security policies.
3. Identity Management: IAM tools enables organizations to manage user identities including the creation, modification, and deletion of user accounts.
4. Audit and Reporting: IAM tools enable organizations to audit and reports on user activities, allowing organizations to monitor and optimize security policies.

Core SW is a network device that serves as the central connection between several other switches in a network. Key Functions of a Core Switch include:

1. Connecting Other Switches: The core switch connects several other switches in a network, allowing communication between devices connected to the switch.
2. Managing Data Traffic: the core switch manages data traffic between other switches allowing data to be sent efficiently and effectively.
3. Increasing Network Speed: the core switch can increase network speed by reducing latency and increases throughput.
4. Controlling Network Access: the core switch can manage access to the network, ensuring that only authorized devices to access the network.

Information Technology Investment

As of December 31, 2025, the Company has realized investments in technology development amounting to Rp3,820,000,000. This investment is focused on increasing the capacity of information technology equipment.

Realization of Information Technology Program In 2025

As of December 31, 2025, the realization of the Company's Information Technology work program is as follows:

1. Managed Service CCS and Surrounding Terminal Operating System (TOS) for PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
2. Maintenance of International and Domestic Autogate System for Jakarta Branch of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
3. Maintenance of Hardware and Information System Infrastructure for PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
4. Use of PTOS-C for the 2025 Period;
5. Rental of Autogate System Settlement Services;
6. Extension of Main Internet Subscription Services for the Head Office;

7. Perpanjangan Layanan Abonemen *Backup* Internet Kantor Pusat;
8. Perpanjangan Layanan Sewa *Link Metro*;
9. Perpanjangan Layanan Abonemen Internet Terminal Satelit (Belawan dan Makassar);
10. Pengadaan Pekerjaan Layanan Abonemen Internet Terminal Satelit Balikpapan;
11. Perpanjangan Lisensi *Bandwidth Management* PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
12. Pengadaan Lisensi *Global Protect* (10 Lisensi);
13. Pengadaan *User* Lisensi SAP di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal Periode 2025 - 2027;
14. Perpanjangan Lisensi *Audit Management System* (Pentana);
15. Perpanjangan (*Renewal*) Lisensi Palo Alto 1410;
16. Perpanjangan Lisensi Email korporat dan Office 365;
17. Migrasi VPN ke SDWAN PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
18. Implementasi *Face Recognition* untuk pengamanan akses;
19. Pengadaan TV Interaktif di ruang rapat Limousine;
20. Pengadaan *Digital Signage* di Lobby CSC;
21. Pengadaan Perangkat Jaringan dan Pendukung Periode 2025;
22. Pengadaan dan Instalasi *Videotron* di Ruang Rapat *Innovation*.

Fokus Pengembangan Teknologi Informasi 2025

Sepanjang tahun 2025, pengembangan Teknologi Informasi yang dilakukan Perseroan terfokus pada aspek berikut:

1. *Rollout* Implementasi dan *Enhancement* Sistem Operasi Terminal Kendaraan (PTOS-C) dan *Integrated Billing System* (IBS) di Terminal Kendaraan Branch Jakarta dan Satelit;
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Teknologi Informasi Fase 1;
3. Implementasi integrasi Sistem Antar Terminal PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

7. Extension of Backup Internet Subscription Services for the Head Office;
8. Extension of Metro Link Rental Services;
9. Extension of Satellite Terminal Internet Subscription Services (Belawan and Makassar);
10. Procurement of Balikpapan Satellite Terminal Internet Subscription Services;
11. Extension of Bandwidth Management License for PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
12. Procurement of Global Protect Licenses (10 Licenses);
13. Procurement of SAP User Licenses for PT Pelindo Multi Terminal for the 2025-2027 Period;
14. Extension of Audit Management System (Pentana) License;
15. Renewal of Palo Alto 1410 License;
16. Extension of Corporate Email and Office 365 Licenses;
17. VPN to SDWAN Migration for PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
18. Implementation of Facial Recognition for Access Security;
19. Procurement of Interactive TV in the Limousine Meeting Room;
20. Procurement of Digital Signage in CSC Lobby;
21. Procurement of Network and Supporting Equipment for the 2025 Period;
22. Procurement and Installation of Videotron in the Innovation Meeting Room.

Information Technology Development Focus For 2025

Throughout 2025, the Company's Information Technology development was focused on the following aspects:

1. Rollout of the Implementation and Enhancement of Vehicle Terminal Operating System (PTOS-C) and Integrated Billing System (IBS) at Jakarta Branch and Satellite Car Terminals;
2. Increasing the Capacity of Phase 1 Information Technology Equipment;
3. Implementation of Inter-Terminal System Integration at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.



PELINDO
MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN

05

Analisa dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Pertumbuhan kinerja yang positif mencerminkan efektivitas strategi dalam mengoptimalkan seluruh lini layanan, memperkuat efisiensi operasional, dan menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.
The positive performance growth reflects the effectiveness of strategy in optimizing all lines of service, strengthening operational efficiency, and creating sustainable value for all stakeholders.

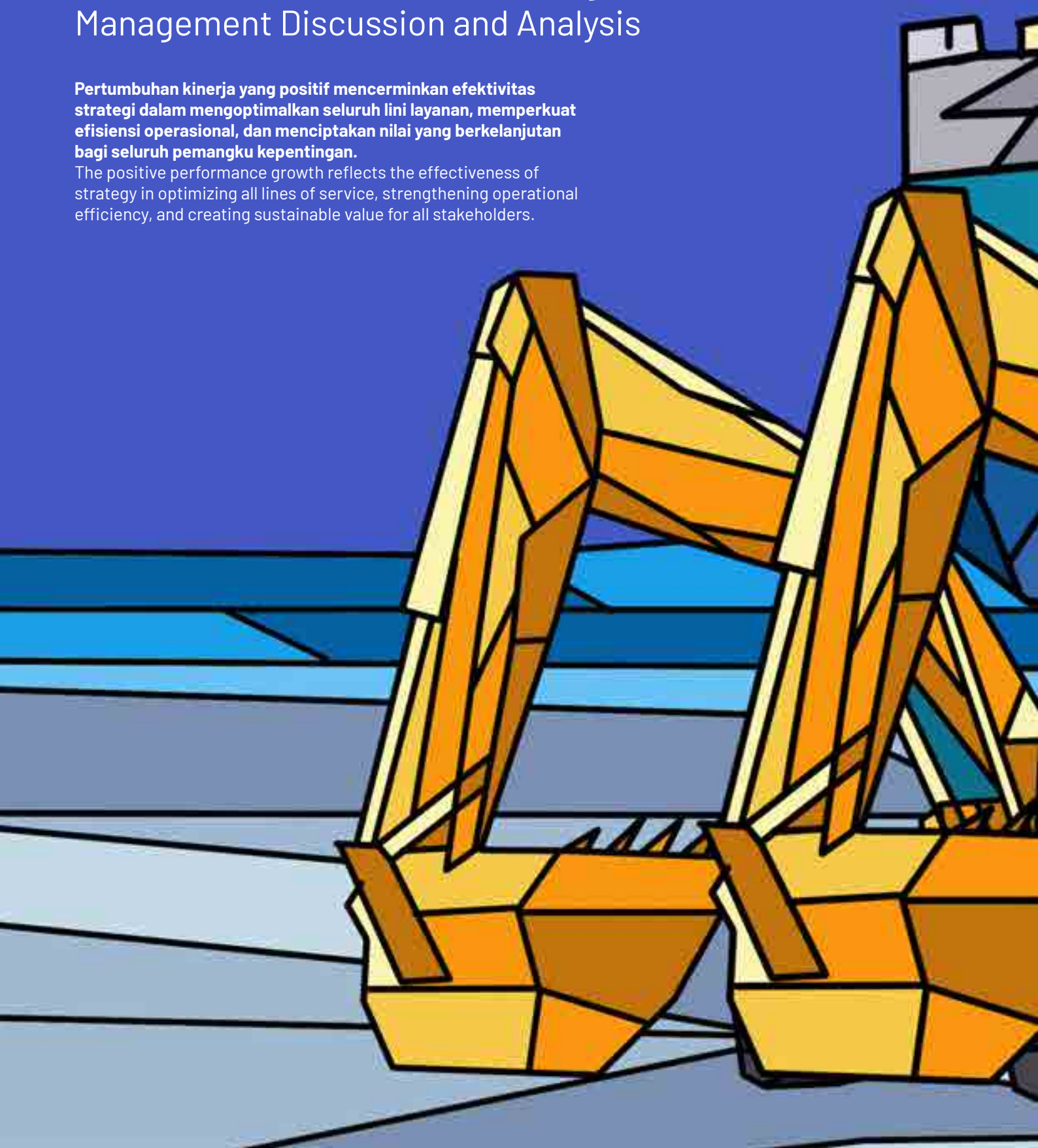



Tinjauan Perekonomian dan Industri
Economic and Industrial Overview



Persaingan dagang di tahun 2025 antara Amerika Serikat dan China turut memberikan dampak pada pelabuhan di Indonesia. Kondisi ini menekan kegiatan ekspor Indonesia yang berkaitan dengan produksi yang dilakukan oleh China.

Terjadi pelemahan terparah Dollar AS terhadap Rupiah terjadi sekitar April 2025, di mana nilai tukar sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa di kisaran Rp17.100 - Rp17.200 per Dolar AS. Meskipun ada sedikit penguatan di akhir tahun karena intervensi Bank Indonesia dan penyesuaian pasar, tren besarnya tetap menunjukkan Dolar yang mendominasi. Pada Desember 2025, harga minyak menyentuh level terendah dalam 4 tahun terakhir, didorong oleh kekhawatiran *oversupply* (kelebihan pasokan).

Tahun 2025 pemerintah memberikan kebijakan insentif impor mobil listrik yang meningkatkan volume kargo CBU listrik yang cukup signifikan dari China.

The trade tensions in 2025 between the United States and China also had an impact on ports in Indonesia. This condition put pressure on Indonesia's export activities, particularly those related to production carried out by China.

The most significant weakening of the Indonesian Rupiah against the US Dollar occurred around April 2025, when the exchange rate reached an all-time high of approximately Rp17,100–Rp17,200 per US Dollar. Although there was slight strengthening toward the end of the year due to Bank Indonesia's intervention and market adjustments, the overall trend continued to show the dominance of the US Dollar. In December 2025, oil prices reached their lowest level in the past four years, driven by concerns over oversupply.

In 2025, the government introduced incentive policies for electric vehicle imports, which significantly increased the volume of electric CBU cargo from China.

Kebijakan Strategis Tahun 2025 dan Penyelesaian Permasalahan yang Terjadi

Strategic Policies for 2025 and Resolution of Issues Encountered

Kebijakan Strategis Tahun 2025

Tahun 2025 IPCC memiliki kebijakan strategis untuk menciptakan *Integrated Connectivity* yang menghubungkan seluruh elemen dalam jaringan secara efisien dan terintegrasi. Melalui penerapan teknologi canggih dan kerjasama lintas sektor, IPCC membangun sistem yang memungkinkan aliran informasi dan operasional yang lebih lancar antara pelabuhan, terminal, transportasi darat, dan automaker. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mempercepat proses distribusi, sambil tetap memperhatikan keberlanjutan dan ramah lingkungan, menjadikan IPCC sebagai pemain utama dalam industri logistik global. Fokus pada tahun 2025 antara lain adalah memperkuat bisnis melalui interkoneksi terminal kendaraan, kolaborasi dengan pemilik barang yang terlibat dalam rantai ekosistem logistik serta implementasi *full dedicated car terminal* (fase 2).

Pada tahun 2025, dalam rangka kolaborasi dengan ekosistem logistik, IPCC melaksanakan kerjasama pengangkutan kargo mobil listik BYD dilakukan mulai bulan September 2025 dan telah melaksanakan pengangkutan kargo mobil listrik BYD sebanyak 43.000 unit.

Rincian Masalah yang Dihadapi di Tahun 2025 dan Solusinya

Tahun 2025 kargo CBU domestik turun sebesar 15% dan kargo alat berat & bus/truk domestik turun sebesar 15%. Namun IPCC mengkompensasi penurunan ini dengan mengamankan kargo internasional terutama lonjakan impor mobil listrik akibat penerapan insentif mobil listrik dari pemerintah. Dengan strategi ini, kargo CBU internasional naik sebesar 9% dan kargo alat berat & bus/truk naik sebesar 10%.

Strategic Policies for 2025

In 2025, IPCC's strategic policies were to create Integrated Connectivity, connecting all elements of the network in an efficient and integrated manner. Through the application of advanced technology and cross-sector collaboration, IPCC is building a system that enables smoother flow of information and operations between ports, terminals, land transportation, and automakers. This approach is expected to increase efficiency, reduce costs, and accelerate distribution processes, while maintaining sustainability and environmental friendliness, establishing IPCC as a major player in the global logistics industry. Focuses for 2025 include strengthening business through interconnected vehicle terminals, collaboration with goods owners involved in the logistics ecosystem, and implementation of full dedicated car terminal (phase 2).

In 2025, as part of its collaboration with the logistics ecosystem, IPCC collaborated to transport BYD electric cars. This agreement began in September 2025 and has already transported 43,000 BYD electric cars.

Details of Issues Encountered in 2025 and The Solutions

In 2025, domestic CBU experienced a decrease of 15%, and domestic heavy equipment and bus/truck cargo decreased by 15%. However, IPCC compensated this decline by securing international cargo, particularly the surge in electric car imports due to the government's electric car incentives. With this strategy, international CBU cargo increased by 9%, and heavy equipment and bus/truck cargo increased by 10%.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operational Overview by Business Segment

Segmen Usaha

Laporan Keuangan Perusahaan telah menerapkan PSAK 108 tentang Segmen Operasi, di mana Perusahaan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam beberapa segmen yang menyediakan jasa pelayanan terminal, jasa pelayanan barang, jasa rupa-rupa dan pengusahaan fasilitas dan utilitas.

Operating Segment

The Company's Financial Statement has implemented PSAK 108 regarding Operating Segments, which the Company operates and manages business in several segments providing terminal services, cargo services, miscellaneous services as well as facilities and utilities services.

Segmen Usaha IPCC
IPCC Business Segments

Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang Terminal and Cargo Services	**Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas** Miscellaneous, Facilities and Utilities Services	**Non Segmen** Non-Segment

Untuk dapat memberikan gambaran awal tentang skala bisnis masing-masing segmen dan kontribusinya terhadap Perusahaan, berikut disampaikan pendapatan serta nilai aset Perusahaan yang dikontribusikan oleh masing-masing segmen.

In order to provide an initial overview of the business scale of each segment and its contribution to the Company, the following is the Company's revenue and asset value contributed by each segment.

Jumlah dan Kontribusi Pendapatan Segmen Usaha Terhadap Pendapatan Operasi IPCC
Amount and Contribution of Business Segment Revenue to IPCC Operating Revenue

Segmen Usaha Business Segment	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang Terminal and Cargo Services	**910.791**	**97,94**	796.750	96,62	114.041	14,31	↑
Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas Miscellaneous, Facilities and Utilities Services	**19.169**	**2,06**	27.846	3,38	(8.677)	(31,16)	↓
Non Segmen Non-Segment	**-**	**0,00**	-	0,00	-	-	-
Jumlah Pendapatan Operasi Total Operating Revenue	**929.960**	**100,00**	**824.596**	**100,00**	**105.364**	**12,78**	↑

Komposisi Pendapatan Segmen Usaha Terhadap Pendapatan Operasi IPCC
Composition of Business Segment Revenue to IPCC Operating Revenue

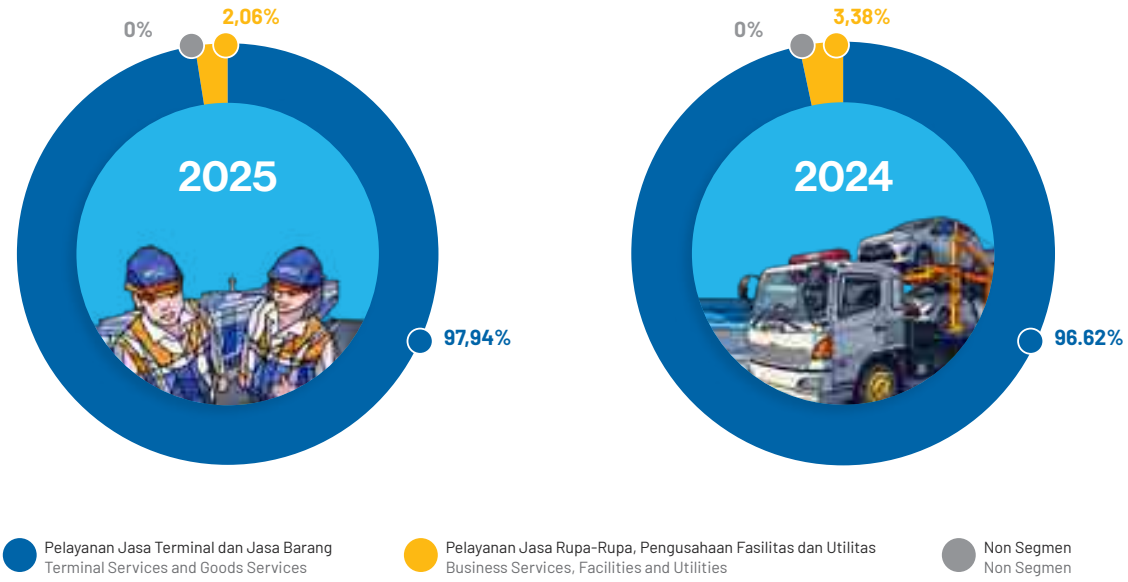

Jumlah dan Kontribusi Aset Segmen Usaha Terhadap Aset IPCC
Amount and Contribution of Business Segment Assets to IPCC Assets

Segmen Usaha Business Segment	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang Terminal and Cargo Services	**917.845**	**44,59**	964.472	52,11	(46.627)	(4,83)	↓
Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas Miscellaneous, Facilities and Utilities Services	**1.429**	**0,07**	13.486	0,73	(12.057)	(89,40)	↓
Non Segmen Non-Segment	**1.138.958**	**55,34**	872.781	47,16	266.177	30,50	↑
Jumlah Aset Operasi Total Operational Assets	**2.058.232**	**100,00**	**1.850.739**	**100,00**	**207.493**	**11,21**	↑

Komposisi Aset Segmen Usaha Terhadap Aset IPCC
Composition of Business Segment Assets to IPCC Assets

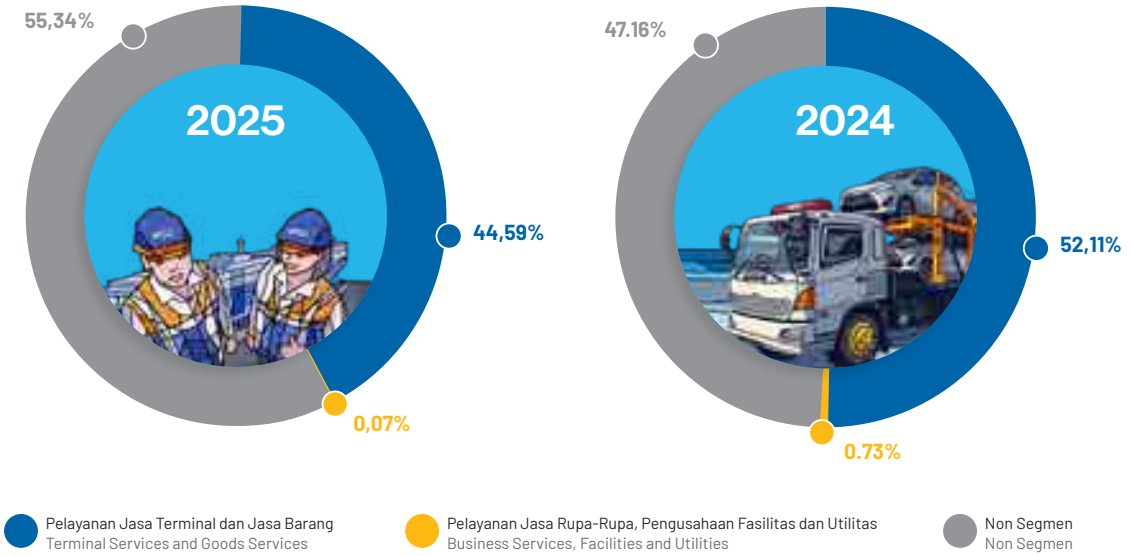

Dari tabel dan bagan di atas, dapat dilihat bahwa segmen Pelayanan Utilitas Jasa Terminal dan Jasa Barang menjadi segmen yang menopang bisnis inti Perusahaan. Berikut disampaikan rincian kegiatan operasi dan profitabilitas dari masing-masing segmen usaha.

The tables and charts above showed that the Utility Services, Terminal Services, and Cargo Services segments are the segments that support the Company's core business. The following is a breakdown of the operational activities and profitability of each business segment.

Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang

Terminal Services and Cargo Services

Pelayanan Jasa Terminal

IPCC menyediakan pelayanan jasa terminal untuk kegiatan bongkar muat mobil, alat berat, truk/bus, motor dan general cargo yang sebagian besar merupakan part dari alat berat yang berstatus *Completely Knock Down* (CKD). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Terminal Internasional dan Terminal Domestik yang meliputi wilayah dermaga domestik Perusahaan, dermaga eks. Presiden, dermaga 107-109, area Pelabuhan Pontianak, Balikpapan, Medan dan Makassar. Realisasi pelayanan jasa terminal dalam dua tahun terakhir ditunjukkan dalam tabel berikut:

Terminal Services

IPCC provides terminal services for loading/unloading of cars, heavy equipment, trucks/buses, motorcycle and general cargo, most of which are parts of heavy equipment with Completely Knock Down (CKD) status. These activities are carried out at the International Terminal and Domestic Terminal which includes the Company's domestic dock area, ex. President's Pier, pier 107–109, Pontianak, Balikpapan, Medan and Makassar Port areas. The realization of terminal services in the last three years is shown in the following table:

Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Terminal di Terminal Satelit Pontianak
Realization of Terminal Service Segment at Pontianak Satellite Terminal

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Amount	Persentase Percentage (%)	
Bongkar Muat Mobil	Unit	**27.829**	27.420	409	1,49	↑
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus)	Unit	**34.352**	28.638	5.714	19,96	↑
	m3	**1.441.065**	1.178.986	262.079	22,23	↑
General Cargo	PKGS	**101.868**	48.174	53.694	111,45	↑
	m3	**101.868**	48.174	53.694	111,45	↑
Bongkar Muat Motor	Unit	**130.711**	110.052	20.659	18,77	↑

Sepanjang tahun 2025, Terminal Kendaraan Pontianak melayani bongkar muat mobil sebanyak 27.829 unit, mengalami peningkatan sebesar 1,49% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebanyak 27.420 unit. Peningkatan ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan mobil pada libur akhir tahun dan *event* lokal seperti Cap Go Meh di Singkawang yang rutin tiap tahunnya.

Throughout 2025, Pontianak Vehicle Terminal handled 27,829 vehicles, increased by 1.49% compared to 27,420 vehicles in 2024. This increase was driven by high demand for vehicles during the year-end holidays and local events such as the annual Cap Go Meh festival in Singkawang.

Pada realisasi pelayanan terminal untuk Kendaraan Berat (Alat Berat, Truk, Bus) tahun 2025 sebanyak 34.352 unit, meningkat 19,96% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebanyak 28.638 unit. Kenaikan ini disebabkan oleh berjalannya proyek jalan dan konektivitas di Kalimantan sehingga permintaan alat berat seperti *excavator* dan *bulldozer* meningkat. Selain itu, ekspansi perkebunan sawit di wilayah seperti Ketapang, Sintang, dan Sanggau juga turut andil dalam meningkatnya trafik kendaraan berat.

Heavy vehicle (heavy equipment, trucks, and buses) terminal services in 2025 totaled 34,352 units, a 19.96% increase compared to the 28,638 units in 2024. This increase was driven by ongoing road and connectivity projects in Kalimantan, which have increased demand for heavy equipment such as excavators and bulldozers. Furthermore, the expansion of oil palm plantations in areas such as Ketapang, Sintang, and Sanggau also contributed to the increase in heavy vehicle traffic.

Sementara itu, realisasi pelayanan terminal bongkar muat motor sebanyak 130.711 unit, meningkat 18,77% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebanyak 110.052 unit motor. Kenaikan ini disebabkan oleh lonjakan penggunaan motor untuk mobilisasi mudik pada libur Idul Fitri dan juga event kota yaitu Festival Khatulistiwa.

Meanwhile, the motorcycle loading and unloading terminal handled 130,711 units, an 18.77% increase compared to 110,052 units in 2024. This increase was driven by a surge in motorcycle use for homecoming travel during the Eid al-Fitr holiday and the city's Equator Festival.

Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Terminal di Terminal Satelit Makassar
Realization of Terminal Services Segment at Makassar Satellite Terminal

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Amount	Persentase Percentage (%)	
Bongkar Muat Mobil Car Loading and Unloading	Unit	**88.181**	93.298	(5.117)	(5,48)	↓
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment/Truck/Bus)t	Unit	**35.423**	35.324	99	0,28	↑
	m^3	**2.035.404**	1.437.889	597.515	41,56	↑
Bongkar Muat Motor Motorcycle Loading and Unloading	Unit	**121.501**	118.284	3.217	2,72	↑

Sepanjang tahun 2025, realisasi pelayanan jasa Terminal Kendaraan Makassar untuk bongkar muat mobil mencapai 88.181 unit, menurun 5,48% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi terutama disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat di wilayah timur Indonesia sehingga berdampak pada terminal ini sebagai hub terminal kendaraan untuk wilayah timur.

Throughout 2025, the realization of Makassar Vehicle Terminal's car loading and unloading services reached 88,181 units, a 5.48% decrease compared to the previous year. This decline was primarily due to declining purchasing power in eastern Indonesia, impacting the terminal's role as a vehicle hub for the eastern region.

Realisasi pelayanan jasa terminal untuk Kendaraan Berat (Alat Berat, Truk, Bus) tahun 2025 telah dilakukan bongkar muat sebanyak 35.423 unit, meningkat 0,28% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebanyak 35.324 unit. Pertumbuhan ini disebabkan oleh rencana pemerintah untuk membangun swasembada pangan di wilayah timur Indonesia.

Terminal services for heavy vehicles (heavy equipment, trucks, and buses) in 2025 included 35,423 units of loading and unloading, a 0.28% increase compared to 35,324 units in 2024. This growth is due to the government's plan to achieve food self-sufficiency in eastern Indonesia.

Sementara itu, realisasi pelayanan jasa terminal untuk motor tahun 2025 telah dilakukan bongkar muat sebanyak 121.501 unit, meningkat 2,72% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebanyak 118.284 unit. Pertumbuhan ini disebabkan oleh tingginya mobilitas masyarakat dan pergeseran moda transportansi *online* khususnya roda dua.

Meanwhile, terminal services for motorcycles in 2025 handled 121,501 units, an increase of 2.72% compared to the previous year's 118,284 units. This growth was due to increased public mobility and the shift toward online transportation, particularly motorcycles.

Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Terminal di Terminal Satelit Belawan
Realization of Terminal Service Segments at Belawan Satellite Terminal

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Amount	Persentase Percentage (%)	
Bongkar Muat Mobil Car Loading and Unloading	Unit	**46.111**	53.787	7.676	(14,27)	↓
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment/Truck/Bus)	Unit	**1.779**	2.119	340	(16,05)	↓
	m3	**74.718**	97.116	22.398	(29,97)	↓
Bongkar Muat Motor Motorcycle Loading and Unloading	Unit	**1.574**	470	1.104	234,89	↑

Sepanjang tahun 2025, realisasi pelayanan jasa Terminal Kendaraan Belawan bongkar muat mobil yang dilakukan Perusahaan sebanyak 46.111 unit, turun 14,27% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebanyak 53.787 unit. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan masyarakat terhadap alat transportasi khususnya roda empat.

Throughout 2025, the Company's car loading and unloading services at Belawan Vehicle Terminal reached 46,111 units, a 14.27% decrease compared to 53,787 units in 2024. This decrease was primarily due to declining public demand for transportation, particularly four-wheeled vehicles.

Realisasi pelayanan jasa terminal untuk Kendaraan Berat (Alat Berat, Truk, Bus) tahun 2025 telah dilakukan bongkar muat sebanyak 1.779 unit, turun 16,05% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebanyak 2.119 unit. Penurunan ini disebabkan menurunnya aktivitas perkebunan yang membutuhkan kendaraan berat.

In 2025, terminal services for heavy vehicles (heavy equipment, trucks, and buses) included loading and unloading of 1,779 units, decreased by 16.05% compared to the previous year's 2,119 units. This decrease was due to a decrease in plantation activities requiring heavy vehicles.

Sementara itu, realisasi pelayanan jasa terminal untuk motor sepanjang tahun 2025 telah dilakukan bongkar muat sebanyak 1.574 unit, meningkat 234,89% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebanyak 470 unit. Kenaikan ini disebabkan oleh tingginya mobilitas masyarakat dan pergeseran moda transportansi online khususnya roda dua serta banyaknya model baru yang dikeluarkan oleh produsen motor.

Meanwhile, 1,574 motorcycle terminal services were loaded and unloaded throughout 2025, a 234.89% increase compared to the previous year of 470 units. This increase was driven by high public mobility and the shift towards online transportation, particularly motorcycles, as well as the numerous new models released by motorcycle manufacturers.

Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Terminal di Terminal Satelit Balikpapan
Realization of Terminal Service Segment at Balikpapan Satellite Terminal

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Amount	Persentase Percentage (%)	
Bongkar Muat Mobil Car Loading and Unloading	Unit	**70.328**	72.637	2.309	(3,18)	↓
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment/Truck/Bus)	Unit	**99.907**	74.221	25.686	34,62	↑
	m3	**4.094.622**	2.648.456	1.446.166	54,60	↑
General Cargo	PKGS	**-**	-	-	-	-
	m3	**46.386**	121.318	74.932	(61,77)	↓
Bongkar Muat Motor Motorcycle Loading and Unloading	Unit	**24.474**	20.981	3.493	16,65	↑

Sepanjang tahun 2025, realisasi pelayanan jasa Terminal Kendaraan bongkar muat mobil sebanyak 70.328 unit, menurun 3,18% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebanyak 72.637 unit. Penurunan ini disebabkan karena telah selesainya fase kontruksi awal pembangunan IKN. Selain itu, penurunan daya beli dan suku bunga yang cukup tinggi menjadi pertimbangan masyarakat untuk melakukan pembelian terhadap kendaraan roda empat.

Throughout 2025, vehicle terminal services for loading and unloading cars reached 70,328 units, a decrease of 3.18% compared to 72,637 units in 2024. This decrease was due to the completion of the initial construction phase of the new capital city (IKN). Furthermore, declining purchasing power and relatively high interest rates are factors that influence public decisions regarding the purchase of four-wheeled vehicles.

Realisasi pelayanan jasa terminal untuk Kendaraan Berat (Alat Berat, Truk, Bus) tahun 2025 telah dilakukan bongkar muat sebanyak 99.907 unit, naik 34,62% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebanyak 74.221 unit. Kenaikan ini disebabkan oleh akselarasi pembangunan IKN fase lanjutan yang membutuhkan alat berat seperti *Tower Crane* dan *Mobile Crane* serta alat pemadat untuk pengerasan lahan di area IKN.

Terminal services for heavy vehicles (heavy equipment, trucks, and buses) in 2025 included loading and unloading of 99,907 units, increased by 34.62% compared to the previous year's 74,221 units. This increase was due to the accelerated development of the next phase of the new capital city (IKN), which requires heavy equipment such as tower cranes and mobile cranes, as well as compaction equipment for land hardening in IKN area.

Sementara itu, pelayanan jasa terminal berupa bongkar muat motor yang dilakukan tahun 2025 sebanyak 24.474 unit, meningkat 16,65% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 20.981 unit. Kenaikan ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang tinggi untuk mobilisasi harian dan pergeseran moda transportasi *online* roda dua.

Meanwhile, terminal services of loading and unloading motorcycles reached 24,474 units in 2025, increased by 16.65% compared to the previous year reaching 20,981 units. This was driven by high purchasing power for daily mobility and a shift towards online two-wheeled transportation.

Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Terminal di Terminal Satelit Banjarmasin
Realization of Terminal Service Segments at Banjarmasin Satellite Terminal

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Amount	Persentase Percentage (%)	
Bongkar Muat Mobil	Unit	**45.848**	8.782	37.066	522,06	↑
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus)	Unit	**56.469**	1.745	54.724	3.236,05	↑
	m3	**2.405.079**	101.071	2.304.008	2.279,59	↑
General Cargo	PKGS	**-**	-	-	-	-
	m3	**3.875**	162	3.713	2.391,98	↑
Bongkar Muat Motor	Unit	**9.990**	521	9.469	1.917,47	↑

Terminal Kendaraan Banjarmasin mulai dioperasikan pada 7 Oktober 2024. Sepanjang tahun 2025, Perseroan melakukan pelayanan jasa terminal berupa bongkar muat mobil sebanyak 45.848 unit, meningkat 522,06% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebanyak 8.782 unit. Kenaikan ini disebabkan tingginya permintaan masyarakat untuk mobilisasi sehari-hari.

Banjarmasin Vehicle Terminal commenced operations on October 7, 2024. Throughout 2025, the Company provided terminal services for loading and unloading of 45,848 vehicles, a 522.06% increase compared to the 8,782 vehicles in 2024. This increase was driven by high public demand for daily transportation.

Realisasi pelayanan jasa terminal untuk Kendaraan Berat (Alat Berat, Truk, Bus) tahun 2025 telah dilakukan bongkar muat sebanyak 56.469 unit, meningkat 3.236,05% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebanyak 1.745 unit. Pertumbuhan ini disebabkan meningkatnya kebutuhan untuk aktivitas tambang di wiliyah Kalimantan Selatan.

Terminal services for heavy vehicles (heavy equipment, trucks, and buses) in 2025 included loading and unloading of 56,469 units, a 3,236.05% increase compared to 1,745 units in 2024. This growth was driven by increased demand for mining activities in South Kalimantan.

Sementara itu, pelayanan jasa terminal berupa bongkar muat motor yang dilakukan tahun 2025 sebanyak 9.990 unit, meningkat 1.917,47% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 521 unit. Pertumbuhan ini disebabkan oleh tingginya mobilitas masyarakat dan pergeseran moda transportansi online khususnya roda dua.

Meanwhile, terminal services for loading and unloading motorcycles reached 9,990 units in 2025, an increase of 1,917.47% compared to the previous year of 521 units. This growth was driven by high public mobility and a shift towards online transportation, particularly motorcycles.

Pelayanan Jasa Barang

IPCC melakukan pelayanan jasa barang, antara lain mobil, motor, alat berat, truk, bus, dan *general cargo*. Barang tersebut didistribusikan melalui dermaga umum baik untuk keperluan ekspor maupun impor di Terminal Internasional untuk perdagangan luar negeri serta kegiatan bongkar dan muat di Terminal Domestik pada perdagangan dalam negeri. Realisasi pelayanan jasa barang berdasarkan perdagangan dalam dua tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Cargo Services

IPCC provides cargo services, including cars, motorcycles, heavy equipment, trucks, buses, and general cargo. The cargo is distributed through public docks for both export and import purposes at the International Terminal for foreign trade and loading and unloading activities at the Domestic Terminal for domestic trade. The realization of cargo services by trading in the last two years as as shown in the following table:

Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Barang Berdasarkan Perdagangan Luar Negeri
Realization of Cargo Services Segment by Foreign Trading

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Amount	Persentase Percentage (%)	
Impor Import						
Bongkar Muat Mobil Car Loading and Unloading	Unit	**158.472**	80.272	78.200	97,42	↑
Alat Berat/Truk/Bus Heavy Equipment/Truck/Bus	Unit	**8.094**	7.917	177	2,24	↑
	m3	**746.305**	718.483	27.822	3,87	↑

Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Barang Berdasarkan Perdagangan Luar Negeri
Realization of Cargo Services Segment by Foreign Trading

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Amount	Persentase Percentage (%)	
General Cargo	PKGS	6.051	5.315	736	13,85	↑
	m3	41.998	54.635	(12.637)	(23,13)	↓
Ekspor Export						
Bongkar Muat Mobil Car Loading and Unloading	Unit	390.803	359.688	31.115	8,65	↑
Alat Berat/Truk/Bus Heavy Equipment/Truck/Bus	Unit	2.723	2.838	(115)	(4,05)	↓
	m3	260.496	240.889	19.606	8,14	↑
General Cargo	PKGS	1.647	1.791	(144)	(8,04)	↓
	m3	21.896	28.849	(6.953)	(24,10)	↓

Realisasi arus impor alat berat, truk dan bus tahun 2025 secara jumlah unit mengalami kenaikan 2,24% dibandingkan tahun sebelumnya, dari sebanyak 7.917 unit pada tahun 2024 menjadi sebanyak 8.094 unit pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan kuatnya permintaan dari sektor pertambangan dan perkebunan, khususnya di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera serta dukungan terhadap proyek-proyek besar pemerintah yang mendorong kebutuhan alat berat dalam skala nasional.

The realization of import flow of heavy equipment, trucks, and buses in 2025, in terms of units, increased by 2.24% compared to the previous year, from 7,917 units in 2024 to 8,094 units in 2025. This reflects strong demand from the mining and plantation sectors, particularly in Kalimantan, Sulawesi, and Sumatra, as well as support for major government projects that drive heavy equipment demand on a national scale.

Namun realisasi arus ekspor alat berat, *truck* dan *bus* tahun 2025 mengalami penurunan hingga 4,05% dibandingkan tahun sebelumnya, dari sebanyak 2.838 unit pada tahun 2024 menjadi sebanyak 2.723 unit pada tahun 2025. Hal ini disebabkan melemahnya permintaan dari negara tujuan utama seperti Afrika dan Asia Selatan, serta terbatasnya kapal pengangkut khusus alat berat, serta kinerja ini masih tertekan oleh melemahnya permintaan dari kawasan serta penyesuaian regulasi emisi kendaraan di negara tujuan, yang menyebabkan sebagian merek menunda jadwal pengiriman.

However, the realization of export flow of heavy equipment, trucks, and buses in 2025 decreased by 4.05% compared to the previous year, from 2,838 units in 2024 to 2,723 units in 2025. This was due to weakening demand from key destination countries such as Africa and South Asia, as well as limited availability of specialized heavy equipment transport vessels. This performance was further pressured by weakening demand from the region and adjustments to vehicle emission regulations in destination countries, which caused some brands to delay delivery schedules.

Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Barang Berdasarkan Perdagangan Dalam Negeri
Realization of Cargo Services Segment by Domestic Trading

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Amount	Persentase Percentage (%)	
Bongkar Unloading						
Mobil Car	Unit	8.478	10.035	(1.557)	(15,52)	↓
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment/Truck/Bus)	Unit	13.626	15.096	(1.470)	(9,74)	↓
	m3	486.926	571.621	(84.694)	(14,82)	↓
General Cargo	PKGS	667	1.010	(343)	(33,96)	↓
	m3	3.269	3.177	92	2,90	↑
Motor Motorcycle	Unit	2.816	2.767	49	1,77	↑

Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Barang Berdasarkan Perdagangan Dalam Negeri
Realization of Cargo Services Segment by Domestic Trading

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Amount	Persentase Percentage (%)	
Muat Loading						
Mobil Car	Unit	**109.250**	129.811	(20.561)	(15,84)	↓
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment/Truck/Bus)	Unit	**21.719**	24.204	(2.485)	(10,27)	↓
	m3	**905.462**	1.022.960	(117.497)	(11,49)	↓
General Cargo	PKGS	**242**	306	(64)	(20,92)	↓
	m3	**21.638**	6.985	14.653	209,78	↑
Motor Motorcycle	Unit	**87.276**	79.376	7.900	9,95	↑

Secara umum realisasi bongkar muat segmen CBU, kendaraan berat, *general cargo* dan motor di tahun 2025 rata-rata menunjukkan penurunan yang terutama disebabkan perdagangan domestik terutama mobil masih menghadapi tekanan akibat perlambatan daya beli konsumen dan tingginya tingkat suku bunga pembiayaan kendaraan baru. Penurunan ini juga utamanya disebabkan oleh stok kendaraan yang tinggi di dealer utama, serta penundaan distribusi ke daerah-daerah luar Jawa akibat rendahnya serapan pasar di sektor retail otomotif.

In general, loading and unloading realization for CBU, heavy vehicle, general cargo, and motorcycle segments in 2025 showed an average decline, primarily due to domestic trade, particularly in cars, still facing pressure due to slowing consumer purchasing power and high interest rates on new vehicle financing. This decline was also primarily due to high vehicle inventories at main dealers and delays in distribution to areas outside Java due to low market absorption in the automotive retail sector.

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang

Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Profitability and Financial Performance of Terminal Services and Cargo Services Segment

The profitability and financial performance of the Terminal Services and Cargo Services segment are shown in the table below.

Kinerja Keuangan Segmen Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang Financial Performance of Terminal Services and Cargo Services Segment	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-juta)	Persentase Percentage (%)	
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income					
Pendapatan operasi segmen Segment operating revenue	**910.791**	796.750	114.041	14,31	↑
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	**(527.876)**	(474.311)	(53.565)	11,29	↑
Laba bruto Gross profit	**382.915**	322.439	60.476	18,76	↑
Posisi Keuangan Financial Position					
Aset segmen Segment assets	**917.845**	964.472	(46.627)	(4,83)	↓
Liabilitas segmen Segment liabilities	**576.690**	513.372	63.318	12,33	↑

Kinerja Keuangan Segmen Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang Financial Performance of Terminal Services and Cargo Services Segment	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-juta)	Persentase Percentage (%)	
Informasi Lainnya Other Information					
Pengeluaran modal Capital expenditures	**7.065**	16.662	(9.597)	(57,60)	↓
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	**94.945**	106.912	(11.967)	(11,19)	↓
Rasio-rasio Profitabilitas Profitability Ratios					
Margin Laba Bruto (%) Gross Profit Margin (%)	**42,04**	40,47	1,57		↑
Margin Laba Usaha (%) Operating Profit Margin (%)	**42,04**	40,47	1,57		↑
Imbal Hasil Aset (%) Return on Assets (%)	**41,72**	33,43	8,29		↑

Pada tahun 2025, total aset segmen Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang tercatat sebesar Rp917,85 miliar, mengalami penurunan sebesar 4,83% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp964,47 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berlanjutnya program optimalisasi aset tetap serta upaya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara konsisten dan terukur.

In 2025, total assets of the Terminal Services and Cargo Services segment were recorded at Rp917.85 billion, representing a decrease of 4.83% compared to the previous year of Rp964.47 billion. This decline was primarily driven by continued implementation of fixed asset optimization programs, as well as consistent and measured efforts to improve efficiency in resource management.

Sementara itu, liabilitas segmen mengalami peningkatan sebesar 12,33%, dari Rp513,37 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp576,69 miliar pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan aktivitas operasional yang lebih intensif serta komitmen jangka pendek yang lebih tinggi dalam rangka mendukung pertumbuhan kapasitas layanan dan pengembangan operasional segmen.

Meanwhile, the segment liabilities increased by 12.33%, from Rp513.37 billion in 2024 to Rp576.69 billion in 2025. This increase reflects more intensive operational activities as well as higher short-term commitments to support service capacity growth and the development of segment operations.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan aset, segmen tetap mampu menjalankan operasionalnya secara produktif dengan dukungan struktur pendanaan yang terkelola dengan baik. Strategi penguatan neraca melalui pengelolaan liabilitas yang terukur terus menjadi fokus utama dalam mendukung keberkelanjutan usaha di tengah dinamika industri kepelabuhanan yang terus berkembang.

This condition indicates that despite the decline in assets, the segment remained capable of operating productively with the support of a well-managed funding structure. The strategy to strengthen the balance sheet through prudent liability management continues to be a key focus in supporting business sustainability amid the evolving dynamics of the port industry.

Pada tahun 2025, pengeluaran modal (*capital expenditure*) segmen Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang tercatat sebesar Rp7,07 miliar, mengalami penurunan signifikan sebesar 57,60% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16,66 miliar. Penurunan ini mencerminkan pendekatan Perseroan yang semakin selektif dan disiplin dalam alokasi belanja modal, dengan memprioritaskan proyek-proyek yang memberikan dampak langsung terhadap efisiensi operasional dan peningkatan kualitas layanan.

In 2025, capital expenditure (capex) in the Terminal Services and Cargo Services segment was recorded at Rp7.07 billion, a significant decrease of 57.60% compared to Rp16.66 billion in the previous year. This decline reflects the Company's increasingly selective and disciplined approach to capital allocation, prioritizing projects that provide direct impact on operational efficiency and service quality improvement.

Sejalan dengan penurunan belanja modal, beban penyusutan dan amortisasi juga mengalami penurunan sebesar 11,19%, dari Rp106,91 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp94,95 miliar pada tahun 2025. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya penambahan aset tetap baru dalam beberapa periode sebelumnya sehingga beban penyusutan yang diakui selama tahun berjalan turut mengalami koreksi.

In line with the decrease in capital expenditure, depreciation and amortization expenses also declined by 11.19%, from Rp106.91 billion in 2024 to Rp94.95 billion in 2025. This decrease is consistent with the lower addition of new fixed assets in previous periods, resulting in reduced depreciation expenses recognized during the year.

Meskipun belanja modal turun secara signifikan, Perseroan tetap menjaga kesinambungan operasional dengan memaksimalkan utilisasi aset yang ada dan memastikan pemeliharaan yang memadai. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menjaga efisiensi biaya sekaligus mempertahankan kinerja layanan yang andal bagi para pengguna jasa, sebagaimana tercermin dari pertumbuhan pendapatan yang positif.

Tahun 2025 menjadi periode pemulihan dan penguatan kinerja bagi segmen Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang, terutama dalam peningkatan margin keuntungan ditengah tantangan biaya operasional. Margin laba bruto dan margin laba usaha tercatat sebesar 42,04%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 40,47%. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh pertumbuhan pendapatan operasi segmen sebesar 14,31% yang melampaui laju kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 11,29%, mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan efisiensi struktur biaya sekaligus memperluas skala layanan.

Kemampuan Perseroan dalam mengelola aset juga tercermin dari imbal hasil atas aset (ROA) yang mencapai 41,72% pada tahun 2025, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 33,43%. Peningkatan ROA ini didorong oleh kombinasi pertumbuhan laba bruto yang kuat dan penurunan total aset segmen, yang bersama-sama mencerminkan peningkatan efisiensi Perseroan yang substansial dalam menghasilkan laba dari aset yang dikelola.

Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas

Pelayanan Rupa-rupa Usaha

Perseroan juga melakukan pelayanan rupa-rupa usaha yang diperoleh dari Mitra yang melakukan sewa ruangan serta kelengkapannya di kantor IPCC. Pada tahun 2025, Perseroan membukukan pendapatan Pelayanan Jasa Rupa-Rupa sebesar Rp17,89 miliar, turun hingga 34,45% atau setara dengan Rp9,40 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp27,30 miliar. Penurunan ini terjadi disebabkan oleh tidak diperpanjang penggunaan layanan *pre-delivery center* yang dioperasikan Perseroan kepada *auto maker*.

Sementara itu, Pendapatan Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas yang meliputi sewa tempat dan ruangan di kantor IPCC bagi para mitra dibukukan sebesar Rp1,22 miliar per 31 Desember 2025, mengalami kenaikan hingga 132,18% atau setara dengan Rp727 juta dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama sebesar Rp550 juta. Kenaikan ini disebabkan terutilisasinya seluruh ruangan yang ada di area kantor pusat oleh *t* (pengguna jasa dan kantin).

Rincian Pendapatan Pelayanan Rupa-Rupa dalam dua tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Despite the significant decline in capital expenditure, the Company continues to maintain operational continuity by maximizing the utilization of existing assets and ensuring adequate maintenance. This approach has proven effective in maintaining cost efficiency while sustaining reliable service performance for customers, as reflected in positive revenue growth.

The year 2025 marked a period of recovery and performance strengthening for the Terminal Services and Cargo Services segment, particularly in improving profit margins amid operational cost challenges. Gross profit margin and operating profit margin were recorded at 42.04%, an increase from 40.47% in the previous year. This improvement was largely driven by segment operating revenue growth of 14.31%, which outpaced the increase in cost of revenue of 11.29%, reflecting the Company's success in enhancing cost efficiency while expanding service scale.

The Company's ability to manage its assets is also reflected in its return on assets (ROA), which reached 41.72% in 2025, a significant increase compared to 33.43% in 2024. This improvement in ROA was driven by a combination of strong gross profit growth and reduction in total segment assets, both of which demonstrate the Company's substantial improvement in generating profit from managed assets.

Miscellaneous Services, Facilities and Utilities Services

Miscellaneous Services

The Company also provides miscellaneous services derived from partners who lease office space and related facilities at IPCC office. In 2025, the Company recorded revenue from Miscellaneous Services amounting to Rp17.89 billion, a decrease of 34.45% or equivalent to Rp9.40 billion compared to the previous year of Rp27.30 billion. This decrease was caused by the fact that the company did not extend its pre-delivery center services to the automaker.

Meanwhile, revenue from Facilities and Utilities Management, which includes the rental of office space and facilities at IPCC office for partners, was recorded at Rp1.22 billion as of December 31, 2025, representing an increase of 132.18% or equivalent to Rp727 million compared to Rp550 million in the same period of the previous year. This increase is due to the fact that all available space in the headquarters area is being utilized by tenants (service users and the cafeteria).

Details of Miscellaneous Services revenue over the past two years are presented in the following table.

Realisasi Segmen Pelayanan Rupa-Rupa Usaha
Realization of Miscellaneous Services Segment

Perihal Description	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase Percentage (%)	
Pendapatan Pelayanan Jasa Rupa-Rupa Miscellaneous Services Revenue	17.892	27.296	(9.404)	(34,45)	↓
Pendapatan Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas (sewa ruangan kantor) Facilities and Utilities Services Revenue (office space rental)	1.277	550	727	132,18	↑

Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas

Dalam rangka memanfaatkan aset yang dimiliki secara optimal, Perusahaan melakukan jasa pengusahaan fasilitas dan utilitas berupa sewa ruangan kantor yang mencakup fasilitas air dan listrik. Rincian jasa pengusahaan fasilitas dan utilitas dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Facilities and Utilities Services

In order to optimally utilize the assets owned, the Company provides facilities and utilities services in the form of office space rentals that include water and electricity facilities. The details of facilities and utilities services over the last three years are as follows

Realisasi segmen Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas
Realization of Facilities and Utilities Services Segment

Perihal Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Jumlah Amount	Persentase Percentage (%)	
Sewa Ruangan Kantor (m^2) Office Space Rental (m^2)	257	257	-	-	

Realisasi ruangan kantor yang disewakan selama tahun 2025 adalah seluas sebanyak 257 m^2. Ruangan kantor tersebut disewakan kepada 12 mitra Perusahaan dengan luas masing-masing ruangan berukuran variatif dari ukuran 12 m^2 sampai 24 m^2.

The realization of office space leased during 2025 was 257 m2. The office space was leased to 12 partners of the Company, with each room varying in size from 12 m^2 to 24 m^2.

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas

Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Profitability and Financial Performance of Miscellaneous, Facilities and Utilities Services Segment

The profitability and financial performance of Miscellaneous, Facilities and Utilities Services segment can be seen in the table below

Kinerja Keuangan Segmen Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas Financial Performance of Miscellaneous, Facilities and Utilities Services Segment	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income					
Pendapatan operasi segmen Segment operating revenue	19.169	27.846	(8.677)	(31,16)	↓
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(2.826)	(2.768)	(58)	2,09	↑

Kinerja Keuangan Segmen Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas Financial Performance of Miscellaneous, Facilities and Utilities Services Segment	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	**Persentase** Percentage **(%)**	
Laba bruto Gross profit	**16.343**	25.078	(8.734)	(34,83)	↓
Posisi Keuangan Financial Position					
Aset segmen Segment assets	**1.429**	13.486	(12.057)	(89,40)	↓
Informasi Lainnya Other Information					
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	**277**	295	(18)	(6,12)	↓
Rasio-rasio Profitabilitas Profitability Ratios					
Margin Laba Bruto (%) Gross Profit Margin (%)	**85,26**	90,06	(4,80)		↓
Margin Laba Usaha (%) Operating Profit Margin (%)	**85,26**	90,06	(4,80)		↓
Imbal Hasil Aset (%) Return on Assets (%)	**1.143,79**	185,95	957,84		↑

Selama tahun 2025, segmen Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas mencatat pertumbuhan yang cukup signifikan dalam hal aset. Total aset segmen ini tercatat sebesar Rp1,43 miliar, menurun 89,40% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp13,49 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya pelepasan aset Perseroan berupa 4 unit *head truck*, mesin *car wash*, 4 unit *chasis*, 2 unit *flatbed chasis*, 1 unit panel timbangan, dan dua unit *x-ray*.

Selama tahun 2025, fokus pengelolaan segmen Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas terlihat dari stabilnya nilai penyusutan dan amortisasi, yang tercatat sebesar Rp277 juta, menurun dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp295 juta.

Kinerja profitabilitas segmen ini menunjukkan penurunan di tahun 2025. Margin laba bruto menurun menjadi 85,26%, dari periode tahun sebelumnya 90,06%. Penurunan ini menunjukkan kurangnya diferensiasi bisnis serta terdapat persaingan usaha dengan kompetitor.

During 2025, the Miscellaneous Services, Facilities, and Utilities Business segment recorded significant asset growth. Total assets for this segment were recorded at Rp1.43 billion, an 89.40% decrease compared to Rp13.49 billion in 2024. This decrease was due to the disposal of the Company's assets, including four head trucks, a car wash machine, four chassis units, two flatbed chassis units, one panel scale unit, and two x-ray units.

During 2025, the focus on managing the Miscellaneous Services, Facilities and Utilities Business segment is evident from the stable depreciation and amortization value, which was recorded at Rp77 million, a decrease compared to 2024, which was Rp295 million.

This segment's profitability performance showed a decline in 2025. Gross profit margin decreased to 85.26%, from 90.06% in the previous year. This decline indicates a lack of business differentiation and intense competition with competitors.

Non Segmen

Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen Non Segmen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Non-Segment

The profitability and financial performance of Non-Segment can be seen in the table below.

Kinerja Keuangan Non Segmen Financial Performance of Non-Segment	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income					
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	**(95.811)**	(89.424)	(6.387)	7,14	↑
Pendapatan operasi lainnya Other operating revenues	**14.587**	12.746	1.842	14,45	↑
Beban operasi lainnya Other operating expenses	**(17.176)**	(14.250)	(2.926)	20,54	↑
Rugi usaha Operating loss	**(98.399)**	(90.928)	(7.471)	8,22	↑
Pendapatan keuangan Financial income	**57.199**	45.051	12.148	26,97	↑
Beban keuangan Financial expenses	**(34.122)**	(31.794)	(2.328)	7,32	↑
Rugi sebelum pajak penghasilan badan Loss before corporate income tax	**(75.322)**	(77.671)	2.349	(3,02)	↓
Posisi Keuangan Financial Position					
Aset segmen Segment assets	**1.138.958**	872.781	266.178	30,50	↑
Liabilitas segmen Segment liabilities	**120.740**	60.138	60.603	100,77	↑
Informasi Lainnya Other Information					
Pengeluaran modal Capital expenditures	**-**	-	-	-	-
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	**2.341**	3.486	(1.145)	(32,85)	↓
Rasio-rasio Profitabilitas Profitability Ratios					
Imbal Hasil Aset (%) Return on Assets (%)	**(8,64)**	(10,42)	1,78		↑

Pada tahun 2025, kontribusi Non Segmen masih memainkan peran strategis dalam menopang operasional dan struktur Perseroan secara keseluruhan. Meski tidak secara langsung terkait dengan aktivitas utama usaha, pos-pos dalam kategori ini menunjukkan dinamika yang signifikan.

In 2025, Non-Segment contribution continues to play a strategic role in supporting the Company's overall operations and structure. Although not directly related to core business activities, items in this category demonstrate significant dynamics.

Segmen Geografis

Di samping segmen usaha, Laporan Keuangan Perusahaan juga menyajikan informasi terkait segmen geografis yang menggambarkan persebaran kegiatan operasi dan usaha IPCC.

Geographic Segment

In addition to operating segments, the Company's Financial Statements also presents information related to geographic segment, which describes the distribution of IPCC's operations and business activities.

Jumlah dan Kontribusi Pendapatan Berdasarkan Segmen Geografis Terhadap Pendapatan Operasi IPCC
Amount and Contribution of Geographic Segment Revenue to IPCC Operating Revenue

Pendapatan Berdasarkan Segmen Geografis Revenue by Geographic Segment	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Tanjung Priok, Jakarta	**844.241**	**90,78**	757.776	91,90	86.465	11,41	↑
Belawan, Sumatra Utara Belawan, North Sumatra	**17.106**	**1,84**	19.636	2,38	(2.530)	(12,88)	↓
Makassar, Sulawesi Selatan Makassar, South Sulawesi	**25.053**	**2,69**	18.407	2,23	6.647	36,11	↑
Pontianak, Kalimantan Barat Pontianak, West Kalimantan	**18.048**	**1,94**	15.618	1,89	2.430	15,56	↑
Balikpapan, Kalimantan Timur Balikpapan, East Kalimantan	**14.098**	**1,52**	11.823	1,43	2.275	19,24	↑
Banjarmasin, Kalimantan Selatan Banjarmasin, South Kalimantan	**10.870**	**1,17**	864	0,10	10.006	1.157,99	↑
Gresik, Jawa Timur Gresik, East Java	**543**	**0,06**	472	0,06	71	15,09	↑
Jumlah Pendapatan Operasi Total Operating Revenue	**929.960**	**100,00**	**824.596**	**100,00**	**105.365**	**12,78**	↑

Komposisi Pendapatan Berdasarkan Segmen Geografis Terhadap Pendapatan Operasi IPCC
Composition of Geographic Segment Revenue to IPCC Operating Revenue

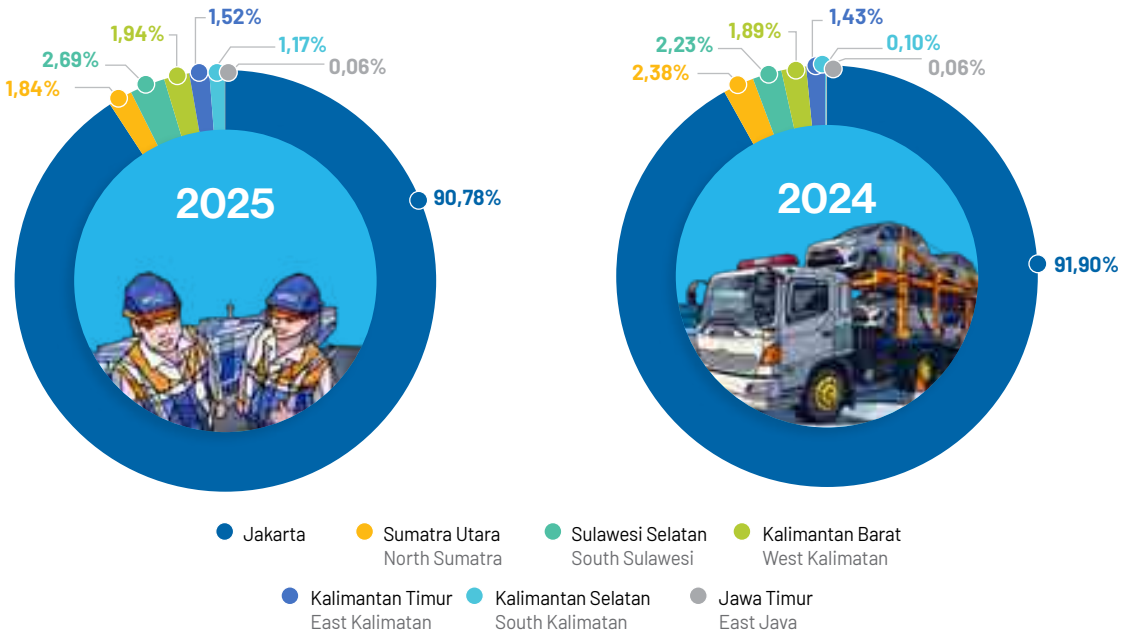

Jumlah dan Kontribusi Aset Tidak Lancar Berdasarkan Segmen Geografis Terhadap Aset Tidak Lancar IPCC
Amount and Contribution of Geographic Segment Non-Current Assets to IPCC Non-Current Assets

Aset Tidak Lancar Berdasarkan Segmen Geografis Non-Current Assets by Geographic Segment	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Jakarta	881.016	99,32	942.960	99,33	(61.944)	(6,57)	↓
Gresik, Jawa Timur Gresik, East Java	6.009	0,68	6.343	0,67	(334)	(5,27)	↓
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	**887.025**	**100,00**	**949.303**	**100,00**	**(62.278)**	**(6,56)**	↓

Komposisi Aset Tidak Lancar Berdasarkan Segmen Geografis Terhadap Aset Tidak Lancar IPCC
Composition of Geographic Segment Non-Current Assets to IPCC Non-Current Assets

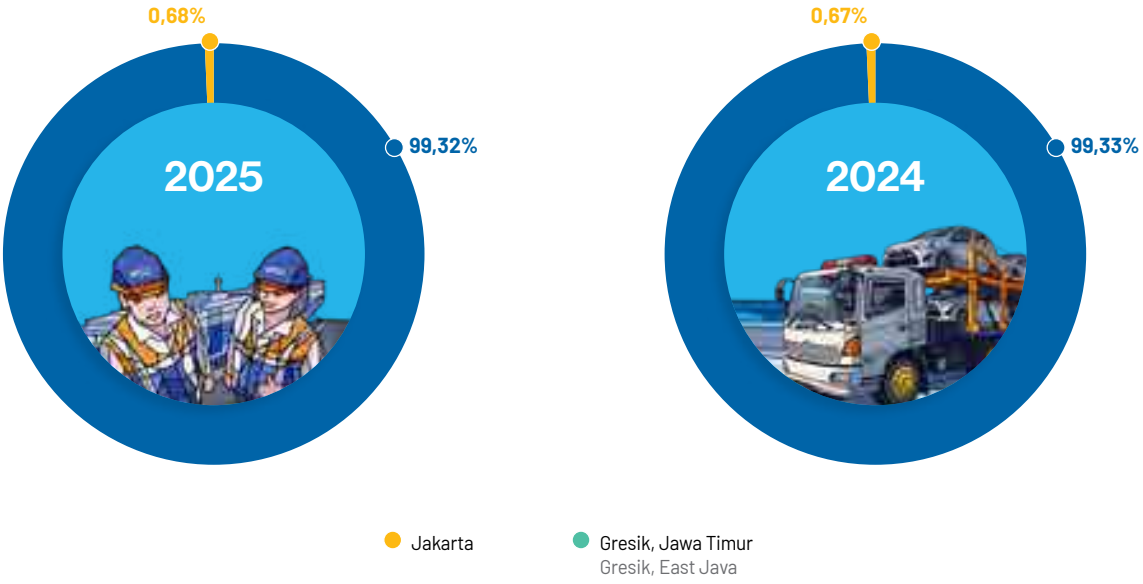

Berdasarkan grafik dan tabel sebagaimana disampaikan di atas, operasi dan bisnis IPCC sebagian besar bertumpu pada kegiatan di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dengan kontribusi pendapatan mencapai 91,90% dari keseluruhan pendapatan yang dicatatkan.

Based on the charts and tables presented above, IPCC's operations and business are largely centered on activities in the Tanjung Priok Port area in Jakarta, with revenue from these activities accounting for 91.90% of total recorded revenue.

Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

Segmentasi, Target dan *Positioning*

Perseroan didirikan sebagai terminal kendaraan komersial yang secara konsisten melayani kebutuhan *customer* untuk penanganan kegiatan bongkar muat, penumpukan, dan *receiving/ delivery* kargo kapal Ro-Ro dan *Pure Car Carrier* berupa CBU/mobil, motor, truk/ bus dan alat berat, *sparepart*, dan kargo lainnya baik untuk layanan Internasional maupun Domestik.

Perseroan menargetkan pelanggan tidak hanya skala nasional namun juga skala internasional, karena telah memiliki jasa pelayanan berbasis digital yang terstandarisasi, baik untuk Domestik maupun Internasional. Diantaranya *car maker, shipping line, user* dari *makers*, dan lain-lain.

Sejalan dengan segmentasi dan target pelanggan yang dipilih, Perseroan memposisikan diri sebagai pilihan utama dan khusus untuk pelayanan bongkar muat kendaraan di Indonesia yang terstandarisasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memberikan kepastian dan kualitas dalam melaksanakan pelayanan kargo kendaraan.

Pangsar Pasar

Dalam mewujudkan visi sebagai Operator Terminal Kendaraan Berkelas Dunia, IPCC terus berupaya meningkatkan jumlah pangsa pasar yang dimiliki. Upaya tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan program pengembangan bisnis berjangka pendek, menengah, dan panjang yang telah disusun. Berikut gambaran pangsa pasar IPCC untuk pangsa pasar CBU, Motor, Bus/Truk dan Alat Berat selama tahun 2025.

Kargo CBU internasional naik secara YOY sebesar 9% sedangkan kargo CBU domestik turun secara YOY sebesar 15%. Kargo alat berat & Bus/Truk Internasional secara YOY naik sebesar 10% dan kargo alat berat & bus/truk domestik turun sebesar 14%.

Segmentation, Targeting and Positioning

The Company was established as a commercial vehicle terminal that consistently serves customer needs in handling loading and unloading activities, storage, and receiving/delivery of Ro-Ro and Pure Car Carrier cargo, including CBU/cars, motorcycles, trucks/buses, heavy equipment, spare parts, and other cargo for both international and domestic services.

The company targets customers not only on a national scale but also internationally, as it has standardized digital-based service offerings for both domestic and international markets. These include car manufacturers, shipping lines, makers' users, and others.

Aligned with its chosen market segmentation and target customers, the company positions itself as the leading and specialized choice for standardized vehicle cargo handling services in Indonesia, meeting customer needs while ensuring reliability and quality in delivering vehicle cargo services.

Market Share

In the pursuit of realizing the vision to become a World Class Vehicle Terminal Operator, IPCC continues to strive to increase its market share. These efforts are realized by executing short, medium and long term business development programs that have been prepared. The following is an overview of IPCC market share for CBU, Motorcycle, Bus/Truck and Heavy Equipment in 2025.

International CBU cargo increased YOY by 9%, while domestic CBU cargo decreased YOY by 15%. International heavy equipment & bus/ truck cargo increased YOY by 10%, and domestic heavy equipment & bus/truck cargo decreased 14%.

Informasi Pangsa Pasar Internasional
Information on International Market Share

Brand	***Throughput* CBU Januari - Desember** CBU Throughput January - December	**Persentase** Percentage		***Brand***	***Throughput* Bus/Truck January - Desember** Buses/Trucks Throughput January - December	**Persentase** Percentage		***Brand***	***Throughput Heavy Equipment* Januari - Desember** Throughput Heavy Equipment January - Desember	**Persentase** Percentage
Toyota	200.225	36%		Volvo	865	23%		Caterpillar	1.832	26%
Mitsubishi	116.091	21%		Scania	441	12%		Hitachi	1.006	14%
BYD	74.969	14%		Hino	430	12%		Kobelco	944	13%
Hyundai	56.629	10%		Sino	201	5%		Sumitomo	723	10%

Informasi Pangsa Pasar Internasional
Information on International Market Share

Brand	*Throughput* CBU Januari - Desember CBU Throughput January - December	Persentase Percentage	*Brand*	*Throughput* Bus/Truck January - Desember Buses/Trucks Throughput January - December	Persentase Percentage	*Brand*	*Throughput Heavy Equipment* Januari - Desember Throughput Heavy Equipment January - Desember	Persentase Percentage
Suzuki	34.747	6%	Komatsu	199	5%	Komatsu	668	9%
Vinfast	24.623	4%	Mercedes	192	5%	Hyundai	570	8%
Honda	19.038	3%	Caterpillar	166	4%	Zoomlion	209	3%
Isuzu	8.661	2%	UD	160	4%	Doosan	171	2%
Mazda	2.657	0,5%	Foton	132	4%	Link	163	2%
Others	11.635	2%	Others	926	25%	Others	819	12%
Total (unit)	**549.275**	**100%**	**Total (unit)**	**3.712**	**100%**	**Total (unit)**	**7.105**	**100%**

Pangsa Pasar Kargo Kendaraan Internasional
International Vehicle Cargo Market Share

Handling Kargo Internasional
Handling Kargo Internasional

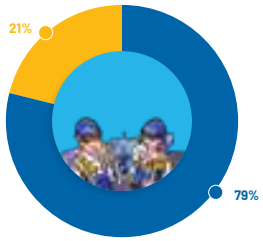

Terminal	Total (unit)
IPCC	548.275
Others	146.530
Total Kargo	694.805

Handling Ekspor Kendaraan
Handling Ekspor Kendaraan

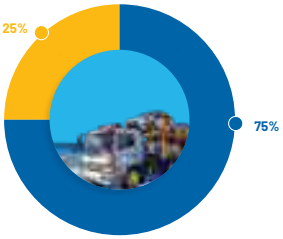

Terminal	Total (unit)
IPCC	390.803
Others	127.409
Total Ekspor	518.212

Handling Impor Kendaraan
Handling Impor Kendaraan

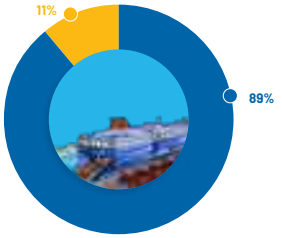

Terminal	Total (unit)
IPCC	157.472
Others	19.121
Total Impor	176.593

Untuk pasar internasional (ekspor-impor), IPCC menguasai 79% pangsa pasar dari total kargo kendaraan di Indonesia, menjadikannya sebagai terminal kendaraan terbesar dan utama di tanah air. Sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik dan efisiensi biaya logistik, IPCC terus memperluas kemitraan dengan berbagai perusahaan otomotif.

Pada tahun 2025, IPCC telah menangani layanan cargodoring dan penumpukan secara langsung dengan beberapa produsen kendaraan terkemuka, termasuk PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan PT Toyota Astra Motor (Toyota), PT BYD Auto Indonesia (BYD), PT Glovis Indonesia Logistics (Hyundai), PT Suzuki Indomobil Motor (Suzuki), PT Laksamana Samudera Indonesia (Vinfast), serta PT Isuzu Astra Motor Indonesia (Isuzu). Dengan inisiatif ini, IPCC memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri terminal kendaraan di Indonesia dan kawasan regional.

For the international market (export-import), IPCC holds a 79% market share of the total vehicle cargo in Indonesia, making it the largest and leading vehicle terminal in the country. As part of its commitment to delivering excellent service and logistics cost efficiency, IPCC continues to expand partnerships with various automotive companies.

In 2025, IPCC directly handled cargodoring and stacking services with several leading vehicle manufacturers, including PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia and PT Toyota Astra Motor (Toyota), PT BYD Auto Indonesia (BYD), PT Glovis Indonesia Logistics (Hyundai), PT Suzuki Indomobil Motor (Suzuki), PT Laksamana Samudera Indonesia (Vinfast), and PT Isuzu Astra Motor Indonesia (Isuzu). Through this initiative, IPCC strengthens its position as a key player in the vehicle terminal industry in Indonesia and the regional market.

Strategi Pemasaran

IPCC terus menyempurnakan strategi pemasaran sejalan dengan program dalam Rencana Kerja Manajemen dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelanggan. Beberapa strategi pemasaran sebagai fokus perusahaan pada tahun 2025, di antaranya adalah:

Marketing Strategy

IPCC continues to refine its marketing strategy in line with the programs outlined in the Management Work Plan and the Company's Work Plan and Budget, which are developed in accordance with evolving customer needs. Several marketing strategies that became the Company's focus in 2025 include:

Tanggal Date	**Kegiatan Pemasaran** Marketing Activity	**Maksud dan Tujuan** Purpose and Objectives
15 Januari 2025 January 15, 2025	Penandatanganan Perjanjian Jasa Layanan Handling dengan PT Solusi Express Logistics Signing of a Handling Services Agreement with PT Solusi Express Logistics	Memberikan dasar dalam pelaksanaan layanan *cargo handling* di terminal Providing a foundation for implementing cargo handling services at the terminal
3 Februari 2025 February 3, 2025	Penandatanganan Perjanjian Pelayanan Penumpukan Kargo dengan PT Wahana Inti Selaras Signing of a Cargo Stacking Services Agreement with PT Wahana Inti Selaras	Memberikan layanan penumpukan kargo Providing cargo stacking services
27 Maret 2025 March 27, 2025	Penandatanganan Perjanjian Pelayanan dan Penanganan Kargo di Terminal Domestik dengan PT Harapan Baru Line Signing of a Cargo Handling Services Agreement at the Domestic Terminal with PT Harapan Baru Line	Memberikan layanan penanganan kargo di terminal domestik Providing cargo handling services at the domestic terminal
1 Juni 2025 June 1, 2025	Penandatanganan Perjanjian Jasa Logistik dengan PT BYD Auto Indonesia Signing of a Logistics Services Agreement with PT BYD Auto Indonesia	Memberikan layanan transportasi kargo Providing cargo transportation services
18 Juni 2025 June 18, 2025	Penandatanganan Perjanjian Jasa Pelayanan Kepelabuhanan dengan PT Honda Prospect Motor Signing of a Port Services Agreement with PT Honda Prospect Motor	Memberikan layanan *cargo handling* dan penumpukan Providing cargo handling and stacking services
1 September 2025 September 1, 2025	Penandatanganan Perjanjian Pelayanan Penanganan dan Penumpukan Kargo dengan PT BYD Auto Indonesia Signing of a Cargo Handling and Stacking Services Agreement with PT BYD Auto Indonesia	Memberikan layanan *cargo handling* dan penumpukan Providing cargo handling and stacking services
1 September 2025 September 1, 2025	Penandatanganan Perjanjian Jasa Pelayanan Kepelabuhanan dengan PT Suzuki Indomobil Motor Signing of a Port Services Agreement with PT Suzuki Indomobil Motor	Memberikan layanan *cargo handling* dan penumpukan Providing cargo handling and stacking services
1 September 2025 September 1, 2025	Penandatanganan Perjanjian Jasa Pelayanan Kepelabuhanan dengan PT Suzuki Indomobil Sales Signing of a Port Services Agreement with PT Suzuki Indomobil Sales	Memberikan layanan *cargo handling* dan penumpukan Providing cargo handling and stacking services
3 September 2025 September 3, 2025	Penandatanganan Perjanjian Jasa Pelayanan Kepelabuhanan dengan PT Samudera Raya Semesta Signing of a Port Services Agreement with PT Samudera Raya Semesta	Memberikan layanan *stevedoring, cargo handling* dan penumpukan Providing stevedoring, cargo handling, and stacking services
29 September 2025 September 29, 2025	Penandatanganan Perjanjian Jasa Pelayanan Kepelabuhanan dengan PT Astra Daihatsu Motor Signing of a Port Services Agreement with PT Astra Daihatsu Motor	Memberikan layanan bongkar muat, penyimpanan dan distribusi kendaraan di terminal Providing loading, unloading, storage, and distribution services for vehicles at the terminal
10 Oktober 2025 October 10, 2025	Penandatanganan Perjanjian Jasa Pelayanan Kepelabuhanan dengan PT Plaza Auto Mega Signing of a Port Services Agreement with PT Plaza Auto Mega	Memberikan layanan *cargo handling* dan penumpukan Providing cargo handling and stacking services
3 November 2025 November 3, 2025	Penandatanganan Perjanjian Jasa Pelayanan Kepelabuhanan dengan PT Solusi Express Logistics Signing of a Port Services Agreement with PT Solusi Express Logistics	Memberikan layanan *stevedoring, cargo handling* dan penumpukan Providing stevedoring, cargo handling, and stacking services
5 Desember 2025 December 5, 2025	*Customer Appreciation*	Memberikan apresiasi kepada pelanggan atas kepercayaan dan loyalitas yang telah diberikan, guna memperkuat hubungan jangka panjang, meningkatkan engagement dan kepercayaan, serta menciptakan pengalaman positif yang berkelanjutan bagi pelanggan Rewarding customers for their trust and loyalty to strengthen long-term relationships, increase engagement and trust, and create a positive, ongoing customer experience

Tanggal Date	Kegiatan Pemasaran Marketing Activity	Maksud dan Tujuan Purpose and Objectives
17 Desember 2025 December 17, 2025	Penandatanganan Perjanjian Jasa Pelayanan Kepelabuhanan dengan PT Isuzu Astra Motor Indonesia Signing of a Port Services Agreement with PT Isuzu Astra Motor Indonesia	Memberikan layanan *cargo handling* dan penumpukan Providing cargo handling and stacking services
23 Desember 2025 December 23, 2025	Penandatanganan Perjanjian Pelayanan Penanganan Bongkar Muat dengan Hyundai Glovis Co., Ltd. Signing of a Loading and Unloading Services Agreement with Hyundai Glovis Co., Ltd.	Memberikan layanan bongkar muat di kapal yang beroperasi di terminal Providing loading and unloading services on ships operating at the terminal
23 Desember 2025 December 23, 2025	Penandatanganan Perjanjian Pelayanan Penanganan dan Penumpukan Kargo dengan PT Glovis Indonesia Logistics Signing of a Cargo Handling and Stacking Services Agreement with PT Glovis Indonesia Logistics	Memberikan layanan *cargo handling* dan penumpukan Providing cargo handling and stacking services

Sebagai bagian dari strategi pemasaran dan peningkatan kualitas layanan, IPCC turut berpartisipasi dalam Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh *holding company*, PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Partisipasi ini merupakan upaya terukur untuk mengevaluasi kinerja layanan sekaligus mengidentifikasi peluang perbaikan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil survei tersebut, IPCC memperoleh skor **4,82** dari skala 5, yang termasuk dalam kategori **"sangat baik"**. Capaian ini mencerminkan tingginya tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas layanan yang diberikan, sekaligus menjadi indikator positif atas efektivitas strategi operasional dan komersial perusahaan.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan standar layanan, IPCC berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan dan inovasi, antara lain melalui peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi infrastruktur terminal, serta pengembangan layanan berbasis digital. Dengan pendekatan yang berorientasi pada umpan balik pelanggan, IPCC tidak hanya menargetkan kepuasan jangka pendek, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang berkelanjutan. Hasil survei ini menjadi landasan strategis bagi IPCC dalam mengidentifikasi area perbaikan dan menyusun pengembangan layanan yang lebih adaptif, sehingga Perseroan dapat terus memenuhi bahkan melampaui ekspektasi pelanggan di masa mendatang.

As part of its marketing strategy and service quality improvement efforts, IPCC participated in the 2025 Customer Satisfaction Survey organized by its holding company, PT Pelabuhan Indonesia (Persero). This participation represents a structured effort to evaluate service performance while identifying opportunities for continuous improvement. Based on the survey results, IPCC achieved a score of **4.82** out of 5, which falls into the **"very good"** category. This achievement reflects a high level of customer satisfaction with the quality of services provided and serves as a positive indicator of the effectiveness of the Company's operational and commercial strategies.

In order to maintain and enhance service standards, IPCC remains committed to continuous improvement and innovation, including through increased operational efficiency, optimization of terminal infrastructure, and the development of digital-based services. By adopting a customer feedback-oriented approach, IPCC not only targets short-term satisfaction but also aims to build sustainable long-term relationships. The survey results serve as a strategic foundation for IPCC in identifying areas for improvement and developing more adaptive services, enabling the Company to consistently meet and even exceed customer expectations in the future.

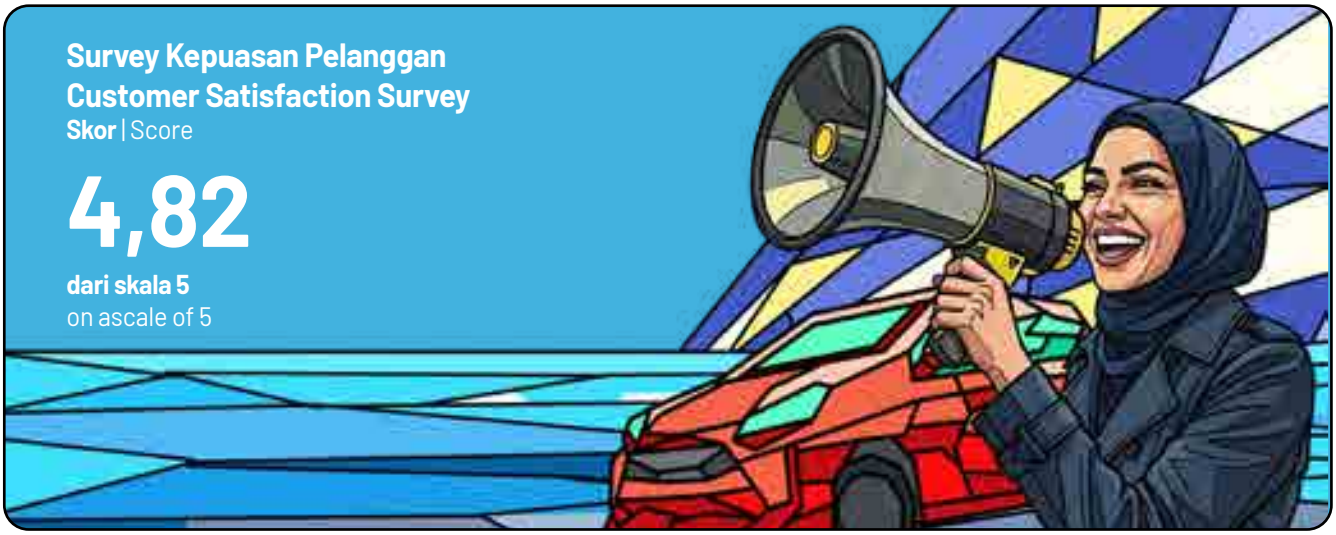

Teknologi
Technology

Pengembangan Terminal Operating System Terminal Kendaraan IKT
Development of Terminal Operating System for ICT Vehicle Terminals

PTOSC Modules			
ADMINISTRATION & SET UP	**PLANNING & CONTROL**	**REALISASI & OPERASI** REALIZATION & OPERATION	**KOMERSIAL & BILLING** COMMERCIAL & BILLING
☐	☐	☐	☐
☐ Vessel Schedule	☐ Dashboard Data Transaction	☐ Dashboard Data Transaction	☐ Dashboard
☐ Dashboard Data Transaction	☐ Manpower Planning	☐ Gate Operation	☐ Master Tarif & Kesepakatan Master Tariff & Agreement
☐ Maintenance Permohonan Application Maintenance	☐ Yard Planning Allocation	☐ Inspection Confirmation (LQ1)	☐ Verifikasi Billing (Billing) Billing Approval
☐ Maintenance Data Master Master Data Maintenance	☐ Storage Plan	☐ Yard Confirmation	☐ Approval Billing (Billing) Billing Approval
☐ Maintenance Data Set Up & Config Maintenance of Data Set Up & Config	☐ Monitoring & Controlling	☐ Wharf Confirmation	☐ Monitoring & Report
☐ Monitoring Terminal Terminal Monitoring	☐ Pencetakan Daily Dokumen Daily Document Printing	☐ Report Activity Activity Report	☐ Master Customer & User IBS (INCO & MDM)
☐ Monitoring FoD & FoG FoD & FoG Monitoring		☐ Rekap Realisasi & Approve Recap of Realization & Approve	
☐ Pencetakan Dokumen Document Printing		☐ Marking (LQ2)	

Flow Loading
Flow Loading

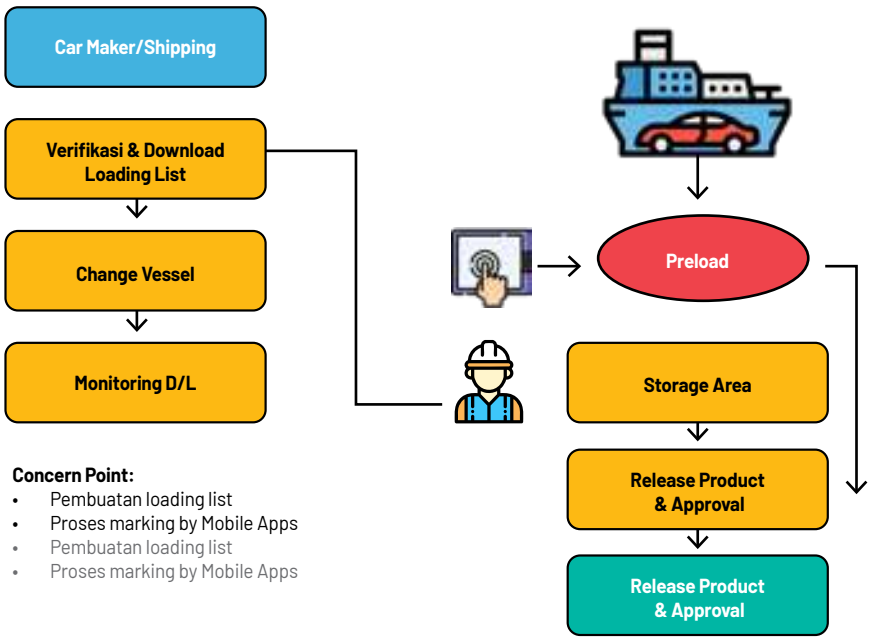

Concern Point:
- Pembuatan loading list
- Proses marking by Mobile Apps
- Pembuatan loading list
- Proses marking by Mobile Apps

Flow of Discharge

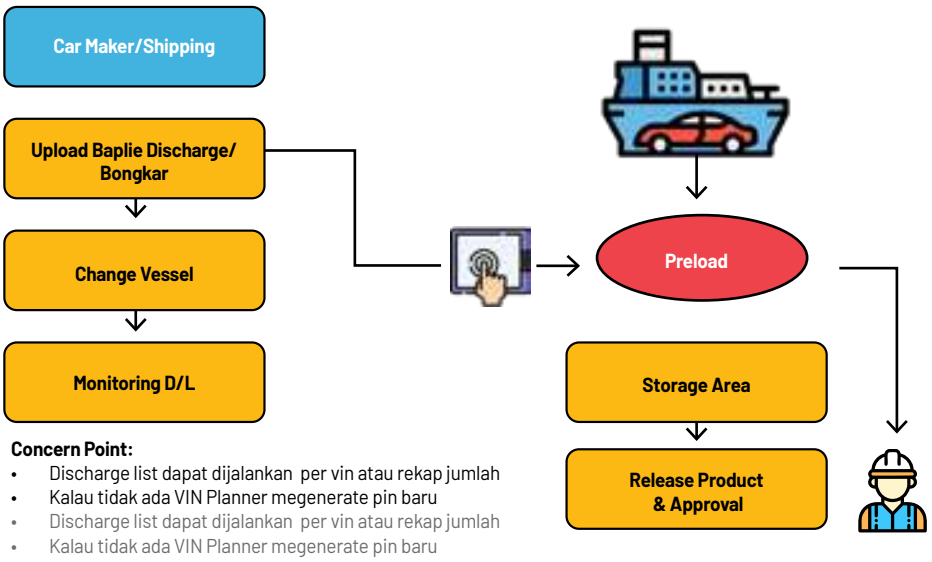

PTOS-C atau Pelindo Terminal Operating System Car merupakan sistem digunakan untuk operasi kegiatan di Terminal yang dilakukan secara *real-time*. Mulai dari kegiatan perencanaan, *booking*, realisasi kegiatan, kontrol dan pengawasan sampai dengan terbit laporan kinerja dan *billing*. *Cargo* atau *Vehicle Identification Number* (VIN) dalam bentuk *barcode*. Sistem ini terintegrasi dengan sistem *Car Maker* guna mengotomasi proses *booking* dari *customer*, TPS *Online* Bea Cukai Ceisa guna mengotomasi proses *clearance document*, mengoptimalkan proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan di terminal. Selain itu, dengan pencatatan secara *real-time* pemilik *cargo* dapat mengetahui pergerakan *cargo* yang ada di dalam terminal dan dapat dikirimkan ke sistem milik pemilik barang dalam hal ini *car maker* melalui sistem yang digunakan oleh *customer*, yaitu sistem IBS.

PTOS-C or Pelindo Terminal Operating System Car is a system used for operational activities in the Terminal which is carried out in real-time. Starting from planning activities, booking, activity realization, control and supervision to the issuance of performance reports and billing. Cargo or Vehicle Identification Number (VIN) in the form of a barcode. This system is integrated with the Car Maker system to automate the booking process from customers, TPS Online Customs Ceisa to automate the clearance document process, optimize the planning process, implementation and monitoring of activities in the terminal. In addition, with real-time recording, cargo owners can find out the movement of cargo in the terminal and can be sent to the system owned by the owner of goods, in this case the car maker, through the system used by the customer, namely IBS system.

Penelitian dan Pengembangan
Research and Development

Inovasi Bisnis melalui Layanan Terminal Kendaraan yang Terintegrasi

Dalam rangka penguatan nilai tambah layanan jasa pengangkutan darat sebagai layanan pendukung konektivitas dari terminal kendaraan ke *Regional Distribution Center* (RDC) atau sebaliknya untuk memperkuat posisi Perseroan sebagai pemimpin ekosistem logistik kendaraan yang terintegrasi di Indonesia. Pada tahun 2025, dalam rangka kolaborasi dengan ekosistem logistik, IPCC melaksanakan kerjasama pengangkutan kargo mobil listik BYD dilakukan mulai bulan September 2025 dan telah melaksanakan pengangkutan kargo mobil listrik BYD sebanyak 43.000 unit.

Sebagai bagian dari penguatan model bisnis yang adaptif terhadap dinamika industri, IPCC terus menghadirkan inovasi melalui pengembangan *Car Distribution Management* (CDM) yang terintegrasi. Inisiatif ini menjadi langkah strategis Perseroan dalam memperluas peran dari sekadar operator terminal kendaraan menjadi penyedia solusi logistik *end-to-end*. Melalui CDM, IPCC tidak hanya mengelola aktivitas bongkar muat di pelabuhan, tetapi juga mengorkestrasi distribusi kendaraan secara menyeluruh dari titik kedatangan hingga ke tujuan akhir.

Dalam implementasinya, CDM diperkuat dengan pengembangan lini bisnis baru berupa inland logistic transportation, yang memungkinkan Perseroan mengendalikan pergerakan kendaraan dari pelabuhan menuju dealer atau hub distribusi di berbagai wilayah secara lebih terukur, efisien, dan tepat waktu. Selain itu, kehadiran fasilitas *Pre Delivery Cent*re (PDC) menjadi nilai tambah signifikan, di mana kendaraan menjalani proses inspeksi, perakitan ringan, hingga penyesuaian sesuai kebutuhan pasar sebelum didistribusikan ke konsumen.

Melalui integrasi kedua layanan ini, Perseroan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kepada automaker dan mitra bisnis, tetapi juga memperkuat daya saing Perseroan dalam rantai pasok otomotif nasional. Inovasi CDM ini sekaligus mencerminkan komitmen IPCC dalam menciptakan efisiensi logistik, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mendukung keberlanjutan bisnis di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Business Innovation through Integrated Vehicle Terminal Services

In order to strengthen the added value of land transportation services as a supporting service for connectivity from vehicle terminals to Regional Distribution Centers (RDCs) or vice versa, to strengthen the Company's position as a leader in the integrated vehicle logistics ecosystem in Indonesia. In 2025, in collaboration with the logistics ecosystem, IPCC entered into a cooperation on BYD electric car cargo transportation starting in September 2025 and has carried out cargo transportation of 43,000 BYD electric cars.

As part of strengthening its business model, which adapts to industry dynamics, IPCC continues to innovate through the development of integrated Car Distribution Management (CDM). This initiative is a strategic step for the Company in expanding its role from a mere vehicle terminal operator to an end-to-end logistics solutions provider. Through CDM, IPCC not only manages loading and unloading activities at ports but also orchestrates comprehensive distribution of vehicles from the point of arrival to their final destination.

In its implementation, CDM is strengthened by the development of a new business line in the form of inland logistics transportation, which allows IPCC to control the movement of vehicles from ports to dealers or distribution hubs in various regions in a more measurable, efficient, and timely manner. Furthermore, the presence of the Pre-Delivery Center (PDC) facility provides significant added value, where vehicles undergo inspection, light assembly, and adjustments according to market needs before being distributed to consumers.

By integrating these two services, IPCC not only improves the quality of service to automakers and business partners but also strengthens the Company's competitiveness in the national automotive supply chain. This CDM innovation also reflects IPCC's commitment to creating logistics efficiency, enhancing customer satisfaction, and supporting business sustainability amidst evolving global challenges.

Analisis Kinerja Keuangan
Financial Performance Analysis

Laporan keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto Susanti dan Surja dan telah mendapatkan opini laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The financial statements of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk have been audited by Public Accounting Firm (PAF) Purwanto Susanti & Surja, and obtained unqualified opinion, the financial position of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk as of December 31, 2025, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

"Posisi Keuangan memberikan gambaran sekilas tentang kekuatan aset dan permodalan IPCC. Pada tahun 2025, saldo aset Perusahaan mencapai Rp2,06 triliun. Sedangkan struktur permodalan Perusahaan terdiri dari liabilitas sebesar 33,88% dan ekuitas sebesar 66,12%."
"The Financial Position provides a glimpse into the strength of IPCC's assets and capitalization. In 2025, the Company's asset balance reached Rp2.06 trillion. Meanwhile, the Company's capital structure consisted of liabilities at 33.88% and equity at 66.12%."

Posisi Keuangan Financial Position	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	**Pesentase** Percentage **(%)**	
Aset Assets					
Jumlah Aset Total Assets	**2.058.232**	1.850.738	207.494	11,21	↑
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity					
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**697.431**	573.510	123.921	21,61	↑
Jumlah Ekuitas Total Equity	**1.360.801**	1.277.228	83.573	6,54	↑
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**2.058.232**	**1.850.738**	**207.494**	**11,21**	↑

Aset

Assets

Jumlah Aset Perusahaan tahun 2025 mencapai Rp2,06 triliun, meningkat 11,21% dibandingkan Jumlah Aset tahun 2024 sebesar Rp1,85 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2021-2025, Aset Perusahaan mengalami pertumbuhan 0,95%
In 2025, the Company's total assets reached Rp2.06 trillion, an 11.21% increase compared to Rp1.85 trillion in 2024. At the Compound Annual Growth Rate (CAGR) from 2021 to 2025, the Company's assets grew by 0.95%.

Jumlah Aset Tahun 2021-2025
Total Assets in 2021-2025

Rp-Juta
Rp-Million

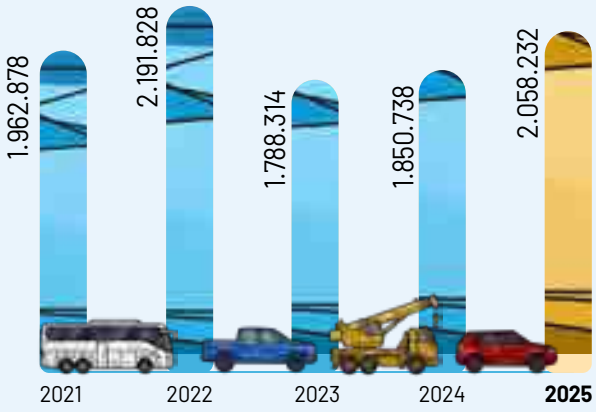

Jumlah Aset Tahun 2024-2025
Total Assets in 2024-2025

	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	**Kontribusi** Contribution **(%)**	**Jumlah (Rp-juta)** Amount (Rp-million)	**Kontribusi** Contribution **(%)**	**Nominal (Rp-juta)** Nominal (Rp-million)	**Persentase** Percentage **(%)**	
Aset Lancar Current Assets	**1.171.207**	**56,90**	901.436	48,71	269.771	29,93	↑
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	**887.025**	**43,10**	949.303	51,29	(62.278)	(6,56)	↓
Jumlah Aset Total Assets	**2.058.232**	**100,00**	**1.850.738**	**100,00**	**207.494**	**11,21**	↑

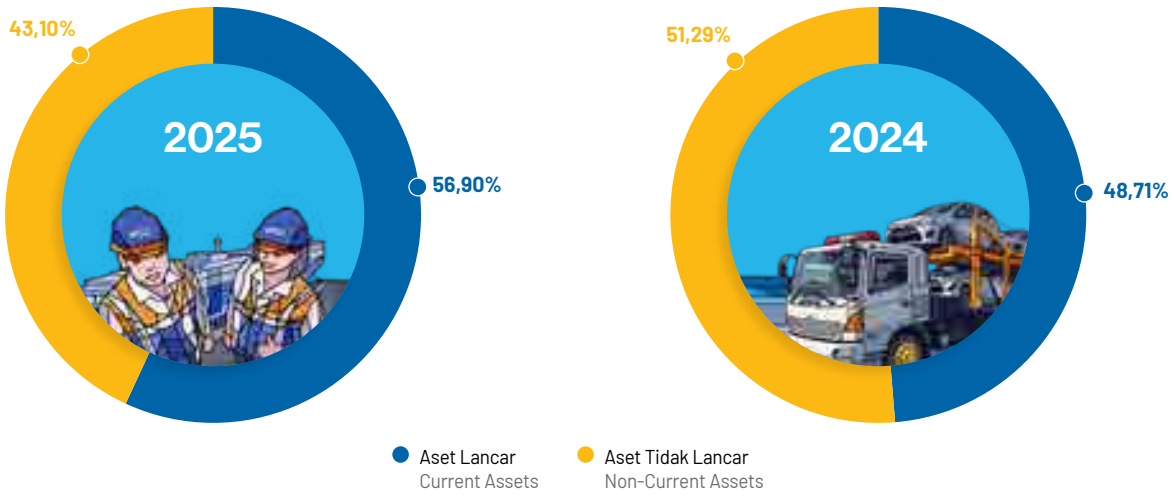

Perseroan membukukan nilai aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp2,06 triliun, mengalami kenaikan 11,21% atau setara dengan Rp207,49 miliar dibandingkan tahun 2024 pada periode yang sama sebesar Rp1,85 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan aset Perseroan terutama disumbang oleh peningkatan saldo kas dan setara kas, yang menjadi cerminan dari arus kas operasional yang kuat. Peningkatan ini merupakan buah dari implementasi strategi komersial, pengembangan bisnis, serta pengelolaan operasional dan pelanggan yang semakin efektif.

Keberhasilan manajemen dalam menjaga hubungan dengan mitra strategis dan pengguna jasa, mendorong peningkatan volume trafik dan produksi layanan bongkar muat kendaraan, yang secara langsung mengerek pendapatan dan memperkuat posisi kas Perseroan. Dari sisi struktur, proporsi aset Perseroan mengalami perubahan sedikit lebih rendah. Aset IPCC pada periode 2024 dan 2025 sebagian besar ditopang aset tidak lancar yang masing-masing mencapai 51,29% dan 43,10% dari total aset.

Berikut disampaikan penjelasan rinci dari kinerja aset Perseroan.

The company recorded total assets of Rp2.06 trillion as of December 31, 2025, an 11.21% increase or Rp207.49 billion, compared to Rp1.85 trillion in the same period in 2024. This increase was driven by to an increase in the company's assets, primarily contributed by an increase in cash and cash equivalents, reflecting strong operating cash flow. This increase is the result of the implementation of commercial strategies, business development, and increasingly effective operational and customer management.

Management's success in maintaining relations with strategic partners and service users has driven increased traffic volume and production of vehicle loading and unloading services, which directly boosted revenue and strengthened the company's cash position. In terms of structure, the Company's asset proportion experienced slightly lower changes. IPCC's assets in 2024 and 2025 were largely supported by non-current assets, which reached 51.29% and 43.10% of total assets, respectively.

The following provides a detailed explanation of the Company's asset performance.

Aset Lancar

Current Assets

Aset Lancar Tahun 2024-2025
Current Assets in 20234-2025

Perihal Description	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase Percentage (%)	
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	**1.082.282**	810.397	271.885	33,55	↑
Piutang Usaha - Neto Third Party Trade Receivables - Net	**70.516**	80.209	(9.693)	(12,08)	↓
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka Advances and Prepaid Expenses	**2.459**	1.675	784	46,78	↑
Aset Kontrak Contract Assets	**14.520**	9.154	5.366	58,62	↑
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	**1.430**	-	1.430	-	-
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**1.171.207**	**901.436**	**269.772**	**29,93**	↑

Pada akhir Desember 2025, jumlah aset lancar Perseroan sebesar Rp1,17 triliun, mengalami kenaikan 29,93% atau setara dengan Rp269,77 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp901,44 miliar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas yang diperoleh atas pertumbuhan kinerja operasi.

At the end of December 2025, the Company's current assets amounted to Rp1.17 trillion, representing a 29.93% increase or equivalent to Rp269.77 billion, compared to Rp901.44 billion in 2024. This increase was driven by increased cash and cash equivalents generated by operational performance growth.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Aset Tidak Lancar Tahun 2024-2025
Non-Current Assets in 2024-2025

	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase Percentage (%)	
Aset Tetap - Neto Fixed Assets - Net	**340.338**	348.651	(8.312)	(2,38)	↓
Aset Tak Berwujud - Neto Intangible Assets - Net	**1.903**	3.224	(1.321)	(40,97)	↓
Aset Hak Guna - Neto Right-of-Use Assets - Net	**488.841**	536.361	(47.520)	(8,86)	↓
Aset Pajak Tangguhan - Neto Deferred Tax Assets - Net	**52.787**	57.911	(5.125)	(8,85)	↓
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	**3.155**	3.155	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	**887.025**	**949.303**	**(62.278)**	**(6,56)**	↓

Per 31 Desember 2025, jumlah aset tidak lancar dibukukan sebesar Rp887,02 miliar, mengalami penurunan 6,56% atau setara dengan Rp62,28 dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama sebesar Rp949,30 miliar. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya beban penyusutan aset tetap, belum terealisasinya CAPEX yang signifikan dan terjadi pelepasan atau penghapusan aset di tahun 2025.

As of December 31, 2025, total non-current assets were recorded at Rp887.02 billion, decreased by 6.56% or equivalent to Rp62.28 billion, compared to Rp949.30 billion in the same period last year. This decrease was due to several factors, including depreciation of fixed assets, significant unrealized capital expenditure (CAPEX), and the disposal or write-off of assets in 2025.

Liabilitas

Liabilities

Jumlah Liabilitas Perusahaan tahun 2025 mencapai Rp697,43 miliar, meningkat 21,61% dibandingkan Jumlah Liabilitas tahun 2024 sebesar Rp573,51 miliar.
The Company's total liabilities in 2025 reached Rp697.43 billion, an increase of 21.61% compared to total liabilities in 2024 of Rp573.51 billion.

Jumlah Liabilitas Tahun 2021-2025
Total Liabilities in 2021-2025

Rp-Juta
Rp-Million

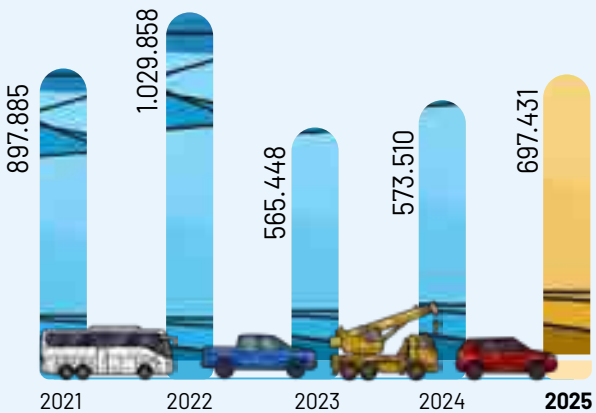

Jumlah Liabilitas Tahun 2024-2025
Total Liabilities in 2024-2025

Perihal Description	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) 2024-2025		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	276.565	39,65	185.272	32,30	91.293	49,27	↑
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	420.866	60,35	388.238	67,70	32.628	8,40	↑
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**697.431**	**100,00**	**573.510**	**100,00**	**123.921**	**21,61**	↑

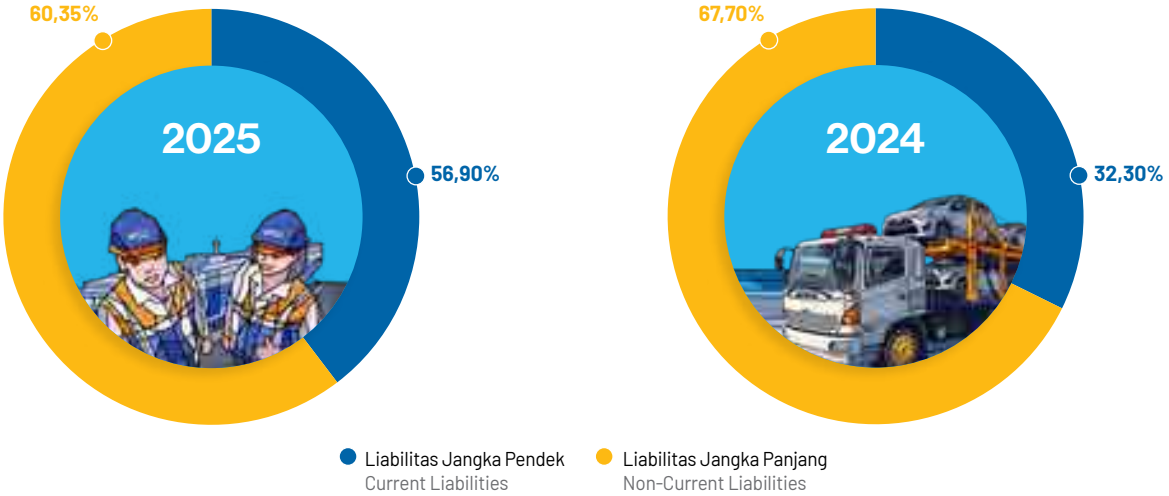

Jumlah liabilitas Perseroan di akhir Desember 2025 sebesar Rp697,43 miliar, mengalami kenaikan 21,61% atau setara dengan Rp123,92 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp573,51 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya upaya efisiensi dan disiplin keuangan yang diterapkan oleh manajemen mampu menekan angka liabilitas secara signifikan. Hal ini tercermin dari berbagai inisiatif percepatan pembayaran kewajiban kepada pemasok dan mitra kerja, renegosiasi atas beban biaya, serta pengendalian pengeluaran operasional secara ketat. Dari sisi struktur, liabilitas IPCC dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagian besar dikontribusikan dari liabilitas jangka panjang yang masing-masing mencapai 67,70% pada tahun 2024 dan 60,35% pada tahun 2025 dari total liabilitas.

Berikut disampaikan penjelasan rinci dari kinerja liabilitas Perseroan.

The Company's total liabilities at the end of December 2025 amounted to Rp697.43 billion, an increase of 21.61% or equivalent to Rp123.92 billion compared to Rp573.51 billion in 2024. This increase was primarily due to efficiency efforts and financial discipline implemented by management, which were able to significantly reduce the liability figure. This is reflected in various initiatives to accelerate payment of obligations to suppliers and partners, renegotiation of cost burdens, and strict control of operational expenses. In terms of structure, IPCC liabilities in the last 2 (two) years were largely contributed by non-current liabilities, which reached 67.70% in 2024 and 60.35% in 2025, respectively, of total liabilities.

The following is a detailed explanation of the Company's liabilities performance.

Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2024-2025
Current Liabilities in 2024-2025

Perihal Description	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease) 2024-2025		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Utang Usaha Trade Payables	**46.381**	47.304	(923)	(1,95)	↓
Utang Lain-lain Other Payables	**5.268**	5.488	(220)	(4,01)	↓
Beban Akrual Accrued Expenses	**96.301**	65.691	30.610	46,60	↑
Utang Dividen Dividend Payables	**47.574**	-	47.574	-	-
Utang Pajak Taxes Payable	**18.596**	20.338	(1.742)	(8,56)	↓
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Other Current Liabilities	**6.821**	6.033	788	13,06	↑
Bagian Lancar atas Liabilitas Sewa Current Portion of Lease Liabilities	**55.624**	40.419	15.205	37,62	↑
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**276.565**	**185.272**	**91.293**	**49,27**	↑

Per 31 Desember 2025, jumlah liabilitas jangka pendek dibukukan sebesar Rp276,56 miliar, mengalami kenaikan 49,27% atau setara dengan Rp91,29 miliar dibandingkan tahun 2024 di periode yang sama sebesar Rp185,27 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh ekspansi bisnis baru dibidang *Car Distibution Management* (CDM), *In line Transportation* dan *Pre-Delivery Center* (PDC) yang bekerja sama dengan mitra strategis.

As of December 31, 2025, total current liabilities were recorded at Rp276.56 billion, a 49.27% increase or equivalent to Rp91.29 billion compared to Rp185.27 billion in the same period in 2024. This increase was driven by new business expansions in Car Distribution Management (CDM), In-line Transportation, and Pre-Delivery Center (PDC) in collaboration with strategic partners.

Liabilitas Jangka Panjang

Non-Current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2024-2025
Non-Current Liabilities in 2024-2025

Perihal Description	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease) 2024-2025		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase Percentage (%)	
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	**420.866**	388.238	32.628	8,40	↑
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	**420.866**	**388.238**	**32.628**	**8,40**	↑

Liabilitas jangka panjang tahun 2025 tercatat sebesar Rp420,87 miliar, mengalami kenaikan 8,40% atau setara dengan Rp32,63 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp388,24 miliar. Kenaikan ini disebabkan pengembangan bisnis termasuk penguatan layanan *Car Distribution Management* (CDM), *In line Transportation* dan fasilitas pendukung seperti *Pre-Delivery Center* (PDC) serta penerapan standar akutansi (PSAK 73)

Total non-current liabilities in 2025 were recorded at Rp420.87 billion, an 8.40% increase or equivalent to Rp32.63 billion compared to 2024 at Rp388.24 billion. This increase was due to business development, including strengthening Car Distribution Management (CDM) services, in-line transportation, and supporting facilities such as Pre-Delivery Centers (PDCs), as well as the implementation of accounting standards (PSAK 73).

Ekuitas

Equity

Jumlah Ekuitas Perusahaan tahun 2025 mencapai Rp1,36 triliun, meningkat 6,54% dibandingkan Jumlah Ekuitas tahun 2024 sebesar Rp1,28 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2021-2025, Ekuitas Perusahaan mengalami pertumbuhan 5,02%

The Company's total equity in 2025 reached Rp1.36 trillion, representing an increase of 6.54% compared to total equity in 2024 of Rp1.28 trillion. Over the 2021–2025 period, the Company's equity recorded a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 5.02%.

Jumlah Ekuitas 2021-2025
Total Equity in 2021-2025

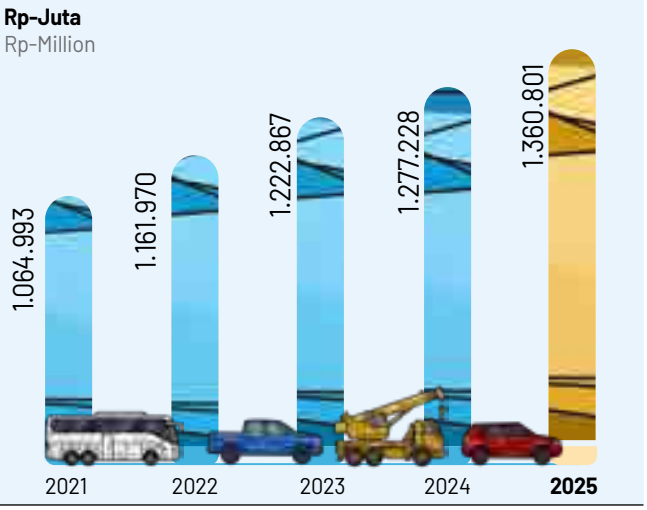

Jumlah Ekuitas Tahun 2024-2025
Total Equity in 2024-2025

Perihal Description	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan) 2024-2025** Increase (Decrease) 2024-2025		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	**Pesentase** Percentage (%)	
Modal Saham Share Capital	**931.299**	931.299	-	-	-
Saldo Laba Retained Earnings	**429.502**	345.930	83.573	24,16	↑
Jumlah Ekuitas Total Equity	**1.360.801**	**1.277.228**	**83.573**	**6,54**	↑

Ekuitas Perseroan pada akhir Desember 2025 sebesar Rp1,36 triliun, mengalami kenaikan 6,54% atau setara dengan Rp83,57 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,28 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan yang berasal dari akumulasi laba ditahan sebagai hasil kinerja keuangan positif semester ini. Kenaikan ini memperkuat struktur permodalan Perseroan dan menjadi fondasi penting bagi kesinambungan pertumbuhan bisnis di masa mendatang.

The Company's equity at the end of December 2025 was Rp1.36 trillion, a 6.54% increase or equivalent to Rp83.57 billion compared to Rp1.28 trillion in 2024. This increase was driven by an increase in accumulated retained earnings resulting from positive financial performance this semester. This increase strengthens the Company's capital structure and provides a critical foundation for sustainable business growth in the future.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

IPCC melanjutkan keberhasilannya dalam menjaga penciptaan nilai melalui profitabilitas yang berhasil dibukukan di tahun 2025.
IPCC continues its track record of creating value through the profitability it achieved in 2025.

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit or Loss and Other Comprehensive Income	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan) 2024-2025** Increase (Decrease) 2024-2025		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	**Pesentase** Percentage **(%)**	
Pendapatan Operasi Operating Revenue	**929.960**	824.596	105.365	12,78	↑
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	**(530.702)**	(477.079)	(53.623)	11,24	↑
Laba Bruto Gross Profit	**399.259**	347.517	51.741	14,89	↑
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	**(95.811)**	(89.424)	(6.387)	7,14	↑
Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya Other Operating Income (Expenses)	**(2.588)**	(1.504)	(1.084)	72,11	↑
Laba Usaha Operating Profit	**300.859**	256.589	44.270	17,25	↑
Pendapatan (Beban) Keuangan Financial Income (Expenses)	**23.077**	13.257	9.820	74,08	↑
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Profit Before Corporate Income Tax	**323.937**	269.846	54.090	20,04	↑
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax Benefit (Expense)	**(67.424)**	(57.630)	(9.794)	16,99	↑
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**256.513**	212.216	44.296	20,87	↑
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	**-**	-	-	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**256.513**	212.216	44.296	20,87	↑
Laba per Saham Dasar (Nilai Penuh) Basic Earnings per Share (Full Amount)	**141,07**	116,71	24	20,87	↑

Pendapatan Operasi

Perseroan berhasil membukukan pendapatan operasi tahun 2025 sebesar Rp929,96 miliar, meningkat 12,78% atau setara dengan Rp105,36 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp824,60 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan pertumbuhan kinerja operasi secara konsolidasi pada area *Branch* Jakarta dan Terminal Satelit, dimana pada tahun ini Terminal Satelit Banjarmasin sudah di operasikan secara menyeluruh.

Operating Revenue

The Company successfully recorded operating revenue amounted to Rp929.96 billion in 2025, an increase of 12.78% or equivalent to Rp105.36 billion, compared to 2024 amounted to Rp824.60 billion. This increase was primarily due to consolidated operational performance growth in Jakarta Branch and Satellite Terminal areas, with Banjarmasin Satellite Terminal fully operational this year.

Beban Pokok Pendapatan

Seiring dengan meningkatnya kinerja operasi yang menyebabkan kenaikan pada kerja sama mitra usaha, maka beban pokok pendapatan tahun 2025 turut mengalami kenaikan hingga mencapai 11,24% sehingga dibukukan menjadi sebesar Rp530,70 miliar dari sebelumnya di tahun 2024 sebesar Rp477,08 miliar.

Cost of Revenue

In line with improved operational performance, which led to an increase in business partnerships, the cost of revenue for 2025 also increased by 11.24%, reaching Rp530.70 billion, up from Rp477.08 billion in 2024.

Peningkatan Beban Pokok Pendapatan selaras dengan meningkatnya aktivitas operasional, perluasan layanan bisnis, dan transformasi bisnis menuju layanan logistik terintegrasi yang pada akhirnya memberikan *value* lebih tinggi bagi pengguna jasa.

Beban Umum dan Administrasi

Sepanjang tahun 2025, Perseroan membukukan beban umum dan administrasi sebesar Rp95,81 miliar, meningkat 7,14% atau setara dengan Rp6,39 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp89,42 miliar.

Kenaikan ini disebabkan oleh perhitungan beban imbal jasa pekerja sebagai mana diatur dalam PSAK 24. Selain itu, peningkatan beban PNBP atas pembayaran konsesi juga menjadi salah satu faktor kenaikan tersebut.

Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya

Pendapatan (beban) operasi lainnya didapatkan dari telah diterapkannya metode *single billing* atas aktivitas operasional dimana seluruh transaksi terpusat di Perseroan.

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat beban operasi lainnya sebesar Rp2,59 miliar, meningkat 72,11% atau setara dengan Rp1,08 miliar dibandingkan tahun 2024 di mana Perseroan membukukan beban operasi lainnya sebesar Rp1,50 miliar.

Pendapatan (Beban) Keuangan

Perseroan mencatat pendapatan (beban) keuangan sebagai dampak dari meningkatnya biaya pendanaan seiring ekspansi bisnis yang dilakukan Perseroan.

Di tahun 2025, Perseroan mencatat pendapatan keuangan sebesar Rp23,08 miliar, meningkat 74,08% atau setara dengan Rp9,82 miliar dibandingkan tahun 2024 di mana Perusahaan membukukan pendapatan keuangan sebesar Rp13,26 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya bertambahnya liabilitas sewa atau PSAK 73 serta kemitraan strategis dibidang *in line transportation*.

Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan badan merupakan kontribusi strategis Perseroan kepada negara yang timbul dari kinerja usaha yang positif dan berkelanjutan. Bagi IPCC, beban pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kepatuhan, tetapi juga sebagai cerminan dari pertumbuhan bisnis yang sehat serta tata kelola perusahaan yang baik. Seiring dengan peningkatan kinerja operasional dan ekspansi layanan, kewajiban pajak penghasilan badan turut mengalami penyesuaian, mencerminkan laba kena pajak yang dihasilkan dari aktivitas usaha Perseroan.

Di tahun 2025, Perseroan mencatat beban pajak penghasilan badan sebesar Rp67,42 miliar, meningkat 16,99% atau setara dengan Rp9,79 miliar dibandingkan tahun 2024 di mana Perseroan membukukan beban pajak penghasilan badan sebesar Rp57,63 miliar. Kenaikan ini disebabkan kenaikan laba sebelum pajak yang dihasilkan dari aktivitas operasional yang semakin solid. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya laba kena pajak sebagai dampak dari ekspansi layanan dan optimalisasi bisnis, termasuk penguatan layanan terintegrasi

The increase in Cost of Revenue was in line with increased operational activities, expansion of business services, and business transformation towards integrated logistics services which ultimately provide higher value for service users.

General and Administrative Expenses

Throughout 2025, the Company recorded general and administrative expenses of Rp95.81 billion, an increase of 7.14% or equivalent to Rp6.39 billion compared to the previous year of Rp89.42 billion.

This increase was caused by the calculation of employee compensation expenses as regulated in PSAK 24. In addition, the increase in PNBP expenses for concession payments was also a factor in the increase.

Other Operating Income (Expenses)

Other operating income (expenses) are obtained from the implementation of single billing method for operational activities, where all transactions are centralized in the Company.

In 2025, the Company recorded other operating expenses of Rp2.59 billion, an increase of 72.11%, equivalent to Rp1.08 billion, compared to 2024, when the Company recorded other operating expenses of Rp1.50 billion.

Financial Income (Expenses)

The Company recorded financial income (expenses) as a result of increasing funding costs in line with the Company's business expansion.

In 2025, the Company recorded financial income of Rp23.08 billion, an increase of 74.08% or equivalent to Rp9.82 billion compared to Rp13.26 billion in 2024. This increase was driven by several factors, including increased lease liabilities (PSAK 73) and strategic partnerships in the in-line transportation sector.

Corporate Income Tax Benefit (Expense)

Corporate income tax represents the Company's strategic contribution to the country, arising from positive and sustainable business performance. For IPCC, the tax expenses are viewed not only as a compliance obligation but also as a reflection of healthy business growth and good corporate governance. Along with improved operational performance and service expansion, the corporate income tax liability has also been adjusted, reflecting the taxable profit generated from the Company's business activities.

In 2025, the Company recorded corporate income tax expense of Rp67.42 billion, an increase of 16.99% or equivalent to Rp9.79 billion, compared to 2024 reaching Rp57.63 billion. This increase was due to higher profit before tax resulting from increasingly robust operational activities. This increase reflects the increase in taxable profit resulting from service expansion and business optimization, including strengthening integrated services such as Car Distribution Management (CDM), inland logistics, and Pre-Delivery Center (PDC).

seperti *Car Distribution Management* (CDM), *inland logistics*, dan *Pre Delivery Centre* (PDC). Kenaikan beban pajak penghasilan badan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kontribusi IPCC terhadap penerimaan negara, tetapi juga menjadi indikator positif atas pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan kinerja keuangan yang semakin sehat.

Laba Tahun Berjalan

Dengan kinerja pendapatan operasi dan beban-beban sebagaimana telah disampaikan di atas, Perusahaan berhasil mencatat perolehan laba bersih di akhir tahun 2025 sebesar Rp256,51 miliar, meningkat 20,87% atau setara dengan Rp44,30 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp212,22 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh kinerja operasional dan komersial yang solid di tengah dinamika industri dan tekanan geopolitik global. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan aktivitas operasional serta kontribusi dari pengembangan layanan terintegrasi seperti *Car Distribution Management* (CDM), *inland logistics*, dan *Pre Delivery Centre* (PDC) yang mampu memperluas sumber pendapatan sekaligus meningkatkan nilai tambah layanan.

Di sisi lain, capaian tersebut juga menunjukkan efektivitas strategi pengelolaan biaya dan mitigasi risiko yang dijalankan secara disiplin, sehingga kenaikan beban operasional dan beban keuangan tetap dapat diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan. Penguatan hubungan dengan pelanggan dan stakeholder turut menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas volume kargo di tengah penurunan *demand* global.

Profitabilitas dan Kemampuan Perusahaan dalam Menghasilkan Keuntungan

Kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba diukur dengan menggunakan rasio-rasio profitabilitas yang tercermin pada tabel di bawah ini.

This increase in corporate income tax expense not only reflects the increased contribution of IPCC to state revenue but also serves as a positive indicator of sustainable business growth and increasingly sound financial performance.

Profit for the Year

With the performance of operating revenue and expenses as stated above, the Company successfully recorded a net profit of Rp256.51 billion at the end of 2025, an increase of 20.87% or equivalent to Rp44.30 billion compared to the previous year's Rp212.22 billion. This increase was due to solid operational and commercial performance amidst industry dynamics and global geopolitical pressures. This growth was driven by increased operational activities and contributions from the development of integrated services such as Car Distribution Management (CDM), inland logistics, and Pre-Delivery Center (PDC), which were able to expand revenue sources while increasing the added value of services.

Furthermore, this achievement also demonstrates the effectiveness of disciplined cost management and risk mitigation strategies, enabling increased operational and financial expenses to be offset by revenue growth. Strengthening relationships with customers and stakeholders is also a key factor in maintaining cargo volume stability amid declining global demand.

Profitability and the Company's Ability to Generate Profit

The Company's ability to generate profit is measured using profitability ratios as presented in the table below.

Rasio Profitabilitas
Profitability Ratio

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	Selisih Difference	
Margin Laba Bruto Gross Profit Margin	%	**42,93**	42,14	0,79	↑
Margin Laba Usaha Operating Profit Margin	%	**32,35**	31,12	1,23	↑
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	%	**27,58**	25,74	1,84	↑
Imbal Hasil Ekuitas Return on Equity	%	**18,85**	16,62	2,23	↑
Imbal Hasil Aset Return on Assets	%	**12,46**	11,47	0,99	↑

Sepanjang tahun 2025, Perseroan mencatatkan kinerja keuangan yang semakin solid seiring dengan peningkatan pendapatan dan efektivitas pengelolaan biaya. Perbaikan ini tercermin dari kenaikan hampir seluruh indikator profitabilitas yang menunjukkan penguatan kinerja operasional dan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba.

Margin laba bruto tercatat sebesar 42,93%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 42,14%. Kenaikan sebesar 0,79% ini

Throughout 2025, the Company recorded increasingly solid financial performance in line with revenue growth and improved cost management effectiveness. This improvement is reflected in the increase of nearly all profitability indicators, demonstrating stronger operational performance and the Company's enhanced ability to generate earnings.

Gross profit margin was recorded at 42.93%, an increase from 42.14% in the previous year. The 0.79% rise reflects the Company's ability to

mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mengendalikan beban pokok pendapatan secara lebih optimal di tengah pertumbuhan pendapatan. Selaras dengan hal tersebut, margin laba usaha juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 1,23% menjadi 32,35%, menunjukkan efisiensi yang lebih baik pada pengelolaan beban operasional.

manage cost of revenues more effectively amid revenue growth. In line with this, operating profit margin also increased significantly by 1.23% to 32.35%, indicating better efficiency in managing operating expenses.

Margin laba bersih menunjukkan peningkatan yang lebih kuat, dari 25,74% pada tahun 2024 menjadi 27,58% pada tahun 2025. Kenaikan sebesar 1,84 % ini mengindikasikan bahwa Perseroan tidak hanya mampu meningkatkan kinerja operasional, tetapi juga menjaga efisiensi pada aspek non-operasional dan beban keuangan, sehingga menghasilkan pertumbuhan laba bersih yang lebih optimal.

Net profit margin showed a stronger improvement, rising from 25.74% in 2024 to 27.58% in 2025. The 1.84% increase indicates that the Company was not only able to enhance operational performance but also maintain efficiency in non-operational aspects and financial expenses, resulting in more optimal net profit growth.

Dari sisi pengembalian, imbal hasil atas ekuitas (ROE) meningkat signifikan menjadi 18,85%, naik 2,23% dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan peningkatan kemampuan Perseroan dalam memberikan imbal hasil kepada pemegang saham. Sementara itu, imbal hasil atas aset (ROA) juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan dari 11,47% menjadi 12,46%, yang menandakan semakin efektifnya pemanfaatan aset dalam mendukung penciptaan laba.

In terms of returns, return on equity (ROE) increased significantly to 18.85%, up by 2.23% from the previous year. This reflects the Company's improved ability to generate returns for shareholders. Meanwhile, return on assets (ROA) also showed a positive trend, increasing from 11.47% to 12.46%, indicating more effective asset utilization in supporting profit generation.

Kinerja ini menegaskan bahwa Perseroan berada dalam tren pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan fundamental profitabilitas yang semakin kuat. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan strategi Perseroan dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi usaha, efisiensi operasional, serta optimalisasi nilai bagi para pemegang saham.

This performance confirms that the Company is on a sustainable growth trajectory, supported by increasingly strong profitability fundamentals. The improvement reflects the success of the Company's strategy in maintaining a balance between business expansion, operational efficiency, and value optimization for shareholders.

Laporan Arus Kas

Statement of Cash Flows

"Arus kas memberikan gambaran tentang jumlah pemasukan dan pengeluaran Perusahaan dalam suatu periode tertentu."
"Cash Flow provides an overview of the Company's income and expenses in a certain period."

Perkembangan Kas dan Setara Kas Akhir Tahun
Perkembangan Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

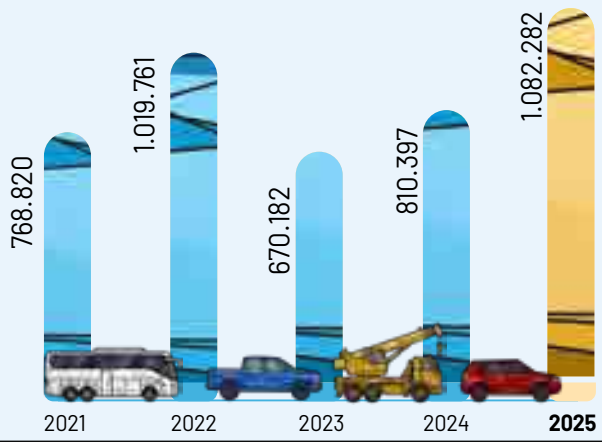

Kas dan setara kas akhir periode 2025 menunjukkan kenaikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Cash and cash equivalents at the end of the 2025 period showed an increase as shown in the following table.

Arus Kas Tahun 2024-2025
Cash Flows in 2024-2025

Perihal Description	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease) 2024-2025		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million	Pesentase Percentage (%)	
Arus kas dari aktivitas operasi Cash flow from operating activities	**423.183**	380.190	42.993	11,31	↑
Arus kas untuk aktivitas investasi Cash flow from investing activities	**(5.279)**	(24.866)	19.587	(78,77)	↓
Arus kas untuk aktivitas pendanaan Cash flow from financing activities	**(146.018)**	(215.108)	69.090	(32,12)	↓
Kenaikan neto kas dan setara kas Net increase in cash and cash equivalents	**271.885**	140.216	131.669	93,90	↑
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	**810.397**	670.182	140.216	20,92	↑
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	**1.082.282**	810.397	271.885	33,55	↑

Posisi kas dan setara kas Perseroan pada akhir tahun 2025 dibukukan sebesar Rp1,08 triliun, meningkat 33,55% atau setara dengan Rp271,88 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp810,40 miliar.

Peningkatan ini terutama ditopang oleh arus kas operasional yang solid, seiring pertumbuhan kinerja usaha dan optimalisasi pengelolaan modal kerja, termasuk percepatan penagihan serta pengendalian pembayaran kepada mitra secara lebih terukur.

Selain itu, kontribusi dari pengembangan layanan terintegrasi seperti *Car Distribution Management* (CDM), *inland logistics*, dan *Pre Delivery Centre* (PDC) turut memperkuat *cash inflow*, sekaligus memperluas basis pendapatan Perseroan. Di sisi lain, disiplin dalam pengelolaan belanja modal dan strategi pendanaan yang *prudent* juga berperan dalam menjaga posisi kas tetap kuat.

Kas Neto dari Aktivitas Operasi

Pada akhir tahun 2025, Perseroan mencatatkan perolehan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp423,18 miliar, meningkat 11,31% atau setara dengan Rp42,99 miliar dibandingkan tahun 2024 di mana Perseroan mencatatkan perolehan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp380,19 miliar.

Kenaikan ini disebabkan oleh pertumbuhan kinerja operasional yang solid, serta efektivitas pengelolaan modal kerja, termasuk optimalisasi penagihan piutang dan pengendalian pembayaran kewajiban secara terukur.

The Company's cash and cash equivalents position at the end of 2025 was recorded at Rp1.08 trillion, an increase of 33.55% or equivalent to Rp271.88 billion compared to 2024 of Rp810.40 billion.

This increase was primarily supported by solid operational cash flow, in line with growing business performance and optimization of working capital management, including accelerated collection and more measurable control of payments to partners.

Furthermore, the development of integrated services such as Car Distribution Management (CDM), inland logistics, and Pre-Delivery Centers (PDC) has strengthened cash inflow and expanded the Company's revenue base. Disciplined capital expenditure management and a prudent funding strategy have also contributed to maintaining a strong cash position.

Net Cash from Operating Activities

At the end of 2025, the Company recorded net cash provided by operating activities amounting to Rp423.18 billion, an increase of 11.31% or equivalent to Rp42.99 billion compared to 2024, when the Company recorded net cash provided by operating activities of Rp380.19 billion.

This increase was due to solid operational performance growth, as well as effective working capital management, including optimization of receivables collection and measurable control of liability payments.

Kontribusi dari pengembangan layanan terintegrasi seperti *Car Distribution Management* (CDM), *inland logistics*, dan *Pre Delivery Centre* (PDC) turut memperkuat kualitas pendapatan yang dihasilkan, sehingga berdampak positif terhadap arus kas masuk. Di sisi lain, disiplin dalam pengelolaan biaya operasional dan mitigasi risiko yang terintegrasi memungkinkan Perseroan menjaga efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan.

Kas Neto untuk Aktivitas Investasi

Perseroan membukukan pengunaan kas bersih untuk aktivitas investasi tahun 2025 sebesar Rp5,28 miliar, turun 78,77% atau setara dengan Rp19,59 miliar dibandingkan tahun 2024 di mana Perseroan mencatatkan penggunaan kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp24,87 miliar.

Penurunan yang cukup signifikan ini terutama disebabkan tidak terealisasinya investasi *Car Storage Building* (CSB) tahap pertama dikarenakan proses perizinan yang masih berjalan.

Kas Neto untuk Aktivitas Pendanaan

Sepanjang tahun 2025, Kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tercatat sebesar Rp146,02 miliar, turun 32,12% atau setara dengan Rp69,09 miliar dibandingkan tahun 2024 di mana Perseroan mencatat penggunaan kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp215,11 miliar.

Penurunan ini disebabkan Penurunan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan, yang berasal dari berkurangnya pembayaran dividen maupun kewajiban sewa dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan arus kas dari aktivitas pendanaan ini mencerminkan disiplin finansial IPCC dalam mengelola kewajiban serta mengoptimalkan sumber pendanaan internal, sekaligus memperkuat fundamental keuangan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika global.

The development of integrated services such as Car Distribution Management (CDM), inland logistics, and Pre-Delivery Center (PDC) has strengthened the quality of revenue generated, positively impacting cash flow. Furthermore, disciplined operational cost management and integrated risk mitigation have enabled the Company to maintain efficiency without compromising service quality.

Net Cash for Investing Activities

The Company recorded net cash used in investing activities in 2025 amounting to Rp5.28 billion, a decrease of 78.77% or equivalent to Rp19.59 billion compared to 2024, when the Company recorded net cash used in investing activities of Rp24.87 billion.

This significant decline was mainly driven by the failure to realize the first phase of the Car Storage Building (CSB) investment due to the ongoing licensing process.

Net Cash for Financing Activities

Throughout 2025, the Company's net cash used in financing activities was recorded at Rp146.02 billion, a decrease of 32.12% or equivalent to Rp69.09 billion compared to 2024, when the Company recorded net cash used in financing activities of Rp215.11 billion.

This decrease was attributable to a decrease in cash outflow from financing activities, resulting from reduced dividend payments and lease obligations compared to the previous year. This decrease in cash flow from financing activities reflects IPCC's financial discipline in managing liabilities and optimizing internal funding sources, while strengthening financial fundamentals to support sustainable growth amidst global dynamics.

Kemampuan Membayar Utang
Ability to Pay Debt

Utang jangka panjang dan jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan telah menerapkan kebijakan pengelolaan utang dan melakukan *monitoring* ketat melalui pengukuran indikator kemampuan membayar utang sebagai berikut:

The current and non-current liabilities are obligations that must be paid off by the Company. Therefore, the Company has implemented a debt management policy and carried out strict monitoring by measuring debt repayment indicators as follows:

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Pengukuran terhadap likuiditas Perseroan dapat dilihat dari hasil perhitungan *Cash Ratio, Quick Ratio,* dan *Current Ratio*. Semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut menandakan bahwa Perseroan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo.

Liquidity Ratio

Liquidity ratio is a ratio used to measure the Company's ability to settle its short-term obligations. Measurement of the Company's liquidity can be seen from the results of the calculation of Cash Ratio, Quick Ratio, and Current Ratio. Higher value of these ratios indicates that the Company has the ability to meet its obligations that will fall due.

Likuiditas
Liquidity

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	Selisih	
Rasio Kas Cash Ratio	Kali Times	**3,91**	4,37	(0,46)	↓
Rasio Cepat Quick Ratio	Kali Times	**4,23**	4,87	(0,64)	↓
Rasio Lancar Current Ratio	Kali Times	**4,23**	4,87	(0,64)	↓

Rasio Kas

Rasio Kas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajiban yang sudah jatuh tempo dari kas yang dimiliki. Sepanjang tahun 2025, terjadi penurunan yang mencapai 0,46 kali pada posisi Rasio Kas Perseroan, dari sebesar 4,37 kali di akhir tahun 2024 menjadi sebesar 3,91 kali di akhir tahun 2025. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan kewajiban jangka pendek yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kas, meskipun demikian tingkat rasio kas masih berada pada level yang sangat memadai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Perseroan tetap memiliki likuiditas yang kuat untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

Cash Ratio

The Cash Ratio is used to measure the Company's ability to pay off maturing liabilities from its cash. Throughout 2025, there was a decrease of 0.46 times in the Company's Cash Ratio position, from 4.37 times at the end of 2024 to 3.91 times at the end of 2025. This was primarily due to an increase in current liabilities that was higher than the cash growth, although the cash ratio remained at a very adequate level. This condition indicates that the Company continues to have strong liquidity to meet maturing obligations.

Rasio Cepat

Rasio Cepat adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aktiva-aktivanya yang paling likuid. Pada tahun 2025, nilai Rasio Cepat Perseroan sebesar 4,23kali, turun 0,64kali dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,87 kali. Hal ini terutama disebabkan peningkatan liabilitas jangka pendek, namun tetap mencerminkan bahwa aset lancar likuid Perseroan, seperti kas dan piutang usaha, masih berada pada tingkat yang sangat memadai untuk menutup kewajiban jangka pendek. Hal ini menunjukkan efektivitas pengelolaan modal kerja yang tetap terjaga.

Quick Ratio

Quick Ratio is a ratio used to measure a company's ability to pay its short-term debts using its most liquid assets. In 2025, the company's Quick Ratio was 4.23 times, a decrease of 0.64 times compared to 4.87 times in 2024. This decrease was primarily due to an increase in current liabilities, but still reflects that the Company's liquid current assets, such as cash and accounts receivable, remain at a very adequate level to cover short-term obligations. This demonstrates the continued effectiveness of working capital management.

Rasio Lancar

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan mengandalkan Aset Lancar yang dimiliki dapat diukur dari indikator Rasio Lancar. Per 31 Desember 2025, Perseroan mencatatkan nilai Rasio Lancar sebesar 4,23 kali, turun mencapai 0,64 kali dibandingkan tahun 2024 pada periode yang sama sebesar 4,87 kali. Meskipun mengalami penurunan, tingkat Rasio Lancar tersebut masih menunjukkan kondisi likuiditas yang sangat kuat. Hal ini mencerminkan bahwa Perseroan tetap mampu menjaga keseimbangan antara pengelolaan aset lancar dan kewajiban jangka pendek secara optimal, serta mempertahankan kondisi keuangan yang sehat dan stabil.

Current Ratio

The Company's ability to meet short-term liabilities by relying on its Current Assets can be measured from the Current Ratio indicator. As of December 31, 2025, the Company recorded a Current Ratio of 4.23 times, down 0.64 times from 4.87 times in the same period in 2024. Despite the decline, Despite the decrease, the Current Ratio still indicates very strong liquidity. This reflects the Company's ability to maintain an optimal balance between managing current assets and short-term obligations, while maintaining a healthy and stable financial condition.

Rasio Solvabilitas

Kemampuan Perseroan dalam membayar seluruh kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek, dapat diukur dengan rasio solvabilitas, yang terdiri dari rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah asset atau *Debt to Total Assets Ratio* (DAR) dan rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas atau *Debt to Equity Ratio* (DER).

Solvency Ratio

The Company's ability to pay all its liabilities, both long-term and short-term, can be measured by the solvency ratio, which at least consists of the Debt to Assets Ratio (DAR) and the Debt to Equity Ratio (DER).

Solvabilitas
Solvency

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	Selisih Difference	
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset Debt to Assets Ratio	%	**33,89**	30,99	2,90	↑
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas Debt to Equity Ratio	%	**51,20**	44,90	6,30	↑

Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset, atau *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian aktiva yang digunakan dalam menjamin keseluruhan kewajiban atau utang. Nilai DAR tahun 2025 dibukukan sebesar 33,89%, di mana nilai ini lebih tinggi 2,90% dibandingkan nilai DAR tahun sebelumnya sebesar 30,99%. Meskipun demikian, tingkat DAR masih berada pada level yang relatif moderat, sehingga menunjukkan bahwa struktur permodalan Perseroan tetap dalam kondisi yang sehat dan terkendali.

Debt to Asset Ratio (DAR)

This ratio is used to measure the portion of assets used to guarantee all liabilities or debts. The 2025 DAR was recorded at 33.89%, 2.90% higher than the previous year's DAR of 30.99%. Nevertheless, the DAR remains at a relatively moderate level, indicating that the Company's capital structure remains healthy and under control.

Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas, atau *Debt to Equity Ratio* (DER)

Ekuitas, atau *Debt to Equity Ratio* (DER) Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian modal yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan kewajiban atau utang. Nilai perhitungan DER Perseroan tahun 2025 diperoleh sebesar 51,20%, di mana nilai ini lebih tinggi 6,30% dibandingkan nilai DER tahun sebelumnya sebesar 44,90%. Namun demikian, posisi DER yang masih berada di bawah 100% mencerminkan bahwa struktur permodalan Perseroan tetap cukup kuat, dengan porsi ekuitas yang masih lebih dominan dalam mendukung kegiatan operasional dan ekspansi usaha.

Debt to Equity Ratio (DER)

This ratio is used to measure the portion of capital used as collateral for all liabilities or debts. The Company's DER calculated for 2025 was 51.20%, 6.30% higher than the previous year's DER of 44.90%. However, the DER remaining below 100% reflects the Company's remaining strong capital structure, with equity remaining a dominant factor in supporting operational activities and business expansion.

Rata-rata Kolektibilitas Piutang Usaha atau Perputaran Piutang Usaha

Average Trade Receivables Collectibility or Trade Receivables Turnover

Tingkat kolektibilitas piutang usaha *(trade receivables turnover)* digunakan untuk menilai kemampuan Perseroan dalam mengumpulkan piutang dari para pelanggan. Rasio ini dipakai untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau bahkan berapa kali dana yang tertanam dalam piutang.

Adapun nilai rata-rata Perputaran Piutang Usaha *(Average Collection Period)* IPCC tahun 2025 adalah selama 29 hari, lebih lama 16 hari dibandingkan tahun sebelumnya yang selama 31 hari.

The collectibility level of trade receivables (trade receivables turnover) is used to assess the Company's ability to collect receivables from customers. This ratio is used to measure how long it takes to collect receivables during one period or even how many times the funds are embedded in receivables.

The average value of IPCC Trade Receivables Turnover (Average Collection Period) in 2025 was 29 days, 16 days longer than the previous year which was 31 days.

Kolektibilitas Piutang
Collectability of Receivables

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	Selisih	
Kolektibilitas Piutang Collectability of Receivables	kali times	**12,34**	11,63	1,71	↑
Rata-Rata Hari Kolektibilitas Piutang Average Days to Collect Receivables	hari days	**29,17**	30,96	(1,79)	↓

Umur piutang usaha dan upaya Perseroan dalam pengelolaan piutang usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The age of the Company's trade receivables and the Company's efforts in managing trade receivables can be seen in the table below.

Umur Piutang Usaha
Receivables Age

Umur Piutang Usaha Receivables Age	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease) 2024-2025		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Belum Jatuh Tempo Not Yet Due	**4.905**	**5,23**	6.089	5,27	(1.185)	(19,46)	↓
Telah Jatuh Tempo Overdue							
1 - 30 hari 1 - 30 days	**62.293**	**66,40**	54.416	47,10	7.877	14,48	↑
31 - 60 hari 31 - 60 days	**2.249**	**2,40**	11.001	9,52	(8.753)	(79,56)	↓
61 - 90 hari 61 - 90 days	**149**	**0,16**	5.764	4,99	(5.616)	(97,42)	↓
91 - 180 hari 91 - 180 days	**49**	**0,05**	4.499	3,89	(4.450)	(98,91)	↓
Lebih dari 180 hari More than 180 days	**24.167**	**25,76**	33.759	29,22	(9.592)	(28,41)	↓
Sub Jumlah Sub Total	**93.811**	**100,00**	115.529	100,00	(21.718)	(18,80)	↓
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Less: Allowance for Impairment	**(23.295)**		(35.320)		12.025	(34,05)	↓
Jumlah Piutang Usaha - Bersih Total Trade Receivables - Net	**70.516**		**80.209**		**(9.693)**	**(12,08)**	↓

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha cukup memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang. Per 31 Desember 2025, tidak terdapat piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan di tahun 2025.

Management believes that the allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover possible losses from uncollectible receivables. As of December 31, 2025, there are no trade receivables used as collateral in 2025.

Struktur Modal Perusahaan dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Capital Structure of the Company and Management Policy on Capital Structure

Tujuan Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimumkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Perseroan dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Struktur Modal Perusahaan

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan tidak memiliki utang berbasis bunga. Seluruh pendanaan untuk operasi dan pengembangan usaha didapatkan dari ekuitas atau permodalan sendiri.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Struktur modal berpengaruh terhadap pengembangan bisnis terutama dalam sumber dan penggunaan dana. Hal ini mendorong Manajemen Perusahaan untuk senantiasa meninjau komposisi struktur modal agar mencapai kondisi yang optimal. Perseroan lebih memilih Ekuitas untuk membiayai Aset. Meskipun demikian, penggunaan Utang di Perseroan juga mengalami peningkatan sehingga dipandang mampu meminimalkan (*Weighted Average Cost of Capital*/WACC) karena biaya utang *(cost of debt)* lebih murah dari biaya modal sendiri (*cost of equity).* Penggunaan utang juga akan mengurangi biaya kena pajak sehingga akan terjadi penghematan pajak. Akan tetapi, peningkatan utang berdampak terhadap biaya beban bunga yang meningkat sehingga mengurangi nilai Perseroan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penggunaan utang dan modal senantiasa dikelola oleh Perseroan sehingga diperoleh kondisi yang optimum. Perseroan juga senantiasa melakukan monitoring terhadap rasio likuiditas karena semakin tinggi rasio likuiditas maka struktur modal akan optimal.

Capital Management Objectives

The main objective of the Company's capital management is to ensure the maintenance of sound capital ratios to support the business and maximize shareholders returns.

The Company manages capital to maintain its business continuity in order to maximize shareholder wealth and benefits to other parties with an interest in the Company and tries to maintain a balance between borrowing rate and equity position to maintain an optimal capital structure to reduce capital costs.

Capital Structure of the Company

Until the end of 2025, the Company has no interest-based debt. All funding for operations and business development is obtained from equity or own capital.

Management Policy on Capital Structure

Capital structure affects business development, especially in the source and use of funds. This encourages the Management to continually review the composition of capital structure in order to achieve optimal conditions. The Company prefers Equity to finance Assets. However, the use of debt in the Company has also increased, hence it is seen as being able to minimize the Weighted Average Cost of Capital (WACC) because the cost of debt is cheaper than the cost of its own equity. Using debt will also reduce taxable costs, which resulted in tax saving. However, increasing debt has an impact on increasing interest costs, thereby reducing the overall value of the Company. Therefore, the use of debt and capital is always managed by the Company so that optimum conditions are obtained. The Company also continuously monitors the liquidity ratio because the higher the liquidity ratio, the more optimal the capital structure will be.

Investasi Barang Modal
Capital Expenditures

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak memiliki catatan atas perikatan material untuk investasi barang modal.

Material Commitment for Capital Expenditures

Throughout 2025, the Company had no records of material commitments for capital expenditure.

Realisasi Investasi Barang Modal

Pada tahun 2025 jumlah penambahan investasi barang modal tercatat sebesar Rp21,49 miliar mengalami penurunan 34,57% atau setara dengan Rp11,35 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp32,85 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan rencana penambahan kapasitas penumpukan dari prioritas semula berupa pembangunan gedung parkir baru menjadi ekspansi Lapangan Eks PUMA. Secara petahapan, ekspansi Lapangan Eks PUMA akan dimulai sejak 2026 dimana secara simultan dilakukan proses pengurusan AMDAL gedung parkir baru.

Berikut disajikan rincian investasi barang modal selama dua tahun terakhir.

Realization of Capital Expenditure

In 2025, total capital expenditure investment was recorded at Rp21.49 billion, representing a decrease of 34.57% or equivalent to Rp11.35 billion compared to Rp32.85 billion in 2024. This decline was driven by a change in the capacity expansion plan, shifting from the initial priority of constructing a new parking building to the expansion of Ex-PUMA yard. In phases, the expansion of Ex-PUMA yard will commence in 2026, while the environmental impact assessment (AMDAL) process for the new parking building is carried out simultaneously.

The following table presents the details of capital expenditure over the past two years.

Penambahan Investasi Barang Modal dalam bentuk Aset Tetap
Additions to Capital Expenditure in the Form of Fixed Assets

Jenis Aset Tetap Type of Fixed Assets	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan) 2024-2025** Increase (Decrease) 2024-2025		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	**Pesentase** Percentage **(%)**	
Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan Port Facilities Equipment					
Investasi Investment	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Maintenance	**2.383**	4.400	(2.017)	(45,84)	↓
Jumlah Amount	**2.383**	4.400	(2.017)	(45,84)	↓
Instalasi Fasilitas Pelabuhan Port Facilities Installation					
Investasi Investment	**3.900**	3.012	888	29,48	↑
Pemeliharaan Maintenance	**3.047**	1.400	1.647	117,64	↑
Jumlah Amount	**6.947**	**4.412**	**2.535**	**57,46**	↑

Penambahan Investasi Barang Modal dalam bentuk Aset Tetap
Additions to Capital Expenditure in the Form of Fixed Assets

Jenis Aset Tetap Type of Fixed Assets	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease) 2024-2025		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase Percentage (%)	
Bangunan Fasilitas Pelabuhan Port Facilities Buildings					
Investasi Investment	**0**	8.012	(8.012)	(100,00)	↓
Pemeliharaan Maintenance	**2.834**	4.572	(1.738)	(38,01)	↓
Jumlah Amount	**2.934**	12.584	(9.650)	(76,68)	↓
Jalan dan Bangunan Roads and Buildings					
Pemeliharaan Maintenance	**3.939**	2.307	1.632	70,74	↑
Jumlah Amount	**3.939**	2.307	1.632	70,74	↑
Emplasemen Emplacement					
Investasi Investment	**3.427**	7.165	(3.738)	(52,17)	↓
Pemeliharaan Maintenance	**1.665**	1.482	183	12,35	↑
Jumlah Amount	**5.092**	8.647	(3.555)	(41,11)	↓
Non-Fisik Non-Physical	**300**	500	(200)	(40,00)	↓
Jumlah Penambahan Total Additions	**21.495**	**32.850**	**(11.355)**	**(34,57)**	↓

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Information and Material Facts Occurring after the Date of the Accountant's Report

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan hingga ditandatanganinya laporan tahunan ini pada tanggal 30 April 2026.

There were no material information and facts that occurred after the date of the accountant's report until the signing of this annual report on April 30, 2026.

Pencapaian Target Tahun 2025
Target Achievement In 2025

Pencapaian Target Tahun 2025

2025 Target Achievement

Perihal Description	**Realisasi 2025** 2025 Realization	**Target 2025** 2025 Target	**Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2025 (%)** Achievement of Realization Against 2025 Target (%)
	1	**2**	**(1:2)**
Arus Barang Perdagangan Luar Negeri Flow of Foreign Trade			
Bongkar Muat Mobil (Unit) Car Loading/Unloading (Unit)	549.275	446.455	123,03
Kendaraan Berat (Alat Berat dan Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment and Trucks/Buses)			
Dalam unit In unit	10.817	12.379	87,38
Dalam m3 In m3	1.006.800	1.135.332,64	88,68
Sparepart			
Dalam PKGS In PKGS	7.698	6.774	113,64
Dalam m3 In m3	63.894	68.502,34	93,27
Pendapatan Operasi (Rp-juta) Operating Revenue (Rp-million)	929.960	849.469	109,48
Laba Bersih Tahun Berjalan (Rp-juta) Net Profit for the Year (Rp-million)	256.513	205.154	125,03
Aset (Rp-juta) Assets (Rp-million)	2.058.232	1.969.989	104,48
Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)	1.360.801	1.353.825	100,52
Pengelolaan Struktur Modal Capital Structure Management			Dipenuhi melalui pendanaan sendiri Fulfilled through self-funding

Hingga akhir Desember 2025, kinerja produksi mencatatkan capaian yang solid dan melampaui ekspektasi. Peningkatan arus kendaraan mencerminkan peningkatan kepercayaan pengguna jasa terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Aktivitas Completely Built Up (CBU) Internasional menjadi penggerak utama dengan volume mencapai 549.275 unit, tumbuh 24,85% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 dan melampaui RKAP sebesar 23%. Peningkatan signifikan ini dipicu oleh meningkatnya ekspor kendaraan dari principal Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang menjadikan terminal satelit sebagai titik muat reguler menuju pasar Asia Tenggara dan Timur Tengah.

Through the end of December 2025, production performance recorded solid results and exceeded expectations. The increase in vehicle traffic reflects growing customer confidence in the quality of service provided. International Completely Built-Up (CBU) activities were the main driver, with a volume of 549,275 units, a 24.85% increase compared to the same period in 2024 and exceeding the budget by 23%. This significant increase was driven by rising vehicle exports from Japanese, South Korean, and Chinese manufacturers, which have established the satellite terminal as a regular loading point for markets in Southeast Asia and the Middle East.

Dari sisi keuangan, kinerja pendapatan hingga Desember 2025 menorehkan hasil yang patut diapresiasi. Total pendapatan tercatat sebesar Rp929,96 miliar, meningkat 12,78% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp824,60 miliar dan melampaui RKAP sebesar 9,48%. Kinerja ini menunjukkan efektivitas strategi Perseroan dalam mengonversi aktivitas operasional menjadi pertumbuhan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Segmen CBU Internasional tetap menjadi kontributor utama dengan pendapatan mencapai Rp697,66 miliar, tumbuh 13,70% dibanding tahun lalu.

Sementara itu, kontribusi signifikan juga datang dari pendapatan Miscellaneous yang mencakup kerja sama pengelolaan Vehicle Distribution Center (VDC) bersama PT Suzuki Indomobil Motor dan PT Glovis, serta management fee atas pengelolaan terminal di Balikpapan dan Banjarmasin dengan subholding PT Multi Terminal Indonesia (SPMT). Pendapatan pada segmen ini mencapai Rp43,15 miliar, jauh di atas RKAP yang sebesar Rp27,25 miliar. Kinerja ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam memanfaatkan peluang bisnis non-core untuk memperkuat posisi keuangan tanpa menambah beban operasional yang signifikan.

Keberhasilan Perseroan hingga hingga akhir tahun 2025 bukan hanya sekadar pencapaian angka, tetapi juga mencerminkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar. Implementasi sistem digitalisasi operasional, peningkatan kualitas layanan, dan sinergi antar terminal menjadi faktor utama yang mendorong kinerja ini. Hasilnya, IPCC kini tidak hanya berperan sebagai simpul logistik regional, tetapi juga sebagai wajah efisiensi dan daya saing Perseroan di tingkat nasional dan internasional.

From a financial perspective, revenue performance through December 2025 has achieved commendable results. Total revenue stood at Rp929.96 billion, an increase of 12.78% compared to the Rp824.60 billion realized in the same period of 2024 and exceeding the budget by 9.48%. This performance demonstrates the effectiveness of the Company's strategy in converting operational activities into sustainable economic growth. The International CBU segment remains the primary contributor, with revenue reaching Rp697.66 billion, a 13.70% increase compared to last year.

Meanwhile, a significant contribution also came from Miscellaneous revenue, which includes the joint management of the Vehicle Distribution Center (VDC) with PT Suzuki Indomobil Motor and PT Glovis, as well as management fees for the operation of terminals in Balikpapan and Banjarmasin through the subholding PT Multi Terminal Indonesia (SPMT). Revenue in this segment reached Rp43.15 billion, far exceeding the budgeted figure of Rp27.25 billion. This performance reflects the Company's success in leveraging non-core business opportunities to strengthen its financial position without significantly increasing operational costs.

The Company's success through the end of 2025 is not merely about achieving numbers but also reflects the organization's ability to adapt to market changes. The implementation of operational digitalization systems, improvements in service quality, and synergy among terminals are the key factors driving this performance. As a result, IPCC now serves not only as a regional logistics hub but also as a symbol of the Company's efficiency and competitiveness at the national and international levels.

Kebijakan Dividen dan Pembagiannya
Dividend Policy and the Distribution

Kebijakan Dasar tentang Pembagian Dividen

Kebijakan dividen yang diterapkan di Perseroan mengacu pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana pembagian dividen disetujui dan ditetapkan oleh pemegang saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jumlah dividen yang dibagikan senantiasa memperhatikan sejumlah aspek, di antaranya tingkat kesehatan keuangan, kecukupan modal, dan kebutuhan pendanaan untuk ekspansi bisnis. Manajemen Perseroan mengajukan usulan laba bersih setelah pajak untuk dividen kepada Pemegang Saham yang akan disetujui dalam RUPS.

Dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2018, disebutkan bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham dengan nilai sekurang-kurangnya 30,0% dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Pembagian Dividen yang Dilakukan di Tahun 2025 dan Kronologis Pembagian Dividen

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 17 Juni 2025, pemegang saham menetapkan penggunaan Laba Bersih/Laba Tahun Berjalan IPCC tahun buku 2024 sebesar Rp212.216.226.998,00 sebagai berikut:

1. Sebesar 0,94% atau Rp2.000.000.000,00 akan dialokasikan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi Pasal 70 ayat (1) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar 80% atau Rp169.772.981.599,00 dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari masing masing pemegang saham, di mana sebesar Rp44.407.321.204,65 atau sebesar Rp24,4213 per lembar saham telah dibagikan sebagai dividen interim sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan sebesar Rp125.365.660.394,10 atau sebesar Rp68,9434 per lembar saham, sehingga jumlah dividen per lembar saham menjadi sebesar Rp93,3647.
3. Sisanya sebesar Rp40.443.245.400,00 atau sebesar 19,06% akan digunakan sebagai laba ditahan.

Menindaklanjuti hasil keputusan RUPS tersebut, Perusahaan telah membayarkan dividen untuk hasil usaha tahun 2024 dengan jumlah sebesar Rp169.772.981.599,00 yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Dividen Interim dibayarkan pada tanggal 19 dan 30 Desember 2024, dan Dividen Final yang dibayarkan pada tanggal 7 dan 15 Juli 2025.

Basic Policy on Dividend Distribution

The dividend policy implemented in the Company refers to Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in which the distribution of dividends is approved and determined by shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS). The amount of dividends distributed at all times shall consider a number of aspects, including the level of financial health, capital adequacy and funding needs for business expansion. The Company's Management submits a proposal for net profit after tax for dividends to Shareholders which will be approved at the GMS.

In the Company's Initial Public Offering prospectus published on July 2, 2018, it is stated that after this Initial Public Offering, the Board of Directors plans to distribute cash dividends to shareholders with a value of at least 30.0% of the net profit for the relevant fiscal year, starting from 2019 based on net profit for the 2018 fiscal year, taking into account the decisions of shareholders at the GMS. If the GMS approves the distribution of dividends, then the dividends will be distributed to all shareholders registered on the date of the list of shareholders entitled to dividends, considering the income tax and withholding taxes in accordance with applicable regulations, if any. The Board of Directors can make changes to the dividend policy at any time, subject to approval from shareholders through the GMS.

Dividend Distribution in 2025 and Chronology of Dividend Distribution

Pursuant to the Annual GMS held on 17 June 2025, the shareholders determined the appropriation of IPCC's Net Profit/ Profit for the Year of 2024 fiscal year amounting to Rp212,216,226,998.00 as follows:

1. An amount of 0.94% or Rp2,000,000,000.00 will be allocated as mandatory reserve to comply with Article 70 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. An amount of 80% or Rp169,772,981,599.00 will be distributed as dividends to shareholders in proportion to their respective share ownership, of which Rp44,407,321,204.65 or Rp24.4213 per share has been distributed as interim dividend. The remaining amount in the form of final dividend to be distributed is Rp125,365,660,394.10 or Rp68.9434 per share, resulting in a total dividend of Rp93.3647 per share.
3. The remaining Rp40,443,245,400.00 or 19.06% will be retained as retained earnings.

Following the resolution of the GMS, the Company has distributed dividends for the 2024 fiscal year totaling Rp169,772,981,599.00, which were paid in two stages: interim dividends paid on December 19 and 30, 2024, and final dividends paid on July 7 and 15, 2025.

Kronologis pembagian dan pembayaran Dividen tahun 2021 hingga 2025 adalah sebagai berikut:

The chronology of dividend distribution and payment for the years 2021 to 2025 is as follows:

Pembagian Dividen Tahun 2021-2025
Dividend Distribution for 2021-2025

Tahun Pembagian Dividend Year	Tahun Dividen Distribution Year	Tanggal Pengumuman Announcement Date	Tanggal Pembayaran Payment Date	Dividen Kas yang Dibagikan (Rp-juta) Cash Dividend Distributed (Rp-million)	Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham) Dividend per Share (Rp/share)	Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Distribution Ratio (%)
2025	2025 (interim)	24 Desember 2025 December 24, 2025	7 Januari 2026 January 7, 2026	47.574	26,16	25,00
	2024	17 Juni 2025 June 17, 2025	7 dan 15 Juli 2025 July 7 and 15, 2025	125.366	68,94	59,07
2024	2024 (interim)	25 November 2024 November 25, 2024	19 dan 30 Desember 2024 December 19 and 30, 2024	44.407	24,42	20,93
	2023	10 Juni 2024 June 10, 2024	8, 10, dan 11 Juli 2024 July 8, 10, and 11, 2024	113.447	62,39	59,44
2023	2023 (interim)	14 Desember 2023 December 14, 2023	10 Januari, 1 Maret, dan 11 Juni 2024 January 10, March 1, and June 11, 2024	39.459	21,70	20,56
	2022	27 Juni 2023 June 27, 2023	26 dan 27 Juli 2023 July 26 and 27, 2023	90.499	49,77	55,96
2022	2022 (interim)	16 Desember 2022 December 16, 2022	13 Januari, 31 Maret, dan 31 Juli 2023 January 13, March 31, and July 31, 2023	22.708	12,49	14,04
	2021	30 Juni 2022 June 30, 2022	3, 29, dan 30 Agustus 2022 August 3, 29, and 30, 2022	42.039	23,12	70,00
2021	2020	14 Juni 2021 June 14, 2021	IPCC tidak membagikan dividen sesuai hasil keputusan RUPS IPCC did not distribute dividends according to the GMS resolution			

Tren Pembayaran Dividen Periode 2021-2025
Dividend Payment Trends for the 2021-2025 Period

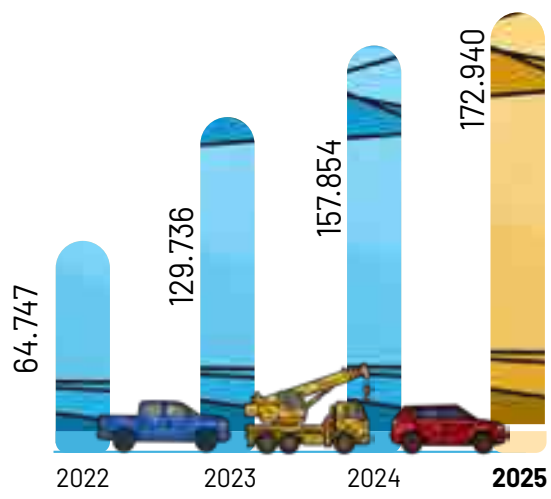

Keterangan: Pembayaran dividen termasuk pembayaran dividen interim untuk tahun dividen berikutnya.
Note: Dividend payments include interim dividend payments for the following dividend year.

Kontribusi Kepada Negara
Contribution to the Nation

Pembayaran Pajak kepada Negara

Sebagai wajib pajak dan pemotong pajak, Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai Wajib Pajak, Perusahaan melakukan pembayaran PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara tepat waktu. Komitmen ini sekaligus menjadi bentuk konkret Perseroan dalam berkontribusi bagi pendapatan negara.

Sebagai wajib pajak dan pemotong pajak, Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai Wajib Pajak, Perusahaan melakukan pembayaran PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara tepat waktu. Komitmen ini sekaligus menjadi bentuk konkret Perseroan dalam berkontribusi bagi pendapatan negara.

Hingga akhir 2025, kontribusi Perseroan kepada negara melalui setoran pajak sebesar Rp140,04 miliar, mengalami kenaikan 39,07% atau setara Rp39,34 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp100,70 miliar.

Berikut ini adalah setoran pajak yang sudah dibayarkan Perseroan kepada negara dalam kurun tiga tahun terakhir, yaitu:

Tax Payments to the Nation

As a taxpayer and tax withholder, the Company is committed to carrying out all its tax obligations with full responsibility. As a Taxpayer, the Company pays Corporate Income Tax, Value Added Tax (VAT), Land and Building Tax (PBB) in a timely manner. This commitment is also a concrete form of the Company's contribution to the nation's revenues.

As a taxpayer and tax withholder, the Company is committed to carrying out all its tax obligations with full responsibility. As a Taxpayer, the Company pays Corporate Income Tax, Value Added Tax (VAT), Land and Building Tax (PBB) in a timely manner. This commitment is also a concrete form of the Company's contribution to the nation's revenues.

By the end of 2025, the Company's contribution to the state through tax payments amounted to Rp140.04 billion, an increase of 39.07% or equivalent to Rp39.34 billion compared to the previous year at Rp100.70 billion.

The following are the tax payments that the Company has paid to the nation in the last three years:

Setoran Pajak Tahun 2024-2025
Tax Payments in 2023-2025

	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease) 2024-2025		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Pesentase Percentage (%)	
Pajak Penghasilan Income Tax					
PPh 21 Income Tax 21	**13.350**	16.377	(3.027)	(18,48)	↓
PPh 23 Income Tax 23	**4.938**	3.966	972	24,51	↑
PPh 25 Income Tax 25	**51.486**	36.213	15.273	42,18	↑
PPh 4 (2) Income Tax 4 (2)	**2.806**	1.235	1.571	127,21	↑
Jumlah Setoran Pajak Penghasilan Amount of Income Tax Payments	**1.311**	771	540	70,04	↑
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Value Added Tax (VAT)	**73.891**	58.562	15.329	26,18	↑

Setoran Pajak Tahun 2024-2025
Tax Payments in 2023-2025

	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease) 2024-2025		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Pesentase Percentage (%)	
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Land and Building Tax (PBB)	57.906	34.463	23.443	68,02	↑
Jumlah Setoran Pajak Total Tax Payments	8.244	7.671	573	7,47	↑
Pajak Penghasilan Income Tax	**140.041**	**100.696**	**39.345**	**39,07**	↑

Sementara sebagai pemotong pajak, Perseroan secara aktif berperan serta dalam melakukan pemotongan terhadap setiap objek kena pajak yang meliputi PPh Pasal 4 ayat 2; PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi; dan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan.

Meanwhile, as a tax withholder, the Company actively participates in making deductions for every taxable object, which includes Income Tax Article 4 paragraph 2; Income Tax Article 21 on income received by individual taxpayers; and Income Tax Article 23 on income received by corporate taxpayers.

Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak

Perseroan memiliki setoran kepada negara dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pembayaran konsesi atas pemanfaatan lahan terminal di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Berikut nilai PNBP yang disetorkan Perseroan dalam dua tahun terakhir.

Payment of Non-Tax Nation Revenue

The Company has a deposit to the nation in the form of Non-Tax Nation Revenue (PNBP) through concession payments for the use of terminal land in Cilincing area, North Jakarta. The following is the value of PNBP paid by the Company in the last two years.

Setoran PNBP Tahun 2024-2025
PNBP Payment in 2024-2025

Jenis PNBP Type of PNBP	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease) 2024-2025		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
PNBP Konsesi Concession PNBP	22.736	17.156	5.580	32,53	↑

Informasi tentang Tambahan Penanaman Modal Negara (PMN) dan Proyek Strategis Nasional atau Penugasan Lain

Information on Additional State Capital Investment (PMN) And National Strategic Projects or Other Assignments

IPCC tidak memiliki penugasan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) dan/atau penugasan lainnya. IPCC juga tidak mendapatkan tambahan Penanaman Modal Negara (PMN).

IPCC does not have any assignments related to National Strategic Projects (PSN) and/or other assignments IPCC also does not receive additional State Capital Investment (PMN).

Informasi tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Information on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering

Hasil dana dari Penawaran Umum saham yang dilakukan di tahun 2018 telah habis di tahun 2024 dan telah dilaporkan seluruhnya serta telah dipertanggungjawabkan pada RUPS tahun buku 2023 yang di selenggarakan di tahun 2024. Dengan demikian, di tahun 2025 IPCC tidak memiliki kewajiban terkait pemenuhan Peraturan OJK mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

The proceeds from the Public Offering of shares conducted in 2018 have been used up in 2024 and have been fully reported and accounted for at the 2023 fiscal year GMS held in 2024. Thus, in 2025 IPCC has no obligations related to fulfilling OJK Regulation regarding report on the realization of the use of proceeds from the public offering.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal, Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Material Information on Investments, Expansions, Divestments, Mergers, Acquisitions, and/or Debt/Capital Restructurings, Material Transactions, Affiliated Transactions, and Transactions Containing Conflicts of Interest

Tidak terdapat informasi material antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan yang terjadi di tahun 2025.

There is no material information regarding, among other things, investments, expansions, divestments, business mergers/amalgamations, acquisitions, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions that occurred in 2025.

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK 224: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak ketiga/tidak berelasi. Perseroan mengadopsi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, yang mempersyaratkan keterbukaan informasi dalam laporan tahunan terkait transaksi pihak berelasi/afiliasi. Seluruh transaksi yang ada telah memenuhi kepatuhan atas Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tersebut.

The Company engages in transactions with related parties as defined in PSAK 224: Related Party Disclosures. These transactions are conducted based on terms agreed upon by both parties, which may differ from other transactions conducted with third/unrelated parties. The Company adopts OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, which requires disclosure of information in the annual report regarding related/affiliated party transactions. All existing transactions have complied with OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020.

Informasi transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan telah diungkapkan secara rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) 24, Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025 yang dilampirkan pada Laporan Tahunan ini.

Information on affiliated transactions or material transactions that constitute business activities carried out in order to generate business income and are carried out routinely, repeatedly, and/or continuously has been disclosed in detail in the Notes to the Financial Statements (CALK) 24, Consolidated Financial Statements for 2025 attached to this Annual Report.

Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan mengedepankan pemenuhan peraturan perundang-undangan. Sampai dengan akhir periode pelaporan, Perseroan tidak pernah mendapatkan sanksi terkait dugaan ketidakwajaran atas transaksi yang terjadi maupun dugaan adanya benturan kepentingan.

All transactions with related parties conducted in strict compliance with prevailing laws and regulations. As of the end of the reporting period, the Company has not been subject to any sanctions related to alleged irregularities in such transactions or potential conflicts of interest.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

Throughout 2025, there was no financial information containing extraordinary and rare events.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Terhadap Perusahaan
Changes in Legislation that Affect the Company

Tidak terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang berpengaruh terhadap bisnis operasi Perseroan.

There are no changes in laws and regulations that affect the Company's business operations.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan

Accounting Policy Changes and the Impact for the Company

Perseroan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan Perseroan:

The Company applies for the first time all new and/or revised standards that are effective for periods beginning on or after January 1, 2025, including the following revised standards that affect the Company's financial statements:

Amendemen PSAK 221 : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran Amendment to PSAK 221: Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Exchangeability Shortfalls		
Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan Explanation of Changes in Accounting Policies Enacted	:	Amandemen tersebut menetapkan bagaimana entitas harus menilai apakah suatu mata uang dapat dipertukarkan serta bagaimana entitas harus menentukan kurs spot ketika ketertukaran *(exchangeability)* tidak tersedia. Amandemen tersebut juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana ketidakmampuan mata uang tersebut untuk dipertukarkan dengan mata uang lainnya memengaruhi, atau diharapkan akan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas. The amendments establish how an entity must assess the convertible nature of a currency and how it must determine the spot rate when convertible currency is unavailable. The amendments also require disclosure of information that enables users of financial statements to understand how the currency's inconversion affects, or is expected to affect, the entity's financial performance, financial position, and cash flows.
Dampak Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Perusahaan Quantitative and Qualitative Impact on the Company	:	Amandemen ini tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan Perseroan. These amendments do not have a material impact on the Company's financial statements.

PSAK 117: Kontrak Asuransi PSAK 117: Insurance Contracts		
Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan Explanation of Changes in Accounting Policies Enacted	:	PSAK 117 merupakan standar akuntansi baru yang komprehensif mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan untuk kontrak asuransi. PSAK 117 menggantikan PSAK 104: Kontrak Asuransi. PSAK 117 berlaku untuk seluruh jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan reasuransi), tanpa memandang jenis entitas yang menerbitkannya, serta berlaku pula untuk jenis garansi tertentu dan instrumen keuangan dengan fitur partisipasi diskresioner. PSAK 117 is a new, comprehensive accounting standard covering the recognition and measurement, presentation, and disclosure of insurance contracts. PSAK 117 replaces PSAK 104: Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts (namely, life, non-life, direct insurance, and reinsurance), regardless of the type of entity issuing them. It also applies to certain types of guarantees and financial instruments with discretionary participation features.
Dampak Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Perusahaan Quantitative and Qualitative Impact on the Company	:	Standar baru tersebut tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan Perseroan. The new standard does not have a material impact on the Company's financial statements.

Prospek Usaha Tahun 2026
Business Prospects For 2026

Kondisi geopolitik global yang sangat dinamis meliputi perang dagang Amerika dan China, konflik Timur Tengah di Selat Hormus yang meningkat, tren kenaikan harga minyak dunia diperkirakan akan memberikan tekanan terhadap aliran kargo IPCC. Namun, tren kenaikan penjualan kendaraan listrik dunia serta naiknya industri pertambangan memberikan potensi kenaikan kargo bagi IPCC. Penetrasi IPCC terhadap jasa di ekosistem logistik kendaraan akan memberikan *competitive advantage* dibandingkan para kompetitor.

The highly dynamic global geopolitical conditions, including the trade war between the United States and China, escalating conflicts in the Middle East in the Strait of Hormuz, and the upward trend in global oil prices, are expected to exert pressure on IPCC's cargo flows. However, the increasing global sales trend of electric vehicles and the growth of mining industry present potential cargo growth opportunities for IPCC. IPCC's penetration into services within the vehicle logistics ecosystem will provide a competitive advantage compared to its competitors.

Rencana Strategis dan Proyeksi Kinerja Perseroan Tahun 2026
Company Strategic Plan and Performance Projection for 2026

Proyeksi Tahun 2026 terhadap Realisasi Tahun 2025
2026 Projection against 2025 Realization

Perihal Description	Proyeksi Kinerja 2026 Performance Projection for 2026
Pertumbuhan *throughput* Throughput Growth	**4.6% s.d 6.3%**
Pendapatan Operasi Operating Revenue	**4.8% s.d 5.1%**
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	**6.5% s.d 8.8%**
Investasi Investment	**80% s.d 100%**
Pengelolaan Struktur Modal Capital Structure Management	**Dipenuhi melalui pendanaan sendiri** Fulfilled through self-funding
Pembayaran Dividen di Tahun 2026 (untuk Hasil Usaha tahun 2025) Dividend Payment in 2026 (for 2025 Operating Results)	**50%-80%**

IPCC masih melihat beberapa peluang bisnis pada tahun 2026 dan optimis dapat melanjutkan tren pertumbuhan operasi pada periode sebelumnya. Sebagai bagian dari rantai pasok industri khususnya dalam aktivitas produksi dan distribusi kendaraan, bisnis terminal kendaraan tidak bisa berdiri sendiri karena saling berkaitan dengan perkembangan berbagai industri di sekitarnya. Dengan pencapaian kinerja ekspor dan impor yang gemilang dari sektor otomotif, IPCC percaya kegiatan usaha akan terus menguat di tahun 2026. Dari sisi ekspor, IPCC meyakini kendaraan produksi dalam negeri masih diminati di negara tujuan. Namun, pertumbuhan dari ekspor dan impor mungkin tidak sesignifikan dibandingkan tahun lalu. Tidak hanya mengandalkan otomotif, IPCC juga memiliki peluang bisnis yang cukup besar dari pengiriman kendaraan berat yang biasanya digunakan oleh industri pertambangan, konstruksi, pertanian dan lainnya.

IPCC still sees several business opportunities in 2026 and is optimistic about continuing the operational growth trend of the previous period. As part of the industrial supply chain, particularly in vehicle production and distribution activities, the vehicle terminal business cannot stand alone because it is interconnected with the development of various surrounding industries. With the impressive export and import performance of the automotive sector, IPCC believes its business activities will continue to strengthen in 2026. In terms of exports, the IPCC is confident that domestically produced vehicles will still be in demand in destination countries. However, growth in exports and imports may not be as significant as last year. Beyond relying solely on the automotive sector, IPCC also sees significant business opportunities in the delivery of heavy vehicles typically used by the mining, construction, agriculture, and other industries.

Untuk mencapai target tahun 2026, IPCC akan melakukan peningkatan pada 5 (lima) poin penting, yaitu:

1. Penambahan kapasitas terminal. Untuk menyambut kenaikan *throughput* di masa depan IPCC akan mengupayakan menambah kapasitas terminal kendaraan baik dengan penambahan lahan, relayout atau membangun gedung penumpukan baru;
2. Menambah pelanggan dan market baru. Beberapa langkah komersial akan dilakukan IPCC untuk dapat melayani layanan *stevedoring* dan *cargodoring* secara langsung kepada c*argo owner*. Selain itu, IPCC akan meningkatkan layanan *PreDelivery Center* (PDC) dan masuk ke layanan transportasi darat. Melanjutkan dari program tahun lalu, IPCC pada tahun ini akan mengupayakan untuk ekspansi layanan terminal kendaraan di area lain;
3. Kerjasama dengan *strategic partner* (Global Co) Langkah ini diposisikan sebagai akselerator transformasi Perseroan dalam memperluas kapabilitas layanan, meningkatkan standar operasional berkelas dunia, serta membuka akses terhadap jaringan logistik internasional yang lebih luas. Strategi ini juga menjadi bagian dari upaya Perseroan dalam memperkuat posisi di dalam ekosistem logistik Pelindo Group, sekaligus meningkatkan daya saing di tengah tantangan geopolitik dan dinamika rantai pasok global. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berorientasi keberlanjutan, IPCC optimis dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan serta perekonomian nasional;
4. IPCC akan melanjutkan peningkatan layanan terminalnya melalui implementasi sistem operasi yang lebih optimal, yaitu PTOS-C. Sistem ini nantinya akan diimplementasikan di seluruh wilayah terminal kendaraan yang dikelola, termasuk di Terminal Satelit. Dengan sistem ini, seluruh aktivitas operasional dapat dilakukan monitoring dan perencanaannya secara terpusat melalui *intergrated planning and control* di *branch* jakarta. Pertukaran data dan integrasi layanan antar terminal kendaraan yang dikelola dapat diwujudlkan;
5. Peningkatan pendapatan melalui penyusunan kajian tarif dan implementasi di tahun 2026. Langkah ini dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan dinamika industri, proyeksi permintaan, struktur biaya operasional, serta benchmarking terhadap standar layanan sejenis di tingkat nasional maupun global. Keseimbangan antara kualitas layanan dan struktur biaya yang semakin kompleks, seiring pengembangan layanan terintegrasi seperti *Car Distribution Management* (CDM), *inland logistics*, dan *Pre Delivery Centre* (PDC). Dengan demikian, tarif yang diterapkan mencerminkan *value* yang diterima pelanggan, termasuk aspek keandalan, efisiensi, dan kepastian layanan *end-to-end*. IPCC optimis dapat meningkatkan kualitas pendapatan *(revenue quality),* memperkuat struktur keuangan, serta mendukung transformasi bisnis menuju penyedia solusi logistik kendaraan yang lebih terintegrasi, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah dinamika pasar global.

To achieve the 2026 targets, IPCC will make improvements to 5 (five) important points, namely:

1. Increasing terminal capacity. To accommodate future increases in throughput, the IPCC will seek to increase vehicle terminal capacity by adding land, constructing relays, or constructing new storage buildings.
2. Expanding new customers and markets. IPCC will undertake several commercial steps to provide stevedoring and cargodoring services directly to cargo owners. In addition, IPCC will enhance its Pre-Delivery Center (PDC) services and expand into land transportation. Continuing from last year's program, this year, IPCC will seek to expand its vehicle terminal services to other areas.
3. Collaboration with strategic partners (Global Co) This step is positioned as an accelerator of the Company's transformation in expanding service capabilities, improving world-class operational standards, and opening access to a wider international logistics network. This strategy is also part of the Company's efforts to strengthen its position within Pelindo Group logistics ecosystem, while increasing competitiveness amidst geopolitical challenges and global supply chain dynamics. With a collaborative and sustainability-oriented approach, IPCC is optimistic to be able to create greater added value, not only for the company, but also for all stakeholders and the national economy;
4. IPCC will continue to improve its terminal services through the implementation of more optimal operating system, namely PTOS-C. This system will be implemented in all managed vehicle terminal areas, including the Satellite Terminal. With this system, all operational activities can be monitored and planned centrally through integrated planning and control at Jakarta branch. Data exchange and service integration between managed vehicle terminals can be realized;
5. Increase revenue through the preparation of tariff studies and implementation in 2026. This step is carried out comprehensively by considering industry dynamics, demand projections, operational cost structures, and benchmarking against similar service standards at the national and global levels. The balance between service quality and cost structures is increasingly complex, along with the development of integrated services such as Car Distribution Management (CDM), inland logistics, and Pre-Delivery Centers (PDC). Thus, the applied tariffs reflect the value received by customers, including aspects of reliability, efficiency, and end-to-end service certainty. IPCC is optimistic that it can improve revenue quality, strengthen the financial structure, and support business transformation towards a more integrated, competitive, and sustainable vehicle logistics solution provider amidst global market dynamics.

Peta Jalan Usaha 2025-2029
Business Roadmap 2025-2029

Sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang Pengelola Terminal Kendaraan, IPCC menyadari peran strategisnya sebagai pintu utama ekspor dan impor kendaraan di Indonesia yang dikelola melalui layanan Terminal Kendaraan. Spesifikasi dan spesialisasi kegiatan usaha IPCC telah menciptakan peluang untuk menjadikan IPCC sebagai pengelola Terminal Kendaraan berkelas dunia. Hal ini sejalan dengan Visi IPCC di 2025, yaitu menjadi "Menjadi Pemimpin Ekosistem Logistik Kendaraan". Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, IPCC memiliki pilar sebagaimana tercantum dalam Rencana Jangka Panjang IPCC periode 2025-2029, antara lain sebagai berikut:

As one of the companies in Indonesia engaged in Vehicle Terminal Management, IPCC realizes its strategic role as the main gateway for vehicle exports and imports in Indonesia, which are managed through the Vehicle Terminal services. The specifications and specialization of IPCC's business activities have created opportunities to make IPCC a world class Vehicle Terminal manager. This is in line with IPCC's Vision in 2025, which is to become the "Car Terminal Connectivity Champion". To support the achievement of its vision, IPCC has pillars as stated in IPCC Long-Term Plan for 2025-2029 period, as follows:

Rumah Strategi IPCC
IPCC Strategy Framework

Visi | Vision

Menjadi Pemimpin Ekosistem Logistik Kendaraan
To Be a Leader in the Vehicle Logistics Ecosystem

Memberikan Layanan Terintegrasi Dalam Ekosistem Logistik Kendaraan yang Menciptakan Nilai Tambah Bagi Para Pelanggan dan Pemangku Kepentingan
To Provide Integrated Services Within the Vehicle Logistics Ecosystem That Create Added Value for Customers and Stakeholders

Pilar Strategis
Strategic Pillars

Standardisasi Operasional & Peningkatan Komersial
Operational Standardization & Commercial Enhancement

- Standardisasi, sistemasi, dan integrasi operasional Terminal Kendaraan
- Integrasi antar terminal kendaraan untuk meningkatkan model konektivitas dengan konsolidasi data
- Optimalisasi skema komersial dengan mitra
- Standardization, systematization, and integration of vehicle terminal operations
- Integration among vehicle terminals to enhance connectivity models through data consolidation
- Optimization of commercial schemes with partners

Membangun Kemitraan, Sinergi dan Konektivitas
Optimization of commercial schemes with partners

- Layanan terminal kendaraan tambahan & ekspansi bisnis
- Additional vehicle terminal services & business expansion

Penataan Struktur Korporasi dan Bisnis
Corporate and Business Structure Reorganization

- Layanan terminal kendaraan tambahan & ekspansi bisnis
- Reorganization and optimization of the business model (Corporate Structure)

Enabler
Enablers

- Governance, Risk, and Compliance (GRC)
- Implementasi kebijakan Environmental, Social, dan Governance (ESG)
- Penguatan branding perusahaan dan komunikasi
- Peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM
- Implementasi layanan berbasis IT yang terintegrasi untuk mendukung ekosistem logistik terminal kendaraan

- Governance, Risk, and Compliance (GRC)
- Implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) policies
- Strengthening corporate branding and communication
- Enhancing HR competencies and capabilities
- Implementation of integrated IT-based services to support the vehicle terminal logistics ecosystem

Pada Rumah Strategi RJPP periode 2025-2029, misi Perseroan adalah Sebagai operator terminal kendaraan yang menciptakan nilai tambah dan pangsa pasar. Dalam Rumah Strategi tersebut terdapat 3 (tiga) *strategic pillars* yaitu:

1. Standardisasi Operasional & Peningkatan Komersial; dan
2. Membangun Kemitraan, Sinergi dan Konektivitas.
3. Penataan Struktur Korporasi dan Bisnis

Sedangkan pencapaian strategi tersebut dapat tercapai dengan adanya 5 (lima) *enablers*, yaitu:

1. *Governance, Risk, dan Compliance* (GRC);
2. Implementasi kebijakan *Environmental, Social* dan *Governance* (ESG);
3. Penguatan *branding* perusahaan dan komunikasi;
4. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM;
5. Implementasi layanan berbasis IT yang terintegrasi untuk mendukung Ekosistem Logistik Terminal Kendaraan.

Tema tahun 2025 IPCC adalah *Vehicle Logistic Ecosystem* di mana pada tahun ini IPCC diharapkan mampu mulai merangkai layanan distribusi kendaraan di dalam ekosistem logistik. Namun, seiring dengan dinamika pasar, IPCC juga menargetkan dapat meningkatkan layanan dan kapasitas terminal kendaraan yang dikelola. Beberapa yang menjadi area fokus utama pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Standardisasi, sistemasi, dan integrasi operasional terminal kendaraan;
2. Integrasi antar terminal kendaraan untuk meningkatkan model konektivitas dengan konsolidasi data;
3. Optimalisasi skema komersial dengan mitra;
4. Layanan terminal kendaraan tambahan dan ekspansi bisnis; dan
5. Penataan dan Optimalisasi model bisnis (Struktur Korporasi).

In the 2025-2029 RJPP Strategic Plan, the Company's mission is to be a vehicle terminal operator that creates added value and market share. This Strategic Plan includes three strategic pillars:

1. Operational Standardization & Commercial Improvement; and
2. Building Partnerships, Synergy, and Connectivity.
3. Corporate and Business Structural Restructuring.

This strategy can be achieved through the presence of five enablers:

1. Governance, Risk, and Compliance (GRC);
2. Implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) policies;
3. Strengthening corporate branding and communications;
4. Improving human resource competencies and capabilities;
5. Implementing integrated IT-based services to support the Vehicle Terminal Logistics Ecosystem.

IPCC's 2025 theme is Vehicle Logistics Ecosystem. This year, IPCC is expected to begin integrating vehicle distribution services within the logistics ecosystem. However, in line with market dynamics, IPCC also aims to increase the services and capacity of the vehicle terminals being managed. Some of the key focus areas for 2025 are as follows:

1. Standardization, systematization, and integration of vehicle terminal operations;
2. Integration between vehicle terminals to improve connectivity models through data consolidation;
3. Optimization of commercial schemes with partners;
4. Additional vehicle terminal services and business expansion; and
5. Structuring and Optimizing Business Models (Corporate Structure).

PELINDO
MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN

06

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Komitmen IPCC terhadap penerapan tata kelola secara konsisten berhasil meraih pengakuan di tingkat nasional maupun kawasan ASEAN, mencerminkan integritas dan profesionalisme Perseroan dalam setiap aspek pengelolaan usaha.
IPCC's consistent commitment to implementing good corporate governance has earned recognition at both the national and ASEAN levels, reflecting the Company's integrity and professionalism across all aspects of its business management.




PELINDO
PELINDO

Pencapaian Terbaik Praktik Tata Kelola Tahun 2025
Best Governance Practices Achievement 2025

Juara 2 Annual Report Award (ARA) 2024
2nd Winner Of The Annual Report Award (ARA) 2024
Kategori BUMN, Klaster Pendapatan
sampai dengan Rp1 Triliun
Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG)
State-Owned Enterprises Category,
Revenue Cluster up to Rp1 Trillion
National Governance Policy Committee (KNKG)

Jakarta, 8 Desember 2025
Jakarta, December 8, 2025

Skor Risk Management Index (RMI)
Risk Management Index (RMI) Score

2,71

Evaluasi Implementasi GCG
Evaluation of GCG Implementation

ACGS

Skor Assessment GCG ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS)
GCG Assessment Score ASEAN Corporate Governance Scorecard **(ACGS)**

115,89
"Leadership in Corporate Governance (ASEAN Asset Class

KNKG

Assesmen PUGKI Tahun 2025
2025 PUGKI Assesment

Apply 66
Explain 8
N/A 7

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

Surat Edaran OJK No.32 Tahun 2015
OJK Circular No.32 of 2015

Apply 19
Explain 6

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan secara Berkelanjutan

Commitment to The Implementation of Sustainable Corporate Governance



Sebagai emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) (GCG) sebagai aspek fundamental dalam menjaga kepercayaan Pemegang Saham. Penerapan GCG menjadi tolok ukur penting untuk menilai kualitas pengelolaan Perseroan, sekaligus memberikan keyakinan bahwa kegiatan usaha dijalankan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga kepentingan Pemegang Saham terlindungi secara optimal.

Perseroan menempatkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan. Perseroan meyakini bahwa tata kelola yang kuat akan mendorong peningkatan kinerja melalui pengelolaan yang lebih efisien dan efektif, serta mendukung keberlanjutan usaha. Dengan demikian, penerapan GCG diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan bagi Pemegang Saham, Pegawai, dan seluruh pemangku kepentingan, baik dalam perspektif jangka pendek maupun jangka panjang.

Sebagai upaya memastikan implementasi GCG berjalan secara menyeluruh dan konsisten di seluruh organisasi, Perseroan mengacu pada praktik terbaik yang diakui secara internasional, antara lain ASEAN *Corporate Governance Scorecard*, pedoman nasional yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi melalui Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Selain itu, sebagai bagian dari entitas tidak langsung Badan Usaha Milik Negara melalui PT Pelindo Multi Terminal, Perseroan juga mematuhi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Penting Badan Usaha Milik Negara.

As a Company listed on the Indonesia Stock Exchange, the Company regards Good Corporate Governance (GCG) as a fundamental aspect of maintaining shareholder's trust. The implementation of GCG serves as a key benchmark for assessing the quality of the Company's management, whilst also providing assurance that business activities are conducted in a professional, transparent and responsible manner, thereby ensuring that shareholders' interests are optimally protected.

The Company places GCG principles at the core of every decision-making process. The Company believes that strong governance will drive performance improvement through more efficient and effective management, whilst supporting business sustainability. Consequently, GCG implementation is expected to create sustainable added value for Shareholders, Employees, and all stakeholders, both in the short and long term.

To ensure the comprehensive and consistent implementation of GCG across the organization, IPCC refers to internationally recognized best practices, including the ASEAN Corporate Governance Scorecard, as well as national guidelines developed by the National Governance Policy Committee through the General Guidelines on Indonesian Corporate Governance. Furthermore, as an indirect subsidiary of a State-Owned Enterprise through PT Pelindo Multi Terminal, the Company also complies with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Tujuan Penerapan GCG

Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai elemen esensial yang mendukung keberlangsungan dan kualitas kinerja Perseroan. Atas dasar tersebut, Perseroan menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara terarah, konsisten, dan berkesinambungan, dalam menjalani kegiatan operasional. Penerapan GCG ini ditujukan untuk mencapai berbagai sasaran strategis Perseroan, antara lain:

1. Meningkatkan pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, efisien, serta mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi;
2. Meningkatkan *stakeholders' value* dengan memperhatikan kepentingan seluruh *Stakeholders*. Pemenuhan nilai kepentingan seluruh *stakeholders* (Pelanggan, Pekerja, Pemegang Saham, dan Masyarakat) dilakukan dengan membuat kebijakan yang meminimalkan biaya dan limbah sambil meningkatkan kualitas jasa, meningkatkan keterampilan dan kepuasan Pekerjanya dan berkontribusi terhadap pengembangan dan kesejahteraan Masyarakat;
3. Meningkatkan daya saing Perseroan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Landasan Penerapan GCG

Perseroan menjadikan berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai dasar dan pedoman guna memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berjalan sesuai ketentuan. Acuan tersebut digunakan untuk menjamin bahwa penerapan GCG dilaksanakan secara patuh, terstruktur, dan sejalan dengan kerangka hukum nasional, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
7. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); dan
8. ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.

Pendekatan Penerapan GCG

Perseroan mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik melalui sejumlah metode dan langkah strategis yang dirancang untuk memastikan prinsip-prinsip GCG dapat dijalankan secara efektif. Pendekatan tersebut menjadi kerangka dalam mengintegrasikan tata kelola ke dalam seluruh proses bisnis dan pengambilan keputusan Perseroan, yang meliputi:

Objectives of GCG Implementation

The Company regards Good Corporate Governance as an essential element underpinning the Company's sustainability and performance. On this basis, The Company reaffirms its commitment to implementing the principles of GCG in a focused, consistent and sustainable manner in the conduct of its operational activities. The implementation of GCG is aimed at achieving the Company's various strategic objectives, including:

1. Improve the Company's management in a professional, transparent, efficient manner, and encouraging the empowerment of functions and independence of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors;
2. Increase stakeholders' value by paying attention to the interests of all Stakeholders. Fulfillment of the interests of all stakeholders {Customers, Workers, Shareholders, and the Community) is carried out by making policies that minimize costs and waste while improving service quality, improving the skills and satisfaction of its Workers and contributing to the development and welfare of the Community;
3. Improving the Company's competitiveness nationally and internationally, thereby increasing market confidence that can encourage investment flows and sustainable national economic growth.

Basis of GCG Implementation

The Company uses the various regulations and laws in force in Indonesia as a basis and guide to ensure that Good Corporate Governance is implemented in accordance with the relevant provisions. These guidelines are used to ensure that the implementation of GCG is carried out in a compliant and structured manner, and in line with the national legal framework, including:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT);
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOE);
3. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Determination of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOE), as amended by Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012;
4. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines;
5. Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines;
6. Indonesian GCG Guidelines developed by the National Governance Policy Committee (KNKG);
7. Corporate Governance principles developed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); and
8. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

GCG Implementation Approach

The Company implements Good Corporate Governance through a number of methods and strategic measures designed to ensure that the GCG principles are effectively implemented. This approach serves as a framework for integrating governance into all of the Company's business processes and decision-making, including:

1. Perseroan sebagai institusi/emiten dalam memenuhi peraturan peraturan sebagai wujud etika bisnis. Pendekatan ini menempatkan Perseroan sebagai institusi/emiten dalam memenuhi peraturan-peraturan sebagai wujud etika bisnis. Penerapan ini mencakup 2 aspek, yaitu:
   a. Aspek legal normatif adalah aspek penerapan GCG yang bertujuan untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*), hal ini merupakan unsur *enforcement* dari tata kelola perusahaan.
   b. Aspek *corporate behavior* adalah semua kegiatan perusahaan yang diperlukan untuk mencapai target dan sasaran perusahaan. Pendekatan ini juga memandang bagaimana Perseroan berinteraksi dengan para Pemangku Kepentingan.
2. Perseroan dalam melakukan penerapan dan internalisasi prinsip prinsip GCG sebagai etika dan perilaku mendasar yang melekat pada setiap karyawan dan diterjemahkan dalam bentuk *code of conduct*.

Pendekatan ini menitikberatkan pada penilaian kesesuaian sikap dan tindakan karyawan Perseroan dengan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum, serta mencermati bagaimana karyawan menjalankan peran, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam aktivitas kerja sehari-hari.

1. The Company, as an institution/issuer, complies with regulations as a form of business ethics. This approach positions the Company as an institution/issuer committed to fulfilling regulatory requirements as an embodiment of ethical business conduct. The implementation covers two aspects:
   a. The legal-normative aspect refers to the implementation of GCG aimed at ensuring compliance with applicable laws and regulations (compliance), which serves as the enforcement element of Corporate governance.
   b. The Corporate behavior aspect includes all Company activities necessary to achieve its goals and objectives. This approach also considers how the Company engages with its stakeholders.
2. The Company implements and internalizes GCG principles as fundamental ethics and behaviors inherent in every employee, which are translated into a code of conduct.

This approach assesses how employees of the Company conduct aligns with the ethical standards prevailing in society and how they behave in carrying out their day-to-day duties and responsibilities.

Pendekatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance Approach



Penerapan Tata Kelola Perusahaan secara Berkelanjutan
Sustainable Implementation of Corporate Governance

Perseroan secara berkelanjutan melakukan berbagai langkah penyempurnaan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik guna mendukung pertumbuhan Perseroan yang berkesinambungan, tangguh, dan berdaya saing. Peningkatan kualitas GCG tersebut diarahkan untuk memastikan terciptanya nilai tambah yang optimal bagi Perseroan serta seluruh pemangku kepentingan. Rangkaian upaya tersebut digambarkan dalam bagan siklus peningkatan kualitas penerapan GCG di Perseroan sebagai berikut:

The Company is continuously implementing various measures to improve the implementation of Good Corporate Governance in order to support the Company's sustainable, resilient and competitive growth. These improvements in GCG are aimed at ensuring the creation of optimal added value for the Company and all stakeholders. These efforts are illustrated in the following cycle diagram for improving the GCG implementation at The Company:

Siklus Peningkatan Kualitas Penerapan GCG IPCC
IPCC GCG Implementation Quality Improvement Cycle

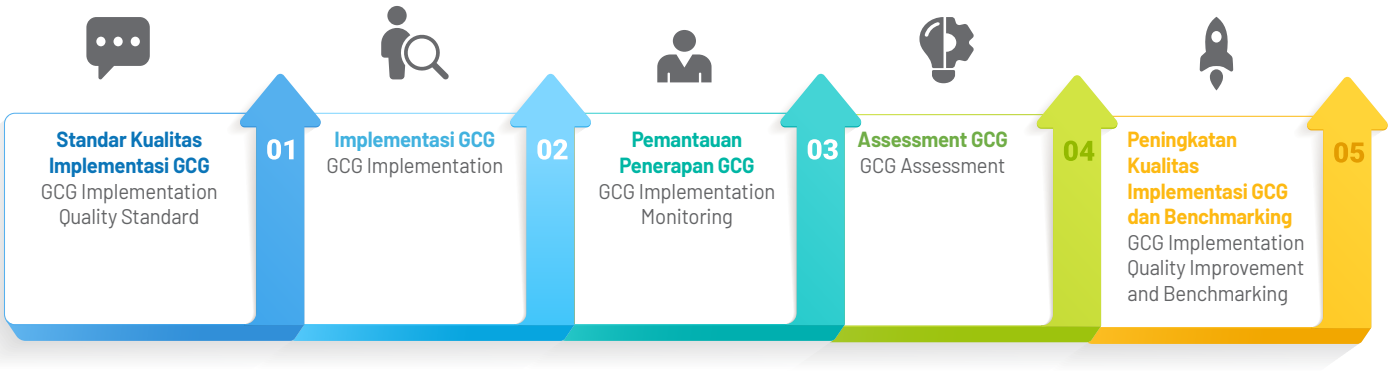

Berdasarkan ilustrasi pada bagan tersebut, siklus peningkatan mutu penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan dapat dipahami sebagai rangkaian tahapan yang saling berkaitan, yang mencakup:

1. Penetapan standar kualitas penerapan GCG;
2. Penerapan prinsip-prinsip GCG;
3. Pemantauan atau pengawasan penerapan GCG;
4. Pengukuran/penilaian penerapan GCG;
5. Peningkatan kualitas penerapan GCG dan *Benchmarking*.

Based on the illustration in the chart, IPCC's cycle for improving the implementation of good Corporate governance can be understood as a series of interrelated stages, comprising:

1. Determination of quality standards for GCG implementation;
2. Implementation of GCG principles;
3. Monitoring or supervision of GCG implementation;
4. Measurement/assessment of GCG implementation;
5. Improvement of GCG implementation quality and benchmarking.

Penetapan Standar Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan mengacu pada berbagai praktik dan standar terbaik yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional sebagai bagian dari upaya memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penerapan standar tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas GCG secara menyeluruh di lingkungan Perseroan, yang meliputi:

1. Peraturan perundang-undang Republik Indonesia, khususnya mengenai Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

Establishment of Quality Standards for Corporate Governance Implementation

The Company adheres to various best practices and standards recognized both nationally and internationally as part of its efforts to strengthen the implementation of Good Corporate Governance. The application of these standards is expected to drive an overall improvement in the quality of GCG within the the Company's, which includes:

1. Laws and regulations of the Republic of Indonesia, especially regarding Limited Liability Companies;
2. Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
3. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Capital of StateOwned Enterprises;

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan; dan
5. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* untuk *State Owned Company* yang dikembangkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD);
6. ASEAN *Corporate Governance Scorecard*;
7. Penerapan GCG dengan melihat indeks terkait tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
8. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang dikembangkan oleh KNKG tahun 2021.

Berdasarkan berbagai acuan-acuan, kemudian ditetapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kode Etik, serta beragam kebijakan dan pedoman lain yang berkaitan dengan implementasi GCG di lingkungan Perseroan.

Penerapan Prinsip-Prinsip GCG di IPCC

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 mengenai Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan. Pada tahun pelaporan ini, pelaksanaan GCG tersebut juga mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang dikembangkan oleh KNKG tahun 2021 serta standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* sebagai kerangka penilaian tata kelola Perseroan.

Penerapan Prinsip TARIFT

Berdasarkan arahan Pemegang Saham pengendali, IPCC mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan berpedoman pada 6 (enam) prinsip. Prinsip-prinsip tersebut meliputi *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness,* serta *Trusted,* yang secara ringkas dikenal dengan akronim TARIFT. Prinsip-prinsip GCG di IPCC

4. Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Implementing Corporate Governance;
5. Corporate Governance Principles for State Owned Companies developed by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD);
6. ASEAN Corporate Governance Scorecard;
7. GCG Implementation by looking at indices related to Corporate governance or the Corporate Governance Perception Index (CGPI).
8. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance developed by KNKG in 2021.

Based on various references, the Company has established Guidelines on Good Corporate Governance, a Code of Conduct, and a range of other policies and guidelines relating to the implementation of GCG within the Company.

Implementation of GCG Principles at IPCC

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) implements the Good Corporate Governance principles based on Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Guidelines on Corporate Governance for Public Companies and Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK. 04/2015 concerning Guidelines for Implementation of Corporate Governance. In the reporting year, GCG implementation also referred to the ASEAN Corporate Governance Scorecard standards as the framework for assessing the Company's governance.

TARIFT Principles Implementation

In accordance with the controlling shareholder's direction, IPCC implements Good Corporate Governance based on six principles. These principles include Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, and Trust, collectively known by the acronym TARIFT.

Prinsip-prinsip GCG di IPCC
GCG Principles at IPCC

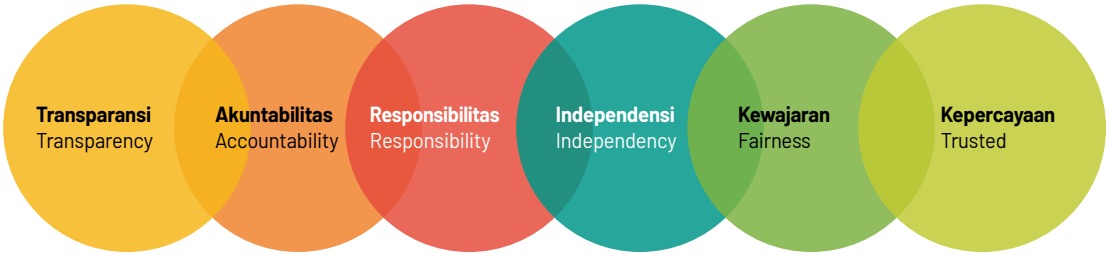

Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG di IPCC adalah sebagai berikut:
The implementation of GCG principles at IPCC is as follows:

Komitmen Commitment	Implementasi Implementation
Transparansi Transparency	
Perseroan menjamin keterbukaan informasi secara jelas dan akurat bagi para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai transparansi informasi perusahaan.	1. Pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan informasi lainnya secara jelas, memadai, akurat, dapat dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan. Semua informasi tersebut dapat diakses pada situs web Perseroan: www.indonesiacarterminal.co.id; 2. Menyampaikan pelaporan secara berkala kepada regulator yang mana hal ini merupakan bagian dari kepatuhan Perusahaan dalam hal transparansi informasi IPCC sebagai perusahaan terbuka. informasi tersebut dapat diakses pada situs web Bursa Efek Indonesia; 3. Mengadakan *Public Expose* Tahunan yang pada tahun ini telah dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2025; 4. Transparansi informasi yang dilakukan IPCC selalu memperhatikan kebijakan perlindungan terhadap informasi rahasia mengenai Perseroan dan Pelanggan serta Mitra Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
The Company guarantees the disclosure of clear and accurate information for Shareholders and Stakeholders, while still paying attention to applicable statutory provisions regarding transparency of Company information.	1. Disclosure of material and relevant information regarding performance, financial condition and other information in a clear, adequate, accurate, comparable and timely manner and easily accessible to Stakeholders. All this information can be accessed on the Company's website: www. indonesiacarterminal.co.id; 2. Submit regular reports to regulators, which is part of the Company's compliance with IPCC information transparency as a public Company. This information can be accessed on the Indonesian Stock Exchange website; 3. Holding an Annual Public Expose which this year was held on October 29, 2025; 4. Information transparency carried out by IPCC always pays attention to the policy of protecting confidential information regarding the Company, Customers and Work Partners in accordance with applicable laws and regulations.
Akuntabilitas Accountability	
Perseroan menetapkan pembagian fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban yang jelas dari masing-masing organ sehingga pengelolaan bisnis IPCC senantiasa dapat berjalan efektif dan efisien.	1. Masing-masing organ utama maupun organ pendukung IPCC menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* ataupun piagam yang telah disahkan; 2. Seluruh insan IPCC bekerja sesuai dengan kompetensi, kemampuan, dan keahlian yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi Perseroan; 3. Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pemegang Saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
The Company determines a clear division of functions, structures, systems and responsibilities for each organ so that IPCC business management can always run effectively and efficiently	1. Each main organ and supporting organs of IPCC carry out different duties and responsibilities as stated in the Board Manual or ratified charter; 2. All IPCC Personnel work in accordance with their competencies, abilities and expertise so that they can provide their best contribution to the Company; 3. Board of Commissioners and Board of Directors are accountable for their performance to Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS).
Tanggung Jawab Responsibility	
Pelaksanaan aktivitas operasional bisnis IPCC senantiasa mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	1. IPCC menjamin kesesuaian antara implementasi aktivitas bisnis sehari-hari dengan prinsip prinsip korporasi sehat dan ketentuan peraturan yang berlaku; 2. Perseroan selalu *update* mengikuti perkembangan regulasi terkini khususnya yang relevan dengan bisnis perusahaan dan regulasi pasar modal; 3. Perseroan mengikutsertakan karyawan di dalam kegiatan sosialisasi peraturan ataupun regulasi yang diselenggarakan oleh regulator; 4. Perseroan menjalankan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) secara berkesinambungan setiap tahunnya.
The Company determines a clear division of functions, structures, systems and responsibilities for each organ so that IPCC business management can always run effectively and efficiently.	1. IPCC guarantees conformity between the implementation of daily business activities with healthy Corporate principles and applicable regulatory provisions; 2. The Company is always updated following the latest regulatory developments, especially those relevant to the Company's business and capital market regulations; 3. The Company involves employees in the socialization of rules and regulations organized by the regulator; 4. The Company carries out Corporate Social Responsibility (CSR) programs and activities on an ongoing basis annually.
Independensi Independence	
Pengelolaan kegiatan usaha Perseroan dilakukan secara profesional dan mandiri serta bebas dari benturan kepentingan ataupun intervensi dari pihak-pihak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Dalam rangka menjamin independensi, IPCC memiliki Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan 2. Melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan pendukung GCG agar implementasi GCG di IPCC dapat sejalan dengan *best practice*.
The management of the Company's business activities is carried out professionally and independently and free from conflicts of interest or intervention from parties that are not in accordance with applicable laws and regulations.	1. In order to ensure independence, IPCC has an Audit Committee, Risk Management Committee and Nomination and Remuneration Committee to assist in carrying out the Board of Commissioners duties; and 2. Make improvements to GCG supporting policies so that GCG implementation at IPCC can be in line with best practice

Komitmen Commitment	Implementasi Implementation
Kewajaran Fairness	
Perseroan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The Company upholds the principles of justice and equality in fulfilling the rights of Stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations.	1. IPCC menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan; 2. IPCC berkomitmen untuk memperlakukan seluruh karyawan secara adil tanpa membeda bedakan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak terkait. 1. IPCC guarantees fair and equal treatment in fulfilling the rights of Stakeholders; 2. IPCC is committed to treating all employees fairly without discriminating against ethnicity, religion, origin, gender or other unrelated matters.
Tepercaya Trusted	
Perseroan mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh Pemangku Kepentingan. The Company has full trust and support from all Stakeholders.	Perseroan berkomitmen untuk memenuhi ekspektasi Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan sehingga Perseroan mendapatkan kepercayaan yang tercermin dari pengelolaan Perseroan berdasarkan sistem yang menjamin kualitas dan mutu yang berstandar internasional, diantaranya adalah ISO 9001: 2015 yang merupakan standar Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001: 2015 yang merupakan standar Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dan juga berdasarkan ISO 45001: 2018, serta ISO 37001: 2016 yang merupakan standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). The Company is committed to meeting the expectations of Shareholders and all stakeholders so that the Company gains trust reflected in the Company's management based on a system that guarantees quality and standards of international standards, including ISO 9001: 2015 the Quality Management System standard, ISO 14001: 2015 the Environmental Management System standard, Occupational Safety and Health Management System based on Government Regulation Number 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems and also based on ISO 45001: 2018, and ISO 37001: 2016 the Anti-Bribery Management System (SAMP) standard.

Pemantauan Penerapan GCG

Guna menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik berjalan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direksi Perseroan menetapkan penugasan khusus melalui Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: HK.01/11/6/2/SDMU/DIRUT/IKT-24 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kantor Pusat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Berdasarkan ketetapan tersebut, Sekretaris Perusahaan ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penerapan GCG di lingkungan Perseroan, termasuk pelaksanaan serta pemantauan kepatuhan terhadap etika kerja, etika bisnis, dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pengukuran/Penilaian Penerapan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*

Perseroan melaksanakan proses pengukuran, penilaian, dan evaluasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang mengacu pada ASEAN *Corporate Governance Scorecard* setiap tahun melalui mekanisme penilaian mandiri oleh internal Perseroan dengan pendampingan dari pihak independen. Pada tahun buku 2025, metode penilaian GCG yang digunakan mengacu pada parameter yang berlaku secara internasional, yaitu standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.

Tujuan Pengukuran/Penilaian

Selain untuk mengetahui sejauh mana efektivitas GCG diterapkan di lingkungan Perseroan, penilaian GCG juga dilakukan atas serangkaian tujuan, antara lain:

1. Menguji dan menilai penerapan GCG di Perseroan melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan dengan kondisi nyata yang diterapkan di Perseroan, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG;

Monitoring of GCG Implementation

To ensure the implementation of Good Corporate Governance principles is comprehensive, sustainable, and in accordance with applicable laws and regulations, the Company's Board of Directors has issued a special assignment via Board of Directors Decree of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.01/11/6/2/SDMU/DIRUT/IKT-24 regarding Organizational Structure and Governance of the Head Office of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Pursuant to this decree, Corporate Secretary has been appointed as the party responsible for the implementation of GCG within the Company, including the implementation and monitoring of compliance with work ethics, business ethics, and Good Corporate Governance practices.

GCG Measurement/Assessment

The Company carries out an annual measurement, assessment, and evaluation process for the implementation of Good Corporate Governance, referring to the ASEAN Corporate Governance Scorecard, through an internal self-assessment mechanism with assistance from an independent party. In the 2025 fiscal year, the GCG assessment method used will refer to internationally accepted parameters, namely the ASEAN Corporate Governance Scorecard standard.

Objectives of Measurement/Assessment

In addition to determining the extent to which GCG is effectively implemented within the Company, GCG assessments are also conducted for a number of objectives, including:

1. Examine and assess the implementation of GCG in the Company through the elaboration of GCG implementation conditions and with real conditions applied at the Company, through the provision of scores/values on GCG implementation and quality categories of GCG implementation;

2. Menilai kesenjangan (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG di Perseroan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah tersebut;
3. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di Perseroan sejalan dengan *best practices*;
4. Memantau konsistensi penerapan GCG di Perseroan dan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG di lingkungan Perseroan.

2. Assess the gap between GCG criteria and GCG implementation at the Company, and propose recommendations for improvement to reduce the gap;
3. Provide recommendations for improvements to the gaps found in the implementation of GCG at the Company in line with best practices;
4. Monitor the consistency of GCG implementation at the Company and obtain input for the improvement and development of GCG policies within the Company.

Skor *Assessment* IPCC 2025
IPCC Assessment Score for 2025

ACGS

115,89 poin 115.89 points

Leadership in Corporate Governance
(ASEAN Asset Class)

Assessment Penerapan GCG berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*
GCG Assessment based on ASEAN Corporate Governance Scorecard

Jenis Penilaian Type of Assessment	:	***Assessment*/Penilaian Independen/*Self Assessment*** *Assessment/Independent Assessment/Self-Assessment*
Pendamping Penilaian Appraiser	:	**PT Pratama Indomitra Konsultan**
Tahun Ukur Measurement Year	:	**2025**
Periode Penerapan Implementation Period	:	**1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025** January 1, 2025 to December 31, 2025
Tempat Pengukuran Venue	:	**Kantor Pusat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk** PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Head Office
Waktu Pengukuran Measurement Time	:	**20 Februari 2026 sampai dengan 27 Maret 2026** February 20, 2026 until March 27, 2026

Ruang lingkup penilaian ditetapkan dengan menelaah kinerja Perseroan dalam mengimplementasikan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana diungkapkan kepada publik pada tahun 2025. Evaluasi tersebut diarahkan pada sejumlah aspek utama dengan fokus pada:

1. Hak-hak dan perlakukan yang sama terhadap pemegang saham;
2. Keberlanjutan dan ketangguhan terkait dengan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST/ESG);
3. Pengungkapan dan transparansi; serta
4. Pertanggung jawaban Dewan (Direksi dan Dewan Komisaris).

The assessment scope is determined by reviewing the Company's performance in implementing Good Corporate Governance practices as disclosed to the public in 2025. The evaluation focuses on several key aspects, with a focus on:

1. Equal rights and treatment for shareholders;
2. Sustainability and resilience related to Environmental, Social and Governance (ESG);
3. Disclosure and transparency; and
4. Board Responsibility (Board of Directors and Board of Commissioners).

Skor Penilaian

Hasil penilaian mandiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan dengan mengacu pada ASEAN *Corporate Governance Scorecard* untuk tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Assessment Score

The results of self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance at the Company with reference to the ASEAN Corporate Governance Scorecard for 2025 can be described as follows:

Aspek Aspect	**Jumlah Item** Number of Items	**Jumlah N/A** Number of N/A	**Jumlah Parameter Setelah Dikurangi N/A** Number of Parameters After Deducting N/A	**Total Item Diterapkan** Total Items Applied	**Total Item Tidak Diterapkan** Total Items Not Applied	**Bobot** Weight	**Skor** Score
Prinsip A - Hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham Principle A - Rights and Equitable Treatment of Shareholders	30	2	28	27	1	20,00	19,29
Prinsip B - Keberlanjutan dan Ketahanan Principle B - Sustainability and Resilience	22	0	22	21	1	15,00	14,32
Prinsip C – Pengungkapan dan Transparansi Principle C – Disclosure and Transparency	34	0	34	34	0	25,00	25,00
Prinsip D – Tanggung Jawab Dewan Principle D – Responsibility of the Board	63	4	59	55	4	40,00	37,29
Jumlah Poin Tingkat 1 Total Point Level 1	149	6	143	137	6	100,00	95,89
Bonus Bonus	18	-	-	10	-	40	20
Penalti Penalty	26	-	-	0	-	0	0
Jumlah Poin Tingkat 2 Total Point Level 2	44	0	0	10	0	40	20
Jumlah Total Point Level 1 + Level 2	193	6	143	146	7	140	115,89

Skor akhir hasil penilaian mandiri ASEAN Corporate Governance Scorecard yang mencakup Level 1 dan Level 2 tercatat sebesar 115,89 poin, dengan demikian kinerja *corporate governance* Perseroan sudah masuk Level 5 yaitu kategori ***Leadership in Corporate Governance (ASEAN Asset Class).***

The final score for the ASEAN Corporate Governance Scorecard self-assessment, covering Level 1 and 2, was 115.89 points, thus placing the Company's corporate governance performance at Level 5, the Leadership in Corporate Governance category (ASEAN Asset Class).

Apabila dibandingkan dengan perolehan skor pada tahun 2024 sebesar 115,89, maka pada tahun pelaporan ini tercatat adanya peningkatan skor sebesar 5,37.

Compared to the 2024 score of 115.89, this reporting year saw a 5.37 increase.

Perkembangan Skor *Assessment* ACGS IPCC
Progress of IPCC ACGS Assessment Score

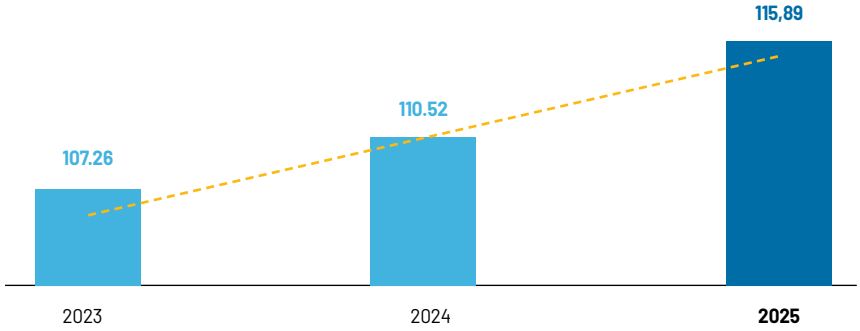

Berikut penilaian yang **Tidak Dapat Diterapkan atau Belum Diterapkan** oleh Perseroan:
The following assessments cannot be applied or have not been applied by the Company:

Item *Corporate* Governance Standards	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standards		Status Pemenuhan Compliance Status
LEVEL 1			
PRINSIP A PRINCIPLE A	**Hak-hak dan Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham** Rights and Equitable Treatment of Shareholders		
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham Basic Rights of Shareholders		
	A.1.1	Apakah perusahaan membayar dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; artinya, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) diumumkan untuk dividen interim dan (ii) disetujui oleh rapat umum pemegang saham untuk dividen final? Dalam hal perusahaan telah menawarkan dividen *Scrip*, apakah perusahaan membayar dividen tersebut dalam waktu 60 hari. Does the Company pay dividends (interim and final/annual) fairly and in a timely manner; meaning that all shareholders are treated equally and are paid within 30 days after (i) the interim dividend is declared and (ii) the final dividend is approved by the General Meeting of Shareholders? In the event that the Company has offered a scrip dividend, does the Company pay such dividend within 60 days?	Ya Yes
A.2	Hak Untuk Berpartisipasi Secara Efektif dan Memberikan Suara Dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan Harus Mengetahui Peraturan, termasuk Prosedur Pemungutan Suara, yang mengatur Rapat Umum Pemegang Saham The right to effectively participate and vote in the General Meeting of Shareholders, and to be informed of the regulations, including voting procedures, governing the General Meeting of Shareholders.		
	A.2.1	Apakah pemegang saham mempunyai kesempatan, yang dibuktikan dengan mata acara, untuk menyetujui remunerasi (*fee*, tunjangan, benefit natura, dan honorarium lainnya) atau kenaikan remunerasi bagi direktur/komisaris non-eksekutif? Do shareholders have the opportunity, as evidenced by the agenda, to approve remuneration (fees, allowances, benefits in kind, and other honoraria) or increases in remuneration for non-executive directors/commissioners?	Ya Yes
	A.2.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham non pengendali untuk mencalonkan calon direksi/komisaris? Does the Company grant non-controlling shareholders the right to nominate candidates for directors/ commissioners?	Ya Yes
	A.2.3	Apakah perusahaan memperbolehkan pemegang saham memilih direktur/komisaris secara individu? Does the Company allow shareholders to vote for directors/commissioners individually?	Ya Yes
	A.2.4	Apakah perusahaan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum rapat dimulai? Does the Company disclose the voting procedures to be used before the meeting begins?	Ya Yes
	A.2.5	Apakah risalah RUPS terakhir mencatat bahwa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan pemegang saham serta jawaban yang diberikan dicatat? Do the minutes of the most recent GMS record that shareholders were given the opportunity to ask questions, and that the questions raised and the responses provided were documented?	Ya Yes
	A.2.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk seluruh keputusan/setiap mata acara RUPS terkini? Does the Company disclose voting results, including votes for, against, and abstentions, for all resolutions/agenda items at the most recent GMS?	Ya Yes
	A.2.7	Apakah perusahaan mengungkapkan daftar anggota dewan yang menghadiri RUPS terakhir? Does the Company disclose the list of board members who attended the most recent GMS?	Ya Yes
	A.2.8	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa seluruh anggota dewan direksi dan CEO (jika dia bukan anggota dewan direksi) menghadiri RUPS terakhir? Does the Company disclose that all members of Board of Directors and the CEO (if not a board member) attended the most recent GMS?	Ya Yes
	A.2.9	Apakah perusahaan memperbolehkan pemungutan suara secara *in-absentia?* Does the Company allow in-absentia voting?	Ya Yes
	A.2.10	Apakah perusahaan memberikan suara melalui jajak pendapat (dan bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua resolusi pada RUPS terbaru? Does the Company conduct voting by poll (rather than by show of hands) for all resolutions at the most recent GMS?	Ya Yes
	A.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan telah menunjuk pihak independen (pemeriksa/ pemeriksa) untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara dalam RUPST? Does the Company disclose that it has appointed an independent party (scrutineer/auditor) to count and/ or validate votes at the Annual GMS?	Ya Yes

Item ***Corporate*** Governance Standards	**Standar Tata Kelola Perusahaan** Corporate Governance Standards		**Status Pemenuhan** Compliance Status
	A.2.12	Apakah perusahaan mengumumkan kepada publik pada hari kerja berikutnya hasil pemungutan suara pada RUPS/RUPSLB terkini untuk semua keputusan? Does the Company publicly announce the voting results on the next working day following the most recent GMS/EGMS for all resolutions?	Tidak No
	A.2.13	Apakah perusahaan memberikan pemberitahuan setidaknya 21 hari sebelumnya untuk semua RUPS dan RUPSLB? *Does the Company provide at least 21 days' notice for all GMS and EGMS?*	Ya Yes
	A.2.14	Apakah perseroan memberikan alasan dan penjelasan atas setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pemanggilan RUPS/surat edaran dan/atau pernyataan yang menyertainya? Does the Company provide reasons and explanations for each agenda item requiring shareholder approval in the GMS notice/circular and/or accompanying statement?	Ya Yes
	A.2.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memasukkan mata acara rapat umum dan/atau meminta diadakannya rapat umum dengan persentase tertentu? Does the Company provide shareholders with the opportunity to propose agenda items for the general meeting and/or request the convening of a general meeting with a specified ownership threshold?	Ya Yes
A.3	Pasar untuk Pengendalian Perusahaan Harus dibiarkan Berfungsi secara Efisien dan Transparan The market for corporate control must be allowed to function efficiently and transparently		
	A.3.1	Dalam hal merger, akuisisi, dan/atau pengambilalihan memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah Direksi/Komisaris perseroan menunjuk pihak independen untuk menilai kewajaran harga transaksi? In the case of mergers, acquisitions, and/or takeovers requiring shareholder approval, does the Company's Board of Directors/Board of Commissioners appoint an independent party to assess the fairness of the transaction price?	Ya Yes
A.4	Pelaksanaan Hak Kepemilikan oleh Seluruh Pemegang Saham, Termasuk Investor The exercise of ownership rights by all shareholders, including investors.		
	A.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktiknya untuk mendorong pemegang saham agar terlibat dengan perusahaan di luar rapat umum? Does the Company disclose its practices to encourage shareholders to engage with the Company outside of general meetings?	Ya Yes
A.5	Saham dan Hak Suara Shares and Voting Rights		
	A.5.1	Apabila perusahaan mempunyai lebih dari satu kelas saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak suara yang melekat pada masing-masing kelas saham tersebut (misalnya melalui *website* perusahaan/ laporan/bursa/website regulator)? If the company has more than one class of shares, does the company disclose the voting rights attached to each class of shares (for example, through the company's website, reports, stock exchange, or regulator's website)?	N/A
A.6	Pemanggilan RUPS Summons for GMS		
	A.6.1	Apakah setiap keputusan yang diambil pada rapat umum tahunan terakhir hanya membahas satu hal saja, yaitu tidak ada penggabungan beberapa hal menjadi satu keputusan yang sama? Does each resolution adopted at the most recent annual general meeting address only a single matter, i.e., are no multiple matters combined into one resolution?	Ya Yes
	A.6.2	Apakah pemberitahuan RUPS/surat edaran terbaru perusahaan sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa lokal? Is the company's latest notice of the GMS/circular letter fully translated into English and published on the same date as the local language version?	Ya Yes
	Apakah pemanggilan RUPS/surat edaran memuat rincian sebagai berikut: Does the summons for GMS/circular letter contain the following details:		
	A.6.3	Apakah profil direksi/komisaris (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal penunjukan pertama, pengalaman, dan jabatan direktur di emiten lain) yang ingin dipilih/dipilih kembali disertakan? Are the profiles of the directors/commissioners (at least including age, academic qualifications, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) who are to be elected/re-elected disclosed?	Ya Yes
	A.6.4	Apakah auditor yang ingin diangkat/diangkat kembali diidentifikasi dengan jelas? Is the auditor proposed for appointment/reappointment clearly identified?	Ya Yes
	A.6.5	Apakah dokumen proksi tersedia dengan mudah? Are proxy documents easily accessible?	Ya Yes

Item *Corporate* Governance Standards	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standards		Status Pemenuhan Compliance Status
A.7	Perdagangan Orang Dalam dan Transaksi Mandiri yang Bersifat Kekerasan Harus Dilarang Insider Trading and Abusive Self-Dealing Transactions Must Be Prohibited		
	A.7.1	Apakah direksi/komisaris wajib melaporkan transaksi saham perseroan dalam waktu 3 hari kerja? Are directors/commissioners required to report transactions in the company's shares within 3 working days?	Ya Yes
A.8	Transaksi Pihak Berelasi oleh Direktur dan Eksekutif Kunci Related Party Transactions by Directors and Key Executives		
	A.8.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan komite yang terdiri dari direktur/komisaris independen untuk meninjau materi RPT (transaksi dengan pihak yang terafiliasi) untuk menentukan apakah RPT tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan dan pemegang saham? Does the company have a policy requiring a committee consisting of independent directors/commissioners to review material RPTs (related party transactions) to determine whether such RPTs are in the best interests of the company and its shareholders?	Ya Yes
	A.8.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan anggota dewan (direktur/komisaris) untuk tidak ikut serta dalam diskusi dewan mengenai agenda tertentu jika ada konflik? Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in board discussions on specific agenda items in the event of a conflict of interest?	Ya Yes
	A.8.3	Apakah perusahaan mempunyai kebijakan mengenai pinjaman kepada direksi dan komisaris yang melarang praktik ini atau memastikan bahwa hal tersebut dilakukan secara wajar dan dengan harga pasar? Does the company have a policy regarding loans to directors and commissioners that either prohibits such practices or ensures that they are conducted on an arm's length basis and at market terms?	N/A
A.9	Melindungi Pemegang Saham Minoritas dari Tindakan Sewenang-Wenang Protecting Minority Shareholders from Arbitrary Actions		
	A.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa RPT dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa RPT tersebut adil dan wajar? Does the company disclose that RPTs are conducted in a manner that ensures they are fair and reasonable?	Ya Yes
	A.9.2	Dalam hal transaksi pihak berelasi memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan? In cases where related party transactions require shareholder approval, are decisions made by disinterested shareholders?	Ya Yes
PRINSIP B PRINCIPLE B	**Keberlanjutan dan Ketahanan** Sustainability and Resilience		
B.1	Pengungkapan Terkait Keberlanjutan Harus Konsisten, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Diandalkan, serta Mencakup Informasi Material yang Bersifat Retrospektif dan Berwawasan ke Depan yang Dianggap Penting oleh Investor Dalam Membuat Keputusan Investasi atau Pemungutan Suara Sustainability-Related Disclosures Must Be Consistent, Comparable, and Reliable, and Include Material Information, Both Retrospective and Forward-Looking, that Is Considered Important by Investors in Making Investment or Voting Decisions		
	Informasi penting terkait Keberlanjutan harus disebutkan Material Sustainability-Related Information Must Be Disclosed		
	B.1.1	Apakah perusahaan mengidentifikasi/melaporkan topik-topik ESG (*Environmental, Social, and Governance.*) yang penting bagi strategi organisasi? Does the company identify/report ESG (Environmental, Social, and Governance) topics that are material to the organization's strategy?	Ya Yes
	B.1.2	Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai sebuah isu? Does the company identify climate change as an issue?	Ya Yes
	B.1.3	Apakah perusahaan mengadopsi kerangka atau standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional (yaitu GRI, Pelaporan Terintegrasi, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS)? Does the company adopt internationally recognized sustainability reporting frameworks or standards (e.g., GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)?	Ya Yes
	Jika perusahaan secara publik menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka pengungkapan harus menyediakan metrik yang andal dan diungkapkan secara berkala dalam bentuk yang mudah diakses. If the company publicly sets sustainability goals or targets, the disclosure framework should provide reliable metrics and disclose them periodically in an easily accessible format.		
	B.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif? Does the company disclose quantitative sustainability targets?	Ya Yes

Item ***Corporate*** Governance Standards	**Standar Tata Kelola Perusahaan** Corporate Governance Standards		**Status Pemenuhan** Compliance Status
	B.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan sehubungan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya? Does the company disclose performance progress related to sustainability against previously set targets?	Ya Yes
	B.1.6	Apakah perusahaan memastikan bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporannya telah ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan? Does the company ensure that its Sustainability Report/Reporting has been reviewed and/or approved by the Board or a Board Committee?	Ya Yes
B.2	Kerangka Tata Kelola Perusahaan Harus Memungkinkan Terjadinya Dialog Antara Perusahaan, Pemegang Saham, dan Pemangku Kepentingan untuk Bertukar Pandangan Mengenai Masalah Keberlanjutan The Corporate Governance Framework Should Enable Dialogue Between the Company, Shareholders, and Stakeholders to Exchange Views on Sustainability Issues		
	B.2.1	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai permasalahan keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan? Does the company engage internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability issues that are material to the company's business?	Ya Yes
	B.2.2	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai permasalahan keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan? Does the company engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability issues that are material to the company's business?	Ya Yes
B.3	Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan Harus Memastikan Bahwa Dewan Direksi Secara Memadai Mempertimbangkan Risiko dan Peluang Keberlanjutan yang Material Ketika Memenuhi Fungsi Utama Mereka Dalam Meninjau, Memantau, dan Memandu Praktik Tata Kelola, Pengungkapan Informasi, Strategi, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Internal, Termasuk Sehubungan Dengan Risiko Fisik dan Transisi Risiko yang Berkaitan dengan Iklim The Corporate Governance Framework Should Ensure That the Board of Directors Adequately Considers Material Sustainability Risks and Opportunities in Fulfilling Its Key Functions of Reviewing, Monitoring, and Guiding Governance Practices, Disclosure, Strategy, Risk Management, and Internal Control Systems, Including Those Related to Physical and Transition Climate Risks		
	B.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa dewan melakukan peninjauan setiap tahun untuk memastikan struktur modal dan utang perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko yang terkait? Does the company disclose that the Board conducts an annual review to ensure that the company's capital and debt structure is aligned with its strategic objectives and related risk appetite?	Ya Yes
B.4	Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan Harus Mengakui Hak-Hak Pemangku Kepentingan yang Ditetapkan oleh Hukum atau Melalui Kesepakatan Bersama dan Mendorong Kerja Sama Aktif antara Perusahaan dan Pemangku Kepentingan dalam Menciptakan Kekayaan, Lapangan Kerja, dan Keberlanjutan Perusahaan yang Sehat Secara Finansial The Corporate Governance Framework Should Recognize Stakeholder Rights Established by Law or Through Mutual Agreements and Encourage Active Cooperation Between the Company and Stakeholders in Creating Wealth, Jobs, and the Financial Sustainability of the Company		
	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas: Does the company disclose policies and practices that address:		
	B.4.1	Keberadaan dan ruang lingkup upaya perusahaan dalam mengatasi kesejahteraan pelanggan? The existence and scope of the company's efforts to address customer welfare?	Ya Yes
	B.4.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor? Supplier/contractor selection procedures?	Ya Yes
	B.4.3	Upaya perusahaan untuk memastikan rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dengan mendorong pembangunan berkelanjutan? The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or aligned with promoting sustainable development?	Ya Yes
	B.4.4	Upaya perusahaan untuk berinteraksi dengan masyarakat di mana mereka beroperasi? The company's efforts to engage with the communities in which it operates?	Ya Yes
	B.4.5	Program dan prosedur antikorupsi perusahaan? The company's anti-corruption programs and procedures?	Ya Yes
	B.4.6	Bagaimana hak-hak kreditur dilindungi? How creditors' rights are protected?	Ya Yes
	B.4.7	Apakah Perusahaan mempunyai laporan/bagian terpisah yang membahas upayanya dalam isu lingkungan/ekonomi dan sosial? Does the company have a separate report or section that discusses its efforts on environmental, economic, and social issues?	Ya Yes

Item *Corporate* Governance Standards	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standards		Status Pemenuhan Compliance Status
B.5	Apabila Kepentingan Pemangku Kepentingan Dilindungi oleh Undang-Undang, Maka Pemangku Kepentingan Harus Mempunyai Kesempatan untuk Mendapatkan Ganti Rugi yang Efektif atas Pelanggaran Hak-Hak Mereka If Stakeholder Interests Are Protected by Law, Stakeholders Should Have the Opportunity to Obtain Effective Redress for Violation of Their Rights		
	B.5.1	Apakah perusahaan memberikan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyuarakan keprihatinan dan/atau keluhan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka? Does the company provide contact details through its website or Annual Report that stakeholders (e.g., customers, suppliers, the general public, etc.) can use to raise concerns and/or complaints regarding potential violations of their rights?	Ya Yes
B.6	Mekanisme Partisipasi Karyawan Harus Dibiarkan Berkembang Employee Participation Mechanisms Should Be Allowed to Develop		
	B.6.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawannya? Does the company explicitly disclose policies and practices regarding the health, safety, and welfare of its employees?	Ya Yes
	B.6.2	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya? Does the company explicitly disclose policies and practices on training and development programs for its employees?	Ya Yes
	B.6.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan di luar ukuran keuangan jangka pendek? Does the company have a reward/compensation policy that takes into account company performance beyond short-term financial measures?	Tidak No
B.7	Para Pemangku Kepentingan Termasuk Karyawan Perorangan dan Badan Perwakilan Mereka, Harus Dapat Secara Bebas Mengkomunikasikan Keprihatinan Mereka Tentang Praktik-Praktik Ilegal atau Tidak Etis Kepada Dewan Direksi dan Hak-Hak Mereka Tidak Boleh Dikompromikan untuk Melakukan Hal Ini Stakeholders, Including Individual Employees and Their Representative Bodies, Should Be Able to Freely Communicate Their Concerns About Illegal or Unethical Practices to the Board of Directors Without Compromising Their Rights to Do So.		
	B.7.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan *whistleblowing* yang mencakup tata cara pengaduan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau laporan tahunan Does the company have a whistleblowing policy that includes procedures for employees and other stakeholders to report suspected illegal or unethical behavior, and provides contact details through the company's website or Annual Report?	Ya Yes
	B.7.2	Apakah perusahaan mempunyai kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/orang yang mengungkap dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari tindakan pembalasan? Does the company have policies or procedures to protect employees/whistleblowers who report suspected illegal or unethical behavior from retaliation?	Ya Yes
PRINISP C PRINCIPLE C	**Pengungkapan dan Transparansi** Disclosure and Transparency		
C.1	Struktur Kepemilikan yang Transparan Transparent Ownership Structure		
	C.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik manfaat yang memiliki 5% kepemilikan saham atau lebih? Does the shareholding information disclose the identity of beneficial owners holding 5% or more of the shares?	Ya Yes
	C.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (yang dianggap) dari pemegang saham utama dan/atau substansial? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?	Ya Yes
	C.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) oleh direktur (komisaris)? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors/commissioners?	Ya Yes
	C.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham manajemen senior secara langsung dan tidak langsung (dianggap)? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	Ya Yes

Item ***Corporate*** Governance Standards	**Standar Tata Kelola Perusahaan** Corporate Governance Standards		**Status Pemenuhan** Compliance Status
	C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian perusahaan induk/induk, anak perusahaan, perusahaan asosiasi, usaha patungan, dan perusahaan/kendaraan bertujuan khusus (SPE)/ (SPV)? Does the company disclose details of parent companies, subsidiaries, associated companies, joint ventures, and special purpose entities/vehicles (SPE/SPV)?	Ya Yes
C.2	Kualitas Laporan Tahunan Quality of the Annual Report		
	Apakah laporan tahunan perusahaan mengungkapkan item-item berikut? Does the company's Annual Report disclose the following items?		
	C.2.1	Tujuan perusahaan Corporate objectives	Ya Yes
	C.2.2	Indikator kinerja keuangan Financial performance indicators	Ya Yes
	C.2.3	Indikator kinerja non keuangan Non-financial performance indicators	Ya Yes
	C.2.4	Kebijakan dividen Dividend policy	Ya Yes
	C.2.5	Rincian biografi (setidaknya usia, kualifikasi akademik, tanggal penunjukan pertama, pengalaman yang relevan, dan jabatan Direktur lainnya di perusahaan tercatat) dari seluruh Direktur/Komisaris. Biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and other directorships in listed companies) of all Directors/Commissioners	Ya Yes
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Confirmation Statement		
	C.2.6	Apakah Laporan Tahunan berisi pernyataan yang menegaskan kepatuhan penuh perusahaan terhadap kode etik tata kelola perusahaan dan jika terdapat ketidakpatuhan, identifikasi dan jelaskan alasan setiap permasalahan tersebut? Does the Annual Report include a statement confirming the company's full compliance with the corporate governance code, and where there is non-compliance, does it identify and explain the reasons for each issue?	Ya Yes
C.3	Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Kunci Board and Key Executive Remuneration		
	C.3.1	Apakah ada pengungkapan struktur biaya untuk direktur/ komisaris non-eksekutif? Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	Ya Yes
	C.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan secara publik [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan secara publik] rincian remunerasi setiap karyawan non-eksekutif? direktur/komisaris? Does the company publicly disclose (i.e., in the Annual Report or other publicly disclosed documents) the details of remuneration for each non-executive director/commissioner?	Ya Yes
	C.3.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan, dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif dan ukuran kinerja jangka pendek dan jangka panjang) untuk direktur eksekutif dan CEO? Does the company disclose remuneration policies/practices (fees, allowances, benefits, and other compensation), including the use of short- and long-term incentives and performance measures, for executive directors and the CEO??	Ya Yes
	C.3.4	Apakah perusahaan mengungkapkan secara publik [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan secara publik] rincian remunerasi masing-masing direktur eksekutif dan CEO [jika dia bukan anggota Dewan]? Does the company publicly disclose (i.e., in the Annual Report or other publicly disclosed documents) the remuneration details of each executive director and the CEO (if he/she is not a member of the Board)?	Ya Yes
C.4	Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi (RPT) Related Party Transactions (RPT) Disclosure		
	C.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakannya yang mencakup peninjauan dan persetujuan RPT yang material? Does the company disclose its policy covering the review and approval of material RPTs?	Ya Yes
	C.4.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat dan nilai setiap RPT material? Does the company disclose the name, relationship, nature, and value of each material RPT?	Ya Yes
C.5	Direksi dan Komisaris Berurusan Dengan Saham Perusahaan Directors and Commissioners Dealing in Company Shares		

Item *Corporate* Governance Standards	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standards		Status Pemenuhan Compliance Status
	C.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan yang dilakukan oleh orang dalam? Does the company disclose trading of company shares by insiders?	Ya Yes
C.6	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor External Auditor and Auditor's Report		
	C.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? Are audit and non-audit fees disclosed?	Ya Yes
	C.6.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? Do non-audit fees exceed audit fees?	Tidak No
C.7	Media Komunikasi Communication Channels		
	Apakah perusahaan menggunakan cara komunikasi berikut? Does the company use the following communication channels?		
	C.7.1	Pelaporan triwulanan Quarterly reporting	Ya Yes
	C.7.2	Situs Perusahaan Company website	Ya Yes
	C.7.3	Pengarahan analis Analyst briefings	Ya Yes
	C.7.4	Pengarahan media/konferensi pers Media briefings/press conferences	Ya Yes
C.8	Penyampaian/Penerbitan Laporan Tahunan/Keuangan yang Tepat Waktu Timely Submission/Publication of Annual/Financial Reports		
	C.8.1	Apakah laporan/pernyataan keuangan tahunan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun buku? Are audited annual financial statements published within 120 days from the end of the fiscal year?	Ya Yes
	C.8.2	Apakah laporan tahunan diterbitkan dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan? Is the Annual Report published within 120 days from the end of the fiscal year?	Ya Yes
	C.8.3	Apakah laporan/laporan keuangan tahunan telah ditegaskan secara benar dan wajar/wajaran oleh direksi/komisaris dan/atau pejabat perusahaan terkait? Have the annual financial statements been fairly presented and properly attested by the Board of Directors/Commissioners and/or relevant company officers?	Ya Yes
C.9	Situs Perusahaan Company Website		
	Apakah Perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut: Does the company have a website that discloses up-to-date information on the following:		
	C.9.1	Laporan/laporan keuangan (triwulanan terbaru) Financial reports/statements (latest quarterly)	Ya Yes
	C.9.2	Materi diberikan dalam briefing kepada analis dan media Materials presented in analyst and media briefings	Ya Yes
	C.9.3	Laporan tahunan yang dapat diunduh Downloadable Annual Reports	Ya Yes
	C.9.4	Pemanggilan RUPS dan/atau RUPSLB Summons of AGMs and/or EGMs	Ya Yes
	C.9.5	Risalah RUPS dan/atau RUPSL Minutes of AGMs and/or EGMs	Ya Yes
	C.9.6	Anggaran dasar perusahaan (anggaran rumah tangga perusahaan, nota kesepahaman dan anggaran dasar) The Company's Articles of Association (bylaws, memorandum, and articles of association)	Ya Yes
C.10	Hubungan dengan Investor Investor Relations		
	C.10.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan email) dari pejabat/kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor? Does the company disclose contact details (e.g., telephone, fax, and email) of the officer/office responsible for investor relations?	Ya Yes

Item ***Corporate*** Governance Standards	**Standar Tata Kelola Perusahaan** Corporate Governance Standards		**Status Pemenuhan** Compliance Status
PRINSIP D PRINCIPLE D	**Tanggung Jawab Dewan** *Responsibilities of the Board*		
D.1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Roles and Responsibilities of the Board		
	Tanggung jawab dewan dan kebijakan tata kelola perusahaan yang jelas Clear board responsibilities and corporate governance policies		
	D.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/piagam dewan? Does the company disclose its corporate governance policy/board charter?	Ya Yes
	D.1.2	Apakah jenis keputusan yang memerlukan persetujuan dewan direksi/komisaris diungkapkan? Are the types of decisions requiring approval of the Board of Directors/Commissioners disclosed?	Ya Yes
	D.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab direksi/komisaris disebutkan dengan jelas? Are the roles and responsibilities of the directors/commissioners clearly stated?	Ya Yes
	Visi/Misi Perusahaan Vision/Mission of the Company		
	D.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan visi dan misi yang diperbarui? Does the company have an updated vision and mission statement?	Ya Yes
	D.1.5	Apakah dewan direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setidaknya setiap tahun? Does the Board of Directors play a leading role in the development and review of the company's strategy at least annually?	Ya Yes
	D.1.6	Apakah dewan direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi penerapan strategi perusahaan? Does the Board of Directors have processes to review, monitor, and oversee the implementation of the company's strategy?	Ya Yes
D.2	Struktur Dewan Board Structure		
	Kode Etik atau Perilaku Code of Ethics or Conduct		
	D.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan? Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	Ya Yes
	D.2.2	Apakah seluruh direktur/komisaris, manajemen senior, dan karyawan diharuskan mematuhi kode etik ini? Are all directors/commissioners, senior management, and employees required to comply with this code of ethics	Ya Yes
	D.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku? Does the company have processes to implement and monitor compliance with the code of ethics or conduct?	Ya Yes
	Struktur & Komposisi Dewan Board Structure & Composition		
	D.2.4	Apakah jumlah direktur/komisaris independen minimal 50% dari dewan direksi/komisaris? Are at least 50% of the Board of Directors/Commissioners independent directors/commissioners?	Ya Yes
	D.2.5	Apakah perusahaan mempunyai batasan masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing- masing lima tahun untuk direktur/komisaris independen? 1 Jangka waktu lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011 Does the company impose a term limit of nine years or less, or two terms of five years each, for independent directors/commissioners? (A five-year term must be mandated by existing law prior to the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011.)	Ya Yes
	D.2.6	Apakah perusahaan telah menetapkan batas lima kursi dewan direksi yang dapat dipegang oleh seorang direktur/komisaris independen/non-eksekutif secara bersamaan? Has the company set a limit of five board seats that an independent/non-executive director/ commissioner may hold simultaneously?	Ya Yes
	D.2.7	Apakah perusahaan mempunyai direktur eksekutif yang menjabat pada lebih dari dua dewan perusahaan tercatat di luar grup? Does the company have executive directors serving on more than two boards of listed companies outside the group?	Tidak No

Item *Corporate* Governance Standards	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standards		Status Pemenuhan Compliance Status
	Komite Nominasi Nomination Committee		
	D.2.8	Apakah perusahaan mempunyai Komite Nominasi? Does the company have a Nomination Committee?	Ya Yes
	D.2.9	Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas direktur/ komisaris independen? Is the Nomination Committee composed of a majority of independent directors/commissioners?	Ya Yes
	D.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi merupakan direktur/ komisaris independen? Is the Chairman of the Nomination Committee an independent director/commissioner?	Tidak No
	D.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/ piagam Komite Nominasi? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Nomination Committee?	Ya Yes
	D.2.12	Apakah kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan dan jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan pertemuan setidaknya dua kali dalam setahun? Is the attendance of Nomination Committee meetings disclosed and, if so, does the Nomination Committee meet at least twice a year?	Ya Yes
	Komite Remunerasi/Komite Kompensasi Remuneration/Compensation Committee		
	D.2.13	Apakah perusahaan mempunyai Komite Remunerasi? Does the company have a Remuneration Committee?	Ya Yes
	D.2.14	Apakah Komite Remunerasi seluruhnya terdiri dari direktur/ komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen? Is the Remuneration Committee composed entirely of non-executive directors/commissioners with a majority being independent directors/commissioners?	Ya Yes
	D.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi merupakan direktur/ komisaris independen? Is the Chairman of the Remuneration Committee an independent director/commissioner?	Tidak No
	D.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola /piagam Komite Remunerasi? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Remuneration Committee?	Ya Yes
	D.2.17	Apakah kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan pertemuan setidaknya dua kali dalam setahun? Is the attendance of Remuneration Committee meetings disclosed and, if so, does the Remuneration Committee meet at least twice a year?	Ya Yes
	Komite Audit Audit Committee		
	D.2.18	Apakah perusahaan mempunyai Komite Audit? Does the company have an Audit Committee?	Ya Yes
	D.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/ komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/ komisaris independen? Is the Audit Committee composed entirely of non-executive directors/commissioners with a majority being independent directors/commissioners?	Ya Yes
	D.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan direktur/komisaris independen? Is the Chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?	Ya Yes
	D.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/ piagam Komite Audit? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?	Ya Yes
	D.2.22	Apakah setidaknya salah satu direktur/komisaris independen komite mempunyai keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)? Does at least one member of the committee have accounting expertise (qualifications or accounting experience)?	Tidak No
	D.2.23	Apakah kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan pertemuan setidaknya empat kali dalam setahun? Is the attendance of Audit Committee meetings disclosed and, if so, does the Audit Committee meet at least four times a year?	Ya Yes
	D.2.24	Apakah Komite Audit mempunyai tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi mengenai penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal? Does the Audit Committee have the primary responsibility for recommending the appointment and removal of the external auditor?	Ya Yes

Item ***Corporate*** Governance Standards	**Standar Tata Kelola Perusahaan** Corporate Governance Standards		**Status Pemenuhan** Compliance Status
D.3	Proses Dewan Board Process		
	Rapat dan kehadiran dewan Board meetings and attendance		
	D.3.1	Apakah rapat dewan direksi dijadwalkan sebelum awal tahun buku? Does the Board of Directors schedule its meetings before the start of the fiscal year?	Ya Yes
	D.3.2	Apakah dewan direksi/komisaris mengadakan pertemuan minimal enam kali dalam setahun? Does the Board of Directors/Commissioners meet at least six times a year?	Ya Yes
	D.3.3	Apakah masing-masing direktur/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari seluruh rapat dewan yang diselenggarakan sepanjang tahun? Does each director/commissioner attend at least 75% of all board meetings held throughout the year?	Ya Yes
	D.3.4	Apakah perusahaan mensyaratkan kuorum minimum minimal 2/3 untuk pengambilan keputusan dewan? Does the company require a minimum quorum of at least two-thirds for board decision-making?	Ya Yes
	D.3.5	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif perusahaan bertemu secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran eksekutif? Do the company's non-executive directors/commissioners meet separately at least once a year without the presence of executives?	N/A
	Akses ke informasi Access to Information		
	D.3.6	Apakah kertas rapat dewan direksi/komisaris diberikan kepada dewan setidaknya lima hari kerja sebelum rapat dewan? Are board papers provided to the Board of Directors/Commissioners at least five working days before board meetings?	Ya Yes
	D.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung dewan dalam melaksanakan tanggung jawabnya? Does the corporate secretary play an important role in supporting the Board in carrying out its responsibilities?	Ya Yes
	D.3.8	Apakah sekretaris perusahaan terlatih dalam bidang hukum, akuntansi, atau praktik kesekretariatan perusahaan dan selalu mengikuti perkembangan yang relevan? Is the corporate secretary trained in legal, accounting, or corporate secretarial practices and kept up to date with relevant developments?	Ya Yes
	Pengangkatan Dewan dan Pemilihan Kembali Board Appointment and Re-election		
	D.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direktur/komisaris baru? Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?	Ya Yes
	D.3.10	Apakah perusahaan menjelaskan proses yang diikuti dalam menunjuk direktur/komisaris baru? Does the company explain the process followed in appointing new directors/commissioners?	Ya Yes
	D.3.11	Apakah seluruh direktur/komisaris dapat dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan tercatat di negara yang peraturan perundang-undangannya menetapkan jangka waktu masing-masing 5 tahun? 2 Jangka waktu lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN *Corporate Governance Scorecard* pada tahun 2011 Are all directors/commissioners subject to re-election every three years, or every five years for listed companies in jurisdictions where regulations prescribe a five-year term? (A five-year term must be mandated by existing law prior to the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011)	Ya Yes
	Masalah Remunerasi Remuneration Matters		
	D.3.12	Apakah pemegang saham atau Dewan Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior? Are the remuneration of executive directors and/or senior executives approved by shareholders or the Board of Directors?	Ya Yes
	D.3.13	Apakah perusahaan mempunyai standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja bagi direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti penarikan kembali kembali bonus yang sudah diberikan? Does the company have measurable standards to align performance-based remuneration of executive directors and senior executives with the company's long-term interests, such as clawback provisions for bonuses?	Ya Yes

Item *Corporate* Governance Standards	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standards		Status Pemenuhan Compliance Status
	Audit internal Internal Audit		
	D.3.14	Apakah perusahaan mempunyai fungsi audit internal tersendiri? Does the company have an internal audit function?	Ya Yes
	D.3.15	Apakah kepala audit internal sudah diidentifikasi atau, jika dialihdayakan, apakah nama perusahaan eksternal diungkapkan? Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	Ya Yes
	D.3.16	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit? Does the appointment and removal of the internal auditor require approval from the Audit Committee?	N/A
	Pengawasan Risiko Risk Oversight		
	D.3.17	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal/kerangka manajemen risiko yang baik dan secara berkala meninjau efektivitas kerangka tersebut? Does the company establish sound internal control procedures/risk management frameworks and periodically review the effectiveness of such frameworks?	Ya Yes
	D.3.18	Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan mengungkapkan bahwa dewan direksi/ komisaris telah melakukan peninjauan terhadap pengendalian material perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko? Does the Annual Report/Annual CG Report disclose that the Board of Directors/Commissioners has reviewed the company's material controls (including operational, financial, and compliance controls) and risk management systems?	Ya Yes
	D.3.19	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko-risiko utama yang secara material dihadapi oleh perusahaan (yaitu keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan hidup, sosial, ekonomi)? Does the company disclose the key risks materially faced by the company (i.e., financial, operational including IT, environmental, social, and economic)?	Ya Yes
	D.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan memuat pernyataan direksi/ komisaris atau Komite Audit yang mengomentari kecukupan pengendalian internal/sistem manajemen risiko perusahaan? Does the Annual Report/Annual CG Report include a statement by the Board of Directors/Commissioners or the Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal control/risk management systems?	Ya Yes
D.4	Orang-Orang di Dewan People on the Board		
	Ketua Dewan Chairman of the Board		
	D.4.1	*Apakah ada orang yang berbeda yang mengambil peran sebagai ketua dan CEO?* Are there different individuals serving as chairman and CEO?	N/A
	D.4.2	Apakah ketuanya adalah direktur/komisaris independen? Is the chairman an independent director/commissioner?	Tidak No
	D.4.3	Apakah ada di antara direktur yang merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir? Are any of the directors former CEOs of the company within the last two years?	Tidak No
	D.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab ketua diungkapkan? Are the roles and responsibilities of the chairman disclosed?	Ya Yes
	Direktur Independen Utama Lead Independent Director		
	D.4.5	Jika Ketua tidak independen, apakah Dewan telah menunjuk Pemimpin/Direktur Independen Senior dan apakah perannya telah ditetapkan? If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director, and is their role defined?	Tidak No
	Keterampilan dan Kompetensi Skills and Competencies		
	D.4.6	Apakah setidaknya satu direktur/komisaris non-eksekutif mempunyai pengalaman kerja di sektor utama tempat perusahaan beroperasi? Does at least one non-executive director/commissioner have work experience in the primary sector in which the company operates?	Ya Yes

Item ***Corporate*** Governance Standards	**Standar Tata Kelola Perusahaan** Corporate Governance Standards		**Status Pemenuhan** Compliance Status
D.5	Kinerja Dewan Board Performance		
	Pengembangan Direksi Board of Directors Development		
	D.5.1	Apakah perusahaan mempunyai program orientasi bagi direksi/komisaris baru? Does the company have an orientation program for new directors/commissioners?	Ya Yes
	D.5.2	Apakah perusahaan mempunyai kebijakan dan praktik serta program aktual yang mendorong direksi/ komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesi berkelanjutan atau berkelanjutan? Does the company have policies, practices, and actual programs that encourage directors/ commissioners to participate in continuing professional education programs?	Ya Yes
	Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif CEO/Executive Management Appointment and Performance		
	D.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana dewan direksi/komisaris merencanakan suksesi CEO/Direktur Utama/ Presiden dan manajemen kunci? Does the company disclose the process by which the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/President Director and key management?	N/A
	D.5.4	Apakah dewan direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/Direktur Utama/ Presiden? Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance appraisal of the CEO/ President Director?	Ya Yes
	Penilaian Dewan Board Assessment		
	D.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap dewan direksi/ komisaris dan mengungkapkan kriteria serta proses yang dilakukan untuk penilaian tersebut? Does the company conduct an annual performance appraisal of the board of directors/commissioners and disclose the criteria and process used for such appraisal?	Ya Yes
	Penilaian Direktur Director Assessment		
	D.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direktur/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut? Does the company conduct an annual performance appraisal of each director/commissioner and disclose the criteria and process used for such appraisal?	Ya Yes
	Penilaian Komite Committee Assessment		
	D.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap komite dewan dan mengungkapkan kriteria serta proses yang diikuti untuk penilaian tersebut? Does the company conduct annual performance assessments of board committees and disclose the criteria and process used for these assessments?	Ya Yes
LEVEL 2	Bonus Bonus		
(B).A.	HAK DAN PERLAKUAN YANG ADIL TERHADAP PEMEGANG SAHAM RIGHTS AND FAIR TREATMENT OF SHAREHOLDERS		
(B).A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus mengetahui peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. The right to participate effectively and vote in general meetings of shareholders and to be informed of the rules, including voting procedures, governing general meetings of shareholders.		
	(B).A.1.1	Apakah perusahaan menerapkan pemungutan suara elektronik yang aman dan *real-time* secara *in-abstia* pada rapat umum pemegang saham? Does the company implement secure, real-time electronic voting in absentia at general meetings of shareholders?	Ya Yes
(B).A.2	Pemanggilan RUPS Summons of GMS		
	(B).A.2.1	Apakah perusahaan mengeluarkan pemanggilan RUPS (dengan rincian agenda dan penjelasan surat edaran), sebagaimana diumumkan kepada Bursa, paling lambat 28 hari sebelum tanggal rapat? Does the company issue Summons for notice (with detailed agenda and explanatory circular), as announced to the Stock Exchange, no later than 28 days before the meeting date?	Tidak No
(B).B.	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilienc		

Item *Corporate* Governance Standards	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standards		Status Pemenuhan Compliance Status
(B).B.1	(B).B.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan cara mereka mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim? Does the company disclose how it manages climate change-related risks and opportunities?	Ya Yes
	(B).B.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/Sustainability Reporting-nya mendapat jaminan dari pihak eksternal? Does the company disclose whether its Sustainability Report has received external assurance?	Tidak No
	(B).B.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan menanggapi kekhawatiran pemangku kepentingan ESG (*Environmental, Social, and Governance*)? Does the company disclose its engagement channels with stakeholder groups and how it addresses ESG (Environmental, Social, and Governance) stakeholder concerns?	Ya Yes
	(B).B.1.4	Apakah perusahaan mempunyai unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab mengelola urusan keberlanjutan? Does the company have a unit/division/committee specifically responsible for managing sustainability matters?	Ya Yes
	(B).B.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan pengawasan dewan direksi/komisaris terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan? Does the company disclose the board of directors'/commissioners' oversight of sustainability-related risks and opportunities?	Ya Yes
	(B).B.1.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hubungan antara remunerasi direktur eksekutif dan manajemen senior serta kinerja keberlanjutan pada tahun sebelumnya? Does the company disclose the relationship between the remuneration of executive directors and senior management and sustainability performance in the previous year?	Tidak No
	(B).B.1.7	Apakah Whistleblowing System perusahaan dikelola oleh pihak/lembaga independen? Is the company's Whistleblowing System managed by an independent party/institution?	Tidak No
(B). C	PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI DISCLOSURE AND TRANSPARENCY		
(B).C.1	*Kualitas Laporan Tahunan* Annual Report Quality		
	(B).C.1.1	Apakah laporan/pernyataan keuangan tahunan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun keuangan? Are audited annual financial statements/reports issued within 60 days of the end of the fiscal year?	Tidak No
(B).D	TANGGUNG JAWAB DEWAN BOARD RESPONSIBILITIES		
(B).D.1	Kompetensi dan Keberagaman Dewan Board Competence and Diversity		
	(B).D.1.1	Apakah perusahaan memiliki minimal satu direktur/komisaris independen perempuan? Does the company have at least one female independent director/commissioner?	Tidak No
	(B).D.1.2	Apakah perusahaan mempunyai kebijakan dan mengungkapkan tujuan terukur untuk menerapkan keberagaman dewan dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya? Does the company have a policy and disclose measurable objectives for implementing board diversity and reporting progress towards achieving these objectives?	Ya Yes
(B).D.2	Struktur Dewan Board Structure		
	(B).D.2.1	Apakah Komite Nominasi seluruhnya terdiri dari direktur/ komisaris independen? Is the Nominating Committee composed entirely of independent directors/commissioners?	Tidak No
	(B).D.2.2	Apakah Komite Nominasi melakukan proses identifikasi kualitas direktur yang selaras dengan arahan strategis perusahaan? Does the Nomination Committee conduct a process for identifying quality directors aligned with the company's strategic direction?	Ya Yes
(B).D.3	Pengangkatan Dewan dan Pemilihan Kembali Board Appointment and Re-Election		
	(B) D.3.1	Apakah perusahaan menggunakan perusahaan pencari profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti database direktur yang dibuat oleh direktur atau badan pemegang saham) ketika mencari kandidat untuk dewan direksi/komisaris? Does the company use a professional search firm or other external candidate sources (such as a director database maintained by a board of directors or shareholder body) when seeking candidates for the board of directors/commissioners?	Tidak No
(B).D.4	Struktur & Komposisi Dewan Board Structure & Composition		

Item ***Corporate*** Governance Standards	**Standar Tata Kelola Perusahaan** Corporate Governance Standards		**Status Pemenuhan** Compliance Status
	(B).D.4.1	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen mencakup lebih dari 50% dewan direksi/komisaris pada perusahaan yang ketuanya independen? Do independent non-executive directors/commissioners comprise more than 50% of the board of directors/commissioners in the company with independent chairman?	Ya Yes
(B).D.5	Pengawasan Risiko Risk Monitoring		
	(B).D.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Dewan telah mengidentifikasi risiko-risiko utama yang terkait dengan teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan? Does the company disclose that the Board has identified key risks related to information technology, including disruption, cybersecurity, and disaster recovery, to ensure that these risks are managed and integrated into the overall risk management framework?	Ya Yes
(B).D.6	Kinerja Dewan Board Performance		
	(B).D.6.1	Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko tingkat dewan yang terpisah? Does the company have a separate board-level Risk Committee?	Ya Yes
LEVEL 2	PENALTI PENALTIES		
	Hak dan perlakuan yang adil kepada Pemegang Saham Rights and Fair Treatment to Shareholders		
(P).A.1	Hak dasar pemegang saham Fundamental Shareholder Rights		
	(P).A.1.1	Apakah perusahaan gagal atau lalai memberikan perlakuan yang sama dalam pembelian kembali saham kepada seluruh pemegang saham? Has the company failed or neglected to provide equal treatment to all shareholders in share buybacks?	Tidak No
(P).A.2	Para pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diperbolehkan untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip, dengan pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan. Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues related to fundamental shareholder rights as defined in the Principles, with exceptions to prevent abuse.		
	(P).A.2.1	Apakah terdapat bukti adanya hambatan yang menghalangi pemegang saham untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lainnya? Is there evidence of any barriers preventing shareholders from communicating or consulting with other shareholders?	Tidak No
(P).A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus mengetahui peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. The right to participate effectively and vote in general meetings of shareholders and to be informed of the rules, including voting procedures, governing general meetings of shareholders.		
	(P).A.3.1	Apakah perusahaan mencantumkan agenda tambahan yang tidak diumumkan sebelumnya dalam pemanggilan RUPST/RUPSLB? Does the company include additional agenda items not previously announced in the notice of the AGMS/EGMS?	Tidak No
	P) A.3.2	Apakah Ketua Dewan dan Ketua seluruh Komite Dewan serta CEO tidak hadir dalam Rapat Umum terakhir? Were the Chairman of the Board, the Chairman of all Board Committees, and the CEO absent from the last General Meeting?	Tidak No
(P) A.4	Struktur dan pengaturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitasnya harus diungkapkan. Capital structure and arrangement that allow certain shareholders to obtain a level of control disproportionate to their equity ownership must be disclosed.		
	Apakah perusahaan gagal mengungkapkan keberadaan: Did the company fail to disclose the existence of:		
	(P) A.4.1	Perjanjian pemegang saham? Shareholder agreements?	Tidak No
	(P) A.4.2	Batasan pemungutan suara? Voting restrictions?	Tidak No
	(P) A.4.3	Hak pilih ganda? Multiple voting rights?	Tidak No

Item *Corporate* Governance Standards	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standards		Status Pemenuhan Compliance Status
(P) A.5	Struktur dan pengaturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitasnya harus diungkapkan Capital structure and arrangement that allow certain shareholders to obtain a level of control disproportionate to their equity ownership must be disclosed.		
	(P) A.5.1	Apakah struktur kepemilikan piramida dan/atau struktur kepemilikan silang terlihat jelas? Are pyramid ownership structures and/or cross-ownership structures evident?	Tidak No
(P) A.6	Perdagangan orang dalam dan transaksi mandiri yang bersifat kekerasan harus dilarang. Insider trading and abusive self-dealing must be prohibited.		
	(P) A.6.1	Apakah terdapat kasus *insider trading* yang melibatkan direksi/komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir? Have there been any cases of insider trading involving directors/commissioners, management, or employees in the last three years?	Tidak No
(P) A.7	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan sewenang-wenang Protecting minority shareholders from arbitrary action		
	(P) A.7.1	Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan sehubungan dengan transaksi pihak berelasi yang material dalam tiga tahun terakhir? Have there been any cases of non-compliance with laws, regulations, and regulations related to material related party transactions in the last three years?	Tidak No
	(P) A.7.2	Apakah ada RPT yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (yaitu tidak dilakukan secara wajar) kepada entitas selain anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya? Have there been any RPTs that could be classified as financial assistance (i.e., not made at arm's length) to entities other than wholly-owned subsidiaries?	Tidak No
	Peran pemangku kepentingan Role of stakeholders		
(P) B.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati. Stakeholder rights established by law or through mutual agreements must be respected.		
	(P) B.1.1	Apakah ada pelanggaran terhadap undang-undang yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan/ketenagakerjaan/konsumen/kebangkrutan/komersial/kompetisi atau lingkungan hidup? Have there been any violations of laws relating to labor/employment/consumer/bankruptcy/commercial/competition or environmental issues?	Tidak No
(P) B.2	Jika pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur. If stakeholders participate in the corporate governance process, they must have access to relevant, adequate, and reliable information in a timely and regular manner.		
	(P) B.2.1	Apakah perusahaan pernah menghadapi sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting? Has the company ever faced sanctions from regulators for failing to make announcements within the required timeframe for significant events?	Tidak No
	(P) B.2.2	Apakah ada bukti bahwa perusahaan terlibat dalam aktivitas greenwashing? Is there evidence that the company has engaged in greenwashing activities?	Tidak No
	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency		
(P) C.1	Sanksi dari regulator terhadap laporan keuangan Regulatory sanctions on financial reports		
	(P) C.1.1	Apakah perusahaan menerima "pendapat wajar dengan pengecualian" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a qualified opinion in its external audit report?	Tidak No
	(P) C.1.2	Apakah perusahaan menerima "opini buruk" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive an adverse opinion in its external audit report?	Tidak No
	(P) C.1.3	Apakah perusahaan menerima "disclaimer opinion" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a disclaimer opinion in its external audit report?	Tidak No
	(P) C.1.4	Apakah perusahaan dalam satu tahun terakhir telah merevisi laporan keuangannya karena alasan selain perubahan kebijakan akuntansi? Has the company revised its financial statements for reasons other than changes in accounting policies in the past year?	Tidak No
	Tanggung Jawab Dewan Board Responsibilities		
(P) D.1	Kepatuhan terhadap aturan pencatatan, peraturan dan hukum yang berlaku Compliance with Listing Rules, Regulations, and Applicable Laws		

Item ***Corporate*** Governance Standards	**Standar Tata Kelola Perusahaan** Corporate Governance Standards		**Status Pemenuhan** Compliance Status
	(P) D.1.1	Apakah ada bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pencatatan selain peraturan pengungkapan selama setahun terakhir? Is there evidence that the company has not complied with listing rules and regulations, other than disclosure regulations, during the past year?	Tidak No
	(P) D.1.2	Pernahkah ada kejadian di mana direktur/komisaris non-eksekutif mengundurkan diri dan mengangkat permasalahan terkait tata kelola? Have there been any instances where non-executive directors/commissioners have resigned and raised governance issues?	Tidak No
(P) D.2	Struktur Dewan Board Structure		
	(P) D.2.1	Apakah Perseroan mempunyai direktur/komisaris independen yang telah menjabat lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun (mana yang lebih tinggi) dalam kapasitas yang sama? Does the Company have independent directors/commissioners who have served for more than nine years or two terms of five years each (whichever is higher) in the same capacity? Jangka waktu lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN *Corporate Governance Scorecard* pada tahun 2011 The five-year term should be required by law existing before the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011.	Tidak No
	(P)D.2.2	Apakah perusahaan gagal mengidentifikasi dengan tepat gambaran seluruh direkturnya sebagai independen, non-eksekutif, dan eksekutif? Has the company failed to properly identify all its directors as independent, non-executive, and executive?	Tidak No
	(P) D.2.3	Apakah perusahaan mempunyai direktur/non eksekutif/komisaris independen yang menjabat di lebih dari lima dewan di perusahaan publik? Does the company have independent directors/non-executive directors/commissioners serving on more than five boards of public companies?	Tidak No
(P) D.3	Audit Eksternal External Audit		
	(P) D.3.1	Apakah ada di antara direktur atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir)? Are any directors or senior management former employees or partners of the current external auditor (within the last two years)?	Tidak No
(P) D.4	Struktur dan Komposisi Dewan Board Structure and Composition		
	(P) D.4.1	Apakah ketuanya pernah menjadi CEO perusahaan dalam tiga tahun terakhir? Has the chairman served as CEO of the company within the last three years?	Tidak No
	(P) D.4.2	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif menerima opsi, bagi hasil atau bonus? Do non-executive directors/commissioners receive options, profit-sharing, or bonuses?	Tidak No

Penerapan 8 (Delapan) Prinsip Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021

Implementation of 8 (Eight) of 2021 Principles Indonesian General Guidelines on Corporate Governance (PUGKI)

Perseroan melaksanakan pemetaan terhadap praktik tata kelola yang dijalankan berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang disusun dan diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Berdasarkan pemetaan terhadap PUGKI, terdapat 8 (delapan) Prinsip yang diturunkan menjadi 28 (dua puluh delapan) bagian, serta 81 (delapan puluh satu) Rekomendasi.

The Company conducted a mapping of its corporate governance practices based on the 2021 General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI), compiled and published by the National Committee for Governance Policy (KNKG). Based on the PUGKI mapping, there are eight Principles, broken down into 28 sections, and 81 Recommendations.

Proses penilaian atas penerapan governansi korporat dilakukan dengan menilai penerapan atas Rekomendasi PUG-KI, dengan berlandaskan pada dasar **"*Apply*/Terapkan"** atau **"*Explain*/Tidak Diterapkan"**.

The assessment of corporate governance implementation is conducted by assessing the application of PUG-KI Recommendations, based on the criteria of "Apply" or "Explain."

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, terdapat 66 (enam puluh enam) Rekomendasi yang telah diterapkan (*apply*), 7 (tujuh) Rekomendasi yang tidak diterapkan dan 8 (delapan) Rekomendasi memerlukan penjelasan, sebagaimana tabel berikut:

Based on the assessment, 66 Recommendations have been applied, 7 Recommendations have not been applied, and 8 Recommendations require explanation, as shown in the following table:

No.	Uraian Description	*Apply*/ *Explain*	Penjelasan Implementation Description
I.	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris** Board of Directors and Board of Commissioners Roles and Responsibilities		
1.1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi** Board of Directors Roles and Responsibilities		
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. Berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. Beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. Berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. Berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*Corporate resilience*) To achieve sustainable value creation, Board of Directors exercises its leadership role and strives to achieve the following governance outcomes: a. Competitive and focused on long-term performance; b. Ethical and responsible in conducting business; c. Making a positive contribution to society and the environment; and d. Capable of sustaining and growing (Corporate resilience)	*Apply*	Direksi telah menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi dengan mewujudkan standar etika bisnis yang tinggi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: DK/12/12/02/IPCC-22 dan Nomor: HK.56/3/4/IKT-22 tentang Pedoman Kode Etik Bisnis (*Code of Conduct*) dan memastikan pelaksanaan Pedoman Kode Etik Bisnis tersebut dapat melahirkan budaya korporasi yang berintegritas. The Board of Directors has carried out its leadership role and strived to achieve governance results by realizing high standards of business ethics as stated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. DK/12/12/02/IPCC-22 and No. HK.56/3/4/IKT-22 concerning the Code of Conduct and ensuring that the implementation of the Code of Conduct can create a corporate culture with integrity.
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. Board of Directors must ensure that the Corporation's mission, vision, objectives, goals, strategies, and annual and medium-term plans are consistent with its long-term objectives, while effectively leveraging innovation and technology.	*Apply*	Direksi telah memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah Perseroan konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif sebagaimana tercantum dalam ITMP IKT 2020-2024, Buku Prognosa 2024 & Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2025-2029. The Board of Directors has ensured that the Company's mission, vision, objectives, targets, strategies, and annual and medium-term plans are consistent with its long-term objectives, by effectively utilizing innovation and technology as outlined in the 2020-2024 ITMP IKT, the 2024 Prognosis Book & 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and 2025–2029 Long-Term Corporate Plan.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Board of Directors ensures that the Corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the Corporation's vision, mission, goals, objectives, and strategies, and comply with applicable laws, regulations, and standards.	*Apply*	Direksi telah memastikan bahwa Perseroan menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif dan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi Perseroan serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku dengan disusunnya kebijakan melalui Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: PW.05.01/24/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 24 Desember 2024, serta ditunjukkan dengan penyampaian Laporan Profil Risiko Operasional dan Investasi Triwulan 4 Tahun 2025 kepada Dewan Komisaris PT IKT Tbk dan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal Januari 2026. The Board of Directors has ensured that the Company implements appropriate and effective risk management and internal control systems that align with the Company's vision, mission, goals, objectives, and strategies and comply with applicable laws and regulations and standards. This is evidenced by the formulation of policies through the Regulation of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: PW.05.01/24/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 concerning the Implementation of Risk Management within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dated December 24, 2024, and demonstrated by the submission of the Operational and Investment Risk Profile Report for Quarter 4 of 2025 to the Board of Commissioners of PT IKT Tbk and the Director of Finance and Risk Management of PT Pelindo Multi Terminal on January 2026.
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. Board of Directors ensures the integrity of the Corporation's accounting and financial reporting systems, as well as the timely and accurate disclosure of all material information regarding the Corporation.	*Apply*	Direksi telah memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan Perseroan dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai Perseroan sebagaimana ditunjukkan dengan Laporan Keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 25 Maret 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen serta Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen. The Board of Directors has ensured the integrity of the Company's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information regarding the Company, as demonstrated in the Financial Statements of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dated March 25, 2026, and for the year then ended, along with the independent auditor's report, and the Board of Directors' Statement of Responsibility for the Financial Statements dated December 31, 2025, and for the year then ended, along with the independent auditor's report.
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. Board of Directors ensures that the sustainability report has been prepared in accordance with applicable standards.	*Apply*	Direksi telah memastikan pelaporan keberlanjutan disusun sebagaimana mestinya yang ditunjukkan dengan penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2025 yang disusun berdasarkan SEOJK No. 16 Tahun 2021/POJK No. 51 Tahun 2017 serta *Global Reporting Initiative* (GRI) *Standards*. The Board of Directors has ensured that sustainability reporting is properly prepared, as demonstrated by the preparation of the 2025 Sustainability Report, which is based on OJK Circular Letter No. 16 of 2021/OJK Regulation No. 51 of 2017 and the Global Reporting Initiative (GRI) Standards.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. Board of Directors establishes a framework for Corporate information technology (IT) governance that aligns with the Company's business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports the Company's objectives and strategies.	*Apply*	Direksi telah membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) Perseroan yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis Perseroan, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi Perseroan sebagaimana tertuang dalam IT Master Plan IKT Tahun 2020-2024 serta Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal TbkNomor: SI.01/17/3/2/SIN/DIRUT/IKT-25 tentang Pedoman Kebijakan Tata Kelola Sistem Informasi di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 17 Maret 2025.Terkait dengan penguatan manajemen risiko termuat dalam Laporan Profil Risiko Operasional dan Investasi Triwulan 4 Tahun 2025 yang di dalamnya mencakuprisiko berkaitan dengan *Cyber Attack* Sistem Informasi. The Board of Directors has established a framework for the Company's information technology (IT) governance that aligns with the Company's business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports the Company's objectives and strategies, as outlined in the 2020-2024 IT Master Plan and the Board of Directors Regulation of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. SI.01/17/3/2/SIN/DIRUT/IKT-25 regarding Guidelines for Information System Governance Policy at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dated March 17, 2025. Regarding the strengthening of risk management as outlined in the Operational and Investment Risk Profile Report for the Fourth Quarter of 2025, which includes risks related to cyberattacks on information systems.
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For Corporations conducting business activities based on Sharia principles, Board of Directors must ensure that the Sharia Supervisory Board has sufficient authority and access to adequate support resources to effectively fulfill its role.	*Not Applicable (N/A)*	Hal ini dikarenakan Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. This is because the Company does not conduct its business activities based on Sharia principles.
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is reviewed periodically. The Charter covers, among other things, division of roles among individual Directors, which may be stipulated in the Board of Directors' Charter or by a Board of Directors Decree.	*Apply*	Piagam Direksi telah mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dan telah ditinjau secara periodik, terakhir dimutakhirkan pada tahun 2022 melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: DK/19/12/03/IPCC-22 dan Nomor: HK.56/3/6/IKT-22 tentang Pedoman Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. The Board of Directors' Charter includes, among other things, the division of roles for individual Directors and has been reviewed periodically, most recently updated in 2022 through Joint Decrees of the Board of Commissioners and Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: DK/19/12/03/IPCC-22 and Number: HK.56/3/6/IKT-22 concerning the Guidelines for the Working Procedures for the Relationship between the Board of Commissioners and Directors (Board Manual) of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of Board of Directors if they are involved in financial crimes and are proven to have committed misconduct.	*Apply*	Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan diatur dalam Board Manual pada Bab II huruf c angka 12 halaman 18. The policy regarding the resignation of members of the Board of Directors in the event of involvement in financial crimes is set forth in the Board Manual, Chapter II, Section c, Item 12, page 18.
1.2	**Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya** Performance Appraisal – Board of Directors and Its Members		
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur. Board of Commissioners conducts an objective and independent annual formal evaluation to assess the effectiveness of Board of Directors and each individual Director.	*Apply*	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur sebagaimana diatur dalam *Board Manual* pada Bab Direksi sub J. Evaluasi Kinerja Direksi halaman 48-49. The Board of Commissioners conducts an objective and independent annual formal evaluation to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director, as stipulated in the Board Manual, Board of Directors Chapter, subsection J. Evaluation of the Performance of the Board of Directors, pages 48-49.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. Board of Commissioners taking into account the recommendations of Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance appraisal criteria and evaluating the performance of President Director and other members of Board of Directors.	*Apply*	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. Kriteria evaluasi kinerja Direksi telah diatur dalam *Board Manual* pada Bab Direksi sub J. Evaluasi Kinerja Direksi poin 2. Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi halaman 49. The Board of Commissioners, in consultation with the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining the performance evaluation criteria and assessing the performance of President Director and other members of Board of Directors. The Board of Directors' performance evaluation criteria are set out in the Board Manual in Chapter #1, Board of Directors, sub-section #1, Directors' Performance Evaluation, point #2, and Directors' Performance Evaluation Criteria, page #49.
1.3	**Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris** Board of Commissioners' Roles and Responsibilities		
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. Board of Commissioners reviews the Corporate strategy at least once a year and approves the Corporate mission, vision, and strategy formulated by Board of Directors. Board of Commissioners also reviews, provides advice on, and approves the Corporation's long-term and short-term business and financial plans. Board of Commissioners provides advice and supervision to Board of Directors regarding the management of its implementation. Board of Directors and Board of Commissioners are involved in decisions of critical importance to the Corporation, as stipulated in the Corporation's articles of association.	*Apply*	Dewan Komisaris telah mereviu strategi Perseroan paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi Perseroan yang dirumuskan oleh Direksi sebagaimana tercantum dalam Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025 (RKAP 2025) PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek Perseroan sebagaimana termuat dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2025-2029 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi Perseroan, diatur dalam anggaran dasar Perseroan. The Board of Commissioners has reviewed the Company's strategy at least annually and approved the Company's mission, vision, and strategy formulated by the Board of Directors, as outlined in the Approval of the 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP 2025) of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk by the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Board of Commissioners also reviewed, provided advice, and approved the Company's long-term and short-term business and financial plans, as outlined in the 2025-2029 Long-Term Plan of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, which has been signed by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners provides advice and monitors the Board of Directors' implementation. The Board of Directors and the Board of Commissioners are involved in decisions critical to the Company, as stipulated in the Company's articles of association.
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. Types of decisions requiring the Board of Commissioners' approval must be disclosed in the annual report	*Apply*	Jenis keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris telah termuat dalam Laporan Tahunan ini halaman 320. The types of Board of Directors' decisions that require the approval of the Board of Commissioners are listed in this Annual Report on page 320.
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. Taking into account the recommendations of Nomination and Remuneration Committee, Board of Commissioners proposes to, and for decision by, General Meeting of Shareholders the appointment and/or dismissal of members of Board of Directors and members of Board of Commissioners. In proposing the above, Board of Commissioners takes into account diversity, non-discrimination, and equal opportunity without distinction based on ethnicity, religion, race, social class, or gender. Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of Board of Directors and Board of Commissioners is formal and transparent.	*Not Applicable* (N/A)	Hal ini dikarenakan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi sepenuhnya menjadi ranah Pemegang Saham/RUPS. This is because the appointment and dismissal of Directors are entirely within the purview of the Shareholders/GMS.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. Board of Commissioners or Committee that performs the nomination function establishes succession policies for the nomination process of members of Board of Directors. Each year, Board of Commissioners reviews reports on the implementation of development and succession plans submitted by President Director.	*Apply*	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi telah menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 13/KEP-DK/XII/IKT-2018 tanggal 19 Desember 2018. Setiap tahun Dewan Komisaris juga meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function has developed a succession policy for the nomination process for members of Board of Directors, as stated in the Nomination and Remuneration Committee Charter, established through Board of Commissioners Decree No. 13/KEP-DK/XII/IKT-2018 dated December 19, 2018. Each year, the Board of Commissioners also reviews the reporting on the implementation of the development and succession plan submitted by the President Director.
1.3.5	Dewan Komisaris : a). Mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). Secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Board of Commissioners: a). Submit to the GMS, which may be preceded by a proposal from the committee responsible for remuneration, an amount of remuneration for members of Board of Directors and members of Board of Commissioners that is consistent with the Corporation's sustainable development and long-term interests of the Corporation and its shareholders; b). Periodically review the remuneration system for Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply*	Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan Perseroan yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang Perseroan dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana proses tersebut diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini pada Bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik sub Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris halaman 304. The Board of Commissioners a). submits to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee performing the remuneration function, the amount of remuneration for the members of Board of Directors and Board of Commissioners that is in line with the sustainable development of the Company and the long-term interests of the Company and its shareholders; b). periodically reviews the remuneration system for Board of Directors and Board of Commissioners, as disclosed in this Annual Report in the Good Corporate Governance Chapter, sub-section "Nomination and Remuneration Policy for Board of Directors and Board of Commissioners," page 304.
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. Board of Commissioners oversees the effectiveness of Corporate governance policies and their implementation, and proposes changes as necessary.	*Apply*	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi Perseroan dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan sebagaimana hal tersebut dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, serta telaah Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan governansi korporat di Perseroan. The Board of Commissioners oversees the effectiveness of the Company's governance policies and their implementation and proposes changes if necessary, as discussed in Board of Commissioners and Board of Directors meetings, as well as the Board of Commissioners' review of the Company's corporate governance implementation.
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. Board of Commissioners supervise and direct the Corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the Corporation's goals, objectives, and strategies, and comply with applicable laws and regulations, codes of conduct, and standards.	*Apply*	Dewan Komisaris telah memantau dan mengarahkan agar Perseroan menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi Perseroan serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku, diantaranya dengan melakukan telaah terhadap Laporan Profil Risiko yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, di samping itu juga Dewan Komisaris juga membahas mengenai Manajemen Risiko dan Pelaksanaannya dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. The Board of Commissioners has monitored and directed the Company to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that align with the Company's goals, objectives, and strategies, and to comply with applicable laws and regulations, codes of conduct, and standards. This includes reviewing the Risk Profile Report submitted to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners also discusses Risk Management and its Implementation in Board of Commissioners and Board of Directors meetings.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. Board of Commissioners supervise and direct efforts to ensure the integrity of the Company's accounting and financial reporting systems, as well as the independence of internal and external audit functions.	*Apply*	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan Perseroan, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal yang menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. The Board of Commissioners oversees and directs the Company's accounting and financial reporting system, as well as the independence of its internal and external audit functions, which are discussed in Board of Commissioners and Board of Directors meetings.
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. Board of Commissioners supervises, reviews, and approves the Corporation's annual and sustainability reports and ensures their integrity, as well as supervise the disclosure and communication processes of the Corporation.	*Apply*	Dewan Komisaris telah memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Perseroan serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian Perseroan sebagaimana telah ditandatanganinya Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan ini dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2025. The Board of Commissioners has monitored, reviewed, and approved the Company's annual report and sustainability report, ensuring their integrity, and overseeing the Company's disclosure and communication processes, as reflected in the signing of the Statement Letter of Board of Commissioners Members regarding Responsibility for this Annual Report and the Sustainability Report for the 2025 Fiscal Year.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners' Charter is reviewed periodically.	*Apply*	Piagam Dewan Komisaris telah secara periodik ditinjau sebagaimana terakhir dimutakhirkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: DK/19/12/03/IPCC-22 dan Nomor: HK.56/3/6/IKT-22 tentang Pedoman Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. The Board of Commissioners Charter has been periodically reviewed, as last updated through Joint Decrees of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: DK/19/12/03/IPCC-22 and Number: HK.56/3/6/IKT-22 concerning the Guidelines for Working Procedures of Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual) of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have committed misconduct.	*Explain*	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, namun belum mengatur secara khusus dalam hal sebab pengunduran diri apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Company has a policy regarding the resignation of members of Board of Commissioners, but it does not specifically regulate the grounds for resignation if they are involved in financial crimes and proven guilty.
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are strongly encouraged to contribute to honest, objective, active, and constructive discussions at Board of Commissioners meetings.	*Apply*	Dalam komposisi Dewan Komisaris, Perseroan memiliki Komisaris Independen. Dalam menjamin independensinya, setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan menandatangani pernyataan Pakta Integritas. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat ketiga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi. Within the Board of Commissioners, the Company has an Independent Commissioner. To guarantee their independence, each member of Board of Commissioners is required to sign an Integrity Pact. Each member of Board of Commissioners must not have any family relationship up to the third degree with other members of Board of Commissioners and/or members of Board of Directors.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. President Commissioner serves as the coordinator of Board of Commissioners and ensures its effectiveness. President Commissioner fosters a culture of openness and constructive dialogue that allows diverse viewpoints to be expressed, including coordinating the setting of an appropriate meeting agenda and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. In addition, there must be opportunities for Board of Commissioners to meet with Board of Directors and senior management.	*Apply*	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Hal tersebut telah termuat dalam Laporan Tahunan ini halaman 341 sub Pembagian Bidang Tugas Dewan Komisaris. Selain itu, juga terdapat kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as the coordinator of Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner fosters a culture of openness and constructive dialogue that allows diverse views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all items. This is outlined in this Annual Report, page 341 sub-section "Division of Duties of Board of Commissioners."
1.4	**Pembentukan Komite** Establishment of the Committee		
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporation has committees under Board of Commissioners consisting of at least the following: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management Monitoring Committee.	*Apply*	Perseroan telah memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko, sebagaimana ditunjukkan dengan: 1. Keputusan Dewan Komisaris No. DK/30/03/03/IKT-15 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; 2. Keputusan Dewan Komisaris No. 16/KEPDK/VIII/IKT-2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; 3. Keputusan Dewan Komisaris No. 18/KEP-DK/X/IKT-2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. The Company has committees under Board of Commissioners, consisting of at least the following: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management Monitoring Committee, as demonstrated by: 1. Board of Commissioners Decree No. DK/30/03/03/IKT-15 concerning the Establishment and Appointment of Chairperson and Members of Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; 2. Board of Commissioners Decree No. 16/KEPDK/VIII/IKT-2020 dated August 20, 2020 concerning the Establishment of Risk Monitoring Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; 3. Board of Commissioners Decree No. 18/KEP-DK/X/IKT-2020 dated October 1, 2020 concerning the Appointment of Chairperson and Members of Nomination and Remuneration Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen . Board of Commissioners ensures that all members of Audit Committee are independent and that a majority of members of other committees established by the Board of Commissioners are independent, and that all committee members are competent, committed, and have sufficient authority to perform their roles effectively and independently.	*Apply*	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen sebagaimana ditunjukkan dengan: 1. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/24/11/04/IPCC-22 tentang Pemutakhiran Piagam Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 24 November 2022; 2. Pernyataan Independensi anggota Komite Audit dalam Laporan Tahunan ini halaman 377. The Board of Commissioners has ensured that all members of Audit Committee are independent, and that the majority of other committees formed by the Board of Commissioners are independent parties. All committee members are competent, committed, and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently, as demonstrated by: 1. Board of Commissioners Decree No. DK/24/11/04/IPCC-22 concerning the Update to Audit Committee Charter of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dated November 24, 2022; 2. Statement of Independence of Audit Committee members in this Annual Report on page 377.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure that the Audit Committee's performance is monitored objectively and independently, President Commissioner may not serve as Head of Audit Committee, except under extraordinary circumstances, which must be explained in the annual report	*Apply*	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak menjabat sebagai ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. Hal ini termuat dalam Laporan Tahunan ini pada sub Masa Jabatan dan Komposisi Komite Audit pada halaman 377, bahwa Ketua Komite Audit dijabat oleh anggota Dewan Komisaris. To ensure that monitoring of the Audit Committee's duties is objective and independent, the President Commissioner does not serve as the Chairman of Audit Committee, except in extraordinary circumstances, which must be explained in the annual report. This is stated in this Annual Report under the subsection "Term of Office and Composition of Audit Committee" on page 377, which states that the Chairman of Audit Committee is held by a member of Board of Commissioners.
1.5	**Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya** Performance Appraisal - Board of Commissioners and Its Members		
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. Board of Commissioners conducts an objective annual formal evaluation to assess the effectiveness of the Board, its committees, and each individual commissioner.	*Apply*	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu Komisaris sebagaimana diatur dalam *Board Manual* pada Bab Dewan Komisaris sub K. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris halaman 79-80. The Board of Commissioners conducts an objective annual formal evaluation to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual Commissioner, as stipulated in the Board Manual, Board of Commissioners Chapter, subsection K. Evaluation of Board of Commissioners' Performance, pages 79-80.
1.6	**Benturan Kepentingan** Conflict of Interest		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of Board of Directors who hold concurrent positions outside the Corporation must obtain approval from Board of Commissioners. A Commissioner must notify the Board of Commissioners and chairperson of the committee responsible for nominations before accepting a new appointment as a director or commissioner of a public Corporation, another directorship, or any other position requiring a significant time commitment.	*Apply*	Tidak ada anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan di luar korporasi. No member of Board of Directors holds concurrent positions outside the corporation.
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest involving management, members of Board of Directors, Board of Commissioners, and shareholders, including the misuse of Corporate assets and misconduct in related-party transactions. Commissioners with a conflict of interest do not participate in the monitoring or decision-making regarding potential conflicts of interest involving the Commissioner or the Commissioner's affiliates.	*Apply*	Dewan Komisaris telah memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset Perseroan dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi sebagaimana diatur dalam: 1. *Board Manual* Bab Direksi sub G. Etika Jabatan Anggota Direksi poin 6. Etika Berkaitan dengan Benturan Kepentingan halaman 40-41; 2. *Board Manual* Bab Dewan Komisaris sub F. Etika Jabatan Dewan Komisaris poin 5. Etika Berkaitan dengan Benturan Kepentingan halaman 64. The Board of Commissioners has monitored and managed potential conflicts of interest among management, members of Board of Directors, Board of Commissioners, and shareholders, including misappropriation of Company assets and misappropriation in related party transactions, as regulated in: 1. Board Manual, Board of Directors Chapter, Sub-G. Ethics for Members of Board of Directors, Point 6. Ethics Related to Conflicts of Interest, pages 40-41; 2. Board Manual, Board of Commissioners Chapter, Sub-F. Ethics for the Board of Commissioners, Point 5. Ethics Related to Conflicts of Interest, page 64.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
1.7	**Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris** Competency Development for Members of Board of Directors and Board of Commissioners		
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. Board of Commissioners ensures that members of Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, the Corporation's characteristics and operations, relevant laws and regulations and standards, as well as other applicable obligations. The Board of Directors, through the Corporate secretary, supports all members of Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing the skills and knowledge necessary to fulfill their roles on the Board.	*Apply*	Perseroan mengikutsertakan Dewan Komisaris dan Direksi pada pendidikan dan pelatihan, sebagai bentuk peningkatan kompetensi serta memastikan diterimanya *Board Manual* oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai panduan kerjanya. Terhadap anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi yang baru diangkat, Perseroan melaksanakan program pengenalan perusahaan guna tersampaikan informasi yang relevan berkaitan dengan Perseroan serta peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris maupun Direksi. The Company includes the Board of Commissioners and Board of Directors in education and training to improve their competency and to ensure that the Board accept the Board Manual as a guide for their work. The Company conducts a company induction program for newly appointed members of Board of Commissioners and Board of Directors to provide relevant information regarding the Company and the roles and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors.
2	**Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Composition and Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners		
2.1	**Komposisi Direksi** Composition of Board of Directors		
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In selecting candidates for director positions, Board of Commissioners, through Nomination and Remuneration Committee, does not rely solely on recommendations from Board of Commissioners, management, or majority shareholders. Board of Commissioners, through Nomination and Remuneration Committee, may use independent sources to identify qualified candidates.	*Not Applicable* (N/A)	Hal ini dikarenakan Dewan Komisaris di Perseroan tidak menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. Kewenangan untuk menentukan kandidat calon Direktur berada pada Pemegang Saham Mayoritas. This is because the Company's Board of Commissioners does not use independent sources to determine qualified candidates. The authority to determine Director candidates rests with the Major Shareholder.
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of Board of Directors include, at a minimum, knowledge, skills, and expertise necessary to effectively fulfill the roles of Board of Directors, while also ensuring diversity within Board of Directors.	*Apply*	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa calon Anggota Direksi telah sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini tertuang pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, Nomor DK/19/12/03/IPCC-22 dan Nomor HK.56/3/6/IKT-22 tentang Pedoman Tata Kerja dan Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. The Board of Commissioners has ensured that the Board of Directors candidates meet the established requirements and criteria. This is stipulated in the Articles of Association and the Board Manual of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, as stipulated in the Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, Number DK/19/12/03/IPCC-22 and Number HK.56/3/6/IKT-22 concerning Guidelines for Work Procedures and Relationships between Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual) of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The Corporation's policy on diversity of Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	*Apply*	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah diungkap oleh Perseroan dalam Laporan Tahunan ini, tepatnya di Bab Tata Kelola Perusahaan pada Sub Pembahasan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi di halaman 345. The Company has disclosed its policy regarding the diversity of the composition of Board of Commissioners and Board of Directors in this Annual Report, specifically in the Corporate Governance Chapter under the Sub-Discussion of the Diversity of Composition of Board of Commissioners and Board of Directors on page 345.
2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to achieve the desired composition of the Board. Board of Commissioners uses independent sources to identify qualified candidates.	*Not Applicable* (N/A)	Dewan Komisaris tidak menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan kewenangan penuh terkait kebijakan dan prosedur untuk seleksi Dewan Komisaris sepenuhnya berada pada Pemegang Saham Mayoritas. The Board of Commissioners does not use independent sources to determine qualified candidates. This is because full authority regarding policies and procedures for the selection of the Board of Commissioners rests entirely with the Major Shareholder.
2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. Board of Commissioners/Committee responsible for nominations shall establish nomination procedures and criteria consistent with the Board of Commissioners' competency matrix, which has been approved by Board of Commissioners, and ensure that candidates' profiles meet the requirements set forth in the competency matrix and nomination criteria.	*Not Applicable* (N/A)	Hal ini dikarenakan pengangkatan dan proses pengangkatan seorang calon anggota Dewan Komisaris merupakan wewenang Pemegang Saham Mayoritas. This is because the appointment and process of appointing a candidate member of Board of Commissioners is the authority of the Major Shareholder.
2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota -anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of Board of Commissioners must be structured in such a way that its members, as a group, reflect the diversity in terms of capabilities, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and gender required to effectively fulfill the role of Board of Commissioners.	*Apply*	Pemegang Saham telah menyusun Dewan Komisaris sedemikian rupa sehingga komposisi Dewan Komisaris telah mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahunan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender, sebagaimana hal tersebut dapat diketahui dari informasi pada *website* Perseroan mengenai anggota Dewan Komisaris dan juga termuat dalam Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini. The Shareholders have structured the Board of Commissioners in such a way that its composition reflects diversity in terms of ability, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and gender, as can be seen from the information on the Company's website regarding the members of Board of Commissioners and also contained in the Board of Commissioners Profile in this Annual Report.
2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advisory and supervisory functions to Board of Directors and to address roles where potential conflicts of interest may arise, Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosures regarding the duration of their membership and their independence from the Corporate perspective.	*Explain*	Perseroan telah memiliki Komisaris Independen dengan jumlah sebanyak 2 (dua), jumlah ini telah lebih dari 50%. Dalam Risalah RUPS juga telah mengungkap mengenai jangka waktu keanggotaan Komisaris Independen. Namun Perseroan belum mengatur mengenai pembatasan masa jabatan dari Komisaris Independen. The Company has two Independent Commissioners, representing more than 50% of the total. The Minutes of GMS also disclosed the term of office of the Independent Commissioners. However, the Company has not yet stipulated a limit on the term of office of Independent Commissioners.
2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris To facilitate the effective functioning of Board of Directors and Board of Commissioners and to enhance investor and stakeholder confidence, Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, rigorous, and transparent process for the nomination and appointment of members of Board of Directors and Board of Commissioners	*Apply*	Penunjukan dan Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sepenuhnya menjadi kewenangan Pemegang Saham Mayoritas. The appointment and promotion of members of Board of Directors and Board of Commissioners rests entirely with the major shareholder.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
2.2	**Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration		
2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of Board of Directors consists of a remuneration structure designed to support the Company's sustainable development and encourage the achievement of long-term goals. Remuneration for Board of Directors must be proposed—potentially through Nomination and Remuneration Committee—by the Board of Commissioners for approval by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by taking into account the role of each member of Board of Directors, as well as the economic situation and the Company's performance.	*Apply*	Perseroan telah memiliki kebijakan Remunerasi anggota Direksi, yang struktur atas remunerasi tersebut telah berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang, sebagaimana Perseroan telah menetapkan kebijakan, skema, prosedur, hingga besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang formulanya berlandaskan pada prinsip kehati-hatian serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dimulai dari proses kajian dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, tahap selanjutnya, Komite Nominasi dan Remunerasi akan menyampaikan hasil kajian tersebut dan memberikan rekomendasi atas besaran dan struktur remunerasi kepada Dewan Komisaris untuk ditinjau kembali dan dijadikan sebagai bahan usulan penetapan remunerasi kepada Pemegang Saham di dalam RUPS Tahunan. The Company has a remuneration policy for its Board of Directors, whose remuneration structure is oriented toward sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The Company has established policies, schemes, procedures, and remuneration amounts for the Board of Commissioners and Board of Directors, the formula of which is based on prudent principles and refers to applicable laws and regulations. The procedure for determining remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors begins with a review and information gathering process conducted by the Nomination and Remuneration Committee. The Nomination and Remuneration Committee then submits the review results and provides recommendations on the amount and structure of remuneration to the Board of Commissioners for review and use as input for the remuneration determination proposal to Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders.
2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is geared toward the sustainable development of Corporations and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by Board of Commissioners to the GMSis determined by taking into account the role of each member of Board of Commissioners, as well as the economic situation and the Corporation's performance. Additionally, their positions as President Commissioner and Chairperson, as well as their membership in committees, must also be considered.	*Apply*	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja Perseroan. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. Hal ini termuat dalam Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: HK.01/16/12/SKPR/DIRUT/IKT-24 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penghasilan dan Fasilitas Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dan Keputusan RUPS Perseroan, serta diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini halaman 350. The remuneration policy for members of Board of Commissioners comprises a remuneration structure oriented toward sustainable corporate development and encouraging the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of Board of Commissioners, the economic situation, and the Company's performance. Furthermore, their positions as President Commissioner and chairperson, as well as their membership in committees, must also be taken into account. This is stipulated in the Regulation of the Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.01/16/12/SKPR/DIRUT/IKT-24 dated December 16, 2024, regarding the Compensation and Benefits of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Bodies of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk and Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk and the Resolution of the Company's GMS, and is disclosed in this Annual Report on page 350.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that compensation packages are determined based on the performance, qualifications, and competencies of directors and commissioners, taking into account the Company's operational performance, individual performance, and market conditions, Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for establishing compensation policies for members of Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply*	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini halaman 350. To ensure that remuneration packages are determined based on the achievements, qualifications, and competencies of directors and commissioners, taking into account corporate operational performance, individual performance, and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that fair and transparent procedures are in place for determining the remuneration policy for members of Board of Directors and Board of Commissioners, as disclosed in this Annual Report on page 350.
3	**Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris** Working Relationship Between Board of Directors and Board of Commissioners		
3.1	**Sifat Hubungan Kerja** Nature of Working Relationship		
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There is open discussions between Board of Directors and Board of Commissioners, as well as among members of the Boards of Directors and Commissioners. However, it remains important to maintain the confidentiality of information to prevent the leakage of confidential information.	*Apply*	Dewan Komisaris dan Direksi memiliki sarana diskusi yang terbuka melalui Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan secara rutin. The Board of Commissioners and Board of Directors have an open forum for discussion through regular Board of Commissioners and Board of Directors meetings.
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, Board of Directors members collaborate with Board of Commissioners members in formulating the Corporation's mission, vision, and strategy, and regularly discuss their implementation.	*Apply*	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi telah bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi Perseroan dan secara reguler membahas pengimplementasiannya sebagaimana: 1. Buku Prognosa 2024 & Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025; 2. Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2025-2029. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors has collaborated with the Board of Commissioners in formulating the Company's mission, vision, and strategy and regularly discusses its implementation, as follows: 1. 2024 Prognosis Book & 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP); 2. 2025-2029 Company Long-Term Plan
3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Corporate Secretary plays a crucial role in supporting effective working relationships between Board of Directors and Board of Commissioners, encouraging the implementation of good Corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders	*Apply*	Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana tercantum dalam: 1. *Board Manual* Bab Direksi sub K. Fungsi Pendukung poin 1. Sekretaris Perusahaan halaman 49-50; 2. Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: HK.01/11/6/2/SDMU/DIRUT/IKT-24 Pasal 2 ayat (3) huruf a. The Corporate Secretary plays a crucial role in supporting the effectiveness of working relationship between Board of Directors and Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders, as stated in: 1. Board Manual, Board of Directors Chapter, Sub-Chapter K. Supporting Functions, Point 1. Corporate Secretary, pages 49-50; 2. Regulation of the Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.01/11/6/2/SDMU/DIRUT/IKT-24, Article 2, paragraph (3), subparagraph (a).

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
3.2	**Akses informasi Dewan Komisaris** Access to information from Board of Commissioners		
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktuwaktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. Board of Directors is responsible for ensuring that Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information. Board of Commissioners, for its part, ensures that it receives adequate information. Board of Directors provides Board of Commissioners with regular, comprehensive, and timely information regarding all matters relevant to the Corporation. Board of Commissioners may, at any time, request Board of Directors to provide additional information.	*Apply*	Sekretaris Perusahaan membantu Direksi dalam menyediakan kebutuhan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Melalui Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan secara rutin, Dewan Komisaris juga memperoleh informasi mengenai Perseroan dan informasi lain sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. The Corporate Secretary assists the Board of Directors in providing accurate, relevant, and timely information to the Board of Commissioners. Through regular Board of Commissioners and Board of Directors meetings, the Board of Commissioners also obtains information regarding the Company and other information to support the implementation of its duties and responsibilities.
3.3	**Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi** The Responsibilities of Board of Directors and Board of Commissioners Regarding Impact of Ownership Structure on the Corporation		
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of ownership structure on Corporations. Board of Directors and Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the Corporation's shareholding structure and relationships among shareholders, which may affect the Corporation's management and operations.	*Apply*	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham di Perseroan dan setiap anggota Direksi telah melaporkan kepemilikan saham maupun perubahan kepemilkan saham Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa mempertimbangkan dampak struktur kepemilikan saham dan hubungan antar pemegang saham terkait pengelolaan dan operasi Perseroan. Members of Board of Commissioners do not own shares in the Company, and each member of Board of Directors has reported their share ownership and changes in the Company's share ownership in accordance with applicable regulations. In carrying out its responsibilities, the Board of Directors consistently considers the impact of the share ownership structure and relationships between shareholders on the management and operations of the Company.
4	**Perilaku Etis dan bertanggung jawab** Ethical and Responsible Behavior		
4.1	**Pedoman Etika dan Perilaku** This statement is set forth in		
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.	*Apply*	Dalam Pedoman Kode Etik Bisnis (*Code of Conduct*) Perseroan, telah memuat pernyataan Komitmen Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan akan Kepatuhan terhadap Pedoman Kode Etik Bisnis. Setiap tahunnya, Pernyataan Komitmen tersebut ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan seluruh Karyawan Perseroan. The Company's Code of Conduct includes a statement of commitment from Board of Commissioners, Directors, and Employees to comply with the Code of Conduct. Each year, this Statement of Commitment is signed by members of Board of Commissioners, Directors, and all Company employees.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
	This statement is set forth in the Code of Conduct, which must clearly articulate the Corporation's expectation that every member of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as every employee, will: a. Act in the best interests of the Corporation; b. Act with honesty and a high standard of integrity; c. Remain independent and act based on complete information, in good faith, with due diligence and prudence; d. Comply with laws and regulations applicable to the Corporation and its operations; e. Avoid actions that violate laws and regulations or unethical conduct as defined by the Corporation's code of conduct; f. Not engaging in or participating in any activity that would create a conflict of interest with the Corporation's best interests or that would negatively impact the Corporation's reputation; g. Not deriving personal benefit from the Corporation's property or information, other assets, or its customers, nor causing harm to the Corporation or its customers; h. Not using one's position or opportunities arising from one's position for personal gain. i. Avoiding the act of soliciting or accepting from a third party any payment, gratuity, or other benefit for oneself or for another person that creates a conflict of interest or provides an advantage to a third party in violation of laws and regulations. j. Respecting differing opinions and the rights of every member of Board of Directors, Board of Commissioners, and employee. k. Ensuring complete, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the Corporation to regulators and in other public communications.		
4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya. Board of Directors establishes policies and practices regarding anti-money laundering and counter-terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political engagement, in accordance with national or international standards on anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, or other relevant standards.	*Apply*	Direksi telah menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan (*anti fraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional, yang termuat dalam Pedoman Kode Etik Bisnis (*Code of Conduct*) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor DK/12/12/02/IPCC-22 dan HK.56/3/4/IKT- 22. The Board of Directors has established policies and practices for anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political involvement, all in accordance with national and international standards, as outlined in the Code of Conduct, established by Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors No. DK/12/12/02/IPCC-22 and HK.56/3/4/ IKT-22.
4.2	Nilai – nilai dan Budaya Organisasi Organizational Values and Culture		
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. The Corporation articulates, fosters, and embodies its Corporate culture and values	*Apply*	Perseroan telah berupaya mengartiulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi melalui sosialisasi budaya Perseroan, sosialisasi *Code of Conduct*, serta memberikan pelatihan terhadap Insan Perseroan berkaitan dengan budaya, nilai-nilai, dan etika Perseroan. The Company has endeavored to articulate, foster, and express its corporate culture and values through the socialization of the Company's culture, the dissemination of the Code of Conduct, and the provision of training to Company personnel regarding the Company's culture, values, and ethics.
4.3	**Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya** Communication and Enforcement of Ethical Guidelines, Values, and Culture		
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. Corporate articulates, fosters, and promotes its culture and values. The Corporate Code of Conduct are effectively communicated to Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees, integrated into Corporate strategy and operations—including risk management systems and compensation structures—and enforced.	*Apply*	Pedoman Kode Etik Bisnis (*Code of Conduct*) telah dikomunikasikan kepada Insan Perseroan melalui distribusi *Code of Conduct* dan sosialisasi atas *Code of Conduct*. Perseroan menerima setiap pengaduan melalui sarana pengaduan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang dimiliki oleh Perseroan dan dikelola oleh pihak independen. Perseroan juga memastikan tindak lanjut atas setiap pelaporan yang masuk sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam penegakan *Code of Conduct*. The Code of Conduct has been communicated to the Company's personnel through the distribution of the Code of Conduct and its socialization. The Company receives all complaints through its whistleblowing system, which is owned and managed by an independent party. The Company also ensures follow-up on every report received as a demonstration of its commitment to enforcing the Code of Conduct.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
5	**Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan** Risk Management, Internal Control, and Compliance		
5.1	**Pengendalian Internal dan Kepatuhan** Internal Control and Compliance		
5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. Board of Directors periodically reviews the appropriateness of design and operational effectiveness of the Corporate governance, risk management, internal control, and compliance systems, and reports on the implementation and results of these reviews to shareholders through the Company's annual report.	*Apply*	Direksi Perseroan telah melakukan reviu secara berkala terhadap ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan korporasi, melalui reviu dan pemutakhiran terhadap kebijakan-kebijakan terkait, antara lain: 1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan dimutakhirkan pada tahun 2022, melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.56/3/7/ IKT-22 tanggal 19 Desember 2022; 2. Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor:PW.05.01/24/12/1/MNRS/DIRUT/IKT24 tentang Penerapan Manajemen Risiko diLingkungan PT Indonesia KendaraanTerminal Tbk tanggal 24 Desember 2024. Atas reviu yang dilakukan, Perseroan melaporkannya kepada Pemegang Saham melalui Laporan Tahunan, sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan ini. The Company's Board of Directors has conducted regular reviews of the design accuracy and operational effectiveness of its governance, risk management, internal control, and corporate compliance systems, through reviews and updates of related policies, including: 1. The Code of Corporate Governance was updated in 2022 through Joint Decree of Board of Commissioners and Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.56/3/7/IKT-22 dated December 19, 2022; 2. Board of Directors Regulation of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. PW.05.01/24/12/1/MNRS/DIRUT/IKT24 regarding the Implementation of Risk Management at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dated December 24, 2024. The Company reports the results of these reviews to Shareholders through its Annual Report, as included in this Annual Report.
5.2	**Manajemen Risiko** Risk Management		
5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are inseparable; they are disclosed transparently and integrated into the duties and responsibilities of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as discussed in meetings of Board of Commissioners and Board of Directors.	*Apply*	Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berkenaan dengan pengelolaan dan pemantauan risiko, diantaranya disampaikan dalam Laporan Manajemen Risiko dan tanggapan Dewan Komisaris terhadap profi risiko Perseroan. Selain itu secara berkala juga dilakukan pemantauan dan mengkaji efektiitas pengendalian dan pengelolaan risiko melalui Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. The Board of Commissioners and the Board of Directors have carried out their duties and responsibilities regarding risk management and monitoring, including reporting in the Risk Management Report and the Board of Commissioners' response to the Company's risk profile. Furthermore, they periodically monitor and review the effectiveness of risk control and management through Board of Commissioners and Board of Directors meetings.
5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. Risk Management Monitoring Committee assists Board of Commissioners in carrying out its duties by establishing a transparent, focused, and independent mechanism for supervising Corporate risk management.	*Apply*	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko Perseroan sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 13/KEP-DK/XII/IKT-2018 tanggal 19 Desember 2018. The Risk Management Monitoring Committee assists the Board of Commissioners in carrying out its duties by creating a transparent, focused, and independent mechanism for overseeing the Company's risk management, as stipulated in the Risk Management Monitoring Committee Charter, established through Board of Commissioners Decree No. 13/KEP-DK/XII/IKT-2018 dated December 19, 2018.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
5.3	**Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan** Integration of Governance, Risk Management, and Compliance		
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. Board of Directors establishes an integrated governance, risk management, and compliance (GRC) system, addressing various uncertainties in a coordinated manner and with the highest integrity, to ensure that the Corporation can achieve its objectives.	*Explain*	Direksi membangun sistem governansi,manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menanganiberbagai ketidakpastian secara terpadudan dengan integritas yang tinggi, akan tetapi Direksi tidak melaksanakan penilaian untuk menyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors has established an integrated governance, risk management, and compliance (GRC) system, addressing various uncertainties in a coordinated manner and with a high degree of integrity; however, the Board has not conducted an assessment to ensure that the corporation can achieve its objectives.
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Board of Directors ensures that the division in charge of compliance does not also perform functions that could potentially give rise to a conflict of interest.	*Apply*	Sekretaris Perusahaan yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentigan. The Corporate Secretary, who oversees the compliance function, shall not concurrently perform any functions that could potentially create a conflict of interest.
5.4	**Audit Internal** Internal Audit		
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. Board of Commissioners through Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function assists the Corporation in achieving its objectives by applying an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal controls, and Corporate governance.	*Apply*	Komite Audit membantu Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas Audit Internal dilakukan secara objektif dan independen, diantaranya dilaksanakan dengan: 1. Meninjau Laporan Audit; 2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja SPI; 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SPI (PKPT); 4. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern serta pelaksanaannya. The Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring that the Internal Audit is carried out objectively and independently, including by: 1. Reviewing Audit Reports; 2. Evaluating the performance of Internal Audit Unit; 3. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of Internal Audit Unit audit plan, scope, and budget (PKPT); 4. Providing recommendations regarding improvements to the internal control system and its implementation.
6	**Pengungkapan dan Transparansi** Disclosure and Transparency		
6.1	**Kebijakan Pengungkapan** Disclosure Policy		
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. Corporate disclosure and transparency policies and procedures ensure the disclosure of material information and safeguard sensitive and confidential Corporate information.	*Apply*	Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastian pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia Perseroan, sebagaimana kebijakan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor HK- 56/9/14/IKT-17 tanggal 6 November 2017 tentang Kebijakan Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian Informasi Serta Dokumen Di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal. The Company has disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information and safeguard the Company's sensitive and confidential information, as stipulated in Board of Directors Decree No. HK-56/9/14/IKT-17 dated November 6, 2017, concerning the Policy and Guidelines for the Management and Control of Information and Documents within PT Indonesia Kendaraan Terminal.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' right to receive relevant material information about the Corporation on a regular and timely basis must be upheld.	*Apply*	Hak Pemegang Saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang Peseroan, telah dipenuhi oleh Perseroan diantaranya dengan publikasi informasi pada *website* Perseroan, serta pada waktu tertentu berkaitan dengan pelaksanaan RUPS, Perseroan juga menyampaikan informasi yang diperlukan baik yang dimuat dalam *website* Perseroan. The Company has fulfilled the right of shareholders to regularly and timely obtain relevant material information about the Company, including by publishing information on the Company's website. The Company also provides necessary information, including through the Company's website, at certain times in connection with the holding of the GMS.
6.2	**Laporan Keuangan dan Keberlanjutan** Financial and Sustainability Report		
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Corporate entities disclose the systems and procedures they use to ensure that interim financial reports that have not been audited or reviewed by an external auditor are, in all material respects, accurate, complete, and provide investors with the information necessary to make informed investment decisions.	*Apply*	Perseroan memiliki sistem dan prosedur yang memastikan bahwa memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat. The Company has systems and procedures that ensure that interim financial reports that are not audited or reviewed by external auditors are materially accurate, complete, and provide investors with the right information to make informed investment decisions.
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. Audit Committee ensures the quality of financial statement audits conducted by external auditors. This includes recommending the appointment, reappointment, and, if necessary, dismissal and remuneration of external auditors.	*Apply*	Komite Audit Perseroan telah memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Auditor Eksternal, sebagaimana dalam penunjukan KAP, Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, hal ini termuat diantara dalam Risalah RUPS perihal penetapan KAP untuk audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. The Company's Audit Committee has ensured the quality of the financial statement audit performed by the External Auditor. As per the appointment of Public Accounting Firm, the Board of Commissioners has considered the recommendations of Audit Committee, as stated in the Minutes of GMS regarding the appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2025.
6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately and structured in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	*Apply*	Perseroan telah menyusun Laporan Keberlanjutan yang akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan yang mengacu pada SEOJK Nomor 16 tahun 2021, serta *Global Reporting Initiative (GRI) Standards* tahun 2021. The Company has prepared an accurate Sustainability Report in accordance with the sustainability reporting framework, which refers to SEOJK Number 16 of 2021 and the 2021 Global Reporting Initiative (GRI) Standards.
6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The Company has published a Sustainability Report, which forms an integral part of the Annual Report. The Company's Sustainability Report details its sustainability performance, covering economic, social, environmental, and governance aspects, presented in a three-year comparison, with the aim of helping shareholders and stakeholders understand the Corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.	*Apply*	Perseroan menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi, melalui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang dibuat secara terpisah namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. The Company publishes its annual reports in an integrated manner, through the Annual Report and the Sustainability Report, which are prepared separately but form an inseparable whole.
6.3	**Diseminasi Informasi** Information Dissemination		
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels must provide equal, timely, and relatively inexpensive access to information that is relevant to users.	*Apply*	Perseroan memiliki saluran penyebaran informasi dengan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna, yaitu melalui *website* dan sosial media Perseroan. The Company has information dissemination channels that provide equal, timely, and relatively affordable access to relevant information for users, namely through the Company's website and social media.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Corporation ensures that the annual statement regarding implementation of the Indonesian Corporate Governance Code, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guideline, is available on its website for a minimum period of five years.	*Explain*	Hal ini dikarenakan tahun 2025 merupakan kali pertama Perseroan melakukan penilaian mandiri kepatuhan terhadap penerapan PUGKI. This is because 2025 was the first year the Company to conduct a self-assessment of its compliance with PUGKI implementation.
6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. For Corporations listed on a capital market in a jurisdiction other than their home jurisdiction, the applicable laws and regulations governing Corporate governance must be clearly disclosed. In the case of cross-listing, the criteria and procedures for cross-listing, as well as the criteria and procedures for meeting the listing requirements for the primary listing, must be transparent and documented.	*Not Applicable* (N/A)	Hal ini dikarenakan IPCC hanya *listing* di Indonesia. This is because IPCC is only registered in Indonesia.
7	**Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham** Protection of Shareholders' Rights		
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The Corporation has a communication policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.	*Apply*	Perseroan memiliki kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi Pemegang Saham atau investor yang termuat dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perseroan. Implementasi atas kebijakan tersebut, dilakukan melalui penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS Perseroan pada tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025. The Company has a communication policy that facilitates and encourages participation by shareholders or investors, as outlined in the Company's Articles of Association and Board Manual. This policy is implemented through the holding of a General Meeting of Shareholders (GMS). The Company's 2025 GMS was held on June 12, 2025.
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The Corporation, as the parent entity, ensures that its Corporate governance policies apply to subsidiaries and jointly controlled entities in which the Corporation has a significant investment.	*Not Applicable* (N/A)	Hal ini dikarenakan perusahaan tidak memiliki entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. This is because the company does not have any subsidiaries or entities under common control in which the corporation has significant investments.
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. The Corporation has rules and procedures governing acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions—such as mergers and the sale of substantial Corporate assets—to ensure that such transactions are conducted transparently and on fair terms, and to protect the rights of all shareholders in accordance with their respective classes.	*Apply*	Perseroan memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan. The Company has rules and procedures governing acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and substantial sales of corporate assets to ensure that transactions occur transparently and under fair conditions and protect the rights of all shareholders, according to their class, as outlined in Articles 25 and 26 of the Company's Articles of Association.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
7.2	**Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham** Fair Treatment of Shareholders		
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b). Pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The Corporation has rules and procedures that ensure: a) All shareholders of the same series within a class of stock must be treated equally; b) Disclosure of such rules and procedures, as well as disclosure of the capital structure and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control disproportionate to their shareholding.	*Explain*	Perseroan belum memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a) Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara. b) Pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memeroleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. Hal ini dikarenakan Perseroan hanya menerbitkan satu seri saham dalam satu kelas. The Company does not yet have rules and procedures that ensure a) that all shareholders of the same series within a share class are treated equally. b) that these rules and procedures are disclosed, as well as the capital structure and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control disproportionate to their share ownership. This is because the Company only issues one series of shares within a single class.
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The Corporation has policies and procedures in place to ensure that related-party transactions are approved and executed in a manner that ensures conflicts of interest are properly managed and protects the interests of the Corporation and its shareholders.	*Explain*	Perseroan belum memiliki aturan dan prosedur tersendiri berkaitan dengan transaksi pihak berelasi. Sampai dengan saat ini, aturan dan prosedur sehubungan dengan transaksi pihak berelasi mengacu pada PSAK 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. The Company does not yet have its own rules and procedures regarding related party transactions. Currently, the rules and procedures regarding related party transactions refer to PSAK 224 concerning Related Party Disclosures.
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. The Corporation has established and disclosed policies to prevent insider trading. The Corporation has clear rules regarding any trading in the Corporation's shares by Directors, Commissioners, and insiders to ensure that no one may profit, directly or indirectly, from information that is not yet available to the market.	*Apply*	Kebijakan yang mencegah *insider trading* diatur dalam Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: HK.01/19/8/1/SKPR/DIRUT/IKT-24 tanggal 19 Agustus 2024 dan telah diungkapkan dalam *website* Perseroan. The policy that prevents insider trading is set forth in PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Directors Regulation No. HK.01/19/8/1/SKPR/DIRUT/IKT-24 dated August 19, 2024 and has been disclosed on the Company's website.
7.3	**Rapat Umum Pemegang Saham** General Meeting of Shareholders		
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. The Corporation shall issue summons for the GMS with a complete agenda and meeting materials as early as possible (no later than 28 days before the GMS) to provide shareholders with sufficient time and materials to thoroughly review the meeting agenda. The meeting invitation and all GMS information shall be disclosed via electronic means, such as the Corporation's website	*Explain*	Pemanggilan RUPS yang dilakukan oleh Perseroan dilakukan kurang dari 28 hari sebelum pelaksanaan RUPS. Hal ini dikarenakan Perseroan melaksanakan pemanggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS yang dipublikasikan secara lengkap pada saat pemanggilan, paling lambat 21 hari sebelum RUPS sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 /POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui *website* Perseroan, *website* Bursa Efek Indonesia, dan KSEI. The Company's summons to the GMS is made less than 28 days before the GMS. This is because the Company carries out the GMS summons with the agenda and materials of the GMS published in full at the time of the summons, no later than 21 days before the GMS in accordance with the provisions of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies. The meeting summons and all information about the GMS are disclosed through the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website, and KSEI.
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The Corporation has and discloses rules and procedures that enable shareholders to participate and vote effectively at the General Meeting of Shareholders.	*Apply*	Perseroan memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS sebagaimana termuat dalam Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan. The Company has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders' participation and effective voting at the GMS, as set out in Article 14 of the Company's Articles of Association.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of Board of Directors and Board of Commissioners	*Apply*	Pemegang saham telah berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana ditunjukkan dalam Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024. Shareholders have actively participated in determining the appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as indicated in the Summary of the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The Corporation ensures the transparency and accountability of external auditors at the GMS.	*Explain*	Berdasarkan Pemanggilan RUPS yang dipublikasikan di *website* Perseroan, tidak diinformasikan calon Auditor Eksternal yang ditunjuk kembali dalam RUPS. Based on the GMS Summons published on the Company's website, no information was provided on the reappointment of External Auditor candidate at the GMS.
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. The voting results and a complete summary of the minutes of General Meeting of Shareholders are announced to the public on the next business day.	*Apply*	Perseroan telah mengumumkan kepada publik perihal hasil pemungutan suara dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 secara lengkap, sebagaimana termuat dalam *website* Perseroan. The Company has announced to the public the complete voting results and Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Fiscal Year, as contained on the Company's website.
8	**Pemangku Kepentingan Lainnya** Other Stakeholders		
8.1	**Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*stakeholder engagement*)** Stakeholder Engagement		
8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The Corporation, through its Corporate Secretary, maintains regular, transparent, and effective communication with key stakeholders and engages with them to understand their expectations and concerns, as well as the Corporation's impact on them.	*Apply*	Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak Perseroan terhadap mereka, proses tersebut dilaksanakan dengan mengidentifikasi Pemangku Kepentingan berdasarkan kelompok melalui metode *Dependency, Responsibility, Tension, Influence, Diverse Perspective*, dan *Proximity*. Perseroan juga melakukan pembinaan hubungan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyusunan Laporan Keberlanjutan, khususnya untuk menentukan Topik Material. Dalam menindaklanjuti keluhan dan menerima saran dari Pemangku Kepentingan, Perseroan melaksanakan sejumlah survei untuk mendapatkan umpan balik dari para pelanggan, vendor, dan juga karyawan. Pertanyaan-pertanyaan dalam setiap survei ditujukan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan juga saran ataupun kritik yang membangun. Perseroan menjadikan hasil survei sebagai sebuah pembelajaran untuk mempererat hubungan kedua belah pihak di masa mendatang. The Company, through its Corporate Secretary, has conducted regular, transparent, and effective communication with key stakeholders and engaged them to understand their expectations and concerns, as well as the Company's impact on them. This process was carried out by identifying stakeholders by group using the Dependency, Responsibility, Tension, Influence, Diverse Perspective, and Proximity methods. The Company also fosters relationships with stakeholders in the preparation of the Sustainability Report, specifically to determine material topics. To follow up on complaints and receive suggestions from stakeholders, the Company conducted several surveys to obtain feedback from customers, vendors, and employees. The questions in each survey aimed to determine levels of satisfaction and provide constructive suggestions or criticism. The Company used the survey results as a learning experience to strengthen relationships between the two parties in the future.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
8.2	**Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis** Commitment to Sustainability in Business Models		
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. Board of Commissioners, together with Board of Directors, is responsible, accountable, and transparent regarding sustainability governance, including setting Corporate sustainability strategies, priorities, and targets. Board of Directors and Board of Commissioners inCorporate sustainability considerations in the performance of their roles, including, among other things, in the development and implementation of Corporate strategies, business plans, key action plans, and risk management.	*Apply*	Dewan Komisaris dan Direksi telah bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan atas governansi keberlanjutan. Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin melaksanakan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi salah satunya sebagai evaluasi atas kinerjanya dalam menangani dan mengawasi risiko serta peluang yang signifikan terkait keberlanjutan Perseroan. Fungsi pengawasan dan manajemen diterapkan dalam hal keberlanjutan, dimana Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas melalui kegiatan telaah yang melibatkan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi. Pelaksanaan fungsi governansi keberlanjutan yang berjalan saat ini di Perseroan menjadi tanggung jawab Direksi. Pelaksanaan sehari-hari penerapan praktik keberlanjutan diserahkan kepada fungsi Sekretaris Perusahaan dan fungsi Manajemen Mutu & HSE. Terhadap strategi, prioritas, target keberlanjutan, serta kinerjanya disampaikan oleh Perusahaan kepada Pemangku Kepentingan melalui Laporan Keberlanjutan. The Board of Commissioners and Board of Directors have been responsible, accountable, and transparent in their sustainability governance. The Board of Commissioners and Board of Directors regularly hold Board of Commissioners and Board of Directors meetings, one of the purposes of which is to evaluate their performance in managing and overseeing significant risks and opportunities related to the Company's sustainability. Supervision and management functions are implemented in sustainability, with the Board of Commissioners acting as a supervisor through review activities involving recommendations and advice to the Board of Directors. The implementation of the Company's current sustainability governance function is the responsibility of Board of Directors. Day-to-day implementation of sustainability practices is delegated to the Corporate Secretary and Quality Management & HSE functions. The Company communicates its sustainability strategies, priorities, targets, and performance to stakeholders through the Sustainability Report.
8.3	**Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan** Protection of Stakeholders		
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. Board of Directors confirms and discloses that the Company's operations reflect the application of high standards of ethics, social responsibility, and environmental stewardship throughout the organization, and ensures that appropriate policies and procedures are in place to respect and comply with the rights of stakeholders.	*Apply*	Direksi telah memastikan dan mengungkapkan bahwa operasional Perseroan mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibuktikan dengan dimilikinya Pedoman Kode Etik Bisnis (*Code of Conduct*) dan atas pelaksanaannya tidak ditemukan adanya pelanggaran atas *Code of Conduct*. Perseroan juga menjalankan Tanggung Jawab Sosial pada tahun 2025 sebagaimana hal tersebut termuat dalam RKAP tahun 2025 dan Laporan Manajemen Tahun 2025. TJSL Perseroan termasuk dalam KPI (*Key Performance Indicator*) Perusahaan, pelaksanaannya terdiri dari 12 program turunan dari SDGs (*Sustainable Development Goals*) dan turunan dari 3 pilar CSR Pelindo, yaitu IPCC Peduli Pendidikan, IPCC Peduli Lingkungan, dan IPCC Peduli Kesehatan. The Board of Directors has ensured and disclosed that the Company's operations reflect the implementation of ethical standards, social and environmental responsibility, as evidenced by the Code of Conduct, and its implementation has not revealed any violations of the Code. The Company also implemented its Corporate Social Responsibility (CSR) program by 2025, as outlined in the 2025 Work Plan and Budget (RKAP) and the 2025 Management Report. The Company's Corporate Social Responsibility (CSR) program is included in the Company's Key Performance Indicators (KPI). Its implementation consists of 12 programs derived from the Sustainable Development Goals (SDGs) and derived from Pelindo's three CSR pillars: IPCC Cares for Education, IPCC Cares for the Environment, and IPCC Cares for Health.

No.	Uraian Description	*Apply/ Explain*	Penjelasan Implementation Description
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. Board of Directors encourages employees to work in the Corporation's long-term best interests and to prioritize sustainability.	*Apply*	Direksi telah mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang Perseroan dan mengedepankan keberlanjutan melalui: 1. Program pengembangan dan manajemen Sumber Daya Manusia dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada Karyawan. 2. Pemberian remunerasi berbasis kinerja (insentif performansi) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor HK.56/2/13/IKT-19 tentang Penghasilan Bagi Karyawan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. The Board of Directors has encouraged employees to work for the long-term interests of the Company and prioritize sustainability through: 1. Human Capital development and management programs by providing training and certification to employees. 2. Performance-based remuneration (performance incentives) as stipulated in Board of Directors Decree No. HK.56/2/13/IKT-19 concerning Income for Employees of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Penerapan atas Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Perseroan terus berupaya dalam memenuhi rekomendasi Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pada Surat Edaran No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola merupakan standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang harus diterapkan Perseroan untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola. Berikut uraian penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka di lingkup IPCC:

Implementation of Aspects and Principles of Corporate Governance in Accordance with the Provisions of the Financial Services Authority

The Company continues its efforts to comply with the recommendations set out in OJK Regulation No. 21/POJK.04/2014 on the Guidelines for the Implementation of Corporate Governance for Public Companies and OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance Guidelines for Public Companies.

The OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance Guidelines for Public Companies covers 5 (five) aspects, 8 (eight) principles, and 25 (twenty-five) recommendations for the implementation of good corporate governance aspects and principles. These recommendations serve as the standard for implementing good corporate governance aspects and principles that must be applied by the Company to ensure the implementation of governance principles. The following is a description of the implementation of the Corporate Governance Guidelines for Public Companies within IPCC:

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendations		Penjelasan Penerapan di Perseroan Explanation of Implementation in the Company
	No.	Perihal Regarding	
Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham. Aspect 1: Public Company Relationship with Shareholders in Guaranteeing Shareholder Rights;			
Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Principle 1 Increasing the Value of Holding GMS	1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Public Companies have technical methods or procedures for collecting votes, both openly and privately, that prioritize independence and the interests of shareholders.	Terpenuhi Tata cara mengenai pengambilan suara dalam RUPS dan e-RUPS telah diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan juga dalam Tata Tertib RUPS, yang keduanya dapat diunggah dari Situs Web Perseroan. Dalam praktiknya pokok-pokok Tata Tertib RUPS dibacakan sebelum RUPS dibuka, setiap pemegang saham mendapatkan surat suara masing-masing sesuai dengan kepemilikan sahamnya, dan pemberian suara dapat dilakukan melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sehingga independensi pemegang saham dapat direalisasikan dengan baik. Complied The procedures for voting at the GMS and e-GMS are regulated in the Company's Articles of Association and the GMS Rules of Procedure, both of which can be downloaded from the Company's website. In practice, the main points of the GMS Rules of Procedure are read out before the GMS opens, each shareholder receives a ballot corresponding to their share ownership, and voting can be done through eASY. KSEI, provided by KSEI, thus ensuring shareholder independence.
	1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of Board of Directors and members of Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS.	Terpenuhi. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana diungkapkan pada halaman 303 pada Laporan Tahunan ini. Complied. All members of Board of Directors and Board of Commissioners were present at the Company's Annual GMS, as disclosed on page 303 of this Annual Report.
	1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the GMS minutes is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.	Terpenuhi. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Perseroan sejak penyelenggaraan RUPS pada tahun 2024 sampai dengan yang terakhir diselenggarakan pada tahun 2025 dapat diunggah dari Situs Web Perseroan. Complied. Announcements of the Summary of Minutes of the Company's General Meetings of Shareholders (GMS) from the first GMS held in 2024 until the last one held in 2025 can be uploaded from the Company's Website.

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance

Prinsip Principles	**Rekomendasi** Recommendations		**Penjelasan Penerapan di Perseroan** Explanation of Implementation in the Company
	No.	**Perihal** Regarding	
			Terpenuhi. Kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham/Investor dapat dilihat pada Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: HK.01/4/1/1/SKPR/DIRUT/IKT-24 tentang Pedoman Komunikasi di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk milik Perseroan dan pengungkapan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham/investor dalam *website* Perseroan, termasuk dengan media untuk menghubungi Perseroan melalui Divisi Sekretaris Perusahaan **Kontak:** **Alamat:** Jalan Sindang Laut No.100, Cilincing, Jakarta Utara, 14110 **Telp:** +62 21 4393 2251 **E-mail:** corsec@indonesiacarterminal.co.id komersial@indonesiacarterminal.co.id **Media Sosial:** X : @IPCC Terminal Kendaraan Facebook : IPCC Terminal Kendaraan Instagram : @IPCC Terminal Kendaraan Youtube: IPCC Terminal Kendaraan Tiktok: IPCC Terminal Kendaraan LinkedIn: IPCC Terminal Kendaraan Complied. The communication policy with Shareholders/Investors can be found in the Regulation of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: HK.01/4/1/1/SKPR/DIRUT/IKT-24 concerning Communication Guidelines within the Company's PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk environment and the disclosure of information required by shareholders/investors on the Company's website, including media to contact the Company through the Corporate Secretary Division. **Contact:** **Address:** Jalan Sindang Laut No. 100, Cilincing, North Jakarta, 14110 **Phone**: +62 21 4393 2251 **Email:** corsec@indonesiacarterminal.co.id komersial@indonesiacarterminal.co.id **Social Media:** X : @IPCC Terminal Kendaraan Facebook : IPCC Terminal Kendaraan Instagram : @IPCC Terminal Kendaraan Youtube: IPCC Terminal Kendaraan Tiktok: IPCC Terminal Kendaraan LinkedIn: IPCC Terminal Kendaraan
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2 Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.	2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Public companies have a policy regarding communication with shareholders or investors.	
	2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Public Companies disclose their communication policies with shareholders or investors on their websites.	Terpenuhi. Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: HK.01/4/1/1/SKPR/DIRUT/IKT-24 tentang Pedoman Komunikasi di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk telah tersedia dalam *website* Perseroan. Complied. The Communication Policy with Shareholders or Investors as stipulated in the Regulation of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: HK.01/4/1/1/SKPR/DIRUT/IKT-24 concerning Communication Guidelines within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk is available on the Company's website.

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendations		Penjelasan Penerapan di Perseroan Explanation of Implementation in the Company
	No.	Perihal Regarding	
Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2: Board of Commissioners' Functions and Roles			
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Principle 3 Strengthening the Membership and Composition of Board of Commissioners	3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. The determination of number of members of Board of Commissioners takes into account the condition of Public Company.	Terpenuhi. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan saat ini sebanyak 3 (tiga) orang dimana jumlah tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Perseroan. Complied. The Company's Board of Commissioners currently consists of 3 (three) members, a number that has been adjusted to meet the Company's needs and circumstances.
	3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determining the composition of members of Board of Commissioners considering the diversity of skills, knowledge and experience required.	Terpenuhi. Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan sudah memperhatikan keberagaman Dewan Komisaris sebagaimana telah diungkapkan dalam halaman 334 Laporan Tahunan ini. Complied. The composition of the Company's Board of Commissioners takes into account the diversity of Board of Commissioners, as disclosed on page 334 of this Annual Report.
Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4 Improving the Quality of Implementation of Board of Commissioners Duties and Responsibilities.	4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate the Board of Commissioners' performance.	Jelaskan. Dewan Komisaris tidak mempunyai kebijakan penilaian mandiri/sendiri atas kinerja Dewan Komisaris. Explain. The Board of Commissioners does not have a policy for self-assessment of its performance.
	4.2	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy for evaluating the Board of Commissioners' performance is disclosed in the Public Company's Annual Report.	Jelaskan. Dewan Komisaris tidak mempunyai kebijakan penilaian mandiri/sendiri atas kinerja Dewan Komisaris. Explain. The Board of Commissioners does not have a policy for self-assessment of its performance.
	4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.	Terpenuhi. Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan diatur dalam *Board Manual*. Complied. The Nomination and Remuneration Committee's Nomination Function Procedures include assisting the Board of Commissioners in preparing for the succession of members of Board of Directors, as stipulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter.
	4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Board of Commissioners or Committee that performs the functions of Nomination and Remuneration shall formulate a succession policy as part of the process for nominating members of Board of Directors.	Terpenuhi. Dalam Tata Cara dan Prosedur Fungsi Nominasi yang dilakukan oleh komite Nominasi dan Remunerasi termasuk membantu Dewan Komisaris untuk mempersiapkan suksesi anggota Direksi sebagaimana diatur prosedur kerja Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Complied. The Company currently has 3 (three) members on Board of Directors, a number that has been adjusted to meet the Company's needs and circumstances.

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendations		Penjelasan Penerapan di Perseroan Explanation of Implementation in the Company
	No.	Perihal Regarding	
Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi Aspect 3: BOARD OF DIRECTORS' FUNCTIONS AND ROLES			
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5 Strengthening Membership and Composition of Board of Directors.	5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Determining the number of members of Board of Directors consider the Public Company condition and effectiveness in decision making	Terpenuhi. Jumlah anggota Direksi Perseroan saat ini sebanyak 3 (tiga) orang dimana jumlah tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Perseroan. Complied. The Company currently has 3 (three) members on Board of Directors, a number that has been adjusted to meet the Company's needs and circumstances.
	5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition of members of Board of Directors is determined with due consideration for the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	Terpenuhi. Komposisi anggota Direksi Perseroan sudah memperhatikan keberagaman Direksi sebagaimana telah diungkapkan dalam halaman 104 Laporan Tahunan ini. Complied. The composition of the Company's Board of Directors takes into account the diversity of Board of Directors, as disclosed on page 104 of this Annual Report.
	5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of Board of Directors who are in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting.	Terpenuhi. Perseroan telah memiliki anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan serta memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang Akuntansi, yaitu Bapak Wing Megantoro. Profil beliau bisa dilihat pada bagian Profil Direksi di halaman 104 Laporan Tahunan ini. Complied. The Company has a Board of Directors member who oversees accounting and finance and possesses expertise and knowledge in accounting, namely Wing Megantoro. His profile can be found in the Board of Directors' Profiles section on page 104 of this Annual Report.
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6 Improving the Quality of Implementation of Board of Directors' Duties and Responsibilities.	6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. Board of Directors has a self-assessment policy to assess the Board of Directors performance.	Jelaskan. Direksi belum memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) pada *Board Manual* atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. Explain. The Board of Directors does not yet have a self-assessment policy in the Board Manual for collegial performance assessment of Board of Directors.
	6.2	Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy for assessing the Board of Directors performance is disclosed in the Public Company's annual report.	Jelaskan. Direksi belum memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) pada *Board Manual* atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. Explain. The Board of Directors does not yet have a self-assessment policy in the Board Manual for collegial performance assessment of Board of Directors.
	6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of Board of Directors if they are involved in financial crimes.	Terpenuhi. Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan diatur dalam *Board Manual*. Complied. The policy regarding the resignation of Board of Directors members involved in financial crimes is regulated in the Board Manual.

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendations		Penjelasan Penerapan di Perseroan Explanation of Implementation in the Company
	No.	Perihal Regarding	
Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Stakeholder Participation			
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7 Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.	7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Public Companies have policies to prevent insider trading	Terpenuhi. Kebijakan yang mencegah insider trading diatur dalam Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: HK.01/19/8/1/SKPR/DIRUT/IKT-24 tanggal 19 Agustus 2024 dan telah diungkapkan dalam *website* Perseroan. Complied. The policy that prevents insider trading is set forth in PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Directors Regulation No. HK.01/19/8/1/SKPR/DIRUT/IKT-24 dated August 19, 2024, and has been disclosed on the Company's website.
	7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud. Public Companies have anti-corruption and anti-fraud policies.	Terpenuhi. Perseroan telah memiliki Kebijakan Anti Korupsi dan Anti *Fraud* sebagaimana telah diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini halaman 104. Complied. The Company has an Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy as disclosed in the Corporate Governance chapter of this Annual Report on page 104. Complied.
	7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Public Companies have policies regarding the selection and improvement of supplier or vendor capabilities.	Terpenuhi. Perseroan telah memiliki Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor sebagaimana telah diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini halaman 496. Complied. The Company has a Policy on supplier or vendor selection as disclosed in the Corporate Governance chapter of this Annual Report on page 496.
	7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Public Companies have policies regarding the fulfillment of creditor rights.	Jelaskan. Perseroan belum memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Explain. The Company does not yet have a policy regarding the fulfillment of creditors' rights.
	7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. Public Companies have a Whistle Blowing System. policy.	Terpenuhi. Perseroan telah memiliki kebijakan Sistem whistleblowing sebagaimana telah diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini halaman 488. pendek kepada Direksi dan karyawan. The Company has a whistleblowing system policy, as disclosed in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report on page 488.
	7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Public Companies have a Whistle Blowing System. policy.	Jelaskan. Perseroan belum memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan, akan tetapi Perseroan telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka pendek kepada Direksi dan karyawan. Complied In addition to the Company's website as a medium for information disclosure, the Company also utilizes social media platforms. Specifically, for the e-GMS, the Company utilizes eASY.KSEI feature provided by KSEI.
Aspek 5 : Keterbukaan Informasi Aspect 5: INFORMATION DISCLOSURE			
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8 Improving the Implementation of Information Disclosure	8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Public Companies make wider use of information technology apart from Websites as a medium for information disclosure.	Terpenuhi. Selain *website* Perseroan sebagai media keterbukaan informasi, Perseroan memanfaatkan juga sosial media Perseroan dan khususnya terkait penyelenggaraan e-RUPS, Perseroan menggunakan fitur-fitur eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Complied In addition to the Company's website as a medium for information disclosure, the Company also utilizes social media platforms. Specifically, for the e-GMS, the Company utilizes eASY.KSEI feature provided by KSEI.

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendations		Penjelasan Penerapan di Perseroan Explanation of Implementation in the Company
	No.	Perihal Regarding	
	8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Public Company's Annual Report discloses the ultimate beneficial owner in Public Company share ownership of at least 5% (five percent), in addition to disclosure of the ultimate beneficial owner in Public Company share ownership through the major and controlling shareholders.	Terpenuhi Perseroan telah mengungkapkan Pemilik Manfaat Akhir secara bulanan pada *website* Bursa Efek Indonesia dan *website* Perseroan serta dalam Laporan Tahunan ini halaman 133. Complied The Company has disclosed the Ultimate Beneficial Owners monthly on the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website, as well as in this Annual Report on page133.

Inisiatif Strategis Peningkatan Kualitas Penerapan GCG

Perseroan secara berkesinambungan melakukan langkah-langkah penyempurnaan dan penguatan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan berpedoman pada praktik dan standar terbaik yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional. Berbagai inisiatif tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk meningkatkan kualitas GCG, yang antara lain meliputi:

1. Penerapan GCG di Perseroan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
2. Self-Assessment GCG yang dilaksanakan setiap tahun dengan didampingi oleh konsultan independen;
3. Penerapan ISO 37001:2016 yang merupakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan:
4. Optimalisasi penerapan *Whsitleblowing System*.

Sosialisasi GCG dan Membangun *Awareness*

1. Dilaksanakannya penandatanganan pakta integritas serta komitmen anti penyuapan antara IPCC dengan seluruh mitra dan customer Perseroan pada tanggal 22 Desember 2025 pada acara IPCC Bersih dengan tema "IPCC Bersih: Satukan Aksi, Basmi Korupsi!".
2. Sosialisasi dan penyegaran penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan IPCC dilakukan melalui platform daring yang tersedia di https://pgood.pelindo.co.id/. Website ini berfungsi sebagai sarana bagi seluruh insan di lingkungan Pelindo Group, termasuk IPCC, untuk mempelajari, memahami, serta mengevaluasi tingkat pemahaman terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
3. Penandatanganan pakta integritas secara elektronik melalui sistem pgood dalam website https://pgood.pelindo.co.id/.
4. Perseroan melaksanakan pemantauan gratifikasi, pungli, dan WBS hingga Desember 2025 dengan hasil nihil.

Strategic Initiatives to Improve the Quality of GCG Implementation

The Company continuously takes steps to improve and strengthen the implementation of Good Corporate Governance, guided by best practices and standards applicable at both the national and international levels. These various initiatives are carried out as part of the Company's commitment to enhancing the quality of GCG, which includes, among other things:

1. Implementation of GCG in the Company in a sustainable and continuous manner;
2. GCG Self-Assessment, which is carried out annually accompanied by an independent consultant;
3. Implementation of ISO 37001:2016 as an Anti-Bribery Management System;
4. Optimizing the implementation of Whistleblowing System.

GCG Socialization and Building Awareness

1. The signing of an integrity pact and anti-bribery commitment between IPCC and all of the Company's partners and customers was carried out on December 22, 2025, during IPCC Bersih event themed "IPCC Bersih: Unite in Action, Eradicate Corruption!".
2. The socialization and reinforcement of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and IPCC are conducted through an online platform available at https://pgood.pelindo.co.id/. This website serves as a medium for all personnel within Pelindo Group, including IPCC, to learn, understand, and assess their level of understanding of good corporate governance principles.
3. The signing of the integrity pact is also carried out electronically through the pgood system on the website https://pgood.pelindo.co.id/.
4. The Company conducted monitoring of gratuities, illegal levies, and the whistleblowing system (WBS) up to December 2025, with zero reported cases.

Struktur Organ GCG dan Mekanisme Hubungan Antar Organ
GCG Organ Structure and Inter-Organ Relationship Mechanism



Struktur GCG

Perseroan didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan bahwa tata kelola Perseroan diselenggarakan melalui 3 (tiga) organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Sinergi yang efektif di antara ketiga organ tersebut dalam menjalankan peran, kewenangan, serta tanggung jawabnya dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan ketentuan lain yang berlaku demi kepentingan Perseroan.

Setiap organ Perseroan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara proporsional untuk menentukan arah strategis serta meningkatkan kualitas kinerja Perseroan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris didukung oleh sejumlah komite, antara lain Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sementara itu, Direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan dibantu oleh organ pendukung berupa Sekretaris Perusahaan dan Satuan Audit Internal.

Sebagai bentuk pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan, Perseroan melaksanakan audit eksternal atas laporan keuangannya. Audit tersebut dilakukan oleh Akuntan Publik yang dipilih melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan organisasi. Pelaksanaan audit eksternal ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Perseroan secara objektif dan andal sebagai dasar utama penilaian kinerja usaha.

GCG Structure

The Company was established and conducts its business activities in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which stipulates that the Company's governance is carried out through three (3) governing organs, namely General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors. Effective synergy among these three organs in carrying out their respective roles, authorities, and responsibilities is implemented in accordance with applicable laws and regulations, Article of Association, and other relevant provisions for the Company's best interests.

Each organ of the Company performs its respective duties and functions proportionally to determine the strategic direction and improve the Company's performance quality. In carrying out its supervisory functions, Board of Commissioners is supported by several committees, including Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. Meanwhile, Board of Directors is assisted by supporting organs, namely Corporate Secretary and Internal Audit Unit, in performing its management functions.

To ensure compliance with applicable laws and regulations and to uphold the principles of transparency and accountability, particularly in financial management, the Company undergoes an external audit of its financial statements. This audit is conducted by a Public Accountant selected through a mechanism in accordance with the Company's organizational regulations. The external audit is expected to provide an objective and reliable picture of the Company's performance as the primary basis for evaluating business performance.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan IPCC
IPCC Corporate Governance Organs Structure

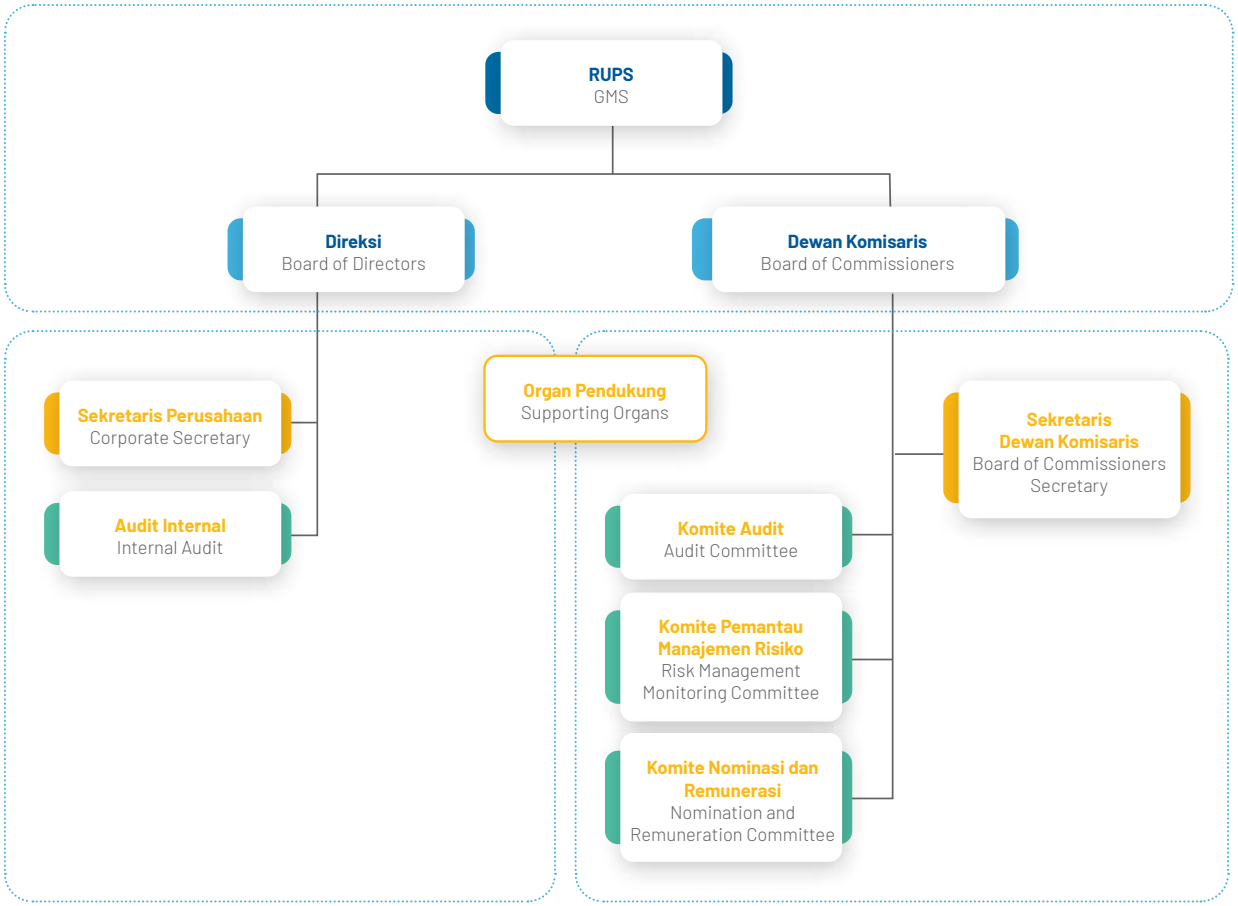

Organ Utama Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Main Organs

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)	**Dewan Komisaris** Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menduduki posisi tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan dan memiliki wewenang yang tidak dapat didelegasikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku. RUPS berfungsi sebagai wadah formal bagi Pemegang Saham dalam mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan IPCC baik untuk kepentingan jangka pendek ataupun jangka panjang.	Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertugas untuk memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi dalam menentukan arah tujuan pencapaian kinerja IPCC. Segala pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar IPCC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja yang tertuang dalam Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris.	Direksi memiliki fungsi utama dalam pengelolaan bisnis IPCC terutama dalam mencapai target-target tahunan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja Perusahaan. Pelaksanaan tugas Direksi mengacu pada Anggaran Dasar IPCC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Tata Tertib Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi.
General Meeting of Shareholders (GMS) occupies the highest position in the Corporate governance structure and has authority that cannot be delegated to Board of Directors or Board of Commissioners, in accordance with the provisions of Articles of Association and applicable laws. The GMS functions as a formal forum for Shareholders to make strategic decisions regarding the management of IPCC for both short and long term interests. .	Board of Commissioners carries out a supervisory function regarding the implementation of the Company's management carried out by Board of Directors. Apart from that, Board of Commissioners is also tasked with providing direction and advice to Board of Directors in determining the direction of achieving IPCC performance goals. All implementation of duties and responsibilities of Board of Commissioners refers to IPCC Articles of Association and applicable laws and regulations. In carrying out its duties and responsibilities, Board of Commissioners has a Work Code of Conduct which is contained in the Board of Commissioner's Manual.	Board of Directors has the main function in managing IPCC business, especially in achieving the annual targets that have been set and improving the Company's performance. The implementation of Board of Directors duties refers to IPCC Articles of Association and applicable laws and regulations and is guided by the Working Relations Code between Board of Commissioners and Board of Directors.

Organ Pendukung Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Supporting Organs

Organ Pendukung Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs		Organ Pendukung Direksi Board of Directors Supporting Organs			
Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Committees	**Sekretaris Dewan Komisaris** Secretary of Board of Commissioners	**Sekretaris Perusahaan** Corporate Secretary		**Audit Internal** Internal Audit	
		Fungsi Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Function	**Fungsi Kepatuhan** Compliance Function	**Fungsi Audit Internal** Internal Audit Function	**Fungsi Manajemen Risiko** Risk Management Functio
Organ pendukung yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, yaitu terdiri dari: • Komite Audit; • Komite Nominasi dan Remunerasi; • Komite Pemantau Manajemen Risiko	Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, serta dibantu oleh seorang staf karyawan Sekretariat Dewan Komisaris.	Organ pendukung Direksi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan keterbukaan informasi Perusahaan. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga berperan dalam mengelola dan menjaga komunikasi antara pihak internal dengan pihak eksternal termasuk Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan.	Secara fungsional unit kerja yang membawahi wewenang dan tanggung jawab atas kepatuhan dan pengendalian kinerja berada di bawah pengawasan langsung Direksi dan bertugas untuk memastikan bahwa IPCC telah memenuhi aspek-aspek kepatuhan (*compliance*) yang dipersyaratkan regulasi untuk mencapai kinerja terbaik Perseroan.	Dalam struktur organisasi, unit kerja ini berada di bawah pengawasan langsung Direksi. Divisi Audit Internal bertugas untuk memberikan masukan yang independen dan objektif terkait pengendalian internal dan proses tata kelola perusahaan.	Satuan kerja manajemen risiko berfungsi melakukan pengelolaan terhadap risiko risiko yang ada, sehingga risiko risiko tersebut dapat teratasi dan terkendali.
Supporting organs established to assist the implementation of Board of Commissioners' supervisory function, consisting of: • Audit Committee; • Nomination and Remuneration Committee; • Risk Management Monitoring Committee	Secretary of Board of Commissioners is appointed and directly responsible to Board of Commissioners, and assisted by a staff employee of Board of Commissioners Secretariat.	A supporting organ of Board of Directors that is responsible for the implementation of the Company's information disclosure. In addition, Corporate Secretary also plays a role in managing and maintaining communication between internal parties and external parties including Shareholders and Stakeholders.	Functionally, the work unit that oversees the authority and responsibility for compliance and performance control is under the direct supervision of Board of Directors and is tasked with ensuring that IPCC has fulfilled the aspects of compliance required by regulations to achieve the Company best performance	In the organizational structure, this work unit is under the direct supervision of Board of Directors. Internal Audit Unit is tasked with providing independent and objective input related to internal control and Corporate governance processes.	The risk management unit functions to manage existing risks, so that these risks can be resolved and controlled.

Soft-Structure GCG

Perseroan memiliki seperangkat kebijakan dan pedoman internal yang disusun secara komprehensif sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan usaha. Keberadaan kebijakan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran seluruh insan Perseroan serta menjadi acuan dalam membentuk perilaku kerja yang beretika dan berbudaya.

Perumusan kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan, dengan mempertimbangkan praktik terbaik yang relevan. Sampai dengan akhir tahun 2025, Perseroan telah menerapkan berbagai *Soft Structure* GCG, antara lain:

GCG Soft Structure

The Company has a comprehensive set of internal policies and guidelines that serve as the foundation for conducting its business activities. These policies aim to foster awareness among all Company personnel and serve as a reference for shaping ethical and culturally appropriate work behavior.

The formulation of Good Corporate Governance policies is carried out in accordance with applicable laws and regulations, and is aligned with the Company's vision, mission, and values, while taking into account relevant best practices. As of the end of 2025, the Company has implemented various GCG Soft Structures, including:

Soft-Struktur/Kebijakan IPCC IPCC Soft-Structure/Policies	Pemberlakuan Enforcement
Anggaran Dasar Articles of Association	Akta No. 45 tanggal 18 Juli 2023 Deed No. 45 dated July 18, 2023
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.56/3/7/IKT-22 tanggal 19 Desember 2022 Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.56/3/7/IKT-22 dated December 19, 2022

Soft-Struktur/Kebijakan IPCC IPCC Soft-Structure/Policies	**Pemberlakuan** Enforcement
Pedoman Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Board Manual for Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual)	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/3/6/IKT-22 tanggal 19 Desember 2022 tentang Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors No. HK.56/3/6/IKT-22 dated December, 19, 2022 concerning Work Procedures for Relationship between Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual)
Pedoman Manajemen Risiko Risk Management Guidelines	Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: PW.05.01/24/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 24 Desember 2024 Regulation of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: PW.05.01/24/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 concerning the Implementation of Risk Management within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dated December 24, 2024
Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar dan Penerapan *Whistleblowing System* (WBS) Guidelines for Gratification Management, Reporting of Illegal Levies and Implementation of Whistle Blowing System (WBS)	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/2/2/IKT-21 tentang Pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS) Dewan Komisaris, Direksi serta Pekerja di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors No. HK.56/2/2/IKT-21 concerning Management of Whistle Blowing System (WBS) of Board of Commissioners, Board of Directors and Workers within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Pedoman Kode Etik Bisnis Code of Conduct	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/3/4/IKT-2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Pedoman Kode Etik dan Bisnis Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors No. HK.56/3/4/IKT-2022 dated December 12, 2022 concerning Code of Conduct
Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Guidelines for Wealth Reporting for Board of Commissioners and Board of Directors	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/3/5/IKT-22 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors No. HK.56/3/5/IKT-22 dated December 19, 2022 concerning Guidelines for Wealth Reporting for Board of Commissioners and Board of Directors.
Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Guidelines for Implementing Social and Environmental Responsibility Programs (SER)	Surat Keputusan Direksi No. HK.01/12/12/1/SKPR/DIRUT/IKT-24 tanggal 12 Desember 2024 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Joint Decree of Board of Directors Decision No. HK.01/12/12/1/SKPR/DIRUT/IKT-24 dated December 12, 2024, regarding the Social and Environmental Responsibility Program
Kebijakan Pelaporan atas Kepemilikan Saham Oleh Dewan Komisaris dan Direksi Reporting Policy on Share Ownership by Board of Commissioners and Board of Directors	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/3/2/IKT-23 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pelaporan atas Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors No. HK.56/3/2/IKT-23 dated February 13, 2023 concerning Reporting on Share Ownership by Board of Commissioners and Board of Directors
Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	Disahkan dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada 3 November 2020 Ratified and signed by Board of Directors and Board of Commissioners on November 3, 2020
Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Charter	Disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris pada 19 Desember 2018 Ratified and signed by Board of Commissioners on December 19, 2018

Seluruh kebijakan dan pedoman tersebut disampaikan kepada seluruh karyawan secara berkesinambungan melalui kegiatan sosialisasi yang terjadwal. Selain itu, Perseroan melakukan peninjauan dan pembaruan atas kebijakan dimaksud apabila diperlukan, agar tetap selaras dengan perkembangan organisasi serta mampu merespons perubahan dan dinamika kegiatan usaha.

All of these policies and guidelines are communicated to all employees on an ongoing basis through scheduled socialization activities. In addition, the Company reviews and updates these policies as necessary to ensure they remain aligned with the organization's development and are capable of responding to changes and the dynamics of business operations.

Mekanisme GCG

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik mencakup serangkaian tata cara, prosedur, dan ketentuan yang dirancang untuk membentuk sistem pengelolaan perusahaan yang efektif dan bernilai tambah. Dibekali dukungan struktur dan infrastruktur GCG yang memadai, Perseroan meyakini bahwa implementasi tata kelola dapat menghasilkan capaian yang sejalan dengan ekspektasi para pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, penerapan GCG tidak hanya bertumpu pada struktur tata kelola semata, tetapi juga memerlukan keberadaan perangkat *soft structure* yang jelas dan terintegrasi dalam setiap proses dan mekanisme kerja. Seluruh proses tersebut melekat dan selaras dengan struktur organ tata kelola Perseroan sebagaimana tercermin dalam Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan. Secara umum, mekanisme GCG yang diterapkan di Perseroan dapat digambarkan melalui alur sebagai berikut:

GCG Mechanisms

Good Corporate Governance (GCG) mechanisms encompass a series of procedures, protocols, and regulations designed to establish an effective and value-adding Corporate management system. Equipped with adequate GCG structures and infrastructure, the Company believes that the implementation of Corporate governance can yield outcomes aligned with stakeholder expectations. In practice, GCG implementation relies not only on governance structures but also requires the presence of clear and integrated soft structures within every process and operational mechanism. All these processes are inherent in and aligned with the Company's governance structure, as reflected in the Corporate Governance Structure. Generally, GCG mechanisms applied at the Company can be illustrated through the following flowchart:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai perusahaan terbuka, penyelenggaraan RUPS Perseroan dilakukan sesuai dengan waktu dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana termaktub pada Pedoman Tata Tertib Kerja atau Board Manual. Dewan Komisaris dan Direksi juga memastikan bahwa segala keputusan yang ditetapkan dalam RUPS sudah ditindaklanjuti dengan baik. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi selanjutnya dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Komite komite atau Perangkat di Bawah Dewan Komisaris dan Direksi Komite-komite dan perangkat lain di bawah Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya untuk mendukung pencapaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dan penerapan pelaksanaan tata kelola perusahaan.
4. Pelaksanaan Kegiatan Usaha IPCC Seluruh aktivitas usaha IPCC dilakukan sesuai dengan pedoman internal yang dimiliki berdasarkan prinsip-prinsip GCG, yang mengacu pada pencapaian visi dan misi IPCC.
5. Dokumentasi Proses Seluruh proses kegiatan IPCC didokumentasikan dengan baik sebagai bukti pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Evaluasi Hasil Selanjutnya, IPCC melakukan evaluasi terhadap kinerja dan pencapaian berhasil diraih dengan tujuan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

1. General Meeting of Shareholders As a public Company, the Company's GMS is held in accordance with the time and procedures stipulated in POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies and POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies.
2. Implementation of the Functions, Duties and Responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors.Board of Commissioners and Board of Directors carry out their functions, duties and responsibilities in accordance with applicable regulations and Law Regulations as stated in the Work Code Guidelines or Board Manual. Board of Commissioners and Board of Directors also ensure that all decisions made at the GMS have been followed up properly. The next performance assessment of Board of Commissioners and Board of Directors is carried out in accordance with the established rules.
3. Implementation of the Functions, Duties and Responsibilities of Committees or Organs under Board of Commissioners and Board of Directors. Committees and other organs under Board of Commissioners and Board of Directors carry out their functions, duties and responsibilities to support the achievement of Board of Commissioners and Board of Directors performance and the implementation of Corporate governance.
4. Implementation of IPCC Business Activities All IPCC business activities are carried out in accordance with internal guidelines based on GCG principles, which refer to achieving IPCC vision and mission.
5. Process Documentation The entire process of IPCC activities is well documented as an evidence that the implementation of activities has been carried out in accordance with applicable laws and regulations.
6. Results Evaluation Furthermore, IPCC evaluates the performance and achievements achieved with the aim of improvement and improvement in the future.

Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham
Shareholders and General Meeting of Shareholders

Pemegang Saham dan Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali, hingga Entitas Pemilik Akhir

Pemegang Saham merupakan pihak perseorangan maupun badan hukum yang secara sah tercatat sebagai pemilik saham Perseroan. Dalam pelaksanaan tata kelola, Pemegang Saham tidak mencampuri pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Komposisi Pemegang Saham IPCC terdiri atas Pemegang Saham Utama atau Pengendali serta Pemegang Saham lainnya yang juga merupakan pendiri Perseroan.

Berdasarkan struktur kepemilikan saham Perseroan, PT Pelindo Multi Terminal memiliki porsi kepemilikan sebesar 71,28%, PT Pelabuhan Indonesia Investama sebesar 5,54%, PT Multi Terminal Indonesia sebesar 0,72% dan masyarakat sebesar 22,46%. Informasi yang lebih rinci mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali, termasuk struktur kepemilikannya, disajikan secara lebih lengkap pada bagian Komposisi Pemegang Saham dalam Bab Profil Perusahaan.

Hak Pemegang Saham

Perseroan senantiasa menjunjung tinggi komitmen untuk menjaga dan memenuhi hak-hak Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang berlaku. Perlindungan terhadap hak tersebut menjadi bagian integral dari penerapan GCG, dengan ketentuan hak-hak Pemegang Saham Perseroan antara lain meliputi:

1. Hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS;
2. Hak untuk meminta informasi tentang mata acara RUPS;
3. Hak untuk mengajukan usul-usul untuk dibahas dalam acara RUPS;
4. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, dengan ketentuan 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
5. Hak untuk mengambil keputusan tertinggi pada Perseroan;
6. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai Perseroan, secara tepat waktu, terukur dan teratur;
7. Hak untuk menerima pembagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen, dan pembagian keuntungan lainnya, serta sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;
8. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas;
9. Hak lainnya berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan Pemegang Saham melalui RUPS

1. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Pemegang Saham melalui RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi;
2. Perbuatan-perbuatan di bawah ini memerlukan persetujuan RUPS setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:

Shareholders and Information on Major/ Controlling Shareholders, to Ultimate Owner Entities

Shareholders are individuals or legal entities legally registered as owners of the Company's shares. In the implementation of governance, Shareholders do not interfere with the duties, functions, and authorities that are the responsibility of Board of Commissioners and Board of Directors. The composition of IPCC's Shareholders consists of Major or Controlling Shareholders as well as other Shareholders who are also the Company's founders.

Based on the Company's shareholding structure, PT Pelindo Multi Terminal holds a 71.28% stake, PT Pelabuhan Indonesia Investama holds 5.54%, PT Multi Terminal Indonesia holds 0.72% and the public holds 22.46%. More detailed information regarding the Major and Controlling Shareholders, including their ownership structure, is presented in full in the Shareholder Composition section of the Company Profile chapter.

Shareholder Rights

The Company remains committed to upholding and fulfilling the rights of its shareholders as set forth in the Articles of Association and applicable Corporate governance policies. The protection of these rights is an integral part of GCG implementation, and the Company's shareholder rights include, among others:

1. The right to request the convening of a GMS;
2. The right to request information regarding the GMS agenda;
3. The right to submit proposals for discussion at the GMS;
4. The right to attend and vote at the GMS, provided that 1 (one) share entitles its holder to cast one vote;
5. The right to make the highest decisions in the Company;
6. The right to obtain material information regarding the Company, in a timely, measurable, and regular manner;
7. The right to receive a distribution of the Company's profits allocated to Shareholders in the form of dividends and other profit distributions, as well as any remaining assets resulting from liquidation, in proportion to the number of shares/capital held;
8. The right to receive fair treatment for shareholders, including minority shareholders;
9. Other rights based on the Articles of Association and applicable laws and regulations.

Shareholders Authority through the GMS

1. Based on applicable laws and regulations, Shareholders, through the GMS, hold all authority not delegated to the Board of Commissioners or the Board of Directors.
2. The following actions require the GMS' approval after obtaining written approval from the Board of Commissioners:

a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah dan/atau Panjang dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
b. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
c. Melepaskan penyertaan modal pada perusahaan lain dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;

3. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS.

a. Pledge fixed assets for medium- and/or long-term credit with a value exceeding 50% (fifty percent) of the Company's net assets in one or more transactions, whether related or unrelated;
b. Invest in other companies with a value exceeding 50% (fifty percent) of the Company's net assets in one or more transactions, whether related or unrelated;
c. Divest equity participation in other companies with a value exceeding 50% (fifty percent) of the Company's net assets in one or more transactions, whether related or unrelated;

3. Legal actions to (a) transfer or relinquish rights or (b) make all or most of the Company's assets a guarantee for debt, namely with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not and the transactions referred to are transactions transferring the Company's net assets that occur within a period of 1 (one) fiscal year, must obtain the approval of the GMS.

Kewajiban dan Akuntabilitas Pemegang Saham

1. Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilaksanakan oleh Pemegang Saham sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
3. Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam proses pengelolaan Perusahaan.

Shareholders Obligations and Accountability

1. Shareholders do not interfere in the Company's operational activities which are the responsibility of Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations;
2. Good Corporate Governance is implemented by Shareholders in accordance with their authority and responsibilities;
3. Shareholders have the responsibility to monitor the implementation of Good Corporate Governance principles in the Company's management process.

Perlakuan yang Sama terhadap Pemegang Saham

Perseroan menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh Pemegang Saham tanpa membedakan besaran, jenis, maupun klasifikasi saham yang dimiliki, sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar Perseroan. Sejalan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak setiap Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.

Equal Treatment for Shareholders

The Company guarantees fair and equal treatment for all Shareholders without distinction based on the number, type, or classification of shares held, unless otherwise provided in the Company's Articles of Association. In line with this, Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for ensuring that the rights of every Shareholder are fulfilled in accordance with applicable laws and regulations as well as the Company's Articles of Association.

Akses Informasi Kepada Pemegang Saham

Perseroan membuka akses informasi yang memadai bagi Pemegang Saham agar mereka dapat memperoleh haknya serta menjalankan tanggung jawab dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung keterbukaan tersebut, Perseroan menyediakan berbagai saluran informasi, antara lain melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, media sosial resmi Perseroan, serta sarana komunikasi melalui surat elektronik (*email*) Perseroan.

Access to Information for Shareholders

The Company provides shareholders with adequate access to information so that they may exercise their rights and fulfill their responsibilities and obligations in accordance with applicable regulations. To support this transparency, the Company provides various information channels, including the Company's website, Indonesia Stock Exchange website, the Company's official social media accounts, and communication via the Company's email.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ Perseroan yang memegang kewenangan tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pelaksanaan RUPS juga merupakan sarana bagi para

General Meeting of Shareholders (GMS)

General Meeting of Shareholders is the Company's governing organ with the highest authority, as stipulated by law, and this authority cannot be delegated to any other party. The GMS also serves as a platform for Shareholders to actively participate in determining

Pemegang Saham untuk berperan aktif dalam menentukan arah dan pengembangan Perseroan melalui penetapan keputusan serta pemberian arahan strategis.

IPCC menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam bentuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Penyelenggaraan RUPS tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan RUPS, Anggaran Dasar Perseroan, serta mengacu pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan melaksanakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Seluruh keputusan yang dihasilkan dalam RUPS tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta dipublikasikan kepada publik melalui situs web resmi IPCC di https://indonesiacarterminal.co.id/ dan situs web Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2024, 17 Juni 2025

RUPS Tahunan diselenggarakan pada 17 Juni 2025, pukul 14.39 WIB s/d 16.36 WIB, di Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok Jakarta Utara. Rapat diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik menggunakan *Electronic General Meeting System* KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI.

the Company's direction and development through the adoption of resolution and strategic direction.

IPCC holds General Meeting of Shareholders in the form of Annual GMS and Extraordinary GMS. These General Meetings of Shareholders are conducted in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Financial Services Authority's regulations regarding the conduct of General Meetings of Shareholders, the Company's Articles of Association, and in reference to the principles set forth in the ASEAN Corporate Governance Scorecard.

GMS Holding in 2025

Throughout 2025, the Company held one (1) Annual General Meeting of Shareholders (GMS) . All resolutions made at the GMS have been submitted to the Financial Services Authority and disclosed to the public via IPCC's official website at https://indonesiacarterminal.co.id/ and the Indonesia Stock Exchange's website at www.idx.co.id.

Annual GMS for 2025 Fiscal Year, June 17, 2025

The Annual GMS was held on June 17, 2025, from 2:39 to 4:36 p.m at Indonesian Maritime Museum, Tanjung Priok, North Jakarta. The meeting was held physically and electronically with reference to the provisions of Article 11 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing of General Meetings of Shareholders of Public Companies, Article 3 of Financial Services Authority Regulation No. 15/ POJK.04/2020 concerning Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies Electronically using the KSEI Electronic General Meeting System Application ("eASY.KSEI Application") provided by KSEI.

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan, 17 Juni 2025
Stages of Annual GMS, June 17, 2025

No	Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Date	Pelaksanaan Implementation
1	Pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS Notification of meeting agenda to OJK no later than 5 (five) working days before the GMS announcement	2 Mei 2025 May 2, 2025	Perusahaan telah menyampaikan Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") melalui Sistem Pelaporan Elektronik ("SPE") dengan surat Perseroan nomor SK.03/2/5/1/SKPR/SKPR/IKT-25. The Company has submitted a Notification to Financial Services Authority ("OJK") and Indonesia Stock Exchange ("IDX") through Electronic Reporting System ("SPE") with Company letter number SK.03/2/5/1/SKPR/SKPR/IKT-25.
2	Pengumuman RUPS: • Dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum Pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman dan Pemanggilan RUPS. • Dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web IPCC, situs web BEI, dan situs web KSEI. • Laporan Pengumuman RUPS disampaikan ke OJK dan BEI pada hari dan tanggal yang sama (hardcopy dan e-reporting via SPE OJK & IDXNet). GMS Announcement: • Made 14 (fourteen) days before the GMS Summon, not including the date of the GMS Announcement and Summon. • Published in Indonesian and English on IPCC website, IDX website, and KSEI website. • The GMS Announcement Report is submitted to the OJK and IDX on the same day and date (hardcopy and e-reporting via OJK SPE & IDXNet).	9 Mei 2025 May 9, 2025	Perusahaan telah menyampaikan Pengumuman RUPS Tahunan kepada Pemegang Saham melalui publikasi pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan. The Company has delivered the Annual GMS Announcement to Shareholders through publication on the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") website, the Indonesia Stock Exchange ("IDX") website and the Company's website

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan, 17 Juni 2025
Stages of Annual GMS, June 17, 2025

No	Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Date	Pelaksanaan Implementation
3	*Recording Date* Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS dilaksanakan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. The Register of Shareholders Recording Date entitled to attend the GMS is made 1 (one) working day before the GMS summons.	23 Mei 2025 May 23, 2025	3 (tiga) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS 3 (three) working day before the GMS summons
4	Pemanggilan dan Informasi penjelasan mata acara RUPS: 1. Dilakukan 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pelaksanaan RUPST, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan pelaksanaan RUPST. 2. Dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web Perusahaan, situs web BEI, dan situs web KSEI. 3. Bukti laporan Pemanggilan RUPST disampaikan ke OJK dan BEI pada hari dan tanggal yang sama (hardcopy dan e-reporting via SPE OJK & IDXNet). Summoning and Explanatory Information on the GMS agenda: 1. Carried out 28 (twenty-eight) days before the AGMS, not including the summons date and the AGMS. 2. Published in Indonesian and English on the Company's website, the IDX website, and the KSEI website. 3. Proof of the AGMS summons report submitted to the OJK and IDX on the same day and date (hardcopy and e-reporting via OJK SPE & IDXNet).	26 Mei 2025 May 26, 2025	Perusahaan menyampaikan Pemanggilan RUPS Tahunan kepada Pemegang Saham, melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perusahaan. The Company submits the Annual GMS Summon to Shareholders through the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) website, the Indonesia Stock Exchange (IDX) website, and the Company website.
5	Pelaksanaan RUPS Tahunan Annual GMS Holding	17 Juni 2025 June 17, 2025	Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok Jakarta Utara. Indonesian Maritime Museum, Tanjung Priok North Jakarta.
6	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan: Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Annual GMS Summary Minutes: The GMS minutes must be submitted to the OJK no later than 30 (thirty) days after the GMS is held.	17 Juni 2025 June 17, 2025	Ringkasan Risalah RUPS dilaporkan kepada OJK 3 hari kerja setelah RUPS. Summary of the GMS Minutes is reported to the OJK 3 (three) working days after the GMS.
7	Akta Risalah RUPS Tahunan Deed of Annual GMS Minutes	17 Juni 2025 June 17, 2025	Akta Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS dilaksanakan. Deed of the GMS Minutes is submitted to the OJK no later than 30 (thirty) calendar days after the GMS is held.

Proses Penyelenggaraan RUPS Tahunan, 17 Juni 2025
Annual GMS Holding Process, June 17, 2025

Hari, Tanggal, dan Waktu Day, Date and Time	Selasa, 17 Juni 2025, Pukul 14.39 WIB s/d 16.36 WIB. Tuesday, June 17, 2025, from 2:39 p.m. to 4:36 p.m.
Lokasi Location	Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok Jakarta Utara. Indonesian Maritime Museum, Tanjung Priok, North Jakarta.
Kuorum Quorum	1.430.811.359 saham atau merupakan 78,6858394% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.818.384.820 saham. 1,430,811,359 shares or 78.6858394% of the total shares issued by the Company, which is 1,818,384,820 shares.
Pimpinan RUPS Tahunan Annual GMS Chairman	Rapat dipimpin oleh DRAJAT SULISTYO selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor DK/06/05/01/IPCC-25 tertanggal 6 Mei 2025. The meeting was chaired by DRAJAT SULISTYO, the Company's President Commissioner, pursuant to PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk's Board of Commissioners' Decree No. DK/06/05/01/IPCC-25 dated May 6, 2025, regarding the Determination of Chairpersons of Annual General Meetings of Shareholders.

Kehadiran Pemegang Saham Shareholder Attendance	• PT PELINDO MULTI TERMINAL selaku pemegang/pemilik 1.296.144.749 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh RIZKIN KURNIAWAN, Direktur Strategi dan Komersial PT PELINDO MULTI TERMINAL selaku kuasa dari ARY HENRYANTO, Direktur Utama PT PELINDO MULTI TERMINAL berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2025 No.HM.03.03/II/6/3/PAPS/DIRU/PLMT-25; • PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA selaku pemegang/pemilik 100.682.600 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh ARIEF KARNA MIHARJA, Kepala Divisi Hukum, Pengadaan dan Kesekretariatan selaku kuasa dari ENDOT ENDRARDONO SE, Pelaksana Tugas Direktur PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juni 2025 No.SK.03/5/6/2/DHKP/PII-25; • Masyarakat sejumlah 33.984.010 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan. • PT PELINDO MULTI TERMINAL, as the holder/owner of 1,296,144,749 shares out of the total number of shares issued and fully paid up in the Company; in this case represented by RIZKIN KURNIAWAN, Director of Strategy and Commercial Affairs of PT PELINDO MULTI TERMINAL acting as the proxy for ARY HENRYANTO, President Director of PT PELINDO MULTI TERMINAL based on a Special Power of Attorney dated June 11, 2025 No. HM.03.03/II/6/3/PAPS/DIRU/PLMT-25; • PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA as the holder/owner of 100,682,600 shares out of the total number of shares that have been issued and fully paid up in the Company; in this case represented by ARIEF KARNA MIHARJA, Head of Legal, Procurement, and Secretariat Division, acting as the authorized representative of ENDOT ENDRARDONO SE, Acting Director of PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA, based on the Power of Attorney dated June 5, 2025, No. SK.03/5/6/2/DHKP/PII-25; • The public holds 33,984,010 shares out of the total number of shares that have been issued and fully paid up in the Company.
Kehadiran Dewan Komisaris Attendance of Board of Commissioners	Komisaris Utama : Drajat Sulistyo Komisaris Independen : Abdur Rahim Hasan Komisaris Independen : LM. Arya Bima Yudiantara President Commissioner : Drajat Sulistyo Independent Commissioner : Abdur Rahim Hasan Independent Commissioner : LM. Arya Bima Yudiantara
Kehadiran Direksi Attendance of Board of Directors	Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : Sugeng Mulyadi Direktur Operasi dan Teknik : Bagus Dwipoyono Direktur Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko : Wing Megantoro President Director and Director of Commercial and Business Development : Sugeng Mulyadi Director of Operations and Technical : Bagus Dwipoyono Director of Finance, HC and Risk Management : Wing Megantoro
Kehadiran Komite Audit Attendance of Audit Committee	Ketua : Abdur Rahim Hasan Anggota Independen : Kurniawan Eko Saputro Anggota Independen : Noval Ali Abbas Chairman : Abdur Rahim Hasan Independent Member : Kurniawan Eko Saputro Independent Member : Noval Ali Abbas
Kehadiran Komite Pemantau Manajemen Risiko Attendance of Risk Management Monitoring Committee	Ketua : LM. Arya Bima Yudiantara Anggota : Nurkholis Lukman Chairman : LM. Arya Bima Yudiantara Member : Nurkholis Lukman
Komite Nominasi dan Remunerasi Attendance of Nomination and Remuneration Committee	Ketua : Abdur Rahim Hasan Anggota : LM. Arya Bima Yudiantara Anggota : Ahmad Alyani Addarain Chairman : Abdur Rahim Hasan Member : LM. Arya Bima Yudiantara Member : Ahmad Alyani Addarain
Pihak Independen Penghitung Suara Independent Vote Counter	• Notaris Ashoya Ratam SH, MKn, selaku Notaris Publik; dan • PT Electronic Data Interchange selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan dan/atau melakukan validasi dan pengambilan suara dalam RUPST. • Notary Ashoya Ratam SH, MKn, as Public Notary; and • PT Electronic Data Interchange as Share Registrar to perform calculations and/or validate and vote at the AGMS.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, pengambilan keputusan dalam rapat pada prinsipnya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham diberikan fasilitas untuk menyampaikan pilihan suara melalui pemberian kuasa secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI. Oleh karena itu, mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat juga dapat dilakukan melalui proses pemungutan suara (*voting*).

Apabila terdapat Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih untuk tidak menyatakan suara atau *abstain*, maka suara tersebut dianggap mengikuti keputusan yang memperoleh suara terbanyak dari Pemegang Saham yang memberikan suara dalam Rapat.

Decision-Making Mechanism in Meetings

In accordance to Article 14 (1) of the Company's Articles of Association, decision-making at meetings is, in principle, conducted through deliberation to reach a consensus. However, in accordance with Article 28 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, Shareholders are provided with the facility to cast their votes by granting a proxy electronically using the eASY.KSEI system. Therefore, the decision-making mechanism at the Meeting may also be conducted through a voting process.

If any Shareholder present and holding valid voting rights chooses not to cast a vote or abstains, such vote shall be deemed to follow the decision that receives the majority of votes from Shareholders casting votes at the Meeting.

Pihak Independen Penghitung Suara

Pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Juni 2025, Perseroan menunjuk pihak independen, yaitu Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., sebagai Notaris Publik dan PT Electronic Data Interchange sebagai Biro Administrasi Efek. Penunjukan tersebut dilakukan untuk melaksanakan penghitungan, validasi, serta proses pemungutan suara dalam penyelenggaraan RUPST.

Independent Vote Counter

At the Annual General Meeting of Shareholders held on June 17, 2025, the Company appointed an independent party, namely Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., as Public Notary, and PT Electronic Data Interchange as the Securities Administration Bureau. These appointments were made to perform the calculation, validation, and voting processes during the AGMS.

Rincian Keputusan RUPS Tahunan dan Tindak Lanjutnya

Seluruh keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dituangkan dalam Akta No. 41 yang dibuat oleh dan di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Jakarta. Rincian hasil keputusan RUPS beserta langkah tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Manajemen Perseroan disajikan sebagai berikut

Details of Annual GMS Resolutions and Follow-Up

All resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders have been stated in Deed No. 41, made by and before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., as a Notary in Jakarta. Details of GMS resolutions and the follow-up actions taken by the Company's Management are presented as follows:

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	**Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.** **Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Report for 2024 Fiscal Year.**		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam rapat. There were 1 (one) shareholders who asked questions at the meeting		
Pengambilan Keputusan Decision-making	**Dengan Pemungutan Suara** By Voting		
	Setuju Agree	***Abstain***	**Tidak Setuju** Disagree
	1.425.848.959 = 99,65%	4.854.100 = 0,34%	108.300 = 0,01%

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	**Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.** **Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Report for 2024 Fiscal Year.**
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	• Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024. • Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2024 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. • Approved the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Report for 2024 Fiscal Year. • Ratified the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ended on December 31, 2024 which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) as stated in its report Number: 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 dated March 25, 2025 with the opinion "Fair in all material respects, the Company's financial position on December 31, 2024, as well as its financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia. With the approval of the Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report and the ratification of the Company's Financial Statements, the Meeting granted full release and discharge of responsibility (Acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their actions management and supervision in 2024 fiscal year as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024.W
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 17 Juni 2025 No.41 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Making a copy of the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 17, 2025 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta.
Status	**Telah dilaksanakan.** **Has been realized.**

Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.** **Determination of Use of the Company's Net Profit for 2024 Fiscal Year.**		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham. There were no Shareholders who asked questions.		
Pengambilan Keputusan Decision-making	**Dengan Pemungutan Suara** By Voting		
	Setuju Agree	***Abstain***	**Tidak Setuju** Disagree
	1.426.442.959 = 99,69%	4.260.100 = 0,30%	108.300 = 0,01%

Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.** **Determination of Use of the Company's Net Profit for 2024 Fiscal Year.**
Keputusan Rapat	1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp212.216.226.998,00 (dua ratus dua belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagai berikut: a. Sebesar 0,94% atau Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dialokasikan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. b. Sebesar 80% atau Rp169.772.981.599,00 (seratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari masing masing pemegang saham; di mana sebesar Rp44.407.321.204,65 (empat puluh empat miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat koma enam lima rupiah) atau sebesar Rp24,4213 per lembar saham telah dibagikan sebagai dividen interim, sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan sebesar Rp125.365.660.394,10 (seratus dua puluh lima miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma satu nol rupiah) atau sebesar Rp68,9434 per lembar saham sehingga total dividen per lembar saham menjadi sebesar Rp93,3647. c. Sisanya sebesar Rp40.443.245.400,00 (empat puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 19,06% akan digunakan sebagai Laba ditahan Perseroan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham. 1. Approve the determination of the use of the Company's net profit for 2024 fiscal year amounting Rp212,216,226,998.00 (two hundred twelve billion two hundred sixteen million two hundred twenty-six thousand nine hundred ninety-eight rupiah) as follows: a. 0.94% or Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah) will be allocated as Mandatory Reserves to fulfill Article 70 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. b. 80% or Rp169,772,981,599.00 (one hundred sixty-nine billion seven hundred seventy-two million nine hundred eighty-one thousand five hundred ninety-nine rupiah) is distributed as dividends to shareholders according to the percentage of share ownership of each shareholder, where Rp44,407,321,204.65 (forty-four billion four hundred seven million three hundred twenty-one thousand two hundred four point six five rupiah) or Rp24.4213 per share has been distributed as an interim dividend, so that the remaining amount to be distributed as a final dividend is Rp125,365. 660,394.10 (one hundred twenty-five billion three hundred sixty-five million six hundred sixty thousand three hundred ninety-four point one zero rupiah) or Rp68.9434 per share, bringing the total dividend per share to Rp93.3647. c. The remaining 19.06% or Rp40,443,245,400.00 (forty billion four hundred forty-three million two hundred forty-five thousand four hundred rupiah) will be used as the Company's Retained Earnings. 2. Granting authority and power to the Company's Board of Directors with the right of substitution to further regulate the procedures and implementation of the distribution of cash dividends in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, including rounding up for dividend payments per share.
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 17 Juni 2025 No.41 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Making a copy of the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 17, 2025 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta
Status	**Telah dilaksanakan.** **Has been realized.**

Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda	**Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.** **Appointment of a Public Accounting Firm ("PAF") to audit the Company's Annual Financial Statements for 2025 Fiscal Year.**		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham. There were no Shareholders who asked questions.		
Pengambilan Keputusan Decision-making	**Dengan Pemungutan Suara** By Voting		
	Setuju Agree	***Abstain***	**Tidak Setuju** Disagree
	1.425.864.159 = 99,65%	4.326.900 = 0,30%	620.300 = 0,04%

Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda	**Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.** **Appointment of a Public Accounting Firm ("PAF") to audit the Company's Annual Financial Statements for 2025 Fiscal Year.**
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, apabila dianggap perlu termasuk Audit Kinerja, Audit KPI dan Audit Kepatuhan Tahun Buku 2025. 2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik. 3. Memberikan pelimpahan kewenangan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit Dewan Komisaris dan dapat dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris 1. Appointing Public Accounting Firm (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG) to perform audit services on the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2025, and other periods within 2025 Fiscal Year for the Company's purposes and interests, including, if deemed necessary, Performance Audits, KPI Audits, and Compliance Audits for 2025 Fiscal Year. 2. Granting authority and power to the Board of Directors to determine the amount of audit fees, any necessary expansion of the scope of work, and other reasonable terms for the public accounting firm. 3. Granting authority to the Company's Board of Commissioners, while taking into account the recommendations of the Board of Commissioners' Audit Committee and subject to prior coordination with the Majority Shareholder, to appoint a Replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG) for any reason is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements, and to grant authority and power to Board of Directors to determine the amount of audit fees and other terms to be reported to Board of Commissioners.
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 17 Juni 2025 No.41 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Making a copy of the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 17, 2025 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta.
Status	**Telah dilaksanakan.** **Has been realized.**

Mata Acara Rapat Keempat Fourth Meeting Agenda	**Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.** **Determination of salary/honorarium and other allowances and bonuses for members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.**
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham. There were no Shareholders who asked questions.
Pengambilan Keputusan Decision-making	**Dengan Pemungutan Suara** By Voting

Setuju Agree	***Abstain***	**Tidak Setuju** Disagree
1.426.102.359 = 99,67%	4.322.100 = 0,30%	386.900 = 0,03%

Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran tantiem bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas. 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025. 3. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas. 1. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of bonuses for members of the Company's Board of Directors and the Company's Board of Commissioners for 2024 fiscal year after consultation with the Major Shareholders. 2. Granting authority to the Major Shareholders to determine the remuneration for members of the Company's Board of Commissioners for 2025. 3. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration for members of the Company's Board of Directors for 2025 after consultation with the Major Shareholders.
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 17 Juni 2025 No.41 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Making a copy of the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 17, 2025 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta.
Status	**Telah dilaksanakan.** **Has been realized.**

Mata Acara Rapat Kelima Fifth Meeting Agenda	**Persetujuan Pengangkatan Kembali dan/atau Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.** **Agreement on the Reappointment and/or Change in the Company's Management Structure.**
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham. There were no Shareholders who asked questions.

Pengambilan Keputusan
Decision-making

Dengan Pemungutan Suara
By Voting

Setuju Agree	*Abstain*	Tidak Setuju Disagree
1.417.247.659 = 99,05%	4.346.700 = 0,30%	9.217.000 = 0,64%

Keputusan Rapat
Meeting Resolutions

1. Terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan periode jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima), maka menyetujui untuk mengangkat:
   a. Dr (Cand) M. SAID BAKHRI, S.Sos., S.H., M.H., sebagai Komisaris Utama;
   b. HERRY ARDIANTO, S.E sebagai Komisaris Independen;
   c. TRI HIDAYAT, S.Si sebagai Komisaris Independen;
   d. SUGENG MULYADI sebagai Direktur Utama;
   e. BAGUS DWIPOYONO sebagai Direktur Operasi dan Teknik;
   f. WING MEGANTORO sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko.
2. Dengan telah diangkatnya Pengurus Perseroan tersebut, maka menyetujui dan menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
   a. Dewan Komisaris
      i) Komisaris Utama: Dr (Cand) M. SAID BAKHRI, S.Sos, S.H., M.H.;
      ii) Komisaris Independen: HERRY ARDIANTO, S.E;
      iii) Komisaris Independen: TRI HIDAYAT, S.SI.
   b. Direksi
      i) Direktur Utama: SUGENG MULYADI;
      ii) Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis: Lowong;
      iii) Direktur Operasi dan Teknik: BAGUS DWIPOYONO;
      iv) Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko: WING MEGANTORO.

   Sehubungan dengan posisi Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis yang saat ini lowong, tugas dan wewenang serta tanggung jawab sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis dapat dilaksanakan oleh salah satu Direksi yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis berdasarkan Keputusan Rapat Direksi sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat 23 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai seluruh atau sebagian isi dari keputusan ini dan melakukan pelaporan data perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia.

1. Effective as of closing of the Meeting, without prejudice to the General Meeting of Shareholders' right to dismiss them at any time, with a term of office until closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders, hereby approves the appointment of:
   a. Dr. (Cand.) M. SAID BAKHRI, S.Sos., S.H., M.H., as President Commissioner;
   b. HERRY ARDIANTO, S.E. as Independent Commissioner;
   c. TRI HIDAYAT, S.Si. as Independent Commissioner;
   d. SUGENG MULYADI as President Director;
   e. BAGUS DWIPOYONO as Director of Operations and Technical;
   f. WING MEGANTORO as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management.
2. With the appointment of the Company's management, the meeting hereby approves and establishes the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:
   a. Board of Commissioners
      i) President Commissioner: Dr. (Cand.) M. SAID BAKHRI, S.Sos, S.H., M.H.;
      ii) Independent Commissioner: HERRY ARDIANTO, S.E.;
      iii) Independent Commissioner: TRI HIDAYAT, S.SI.
   b. Board of Directors
      i) President Director: SUGENG MULYADI;
      ii) Director of Commercial and Business Development: Vacant;
      iii) Director of Operations and Technical: BAGUS DWIPOYONO;
      iv) Director of Finance, Human Capital, and Risk Management: WING MEGANTORO.

In connection with the currently vacant position of Director of Commercial and Business Development, the duties, authorities, and responsibilities of Director of Commercial and Business Development may be carried out by one of the Board members designated pursuant to Board of Directors Meeting's decision.

3. To authorize the Board of Directors to determine the division of duties and authorities of Director of Commercial and Business Development based on a Board of Directors' Meeting decision as stipulated in Article 16, Paragraph 23 of the Company's Articles of Association.
4. Granting power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors, either individually or jointly, to state in a separate notarial deed the entirety or part of the contents of this resolution and to report changes to the Company's data to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia.

Mata Acara Rapat Kelima Fifth Meeting Agenda	**Persetujuan Pengangkatan Kembali dan/atau Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.** **Agreement on the Reappointment and/or Change in the Company's Management Structure.**
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 17 Juni 2025 No.41 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Making a copy of the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 17, 2025 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta.
Status	**Telah dilaksanakan.** **Has been realized.**

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2024 dan Tindak Lanjutnya

Sepanjang tahun 2024, IPCC menyelenggarakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali RUPS Tahunan. Hasil Keputusan RUPS tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan diumumkan pada situs web IPCC (https://indonesiacarterminal.co.id/) dan situs web BEI (www.idx.co.id).

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023, 10 Juni 2024

RUPS Tahunan diselenggarakan pada 10 Juni 2024, pukul 14.00 WIB-16.00 WIB, di Ruang Serbaguna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310.

Rapat diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik menggunakan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI.

GMS Holding in 2024 and the Follow-Up

Throughout 2024, IPCC held 1(one) Annual GMS. The GMS resolutions have been reported to the OJK and announced on IPCC website (https://indonesiacarterminal.co.id/) and the BEI website (www.idx.co.id).

Annual GMS for 2023 Fiscal Year, June 10, 2024

The Annual GMS was held on June 10, 2024, from 2:00 to 4:00 p.m in the Multipurpose Room, Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Pelabuhan 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310.

The meeting was held physically and electronically with reference to the provisions of Article 11 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing of General Meetings of Shareholders of Public Companies, Article 3 of Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies Electronically using the KSEI Electronic General Meeting System Application ("eASY.KSEI Application") provided by KSEI.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan, 10 Juni 2024
Annual GMS Holding Process, June 10, 2024

Hari, Tanggal, dan Waktu Day, Date and Time	Senin, 10 Juni 2024, Pukul 14.25 WIB-15.53 WIB Monday, June 10, 2024, 14.25 PM-15.53 PM
Lokasi Location	Museum Maritim Indonesia Lantai 2 Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310 Indonesian Maritime Museum 2nd Floor Jalan Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310
Kuorum Quorum	1.430.152.252 saham atau merupakan 78,64959% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.818.384.820 saham. 1,430,152,252 shares or 78.64959% of the total shares issued by the Company, which is 1,818,384,820 shares.
Pimpinan RUPS Tahunan Annual GMS Chairman	Drajat Sulistyo selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor DK/30/05/01/IPCC-24 tertanggal 30 Mei 2024. Drajat Sulistyo as the President Commissioner of the Company based on the Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Decree concerning the Determination of Chairman of Annual General Meeting of Shareholders Number DK/30/05/01/IPCC-24 dated May 30, 2024.

Kehadiran Pemegang Saham Shareholder Attendance	• PT Pelindo Multi Terminal selaku pemegang/pemilik 1.296.144.749 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Yoni SeTiawan, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo MulTi TerMinal selaku kuasa dari Ary Henryanto, Direktur Utama PT Pelindo Multi TerMinal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2024 Nomor HM.03.03/31/5/2/PAPS/DIRU/PLMT-24; • PT Pelabuhan Indonesia Investama selaku pemegang/pemilik 100.682.600 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Ikhwanoel, Direktur PT PelabuHan Indonesia Investama; • PT Multi TerMinal Indonesia selaku pemegang/pemilik 13.092.371 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Yuli Wahyu Wibowo, SM Keuangan PT MulTi TerMinal Indonesia, selaku kuasa dari Yandi Tiosaputra, Plt. Direktur Utama PT Multi TerMinal Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juni 2024 Nomor SK.03/5/6/2/SSPH/DUTM/MTI-24; • Masyarakat sejumlah 20.232.532 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan. • PT Pelindo Multi Terminal as the holder/owner of 1,296,144,749 shares of the total shares that have been placed and fully paid into the Company; in this case represented by Yoni Setiawan, Director of Finance and Risk Management of PT Pelindo Multi Terminal as the attorney of Ary Henryanto, President Director of PT Pelindo Multi Terminal based on the Special Power of Attorney dated May 31, 2024 Number HM.03.03/31/5/2/PAPS/DIRU/PLMT-24; • PT Pelabuhan Indonesia Investama as the holder/owner of 100,682,600 shares of the total shares that have been placed and fully paid into the Company; in this case represented by Ikhwanoel, Director of PT Pelabuhan Indonesia Investama; • PT Multi Terminal Indonesia as the holder/owner of 13,092,371 shares of the total number of shares that have been placed and fully paid into the Company; in this case represented by Yuli Wahyu Wibowo, SM Finance PT Multi Terminal Indonesia, as the attorney of Yandi Tiosaputra, Acting President Director of PT Multi Terminal Indonesia based on Power of Attorney dated June 5, 2024 Number SK.03/5/6/2/SSPH/DUTM/MTI-24; • The public amounting to 20,232,532 shares of the total number of shares that have been placed and fully paid into the Company.
Kehadiran Dewan Komisaris Attendance of Board of Commissioners	Komisaris Utama : Drajat Sulistyo Komisaris Independen : Abdur Rahim Hasan Komisaris Independen : LM. Arya Bima Yudiantara President Commissioner : Drajat Sulistyo Independent Commissioner : Abdur Rahim Hasan Independent Commissioner : LM. Arya Bima Yudiantara
Kehadiran Direksi Attendance of Board of Directors	Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : Sugeng Mulyadi Direktur Operasi dan Teknik : Bagus Dwipoyono Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : Wing Megantoro President Director and Director of Commercial and Business Development : Sugeng Mulyadi Director of Operations and Technical : Bagus Dwipoyono Director of Finance and Human Capital : Wing Megantoro
Kehadiran Komite Audit Attendance of Audit Committee	Ketua : Abdur Rahim Hasan Anggota Independen : Noval Ali Abbas Anggota Independen : Kurniawan Eko Saputro Chairman : Abdur Rahim Hasan Independent Member : Noval Ali Abbas Independent Member : Kurniawan Eko Saputro
Kehadiran Komite Pemantau Manajemen Risiko Attendance of Risk Management Monitoring Committee	Ketua : LM. Arya Bima Yudiantara Anggota : Nurkholis Lukman Chairman : LM. Arya Bima Yudiantara Member : Nurkholis Lukman
Komite Nominasi dan Remunerasi Attendance of Nomination and Remuneration Committee	Ketua : Abdur Rahim Hasan Anggota : LM. Arya Bima Yudiantara Anggota : Ahmad Alyani Addarain Chairman : Abdur Rahim Hasan Member : LM. Arya Bima Yudiantara Member : Ahmad Alyani Addarain
Pihak Independen Penghitung Suara Independent Vote Counter	• Notaris Ashoya Ratam SH, MKn, selaku Notaris Publik dan • PT Electronic Data Interchange selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan dan/atau melakukan validasi dan pengambilan suara dalam RUPST. • Notary Ashoya Ratam SH, MKn, as Public Notary and • PT Electronic Data Interchange as Share Registrar to perform calculations and/or validate and vote at the GMS

Rincian Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan Tindak Lanjutnya
Details of Annual GMS Resolutions for 2023 Fiscal Year and FollowUp

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	**Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.** **Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Report for 2023 Fiscal Year.**
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam rapat. There were 2 (two) shareholders who asked questions at the meeting
Pengambilan Keputusan Decision-making	**Dengan Pemungutan Suara** By Voting

Setuju Agree	***Abstain***	**Tidak Setuju** Disagree
1.429.086.852 = 99,926%	944.800 = 0,066%	120.600 = 0,008%

Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan PuBlik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 1. Approved the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Report for 2023 Fiscal Year. 2. Ratified the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ended on December 31, 2023 which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) as stated in its report Number: 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 dated March 26, 2024 with the opinion "Fair in all material respects, the Company's financial position on December 31, 2023, as well as its financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia. With the approval of the Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report and the ratification of the Company's Financial Statements, the Meeting granted full release and discharge of responsibility (Acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their actions management and supervision in 2023 fiscal year as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2023
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Making a copy of the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 10, 2024 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta
Status	**Telah dilaksanakan** **Has been realized.**

Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.** **Determination of Use of the Company's Net Profit for 2023 Fiscal Year.**
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan There were no Shareholders who asked questions.
Pengambilan Keputusan Decision-making	**Dengan Pemungutan Suara** By Voting

Setuju Agree	***Abstain***	**Tidak Setuju** Disagree
1.429.089.152 = 99,926%	944.800 = 0,066%	118.300 = 0,008%

Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.** **Determination of Use of the Company's Net Profit for 2023 Fiscal Year.**
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp190.854.844.653,00 (seratus sembilan puluh miliar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) sebagai berikut: a. Sebesar 1,05% atau Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dialokasikan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. b. Sebesar 80% atau Rp152.683.875.722,00 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari masing masing pemegang saham, dimana sebesar Rp39.236.506.498,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) telah dibagikan sebagai dividen interim sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan sebesar Rp113.447.369.224,00 (seratus tiga belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) atau total dividen per lembar saham menjadi sebesar Rp83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan tujuh rupiah). c. Sisanya sebesar 18,95% atau sebesar Rp36.170.968.931,00 (tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) akan digunakan sebagai Laba ditahan Perseroan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham. 1. Approve the determination of the use of the Company's net profit for 2023 fiscal year amounting to Rp190,854,844,653.00 (one hundred ninety billion eight hundred fifty four million eight hundred forty four thousand six hundred and fifty three rupiah) as follows: a. 1.05% or Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah) will be allocated as Mandatory Reserves to fulfill Article 70 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. b. 80% or Rp152,683,875,722.00 (one hundred fifty two billion six hundred eighty three million eight hundred seventy five thousand seven hundred twenty two rupiah) is distributed as dividends to shareholders according to the percentage of share ownership of each shareholder, where Rp39,236,506,498.00 (thirty nine billion two hundred thirty six million five hundred six thousand four hundred ninety eight rupiah) has been distributed as interim dividends so that the remainder is in the form of final dividends to be distributed amounting to Rp113,447,369,224.00 (one hundred thirteen billion four hundred forty seven million three hundred sixty nine thousand two hundred twenty four rupiah) or total dividends per share amounting to Rp83.97 (eighty three point ninety seven rupiah). c. The remaining 18.95% or Rp36,170,968,931.00 (thirty-six billion one hundred seventy million nine hundred sixtyeight thousand nine hundred thirty-one rupiah) will be used as the Company's Retained Earnings. 2. Granting authority and power to the Company's Board of Directors with the right of substitution to further regulate the procedures and implementation of the distribution of cash dividends in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, including rounding up for dividend payments per share
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Making a copy of the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 10, 2024 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta
Status	**Telah dilaksanakan** **Has been realized.**

Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda	**Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024.** **Appointment of the Company's Public Accounting Firm for 2024 Fiscal Year.**
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan There were no Shareholders who asked questions.

Pengambilan Keputusan
Decision-making

Dengan Pemungutan Suara By Voting		
Setuju Agree	***Abstain***	**Tidak Setuju** Disagree
1.429.089.152 = 99,926%	944.800 = 0,066%	118.300 = 0,008%

Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda	**Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024.** **Appointment of the Company's Public Accounting Firm for 2024 Fiscal Year.**
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, apabila dianggap perlu termasuk Audit Kinerja, Audit KPI dan Audit Kepatuhan Tahun Buku 2024. 2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut termasuk untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas. 1. Appoint Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) to perform audit services on the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2024 and other periods in the 2024 Fiscal Year for the purposes and interests of the Company, if deemed necessary including Performance Audit, KPI Audit and Compliance Audit for the 2024 Fiscal Year. 2. Grant the delegation of authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of audit service fees, additional scope of work required and other reasonable requirements for the public accounting firm including to determine a Replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) for any reason is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements, including determining the audit service fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm, with prior written approval from the major shareholder
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Making a copy of the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 10, 2024 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta
Status	**Telah dilaksanakan** **Has been realized.**

Mata Acara Rapat Keempat Fourth Meeting Agenda	Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Determination of salary/honorarium and other allowances and bonuses for members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan There were no Shareholders who asked questions.		
Pengambilan Keputusan Decision-making	**Dengan Pemungutan Suara** By Voting		
	Setuju Agree	***Abstain***	**Tidak Setuju** Disagree
	1.429.058.052 = 99,924%	946.400 = 0,066%	147.800 = 0,010%
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran tantiem bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas. 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024. 3. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas. 1. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of bonuses for members of the Company's Board of Directors and the Company's Board of Commissioners for 2023 fiscal year after consultation with the Major Shareholders. 2. Granting authority to the Major Shareholders to determine the remuneration for members of the Company's Board of Commissioners for 2024. 3. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration for members of the Company's Board of Directors for 2024 after consultation with the Major Shareholders.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Making a copy of the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 10, 2024 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta		
Status	Telah dilaksanakan Has been realized.		

Mata Acara Rapat Kelima Fifth Meeting Agenda	**Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota Direksi Perseroan.** **Changes in the Nomenclature of Positions of the Company's Board of Directors.**
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan There were no Shareholders who asked questions.
Pengambilan Keputusan Decision-making	**Dengan Pemungutan Suara** By Voting

Setuju Agree	*Abstain*	Tidak Setuju Disagree
1.429.062.652 = 99,924%	944.800 = 0,066%	144.800 = 0,010%

Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Menetapkan Direktur Keuangan & SDM menjadi Direktur Keuangan, SDM, & Manajemen Risiko. Appointed Director of Finance & HC as Director of Finance, HC, & Risk Management
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Making a copy of the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 10, 2024 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta
Status	Telah dilaksanakan Has been realized.

Mata Acara Rapat Keenam Sixth Meeting Agenda	**Persetujuan Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham Perseroan.** **Approval of the Company's Share Buyback.**
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam rapat. There were 2 (two) shareholders who raised questions in the meeting.
Pengambilan Keputusan Decision-making	**Dengan Pemungutan Suara** By Voting

Setuju Agree	*Abstain*	Tidak Setuju Disagree
1.429.195.152 = 99,933%	944.800 = 0,066%	12.300 = 0,001%

Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Menyetujui Pembelian Kembali *(Buyback)* Saham Perseroan dengan Dana maksimal sebesar Rp116.930.902.220,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua ribu dua ratus dua puluh rupiah). 2. Memberikan wewenang dan kuasa. dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, yang dalam pelaksanaanya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan PT Pelindo Multi Terminal selaku Pemegang Saham Mayoritas, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan syarat pelaksanaan dan ketentuan lainnya atas pembelian kembali saham Perseroan *(Buyback)* dan menyatakan keputusan tersendiri dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 1. Approve the Company's Share Buyback with a maximum Fund of Rp16,930,902,220.00 (one hundred sixteen billion nine hundred thirty million nine hundred two thousand two hundred twenty rupiah). 2. Grant authority and power. with the right of substitution to the Company's Board of Directors, which in its implementation will consult in advance with PT Pelindo Multi Terminal as the Major Shareholder, to carry out all necessary actions in connection with the implementation of this Meeting resolution, including but not limited to determining the terms of implementation and other provisions for the Company's share buyback and stating a separate decision with a separate deed before a Notary, with due regard to the applicable provisions and laws.
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Making a copy of the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 10, 2024 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta.
Status	Perseroan memutuskan untuk tidak melaksanakan rencana pembelian kembali saham (*buyback*) pada periode berjalan setelah mempertimbangkan kondisi pasar. The Company decided not to carry out the share buyback plan in the current period after considering market conditions.

Mata Acara Rapat Ketujuh Seventh Meeting Agenda	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perseroan. Report on the Use of Proceeds from the Company's Public Offering of Shares.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan There were no Shareholders who asked questions.
Pengambilan Keputusan Decision-making	Mata Acara Ketujuh sifatnya sebagai laporan sehingga tidak ada pengambilan keputusan. The Seventh Agenda is a report so that no decision is taken.
Laporan Report	Dana hasil Penawaran Umum Perdana telah digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dilaporkan ke SPE OJK sesuai dengan Surat Nomor: KU.02.04/29/5/1/SKPR/SKPR/IKT-24 tanggal 29 Mei 2024, telah dipergunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut: Dari total perolehan dana IPO sebesar Rp835.002.228.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sebanyak Rp34.627.174.064,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) telah digunakan untuk biaya penawaran umum saham Perseroan sehingga diperoleh dana bersih hasil yang didapatkan dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan sebesar Rp800.375.053.936,00 (delapan ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), dan telah digunakan sebagai berikut: 1. Sebesar Rp428.953.082.600,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) telah dialokasikan untuk Belanja Modal/Capital Expenditure. 2. Sebesar Rp361.421.971.336,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) telah digunakan untuk Sewa Lahan Dibayar Dimuka untuk Termin I dan sebagian Termin II. 3. Sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) telah digunakan untuk Modal Kerja (Working Capital). Terdapat selisih Dana Net Proceed IPO yang tertera dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor 1 0 Tanggal 19 Juni 2019 dan Laporan koreksi audit Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG)-("EY") Tahun 2018 terdapat perbedaan net Proceed yang diilustrasikan sebagai berikut: 1. Dana Net Proceed Koreksi Audit EY Tahun 2018 sebesar Rp800.375.053.936,00 (delapan ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) 2. Dana Net Proceed Akuntan nomor 10 Tahun 2019 sebesar Rp799.500.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah). Sehingga terdapat selisih sebesar Rp875.053.936,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah). Dengan demikian ditegaskan bahwa Dana yang diperoleh hasil Penawaran Umum Saham (IPO) - Net Proceed sesuai dengan Koreksi Audit ey Tahun 2018 sebesar Rp800.375.053.936,00 (delapan ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) telah seluruhnya digunakan oleh Perseroan sebagaimana telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. The funds from the Initial Public Offering have been used entirely by the Company in accordance with applicable provisions and have been reported to OJK SPE in accordance with Letter Number: KU.02.04/29/5/1/SKPR/SKPR/IKT-24 dated May 29, 2024, have been used by the Company with the following details: From the total IPO funds obtained of Rp835,002,228,000.00 (eight hundred thirty-five billion two million two hundred twenty-eight thousand rupiah), as much as Rp34,627,174,064.00 (thirty-four billion six hundred twenty-seven million one hundred seventy-four thousand sixty-four rupiah) has been used for the Company's public offering costs so that the net funds obtained from the Company's Initial Public Offering (IPO) amounted to Rp800,375,053,936.00 (eight hundred billion three hundred seventy-five million fifty-three thousand nine hundred thirty-six rupiah), and has been used as follows: 1. An amount of Rp428,953,082,600.00 (four hundred twenty-eight billion nine hundred fifty-three million eighty-two thousand six hundred rupiah) has been allocated for Capital Expenditure. 2. An amount of Rp361,421,971,336.00 (three hundred sixty-one billion four hundred twenty-one million nine hundred seventy-one thousand three hundred thirty-six rupiah) has been used for Land Rent Paid in Advance for Term I and part of Term II. 3. An amount of Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah) has been used for Working Capital. There is a difference in the Net Proceed Fund of IPO stated in the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number 1 0 Dated June 19, 2019 and the Audit Correction Report of Public Accounting Firm (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG)-("EY") in 2018 there is a difference in the net Proceed illustrated as follows: 1. Net Proceed Fund of Audit Correction EY in 2018 amounting to Rp800,375,053,936.00 (eight hundred billion three hundred seventy five million fifty three thousand nine hundred thirty six rupiah) 2. Net Proceed Fund of Accountant number 10 in 2019 amounting to Rp799,500,000,000.00 (seven hundred ninety nine billion five hundred million rupiah). There is a difference of Rp875,053,936.00 (eight hundred seventy five million fifty three thousand nine hundred thirty six rupiah). Thus it is confirmed that the Funds obtained from the Public Offering of Shares (IPO) - Net Proceed in accordance with the Audit Correction EY 2018 amounting to Rp800,375,053,936.00 (eight hundred billion three hundred seventy five million fifty three thousand nine hundred thirty six rupiah) have been entirely used by the Company as reported to the Financial Services Authority
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Making a copy of the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 10, 2024 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta
Status	**Telah dilaksanakan** **Has been realized.**

Direksi
Board of Directors

Direksi merupakan salah satu organ kunci dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan peran utama dalam menjalankan pengurusan Perseroan. Direksi memegang tanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan, baik secara perseorangan maupun bersama-sama, agar kegiatan usaha berjalan sejalan dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selain itu, Direksi bertindak sebagai perwakilan Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi diwajibkan bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan mengedepankan kepentingan terbaik Perseroan. Keberadaan, peran, dan pelaksanaan fungsi Direksi di IPCC telah disesuaikan dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 108.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan.
4. Anggaran Dasar IPCC.
5. Pedoman *Good Corporate Governance* IPCC.
6. Pedoman Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi IPCC.

Prosedur Pengangkatan Direksi

Proses pengangkatan Direksi di lingkungan Perseroan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan SDM. Tahapan pengangkatan diawali dengan penetapan sumber calon, dilanjutkan dengan proses penjaringan, evaluasi, hingga pengajuan usulan pengangkatan.

Dalam menetapkan Anggota Direksi, Perseroan menerapkan kriteria dan persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi oleh setiap calon, termasuk keharusan untuk lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) melalui mekanisme *Talent Pool* yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham. Calon Anggota Direksi yang diajukan harus memenuhi persyaratan umum, antara lain memiliki kompetensi yang memadai, integritas, kemampuan kepemimpinan, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi tinggi dalam mendorong kemajuan dan pengembangan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Board of Directors is one of the key organs in implementing Good Corporate Governance, with a primary role in managing the Company. Board of Directors has full responsibility for managing the Company, both individually and collectively, to ensure that business activities are conducted in accordance with the Company's objectives and goals. In addition, Board of Directors acts as the Company's representative, both in and out of court, as stipulated in the Articles of Association.

In carrying out their duties, each member of Board of Directors is required to act in good faith, with full responsibility, and prioritize the best interests of the Company. The existence, role, and performance of the Board of Directors' functions at IPCC have been aligned with and comply with the provisions set forth in the Financial Services Authority Regulation regarding Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Legal Basis

1. Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 Article 108.
2. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
3. Financial Services Authority Regulation No. 75/POJK.04/2017 concerning Board of Directors Responsibility for Financial Reports.
4. IPCC Articles of Association.
5. IPCC Good Corporate Governance Guidelines.
6. Guidelines for Working Relations of IPCC Board of Commissioners and Board of Directors.

Board of Directors Appointment Procedure

The process of appointing members of Board of Directors within the Company is conducted in accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organizational Structure and Human Capital. The appointment process begins with the identification of potential candidates, followed by a screening process, evaluation, and the submission of appointment proposals.

In appointing members of Board of Directors, the Company applies specific criteria and requirements that must be met by every candidate, including the requirement to pass the Fit and Proper Test through the Talent Pool mechanism organized by the Shareholders. Proposed candidates for members of Board of Directors must meet general requirements, including possessing adequate competence, integrity, leadership skills, honesty, good conduct, and a high level of dedication to driving the Company's progress and development in accordance with applicable regulations.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi IPCC ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, serta Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan tersebut, masa jabatan Anggota Direksi dinyatakan berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Masa jabatannya berakhir.
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan.
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengundurkan diri.

Pedoman Direksi

Direksi IPCC telah menetapkan pedoman kerja atau *board manual* yang mulai diberlakukan sejak 19 Desember 2022. Dokumen tersebut secara berkala dilakukan peninjauan kembali guna memastikan kesesuaiannya dengan dinamika usaha, tantangan bisnis yang dihadapi Perseroan, serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Pedoman Kerja Direksi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta regulasi terkait lainnya. Pedoman tersebut memuat pengaturan mengenai berbagai aspek pelaksanaan fungsi Direksi, antara lain masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, tata cara penyelenggaraan rapat, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan peran Direksi sebagai salah satu organ utama Perseroan.

Secara umum, Pedoman Kerja Direksi mencakup pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

1. Kebijakan mengenai Direksi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
2. Kebijakan mengenai Direksi berdasarkan Anggaran Dasar.
3. Tugas dan Wewenang Direksi.
4. Rapat Direksi.
5. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas.
6. Independensi Direksi.
7. Etika Jabatan Anggota Direksi.
8. Susunan Direksi.
9. Fungsi Pendukung Direksi.

Keberadaan Pedoman Kerja Direksi diharapkan mampu menjadi acuan yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi, sehingga pengelolaan Perseroan dapat berlangsung secara lebih sistematis dan efisien. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat diwujudkan secara optimal dan sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam mengevaluasi kinerja Direksi.

Mechanism for Resignation and Dismissal of Board of Directors

The provisions regarding the dismissal of members of IPCC's Board of Directors are established in accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023, Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014, and the Company's Articles of Association. Pursuant to these provisions, members of Board of Directors shall be deemed to have completed their term of office if:

1. Passed away.
2. Term of office ends.
3. Dismissed by decision.
4. No longer meets the requirements as a member of Board of Directors based on the provisions of Articles of Association and applicable laws and regulations.
5. Resignation.

Board of Directors Manual

IPCC's Board of Directors has established a board manual, which took effect on December 19, 2022. This document is periodically reviewed to ensure its alignment with business dynamics, the challenges faced by the Company, and developments in applicable laws and regulations.

The Board of Directors Manual was drafted in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as well as other relevant regulations. These guidelines contain provisions regarding various aspects of the Board of Directors' functions, including terms of office, duties and responsibilities, meeting procedures, and other provisions related to Board of Directors' role as one of the Company's principal organs.

In general, the Board of Directors Manual cover the following key provisions:

1. Policy regarding Board of Directors based on the Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange Regulations.
2. Policy regarding Board of Directors based on Articles of Association.
3. Board of Directors Duties and Authorities.
4. Board of Directors Meetings.
5. Introduction and Capability Improvement Program.
6. Independence of Board of Directors.
7. Ethics of Board of Directors Members.
8. Composition of Board of Directors.
9. Supporting Functions of Board of Directors.

The Board of Directors Manual are intended to serve as a clear reference for implementing the duties and authorities of Board of Directors, so that the Company's management can be conducted in a more systematic and efficient manner. Consequently, Good Corporate Governance principles can be optimally implemented and simultaneously serve as a basis for evaluating the Board of Directors' performance.

Masa Jabatan Direksi

Anggota Direksi Perseroan menjabat selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Masa jabatan tersebut berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan kelima setelah pengangkatan, dengan tetap memperhatikan kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sebelum berakhirnya masa jabatan apabila dipandang perlu. Anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS untuk satu kali periode jabatan selanjutnya.

Board of Directors' Term of Office

Members of the Company's Board of Directors serve for a term of 5 (five) years from the date of appointment as determined at the Annual General Meeting of Shareholders. This term of office ends s authority to dismiss members of Board of Directors prior to the end of their term if deemed necessary. Members of Board of Directors who have completed their term of office may be reappointed by General Meeting of Shareholders resolution for one additional term.

Kriteria dan Persyaratan Anggota Direksi

Perseroan memastikan bahwa setiap calon yang ditetapkan dalam pelaksanaan proses nominasi Direksi memiliki kompetensi, kapabilitas, dan keahlian yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran serta kepentingan terbaik Perseroan. Penjelasan mengenai pemenuhan kriteria oleh masing-masing anggota Direksi disampaikan sebagai berikut:

Criteria and Requirements for Board Members

The Company ensures that every candidate nominated during the Board nomination process possesses the competence, capability, and expertise necessary to support the achievement of the Company's objectives and best interests. An explanation of how each member of Board of Directors fulfills these criteria is provided as follows:

Kriteria/Persyaratan Criteria/Requirements	Sugeng Mulyadi	Bagus Dwipoyono	Wing Megantoro
1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik Have good character, morals and integrity	V	V	V
2. Cakap melakukan perbuatan hukum Capable of carrying out legal actions	V	V	V
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: Within 5 (five) years before appointment and during term of office:			
a. Tidak pernah dinyatakan pailit Never declared bankrupt	V	V	V
b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau Never been a member of Board of Directors or Board of Commissioners being found guilty of causing a Company to be declared bankrupt; or	V	V	V
c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan Never been convicted of committing a criminal offense that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector	V	V	V
d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: Never been a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners while serving:			
i) Tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunan Never held an Annual GMS	V	V	V
ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris kepada RUPS. Accountability as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners have ever been not accepted by the GMS or has never provided accountability as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS.	V	V	V
iii) Tidak pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Never cause a Company that obtains a permit, approval or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to the Financial Services Authority.	V	V	V
4. Memiliki komitmen untuk memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Have a commitment to understand and comply with statutory regulations.	V	V	V

Kriteria/Persyaratan Criteria/Requirements	Sugeng Mulyadi	Bagus Dwipoyono	Wing Megantoro
5. Memiliki pengetahuan dan atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik Have knowledge and/or expertise in the field required by the Issuer or Public Company	V	V	V
6. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perusahaan tercatat yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen. Have no affiliation with the Controller of listed Company concerned for at least 6 (six) months prior to appointment as Independent Director	V	V	V
7. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Calon Perusahaan. Have no affiliation with other Board of Commissioners or Board of Directors of the Prospective Company	V	V	V
8. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain Not working concurrently as a Director in other companies	V	V	V
9. Tidak menjadi Orang Dalam Lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Calon Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Not be a Person in an Institution or Capital Market Supporting Professional whose services are used by the Prospective Listed Company for 6 (six) months prior to appointment as Director.	V	V	V

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Direksi Tahun 2025

Ketentuan mengenai komposisi dan keanggotaan Direksi Perusahaan, sebagai berikut:

1. Jumlah Direksi disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas, dan rencana strategis Perusahaan;
2. Dalam hal Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan diangkat seorang Wakil Direktur Utama;
3. Komposisi dan pembagian tugas serta wewenang Direksi berdasarkan struktur organisasi Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Apabila pembagian tugas Direksi tidak ditetapkan oleh RUPS maka pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;
4. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham.

Per 31 Desember 2025, jumlah dan komposisi Direksi Perseroan berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, Direktur Operasi dan Teknik, serta Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko.

Number, Composition and Structure of Board of Directors in 2025

Provisions regarding the composition and membership of the Company's Board of Directors, as follows:

1. The number of Board of Directors is adjusted to the needs, level of complexity and strategic plans of the Company;
2. In the event that the Board of Directors consists of more than 1 (one) member of Board of Directors, one of whom is appointed as President Director, and if necessary a Deputy President Director is appointed;
3. The composition and distribution of duties and authority of Board of Directors based on the Company's organizational structure is determined by the GMS. If the division of duties of Board of Directors is not determined by the GMS, the distribution of duties and authority among members of Board of Directors is determined based on the Board of Directors Decree;
4. Members of Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders (GMS) and the GMS Resolutions must be approved by the Shareholders.

As of December 31, 2025, number and composition of the Company's Board of Directors amounted to 3 (three) persons, consisting of 1 (one) President Director, Director of Operations and Technical, Director of Finance, HC and Risk Management.

Susunan dan Komposisi Direksi Per 31 Desember 2025
Structure and Composition of Board of Directors as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama President Director	Akta RUPS No. 42 tanggal 17 Juni 2025 GMS Minutes No. 42 dated June 17, 2025	RUPS Tahunan Tahun 2030 Annual GMS 2030	Ke-2 2nd
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technical	Akta RUPS No. 42 tanggal 17 Juni 2025 GMS Minutes No. 42 dated June 17, 2025	RUPS Tahunan Tahun 2030 Annual GMS 2030	Ke-2 2nd
Wing Megantoro	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC and Risk Management	Akta RUPS No. 42 tanggal 17 Juni 2025 GMS Minutes No. 42 dated June 17, 2025	RUPS Tahunan Tahun 2030 Annual GMS 2030	Ke-2 2nd

Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi mencakup pelaksanaan seluruh tindakan pengurusan Perseroan yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sejalan dengan maksud serta tujuan Perseroan. Dalam menjalankan perannya tersebut, Direksi juga memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wakil Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sepanjang sesuai dengan ketentuan dan batasan yang berlaku. Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengurusan tersebut, Direksi diberikan kewenangan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada orang atau beberapa orang anggota Direksi;
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan;
3. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan;
4. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan; dan
5. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun kepemilikan kekayaan Perseroan.

Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, Direksi juga mengemban kewajiban tertentu yang harus dipenuhi dalam rangka memastikan pengelolaan Perseroan berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip tata kelola yang berlaku, yaitu:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris;
3. Memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi;
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perseroan;
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk di audit;
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahun ini;
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan;

Profiles of all Board of Directors can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Board of Directors Duties and Authorities

The duties and responsibilities of Board of Directors, as stipulated in the Board of Commissioners and Board of Directors Relations Work Guidelines, are to carry out all of the Company's management activities in the Company's best interests and in accordance with the Company's objectives and goals. In performing these duties, Board of Directors also has the authority to act as the Company's representative, both in and out of court, provided that such actions comply with applicable regulations and limitations. In connection with the performance of these management functions, Board of Directors is authorized to carry out the following:

1. Arrange the handover of the Board of Directors' authority to represent the Company in and out of court to one or more members of Board of Directors;
2. Arrange the provisions regarding the Company's personnel;
3. Appoint and dismiss the Company's employees;
4. Appoint and dismiss Corporate Secretary; and
5. Take all other actions and deeds regarding the management and ownership of the Company's assets.

In addition to carrying out their established duties and responsibilities, Board of Directors also has certain obligations that must be fulfilled to ensure that the Company is managed in accordance with applicable regulations and Corporate governance principles, as follows:

1. Strive for and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its purposes, objectives and business activities;
2. Prepare in a timely manner the Company's Long Term Plan, Work Plan and Budget, and any amendments thereto and submit them to Board of Commissioners for approval from Board of Commissioners;
3. Provide an explanation to the Board of Commissioners regarding the Company's Long Term Plan and the Company's Work Plan and Budget;
4. Create a Shareholder List, Special List and Minutes of Board of Directors' Meetings;
5. Prepare an Annual Report as a form of accountability for Company management, as well as Company financial documents as intended in the Law on Company Documents;
6. Prepare Financial Reports based on Financial Accounting Standards and submit them to the Public Accountant for audit;
7. Submit the Annual Report including Financial Reports to the GMS for approval and ratification;
8. Provide an explanation to the GMS regarding this year's report;
9. Submit the Balance Sheet and Profit and Loss Report approved by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights in accordance with the provisions of statutory regulations;
10. Maintaining the Shareholders' Register, Special List, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners' Meetings and Minutes of Board of Directors' Meetings, Annual Reports and Financial Documents of the Company;

11. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpan dan pengawasan;
13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
14. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
15. Menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perseroan;
16. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang undangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Penetapan pembagian tugas di antara anggota Direksi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pengurusan Perseroan serta keberlanjutan pencapaian tujuan di masa mendatang dapat berjalan secara terstruktur, efisien, dan efektif. Cakupan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Direksi No. HK.01/11/6/2/SDMU/DIRUT/IKT-24 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kantor Pusat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Rincian pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:

11. Store at the Company's place of residence: List of Shareholders, Special List, Minutes of GMS, Minutes of Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors, Annual Report and financial documents of the Company;
12. Develop an accounting system in accordance with Financial Accounting standards and based on internal control principles, especially the separation of management, recording, storage and supervision functions;
13. 1Provide periodic reports according to the method and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners;
14. Prepare the Company's organizational structure complete with details and duties;
15. Develop and determine the Company's organizational structure;
16. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and determined by the GMS based on statutory regulations.

Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

The division of duties among Board of Directors members is determined to ensure that the Company's management activities and continued achievement of its future goals are structured, efficient, and effective. The scope of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is in accordance with the provisions set forth in Board of Directors Regulation No. HK.01/11/6/2/SDMU/DIRUT/IKT-24 regarding the Organizational Structure and Governance of the Head Office of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. The details of the division of duties and responsibilities are as follows:

Sugeng Mulyadi

Direktur Utama, merangkap Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
President Director, Acting Director of Commercial and Business Development

1. Bertindak sebagai pimpinan dari para anggota Direksi untuk menyusun RJPP dan melaksanakan kegiatan usaha Perusahaan yang telah ditetapkan dalam RKAP dan RKM;
2. Mengarahkan dan mengendalikan implementasi kebijakan visi, misi dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan dalam RJPP;
3. Mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada (i) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi atas pencapaian RJPP, RKAP dan RKM, (ii) kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan budaya korporasi, citra positif Perusahaan dan tata kelola Perusahaan (good corporate governance) serta pengelolaan pemangku kepentingan (managing stakeholder) dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan visi misi Perusahaan;
4. Memimpin dan mengoordinasikan penyusunan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam kegiatan Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal;
5. Menandatangani seluruh persetujuan-persetujuan yang diputuskan di dalam Rapat Direksi maupun diluar Rapat Direksi yang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, kecuali atas kewenangan yang telah didelegasikan berdasarkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait;
6. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasaar perusahaan;
7. Memimpin Rapat Direksi dan rapat korporasi lainnya serta mengoordinasikan Direksi untuk pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris/RUPS;
8. Memberikan informasi terkait segala sesuai tentang Perusahaan kepada Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*);
9. Menandatangani strategi risiko yang meliputi: selera risiko, toleransi risiko, batasan risiko dan kapasitas risiko.

1. Act as the leader of Board of Directors in preparing the Long-Term Business Plan (RJPP) and implementing the Company's business activities as stipulated in the Company's Work Plan (RKAP) and Work Plan (RKM);
2. Direct and control the implementation of the Company's vision, mission, and strategy policies as stipulated in the RJPP;
3. Direct and control all Company activities, including but not limited to (i) planning, implementation, control, and evaluation of the achievement of RJPP, RKAP, and RKM; (ii) activities to enhance corporate culture, the Company's positive image, good corporate governance, and stakeholder management to achieve the Company's goals and objectives in accordance with the Company's vision and mission;
4. Lead and coordinate the development of strategies to elaborate on RJPP, RKAP, and RKM within the Corporate Secretary and Internal Audit activities;
5. Sign all agreements resolved in Board of Directors Meetings and outside of Board of Directors Meetings, implemented in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, except for authority delegated based on relevant policies and Standard Operating Procedures (SOPs);
6. Sign agreements, contracts, or other agreements with third parties related to the management of the Company in accordance with the authority stipulated in the Company's Articles of Association;
7. Lead Board of Directors Meetings and other corporate meetings and coordinate Board of Directors for the holding of Board of Commissioners Meetings/GMS;
8. Provide information related to all matters concerning the Company to Stakeholders;
9. Sign the risk strategy, which includes: risk appetite, risk tolerance, risk limits, and risk capacity.

Bagus Dwipoyono
Direktur Operasi dan Teknik
Director of Operations and Technical

1. Menyelenggarakan tugas pengurusan Perusahaan di bidang perencanaan, pengembangan dan pengelolaan oeprasi, fasilitas dan utilitas pelabuhan, instansi listrik serta sistem informasi;
2. Direktur Operasi dan Teknik dalam melaksanakan tugasnya, berwenang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
   a. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam kegiatasn operasi dan Terminal Satelit, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan dan utilitas pelabuhan serta terkait sistem informasi;
   b. Melakukan kajian investasi baik fasilitas maupun utilitas pelabuhan sebagai usulan kepada Komite Investasi untuk dituangkan kedalam RKAP;
   c. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan untuk pemenuhan optimalisasi pelayanan jasa kepelabuhanan, baik dalam rangka implementasi strategi perusahaan, melaksanakan tugas dari pemerintah maupun dari stakeholder;
   d. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan, utilitas pelabuhan dan sistem informasi;
   e. Memberikan persetujuan atau keputusan bisnis di bidang teknik sesuai pendelegasian kewenangan dari Direksi;
   f. Mengoordinasikan serta mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan operasi, teknik dan sistem informasi;
   g. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terakit dengan pengurusan Perusahaan, khususnya dalam bidang tugas operasi, teknik dan sistem informasi atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait;
   h. Mengoordinasikan serta mengevaluasi penysunan implementasi kegiatan strategi kegiatan pemberian jasa pelabuhan antara lain dalam rangka kegiatan pengelolaan bongkar muat barang, pengelolaan terminal RoRO/ROPax dan manajemen sistem informasi yang terintegrasi dengan stakeholder;
   i. Memastikan pelaksanaan pembinaan Pekerja dibawah Pimpinan Direktur Operasi dan Teknik sesuai kebijakan/pedoman di bidang SDM;
   j. Mengoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan di bidang-bidang dibawah Direktur Operasi dan Teknik;
   k. Mengoordinasikan pelaksanaan, mengevaluasi dan menyetujui kegiatan pencatatan, administasi dan dokumentasi serta penyusunan laporan pengurusan Perusahan terkait dengan operasi secara baik, akurat dan tepat waktu baik untuk keperluan internal maupun eksternal Perusahaan;
   l. Memastikan tercapainya pendapatan Branch, peningkatan layanan dan produksi melalui perencanaan operasional dan penunjang operasional, operasi pelayanan barang dan bongkar muat guna mendukung tercapainya pertumbuhan pendapatan usaha dan terpenuhinya Key Performance Indicator (KPI) dan Service Level Guarantee (SLG) Branch berdasarkan RKAP yang telah ditetapkan;
   m. Bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan atas risiko pada Direktorat Operasi dan Teknik;
   n. Melaporkan tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas kepada Direktur Utama dan/atau Direksi.

1. Carry out the Company's management duties in the areas of planning, development, and management of operations, port facilities and utilities, electricity utilities, and information systems;
2. In carrying out his/her duties, the Director of Operations and Engineering is authorized to perform the following functions:
   a. Lead and establish strategies as an elaboration of the Long-Term Plan (RJPP), Work Plan and Budget (RKAP), and Work Plan and Budget (RKM) for operational activities and the Satellite Terminal, the construction and maintenance of port facilities and utilities, and related information systems;
   b. Conduct investment studies for both port facilities and utilities, as a recommendation to the Investment Committee for inclusion in the RKAP;
   c. Coordinate, control, and evaluate activities to optimize port services, both in the context of implementing company strategies, carrying out tasks from the government, and from stakeholders;
   d. Coordinate, control, and evaluate the implementation of construction, development, and maintenance activities for port facilities, utilities, and information systems;
   e. Provide approvals or make business decisions in the technical field in accordance with the delegation of authority from the Board of Directors;
   f. Coordinate and evaluate the development and implementation of policies and Standard Operating Procedures (SOPs) related to operational, technical, and information systems activities;
   g. Sign agreements, contracts, or other agreements with third parties related to the management of the Company, particularly in the areas of operational, technical, and information systems tasks, or based on the authority delegated in the relevant policies and SOPs;
   h. Coordinate and evaluate the development and implementation of strategic activities for the provision of port services, including cargo loading and unloading management, RoRO/ROPax terminal management, and integrated information systems management with stakeholders;
   i. Ensure the implementation of employee development under the leadership of the Director of Operations and Engineering in accordance with HR policies/guidelines;
   j. Coordinate and evaluate policies and activities in areas under the Director of Operations and Engineering;
   k. Coordinate the implementation, evaluate, and approve recording, administration, and documentation activities, as well as the preparation of Company management reports related to operations in a proper, accurate, and timely manner for both internal and external purposes.
   l. Ensure the achievement of Branch revenue, increase in services and production through operational planning and operational support, goods service operations, and loading and unloading to support the achievement of business revenue growth and the fulfillment of the Branch's Key Performance Indicators (KPIs) and Service Level Guarantee (SLG) based on the established RKAP;
   m. Responsible for managing risks within the Operations and Engineering Directorate;
   n. Report the above-mentioned tasks to the President Director and/or Board of Directors.

Wing Megantoro
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Human Capital, and Risk Management

1. Tugas pokok Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko adalah menyelenggarakan tugas pengurusan Perusahaan di bidang anggaran, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan perpajakan, perencanaan dan pengelolaan SDM, layanan SDM dan Umum, pengadaan barang dan jasa, manajemen risiko serta sistem manajemen dan HSSE;
2. Direktur keuangan, SDM dan Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugas pokok Direktorat Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko, berwenang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
   a. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam Perusahaan di bidang akuntansi, perbendaharaan, keuangan dan investasi, sumber daya manusia, budaya dan layanan umum, pengadaan barang dan jasa, manajemen risiko serta sistem manajemen dan hsse;
   b. Bertanggung jawab dalam penyusunan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pencapaian RKAP berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis Perusahaan;
   c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mngevaluasi kegiatan pencatatan akuntasi transaksi keuangan dan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara tepat waktu;
   d. Melaksanakan pemenuhan aspek perpajakan terkait dengan kegiatan Perusahaan;
   e. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan optimalisasi dana perusahaan secara akuntabel dan memperhatikan prinsip kehati-hatian melalui kegiatan penempatan dana pada bank dan/atau instrumen pasar uang lainnya termasuk kegiatan pengadministrasian untuk menjamin ketersediaan dan guna membiayai kegiatan operasional Perusahaan;

Wing Megantoro
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Human Capital, and Risk Management

f. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan atau upaya-upaya untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak ketiga guna membiayai kegiatan Perusahaan sehingga dapat bertumbuh dan mancapai tujuan/strategi yang ditetapkan;
g. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pembayaran dan penagihan ke pihak lain terkait kegiataan Perusahaan;
h. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pengembangan di bidang keuangan, SDM dan umum, manajemen risiko, sistem manajemen sesuai dengan RKAP, RJPP dan/atau rencana bisnis Perusahaan;
i. Mengoordinasikan pelaksanaan, mengevaluasi dan menyetujui kegiatan pencatatan, administasi dan dokumentasi serta penyusunan laporan pengurusan Perusahaan terkait dengan bidang akuntansi;
j. Mengoordinasikan serta mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan keuangan, SDM dan Umum, Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen;
k. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga dengan pengurusan Perusahaan, khususnya dalam bidang tugas Keuangan, SDM dan Umum, Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait;
l. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama atas nama Direksi untuk hal-hal tertentu;
m. Memastikan pelaksanaan pembinaan Pekerja dibawah pimpinan Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko sesuai kebijakan/pedoman di bidang SDM;
n. Mengembangkan budaya manajemen risiko ke seluruh jenjang organisasi;
o. Melaksanakan fungsi manajemen risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
p. Melaporkan tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas kepada Direktur Utama dan/atau Direksi.

1. The primary duties of the Director of Finance, Human Resources, and Risk Management are to manage the Company in the areas of budgeting, accounting and reporting, financial management and taxation, HC planning and management, HC and general services, procurement of goods and services, risk management, and management systems and HSE.
2. In carrying out the primary duties of the Directorate of Finance, Human Capital, and Risk Management, the Director of Finance, Human Capital, and Risk Management is authorized to perform the following functions:
   a. Lead and establish strategies as an elaboration of the Company's Long-Term Plan (RJPP), Work Plan and Budget (RKAP), and Work Plan and Budget (RKM) in the areas of accounting, treasury, finance and investment, human resources, culture and general services, procurement of goods and services, risk management, and management systems and HSE;
   b. Responsible for preparing, coordinating, controlling, and evaluating the achievement of the RKAP based on the Company's needs and strategic plans;
   c. Coordinate, control, and evaluate the recording of financial transactions and timely preparation of monthly, quarterly, semi-annual, and annual reports in accordance with applicable accounting standards;
   d. Fulfilling taxation requirements related to the Company's activities;
   e. Coordinating, controlling, and evaluating the Company's fund optimization activities in an accountable manner and with due regard to prudent principles through fund placement in banks and/or other money market instruments, including administrative activities to ensure the availability and financing of the Company's operational activities;
   f. Coordinating, controlling, and evaluating activities or efforts to obtain financing from third parties to finance the Company's activities, enabling it to grow and achieve its stated goals/strategies;
   g. Coordinating, controlling, and evaluating payments and collections to other parties related to the Company's activities;
   h. Coordinating, controlling, and evaluating developments in finance, human capital, general affairs, risk management, and management systems in accordance with the Company's RKAP, RJPP, and/or business plan;
   i. Coordinating the implementation, evaluating, and approving recording, administration, and documentation activities, as well as the preparation of Company management reports related to accounting;
   j. Coordinate and evaluate the development and implementation of policies and Standard Operating Procedures (SOPs) related to financial, HC and General Affairs, Risk Management, and Management Systems activities;
   k. Sign agreements, contracts, or other agreements with third parties involved in the Company's management, specifically in the areas of Finance, HC and General Affairs, Risk Management, and Management Systems, or based on the authority delegated in the relevant policies and SOPs;
   l. Sign agreements, contracts, or other agreements with third parties related to the Company's management based on the authority of the President Director on behalf of the Board of Directors for certain matters;
   m. Ensure the implementation of employee development under the leadership of the Director of Finance, HC, and Risk Management in accordance with HC policies/guidelines;
   n. Develop a risk management culture at all levels of the organization;
   o. Carry out other risk management functions in accordance with applicable laws and regulations;
   p. Report on the aforementioned tasks to the President Director and/or Board of Directors

Independensi Direksi

Perseroan memastikan bahwa setiap anggota Direksi menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan independensi, serta bebas dari benturan kepentingan dengan pihak mana pun. Selain itu, Direksi senantiasa menghindari segala bentuk tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpotensi memengaruhi objektivitas maupun independensinya dalam melaksanakan fungsi pengurusan Perseroan.

Board of Directors' Independence

The Company ensures that each member of Board of Directors carries out their roles and responsibilities with the utmost professionalism and independence, and is free from any conflict of interest with any party. Furthermore, Board of Directors consistently avoids any actions or activities that violate laws and regulations and could potentially affect their objectivity or independence in performing their management duties for the Company.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan usaha terdapat transaksi atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, setiap anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau menurunkan tingkat keuntungan Perseroan. Dalam kondisi

Board of Directors' Conflict of Interest Management

If, in the course of business operations, there are transactions or activities that have the potential to create a conflict of interest, each member of Board of Directors is prohibited from taking actions that could harm the Company or reduce the Company's profits. In

tersebut, anggota Direksi wajib menyampaikan dan mengungkapkan adanya benturan kepentingan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Apabila keputusan tetap diperlukan, Direksi harus senantiasa mengedepankan kepentingan Perseroan serta memastikan tidak timbul kerugian maupun penurunan manfaat bagi Perseroan.

Program Orientasi/Pengenalan bagi Direksi Baru Tahun 2025

Perseroan menyediakan kebijakan serta program orientasi atau pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat. Program tersebut diselenggarakan untuk membekali Direksi dengan pemahaman yang memadai mengenai peran, tugas, dan tanggung jawabnya, sehingga mampu berkontribusi secara optimal terhadap pengembangan dan kinerja Perseroan. Program orientasi Direksi mencakup sejumlah pokok pembahasan, antara lain meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Perseroan;
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan;
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka panjang, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya;
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melaksanakan program orientasi atau pengenalan perusahaan kepada Direksi, dikarenakan tidak terdapat anggota Direksi baru.

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Direksi

Kebijakan

Perseroan menetapkan kebijakan terkait pelatihan dan pengembangan kompetensi Direksi dengan berpedoman pada Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor HK.56/4/5/IKT-17 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan anggota Direksi senantiasa memiliki kompetensi yang sesuai dan terkini, sehingga mampu menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Perseroan.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan melalui berbagai kegiatan yang relevan, antara lain program pelatihan manajerial dan teknis, partisipasi dalam seminar dan forum strategis, serta kegiatan *benchmarking*. Seluruh program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu, kebutuhan organisasi, serta dinamika dan tantangan bisnis yang dihadapi. Dilandasi penerapan kebijakan ini, Perseroan berupaya mendorong terciptanya budaya pembelajaran berkelanjutan guna memperkuat kualitas kepemimpinan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

such circumstances, members of Board of Directors are required to disclose the existence of a conflict of interest in every decision-making process. If a decision is still necessary, Board of Directors must always prioritize the Company's interests and ensure that no loss or reduction in benefits occurs for the Company.

Orientation/Introduction Program for New Board of Directors in 2025

The Company provides policies and an orientation or introduction program for newly appointed members of Board of Directors. The program is designed to equip the Board of Directors with a sufficient understanding of their roles, duties, and responsibilities, enabling them to contribute optimally to the Company's development and performance. The Board of Directors' orientation program covers several key topics, including:

1. Implementation of Good Corporate Governance principles in the Company;
2. Information regarding the duties and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors as well as other things that are not permitted;
3. An overview of the Company relating to objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, long-term business plans, risks, internal control and other strategic issues;
4. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control policies and Audit Committee.

Throughout 2025, the Company did not hold an orientation or introduction program for Board of Directors, because there were no new members of Board of Directors.

Board of Directors' Competency Development Program

Policy

The Company has established a policy regarding the training and competency development of Board of Directors in accordance with PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Directors Regulation No. HK.56/4/5/IKT-17 dated June 15, 2017, concerning Guidelines for Human Capital Development. This policy is designed to ensure that members of Board of Directors consistently possess appropriate and up-to-date competencies, enabling them to effectively perform their functions, duties, and responsibilities in support of the Company's strategic objectives.

Competency development is implemented through various relevant activities, including managerial and technical training programs, participation in seminars and strategic forums, as well as benchmarking activities. All of these programs are tailored to individual needs, organizational needs, and the business dynamics and challenges faced. Based on the implementation of this policy, the Company strives to foster a culture of continuous learning to strengthen leadership quality and the implementation of Good Corporate Governance.

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi yang Diikuti Direksi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah menjalani serangkaian pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Training and/or Competency Development Attended by Board of Directors in 2025

Throughout 2025, Board of Directors has participated in the following training and competency development programs:

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2025
Training and Competency Development for Directors in 2025

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Waktu Penyelenggaraan Implementation Time	Penyelenggara Organizer
Sugeng Mulyadi (Direktur Utama, merangkap Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) President Director, Acting Director of Commercial and Business Development	*Workshop*	Workshop Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth bersama Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP dan Kukuh Workshop on Building Capacity and Infrastructure for Sustainable Growth with Bernardin Nainggolan, S.T., M.M., FRM, CRMP, CRGP, CRPP, and Kukuh	5-6 Februari 2025 February 5–6, 2025	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
	Workshop	Podcast Leadership Forum Vol. 6 "Felt Leadership - Peran Leader Dalam Perubahan Budaya" Leadership Forum Podcast Vol. 6: "Felt Leadership—The Role of Leaders in Cultural Change"	7 Maret 2025 March 7, 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Praktisi Coaching Coaching Practitioner Certification	10-11 Oktober 2025 & 12 Oktober 2025 October 10–11, 2025 & October 12, 2025	Visecoach
	Workshop	Premium Workshop Scale UP 2.0	15-16 November 2025 November 15–16, 2025	PT Aksara Juara Nusantara
	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Coaching Coaching Certification	26 November 2025 November 26, 2025	LKP Anshana Coaching
	Workshop	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko XI - Toward Golden Indonesia 2045: Risk Management As A Competitive Edge in A Complex World 11th National Conference on Risk Management Professionals - Toward Golden Indonesia 2045: Risk Management as a Competitive Edge in a Complex World	27 - 28 November 2025 November 27–28, 2025	LSPMR
	Pelatihan Training	Pelatihan AI For Productivity Training in AI for Productivity	17 November 2025 November 17, 2025	Potensi Daya Sinergi
Bagus Dwipoyono (Direktur Operasi dan Teknik) Director of Operations and Technical	*Workshop*	Workshop Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth bersama Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP dan Kukuh Workshop on Building Capacity and Infrastructure for Sustainable Growth with Bernardin Nainggolan, S.T., M.M., FRM, CRMP, CRGP, CRPP, and Kukuh	5-6 Februari 2025 February 5–6, 2025	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
	Workshop	Podcast Leadership Forum Vol. 6 "Felt Leadership - Peran Leader Dalam Perubahan Budaya" Leadership Forum Podcast Vol. 6: "Felt Leadership—The Role of Leaders in Cultural Change"	7 Maret 2025 March 7, 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
	Sertifikasi Certification	Certified Digital Marketing Specialist (CDMS)	10 Oktober 2025 October 10, 2025	MarkPlus Institute
	Sertifikasi Certification	Star Track Executive Development-Strategic Human Resources Leadership	20 November 2025 November 20, 2025	Cornell University
Wing Megantoro (Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko) (Director of Finance, HC, and Risk Management)	*Workshop*	Workshop Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth bersama Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP dan Kukuh Workshop on Building Capacity and Infrastructure for Sustainable Growth with Bernardin Nainggolan, S.T., M.M., FRM, CRMP, CRGP, CRPP, and Kukuh	5-6 Februari 2025 February 5–6, 2025	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
	Workshop	Podcast Leadership Forum Vol. 6 "Felt Leadership - Peran Leader Dalam Perubahan Budaya" Leadership Forum Podcast Vol. 6: "Felt Leadership—The Role of Leaders in Cultural Change"	7 Maret 2025 March 7, 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
	Sertifikasi Certification	Chartered Accountant (CA)	10 Juni 2025 June 10, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2025
Training and Competency Development for Directors in 2025

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Waktu Penyelenggaraan Implementation Time	Penyelenggara Organizer
	Studi Banding Benchmarking	Studi Banding Learning Center TMMIN Benchmarking Study at TMMIN Learning Center	31 Juli 2025 July 31, 2025	TMMIN & PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
	Pelatihan Training	Fundamental Risk Management & Risk Assessment Techniques (Kelas 2-Lini 1) Fundamental Risk Management & Risk Assessment Techniques (Grade 2, Class 1)	18 November 2025 November 18, 2025	PT RAP Indonesia
	Pelatihan Training	Pelatihan AI For Productivity Training in AI for Productivity	17 November 2025 November 17, 2025	Potensi Daya Sinergi
	Workshop	International Seminar IAI 68th Anniversary "Indonesian Accountants: Resilient, Sustainable,and Future Ready-Beyond Numbers Building the Golden Future"	3 Desember 2025 December 3, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Sepanjang Tahun 2025

Sebagaimana dalam Anggaran Dasar Perseroan, sepanjang tahun 2025 Direksi Perseroan telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya secara optimal. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan dan capaian yang diuraikan sebagai berikut:

Report on the Implementation of Board of Directors' Duties for 2025

In accordance with the Company's Articles of Association, throughout 2025 the Company's Board of Directors has optimally carried out its functions, duties, and responsibilities. The fulfillment of these responsibilities is reflected in various activities and achievements, as outlined below:

No	Uraian Tugas Job Description	Status Realisasi Realization Status
Terkait dengan RUPS Related to the GMS		
1	Wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan perundang-undangan. Obliged to organize and keep documents related to the GMS in accordance with statutory provisions	Sudah Terealisasi Already Realize
2	Menandatangani Laporan Tahunan, dan apabila dalam hal anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya. Sign the Annual Report, and in the event that a member of Board of Directors does not sign the Annual Report, the reason must be stated.	Sudah Terealisasi Already Realize
3	Menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan. Sign the Quarterly Management Report and Annual Management Report	Sudah Terealisasi Already Realize
4	Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa. Summon and organize the Annual GMS and/or Extraordinary GMS	Sudah Terealisasi Already Realize
5	Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham. Provide GMS materials to the Shareholders.	Sudah Terealisasi Already Realize
6	Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan, termasuk Laporan Keuangan, baik dalam bentuk Laporan Tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan kepada RUPS. Provide accountability and all information regarding the condition and course of the Company in the form of a report on the Company's activities, including Financial Statements, both in the form of an Annual Report and in the form of other periodic reports according to the manner and time specified to the GMS.	Sudah Terealisasi Already Realize
7	Meminta persetujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar. Request for GMS approval if there will be an amendment to the Articles of Association	Sudah Terealisasi Already Realize
8	Memberikan Risalah RUPS jika diminta oleh Pemegang Saham. Provide Minutes of the GMS if requested by the Shareholders.	Sudah Terealisasi Already Realize

No	Uraian Tugas Job Description	Status Realisasi Realization Status
Terkait dengan Strategi dan Rencana Perusahaan Related to Company Strategy and Plans		
1	Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. Strive for and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with the puposes, objectives, and business activities	Sudah Terealisasi Already Realize
2	Menyiapkan RJPP dan RKAP termasuk rencana-rencana lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahan dalam RUPS. Prepare RJPP and RKAP including other plans related to the implementation of the Company's business and activities to be submitted to the Board of Commissioners and Shareholders to obtain approval at the GMS.	Sudah Terealisasi Already Realize
3	Melaksanakan rencana bisnis secara efektif dalam pengelolaan Perseroan. Implement business plans effectively in managing the Company.	Sudah Terealisasi Already Realize
Terkait dengan Penyusunan RJPP Related to the Preparation of RJPP		
1	Menyusun RJPP yang sekurang-kurangnya memuat: • Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya; • Posisi Perseroan saat ini; • Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP. Prepare the RJPP which at least contains: • Evaluation of the implementation of previous RJPP; • The Company's current position; • Assumptions used in preparing the RJPP	Sudah Terealisasi Already Realize
2	Penetapan Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kerja Rencana Jangka Panjang. Determination of Vision, Mission, Targets, Strategies, Policies, and Long-Term Plan Work Programs.	Sudah Terealisasi Already Realize
3	Bersama dengan Dewan Komisaris menandatangani RJPP yang telah disepakati dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham. Together with Board of Commissioners, sign the agreed RJPP and submit it to Shareholders	Sudah Terealisasi Already Realize
4	Dalam hal terjadi perubahan faktor internal dan eksternal Perseroan dikarenakan terdapat perubahan material yang berada di luar kendali Direksi, Direksi melakukan kajian terhadap kemungkinan revisi RJPP yang berlaku. In the event of changes in the Company's internal and external factors due to material changes beyond the control of Board of Directors, Board of Directors will conduct a study on the possibility of revising the applicable RJPP.	Sudah Terealisasi Already Realize
5	Dalam hal diperlukan revisi RJPP, maka Direksi harus menyampaikan RJPP hasil revisi kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan tanggapan dan persetujuan untuk diajukan kepada RUPS. In the event that a revision of the RJPP is required, Board of Directors must submit the revised RJPP to Board of Commissioners in order to obtain a response and approval to be submitted to the GMS.	Sudah Terealisasi Already Realize
Terkait dengan Penyusunan RKAP Related to the Preparation of RKAP		
1	Kinerja Perseroan tahun berjalan. The Company's performance for the current year.	Sudah Terealisasi Already Realize
2	Rencana kerja Perseroan. The Company's work plan.	Sudah Terealisasi Already Realize
3	Anggaran Perseroan. The Company's budget.	Sudah Terealisasi Already Realize
4	Proyeksi keuangan Perseroan. The Company's financial projections.	Sudah Terealisasi Already Realize
5	Proyek keuangan anak perusahaan. The subsidiaries' financial projections.	Sudah Terealisasi Already Realize
6	Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS. Other matters requiring a GMS resolution.	Sudah Terealisasi Already Realize
7	Direksi menyerahkan RKAP kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan sebelum diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. Board of Directors submits the RKAP to Board of Commissioners for a response before being submitted to the GMS for approval.	Sudah Terealisasi Already Realize
Terkait dengan Laporan Tahunan Related to the Annual Report		
1	Menyusun Laporan Tahunan Perusahaan dan bersama dengan Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan Perusahaan dimaksud. Prepare the Company's Annual Report and together with Board of Commissioners sign the Company's Annual Report	Sudah Terealisasi Already Realize
2	Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham. Submit the Annual Report to Shareholders	Sudah Terealisasi Already Realize

No	Uraian Tugas Job Description	Status Realisasi Realization Status
Terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko Related to Risk Management		
	Mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten, dengan tahapan sebagai berikut: Develop a risk management system and implement it consistently, with the following stages:	
1	Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis risiko yang relevan dan berpotensi terjadi. Risk Identification, which is the process of identifying the types of risks that are relevant and potentially occurring	Sudah Terealisasi Already Realize
2	Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak dan probabilitas untuk setiap risiko yang telah teridentifikasi. Risk Measurement, which is the process of measuring the magnitude of impact and probability for each identified risk.	Sudah Terealisasi Already Realize
3	Evaluasi Risiko, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan di dalam Perseroan. Risk Evaluation, which is the process of reviewing the adequacy of overall risk management activities carried out within the Company	Sudah Terealisasi Already Realize
4	Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani risiko potensial. Risk Handling, which is the process of determining efforts that can be made to handle potential risks	Sudah Terealisasi Already Realize
5	Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai faktor yang diduga dapat mengerahkan kemunculan risiko. Risk Monitoring, which is the process of monitoring various factors that are suspected of being able to mobilize the emergence of risks.	Sudah Terealisasi Already Realize
6	Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Perseroan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Reporting and Disclosure, which is the process of reporting the risk management system implemented by the Company along with its disclosure to related parties in accordance with applicable provisions.	Sudah Terealisasi Already Realize
Terkait dengan Pengendalian Intern Related to Internal Control		
1	Menetapkan kebijakan tentang sistem pengendalian intern yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan Perseroan. Establish policies on effective internal control systems to ensure the achievement of the Company's objectives.	Sudah Terealisasi Already Realize
2	Sistem pengendalian internal mencakup hal-hal sebagai berikut: • Lingkungan pengendalian internal; • Penetapan rencana kerja dan target-target perusahaan; • Identifikasi dan evaluasi risiko; • Penilaian risiko; • Mitigasi risiko; • Aktivitas pengendalian; • Informasi dan komunikasi; • *Monitoring.* The internal control system includes the following: • Internal control environment; • Determination of work plans and Company targets; • Risk identification and evaluation; • Risk assessment; • Risk mitigation; • Control activities; • Information and communication; • Monitoring.	Sudah Terealisasi Already Realize
Keterbukaan Informasi Disclosure of Information		
1	Mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan kepada pihak terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif. Disclose important information in the Company's Annual Report and Financial Report to related parties in accordance with applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear, and objective manner.	Sudah Terealisasi Already Realize
2	Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Take the initiative to disclose not only issues required by laws and regulations but also matters that are important for decision-making by stakeholders.	Sudah Terealisasi Already Realize
3	Direksi harus aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dan masalah material yang dihadapi Perseroan. Board of Directors must actively disclose the implementation of GCG principles and material issues faced by the Company.	Sudah Terealisasi Already Realize
Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Stakeholder Relations		
1	Menghormati hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pemangku kepentingan. Respecting the rights of stakeholders arising from applicable laws and/or agreements made by the Company with stakeholders	Sudah Terealisasi Already Realize
2	Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosial. Ensuring that the Company carries out social responsibility.	Sudah Terealisasi Already Realize

No	Uraian Tugas Job Description	Status Realisasi Realization Status
3	Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Ensuring that the Company's assets, business locations and other facilities comply with applicable laws and regulations regarding environmental preservation, health and safety at work.	Sudah Terealisasi Already Realize
4	Dalam memperkerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karier, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk pegawai, Perseroan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundangan. In hiring, determining salaries, providing training, determining career levels, and determining other work requirements for employees, the Company does not discriminate because of a person's ethnic background, religion, gender, age, physical disability, or other special circumstances protected by laws and regulations.	Sudah Terealisasi Already Realize
5	Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan. Board of Directors is required to provide a work environment that is free from all forms of pressure	Sudah Terealisasi Already Realize
Tugas dan Kewajiban Lain Other Duties and Obligations		
1	Menjalankan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Carrying out other obligations in accordance with the provisions set out in the Articles of Association and those determined by the GMS based on applicable laws and regulations.	Sudah Terealisasi Already Realize

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Prosedur Pernilaian

Penilaian kinerja Komite Investasi sebagai komite yang berada di bawah Direksi dilaksanakan secara berkala oleh Direksi sebagai bagian dari mekanisme evaluasi internal Perseroan. Proses penilaian dijalankan melalui serangkaian evaluasi yang mencakup tinjauan atas pelaksanaan tugas dan fungsi komite sepanjang tahun buku, yang hasilnya disampaikan kepada Direksi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis. Seluruh prosedur penilaian dilaksanakan secara objektif, terstruktur, dan mengacu pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Perseroan.

Kriteria Penilaian

Penilaian kinerja Komite Investasi didasarkan pada beberapa kriteria utama, yaitu capaian kinerja selama tahun buku yang diukur dari efektivitas pelaksanaan tugas evaluasi investasi, kualitas rekomendasi yang dihasilkan, serta kontribusi terhadap kualitas pengambilan keputusan Direksi. Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan aspek kompetensi anggota komite dalam menjalankan fungsinya, yang tercermin dari kedalaman analisis dan pemahaman terhadap arah strategis Perseroan, serta tingkat kehadiran setiap rapat dan forum pembahasan yang diselenggarakan. Secara keseluruhan, Direksi menilai bahwa Komite Investasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sepanjang tahun 2025, dan memberikan kontribusi yang positif dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi.

Performance Assessment of Committees Under Board of Directors and Basis for Evaluation

Assessment Procedure

The performance assessment of Investment Committee, a committee under the Board of Directors, is conducted periodically by the Board of Directors as part of the Company's internal evaluation mechanism. The assessment process involves a series of evaluations that include a review of the implementation of the committee's duties and functions throughout the fiscal year, the results of which are submitted to the Board of Directors for consideration in strategic decision-making. All assessment procedures are conducted objectively, in a structured manner, and in accordance with applicable regulations within the Company.

Assessment Criteria

The Investment Committee's performance assessment is based on several key criteria: performance achievements during the fiscal year, measured by the effectiveness of investment evaluation task, the quality of recommendations produced, and the contribution to the quality of the Board of Directors' decision-making. Furthermore, the assessment also takes into account the competencies of committee members in carrying out their functions, as reflected in the depth of their analysis and understanding of the Company's strategic direction, as well as the attendance rate at each meeting and discussion forum. Overall, the Board of Directors assesses that the Investment Committee has performed its duties and responsibilities effectively throughout 2025 and has made a positive contribution to supporting effective implementation of the Board of Directors' duties.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ dalam sistem Tata Kelola Perusahaan yang berperan melakukan fungsi pengawasan, baik secara umum maupun khusus, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Selain menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilaksanakan secara konsisten di seluruh tingkatan organisasi. Di samping itu, Dewan Komisaris memastikan bahwa kegiatan usaha Perseroan dijalankan selaras dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.

Board of Commissioners is one of organs in Corporate Governance system that plays a supervisory role, both general and specific, in accordance with the Company's Articles of Association. In addition to performing supervisory functions, Board of Commissioners also provides advice to Board of Directors and ensures that the principles of Good Corporate Governance are consistently implemented at all levels of the organization. Furthermore, Board of Commissioners ensures that the Company's business activities are conducted in accordance with the established objectives and purposes.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris wajib menjunjung tinggi independensi dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan operasional Perseroan dengan mengacu pada strategi dan rencana bisnis yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta arahan Pemegang Saham yang telah memperoleh persetujuan. Dewan Komisaris juga memegang tanggung jawab untuk memastikan seluruh aktivitas Perseroan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In carrying out its duties, Board of Commissioners must uphold independence and is responsible for overseeing the Company's operational policies by referring to the strategies and business plans outlined in the Company's Work Plan and Budget, as well as the directives of Shareholders that have been approved. Board of Commissioners also has the responsibility to ensure that all of the Company's activities comply with applicable laws and regulations.

Dasar Hukum

Pembentukan serta penetapan anggota Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan dengan berlandaskan pada berbagai ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Ketentuan tersebut menjadi acuan dalam memastikan keberadaan dan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan, yang antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 108.
2. Peraturan Menteri Sadan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Sadan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Anggaran Dasar IPCC.
5. Pedoman *Good Corporate Governance* IPCC.
6. Pedoman Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi IPCC.

Legal Basis

The formation and appointment of members of the Company's Board of Commissioners are carried out in accordance with applicable laws and regulations. These provisions serve as a reference to ensure that the existence and performance of the Board of Commissioners' functions are in line with Corporate governance principles, which include, among others:

1. Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 Article 108.
2. Minister of State-Owned Enterprises Number Regulation: PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Commissioners and Supervisory Board of State Owned Enterprises;
3. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
4. IPCC Articles of Association.
5. IPCC Good Corporate Governance Guidelines.
6. Guidelines for Working Relations between IPCC Board of Commissioners and Board of Directors.

Prosedur Pengangkatan Dewan Komisaris

Proses pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, diawali dengan penetapan sumber calon, dilanjutkan dengan proses penjaringan, evaluasi, hingga pengajuan usulan pengangkatan. Dalam menetapkan Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham telah memperhatikan kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon, dengan mempertimbangkan hasil penilaian Tim Evaluasi serta rekam jejak singkat masing-masing calon.

Board of Commissioners Appointment Procedure

The process for appointing the Company's Board of Commissioners is carried out through systematic stages, beginning with the identification of potential candidates, followed by a screening and evaluation process, and culminating in the submission of appointment proposals. In appointing members of Board of Commissioners, Shareholders have taken into account the criteria and requirements that candidates must meet, considering the Evaluation Team's assessment results as well as each candidate's brief track record.

Seluruh proses tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian, seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan, antara lain memiliki kompetensi yang memadai, integritas, kemampuan kepemimpinan, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi tinggi untuk mendorong kemajuan dan pengembangan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berpedoman pada Anggaran Dasar serta *Board Manual* yang memuat ketentuan mengenai tata tertib dan tata cara pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Pedoman tersebut disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi acuan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat.

Board Manual Dewan Komisaris mengatur berbagai aspek penting, antara lain persyaratan, komposisi, keanggotaan, dan masa jabatan, program pengenalan serta peningkatan kapabilitas, serta tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Dewan Komisaris. Dengan adanya pedoman kerja tersebut, diharapkan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dapat berlangsung secara lebih sistematis dan efektif, sekaligus menjadi salah satu dasar dalam melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berlaku sejak tanggal pengangkatan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan kelima setelah tanggal pengangkatan tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya berdasarkan keputusan RUPS, dengan tetap memperhatikan kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila yang bersangkutan:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

The entire process is in accordance with the provisions of Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 regarding Structure and Human Capital of State-Owned Enterprises. Thus, all members of the Company's Board of Commissioners have met the established general requirements, including possessing adequate competence, integrity, leadership ability, honesty, good conduct, and a high level of dedication to driving the Company's progress and development in accordance with applicable regulations.

Board of Commissioners Work Guidelines

Board of Commissioners is guided by the Articles of Association and Board Manual, which contain provisions regarding the rules of procedure and manner of performing the Board of Commissioners' duties. These guidelines are formulated in accordance with applicable laws and regulations and serve as a reference in carrying out supervisory and advisory functions.

The Board of Commissioners' Manual stipulates various important aspects, including requirements, composition, membership, and terms of office; orientation and capacity-building programs; as well as the duties, responsibilities, and obligations of Board of Commissioners. With these work guidelines, it is hoped that the Board of Commissioners' functions can be carried out more systematically and effectively, while also serving as a basis for evaluating the Board of Commissioners' performance.

Board of Commissioners' Term of Office

Term of office for members of Board of Commissioners is effective from the date of appointment as determined at General Meeting of Shareholders and ends at the close of the fifth Annual General Meeting of Shareholders following said appointment date. Members of Board of Commissioners who have completed their term of office may be reappointed for a subsequent term based on the General Meeting of Shareholders' resolution, subject to the General Meeting of Shareholders' authority to dismiss members of Board of Commissioners at any time if deemed necessary.

Mechanisms for Resignation and Dismissal of Board of Commissioners

As stipulated in the Company's Articles of Association, the term of office of a member of Board of Commissioners ends if the person concerned:

1. Passed away;
2. Term of office ends;
3. Dismissed based on GMS; and/or
4. No longer meets the requirements as a member of Board of Commissioners based on the Articles of Association and other laws and regulations.

Mekanisme Pengunduran Diri

Apabila terjadi pengunduran diri atas kehendak sendiri maupun pemberhentian oleh Pemegang Saham, tata cara pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Mekanisme tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Perseroan mengenai maksud pengunduran dirinya.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya surat pengunduran diri.
3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima permohonan pengunduran diri serta setelah pelaksanaan RUPS yang memutuskan pengunduran diri tersebut.
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris tetap dapat dimintakan sejak tanggal pengangkatan hingga disetujuinya pengunduran diri dalam RUPS.
6. Pembebasan tanggung jawab kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan menyetujui dan membebaskannya secara resmi.

Mekanisme Pemberhentian

Adapun mekanisme pemberhentian Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. RUPS berwenang memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.
2. Pemberhentian dapat dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, melakukan tindakan yang merugikan Perseroan, atau karena alasan lain yang dinilai patut oleh RUPS.
3. Keputusan pemberhentian diambil setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri dalam RUPS.
4. Kesempatan membela diri tidak diberikan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menyatakan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.
5. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut.

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris berasal dari individu perseorangan yang pada saat pengangkatan dan sepanjang masa jabatannya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota

Resignation Mechanism

In the event of a voluntary resignation or dismissal by Shareholders, procedures for dismissing members of Board of Commissioners shall be carried out in accordance with the provisions set forth in the Company's Articles of Association. The mechanism is outlined as follows:

1. Members of Board of Commissioners have the right to resign before the end of their term of office by submitting a written request to the Company regarding the intention of their resignation.
2. The Company is required to hold a GMS to decide on the resignation request within a maximum period of 90 (ninety) calendar days from the receipt of the resignation letter.
3. The Company is required to provide information disclosure to the public and submit a report to the Financial Services Authority (OJK) no later than 2 (two) working days after receiving the resignation request and after the GMS that decides on the resignation.
4. Before the resignation becomes effective, the member of Board of Commissioners concerned remains obliged to carry out his/her duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the provisions of applicable laws and regulations.
5. Accountability for the implementation of duties as a member of Board of Commissioners can still be requested from the date of appointment until the resignation is approved in the GMS.
6. Release of responsibility to members of Board of Commissioners who resign is given after the Annual GMS approves and officially releases them.

Dismissal Mechanism

The dismissal mechanism of Board of Commissioners is as follows:

1. The GMS has the authority to dismiss members of Board of Commissioners at any time by stating the reasons for the dismissal.
2. Dismissal can be carried out if a member of Board of Commissioners no longer meets the requirements as a member of Board of Commissioners, takes actions that are detrimental to the Company, or for other reasons deemed appropriate by the GMS.
3. The decision to dismiss is taken after the member of Board of Commissioners concerned is given the opportunity to present a defense in the GMS.
4. The opportunity to defend oneself is not given if the member of Board of Commissioners concerned states that he/she has no objection to the dismissal.
5. Dismissal of a member of Board of Commissioners is effective from the closing of the GMS that decided on the dismissal.

Requirements for Members of Board of Commissioners

Members of Board of Commissioners are individuals who, at the time of their appointment and throughout their term of office, meet the established requirements, as follows:

1. Have good character, morals and integrity;
2. Competent to carry out legal actions;
3. Within 5 (five) years before appointment and during office:
   a. Never declared bankruptcy;
   b. Have never been a member of Board of Directors and/or a

Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
5. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
   a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
   b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
   c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
   d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
   e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
   f. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Emiten atau Perusahaan Publik;
   g. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
   h. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
   i. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
   j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Dewan Komisaris Tahun 2025

Struktur, jumlah, serta komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2025 telah disesuaikan dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Piagam Dewan Komisaris, yaitu:

1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) anggota atau lebih;
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama;
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi;
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham;
5. Dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 20% merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.

Penetapan anggota Dewan Komisaris dilaksanakan melalui tahapan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Oleh karena itu,

member of Board of Commissioners who was found guilty of causing a Company to be declared bankrupt;

4. Have never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector; and
5. Has never served as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners who, during their tenure:
   a. Failed to hold an annual General GMS;
   b. Had their accountability as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners not accepted by the GMS or failed to provide accountability as member of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS;
   c. Caused a Company holding a license, approval, or registration from the Financial Services Authority (OJK) to fail in fulfilling the obligation to submit an annual report and/or financial statements to the Financial Services Authority.
   d. Have a commitment to comply with statutory regulations;
   e. Have knowledge and/or expertise in the field required by the Issuer or Public Company.
   f. Fulfillment of the requirements as intended must be included in a statement letter and submitted to the Issuer or Public Company;
   g. The statement letter as intended must be examined and documented by the Issuer or Public Company;
   h. Does not own shares, either directly or indirectly, in the Issuer or Public Company;
   i. Have no affiliation with the Issuer or Public Company, member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, or major shareholder of the Issuer or Public Company; and
   j. Have no direct or indirect business relationship related to the business activities of the Issuer or Public Company

Number, Composition, and Structure of Board of Commissioners in 2025

The structure, number, and composition of the Company's Board of Commissioners in 2025 have been adjusted and comply with applicable regulations as stipulated in the Board of Commissioners' Charter, namely:

1. Board of Commissioners consists of 1 (one) member or more;
2. In the event that Board of Commissioners consists of more than 1 (one) member, one member of Board of Commissioners is appointed as President Commissioner;
3. The appointment of members of Board of Commissioners does not coincide with the appointment of members of Board of Directors;
4. Members of Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS and the GMS Resolutions must be approved by the Shareholders;
5. In the composition of Board of Commissioners, at least 20% are independent members of Board of Commissioners as determined in the appointment decision.

The appointment of members of Board of Commissioners is carried out through a fit and proper test conducted in accordance with applicable laws and regulations as well as the principles of Good Corporate Governance. Therefore, all incumbent members of the

seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dinilai telah memenuhi standar kompetensi, integritas, dan reputasi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya secara optimal.

Company's Board of Commissioners are deemed to have met the required standards of competence, integrity, and reputation to optimally perform their functions, duties, and responsibilities.

Sepanjang tahun 2025 terjadi perubahan susunan anggota Dewan Komisaris. Keseluruhan komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan tetap berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) Komisaris Independen. Berikut komposisi Dewan Komisaris secara lebih rinci:

Throughout 2025, there were changes in the Board of Commissioners' composition. The total composition of the Company's Board of Commissioners remains at 3 (three) members, consisting of 1 (one) President Commissioner and 2 (two) Independent Commissioners. The following is a more detailed breakdown of the Board of Commissioners' composition:

1 Januari - 17 Juni 2025
January 1 – June 17, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office
Drajat Sulistyo	Komisaris Utama President Commissioner	Akta RUPS No. 27 tanggal 13 april 2022 Deed of GMS No. 27 dated April 13, 2022	RUPS Tahunan Tahun 2025 Annual GMS 2025	Ke-1 1st
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta RUPS No. 48 tanggal 26 Agustus 2020 Deed of GMS No. 48 dated August 26, 2020	RUPS Tahunan Tahun 2025 Annual GMS 2025	Ke-1 1st
LM Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta RUPS No. 27 tanggal 14 Juni 2021 Deed of GMS No. 27 dated June 14, 2021	RUPS Tahunan Tahun 2025 Annual GMS 2025	Ke-1 1st

17 Juni - 31 Desember 2025
June 17 – December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office
M. Said Bakhri	Komisaris Utama President Commissioner	Akta RUPS No. 42 tanggal 17 Juni 2025 Deed of GMS No. 42 dated June 17, 2025	RUPS Tahunan Tahun 2030 Annual GMS 2030	Ke-1 1st
Herry Ardianto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta RUPS No. 42 tanggal 17 Juni 2025 Deed of GMS No. 42 dated June 17, 2025	RUPS Tahunan Tahun 2030 Annual GMS 2030	Ke-1 1st
Tri Hidayat	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta RUPS No. 42 tanggal 17 Juni 2025 Deed of GMS No. 42 dated June 17, 2025	RUPS Tahunan Tahun 2030 Annual GMS 2030	Ke-1 1st

Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa memastikan untuk mengambil keputusan dan memberikan nasihat kepada Direksi semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik Perseroan, tanpa adanya tekanan, benturan kepentingan, maupun hubungan yang dapat memengaruhi independensi. Dengan demikian, Dewan Komisaris dapat menjalankan peran pengawasan secara efektif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendorong penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten di seluruh lingkungan Perseroan.

Board of Commissioners Independence

Board of Commissioners consistently ensures that decisions are made and advice is provided to Board of Directors solely in the best interests of the Company, free from any pressure, conflicts of interest, or relationships that could compromise its independence. As a result, Board of Commissioners can effectively carry out its supervisory role, ensure compliance with laws and regulations, and promote the consistent implementation of Good Corporate Governance throughout the Company.

Status Independensi Dewan Komisaris Tahun 2025
Board of Commissioners Independence Status in 2025

Kriteria Criteria	Independensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Independence		
	M. Said Bakhri	Herry Ardianto	Tri Hidayat
Bukan Anggota Manajemen Perseroan Not a Member of the Company's Management	v	v	v
Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan Free from business relationships and other relationships that may influence decision making	v	v	v

Status Independensi Dewan Komisaris Tahun 2025
Board of Commissioners Independence Status in 2025

Kriteria Criteria	Independensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Independence		
	M. Said Bakhri	Herry Ardianto	Tri Hidayat
Bukan pemegang saham mayoritas Perseroan atau pekerja yang berhubungan langsung dengan pemegang saham mayoritas Perseroan Not a majority shareholder of the Company or an employee directly related to a majority shareholder of the Company	v	v	v
Bukan Pekerja atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perusahaan atau anggota perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris Not an employee or having worked as an executive of the Company or a member of an affiliated Company for at least 3 (three) years prior to becoming a member of Board of Commissioners	v	v	v
Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perusahaan atau perusahaan afiliasi, atau pekerja yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris Not a professional advisor or consultant who is material to the Company or an affiliate, or an employee directly related to a service provider, for at least 3 (three) years prior to becoming a member of Board of Commissioners	v	v	v
Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau pekerja dari/ atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama Not a major supplier or customer of the Company or an affiliate or an employee of or directly or indirectly related to a major supplier or customer	v	v	v
Tidak memiliki hubungan perjanjian dengan perusahaan atau perusahaan afiliasi lainnya sebagai Direksi Not having a contractual relationship with the Company or other affiliates as a member of Board of Directors	v	v	v

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan pengelolaan Perseroan serta pelaksanaan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, baik yang berkaitan dengan aktivitas Perseroan maupun kegiatan usaha. Selain itu, Dewan Komisaris memberikan masukan dan nasihat kepada Direksi, termasuk dalam pemantauan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh pelaksanaan fungsi tersebut ditujukan untuk menjaga kepentingan Perseroan agar tetap sejalan dengan maksud dan tujuan pendirian.

Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi guna memastikan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dapat berjalan secara efektif, yaitu:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
3. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
4. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Direksi mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
5. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
6. Membentuk Komite Audit;

Board of Commissioners Duties, Obligations and Authorities

Board of Commissioners Duties

Board of Commissioners supervise the management policies of the Company and the implementation of management activities carried out by Board of Directors, both in relation to the Company's operations and business activities. In addition, Board of Commissioners provides input and advice to Board of Directors, including monitoring the implementation of the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Budget, as well as compliance with the Articles of Association, General Meeting of Shareholders' resolutions, and applicable laws and regulations. All such functions are intended to safeguard the Company's interests so that they remain aligned with the purpose and objectives of its establishment.

Board of Commissioners Obligations

Board of Commissioners has a number of obligations that must be fulfilled to ensure that its oversight and provision of advice to Board of Directors are carried out effectively, namely:

1. To provide advice to the Board of Directors in the management of the Company;
2. To review, examine, and sign the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of these Articles of Association;
3. Reviewing and examining periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report;
4. Providing explanations, opinions, and recommendations to the Board of Directors regarding the Annual Report, if requested;
5. Preparing an annual work program and incorporating it into the Company's Work Plan and Budget;
6. Establishing an Audit Committee;

7. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut atau Perseroan lain;
10. Laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

Wewenang Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
3. Meneliti dan menelaah berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
4. Memberikan penjelasan pendapat dan saran kepda Direksi mengenai laporan Tahunan, apabila diminta;
5. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;
7. Memberikan sementara angota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
8. Membentuk Komite-Komite selain Komite Audit jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan peundangan yang berlaku;
11. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Hak Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh imbalan berupa honorarium serta tunjangan dan/atau fasilitas lainnya, termasuk santunan purna jabatan, dengan jenis dan besaran yang ditetapkan melalui RUPS. Penetapan tersebut dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham.

7. To propose a Public Accountant to the General Meeting of Shareholders;
8. To prepare the minutes of the Board of Commissioners' meetings and retain copies thereof;
9. To report to the Company regarding its shareholdings and/or those of its family members in the Company or other companies;
10. Reporting to the General Meeting of Shareholders on the supervisory duties performed during the immediately preceding fiscal year;
11. Performing other duties in connection with supervisory and advisory functions, provided such duties do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Board of Commissioners Authority

In carrying out its supervisory duties, Board of Commissioners has the authority to:

1. To advise the Board of Directors in the management of the Company;
2. To review, examine, and sign the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of these Articles of Association;
3. Periodically reviewing and examining the annual reports prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report;
4. Providing explanations, opinions, and recommendations to the Board of Directors regarding the Annual Report, if requested;
5. To formulate an annual work program and incorporate it into the Company's Work Plan and Budget;
6. To appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners if deemed necessary;
7. To appoint members of the Board of Directors in accordance with the provisions of these Articles of Association;
8. To establish committees other than the Audit Committee if deemed necessary, taking into account the Company's capabilities;
9. Engage experts for specific matters and for a specific period at the Company's expense, if deemed necessary;
10. Take management actions on behalf of the Company under specific circumstances for a specific period in accordance with the provisions of these Articles of Association and applicable laws and regulations;
11. Attend Board of Directors meetings and provide opinions on matters discussed;
12. Exercise other supervisory powers provided they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Board of Commissioners Rights

Members of Board of Commissioners are entitled to receive remuneration in the form of honorarium and other allowances and/or benefits, including post-retirement benefits, the types and amounts of which are determined by a GMS. Such determination is made in accordance with applicable laws and regulations and takes effect upon approval by the Shareholders.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Terdapat beberapa keputusan tertentu oleh yang Direksi hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. Ketentuan mengenai jenis dan ruang lingkup tindakan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan setiap keputusan strategis tetap sejalan dengan kepentingan Perseroan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Adapun perubatan-perbuatan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris, antara lain:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BOWT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan RUPS;
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dalam kondisi tertentu (hilang), musnah, rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (*total lost*), biaya pemindahtanganan lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan, dibongkar untuk dibangun kembali atau dibangun menjadi aktiva tetap yang lain, yang anggarannya telah ditetapkan oleh RUPS/Menteri melalui pengesahan RKAP, dan dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan adanya program lain yang telah direncanakan RKAP;
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
7. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern;
8. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.

Pembagian Bidang Tugas Dewan Komisaris

Sebagai upaya menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris menetapkan pengaturan pembagian peran dan tanggung jawab di antara para anggotanya secara mandiri. Ketentuan mengenai pembagian tugas dan kewenangan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor DK/19/12/02/IPCC 22 dan Nomor HK.56/3/7/IKT-22 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* Perusahaan, yang menjadi acuan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Rincian Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab dengan rincian sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Decisions that Require Approval from Board of Commissioners

There are certain decisions by the Board of Directors that may only be implemented after obtaining prior approval from Board of Commissioners. Provisions regarding the nature and scope of such actions are established as part of the supervisory mechanism to ensure that every strategic decision remains in line with the Company's interests and the principles of Good Corporate Governance. The actions that require approval from Board of Commissioners include, among others:

1. Pledge fixed assets for short-term credit withdrawals;
2. Establish cooperation with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operation (JO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOwT), Build Handover (Build Transfer Operate/BTO) and other collaborations with a certain value or time period determined by the GMS;
3. Receive or provide medium/long term loans, except loans (debts or receivables) arising from business transactions, and loans provided to Subsidiaries provided that loans to Subsidiaries are reported to Board of Commissioners;
4. Write off bad debts and dead inventory from the books;
5. Release and write off movable fixed assets under certain conditions (lost, destroyed, damaged which cannot be transferred (total lost), the cost of transfer is greater than the economic value obtained from the transfer, dismantled to be rebuilt or built into another fixed asset, whose budget has been determined by the GMS/Minister through ratification of the RKAP, and is dismantled not to be rebuilt in connection with other programs that have been planned by the RKAP;
6. Establish an organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors;
7. Appoint and dismiss the Head of Internal Audit Unit;
8. Appoint and dismiss Corporate Secretary.

Board of Commissioners Division of Duties

To ensure the effective performance of its supervisory functions, Board of Commissioners independently establishes the division of duties and responsibilities among its members. The provisions regarding the division of duties and authorities are set forth in the Board of Commissioners and Board of Directors Joint Decree Number DK/19/12/02/IPCC 22 and Number HK.56/3/7/IKT-22 on the Company's Good Corporate Governance Guidelines, which serve as a reference to ensure the Board of Commissioners' duties are carried out smoothly.

Details of Board of Commissioners Duties

Board of Commissioner has duties and responsibilities with the following details:

1. Board of Commissioners is tasked with supervising and is responsible for supervising management policies, course of management in general, both regarding the Issuer or Public Company and the business of the Issuer or Public Company, and providing advice to Board of Directors.

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan keenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
8. Wewenang ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

2. Under certain conditions, Board of Commissioners is required to hold an annual GMS and other GMS in accordance with its wishes as regulated in laws and regulations and the articles of association.
3. Members of Board of Commissioners are required to carry out their duties and responsibilities in good faith, with full responsibility, and with caution.
4. In order to support the effectiveness of implementation of their duties and responsibilities, Commissioners are required to form an Audit Committee and may form other committees.
5. Board of Commissioners is required to evaluate the committees performance of that assist in the implementation of their duties and responsibilities as referred to at the end of each fiscal year.
6. Board of Commissioners has the authority to temporarily dismiss members of Board of Directors by stating the reasons.
7. Board of Commissioners may take action to manage the Issuer or Public Company under certain circumstances for a certain period of time.
8. Authority is determined based on the articles of association or GMS resolutions.

Sementara itu, rincian pembagian bidang tugas di antara anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Meanwhile, details of division of duties among members of Board of Commissioners are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of Duties
M. Said Bakhri	Komisaris Utama President Commissioner	Mengoordinir pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris, Koordinator Umum di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) serta sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Coordinates the duties of members of Board of Commissioners, serves as General Coordinator for Human Capital (HC), and Chairman of Nominations and Remuneration Committee.
Herry Ardianto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Koordinator Umum di bidang manajemen risiko serta sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko. As General Coordinator for Risk Management and Chairman of Risk Management Monitoring Committee.
Tri Hidayat	Komisaris Independen Independent Commissioner	Koordinator umum di bidang keuangan serta sebagai Ketua Komite Audit. As General Coordinator for Finance and Chairman of Audit Committee.

Program Orientasi bagi Komisaris Baru

Perseroan menyelenggarakan program orientasi yang bertujuan mempercepat pemahaman terhadap peran, tanggung jawab, serta kondisi Perseroan. Pelaksanaan program pengenalan tersebut dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelancaran dan kelengkapan materi. Adapun program-program yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat antara lain:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah- masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk serta Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris dilaksanakan melalui berbagai metode yang disesuaikan dengan kebutuhan

Orientation Program For New Board of Commissioners

The Company conducts an orientation program designed to help new members quickly understand their roles, responsibilities, and the Company's environment. The implementation of this orientation program is coordinated by Corporate Secretary, who is responsible for ensuring the program runs smoothly and that all materials are provided. The programs offered to newly appointed members of Board of Commissioners include:

1. Implementation of GCG principles by the Company;
2. An overview of the Company relating to the objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short and long term plans, competitive position, risks and other strategic issues;
3. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including Audit Committee;
4. Information regarding the duties and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors as well as things that are not permitted.

The orientation program for new members of Board of Commissioners is conducted through various methods tailored to the Company's

Perseroan, antara lain pemaparan materi, sesi diskusi, kunjungan ke unit kerja, serta penelaahan dokumen dan kegiatan lain yang relevan. Seluruh rangkaian program tersebut diselenggarakan paling lambat dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak RUPS menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Sehubungan dengan diangkatnya anggota Dewan Komisaris baru, sepanjang tahun 2025 Perseroan menjalani kegiatan 1 (satu) kali program orientasi bagi Dewan Komisaris pada tanggal 26 Juni 2025 yang berlokasi di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Kebijakan

Perseroan menetapkan kebijakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris yang berlandaskan Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor HK.56/4/5/IKT-17 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan Dewan Komisaris memiliki kemampuan yang relevan dan memadai dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan menyelenggarakan program peningkatan kapabilitas secara berkesinambungan agar Dewan Komisaris senantiasa mengikuti dinamika kegiatan usaha dan perkembangan pengetahuan yang dibutuhkan, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti Dewan Komisaris di Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

needs, including presentations, discussion sessions, visits to business units, as well as document reviews and other relevant activities. The entire program must be completed within 90 calendar days from the GMS appointment date of the relevant members of Board of Commissioners.

In connection with the appointment of new members of Board of Commissioners, throughout 2025 the Company conducted 1 (one) orientation program for Board of Commissioners on June 26, 2025, held at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Board of Commissioners Competency Development Program

Policy

The Company has established a training and competency development policy for Board of Commissioners based on PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Directors Regulation No. HK.56/4/5/IKT-17 dated June 15, 2017, regarding Guidelines for Human Capital Development within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. This policy aims to ensure that members of Board of Commissioners possess relevant and adequate capabilities to perform their supervisory functions and provide advice to Board of Directors. In line with this, the Company conducts continuous capability enhancement programs to ensure that members of Board of Commissioners remain abreast of business dynamics and the necessary knowledge developments, so that their duties and responsibilities can be carried out optimally in accordance with the Good Corporate Governance principles.

Training and/or Competency Development Attended by Board of Commissioners in 2025

Throughout 2025, Board of Commissioners has participated in the following training and competency development.

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Material	**Waktu Penyelenggaraan** Date	**Penyelenggara** Organizer
Drajat Sulistyo (Komisaris Utama) President Commissioner	*Workshop*	Workshop Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth bersama Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP dan Kukuh Workshop on Building Capacity and Infrastructure for Sustainable Growth with Bernardin Nainggolan, S.T., M.M., FRM, CRMP, CRGP, CRPP, and Kukuh	5-6 Februari 2025 February 5–6, 2025	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
M. Said Bakhri (Komisaris Utama) President Commissioner	Pelatihan Training	Executive Program for Commissioners: Excellence for the Future of Maritime & Logistics Industry	30-31 Oktober 2025 October 30–31, 2025	PT PMLI
	Pelatihan Training	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2025, Bali National Internal Audit Seminar (SNIA) 2025, Bali	3-4 Desember 2025 December 3–4, 2025	YPIA
Herry Ardianto (Komisaris Independen) Independent Commissioner	Pelatihan Training	Executive Program for Commissioners: Excellence for the Future of Maritime & Logistics Industry	30-31 Oktober 2025 October 30–31, 2025	PT PMLI
	Pelatihan Training	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2025, Bali National Internal Audit Seminar (SNIA) 2025, Bali	3-4 Desember 2025 December 3–4, 2025	YPIA
Tri Hidayat (Komisaris Independen) Independent Commissioner	Pelatihan Training	Executive Program for Commissioners: Excellence for the Future of Maritime & Logistics Industry	30-31 Oktober 2025 October 30–31, 2025	PT PMLI
	Pelatihan Training	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2025, Bali National Internal Audit Seminar (SNIA) 2025, Bali	3-4 Desember 2025 December 3–4, 2025	YPIA

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Waktu Penyelenggaraan Date	Penyelenggara Organizer
Noval Ali Abbas (Komisaris Independen) Independent Commissioner	*Workshop*	Workshop Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth bersama Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP dan Kukuh Workshop on Building Capacity and Infrastructure for Sustainable Growth with Bernardin Nainggolan, S.T., M.M., FRM, CRMP, CRGP, CRPP, and Kukuh	5-6 Februari 2025 February 5–6, 2025	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Certification in Audit Committee Practices (CACP) Batch 57 Certification in Audit Committee Practices (CACP) Batch 57	20-22 & 26 Mei 2025 May 20–22 & 26, 2025	Pers. Ikatan Komite Audit Indonesia
Abdur Rahim Hasan (Komisaris Independen) Independent Commissioner	*Workshop*	Workshop Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth bersama Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP dan Kukuh Workshop on Building Capacity and Infrastructure for Sustainable Growth with Bernardin Nainggolan, S.T., M.M., FRM, CRMP, CRGP, CRPP, and Kukuh	5-6 Februari 2025 February 5–6, 2025	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
LM Arya Bima Yudiantara (Komisaris Independen) Independent Commissioner	*Workshop*	Workshop Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth bersama Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP dan Kukuh Workshop on Building Capacity and Infrastructure for Sustainable Growth with Bernardin Nainggolan, S.T., M.M., FRM, CRMP, CRGP, CRPP, and Kukuh	5-6 Februari 2025 February 5–6, 2025	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Fokus Pengawasan Dewan Komisaris di Tahun 2025

Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk senantiasa menjalankan peran pengawasan dan pemberian masukan strategis kepada Direksi guna memastikan kegiatan pengelolaan Perseroan dilaksanakan secara akuntabel dan terbuka serta berpedoman pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pelaksanaan fungsi tersebut juga diarahkan untuk menjaga keselarasan antara kebijakan manajemen dengan visi, misi, dan sasaran strategis Perseroan. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris memusatkan perhatian pengawasan pada sejumlah area utama yang dinilai krusial bagi keberlanjutan dan kinerja Perseroan, antara lain:

1. Pengawasan atas pelaksanaan strategi dan kebijakan strategis Perseroan oleh Direksi sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
2. Pemantauan pencapaian target yang tertuang dalam RKAP, Capaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), termasuk pencapaian indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*/KPI), efisiensi operasional, dan realisasi anggaran, agar sejalan dengan visi dan misi Perseroan.
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris memberikan perhatian terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, termasuk meninjau tindak lanjut atas temuan audit, guna memastikan terciptanya proses bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
4. Memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendorong penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan.
5. Peningkatan kualitas tata kelola perusahaan melalui evaluasi terhadap efektivitas dan integritas fungsi komite-komite di bawah Dewan Komisaris mendukung pengambilan keputusan yang objektif dan akuntabel oleh Dewan Komisaris.

Board of Commissioners' Supervision Focus in 2025

Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk consistently performs its supervisory role and provides strategic input to Board of Directors to ensure that the Company's management activities are conducted in an accountable and transparent manner, guided by the Good Corporate Governance principles. The execution of these functions is also aimed at maintaining alignment between management policies and the Company's vision, mission, and strategic objectives. Throughout 2025, Board of Commissioners has focused its supervision on several key areas deemed crucial for the Company's sustainability and performance, including:

1. Supervision on the implementation of the Company's strategic strategies and policies by the Board of Directors as stated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
2. Monitoring the achievement of targets stated in the RKAP, Achievement of the Company's Work Plan and Budget (RKAP), including the achievement of key performance indicators (KPI), operational efficiency, and budget realization, so that they are in line with the Company's vision and mission.
3. Strengthening the Internal Control System and Risk Management. Board of Commissioners pays attention to the effectiveness of internal control system and risk management, including reviewing follow-up actions on audit findings, to ensure the creation of a healthy and sustainable business process.
4. Monitoring the Company's compliance with applicable laws and regulations and encouraging the delivery of accurate and timely information to stakeholders.
5. Improving the quality of Corporate governance through evaluation of the effectiveness and integrity of the committee functions under Board of Commissioners to support objective and accountable decision-making by Board of Commissioners.

Berlandaskan fokus pengawasan tersebut, Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan Perseroan senantiasa mendukung keberlanjutan usaha serta memperkuat posisi daya saing Perseroan dalam industri jasa bongkar muat kendaraan di lingkungan pelabuhan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan, tanggung jawab, dan kewajibannya terhadap penetapan kebijakan pengurusan serta pelaksanaan pengelolaan Perseroan agar tetap berada dalam lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, dan Rencana Kerja yang telah disahkan pada awal tahun. Dalam rangka mendukung pelaksanaan peran tersebut, Dewan Komisaris melaksanakan sejumlah aktivitas dan agenda pengawasan selama tahun berjalan, antara lain:

1. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris tahun 2025;
2. Melaksanakan rapat rutin dengan Dewan Komisaris dalam rangka pengurusan dan pengelolaan Perseroan;
3. Melaksanakan rapat gabungan dengan Direksi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan;
4. Memberikan pendapat dan saran terkait pengelolaan Perseroan;
5. Memberikan tanggapan keputusan dan persetujuan terkait pengelolaan Perseroan;
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2025.

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan peran pengawasan Dewan Komisaris turut direalisasikan melalui kegiatan kunjungan kerja ke berbagai area dan wilayah operasional Perseroan. Pada kunjungan tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan saran, masukan, serta melakukan klarifikasi atas pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. Selain itu, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mendorong semangat dan kinerja karyawan, sekaligus memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan dan capaian usaha Perseroan. Rincian kunjungan kerja Dewan Komisaris selama tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Based on these supervision focuses, Board of Commissioners is committed to ensuring that the Company's management consistently supports business sustainability and strengthens the Company's competitive position in the vehicle loading and unloading services industry within the port environment.

Implementation of Board of Commissioners' Duties and Responsibilities in 2025

Throughout 2025, Board of Commissioners has carried out its supervisory functions, responsibilities, and obligations regarding the formulation of management policies and the implementation of the Company's management to ensure compliance with applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and Work Plan approved at the beginning of the year. To support the fulfillment of these roles, Board of Commissioners carried out a number of supervisory activities and initiatives during the year, including:

1. Prepare a work plan for Board of Commissioners for 2025;
2. Carrying out regular meetings with Board of Commissioners in the context of administering and administering the Company;
3. Carrying out joint meetings with Board of Directors in order to implement the supervisory function of the Company's management policies;
4. Provide opinions and suggestions regarding the management of the Company;
5. Provide feedback on decisions and approvals related to the management of the Company;
6. Holding the 2025 General Meeting of Shareholders (GMS).

Board of Commissioners Working Visit

In carrying out its supervisory role, Board of Commissioners conducts working visits to various operational areas and regions of the Company. During these visits, members of Board of Commissioners provided suggestions and feedback, and clarified operational activities in the field. Additionally, these visits were used to boost employee morale and performance, while also gaining a more comprehensive understanding of the Company's business developments and achievements. Details of Board of Commissioners' working visits during 2025 are presented in the following table:

Peserta Kunjungan Visit Participants	**Waktu Pelaksanaan** Implementation Time	**Wilayah Kerja IPCC** IPCC Working Areas
1. M. Said Bakhri 2. Herry Ardanto 3. Tri Hidayat 4. Para Komite	31 Juli-1 Agustus 2025 July 31–August 1, 2025	Satelit Balikpapan Balikpapan Satellite
1. Abdur Rahim Hasan 2. LM Arya Bima Yudiantara 3. Para Komite	10-12 Juni 2025 June 10–12, 2025	Satelit Balikpapan Balikpapan Satellite

Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris secara aktif menyampaikan berbagai saran dan arahan kepada Direksi dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional Perseroan yang optimal serta mendorong peningkatan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh area operasional. Pemberian rekomendasi tersebut merupakan wujud peran pengawasan Dewan Komisaris guna memastikan kegiatan usaha berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan cakupan antara lain sebagai berikut:

Board of Commissioners' Recommendations

Throughout 2025, Board of Commissioners actively provided various suggestions and directions to Board of Directors to support the Company's optimal operational continuity and promote the improvement of occupational safety and health practices across all operational areas. These recommendations reflect the Board of Commissioners' supervisory role in ensuring business activities are conducted effectively, safely, and in compliance with applicable regulations, covering the following areas, among others:

1. Agar dilakukan perbaikan fasilitas pada terminal satelit guna menjaga keandalan infrastruktur operasional serta menigkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa.
2. Agar dibuatkan kajian kebutuhan SDM di terminal satelit, sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan sumber daya manusia yang selaras dengan dinamika operasional dan arah pengembangan bisnis.

Dewan Komisaris menaruh harapan agar seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat diimplementasikan secara konsisten dan tepat sasaran, sehingga kegiatan operasional Perseroan dapat terlaksana secara aman, terkelola dengan baik, serta selaras dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Selain rekomendasi yang bersifat spesifik, Dewan Komisaris juga menyampaikan panduan dan arahan umum kepada Direksi IPCC untuk senantiasa meningkatkan dan memperkokoh hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG);
2. Manajemen risiko operasional dan keuangan yang berkesinambungan;
3. Optimalisasi kinerja usaha melalui inovasi layanan dan penguatan pengendalian internal;
4. Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia guna mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan.

Rekomendasi yang telah diberikan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan IPCC yang berkelanjutan, memastikan terjaganya aspek keselamatan dalam kegiatan operasional, serta memperkuat tingkat kepercayaan seluruh pemangku kepentingan terhadap Perseroan.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi atas kinerja organ pendukung, yang meliputi Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Evaluasi tersebut dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dengan mengacu pada tingkat realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan masing-masing komite. Selain itu, proses penilaian juga mempertimbangkan kualitas saran, rekomendasi, dan masukan yang disampaikan oleh setiap komite sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan Dewan Komisaris dalam menetapkan keputusan terkait pengangkatan kembali atau pemberhentian anggota Komite Audit dan GCG untuk periode jabatan selanjutnya. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi berada pada kategori "Sangat Baik", sejalan dengan capaian dan realisasi rencana kerja tahunan.

1. Facility improvements at the satellite terminal should be made to maintain the reliability of operational infrastructure and improve the quality of service to users.
2. Human Capital needs assessment should be conducted at the satellite terminal to ensure human capital readiness aligned with operational dynamics and business development direction.

Board of Commissioners hopes that all recommendations provided will be implemented consistently and effectively, so that the Company's operational activities can be carried out safely, well-managed, and in alignment with the Good Corporate Governance principles. In addition to specific recommendations, Board of Commissioners also provided general guidance and direction to the IPCC Board of Directors to continuously improve and strengthen the following areas:

1. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles;
2. Sustainable management of operational and financial risks;
3. Optimization of business performance through service innovation and strengthening of internal controls;
4. Improvement of human capital capabilities to support the Company's long-term growth.

The recommendations provided are expected to be implemented on an ongoing basis as part of efforts to promote the IPCC's sustainable growth, ensure safety in operational activities, and strengthen the trust of all stakeholders in the Company.

Performance Assessment of Committees Under Board of Commissioners

Performance Assessment of Board of Commissioners Committees and Assessment Basis

Board of Commissioners periodically evaluates the performance of its supporting organs, which include Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. This evaluation is conducted once a year based on the degree of implementation and completion of the work programs set forth in each committee's annual work plan. Additionally, the assessment process also considers the quality of advice, recommendations, and input provided by each committee in accordance with their respective scope of duties and responsibilities.

The results of this evaluation serve as the basis for the Board of Commissioners' consideration in making decisions regarding the reappointment or dismissal of members of Audit and GCG Committees for the following term. Based on the 2025 assessment results, Board of Commissioners determined that the performance of Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee falls under the "Very Good" category, in line with the achievements and implementation of the annual work plans.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Susunan Komisaris Independen Perseroan ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Hingga tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen, yaitu Herry Ardianto dan Tri Hidayat, yang pengangkatannya dilakukan melalui keputusan RUPS dan dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 42 tanggal 17 Juni 2025 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk serta Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tertanggal 17 Juni 2025 nomor 41.

Jumlah tersebut mencerminkan lebih dari 20% dari total anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 3 (tiga) orang, sehingga telah memenuhi ketentuan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri BUMN. Selain itu, komposisi tersebut juga sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mensyaratkan proporsi Komisaris Independen paling sedikit 30% dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut, Perseroan menunjukkan komitmen yang konsisten dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya dalam menjaga independensi dan objektivitas proses pengambilan keputusan strategis.

Kriteria Penentuan dan Pemenuhan Independensi Komisaris Independen

Anggota Dewan Komisaris Independen Perseroan menjalankan fungsi pengawasannya secara objektif dan bebas dari pengaruh pihak mana pun. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen tidak memiliki keterkaitan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, serta tidak memiliki hubungan lain dengan Perseroan yang berpotensi memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan. Untuk memastikan terjaganya independensi tersebut, Perseroan menetapkan kriteria tertentu sebagai dasar penetapan Komisaris Independen IPCC, yaitu:

1. Tidak memiliki hubungan kerja dan tidak pernah bekerja dengan IPCC;
2. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk Kementerian, dan tidak menjadi anggota Dewan Direksi pada perusahaan yang memiliki hubungan langsung dengan Perseroan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir; dan
3. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perseroan.

The composition of the Company's Independent Commissioners is determined in accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organizational Structure and Human Capital of State-Owned Enterprises. As of December 31, 2025, the Company has 2 (two) Independent Commissioners, namely Herry Ardianto and Tri Hidayat, whose appointments were made through a resolution of GMS and documented in Notarial Deed No. 42 dated June 17, 2025, regarding PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk's Meeting Resolution Statement, as well as the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dated June 17, 2025, Number 41.

This number represents more than 20% of the total members of Board of Commissioners, which consists of 3 (three) persons, thereby meeting the minimum requirement as stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises' regulation. Furthermore, this composition is also in line with Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Boards of Directors and Boards of Commissioners of Issuers or Public Companies, which requires that independent commissioners constitute at least 30% of the total members of Boards of Commissioners. By fulfilling these requirements, the Company demonstrates a consistent commitment to implementing the principles of Good Corporate Governance, particularly in maintaining the independence and objectivity of strategic decision-making processes.

Criteria for Determining and Fulfilling the Independence of Independent Commissioners

Independent members of Board of Commissioners of the Company perform their supervisory duties objectively and free from the influence of any party. In performing their duties, Independent Commissioners have no financial ties, management relationships, shareholdings, or family relationships with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, nor do they have any other relationships with the Company that could potentially affect their independence in decision-making. To ensure that such independence is maintained, the Company has established specific criteria as the basis for appointing IPCC Independent Commissioners, namely:

1. Has no working relationship and has never worked with IPCC;
2. Has not worked for the Government including ministries, and has not been a member of board of directors at a Company that has a direct relationship with the Company in the last three years; and
3. Is free from interests and business activities or other relationships that may hinder or interfere with the ability of Board of Commissioners to act or think freely within the Company.

Pernyataan Tentang Independensi Masing-Masing Komisaris Independen

Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip independensi, Komisaris Independen telah menyampaikan pernyataan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan mengenai independensi Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris tidak menghadapi kondisi atau keadaan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga seluruh keputusan yang dihasilkan dapat diambil secara objektif dan semata-mata untuk kepentingan terbaik Perseroan.

Statement on the Independence of Each Independent Commissioner

In line with their commitment to the independence principle, Independent Commissioners have submitted statements of independence in accordance with applicable regulations and as outlined in the discussion regarding Board of Commissioners' independence. Throughout 2025, Board of Commissioners did not face any conditions or circumstances that could potentially give rise to conflicts of interest in the decision-making process; consequently, all decisions made were objective and solely in the Company's best interests.

Transparansi Informasi tentang Direksi dan Dewan Komisaris

Transparency of Information about Board of Directors and Board of Commissioners

Kebijakan Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan telah menetapkan *Board Manual* bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang antara lain mengatur ketentuan mengenai pola dan mekanisme hubungan kerja kedua organ tersebut. Pedoman ini menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi yang harmonis antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing secara optimal, efektif, dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menerapkan sejumlah prinsip sebagai landasan dalam membina dan menjaga hubungan kerja yang sehat antara Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengurus Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar.
2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perseroan.
3. Korespondensi antara Dewan Komisaris dengan Direksi menggunakan format surat yang didalamnya mengandung penjelasan maksud dan tujuan atas surat tersebut.
4. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Working Relations Policy between Board of Directors and Board of Commissioners

The Company has established a Board Manual for Board of Commissioners and Board of Directors, which, among other things, sets forth provisions regarding the framework and mechanisms governing the working relationship between these two organs. This manual emphasizes that synergy and harmonious coordination between Board of Commissioners and Board of Directors are key factors in supporting the optimal, effective, and efficient fulfillment of their respective roles and responsibilities. In this regard, the Company applies a number of principles as a foundation for fostering and maintaining a healthy working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

1. Board of Commissioners respects the function and role of Board of Directors in managing the Company as regulated in statutory regulations and Articles of Association.
2. Board of Directors respects the function and role of Board of Commissioners in supervising and providing advice on the Company's management policies.
3. Correspondence between Board of Commissioners and Board of Directors uses a letter format that contains an explanation of purpose and objective of the letter.
4. Every working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors is a formal relationship, meaning that it must always be based on a standard mechanism or correspondence that can be accounted for.
5. Any informal working relationship can be carried out by each member of Board of Commissioners and members of Board of Directors, but cannot be used as a formal policy before going through an accountable mechanism or correspondence.

6. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara Anggota Dewan Komisaris dengan salah seorang Anggota Direksi harus diketahui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

6. Every working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors is an institutional relationship in the sense that Board of Commissioners and Board of Directors are collective positions that represent all of its members so that every working relationship between a Member of Board of Commissioners and a Member of Board of Directors must be known to other Members of Board of Commissioners and Board of Directors.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan hingga saat ini belum memiliki ketentuan khusus yang mengatur kebijakan keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Kendati demikian, proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepenuhnya dilaksanakan melalui RUPS dan telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta persyaratan yang ditetapkan dalam *Board Manual*. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi menunjukkan variasi latar belakang yang mencakup bidang pendidikan, pengalaman profesional, rentang usia, jenis kelamin, serta keahlian yang dimiliki. Keberagaman tersebut dipandang penting untuk memperkaya sudut pandang dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat lebih objektif, menyeluruh, dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan bagi kepentingan Perseroan.

Policy on Composition Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors

The Company currently has no specific provisions governing diversity policies regarding the composition of Board of Commissioners and Board of Directors. Nevertheless, appointment and dismissal of members of Board of Commissioners and Board of Directors are conducted entirely through the General Meeting of Shareholders and have complied with the Company's Articles of Association as well as the requirements set forth in the Board Manual. The composition of Board of Commissioners and Board of Directors reflects a variety of backgrounds, including educational backgrounds, professional experience, age range, gender, and expertise. This diversity is considered essential to enrich perspectives in the decision-making process, ensuring that decisions are more objective, comprehensive, and take into account various aspects relevant to the Company's interests.

Nama Name	**Kewarganegaraan** Citizenship	**Domisili** Domicile	**Pendidikan Terakhir** Last Education	**Latar Belakang Pendidikan** Educational Background	**Pengalaman Kerja** Work Experience	**Keahlian** Expertise	**Usia** Age	**Gender** Gender
Direksi Board of Directors								
Sugeng Mulyadi	Indonesia Indonesian	Jakarta	S2 Master	• Master of Shipping and Transport from Netherland Maritime University, Rotterdam-Netherlands, in 2013 • Master of Finance from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, in 2008 • Bachelor of Economic Management from Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, in 1996 • Master of Shipping and Transport from Netherland Maritime University, RotterdamNetherlands, in 2013 • Master of Finance from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, in 2008 • Bachelor of Economic Management from Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, in 1996	• Direktur Utama merangkap Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis (2023-saat ini) • Direktur PT Pelindo Investama (2020 – 2023) • Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2018 – 2019) • VP Keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2017 – 2018) • President Director concurrently Acting Commercial and Business Development Director (2023-present) • Director at PT Pelindo Investama (2020 – 2023) • Finance and Human Capital Director at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2018 – 2019) • VP of Finance at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2017 – 2018)	Keuangan dan Pelayaran Finance and Shipping	53	L Male

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Domisili Domicile	Pendidikan Terakhir Last Education	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender Gender
Bagus Dwipoyono	Indonesia Indonesian	Jakarta	S2 Master	• Engineering Profession Program from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, in 2020 • Master of International Transport and Logistic from Shanghai Maritime University, China, in 2011 • Master of Management from Sekolah Tinggi Manajemen IMMI, Jakarta, in 2002 • Bachelor Industrial Engineering from Universitas Pasundan, Bandung, in 1996 • Engineering Profession Program from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, in 2020 • Master of International Transport and Logistic from Shanghai Maritime University, China, in 2011 • Master of Management from Sekolah Tinggi Manajemen IMMI, Jakarta, in 2002 • Bachelor Industrial Engineering from Universitas Pasundan, Bandung, in 1996	• Direktur Operasi dan Teknik PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2023 - saat ini) • President Director at PT Menara Maritime Indonesia on (2018 – 2023) • Director at PT Terminal Petikemas Indonesia on (2016 – 2018) • Manager Operation Support 1 at PT Pelabuhan Tanjung Priok on (2015 – 2016) • Director of Operation and Technic at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2023 - present) • President Director at PT Menara Maritime Indonesia on (2018 – 2023) • Director at PT Terminal Petikemas Indonesia on (2016 – 2018) • Manager Operation Support 1 at PT Pelabuhan Tanjung Priok on (2015 – 2016)	Manajemen, transportasi internasional, dan logistik Management, International transportation and Logistics	53	L Male
Wing Megantoro	Indonesia Indonesian	Jakarta	S2 Master	• Master of Business Administration from Kuhne Logistic University, in 2015 • Bachelor of Accountancy from University of Jayabaya, in 1997 • Master of Business Administration from Kuhne Logistic University, in 2015 • Bachelor of Accountancy from University of Jayabaya, in 1997	• Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2023 - saat ini) • Regional Division Head Management of Finance & Tax Regional 2 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on (2021 - 2023) • SVP of Finance Management at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) on (2019 – 2021) • SVP of Finance Control & Planning at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) on (2018 – 2019) • Director of Finance, HC, and Risk Management (2023-present) • Regional Division Head Management of Finance & Tax Regional 2 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on (2021 - 2023) • SVP of Finance Management at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) on (2019 – 2021) • SVP of Finance Control & Planning at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) on (2018 – 2019)	Akuntansi dan administrasi bisnis Accounting and Business Administration	53	L Male
Dewan Komisaris Board of Commissioners								
M. Said Bakhri	Indonesia Indonesian	Jakarta	S3 Doctor	• Doctor of Law, Universitas Jayabaya, 29 September 2025 • Master of Law, Universitas Jayabaya, 2012 • Bachelor of Law, Universitas Indonesia, 2010 • Doctor of Law from Jayabaya University, September 29, 2025 • Master of Law from Jayabaya University, 2012 • Bachelor of Law from University of Indonesia, 2010	• President Commissioner PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2025 - saat ini) • Supervisory Board at Perumda Pasar Jaya (2022-2025) • Head of Corporate Legal at PT Jaga Nusantara (2013-2020) • Head of Corporate Legal at PT Red Circle Jaya (2015-2021) • Head of Corporate Legal at PT Sari Keramindo International (2015-2019)	Hukum	46	L Male

Nama Name	**Kewarganegaraan** Citizenship	**Domisili** Domicile	**Pendidikan Terakhir** Last Education	**Latar Belakang Pendidikan** Educational Background	**Pengalaman Kerja** Work Experience	**Keahlian** Expertise	**Usia** Age	**Gender** Gender
Herry Ardianto	Indonesia Indonesian	Jakarta	S1 Bachelor	Bachelor of Economy in Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2010 Bachelor of Economics from School of Economics, 2010	• Independent Commissioners PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2025 - saat ini | present) • Director of Operations at PT Inamal Cemerlang (2011-2023) • Director of Operations at PT Target Persadajaya (1994-2014)	Managemen	58	L Male
Tri Hidayat	Indonesia Indonesian	Jakarta	S1 Bachelor	Bachelor of Sistem Informasi in Mercubuana University, 2013 Bachelor of Information System from Mercubuana University, 2013	• Independent Commissioners PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2025 - saat ini | present) • *Expert Staff to the House of Representatives of the Republic of Indonesia* (2013-2025)	*Public Policies*	39	L Male

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris, baik secara kolegial maupun secara individual, dengan mengacu pada *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan dan disepakati pada awal tahun sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan ruang lingkup kerja masing-masing anggota Direksi. Proses penilaian dilaksanakan melalui evaluasi atas tingkat pencapaian target kinerja selama tahun buku, yang dilakukan secara berkala dan ditetapkan pada akhir periode penilaian.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris menelaah realisasi KPI Direksi, baik yang bersifat kolegial maupun individual, serta mempertimbangkan aspek kompetensi dan perilaku masing-masing anggota Direksi.

Hasil penilaian tersebut kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengurusan Perseroan dan sebagai dasar dalam pemberian persetujuan pembebasan tanggung jawab pengurusan (*acquit et de charge*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain melalui mekanisme RUPS, penilaian kinerja Direksi juga terintegrasi dengan evaluasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta pencapaian sasaran strategis Perseroan yang telah ditetapkan pada awal tahun buku.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi mencakup pencapaian kinerja selama tahun buku, kompetensi, kapasitas kepemimpinan, perilaku, serta aspek-aspek lain yang relevan dengan pelaksanaan fungsi pengurusan Perseroan. Secara umum, indikator penilaian kolegial Direksi meliputi:

1. Keuangan dan Pasar
   a. *Average Collection Period* (ACP)

Board of Directors and Board of Commissioners Performance Assessment

Board of Directors Performance Assessment

Assessment Procedure

Board of Directors' performance assessment is carried out by Board of Commissioners, both collectively and individually, based on Key Performance Indicators (KPIs) that have been established and agreed upon at the beginning of the year in accordance with the duties, responsibilities, and scope of duties of each member of Board of Directors. The assessment process is conducted through an assessment of performance target achievement levels during the fiscal year, which is carried out periodically and finalized at the end of each assessment period.

In its implementation, Board of Commissioners reviews the Board of Directors' KPI performance, both collectively and individually, and considers the competence and conduct of each member of Board of Directors.

The results of this assessment are then presented to Shareholders through General Meetings of Shareholders (GMS) as part of the management's accountability to the Company and as the basis for granting approval of the discharge of management's liability (acquit et de charge) in accordance with applicable regulations.

In addition to the GMS mechanism, Board of Directors' performance assessments are also integrated with evaluations of Good Corporate Governance implementation and the achievement of the Company's strategic objectives established at the beginning of the fiscal year.

Board of Directors Performance Assessment Criteria

The criteria used in the performance assessment of Board of Directors include performance achievements during the fiscal year, competence, leadership capacity, conduct, and other aspects relevant to the performance of the Company's management functions. In general, indicators for the collegial assessment of Board of Directors members include:

1. Finance and Market
   a. Average Collection Period (ACP)

b. Pertumbuhan Pendapatan Usaha
c. EBITDA Margin
2. Fokus Pelanggan
a. Indeks Kepuasan Pelanggan
b. Persentase Tindak Lanjut Komplain Pelanggan
3. Efektivitas Produk dan Proses
a. Produktivitas Bongkar Muat (T/G/H)
b. Utilisasi Lapangan (YOR)
c. Kinerja Proses Pengadaan Barang dan Jasa
4. Fokus Tenaga Kerja
a. Peningkatan Kompetensi Pegawai
b. Produktivitas Pegawai (dalam juta Rupiah)
c. Indeks Kepuasan Pegawai
5. Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan
a. Skor *Good Corporate Governance* (GCG)
b. Penyerapan Investasi (Capex)
c. Ketepatan Penyampaian Laporan Berkala

Sementara itu, penilaian individual Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan unsur:
- Pencapaian target;
- Kapasitas pemenuhan kompetensi;
- *Learning agility*; dan
- perilaku.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian atas kinerja Direksi, baik secara individu maupun kolegial, dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui proses evaluasi yang dilaksanakan secara berkala. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan dan dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hasil Penilaian Kinerja Berdasarkan KPI Direksi

Hasil penilaian kinerja Direksi pada tahun buku 2025 disajikan dalam bentuk pencapaian KPI kolegial dan penilaian individual Direksi. Berikut rincian pencapaian KPI kolegial dan hasil kategorisasi penilaian individual Direksi disajikan pada tabel berikut.

b. Business Income Growth
c. EBITDA Margin
2. Customer Focus
a. Customer Satisfaction Index
b. Percentage of Customer Complaint Follow-Ups
3. Product and Process Effectiveness
a. Loading and Unloading Productivity (T/G/H)
b. Field Utilization (YOR)
c. Performance of Goods and Services Procurement Process
4. Workforce Focus
a. Increasing Employee Competency
b. Employee Productivity (in million Rupiah)
c. Employee Satisfaction Index
5. Leadership, Governance and Community Responsibility
a. Good Corporate Governance (GCG) Score
b. Investment Absorption (Capex)
c. Precision in Submitting Periodic Reports

Meanwhile, Board of Directors' individual assessments are conducted by considering the following factors:
- Target achievement;
- Competency fulfillment;
- Learning agility; and
- Behavior.

Assessor for Performance Assessment of Board of Directors

Board of Commissioners assesses the performance of Board of Directors, both individually and collectively, through a periodic evaluation process. The results of this evaluation are then presented to and accounted for to Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).

Performance Assessment Results Based on Board of Directors KPIs

The results of Board of Directors' performance assessment for 2025 fiscal year are presented in the form of collective KPI achievements and individual Board of Directors' performance evaluations. The details of collective KPI achievements and the results of categorization of individual Board of Directors' performance assessments are presented in the following table.

KPI Kolegial Direksi
Board of Directors Collegial KPIs

No	Aspek Penilaian Assessment Criteria	Persentase Capaian Percentage of Achievement	DIRUT	DIRKEU	DIRKOM	DIROPTEK
1	EBITDA	105%	V	V		V
2	Pendapatan Revenue	109%	V	V	V	V
3	*Average Collection Period*	102%	V	V		
4	BOPO	102%	V	V		
5	*Net Profit Margin*	116%	V		V	
6	Penambahan *Market Share* *Increase in Market Share*	1100%	V		V	
7	Produktivitas Bongkar Muat (U/S/H) Loading and Unloading Productivity (U/S/H)	125%	V		V	V

KPI Kolegial Direksi
Board of Directors Collegial KPIs

No	Aspek Penilaian Assessment Criteria	Persentase Capaian Percentage of Achievement	DIRUT	DIRKEU	DIRKOM	DIROPTEK
8	Utilisasi Lapangan (YOR) Field Utilization (YOR)	156%	V			V
9	Implementasi *Roadmap* *Roadmap Implementation*	100%	V	V		V
10	Implementasi GCG Implementation of Corporate Governance	120%	V			
11	Implementasi Program TJSL Implementation of the SER Program	155%	V			
12	*Anorganik Growth* pada Bisnis Pendukung Inorganic Growth in Support Businesses	200%	V		V	
13	Ekspansi Bisnis Terminal di luar Wilayah IKT Business Expansion of the Terminal Outside the IKT Region	200%	V		V	
14	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	105%	V		V	
15	Digitalisasi Aktivitas Operasional Digitization of Operational Activities	100%	V			V
16	Digitalisasi Teknologi Administrasi Kantor Digitalization of Office Administration Technology	100%	V			V
17	Implementasi HSSE HSSE Implementation	100%	V			V
18	Penyerapan Investasi (Capex): Penyerapan Program Capital Expenditures (Capex): Program Expenditures	125%	V			V
19	Penyerapan Investasi (Capex): Penyerapan Fisik Capital Expenditures (Capex): Physical Progress	119%	V			V
20	Produktivitas Pegawai Employee Productivity	124%	V	V		
21	*High Potential* dan *Promotable Talent* High-Potential and Promising Talent	100%	V	V		
22	Jumlah Implementasi Ide Inovasi Number of Innovative Ideas Implemented	100%	V		V	
23	Peningkatan Kompetensi Pegawai Employee Skills Development	100%	V	V		
Jumlah Persentase Total Percentage		**105,78**				

KPI Individual Direksi
Board of Directors Individual KPIs

No	Nama Direksi Name of Board of Directors	Pencapaian Target Target Achievement				Kapasitas Pemenuhan Kompetensi Competency Fulfillment Capacity				*Learning Agility*				Perilaku Behavior				Hasil Kategorisasi Penilaian Assessment Categorization Results
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Sugeng Mulyadi (01 Januari - 31 Desember 2025) (January 1 – December 31, 2025)				V				V				V				V	Sangat Baik Very Good
2	Bagus Dwipoyono (01 Januari - 31 Desember 2025) (January 1 – December 31, 2025)				V				V				V				V	Sangat Baik Very Good
3	Wing Megantoro (01 Januari - 31 Desember 2025) (January 1 – December 31, 2025)				V				V				V				V	Sangat Baik Very Good

Catatan | Note:
1. Kurang | Poor
2. Cukup | Fair
3. Baik | Good
4. Sangat Baik | Very Good

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Penilaian

Sebagai bentuk akuntabilitas, Dewan Komisaris melaporkan pelaksanaan kinerjanya kepada Pemegang Saham melalui RUPS guna memperoleh persetujuan dan pembebasan tanggung jawab. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan mengacu pada tingkat pemenuhan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Pedoman Kerja Dewan Komisaris, serta arahan dan penugasan yang diberikan oleh Pemegang Saham.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Dewan Komisaris mencakup pelaksanaan fungsi pengawasan selama tahun buku, kompetensi, dan tingkat kehadiran dalam rapat.

Adapun indikator yang digunakan dalam penilaian, antara lain:
1. Kontribusi terhadap capaian kinerja Perseroan;
2. Ketepatan waktu penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris;
3. Kontribusi terhadap penerapan GCG;
4. Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris;
5. Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan Perseroan; dan
6. Efektivitas kegiatan penunjang Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan melalui mekanisme penilaian mandiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh masing-masing anggota. Hasil penilaian tersebut kemudian disampaikan kepada pemegang saham untuk disampaikan, dinilai, dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS. Penetapan kinerja Dewan Komisaris didasarkan pada tingkat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta arahan pemegang saham. Penilaian kinerja, baik secara kolegial maupun individu, menjadi bagian integral dalam penetapan remunerasi dan kompensasi, sekaligus digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemegang saham dalam keputusan pemberhentian atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Ketentuan mengenai mekanisme nominasi serta penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan disusun dengan berlandaskan pada sejumlah kebijakan dan peraturan yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Board of Commissioners Performance Assessment

Assessment Procedure

As a form of accountability, Board of Commissioners reports on its performance to Shareholders through GMS in order to obtain approval and discharge of liability. The Board of Commissioners' performance is evaluated based on the extent to which it has fulfilled its duties and obligations as stipulated in the Articles of Association, Board of Commissioners' Work Guidelines, and the directives and assignments given by Shareholders.

Board of Commissioners Performance Assessment Criteria

The criteria used in the performance assessment of Board of Commissioners include the performance of supervisory functions during the fiscal year, competence, and attendance at meetings.

The indicators used include, among others:
1. Contribution to the Company's performance achievements;
2. Punctuality in delivering opinions and suggestions which are the obligation of Board of Commissioners;
3. Contribution to the GCG implementation;
4. Attendance level of members of Board of Commissioners;
5. Supervision and direction of Board of Directors regarding the Company's plans and policies; and
6. Effectiveness of the Board of Commissioners' supporting activities.

Assessor for Performance Assessment of Board of Commissioners

The performance evaluation of Board of Commissioners is conducted through a self-assessment mechanism carried out by each member. The results of this assessment are then submitted to the shareholders to be presented, evaluated, and accounted for at the General Meeting of Shareholders. The determination of Board of Commissioners' performance is based on the level of fulfillment of duties, functions, and obligations as stipulated in applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and shareholder directives. Performance assessments, whether conducted collectively or individually, are an integral part of determining remuneration and compensation, and are also used as a basis for shareholders' consideration in decisions regarding the dismissal or reappointment of members of Board of Commissioners.

Nomination and Remuneration Policy for Board of Directors and Board of Commissioners

The provisions regarding the nomination mechanism and determination of remuneration for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are formulated based on a number of policies and regulations that serve as the primary guidelines for their implementation, as follows:
1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 of 2023 concerning the Minister of State-Owned Enterprises Regulation on Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.
3. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committees for Issuers or Public Companies.

4. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/23/2/2/RKTK/UTMA/PLND-24 tanggal 23 Februari 2024 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Subholding, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
5. Surat Keputusan Direksi IPCC No. HK.56/2/12/IKT-19 tanggal 21 Juni 2019 tentang Penghasilan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
6. Keputusan RUPS PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan perannya dengan melakukan penelaahan atas kebijakan serta mekanisme pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, Komite menyusun dan menyampaikan rekomendasi, termasuk usulan kandidat yang berasal dari *talent pool*, kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan evaluasi lanjutan atas rekomendasi dimaksud dan menggunakannya sebagai dasar pengajuan calon Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditetapkan melalui RUPS Luar Biasa.

Prosedur Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemilihan Ulang Direksi

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi merupakan kewenangan RUPS. Sebelum diangkat, calon Direksi wajib melalui proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengacu pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Anggota Direksi diangkat untuk 1 (satu) periode jabatan dan dapat ditunjuk kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan Direksi paling lama sampai dengan berakhirnya RUPS Tahunan kelima. RUPS juga memiliki hak untuk memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan. Seluruh proses pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas profesionalisme dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Prosedur Pengangkatan Dewan Komisaris

Kewenangan untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris sepenuhnya berada pada Pemegang Saham. Setiap calon yang diusulkan wajib melalui tahapan seleksi berupa *fit and proper test* yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham atau Pemilik Modal melalui mekanisme RUPS. Proses tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

4. Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: HK.01/23/2/2/RKTK/UTMA/PLND-24 dated February 23, 2024, concerning Guidelines for the Appointment of Members of Board of Directors and Members of Board of Commissioners in Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
5. Decree of IPCC Board of Directors No. HK.56/2/12/IKT-19 dated June 21, 2019, concerning Remuneration for he Board of Directors and Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
6. The GMS Resolution of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Board of Directors and Board of Commissioners Nomination

Board of Directors Nomination Procedure

Nomination and Remuneration Committee fulfills its role by reviewing the policies and mechanisms for appointing members of Board of Directors and Board of Commissioners. Based on the results of this review, Committee prepares and submits recommendations, including candidate proposals drawn from the talent pool, to Board of Commissioners. Subsequently, Board of Commissioners conducts a further evaluation of the aforementioned recommendations and uses them as the basis for proposing candidates for Board of Directors and Board of Commissioners to be appointed through an Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Procedures for Appointment, Dismissal and Re-Appointment of Board of Directors

The appointment and dismissal of members of Board of Directors are the authority of GMS. Prior to appointment, candidates for Board of Directors must undergo a fit and proper test conducted in accordance with applicable laws and regulations and in line with the principles of Good Corporate Governance. Members of Board of Directors are appointed for one (1) term and may be reappointed in accordance with applicable regulations. The term of office for Board of Directors members is a maximum of one term, ending at the conclusion of the fifth Annual General Meeting of Shareholders. The GMS also has the right to dismiss members of Board of Directors before the end of their term, provided that the Company's Articles of Association are adhered to. The entire process of appointing and dismissal of members of Board of Directors is carried out with a commitment to professionalism and implementation of Good Corporate Governance.

Appointment Procedure for Board of Commissioners

The authority to appoint members of Board of Commissioners rests entirely with the Shareholders. Each proposed candidate must undergo a selection process in the form of a fit and proper test conducted by the Shareholders or Capital Owners through the General Meeting of Shareholders (GMS) mechanism. This process is carried out in accordance with the provisions of Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 of 2023 concerning Organizations and Human Capital of State-Owned Enterprises.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Pemberian Remunerasi

Sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi memperoleh imbalan yang wajar sesuai dengan kontribusinya dalam mendorong kinerja dan perkembangan Perseroan. Pemberian remunerasi tersebut dapat berbentuk kompensasi tetap maupun tidak tetap.

Perseroan telah menetapkan kebijakan dan mekanisme remunerasi yang mencakup skema, tata cara, serta penetapan besaran imbalan bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Perumusan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan meningkatnya dinamika dan persaingan di pasar tenaga kerja, Perseroan secara berkala melakukan peninjauan atas kebijakan remunerasi guna memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan industri, arah strategis Perseroan, serta ketentuan regulator yang berlaku.

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Penentuan remunerasi bagi Direksi dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan mengacu pada hasil evaluasi kinerja. Salah satu dasar utama dalam penilaian tersebut adalah tingkat pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) atau kontrak manajemen Direksi, yang digunakan sebagai tolok ukur objektif untuk menilai kinerja Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi diawali dengan pelaksanaan kajian serta pengumpulan data oleh Komite Nominasi dan Remunerasi terkait praktik terbaik dan tolok ukur remunerasi untuk jabatan sejenis pada perusahaan pembanding di pasar, sekurang-kurangnya di lingkungan Pelindo Group. Kajian tersebut disusun dengan mengacu pada kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham dan diterapkan di Perseroan, dengan tetap memperhatikan kinerja Perseroan serta selaras dengan sasaran dan strategi jangka panjang yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, hasil kajian dan analisis tersebut disampaikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris disertai rekomendasi mengenai struktur dan besaran remunerasi. Rekomendasi ini kemudian ditelaah oleh Dewan Komisaris dan digunakan sebagai dasar pengusulan penetapan remunerasi kepada Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan dalam RUPS Tahunan.

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration

Remuneration Policy

As a form of appreciation for the performance of their duties, functions, and responsibilities, Board of Commissioners and Board of Directors members receive fair compensation commensurate with their contributions to driving the Company's performance and development. Such remuneration may take the form of fixed or variable compensation.

The Company has established remuneration policies and mechanisms that cover the schemes, procedures, and determination of compensation amounts for members of Board of Commissioners and Board of Directors. The formulation of these policies is carried out by prioritizing the principle of prudence and complying with applicable laws and regulations.

In line with the increasing dynamics and competition in the labor market, the Company periodically reviews its remuneration policy to ensure its alignment with industry developments, the Company's strategic direction, and applicable regulatory requirements.

Indicators for Determining Board of Directors' Remuneration

The determination of remuneration for Board of Directors is based on indicators established by the Shareholders, taking into account the results of performance assessments. One of the primary bases for such assessments is the level of achievement of Key Performance Indicators (KPIs) or the Board of Directors' management contracts, which serve as objective benchmarks for evaluating the Board of Directors' performance in carrying out their duties and responsibilities.

Remuneration Determination Procedures

The determination of remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors begins with a review and data collection by Nomination and Remuneration Committee regarding best practices and remuneration benchmarks for similar positions at comparable companies in the market, at a minimum within the Pelindo Group. This study is prepared in accordance with the remuneration policy established by the Shareholders and implemented by the Company, while taking into account the Company's performance and aligning with the established long-term objectives and strategies.

Subsequently, results of the review and analysis are submitted by Nomination and Remuneration Committee to Board of Commissioners along with recommendations regarding remuneration structure and amounts. These recommendations are then reviewed by Board of Commissioners and used as the basis for proposing remuneration determination to Shareholders for approval at Annual General Meeting of Shareholders.

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Compensation Committee	Dewan Komisaris Board of Commissioners	RUPS Tahunan Annual GMS
Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi dan ususlan remunerasi kepaada Dewan Komisaris sesuai dengan standar remunerasi untuk jabatan dan industri sejenis. Conduct reviews and provide recommendations and remuneration proposals to Board of Commissioners in accordance with remuneration standards for similar positions and industries.	Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dan usulan remunerasi yang disampaikan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham di dalam RUPS Tahunan. Board of Commissioners reviews the recommendations and remuneration proposals submitted by Nomination and Remuneration Committee and then submits them to Shareholders at the Annual GMS.	Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan hasil keputusan RUPST. Determination of remuneration for members of Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with the Annual GMS resolutions.

Perumusan struktur remunerasi, kebijakan yang mendasarinya, serta penetapan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mengacu pada praktik remunerasi yang berlaku di industri kepelabuhanan, khususnya pada perusahaan dengan jenis kegiatan dan skala usaha yang sebanding dengan Perseroan, termasuk perusahaan-perusahaan dalam lingkungan Pelindo Group. Dalam proses tersebut, Perseroan menggunakan sejumlah kriteria atau indikator sebagai dasar pertimbangan, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
2. Pencapaian target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel;
4. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
5. Prestasi kerja kolektif dan individual;
6. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

The formulation of remuneration structure, underlying policies, and determination of remuneration amounts for Board of Commissioners and Board of Directors are conducted by referring to prevailing remuneration practices in the port industry, particularly among companies with business activities and scale comparable to the Company, including companies within the Pelindo Group. In this process, the Company uses a number of criteria or indicators as a basis for consideration, including:

1. The implementation of duties, responsibilities and authority of members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners is linked to the achievement of the Company's objectives and performance;
2. The achievement of performance targets or performance of each member of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners;
3. Balance of allowances between fixed and variable;
4. Financial performance and fulfillment of the Company's obligations as regulated in applicable regulations;
5. Collective and individual work achievements;
6. Consideration of the Company's long-term targets and strategies.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pemegang Saham melalui keputusan RUPS telah menetapkan kewajiban Perseroan untuk memberikan remunerasi beserta fasilitas penunjang kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Penetapan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing organ Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Remuneration Structure for Board of Commissioners and Board of Directors

Through a GMS resolution, shareholders have stipulated the Company's obligation to provide remuneration and supporting benefits to members of Board of Commissioners and Board of Directors. This provision is intended as a form of recognition for the performance of duties, responsibilities, and contributions made by each of the Company's governing bodies, with the following details:

No.	Komponen Remunerasi Remuneration Components	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
1	**Gaji/Honorarium** **Salary/Honorarium**	V	V
2	**Tunjangan** **Allowance**		
	Tunjangan Perumahan Housing Allowance		V
	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	V	V
	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	V	
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	V	
	Tunjangan Pakaian Dinas Official Uniform Allowance	V	V

No.	Komponen Remunerasi Remuneration Components	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
3	**Fasilitas** **Facilities**		
	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities		V
	Fasilitas Club Membership Club Membership Facilities		V
	Fasilitas Perjalanan Dinas/Pelatihan Official Travel/Training Facilities	V	V
	Fasilitas Kesehatan Health Care Facilities	V	V
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Support Facility	V	V
	Fasilitas Keanggotaan Profesi Professional Membership Facilities	V	V
	Fasilitas Kartu Kredit Credit Card Facilities		V
4	**Fasilitas Lainnya** **Other Facilities**		
	Tantiem/Insentif Kinerja Tantiem/Performance Incentives		V*

*) Menunggu keputusan Danantara
*) Waiting for Danantara's decision

Jumlah Remunerasi dan Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan pemenuhan hak remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian remunerasi tersebut diberikan sebagai imbal jasa atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota organ Perseroan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Total Remuneration and Tantiem for Board of Commissioners and Board of Directors

Throughout 2025, the Company has fulfilled the remuneration entitlements for all members of Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with applicable regulations. Such remuneration was provided as compensation for the performance of duties and responsibilities of each member of the Company's governing organs, as detailed below:

Tabel Remunerasi Bulanan Dewan Komisaris Tahun 2025
Monthly Remuneration for Board of Commissioners in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan 2025 Term of Office in 2025	Honorarium (Rp)	Tunjangan dan Fasilitas (Rp) Allowances and Facilities	*Take-Home Pay* per Bulan (Rp) Take-Home Pay per Month
Drajat Sulistyo	Komisaris Utama President Commissioner	Januari-Juni January–June	36.000.000	7.200.000	42.374.526
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Januari-Juni January–June	32.400.000	6.480.000	38.880.000
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	Januari-Juni January–Jun	32.400.000	6.480.000	38.880.000
M. Said Bakhri	Komisaris Utama President Commissioner	Juni-sekarang June–present	36.000.000	7.200.000	42.374.526
Herry Ardianto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Juni-sekarang June–present	32.400.000	6.480.000	38.880.000
Tri Hidayat	Komisaris Independen Independent Commissioner	Juni-sekarang June–present	32.400.000	6.480.000	38.880.000

Tabel Remunerasi Bulanan Direksi Tahun 2025
Monthly Remuneration for Board of Directors in 2025

Nama Name	**Jabatan** Position	**Masa Jabatan 2025** Term of Office in 2025	**Honorarium (Rp)**	**Tunjangan dan Fasilitas (Rp)** Allowances and Facilities	***Take-Home Pay* per Bulan (Rp)** Take-Home Pay per Month
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama merangkap Plt. Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently Acting Director of Commercial and Business Development	Januari- Desember January–December	80.000.000	20.000.000	95.529.643
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technical	Januari- Desember January–December	68.000.000	20.000.000	85.287.255
Wing Megantoro	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management	Januari- Desember January–December	68.000.000	20.000.000	85.268.575

Pada tahun 2025, Perseroan tidak merealisasikan pemberian tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Keputusan tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas arahan Danantara selaku pengelola strategis dan katalisator pertumbuhan. Kebijakan ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sebagai bagian dari upaya penyelarasan kebijakan remunerasi dengan arah strategis dan kebijakan pemegang saham.

Berdasarkan informasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang telah disampaikan, dapat dihitung total remunerasi dalam perhitungan tahunan. Rincian lebih lanjut mengenai pengelompokan jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi per tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

In 2025, the Company did not distribute performance tantiem to Board of Commissioners and Board of Directors members. This decision was made in accordance with the guidance of Danantara, the strategic manager and growth catalyst. This policy was implemented in compliance with applicable laws and regulations as well as the principles of good Corporate governance, as part of efforts to align remuneration policies with strategic direction and shareholder policies.

Based on the remuneration information for members of Board of Commissioners and Board of Directors that has been disclosed, the total annual remuneration can be calculated. Further details regarding the breakdown of remuneration paid to members of Board of Commissioners and Board of Directors annually over the past 3 (three) years are presented in the following table:

Tabel Total Remunerasi Tahunan Dewan Komisaris dan Direksi
Total Annual Remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors

Total Remunerasi (per Orang per Tahun) Total Remuneration (per Person per Year)	**Jumlah Dewan Komisaris** Amount of Board of Commissioners		**Jumlah Direksi** Amount of Board of Directors	
	2025	**2024**	**2025**	**2024**
Di atas Rp2 miliar More than Rp2 billion	-	-	-	-
Di atas Rp1 miliar hingga Rp2 miliar More than Rp1 billion to Rp2 billion	-	-	3	3
Di atas Rp500 juta hingga Rp1 miliar More than Rp500 million to Rp1 billion	1	1	-	-
Di bawah Rp500 juta Below Rp500 million	2	2	-	-

Pengungkapan Bonus Kinerja, Bonus Non-Kinerja, dan/atau Opsi Saham

Pengaturan mengenai pembagian tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor HK.56/2/12/IKT-19 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Penetapan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kinerja masing-masing organ serta kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan. Hingga saat ini, Perseroan belum memberlakukan kebijakan terkait pemberian opsi saham atau skema kepemilikan saham bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pejabat Eksekutif Perseroan.

Disclosure of Performance Bonus, Non-Performance Bonus, and/or Stock Option

The regulations regarding bonus distribution for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors have been established through Decree Number HK.56/2/12/IKT-19 concerning Income of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. This determination was made by taking into account the performance levels of each body as well as the Company's financial condition and capacity. To date, the Company has not implemented any policies regarding the granting of stock options or share ownership schemes for members of Board of Commissioners, Board of Directors, or Executive Officials of the Company.

Rasio Gaji Karyawan Tertinggi dan Terendah

Uraian berikut menyajikan perbandingan rasio penghasilan, yang mencerminkan besaran kompensasi bulanan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta karyawan tetap di lingkungan Perseroan.

Ratio of Highest and Lowest Employee Salaries

The following table presents a comparison of compensation ratios, reflecting the monthly compensation received by members of Board of Commissioners, Board of Directors, and permanent employees of the Company

Rasio Gaji Salary Ratio	**Rasio** Ratio	
	2025	**2024**
Rasio Gaji Karyawan Tertinggi dan Terendah Ratio of Highest and Lowest Employee Salary	**1:5,4**	1:2,6
Rasio Gaji Anggota Direksi Tertinggi dan Terendah Ratio of Highest and Lowest Salary for Members of Board of Directors	**1: 1,2**	1: 1,6
Rasio Gaji Anggota Dewan Komisaris Tertinggi dan Terendah Ratio of Highest and Lowest Salary for Members of Board of Commissioners	**1: 1,1**	1: 1,6
Rasio Gaji Anggota Direksi Yang Tertinggi dan Karyawan Tertinggi Ratio of Highest Salary for Members of Board of Directors and Highest Salary for Employees	**1:3,8**	1:1,3

Rapat Direksi dan Dewan Komisaris

Board of Directors and Board of Commissioners Meeting

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris:
   a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (salah satu Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
   b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 3 di atas ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 1.b dan nomor 3 di atas ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

Board of Commissioners Meeting

Board of Commissioners Meeting Policy

1. Board of Commissioners Meeting:
   a. The Board of Commissioners meetings can be held at any time if deemed necessary by one or more members of Board of Commissioners or at the written request of Board of Directors or at the request of 1(one) or more Shareholders jointly owning 1/10 (one tenth) or more of the total all shares that have been placed by the Company with valid voting rights.
   b. Board of Commissioners is required to hold meetings at least 1(one) every 2 (two) months.
2. The Board of Commissioners meeting as referred to in number 1 above can be held, is valid and has the right to make binding decisions if attended by more than 1/2 (one half) of the total number of members of Board of Commissioners present or represented at the Meeting.
3. Board of Commissioners shall hold meetings with Board of Directors periodically at least once in 4 (four) months.
4. The attendance of members of Board of Commissioners at the meetings as referred to in numbers 1 and 3 above must be disclosed in the Company's annual report.
5. Board of Commissioners must schedule the meeting as referred to in number 1.b and number 3 above for the following year before the end of the Fiscal Year.

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 di atas ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada nomor 5 di atas ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
14. Pemungutan suara:
    a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihak harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

6. At the meeting that has been scheduled as referred to in number 5 above, the meeting materials are delivered to the participants no later than 5 (five) days before the meeting is held.
7. In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared as referred to in number 5 above, the meeting materials are delivered to the meeting participants no later than before the meeting is held.
8. Summons for Board of Commissioners Meetings are carried out by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent for any reason, which does not need to be proven to a third party, 1 (one) member of Board of Commissioners appointed by the President Commissioner has the right and authority to summon a Board of Commissioners Meeting.
9. Summons for Board of Commissioners Meetings are sent by any means in written form, which summons must be sent to members of Board of Commissioners no later than 5 (five) calendar days before the Meeting is held or within a shorter time in urgent circumstances, namely no later than 1 (one) calendar day before the Meeting without considering the summons date and the Meeting date, the urgent situation is determined by the President Commissioner. If all members of Board of Commissioners are present at the Meeting, prior summons is not required.
10. Summon to the meeting must include the agenda, date, time and place of the meeting.
11. The Board of Commissioners meetings are held at the Company's domicile or place of business activities or at the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at any other place provided it is within the territory of the Republic of Indonesia.
12. The Board of Commissioners meeting is chaired by President Commissioner, if the President Commissioner is not present or is unable to attend the Meeting, which does not need to be proven to a third party, then the Meeting is chaired by one of the selected members of Board of Commissioners and from the members of Board of Commissioners who are present at the Meeting
13. A member of Board of Commissioners can only be represented at a Board of Commissioners Meeting by another member of Board of Commissioners based on a power of attorney.
14. Voting:
    a. Each member of Board of Commissioners has the right to cast 1 (one) and an additional 1 (one) vote for each other member of Board of Commissioners he represents. Every member of Board of Commissioners who personally, in any way, either directly or indirectly, has an interest in a proposed transaction or contract in which the Company is a party must declare the nature of the interest at a Board of Commissioners Meeting and is not entitled to participate in voting on matters relating to transactions or contracts.
    b. Voting regarding individuals is carried out using a closed ballot without a signature, while voting regarding other matters is carried out orally unless the Chairman of Meeting determines otherwise without any objection from those present.
15. Decision making at Board of Commissioners Meetings must be taken based on deliberation to reach consensus.

16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada nomor 15 di atas ini, pengambilan keputusan dilakukan berdasar suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1h (satu per dua) dari anggota.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 di atas ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 di atas wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 17 dan nomor 18 di atas ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 17 dan nomor 18 di atas ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 17 dan nomor 18 di atas ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

16. In the event that a consensus deliberation decision is not reached as referred to in number 15 above, the decision is made based on a majority vote, namely approved by more than 1 hour (one half) of the members.
17. The meeting results as referred to in number 1 above must be stated in the meeting minutes, signed by all members of Board of Commissioners present, and submitted to all members of Board of Commissioners.
18. The meeting results as referred to in number 3 above must be stated in the meeting minutes, signed by members of Board of Commissioners and members of Board of Directors who are present, and submitted to all members of Board of Commissioners and members of Board of Directors.
19. In the event that there are members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who do not sign the meeting results as referred to in numbers 17 and 18 above, the person concerned is obliged to state the reasons in writing in a separate letter attached to the meeting minutes.
20. Minutes of meetings as referred to in numbers 17 and 18 above must be documented by the Company.
21. Minutes of meetings as referred to in numbers 17 and 18 above are valid evidence regarding the decisions taken at the relevant Board of Commissioners Meeting, both for members of Board of Commissioners and for third parties.
22. Board of Commissioners can also take legal and binding decisions without holding a Board of Commissioners Meeting, provided that all members of Board of Commissioners have been notified in writing about the proposals in question and all members of Board of Commissioners have given their approval regarding the proposals submitted in writing. and sign the agreement. Decisions taken in this way have the same force as decisions legally taken at a Board of Commissioners Meeting.

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

Board of Commissioners Internal Meeting

No	Nomor Undangan Invitation Number	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
1	DK/14/01/01/IPCC-25	16 Januari 2025 January 16, 2025	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Desember 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC meeting decisions 2. Company performance reports until December 2024 3. Other strategic matters	1. Dewan Komisaris 2. Organ Pendukung 3. Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Supporting Organs 3. Secretary of Board of Commissioners
2	DK/19/02/01/IPCC-25	20 Februari 2025 February 20, 2025	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Januari 2025; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC meeting decisions 2. Company performance reports until January 2025 3. Other strategic matters	1. Dewan Komisaris 2. Organ Pendukung 3. Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Supporting Organs 3. Secretary of Board of Commissioners

No	Nomor Undangan Invitation Number	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
3	DK/18/03/01/IPCC-25	21 Maret 2025 March 21, 2025	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Februari 2025; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC meeting decisions 2. Company performance reports until February 2025 3. Other strategic matters	1. Dewan Komisaris 2. Organ Pendukung 3. Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Supporting Organs 3. Secretary of Board of Commissioners
4	DK/23/04/01/IPCC-25	24 April 2025 April 24, 2025	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Maret 2025; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC meeting decisions 2. Company performance reports until March 2025 3. Other strategic matters	1. Dewan Komisaris 2. Organ Pendukung 3. Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Supporting Organs 3. Secretary of Board of Commissioners
5	DK/20/05/01/IPCC-25	28 Mei 2025 May 28, 2025	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d April 2025; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC meeting decisions 2. Company performance reports until April 2025 3. Other strategic matters	1. Dewan Komisaris 2. Organ Pendukung 3. Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Supporting Organs 3. Secretary of Board of Commissioners
6	DK/04/06/01/IPCC-25	5 Juni 2025 June 5, 2025	Pembahasan: 1. Aksi Korporasi Rencana Divestasi MKO MTKI; 2. Pembahasan RJPP Tahun 2025-2029. Agenda: 1. Corporate Action: Plan to Divest MKO MTKI; 2. Discussion on the 2025-2029 RJPP.	1. Dewan Komisaris 2. Organ Pendukung 3. Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Supporting Organs 3. Secretary of Board of Commissioners
7	DK/26/07/02/IPCC-25	26 Juli 2025 July 26, 2025	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Mei 2025; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC meeting decisions 2. Company performance reports until May 2025 3. Other strategic matters	1. Dewan Komisaris 2. Organ Pendukung 3. Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Supporting Organs 3. Secretary of Board of Commissioners
8	DK/03/08/01/IPCC-25	3 Agustus 2025 August 3, 2025	Pembahasan: 1. Permohonan Persetujuan Aksi Korporasi Divestasi MKO MTKI tertanggal 13 Mei 2025; 2. Permohonan Persetujuan Atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Tahun 2025-2029 tertanggal 22 Mei 2025 tertanggal 28 Mei 2025; 3. Usulan Penghapusan Aset Tetap tertanggal 12 Juni 2025. Discussion: 1. Request for Approval of MKO MTKI's Corporate Divestiture Action dated May 13, 2025; 2. Request for Approval of the Long-Term Plan of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk for 2025-2029 dated May 22, 2025, and May 28, 2025; 3. Proposal for Disposal of Fixed Assets dated June 12, 2025.	1. Dewan Komisaris 2. Organ Pendukung 3. Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Supporting Organs 3. Secretary of Board of Commissioners
9	DK/18/09/02/IPCC-25	18 September 2025 September 18, 2025	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Juni 2025; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC meeting decisions 2. Company performance reports until June 2025 3. Other strategic matters	1. Dewan Komisaris 2. Organ Pendukung 3. Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Supporting Organs 3. Secretary of Board of Commissioners

No	Nomor Undangan Invitation Number	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
10	DK/14/10/01/IPCC-25	14 Oktober 2025 October 14, 2025	Pembahasan: Tindak lanjut penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dengan PT Maspion Industrial Estate Discussion: Follow-up on the signing of Joint Decree between PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk and PT Maspion Industrial Estate	1. Dewan Komisaris 2. Organ Pendukung 3. Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Supporting Organs 3. Secretary of Board of Commissioners
11	DK/20/11/01/IPCC-25	20 November 2025 November 20, 2025	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Juli 2025; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC meeting decisions 2. Company performance reports until July 2025 3. Other strategic matters	1. Dewan Komisaris 2. Organ Pendukung 3. Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Supporting Organs 3. Secretary of Board of Commissioners
12	DK/09/12/01/IPCC-25	9 Desember 2025 December 9, 2025	Pembahasan: *Update* Rencana Kerja Dewan Komisaris Discussion: Update on the Board of Commissioners' Work Plan	1. Dewan Komisaris 2. Organ Pendukung 3. Sekretaris Dewan Komisaris 1. Board of Commissioners 2. Supporting Organs 3. Secretary of Board of Commissioners

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Rapat Gabungan

Selain melaksanakan rapat internal secara rutin, Dewan Komisaris juga menyelenggarakan pertemuan yang melibatkan Direksi sebagai bagian dari mekanisme koordinasi dan pengawasan. Berdasarkan Pedoman Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi, rapat bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi wajib dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.

AgendaJoint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors

Joint Meeting Policy

In addition to holding regular internal meetings, Board of Commissioners also convenes meetings involving Board of Directors as part of its coordination and supervision mechanism. Pursuant to the Working Procedures Guidelines for Relations between Board of Commissioners and Board of Directors, joint meetings between Board of Commissioners and Board of Directors must be held periodically, at least 1 (one) time every 4 (four) months.

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Agenda for Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors

No	Nomor Undangan Invitation Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat (Kehadiran Dewan Komisaris) Meeting Participants (Attendance of Board of Commissioners)	Peserta Rapat (Kehadiran Direksi) Meeting Participants (Attendance of Board of Directors)
1	DK/14/01/02/IPCC-25	Kamis, 16 Januari 2025 Thursday, January 16, 2025	1. Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya; 2. Laporan isu kinerja Perseroan s.d Desember 2024; 3. Isu strategis; 4. Hal-hal strategis lainnya 1. Follow up on the results of previous BoC&BoD meeting decisions 2. Report on the Company's performance through December 2024; 3. Strategic issues; 4. Other strategic matters	1. Drajat Sulistyo 2. Abdur Rahim Hasan 3. LM Arya Bima Yudiantara 4. Sugeng Mulyadi 5. Bagus Dwipoyono 6. Wing Megantoro
2	DK.17/02/02/IPCC-25	Kamis, 20 Februari 2025 Thursday, February 20, 2025	1. Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya; 2. Laporan isu kinerja Perseroan s.d Januari 2025; 3. Isu strategis; 4. Hal-hal strategis lainnya 1. Follow up on the results of previous BoC&BoD meeting decisions 2. Report on the Company's performance through January 2025; 3. Strategic issues; 4. Other strategic matters	1. Drajat Sulistyo 2. Abdur Rahim Hasan 3. LM Arya Bima Yudiantara 4. Sugeng Mulyadi 5. Bagus Dwipoyono 6. Wing Megantoro

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Agenda for Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors

No	Nomor Undangan Invitation Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat (Kehadiran Dewan Komisaris) Meeting Participants (Attendance of Board of Commissioners)	Peserta Rapat (Kehadiran Direksi) Meeting Participants (Attendance of Board of Directors)
3	DK/18/03/02/IPCC-25	Jumat, 21 Maret 2025 Friday, March 21, 2025	1. Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya; 2. Laporan isu kinerja Perseroan s.d Februari 2025; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Follow up on the results of previous BoC&BoD meeting decisions; 2. Report on the Company's performance through February 2025; 3. Other strategic matters.	1. Drajat Sulistyo 2. Abdur Rahim Hasan 3. LM Arya Bima Yudiantara 4. Sugeng Mulyadi 5. Bagus Dwipoyono 6. Wing Megantoro
4	DK/23/04/02/IPCC-25	Kamis, 24 April 2025 Thursday, April 24, 2025	1. Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya; 2. Laporan isu kinerja Perseroan s.d Maret 2025; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Follow up on the results of previous BoC&BoD meeting decisions; 2. Report on the Company's performance through March 2025; 3. Other strategic matters.	1. Drajat Sulistyo 2. Abdur Rahim Hasan 3. LM Arya Bima Yudiantara 4. Sugeng Mulyadi 5. Bagus Dwipoyono 6. Wing Megantoro
5	DK/20/05/02/IPCC-25	Rabu, 28 Mei 2025 Wednesday, May 28, 2025	1. Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya; 2. Laporan isu kinerja Perseroan s.d April 2025; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Follow up on the results of previous BoC&BoD meeting decisions; 2. Report on the Company's performance through April 2025; 3. Other strategic matters.	1. Drajat Sulistyo 2. Abdur Rahim Hasan 3. LM Arya Bima Yudiantara 4. Sugeng Mulyadi 5. Bagus Dwipoyono 6. Wing Megantoro
6	DK/24/06/03/IPCC-25	Kamis, 26 Juni 2025 Thursday, June 26, 2025	1. Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya; 2. Laporan isu kinerja Perseroan s.d Mei 2025; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Follow up on the results of previous BoC&BoD meeting decisions 2. Report on the Company's performance through May 2025; 3. Other strategic matters.	1. M. Said Bakhri 2. Herry Ardianto 3. Tri Hidayat 4. Sugeng Mulyadi 5. Bagus Dwipoyono 6. Wing Megantoro
7	DK/16/07/03/IPCC-25	Jumat, 18 Juli 2025 Friday, July 18, 2025	1. Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya; 2. Laporan isu kinerja Perseroan s.d Juni 2025; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Follow up on the results of previous BoC&BoD meeting decisions 2. Report on the Company's performance through June 2025; 3. Other strategic matters.	1. M. Said Bakhri 2. Herry Ardianto 3. Tri Hidayat 4. Sugeng Mulyadi 5. Bagus Dwipoyono 6. Wing Megantoro
8	DK/18/08/02/IPCC-25	Rabu, 20 Agustus 2025 Wednesday, August 20, 2025	1. Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya; 2. Laporan isu kinerja Perseroan s.d Juli 2025; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Follow up on the results of previous BoC&BoD meeting decisions 2. Report on the Company's performance through July 2025; 3. Other strategic matters.	1. M. Said Bakhri 2. Herry Ardianto 3. Tri Hidayat 4. Sugeng Mulyadi 5. Bagus Dwipoyono 6. Wing Megantoro
9	DK/29/09/02/IPCC-25	Selasa, 30 September 2025 Tuesday, September 30, 2025	1. Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya; 2. Laporan isu kinerja Perseroan s.d Agustus 2025; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Follow up on the results of previous BoC&BoD meeting decisions; 2. Report on the Company's performance through August 2025; 3. Other strategic matters.	1. M. Said Bakhri 2. Herry Ardianto 3. Tri Hidayat 4. Sugeng Mulyadi 5. Bagus Dwipoyono 6. Wing Megantoro
10	DK/08/10/02/IPCC-25	Senin, 13 Oktober 2025 Monday, October 13, 2025	1. Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya; 2. Laporan isu kinerja Perseroan s.d September 2025; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Follow up on the results of previous BoC&BoD meeting decisions; 2. Report on the Company's performance through September 2025; 3. Other strategic matters.	1. M. Said Bakhri 2. Herry Ardianto 3. Tri Hidayat 4. Sugeng Mulyadi 5. Bagus Dwipoyono 6. Wing Megantoro

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Agenda for Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors

No	Nomor Undangan Invitation Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat (Kehadiran Dewan Komisaris) Meeting Participants (Attendance of Board of Commissioners)	Peserta Rapat (Kehadiran Direksi) Meeting Participants (Attendance of Board of Directors)
11	DK/18/11/02/IPCC-25	Kamis 20 November 2025 Thursday, November 20, 2025	1. Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya; 2. Laporan isu kinerja Perseroan s.d Oktober 2025; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Follow up on the results of previous BoC&BoD meeting decisions; 2. Report on the Company's performance through October 2025; 3. Other strategic matters.	1. M. Said Bakhri 2. Herry Ardianto 3. Tri Hidayat 4. Sugeng Mulyadi 5. Bagus Dwipoyono 6. Wing Megantoro
12	DK/10/12/02/IPCC-25	Kamis, 18 Desember 2025 Thursday, December 18, 2025	1. Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya; 2. Laporan isu kinerja Perseroan s.d November 2025; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Follow up on the results of previous BoC&BoD meeting decisions; 2. Report on the Company's performance through November 2025; 3. Other strategic matters.	1. M. Said Bakhri 2. Herry Ardianto 3. Tri Hidayat 4. Sugeng Mulyadi 5. Bagus Dwipoyono 6. Wing Megantoro

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat dengan Direksi, dan RUPS

Frequency and Attendance of Board of Commissioners at Board of Commissioners Internal Meetings, Meetings with Board of Directors and GMS

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting			Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors			RUPS GMS		
		Wajib Rapat Mandatory Meeting	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Rata-Rata Tingkat Kehadiran Average Attendance Level	Wajib Rapat Mandatory Meeting	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Rata-Rata Tingkat Kehadiran Average Attendance Level	Wajib Rapat Mandatory Meeting	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Rata-Rata Tingkat Kehadiran Average Attendance Level
1	M. Drajat Sulistyo (Komisaris Utama) (President Commissioner	6	6	100%	6	6	100%	1	1	100%
2	Abdur Rahim Hasan (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	6	6	100%	6	6	100%	1	1	100%
3	LM Arya Bima Yudiantara (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	6	6	100%	6	6	100%	1	1	100%
4	M. Said Bakhri (Komisaris Utama) (President Commissioner)	6	6	100%	6	6	100%	1	1	100%
5	Herry Ardianto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	6	6	100%	6	6	100%	1	1	100%
6	Tri Hidayat (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	6	6	100%	6	6	100%	1	1	100%

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
   a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
   b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
   c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dapat dilangsungkan dan sah berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 3 di atas ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 di atas ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada nomor 5 di atas ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
8. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

Board of Directors Meeting

Board of Directors Meeting Policy

1. A Board of Directors Meeting can be held at any time if:
   a. Deemed necessary by one or more members of Board of Directors;
   b. Upon written request from one or more members of Board of Commissioners; or
   c. At the written request of 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights.
2. Board of Directors is obliged to hold regular the Board of Directors meetings at least 1 (one) time every month and Board of Directors is obliged to hold regular joint meetings of Board of Directors with Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 (four) months.
3. The Board of Directors meeting as referred to in number 2 can be held and legally has the right to make binding decisions if attended by 1/2 (one half) of the total number of members of Board of Directors present or represented at the Meeting.
4. The attendance of members of Board of Directors at the meeting as referred to in number 3 above must be disclosed in the Company's annual report.
5. Board of Directors must schedule the meeting as referred to in number 2 above for the following year before the end of the Fiscal Year.
6. At the scheduled meeting as referred to in number 2, the meeting materials are delivered to the participants no later than 5 (five) calendar days before the meeting is held.
7. In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared as referred to in number 5 above, the meeting materials are delivered to the meeting participants no later than before the meeting is held. Summons for Board of Directors Meetings are made by members of Board of Directors who have the right to represent the Board of Directors.
8. Summons for the Board of Directors Meetings must be submitted by any means in written form to each member of Board of Directors no later than 5 (five) calendar days before the Meeting is held, without considering the Summons and the Meeting date. If all members of Board of Directors are present or represented, Summons must be given first. This is not required and the Board of Directors Meeting has the right to make legal and binding decisions.
9. The Summons must include the Meeting agenda, date, time and place of the Meeting.
10. The Board of Directors meetings are held at the Company's domicile or place of business activities or at the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at other places within the territory of the Republic of Indonesia.
11. The Board of Directors Meeting is chaired by President Director. In the event that the President Director is absent or unable to attend the Board of Directors Meeting for any reason, which does not need to be proven to third parties, one of members of Board of Directors who is present and elected at the Board of Directors Meeting may chair the Board of Directors Meeting.
12. A member of Board of Directors may be represented at a Board of Directors Meeting only by another member of Board of Directors based on a power of attorney

13. Pemungutan suara:
    a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
    b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 di atas ini dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
16. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting opinions) tersebut.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 di atas wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 di atas ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 17 dan nomor 18 di atas ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
20. Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada nomor 17 dan nomor 18 di atas ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
21. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan- keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
22. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.
23. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua

13. Voting:
    a. Each member of Board of Directors present has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) votes for each other member of Board of Directors whom he represents.
    b. Every member of Board of Directors personally in any way, either directly or indirectly have an interest in a transaction, contract or agreement proposed, in which the Company is one of the parties must state the nature interests in a Board of Directors Meeting and is not entitled to participate in voting regarding matters relating to the transaction or contract, unless the Board of Directors Meeting determines otherwise.
14. Decision making at the Board of Directors Meeting as referred to in number 1 above is carried out based on deliberation and consensus.
15. In the event that a consensus deliberation decision is not reached, the decision is made based on a majority vote, i.e. approved by more than 1/2 (one half) of members of Board of Directors present.
16. Differences of opinion (dissenting opinions) that occur in the decisions of the Board of Directors Meeting must be stated clearly in the minutes of Board of Directors meeting accompanied by the reasons for the dissenting opinions.
17. The meeting results as referred to in number 1 above must be stated in the minutes of meeting, signed by all members of Board of Directors present, and submitted to all members of Board of Directors.
18. The meeting results as referred to in number 3 above must be stated in the minutes of meeting, signed by members of Board of Directors and members of Board of Commissioners who are present, and submitted to all members the Board of Directors and Board of Commissioners.
19. In the event that there are members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners who do not sign the results of meeting as referred to in numbers 17 and 18 above, the person concerned is obliged to state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of meeting.
20. Minutes of Board of Directors' meetings as referred to in numbers 17 and 18 above must be documented by the Company.
21. Minutes of Board of Directors' Meetings are valid evidence regarding the decisions taken at the relevant Directors' Meeting, both for members of Board of Directors and for third parties.
22. Board of Directors can also take legal and binding decisions without holding a Board of Directors Meeting, provided that all members of Board of Directors have been notified in writing about the proposals in question and all members of Board of Directors have given their approval regarding the proposals submitted in writing and signed the approval. Decisions taken in this way have the same force as decisions legally taken at the Meeting.
23. The Board of Directors meetings can also be conducted via teleconference, video conference, or other electronic media which allows all participants in the Board of Directors' Meeting to see and/or hear each other directly and participate in the Board of Directors' Meeting, provided that the minutes of Meeting are made using telephone conference. or similar communication equipment will be made in writing and circulated among all members of

anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Board of Directors Meeting who participate in the meeting, to be signed. Decisions taken in this way have the same force as decisions legally taken at a Board of Directors Meeting.

24. Provisions regarding the Board of Directors Meetings that have not been regulated in these articles of association refer to OJK Regulations and other applicable laws and regulations.

Agenda Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2025, Rapat Direksi membahas agenda-agenda, antara lain sesuai di bawah ini:

Board of Directors Meeting Agenda

Throughout 2025, the Board of Directors Meeting discussed the following agendas:

No	Nomor Undangan Invitation Number	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
1	SK.02/5/1/1/KCSR/SKPR/IKT-25	6 Januari 2025 January 6, 2025	1. Evaluasi biaya 2024 dan rencana 2025 2. Evaluasi struktur organisasi 3. CEO Direction 4. Hal-hal strategis lainnya 1. 2024 Cost Review and 2025 Plan 2. Organizational Structure Review 3. CEO Direction 4. Other Strategic Matters	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management
2	SK.02/9/1/1/KCSR/SKPR/IKT-25	9 Januari 2025 January 9, 2025	Evaluasi Kinerja Perseroan periode s.d Desember 2025 Company Performance Evaluation until December 2025	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management
3	SK.02/13/2/1/SKPR/SKPR/IKT-25	14 Februari 2025 February 14, 2025	1. CEO direction 2. Kinerja operasional dan Keuangan s.d Januari 2025 3. Hal-hal strategis lainnya 1. CEO's Direction 2. Operational and Financial Performance until January 2025 3. Other Strategic Matters	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management
4.	SK.02/6/3/1/SKPR/SKPR/IKT-25	10 Maret 2025 March 10, 2025	1. Analisa dan evaluasi kinerja Perseroan s.d Februari 2025 2. *Pending matter* arahan Dekom termasuk saat mau MWT di IPCC 3. Persiapan *final report* KAP 2024 4. Persiapan RUPS tahun buku 2024 5. Persiapan lebaran (mudik, angkutan roro, kegiatan ramadan, dll) 6. Progres pembuatan AR dan SR tahun 2024 7. Hal- hal strategis lainnya 1. Analysis and evaluation of the Company's performance until February 2025 2. Pending matters regarding the Board of Commissioners' directions, including preparations for the MWT at IPCC 3. Preparation of the 2024 KAP final report 4. Preparation for 2024 fiscal year Annual GMS 5. Eid preparations (homecoming, Ro-Ro transport, Ramadan activities, etc.) 6. Progress on the preparation of the 2024 Annual Report and Annual Statement 7. Other strategic matters	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management

No	Nomor Undangan Invitation Number	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
5	SK.02/23/3/1/KCSR/SKPR/IKT-25	24 Maret 2025 March 24, 2025	Optimalisasi operasi dan penyempurnaan ICT Optimization of ICT operations and improvements	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management
6	SK.02/10/4/1/KCSR/SKPR/IKT-25	11 April 2025 April 11, 2025	1. CEO *direction* 2. Pembahasan materi rakomdir serta evaluasi kinerja operasional dan keuangan periode s.d Maret 2025 3. Hal-hal strategis lainnya 1. CEO's Direction 2. Discussion on the BoC&BoD meeting material and evaluation of operational and financial performance until March 2025 3. Other Strategic Matters	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management
7	SK.02/23/4/1/KCSR/SKPR/IKT-25	24 April 2025 April 24, 2025	1. CEO *direction* 2. Rencana investasi 2026 3. Finalisasi AR dan SR tahun buku 2024 4. Tindak lanjut serta mitigasi kemacetan Tanjung Priok 5. Alternatif penambahan lahan untuk antisipasi kepadatan YOR *Branch* Jakarta 6. Tindak lanjut rencana divestasi/likuidasi MKO MTKI 7. Hal-hal strategis lainnya 1. CEO's Direction 2. 2026 Investment Plan 3. Finalization of the Annual Report and Financial Statements for Fiscal Year 2024 4. Follow-up and mitigation of traffic congestion at Tanjung Priok 5. Alternatives for additional land to address congestion at the Jakarta YOR Branch 6. Follow-up on the divestment/liquidation plan for MKO MTKI 7. Other strategic matters	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management
8	SK.02/8/5/1/SKPR/SKPR/IKT-25	9 Mei 2025 May 9, 2025	1. Tindak lanjut *pending matter* permasalahan *Branch* Jakarta 2. Pembahasan kinerja s.d April 2025 3. Hal-hal strategis lainnya 1. Follow-up on pending matters regarding the Jakarta Branch 2. Performance review until April 2025 3. Other strategic matters	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management
9	SK.02/11/6/1/SKPR/SKPR/IKT-25	11 Juni 2025 June 11, 2025	1. CEO *direction* 2. *Pending matter* seluruh divisi 3. Hal-hal strategis lainnya 1. CEO's direction 2. Pending matters across all divisions 3. Other strategic matters	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management
10	SK.02/18/6/1/SKPR/SKPR/IKT-25	23 Juni 2025 June 23, 2025	Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis dan Penanggung Jawab *Branch* Jakarta Appointment of Acting Director of Commercial and Business Development and Head of Jakarta Branch	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management

No	Nomor Undangan Invitation Number	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
11	SK.02/16/7/1/SKPR/SKPR/IKT-25	16 Juli 2025 July 16, 2025	1. Reviu materi rakomdir 2. Reviu kinerja operasi dan keuangan s.d Juni 2025 3. Rekapitulasi isu strategis IPCC s.d Juni 2025 4. Hal-hal strategis lainnya 1. Review of BoC&BoD meeting materials 2. Review of operational and financial performance until June 2025 3. Summary of strategic IPCC issues until June 2025 4. Other strategic matters	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management
12	SK.02/11/8/1/SKPR/SKPR/IKT-25	11 Agustus 2025 August 15, 2025	1. Reviu materi Rakomdir 2. Evaluasi kinerja operasi dan keuangan s.d Juli 2025 3. Pending isu-isu dan hal-hal strategis lainnya 1. Review of BoC&BoD meeting materials 2. Evaluation of Operational and Financial Performance until July 2025 3. Pending Issues and Other Strategic Matters	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management
13	SK.02/15/8/1/SKPR/SKPR/IKT-25	15 Agustus 2025 August 15, 2025	1. Pembahasan rencana layanan transportasi BYD 2. Kebutuhan penyesuaian anggaran 2025 dari perubahan susunan Dekom dan Organ Pendukung Dekom 2025-2029 3. *Pending issues* dan hal-hal strategis lainnya 1. Discussion on BYD transportation service plans 2. Budget adjustments required for 2025 due to changes in the BoD composition and supporting organs for 2025–2029 3. Pending issues and other strategic matters	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management
14	SK.02/7/9/1/KCSR/SKPR/IKT-25	8 September 2025 September 8, 2025	1. Review materi Rakomdir periode s.d Agustus 2025 2. Evaluasi kinerja keuangan dan operasional periode Agustus 2025 3. Pending issued divisi dan hal-hal strategis lainnya 1. Review of BoC&BoD meeting materials until August 2025 2. Evaluation on financial and operational performance until August 2025 3. Pending issues and other strategic matters	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management
15	SK.02/10/9/1/SKPR/SKPR/IKT-25	10 September 2025 September 10, 2025	1. Tindak lanjut rencana Divestasi MKO MTKI 2. Hal-hal strategis lainnya 1. Follow-up on the MKO MTKI Divestiture Plan 2. Other strategic matters	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management
16	SK.02/17/9/1/SKPR/SKPR/IKT-25	17 September 2025 September 17, 2025	1. Progres MKO MTKI 2. Pembahasan PNBP 3. Pembahasan materi Rakomdir 1. MKO MTKI Progress 2. Discussion on Non-Tax State Revenue 3. Discussion on BoC&BoD Meeting Materials	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management
17	SK.02/6/10/1/SKPR/SKPR/IKT-25	10 Oktober 2025 October 10, 2025	1. Arahan Direktur Utama Pelindo 2. Kinerja s.d September 2025 3. Hal-hal strategis lainnya 1. Pelindo President Director's Directions 2. Performance through September 2025 3. Other Strategic Matters	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management

No	Nomor Undangan Invitation Number	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
18	SK.02/21/10/1/SKPR/SKPR/IKT-25	23 Oktober 2025 October 23, 2025	1. CEO *Direction* 2. Usulan RKAP 2026 3. Penerapan *Risk Management* di IPCC 4. Penilaian TAD 5. Hal-hal strategis lainnya 1. CEO's Direction 2. 2026 RKAP Proposal 3. Implementation of Risk Management at IPCC 4. TAD Assessment 5. Other Strategic Matters	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management
19	SK.02/10/11/1/SKPR/SKPR/IKT-25	10 November 2025 November 10, 2025	1. CEO *Direction* 2. Kinerja Perseroan s.d Oktober 2025 3. Hal-hal strategis lainnya 1. CEO's Direction 2. Company Performance as of October 2025 3. Other Strategic Matters	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management
20	SK.02/9/12/1/SKPR/SKPR/IKT-25	10 Desember 2025 December 10, 2025	1. *Review* kinerja Perseroan s.d November 2025 2. *Pending matters* masing-masing divisi 3. Hal-hal strategis lainnya 1. Review of the Company's Performance until November 2025 2. Pending matters for each division 3. Other strategic matters	1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi dan Teknik 3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 1. President Director 2. Director of Operations and Technical 3. Director of Finance, Human Capital and Risk Management

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi pada Rapat Internal Direksi, Rapat dengan Dewan Komisaris dan RUPS
Frequency and Attendance of Board of Directors at Board of Directors Internal Meetings, Meetings with Board

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting			Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors			RUPS GMS		
		Wajib Rapat Mandatory Meeting	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Rata-Rata Tingkat Kehadiran Average Attendance Level	Wajib Rapat Mandatory Meeting	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Rata-Rata Tingkat Kehadiran Average Attendance Level	Wajib Rapat Mandatory Meeting	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Rata-Rata Tingkat Kehadiran Average Attendance Level
1	Sugeng Mulyadi (Direktur Utama merangkap Plt. Komersial dan Pengembangan Bisnis) President Director concurrently Acting Director of Commercial and Business Development	20	20	100%	12	12	100%	1	1	100%
2	Bagus Dwipoyono (Direktur Operasi dan Teknik) Director of Operations and Technical	20	19	95%	12	12	100%	1	1	100%
3	Wing Megantoro (Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko) Director of Finance, Human Capital and Risk Management	20	20	100%	12	12	100%	1	1	100%

Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Independensi Dewan Komisaris dan Direksi menjadi elemen krusial dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan. Salah satu indikator utama untuk menilai tingkat independensi tersebut adalah keberadaan atau ketiadaan hubungan afiliasi. Dalam

Disclosure of Affiliation between Board of Directors, Board of Commissioners, and Major and/or Controlling Shareholders

The independence of Board of Commissioners and Board of Directors members is a crucial element in the implementation of Good Corporate Governance at the Company. One of the key indicators for assessing the level of such independence is the presence or absence of affiliate

rangka menjunjung prinsip transparansi, Perseroan secara terbuka menyajikan informasi terkait hubungan afiliasi yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi Lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris Lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam tabel pengungkapan hubungan afiliasi berikut, dapat diketahui bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki keterkaitan keluarga maupun hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta pemegang saham utama atau pengendali. Data tersebut disajikan dalam tabel berikut:

relationships. In order to uphold the principle of transparency, the Company openly discloses information regarding the affiliate relationships held by members of Board of Commissioners and Board of Directors, which includes:

1. Affiliation between members of Board of Directors and other members of Board of Directors;
2. Affiliation between members of Board of Directors and members of Board of Commissioners;
3. Affiliation between members of Board of Directors and Major and/or controlling Shareholders;
4. Affiliation between members of Board of Commissioners and other members of Board of Commissioners; and
5. Affiliation between members of Board of Commissioners and Major and/or controlling Shareholders.

Based on the information presented in the following table disclosing affiliations, it can be seen that none of the members of the Company's Board of Commissioners or Board of Directors have any family ties or financial relationships with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, or major or controlling shareholders. The data is presented in the following table:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Hubungan Keluarga Dengan** Family Relations With						**Hubungan Keluarga Dengan** Financial Relationship With					
		Dewan Komisaris Board of Commissioner		**Direksi** Board of Director		**Pemegang Saham** Shareholders		**Dewan Komisaris** Board of Commissioner		**Direksi** Board of Director		**Pemegang Saham** Shareholders	
		Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
M. Said Bakhri	Komisaris Utama President Commissioner	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V
Herry Ardianto	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V
Tri Hidayat	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama merangkap Plt Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently Acting Director of Commercial and Business Development	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technical	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V
Wing Megantoro	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Pengungkapan Rangkap Jabatan Direksi

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 26 tentang Jabatan Rangkap, anggota Direksi Perseroan tidak diperkenankan memegang jabatan lain pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kategori sebagai berikut:

1. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan Perseroan;
2. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; dan
3. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Informasi di bawah ini menjelaskan tentang rangkap jabatan Direksi Perseroan pada saat laporan Tahunan ini diungkapkan:

Disclosure of Board of Commissioners and Board of Directors Concurrent Positions

Disclosure of Board of Directors Concurrent Positions

Pursuant to the provisions of Law No. 5 of 2009 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, specifically Article 26 regarding Concurrent Positions, members of the Company's Board of Directors are not permitted to hold other positions in companies falling under the following categories:

1. Be in the same relevant market as the Company;
2. Has a close relationship in the field and/or type of business; and
3. Together can control the market share of certain goods and/or services which can result in monopolistic practices and/or unfair business competition.

The information below explains the concurrent positions of the Company's Board of Directors at the time this Annual Report was disclosed:

Nama Name	Jabatan di IPCC Position at IPCC	Rangkap Jabatan di IPCC Concurrent Position at IPCC	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain Position in other Companies/ Institution
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama President Director	Plt Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Acting Director of Commercial and Business	Tidak ada None
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technical	Tidak ada None	Tidak ada None
Wing Megantoro	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital and Risk Management	Tidak ada None	Tidak ada None

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 26 tentang Jabatan Rangkap, seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memegang jabatan pada perusahaan lain yang berada pada pasar yang sama dengan Perseroan, memiliki keterkaitan erat dalam bidang dan atau jenis usaha, maupun yang secara bersama-sama berpotensi menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Adapun jabatan lain yang saat ini diemban oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners Concurrent Position

Pursuant to the provisions of Law No. 5 of 2009 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition, specifically Article 26 on Concurrent Positions, no member of the Company's Board of Commissioners holds a position in another Company operating in the same market as the Company, having close ties in the field and/or type of business, or which, collectively, has the potential to control the market share of certain goods and/or services, thereby giving rise to monopolistic practices or unfair business competition. The other positions currently held by members of the Company's Board of Commissioners are as follows:

Nama Name	**Jabatan di IPCC** Position at IPCC	**Rangkap Jabatan di IPCC** Concurrent Position at IPCC	**Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain** Position in other Companies/ Institution
M. Said Bakhri	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None
Herry Ardianto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None
Tri Hidayat	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Apabila terdapat situasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) wajib menjaga integritas dalam setiap pengambilan keputusan dengan tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi manfaat ekonomi bagi Perseroan. Setiap potensi benturan kepentingan harus diungkapkan secara terbuka sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Benturan kepentingan dimaksud mencakup adanya perbedaan antara kepentingan Perseroan dan kepentingan pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, maupun pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Perseroan, termasuk pemberian perlakuan khusus kepada pihak tertentu yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dalam kondisi tertentu apabila keputusan tetap harus ditetapkan, maka keputusan tersebut harus didasarkan pada kepentingan terbaik Perseroan dengan tetap menghindari potensi kerugian atau penurunan keuntungan Perseroan.

Management of Board of Commissioners' Conflicts of Interest

In the event of a situation that could potentially give rise to a conflict of interest, members of Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Officials of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) are required to maintain integrity in every decision-making process by refraining from any actions that could harm the Company or diminish its economic benefits. Any potential conflict of interest must be disclosed openly as part of the decision-making process. Such conflicts of interest include any discrepancy between the Company's interests and the personal interests of owners, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, Executive Officials, or parties affiliated with the Company, including the granting of special treatment to certain parties that does not comply with applicable procedures and regulations. In certain circumstances where a decision must still be made, such decision must be based on the best interests of the Company while avoiding potential losses or a reduction in the Company's profits.

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Board of Commissioners Supporting Organs

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara efektif, Dewan Komisaris IPCC memperoleh dukungan komite yang terdiri atas Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Keberadaan komite-komite tersebut berperan penting dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya secara profesional dan terstruktur.

To effectively carry out its supervisory and advisory functions, the IPCC Board of Commissioners is supported by committees consisting of Secretary of Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. These committees play a vital role in helping the Board of Commissioners perform its duties in a professional and structured manner.

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) merupakan pejabat yang penunjukannya dilakukan oleh dan berada di bawah pertanggungjawaban langsung Dewan Komisaris, dengan dukungan seorang staf pada Sekretariat Dewan Komisaris. Saat ini, jabatan Sekretaris Dewan Komisaris IPCC diemban oleh Sdr. M. Fadhil Satya Syafone, yang pengangkatannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris IPCC Nomor KEP-DK/01/08/02/IPCC-25 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Secretary of Board of Commissioners

Secretary of Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) is an official appointed by and reporting directly to Board of Commissioners, supported by a staff member at the Board of Commissioners' Secretariat. Currently, this position is held by M. Fadhil Satya Syafone, whose appointment was established through IPCC Board of Commissioners Decree No. KEP-DK/01/08/02/IPCC-25 dated August 1, 2025, regarding the Appointment of Secretary of Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of Board of Commissioners Profile

M. Fadhil Satya Syafone
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioners

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, usia 26 tahun, berdomisili di Jakarta. Indonesian citizen, 26 years old, domiciled in Jakarta.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris IPCC No. KEP-DK/01/08/02/IPCC-25 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. IPCC Board of Commissioners Decree No. KEP-DK/01/08/02/IPCC-25 dated August 1, 2025, regarding Appointment of Secretary of Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S1, Sarjana Ilmu Hukum Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia (2017) • Bachelor of Laws from National University, Jakarta, Indonesia (2017)
Sertifikasi Certification	• *Certified Risk Governance Professional* (CRGP)
Riwayat Karier Work Experience	• Sekretaris Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2025 - saat ini) • Junior Advocate Attorney & Legal Consultant (2022-saat ini); • Staf Asisten Manager Keuangan, Administrasi dan Umum Perumda Pasar Jaya (2022-2025); • Tenaga Ahli Bidang Hukum Wakil Gubernur DKI Jakarta (2021-2022). • Content Creator Buku Saku Kementerian Kesehatan (2019-2020). • Secretary of Board of Commissioners PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2025 - present) • Junior Attorney & Legal Consultant (2022–present) • Assistant Manager for Finance, Administration, and General Affairs at Perumda Pasar Jaya (2022–2025) • Legal Expert for the Deputy Governor of Jakarta (2021–2022) • Content Creator for the Ministry of Health's Pocket Guide (2019–2020)

Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk undangan rapat dan bahan rapat yang disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan pihak lain yang diundang.

Duties and Responsibilities

Secretary of Board of Commissioners is tasked with carrying out activities to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties, including:

1. Prepare meetings, including meeting invitations and meeting materials which are submitted to the entire Board of Commissioners and other invited parties.

2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.
4. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat, maupun dokumen lainnya.
5. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.
6. Menyusun rancangan laporan Dewan Komisaris.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
9. Mengoordinasikan anggota Komite Dewan Komisaris, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
10. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Pendidikan/Pelatihan dan Pengembangan Sekretaris Dewan Komisaris

Sebagai upaya meningkatkan kapabilitas, sepanjang tahun 2025 Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalani serangkaian program pendidikan dan/atau pelatihan. Adapun pelatihan yang telah dijalani, antara lain:

2. Prepare minutes of the Board of Commissioners meetings in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
3. Provide data/information required by the Board of Commissioners and committees within the Board of Commissioners.
4. Administer Board of Commissioners documents, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents.
5. Prepare a draft work plan and budget for Board of Commissioners.
6. Prepare a draft report for Board of Commissioners.
7. Ensure the Board of Commissioners complies with statutory regulations and implements GCG principles.
8. Provide information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested.
9. Coordinate members of Board of Commissioners Committee, if necessary in order to expedite the Board of Commissioners duties.
10. As a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.

Education/Training and Development of Secretary of Board of Commissioners

As part of efforts to enhance capabilities, throughout 2025 Secretary Board of Commissioners has participated in a series of educational and/or training programs. The training programs completed include:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Waktu Penyelenggaraan** Date	**Penyelenggara** Organizer
Dian Vegawati	*Workshop*	Workshop Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth bersama Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP dan Kukuh Workshop on Building Capacity and Infrastructure for Sustainable Growth with Bernardin Nainggolan, S.T., M.M., FRM, CRMP, CRGP, CRPP, and Kukuh	5-6 Februari 2025 February 5–6, 2025	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
M. Fadhil Satya Syafone	Pelatihan *Certified Risk Governance Professional* (CRGP) Training on Certified Risk Governance Professional (CRGP)	Certified Risk Governance Professional (CRGP)	Desember 2025 December 2025	PT RAP Asia Consulting

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2025

Sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan beragam aktivitas yang selaras dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris;
2. Koordinasi dengan Direksi dan Komite Pendukung;
3. Pemantauan Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan;
4. Pelaporan dan Dokumentasi;
5. Fasilitasi Program Pengembangan dan Pelatihan;
6. Pengelolaan Administrasi; dan
7. Menghadiri Acara dan Forum Resmi.

Implementation of Secretary of Board of Commissioners Duties in 2025

Throughout the period from January to December 2025, Secretary of Board of Commissioners carried out various activities in line with his functions and responsibilities to support the effective performance of the Board of Commissioners' duties, including the following:

1. Organizing Board of Commissioners Meetings
2. Coordination with the Board of Directors and Supporting Committees
3. Monitoring Compliance and Corporate Governance
4. Reporting and Documentation
5. Facilitation of Development and Training Programs
6. Administration Management
7. Attending Official Events and Forums

Komite Audit

Komite Audit berperan sebagai perangkat pendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sistem pengendalian internal, kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, keandalan dan kualitas laporan keuangan, serta efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal. Komite Audit berkontribusi dalam memperkuat penerapan mekanisme *checks and balances* di lingkungan Perseroan guna menjaga dan melindungi kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya. Komite Audit Perseroan pertama kali dibentuk pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor DK/30/03/03/IKT-15 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 70; Tambahan Lembaran Negara No. 4197);
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (lembaran Negara Tahun 2007 No. 106; Tambahan Lembaran Negara 4756);
3. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER 12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-06/ MBU/04/2021 yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain (selain yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri dimaksud) kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit;
6. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008618.AH.01.02. Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
10. Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal No. 09/KEPDK/14/05/01/IKT-18 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua serta Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal tanggal 14 Mei 2018;

Audit Committee

Audit Committee serves as a support mechanism for Board of Commissioners in carrying out its supervisory function, particularly regarding the implementation of internal control systems, the Company's compliance with laws and regulations, reliability and quality of financial statements, and the effectiveness of internal audit functions. Audit Committee contributes to strengthening the implementation of checks and balances mechanisms within the Company to safeguard the interests of Shareholders and other Stakeholders. The Company's Audit Committee was first established in 2015 pursuant to Board of Commissioners' Resolution No. DK/30/03/03/IKT-15 regarding the Formation and Appointment of Chairman and Members of Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal.

Legal Basis

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of 2003 No. 70; Supplement to State Gazette No. 4197);
2. Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of 2007 No. 106; Supplement to State Gazette 4756);
3. Government Regulation No. 101 of 2021 dated 1 October 2021 concerning the Merger of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III and the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV into the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II;
4. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, concerning Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises;
5. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs for Board of Commissioners of State-Owned Enterprises as amended by the Minister of State-Owned Enterprises of Republic of Indonesia Regulation No. PER-06/MBU/04/2021 which states that Board of Commissioners may provide other assignments (other than those stipulated in the Ministerial Regulation) to Audit Committee as stipulated in the Audit Committee Charter;
6. Secretary of the Ministry of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Implementation of Good Corporate Governance in SOE;
7. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
8. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of Audit Committee;
9. The Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Decree No. AHU-0008618.AH.01.02. 2018 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
10. The Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Decree No. 09/KEPDK/14/05/01/IKT-18 concerning Dismissal and Appointment of Chairperson and Members of Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal dated May 14, 2018;

11. Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk No. 17/KEPDK/X/IKT-2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
12. Salinan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-5/MBU/09/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara.

Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit Perseroan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 13/KEP-DK/XII/IKT2018 tanggal 19 Desember 2018 dan selanjutnya disesuaikan dengan perkembangan melalui pemutakhiran yang ditetapkan pada 24 November 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor DK/24/11/04/IPCC-22 tentang Pemutakhiran Piagam Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Piagam tersebut berfungsi sebagai acuan kerja yang bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Audit dalam menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawabnya, khususnya terkait pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Perseroan. Piagam Komite Audit Perseroan mengatur ketentuan pokok yang mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Landasan Hukum;
2. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite;
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komite;
4. Persyaratan Keanggotaan;
5. Rapat Komite;
6. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite;
7. Akses Kerahasiaan Informasi;
8. Rencana Kerja dan Anggaran;
9. Penghasilan Anggota Komite;
10. Pendidikan dan Tenaga Penunjang; dan
11. Penilaian Kinerja.

Perseroan secara rutin mengevaluasi Piagam Komite Audit untuk memastikan kesesuaiannya dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi dan tantangan bisnis yang berkembang, serta arah dan sasaran usaha. Apabila diperlukan, piagam tersebut dapat disesuaikan atau diperbarui agar tetap relevan dan efektif sebagai pedoman pelaksanaan tugas Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Sesuai dengan Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal (SPI) dan audit eksternal;
2. Memantau dan mengkaji hasil pelaporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal;
3. Meninjau laporan audit dan bersama Dewan Komisaris memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan, pengendalian, kecurangan (*fraud*), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta SPI;

11. The Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Decree No. 17/KEPDK/X/IKT-2020 dated October 1, 2020 concerning Determination of Chairperson and Members of Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
12. Copy of the Minister of State-Owned Enterprises of Republic of Indonesia Regulation No. PER-5/MBU/09/2022 dated September 1, 2022 concerning Implementation of Risk Management in StateOwned Enterprises.

Audit Committee Charter

The Company's Audit Committee Charter was established by Board of Commissioners Resolution No. 13/KEP-DK/ XII/IKT2018 dated December 19, 2018, and was subsequently updated to reflect developments through an amendment adopted on November 24, 2022, as set forth in Board of Commissioners' Resolution No. DK/24/11/04/IPCC-22 regarding Amendment to Audit Committee Charter of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

The Charter serves as a binding guideline for all members of Audit Committee in carrying out their roles, duties, and responsibilities, particularly regarding compliance with statutory regulations and the implementation of internal control systems within the Company. The Company's Audit Committee Charter sets forth key provisions covering, among other things, as follows:

1. Legal Framework
2. Procedures for Appointment and Dismissal of Committee Members
3. Duties, Responsibilities and Authority of the Committee
4. Membership Requirements
5. Committee meeting
6. Report on the Implementation of Committee Duties
7. Access to Confidentiality of Information
8. Work Plan and Budget
9. Income of Committee Members
10. Education and Supporting Personnel
11. Performance Appraisal

The Company regularly reviews the Audit Committee Charter to ensure its alignment with changes in laws and regulations, evolving business conditions and challenges, as well as the Company's strategic direction and objectives. If necessary, this charter may be revised or updated to remain relevant and effective as a guide for the Audit Committee in carrying out its duties.

Audit Committee Duties and Responsibilities

In accordance with the Company's Audit Committee Charter, Audit Committee duties and responsibilities are as follows:

1. Monitor and review the effectiveness of implementation of Internal Audits and external audits;
2. Monitor and review the results of financial reporting audited by external auditors;
3. Review audit reports and together with Board of Commissioners ensure the Board of Directors takes necessary corrective actions quickly to overcome control weaknesses, fraud, compliance issues with policies and laws and regulations as well as Internal Audit;

4. Mengevaluasi kinerja Audit Internal;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Audit Internal (PKPT);
6. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya;
7. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
9. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
11. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
13. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan kepada publik;
14. Membantu Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris;
15. Tugas Khusus dari Dewan Komisaris.

Kriteria Komite Audit

Perseroan menjamin bahwa keanggotaan Komite Audit telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Susunan Komite Audit saat ini didukung oleh kompetensi dan pengalaman profesional di bidang akuntansi publik, keuangan, serta keahlian yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan. Setiap anggota Komite Audit wajib memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit, antara lain sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

4. Evaluate Internal Audit performance;
5. Provide recommendations to Board of Commissioners regarding the preparation of audit plan, scope and SPI budget (PKPT);
6. Provide recommendations regarding improvements to the internal control system and its implementation;
7. Reviewing financial information that the Company will issue to the public and/or the authorities, including financial reports, projections and other reports related to the financial information of Issuers or Public Companies;
8. Reviewing compliance with laws and regulations relating to the Company's activities;
9. Provide independent opinions in the event of differences of opinion between management and accountants regarding services provided;
10. Provide recommendations to Board of Commissioners regarding the appointment of accountants based on independence, scope of assignment, and service fees;
11. Reviewing complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes;
12. Review and provide advice to Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Company;
13. Ensure that there are satisfactory review procedures for all information released by the Company to the public;
14. Assist the Board of Commissioners and other tasks assigned by Board of Commissioners;
15. Special Duties from Board of Commissioners.

Audit Committee Criteria

The Company guarantees that the Audit Committee's membership meets all requirements and provisions set forth in applicable regulations. The current composition of Audit Committee is supported by professional competence and experience in public accounting, finance, and expertise relevant to the Company's business activities. Each member of Audit Committee must meet the qualifications and requirements as stipulated in the Audit Committee Charter, including the following:

1. Must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the field of work, and be able to communicate well;
2. Must understand financial reports, Company business, especially those related to services or business activities of Issuers or Public Companies, audit processes, risk management, and laws and regulations in the Capital Market sector as well as other related laws and regulations;
3. Must comply with the Audit Committee Code of Conduct established by the Company;
4. Willing to continuously improve competence through education and training;
5. Must have at least 1 (one) member with an educational background and expertise in accounting and finance;
6. Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Services Firm or other party providing insurance services, noninsurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company concerned within the last 6 (six) months;

7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung Perseroan;
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
10. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
12. Memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

7. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for Independent Commissioners;
8. Does not own shares directly or indirectly in the Company;
9. In the event that a member of Audit Committee acquires Company shares either directly or indirectly as a result of a legal incident, the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after acquiring the shares;
10. Does not have any direct or indirect business relationships related to the Company's business activities;
11. Does not have any direct or indirect business relationships related to the Company's business activities;
12. Have an adequate understanding of the principles of Good Corporate Governance.

Masa Jabatan dan Komposisi

Term of Office and Composition

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jabatan Lain di Perseroan** Other Positions in the Company	**Dasar Hukum Penunjukan** Legal Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode** Period
Tri Hidayat	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-DK/01/07/04/IPCC-25 tanggal 1 Juli 2025 tentang Penetapan Susunan Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners Decree No. KEP-DK/01/07/04/IPCC-25 dated July 1, 2025, concerning Establishment of Audit Committee Composition of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following term of office as an Independent Commissioner	Pertama First
Kurniawan Eko Saputro	Anggota Independen Independent Member	Tidak ada None	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-DK/30/04/06/IPCC-24 tanggal 30 April 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners Decree No. KEP-DK/30/04/06/IPCC-24 dated April 30, 2024, concerning Appointment of Members of Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	30 April 2024 – Sekarang April 30, 2024 - Present	Pertama First

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile

Tri Hidayat

Ketua Komite Audit/Komisaris Independen
Chairman of Audit Committee/Independent Commissioner

Profil Lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris.
The complete profile has been described in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Sub-chapter.

Kurniawan Eko Saputro

Anggota Independen Komite Audit
Independent Member of Audit Committee

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, usia 35 tahun, domisili di Tangerang Selatan Indonesian citizen, 35 years old, domiciled in South Tangerang
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-DK/30/04/06/IPCC-2024 tanggal 30 April 2024 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners Decree No. KEP-DK/30/04/06/IPCC-2024 dated April 30, 2024, concerning Appointment of Chairman and Members of Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak ada None
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknologi Pertanian dari Universitas Brawijaya (2016) Bachelor of Agricultural Technology from Brawijaya University (2016)
Sertifikasi Certification	• Qualified Risk Governance Professional (QRGP) dengan No. 70209 1120 0022444 2024. • Certified Investment Banker (CIB) dengan No. 66123 2413 0014421 2024 • Manajer Proyek (M.Pr) dengan No. 0000545 2024 • Qualified Risk Governance Professional (QRGP) No. 70209 1120 0022444 2024 • Certified Investment Banker (CIB) No. 66123 2413 0014421 2024 • Project Manager (M.Pr) with No. 0000545 2024
Riwayat Karier Work Experience	• Sekretaris Perusahaan PT Nanotech Indonesia Global Tbk (2021 - 2022) • Kepala Manajemen Proyek di Nano Center Indonesia (2016 – 2020) • Corporate Secretary of PT Nanotech Indonesia Global Tbk (2021 - 2022) • Head of Project Management at Nano Center Indonesia (2016 - 2020)

Independensi Anggota Komite

Komite Audit diwajibkan bertindak secara profesional, mandiri, dan berlandaskan itikad baik. Keberadaan Komite Audit dimaksudkan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penelaahan serta pengawasan atas kualitas proses pelaporan keuangan, pelaksanaan Audit Internal dan Audit Eksternal, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Seluruh anggota Komite Audit pada periode pelaporan telah memenuhi ketentuan independensi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 55/2015. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemenuhan aspek independensi masing-masing anggota Komite Audit disajikan dalam tabel berikut ini:

Independence of Committee Members

Audit Committee is obliged to act professionally, independently, and in good faith. Audit Committee is intended to assist the Board of Commissioners in reviewing and supervising the quality of financial reporting processes, implementation of Internal and External Audits, as well as the implementation of Good Corporate Governance to ensure compliance with applicable regulations and procedures.

All members of Audit Committee during the reporting period have met the independence requirements as stipulated in POJK No. 55/2015. Further details regarding the fulfillment of independence requirements for each member of Audit Committee are presented in the following table:

Aspek Independensi Independence Aspect	Tri Hidayat	Kurniawan Eko Saputro
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	V	V
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationships in the Company, subsidiaries or affiliated Companies	V	V
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Has no share ownership relationship in the Company	V	V
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Audit Committee	V	V

Rapat Komite Audit

Kebijakan

Mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/2015, Komite Audit melaksanakan rapat secara terjadwal dan berkesinambungan. Frekuensi rapat tersebut ditetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap periode 3 (tiga) bulan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif.

Audit Committee Meeting

Policy

In accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 55/2015, Audit Committee holds scheduled and regular meetings. The frequency of these meetings is set at a minimum of 1 (one) time every 3 (three) months as part of the implementation of effective supervisory functions.

Pelaksanaan Rapat

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit secara aktif melaksanakan rapat sebanyak 18 kali. Partisipasi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat-rapat tersebut disajikan secara rinci pada tabel berikut:

Meeting Implementation

Throughout 2025, Audit Committee actively held 18 meetings. The participation and attendance level of each member in these meetings are presented in detail in the following table:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Wajib Rapat** Total Mandatory Meetings	**Kehadiran** Attendance	**Tingkat Kehadiran (%)** Attendance Level
Abdur Rahim Hasan*	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	8	8	100%
Tri Hidayat**	Ketua Chairman	10	10	100%
Kurniawan Eko Saputro	Anggota Independen Independent Member	18	18	100%
Noval Ali Abbas***	Anggota Independen Independent Member	13	13	100%

*Berhenti menjabat sejak 17 Juni 2025.
**Menjabat sejak 17 Juni 2025.
***Berhenti menjabat sejak 25 September 2025
*Stop serving since June 17, 2025.
**Has been serving since June 17, 2025.
***Stop serving since September 25, 2025

Pada rapat yang diselenggarakan selama tahun 2025, Komite Audit melakukan pembahasan terkait agenda-agenda berikut ini:

At meetings held throughout 2025, Audit Committee discussed the following agendas:

Tanggal Rapat Meeting Date	**Agenda Rapat** Meeting Agendas	**Peserta** Participants
15 Januari 2025 January 15, 2025	Pembahasan awal laporan keuangan unaudited FY 2024 dan evaluasi kinerja operasional terminal kendaraan Preliminary discussion on unaudited financial statements for 2024 FY and evaluation of vehicle terminal operational performance	KES, NAA
30 Januari 2025 January 30, 2025	*Review* rencana audit eksternal FY 2024 dan koordinasi dengan auditor independen Review of 2024 FY external audit plan and coordination with independent auditors	KES, NAA
20 Februari 2025 February 20, 2025	Evaluasi temuan SPI Q4 2024 dan tindak lanjut rekomendasi audit internal Evaluation of 2024 Q4 internal audit findings and follow-up on internal audit recommendations	KES, NAA
12 Maret 2025 March 12, 2025	Pembahasan laporan keuangan audited FY 2024 sebelum penyampaian kepada Dewan Komisaris Discussion on the audited financial statements for 2024 FY prior to submission to Board of Commissioners	KES, NAA
27 Maret 2025 March 27, 2025	*Review* manajemen risiko operasional terminal dan risiko logistik kendaraan impor/ekspor Review of operational risk management at terminals and logistics risks for imported/exported vehicles	KES, NAA
23 April 2025 April 23, 2025	Evaluasi realisasi RKAP Q1 2025 dan analisis deviasi kinerja keuangan Evaluation of realization of 2025 RKAP First Quarter and analysis of financial performance deviations	KES, NAA
14 Mei 2025 May 14, 2025	*Review* kepatuhan terhadap regulasi kepelabuhanan, kepabeanan, dan standar keselamatan operasional Review of compliance with port regulations, customs regulations, and operational safety standards	KES, NAA
29 Mei 2025 May 29, 2025	Pembahasan efektivitas pengendalian internal pada sistem operasional terminal kendaraan Discussion on the effectiveness of internal controls in the vehicle terminal operational system	KES, NAA
18 Juni 2025 June 18, 2025	Pengenalan anggota baru Komite Audit dan pembahasan laporan kinerja semester I Introduction of new members of Audit Committee and discussion on the first semester performance report	TH, KES, NAA
3 Juli 2025 July 3, 2025	Evaluasi implementasi manajemen risiko dan mitigasi risiko rantai pasok kendaraan Evaluation of the implementation of risk management and risk mitigation in the vehicle supply chain	TH, KES, NAA
24 Juli 2025 July 24, 2025	*Review* laporan keuangan semester I 2025 dan kesiapan audit *review* terbatas Review of the first-half 2025 financial statements and readiness for the limited review	TH, KES, NAA
14 Agustus 2025 August 14, 2025	Pembahasan temuan audit internal semester I dan *monitoring* tindak lanjut manajemen Discussion on the first-half internal audit findings and monitoring of management's follow-up actions	TH, KES, NAA
28 Agustus 2025 August 28, 2025	Evaluasi pengawasan proyek investasi dan pengembangan fasilitas terminal kendaraan Evaluation of investment project supervision and vehicle terminal facility development	TH, KES, NAA
18 September 2025 September 18, 2025	*Review* laporan kinerja operasional Q3 2025 dan evaluasi efektivitas SPI Review of 2025 Third Quarter operational performance reports and evaluation of SPI effectiveness	TH, KES

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Participants
9 Oktober 2025 October 9, 2025	Pembahasan risiko strategis dan proyeksi kinerja keuangan hingga akhir tahun Discussion on strategic risks and financial performance projections through the end of the year	TH, KES
30 Oktober 2025 October 30, 2025	*Review* rencana kerja audit internal tahun 2026 Review of the 2026 internal audit work plan	TH, KES
20 November 2025 November 20, 2025	Evaluasi awal penyusunan RKAP 2026 dan asumsi bisnis utama Preliminary evaluation of the 2026 Budget Plan (RKAP) and key business assumptions	TH, KES
11 Desember 2025 December 11, 2025	Evaluasi kinerja Komite Audit 2025 dan penyusunan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Evaluation of the Audit Committee's 2025 performance and preparation of recommendations for Board of Commissioners	TH, KES

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2025

Komite Audit menjalankan fungsi pendukung pengawasan Dewan Komisaris yang diwujudkan melalui kegiatan penelaahan atas berbagai informasi keuangan yang diterbitkan oleh Perseroan, termasuk Laporan Keuangan, Laporan Manajemen, serta proyeksi dan data keuangan lainnya. Selain itu, Komite Audit turut memastikan bahwa kebijakan dan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menekan potensi pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan. Komite Audit juga memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait upaya percepatan dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan yang muncul di tingkat manajemen. Adapun pelaksanaan kegiatan Komite Audit sepanjang tahun 2025, yang mengacu pada rencana kerja Komite Audit, diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Komite Audit;
2. Memberikan Evaluasi/Arahan/Tanggapan/Persetujuan;
3. Melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal;
4. Pengawasan terhadap regulasi dan tata kelola perusahaan;
5. Koordinasi dengan auditor eksternal dan internal atas hasil audit;
6. Peningkatan wawasan dan profesionalisme;
7. Melaksanakan kunjungan kerja; dan
8. Rekomendasi dan laporan berkala kepada Dewan Komisaris.

Report on the Implementation Audit Committee's Duties in 2025

Audit Committee performs a supervisory support function for Board of Commissioners, which is carried out through the review of various financial information published by the Company, including Financial Statements, Management Reports, as well as financial projections and other data. In addition, Audit Committee ensures that internal control policies and systems are implemented in accordance with applicable laws and regulations to minimize potential violations that could harm the Company. Audit Committee also provides input to Board of Commissioners regarding efforts to expedite the handling and resolution of issues arising at the management level. Audit Committee's activities throughout 2025, based on its work plan, are outlined as follows:

1. Implementation of Coordination Meetings
2. Provide evaluation/direction/response/approval
3. Supervising internal controls
4. Supervising regulations and Corporate governance
5. Coordinating with external and internal auditors on audit results
6. Enhancing insight and professionalism
7. Carrying out work visits
8. Making recommendations and periodic reports to Board of Commissioners

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Komite Audit Tahun 2025

Kebijakan

Perseroan senantiasa mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota Komite Audit dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan tugas, khususnya dalam fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, serta kinerja audit internal dan eksternal. Upaya tersebut dilaksanakan melalui kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang diatur dalam Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor HK.56/4/5/IKT-17 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan dalam memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Materi pengembangan difokuskan pada pendalaman aspek audit, pemahaman terhadap regulasi dan ketentuan dari regulator, serta pembaruan pengetahuan terkait isu-isu mutakhir di bidang akuntansi, keuangan, dan manajemen risiko. Berlandaskan pendekatan tersebut, anggota Komite Audit diharapkan senantiasa memiliki kemampuan yang memadai untuk

Audit Committee Competency Development Program in 2025

Policy

The Company consistently strives to improve the capacity and competence of members of Audit Committee to support the effective performance of their duties, particularly in overseeing financial reporting processes, internal control systems, and the performance of internal and external audits. These efforts are carried out through human capital development policies outlined in PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Directors Regulation No. HK.56/4/5/IKT-17 dated June 15, 2017, regarding Guidelines for Human Capital Development within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

These training and competency development activities are part of the Company's commitment to strengthening the implementation of Good Corporate Governance. The development materials focused on deepening knowledge of audit aspects, understanding regulations and requirements from regulators, and updating knowledge regarding current issues in the fields of accounting, finance, and risk management. Based on this approach, members of Audit Committee are expected to always possess adequate capabilities to carry out

menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, independen, dan bernilai tambah bagi Perseroan.

their supervisory functions professionally, independently, and in a manner that adds value to the Company.

Pelaksanaan Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Implementation of Training and/or Competency Development in 2025

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Audit Tahun 2025
Audit Committee Training and Competency Development in 2025

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Waktu Penyelenggaraan** Implementation Time	**Penyelenggara** Organizer
Tri Hidayat (Ketua) Chairman	Informasi pengembangan kompetensi Ketua Komite Audit Tri Hidayat telah disampaikan pada Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Information on the competency development of Chairman of Audit Committee, Tri Hidayat, has been contained in the Competency Development of Board of Commissioners			
Kurniawan Eko Saputro Z. (Anggota) Member	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Certification in Audit Committee Practices (CACP) Batch 57 Certification in Audit Committee Practices (CACP) Batch 57	20-22 & 26 Mei 2025 May 20–22 & 26, 2025	Pers. Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Audit Committee Association

Penilaian dan Evaluasi Atas Kinerja Komite Audit Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris memberikan penilaian "Sangat Baik" atas kinerja Komite Audit. Penilaian tersebut didasarkan pada tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan Komite Audit, yang realisasinya dapat dilihat melalui uraian capaian kinerja sebagaimana disajikan di bawah ini:

Assessment and Evaluation of Audit Committee's Performance in 2025

Throughout 2025, Board of Commissioners rated the Audit Committee's performance as "Very Good" based on the extent to which the programs and activities outlined in the Audit Committee's annual work plan were implemented, as evidenced by the performance achievements detailed below:

No	**Kriteria Penilaian** Assessment Criteria	**Status Pelaksanaan** Implementation Status
1	Mengadakan rapat koordinasi (internal, Dewan Komisaris, SPI dan Unit Terkait/Direksi dan manajemen Perseroan). Hold Coordination Meetings (Internal, Board of Commissioners, SPI and Related Units/Board of Directors and management of PT IPCC Tbk)	√
2	Melakukan rapat koordinasi, memberikan saran dan masukan serta telaah RJPP/RKAP 2026. Conduct coordination meetings, provide suggestions and input as well as review the 2026 RJPP/RKAP	√
3	Membuat laporan evaluasi atas kinerja Perseroan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Make evaluation reports on the Company's performance on a monthly, quarterly, semi-annual, and annual	√
4	Menyusun Tanggapan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Tahun Buku 2024 yang telah diaudit sebagai dasar penyampaian kinerja Perseroan tahun buku 2024 ke pemegang saham (RUPS). Prepare a response to the audited Financial Responsibility Report for 2024 fiscal year as a basis for conveying the Company's performance for 2024 fiscal year to shareholders (GMS)	√
5	Melakukan pengawasan audit, pemantauan temuan audit dan melakukan evaluasi atas kinerja auditor eksternal. Perform audit supervision, monitor audit findings and evaluate the performance of external auditors	√
6	Mengusulkan calon auditor eksternal kepada Dewan Komisaris. Proposing prospective external auditors to the Board of Commissioners	√
7	Memberikan saran dan masukan atas PKPT SPI periode 2025. Provide suggestions and input on PKPT SPI for 2025 period	√
8	Berkoordinasi dengan SPI terkait pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam rangka peningkatan efektivitas pengendalian internal Perseroan. Coordinate with SPI regarding the implementation of internal control system in order to increase the effectiveness of the Company's internal control.	√
9	Berkoordinasi dengan SPI untuk melakukan monitoring tindak lanjut hasil temuan audit. Coordinate with SPI to carry out follow-up monitoring of audit findings	√
10	Membuat laporan evaluasi efektivitas pengendalian internal PT IKT Tbk tahun 2025. Create an evaluation report on the effectiveness of PT IKT Tbk's internal control in 2025	√
11	Membuat laporan evaluasi kinerja SPI PT IKT Tbk tahun 2025. Create a SPI performance evaluation report for PT IKT Tbk in 2025	√
12	Memberikan saran dan masukan terkait pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Provide advice and input related to financial reporting in accordance with applicable Financial Accounting Standards	√

No	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Status Pelaksanaan Implementation Status
13	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit 2026. Prepare the 2026 Audit Committee Work Plan and Budget	√
14	Penyusunan Laporan realisasi rencana kerja Komite Audit 2025. Preparation of a report on the realization of 2025 Audit Committee work plan	√
15	Mengikuti seminar/*workshop*/*conference*/pelatihan/sertifikasi dalam meningkatkan kompetensi komite audit. Participating in seminars/workshops/conferences/training/certification to improve audit committee competency	√
16	Melakukan kunjungan kerja dalam rangka mendapatkan informasi terkait pengembangan usaha Perseroan maupun dalam rangka studi banding/*benchmark*. Conduct work visits in order to obtain information related to the Company's business development as well as in the context of comparative/benchmark studies	√
17	Melakukan pengawasan kepatuhan Direksi terhadap Perjanjian dengan Pihak Ketiga. Supervise the Board of Directors' compliance to Agreements with Third Parties	√
18	Menyusun Kajian atas usulan Direksi yang memerlukan tanggapan/persetujuan Dewan Komisaris atau kajian atas hal-hal tertentu sesuai dengan arahan Dewan Komisaris. Preparing reviews of proposals from Board of Directors that require Board of Commissioners' response/approval or reviews of certain matters as directed by the Board of Commissioners	√

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 16/KEP-DK/VIII/IKT-2020 tertanggal 20 Agustus 2020. Keberadaan Komite merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat penerapan manajemen risiko serta meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Komite Pemantau Manajemen Risiko berperan mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya terkait identifikasi, pengelolaan, dan pengendalian risiko yang dihadapi Perseroan.

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 13/KEP-DK/XII/IKT2018 tanggal 19 Desember 2018. Dokumen tersebut menjadi acuan utama sekaligus pedoman kerja resmi bagi Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya.

Sebagai pedoman yang bersifat mengikat, piagam ini wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko guna memastikan pelaksanaan pengawasan risiko dilakukan secara konsisten, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan memuat ketentuan pokok yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Landasan Hukum;
2. Pengangkatan dan Pemberhentian;
3. Tugas Pokok;
4. Kewenangan;
5. Rapat Komite;
6. Tanggung Jawab;
7. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite;
8. Akses Kerahasiaan Informasi;
9. Rencana Kerja dan Anggaran;
10. Penghasilan Anggota Komite;
11. Pengembangan/Peningkatan kapasitas;
12. Penggunaan Tenaga ahli;

Risk Management Monitoring Committee

The establishment of Risk Management Monitoring Committee was approved by Board of Commissioners through the Company's Board of Commissioners' Decree Number 16/KEP-DK/VIII/IKT-2020 dated August 20, 2020. The existence of this Committee is part of the Company's commitment to strengthening the implementation of risk management and improving the quality of implementation of Good Corporate Governance principles.

Risk Management Monitoring Committee supports the Board of Commissioners in carrying out its supervisory functions, particularly regarding the identification, management, and control of risks faced by the Company.

Risk Management Monitoring Committee Charter

The Company's Risk Management Monitoring Committee Charter was established pursuant to Board of Commissioners Decree No. 13/KEP-DK/XII/IKT2018 dated December 19, 2018. This document serves as the primary reference and official operating guideline for Risk Management Monitoring Committee in carrying out its functions, duties, and responsibilities.

As a binding guideline, this charter must be adhered to by all members of Risk Management Monitoring Committee to ensure that risk oversight is carried out consistently, in a structured manner, and in accordance with applicable regulations. The Company's Risk Management Monitoring Committee Charter contains key provisions governing, among other things, the following matters:

1. Legal Framework
2. Appointment and Dismissal
3. Main Duties
4. Authority
5. Committee Meeting
6. Responsibility
7. Report on the Implementation of Committee Duties
8. Access to Confidentiality of Information
9. Work Plan and Budget
10. Income of Committee Members
11. Capacity development/increasing
12. Use of experts

13. Penilaian Kinerja;
14. Hubungan Kelembagaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite berfungsi mendukung Dewan Komisaris untuk memastikan pengelolaan Perseroan berjalan secara efektif, serta proses pengawasan dilaksanakan secara objektif, profesional, dan independen.

Ruang lingkup tugas dan kewenangan Komite Pemantau Manajemen Risiko telah ditetapkan secara jelas dalam Piagam Komite. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Komite dalam melaksanakan tanggung jawabnya, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko, dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan Manajemen Risiko Perseroan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Perseroan;
4. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan Manajemen Risiko;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;
6. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
7. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS/ Pemilik Modal.

Kriteria Komite Pemantau Manajemen Risiko

Perseroan menegaskan bahwa keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko telah disusun dengan mengacu pada ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Setiap anggota yang ditunjuk wajib memenuhi kualifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam Piagam Komite, sehingga pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan risiko dapat berjalan secara optimal. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko diatur lebih lanjut sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik, pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup serta sertifikasi di bidang manajemen risiko risiko.
2. Memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman di bidang manajemen risiko dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai bisnis secara umum dan Perseroan secara khusus.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
4. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.

13. Performance Appraisal
14. Institutional Relations

Risk Management Monitoring Committee Duties and Responsibilities

Risk Management Monitoring Committee operates under the coordination of and reports directly to Board of Commissioners. The Committee serves to support the Board of Commissioners in ensuring that the Company is managed effectively and that supervisory processes are carried out objectively, professionally, and independently.

The scope of duties and authority of Risk Management Monitoring Committee has been clearly defined in the Committee Charter. These provisions serve as the basis for Committee in carrying out its responsibilities, which are further outlined as follows:

1. Monitor and review Risk Management reports and other reports related to the implementation of Risk Management;
2. Monitor and evaluate the suitability of implementation of the Company's Risk Management policies;
3. Provide recommendations to Board of Commissioners on matters that support the effectiveness of implementation of Risk Management and the conformity of the Company's Risk Management policies;
4. Assist the Board of Commissioners in evaluating and approving Risk Management policies;
5. Assist the Board of Commissioners in evaluating the responsibility of Board of Directors for implementing Risk Management policies;
6. Assist the Board of Commissioners in evaluating and deciding on requests from Board of Directors relating to transactions that require the Board of Commissioners approval;
7. Assist the Board of Commissioners in carrying out supervision over the implementation of other risk management functions in accordance with the provisions of statutory regulations, articles of association and/or resolutions of the GMS/Capital Owners.

Risk Management Monitoring Committee Criteria

The Company confirms that membership of Risk Management Monitoring Committee has been established in accordance with applicable regulations and requirements. Each appointed member must meet specific qualifications as stipulated in the Committee Charter, so that risk monitoring and oversight duties can be carried out optimally. The requirements that must be met by members of Risk Management Monitoring Committee are further specified as follows:

1. Have good integrity, sufficient knowledge and work experience as well as certification in the field of risk management.
2. Have a balance of expertise and experience in the field of risk management with a broad background understanding of business in general and the Company in particular.
3. Have sufficient knowledge to read and understand financial reports and risk management policy implementation reports.
4. Have no personal interests/relationships that could have a negative impact or conflict of interest on the Company.

5. Mampu berkomunikasi secara efektif.
6. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
7. Independen, objektif dan profesional.
8. Tidak memiliki hubungan kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris dan Direksi.
9. Memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

5. Able to communicate effectively.
6. Can provide sufficient time to complete the duties.
7. Independent, objective and professional.
8. Has no familial relationship through marriage or descent up to the second degree, either horizontally or vertically with Board of Commissioners and Board of Directors.
9. Have an adequate understanding of the principles of Good Corporate Governance.

Masa Jabatan dan Komposisi

Perseroan menetapkan ketentuan masa jabatan bagi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun. Bagi ketua dan/atau anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris, masa penugasan dalam Komite tidak dapat melampaui masa jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris. Setelah berakhirnya masa jabatan tersebut, anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko masih dimungkinkan untuk diangkat kembali, namun hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Term of Office and Composition

The Company has established term of office provisions for members of Risk Management Monitoring Committee, with a maximum term of 5 (five) years. For the chairman and/or members of Committee who are members of Board of Commissioners, their term of service on Committee may not exceed their respective terms of office as members of Board of Commissioners. Upon the expiration of such term, members of Risk Management Monitoring Committee may still be reappointed, but only for one (1) subsequent term.

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Risk Management Monitoring Committee as of December 31, 2025, is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jabatan Lain di Perseroan** Other Positions in the Company	**Dasar Hukum Penunjukan** Legal Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office
Herry Ardianto	Ketua Komite Chairman of Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta RUPS No. 42 tanggal 17 Juni 2025 GMS Deed No. 42 dated June 17, 2025	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following term of office as Independent Commissioner
Nurkholis Lukman	Anggota Member	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-DK/30/04/06/IPCC-24 tanggal 30 April 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners Decree No. KEP-DK/30/04/06/IPCC-24 datedApril 30, 2024, concerning Appointment of Member of Risk Management Monitoring Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	30 April 2024 sampai sekarang April 30, 2024 until present
Andy Surono	Anggota Member	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor KEP-DK/30/04/01/IPCC-24 tanggal 01 Juli 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners' Decree of PT Indonesia Kendaraan Terminal No. KEP-DK/30/04/01/IPCC-24 dated July 1, 2025, regarding Appointment of Members of Risk Management Monitoring Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	01 Juli 2025 – sekarang July 1, 2025 until present

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko

Risk Management Monitoring Committee Profile

Herry Ardianto

Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko
Chairman of Risk Management Monitoring Committee

Profil Lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris.
The complete profile has been described in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Sub-chapter.

Nurkholis Lukman

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko
Member of Risk Management Monitoring Committee

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, usia 53 tahun, domisili di Jakarta Indonesian citizen, 53 years old, domiciled in Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor KEP-DK/30/04/01/IPCC-24 tanggal 30 April 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Decree Number KEPDK/30/04/01/IPCC-24 dated April 30, 2024 concerning Appointment of Members of Risk Management Monitoring Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Senior Vice President Satuan Pengawasan Intern PT Pelindo Solusi Logistik (Agustus 2023 – sekarang) Senior Vice President of PT Pelindo Solusi Logistik Internal Audit Unit (August 2023 - present)
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Sistem Informasi dari Universitas Bina Darma (2005) Bachelor of Information Systems from Bina Darma University (2005)
Sertifikasi Certification	Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP): 1. Certified in Qualified Chief Risk Officer (QCRO) No.70209121300161772023 2. Certified in Qualified Risk Governance Professional (QRGP) No.702091120000224372024. 3. Certified in Qualified Risk Management Analyst (QRMA) No.2017-10-02-0467 Certification from the Professional Certification Institute (LSP): 1. Certified in Qualified Chief Risk Officer (QCRO) No.70209121300161772023 2. Certified in Qualified Risk Governance Professional (QRGP) No.702091120000224372024. 3. Certified in Qualified Risk Management Analyst (QRMA) No.2017-10-02-0467
Riwayat Karier Work Experience	• Senior Vice President Satuan Pengawasan Intern SPSL (Agustus 2023 - sekarang) • Division Head Pelayanan SDM Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Oktober 2021 – Agustus 2023) • Vice President Layanan SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Desember 2019 – Oktober 2021) • General Manager Cabang Bengkulu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Januari 2019 – Desember 2019) • General Manager Cabang Tanjung Pandan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Maret 2018 – Januari 2019) • Senior Department Head GCG dan Kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Maret 2017 – Maret 2018) • Senior Vice President of SPSL Internal Audit Unit (August 2023 - present) • Division Head of Regional HC Services 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (October 2021 - August 2023) • Vice President of HC Services PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (December 2019 - October 2021) • General Manager of the Bengkulu Branch of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (January 2019 - December 2019) • General Manager of the Tanjung Pandan Branch of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (March 2018 - January 2019) • Senior Department Head of GCG and Compliance at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (March 2017 – March 2018)

Andy Surono

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko
Member of Risk Management Monitoring Committee

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, usia 47 tahun, domisili di Bogor, Jawa Barat Indonesian citizen, 47 years old, domiciled in Bogor, West Java
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor KEP-DK/01/07/01/IPCC-25 tanggal 01 Juli 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners' Decree of PT Indonesia Kendaraan Terminal No. KEP-DK/30/04/01/IPCC-24 dated July 1, 2025, regarding Appointment of Members of Risk Management Monitoring Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Advokat Aktif (November 2016 – sekarang) Practicing Attorney (November 2016 – present)
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Hukum Kekhususan Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (2005) Bachelor of Laws, Specializing in Criminal Law from Muhammadiyah University of Jakarta (2005)
Sertifikasi Certification	1. Sertifikat Profesi Advokat Peradi No. 07-03716/PERADI-PUPA/IV/15 DKI 05424 24 April 2015. 2. Certificate in Risk Governance Professional PT IKT Tbk. No. 0120/T-12/RAPAC/CRGP/XII/2025 23 Desember 2025 1. Peradi Professional Attorney Certificate No. 07-03716/PERADI-PUPA/IV/15 DKI 05424, April 24, 2015. 2. Certificate in Risk Governance Professional from PT IKT Tbk. No. 0120/T-12/RAPAC/CRGP/XII/2025, December 23, 2025
Riwayat Karier Work Experience	1. Advokat aktif di beberapa kantor hukum (EFHA SALIM tahun 2014 – 2015, RAWS & Partner tahun 2017 – 2018, Abyakta Law Office 2019 – 2022, Siswo Nugroho & Rekan 2022 – 2024, Aidillan & Associates 2023 – sekarang). 2. In House Lawyer Team di PT. Jotun Indonesia tahun 2014 – 2015 . 1. Practicing attorney at several law firms (EFHA SALIM 2014–2015, RAWS & Partners 2017–2018, Abyakta Law Office 2019–2022, Siswo Nugroho & Partners 2022–2024, Aidillan & Associates 2023–present). 2. In-House Lawyer at PT. Jotun Indonesia from 2014 to 2015.

Independensi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko

Perseroan meyakini bahwa Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan peran, tugas, dan kewenangannya dengan menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, serta itikad baik. Dalam menjalankan fungsinya, Komite senantiasa menjaga objektivitas dan integritas dalam memberikan pengawasan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko pada periode pelaporan telah memenuhi ketentuan independensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rincian mengenai pemenuhan aspek independensi masing-masing anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko disajikan dalam tabel berikut ini:

Independence of Risk Management Monitoring Committee Members

The Company believes that Risk Management Monitoring Committee has carried out its roles, duties, and authorities while upholding professionalism, independence, and good faith. In performing its functions, the Committee consistently maintains objectivity and integrity in providing supervision and recommendations to Board of Commissioners.

All members of Risk Management Monitoring Committee during the reporting period have met the independence requirements as stipulated in applicable laws and regulations. Details regarding the fulfillment of independence requirements for each member of Risk Management Monitoring Committee are presented in the following table:

Aspek Independensi Independence Aspect	Andy Surono	Nurkholis Lukman
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. Has no management relationships in the Company, subsidiaries or affiliated companies	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan. Has no share ownership relationship in the Company	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit. Has no family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Audit Committee	√	√

Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Sebagai upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan di bidang manajemen risiko, Komite Pemantau Manajemen Risiko secara rutin mengadakan rapat, baik secara internal maupun bersama unit kerja terkait, untuk membahas penerapan dan efektivitas sistem manajemen risiko di Perseroan. Forum rapat tersebut menjadi sarana koordinasi dan evaluasi atas berbagai isu risiko yang dihadapi Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 3 kali rapat, yang terdiri atas rapat internal Komite serta rapat bersama unit kerja pendukung. Tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat-rapat tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Risk Management Monitoring Committee Meeting

In an effort to optimize supervisory functions in the area of risk management, Risk Management Monitoring Committee regularly holds meetings—both internal and with relevant business units—to discuss the implementation and effectiveness of risk management systems within the Company. These meetings serve as a platform for coordinating and evaluating various risk issues faced by the Company.

Throughout 2025, Risk Management Monitoring Committee held 3 times meetings, consisting of internal Committee meetings as well as joint meetings with supporting work units. The attendance level of each Committee member in these meetings is presented in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Pertemuan Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level
LM. Arya Bima Yudiantara*	Ketua Chairman	1	1	100%
Herry Ardianto**	Ketua Chairman	2	2	100%
Nurkholis Lukman	Anggota Member	3	3	100%
Andy Surono***	Anggota Member	2	2	100%

Catatan:
*Berhenti menjabat sejak 17 Juni 2025 | Stop serving since June 17, 2025.
**Menjabat sejak 17 Juni 2025 | Has been serving since June 17, 2025.
***Menjabat sejak 1 Juli 2025 | Has been serving since July 1, 2025

Pada rapat yang diselenggarakan selama tahun 2025, Komite Pemantau Manajemen Risiko melakukan pembahasan terkait agenda-agenda berikut ini:

At meetings held throughout 2025, Risk Management Monitoring Committee discussed the following agendas:

Tanggal Rapat Meeting Date	**Agenda Rapat** Meeting Agendas	**Peserta** Participants
16 April 2025 April 16, 2025	Pembahasan Laporan Risiko Operasional, Risiko Investasi, Peringkat Komposit Risiko s.d Triwulan I Tahun 2025 dan Profil Risiko 2025, Discussion on Operational Risk Reports, Investment Risk Reports, Composite Risk Ratings through the First Quarter of 2025, and the 2025 Risk Profile.	1. H. Ardianto; 2. N. Lukman; 3. A. Surono.
7 Juli 2025 July 7, 2025	Pembahasan Laporan Risiko Operasional, Risiko Investasi, Peringkat Komposit Risiko s.d Semester I Tahun 2025. Discussion on Operational Risk Reports, Investment Risk Reports, and Composite Risk Ratings through the First Semester of 2025.	1. H. Ardianto; 2. N. Lukman; 3. A. Surono.
17 September 2025 September 17, 2025	Evaluasi atas Rekomendasi AOI RMI BPKP yang Telah Ditindaklanjuti IPCC serta Sinkronisasi Risiko dan RKM 2026. Evaluation of AOI RMI BPKP Recommendations That Have Been Followed Up by the IPCC, as well as Risk Synchronization and the 2026 Risk Management Plan.	1. H. Ardianto; 2. N. Lukman; 3. A. Surono.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2025

Komite Pemantau Manajemen Risiko menjalankan peran yang signifikan dalam membantu Dewan Komisaris, khususnya melalui fungsi pengawasan serta penyampaian rekomendasi dan masukan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko Perseroan. Keterlibatan aktif tersebut ditujukan untuk memastikan penerapan manajemen risiko berjalan secara memadai dan selaras dengan tujuan usaha Perseroan.

Rincian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko selama tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam mendeteksi/mengidentifikasi risiko sedini mungkin pada setiap aktivitas terkait tugas, wewenang dan tanggung jawab;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengukuran risiko dengan memperhitungkan besarnya dampak dan kemungkinan terjadinya peluang risiko;
3. Membantu Dewan Komisaris mengelola strategi pengendalian secara berkesinambungan terhadap risiko yang mempunyai prioritas tinggi/risiko signifikan demi kelangsungan hidup Perseroan;
4. Melakukan pemantauan risiko secara terus menerus, khususnya yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap kondisi Perseroan;
5. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Pemantauan Manajemen Risiko atas permintaan Dewan Komisaris.

Report on the Implementation of Risk Management Monitoring Committee Duties in 2025

Risk Management Monitoring Committee plays a significant role in assisting the Board of Commissioners, particularly through its supervisory function and by providing recommendations and input regarding the Company's risk management. This active involvement is intended to ensure that risk management is implemented adequately and in alignment with the Company's business objectives.

Details regarding the Risk Management Monitoring Committee's duties and responsibilities for 2025 are outlined as follows:

1. Assist the Board of Commissioners in detecting/identifying risks as early as possible in every activity related to duties, authorities and responsibilities;
2. Assist the Board of Commissioners in measuring risk by taking into account the magnitude of impacts and the possibility of risk opportunities;
3. Assist the Board of Commissioners in managing control strategies on an ongoing basis for risks that have high priority/significant risks for the Company's survival;
4. Carry out continuous risk monitoring, especially those that have a significant impact on the Company's condition;
5. Carry out other duties relevant to the Risk Management Monitoring Committee's functions at the Board of Commissioners' request.

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2025

Kebijakan

Perseroan secara berkelanjutan mengupayakan peningkatan kapasitas seluruh organ pendukung Dewan Komisaris, termasuk Komite Pemantau Manajemen Risiko, melalui penerapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor HK.56/4/5/IKT-17 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Upaya pengembangan tersebut dilaksanakan melalui program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang berkesinambungan, dengan tujuan memperkuat kemampuan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan saran dan rekomendasi yang efektif di bidang manajemen risiko.

Risk Management Monitoring Committee Competency Development Program in 2025

Policy

The Company continuously strives to enhance the capabilities of all supporting organs of Board of Commissioners, including the Risk Management Monitoring Committee, through the implementation of human capital development policies as stipulated in PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Directors Regulation No. HK. 56/4/5/IKT-17 dated June 15, 2017, regarding Guidelines for Human Capital Development within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

These development efforts are carried out through continuous training and competency enhancement programs, with the aim of strengthening the capabilities of Risk Management Monitoring Committee members in performing their monitoring functions and providing effective advice and recommendations in the field of risk management.

Pelaksanaan Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Implementation of Training and/or Competency Development in 2025

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2025
Risk Management Monitoring Committee Training and Development in 2025

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Waktu Penyelenggaraan Implementation Time	Penyelenggara Organizer
Herry Ardianto	*Risk Management*	1. Enterprise Risk Management; 2. Enterprise Risk Governance; 3. Enterprise Risk Management: Board Practical Perspective.	21 Desember 2025 December 21, 2025	Lembaga Sertifikat Profesi Manajemen Risiko
Nurkholis Lukman	Sertifikasi Certification	1. Risk Culture and Leadership; 2. Strategic Risk Management; 3. Compliance Management	22 Desember 2025 December 22, 2025	Pers. Ikatan Komite Audit Indonesia
Nurkholis Lukman	*Risk Management*	1. Certification in Audit Committee Practices;	31 Mei 2025 May 31, 2025	Ikatan Komite Audit Indonesia
	Leadership	2. Cara Memimpin Tim Berkinerja Tinggi (How To Lead High-Performing Teams); How to Lead High-Performing Teams;	7 Januari 2025 January 7, 2025	
	Business Management	3. Proyeksi Tantangan Resesi Global Bagi Pelindo; Projected Challenges of Global Recession for Pelindo;	15 April 2025 April 15, 2025	
	Risk Management	4. Legal Coaching Clinic |-Mitigasi Risiko Hukum dalam Melindungi Nilai Perusahaan. Legal Coaching Clinic |-Mitigating Legal Risks to Protect Corporate Value	23 April 2025 April 23, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
Andy Surono	*Risk Management*	1. Enterprise Risk Management; 2. Enterprise Risk Governance; 3. Enterprise Risk Management: Board Practical Perspective.	21 Desember 2025 December 21, 2025	Lembaga Sertifikat Profesi Manajemen Risiko

Penilaian dan Evaluasi atas Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2025

Dewan Komisaris menilai bahwa pelaksanaan tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko selama tahun 2025 menunjukkan kinerja "Sangat Baik". Penilaian tersebut didasarkan pada tingkat pencapaian dan realisasi seluruh program kerja tahunan Komite Pemantau Manajemen Risiko yang telah ditetapkan, sebagaimana dijabarkan pada uraian berikut ini:

Assessment and Evaluation of the Performance of Risk Management Monitoring Committee in 2025

Board of Commissioners assessed that the Risk Management Monitoring Committee's performance in 2025 was "Very Good" based on the level of achievement and implementation of all the Committee's established annual work programs, as detailed below:

No	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Status Pelaksanaan Implementation Status
1	Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi telah terlaksana. Meeting of Board of Commissioners Risk Management Monitoring Committee by inviting the Board of Directors has been carried out.	√
2	Evaluasi dan menyampaikan arahan tentang Penguatan Manajemen Risiko Perseroan. Evaluation and providing direction on Strengthening the Company's Risk Management.	√
3	Kunjungan kerja ke satelit dalam rangka melakukan *monitoring* dan pengawasan atas program sebagaimana telah dianggarkan dalam RKAP. Working visit to the satellite in order to monitor and supervise the program as budgeted in the RKAP.	√
4	Peningkatan profesionalisme Dewan Komisaris melalui menghadiri Seminar, *Workshop* dan Sosialisasi di dalam negeri dan luar negeri Improving the Board of Commissioners' professionalism by attending seminars, workshops and socialization programs at home and abroad.	√

Komite Nominasi dan Remunerasi

Mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai perangkat pendukung Dewan Komisaris. Komite ini berperan dalam membantu pelaksanaan mekanisme nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta dalam perumusan kebijakan, struktur, dan besaran remunerasi yang berlaku di Perseroan.

Sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, keberadaan Komite Nominasi dan Remunerasi mencerminkan komitmen Perseroan terhadap keterbukaan dan akuntabilitas, khususnya dalam memastikan bahwa proses nominasi dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan secara objektif, terukur, dan transparan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 70; Tambahan Lembaran Negara No. 4297).
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 106; Tambahan Lembaran Negara No. 4756).
3. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, di antaranya menyangkut pembentukan Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER- 11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
7. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
8. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator (Parameter) Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

Nomination and Remuneration Committee

In accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committees of Issuers or Public Companies, the Company has established a Nomination and Remuneration Committee to support the Board of Commissioners. This Committee plays a role in assisting with the implementation of nominating mechanisms for members of Board of Commissioners and Board of Directors, as well as in formulating policies, structures, and remuneration levels applicable within the Company.

In line with the implementation of Good Corporate Governance principles, existence of Nomination and Remuneration Committee reflects the Company's commitment to transparency and accountability, particularly in ensuring that the nomination and remuneration determination processes for Board of Commissioners and Board of Directors are conducted objectively, measurably, and transparently.

Legal Basis

1. Law No. 19 of 2003 dated October 4, 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of 2003 No. 70; Supplement to State Gazette No. 4297).
2. Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of 2007 No. 106; Supplement to State Gazette No. 4756).
3. Government Regulation No. 101 of 2021 dated October 1, 2021 concerning the Merger of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, and the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV into the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.
4. Minister of State for State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, including the establishment of a Supporting Organ for Board of Commissioners/Supervisory Board for the formation of Nomination and Remuneration Committee.
5. Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Regulation No. PER-14/MBU/10/2021 concerning Second Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
6. Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Regulation No. PER- 11/MBU/07/2021 dated July 30, 2021 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Directors of State-Owned Enterprises.
7. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which states that in carrying out supervisory duties, Board of Commissioners can form a Committee whose members are one or more members of Board of Commissioners and are responsible to the Board of Commissioners.
8. Secretary of the Ministry of SOE Decree No. SK16/S.MBU/2012 concerning Indicators (Parameters) for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOE.

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

11. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

12. Akta Pendirian Perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal No. 10 Tanggal 5 November 2012 yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, S.H. Notaris pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H. di Jakarta sebagaimana telah disetujui dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012.
13. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk No. 12 tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Silfia, S.H. Notaris pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0206655 tanggal 21 Mei 2018.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008618.AH.01.02. Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
16. Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal No. 10/KEP-DK/14/05/01/IKT-18 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua serta Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indonesia Kendaraan Terminal tanggal 14 Mei 2018.

17. Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. 18/KEP-DK/X/IKT-2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 13/KEP-DK/XII/IKT-2018 tanggal 19 Desember 2018. Seiring dengan perkembangan regulasi dan kebijakan yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi, piagam tersebut telah dilakukan penyesuaian dan pembaruan pada tanggal 1 Oktober 2022 agar tetap relevan dan selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi berfungsi sebagai acuan utama dalam pelaksanaan tugas dan wewenang komite, serta bersifat mengikat bagi seluruh anggotanya. Pada piagam tersebut, ditetapkan kerangka kerja yang harus dipatuhi guna memastikan pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi berjalan secara tertib, konsisten, dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Selain itu, piagam tersebut memuat ketentuan pokok yang mengatur berbagai aspek, yang meliputi:

9. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
10. Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committees for Issuers or Public Companies.
11. State-Owned Enterprises Ministerial Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs of Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
12. Deed of Establishment of PT Indonesia Kendaraan Terminal No. 10 dated November 5, 2012, made before Yulianti Irawati, S.H. Replacement notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H. in Jakarta as approved in the Minister of Law and Human Rights Decree No. AHU-58515.AH.01.01 of 2012.

13. Deed of Statement of Shareholders' Decision of PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk No. 12 dated May 21, 2018, made before Silfia, S.H. Replacement notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., which has been ratified by the Ministry of Law and Human Rights No. AHUAH.01.03-0206655 dated May 21, 2018.

14. Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning Establishment and Guidelines for Implementing the Work of Nomination and Remuneration Committee.
15. Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Decree No. AHU-0008618.AH.01.02. 2018 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
16. Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Decree No. 10/KEP-DK/14/05/01/IKT-18 concerning the Dismissal and Appointment of Chairperson and Members of Nomination and Remuneration Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal dated May 14, 2018.
17. Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Decree No. 18/KEP-DK/X/IKT-2020 dated October 1, 2020 concerning Determination of Chairperson and Members of Nomination and Remuneration Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Company's Nomination and Remuneration Committee Charter was established by Board of Commissioners' Decree No. 13/KEP-DK/XII/IKT-2018 dated December 19, 2018. In line with regulatory and policy developments that may affect the performance of nomination and remuneration functions, the charter was revised and updated on October 1, 2022, to ensure it remains relevant and aligned with applicable regulations.

The Nomination and Remuneration Committee Charter serves as the primary reference for the committee's duties and authorities and is binding on all its members. The charter establishes a framework that must be adhered to in order to ensure that the nomination and remuneration functions are carried out in an orderly, consistent manner, and in accordance with the principles of Good Corporate Governance. Additionally, the charter contains key provisions governing various aspects, including:

1. Landasan Hukum;
2. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite;
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komite;
4. Persyaratan Keanggotaan;
5. Rapat komite;
6. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite;
7. Akses Kerahasiaan Informasi;
8. Rencana Kerja dan Anggaran;
9. Penghasilan Anggota Komite;
10. Pendidikan dan Tenaga Penunjang; dan
11. Penilaian Kinerja.

Tugas dan tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi, sesuai dengan yang telah diatur dalam Piagam Komite, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi Perseroan dan Direksi anak perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta Perseroan serta *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaannya. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
   b. Kebijakan remunerasi bagi karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
5. Melakukan evaluasi kinerja secara individual dan kolegial bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
6. Menyiapkan usulan program pengembangan kompetensi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
7. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perseroan.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.

Kriteria Komite Nominasi dan Remunerasi

Persyaratan dan kualifikasi bagi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Piagam Komite, yang mencakup:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang nominasi dan remunerasi.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.

1. Legal Framework
2. Procedures for Appointment and Dismissal of Committee Members
3. Duties, Responsibilities and Authority of the Committee
4. Membership Requirements
5. Committee meeting
6. Report on the Implementation of Committee Duties
7. Access to Confidentiality of Information
8. Work Plan and Budget
9. Income of Committee Members
10. Education and Supporting Personnel
11. Performance Appraisal

Nomination and Remuneration Committee Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of Nomination and Remuneration Committee, as regulated in the Committee Charter, are as follows:

1. Provide recommendations regarding prospective members of the Company's Board of Directors and Subsidiary Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).
2. Conduct regular reviews of the Company's Talent Management System as well as monitoring and evaluating its implementation. Prepare and provide recommendations regarding systems and procedures for selecting and/or replacing members of Board of Commissioners and Board of Directors to Board of Commissioners to be submitted to Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).
3. Evaluate remuneration policies.
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
   a. Remuneration policy for Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS).
   b. The remuneration policy for employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.
5. Conduct individual and collegial performance evaluations for Board of Directors and/or Board of Commissioners.
6. Prepare proposals for competency development programs for members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners.
7. Evaluate remuneration policies for employees which require approval/response from the Board of Commissioners.
8. Evaluate the Board of Directors' proposals regarding the Company's organizational structure.
9. Carry out other tasks as requested by the Board of Commissioners.

Nomination and Remuneration Committee Criteria

The requirements and qualifications for members of Nomination and Remuneration Committee are established in accordance with the provisions set forth in the Committee Charter, which include:

1. Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of nomination and remuneration.
2. Has no personal interests/relationships that could have a negative impact and conflict of interest on the Company.

3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
5. Para anggota secara bersama-sama memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai bisnis secara umum dan Perseroan secara khusus.
6. Anggota Komite harus bersifat dan bersikap independen, objektif dan profesional baik dalam penampilan maupun dalam kenyataan.
7. Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Memiliki kemampuan dalam menulis laporan yang baik untuk menuangkan evaluasi dan analisa kriteria nominasi dan sistem remunerasi.
9. Memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

3. Able to communicate effectively.
4. Can provide sufficient time to complete the duties.
5. The members collectively have a balance of expertise and experience with a broad background understanding of business in general and the Company in particular.
6. Committee members must be independent, objective and professional both in appearance and in reality.
7. Has no familial relationship by marriage or descent up to the second degree, either horizontally or vertically, with members of Board of Commissioners and Board of Directors.
8. Have the ability to write good reports to provide evaluation and analysis of nomination criteria and remuneration systems.
9. Have an adequate understanding of the principles of Good Corporate Governance.

Masa Jabatan dan Komposisi

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang tidak berasal dari Dewan Komisaris memiliki masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya, dengan tetap memperhatikan kewenangan Dewan Komisaris untuk melakukan pemberhentian sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi Ketua dan/atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, masa jabatan komite tersebut dibatasi dan tidak dapat melampaui masa jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah berakhir masa jabatannya hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode selanjutnya.

Struktur keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua yang berasal dari Komisaris Independen serta sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota yang memenuhi kriteria independen, baik yang berasal dari luar Perseroan maupun dari pihak internal yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Term of Office and Composition

Pursuant to Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015, members of Nomination and Remuneration Committee who are not members of Board of Commissioners shall serve for a maximum term of 3 (three) years and may be reappointed once for a subsequent term of 2 (two) years, subject to the Board of Commissioners' authority to dismiss them at any time in accordance with applicable regulations.

For the Chairperson and/or members of Nominating and Remuneration Committee who also serve as members of the Company's Board of Commissioners, the committee's term of office is limited and may not exceed the relevant individual's term as a member of Board of Commissioners. Members of Nominating and Remuneration Committee whose terms have expired may only be reappointed for one subsequent term.

The membership structure of Nomination and Remuneration Committee consists of 1 (one) Chairperson who is an Independent Commissioner and at least 1 (one) member who meets the independence criteria, whether from outside the Company or from within the Company holding a managerial position under the Board of Directors responsible for human capital.

The composition of the Company's Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2025, is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jabatan Lain di Perseroan** Other Positions in the Company	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode** Period
Abdur Rahim Hasan*	Ketua Komite Chairman of Committee	Anggota Komite Member of Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.15/KEP-DK/VIII/IKT-20 tanggal 20 Agustus 2020 Board of Commissioners Decree No. 15/KEP-DK/VIII/IKT-20 dated August 20, 2020	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following term of office as Independent Commissioner	Pertama First
LM. Arya Bima Yudiantara*	Anggota Komite Member of Committee	Anggota Komite Member of Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor 20/KEP-DK/VI/IKT-2021 tanggal 29 Juni 2021 PT Indonesia Kendaraan Terminal Board of Commissioners Decree No. 20/KEP-DK/VI/IKT-2021 dated June 29, 2021	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following term of office as Independent Commissioner	Pertama First

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jabatan Lain di Perseroan** Other Positions in the Company	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode** Period
M. Said Bakhri**	Ketua Komite Chairman of Committee	Tidak ada None	Akta RUPS No. 42 tanggal 17 Juni 2025 AGM Deed No. 42 dated June 17, 2025	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following term of office as Independent Commissioner	Pertama First
Handy***	Anggota Komite Member of Committee	Anggota Komite Member of Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-DK/01/07/05/IPCC-25 tanggal 1 Juli 2025 Board of Commissioners Decree No. KEP-DK/01/07/05/IPCC-25 dated July 1, 2025	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following term of office as Independent Commissioner	Pertama First
Ahmad Alyani Addarain	Anggota Komite Member of Committee	Tidak ada None	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/25/07/02/IPCC-23 tanggal 25 Juli 2023 Board of Commissioners Decree No. DK/25/07/02/IPCC-23 dated July 25, 2023	2023-2026	Kedua Second

*Berhenti menjabat sejak 17 Juni 2025 | Ceased to serve as of June 17, 2025
**Menjabat sejak 17 Juni 2025 | Has served since June 17, 2025
***Menjabat sejak 1 Juli 2025 | Has served since July 1, 2025

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Profile

M. Said Bakhri

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Independen
Chairman of Nomination and Remuneration Committee/Independent Commissioner

Profil Lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris.
The complete profile has been described in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Sub-chapter

Handy

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration Committee

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, usia 45 tahun, domisili di Jakarta Indonesian citizen, 45 years old, domiciled in Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-DK/01/07/02/IPCC-25 tanggal 1 Juli 2025 Board of Commissioners Decree No. KEP-DK/01/07/02/IPCC-25 dated July 1, 2025
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak Ada None
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ilmu Hukum Universitas Nasional (2014) Bachelor of Law, University Nasional (2014)
Sertifikasi Certification	QRGP (Qualified Risk Governance Professional)/CRGP (Certified Risk Governance Professional) yang dilaksanakan pada 22 -23 Desember 2025 QRGP (Qualified Risk Governance Professional)/CRGP (Certified Risk Governance Professional) which was held on December 22-23,2025
Riwayat Karier Work Experience	• Advocate di Tri Anarghya Law Firm (2019-2025) • Tenaga Ahli Wakil Gubernur DKI Jakarta (2020-2022) • Junior Advocate di RAM Law Office (2016-2019) • Peneliti di Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (2014-2016) • Advocate at Tri Anarghya Law Firm (2019-2025) • Expert Advisor to the Deputy Governor of DKI Jakarta (2020-2022) • Junior Advocate at RAM Law Office (2016-2019) • Researcher at the Indonesian Anti-Money Laundering Agency (2014-2016)

Ahmad Alyani Addarain
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, usia 37 tahun, domisili di Jakarta Indonesian citizen, 37 years old, domiciled in Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/25/07/02/IPCC-23 tanggal 25 Juli 2023 Board of Commissioners Decree No. DK/25/07/02/IPCC-23 dated July 25, 2023
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak Ada None
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Psikologi Universitas Negeri Semarang (2013) Bachelor of Psychology, Universitas Negeri Semarang (2013)
Sertifikasi Certification	1. Program GRC Summit 2023, Building Resilient Future Through GRC and ESG yang dilaksanakan pada 23 Agustus 2023 2. QRGP (Qualified Risk Governance Professional)/CRGP (Certified Risk Governance Professional) yang dilaksanakan pada 23 – 24 September 2024 1. GRC Summit 2023 Program, Building Resilient Future Through GRC and ESG which was held on August 23, 2023 2. QRGP (Qualified Risk Governance Professional)/CRGP (Certified Risk Governance Professional) which was held on September 23-24, 2024
Riwayat Karier Work Experience	• PT Indonesia Kendaraan Terminal sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi (2018-Sekarang) • Marketing Advisor di PT Summit Global Indonesia (2017-2019) • Supervisor Area HRD di PT Wirasindo Santakarya (2016-2017) • Staff HRD di PT Riyana Cipta Pangan sebagai HRD (2015-2016) • CMO di PT Astra Credit Companies (2014-2015) • Supervisor HRD di PT Suzuki Mobil Cirebon (2013-2014) • PT Indonesia Kendaraan Terminal as Nomination and Remuneration Committee (2018-Present) • Marketing Advisor at PT Summit Global Indonesia (2017-2019) • HRD Area Supervisor at PT Wirasindo Santakarya (2016-2017) • HRD Staff at PT Riyana Cipta Pangan as HRD (2015-2016) • CMO at PT Astra Credit Companies (2014-2015) • HRD Supervisor at PT Suzuki Mobil Cirebon (2013-2014)

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan menegaskan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan seluruh tugas dan kewenangannya dengan menjunjung tinggi profesionalisme, menjaga independensi, serta dilandasi itikad baik dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Selama periode berjalan, seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan independensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rincian mengenai tingkat independensi masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi disajikan dalam tabel berikut ini:

Independence of Nomination and Remuneration Committee Members

The Company confirms that the Nomination and Remuneration Committee performs all of its duties and exercises its authority by upholding professionalism, maintaining independence, and acting in good faith in every decision-making process.

During the current period, all members of Nomination and Remuneration Committee have met the independence requirements as stipulated in applicable laws and regulations. Details regarding the level of independence of each member of Nomination and Remuneration Committee are presented in the following table:

Aspek Independensi Independence Aspect	M. Said Bakhri	Handy	Ahmad Alyani Addarain
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Does not have financial relationships with Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. Does not have management relationships in the Company, subsidiaries, or affiliated companies	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan. Does not have share ownership relationships in the Company	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit. Does not have family relationships with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Audit Committee	√	√	√

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan rapat secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Piagam Komite sebagai sarana pembahasan dan pengambilan keputusan terkait proses nominasi serta kebijakan dan struktur remunerasi yang berlaku di Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan sebanyak 21 kali rapat, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Nomination and Remuneration Committee Meeting

Nomination and Remuneration Committee holds regular meetings in accordance with the provisions set forth in the Committee Charter as a forum for discussion and decision-making regarding the nomination process and the remuneration policies and structure in effect at the Company.

Throughout 2025, Nomination and Remuneration Committee held a total of 21 meetings, with the attendance level of each Committee member as presented in the following table:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Wajib Rapat** Total Mandatory Meetings	**Kehadiran** Attendance	**Tingkat Kehadiran** Attendance Level
Abdur Rahim Hasan*	Ketua Komite Chairman of Committee	6	6	100%
LM. Arya Bima Yudiantara*	Anggota Komite Member of Committee	6	6	100%
M. Said Bakhri**	Ketua Komite Chairman of Committee	6	6	100%
Handy***	Anggota Komite Member of Committee	5	5	100%
Ahmad Alyani Addarain	Anggota Komite Member of Committee	12	12	100%

Catatan | Note:
*Berhenti menjabat sejak 17 Juni 2025 | Stop serving since June 17, 2025
**Menjabat sejak 17 Juni 2025 | Serving since June 17, 2025
***Menjabat sejak 1 Juli 2025 | Has been serving since July 1, 2025

Berikut rincian rapat dan agenda rapat yang diikuti Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2025:

The following is a detailed list of meetings and meeting agenda attended by Nomination and Remuneration Committee throughout 2025:

No	**Tanggal Rapat** Meeting Date	**Agenda Rapat** Meeting Agendas	**Peserta** Participants
1	08 Januari 2025 January 8, 2025	Pembahasan program kerja dan bidang SDM tahun 2025. Discussion on the 2025 human capital work program	KNR dan Manajemen (SDM & Umum) KNR and Management (HC & General)
2	14 Januari 2024 January 14, 2025	Pembahasan terkait isu demo dari serikat buruh pekerja TNO PT IKT. Discussion on demonstrations issue by PT IKT TNO labor union.	KNR dan Manajemen (SDM & Umum) KNR and Management (HC & General)
3	06 Februari 2025 February 6, 2025	Rakernas PT IKT Tahun 2025. PT IKT 2025 National Conference	KA, KNR, KPMR, Manajemen (SDM & Umum) KA, KNR, KPMR, Management (HC & General)
4	11 Februari 2025 February 11, 2025	Pembahasan RKAP 2025 tentang beban gaji pegawai, tantiem/bonus, dan pengelolaan SDM. Discussion on the 2025 Budget Plan regarding employee salary expenses, bonuses, and human capital management.	KNR dan Manajemen (SDM & Umum) KNR and Management (HC & General)
5	19 Maret 2025 March 19, 2025	Pembahasan pengembangan dan pelaksanaan karier dengan SDM. Discussion on career development and implementation with the HC department.	KNR dan Manajemen (SDM & Umum) KNR and Management (HC & General)
6	17 April 2025 April 17, 2025	Pembahasan dengan divisi SDM terkait *workload job analysis* dan remunerasi karyawan. Discussion with HC division regarding job workload analysis and employee compensation.	KNR dan Manajemen (SDM & Umum) KNR and Management (HC & General)
7	24 April 2025 April 24, 2025	*Updating* Pengelolaan Pegawai Organik dan Non-Organik Updating the management of permanent and non-permanent staff	KNR dan Manajemen (SDM & Umum) KNR and Management (HC & General)
8	26 Mei 2025 May 26, 2025	Pembahasan dengan divisi SDM terkait wacana pemberlakuan pola kerja 3 *Shift* pada pekerja lapangan operasional IKT. Discussion with HC division regarding the proposed implementation of a 3-shift work schedule for IKT operational field workers.	KNR dan Manajemen (SDM & Umum) KNR and Management (HC & General)
9	05 Juni 2025 June 5, 2025	Rapat *partnership* pembahasan divestasi MKO dan RJPP 2025-2029. Partnership meeting to discuss the divestment of MKO and the 2025–2029 RJPP.	KA, KNR, KPMR dan Manajemen KA, KNR, KPMR and Management

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Participants
10	11 Juni 2025 June 11, 2025	Pembahasan permasalahan *manpower* di satelit Balikpapan. Discussion on manpower issues at Balikpapan satellite office.	KA, KNR, KPMR dan Manajemen (Tim Satelit Balikpapan) KA, KNR, KPMR and Management (Balikpapan Satellite Team)
11	3 Juli 2025 July 3, 2025	Rapat Internal Komite dan Dewan Komisaris pembahasan MKO, RJPP, dan penghapusan aset. Internal Committee and Board of Commissioners Meeting to discuss the MKO, RJPP, and asset write-offs.	KA, KNR, KPMR dan Manajemen KA, KNR, KPMR and Management
12	7 Juli 2025 July 7, 2025	Rapat *partnership* Manajemen Risiko. Risk Management partnership meeting.	KA, KNR, KPMR dan Manajemen (Divisi MR)
13	9-10 Juli 2025 July 9–10, 2025	Rapat *partnership* pembahasan finalisasi RJPP 2025-2029 Partnership meeting to discuss the finalization of RJPP 2025-2029.	KA, KNR, KPMR dan Manajemen KA, KNR, KPMR and Management
14	05 Agustus 2025 August 5, 2025	Rapat Internal Komite dan Dewan Komisaris (Pembahasan Remunerasi, Fasilitas dan Tunjangan dan Biaya Operasional Direksi dan Komisaris) serta pembahasan MKO. Internal Committee and Board of Commissioners Meeting (Discussion on Remuneration, Facilities, Allowances, and Operational Expenses for Board of Directors and Board of Commissioners) as well as discussion on MKO.	KA, KNR, KPMR dan Manajemen KA, KNR, KPMR and Management
15	15 September 2025 September 15, 2025	Rapat *partnership* dengan BPKP terkait MKO serta Pembahasan terkait tindak lanjut permasalahan *manpower* di satelit Balikpapan. Partnership meeting with BPKP regarding MKO and discussion on follow-up actions regarding manpower issues at Balikpapan satellite office.	KA, KNR, KPMR, Manajemen KA, KNR, KPMR and Management
16	23 September 2025 September 23, 2025	Pembahasan Anggaran Dewan Komisaris. Discussion on the Board of Commissioners' budget.	KA, KNR, KPMR, dan Sesdekom KA, KNR, KPMR and Secretary of BoC
17	8 Oktober 2025 October 8, 2025	Pembahasan Usulan Struktur Organisasi. Discussion on the proposed organizational structure.	KA, KNR, KPMR, Manajemen (SDM & Umum) KA, KNR, KPMR and Management (HC & General)
18	11 Oktober 2025 October 11, 2025	Rapat *partnership* terkait LHA semester 1. Partnership meeting regarding the first-semester LHA.	KA, KNR, KPMR, Manajemen (Audit Internal) KA, KNR, KPMR and Management (Internal Audit)
19	27 November November 27	Rapat koordinasi wacana terkait usulan *grading* PT IKT. Coordination meeting regarding the proposed grading system for PT IKT.	KNR dan Manajemen (SDM & Umum) KNR and Management (HC & General)
20	3 Desember 2025 December 3, 2025	Rapat *partnership* terkait usulan *grading* PT IKT. Partnership meeting regarding the proposed grading system for PT IKT.	KA, KNR, KPMR, Manajemen (SDM & Umum) KA, KNR, KPMR and Management (HC & General)
21	09 Desember 2025 December 9, 2025	Pembahasan terkait usulan Direksi baru. Discussion regarding the proposed new Board of Directors.	KNR dan Manajemen (SDM & Umum) KNR and Management (HC & General)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa menjalankan perannya dalam membantu Dewan Komisaris, khususnya dalam memastikan proses nominasi serta penetapan kebijakan dan struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berjalan sesuai ketentuan. Selama tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang mencakup berbagai aspek sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025;
2. Tanggapan Permohonan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
3. Arahan/Nasihat terkait SE Danantara mengenai Tantiem Direksi dan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
4. Tanggapan Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan Nomenklatur PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;

Report on the Implementation of Nomination and Remuneration Committee Duties for 2025

Nomination and Remuneration Committee consistently fulfills its role in assisting the Board of Commissioners, particularly in ensuring that the nomination process and the establishment of remuneration policies and structures for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are conducted in accordance with applicable regulations. During 2025, Nomination and Remuneration Committee submitted a number of recommendations to Board of Commissioners covering the following aspects:

1. Annual Report of Nominations and Remuneration Committee for 2025;
2. Response to Request for 2025-2029 Long-Term Corporate Plan (RJPP) of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
3. Direction/Advice related to SE Danantara regarding Bonuses for Board of Directors and Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
4. Response to Proposal for Changes of Organizational Structure and Nomenclature of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;

5. Arahan/Nasihat terkait usulan Besaran Gaji, tunjangan fasilitas Direksi dan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
6. Arahan/Nasihat terkait pengembangan karier dan suksesi manajemen PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
7. Arahan/Nasihat terkait Pengelolaan SDM PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan suksesi Direksi Perseroan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku Holding. Pelindo telah menetapkan Peraturan Direksi Nomor: HK.01/27/6/1/RKTK/UTMA/PLND-23 tanggal 27 Juni 2023 yang menjadi pedoman dalam pengelolaan talenta secara terintegrasi, mulai dari proses penjaringan, penilaian, pengembangan, hingga rotasi dan pemenuhan kebutuhan jabatan Direksi di seluruh entitas dalam lingkungan Pelindo Group. Kebijakan ini juga mengatur mekanisme suksesi yang bersumber dari *talent pool*, proses seleksi terbuka, maupun pemenuhan dari sumber eksternal, sehingga memastikan kesinambungan kepemimpinan yang selaras dengan kebutuhan strategis Perseroan.

Direksi melalui Komite Talenta di tingkat Holding melakukan proses identifikasi dan penilaian terhadap kandidat yang dinilai memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai calon Direksi. Hasil proses tersebut berupa daftar *Selected Talent* yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan validasi dan kalibrasi melalui Komite Nominasi dan Remunerasi di tingkat Holding. Kandidat yang telah melalui tahapan tersebut ditetapkan sebagai *Nominated Talent* untuk kemudian diusulkan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, proses suksesi Direksi di lingkungan Perseroan, termasuk untuk posisi Direktur Utama, merupakan bagian dari sistem yang terintegrasi di bawah kewenangan Holding, sehingga menjamin objektivitas dan keselarasan dengan arah strategis Pelindo Group. Selaras dengan hal tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi berperan aktif dalam melakukan penelaahan serta menyusun usulan calon anggota Direksi yang memenuhi kualifikasi. Rekomendasi yang diberikan didasarkan pada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan, hasil uji kompetensi dan kelayakan, serta evaluasi lainnya yang relevan. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari kerangka tata kelola perusahaan. Sistem tersebut digunakan sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan kebijakan nominasi dan remunerasi secara objektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi berupaya untuk melakukan kajian mengenai usulan kenaikan *grading* PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dari *Tier* 1B menjadi *Tier* 1A kepada Subholding dan/atau Pelindo Pusat (sebagai pendukung dalam kebijakan Suksesi Direktur Utama).

5. Directions/Advice regarding the proposed salary amounts and facility allowances for Board of Directors and Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
6. Directions/Advice regarding career development and management succession at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
7. Directions/Advice regarding human capital management at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Policy on Board of Directors' Succession

The Company's Board of Directors succession policy is carried out with reference to the provisions established by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as the Holding. Pelindo has issued Board of Directors Regulation No. HK.01/27/6/1/RKTK/UTMA/PLND-23 dated June 27, 2023, which serves as a guideline for integrated talent management, covering the processes of sourcing, assessment, development, rotation, and fulfillment of Board of Directors positions across all entities within Pelindo Group. This policy also governs succession mechanisms derived from the talent pool, open selection processes, and external sourcing, thereby ensuring leadership continuity aligned with the Company's strategic needs.

Through the Talent Committee at the Holding level, Board of Directors conducts identification and assessment processes of candidates deemed to meet the criteria to be proposed as Board of Directors candidates. The outcome of this process is a list of Selected Talent, which is then submitted to Board of Commissioners for validation and calibration through Nomination and Remuneration Committee at the Holding level. Candidates who have passed these stages are designated as Nominated Talent and subsequently proposed to the Shareholders in accordance with applicable regulations.

Accordingly, the succession process for Board of Directors within the Company, including the position of President Director, is part of an integrated system under the authority of the Holding, ensuring objectivity and alignment with the strategic direction of Pelindo Group. In line with this, Nomination and Remuneration Committee plays an active role in reviewing and formulating proposals for Board of Directors candidates who meet the required qualifications. The recommendations provided are based on the fulfillment of established requirements, results of competency and fit-and-proper tests, as well as other relevant evaluations. In addition, Nomination and Remuneration Committee is responsible for designing and developing a nomination system for members of Board of Commissioners and Board of Directors as part of the corporate governance framework. This system serves as a reference for Board of Commissioners and the General Meeting of Shareholders in determining nomination and remuneration policies in an objective, transparent manner and in accordance with the principles of Good Corporate Governance. Furthermore, Nomination and Remuneration Committee has undertaken efforts to review the proposal for upgrading the grading of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk from Tier 1B to Tier 1A to the Subholding and/or Pelindo Head Office (as support for the succession policy of the President Director).

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan

Perseroan secara berkelanjutan mengupayakan penguatan kapabilitas seluruh organ pendukung Dewan Komisaris, termasuk Komite Nominasi dan Remunerasi, melalui penerapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor HK.56/4/5/IKT-17 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Upaya peningkatan kompetensi ini diwujudkan melalui program pelatihan dan pengembangan yang berkesinambungan, sehingga anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif serta menyusun rekomendasi yang objektif, akurat, dan bernilai tambah bagi Perseroan.

Pelaksanaan Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Nomination and Remuneration Committee Training and/or Competency Development

Policy

The Company continuously strives to strengthen the capabilities of all supporting organs of Board of Commissioners, including the Nomination and Remuneration Committee, through the implementation of human capital development policies as stipulated in PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Directors Regulation No. HK. 56/4/5/IKT-17 dated June 15, 2017, regarding Guidelines for Human Capital Development within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

These competency enhancement efforts are realized through continuous training and development programs, ensuring that members of Nomination and Remuneration Committee possess adequate knowledge and expertise to effectively carry out their duties and responsibilities, as well as formulate objective, accurate, and value-added recommendations for the Company.

Implementation of Training and/or Competency Development in 2025

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025
Nomination and Remuneration Committee Training and Competency Development in 2025

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Waktu Penyelenggaraan Implementation Time	Penyelenggara Organizer
Abdur Rahim Hasan	Pelatihan Training	CACP (Certification in Audit Committee Practices)	20-22 Mei 2025 May 20-22, 2025	IKAI
LM. Arya Bima Yudiantara	Pelatihan Training	CACP (Certification in Audit Committee Practices)	20-22 Mei 2025 May 20-22, 2025	IKAI
M. Said Bakhri	Sertifikasi	*Certified Risk Governance Professional* (CRGP)	22-23 Desember 2025 December 22-23, 2025	PT RAP Asia Consulting
	Pelatihan Training	*Executive Program for Commissioners: Excellence for the Future of Maritime & Logistics Industry*	30-31 Oktober 2025 October 30-31, 2025	PT PMLI
	Seminar	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2025, Bali	3-4 Desember 2025 December 3-4, 2025	YPIA
Handy	Pelatihan Training	QRGP (Qualified Risk Governance Professional)	22-23 Desember 2025 December 22-23, 2025	PT RAP Asia Consulting
Ahmad Al Yani Addarain	Pelatihan Training	CACP (Certification in Audit Committee Practices)	20-22 Mei 2025 May 20-22, 2025	IKAI

Penilaian dan Evaluasi Atas Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan fungsinya dengan "Sangat Baik" sepanjang tahun 2025, yang tercermin dari tingkat pencapaian dan realisasi rencana kerja tahunan komite tersebut sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini:

Assessment and Evaluation of the Performance of Nomination and Remuneration Committee in 2025

Board of Commissioners assessed that the Nomination and Remuneration Committee performed its functions "Very Good" throughout 2025, as evidenced by the committee's achievement and implementation of its annual work plan, as detailed in the following section:

No	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Status Pelaksanaan Implementation Status
1	Evaluasi penerapan prinsip - prinsip GCG bidang SDM. Evaluation of the implementation of GCG principles in the HC sector	√
2	Pembahasan dan *review* usulan RKAP bidang SDM. Discussion and review of RKAP proposal in the HC sector	√
3	Rapat koordinasi triwulan bersama divisi SDM (Sinergi dengan Rapat Koordinasi Komite Audit/KPMR). Quarterly coordination meeting with HC division (Synergy with Audit Committee Coordination Meeting/KPMR)	√
4	Kajian usulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Review of remuneration proposal for Board of Commissioners and Board of Directors	√
5	Kajian/rekomendasi atas desain dan pola struktur organisasi Perseroan berdasarkan usulan Direksi dan/atau penugasan Dewan Komisaris. Review/recommendations on the design and pattern of the Company's organizational structure based on proposals from Board of Directors and/or assignments from Board of Commissioners	√
6	Review atas penerapan sistem manajemen karier pekerja. Review of the implementation of employee career management system	√
7	Kunjungan kerja (*Benchmarking*). Work visit (Benchmarking)	√
8	Menyusun rencana kerja dan anggaran KNR. Prepare KNR work plans and budgets	√
9	Penyusunan laporan triwulan KNR. Preparation of KNR quarterly reports	√
10	Seminar/pelatihan/*workshop*/studi banding. Seminar/training/workshop/comparative study	√
11	Rapat dengan Dewan Komisaris. Meeting with Board of Commissioners	√
12	Rapat internal KNR (minimal satu bulan sekali). KNR internal meeting (at least once a month)	√

Organ Pendukung Direksi
Board of Directors Supporting Organs

Komite Investasi
Perseroan membentuk Komite Investasi untuk memastikan proses pengusulan dan pengelolaan investasi berjalan secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (*compliance*). Keberadaan Komite juga ditujukan untuk mendukung kualitas pengambilan keputusan investasi serta mendorong peningkatan realisasi dan penyerapan anggaran investasi Perseroan. Pembentukan Komite Investasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor SK.01.02/13/3/1/AMR/DIRUT/IKT-24 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pembentukan Tim Komite Investasi di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Pedoman Kerja Komite Investasi
Pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Investasi berlandaskan pada pedoman kerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor SK.01.02/13/3/1/AMR/DIRUT/IKT-24 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pembentukan Tim Komite Investasi di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, yang menjadi acuan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab Komite secara terstruktur dan konsisten.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Investasi
Tim Komite Investasi memiliki tugas untuk:
1. Melakukan analisis kelengkapan dokumen yang disampaikan pengusul investasi mengacu kepada persyaratan pengajuan investasi sesuai fungsi kerja masing-masing;
2. Mengevaluasi draf usulan investasi, dan kesesuaian dokumen investasi dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja Manajemen (RKM) Perseroan dan aturan-aturan keuangan yang berlaku;
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengusul investasi atas item investasi yang belum sesuai dengan persyaratan dokumen kelengkapan sesuai fungsi kerja masing - masing;
4. Memberikan masukan dan upaya percepatan pelaksanaan program investasi;
5. Menyampaikan draft hasil evaluasi usulan investasi kepada Direksi guna mendapat penetapan dan persetujuan Direksi.

Struktur Keanggotaan Komite Investasi
Susunan organisasi dan komposisi keanggotaan Komite Investasi ditetapkan berdasarkan SK.01.02/13/3/1/AMR/DIRUT/IKT-24 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pembentukan Tim Komite Investasi di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Ketentuan tersebut mengatur pembagian peran dan keanggotaan Komite Investasi secara jelas, dengan rincian susunan anggota Komite Investasi sebagai berikut:

Investment Committee
The Company has established an Investment Committee to ensure that the investment proposal and management processes run optimally while adhering to the principles of Corporate governance, risk management, and compliance. The Committee is also intended to support the quality of investment decision-making and to encourage improved realization and utilization of the Company's investment budget. The establishment of Investment Committee was formalized through a Board of Directors' Decree of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. SK.01.02/13/3/1/AMR/DIRUT/IKT-24 dated March 13, 2024, regarding Establishment of Investment Committee at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Investment Committee Work Guidelines
Investment Committee performs its duties and functions in accordance with the operating guidelines established by PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Directors Decree No. SK.01.02/13/3/1/AMR/DIRUT/IKT-24 dated March 13, 2024, regarding Establishment of Investment Committee Teams at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, which serves as a reference for carrying out the Committee's roles and responsibilities in a structured and consistent manner.

Investment Committee Duties and Responsibilities
The Investment Committee Team has the following duties:
1. Analyze the completeness of documents submitted by investment proposers referring to the investment submission requirements according to their respective work functions;
2. Evaluate the draft investment proposal, and the conformity of investment documents with the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Company's Management Work Plan (RKM) and applicable financial regulations;
3. Communicate and coordinate with investment proposers on investment items that do not comply with the completeness document requirements according to their respective work functions;
4. Provide input and efforts to accelerate the implementation of investment programs;
5. Submit a draft of the results of the investment proposal evaluation to Board of Directors in order to obtain the Board of Directors' determination and approval.

Investment Committee Membership Structure
The organizational structure and membership composition of Investment Committee are established pursuant to SK.01.02/13/3/1/AMR/DIRUT/IKT-24 dated March 13, 2024 concerning the Establishment of an Investment Committee Team at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. These provisions clearly define the roles and membership of Investment Committee, with the members composition of Investment Committee as follows:

No	Jabatan Job Title	Posisi Position
1	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC and Risk Management	Ketua Chairman
2	Senior Manager Strategi & Pengembangan Bisnis Senior Manager of Strategy & Business Development	Sekretaris 1 Secretary 1
3	Senior Manager Teknik & Sistem Informasi Senior Manager of Technical & Information Systems	Sekretaris 2 Secretary 2
4	Senior Manager Sekretaris Perusahaan Senior Manager of Corporate Secretary	Anggota Member
5	Senior Manager Manajemen Risiko & Sistem Manajemen Senior Manager of Risk Management & Management Systems	Anggota Member
6	Senior Manager Keuangan Senior Manager of Finance	Anggota Member
7	Senior Manager SDM & Umum Senior Manager of Human Capital & General Affairs	Anggota Member
8	Senior Manager Komersial Senior Manager of Commercial	Anggota Member
9	Senior Manager Operasi & Terminal Satelit Senior Manager of Operations & Satellite Terminals	Anggota Member
10	Senior Manager Audit Internal Senior Manager of Internal Audit	Anggota Member
11	Branch Manager Jakarta Jakarta Branch Manager	Anggota Member

Profil Komite Investasi
Investment Committee Profile

Wing Mengatoro
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko
Ketua Komite Investasi
Director of Finance, HC and Risk Management
Chairman of Investment Committee

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Direksi, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.
The profile can be seen in the discussion of Board of Directors' Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Berry Tagore
Senior Manager Strategi & Pengembangan Bisnis
Sekretaris I
Senior Manager of Strategy & Business Development
Secretary I

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.
The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Tatan Sontana
Senior Manager Teknik & Sistem Informasi
Sekretaris 2
Senior Manager of Technical & Information Systems
Secretary 2

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.
The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Roro Endah Dwi Liesly Puspita Sari
Senior Manager Sekretaris Perusahaan
Anggota
Senior Manager of Corporate Secretary
Member

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.
The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Dawud
Senior Manager Manajemen Risiko & Sistem Manajemen
Anggota
Senior Manager of Risk Management & Management Systems
Member

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.
The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Ramadan Saleh
Senior Manager Keuangan
Anggota
Senior Manager of Finance
Member

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.
The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Safrial
Senior Manager SDM & Umum
Anggota
Senior Manager of HC & General Affairs
Member

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.
The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Nugroho Atmosudiro
Senior Manager Komersial
Anggota
Senior Manager of Commercial
Member

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.
The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Kusno Utomo
Senior Manager Operasi & Terminal Satelit
Anggota
Senior Manager of Operations & Satellite Terminal
Member

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.
The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Kamal Akhyar
Senior Manager Audit Internal
Anggota
Senior Manager of Internal Audit
Member

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.
The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Agus Edi Santoso
Branch Manager Jakarta
Anggota
Jakarta Branch Manager
Member

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.
The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Independensi Komite Investasi

Anggota Komite Investasi berkomitmen untuk menjaga sikap independen sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Setiap anggota Komite tidak memiliki keterkaitan afiliasi, baik secara keuangan, kepengurusan, maupun hubungan lainnya, dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, anggota Komite juga tidak memiliki kepemilikan saham Perseroan yang berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas dalam menyampaikan pandangan, pertimbangan, serta rekomendasi kepada manajemen.

Lebih lanjut, Komite Investasi memastikan tidak terdapat kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, Komite Investasi mampu menjalankan perannya secara profesional, objektif, dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, demi mendukung pengambilan keputusan yang terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan.

Pelaksanaan Tugas Komite Investasi

Komite Investasi menjalankan peran dan fungsinya dalam menelaah berbagai proposal investasi yang diajukan oleh unit kerja di lingkungan Perseroan. Komite melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelengkapan administrasi, keterkaitan usulan dengan arah dan rencana strategis Perseroan, serta mempertimbangkan potensi risiko dan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku pada setiap rencana investasi.

Sepanjang tahun 2025, Komite Investasi secara berkesinambungan menyampaikan saran dan rekomendasi kepada Direksi sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan investasi. Selain itu, Komite juga menjalin koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan unit pengusul untuk memastikan kualitas substansi dan kelengkapan dokumen usulan telah memenuhi standar tata kelola perusahaan yang ditetapkan.

Pelaksanaan Rapat dan Frekuensi Rapat Komite Investasi

Sepanjang tahun 2025, Komite Investasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 9 kali yang dilaksanakan baik secara tatap muka maupun daring. Setiap rapat didokumentasikan dan disusun secara terstruktur, kemudian disampaikan kepada Direksi sebagai bahan pertanggungjawaban serta dukungan terhadap proses pengambilan keputusan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tingkat kehadiran dan keterlibatan aktif seluruh anggota Komite dalam setiap rapat menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan fungsi strategisnya, khususnya dalam mendukung pengelolaan investasi Perseroan agar berjalan secara efektif dan selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Independence of Investment Committee

Members of Investment Committee are committed to maintaining their independence in accordance with the Good Corporate Governance Principles. No member of Committee has any affiliation—whether financial, managerial, or otherwise—with members of Board of Directors, Board of Commissioners, or Controlling Shareholders. Furthermore, Committee members do not hold shares in the Company that could potentially compromise their independence and objectivity in presenting views, considerations, and recommendations to management.

Furthermore, Investment Committee ensures that there are no personal interests or other interests that could give rise to conflicts of interest in the performance of its duties. By adhering to these principles, Investment Committee is able to carry out its role professionally, objectively, and free from the influence of any party, in order to support the best decision-making for the Company and all stakeholders.

Implementation of Investment Committee Duties

Investment Committee performs its role and functions in reviewing various investment proposals submitted by business units within the Company. The Committee conducts a comprehensive evaluation of administrative completeness, alignment of proposals with the Company's strategic direction and plans, and considers potential risks and the level of compliance with applicable regulations for each investment plan.

Throughout 2025, Investment Committee consistently provided advice and recommendations to Board of Directors as part of the investment decision-making process. Additionally, the Committee maintained intensive coordination and communication with the proposing units to ensure the substantive quality and completeness of proposal documents met established Corporate governance standards.

Meetings Implementation and Meeting Frequency of Investment Committee

Throughout 2025, Investment Committee held 9 meetings, conducted both in-person and online. Each meeting was documented and organized in a structured manner, then submitted to the Board of Directors as accountability material and support for a transparent and accountable decision-making process.

The attendance level and active engagement of all Committee members in every meeting demonstrate a strong commitment to fulfilling their strategic functions, particularly in supporting the Company's investment management to ensure it operates effectively and in alignment with the Good Corporate Governance principles.

Tabel Frekuensi Rapat Komite Investasi
Investment Committee Meeting Frequency

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
17 Februari 2025 February 17,2025	Pembahasan *Monitoring* Progress Realisasi Investasi SPMT Group s.d. Januari 2025 Discussion on Monitoring the Progress of SPMT Group Investment Realization until January 2025	1. Ahmad Fauzi (Plh. Senior Vice President Perencanaan Strategis PT Pelindo Multi Terminal) 2. Bernas P.D. Nababan MT (Senior Vice President Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 3. Rizaldy Hasian Harahap MT (Vice President Pengendalian Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 4. Nurwahyudi Panca Setiawan (Senior Vice President Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 5. Fahryanto (Vice President Perencanaan Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 6. Indra Siregar (Senior Vice President Teknologi Informasi PT Pelindo Multi Terminal) 7. Fernando Manurung (Vice President Perencanaan Dan Pengendalian TI PT Pelindo Multi Terminal) 8. Tatan Sontana (Senior Manager Teknik Dan Sistem Informasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 9. Pramujaya Simbolon (SM Teknik PT Pelabuhan Tanjung Priok) 1. Ahmad Fauzi (Acting Senior Vice President of Strategic Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 2. Bernas P.D. Nababan, MT (Senior Vice President of Port Facilities, PT Pelindo Multi Terminal) 3. Rizaldy Hasian Harahap, MT (Vice President of Port Facilities Control, PT Pelindo Multi Terminal) 4. Nurwahyudi Panca Setiawan (Senior Vice President of Port Equipment, PT Pelindo Multi Terminal) 5. Fahryanto (Vice President of Port Equipment Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 6. Indra Siregar (Senior Vice President of Information Technology, PT Pelindo Multi Terminal) 7. Fernando Manurung (Vice President of IT Planning and Control, PT Pelindo Multi Terminal) 8. Tatan Sontana (Senior Manager of Engineering and Information Systems, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 9. Pramujaya Simbolon (Senior Engineering Manager, PT Pelabuhan Tanjung Priok)
17 April 2025 April 17, 2025	*Monitoring* Realisasi Investasi SPMT Group s.d. Maret 2025 Monitoring of SPMT Group Investment Realization until March 2025	1. Ahmad Fauzi (Plh. Senior Vice President Perencanaan Strategis PT Pelindo Multi Terminal) 2. Bernas P.D. Nababan MT (Senior Vice President Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 3. Nurwahyudi Panca Setiawan (Senior Vice President Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 4. Indra Siregar (Senior Vice President Teknologi Informasi PT Pelindo Multi Terminal) 5. Pramujaya Simbolon (SM Teknik PT Pelabuhan Tanjung Priok) 6. Tatan Sontana (Senior Manager Teknik Dan Sistem Informasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 7. Fahryanto (Vice President Perencanaan Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 8. Nailul Abror Pohan (Vice President Perencanaan Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 9. Fernando Manurung (Vice President Perencanaan Dan Pengendalian TI PT Pelindo Multi Terminal) 1. Ahmad Fauzi (Acting Senior Vice President of Strategic Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 2. Bernas P.D. Nababan MT (Senior Vice President of Port Facilities, PT Pelindo Multi Terminal) 3. Nurwahyudi Panca Setiawan (Senior Vice President of Port Equipment, PT Pelindo Multi Terminal) 4. Indra Siregar (Senior Vice President of Information Technology, PT Pelindo Multi Terminal) 5. Pramujaya Simbolon (Senior Engineering Manager, PT Pelabuhan Tanjung Priok) 6. Tatan Sontana (Senior Manager of Engineering and Information Systems, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 7. Fahryanto (Vice President of Port Equipment Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 8. Nailul Abror Pohan (Vice President of Port Facilities Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 9. Fernando Manurung (Vice President of IT Planning and Control, PT Pelindo Multi Terminal)
19 Juni 2025 June 19, 2025	Pembahasan *Monitoring* Realisasi Investasi SPMT Group s.d. Mei 2025 Discussion on Monitoring of SPMT Group Investment Realization until May 2025	1. Imron Eryandy (Senior Vice President Perencanaan Strategis PT Pelindo Multi Terminal) 2. Bernas P.D. Nababan MT (Senior Vice President Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 3. Nurwahyudi Panca Setiawan (Senior Vice President Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 4. Indra Siregar (Senior Vice President Teknologi Informasi PT Pelindo Multi Terminal) 5. Emilda Andayani MM (Senior Vice President Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal) 6. Endar Dwi Sutristiono (Senior Vice President Anggaran, Akuntansi, dan Pelaporan PT Pelindo Multi Terminal) 7. Ahmad Fauzi (Vice President Perencanaan Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal) 8. Rizaldy Hasian Harahap MT (Vice President Pengendalian Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 9. Fahryanto (Vice President Perencanaan Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 10. Fernando Manurung (Vice President Perencanaan Dan Pengendalian TI PT Pelindo Multi Terminal) 11. Auriga (Vice President Risiko Non Operasional PT Pelindo Multi Terminal) 12. Tri Wahyudi (Vice President Akuntansi Umum dan Sistem Keuangan PT Pelindo Multi Terminal) 13. Pramujaya Simbolon (SM Teknik PT Pelabuhan Tanjung Priok) 14. Tatan Sontana (Senior Manager Teknik Dan Sistem Informasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 15. Fikhri Yandril (ASM Peralatan PT Pelabuhan Tanjung Priok) 16. Aan Susilastiyono (Asisten Senior Manager Teknik PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 1. Imron Eryandy (Senior Vice President of Strategic Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 2. Bernas P.D. Nababan MT (Senior Vice President of Port Facilities, PT Pelindo Multi Terminal) 3. Nurwahyudi Panca Setiawan (Senior Vice President of Port Equipment, PT Pelindo Multi Terminal) 4. Indra Siregar (Senior Vice President of Information Technology, PT Pelindo Multi Terminal) 5. Emilda Andayani MM (Senior Vice President of Risk Management, PT Pelindo Multi Terminal) 6. Endar Dwi Sutristiono (Senior Vice President of Budget, Accounting, and Reporting, PT Pelindo Multi Terminal) 7. Ahmad Fauzi (Vice President of Corporate Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 8. Rizaldy Hasian Harahap MT (Vice President of Port Facilities Control, PT Pelindo Multi Terminal) 9. Fahryanto (Vice President of Port Equipment Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 10. Fernando Manurung (Vice President of IT Planning and Control, PT Pelindo Multi Terminal) 11. Auriga (Vice President of Non-Operational Risk, PT Pelindo Multi Terminal) 12. Tri Wahyudi (Vice President General Accounting and Financial Systems, PT Pelindo Multi Terminal 13. Pramujaya Simbolon (Senior Engineering Manager, PT Pelabuhan Tanjung Priok) 14. Tatan Sontana (Senior Manager of Engineering and Information Systems, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 15. Fikhri Yandril (Senior Engineering Manager, PT Pelabuhan Tanjung Priok) 16. Aan Susilastiyono (Senior Assistant Manager of Engineering, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk)

Tabel Frekuensi Rapat Komite Investasi
Investment Committee Meeting Frequency

Tanggal Date	**Agenda Rapat** Meeting Agenda	**Peserta Rapat** Meeting Participants
04 Juli 2025 July 04, 2025	Pembahasan *Monitoring* Realisasi Investasi SPMT Group s.d. Juni 2025 Discussion on Monitoring of SPMT Group Investment Realization until June 2025	1. Imron Eryandy (Senior Vice President Perencanaan Strategis PT Pelindo Multi Terminal) 2. Bernas P.D. Nababan MT (Senior Vice President Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 3. Nurwahyudi Panca Setiawan (Senior Vice President Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 4. Endar Dwi Sutristiono (Senior Vice President Anggaran, Akuntansi, dan Pelaporan PT Pelindo Multi Terminal) 5. Emilda Andayani MM (Senior Vice President Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal) 6. Ahmad Fauzi (Vice President Perencanaan Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal) 7. Rizaldy Hasian Harahap MT (Vice President Pengendalian Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 8. Fahryanto (Vice President Perencanaan Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 9. Fernando Manurung (Vice President Perencanaan dan Pengendalian TI PT Pelindo Multi Terminal) 10. Tri Wahyudi (Vice President Akuntansi Umum dan Sistem Keuangan PT Pelindo Multi Terminal) 11. Auriga (Vice President Risiko Non Operasional PT Pelindo Multi Terminal) 12. Pramujaya Simbolon (SM Teknik PT Pelabuhan Tanjung Priok) 13. Davit Fikri (ASM Sarana dan Prasarana PT Pelabuhan Tanjung Priok) 14. Tatan Sontana (Senior Manager Teknik Dan Sistem Informasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 15. Aan Susilastiyono (Asisten Senior Manager Teknik PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 16. Fernando Manurung (Plh. Senior Vice President Teknologi Informasi PT Pelindo Multi Terminal) 17. Zaid Syahluthfy (Officer Pengendalian Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 18. Rasyid Anhar Siagian (Vice President Pengendalian Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 1. Imron Eryandy (Senior Vice President of Strategic Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 2. Bernas P.D. Nababan MT (Senior Vice President of Port Facilities, PT Pelindo Multi Terminal) 3. Nurwahyudi Panca Setiawan (Senior Vice President of Port Equipment, PT Pelindo Multi Terminal) 4. Endar Dwi Sutristiono (Senior Vice President of Budget, Accounting, and Reporting, PT Pelindo Multi Terminal) 5. Emilda Andayani MM (Senior Vice President of Risk Management, PT Pelindo Multi Terminal) 6. Ahmad Fauzi (Vice President of Corporate Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 7. Rizaldy Hasian Harahap MT (Vice President of Port Facilities Control, PT Pelindo Multi Terminal) 8. Fahryanto (Vice President of Port Equipment Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 9. Fernando Manurung (Vice President of IT Planning and Control, PT Pelindo Multi Terminal) 10. Tri Wahyudi (Vice President of General Accounting and Financial Systems, PT Pelindo Multi Terminal) 11. Auriga (Vice President of Non-Operational Risk, PT Pelindo Multi Terminal) 12. Pramujaya Simbolon (Senior Engineering Manager, PT Pelabuhan Tanjung Priok) 13. Davit Fikri (Senior Engineering Manager, PT Pelabuhan Tanjung Priok) 14. Tatan Sontana (Senior Manager of Engineering and Information Systems, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 15. Aan Susilastiyono (Senior Assistant Manager of Engineering, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 16. Fernando Manurung (Acting Senior Vice President of Information Technology, PT Pelindo Multi Terminal) 17. Zaid Syahluthfy (Officer of Port Equipment Control, PT Pelindo Multi Terminal) 18. Rasyid Anhar Siagian (Vice President of Port Equipment Control, PT Pelindo Multi Terminal)
05 Agustus 2025 August 05, 2025	Pembahasan Realisasi Investasi SPMT Group s.d. Juli 2025 Discussion on SPMT Group Investment Realization until July 2025	1. Imron Eryandy (Senior Vice President Perencanaan Strategis PT Pelindo Multi Terminal) 2. Bernas P.D. Nababan MT (Senior Vice President Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 3. Nurwahyudi Panca Setiawan (Senior Vice President Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 4. Indra Siregar (Senior Vice President Teknologi Informasi PT Pelindo Multi Terminal) 5. Emilda Andayani MM (Senior Vice President Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal) 6. Endar Dwi Sutristiono (Senior Vice President Anggaran, Akuntansi, dan Pelaporan PT Pelindo Multi Terminal) 7. Rizaldy Hasian Harahap MT (Vice President Pengendalian Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 8. Fahryanto (Vice President Perencanaan Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 9. Fernando Manurung (Vice President Perencanaan Dan Pengendalian TI PT Pelindo Multi Terminal) 10. Auriga (Vice President Risiko Non Operasional PT Pelindo Multi Terminal) 11. Tri Wahyudi (Vice President Akuntansi Umum dan Sistem Keuangan PT Pelindo Multi Terminal) 12. Ahmad Fauzi (Vice President Perencanaan Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal) 13. Pramujaya Simbolon (SM Teknik PT Pelabuhan Tanjung Priok) 14. Davit Fikri (ASM Sarana dan Prasarana PT Pelabuhan Tanjung Priok) 15. Tatan Sontana (Senior Manager Teknik Dan Sistem Informasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 16. Aan Susilastiyono (Asisten Senior Manager Teknik PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 17. Zaid Syahluthfy (Officer Pengendalian Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 18. Fidhaty Eyanur (Senior Officer Pengendalian Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 1. Imron Eryandy (Senior Vice President of Strategic Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 2. Bernas P.D. Nababan MT (Senior Vice President of Port Facilities, PT Pelindo Multi Terminal) 3. Nurwahyudi Panca Setiawan (Senior Vice President of Port Equipment, PT Pelindo Multi Terminal) 4. Indra Siregar (Senior Vice President of Information Technology, PT Pelindo Multi Terminal) 5. Emilda Andayani MM (Senior Vice President of Risk Management, PT Pelindo Multi Terminal) 6. Endar Dwi Sutristiono (Senior Vice President of Budget, Accounting, and Reporting, PT Pelindo Multi Terminal) 7. Rizaldy Hasian Harahap MT (Vice President of Port Facilities Control, PT Pelindo Multi Terminal) 8. Fahryanto (Vice President of Port Equipment Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 9. Fernando Manurung (Vice President of IT Planning and Control, PT Pelindo Multi Terminal) 10. Auriga (Vice President of Non-Operational Risk, PT Pelindo Multi Terminal)

Tabel Frekuensi Rapat Komite Investasi
Investment Committee Meeting Frequency

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
		11. Tri Wahyudi (Vice President Akuntansi Umum dan Sistem Keuangan PT Pelindo Multi Terminal) 12. Ahmad Fauzi (Vice President Perencanaan Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal) 13. Pramujaya Simbolon (SM Teknik PT Pelabuhan Tanjung Priok) 14. Davit Fikri (ASM Sarana dan Prasarana PT Pelabuhan Tanjung Priok) 15. Tatan Sontana (Senior Manager Teknik Dan Sistem Informasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 16. Aan Susilastiyono (Asisten Senior Manager Teknik PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 17. Zaid Syahluthfy (Officer Pengendalian Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 18. Fidhaty Eyanur (Senior Officer Pengendalian Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal)
04 September 2025 September 04, 2025	Pembahasan Realisasi Investasi SPMT Group s.d. Agustus 2025 Discussion on SPMT Group Investment Realization until August 2025	1. Imron Eryandy (Senior Vice President Perencanaan Strategis PT Pelindo Multi Terminal) 2. Bernas P.D. Nababan MT (Senior Vice President Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 3. Nurwahyudi Panca Setiawan (Senior Vice President Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 4. Endar Dwi Sutristiono (Senior Vice President Anggaran, Akuntansi, dan Pelaporan PT Pelindo Multi Terminal) 5. Emilda Andayani MM (Senior Vice President Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal) 6. Indra Siregar (Senior Vice President Teknologi Informasi PT Pelindo Multi Terminal) 7. Ahmad Fauzi (Vice President Perencanaan Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal) 8. Rizaldy Hasian Harahap MT (Vice President Pengendalian Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 9. Fahryanto (Vice President Perencanaan Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 10. Fernando Manurung (Vice President Perencanaan Dan Pengendalian TI PT Pelindo Multi Terminal) 11. Nailul Abror Pohan (Vice President Perencanaan Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 12. Auriga (Vice President Risiko Non Operasional PT Pelindo Multi Terminal) 13. Tri Wahyudi (Vice President Akuntansi Umum dan Sistem Keuangan PT Pelindo Multi Terminal) 14. Pramujaya Simbolon (SM Teknik PT Pelabuhan Tanjung Priok) 15. Davit Fikri (ASM Sarana dan Prasarana PT Pelabuhan Tanjung Priok) 16. Tatan Sontana (Senior Manager Teknik Dan Sistem Informasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 17. Aan Susilastiyono (Asisten Senior Manager Teknik PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 18. Fidhaty Eyanur (Senior Officer Pengendalian Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 19. Zaid Syahluthfy (Officer Pengendalian Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 20. Chandra Artika (Senior Officer Perencanaan Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal) 21. Rihol Togi Simamora (Senior Officer Perencanaan Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal) 1. Imron Eryandy (Senior Vice President of Strategic Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 2. Bernas P.D. Nababan MT (Senior Vice President of Port Facilities, PT Pelindo Multi Terminal) 3. Nurwahyudi Panca Setiawan (Senior Vice President of Port Equipment, PT Pelindo Multi Terminal) 4. Endar Dwi Sutristiono (Senior Vice President of Budget, Accounting, and Reporting, PT Pelindo Multi Terminal) 5. Emilda Andayani MM (Senior Vice President of Risk Management, PT Pelindo Multi Terminal) 6. Indra Siregar (Senior Vice President of Information Technology, PT Pelindo Multi Terminal) 7. Ahmad Fauzi (Vice President of Corporate Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 8. Rizaldy Hasian Harahap MT (Vice President of Port Facility Control, PT Pelindo Multi Terminal) 9. Fahryanto (Vice President of Port Equipment Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 10. Fernando Manurung (Vice President of IT Planning and Control, PT Pelindo Multi Terminal) 11. Nailul Abror Pohan (Vice President of Port Facility Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 12. Auriga (Vice President of Non-Operational Risk, PT Pelindo Multi Terminal) 13. Tri Wahyudi (Vice President of General Accounting and Financial Systems, PT Pelindo Multi Terminal) 14. Pramujaya Simbolon (Senior Engineering Manager, PT Pelabuhan Tanjung Priok) 15. Davit Fikri (Senior Facilities and Infrastructure Manager, PT Pelabuhan Tanjung Priok) 16. Tatan Sontana (Senior Manager of Engineering and Information Systems, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 17. Aan Susilastiyono (Assistant Senior Manager of Engineering, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 18. Fidhaty Eyanur (Senior Officer of Port Facilities Control, PT Pelindo Multi Terminal) 19. Zaid Syahluthfy (Officer of Port Equipment Control, PT Pelindo Multi Terminal) 20. Chandra Artika (Senior Officer of Corporate Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 21. Rihol Togi Simamora (Senior Officer of Corporate Planning, PT Pelindo Multi Terminal)

Tabel Frekuensi Rapat Komite Investasi
Investment Committee Meeting Frequency

Tanggal Date	**Agenda Rapat** Meeting Agenda	**Peserta Rapat** Meeting Participants
06 Oktober 2025 October 06, 2025	Pembahasan Realisasi Investasi SPMT Group s.d. September 2025 Discussion on SPMT Group Investment Realization until September 2025	1. Imron Eryandy (Senior Vice President Perencanaan Strategis PT Pelindo Multi Terminal) 2. Bernas P.D. Nababan MT (Senior Vice President Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 3. Nurwahyudi Panca Setiawan (Senior Vice President Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 4. Indra Siregar (Senior Vice President Teknologi Informasi PT Pelindo Multi Terminal) 5. Endar Dwi Sutristiono (Senior Vice President Anggaran, Akuntansi, dan Pelaporan PT Pelindo Multi Terminal) 6. Emilda Andayani MM (Senior Vice President Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal) 7. Ahmad Fauzi (Vice President Perencanaan Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal) 8. Rizaldy Hasian Harahap MT (Vice President Pengendalian Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 9. Fahryanto (Vice President Perencanaan Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 10. Fernando Manurung (Vice President Perencanaan Dan Pengendalian TI PT Pelindo Multi Terminal) 11. Tri Wahyudi (Vice President Akuntansi Umum dan Sistem Keuangan PT Pelindo Multi Terminal) 12. Auriga (Vice President Risiko Non Operasional PT Pelindo Multi Terminal) 13. Pramujaya Simbolon (SM Teknik PT Pelabuhan Tanjung Priok) 14. Davit Fikri (ASM Sarana dan Prasarana PT Pelabuhan Tanjung Priok) 15. Tatan Sontana (Senior Manager Teknik Dan Sistem Informasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 16. Aan Susilastiyono (Asisten Senior Manager Teknik PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 17. Zaid Syahluthfy (Officer Pengendalian Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 18. Rihol Togi Simamora (Senior Officer Perencanaan Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal) 19. Fidhaty Eyanur (Senior Officer Pengendalian Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 20. Irfan Cahyono (Asisten Senior Manager Sistem Informasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 21. Getsha Nagista (Asisten Senior Manager Sistem Manajemen dan QHSE PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 1. Imron Eryandy (Senior Vice President of Strategic Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 2. Bernas P.D. Nababan MT (Senior Vice President of Port Facilities, PT Pelindo Multi Terminal) 3. Nurwahyudi Panca Setiawan (Senior Vice President of Port Equipment, PT Pelindo Multi Terminal) 4. Indra Siregar (Senior Vice President of Information Technology, PT Pelindo Multi Terminal) 5. Endar Dwi Sutristiono (Senior Vice President of Budget, Accounting, and Reporting, PT Pelindo Multi Terminal) 6. Emilda Andayani MM (Senior Vice President of Risk Management, PT Pelindo Multi Terminal) 7. Ahmad Fauzi (Vice President of Corporate Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 8. Rizaldy Hasian Harahap MT (Vice President of Port Facilities Control, PT Pelindo Multi Terminal) 9. Fahryanto (Vice President of Port Equipment Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 10. Fernando Manurung (Vice President of IT Planning and Control, PT Pelindo Multi Terminal) 11. Tri Wahyudi (Vice President of General Accounting and Financial Systems, PT Pelindo Multi Terminal) 12. Auriga (Vice President of Non-Operational Risk, PT Pelindo Multi Terminal 13. Pramujaya Simbolon (Senior Engineering Manager, PT Pelabuhan Tanjung Priok) 14. Davit Fikri (Senior Facilities and Infrastructure Manager, PT Pelabuhan Tanjung Priok) 15. Tatan Sontana (Senior Manager of Engineering and Information Systems, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 16. Aan Susilastiyono (Senior Assistant Manager of Engineering, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 17. Zaid Syahluthfy (Officer of Port Equipment Control, PT Pelindo Multi Terminal) 18. Rihol Togi Simamora (Senior Officer of Corporate Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 19. Fidhaty Eyanur (Senior Officer of Port Facility Control, PT Pelindo Multi Terminal) 20. Irfan Cahyono (Senior Assistant Manager of Information Systems, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 21. Getsha Nagista (Senior Assistant Manager of Management Systems and QHSE, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk)

Tabel Frekuensi Rapat Komite Investasi
Investment Committee Meeting Frequency

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
06 November 2025 November 06, 2025	Pembahasan Realisasi Investasi SPMT Group s.d. Oktober 2025 Discussion on SPMT Group Investment Realization until October 2025	1. Imron Eryandy (Senior Vice President Perencanaan Strategis PT Pelindo Multi Terminal) 2. Bernas P.D. Nababan MT (Senior Vice President Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 3. Nurwahyudi Panca Setiawan (Senior Vice President Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 4. Indra Siregar (Senior Vice President Teknologi Informasi PT Pelindo Multi Terminal) 5. Endar Dwi Sutristiono (Senior Vice President Anggaran, Akuntansi, dan Pelaporan PT Pelindo Multi Terminal) 6. Emilda Andayani MM (Senior Vice President Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal) 7. Rizaldy Hasian Harahap MT (Vice President Pengendalian Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 8. Fahryanto (Vice President Perencanaan Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 9. Fernando Manurung (Vice President Perencanaan Dan Pengendalian TI PT Pelindo Multi Terminal) 10. Tri Wahyudi (Vice President Akuntansi Umum dan Sistem Keuangan PT Pelindo Multi Terminal) 11. Auriga (Vice President Risiko Non Operasional PT Pelindo Multi Terminal) 12. Ahmad Fauzi (Vice President Perencanaan Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal) 13. Pramujaya Simbolon (SM Teknik PT Pelabuhan Tanjung Priok) 14. Davit Fikri (ASM Sarana dan Prasarana PT Pelabuhan Tanjung Priok) 15. Tatan Sontana (Senior Manager Teknik Dan Sistem Informasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 16. Aan Susilastiyono (Asisten Senior Manager Teknik PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 1. Imron Eryandy (Senior Vice President of Strategic Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 2. Bernas P.D. Nababan MT (Senior Vice President of Port Facilities, PT Pelindo Multi Terminal) 3. Nurwahyudi Panca Setiawan (Senior Vice President of Port Equipment, PT Pelindo Multi Terminal) 4. Indra Siregar (Senior Vice President of Information Technology, PT Pelindo Multi Terminal) 5. Endar Dwi Sutristiono (Senior Vice President of Budget, Accounting, and Reporting, PT Pelindo Multi Terminal) 6. Emilda Andayani MM (Senior Vice President of Risk Management, PT Pelindo Multi Terminal) 7. Rizaldy Hasian Harahap MT (Vice President of Port Facilities Control, PT Pelindo Multi Terminal) 8. Fahryanto (Vice President of Port Equipment Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 9. Fernando Manurung (Vice President of IT Planning and Control, PT Pelindo Multi Terminal) 10. Tri Wahyudi (Vice President of General Accounting and Financial Systems, PT Pelindo Multi Terminal) 11. Auriga (Vice President of Non-Operational Risk, PT Pelindo Multi Terminal) 12. Ahmad Fauzi (Vice President of Corporate Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 13. Pramujaya Simbolon (Senior Engineering Manager, PT Pelabuhan Tanjung Priok) 14. Davit Fikri (Senior Engineering Manager, PT Pelabuhan Tanjung Priok) 15. Tatan Sontana (Senior Manager of Engineering and Information Systems, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 16. Aan Susilastiyono (Senior Assistant Manager of Engineering, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk)
05 Desember 2025 December 05, 2025	Pembahasan Realisasi Investasi SPMT Group s.d. November 2025 Discussion on SPMT Group Investment Realization until November 2025	1. Ahmad Fauzi (Plh. Senior Vice President Perencanaan Strategis PT Pelindo Multi Terminal) 2. Bernas P.D. Nababan MT (Senior Vice President Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 3. Nurwahyudi Panca Setiawan (Senior Vice President Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 4. Indra Siregar (Senior Vice President Teknologi Informasi PT Pelindo Multi Terminal) 5. Endar Dwi Sutristiono (Senior Vice President Anggaran, Akuntansi, dan Pelaporan PT Pelindo Multi Terminal) 6. Emilda Andayani MM (Senior Vice President Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal) 7. Rizaldy Hasian Harahap MT (Vice President Pengendalian Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 8. Fahryanto (Vice President Perencanaan Peralatan Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal) 9. Fernando Manurung (Vice President Perencanaan Dan Pengendalian TI PT Pelindo Multi Terminal) 10. Tri Wahyudi (Vice President Akuntansi Umum dan Sistem Keuangan PT Pelindo Multi Terminal) 11. Auriga (Vice President Risiko Non Operasional PT Pelindo Multi Terminal) 12. Pramujaya Simbolon (SM Teknik PT Pelabuhan Tanjung Priok) 13. Meirisal Dwi Waldi (SM Sistem Informasi PT Pelabuhan Tanjung Priok) 14. Davit Fikri (ASM Sarana dan Prasarana PT Pelabuhan Tanjung Priok) 15. Amie Maulana (ASM Pemeliharaan dan Peng.Hardware PT Pelabuhan Tanjung Priok) 16. Tatan Sontana (Senior Manager Teknik Dan Sistem Informasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 17. Irfan Cahyono (Asisten Senior Manager Sistem Informasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 1. Ahmad Fauzi (Acting Senior Vice President of Strategic Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 2. Bernas P.D. Nababan MT (Senior Vice President of Port Facilities, PT Pelindo Multi Terminal) 3. Nurwahyudi Panca Setiawan (Senior Vice President of Port Equipment, PT Pelindo Multi Terminal) 4. Indra Siregar (Senior Vice President of Information Technology, PT Pelindo Multi Terminal) 5. Endar Dwi Sutristiono (Senior Vice President of Budget, Accounting, and Reporting, PT Pelindo Multi Terminal) 6. Emilda Andayani MM (Senior Vice President of Risk Management, PT Pelindo Multi Terminal) 7. Rizaldy Hasian Harahap MT (Vice President of Port Facilities Control, PT Pelindo Multi Terminal) 8. Fahryanto (Vice President of Port Equipment Planning, PT Pelindo Multi Terminal) 9. Fernando Manurung (Vice President of IT Planning and Control, PT Pelindo Multi Terminal) 10. Tri Wahyudi (Vice President of General Accounting and Financial Systems, PT Pelindo Multi Terminal) 11. Auriga (Vice President of Non-Operational Risk, PT Pelindo Multi Terminal) 12. Pramujaya Simbolon (Senior Engineering Manager, PT Pelabuhan Tanjung Priok) 13. Meirisal Dwi Waldi (Senior Information Systems Manager, PT Pelabuhan Tanjung Priok) 14. Davit Fikri (Senior Facilities and Infrastructure Manager, PT Pelabuhan Tanjung Priok) 15. Amie Maulana (Senior Hardware Maintenance and Development Manager, PT Pelabuhan Tanjung Priok) 16. Tatan Sontana (Senior Engineering and Information Systems Manager, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk) 17. Irfan Cahyono (Senior Assistant Manager, Information Systems, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk)

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Keberadaan Sekretaris Perusahaan menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan terselenggaranya hubungan yang terbuka di lingkungan Perseroan serta memperkuat transparansi, kualitas layanan, serta efektivitas komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Sekretaris Perusahaan berfungsi sebagai organ pendukung Direksi yang memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan komunikasi antarorgan Perseroan, sekaligus bertindak sebagai penghubung antara Perseroan dengan regulator, pemegang saham, media, serta pihak eksternal lainnya. Melalui peran tersebut, Sekretaris Perusahaan membantu menjaga keselarasan kepentingan Perseroan dengan para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan di Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Selain menjalankan fungsi kesekretariatan, Sekretaris Perusahaan juga berperan dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan serta penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sekaligus mendukung pembentukan dan penguatan citra korporasi.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 10/POJK.04/2017;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan IPCC melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada beberapa pedoman kerja, di antaranya:

1. Pedoman *Good Corporate Governance*;
2. Pedoman Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi;

The role of Corporate Secretary is a strategic necessity to ensure open communication within the Company and to strengthen transparency, service quality, and the effectiveness of communication with all stakeholders as part of the implementation of Good Corporate Governance principles.

Corporate Secretary serves as a supporting organ to Board of Directors that plays a central role in coordinating communication among the Company's organs, while also acting as a liaison between the Company and regulators, shareholders, media, and other external parties. Through this role, Corporate Secretary helps maintain alignment of the Company's interests with those of stakeholders.

The performance of Corporate Secretary functions within the Company has been aligned with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 regarding the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies. In addition to performing secretarial functions, Corporate Secretaries also play a role in ensuring the Company's compliance with laws and regulations and the implementation of Good Corporate Governance principles, while supporting the development and strengthening of Corporate image
.

Legal Basis

1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
3. Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2014 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies as amended by Financial Services Authority Regulation 10/ POJK.04/2017;
4. Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;
5. Financial Services Authority Regulation Number 8/POJK.04/2015 concerning Issuer or Public Company Websites;
6. Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies;
7. Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies;
8. Financial Services Authority Circular Number 30/SEOJK.04/2016 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

Corporate Secretary Work Guidelines

IPCC Corporate Secretary carries out duties and responsibilities referring to several work guidelines, including:

1. Code of Good Corporate Governance
2. Guidelines for Work Procedures for Relationship between Board of Commissioners and Board of Directors

3. Pedoman *Sponsorship* atau Bentuk Bantuan Lainnya;
4. Pedoman Penyusunan dan Pembuatan Laporan Tahunan;
5. Pedoman Penyaluran Dana CSR;
6. Pedoman Pelaksanaan RUPS;
7. Pedoman Pengelolaan Informasi dengan Media; dan
8. Pedoman *Visit* dan *Field Trip*.

Struktur dan Organisasi

Susunan organisasi Sekretaris Perusahaan, termasuk penetapan pejabat dan pimpinan unit kerja yang berada di bawah koordinasinya, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor KP.428/1/1/IKT-18 tentang Alih Tugas/Jabatan bagi Pekerja di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 23 Juli 2018. Rincian struktur tersebut disajikan secara visual dalam bagan organisasi berikut ini:

3. Guidelines for Sponsorship or Other Forms of Assistance
4. Guidelines for Preparing and Preparing Annual Reports
5. Guidelines for Distribution of CSR Funds
6. Guidelines for Implementing GMS
7. Guidelines for Information Management with Media
8. Visit and Field Trip Guidelines

Structure and Organization

The organizational structure of Corporate Secretary, including the appointment of officials and heads of work units under his/her coordination, has been established through PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Directors Decree No. KP.428/1/1/IKT-18 regarding Reassignment of Duties/Positions for Employees within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dated July 23, 2018. Details of this structure are presented visually in the following organizational chart:

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan IPCC
Organizational Structure of IPCC Corporate Secretary

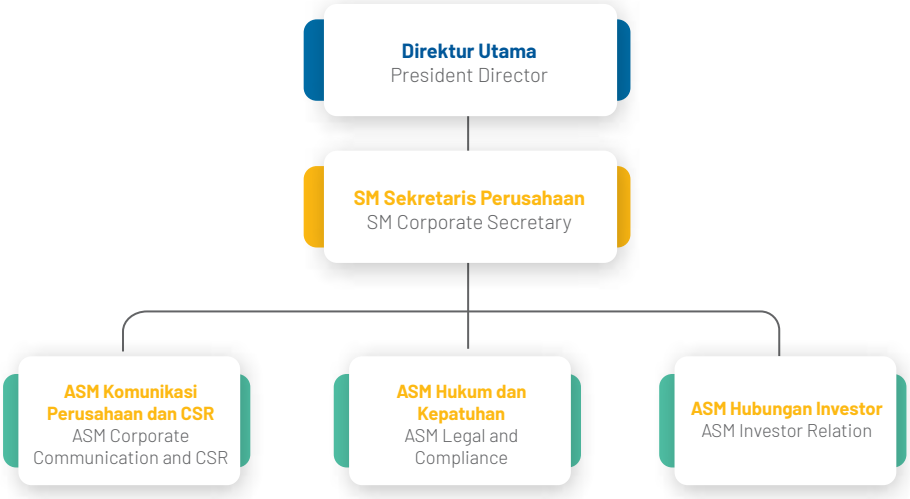

Sekretaris Perusahaan berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Guna mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut, Sekretaris Perusahaan didukung oleh 3 (tiga) divisi yang masing-masing memiliki ruang lingkup tugas dan tanggung jawab yang berbeda sebagai berikut:

1. Komunikasi Perseroan dan CSR;
2. Hukum dan Kepatuhan; dan
3. Hubungan Investor.

Masing-masing divisi tersebut dipimpin oleh seorang Asisten Senior Manajer (ASM).

Corporate Secretary operates under the coordination of and reports directly to the President Director. To ensure the effective performance of these functions, Corporate Secretary is supported by three divisions, each with distinct scopes of duties and responsibilities as follows:

1. Corporate Communication and CSR;
2. Legal and Compliance; and
3. Investor Relations.

Each division is led by an Assistant Senior Manager (ASM)

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile

Roro Endah Dwi Liesly Puspita Sari

Senior Manager Sekretaris Perusahaan
Menjabat sejak 1 Februari 2024
Senior Manager of Corporate Secretary
Serving Since February 1, 2024

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 45 tahun Berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia Indonesian citizen 45 years old Domiciled in DKI Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Menjabat sebagai Senior Manager Sekretaris Perusahaan berdasarkan surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/31/1/1/RKTK/SDMA/PLND-24 tanggal 31 Januari 2024 Served as Senior Manager of Corporate Secretary based on the Board of Directors Decree No. KP.10.02/31/1/1/RKTK/SDMA/PLND-24 dated January 31, 2024
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Maritime Economics and Logistics, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2014 • S1 Manajemen Universitas Gadjah Mada, 2004 • Master of Science in Maritime Economics and Logistics, Erasmus University Rotterdam, 2014 • Bachelor Degree in Management, Gadjah Mada University, 2004
Riwayat Karier Work Experience	• Senior Manager Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2022- Jan 2024) • Department Head Pemasaran Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2022) • Deputy Vice President Hubungan Pelanggan Non Peti Kemas PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019- 2021) • Deputy Vice President Pelayanan Pelanggan PT Pelabuhan Tanjung Priok (2018-2019) • Asisten Manager Customer Service PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2018) • Asisten Manager Komersial & Pengembangan Bisnis Tanjung Priok (2014-2015) • Senior Manager of Strategy and Business Development at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2022- Jan 2024) • Head of Regional Marketing Department 2 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2022) • Deputy Vice President of Non-Container Customer Relations at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2021) • Deputy Vice President of Customer Service at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2018-2019) • Assistant Manager of Customer Service at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2018) • Assistant Manager of Commercial & Business Development of Tanjung Priok (2014-2015)
Riwayat Pelatihan Training Experience	• Program Training & Executive Development 2024 – Pendampingan Persiapan Assessment di Lingkungan PT IKT Tbk, PT PMLI (5 – 6 Februari 2024) • Mastering The Art of Market – Friendly Investor Relations, PT PMLI (4 -5 Juli 2024) • Pelatihan Awareness ISO 9001, 14001, 45001, dan 37001, PT PMLI (12 -14 Agustus 2024) • Workshop BCM (Business Continuity Management) Tahun 2024, PT PMLI (30 September dan 1 Oktober 2024) • Pelatihan Auditor Internal ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 dan 37001:2016 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, PT PMLI (23 -24 Oktober 2024) • Training & Executive Development Program 2024 – Assessment Preparation Assistance in PT IKT Tbk Environment, PT PMLI (February 5 – 6, 2024) • Mastering The Art of Market – Friendly Investor Relations, PT PMLI (July 4-5, 2024) • ISO 9001, 14001, 45001, and 37001 Awareness Training, PT PMLI (August 12-14, 2024) • BCM (Business Continuity Management) Workshop 2024, PT PMLI (September 30 and October 1, 2024) • Internal Auditor Training ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 and 37001:2016 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, PT PMLI (October 23-24, 2024)

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Pedoman *Good Corporate Governance*, Sekretaris Perusahaan memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang meliputi berbagai aspek pendukung tata kelola perusahaan, antara lain sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Menata usahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan RUPS;
4. Mengelola Rapat Direksi;
5. Mengelola Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi;

Corporate Secretary Duties and Responsibilities

In accordance with the provisions set forth in the Work Guidelines for Relations Between Board of Commissioners and Board of Directors and the Good Corporate Governance Guidelines, Corporate Secretary has authority, duties, and responsibilities covering various aspects of Corporate governance support, including the following:

1. Ensure that the Company complies with regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles;
2. Provide information required by Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
3. Administer and store Company documents, including but not limited to, Shareholder Register, Special Register and minutes of Board of Directors' meetings, Board of Commissioners' meetings and the GMS;
4. Managing Board of Directors' Meetings;
5. Manage Joint Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors;

6. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perseroan secara umum;
7. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG;
8. Menangani dan mengoordinasi permasalahan legal Perseroan;
9. Menata usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perseroan;
10. Mengoordinasi program kerja dan aktivitas Sekretaris Direksi;
11. Mengikuti perkembangan/peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
12. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
13. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *stakeholders* atas informasi yang dibutuhkan modal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
14. Sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Perseroan dengan lembaga terkait dan masyarakat (luar dan lingkungan), termasuk penyusunan dan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tahun 2025

Selama tahun 2025, Sekretaris Perusahaan secara konsisten menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab yang mendukung kelancaran operasional, kepatuhan, serta penerapan tata kelola perusahaan di lingkungan Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
2. Menyelenggarakan dan memfasilitasi Rapat Dewan, Rapat gabungan Komisaris dan Direksi, dan Rapat Direksi beserta dengan pengelolaan Notulensi Rapat.
3. Pelaksanaan keterbukaan informasi melalui penerbitan Laporan Tahunan, Laporan Berkelanjutan, serta mempublikasikan Laporan Keuangan Perseroan
4. Menyelenggarakan *public expose*.
5. Pengelolaan media komunikasi resmi IPCC seperti situs web dan akun media sosial sebagai bentuk keterbukaan informasi dan promosi.
6. Pelaksanaan program media relations melalui siaran pers dan *media gathering* serta pemberitaan positif.
7. Melakukan penyampaian keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui media Televisi.
8. Melakukan pendampingan dalam kedinasan Direksi.
9. Membuat agenda kerja bagi Direksi.
10. *Monitoring* terhadap implementasi *corporate identity*.
11. Menerbitkan materi promosi *corporate* dan promosi layanan.
12. Pelaksanaan komunikasi kepada internal dengan mengadakan 1 (satu) kali Rapat Kerja Nasional.
13. Pelaksanaan *event* seperti Safari Ramadan, Halalbihalal, peringatan HUT Kemerdekaan RI, dan peringatan HUT IPCC.

6. Assist the Board of Directors in solving general Company issues;
7. Supervise the implementation of applicable regulations while remaining guided by GCG principles;
8. Handle and coordinate the Company's legal issues;
9. Administer and store Company documents;
10. Coordinate the work program and activities of Secretary of Board of Directors;
11. Follow applicable developments/regulations in the Capital Market sector;
12. Provide input to Board of Directors to comply with Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets;
13. Provide services to the public or stakeholders regarding information needed for capital related to the Company condition;
14. As a liaison officer between the Company and related institutions and the community (external and environmental), including the preparation and implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) Program.

Implementation of Duties and Responsibilities in 2025

Throughout 2025, Corporate Secretary consistently carried out its roles and functions in accordance with applicable regulations, performing various duties and responsibilities that support operational efficiency, compliance, and implementation of Corporate governance within the Company, including the following:

1. Organizing General Meetings of Shareholders
2. Organizing and facilitating Board Meetings, Joint Meetings of Commissioners and Directors, and Board of Directors Meetings along with managing the Meeting Minutes.
3. Carrying out information disclosure through the publication of Annual Reports, Sustainability Reports, and publishing the Company's Financial Reports
4. Organizing public exposes.
5. Managing IPCC's official communication media such as websites and social media accounts as a form of information disclosure and promotion.
6. Carrying out media relations programs through press releases and media gatherings as well as positive news.
7. Delivering information disclosure to the public through television media.
8. Providing assistance in the Board of Directors' official duties.
9. Creating a work agenda for Board of Directors.
10. Monitoring the implementation of Corporate identity.
11. Publishing Corporate promotional materials and service promotions.
12. Implementation of internal communication by holding 1 (one) National Working Meeting.
13. Implementation of events such as Safari Ramadan, Halalbihalal, commemoration of the Independence Day of the Republic of Indonesia, and commemoration of IPCC Anniversary.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Kebijakan

Penguatan kompetensi Sekretaris Perusahaan menjadi salah satu fokus Perseroan guna memastikan pelaksanaan fungsi kesekretariatan Perseroan berlangsung efektif, profesional, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 yang menegaskan kewajiban Sekretaris Perusahaan untuk memiliki pemahaman yang memadai terkait pasar modal, tata kelola perusahaan, dan regulasi yang berlaku.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Perseroan secara aktif memfasilitasi peningkatan kapasitas Sekretaris Perusahaan melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan pengembangan, seperti pelatihan, seminar, lokakarya, dan forum diskusi yang relevan, baik yang diselenggarakan oleh regulator, asosiasi pasar modal, maupun pihak eksternal lainnya, guna menjaga kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Selama tahun 2025, Sekretaris Perusahaan secara aktif berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan pelatihan dan pengembangan yang ditujukan untuk memperkuat wawasan serta kapabilitas dalam menjalankan fungsi strategisnya. Program-program tersebut mendukung peran Sekretaris Perusahaan sebagai penghubung Perseroan dengan para pemangku kepentingan, antara lain regulator, investor, dan masyarakat luas. Rincian kegiatan pengembangan yang diikuti disajikan pada tabel berikut ini:

Corporate Secretary Competency Development Program in 2025

Policy

Strengthening the competencies of Corporate Secretaries is one of the Company's priorities to ensure that Corporate secretarial functions are carried out effectively, professionally, and in accordance with applicable laws and regulations. These efforts are in line with Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies and Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015, which emphasizes the obligation of Corporate Secretaries to possess adequate understanding regarding the capital market, Corporate governance, and applicable regulations.

As a tangible form of support, the Company actively facilitates the capacity building of Corporate Secretaries through participation in various development activities, such as training, seminars, workshops, and relevant discussion forums, whether organized by regulators, capital market associations, or other external parties, to ensure the sustainable quality of the performance of duties and responsibilities.

Implementation of Training and/or Competency Development in 2025

Throughout 2025, Corporate Secretary actively participated in a number of training and development activities aimed at strengthening their knowledge and capabilities in performing their strategic functions. These programs support the Corporate Secretary's role as a liaison between the Company and its stakeholders, including regulators, investors, and the general public. Details of the development activities participated in are presented in the following table:

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2025
Training and Competency Development for Corporate Secretary in 2025

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Material	**Waktu Penyelenggaraan** Date	**Penyelenggara** Organizer
Roro Endah Dwi Liesly Puspita Sari (Senior Manager Sekretaris Perusahaan) Senior Manager of Corporate Secretary	*Workshop*	Workshop Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth bersama Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP dan Kukuh Workshop on Building Capacity and Infrastructure for Sustainable Growth with Bernardin Nainggolan, S.T., M.M., FRM, CRMP, CRGP, CRPP and Kukuh	5-6 Februari 2025 February 5–6, 2025	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
	Pelatihan Training	Pelatihan Dasar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Basic Training on Domestic Component Content (TKDN) for Corporate Procurement of Goods and Services	10-11 Februari 2025 February 10–11, 2025	PT Surveyor Indonesia
	Workshop	Podcast Leadership Forum Vol. 6 "Felt Leadership - Peran Leader Dalam Perubahan Budaya" Leadership Forum Podcast Vol. 6: "Felt Leadership—The Role of Leaders in Cultural Change"	7 Maret 2025 March 7, 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
	Pelatihan Training	Pelatihan AI For Productivity AI Training for Productivity	17 November 2025 November 17, 2025	Potensi Daya Sinergi
	Pelatihan Training	Fundamental Risk Management & Risk Assessment Techniques (Kelas 2-Lini 1) Fundamentals of Risk Management & Risk Assessment Techniques (Class 2 – Line 1)	18 November 2025 November 18, 2025	PT RAP Indonesia

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2025
Training and Competency Development for Corporate Secretary in 2025

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Waktu Penyelenggaraan Date	Penyelenggara Organizer
Mochamad Ilhamsyah (Asisten Senior Manager Komunikasi Perusahaan & CSR) Senior Assistant Manager of Corporate Communications & CSR	*Workshop*	Workshop Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth bersama Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP dan Kukuh Workshop on Building Capacity and Infrastructure for Sustainable Growth with Bernardin Nainggolan, S.T., M.M., FRM, CRMP, CRGP, CRPP and Kukuh	5-6 Februari 2025 February 5–6, 2025	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Community Development Officer (CDO) Community Development Officer (CDO) Certification	5-7 Maret 2025 March 5–7, 2025	Dampak Sosial Indonesia
	Workshop	Podcast Leadership Forum Vol. 6 "Felt Leadership - Peran Leader Dalam Perubahan Budaya" Leadership Forum Podcast Vol. 6: "Felt Leadership—The Role of Leaders in Cultural Change"	7 Maret 2025 March 7, 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
	Pelatihan Training	Refreshment Knowledge Map & Updating Critical Knowledge	20 Mei 2025 May 20, 2025	KM Plus
	Workshop	Workshop Innovation Experience	20-23 Mei 2025 May 20–23, 2025	Metranet
	Workshop	Workshop Kearsipan 2025 Archiving Workshop 2025	16-17 Juni 2025 June 16–17, 2025	PT Pelindo (Persero) dan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
	Pelatihan Training	Pelatihan AI For Productivity AI Training for Productivity	17 November 2025 November 17, 2025	Potensi Daya Sinergi
Cynthia Yasmine (Asisten Senior Manager Hubungan Investor) Senior Assistant Manager of Investor Relations	*Workshop*	Workshop Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth bersama Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP dan Kukuh Workshop on Building Capacity and Infrastructure for Sustainable Growth with Bernardin Nainggolan, S.T., M.M., FRM, CRMP, CRGP, CRPP and Kukuh	5-6 Februari 2025 February 5–6, 2025	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
	Workshop	Podcast Leadership Forum Vol. 6 "Felt Leadership - Peran Leader Dalam Perubahan Budaya" Basic Training on Domestic Component Content (TKDN) for Corporate Procurement of Goods and Services	7 Maret 2025 March 7, 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
	Pelatihan Training	Refreshment Knowledge Map & Updating Critical Knowledge	20 Mei 2025 May 20, 2025	KM Plus
	Pelatihan Training	Pelatihan dan Workshop ICoFR IcoFR Training and Workshops	22-23 Mei 2025 May 22–23, 2025	Parker Russel
	Pelatihan Training	Pelatihan AI For Productivity AI Training for Productivity	17 November 2025 November 17, 2025	Potensi Daya Sinergi
	Pelatihan Training	Fundamental Risk Management & Risk Assessment Techniques (Kelas 2-Lini 1) Fundamentals of Risk Management & Risk Assessment Techniques (Class 2 - Line 1)	18 November 2025 November 18, 2025	PT RAP Indonesia

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2025
Training and Competency Development for Corporate Secretary in 2025

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Material	**Waktu Penyelenggaraan** Date	**Penyelenggara** Organizer
Indri Wulandary (Asisten Senior Manager Hukum & Kepatuhan) Senior Assistant Manager of Law & Compliance	*Workshop*	Workshop Building Capacity & Facility Toward Sustainable Growth bersama Bernardin Nainggolan S.T. MM, FRM, CRMP, CRGP, CRPP dan Kukuh Workshop on Building Capacity and Infrastructure for Sustainable Growth with Bernardin Nainggolan, S.T., M.M., FRM, CRMP, CRGP, CRPP and Kukuh	5-6 Februari 2025 February 5–6, 2025	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
	Pelatihan Training	Pelatihan Dasar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Basic Training on Domestic Component Content (TKDN) for Corporate Procurement of Goods and Services	10-11 Februari 2025\ February 10–11, 2025	PT Surveyor Indonesia
	Workshop	Podcast Leadership Forum Vol. 6 "Felt Leadership - Peran Leader Dalam Perubahan Budaya" Leadership Forum Podcast Vol. 6: "Felt Leadership—The Role of Leaders in Cultural Change"	7 Maret 2025 March 7, 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
	Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Pelatihan Pendidikan Sertifikasi Auditor Hukum Indonesia Training for Indonesian Legal Auditor Certification	17-20 Maret 2025 dan Sertifikasi 9-10 April 2025 March 17–20, 2025 and Certification April 9–10, 2025	Jimly School Of Law And Government (JSLG)
	Workshop	Workshop Kearsipan 2025 Archiving Workshop 2025	16-17 Juni 2025 June 16–17, 2025	PT Pelindo (Persero) dan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
	Pelatihan Training	Pelatihan Awareness SMK3 Tahun 2025 SMK3 Awareness Training 2025	24-25 September 2025 September 24–25, 2025	PT Lingkar Tiga Consultant
	Pelatihan Training	Pelatihan AI For Productivity AI Training for Productivity	17 November 2025 November 17, 2025	Potensi Daya Sinergi
	Pelatihan Training	Fundamental Risk Management & Risk Assessment Techniques (Kelas 1-Beginner) Fundamentals of Risk Management & Risk Assessment Techniques (Class 1 – Beginner)	18 November 2025 November 18, 2025	PT RAP Indonesia
	Pelatihan Training	Pelatihan Auditor Internal Terintegrasi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & SMK3 PP RI 50/2012 Tahun 2025 Integrated Internal Auditor Training for ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, and SMK3 (Indonesian Government Regulation No. 50 of 2012) in 2025	20-21 November 2025 November 20–21, 2025	PT Lingkar Tiga Pilar

Audit Internal
Internal Audit

Perseroan menugaskan Divisi Audit Internal untuk mengawal agar seluruh kegiatan operasional dan aktivitas bisnis sehari-hari dijalankan selaras dengan kebijakan, sistem, serta prosedur Audit Internal yang telah ditetapkan. Audit Internal menjalankan fungsi pengawasan melalui pemberian keyakinan (*assurance*) dan jasa konsultasi yang bersifat independen dan objektif. Peran tersebut ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah bagi Perseroan serta mendorong perbaikan berkelanjutan atas proses operasional melalui pendekatan yang terstruktur, termasuk pengujian, penilaian, dan penyempurnaan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, serta mekanisme tata kelola perusahaan.

Sejalan dengan penerapan *Enterprise Risk Management* dengan pendekatan *three lines of defence*, auditor internal Perseroan berfungsi sebagai lini pertahanan ketiga. Dalam kapasitas ini, Audit Internal melaksanakan pengawasan secara independen terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit kerja lainnya, sehingga memastikan sistem pengendalian dan pengelolaan risiko berjalan secara memadai dan objektif.

Dasar Hukum

1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 67(1) yang menyatakan bahwa "Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas internal Perseroan".
2. POJK No. 56/POJK.04/2015 ("POJK 56/2015") tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Struktur dan Kedudukan Audit Internal

Fungsi Audit Internal ditempatkan secara strategis dalam struktur organisasi Perseroan melalui pembentukan Divisi Audit Internal yang berada langsung di bawah koordinasi Direktur Utama. Pimpinan Audit Internal dijabat oleh Senior Manager Audit yang mengemban tanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Audit Internal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan evaluasi kepada Direktur Utama serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit sesuai dengan kewenangannya. Pengaturan mengenai struktur organisasi dan tata kelola Audit Internal tersebut telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor HK.01/11/6/2/SDMU/DIRUT/IKT-24 tanggal 11 Juni 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kantor Pusat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

The Company has tasked the Internal Audit with ensuring that all operational activities and day-to-day business operations are conducted in accordance with established Internal Audit policies, systems, and procedures. Internal Audit performs its supervisory function by providing assurance and consulting services that are independent and objective. This role is intended to enhance value for the Company and drive continuous improvement in operational processes through a structured approach, including testing, evaluating, and refining the effectiveness of risk management, internal controls, and Corporate governance mechanisms.

In line with the implementation of Enterprise Risk Management using the three lines of defense approach, the Company's internal auditors serve as the third line of defense. In this capacity, Internal Audit conducts independent supervision of the implementation of duties and responsibilities by other business units, thereby ensuring that control and risk management systems operate adequately and objectively.

Legal Basis

1. Law No. 19 of 2003 concerning SOE article 67(1) which states that "In every SOE an internal supervision unit is formed which is the Company's internal supervisory apparatus".
2. POJK No. 56/POJK.04/2015 ("POJK 56/2015") concerning Establishment and Guidelines for Preparing the Internal Audit Unit Charter.

Internal Audit Structure and Position

The Internal Audit function is strategically positioned within the Company's organizational structure through the establishment of Internal Audit, which reports directly to the President Director. The head of Internal Audit is a Senior Audit Manager who reports directly to the President Director. Internal Audit submits reports on audit findings and evaluations to President Director and to Board of Commissioners through Audit Committee in accordance with its authority. The regulations regarding the organizational structure and governance of Internal Audit have been established through Board of Directors Decree No. HK.01/11/6/2/SDMU/DIRUT/IKT-24 dated June 11, 2024, concerning Organizational Structure and Governance of Head Office of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Struktur Organisasi Audit Internal IPCC
IPCC Internal Audit Organizational Structure

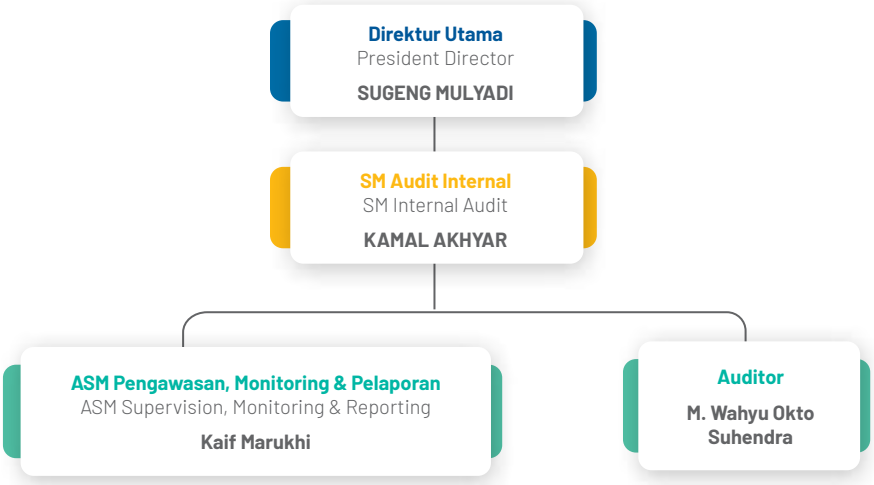

Fungsi Audit Internal perlu menjalin sinergi dengan Komite Audit yang difokuskan pada penyampaian dan pembahasan hasil pemeriksaan, termasuk identifikasi temuan audit serta pemantauan rencana aksi perbaikan yang harus dilaksanakan oleh unit terkait. Berdasarkan mekanisme tersebut, upaya perbaikan dapat dilakukan secara tepat waktu sehingga tidak menghambat pencapaian sasaran dan kinerja Perseroan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Kepala Audit Internal yang dijabat oleh Senior Manager Audit Internal diangkat dan diberhentikan langsung oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Komposisi Audit Internal

Mengacu pada Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor HK.01/11/6/2/SDMU/DIRUT/IKT-24 tanggal 11 Juni 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kantor Pusat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, pelaksanaan fungsi Audit Internal berada di bawah kepemimpinan seorang Senior Manager Audit Internal. Berdasarkan struktur tersebut, pimpinan Audit Internal didukung oleh 1(satu) orang Asisten Senior Manager yang membidangi pengawasan, *monitoring*, dan pelaporan, serta 2 (dua) orang Auditor Internal. Susunan personel Audit Internal Perseroan per 31 Desember 2025 dijabarkan sebagai berikut:

The Internal Audit function must collaborate with the Audit Committee, focusing on the presentation and discussion of audit results, including the identification of audit findings and the monitoring of corrective action plans to be implemented by the relevant units. Through this mechanism, corrective actions can be implemented in a timely manner, thereby ensuring they do not hinder the achievement of the Company's objectives and performance.

Party Who Appoints and Dismisses the Head of Internal Audit

Head of Internal Audit, held by Senior Manager of Internal Audit and Risk Management, is appointed and dismissed directly by the President Director with the Board of Commissioners approval. Internal Audit Composition approval.

Internal Audit Composition

Pursuant to the Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Regulation Number: HK.01/11/6/2/SDMU/DIRUT/IKT-24 dated June 11, 2024 concerning Organizational Structure and Governance of Head Office of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, in carrying out its duties and responsibilities, Internal Audit of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk is led by a Senior Manager of Internal Audit, assisted by one (1) Senior Assistant Manager for Supervision, Monitoring & Reporting and two (2) Internal Auditors. Internal Audit composition as of December 31, 2025, is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Kamal Akhyar	Senior Manager Audit Internal Senior Manager of Internal Audit	KP.10.02/1/1/1/RKTK/SDMA//PLND-23 tanggal 1 Januari 2023 KP.10.02/1/1/1/RKTK/SDMA//PLND-23 dated January 1, 2023
Kaif Marukhi	Asisten Senior Manager Pengawasan, Monitoring & Pelaporan Senior Assistant Manager of Supervision, Monitoring & Reporting	KP.10.02/13/2/1/PPSD/PPSD/PLMT-24 tanggal 13 Februari 2024 KP.10.02/13/2/1/PPSD/PPSD/PLMT-24 dated February 13, 2024
Muhammad Wahyu Okto Riendi	Senior Asisten Auditor Internal Senior Assistant of Internal Auditor	KP.10.02/13/2/1/PPSD/PPSD/PLMT-24 tanggal 13 Februari 2024 KP.10.02/13/2/1/PPSD/PPSD/PLMT-24 dated February 13, 2024
Suhendra	Junior Auditor Internal Junior Internal Auditor	KP.10.02/13/2/1/PPSD/PPSD/PLMT-24 tanggal 13 Februari 2024 KP.10.02/13/2/1/PPSD/PPSD/PLMT-24 dated February 13, 2024

Profil Senior Manager Audit Internal
Profile of Senior Manager of Internal Audit

Kamal Akhyar
Senior Manager Audit Internal
Senior Manager of Internal Audit

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 50 tahun Domisili di Medan, Indonesia Indonesian Citizen 50 years old Domiciled in Medan, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (PERSERO) No. KP.10.02/1/1/1/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 1 Januari 2023 Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (PERSERO) Decree No. KP.10.02/1/1/1/RKTK/ SDMA/ PLND-23 dated January 1, 2023
Riwayat Pendidikan Work Experience	• Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Sumatra Utara (1998) • Magister Sains dari Universitas Sumatra Utara (2005) • Magister Manajemen Transportasi dari Universitas Trisakti (2010) • Bachelor of Economics majoring in Management from North Sumatra University (1998) • Master of Science from North Sumatra University (2005) • Master of Transportation Management from Trisakti University (2010)
Riwayat Karier Work Experience	**Di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk** • Senior Manager Audit Internal (2024 – sekarang) • Senior Manager Audit Internal dan Management Risiko (2023 – 2024) • *Vice President* Pengendalian Internal Supporting SPI pada Subholding Pelindo Multi Terminal (2021-2022) • *Deputy Senior Vice* President SPI Pengawasan SDM dan Umum (2020-2021) • Wakil Kepala Satuan Pengawasan Internal Kantor Pusat (2019-2020) • Pengawas Bidang Khusus pada Satuan Pengawasan Internal Kantor Pusat (2016-2019) • Senior Manager Internal Audit (2024 - present) • Senior Manager Internal Audit and Risk Management (2023 - 2024) • Vice President Internal Control Supporting SPI at Pelindo Multi Terminal Subholding (2021-2022) • Deputy Senior Vice President SPI for HC and General Supervision (2020-2021) • Deputy Head of Internal Audit Unit at Head Office (2019-2020) • Special Field Supervisor at Head Office Internal Audit Unit (2016-2019)
Riwayat Pelatihan Training Record	• Diklat QIA Lanjutan 2 Angkatan A-212 (2019) • Diklat QIA Lanjutan 1 Angkatan A-222 (2018) • Diklat LPFA Fraud Audit 1 (2017) • Diklat QIA Dasar 2 Angkatan A-242 (2017) • Diklat QIA Dasar 1 Angkatan A-262 (2017) • Sosialisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sektor Transportasi (2013) • Sosialisasi Polis Asuransi PT Pelabuhan I (Persero) (2013) • Sosialisasi AVSEC Awareness International Airport (2012) • Port Management Course for Managers (2011) • Certified Human Resources Professional (2011) • Advanced QIA Training 2 Batch A-212 (2019) • Advanced QIA Training 1 Batch A-222 (2018) • LPFA Fraud Audit Training 1 (2017) • Basic QIA Training 2 Batch A-242 (2017) • Basic QIA Training 1 Batch A-262 (2017) • Socialization of the Community Satisfaction Index in Improving the Quality of Public Services in the Transportation Sector (2013) • Socialization of PT Pelabuhan I (Persero) Insurance Policy (2013) • AVSEC Awareness International Airport Socialization (2012) • Port Management Course for Managers (2011) • Certified Human Capital Professional (2011)

Independensi Audit Internal

Perseroan meyakini bahwa fungsi Audit Internal dilaksanakan oleh seluruh personelnya dengan menjunjung tinggi profesionalisme, objektivitas, dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Seluruh personel Audit Internal telah memenuhi ketentuan independensi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, sehingga mampu menjalankan peran pengawasan secara bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak mana pun. Uraian lebih lanjut mengenai pemenuhan aspek independensi tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Senior Manager Internal Audit dan pegawai Divisi Internal Audit tidak diperkenankan:
   a. Mempunyai wewenang atau tanggung Jawab operasional langsung atas kegiatan yang diaudit;
   b. Terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional;
   c. Jika Senior Manager Audit Internal diharapkan memiliki peran dan/atau tanggung jawab di luar audit internal, kerangka pengaman *(safeguards)* akan dibuat untuk membatasi terjadinya penurunan independensi dan objektivitas.
2. Audit Internal harus memiliki ketentuan atau prosedur yang mengatur pelaksanaan penugasan audit yang mampu menjaga objektivitas auditor dan Senior Manager Audit Internal atas objek yang diaudit.

Internal Audit Independence

The Company believes that the Internal Audit function is carried out by all its personnel with a commitment to professionalism, objectivity, and integrity in the performance of their duties. All Internal Audit personnel have met the independence requirements as stipulated in applicable regulations, thereby enabling them to perform their oversight role free from the influence or interests of any party. Further details regarding compliance with these independence requirements are presented as follows:

1. Senior Manager of Internal Audit and Internal Audit Division employees are not permitted to:
   a. Have direct operational authority or responsibility for the activities being audited;
   b. Be involved in decision-making in operational activities;
   c. If the Senior Manager of Internal Audit is expected to have a role and/or responsibility outside of internal audit, safeguards will be put in place to limit any impairment of independence and objectivity.
2. Internal Audit must have provisions or procedures governing the implementation of audit assignments that are capable of maintaining the objectivity of auditors and Senior Internal Audit Managers on the objects being audited.

Kualifikasi dan Sertifikasi sebagai Profesi Audit Internal

Perseroan senantiasa memotivasi dan memfasilitasi setiap individu, khususnya auditor internal untuk mengikuti program sertifikasi untuk meningkatkan kredibilitasnya. Terhitung per 31 Desember 2025, auditor internal Perseroan telah memegang sertifikasi sesuai dengan bidang audit internal, yang mencakup:

Internal Audit Qualifications and Certification

The Company consistently encourages and supports all employees, particularly internal auditors, to participate in certification programs to enhance their credibility. As of December 31, 2025, the Company's internal auditors have obtained certifications relevant to the field of internal auditing, including:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Sertifikasi** Certification
Kamal Akhyar	Senior Manager Audit Internal Senior Internal of Audit Manager	Sertifikasi QIA (Lanjutan) QIA Certification (Advanced)
Kaif Marukhi	Asisten Senior Manager Pengawasan, Monitoring & Pelaporan Senior Assistant Manager of Supervision, Monitoring & Reporting	Sertifikasi QIA (Dasar) QIA Certification (Basic
Muhammad Wahyu Okto Riendi	Senior Asisten Auditor Internal Senior Assistant of Internal Auditor	Qualified Internal Auditor (QIA) Qualified Internal Audit (QIA)
Suhendra	Junior Auditor Internal Junior Internal Auditor	Sertifikasi QIA (Lanjutan) QIA Certification (Advanced)

Visi, Misi, dan Tata Nilai Audit Internal

Internal Audit Vision, Mission and Values

Visi Vision	Misi Mision	Tata Nilai Values
Menjadi mitra strategis yang profesional, independen, dan objektif bagi manajemen dalam mewujudkan visi misi Perseroan. Become a professional, independent and objective strategic partner for management in realizing the Company's vision and mission.	1. Melaksanakan kegiatan *assurance* dan *consulting* yang independen dan objektif, untuk memberikan nilai tambah dalam peningkatan efektivitas *risk management, control* dan *governance process* di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; 2. Memberikan Jasa konsultasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal; dan 3. Meningkatkan kompetensi sehingga menjadi auditor yang profesional. 1. Carrying out independent and objective assurance and consulting activities, to provide added value in increasing the effectiveness of risk management, control and governance processes within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; 2. Providing consulting services in accordance with existing expertise to improve the quality of internal control; 3. Increase competence so that you become a professional auditor	Sebagai *strategic business partner*, Audit Internal PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk harus memberikan Nilai Tambah dan dapat dipercaya, melalui: 1. Perumusan strategi yang mendukung pencapaian tujuan Perseroan; 2. Struktur organisasi yang mendukung independensi; 3. Kompetensi auditor internal yang profesional; 4. Pelaksanaan internal audit yang berfokus pada area-area yang berisiko tinggi; dan 5. Penerapan teknologi yang mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan internal audit. As a strategic business partner, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Internal Audit must provide added value and be trustworthy, through: 1. Formulation of strategies that support the achievement of Company goals; 2. Organizational structure that supports independence; 3. Professional internal auditor competency; 4. Implementation of internal audits that focus on high risk areas; 5. Application of technology that supports the efficiency and effectiveness of implementing internal audit activities.

Piagam Audit Internal

Piagam Audit Internal IPCC ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada 31 Januari 2025 dengan mengacu pada ketentuan POJK 56/2015. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan utama dan landasan kerja yang mengatur pelaksanaan fungsi Audit Internal, serta menjadi pedoman yang wajib dipatuhi oleh seluruh auditor internal dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Internal Audit Charter

The IPCC Internal Audit Charter was established by the Board of Directors and Board of Commissioners on Januari 31, 2025, in accordance with the provisions of POJK 56/2015. This charter serves as the primary reference and operational framework governing the performance of internal audit functions, and constitutes a set of guidelines that all internal auditors must adhere to in carrying out their duties, authorities, and responsibilities.

Peran dan Fungsi Audit Internal

Peran dan fungsi Audit Internal antara lain:

1. Membantu Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan dan pelaksanaan audit, maupun pemantauan hasil audit;
2. Melakukan evaluasi atas semua Divisi dalam pengelolaan operasional Perseroan;
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif terhadap hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan hasil audit dan disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan *auditee*;
4. Memberikan jasa konsultasi internal Perseroan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan, selama tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SPI, serta didukung dengan sumber daya yang memadai;
5. Melaksanakan pemantauan hasil audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara periodik; dan
6. Melakukan audit pendalaman sesuai permintaan Direksi dan/atau Komisaris, sebagai tindak hasil lanjut audit rutin yang berpotensi mengandung indikasi pelanggaran dan/atau kecurangan apabila diperlukan.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Senior Manager Audit Internal dan Manajemen Risiko selaku Kepala Divisi Audit Internal memegang peran utama dalam mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan fungsi audit internal. Dalam kapasitas tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, pengawasan, serta penjaminan kualitas kegiatan Audit Internal sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku, dengan rincian tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan menggunakan metodologi berbasis risiko (*risk-based*) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan tersebut diserahkan untuk disetujui oleh Direktur Utama;
2. Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama serta melaporkan pelaksanaan pemeriksaan kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
3. Menjaga profesionalitas auditor dengan pengetahuan, keterampilan, dan etika yang diperlukan;
4. Melaporkan rangkuman hasil pemeriksaan secara periodik kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
5. Memberikan jasa konsultasi kepada manajemen di mana internal auditor tidak menjalankan tanggung jawab manajemen, misalnya menilai kecukupan pengendalian internal dari suatu sistem/proses yang akan diimplementasikan;
6. Melaksanakan program evaluasi kualitas Audit Internal. Hasil pelaksanaan program evaluasi dilaporkan kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
7. Berkoordinasi dengan fungsi kontrol dan pengawasan lainnya (misalnya auditor eksternal); dan
8. Melakukan audit investigasi atas aktivitas yang berindikasi kecurangan dan melaporkan hasil investigasi tersebut kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Internal Audit Role and Function

The role and function of Internal Audit include:

1. Assist the President Director and/or Board of Commissioners in carrying out supervision by explaining operationally both the planning and implementation of audits, as well as monitoring audit results;
2. Evaluate all divisions in the Company's operational management;
3. Provide suggestions for improvements and objective information regarding audit results in the form of audit results reports and submit them to President Director, Board of Commissioners and auditees;
4. Providing internal Company consulting services to provide added value and improve the quality of control, risk management and Corporate governance, as long as it does not affect the independence and objectivity of SPI, and is supported by adequate resources;
5. Monitor audit results and report periodically to President Director and Board of Commissioners;
6. Conduct in-depth audits as requested by Board of Directors and/or Board of Commissioners, as a follow-up to routine audits that have the potential to contain indications of violations and/or fraud if necessary.

Internal Audit Duties and Responsibilities

Senior Manager of Internal Audit and Risk Management, as Head of Internal Audit, plays a key role in coordinating and overseeing the implementation of internal audit functions. In this capacity, the individual is responsible for carrying out tasks, supervising, and ensuring the quality of internal audit activities in accordance with applicable regulations and guidelines, with the following specific responsibilities:

1. Prepare an Annual Supervision Work Program using a riskbased methodology and submit the Annual Supervision Work Program for approval to President Director;
2. Carry out the Annual Supervision Work Program which has been approved by the President Director and report the audit implementation to President Director and/or Board of Commissioners through Audit Committee;
3. Maintain the professionalism of auditors with the necessary knowledge, skills and ethics;
4. Report a summary of audit results periodically to President Director and/or Board of Commissioners through Audit Committee;
5. Providing consulting services to management where the internal auditor does not carry out management responsibilities, for example assessing the adequacy of internal control of a system/process to be implemented;
6. Implement the Internal Audit quality evaluation program. The results of evaluation program are reported to President Director and/or Board of Commissioners through Audit Committee;
7. Coordinate with other control and supervision functions (eg external auditors);
8. Conduct investigative audits on activities that indicate fraud and report the results of these investigations to President Director and/or Board of Commissioners through Audit Committee.

Wewenang Audit Internal

Dalam mengemban tugasnya, Audit Internal berwenang untuk:

1. Memiliki akses tak terbatas ke seluruh Divisi, dokumen (baik fisik dan elektronik), properti, dan personel yang terkait dengan penugasan audit;
2. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi pemeriksaan, memilih objek pemeriksaan, menentukan ruang lingkup pemeriksaan, serta menetapkan teknik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan;
3. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personel *auditee* saat melaksanakan pemeriksaan dan tenaga ahli lainnya, baik yang berasal dari internal PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk maupun dari pihak eksternal;
4. Memiliki akses untuk berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit; dan
5. Mendapat perlindungan dari Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya apabila menerima ancaman dari pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi maupun segala macam tuntutan dari pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas audit.

Internal Audit Authority

In carrying out its duties, Internal Audit has the authority to:

1. Have unlimited access to all Divisions, documents (both physical and electronic), property and personnel related to audit assignments;
2. Allocate resources, determine the frequency of inspections, select inspection objects, determine the scope of inspections, and determine the inspection techniques required to achieve inspection objectives;
3. Obtain the necessary assistance from auditee personnel when carrying out inspections and other experts, both from internal PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk and from external parties;
4. Have access to communicate directly with Board of Commissioners through Audit Committee;
5. Receive protection from the President Director and/or Board of Commissioners in carrying out their duties if they receive threats from other parties which could affect independence or all kinds of demands from other parties related to the implementation of audit duties.

Rapat Audit Internal dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

Kebijakan

Piagam Audit Internal PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk menegaskan pentingnya terjalinnya komunikasi yang terstruktur, efektif, dan berkelanjutan antara Divisi Audit Internal dengan Direksi, Dewan Komisaris, serta Komite Audit. Implementasi komunikasi tersebut dilakukan melalui keterlibatan aktif Divisi Audit Internal dalam berbagai forum dan rapat yang bersifat strategis, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian internal, pembahasan hasil audit, serta pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi audit.

Selain itu, Divisi Audit Internal secara berkala menyelenggarakan rapat koordinasi dengan *auditee* dan/atau Komite Audit guna memastikan kejelasan laporan audit serta kemajuan pelaksanaan perbaikan yang telah disepakati. Lebih lanjut, Piagam Audit Internal mengatur bahwa Senior Manager Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, sehingga mekanisme rapat menjadi sarana penting dalam menjaga independensi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal Perseroan.

Frekuensi Rapat

Berikut adalah rincian frekuensi kehadiran Divisi Audit Internal dalam rapat strategis sepanjang tahun 2025:

Internal Audit Meeting with Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee

Policy

The Internal Audit Charter of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk emphasizes the importance of maintaining structured, effective, and ongoing communication between Internal Audit and Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee. This communication is implemented through the Internal Audit's active participation in various strategic forums and meetings, particularly those related to internal controls, the discussion of audit results, and the monitoring of follow-up actions on audit recommendations.

In addition, Internal Audit periodically holds coordination meetings with the auditee and/or Audit Committee to ensure the clarity of audit reports and the progress of agreed-upon corrective actions. Furthermore, the Internal Audit Charter stipulates that the Senior Manager of Internal Audit reports directly to President Director and functionally to Board of Commissioners through Audit Committee; thus, the meeting mechanism serves as a vital tool in maintaining the independence, accountability, and effectiveness of the Company's internal supervisory function.

Meeting Frequency

Below are details regarding the Internal Audit's attendance at strategic meetings throughout 2025:

Frekuensi Kehadiran Rapat Audit Internal
Internal Audit Meeting Attendance Frequency

Uraian Description	Jumlah Rapat Total Meeting	Frekuesi Rapat Meeting Frequency
Rapat Direksi Board of Directors Meeting	4	100%
Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	4	100%
Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting	4	100%

Perencanaan dan Realisasi Aktivitas Audit Internal Tahun 2025

Perseroan memperhatikan dinamika dan perkembangan yang terjadi dalam organisasi IPCC. Perencanaan tersebut disusun dengan mengacu pada berbagai informasi terkait perubahan struktural, operasional, maupun kebijakan yang berpotensi memengaruhi proses bisnis Perseroan. Adapun pendekatan yang digunakan Perseroan, antara lain:

1. Pendekatan struktur organisasi;
2. Pendekatan program; dan
3. Pendekatan Proses Bisnis.

Proses perencanaan audit tahunan diatur dalam Prosedur Audit Internal IPCC, yang meliputi hal-hal berikut:

1. Memahami proses bisnis;
2. Menetapkan audit internal;
3. Menetapkan rencana audit;
4. Memberikan peringkat *audit universe* berdasarkan risiko dan frekuensi audit; dan
5. Menentukan rencana audit.

Program kerja pengawasan Audit Internal untuk tahun 2025 disusun dan ditetapkan oleh Senior Manager Audit Internal serta memperoleh pengesahan dari Direktur Utama. Dokumen program kerja tersebut memuat perencanaan aktivitas pengawasan yang menjadi instrumen dalam mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan fungsi audit internal. Fokus pengawasan diarahkan pada penguatan *Governance, Revenue Enhancement* dan *Cost Effectiveness*, disertai penyampaian rekomendasi yang memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

Adapun perencanaan kegiatan serta realisasi pelaksanaan Program Kerja Audit Internal tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Planning and Realization of Internal Audit Activities in 2025

The Company monitors the dynamics and developments within the IPCC organization. This plan was developed based on various pieces of information regarding structural, operational, and policy changes that could potentially impact the Company's business processes. The approaches used by the Company include:

1. Organizational structure approach;
2. Program approach; and
3. Business Process Approach.

The annual audit planning process is regulated in IPCC Internal Audit Procedure, which covers the following:

1. Understanding the business process;
2. Establishing an internal audit;
3. Establishing an audit plan;
4. Ranking the audit universe based on risk and audit frequency; and
5. Determining the audit plan.

The Internal Audit work program for 2025 was prepared and approved by Senior Manager of Internal Audit and endorsed by President Director. This work program document outlines the planning of supervisory activities, which serve as a tool to guide and control the implementation of internal audit functions. The focus of supervision is directed toward strengthening Governance, Revenue Enhancement, and Cost Effectiveness, accompanied by recommendations that provide added value to the Company.

The planning of activities and realization of the 2025 Internal Audit Work Program are outlined as follows:

Rencana Plan	**Realisasi** Realization
Laporan Manajemen Management Reports	Laporan Triwulan Tahun 2025. 2025 Quarterly Report
Pelaksanaan Audit Audit Implementation	1. Pelaksanaan Audit Rutin Semester II Tahun 2024. 2. Pelaksanaan Audit Rutin Semester I Tahun 2025. 1. Implementation of Routine Audits for Second Semester of 2024 2. Implementation of Routine Audits for First Semester of 2025
Monitoring Hasil Audit Monitoring Audit Results	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Audit yang Masih *Pending*. Completion of follow-up audit recommendations that are still pending
Pendampingan Auditor Eksternal External Auditor Assistance	Pendampingan KAP. KAP assistance
Self Assessment Internal Control	Penilaian Tingkat Efektivitas Pengendalian Internal Perseroan Tahun 2025. Assessment of the Level of Effectiveness of Company Internal Control in 2025
Peningkatan Kompetensi SDM Increasing HC Competency	Keikutsertaan Pelatihan dan Seminar. Participation in Training and Seminars

Laporan hasil audit dan *monitoring* audit disampaikan kepada Direktur Utama, Komisaris Utama, Komite Audit dan *Auditee* terkait.

Reports on audit results and audit monitoring are submitted to President Director, President Commissioner, Audit Committee and related Auditees.

Laporan Pelaksanaan Tugas Audit Internal Tahun 2025

Selama tahun 2025, Audit Internal menjalankan seluruh fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja tersebut didasarkan pada pendekatan audit berbasis risiko, sehingga kegiatan pengawasan difokuskan pada area-area yang memiliki tingkat risiko signifikan bagi Perseroan.

Adapun rangkaian kegiatan audit yang telah dilaksanakan oleh Audit Internal sepanjang tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

Report on the Implementation of Internal Audit Duties in 2025

Throughout 2025, Internal Audit carried out all of its functions and authorities in accordance with the established Annual Supervision Work Program (PKPT). The development and implementation of this work program were based on a risk-based audit approach, so that supervision activities were focused on areas posing significant risks to the Company.

The series of audit activities carried out by Internal Audit throughout 2025 included the following:

No	Kegiatan Activity	Waktu Time	Realisasi Pelaksanaan Implementation Realization
Kegiatan Audit Audit Activities			
1	Audit Rutin Semester II Tahun 2024. Routine Audit for Second Semester of 2024	1 Februari – 31 Maret 2025 February 1 – March 31, 2025	12 Februari – 28 Maret 2025 February 12 – March 28, 2025
2	Audit Rutin Semester I Tahun 2025. Routine Audit for First Semester of 2025	1 Juli – 31 Agustus 2025 July 1 – August 31, 2025	9 Juli – 4 September 2025 July 9 – September 4, 2025
3	*Monitoring* Tindak Lanjut Audit Audit Follow-Up Monitoring	Semester 1: 1 November – 31 Desember First Semester: November 1 – December 31	Semester 1: 3 November – 31 Desember 2025 First Semester: November 3 – December 31, 2025
		Semester 2: 1 Mei – 30 Juni 2025 Second Semester: May 1 – June 30, 2025	Semester 2: 5 Mei – 30 Juni 2025 Second Semester: May 5 – June 30, 2025
Kegiatan Non-Audit Audit Non-Activities			
1	Pelatihan dan Seminar Training and Seminars	Pelatihan QRMO, November 2025 QRMO Training, November 2025	10-12 November 2025 November 10–12, 2025
		Conference Audit Internal, Juli 2025 Internal Audit Conference, July 2025	2-3 Juli 2025 July 2–3, 2025
		Seminar nasional internal audit, Desember 2025 National Internal Audit Seminar, December 2025	3-4 Desember 2025 December 3–4, 2025
2	Survei Efektivitas Pengendalian Internal Perseroan Surveys on Effectiveness of Companies Internal Control	1-10 Januari 2026 January 1–10, 2026	19-30 Januari 2026 January 19–30, 2026

Hasil Temuan Audit Internal Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Audit Internal telah menghasilkan sejumlah temuan berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan. Setiap temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Adapun ringkasan hasil temuan Audit Internal beserta status dan perkembangan penyelesaian tindak lanjutnya diuraikan sebagai berikut:

Internal Audit Findings in 2025

Throughout 2025, Internal Audit identified a number of findings based on the supervisory activities it conducted. Each finding has been addressed by the relevant work units in accordance with the recommendations provided.

A summary of the Internal Audit findings, along with the status and progress of their resolution, is outlined below:

No	Judul Laporan Hasil Audit (LHA) Title of Audit Result Report (LHA)	Hasil Temuan Findings	Temuan yang Sudah Ditindaklanjuti Findings that Have Been Followed Up	Temuan yang Belum Ditindaklanjuti Unfollowed-up Findings
1	Laporan Hasil Audit Semester II Tahun 2024 Audit Results Report for First Semester of 2024	8	8	0
2	Laporan Hasil Audit Semester I Tahun 2025 Audit Results Report for First Semester of 2025	4	4	0

Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Tahun 2024-2025
Recapitulation of Findings and Follow-up for 2024-2025

Tahun Year	Jumlah Temuan Audit Internal Number of Internal Audit Findings		Sisa Temuan Per 31 Desember 2024 Remaining Findings as of December 31, 2024	Jumlah Rekomendasi		Sisa Rekomendasi yang Belum Ditindaklanjuti Per 31 Desember 2025 Remaining Unfollowed-up Recommendations as of December 31, 2025
	Sudah Ditindaklanjuti Has been followed up	Dalam Proses Tindak Lanjut In the Follow-up Process		Sudah Ditindaklanjuti Has been followed up	Dalam Proses Tindak Lanjut In the Follow-up Process	
Tahun 2024-Semester I 2024 - First Semester	3	-	-	10	-	-
Tahun 2024-Semester II 2024 - Second Semester	8	-	-	14	-	-
Tahun 2025-Semester I 2025 - First Semester	4	-	-	14	-	-
Tahun 2025-Semester II 2025 - Second Semester	(audit internal semester 2 2025 sedang berjalan sesuai jadwal pada program kerja pemeriksaan tahunan/PKPT) (Second Semester of 2025 Internal Audit is currently underway)	-	-	(audit internal semester 2 2025 sedang berjalan sesuai jadwal pada program kerja pemeriksaan tahunan/PKPT) (Second Semester of 2025 Internal Audit is currently underway)	-	-

Penyimpangan Internal

Penyimpangan internal atau *internal fraud* merupakan tindakan penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengurus maupun karyawan, baik berstatus tetap, tidak tetap, honorer, maupun tenaga alih daya, yang berkaitan dengan proses kerja serta aktivitas operasional Perseroan dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Sebagai langkah pencegahan, Perseroan menerapkan fungsi Audit Internal secara menyeluruh dan berkelanjutan pada seluruh lini kegiatan usaha. Apabila ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan atau kecurangan, Audit Internal akan menindaklanjutinya melalui pelaksanaan audit khusus atau investigasi sesuai ketentuan yang berlaku. Data mengenai kasus penyimpangan internal yang terjadi di Perseroan selama periode tahun 2024–2025 disajikan pada tabel berikut ini:

Internal Fraud

Internal fraud is any act of deviation or fraudulent activity committed by management or employees—whether permanent, non-permanent, contract, or outsourced staff—that relates to the Company's work processes and operational activities and has the potential to impact the Company's financial condition.

As a preventive measure, the Company implements a comprehensive and continuous Internal Audit function across all lines of business. If indications of irregularities or fraud are found, Internal Audit will follow up by conducting a special audit or investigation in accordance with applicable regulations. Data regarding cases of internal fraud that occurred at the Company during the 2024–2025 period is presented in the following table:

No	Penyimpangan Internal Internal Fraud	Pengurus Management		Karyawan Employees	
		2025	2024	2025	2024
1	Telah diselesaikan Has been completed	0	0	0	0
2	Dalam proses penyelesaian di internal di IPCC In the internal completion process at IPCC	0	0	0	0
3	Belum diupayakan penyelesaiannya No solution has been attempted yet	0	0	0	0
4	Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Has been followed up through legal proceedings	0	0	0	0

Program Pengembangan Kompetensi Audit Internal Tahun 2025

Internal Audit Competency Development Program in 2025

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Audit Internal Tahun 2025
Internal Audit Competency Training and Development for 2025

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Waktu Penyelenggaraan** Implementation Time	**Penyelenggara** Organizer
Kamal Akhyar (Senior Manager Audit Internal) Senior Manager of Internal Audit	Konferensi Conference	Konferensi Audit Internal (KAI) Tahun 2025 2025 Internal Audit Conference (KAI)	2-3 Juli 2025 July 2–3, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit
	Seminar Nasional National Seminar	Seminar Nasional Internal Audit 2025 2025 National Internal Audit Seminar	3-4 Desember 2025 December 3–4, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit
Kaif Marukhi (Asisten Senior Manager Pengawasan, Monitoring & Pelaporan) Assistant Senior Manager of Supervision, Monitoring & Reporting	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	Qualified Risk Management Officer Certificate Qualified Risk Management Officer Certificate	10-12 Desember 2025 December 10–12, 2025	CRMS Indonesia
Muhammad Wahyu Okto Riendi	Konferensi Conference	Seminar Nasional Internal Audit 2025 2025 National Internal Audit Seminar	3-4 Desember 2025 July 2–3, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit
Suhendra	Seminar Nasional National Seminar	Seminar Nasional Internal Audit 2025 2025 National Internal Audit Seminar	3-4 Desember 2025 December 3–4, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit

Akuntan Publik
Public Accountants

Selain menjalankan pengawasan melalui audit internal, Perseroan juga melibatkan mekanisme pemeriksaan oleh pihak eksternal yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Pelibatan auditor eksternal ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan memastikan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi yang berlaku.

Terkait pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan, Perseroan menunjuk KAP dan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK untuk melaksanakan audit secara independen. Audit tersebut dilakukan guna menilai kewajaran penyajian Laporan Keuangan Tahunan serta memberikan opini profesional mengenai kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan dan berkualitas.

Mekanisme Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, proses penetapan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dilaksanakan oleh Pemegang Saham melalui RUPS, dengan memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris. Mekanisme tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Berdasarkan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 17 Juni 2025, Perseroan menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti & Surja (*a Member Firm of* Ernst & Young *Global Network*) sebagai auditor independen. KAP tersebut ditugaskan untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, serta dapat melakukan penugasan audit lainnya apabila diperlukan, termasuk Audit Kinerja, Audit KPI, dan Audit Kepatuhan Tahun Buku 2025, sesuai dengan kepentingan Perseroan.

Tanggung Jawab Komite Audit dalam Pemberian Rekomendasi atas Penunjukan dan Pemberhentian Auditor Eksternal

Komite Audit berperan dalam memastikan proses audit di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) berlangsung secara independen, objektif, dan berintegritas. Salah satu fungsi kunci yang dijalankan adalah menyampaikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penetapan maupun penghentian penugasan auditor eksternal yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan keuangan tahunan Perseroan.

In addition to conducting supervisory activities through internal audits, the Company also engages external audit mechanisms carried out by parties authorized under applicable laws and regulations, including the Supreme Audit Agency (BPK), Financial Services Authority (OJK), and Public Accounting Firms (PAF). The engagement of these external auditors aims to strengthen accountability and ensure the Company's compliance with applicable regulations.

Regarding the audit of annual financial statements, the Company appoints Public Accounting Firms (PAF) and Public Accountants registered with the OJK to conduct independent audits. The audit is conducted to assess the fairness of presentation of Annual Financial Reports and to provide a professional opinion regarding their compliance with Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia, so that the resulting financial information is reliable and of high quality.

Mechanism for Appointing Public Accounting Firms

In accordance with the principles of Good Corporate Governance, the process of appointing a Public Accounting Firm and/or a Public Accountant is carried out by the Shareholders through the General Meeting of Shareholders, taking into account the recommendations submitted by the Board of Commissioners. This mechanism is implemented in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 regarding the use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in financial services activities.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders held on June 17, 2025, the Company appointed the Public Accounting Firm Purwanto Susanti & Surja (a Member Firm of the Ernst & Young Global Network) as its independent auditor. The Public Accounting Firm has been assigned to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025, and may undertake other audit engagements as required, including Performance Audits, KPI Audits, and Compliance Audits for 2025 fiscal year, in accordance with the Company's interests.

Audit Committee's Responsibilities in Providing Recommendations on the Appointment and Dismissal of External Auditors

Audit Committee plays a role in ensuring that the audit process at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) is conducted independently, objectively, and with integrity. One of its key functions is to provide considerations and recommendations to Board of Commissioners regarding the appointment and dismissal of external auditors responsible for auditing the Company's annual financial statements.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Komite Audit melakukan penilaian komprehensif terhadap auditor eksternal, yang mencakup aspek independensi, kompetensi profesional, pengalaman, pendekatan dan metodologi audit, serta kepatuhan terhadap standar audit yang berlaku. Penilaian juga mencakup efektivitas komunikasi antara auditor eksternal dengan manajemen dan Komite Audit, serta kualitas pelaksanaan proses audit secara keseluruhan.

Rekomendasi yang disampaikan diarahkan untuk memastikan auditor eksternal yang dipilih memiliki integritas dan kemampuan yang memadai dalam memberikan opini audit yang bebas dari pengaruh dan kepentingan tertentu. Selain itu, proses pemberian rekomendasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Dilandasi keterlibatan aktif tersebut, Komite Audit berkontribusi signifikan dalam memperkuat fungsi pengawasan Perseroan dan meningkatkan keyakinan para pemangku kepentingan terhadap keandalan serta kredibilitas laporan keuangan IPCC.

Koordinasi Akuntan Publik dan Komite Audit

Direksi dan Dewan Komisaris memperoleh dukungan dari Komite Audit dan Audit Internal dalam melakukan pengawasan atas seluruh tahapan proses audit. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa audit eksternal berjalan secara efektif, sesuai dengan standar audit yang berlaku, serta dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu sebagaimana jadwal yang telah disepakati.

Komite Audit secara berkala memantau kinerja Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk perkembangan pelaksanaan audit eksternal, melalui forum rapat yang melibatkan Audit Internal dan Direksi. Dalam rapat koordinasi tersebut, Komite Audit membahas hasil dan temuan audit yang disampaikan oleh auditor eksternal, sekaligus mendiskusikan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh manajemen guna memastikan penyelesaian temuan secara tepat dan memadai.

Lingkup Tugas serta Tanggung Jawab Manajemen dan Auditor Eksternal

Manajemen memegang tanggung jawab utama atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang andal serta memastikan kebenaran informasi yang disampaikan. Laporan keuangan tersebut harus disusun sesuai dengan standar audit dan ketentuan profesional yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia serta mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku.

Di sisi lain, auditor eksternal memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan secara independen dan objektif terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, auditor eksternal memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, khususnya terkait posisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan dalam suatu periode pelaporan.

In performing this function, Audit Committee conducts a comprehensive assessment of the external auditor, covering aspects of independence, professional competence, experience, audit approach and methodology, as well as compliance with applicable audit standards. The assessment also covers the effectiveness of communication between the external auditor and management and Audit Committee, as well as the quality of the overall audit process.

The recommendations provided are aimed at ensuring that the selected external auditor possesses the integrity and adequate capability to issue an audit opinion free from undue influence and specific interests. Furthermore, recommendation process is conducted in accordance with the principles of Good Corporate Governance, particularly regarding transparency and accountability in financial reporting.

Based on this active involvement, Audit Committee makes a significant contribution to strengthening the Company's supervisory function and enhancing stakeholders' confidence in the reliability and credibility of IPCC's financial statements.

Coordination of Public Accountants and Audit Committee

Board of Directors and Board of Commissioners receive support from Audit Committee and Internal Audit in supervising all stages of audit process. This supervision is conducted to ensure that external audit is carried out effectively, in accordance with applicable audit standards, and implemented in an orderly and timely manner as per agreed schedule.

Audit Committee periodically monitors the performance of Public Accountants and Public Accounting Firms, including the progress of external audits, through meetings involving Internal Audit and Board of Directors. During these coordination meetings, Audit Committee reviews the audit results and findings presented by external auditors, while also discussing follow-up actions that management must take to ensure the findings are resolved appropriately and adequately.

Scope of Duties and Responsibilities of Management and External Auditors

Management bears primary responsibility for the preparation and presentation of reliable financial statements and for ensuring the accuracy of information presented. These financial statements must be prepared in accordance with auditing standards and professional requirements established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and in accordance with applicable Professional Standards for Certified Public Accountants.

On the other hand, external auditors are responsible for conducting an independent and objective examination of the financial statements prepared by management. Based on the results of this examination, external auditors issue an opinion regarding the fairness of presentation of financial statements, particularly regarding the Company's financial position and operational performance during a reporting period.

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto Susanti & Surja dalam setiap penugasan *assurance* menerapkan prosedur dan standar sebagai berikut:

1. Kompeten, Independen dan Profesional;
2. Memiliki Integritas dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Mempersiapkan strategi audit dan melakukan penilaian risiko;
4. Melakukan pengujian untuk mendapatkan bukti audit yang memadai;
5. Memastikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; dan
6. Memberikan pernyataan pendapat (opini) mengenai laporan keuangan secara keseluruhan.

External Audit Procedures and Audit Standards

Purwanto Susanti & Surja Public Accounting Firm (PAF) in every assurance assignment applies the following procedures and standards:

1. Competent, Independent and Professional;
2. Have integrity in carrying out their duties;
3. Prepare audit strategies and carry out risk assessments;
4. Carrying out tests to obtain adequate audit evidence;
5. Ensure that financial reports comply with generally accepted accounting principles;
6. Provide a statement of opinion regarding the overall financial report.

Daftar Akuntan Publik Periode 5 (Lima) Tahun Terakhir

Sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan, Perseroan menyajikan informasi mengenai Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik yang ditunjuk, serta ruang lingkup jasa audit yang diberikan. Informasi tersebut juga mencakup besaran imbalan jasa audit laporan keuangan yang telah dibayarkan oleh Perseroan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, sebagaimana diuraikan berikut ini:

List of Public Accountants for the Last 5 (Five) Years

As a measure of transparency and accountability to stakeholders, the Company provides information regarding the Public Accounting Firm, appointed Public Accountants, and the scope of audit services provided. This information also includes the amount of audit fees for financial statements paid by the Company over the past 5 (five) years, as detailed below:

Tahun Buku Fiscal Year	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Nama Auditor** Auditor Name	**Biaya (Rp)** Fee	**Jasa Audit** Audit Services	**Opini Audit** Audit Opinion
2025	KAP Purwanto Susanti dan Surja (*a Member Firm of* Ernst & Young *Global Network*)	Mento	1.190.000.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar dalam semua hal yang material) Unqualified (Fair in all material respects)
2024	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*a Member Firm of* Ernst & Young *Global Network*)	Moch. Dadang Syachruna	1.035.000.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar dalam semua hal yang material) Unqualified (Fair in all material respects)
2023	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*a Member Firm of* Ernst & Young *Global Network*)	Moch. Dadang Syachruna	1.265.400.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar dalam semua hal yang material) Unqualified (Fair in all material respects)
2022	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*a Member Firm of* Ernst & Young *Global Network*)	Moch. Dadang Syachruna	1.176.600.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar dalam semua hal yang material) Unqualified (Fair in all material respects)
2021	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*a Member Firm of* Ernst & Young *Global Network*)	Moch. Dadang Syachruna	984.500.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar dalam semua hal yang material) Unqualified (Fair in all material respects)

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal di Perseroan dipahami sebagai rangkaian mekanisme dan prosedur yang dirancang secara terpadu serta diterapkan secara konsisten dalam seluruh aktivitas pimpinan dan karyawan. Perseroan meyakini bahwa keberadaan pengendalian internal yang menyeluruh dan terintegrasi merupakan prasyarat penting agar kegiatan operasional sehari-hari dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan, sehingga pencapaian sasaran dan tujuan usaha Perseroan tetap terjaga. Penerapan pengendalian internal yang memadai juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pelaksanaan pengendalian internal diarahkan untuk menjaga dan mengamankan aset Perseroan, memastikan keandalan serta kredibilitas laporan keuangan, meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meminimalkan potensi risiko kerugian, *fraud*, dan penyimpangan. Selain itu, pengendalian internal diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas organisasi serta mendukung tercapainya tujuan strategis Perseroan.

Sebagai upaya memastikan sistem tersebut tetap relevan dan berjalan secara optimal, Perseroan melakukan pemantauan dan penilaian secara berkesinambungan terhadap efektivitas pengendalian internal dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Evaluasi dilakukan secara berkala pada seluruh proses bisnis dan jenjang organisasi, dan hasilnya digunakan oleh manajemen sebagai dasar dalam merumuskan langkah perbaikan serta penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal secara berkelanjutan.

The Company's Internal Control System is understood as a set of mechanisms and procedures that are designed in an integrated manner and consistently applied across all activities of management and employees. The Company believes that the existence of comprehensive and integrated internal controls is a critical prerequisite for ensuring that daily operational activities proceed effectively and sustainably, thereby safeguarding the achievement of the Company's business objectives and goals. The implementation of adequate internal controls is also an integral part of the implementation of Good Corporate Governance principles.

The implementation of internal controls is aimed at safeguarding the Company's assets, ensuring the reliability and credibility of financial statements, enhancing compliance with applicable laws and regulations, and minimizing the potential risks of loss, fraud, and irregularities. Additionally, internal controls are expected to drive organizational effectiveness and support the achievement of the Company's strategic objectives.

To ensure the system remains relevant and operates optimally, the Company continuously monitors and assesses the effectiveness of internal controls, taking into account the dynamics of changes in both the internal and external environments. Evaluations are conducted periodically across all business processes and organizational levels, and the results are used by management as a basis for formulating corrective actions and continuously improving the Internal Control System.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan COSO - *Internal Control Framework*

Penerapan sistem pengendalian internal di Perseroan disusun dan dijalankan dengan merujuk pada kerangka kerja yang diakui secara internasional, yakni COSO *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Kerangka ini menjadi acuan utama dalam perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi pengendalian internal Perseroan, sehingga setiap unsur pengendalian dapat berjalan secara terstruktur, konsisten, dan terintegrasi. Gambaran penerapan kerangka COSO tersebut dalam lingkungan Perseroan disajikan pada bagan berikut ini:

Compliance of Internal Control Systems with COSO - Internal Control Framework

The implementation of internal control systems at the Company is designed and executed in accordance with an internationally recognized framework, namely COSO Internal Control Integrated Framework, developed by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. This framework serves as the primary reference in the design, implementation, and evaluation of the Company's internal controls, ensuring that each control element operates in a structured, consistent, and integrated manner. An overview of the application of COSO framework within the Company is presented in the following diagram:



1. **Lingkungan Pengendalian**
   Lingkungan pengendalian adalah dasar dari seluruh komponen sistem pengendalian internal yang mampu membuat suatu organisasi perusahaan menjadi lebih disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian internal di dalam organisasi.

   Implementasi di Perseroan:
   a. Menunjukkan komitmen terhadap Nilai-Nilai Budaya dan Etika.
   b. Pembentukan Struktur Organisasi yang menggambarkan pemisahan fungsi dan tugas dari masing-masing organ Perseroan.
   c. Komitmen terhadap kompetensi.
   d. Menjunjung tinggi sikap profesionalisme dan akuntabilitas.

2. **Penilaian Risiko**
   Penilaian risiko dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko pada setiap fungsi yang ada di Perseroan. Sebuah penilaian risiko yang komprehensif memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap potensi risiko, sehingga akan memudahkan manajemen dalam merumuskan upaya mitigasi yang diperlukan sehingga akibat yang ditimbulkan dari risiko tersebut dapat diminimalisir.

   Implementasi di Perseroan:
   Mengidentifikasi dan menganalisis risiko berdasarkan dampak dan kecenderungan yang dijabarkan dalam suatu matriks risiko yang menggambarkan tingkat risiko pada masing-masing fungsi.

3. **Prosedur Pengendalian**
   Prosedur pengendalian merupakan kebijakan ataupun prosedur yang diciptakan untuk bisa memastikan tercapainya tujuan Perseroan dan juga mencegah terjadinya kecurangan yang mungkin bisa terjadi.

1. **Control Environment**
   The control environment is the basis of all components of internal control system which is able to make a Company organization more disciplined and structured. The control environment includes organizational atmosphere and attitudes of management and employees towards the importance of internal control in the organization.

   Implementation in the Company:
   a. Demonstrate commitment to Cultural and Ethical Values.
   b. Establishment of an Organizational Structure that describes the separation of functions and duties of each Company organ.
   c. Commitment to competence.
   d. Upholding an attitude of professionalism and accountability.

2. **Risk Assessment**
   Risk assessment is carried out by identifying, analyzing and evaluating risks in each function in the Company. A comprehensive risk assessment allows a better understanding of potential risks, making it easier for management to formulate the necessary mitigation efforts so that the consequences of these risks can be minimized.

   Implementation in the Company:
   Identify and analyze risks based on impacts and trends described in a risk matrix that describes the level of risk for each function.

3. **Control Procedures**
   Control procedures are policies or procedures created to ensure the achievement of Company goals and also prevent fraud that might occur.

Implementasi di Perseroan:
a. Memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian.
b. Menyusun kebijakan dan prosedur maupun petunjuk teknis yang bertujuan untuk mendukung aktivitas pengendalian internal.

4. **Informasi dan Komunikasi**
Perseroan menyadari bahwa informasi yang valid dan akurat sangat diperlukan oleh pihak eksternal. Komunikasi yang dimaksud dalam komponen ini juga melibatkan penyediaan atas suatu pemahaman yang lebih jelas terkait peran dan tanggung jawab seseorang yang berkaitan dengan pengendalian internal pada laporan keuangan.

Implementasi di Perseroan:
a. Mengembangkan dan mengontrol Sistem Akuntansi, informasi dan komunikasi baik secara internal maupun eksternal untuk menghasilkan informasi yang relevan.
b. Menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang relevan, terpercaya, tepat waktu dan konsisten agar dapat memberikan informasi kepada seluruh *stakeholders*.

5. **Pengawasan**
Pengawasan adalah suatu upaya yang dilakukan manajemen untuk menilai apakah sistem pengendalian internal sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui area-area pengendalian internal yang perlu ditingkatkan penerapannya ke depan.

Implementasi di Perseroan:
a. Melakukan evaluasi dan kontrol secara terus-menerus.
b. Mengomunikasikan setiap aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.
c. Pengelolaan risiko melalui Sistem Pengendalian Internal harus dibuat secara terstruktur dan pendekatan yang digunakan oleh Perseroan mengacu pada pendekatan model *Three Lines of Defense* (LOD). Dengan pendekatan ini diharapkan setiap risiko dan kontrol dapat dikelola secara efektif oleh fungsi-fungsi terkait yang ada di Perseroan.

Konsep Tiga Lini Pertahanan

Model Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) merupakan kerangka pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang menjelaskan pembagian peran secara jelas dalam suatu perusahaan. Model ini menekankan bahwa setiap lini memiliki tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi, sehingga pengelolaan risiko dapat berjalan lebih terstruktur, terkoordinasi, dan efektif, baik pada perusahaan berskala kecil maupun besar.

Direksi dan Manajemen perlu memahami secara mendalam pembedaan fungsi antar-lini agar penugasan peran dapat dilakukan secara optimal dan mendukung pencapaian tujuan Perseroan. Skema hubungan dan peran masing-masing lini pertahanan tersebut ditunjukkan pada ilustrasi berikut:

Implementation in the Company:
a. Select and develop control activities.
b. Develop policies and procedures as well as technical instructions aimed at supporting internal control activities.

4. **Information and Communication**
The Company realizes that valid and accurate information is needed by external parties. The communication referred to in this component also involves providing a clearer understanding regarding a person's role and responsibilities relating to internal control in financial reports.

Implementation in the Company:
a. Develop and control the accounting, information and communication systems both internally and externally to produce relevant information.
b. Implement relevant, reliable, timely and consistent information and communication systems to provide information to all stakeholders.

5. **Supervision**
Supervision is an effort made by management to assess whether the internal control system is running according to plan or not. Supervision is carried out to identify areas of internal control that need to be improved in the future.

Implementation in the Company:
a. Conduct continuous evaluation and control.
b. Communicate any aspects that need to be improved or enhanced.
c. Risk management through the Internal Control System must be structured and the approach used by the Company refers to the Three Lines of Defense (LOD) model approach. With this approach, it is hoped that every risk and control can be managed effectively by related functions in the Company.

Three Lines of Defense Concept

The Three Lines of Defense model is a framework for risk management and internal control that clearly defines the division of roles within a Company. This model emphasizes that each line has distinct yet complementary responsibilities, enabling risk management to operate in a more structured, coordinated, and effective manner, whether in small or large companies.

Board of Directors and Management must have a deep understanding of the functional distinctions between the lines so that role assignments can be optimized and support the achievement of the Company's objectives. The relationships and roles of each line of defense are illustrated in the following diagram:

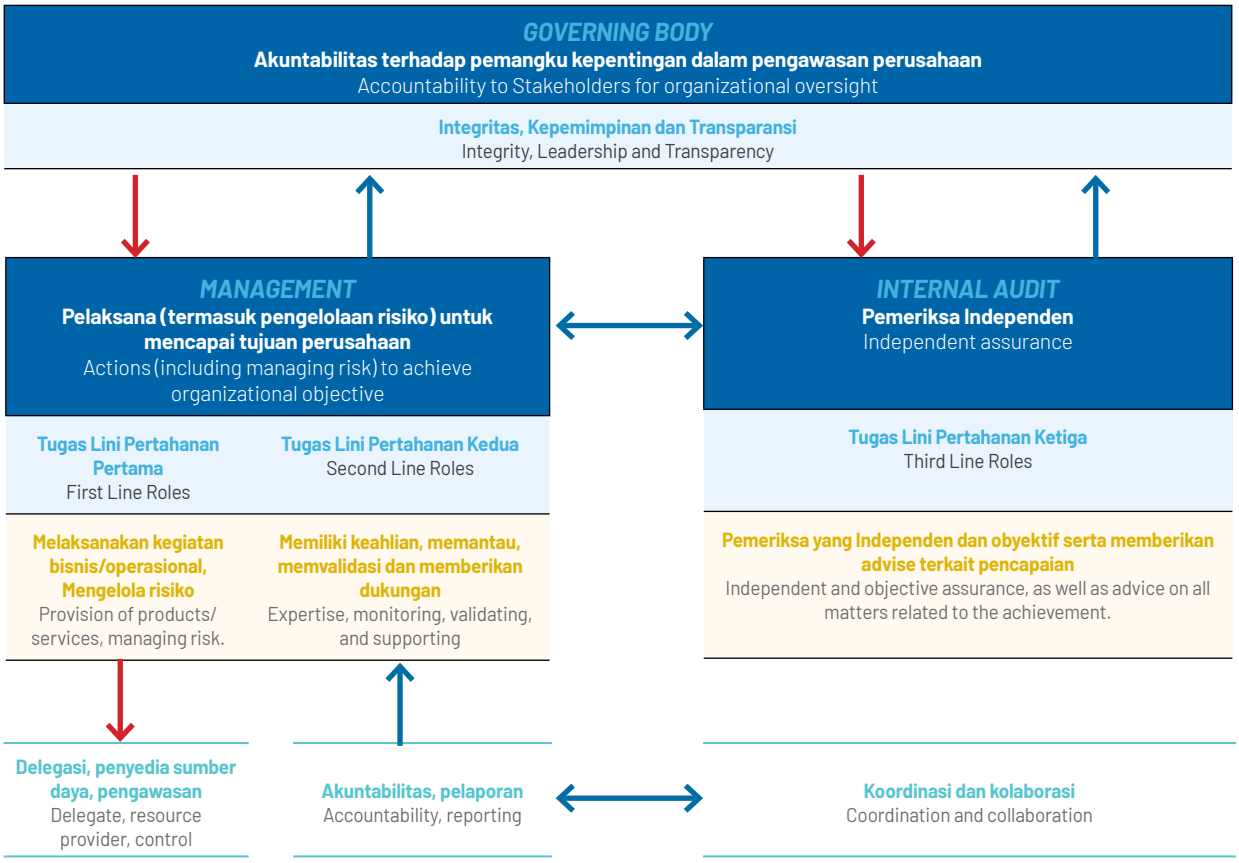

Dalam tata kelola perusahaan membutuhkan ketepatan struktur dan proses yang memungkinkan:

1. Akuntabilitas kepada Stakeholder untuk pengawasan perusahaan melalui integritas, kepemimpinan, dan transparansi;
2. Tindakan (termasuk mengelola risiko) oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pengambilan keputusan berbasis risiko dan penerapan sumber daya;
3. *Assurance* dan saran dari audit internal yang independen untuk memberikan kejelasan dan kepercayaan diri untuk melakukan perbaikan secara terus menerus, melalui pemeriksaan yang teliti dan komunikasi berwawasan.

Peran Manajemen dan Audit Internal memang tidak sama, namun keduanya perlu bergerak dalam arah yang sejalan dengan sasaran strategis Perseroan. Keselarasan tersebut hanya dapat tercapai apabila terdapat sinergi yang dibangun melalui mekanisme koordinasi yang jelas, kerja sama yang konstruktif, serta pertukaran informasi yang berkesinambungan. Dibekali pola interaksi yang terstruktur dan komunikatif, setiap fungsi dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa berjalan sendiri-sendiri, sehingga pengelolaan perusahaan tetap terpadu dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh.

In Corporate governance, it requires the precision of structures and processes that enable:

1. Accountability to stakeholders for Corporate supervision through integrity, leadership, and transparency;
2. Actions (including risk management) by management to achieve Corporate objectives through risk-based decision making and resource allocation;
3. Assurance and advice from an independent internal audit to provide clarity and confidence to make continuous improvements, through careful inspection and insightful communication.

The roles of management and internal audit are indeed different, but both must move in a direction aligned with the Company's strategic objectives. Such alignment can only be achieved through synergy fostered by clear coordination mechanisms, constructive cooperation, and continuous information exchange. Equipped with structured and communicative interaction patterns, each function can perform its duties optimally without operating in isolation, ensuring that Corporate management remains integrated and supports the achievement of the organization's overall objectives.

1. ***Governing Body:***
   Governing Body adalah Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan/atau mengawasi Persroan yang memastikan adanya struktur dan proses yang tepat untuk tata kelola yang efektif, serta visi dan misi Perseroan yang selaras dengan prioritas kepentingan para *stakeholders*. Peran dari *Governing Body*:
   a. Menentukan visi dan misi Perseroan.
   b. Bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan;
   c. Terlibat dengan *stakeholders* untuk memantau kepentingan mereka dan berkomunikasi secara transparan tentang target perusahaan;
   d. Memupuk budaya yang mempromosikan perilaku etis dan akuntabilitas;
   e. Menetapkan struktur dan proses tata kelola, termasuk komite pembantu sesuai kebutuhan;
   f. Mendelegasikan tanggung jawab dan memberikan sumber daya kepada manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan;
   g. Menentukan selera perusahaan untuk risiko dan melaksanakan pengawasan manajemen risiko (termasuk pengendalian internal);
   h. Menjaga pengawasan terhadap kepatuhan hukum, peraturan, dan etika;
   i. Membentuk dan mengawasi fungsi audit internal yang independen obyektif, dan kompeten.

2. **Lini Pertahanan Pertama *(First Line of Defense):***
   Manajemen operasional, sebagai lini pertama, adalah pemilik dan pengelola risiko dan pengendaliannya. Manajemen operasional mencakup manajemen pada fungsi-fungsi inti, misalnya fungsi logistik, operasi, komersial, penjualan, dan pelayanan, maupun fungsi-fungsi pendukung, misalnya fungsi *human capital, accounting*, dan umum (*general affairs*). Manajemen operasional bertanggung jawab untuk mempertahankan efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan dari aktivitas operasional sehari-hari secara konsisten pada setiap proses yang ada termasuk di dalamnya risiko dan kontrol, sehingga selaras dengan tujuan Perseroan. Manajemen Perseroan memastikan bahwa pada lini pertama memiliki otonomi dalam mengelola risiko dan melakukan penilaian secara mandiri terhadap risiko yang dihadapi serta menjaga kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

   Adapun peran lini pertahanan pertama diuraikan sebagai berikut:
   a. Manajemen operasional pemilik dan mengarahkan tindakan (termasuk mengelola risiko) serta penerapan sumber daya dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi;
   b. Menjaga dialog berkelanjutan dengan Direksi, dan melaporkan hasil yang direncanakan, aktual, dan yang diharapkan terkait dengan tujuan organisasi;
   c. Menetapkan dan memelihara struktur dan proses yang sesuai untuk SOP dan manajemen risiko (termasuk pengendalian internal);
   d. Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan etika.

3. **Lini Pertahanan Kedua *(Second Line of Defense):***
   Lini pertahanan kedua merupakan bagian dari manajemen, tetapi memiliki independensi terhadap manajemen operasional (*limited independent control*) atau bertanggung jawab dalam perusahaan untuk merancang dan mengimplementasikan

1. **Governing Body**
   Governing Body is the Board of Directors and/or Board of Commissioners who are given responsibility for managing and/or supervising the Company, ensuring that there are appropriate structures and processes for effective governance, as well as the Company's vision and mission which is in line with the priority interests of stakeholders. Role of the Governing Body:
   a. Determine the Company's vision and mission.
   b. Responsible for Company supervision;
   c. Engage with stakeholders to monitor their interests and communicate transparently about Company targets;
   d. Foster a culture that promotes ethical behavior and accountability;
   e. Establish governance structures and processes, including subsidiary committees as needed;
   f. Delegating responsibilities and providing resources to management to achieve Company goals;
   g. Determine the Company's appetite for risk and implement risk management supervision (including internal controls);
   h. Maintain supervision of legal, regulatory and ethical compliance;
   i. Establish and supervise an independent, objective and competent internal audit function.

2. **First Line of Defense:**
   Operational management, as the first line, is the owner and manager of risks and controls. Operational management includes management of core functions, for example logistics, operations, commercial, sales and service functions, as well as supporting functions, for example human capital, accounting and general affairs functions. Operational management is responsible for maintaining the effectiveness of the Internal Control System and consistent implementation of daily operational activities in every existing process, including risks and controls, so that it is in line with the Company's objectives. The Company's management ensures that in the first line it has autonomy in managing risks and carries out independent assessments of the risks faced and maintains compliance with established policies and procedures.

   The role of first line of defense is described as follows:
   a. Owner's operational management and directing actions (including managing risks) and application of resources in its activities to achieve organizational goals;
   b. Maintain ongoing dialogue with Board of Directors, and report on planned, actual, and expected results related to organizational goals;
   c. Establish and maintain appropriate structures and processes for SOPs and risk management (including internal controls);
   d. Ensure compliance with laws, regulations and ethics.

3. **Second Line of Defense:**
   The second line of defense is part of management, but has independence from operational management (limited independent control) or is responsible within the Company for designing and implementing policies and procedures, for example HC, Financial

kebijakan dan prosedur, misalnya Bagian SDM, Kontrol Keuangan, Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Legal. Oleh karenanya, lini kedua juga memberikan tantangan terhadap pengelolaan risiko dan pengendalian oleh lini pertama. Lini kedua pada umumnya juga memberikan pedoman, sistem, pelatihan, dan internalisasi pada manajemen operasional. Fungsi manajemen risiko di dalam Perseroan bersama komite terkait untuk memantau praktik manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen operasional, membantu pemilik risiko dalam mengidentifikasi, menilai, dan melaporkan risiko dan kontrol yang dilakukan. Termasuk compliance terhadap peraturan perundang-undangan.

Control, Risk Management, Compliance and Legal. Therefore, the second line also poses challenges to risk management and control by the first line. The second line generally also provides guidelines, systems, training and internalization of operational management. The risk management function within the Company together with related committees is to monitor risk management practices carried out by operational management, assist risk owners in identifying, assessing and reporting risks and controls implemented. Including compliance with statutory regulations.

Fungsi compliance melakukan kontrol atas aktivitas yang dilakukan di Lini Pertahanan Pertama terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara umum. Beberapa fungsi yang khusus di Perseroan adalah: *health and safety*, kepatuhan lingkungan, dan *whistleblowing system*. Sedangkan fungsi keuangan melakukan *controllership* dengan memonitor isu-isu terkait keuangan, risks dan kepatuhan perusahaan.

The compliance function controls activities carried out in the First Line of Defense related to compliance with laws and regulations in general. Some of the specific functions in the Company are: health and safety, environmental compliance, and whistle blowing system. Meanwhile, the finance function carries out controllership by monitoring issues related to finance, risks and Company compliance.

Beberapa tugas lainnya dari Lini Pertahanan Kedua adalah:
a. Menyiapkan *risk management framework*;
b. Membantu manajemen dalam mengembangkan proses dan kontrol untuk mengelola risiko dan isu di Perseroan;
c. Memberikan *training* dan panduan atas proses manajemen risiko;
d. Mengingatkan lini pertama atas adanya isu yang penting, perubahan peraturan yang mempengaruhi risiko;
e. Me-*monitor* apakah Sistem Pengendalian Internal sudah memadai, apakah sudah *comply* terhadap peraturan dan apakah perbaikan atas kelemahan kontrol dilakukan tepat waktu.

Some of the other tasks of Second Line of Defense are:
a. Preparing a risk management framework;
b. Assist management in developing processes and controls to manage risks and issues in the Company;
c. Providing training and guidance on the risk management process;
d. Alert the first line to important issues, regulatory changes that affect risk;
e. Monitor whether the Internal Control System is adequate, whether it is in compliance with regulations and whether improvements to control weaknesses are carried out in a timely manner.

4. **Lini Pertahanan Ketiga (*Third Line of Defense*):**
Lini pertahanan ketiga adalah fungsi yang memiliki *the highest level of independence control* yang dimiliki oleh Unit Audit Internal. Internal Auditor adalah pihak yang bersifat independen, memberikan pemastian yang objektif, dan mendampingi perancangan aktivitas untuk memberikan nilai tambah dan pengembangan terhadap operasional perusahaan. Unit Audit Internal membantu perusahaan untuk mencapai sasaran secara sistematis dan melalui pendekatan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, proses tata kelola dan melaporkan setiap temuannya kepada Direktur Utama Perseroan dan/atau Dewan Komisaris serta bekerja sama atau berkoordinasi dengan Komite Audit.

4. **Third Line of Defense:**
The third line of defense is the function that has the highest level of independence control owned by the Internal Audit Unit. Internal Auditors are parties who are independent, provide objective assurance, and assist in the design of activities to provide added value and development to Company operations. Internal Audit Unit helps the Company to achieve targets systematically and through a disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, governance processes and report any findings to the Company's President Director and/or Board of Commissioners as well as collaborating or coordinating with the Audit Committee.

Ruang lingkup pekerjaan Audit Internal antara lain:
a. Meyakinkan bahwa proses di operasi sudah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
b. Adanya Sistem Pengendalian Internal yang memadai atas pengamanan aset (*safeguarding assets*);
c. Keakuratan dari proses pelaporan keuangan;
d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan dan SOP;
e. Elemen-elemen manajemen risiko;
f. Meyakinkan bahwa Lini Pertama dan Lini Kedua telah melakukan tugasnya dengan baik;
g. Komponen dan prinsip utama dalam Sistem Pengendalian Internal telah dijalankan dalam setiap proses di Perseroan

The scope of Internal Audit work includes:
a. Ensure that the operational processes are running in accordance with established standards;
b. The existence of an adequate Internal Control System for safeguarding assets;
c. Accuracy of the financial reporting process;
d. Compliance with laws and regulations, policies and SOPs;
e. Risk management elements;
f. Ensure that the First Line and Second Line have done their job well;
g. The main components and principles in the Internal Control System have been implemented in every process in the

(termasuk di setiap entitas, departemen, unit dan fungsi operasional);

h. *Counterpart* Pihak Luar Auditor Eksternal (BPK, KAP, SPI Perusahaan holding).

5. **Eksternal:**
Auditor Eksternal (BPK dan KAP), Regulator (OJK, Kantor pajak) dan eksternal lainnya yang berada di luar Perseroan, dapat menjadi bagian penting yang secara tidak langsung memiliki peran penting dalam perusahaan keseluruhan tata kelola dan struktur kontrol, berperan dalam mengevaluasi peran *lines of defense* (LoD) dalam Perseroan secara independen dan obyektif. Pihak Luar ini secara tidak langsung berperan sebagai tambahan LoD bagi Perseroan.

Implementasi dalam Manajemen Perseroan

Penerapan model tiga lini pertahanan di Perseroan diselaraskan dengan pembagian tugas, peran, dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Direksi. Setiap lini memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam pengelolaan risiko dan pengendalian internal, sehingga membentuk mekanisme tata kelola yang terintegrasi. Secara umum, kerangka tiga lini pertahanan di IPCC dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

Company (including in every entity, department, unit and operational function);

h. External Counterparty External Auditor (BPK, KAP, SPI holding Company).

5. **External:**
External Auditors (BPK and KAP), Regulators (OJK, Tax Office) and other external auditors who are outside the Company, can be an important part that indirectly has an important role in the Company's overall governance and control structure, playing a role in evaluating the role of lines of defense (LoD) within the Company independently and objectively. This external party indirectly acts as an additional LoD for the Company

Implementation in the Company Management

The implementation of three lines of defense at the Company is aligned with the division of duties, roles, and authorities as set forth in the organizational structure established by Board of Directors. Each line performs complementary functions in risk management and internal control, thereby forming an integrated governance mechanism. In general, IPCC's three lines of defense framework can be described as follows:

Governance Body	**Lini Pertama** First Line	**Lini Kedua** Second Line	**Lini Ketiga** Third Line	**Eksternal** External
Oversight	*Owner Risk*	*Control Support*	*Objective Assurance and Advise*	*Independent*
• Komisaris • Direksi • Board of Commissioners • Board of Directors	• Terminal • Teknik • SDM & Pengadaan • Komersial • Sekretaris Perusahaan • Terminal • Technical • Human Capital & Procurement • Commercial • Corporate Secretary	• Manajemen Risiko • Manajemen Mutu • Hukum • Sistem Informasi • Risk Management • Quality Management • Legal • Information Systems	• Audit Internal • Internal Audit	• BPK • Kantor Akuntan Publik • Regulator • BPK • Public Accounting Firm • Regulators

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sistem pengendalian internal yang diterapkan di Perseroan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

Financial and Operational Control System

The internal control system implemented in the Company can be grouped into two parts, namely:

Pengendalian Keungan Financial Control	**Pengendalian Administrasi** Administrative Control
Pengendalian internal keuangan/akuntansi, meliputi: 1. Menerapkan *flow* persetujuan dan pemisahan antara fungsi operasi yang jelas terkait alur otorisasi transaksi keuangan. 2. Melakukan pencatatan dan pengawasan fisik atas aset. 3. Menyusun prosedur dan sistem pencatatan keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengamanan aset Perseroan. Financial/accounting internal control, including: 1. Implement approval flows and clear separation between operational functions regarding the flow of financial transaction authorization. 2. Carry out recording and physical supervision of assets. 3. Develop procedures and financial recording systems related to the management and security of the Company's assets.	Pengendalian internal pada aspek operasional, meliputi upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi usaha, melakukan update berkala atas seluruh kebijakan, prosedur dan sistem operasional yang berlaku di Perseroan agar dapat menggambarkan kegiatan operasional yang aktual. Penerapan pengendalian operasional bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara implementasi kegiatan dengan prosedur atau kebijakan internal yang berlaku. Internal control in operational aspects, includes efforts aimed at increasing business efficiency, carrying out regular updates on all policies, procedures and operational systems that apply in the Company in order to reflect actual operational activities. The implementation of operational control aims to ensure conformity between the implementation of activities and applicable internal procedures or policies.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Didukung oleh Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh komite dan fungsi pendukungnya, Perseroan secara konsisten membangun mekanisme pengawasan dan kepatuhan yang melekat pada setiap proses bisnis. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas operasional dan keputusan manajerial dilaksanakan selaras dengan ketentuan hukum, regulasi, dan standar tata kelola yang berlaku, sehingga keberlangsungan usaha Perseroan tetap terjaga dan akuntabel.

Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal Tahun 2025

Hasil analisis atas temuan pengujian dan penilaian terhadap survei yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal di Perseroan berada pada kategori yang memadai, dengan skor rata-rata mencapai 90,23 dan tingkat *error margin* sebesar 6,36%. Kondisi ini mencerminkan bahwa efektivitas pengendalian internal secara umum berada pada level "Sangat Efektif".

Meskipun demikian, seiring dengan dinamika perkembangan bisnis dan tantangan operasional yang dihadapi Perseroan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat dan disempurnakan, khususnya terkait dengan pengintegrasian sistem IT dalam implementasi pengendalian internal.

Compliance with Law Regulations

With the support of Board of Directors, Board of Commissioners, and all committees and supporting functions, the Company consistently establishes supervisory and compliance mechanisms that are integrated into every business process. This approach aims to ensure that all operational activities and managerial decisions are carried out in accordance with applicable laws, regulations, and governance standards, thereby maintaining the Company's business continuity and accountability.

Evaluation of Internal Control Effectiveness in 2025

The analytical results of testing and evaluation findings from the survey indicate that the implementation of the Company's internal control system is in the "adequate" category, with an average score of 90.23 and an error margin of 6.36%. This reflects that the effectiveness of internal controls is generally at the "Very Effective" level.

However, given the dynamic nature of business development and the operational challenges faced by the Company, there are still several aspects that need to be strengthened and improved, particularly regarding the integration of IT systems into the implementation of internal controls.

No	Aspek Pengendalian Control Aspects	Bobot Nilai Value Weight	Nilai Value	Skor Score	Keterangan Information
1	Lingkungan Pengendalian Control Environment	40	36,90	92,24	Sangat Efektif Very Effective
LP1	Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etik Commitment to integrity and ethical values	8	7,27	90,86	Sangat Efektif Very Effective
LP2	Independensi direksi terhadap manajemen dalam menjalankan tugas Independence of directors from management in carrying out their duties	10	9,09	90,86	Sangat Efektif Very Effective
LP3	Membuat Struktur, Garis Pelaporan, Otorisasi dan Pertanggungjawaban Independence of directors from management in carrying out their duties	9	8,72	96,84	Sangat Efektif Very Effective
LP4	Komitmen pada kompetensi Commitment to competence	8	7,28	90,95	Sangat Efektif Very Effective
LP5	Mengembangkan akuntabilitas Develop accountability	5	4,55	91,00	Sangat Efektif Very Effective
2	Aktivitas Pengendalian Control Activities	30	26,68	88,94	Sangat Efektif Very Effective
AP1	Menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian Establish and develop control activities	10	7,79	77,87	Efektif Effective
AP2	Menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi. Establish and develop general control activities over technology	10	9,53	95,26	Sangat Efektif Very Effective
AP3	Menetapkan pengendalian melalui kebijakan dan prosedur Establish controls through policies and procedures	10	9,37	93,68	Sangat Efektif Very Effective
3	Informasi dan Komunikasi Information and Communication	15	12,54	83,57	Efektif Effective
KI1	Memperoleh, menghasilkan dan menggunakan informasi berkualitas dan relevan Obtain, produce and use quality and relevant information	8	7,01	87,59	Sangat Efektif Very Effective

No	Aspek Pengendalian Control Aspects	Bobot Nilai Value Weight	Nilai Value	Skor Score	Keterangan Information
KI2	Mengomunikasikan secara internal dan eksternal Communicate internally and external	7	5,53	78,97	Efektif Effective
4	Pemantauan Monitoring	15	14,11	94,09	Sangat Efektif Very Effective
P1	Melaksanakan evaluasi berkala dan berkesinambungan Carry out periodic and continuous evaluations	15	14,11	94,09	Sangat Efektif Very Effective
	Jumlah **Total**	**100**	**90,23**	**90,23**	**Sangat Efektif** **Very Effective**

Temuan Internal, Rekomendasi, dan Tindak Lanjutnya

Penelaahan terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan atas sejumlah area audit pada Semester I tahun 2025 menunjukkan bahwa beberapa objek audit memperoleh penilaian risiko Menengah. Penilaian tersebut mengindikasikan adanya kelemahan dalam desain maupun implementasi pengendalian internal pada objek-objek audit tertentu, sehingga berpotensi meningkatkan eksposur risiko operasional maupun kepatuhan bagi Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa area audit teridentifikasi memerlukan perhatian khusus dan tindak lanjut perbaikan karena dinilai memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan objek audit lainnya. Berikut uraian hasil evaluasi yang dilakukan:

Internal Findings, Recommendations and Follow-up

A review of the results of examinations and tests conducted on a number of audit areas in the first semester of 2025 indicates that several audit subjects received an Intermediate risk rating. This rating indicates weaknesses in the design and implementation of internal controls for certain audit subjects, which could potentially increase the Company's exposure to operational and compliance risks. In light of this, several audit areas have been identified as requiring special attention and corrective follow-up, as they are assessed to have a higher level of vulnerability compared to other audit subjects. The following is a description of evaluation results:

No	Temuan audit Audit findings	Pengendalian Internal Internal Control	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Tingkat Prioritas Priority Level
1	Terdapat Perjanjian Kerjasama dengan Pengguna Jasa yang Telah Jatuh Tempo. There are expired service agreements with clients.	Perlu Beberapa Perbaikan terhadap Kontrol Pengendalian. Some improvements are needed in the control system.	2	Rendah Low
2	Pelaksanaan Penyediaan Jamuan Makan di PT IKT Tbk yang Belum Memiliki Dasar Hukum (Kontrak). The provision of catering services at PT IKT Tbk lacks a legal basis (contract).	Perlu Beberapa Perbaikan terhadap Kontrol Pengendalian. Some improvements are needed in the control system.	3	Rendah Low
3	Administrasi dan Ketentuan Tenaga Kerja Alih Daya (TAD) yang Belum Sesuai Ketentuan. The administration and terms regarding outsourced workers (TAD) do not comply with regulations.	Perlu Beberapa Perbaikan terhadap Kontrol Pengendalian. Some improvements are needed in the control system.	6	Menengah Intermediate
4	Administrasi dan Ketentuan Tenaga Kerja Pengamanan (*Security*) yang Belum Sesuai Ketentuan. Administration and regulations regarding security personnel that do not yet comply with the requirements.	Perlu Beberapa Perbaikan terhadap Kontrol Pengendalian. Some improvements are needed in the control system.	3	Menengah Intermediate

Kemudian, di bawah ini adalah detail ilustrasi hasil audit dengan "*Risk Bubbles*" yang menggambarkan "*likelihood* dan *impact*":

Below is a detailed illustration of the audit results with "Risk Bubbles" which describe "likelihood and impact":

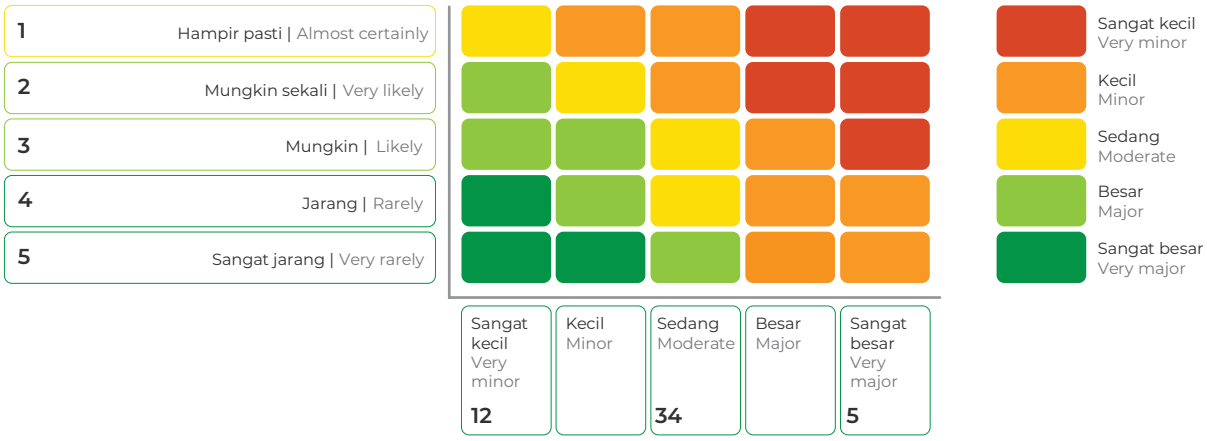

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2025

Berdasarkan hasil penilaian komprehensif atas penerapan pengendalian internal, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal Perseroan telah berjalan secara memadai dan berfungsi dengan baik. Kesimpulan ini diperoleh melalui analisis data yang telah diverifikasi mencakup 5 (lima) komponen pengendalian internal, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Control*), Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), serta Pemantauan (*Monitoring*). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal memperoleh skor 90,23, sehingga secara keseluruhan dikategorikan sebagai "Sangat Efektif".

Selain itu, sepanjang tahun 2025 Perseroan berhasil menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh temuan audit dari periode sebelumnya, termasuk temuan terkait pertimbangan Perseroan dalam hal tingkat *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) sebelum mengambil keputusan investasi.

Statement of Board of Directors and/or Board of Commissioners regarding the Adequacy of Internal Control System in 2025

Based on the results of a comprehensive assessment of the implementation of internal controls, it can be concluded that the Company's internal control system has been operating adequately and functioning effectively. This conclusion was reached through an analysis of verified data covering 5 (five) components of internal control, namely Control Environment, Risk Control, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring. The measurement results indicate that the effectiveness of internal controls achieved a score of 90.23, thereby being categorized overall as "Very Effective".

Furthermore, throughout 2025, the Company successfully addressed and resolved all audit findings from the previous period, including findings related to the Company's consideration of the Weighted Average Cost of Capital (WACC) prior to making investment decisions.

Manajemen Risiko
Risk Management

Sebagai operator kepelabuhanan yang berhadapan dengan berbagai ketidakpastian operasional, komersial, maupun regulasi, Perseroan menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari strategi bisnis dan proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini diarahkan untuk menjaga ketahanan usaha sekaligus mendukung pertumbuhan berkelanjutan melalui pengelolaan risiko yang terstruktur, terpadu, dan berbasis prioritas pada risiko-risiko yang paling material.

As a port operator facing various operational, commercial, and regulatory uncertainties, the Company treats risk management as an integral part of its business strategy and decision-making processes. This approach is designed to maintain business resilience while supporting sustainable growth through structured, integrated risk management that prioritizes the most material risks.

Perseroan juga telah menetapkan Pedoman Manajemen Risiko melalui Surat Keputusan Direksi Nomor PW.05/01/24/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 tanggal 24 Desember 2024, yang mewajibkan setiap level manajemen memasukkan pertimbangan risiko dalam setiap aktivitas pengelolaan dan investasi. Pedoman tersebut disusun selaras dengan standar ISO 31000:2018 yang mencakup prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko, serta diperkuat dengan penandatanganan Komitmen Bersama Penerapan Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018 oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang diperbarui secara berkala.

The Company has also established Risk Management Guidelines through Board of Directors Decree Number PW.05/01/24/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 dated December 24, 2024, which requires every level of management to inCorporate risk considerations into all management and investment activities. These guidelines were developed in accordance with the ISO 31000:2018 standard, which covers the principles, framework, and processes of risk management, and are reinforced by the signing of a Joint Commitment to Implement ISO 31000:2018-Based Risk Management by Board of Commissioners and Board of Directors, which is updated periodically.

Selain itu, Direksi dan jajaran Senior Manager juga menegaskan komitmen terhadap budaya sadar risiko melalui penandatanganan pernyataan komitmen tahunan sebagai upaya menanamkan praktik manajemen risiko dalam keseharian operasional Perseroan.

In addition, Board of Directors and Senior Managers also reaffirm their commitment to a risk-aware culture through the signing of an annual commitment statement as an effort to embed risk management practices into the Company's daily operations.

Komitmen Bersama Penerapan Manajemen Risiko Joint Commitment to Implementing Risk Management	**Pernyatan Komitmen Bersama Penerapan Budaya Sadar Risiko** Statement of Joint Commitment to Implementing a Risk-Aware Culture
Kami Dewan Komisaris dan Direksi, berkomitmen mengimplementasikan Manajemen Risiko secara sistematik, menyeluruh dan terintegrasi untuk mewujudkan visi "Menjadi Ekosistem Terminal Kendaraan Berkelas Dunia." We, as Board of Commissioners and Board of Directors, are committed to implementing a systematic, comprehensive, and integrated risk management approach to realize our vision of "Becoming a World-Class Vehicle Terminal Ecosystem."	Jajaran Manajemen berkomitmen untuk menanamkan budaya kerja yang mengedepankan kehati-hatian, keterbukaan, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Komitmen ini diwujudkan melalui: 1. Memberi contoh dalam mengantisipasi potensi kendala dan meresponsnya secara cepat dan tepat. 2. Menyeimbangkan pencapaian target jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang dalam setiap keputusan. 3. Mendorong diskusi konstruktif terhadap isu dan tantangan yang kompleks. 4. Mendukung penuh penerapan Pedoman Manajemen Risiko dan memastikan prosesnya berjalan konsisten di seluruh lini. 5. Memperkuat resiliensi organisasi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan operasional. 6. Komitmen ini menjadi dasar perilaku seluruh Insan Perseroan agar proses kerja berjalan lebih efektif, adaptif dan berkelanjutan. The Management is committed to fostering a work culture that prioritizes prudence, transparency, and responsible decision-making. This commitment is demonstrated through: 1. Setting an example by anticipating potential challenges and responding to them quickly and appropriately. 2. Balancing the achievement of short-term goals with long-term sustainability in every decision. 3. Encouraging constructive discussions on complex issues and challenges. 4. Fully supporting the implementation of Risk Management Guidelines and ensuring the process is consistently applied across all levels. 5. Strengthening organizational resilience, both in planning and operational execution. 6. This commitment serves as the foundation for the behavior of all Company personnel to ensure work processes are more effective, adaptive, and sustainable.

Dalam rangka menumbuhkan pemahaman yang seragam serta memastikan implementasi budaya risiko berjalan konsisten di seluruh lini organisasi, Perseroan secara rutin menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi manajemen risiko kepada setiap unit kerja. Kegiatan ini dirancang sebagai sarana pembelajaran berkelanjutan bagi manajemen maupun pemilik risiko agar kebijakan dan praktik pengelolaan risiko tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diterapkan dalam aktivitas operasional sehari-hari. Berlandaskan

In order to foster a shared understanding and ensure the consistent implementation of a risk culture across all levels of the organization, the Company regularly conducts risk management education and awareness programs for each business unit. These activities are designed as a means of continuous learning for both management and risk owners so that risk management policies and practices are not only understood conceptually but also applied in daily operational activities. Based on a structured and continuous approach, the

pendekatan yang terstruktur dan berkesinambungan, Perseroan berupaya membangun kesadaran kolektif bahwa pengelolaan risiko merupakan tanggung jawab bersama yang melekat pada setiap fungsi dan peran di dalam organisasi.

Struktur Pengelolaan Risiko IPCC

Pelaksanaan manajemen risiko di IPCC didukung oleh Divisi Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen yang berada dalam koordinasi Direktur Keuangan sesuai Peraturan Direksi Nomor PW.05/01/24/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Company strives to build a collective awareness that risk management is a shared responsibility inherent to every function and role within the organization.

IPCC Risk Management Structure

The implementation of risk management at IPCC is supported by Risk Management and Management Systems Division, which operates under the coordination of Director of Finance in accordance with Board of Directors Regulation No. PW.05/01/24/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 dated December 24, 2024, regarding Implementation of Risk Management within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

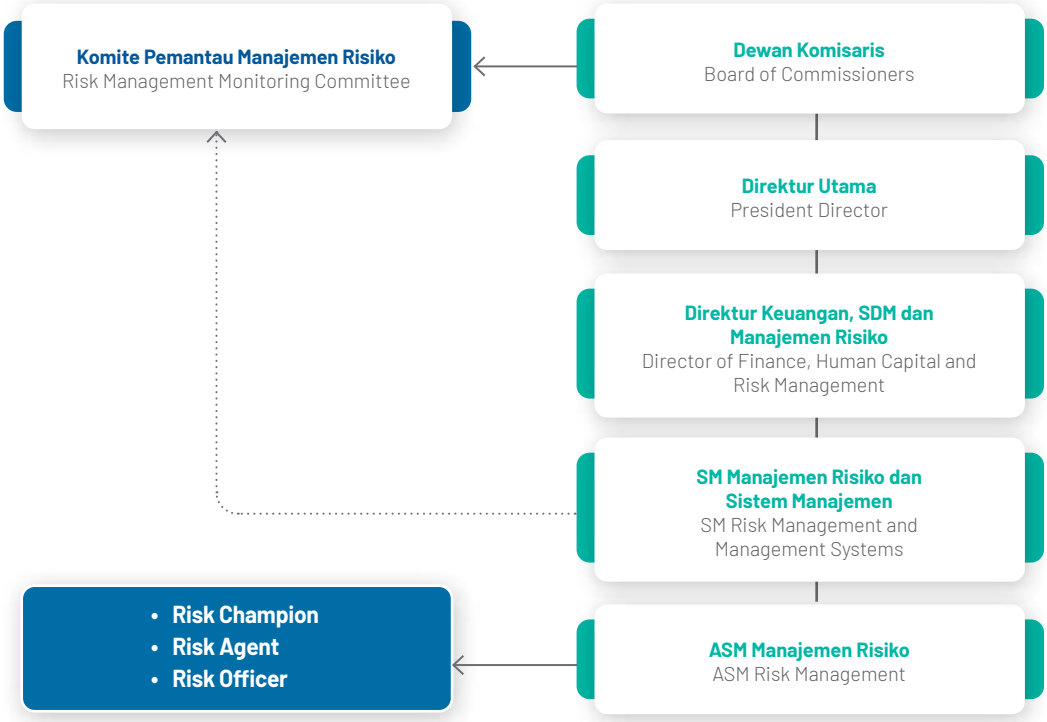

1. Struktur organisasi Manajemen Risiko didasarkan pada filosofi bahwa proses Manajemen Risiko yang efektif tercapai apabila perusahaan berhasil membangun komitmen yang kuat dari Direksi dan Dewan Komisaris, serta berhasil mengintegrasikan proses Manajemen Risiko ke dalam seluruh proses bisnis perusahaan.
2. Perusahaan memiliki organ komite di bawah Komisaris yang fungsinya memantau aktivitas pengelolaan manajemen risiko perusahaan.
3. Perseroan menetapkan struktur kuasi di mana setiap unit memiliki Agen Risiko yang terdiri dari *Risk Champion, Risk Agent,* dan *Risk Officer* yang ditetapkan pada Surat Keputusan Direksi No. HK.01/10/3/1/MNRS/DIRUT/IKT-25 tanggal 10 Maret 2025. Struktur ini bersifat kuasi yang mewakili setiap divisi untuk menjadi Agen Manajemen Risiko.
4. Untuk memastikan implementasi dan menjaga proses Manajemen Risiko dapat berjalan secara baik dan dengan pengendalian yang efektif dan efisien, Direksi menetapkan kepala unit yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko perusahaan. Mereka bertugas menjabarkan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management*/"ERM") menjadi pedoman, prosedur, dan instruksi kerja serta melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam penerapannya.

1. The Risk Management organizational structure is based on the philosophy that an effective Risk Management process is achieved if the Company succeeds in building strong commitment from the Board of Directors and Board of Commissioners, and successfully integrates the Risk Management process into all Company business processes.
2. The Company has a committee organ under Board of Commissioner whose function is to monitor the Company's Risk Management activities.
3. The Company has established a quasi-structure in which each unit has a Risk Agent consisting of a Risk Champion, a Risk Agent, and a Risk Officer, as designated in Board of Directors' Decision No. HK.01/10/3/1/MNRS/DIRUT/IKT-25 dated March 10, 2025. This quasi-structure designates each division to serve as a Risk Management Agent.
4. To ensure that the implementation and maintenance of Risk Management process can run well and with effective and efficient control, Board of Directors appoints a unit head who is responsible for managing Company risks. They are tasked with describing Enterprise Risk Management (ERM) policies into guidelines, procedures and work instructions as well as providing guidance and coordination in their implementation.

5. Struktur organisasi perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko harus dirancang sedemikian rupa sehingga pemangku risiko, unit yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko perusahaan, dan auditor internal masing-masing harus independen antara satu dengan lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Manajemen Risiko

1. Mengkaji dan merekomendasikan kerangka, falsafah, dan strategi serta program Manajemen Risiko.
2. Mengkaji dan mengembangkan metode identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko.
3. Mengukur dan memonitor eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional serta dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan.
4. Memonitor dan mengkaji ulang pencapaian target usaha dari segi risiko serta mendukung unit usaha dalam bentuk memberi masukan untuk memitigasi risiko yang dihadapi.
5. Menjadi fasilitator untuk proses implementasi Manajemen Risiko sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang telah diatur di kebijakan.

Peran dan Tanggung Jawab Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen

1. Melakukan evaluasi ketaatan dan efektivitas penerapan Manajemen Risiko.
2. Mengawasi dan mengevaluasi kebijakan dan proses Manajemen Risiko secara menyeluruh.
3. Melakukan kaji ulang secara berkala mengenai kecukupan kebijakan dan prosedur.
4. Memastikan bahwa proses Manajemen Risiko telah berjalan dengan baik di seluruh aktivitas perusahaan.
5. Melakukan validasi dan kaji ulang berkala terhadap metodologi pengukuran risiko.

Manajemen dan Dukungan Kontrol Internal

Agar tercipta suatu pengendalian internal yang baik, Manajemen Puncak harus:

1. Memastikan tersedianya infrastruktur.
2. Memastikan adanya kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan tepat guna.
4. Memastikan adanya pengelolaan risiko yang efektif di Perseroan.
5. Memastikan terbentuknya budaya risiko pada Perusahaan secara menyeluruh.
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Tujuan Utama Sistem Pengendalian Internal

1. Menjaga dan mengamankan aset perusahaan.
2. Mendapatkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya.
3. Mengurangi potensi dan dampak kerugian.
4. Meningkatkan peran serta Pemangku Kepentingan.

Pengendalian Internal Manajemen Risiko

Cakupan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko adalah:

1. Kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat.

5. The Company's organizational structure related to the implementation of Risk Management Function must be designed in such a way that risk stakeholders, units responsible for managing Company risk, and internal auditors must each be independent of one another.

Duties and Responsibilities of Risk Management Function

1. Review and recommend Risk Management frameworks, philosophies and strategies and programs.
2. Review and develop risk identification, measurement and control methods.
3. Measure and monitor overall risk exposure, per type of risk and per functional activity and its impact on Company profitability.
4. Monitor and review the achievement of business targets in terms of risk and support business units by providing input to mitigate the risks faced.
5. Become a facilitator for the Risk Management implementation process in accordance with the duties and authorities as regulated in the policy.

Roles and Responsibilities of Risk Management and Management Systems:

1. Evaluate the compliance and effectiveness of the implementation of Risk Management.
2. Oversee and evaluate Risk Management policies and processes as a whole.
3. Conduct regular reviews regarding the adequacy of policies and procedures.
4. Ensure that the Risk Management process is running well in all Company activities.
5. Validate and periodically review the risk measurement methodology.

Internal Control Management and Support:

In order to create good internal control, Top Management must:

1. Ensure the availability of infrastructure.
2. Ensure compliance with applicable laws and regulations.
3. Ensure the availability of complete, accurate, timely and effective financial and management information.
4. Ensure that there is effective risk management in the Company.
5. Ensure the formation of a risk culture in the Company as a whole.
6. Increase compliance with applicable regulations.

Main Objectives of Internal Control System

1. Maintain and secure Company assets.
2. Get accurate and reliable financial reports.
3. Reduce the potential and impact of losses.
4. Increase stakeholder participation.

Internal Control Risk Management:

The scope of internal control system in implementing Risk Management is:

1. Suitability of internal control system to the type and level of inherent risk.

2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur.
3. Pemisahan fungsi antara pemangku risiko, divisi Manajemen Risiko, dan audit internal.
4. Struktur organisasi perusahaan.
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang andal, akurat, dan tepat waktu.
6. Prosedur yang cukup untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
7. Kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap penilaian kegiatan operasional Perseroan.
8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen.
9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai dari seluruh transaksi, temuan audit serta tanggapan dan tindak lanjut dari *auditee*.
10. Pengawasan dan kaji ulang secara berkala terhadap kejadian risiko dan perlakuannya.

2. Determination of authority and responsibility for monitoring compliance with policies and procedures.
3. Separation of functions between risk stakeholders, Risk Management division and internal audit.
4. The Company organizational structure.
5. Reliable, accurate and timely reporting of financial and operational activities.
6. Adequate procedures to ensure compliance with Law Regulations.
7. Effective, independent and objective review of the assessment of the Company's operational activities.
8. Adequate testing and review of the management information system.
9. Complete and adequate documentation of all transactions, audit findings as well as responses and follow-up from auditees.
10. Regular monitoring and review of risk events and their treatment.

Komposisi Keanggotaan dan Sertifikasi

Per 31 Desember 2025, Divisi Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen didukung oleh 14 (empat belas) orang, yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Divisi serta jajaran staf pendukung lainnya. Berdasarkan keseluruhan jumlah tersebut, terdapat 1 (satu) karyawan organik yang secara langsung menangani fungsi manajemen risiko serta 1 (satu) karyawan alih daya yang berperan sebagai administrator untuk menunjang aspek operasional dan administrasi divisi.

Anggota Divisi Manajemen Risiko secara aktif berpartisipasi dalam berbagai program sertifikasi di bidang manajemen risiko. Upaya ini dilakukan untuk memperdalam kompetensi, memperluas wawasan profesional, serta memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko di Perseroan ditangani oleh personel yang memiliki kualifikasi memadai dan kemampuan teknis yang andal, sehingga implementasi manajemen risiko dapat berjalan lebih optimal. Beberapa sertifikasi yang telah diperoleh oleh sejumlah anggota Divisi Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen sampai dengan akhir tahun 2025 antara lain:

Membership Composition and Certification

As of December 31, 2025, Risk Management and Management Systems Division is supported by 14 (fourteen) personnel, consisting of 1 (one) Head of Division and other supporting staff. Of this total, there is 1 (one) permanent employee directly handling risk management functions and 1 (one) outsourced employee serving as an administrator to support the division's operational and administrative aspects.

Members of Risk Management Division actively participate in various certification programs in the field of risk management. These efforts are undertaken to deepen competencies, broaden professional knowledge, and ensure that risk management within the Company is handled by personnel possessing adequate qualifications and reliable technical skills, thereby enabling risk management implementation to operate more effectively. Some of the certifications obtained by members of Risk Management and Management Systems Division as of the end of 2025 include:

Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	**Jumlah Karyawan** Number of Employees
Pelatihan Certified Risk Governance Professional (CRGP) Certified Risk Governance Professional (CRGP) Training	10
Certified Risk Management Officer (CRMO)	1
Qualified Risk Management Officer (QRMO)	2
Refreshment Enterprise Risk Management based on ISO 31000	23
Workshop Cyber Risk Management Fundamental	39
Risk Based Decision Making	24
Workshop Business Continuity Management	48
Pelatihan Certified Risk Governance Professional (CRGP) Certified Risk Governance Professional (CRGP) Training	10

Budaya dan Sosialisasi Manajemen Risiko

Perseroan memandang bahwa penyebaran pemahaman dan penguatan budaya sadar risiko merupakan proses yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar penerapan manajemen risiko benar-benar terinternalisasi di seluruh lapisan organisasi. Oleh karena itu, Direksi senantiasa memberikan dukungan terhadap berbagai inisiatif yang bertujuan menanamkan cara berpikir berbasis risiko dalam setiap aktivitas kerja karyawan. Komitmen tersebut diwujudkan

Risk Management Culture and Socialization

The Company believes that fostering an understanding of and strengthening a risk-aware culture is a process that must be carried out systematically and continuously so that the implementation of risk management is truly internalized at all levels of the organization. Therefore, Board of Directors consistently supports various initiatives aimed at instilling a risk-based mindset in every employee's work activities. This commitment is realized through the implementation of

melalui pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatan kesadaran dan kapasitas manajemen risiko yang diselenggarakan secara periodik dan menjangkau seluruh unit kerja, di antaranya dilakukan melalui:

1. Penyelenggaraan program pelatihan dan *workshop* berkala yang difokuskan pada pemahaman konsep-konsep dasar manajemen risiko, identifikasi risiko, evaluasi risiko, serta strategi mitigasi risiko yang relevan dengan berbagai unit kerja dalam organisasi.
2. Penandatanganan Komitmen dan Penerapan Budaya Risiko oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran Senior Manager sebagai bentuk komitmen tertulis dalam menerapkan dan memperkuat budaya sadar risiko dalam seluruh aktivitas perusahaan.
3. Pelaporan profil risiko secara rutin yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko-risiko utama yang dihadapi perusahaan, yang dilakukan secara berkala dan transparan kepada Direksi dan Senior Manager untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
4. Koordinasi, sosialisasi, dan monitoring implementasi manajemen risiko di setiap Divisi secara rutin setiap Triwulan, yang melibatkan dialog antara Divisi Manajemen Risiko dengan unit kerja terkait guna memastikan pemahaman yang tepat tentang kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penilaian kinerja dalam implementasinya.
5. Telah dilakukan survei efektivitas implementasi manajemen risiko 2025 sebagai bentuk upaya perusahaan dalam melakukan penilaian seberapa efektif penerapan manajemen risiko di tahun 2025.
6. Pemberian penghargaan dan pengakuan kepada *risk agent* dan Divisi terbaik dalam hal pelaporan dan implementasi manajemen risiko pada unit kerja masing-masing sebagai bentuk dorongan dan apresiasi atas kontribusi dalam memperkuat budaya sadar risiko dalam perusahaan.

various risk management awareness and capacity-building activities held periodically and reaching all work units, including through:

1. The implementation of periodic training programs and workshops focused on understanding the basic concepts of risk management, risk identification, risk evaluation, and risk mitigation strategies relevant to various work units in the organization.
2. The signing of Risk Culture Commitment and Implementation by the Board of Commissioners, Board of Directors, and all Senior Managers as a form of written commitment to implement and strengthen a risk-aware culture in all Company activities.
3. Regular reporting of risk profiles, including identification, evaluation, and mitigation of the main risks faced by the Company, carried out periodically and transparently to the Board of Directors and Senior Managers to support proper decision making.
4. Coordination, socialization, and monitoring of risk management implementation in each Division on a routine quarterly basis, involving dialogue between Risk Management Division and related work units to ensure proper understanding of risk management policies and procedures as well as performance assessment in their implementation.
5. A survey of the effectiveness of risk management implementation in 2025 has been conducted as part of the Company's efforts to assess how effective the risk management implementation in 2025.
6. Giving awards and recognition to the best risk agents and divisions in terms of risk management reporting and implementation in their respective work units as encouragement and appreciation for their contribution in strengthening a risk-aware culture within the Company.

Implementasi Rencana Kerja Manajemen Risiko Tahun 2025

Implementation of Risk Management Work Plan in 2025

Rencana Kerja Work Plan	Realisasi Realization
Implementasi GRC secara Menyeluruh Comprehensive GRC Implementation	1. *Alignment* tata kelola dengan regulasi terkini. 2. Pelaporan Profil Risiko s/d Triwulan IV Tahun 2025 sudah dilaporkan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Seluruh kajian risiko dilaksanakan sesuai target SLA. 1. Alignment of governance with current regulations. 2. Risk Profile reports through the fourth quarter of 2025 have been submitted by the specified deadlines. All risk assessments have been conducted in accordance with SLA targets.
Penguatan Program Budaya Risiko Strengthening the Risk Culture Program	1. Pelatihan untuk Lini 1, Lini 2 dan Lini 3 serta Organ Dekom. 2. Program Budaya Risiko (RAISING & 1-RO). 3. Uji coba *drill* BCM telah dilakukan dengan skenario banjir rob. 4. Keikutsertaan 10 personil IPCC ke ajang Risk Award Level Holding. Pelaksanaan Survei Manajemen Risiko dalam bentuk Kuesioner. 1. Training for First Line, Second Line, and Third Line staff, as well as BoC Organs. 2. Risk Culture Program (RAISING & 1-RO). 3. A BCM drill was conducted using a tidal flood scenario. 4. Participation of 10 IPCC personnel in the Holding-Level Risk Award event. Conducting a Risk Management Survey via questionnaire.
Pengembangan Prediktif Analisis Risiko melalui Optimalisasi *Key Risk Indicator* *Predictive Development of Risk Analysis through Optimization of Key Risk Indicators*	Pengembangan *Key Risk Indicator* (KRI) melalui pendetailan parameter penilaian probabilitas risiko yang digunakan oleh *risk owner.* *Development of Key Risk Indicators (KRIs) through the refinement of risk probability assessment parameters used by risk owners*
Penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) 2025 Risk Maturity Index (RMI) Assessment 2025	Hasil Penilaian RMI untuk IPCC yang dilakukan oleh Tim Subholding berada di angka 2,71, di atas target RMI yang hendak dicapai yaitu 2,5. The RMI assessment results for IPCC conducted by the Subholding Team came in at 2.71, above the RMI target of 2.5.

Program Pelatihan Manajemen Risiko

1. Telah tersertifikasinya Organ Dekom, Direksi, Unit Manajemen Risiko.
2. *Refreshment Enterprise Risk Management based on ISO 31000* bagi Unit Manajemen Risiko dan *Risk Agent*.
3. Pelatihan *Risk Based Decision Making*.
4. *Workshop Cyber Risk Management Fundamental*.
5. *Workshop Bussiness Continuity Manangement*.

Program Budaya Manajemen Risiko

1. Program Penguatan Kapabilitas dan Budaya Risiko:
   a. RO (Satu Jam Bersama *Risk Owner*): Sesi diskusi dengan pemilik risiko untuk membahas isu dan tantangan risiko secara intensif.
   b. RAISING (*Risk Intensive Meeting*): Pertemuan intensif yang fokus pada pembahasan risiko dan strategi mitigasinya.
   c. Pembuatan Newsletter Riskpedia Vol.01 yang memuat 4 segmen utama, yaitu Segmen Monthly Risk Radar, Segmen Jejak Risiko, Segmen Pojok Tips Risiko, dan Segmen Voice of Risk
   d. Ikut serta dalam Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko XI 2025 di Batam.
2. Program *Monitoring* dan Evaluasi Risiko:
   a. Survey Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko 2025: Survei yang dilakukan untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko pada tahun 2025.
   b. *Focus Group Discussion* (FGD) *Risk Maturity Index* (RMI) : Diskusi kelompok terfokus untuk mengkaji dan menilai kematangan manajemen risiko, bersama dengan Subholding SPMT.
   c. *Exit Meeting* Penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) 2025: Pertemuan akhir yang menandai selesainya penilaian kematangan risiko tahun 2025, bersama dengan Subholding SPMT.
3. Program Pengembangan BCMS dan Mitigasi Risiko:
   a. *Kick Off Meeting* Pengembangan Tata Kelola BCM: Pertemuan awal untuk memulai pengembangan tata kelola *Business Continuity Management* (BCM).
   b. Sosialisasi Integrasi Aplikasi PRiMa dan P-RKM: Program sosialisasi mengenai integrasi aplikasi PRiMa dengan P-RKM untuk mempermudah pengelolaan risiko dan kinerja.
   c. Penyusunan Risiko, RKM, dan Anggaran 2026: Proses penyusunan risiko, rencana kerja manajemen (RKM), dan anggaran untuk tahun 2026.
4. Program Edukasi dan Sosialisasi Risiko:
   a. Pendampingan Penyusunan Risiko Pada Aplikasi PRiMa: Bimbingan dalam menyusun dan memantau risiko menggunakan aplikasi PRiMa.
   b. Kuis RAISING Series 2: Kegiatan edukasi berbentuk kuis yang merupakan bagian dari seri RAISING untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen risiko.

Risk Management Training Program

1. Board of Commissioners, Board of Directors, and Risk Management Unit have been certified.
2. Enterprise Risk Management Refresher Course based on ISO 31000 for the Risk Management Unit and Risk Agents.
3. Risk-Based Decision Making training.
4. Cyber Risk Management Fundamentals Workshop.
5. Business Continuity Management Workshop.

Risk Management Culture Program

1. Capability strengthening and risk culture program
   a. RO (One Hour with Risk Owner): Discussion session with risk owners to intensively discuss risk issues and challenges.
   b. RAISING (Risk Intensive Meeting): Intensive meeting focused on discussing risks and mitigation strategies.
   c. Production of Riskpedia Newsletter Vol. 01, which features four main sections: Monthly Risk Radar, Risk Tracker, Risk Tips Corner, and Voice of Risk
   d. Participation in the 11th National Conference of Risk Management Professionals 2025 in Batam.
2. Risk Monitoring and Evaluation Program
   a. The 2025 Risk Management Implementation Effectiveness Survey: A survey conducted to assess the effectiveness of risk management implementation in 2025.
   b. Risk Maturity Index (RMI) Focus Group Discussion (FGD): A focus group discussion to review and assess the the maturity of risk management, in collaboration with the SPMT Subholding.
   c. Exit Meeting Risk Maturity Index (RMI) 2025 Assessment: Final meeting marking the completion of 2025 risk maturity assessment , in conjunction with the SPMT Subholding.
3. BCMS Development and Risk Mitigation Program
   a. Kick Off Meeting BCM Governance Development: Initial meeting to start the development of Business Continuity Management (BCM) governance.
   b. Socialization of PRiMa and P-RKM Application Integration: A socialization program regarding the integration of the PRiMa application with P-RKM to facilitate risk and performance management.
   c. Risk, RKM, and Budget Preparation of 2026: The process of preparing risk, management work plans (RKM), and budgets for 2026.
4. Risk Education and Socialization Program
   a. Risk Preparation Assistance on the PRiMa Application: Guidance in preparing and monitoring risks using the PRiMa application.
   b. RAISING Series 2 Quiz: Quiz-based educational activities that are part of the RAISING series to improve risk management understanding.

Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko IPCC

Implementasi manajemen risiko di IPCC berlandaskan pada standar internasional ISO 31000 sebagai acuan utama dalam mengelola risiko secara terstruktur dan konsisten. Standar tersebut memberikan panduan komprehensif yang meliputi 11 (sebelas) prinsip dasar pengelolaan risiko, 5 (lima) komponen kerangka kerja yang menjadi fondasi tata kelola risiko, serta 7 (tujuh) tahapan proses manajemen risiko yang menggambarkan alur pengelolaan risiko dari identifikasi hingga pemantauan berkelanjutan. Keseluruhan pendekatan ini disajikan secara sistematis dalam skema di bawah ini sebagai gambaran menyeluruh mengenai penerapan manajemen risiko di Perseroan:

IPCC Risk Management System Overview

The implementation of risk management at IPCC is based on the international standard ISO 31000 as the primary reference for managing risks in a structured and consistent manner. This standard provides comprehensive guidance covering 11 (eleven) fundamental principles of risk management, 5 (five) framework components that form the foundation of risk governance, and 7 (seven) stages of risk management processes that outline the risk management workflow from identification to continuous monitoring. This overall approach is presented systematically in the diagram below as a comprehensive overview of the implementation of risk management at the Company:

Arsitektur Manajemen Risiko
Architecture of Risk Management

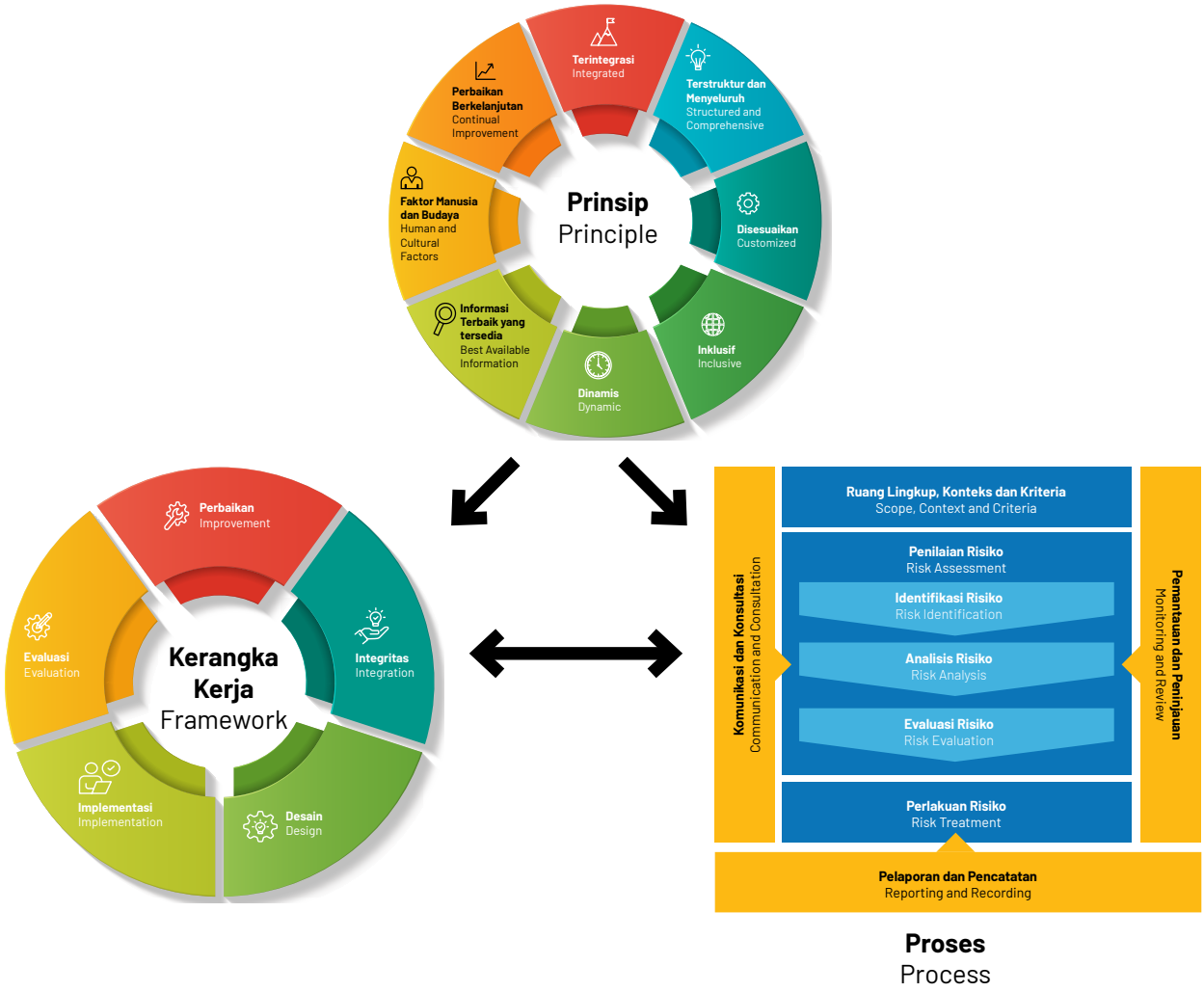

Prinsip Manajemen Risiko ISO 31000:2018

ISO 31000:2018 Risk Management Principles



Dalam kerangka ISO 31000, prinsip-prinsip manajemen risiko berfungsi sebagai dasar berpikir dan pedoman bertindak bagi seluruh pemilik risiko di Perseroan agar praktik pengelolaan risiko dapat dilaksanakan secara tepat, terarah, dan efektif. Penerapan prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mendukung penciptaan nilai sekaligus menjaga dan melindungi keberlanjutan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Perseroan menempatkan manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses bisnis dan pengambilan keputusan organisasi. Pendekatan yang digunakan bersifat sistematis, terstruktur, dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan pengelolaan risiko yang konsisten, relevan, serta responsif terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal. Selain itu, implementasi manajemen risiko dilakukan secara partisipatif dan adaptif dengan mempertimbangkan aspek manusia, budaya kerja, serta dinamika organisasi. Proses pengelolaan risiko juga terus disempurnakan melalui mekanisme pembelajaran berkelanjutan.

Pemahaman yang selaras mengenai tujuan dan manfaat manajemen risiko tersebut menjadi landasan bagi seluruh insan Perseroan untuk menerapkan 8 (delapan) prinsip manajemen risiko ISO 31000 yang diyakini mampu membentuk karakteristik pengelolaan risiko, mencakup:

In the ISO 31000 framework, risk management principles serve as a foundation for thinking and a guide for action for all risk owners within the Company, ensuring that risk management practices are implemented appropriately, purposefully, and effectively. The implementation of these principles is fundamentally aimed at supporting value creation while maintaining and protecting the Company's long-term sustainability.

The Company positions risk management as an integral part of all business processes and organizational decision-making. The approach used is systematic, structured, and comprehensive, enabling consistent, relevant, and responsive risk management in the face of changing internal and external conditions. Furthermore, risk management is implemented in a participatory and adaptive manner, taking into account human factors, work culture, and organizational dynamics. The risk management process is also continuously refined through a mechanism of continuous learning.

A shared understanding of the objectives and benefits of risk management serves as the foundation for all Company personnel to implement the 8 (eight) principles of ISO 31000 risk management, which are believed to shape the characteristics of risk management, including:

1. Terintegrasi;
2. Terstruktur dan komprehensif;
3. Adaptif/dapat menyesuaikan;
4. Inklusif;
5. Dinamis;
6. Berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
7. Faktor manusia dan budaya; dan
8. Perbaikan berkesinambungan.

1. Integrated;
2. Structured and comprehensive;
3. Adaptive/can adjust;
4. Inclusive;
5. Dynamic;
6. Based on the best information available;
7. Human and cultural factors; and
8. Continuous improvement.

Kerangka Manajemen Risiko ISO 31000:2018

ISO 31000:2018 Risk Management Framework

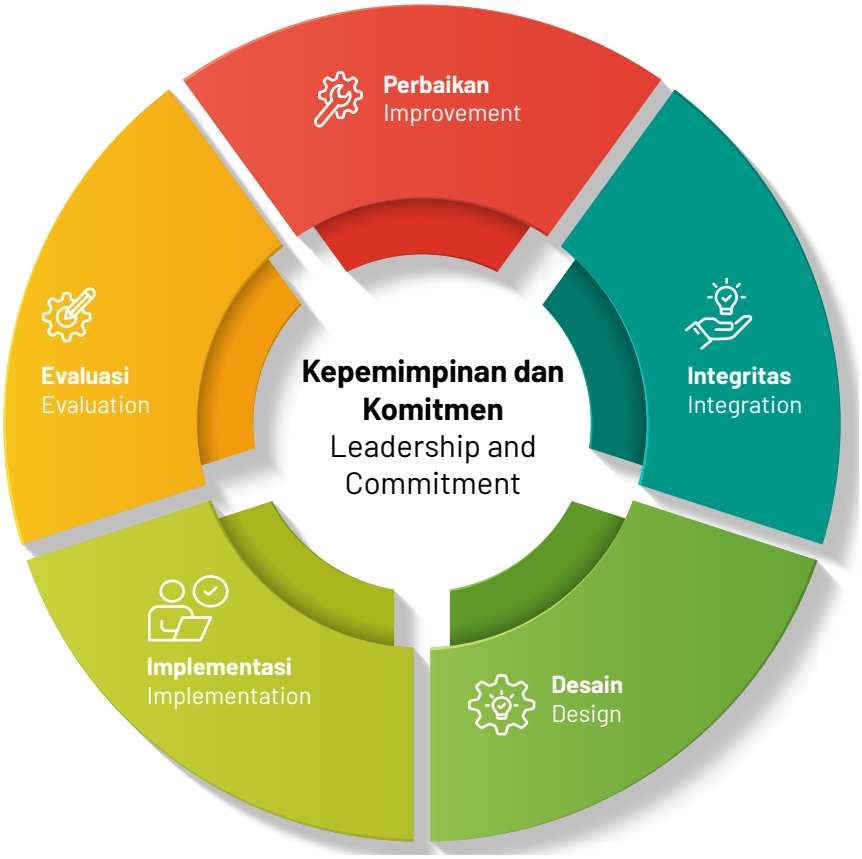

Kerangka kerja manajemen risiko merupakan tata kelola pengelolaan risiko yang dirancang secara terorganisasi, terpadu, dan berkesinambungan di seluruh lini Perseroan. Kerangka ini diwujudkan melalui seperangkat kebijakan, prosedur operasional, batasan transaksi, pendelegasian kewenangan, serta instrumen pengelolaan risiko lainnya yang mengikat dan menjadi acuan dalam setiap aktivitas usaha.

The risk management framework is a system for managing risk that is designed to be organized, integrated, and continuous across all levels of the Company. This framework is implemented through a set of policies, operational procedures, transaction limits, delegation of authority, and other binding risk management tools that serve as guidelines for all business activities.

Sejalan dengan ISO 31000:2018, penerapan kerangka manajemen risiko diawali dengan adanya mandat dan komitmen yang kuat dari manajemen puncak. Hal tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi manajemen risiko tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada keterlibatan aktif, dukungan nyata, dan kepemimpinan yang konsisten dari jajaran pimpinan sebagai penggerak utama budaya sadar risiko di organisasi.

In line with ISO 31000:2018, implementation of the risk management framework begins with a strong mandate and commitment from top management. This underscores that the success of risk management implementation depends not only on the system but also on the active involvement, tangible support, and consistent leadership of senior management as the primary drivers of a risk-aware culture within the organization.

Komitmen tersebut tercermin dalam peran pimpinan Perseroan yang mencontohkan praktik pengelolaan risiko melalui penetapan kebijakan yang jelas, pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas, serta mekanisme akuntabilitas yang terstruktur dan selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Sebagai pedoman operasional, Perseroan

This commitment is reflected in the roles of the Company's leadership, who exemplify risk management practices through the establishment of clear policies, a clear division of duties and responsibilities, and structured accountability mechanisms aligned with the Company's strategic objectives. As an operational guideline, the Company

menetapkan 6 (enam) komponen yang membentuk kerangka kerja manajemen risiko yang diterapkan secara menyeluruh di seluruh aktivitas bisnis.

1. Kepemimpinan dan Komitmen
   Direksi dan Dewan Komisaris berperan aktif dalam mengawal jalannya implementasi manajemen risiko dan bertugas memastikan bahwa manajemen risiko telah terintegrasi ke dalam seluruh kegiatan organisasi. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus menunjukkan sikap kepemimpinan dan komitmennya terhadap pengelolaan risiko yang efektif, tertuang dalam Komitmen antara Komisaris dan Direksi dan Penuansaan Implementasi Manajemen Risiko antara Direksi dan para Senior Manager.
2. Integrasi
   Integrasi pada kerangka kerja bermakna bahwa manajemen risiko menjadi bagian dan tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tujuan, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran dan operasi organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan menilai proses integrasi manajemen risiko sangat bergantung pada pemahaman terhadap struktur organisasi dan konteks organisasi yang tentunya dikelola pada setiap bagian dari struktur organisasi tersebut mempunyai tanggung jawab untuk mengelola risiko yang dihadapinya. Hal ini tertuang dalam perencanaan risiko tahun yang terintegrasi dengan Sasaran, RKM dan RKAP Perseroan.
3. Desain
   Desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen atau struktur. Desain dalam kerangka kerja manajemen risiko mencakup beberapa hal, yaitu (1) pemahaman organisasi dan konteksnya, (2) penegasan komitmen manajemen risiko, (3) penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas, (4) alokasi sumber daya, dan (5) penyiapan komunikasi dan konsultasi. Hal ini tertuang dalam sebuah komitmen, pedoman dan SOP Manajemen Risiko perusahaan tahun 2022.
4. Implementasi
   Implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko dilaksanakan setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Jika desain manajemen risiko diimplementasikan dengan baik, maka kerangka kerja manajemen risiko dapat memastikan proses manajemen risiko menjadi bagian dari semua kegiatan dalam organisasi risiko yang dilakukan setiap Triwulan dan dilaporkan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Evaluasi
   Evaluasi dalam kerangka manajemen risiko dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen risiko secara berkala terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Hal ini dilaksanakan baik oleh Pemegang Saham maupun Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko yang dilaksanakan setiap Triwulan.
6. Perbaikan
   Perbaikan dalam kerangka kerja manajemenrisiko terdiri dari adaptasi dan perbaikan yang berkesinambungan. Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Proses adaptasi suatu organisasi dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan yang terjadi baik pada lingkungan internal maupun eksternal, dengan begitu manajemen dapat mengambil langkah-langkah perbaikan sesuai dengan perubahan lingkungan yang

has established six components that form the risk management framework, which is comprehensively applied across all business activities.

1. Leadership and Commitment
   Board of Directors and Board of Commissioners play an active role in supervising the implementation of risk management and are responsible for ensuring that risk management is integrated into all organizational activities. Each member of Board of Directors and Board of Commissioners must demonstrate leadership and commitment to effective risk management, as stated in the Commitment between Board of Commissioners and Board of Directors and the Implementation of Risk Management between Board of Directors and Senior Managers.
2. Integration
   Integration into the framework means that risk management is part and cannot be separated or integrated into the goals, governance, leadership and commitment, strategy, targets and operations of the organization. To achieve this, the Company assesses that the risk management integration process is very dependent on understanding the organizational structure and organizational context, which of course is managed by each part of the organizational structure having the responsibility to manage the risks it faces. This is stated in the year's risk planning which is integrated with the Company's Targets, RKM and RKAP.
3. Design
   Design is a planning or conception that is carried out before the creation of an object, system, component or structure. Design in the risk management framework covers several things, namely (1) understanding the organization and its context, (2) affirming risk management commitment, (3) determining roles, authorities, responsibilities, and accountabilities, (4) allocating resources, and (5) preparing communication and consultation. This is stated in a commitment, guidelines, and SOP for Risk Management in 2022.
4. Implementation
   Implementation or execution in the risk management framework is carried out after the risk management design is created and determined. If the risk management design is implemented well, the risk management framework can ensure that the risk management process becomes part of all activities within the risk organization carried out every quarter and reported to Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors.
5. Evaluation
   Evaluation within the risk management framework is carried out to periodically measure the risk management framework against the objectives, implementation plans, indicators and expected behavior in accordance with the goals of the organization or Company. This is carried out by both Shareholders and Board of Commissioners through the Risk Management Monitoring Committee which is every quarter.
6. Improvements
   Improvement in the risk management framework consist of continuous adaptation and improvement. Adaptation is the ability to adjust to the environment. The adaptation process of an organization is carried out by considering changes that occur in both the internal and external environment, so that management can take corrective steps in accordance with environmental changes that occur to achieve organizational goals. This is stated

terjadi untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini tertuang pada Tinjauan Perubahan yang dilakukan pada setiap dokumen serta pembaharuan komitmen yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali pada peraturan perusahaan.

in the Review of Changes made to each document as well as renewal of commitments made at least once a year in Company regulations.

Proses Manajemen Risiko ISO 31000:2018

ISO 31000:2018 Risk Management Process

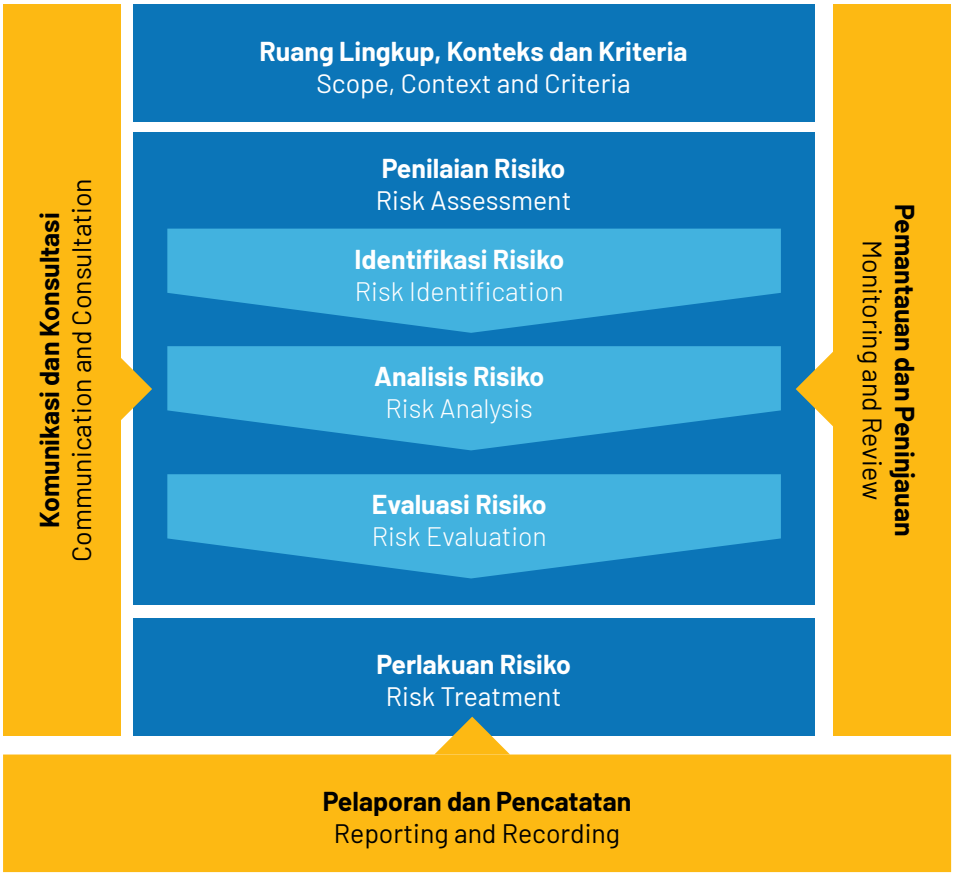

Proses Manajemen Risiko berfungsi sebagai panduan sistematis bagi Perseroan dalam melaksanakan pengelolaan risiko secara berkelanjutan dan terstruktur. Setiap tahapan pengelolaan risiko dilaksanakan secara runtut, terukur, dan saling berkaitan sehingga organisasi dapat memastikan bahwa risiko dikelola secara konsisten dan selaras dengan tujuan perusahaan.

Pelaksanaan proses manajemen risiko dimulai dengan pemahaman terhadap konteks internal dan eksternal organisasi sebagai dasar dalam mengidentifikasi potensi risiko. Setelah itu, proses ini terus berlanjut melalui mekanisme pemantauan, peninjauan ulang, serta pelaporan secara berkala. Dengan demikian, manajemen dapat memperoleh informasi yang mutakhir mengenai perkembangan risiko dan efektivitas pengelolaannya, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan apabila terjadi perubahan kondisi.

The Risk Management Process serves as a systematic guide for the Company in implementing sustainable and structured risk management. Each stage of risk management is carried out in a sequential, measurable, and interconnected manner so that the organization can ensure that risks are managed consistently and in alignment with Corporate objectives.

The implementation of risk management begins with an understanding of the organization's internal and external context as the foundation for identifying potential risks. Thereafter, this process continues through mechanisms of monitoring, review, and periodic reporting. Consequently, management can obtain up-to-date information regarding risk developments and the effectiveness of risk management, as well as make necessary adjustments should conditions change.

Secara lebih rinci, tahapan operasional dalam penerapan manajemen risiko Perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi dan Konsultasi
   Proses komunikasi dan konsultasi ialah proses dalam memahami dan mengomunikasikan risiko dan strategi pengelolaannya kepada seluruh pemangku kepentingan. Tahapan ini menjadi penting karena penerapan manajemen risiko seharusnya dikembangkan oleh pihak-pihak yang telah paham mengenai risiko yang akan dihadapi Perseroan, sebab manajemen risiko bukanlah tanggung jawab satu atau dua pihak tertentu, tetapi tanggung jawab semua pihak. Proses komunikasi dan konsultasi ini dilakukan baik saat penyusunan risiko tahun berikutnya maupun *monitoring* pelaksanaan mitigasi risiko.
2. Menentukan Konteks, Jangkauan, dan Kriteria
   Perseroan telah menentukan konteks, jangkauan, dan kriteria dari manajemen risiko. Penentuan kriteria risiko ini dilakukan berdasarkan *risk appetite* dan *tolerance* yang telah ditetapkan perusahaan serta arahan Kantor Pusat yang mana merupakan turunan dari Kementerian BUMN.
3. Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko
   Perseroan melakukan identifikasi risiko (*risk identification*) untuk mengidentifikasi sumber risiko (*risk causes*), peristiwa risiko (*risk events*), dan dampak risiko (*risk impacts*) yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam konteks perusahaan. Selain itu, Perseroan juga melakukan analisis risiko (*risk analysis*) untuk memahami sifat dari risiko dan karakteristiknya termasuk kesesuaian level risiko. Risiko kemudian dievaluasi agar dapat menentukan langkah penanganan risiko (*risk treatment*) yang diperlukan. Akan hal ini, Perseroan telah memiliki *Key Risk Indicators* (KRI) yang bertujuan untuk mengukur *risk drivers* atau *risk cause* yang dapat digunakan untuk menghubungkan dampak dari risiko dengan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. KRI digunakan untuk memantau *level of risk exposure* perusahaan terhadap suatu risiko sebelum kerugian akibat risiko tersebut terjadi. Hal ini tertuang dalam dokumen Kertas Kerja Risiko (KKR) yang di-*update* setiap Triwulan.

   Selain itu, sejak tahun 2023 Perseroan telah melakukan penyusunan *Early Warning System* (EWS) sebagai sebuah sistem yang mempunyai kemampuan untuk memberikan notifikasi peluang atau kesempatan terjadinya potensi risiko bisnis atau deteksi dini terhadap risiko bisnis yang berbasis KRI.

4. Pemantauan dan Pengkajian
   Proses *monitoring* dan *review* adalah tahapan untuk memastikan bahwa *risk assessment* dan *risk treatment* sudah berjalan memadai dan efektif, memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
5. Penyimpanan dan Pelaporan
   Perseroan menyusun laporan secara tepat waktu, akurat, dan dalam bentuk yang mudah dimengerti. Pelaporan disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen kepada Direktur Utama. Perseroan juga memiliki *Loss Event Management*, sebuah mekanisme untuk mencatat setiap kejadian yang merugikan perusahaan dalam sebuah *database*. Basis data ini dapat digunakan untuk tools analisis masa depan terutama dalam menentukan ukuran kemungkinan, dampak, dan jangkauan kapasitas, toleransi, dan selera yang diharapkan. *Database* ini juga dapat digunakan untuk menganalisa dan digunakan untuk mengembangkan rencana mitigasi yang tepat guna di kemudian

In more detail, operational stages in implementing the Company's risk management can be described as follows:

1. Communication and Consultation
   The communication and consultation process is the process of understanding and communicating risks and management strategies to all stakeholders. This stage is important because the implementation of risk management should be developed by parties who understand the risks that the Company will face, because risk management is not the responsibility of one or two particular parties, but is the responsibility of all parties in the Company. This communication and consultation process is carried out both when preparing risks for the following year and monitoring the implementation of risk mitigation.
2. Determine Context, Scope, and Criteria
   The Company has determined the context, scope and criteria for risk management. Determination of risk criteria is carried out based on the risk appetite and tolerance that has been determined by the Company as well as the Head Office direction which is derived from the Ministry of SOE.
3. Risk Identification and Risk Analysis
   The Company carries out risk identification to identify risk sources, risk events and risk impacts that are associated with achieving targets that have been determined in the Company context. Apart from that, the Company also carries out risk analysis to understand the nature of risks and their characteristics, including the suitability of risk levels. The risks are then evaluated in order to determine the necessary risk treatment steps (risk treatment). In this regard, the Company has Key Risk Indicators (KRI) which aims to measure risk drivers or risk causes which can be used to relate the impact of a risk to the possibility of that risk occurring. KRI is used to monitor the level of risk of a Company's exposure to a risk before losses due to that risk occur. This is stated in the Risk Working Paper (KKR) document which is updated every quarter.

In addition, since 2023 the Company has conducted developing an Early Warning System (EWS) as a system that has the ability to provide notification of opportunities or opportunities for potential business risks or early detection of KRI-based business risks.

4. Monitoring and Assessment
   The monitoring and review process is a stage to ensure that risk assessment and risk treatment have been carried out adequately and effectively, providing feedback and recommendations for necessary improvements.
5. Storage and Reporting
   The Company prepares reports timely, accurately and in a form that is easy to understand. Reports are submitted by Internal Audit and Risk Management Division to President Director. The Company also has Loss Event Management, a mechanism to record every event that is detrimental to the Company in a database. This database can be used for future analysis tools, especially in determining the size of possibility, impact, and range of expected capacities, tolerances, and tastes. This database can also be used to analyze and be used to develop appropriate mitigation plans in the future for similar events. This is stated consistently in quarterly reports to the Board of Directors, Board

hari untuk peristiwa serupa. Hal ini tertuang secara konsisten yang dilaporkan Triwulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

Pengelolaan Manajemen Risiko di Perseroan dijalankan melalui 2 (dua) alur proses yang saling melengkapi, yaitu proses strategis dan proses taktis. Pada tataran strategis, pengelolaan risiko dirancang dengan mengombinasikan pendekatan dari tingkat pimpinan ke unit kerja (*top-down*) dan dari unit operasional ke manajemen (*bottom-up*), sehingga seluruh risiko utama dapat terpetakan secara menyeluruh dalam lingkup Perseroan (*enterprise wide*). Pendekatan terpadu ini memastikan bahwa pengelolaan risiko tidak hanya berangkat dari kebijakan manajemen puncak, tetapi juga mencerminkan realitas operasional di lapangan, dengan tetap berpedoman pada kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. *Top-Down Process*
   Pada setiap periode pembuatan rencana strategis perusahaan dalam bentuk RJPP dan RKAP, direksi akan memberikan arahan kepada seluruh unit untuk target dan capaian sasaran yang diharapkan yang disertai dengan gambaran paparan potensi risiko beserta rencana strategis penanganannya yang mungkin terjadi. Setelah RJP dan RKAP tahun berikutnya untuk dilaporkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang di dalamnya terdapat analisis dan mitigasi risiko-risiko korporat (*strategic*, operasional, finansial, dan kepatuhan). Profil risiko tahunan disusun oleh unit yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko perusahaan berdasarkan hasil analisis, kajian, dan *risk assessment* di tingkat korporat dan unit kerja.
2. *Bottom-Up Process*
   Setiap tahun dan tiga bulan sekali seluruh unit kerja dengan difasilitasi oleh unit yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko perusahaan menyusun dan melaporkan eksposur risiko serta memonitor implementasi mitigasi risiko operasional dengan merujuk analisis risiko dan progres penanganan risiko sebelumnya.
3. *Tactical Process*

Proses Manajemen Risiko didasarkan pada proses Manajemen Risiko ISO 31000:2018, mencakup 2 (dua) kegiatan:

of Commissioners and Shareholders.

Risk management at the Company is carried out through two complementary processes: strategic process and tactical process. At the strategic level, risk management is designed by combining approaches from top management to work units (top-down) and from operational units to management (bottom-up), so that all major risks can be comprehensively mapped across the Company (enterprise-wide). This integrated approach ensures that risk management not only stems from top management policies but also reflects operational realities on the ground, while adhering to previously established risk criteria.

1. Top-Down Process
   In each period of making the Company's strategic plan in the form of RJPP and RKAP, Board of Directors will provide direction to all units regarding the expected targets and target achievements accompanied by a description of potential risk exposures along with strategic plans for handling them that may occur. After the following year's RJP and RKAP, it is to be reported to shareholders and other stakeholders, which includes analysis and mitigation of Corporate risks (strategic, operational, financial and compliance). The annual risk profile is prepared by the unit responsible for managing Company risk based on the results of analysis, studies and risk assessments at the Corporate and work unit levels.

2. Bottom-Up Process
   Every year and every three months, all work units, facilitated by the unit responsible for managing Company risk, compile and report risk exposure and monitor the implementation of operational risk mitigation by referring to previous risk analysis and risk management progress.

3. Tactical Process

The Risk Management process is based on the ISO 31000:2018 Risk Management process, including two activities:



Matriks Risiko Signifikan Tahun 2025

Bertolak dari penerapan kerangka manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018, Perseroan melalui Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melakukan rangkaian kajian sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan memutakhirkan profil risiko sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Proses berlandaskan oleh dinamika lingkungan bisnis, strategi perusahaan, serta kondisi operasional terkini.

Sepanjang periode 1(satu) tahun terakhir, Perseroan telah menelaah perkembangan risiko-risiko utama dengan mengutamakan hasil pemetaan melalui pendekatan *top-down*. Risiko-risiko tersebut berasal dari penilaian strategis pada tingkat korporat yang berfokus pada pencapaian tujuan organisasi dan belum sepenuhnya terungkap melalui mekanisme identifikasi berbasis unit kerja atau pendekatan *bottom-up*. Uraian mengenai perkembangan profil risiko utama tersebut disajikan sebagai berikut:

2025 Significant Risk Matrix

Based on the implementation of an ISO 31000:2018-based risk management framework, the Company, through its Risk Management and Compliance Division, has conducted a series of systematic reviews to identify, assess, and update its risk profile through December 31, 2025. This process is grounded in business environment dynamics, Corporate strategy, and current operational conditions.

Over the past one-year period, the Company has analyzed developments in key risks, prioritizing mapping results through a top-down approach. These risks stem from strategic assessments at the Corporate level focused on achieving organizational objectives and have not been fully revealed through unit-based identification mechanisms or a bottom-up approach. A description of the developments in these key risk profiles is presented as follows:

Matriks Risiko Signifikan IPCC 2025

IPCC 2025 Significant Risk Matrix

Risiko Inheren Awal Tahun 2025
Inherent Risks at the Start of 2025

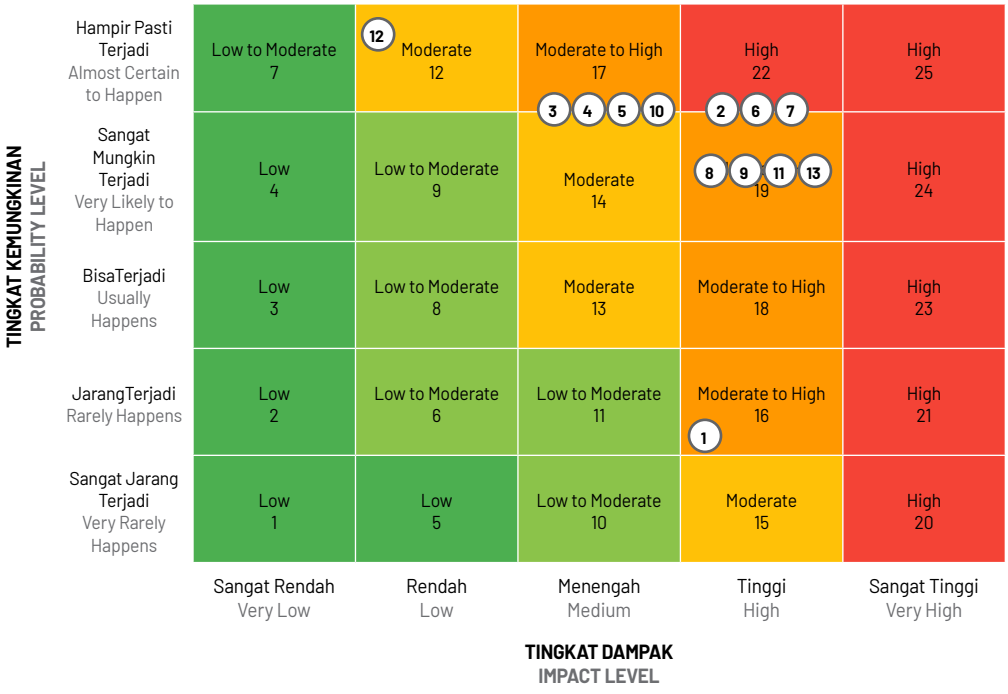

Target Risiko Triwulan 4 2025
Risk Targets for Fourth Quarter of 2025

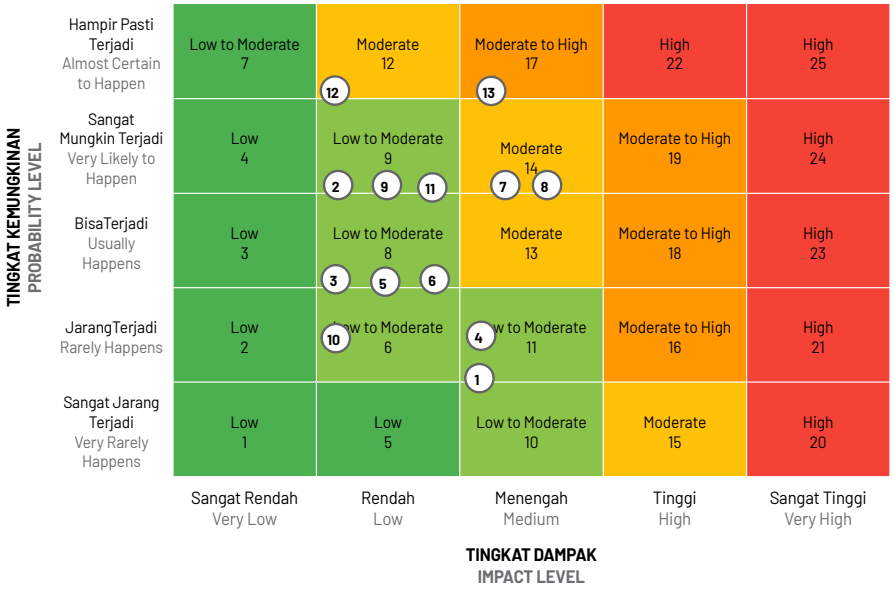

Realisasi Risiko Residual s.d Desember 2025
Realized Residual Risks through December 2025

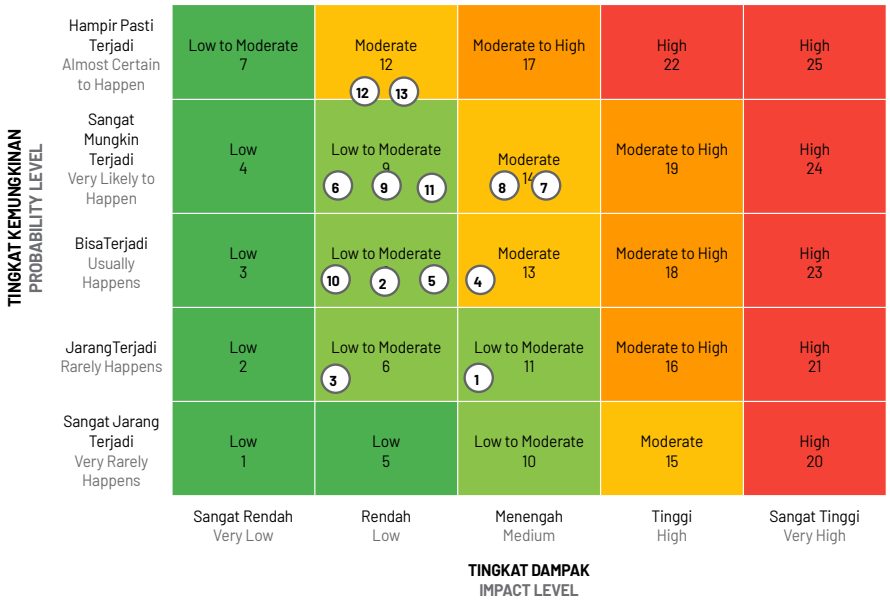

Tabel Matriks Risiko Signifikan IPCC 2025
IPCC 2025 Significant Risk Matrix Table

No	Peristiwa Risiko Risk Events	Risiko Inherent Inherent Risk	Risiko Risidual Residual Risk	Target Akhir Tahun End of Year Target
1	Menurunnya Citra Perusahaan. Damage to the Company's Reputation.	Moderate 15	Low to Moderate 10	Low to Moderate 10
2	Tidak tersedianya lapangan penumpukan sesuai kebutuhan *customer.* *Lack of storage space to meet customer needs.*	Moderate to High 19	Low to Moderate 6	Low to Moderate 6
3	Kegagalan Pengembangan Bisnis melalui *Strategic Partnership.* *Failure to Develop the Business through Strategic Partnerships.*	Moderate 14	Low 5	Low to Moderate 6
4	Kegagalan meraih *market* baru. Failure to Capture New Markets.	Moderate 14	Low to Moderate 11	Low to Moderate 11

No	Peristiwa Risiko Risk Events	Risiko Inherent Inherent Risk	Risiko Risidual Residual Risk	Target Akhir Tahun End of Year Target
5	Kegagalan implementasi inisiatif strategis dan atau aksi korporasi. Failure to implement strategic initiatives and/or Corporate actions	Moderate 14	Low to Moderate 6	Low to Moderate 6
6	Jaringan *provider* mengalami gangguan. Disruptions in the provider network.	Moderate to High 19	Low to Moderate 8	Low to Moderate 6
7	Keterbatasan lahan penumpukan *cargo.* *Limited cargo storage space.*	Moderate to High 19	Moderate 13	Moderate 13
8	Kapasitas lapangan penumpukan penuh di terminal satelit. Full storage capacity at satellite terminals.	Moderate 13	Moderate 13	Moderate 13
9	Lamanya proses perizinan. Lengthy licensing processes.	Moderate to High 19	Low to Moderate 8	Low to Moderate 8
10	Penerapan Manajemen Risiko tidak efektif dalam melindungi nilai dan menciptakan nilai. Risk management is ineffective in protecting and creating value.	Moderate 14	Low to Moderate 6	Low to Moderate 6
11	Dokumen hilang/tidak terarsipkan dengan benar. Documents are missing or not properly archived.	Moderate to High 19	Low to Moderate 8	Low to Moderate 8
12	Ketidakakuratan pencatatan laporan keuangan. Inaccuracies in financial reporting.	Moderate 12	Low to Moderate 9	Low to Moderate 9
13	Kerugian signifikan akibat struktur bisnis korporasi yang tidak tepat. Significant losses resulting from an inappropriate Corporate business structure.	Moderate to High 19	Low to Moderate 9	Moderate 13

Adapun upaya penanganan dari profil risiko yang telah diidentifikasi Perseroan di sepanjang tahun 2025, adalah sebagai berikut:

The mitigation efforts for risk profiles identified by the Company throughout 2025 are as follows:

Profil Risiko 2025 dan Upaya Mitigasi
Risk Profile and Mitigation Efforts in 2025

Reputasi Perusahaan Company Reputation	
Peristiwa Risiko Risk Events	Menurunnya Citra Perusahaan. Damage to the Company's Reputation.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Optimalisasi Media Komunikasi Perusahaan Untuk Peningkatan *Corporate Awareness.* *Optimizing Corporate Communication Channels to Enhance Corporate Awareness.*
Progres Penanganan Handling Progress	100%
Infrastruktur & Suprastruktur Infrastructure & Superstructure	
Peristiwa Risiko Risk Events	Tidak Tersedianya Lapangan Penumpukan untuk Kargo Bongkar dan Muat yang sesuai dengan Kebutuhan *Customer.* *Lack of a storage yard for loading and unloading cargo that meets the customer's needs.*
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Penambahan/Perluasan Lapangan Penumpukan (Ex PP). Addition/Expansion of the Storage Yard (Ex PP).
Progres Penanganan Handling Progress	100%
Pengembangan Bisnis Baru New Business Development	
Peristiwa Risiko Risk Events	Kegagalan Pengembangan Bisnis melalui *Strategic Partnership.* *Failure of Business Development through Strategic Partnerships.*
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Pengoperasian Terminal Kendaraan di Pelabuhan Lain yang Potensial di area Pelindo. Operation of Vehicle Terminals at Other Potential Ports within the Pelindo Area.
Progres Penanganan Handling Progress	100%

Sales & Marketing	
Peristiwa Risiko Risk Events	Kegagalan Meraih *Market* Baru. Failure to Capture New Markets.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Peningkatan Pangsa Pasar. Increase in Market Share.
Progres Penanganan Handling Progress	100%

Perencanaan (RJPP, RKAP, RIP, dll) (RJPP, RKAP, RIP, etc) Planning	
Peristiwa Risiko Risk Events	Kegagalan implementasi inisiatif strategis dan/atau aksi korporasi. Failure to implement strategic initiatives and/or Corporate actions.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Penyusunan RJPP 2025-2029. Development of 2025-2029 Strategic Business Plan.
Progres Penanganan Handling Progress	100%

Keamanan Jaringan Network Security	
Peristiwa Risiko Risk Events	Terhentinya pelayanan. Service interruption.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Peningkatan Kapasitas Perangkat Teknologi informasi. Expansion of information technology infrastructure.
Progres Penanganan Handling Progress	100%

Infrastruktur dan Suprastruktur Infrastructure and Superstructure	
Peristiwa Risiko Risk Events	Keterbatasan lahan penumpukan *cargo.* *Limited cargo storage space.*
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Penambahan Kapasitas Penumpukan Terminal Kendaraan. Expansion of Vehicle Terminal Storage Capacity.
Progres Penanganan Handling Progress	100%

Infrastruktur dan Suprastruktur Infrastructure and Superstructure	
Peristiwa Risiko Risk Events	Kapasitas lapangan penumpukan penuh di terminal satelit. Limited cargo storage space.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Penambahan Lapangan Penumpukan di Terminal Satelit Makassar. Expansion of Vehicle Terminal Storage Capacity.
Progres Penanganan Handling Progress	100%

Perencanaan Investasi Investment Planning	
Peristiwa Risiko Risk Events	Lamanya Proses Perizinan. Lengthy licensing process.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Pengurusan dokumen lingkungan untuk penambahan kapasitas penumpukan terminal kendaraan. Processing of environmental documents for an expansion of the vehicle terminal's storage capacity.
Progres Penanganan Handling Progress	100%

Kepatuhan Compliance	
Peristiwa Risiko Risk Events	Penerapan Manajemen Risiko tidak efektif dalam melindungi dan menciptakan nilai. The implementation of risk management is ineffective in protecting and creating value.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Penguatan Implementasi GRC dan Program Budaya Risiko sesuai *Risk Based Budgeting* dan *Risk Based Audit.* *Strengthening the implementation of GRC and risk culture programs in accordance with Risk-Based Budgeting and Risk-Based Auditing.*
Progres Penanganan Handling Progress	100%

Kepatuhan Compliance	
Peristiwa Risiko Risk Events	Dokumen hilang/tidak terarsipkan dengan benar. Documents are missing or not properly archived.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	IPCC tanggap peduli tertib arsip. IPCC is committed to maintaining proper archives.
Progres Penanganan Handling Progress	100%
Keuangan Financial	
Peristiwa Risiko Risk Events	Ketidakakuratan Pencatatan Laporan Keuangan. Inaccuracies in Financial Reporting.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Implementasi ICOFR. Implementation of ICOFR.
Progres Penanganan Handling Progress	100%
Struktur Korporasi Corporate Structure	
Peristiwa Risiko Risk Events	Kerugian signifikan akibat struktur bisnis korporasi yang tidak tepat. Significant losses resulting from an inappropriate Corporate business structure.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Divestasi MKO MTKI. Divestiture of MKO MTKI.
Progres Penanganan Handling Progress	100%

Tinjauan atas Efektivitas Manajemen Risiko Tahun 2025

Hasil penilaian melalui survei efektivitas manajemen risiko menunjukkan bahwa bahwa penerapan manajemen risiko di Perseroan telah berjalan dengan baik dan menunjukkan kematangan yang signifikan pada aspek budaya, efektivitas, maupun metode asesmen risiko.

Dari sisi Budaya Risiko, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pegawai telah memiliki kesadaran dan perilaku proaktif terhadap risiko dengan tingkat kematangan berada pada kategori "*Mature*". Hal ini mengindikasikan bahwa budaya risiko telah tertanam cukup kuat dan menjadi bagian dari kebiasaan kerja sehari-hari.

Pada aspek Efektivitas Manajemen Risiko, hasil pengukuran menunjukkan rata-rata skor pada kategori "Baik". Ini berarti bahwa kebijakan, kerangka kerja, dan prosedur manajemen risiko telah berjalan secara konsisten dan efektif di sebagian besar lini Perseroan.

Sementara itu, dari sisi Metode Asesmen Manajemen Risiko, hasil survei menunjukkan bahwa metode yang digunakan telah memiliki kejelasan, relevansi, dan kepraktisan yang baik. Pegawai memahami proses asesmen dengan cukup jelas, dokumentasi telah tertata, dan penerapan metode secara umum sudah efektif.

Secara keseluruhan, hasil survei memberikan gambaran bahwa IPCC telah memiliki pondasi manajemen risiko yang solid dan budaya sadar risiko yang mulai mengakar di seluruh lini organisasi. Dengan penguatan berkelanjutan pada aspek komunikasi, koordinasi, dan integrasi sistem, IPCC berpotensi mencapai kategori "Sangat Baik" dalam penerapan manajemen risiko secara menyeluruh

Review of Risk Management Effectiveness in 2025

The results of risk management effectiveness surveys indicate that the implementation of risk management at the Company has been successful and demonstrates significant maturity in terms of culture, effectiveness, and risk assessment methods.

In terms of Risk Culture, survey results show that the majority of employees have developed awareness and proactive behavior regarding risks, with the maturity level falling into the "Mature" category. This indicates that the risk culture has been firmly established and has become an integral part of daily work practices.

Regarding Risk Management Effectiveness, measurement results show an average score in the "Good" category. This means that risk management policies, frameworks, and procedures have been implemented consistently and effectively across most of the Company's operations.

Meanwhile, regarding Risk Management Assessment Methods, survey results indicate that the methods used possess good clarity, relevance, and practicality. Employees understand the assessment process clearly, documentation is well-organized, and the application of methods is generally effective.

Overall, survey results suggest that IPCC has a solid foundation in risk management and a risk-aware culture that is beginning to take root across the entire organization. With continuous strengthening in the areas of communication, coordination, and system integration, IPCC has potential to achieve the "Very Good" category in its overall implementation of risk management

Sebagai tindak lanjut dari hasil survei, terdapat beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depannya untuk memperkuat implementasi budaya dan manajemen risiko Perseroan, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran Risiko:
   a. Melakukan pelatihan, *workshop*, dan sosialisasi berkala terkait budaya risiko dan penerapan manajemen risiko di seluruh level organisasi.
   b. Mengembangkan program *Risk Awareness Campaign* yang menarik dan interaktif untuk menjaga konsistensi kesadaran risiko.
2. Penguatan Peran Pimpinan:
   a. Mendorong peran aktif pimpinan unit kerja sebagai *role model* dalam penerapan budaya risiko.
   b. Menunjuk *risk champion* di setiap unit sebagai penggerak dan penghubung komunikasi risiko.
3. *Monitoring* dan Evaluasi Berkelanjutan:
   a. Melakukan survei budaya risiko dan evaluasi efektivitas manajemen risiko secara periodik (tahunan/triwulanan).
   b. Mengintegrasikan hasil survei ke dalam *dashboard monitoring* risiko untuk memantau kemajuan dan efektivitas penerapan di setiap unit.
4. Apresiasi dan Penguatan Motivasi:
   a. Memberikan penghargaan bagi unit kerja dengan peningkatan signifikan dalam penerapan budaya risiko.
   b. Menjadikan budaya sadar risiko sebagai bagian dari indikator kinerja (KPI) pegawai.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan IPCC mampu memperkuat tata kelola risiko yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa budaya sadar risiko benar-benar menjadi bagian dari perilaku kerja seluruh Insan Perseroan. Pada akhirnya, penguatan budaya risiko ini akan menjadi penting dalam mendukung visi IPCC sebagai perusahaan Ekosistem Terminal Kendaraan Kelas Dunia.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Komitmen manajemen terhadap penerapan sistem manajemen risiko diwujudkan secara formal melalui kesepakatan bersama antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Implementasi Manajemen Risiko. Dokumen ini ditandatangani pada tahun 2025 dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai bentuk penguatan tanggung jawab kolektif pimpinan Perseroan dalam memastikan pengelolaan risiko dilaksanakan secara konsisten, terarah, dan terintegrasi dengan proses bisnis Perseroan:

1. Pernyataan Komitmen bersama antara Direksi dengan Senior Manager tentang Penerapan budaya sadar risiko Direksi yang ditandatangani pada tahun 2025 untuk periode selama 1 (satu) tahun;

As a follow-up to the survey results, several strategic steps will be taken moving forward to strengthen the implementation of the Company's risk culture and risk management, namely:

1. Capacity Building and Risk Awareness:
   a. Conducting regular training, workshops, and outreach activities related to risk culture and the implementation of risk management at all organizational levels.
   b. Developing engaging and interactive risk awareness campaigns to maintain consistent risk awareness.
2. Strengthening Leadership Roles:
   a. Encouraging the active role of work unit leaders as role models in fostering a risk culture.
   b. Appoint a risk champion in each unit to serve as a driver and liaison for risk communication.
3. Monitoring and Continuous Evaluation:
   a. Conduct periodic (annual/quarterly) risk culture surveys and evaluations of risk management effectiveness.
   b. Integrate survey results into the risk monitoring dashboard to track progress and the effectiveness of implementation across all units.
4. Recognition and Motivation:
   a. Awarding recognition to work units demonstrating significant improvement in the implementation of risk culture.
   b. Incorporating risk-aware culture as part of employee performance indicators (KPIs).

Through these steps, it is hoped that IPCC will be able to strengthen adaptive, responsive, and sustainable risk governance, as well as ensure that a risk-aware culture truly becomes part of the work behavior of all Company personnel. Ultimately, the strengthening of this risk culture will be crucial in supporting IPCC's vision as a World-Class Vehicle Terminal Ecosystem Company.

Statement of Board of Directors and/or Board of Commissioners or Audit Committee regarding the Adequacy of Risk Management System

Management's commitment to implementing a risk management system is formally established through a joint agreement between Board of Commissioners and Board of Directors, as set forth in the Commitment Statement on Risk Management Implementation. This document was signed in 2025 and is valid for a period of 1 (one) year as a means of reinforcing the collective responsibility of the Company's leadership to ensure that risk management is carried out consistently, purposefully, and integrated with the Company's business processes:

1. Joint Statement of Commitment between Board of Directors and Senior Managers regarding Implementation of the Board of Directors' risk awareness culture, signed in December 2025 for a period of 1 (one) year;

2. Pedoman manajemen risiko sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 yang berisi antara lain Model Tata Kelola Risiko, Klasifikasi Perseroan berdasarkan Intensitas Risiko, Ketentuan Organ Pengelola Risiko, Taksonomi Risiko, Prinsip, Kerangka, dan Proses Manajemen Risiko sesuai dengan ISO 31000:2018 serta Roadmap Implementasi Manajemen Risiko yang ditandatangani bulan November 2023;
3. Prosedur dan instruksi kerja Manajemen Risiko dengan pembaharuan proses yang ditandatangani bulan November 2023;
4. Pelaporan Implementasi Manajemen Risiko dalam bentuk pelaporan Profil Risiko baik Operasional maupun Investasi dan disertai data – data kuantitatif secara konsisten setiap Triwulanan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham;
5. Terdapat program – program manajemen risiko dalam bentuk Rencana Kerja Manajemen (RKM) dan Budaya Risiko;
6. Penetapan struktural organisasi yang menangani manajemen risiko yaitu Subdivisi Manajemen Risiko yang tercantum pada SK Direksi nomor HK.01/2/1/1/SDMU/DIRUT/IKT-24 tanggal 1 Januari 2024 perihal Struktur Organisasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
7. Pembentukan *Risk Agent* yang secara konsisten diperbaharui dengan anggota dari perwakilan setiap Divisi untuk mendukung implementasi manajemen risiko, sebagaimana tertuang dalam SK Direksi nomor: HK.01/10/3/1/MNRS/DIRUT/IKT-25 tanggal 10 Maret 2025 perihal Pembentukan *Risk Champion, Risk Agent* dan *Risk Officer* di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
8. Pelatihan dan sertifikasi di bidang manajemen risiko untuk personil yang menjabat sebagai dari mulai Direktur Pengelola Risiko, Senior Manager, Asisten Senior Manager dan *Risk Agent*; dan
9. Digitalisasi dalam implementasi manajemen risiko melalui aplikasi Pelindo Risk Management (PRiMa);

Bahwa bukti dokumentasi di atas telah mencukupi, dan selanjutnya akan disosialisasikan, diimplementasikan, dipantau, dan ditinjau secara berkesinambungan.

Rencana Program Pengelolaan Sistem Manajemen Risiko Tahun 2026

Perseroan telah menyusun arah kebijakan dan inisiatif strategis yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Perencanaan ini disusun sebagai upaya antisipatif agar sistem manajemen risiko semakin matang, adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis, serta mampu memberikan dukungan yang lebih optimal bagi pencapaian tujuan perusahaan. Adapun berbagai inisiatif yang menjadi fokus penguatan manajemen risiko diuraikan lebih lanjut dalam rencana program berikut:

1. Penguatan Literasi dan Kompetensi Manajemen Risiko, di dalamnya mencakup Sosialisasi Risiko ke Terminal Satelit, Penyusunan Laporan *Internal Control Testing*, Identifikasi Peluang (*risk-opportunity*), Penyusunan *Stress Testing* serta implementasi *Early Warning System* (EWS).
2. Penguatan Budaya dan Keterlibatan Manajemen Risiko, di dalamnya mencakup *Risk Townhall Meeting, Awarding* Risiko, *Mentorship* Risiko antar Divisi, serta Keikutsertaan Perlombaan Risiko.

2. Risk management guidelines have been adapted to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-2/MBU/03/2023 which contains, among other things, Risk Governance Model, Company Classification based on Risk Intensity, Provisions for Risk Management Organs, Risk Taxonomy, Principles, Framework and Management Process Risk in accordance with ISO 31000:2018 and the Risk Management Implementation Roadmap signed in November 2023;
3. Risk Management procedures and work instructions with process updates signed in November 2023;
4. Risk Management Implementation Reporting in the form of Risk Profile reporting both Operational and Investment and accompanied by quantitative data consistently every quarter to Board of Commissioners and Shareholders;
5. There are risk management programs in the form of Management Work Plans (RKM) and Risk Culture;
6. The organizational structure that handles risk management is the Risk Management Subdivision as stated in the Board of Directors Decree number HK.01/2/1/1/SDMU/DIRUT/IKT-24 dated January 1, 2024, regarding Organizational Structure of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
7. The establishment of a Risk Agent that is consistently updated with members from representatives of each Division to support the implementation of risk management, as stated in the Board of Directors Decree number: HK.01/10/3/1/MNRS/DIRUT/IKT-25 dated March 10, 2025, regarding Establishment of Risk Champions, Risk Agents, and Risk Officers at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
8. Training and certification in the field of risk management for personnel serving as Risk Management Director, Senior Manager, Assistant Senior Manager, and Risk Agent;
9. Digitalization in risk management implementation through the Pelindo Risk Management (PRiMa) application.

The above documentation evidence is sufficient, and continues to be disseminated, implemented, monitored and reviewed on an ongoing basis.

Risk Management System Program Plan for 2026

The Company has formulated policy directions and strategic initiatives to be implemented throughout 2026. This plan was developed as a proactive measure to ensure that the risk management system becomes more mature, adaptable to changes in the business environment, and capable of providing optimal support for the achievement of the Company's objectives. The various initiatives focused on strengthening risk management are further detailed in the following program plan:

1. Strengthening Risk Management Literacy and Competence, which includes Risk Awareness Sessions at Satellite Terminals, Preparation of Internal Control Testing Reports, Identification of Risk-Opportunity, Development of Stress Testing, and implementation of the Early Warning System (EWS).
2. Strengthening Risk Management Culture and Engagement, which includes Risk Town Hall Meetings, Risk Awards, Risk Mentorship across Divisions, and Participation in Risk Competitions.

Penilaian Risiko Terkait Teknologi Informasi

Dalam rangka menjaga ketahanan operasional di tengah perkembangan digital yang semakin dinamis, Perseroan menempatkan pengelolaan teknologi informasi sebagai salah satu pilar penting dalam tata kelola perusahaan. Penguatan pengelolaan IT diarahkan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan usaha, menjaga kerahasiaan dan integritas data, serta meminimalkan potensi risiko yang dapat mengganggu aktivitas bisnis. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan menerapkan kerangka pengelolaan yang menyeluruh dengan memberikan perhatian khusus pada risiko gangguan sistem (*disruption*), ancaman keamanan siber (*cyber security*), serta kesiapan pemulihan (*disaster recovery*) apabila terjadi insiden atau bencana yang berdampak pada infrastruktur teknologi informasi.

Pengelolaan Risiko Disruption

Pengelolaan risiko teknologi informasi di Perseroan dilaksanakan melalui mekanisme yang sistematis dan berkesinambungan agar setiap potensi gangguan terhadap sistem dan infrastruktur IT dapat dikenali sejak dini serta ditangani secara tepat. Sebagai upaya memperkuat upaya mitigasi terhadap risiko *disruption*, Perseroan menetapkan sejumlah tindakan, yang meliputi:

1. *Monitoring* Proaktif: Penggunaan sistem pemantauan 24/7 untuk mendeteksi anomali atau potensi gangguan sebelum berdampak luas.
2. Redundansi Infrastruktur: Implementasi infrastruktur IT yang berlapis dengan mekanisme *failover* untuk memastikan keberlanjutan layanan.
3. Pengujian dan Simulasi Rutin: Pelaksanaan uji coba pemulihan sistem secara berkala untuk menilai kesiapan menghadapi potensi gangguan.

Strategi *Cyber Security*

Perlindungan terhadap aset digital dan integritas sistem informasi ditempatkan sebagai fokus penting dalam pengelolaan teknologi informasi Perseroan. Seiring meningkatnya ancaman di ruang siber, Perseroan membangun pendekatan yang terencana dan berlapis untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, serta keandalan data dan aplikasi yang digunakan dalam operasional bisnis. Strategi pengamanan tidak hanya bersifat reaktif terhadap insiden, tetapi juga menekankan pencegahan, deteksi dini, dan kesiapsiagaan berkelanjutan. Perseroan menetapkan serangkaian upaya penguatan keamanan dunia maya sebagai bagian integral dari tata kelola IT dan manajemen risiko teknologi informasi, antara lain:

1. Kebijakan dan Standar Keamanan: Penerapan kebijakan keamanan siber yang mengacu pada standar internasional seperti ISO 27001 dan NIST Cybersecurity Framework.
2. Proteksi *Multi-layered*: Penggunaan *firewall*, enkripsi data, serta sistem deteksi dan pencegahan intrusi (IDS/IPS) untuk menghalau ancaman siber.
3. Kesadaran dan Pelatihan Pegawai: Program edukasi berkala untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap serangan siber, seperti *phishing* dan *malware*.
4. Audit dan Penilaian Keamanan: Evaluasi rutin terhadap sistem IT melalui *penetration testing* dan *security assessment* untuk mengidentifikasi serta memperbaiki celah keamanan.

Information Technology Risk Assessment

To maintain operational resilience amid increasingly dynamic digital developments, the Company regards information technology management as a key pillar of Corporate governance. Strengthening IT management is aimed at ensuring the continuity of business operations, safeguarding data confidentiality and integrity, and minimizing potential risks that could disrupt business activities. In line with this, the Company implements a comprehensive management framework with a particular focus on system disruption risks, cybersecurity threats, and disaster recovery readiness in the event of incidents or disasters affecting the information technology infrastructure.

Disruption Risk Management

Information technology risk management at the Company is carried out through systematic and continuous mechanisms to ensure that any potential disruptions to IT systems and infrastructure can be identified early on and addressed appropriately. To strengthen mitigation efforts against disruption risks, the Company has established a number of measures, including:

1. Proactive Monitoring: Use of a 24/7 monitoring system to detect anomalies or potential disruptions before they have a widespread impact.
2. Infrastructure Redundancy: Implementation of a layered IT infrastructure with failover mechanisms to ensure service continuity.
3. Routine Testing and Simulation: Periodic system recovery trials to assess readiness for potential disruptions.

Cyber Security Strategy

Protecting digital assets and the integrity of information systems is a key focus of the Company's information technology management. As cyber threats increase, the Company has developed a planned, multi-layered approach to safeguard the confidentiality, availability, and reliability of the data and applications used in business operations. The security strategy is not merely reactive to incidents but also emphasizes prevention, early detection, and continuous preparedness. The Company has established a series of cybersecurity enhancement initiatives as an integral part of IT governance and information technology risk management, including:

1. Security Policies and Standards: Implementation of cyber security policies that refer to international standards such as ISO 27001 and NIST Cybersecurity Framework.
2. Multi-layered Protection: Use of firewalls, data encryption, and intrusion detection and prevention systems (IDS/IPS) to ward off cyber threats.
3. Employee Awareness and Training: Regular educational programs to increase employee awareness of cyber attacks, such as phishing and malware.
4. Security Audit and Assessment: Routine evaluation of IT systems through penetration testing and security assessment to identify and fix security gaps.

Disaster Recovery dan *Business Continuity Plan* (BCP)

Dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional ketika terjadi situasi krisis atau gangguan yang tidak terduga, Perseroan telah menyiapkan kerangka penanganan keadaan darurat yang terintegrasi melalui penerapan *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Business Continuity Plan* (BCP). Kedua instrumen tersebut dirancang untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi kritis perusahaan tetap dapat berjalan, risiko kerugian dapat diminimalkan, serta proses pemulihan operasional dapat dilakukan secara cepat dan terstruktur. Adapun tanggap darurat yang telah disiapkan Perseroan antara lain:

1. Pusat Data Cadangan (*Backup Data Center*): Penyimpanan data pada lokasi alternatif yang dapat diakses dalam situasi darurat.
2. Rencana Pemulihan Darurat: Protokol pemulihan yang jelas dengan skenario untuk berbagai jenis gangguan, termasuk bencana alam, kegagalan sistem, dan serangan siber.
3. Tim Tanggap Darurat IT: Pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab dalam menangani insiden IT secara cepat dan efektif.
4. Uji Coba dan Simulasi Berkala: Pelaksanaan simulasi pemulihan untuk memastikan kesiapan sistem dan tim dalam menghadapi skenario bencana.

Pelaporan dan Pengawasan kepada Direksi

Perseroan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko IT, yang dilakukan melalui:

1. Laporan Risiko IT: Pembaruan rutin terkait ancaman terbaru, insiden keamanan, dan langkah mitigasi yang telah dilakukan.
2. Evaluasi Kinerja Sistem: Peninjauan berkala terhadap efektivitas sistem IT, termasuk *uptime*, tingkat keberhasilan pemulihan, serta efektivitas kontrol keamanan.
3. Rekomendasi Strategis: Penyampaian usulan perbaikan atau peningkatan sistem berdasarkan evaluasi risiko dan tren teknologi terbaru.

Dilandasi pengelolaan tata kelola teknologi informasi yang sistematis dan berkesinambungan, Perseroan berkomitmen untuk menjalankan proses pengelolaan risiko IT secara terencana mulai dari tahap identifikasi, analisis, pengendalian, hingga pelaporan kepada pihak-pihak terkait. Pendekatan ini memungkinkan manajemen memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap potensi ancaman digital sekaligus mengambil langkah mitigasi yang tepat waktu dan terukur. Dengan demikian, pengelolaan risiko IT tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan operasional, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan usaha dan memperkuat kredibilitas Perseroan di mata pemangku kepentingan.

Business Continuity Management

Sebagai langkah antisipatif untuk menjaga keberlanjutan kegiatan usaha dari berbagai potensi kejadian di luar kendali, termasuk keadaan kahar (*force majeur*) dan gangguan eksternal lainnya yang dapat berdampak pada operasional, Perseroan menetapkan Pedoman *Business Continuity Management System* (BCMS) sebagai acuan pengelolaan kesinambungan bisnis.

Pedoman tersebut disusun secara komprehensif dengan mengatur berbagai aspek penting, mulai dari pemetaan konteks organisasi, pembagian peran dan tanggung jawab Tim BCMS,

Disaster Recovery and Business Continuity Plan (BCP)

To ensure operational continuity in the event of a crisis or unexpected disruption, the Company has established an integrated emergency response framework through the implementation of a Disaster Recovery Plan (DRP) and a Business Continuity Plan (BCP). These two instruments are designed to ensure that the Company's critical functions remain operational, the risk of loss is minimized, and the operational recovery process can be carried out quickly and in a structured manner. The emergency response measures prepared by the Company include:

1. Backup Data Center: Data storage at an alternative location that can be accessed in an emergency.
2. Emergency Recovery Plan: A clear recovery protocol with scenarios for various types of disruptions, including natural disasters, system failures, and cyberattacks.
3. IT Emergency Response Team: Establishment of a special team responsible for handling IT incidents quickly and effectively.
4. Periodic Trials and Simulations: Implementation of recovery simulations to ensure the readiness of systems and teams in the event of a disaster scenario.

Reporting and Supervision to Board of Directors

The Company ensures transparency and accountability in IT risk management, which is implemented through:

1. IT Risk Report: Regular updates on the latest threats, security incidents, and mitigation measures taken.
2. System Performance Evaluation: Periodic review of IT system effectiveness, including uptime, recovery success rate, and security control effectiveness.
3. Strategic Recommendations: Submission of proposals for system improvements or enhancements based on risk evaluation and the latest technological trends.

Based on systematic and continuous information technology governance, the Company is committed to implementing a planned IT risk management process, ranging from identification and analysis to control and reporting to relevant parties. This approach enables management to gain a more comprehensive understanding of potential digital threats while taking timely and measured mitigation steps. Thus, IT risk management not only serves as an operational protection mechanism but also becomes a crucial foundation for ensuring business continuity and strengthening the Company's credibility in the eyes of stakeholders.

Business Continuity Management

As a proactive measure to ensure the continuity of business operations in the face of various potential events beyond our control, including force majeure and other external disruptions that could impact operations, the Company has established the Business Continuity Management System (BCMS) Guidelines as a framework for business continuity management.

These guidelines are comprehensively structured to address various critical aspects, ranging from organizational context mapping, division of roles and responsibilities within the BCMS Team, methodological

pendekatan metodologis dalam pengelolaan kesinambungan bisnis, pemenuhan standar operasional manajemen, pengelolaan informasi terdokumentasi, mekanisme operasional BCMS, pelaksanaan uji coba dokumen, hingga proses evaluasi kinerja dan audit secara berkala.

Ketentuan tersebut resmi diberlakukan melalui Peraturan Direksi Nomor: PW.05.02/10/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 tanggal 10 Desember 2024 sebagai dasar implementasi BCMS di lingkungan Perseroan, yang bertujuan untuk:

1. Menjamin kelangsungan fungsi bisnis saat kondisi gangguan atau bencana, terutama fungsi bisnis atau operasional yang kritikal agar layanan Perseroan tetap berjalan;
2. Memastikan ketersediaan prosedur kerja bagi Unit Kerja sebelum, saat, dan setelah gangguan atau bencana, sehingga dapat meminimalisasi dampak dan menghindari kerugian yang lebih besar bagi Perseroan dan *stakeholder*; dan
3. Membangun budaya, pemahaman, dan kesadaran BCMS (BCMS *awareness*) melalui sosialisasi secara berkesinambungan dan simulasi penanganan gangguan atau bencana.

Ruang Lingkup

Penerapan BCMS di lingkungan Perseroan dirancang mencakup seluruh lini kegiatan usaha yang memiliki tingkat kepentingan tinggi bagi keberlangsungan operasional, termasuk produk dan layanan, fungsi bisnis kritikal, serta aset-aset strategis yang mendukung aktivitas perusahaan. Kebijakan ini juga melindungi seluruh pihak yang berada di area kerja Perseroan, baik karyawan maupun pihak lain yang beraktivitas di lokasi operasional.

Dalam aspek teknologi informasi, perhatian utama diberikan pada sistem dan layanan yang bersifat kritikal karena memiliki dampak langsung terhadap kelancaran proses bisnis, sementara layanan non-kritikal dapat dipertimbangkan sebagai pendukung sepanjang relevan dengan kebutuhan operasional. Pendekatan menyeluruh ini dimaksudkan agar kesiapsiagaan Perseroan terhadap gangguan dapat berjalan terpadu, konsisten, dan efektif pada seluruh unit kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, ruang lingkup Kebijakan BCMS ditetapkan sebagai berikut:

1. Kebijakan *Business Continuity Management System* (BCMS) berlaku untuk seluruh Unit Kerja Perseroan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Kebijakan BCMS mengatur perlindungan dan keselamatan aset Perseroan (Karyawan, dokumen, dan lainnya) pada saat terjadi gangguan atau bencana sebagaimana dijelaskan secara lebih detail pada Prosedur Keadaan Darurat (ER *Plan*).
3. Kebijakan BCMS merupakan referensi Perseroan dalam membangun ketahanan (*resiliency*) terhadap ancaman yang dapat mengganggu operasional.

Batasan

1. Implementasi BCMS merespons beberapa skenario gangguan/ bencana yang paling berpotensi terjadi pada Perseroan.
2. *Back-up* layanan Teknologi Informasi fokus pada layanan teknologi informasi yang termasuk kritikal berdasarkan proses *Business Impact Analysis* (BIA).

approaches to business continuity management, compliance with operational management standards, management of documented information, BCMS operational mechanisms, execution of document testing, to periodic performance evaluation and audit processes.

These provisions were officially enacted through Board of Directors Regulation No. PW.05.02/10/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 dated December 10, 2024, as the basis for BCMS implementation within the Company, with the following objectives:

1. Ensure the continuity of business functions during disruption or disaster conditions, especially critical business or operational functions so that the Company's services continue to run;
2. Ensure the availability of work procedures for Work Units before, during and after disruptions or disasters, so as to minimize the impact and avoid greater losses for the Company and stakeholders;
3. Building culture, understanding and awareness of BCMS (BCMS awareness) through continuous socialization and simulations of handling disturbances or disasters.

Scope

Implementation of BCMS within the Company is designed to cover all business lines that are of high importance to operational continuity, including products and services, critical business functions, and strategic assets that support the Company's activities. This policy also protects all parties within the Company's work areas, including employees and other parties conducting activities at operational sites.

In the information technology aspect, primary attention is given to critical systems and services due to their direct impact on the smooth flow of business processes, while non-critical services may be considered as supporting elements as long as they are relevant to operational needs. This comprehensive approach is intended to ensure that the Company's preparedness for disruptions operates in an integrated, consistent, and effective manner across all business units.

In line with this, scope of the BCMS Policy is defined as follows:

1. The Business Continuity Management System (BCMS) policy applies to all Company Work Units throughout Indonesia.
2. The BCMS policy regulates the protection and safety of Company assets (Employees, documents, etc.) in the event of a disruption or disaster as explained in more detail in the Emergency Procedure (ER Plan).
3. The BCMS policy is a reference for the Company in building resilience against threats that could disrupt the Company's operations.

Limitation

1. BCMS implementation responds to several disruption/ disaster scenarios that have the most potential to occur in the Company.
2. Back-up Information Technology services focus on information technology services which are considered critical based on the Business Impact Analysis (BIA) process.

Penyelenggaraan BCMS di Perseroan dirancang sebagai suatu siklus yang berkelanjutan, sehingga setiap tahapan pengelolaannya saling terhubung dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu.

Mekanisme ini dibingkai dalam pendekatan siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) yang memungkinkan Perseroan tidak hanya merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah keberlangsungan bisnis, tetapi juga secara sistematis melakukan pengawasan, evaluasi, dan perbaikan atas penerapannya. Uraian mengenai tahapan siklus PDCA dijelaskan sebagai berikut:

Implementation of BCMS at the Company is designed as a continuous cycle, so that each stage of its management is interconnected and continuously improved over time.

This mechanism is framed within the Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle approach, which enables the Company not only to plan and implement business continuity measures but also to systematically monitor, evaluate, and improve their implementation. The stages of PDCA cycle are described as follows:

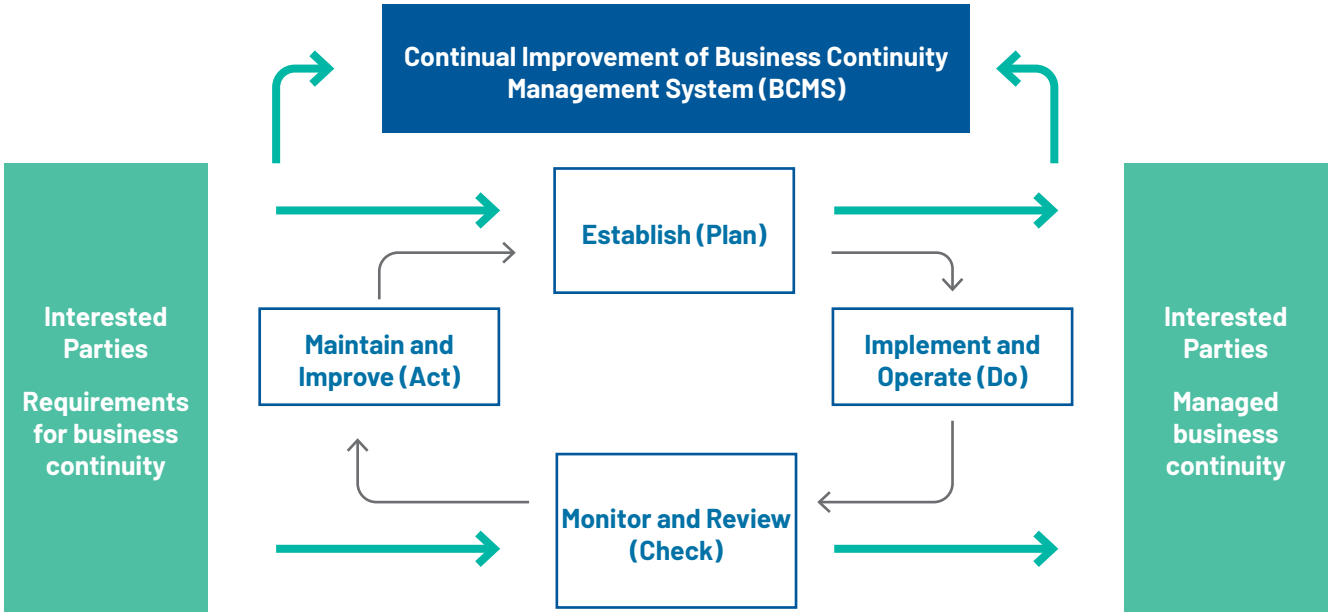

1. *Plan* (Menetapkan):
   Menetapkan kebijakan BCMS, tujuan, kontrol, proses dan prosedur yang relevan untuk mengembangkan BCMS dalam rangka memberikan hasil yang sesuai dengan kebijakan dan tujuan perusahaan secara keseluruhan.
2. *Do* (Mengimplementasikan dan Mengoperasikan):
   Mengimplementasikan dan mengoperasikan kebijakan BCMS, kontrol, proses dan prosedurnya.
3. *Check* (Memantau dan Meninjau):
   Memantau dan meninjau kinerja kebijakan dan tujuan BCMS, melaporkan hasilnya kepada *Top Management* untuk ditinjau, dan menentukan serta mengotorisasi tindakan perbaikan dan pengembangan.
4. *Act* (Memelihara dan Mengembangkan):
   Memelihara dan mengembangkan BCMS dengan mengambil tindakan korektif, berdasarkan hasil tinjauan manajemen dan menilai ulang ruang lingkup BCMS serta kebijakan dan tujuannya.

Pelaksanaan BCMS pada dasarnya menjadi tanggung jawab kolektif seluruh insan Perseroan, terutama mereka yang terlibat langsung dalam menjaga keberlangsungan fungsi operasional dan aktivitas bisnis. Tanggung jawab ini mencakup berbagai unit kerja strategis, antara lain Teknologi Informasi, Manajemen Aset dan Logistik, Sekretaris Perusahaan, SOM, serta Operasional, namun tidak terbatas pada bidang-bidang tersebut. Seluruh karyawan diwajibkan untuk memahami dan mematuhi ketentuan BCMS yang berlaku, baik pada tahap pencegahan, saat terjadi gangguan atau bencana, maupun pada fase pemulihan setelah kejadian.

1. Plan (Determine):
   Establish BCMS policies, objectives, controls, processes and procedures that are relevant to developing BCMS in order to provide results in accordance with overall Company policies and objectives.
2. Do (Implement and operate):
   Implement and operate BCMS policies, controls, processes and procedures.
3. Check (Monitoring and reviewing):
   Monitor and review the performance of BCMS policies and objectives, report results to Top Management for review, and determine and authorize corrective and developmental actions.
4. Act (Maintain and develop):
   Maintain and develop the BCMS by taking corrective action, based on the results of management reviews and reassessing the scope of the BCMS as well as its policies and objectives.

Implementation of BCMS is essentially the collective responsibility of all Company personnel, particularly those directly involved in maintaining the continuity of operational functions and business activities. This responsibility encompasses various strategic business units, including Information Technology, Asset Management and Logistics, Corporate Secretary, SOM, and Operations, though it is not limited to these areas. All employees are required to understand and comply with applicable BCMS provisions, whether during the prevention phase, when disruptions or disasters occur, or during the recovery phase following an incident.

Dalam kerangka pertahanan lapis kedua, Sub Divisi Manajemen Risiko berperan menyusun, meninjau, dan menyempurnakan kebijakan serta pedoman BCMS Perseroan. Meskipun demikian, tanggung jawab implementasi berada pada masing-masing Unit Kerja selaku *risk owner*, termasuk penyusunan, pemeliharaan, dan pembaruan informasi serta dokumentasi BCMS yang berada dalam lingkup tugasnya.

Within the framework of second-line defense, the Risks Management Sub-Division is responsible for developing, reviewing, and refining the Company's BCMS policies and guidelines. Nevertheless, responsibility for implementation lies with each Work Unit as the risk owner, including the preparation, maintenance, and updating of BCMS information and documentation within the scope of its duties.

Apabila terjadi bencana atau gangguan operasional, Sub Divisi Manajemen Risiko menjalankan fungsi pengawasan dengan memantau perkembangan situasi, mengoordinasikan pelaporan, serta memastikan bahwa penanganan gangguan berjalan sesuai dengan kerangka BCMS yang telah ditetapkan.

In the event of a disaster or operational disruption, Risk Management Subdivision performs a supervisory function by monitoring the situation, coordinating reporting, and ensuring that the handling of disruption is in accordance with the established BCMS framework.

Tim *Business Continuity Management System* (BCMS)

Sebagai langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan BCMS berjalan terstruktur dan berkelanjutan, Perseroan menegaskan komitmen pengelolaan keberlangsungan bisnis melalui pembentukan Tim Business Continuity Management System (BCMS). Tim ini secara resmi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor PW.05.02/10/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 tanggal 10 Desember 2024 tentang Pembentukan Tim Business Continuity Management System (BCMS).

Business Continuity Management System (BCMS) Team

As a strategic step to ensure the structured and sustainable implementation of BCMS, the Company reaffirms its commitment to business continuity management through the establishment of Business Continuity Management System (BCMS) Team. This team was officially established pursuant to the Board of Directors' Decree of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. PW.05.02/10/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 dated December 10, 2024, regarding the Establishment of Business Continuity Management System (BCMS) Team.

Struktur Keanggotan Tim BCMS
BCMS Members Structure

No	Jabatan dalam TIM BCMS Position in the BCMS TEAM	Divisi/Unit Kerja Division/Work Unit
1	Pengarah Pusat Penanganan Gangguan Director of Disaster Management Center	Direktur Utama President Director
2	Ketua Pusat Penanganan Gangguan (Executive BCM) Head of Disaster Management Center (Executive BCM)	Direktur Keuangan, SDM dan MR Director of Finance, HC and RM
3	*Caretaker*	Direktur Operasi & Teknik Director of Operations & Technical
4	Ketua Tim Pendukung Pusat Penanganan Gangguan Head of Disaster Management Center Support Team	SM Manajemen Risiko & Sistem Manajemen SM of Risk Management & Management Systems
5	Ketua Tim Tanggap Darurat Head of Emergency Response Team	SM Manajemen Risiko & Sistem Manajemen SM of Risk Management & Management Systems
6	Ketua Tim Kelangsungan Usaha (Koordinator BCM Divisi) Head of Business Continuity Team (BCM Division Coordinator	Seluruh Kepala Divisi Unit kerja masing - masing All Division Heads of their respective work units

No	Jabatan dalam TIM BCMS Position in the BCMS TEAM	Divisi/Unit Kerja Division/Work Unit
7	Ketua Alternatif (Koordinator Sub Divisi) Alternative Head (Subdivision Coordinator)	1. ASM Manajemen Risiko 2. ASM Hubungan Investor 3. ASM Sistem Manajemen & QHSE 4. ASM Pemasaran & Pengelolaan Pelanggan 5. ASM Perencanaan Strategis 6. ASM Layanan SDM & Umum 7. ASM Anggaran 8. ASM Operasi & Administrasi Terminal Satelit 9. ASM Sistem Informasi 10. ASM Pengawasan Monitoring & Pelaporan 11. DBM Operasi Domestik & CDM 12. DBM Administrasi & Penunjang 1. ASM Risk Management 2. ASM Investor Relations 3. ASM Management Systems & QHSE 4. ASM Marketing & Customer Management 5. ASM Strategic Planning 6. ASM HC & General Services 7. ASM Budget 8. ASM Operations & Administration Satellite Terminal 9. ASM Information Systems 10. ASM Supervision Monitoring & Reporting 11. DBM Domestic Operations & CDM 12. DBM Administration & Support
8	Ketua Tim Pemulihan Teknologi Head of Technology Recovery Team	SM Teknik & Sistem Informasi SM Technical & Information Systems
9	Ketua Tim Pemulihan Fasilitas Head of Facilities Recovery Team	SM SDM & Umum SM HC & General Affair
10	Ketua Tim Tanggap Insiden Siber Head of Cyber Attack Response Team	SM Manajemen Risiko & Sistem Manajemen SM Risk Management & Management Systems

Metodologi Pengembangan Kerangka Kerja BCMS
BCMS Framework Development Methodology

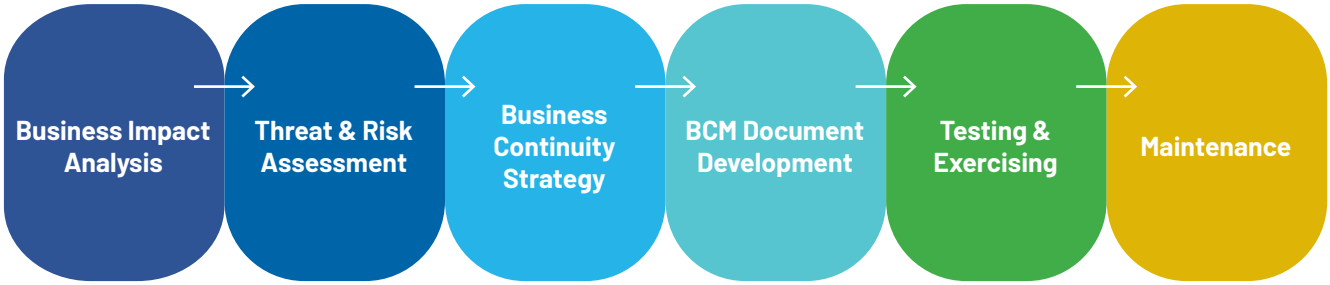

Metodologi pengembangan kerangka kerja Business Continuity Management System (BCMS) terdiri dari:
1. Proses *Business Impact Analysis* (BIA);
2. Proses *Risk Assessment* (RA);
3. Proses *Threat Assessment*;
4. Penentuan *Business Continuity Strategy* (BC *Strategy*);
5. Penyusunan dokumen BCMS;
6. Uji coba (*testing*) dan pelatihan (*exercising*) untuk seluruh Karyawan; dan
7. *Maintenance* dan pengembangan BCMS secara berkelanjutan (*continous improvement*).

The Business Continuity Management System (BCMS) framework development methodology consists of:
1. Business Impact Analysis (BIA) process;
2. Risk assessment (RA) process;
3. Threat Assessment process,
4. Determining Business Continuity Strategy (BC Strategy);
5. Preparation of BCMS documents;
6. Testing and training for all employees; and;
7. Continuous maintenance and development of BCMS (continuous improvement).

Business Continuity Plan (BC Plan)

1. Setiap Unit Kerja wajib menyusun dokumen BC *Plan*.
2. Dokumen BC *Plan* harus mencantumkan tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga kelangsungan fungsi bisnis kritikal selama dan setelah terjadi gangguan atau bencana.
3. Dokumen BC *Plan* digunakan atau diaktivasi setelah diputuskan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tingkat kekritisan yang terjadi (dijelaskan lebih lanjut pada Tingkat Kekritisan dalam kebijakan BCMS, Bab 7 bagian A).
4. Tujuan dan sasaran dari penyusunan dokumen BC *Plan* antara lain:
   a. Menjaga operasional dan bisnis perusahaan, khususnya yang termasuk dalam aktivitas kritikal dapat tetap berjalan, atau diprioritaskan untuk dipulihkan sesaat setelah gangguan/bencana terjadi;
   b. Mengamankan aset dan informasi penting Perusahaan;
   c. Meminimalisasi risiko akibat gangguan atau bencana dengan membatasi kerugian finansial, risiko hukum dan reputasi;
   d. Meyakini ketersediaan layanan dan produk yang berkesinambungan; dan
   e. Mempersiapkan alternatif lain agar fungsi bisnis kritikal tetap dapat berjalan untuk menjaga kelangsungan operasi Perusahaan. Dokumen BC Plan dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari tahapan sebelumnya *Business Impact Analysis* (BIA), *Risk Assessment* (RA), dan *Business Continuity Strategy* (BC *Strategy*).
5. Pengembangan dan penyusunan dokumen BC *Plan* harus mempertimbangkan aspek pengamanan terhadap aset Perusahaan (sumber daya Teknologi Infomasi, sumber daya manusia, gedung, dan lain-lain).
6. Pengembangan dan penyusunan dokumen BC *Plan* disesuaikan dengan ketentuan internal dan eksternal Perseroan.
7. Dokumen BC *Plan* juga mencakup: struktur hierarki pelaporan terkait gangguan atau bencana dan prosedur eskalasi.

Disaster Recovery Plan (DR Plan)

1. Dokumen DR *Plan* dikembangkan dan disusun oleh Divisi Teknik & Sistem Informasi pada dokumen terpisah dari kebijakan ini.
2. Dokumen DR *Plan* harus tersedia untuk setiap layanan Teknologi Informasi yang dinilai kritikal dalam mendukung bisnis dan operasional kritikal di setiap Unit Kerja berdasarkan hasil *Business Impact Analysis* (BIA), *Risk Assessment*, dan BC *Strategy*.

Pengembangan BCMS Berkelanjutan

1. Perseroan berkomitmen mengembangkan kesesuaian, efektivitas, dan kecukupan BCMS di setiap Unit Kerja secara berkelanjutan.
2. Setiap tindakan pencegahan atau perbaikan yang diambil harus sesuai dengan tujuan Kebijakan BCMS.
3. Perubahan dan perbaikan yang dilakukan harus tercermin dalam dokumentasi BCMS.
4. Tindakan pencegahan atau perbaikan berfokus pada pencegahan dan perbaikan atas perencanaan penanganan gangguan yang terjadi.
5. Tujuan tindakan pencegahan atau perbaikan adalah meminimalkan kerugian serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas aktivitas BCMS.

Business Continuity Plan (BC Plan)

1. Each Work Unit is required to prepare a BC Plan document.
2. The BC Plan document must include actions that must be taken to maintain the continuity of critical business functions during and after a disruption or disaster.
3. The BC Plan document is used or activated after being decided by an authorized official according to the level of criticality that occurs (explained further in the Criticality Level in the BCMS policy, Chapter 7 part A).
4. The aims and objectives of preparing the BC Plan document include:
   a. Maintaining Company operations and business, especially critical activities, can continue to run, or be prioritized for recovery immediately after a disturbance/disaster occurs;
   b. Securing important Company assets and information;
   c. Minimize risks resulting from disruptions or disasters by limiting financial losses, legal and reputation risks;
   d. Ensuring the continuous availability of services and products; and
   e. Prepare other alternatives so that critical business functions can continue to run to maintain the continuity of the Company's operations. The BC Plan document is created based on data obtained from the previous stages of Business Impact Analysis (BIA), Risk Assessment (RA), and Business Continuity Strategy (BC Strategy).
5. The development and preparation of the BC Plan document must consider aspects of securing Company assets (Information Technology resources, human capital, buildings, etc.).
6. Development and preparation of BC Plan documents in accordance with the Company's internal and external regulations.
7. The BC Plan document also includes: hierarchical structure of reporting related to disturbances or disasters and escalation procedures.

Disaster Recovery Plan (DR Plan)

1. The DR Plan document is developed and prepared by the Technical & Information Systems Division in a separate document from this policy.
2. The DR Plan documents must be available for every Information Technology service that is considered critical in supporting critical business and operations in each Work Unit based on the results of Business Impact Analysis (BIA), Risk Assessment and BC Strategy.

Sustainable BCMS Development

1. The Company is committed to developing the suitability, effectiveness and adequacy of BCMS in each Work Unit on an ongoing basis.
2. Any preventive or corrective action taken must be in accordance with the objectives of BCMS Policy.
3. Changes and improvements made must be reflected in the BCMS documentation.
4. Preventive or corrective actions focus on preventing and correcting planning for handling disturbances that occur.
5. The aim of preventive or corrective action is to minimize losses and increase the efficiency and effectiveness of BCMS activities.

6. Tindakan pencegahan diperlukan untuk mengantisipasi penyebab dari suatu gangguan. Tindakan pencegahan yang diambil harus sesuai dengan potensi dampak dari gangguan.
7. Tindakan korektif mengelola ketidaksesuaian atas implementasi BCMS. Manajemen harus mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terkait dengan implementasi BCMS untuk mencegah pengulangan kejadian serupa di masa mendatang.
8. Perseroan harus terus-menerus meningkatkan efektivitas BCMS dengan cara melakukan kaji ulang dan menindaklanjuti:
   a. Hasil audit, analisis dari pemantauan kejadian;
   b. Tindakan pencegahan dan perbaikan; dan
   c. Kaji ulang oleh Manajemen.

6. Preventive measures are needed to anticipate the cause of a disturbance. The precautions taken must be appropriate to the potential impact of the disturbance.
7. Corrective actions to manage non-conformities regarding BCMS implementation. Management must take action to eliminate the causes of nonconformities related to BCMS implementation to prevent recurrence of similar events in the future.

8. Companies must continuously improve the effectiveness of the BCMS by reviewing and following up:
   a. Audit results, analysis of event monitoring;
   b. Preventive and corrective actions; and
   c. Review by Management.

Perkara Hukum yang Berdampak Material yang dihadapi oleh Perseroan, Entitas Anak, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Legal Cases with Material Impact Faced by the Company, Subsidiaries, Members of Board of Directors and Members of Board of Commissioners

Perseroan secara konsisten menempatkan integritas dan kepatuhan sebagai dasar utama dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk dengan mengedepankan upaya pencegahan dan pengelolaan potensi pelanggaran yang berdimensi hukum. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme pengendalian, pemantauan, dan penanganan permasalahan hukum secara terencana agar risiko hukum dapat ditekan seminimal mungkin. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh perkara hukum yang melibatkan Perseroan selama tahun 2025 dirangkum dan diuraikan dalam tabel yang disajikan berikut ini:

The Company consistently prioritizes integrity and compliance as the cornerstones of its business operations, including by emphasizing efforts to prevent and manage potential legal violations. This commitment is realized through various mechanisms for controlling, monitoring, and systematically addressing legal issues to minimize legal risks as much as possible. In this regard, all legal cases involving the Company during 2025 are summarized and detailed in the table presented below:

No	Perkara Hukum Legal Cases	Jumlah Perkara Number of Cases	
		Perdata Civil	Pidana Criminal
1	Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap/ *inkracht*) The case is finished (has permanent legal force/inkracht	0	0
2	Perkara dalam proses penyelesaian The case is in the process of being resolved	0	0
Total		**0**	**0**

Pengungkapan Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Sepanjang tahun 2025, tidak ada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan yang sedang menjabat, memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

Disclosure of Legal Cases Currently Faced by Board of Commissioners and Board of Directors In Office

Throughout 2025, no current members of the Company's Board of Commissioners or Board of Directors were involved in any legal cases, whether civil or criminal.

Pengungkapan Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Entitas Anak

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan tidak memiliki anak Perusahaan, dengan demikian tidak terdapat informasi terkait permasalahan hukum terhadap entitas anak.

Disclosure of Legal Cases Currently Facing Subsidiaries

Until the end of 2025, the Company did not have any subsidiaries, thus there was no information regarding legal cases against subsidiaries.

Kasus Terkait Buruh dan Karyawan

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan tidak memiliki kasus terkait buruh dan/atau karyawan.

Cases Related to Labor and Employees

Until the end of 2025, the Company has no cases related to labor and/or employees.

Informasi Tentang Sanksi Perkara Pajak

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, Perseroan tidak pernah dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan pajak tertinggi terkait masalah pajak maupun sengketa pajak.

Information on Tax Sanctions

In the last four years, the Company has never been found guilty in the highest tax court decision related to tax issues or tax disputes.

Sanksi Administratif/Sanksi yang Dikenakan kepada Perseroan, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi oleh OJK dan Otoritas Lainnya pada Tahun 2025

Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Lainnya sehingga tidak ada informasi terkait yang dapat disajikan pada laporan ini.

Administrative Sanctions/Sanctions Imposed on the Company, Members of Board of Commissioners and Members of Board of Directors By the Financial Services Authority and Other Authorities in 2025

As of December 31, 2025, no administrative sanctions imposed on the Company, Members of Board of Commissioners and Members of Board of Directors by the Financial Services Authority and Other Authorities, hence no related information can be presented in this report.

Transparansi Kondisi Keuangan
Transparency of Financial Conditions

Sebagai emiten yang terdaftar di pasar modal, Perseroan menjalankan kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tanggung jawab kepada regulator dan pemangku kepentingan. Praktik keterbukaan informasi Perseroan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah.

As a publicly listed Company, the Company fulfills its reporting and disclosure obligations as part of its responsibility to regulators and stakeholders. The Company's information disclosure practices are guided by Financial Services Authority Regulation No. 43/POJK.04/2020 regarding Information Disclosure Obligations and Corporate Governance for Issuers or Public Companies with Small-Scale Assets and Issuers with Medium-Scale Assets.

Transparansi Kondisi Keuangan Perseroan

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi keuangan kepada otoritas terkait sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan perusahaan. Seluruh informasi keuangan yang disampaikan telah dipublikasikan secara terbuka sehingga dapat diakses oleh pemegang saham, investor, maupun masyarakat luas melalui laman resmi Perseroan dan laman resmi Bursa Efek Indonesia. Berbagai laporan yang telah dipublikasikan mencerminkan komitmen Perseroan dalam menjaga keterbukaan informasi serta kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Triwulanan
2. Laporan Keuangan Tahunan
3. Laporan Tahunan IPCC disusun sesuai dengan ketentuan POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Transparency of the Company's Financial Condition

Throughout 2025, the Company has fulfilled its financial reporting and disclosure obligations to the relevant authorities as a demonstration of accountability and transparency in Corporate management. All financial information submitted has been publicly disclosed and is accessible to shareholders, investors, and the general public through the Company's official website and Indonesia Stock Exchange's official website. The various reports that have been published reflect the Company's commitment to maintaining transparency and compliance with applicable capital market regulations, including the following:

1. Quarterly Financial Statements
2. Annual Financial Statements
3. IPCC Annual Report is prepared in accordance with the provisions of POJK No. 29/POJK.04/2016 concerning the Annual Report of Issuers or Public Companies and OJK SE No. 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.

Berikut ini adalah daftar publikasi dan transparansi laporan keuangan yang sudah dilakukan Perseroan di tahun 2025:

The following is a list of publications and transparency of financial reports that have been carried out by the Company in 2025:

No	Nama Laporan Report Name	Penyempaian Kepada Regulator Submission to Regulator	Media Publikasi Publication Media	Tanggal Publikasi Iklan Publication Date of Advertisement
1	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit Kuartal I Submission of Unaudited Interim Financial Report for Quarter I	OJK dan BEI OJK and BEI	*Website* IPCC IPCC Website	Tidak dipublikasikan di iklan Not published in advertisement
2	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit Kuartal II Submission of Unaudited Interim Financial Report for Quarter II	OJK dan BEI OJK and BEI	*Website* IPCC IPCC Website	Tidak dipublikasikan di iklan Not published in advertisement
3	Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 Submission of Financial Report for 2025 Fiscal Year	OJK dan BEI OJK and BEI	*Website* IPCC IPCC Website	Tidak dipublikasikan di iklan Not published in advertisement

Transparansi Kondisi Non-Keuangan Perseroan

Sepanjang tahun 2025, Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi mengenai transparansi nonkeuangan, antara lain:

1. Informasi terkait Tata Kelola Perusahaan, seperti perubahan pengurus, perubahan anggota komite, amandeman Anggaran Dasar, dan lain-lain. Informasi-informasi ini wajib disampaikan kepada regulator dan dapat diakses pada situs web BEI: www.idx.co.id dengan mengakses kode saham: IPCC.
2. Informasi Produk dan Layanan dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan ditampilkan pada situs web Perusahaan: www.indonesiacarterminal.co.id sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas.
3. Informasi mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa disampaikan kepada BEI dan OJK serta disediakan pada situs web Perseroan.
4. Informasi mengenai transparansi struktur kepemilikan atau perubahan Pemegang Saham pada Laporan Tahunan dan situs web Perseroan.
5. Informasi atau fakta material penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi keputusan pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, senantiasa diumumkan kepada masyarakat melalui situs web Perusahaan dan BEI.
6. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi.

Transparency of Company Non-Financial Conditions

Throughout 2025, the Company has submitted information disclosure regarding non-financial transparency, including:

1. Information related to Corporate Governance, such as changes in management, changes in committee members, amendments to the Articles of Association, and others. This information must be submitted to the regulator and can be accessed on IDX website: www.idx.co.id by accessing the stock code: IPCC.
2. Product and Service Information is published through the Annual Report and displayed on the Company's website: www.indonesiacarterminal.co.id, hence can be easily accessed by wider community.
3. Information regarding the implementation of Annual GMS and Extraordinary GMS is submitted to IDX and OJK, and is available on the Company's website.
4. Information regarding transparency of ownership structure or changes in Shareholders in the Annual Report and the Company's website.
5. Important and relevant material information or facts regarding events, incidents or facts that may influence the decisions of interested parties regarding such information or facts, are always announced to the public through the Company's and IDX's websites.
6. Other information that aims to support information disclosure.

Sistem Pelaporan Elektronik

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan POJK No. 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan selama tahun 2025 secara konsisten memanfaatkan Sistem Pelaporan Elektronik yang terintegrasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia. Perseroan telah menyampaikan berbagai jenis laporan yang diwajibkan sepanjang tahun berjalan melalui platform SPE OJK-IDX, sebagaimana dirinci sebagai berikut:

Electronic Reporting System

In compliance with OJK Regulation No. 7/POJK.04/2018 concerning Submission of Reports through the Electronic Reporting System for Issuers or Public Companies, the Company consistently utilized the integrated Electronic Reporting System between the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) throughout 2025. The Company submitted various required reports throughout the year through the OJK-IDX SPE platform, as detailed below:

No	Tanggal Date	Uraian Description
1	8 Desember 2025 December 8, 2025	Laporan Bulanan Pemegang Efek Monthly Report of Securities Holders
2	5 Desember 2025 December 5, 2025	Jadwal Dividen Tunai Interim Interim Cash Dividend Schedule
3	22 Desember 2025 December 22, 2025	Laporan Penunjukkanp/Perubahan Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Report on the Appointment/Change of Public Accountant and/or Public Accountant for Audit Services on Annual Historical Financial Information
4	19 Desember 2025 December 19, 2025	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya Request for Explanation from Issuers and Other Public Companies
5	16 Juli 2025 July 16, 2025	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
6	23 Juli 2025 July 23, 2025	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Report on Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies
7	07 Agustus 2025 August 7, 2025	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Monthly Report on Securities Holder Registration
8	04 Agustus 2025 August 4, 2025	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Monthly Report on Securities Holder Registration
9	25 September 2025 September 25, 2025	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya Request for Explanation from Issuers and Other Public Companies

No	Tanggal Date	Uraian Description
10	06 Oktober 2025 October 6, 2025	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Monthly Report on Securities Holder Registration
11	10 Oktober 2025 October 10, 2025	Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan Public Expose Plan - Annual
12	24 Oktober 2025 October 24, 2025	Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan Submission of Public Expose Material - Annual
13	10 Oktober 2025 October 10, 2025	Laporann Hasil Public Expose - Tahunan Report on Public Expose Results - Annual
14	07 November 2025 November 7, 2025	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Monthly Report on Securities Holder Registration
15	08 Mei 2025 May 8, 2025	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Koreksi) Submission of Agenda Items for the Annual General Meeting of Shareholders (Correction)
16	07 Mei 2025 May 7, 2025	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Monthly Report on Securities Holder Registration
17	02 Mei 2025 May 2, 2025	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Submission of Agenda Items for the Annual General Meeting of Shareholders
18	01 Mei 2025 May 1, 2025	Penyampaian Laporan Keberlanjutan dan ESG Submission of Sustainability Report and ESG
19	04 April 2025 April 4, 2025	Penyampaian Laporan Tahunan Annual Report Submission
20	15 Juli 2025 July 15, 2025	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Realisasi Pembelian Kembali Saham IPCC (Buyback) Periode Januari s/d Juni 2025 Material Information or Facts Report on the Realization of IPCC Share Buyback for the Period January to June 2025
21	07 Juli 2025 July 7, 2025	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Monthly Report on Securities Holder Registration
22	27 Juni 2025 June 27, 2025	Perubahan Pengurus (Koreksi) Changes in Management (Correction)
23	24 Juni 2025 June 24, 2025	Laporan Realisasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Report on the Realization of the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms
24	19 Juni 2025 June 19, 2025	Perubahan Pengurus Changes in Management
25	19 Juni 2025 June 19, 2025	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi – Dividen Tunai - 19062025 Disclosure of Information Regarding Corporate Actions – Cash Dividends - 19062025
26	19 Juni 2025 June 10 2025	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
27	10 Juni 2025 May 26, 2025	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Monthly Report on Securities Holder Registration
28	26 Mei 2025 May 09, 2025	Pemanggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Summons of the Annual General Meeting of Shareholders
29	09 Mei 2025 May 09, 2025	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Notice of the Planned Annual General Meeting of Shareholders

Transparansi Informasi Produk dan Layanan

Perseroan mengungkapkan informasi mengenai produk dan layanan kepada mitra, publik dan Pemangku Kepentingan lainnya, dengan menggunakan berbagai media komunikasi, seperti:

1. Situs Web: www.indonesiacarterminal.co.id
2. @ipccterminalkendaraan pada berbagai media sosial Perseroan seperti Facebook, X, Instagram, LinkedIn, Threads, Tiktok dan YouTube.
3. Brosur/iklan di media massa dan berbagai media promosi dan komunikasi lainnya.

Transparency of Product and Service Information

The Company discloses information regarding products and services as transparently as possible to partners, the public and other Stakeholders, using various communication media, such as:

1. Website: www.indonesiacarterminal.co.id
2. @ipccterminalkendaraan on the Company's various social media platforms, such as Facebook, X, Instagram, LinkedIn, Threads, TikTok, and YouTube.
3. Brochures/advertisements in mass media and various other promotional and communication media.

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company Information and Data

Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tercermin dari cara Perseroan mengelola dan menyampaikan informasi kepada para Pemangku Kepentingan, terutama terkait produk, layanan, serta informasi material lainnya yang memiliki dampak terhadap pengambilan keputusan. Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan secara konsisten menjalankan kewajiban publikasi dan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan regulator, yang telah dijelaskan secara lebih rinci pada bagian lain dalam laporan tahunan ini.

Perseroan memandang bahwa penyampaian informasi yang jelas, tepat waktu, dan dapat diakses secara merata oleh pihak internal maupun eksternal merupakan instrumen penting untuk membangun pemahaman yang komprehensif, memperkuat kepercayaan, serta menciptakan citra positif di mata Pemangku Kepentingan. Oleh karena itu, pengelolaan informasi korporasi dilakukan secara terstruktur dan profesional dengan berpedoman pada POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

Di sisi lain, keterbukaan informasi tetap dijalankan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia atau strategis. Perseroan hanya menyampaikan informasi kepada publik sejauh diizinkan oleh peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan ketentuan perjanjian, kesepakatan, dan komitmen yang berlaku.

Situs Web

Sebagai wujud komitmen terhadap keterbukaan informasi, Perseroan menyediakan sarana komunikasi publik yang mudah diakses melalui situs web resmi www.indonesiacarterminal.co.id yang dikelola langsung oleh Sekretaris Perusahaan. Situs ini dirancang untuk menjangkau pemangku kepentingan yang lebih luas dengan menyajikan informasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Perseroan juga secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan tampilan serta pemutakhiran konten agar informasi yang disajikan tetap relevan, akurat, dan sesuai dengan perkembangan terbaru.

Pada situs web tersebut, publik dapat memperoleh berbagai informasi penting, antara lain profil dan sejarah perusahaan, portofolio layanan, kinerja operasional dan keuangan, perkembangan terkini IPCC, serta informasi pengadaan dan pengumuman korporasi lainnya. Seluruh informasi diperbarui secara periodik untuk mencerminkan kondisi aktual Perseroan.

Bagi pihak yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam mengenai kinerja, data, atau informasi lainnya terkait Perseroan, tersedia kanal komunikasi resmi yang dapat dihubungi secara langsung.

The Company's commitment to implementing Good Corporate Governance is reflected in how it manages and communicates information to stakeholders, particularly regarding products, services, and other material information that impacts decision-making. As a publicly listed Company, the Company consistently fulfills its disclosure and transparency obligations in accordance with regulatory requirements, which are explained in greater detail in other sections of this annual report.

The Company believes that the provision of clear, timely, and equally accessible information to both internal and external parties is a crucial tool for fostering comprehensive understanding, strengthening trust, and building a positive image in the eyes of stakeholders. Therefore, Corporate information management is conducted in a structured and professional manner, guided by POJK No. 8/POJK.04/2015 regarding Websites of Issuers or Public Companies.

On the other hand, information disclosure is carried out while adhering to the principles of prudence and the protection of confidential or strategic information. The Company only discloses information to the public to the extent permitted by laws and regulations and in accordance with the provisions of applicable agreements, arrangements, and commitments.

Website

As a demonstration of its commitment to transparency, the Company provides easily accessible public communication channels through its official website www.indonesiacarterminal.co.id, which is managed directly by the Corporate Secretary. This website is designed to reach a broader range of stakeholders by presenting information in both Indonesian and English. The Company also continuously improves the website's design and updates its content to ensure the information presented remains relevant, accurate, and aligned with the latest developments.

On this website, public can obtain various important information, including the Company's profile and history, service portfolio, operational and financial performance, latest developments regarding IPCC, as well as procurement information and other Corporate announcements. All information is updated periodically to reflect the Company's current status.

For those requiring further clarification regarding performance, data, or other information related to the Company, official communication channels are available for direct contact.

IPCC Kantor Pusat | IPCC Head Office

Jl. Sindang Laut No. 100, Kali Baru, Kec. Cilincing
Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14110
Jl. Sindang Laut No. 100, Kali Baru, Cilincing
District, North Jakarta, Jakarta 14110

Telp. : 021 4393 2251
Email : corsec@indonesiacarterminal.co.id
komersial@indonesiacarterminal.co.id
Phone : 021 4393 2251
Email : corsec@indonesiacarterminal.co.id
komersial@indonesiacarterminal.co.id

Media Sosial

Selain menampilkan informasi secara lengkap pada situs web, Perseroan juga mengelola 5 (lima) akun media sosial, yaitu:

Social Media

In addition to providing comprehensive information on its website, the Company also manages five social media accounts, namely:

@IPCC Terminal Kendaraaan | **@IPCC Terminal Kendaraaan** | **IPCC Terminal Kendaraaan**

IPCC Terminal Kendaraaan | **IPCC Terminal Kendaraaan** | **IPCC Terminal Kendaraaan**

Memasuki era transformasi digital, Perseroan memandang pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi yang strategis dan efisien untuk menyampaikan informasi kepada publik. Saluran digital dinilai mampu menjangkau audiens yang lebih luas dalam waktu singkat, seiring dengan semakin tingginya adopsi teknologi dan kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi di ruang digital. Selain mempercepat alur komunikasi, media sosial juga memungkinkan Perseroan berinteraksi secara lebih langsung dengan berbagai pemangku kepentingan tanpa harus bergantung pada mekanisme formal yang berjenjang.

Entering the era of digital transformation, the Company views the use of social media as a strategic and efficient communication tool for conveying information to the public. Digital channels are considered capable of reaching a wider audience in a short period of time, in line with the increasing adoption of technology and the public's growing habit of interacting in the digital space. In addition to streamlining communication, social media also enables the Company to interact more directly with various stakeholders without having to rely on formal, hierarchical mechanisms.

Atas dasar tersebut, akun media sosial resmi Perseroan dikelola secara aktif sebagai kanal informasi korporasi yang menampilkan berbagai kegiatan, capaian, dan perkembangan perusahaan dengan penyajian visual yang informatif dan menarik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi sekaligus memperkuat hubungan komunikasi antara Perseroan dan masyarakat luas.

Based on this, the Company's official social media accounts are actively managed as Corporate information channels that showcase the Company's various activities, achievements, and developments through informative and engaging visual content. This is expected to enhance transparency while strengthening communication ties between the Company and the broader public.

Komunikasi Eksternal

Sebagai wujud akuntabilitas, Perseroan konsisten menyampaikan informasi penting terkait aktivitas operasional maupun kinerja perusahaan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyampaian informasi tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan melalui komunikasi yang terbuka dan terstruktur. Berbagai kanal disiapkan untuk memastikan informasi dapat diakses secara luas, antara lain melalui siaran pers, publikasi capaian kinerja di media nasional, serta penyelenggaraan konferensi pers secara berkala.

External Communications

As a demonstration of accountability, the Company consistently shares important information regarding its operational activities and performance with the public and stakeholders. The dissemination of this information is intended not only to fulfill regulatory obligations but also to build trust through open and structured communication. Various channels have been established to ensure information is widely accessible, including press releases, publication of performance achievements in national media, and regular press conferences.

Di samping itu, Perseroan menyusun dan menerbitkan Laporan Tahunan sebagai sumber informasi komprehensif yang disampaikan kepada Pemegang Saham dan pihak terkait lainnya. Seluruh proses pengelolaan dan penyampaian informasi kepada pihak eksternal dikoordinasikan oleh fungsi Hubungan Investor agar komunikasi berjalan terarah, akurat, dan selaras dengan ketentuan yang berlaku.

In addition, the Company compiles and publishes an Annual Report as a comprehensive source of information provided to Shareholders and other relevant parties. The entire process of managing and communicating information to external parties is coordinated by the Investor Relations function to ensure that communication is focused, accurate, and in accordance with applicable regulations.

Hubungan Investor

Tugas pokok hubungan investor, yaitu mewakili Direksi dalam hubungannya dengan pihak komunitas investor dan masyarakat pasar modal, antara lain meliputi:

Investor Relations

The main duties of investor relations is representing the Board of Directors in their relations with the investor community and the capital market community, include:

1. Menyusun strategi komunikasi khususnya kepada investor, calon investor, analis dan masyarakat pasar modal pada umumnya;
2. Menyiapkan materi dan melaksanakan kegiatan *road show*, dan *conference call*;
3. Mengomunikasikan berbagai aspek terkait dengan saham dan kinerja Perseroan serta laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti analis, investor dan calon investor;
4. Menjaga dan meningkatkan komunikasi antara perusahaan dengan para investor dan juga media baik di tingkat lokal maupun internasional;
5. Menjaga dan meningkatkan komunikasi antara Perusahaan dengan media, pers;
6. Mengelola hubungan dengan para analis, fund manager, pakar dan pengamat ekonomi (khususnya saham);
7. Memantau dan melaporkan kepada Direksi atas hasil evaluasi para analis terhadap kinerja dan harga saham Perseroan secara berkala;
8. Mengoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian Laporan Tahunan kepada investor/analis;
9. Menyediakan data dan informasi keuangan Perseroan untuk investor dan masyarakat pasar modal.

Aktivitas Hubungan Investor

Divisi Hubungan Investor berperan sebagai jembatan komunikasi antara Perseroan dengan komunitas pasar modal dan lembaga keuangan guna memastikan seluruh pemangku kepentingan memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu mengenai kinerja serta arah pengembangan usaha. Divisi ini senantiasa berpegang pada prinsip keterbukaan yang bertanggung jawab, menjaga kerahasiaan informasi sensitif, serta menerapkan perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh investor tanpa diskriminasi. Pendekatan komunikasi yang konsisten dan terstruktur diharapkan dapat membantu investor memahami kondisi Perseroan secara komprehensif sehingga mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih tepat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas tersebut, Perseroan secara rutin menggelar pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk mempresentasikan capaian kinerja setiap triwulan. Selain itu, Perseroan aktif berpartisipasi dalam berbagai forum seperti *non-deal road show* yang diselenggarakan oleh sekuritas, baik di dalam maupun luar negeri, guna memperluas jangkauan komunikasi dengan investor potensial. Perseroan juga terbuka menerima kunjungan langsung dari investor serta menyelenggarakan *conference call* sesuai permintaan.

1. Develop a communication strategy, especially to investors, potential investors, analysts and the capital market community in general;
2. Prepare materials and carry out road shows and conference calls;
3. Communicate various aspects related to the Company's shares and performance as well as financial reports to interested parties, such as analysts, investors and potential investors;
4. Maintain and improve communication between the Company and investors and the media both at local and international levels;
5. Maintain and improve communication between the Company, media and press;
6. Manage relationships with analysts, fund managers, experts and economic observers (especially stocks);
7. Monitor and report to Board of Directors the results of analysts' evaluations of the Company's performance and share price on a regular basis;
8. Coordinate the preparation, publication and distribution of Annual Report to investors/analysts;
9. Provide the Company's financial data and information to investors and the capital market community.

Investor Relations Activities

The Investor Relations Division serves as a communication bridge between the Company and the capital market community and financial institutions to ensure that all stakeholders receive accurate, relevant, and timely information regarding the Company's performance and business development direction. This division consistently adheres to the principles of responsible transparency, safeguards the confidentiality of sensitive information, and treats all investors fairly and equally without discrimination. A consistent and structured communication approach is intended to help investors comprehensively understand the Company's condition, thereby supporting more informed investment decision-making.

As part of fulfilling these responsibilities, the Company regularly holds meetings with stakeholders to present quarterly performance results. Additionally, the Company actively participates in various forums such as investment conferences and non-deal road shows organized by securities firms, both domestically and internationally, to expand communication outreach to potential investors. The Company also welcomes direct visits from investors and organizes conference calls upon request.

Berikut ini adalah daftar aktivitas dan program kerja yang sudah dilakukan Divisi Hubungan Investor sepanjang tahun 2025, antara lain:

The following is a list of activities and work programs carried out by Investor Relations Division throughout 2025, including:

Tabel Frekuensi Keterbukaan Informasi dalam Komunikasi Eksternal
Frequency Table of Information Disclosure in External Communication

Media Keterbukaan Informasi Information Disclosure Media	2025	Keterangan Description
Laporan Tahunan Annual Report	1	Informasi penyampaian Laporan Tahunan 2025 dapat diakses pada situs web BEI dan situs web Perusahaan: **https://indonesiacarterminal.co.id/laporan-tahunan** **Information on the submission of 2025 Annual Report can be accessed on IDX website and the Company's website: https:// indonesiacarterminal.co.id/laporan-tahunan**
Public Expose	1	Public Expose tahun 2025 dapat dilihat di situs web Perusahaan: **https://indonesiacarterminal.co.id/presentasi-perusahaan** **The 2025 Public Expose can be viewed on the Company's website: https://indonesiacarterminal.co.id/presentasi-perusahaan**
Publikasi Laporan Keuangan Publication of Financial Reports	4	Informasi Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat diakses pada situs web Perusahaan: **https://indonesiacarterminal.co.id/laporan-keuangan** **Financial Report Information for 2025 can be accessed on the Company's website: https:// indonesiacarterminal.co.id/ laporan-keuangan**
Publikasi Pengumuman Keterbukaan Informasi Publication of Announcements of Information Disclosure	17	Dapat diakses di situs web Perusahaan: **https://indonesiacarterminal.co.id/presentasi-perusahaan** **Can be accessed on the Company's website: https:// indonesiacarterminal.co.id/presentasi-perusahaan**
Siaran Pers Press Releases	52	Siaran Pers Tahun 2025 dapat diakses pada situs web Perusahaan: **https://indonesiacarterminal.co.id/berita-siaranpers** **The 2025 Press Release can be accessed on the Company's website: https://indonesiacarterminal.co.id/berita-siaranpers**
Sosial Media Social Media	6 Platform Sosial Media dengan rincian sebagai berikut: • 1 akun Facebook; • 1 akun X; • 1 akun Instagram; • 1 akun Youtube; • 1 akun Tiktok; dan • 1 akun Linkedin. 6 Social Media Platforms with the following details: • 1 Facebook account; • 1 X account; • 1 Instagram account; • 1 Youtube account; • 1 Tiktok account ; and • 1 Linkedin account	

Komunikasi Internal

Perseroan memandang harmonisasi hubungan dengan karyawan sebagai elemen penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kolaboratif. Untuk itu, Perseroan menempatkan komunikasi internal sebagai salah satu prioritas dalam pengelolaan sumber daya manusia, dengan memastikan arus informasi berjalan secara terbuka, jelas, dan berkesinambungan.

Perseroan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi digital yang telah tersedia guna menjangkau karyawan secara lebih cepat dan efektif. Berbagai platform seperti Grup WhatsApp, *email* resmi perusahaan, Pelindo E-Office, dan Portaverse digunakan untuk mendukung koordinasi kerja, penyebaran informasi, serta interaksi antarunit kerja.

Internal Communication

The Company views fostering harmonious relationships with employees as a key element in creating a productive and collaborative work environment. To that end, the Company prioritizes internal communication as a core component of its human capital management, ensuring that the flow of information is open, clear, and continuous.

The Company utilizes various available digital communication tools to reach employees more quickly and effectively. Various platforms such as WhatsApp groups, the Company's official email, Pelindo E-Office, and Portaverse are used to support work coordination, information dissemination, and interaction between work units.

Kode Etik
Code of Conduct

Sebagai bentuk integritas, Perseroan telah menetapkan Pedoman Kode Etik dan Bisnis melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.56/3/4/IKT-2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Pedoman Kode Etik dan Bisnis, yang menjadi rujukan utama dalam membentuk perilaku dan pola kerja yang profesional.

Pedoman tersebut dirancang untuk menanamkan standar moral dan kepatuhan yang selaras dengan visi, misi, serta budaya perusahaan, sekaligus memastikan kesesuaian dengan regulasi internal maupun eksternal yang berlaku. Penerapan kode etik ini bersifat menyeluruh dan mengikat bagi seluruh jajaran organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga seluruh karyawan, sehingga setiap keputusan dan tindakan yang diambil senantiasa mencerminkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas.

Tujuan Pemberlakuan Kode Etik

Pemberlakuan Pedoman Kode Etik dan Bisnis dimaksudkan sebagai panduan yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membangun pemahaman bersama mengenai standar etika profesional di lingkungan Perseroan. Setiap insan Perseroan dibekali arahan, pembinaan, serta mekanisme pelaporan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau menghadapi situasi yang menimbulkan dilema etis dalam pekerjaannya. Dengan demikian, kode etik berfungsi sebagai rambu-rambu moral yang membantu karyawan mengambil keputusan secara bijaksana dan bertanggung jawab, sekaligus menegaskan bahwa setiap penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dipandang sebagai pelanggaran disiplin yang akan ditindak sesuai aturan.

Lebih lanjut, pedoman ini menetapkan batasan dan ekspektasi perilaku karyawan dalam berinteraksi dengan sesama pekerja, mitra usaha, pelanggan, maupun pihak eksternal lainnya, sehingga tercipta budaya kerja yang tertib dan saling menghormati. Penerapan kode etik juga menjadi instrumen penting dalam mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta mendorong pelaksanaan bisnis yang adil dan transparan. Sejalan dengan itu, Perseroan menyadari bahwa keberlanjutan usaha tidak hanya ditentukan oleh kinerja finansial, tetapi juga oleh integritas perilaku seluruh insan dalam menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dengan berlandaskan kepatuhan hukum dan nilai-nilai etika yang luhur.

Kode Etik Bisnis Berlaku Bagi Seluruh Level Organisasi

Penerapan Pedoman Kode Etik dan Bisnis dirancang bersifat umum di lingkungan IPCC, sehingga mengikat seluruh jajaran organisasi mulai dari karyawan hingga Dewan Komisaris dan Direksi tanpa pengecualian. Ketentuan ini menegaskan bahwa standar integritas dan perilaku profesional tidak hanya menjadi tanggung jawab operasional di level staf, tetapi juga menjadi komitmen strategis di tingkat pengambilan keputusan tertinggi Perseroan.

As a demonstration of integrity, the Company has established a Code of Conduct Guidelines through Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.56/3/4/IKT-2022 dated December 12, 2022, regarding Code of Conduct Guidelines, which serves as the primary reference for fostering professional behavior and work practices.

These guidelines are designed to instill moral standards and compliance aligned with the Company's vision, mission, and culture, while ensuring adherence to applicable internal and external regulations. The implementation of this code of conduct is comprehensive and binding for all levels of the organization, from Board of Commissioners and Board of Directors to all employees, so that every decision and action taken consistently reflects the values of honesty, responsibility, and accountability.

Purpose of Enforcement of Code of Conduct

The enforcement of Code of Conduct Guidelines is intended to serve as a guide that not only regulates behavior but also fosters a shared understanding of professional ethical standards within the Company. Every employee of the Company is provided with guidance, training, and reporting mechanisms should they encounter suspected violations or face situations that present ethical dilemmas in their work. Thus, Code of Conduct serves as a moral compass that helps employees make wise and responsible decisions, while also affirming that any deviation from applicable provisions is considered a disciplinary violation that will be addressed in accordance with the rules.

Furthermore, these guidelines establish boundaries and expectations for employee conduct when interacting with fellow employees, business partners, customers, and other external parties, thereby fostering a disciplined and mutually respectful work culture. The implementation of Code of Conduct is also an important instrument in preventing practices of Corruption, Collusion, and Nepotism (CCN) and promoting fair and transparent business operations. In line with this, the Company recognizes that business sustainability is determined not only by financial performance but also by the integrity of all employees in maintaining the trust of stakeholders, grounded in legal compliance and noble ethical values.

Code of Conduct Applies to All Levels of the Organization

The application of Code of Conduct Guidelines is designed to be universal within IPCC, thereby binding all levels of the organization—from employees to Board of Commissioners and Board of Directors—without exception. This provision underscores that standards of integrity and professional conduct are not merely operational responsibilities at the staff level, but also strategic commitments at the Company's highest decision-making level.

Sebagai wujud nyata atas komitmen tersebut, Perseroan menetapkan kewajiban penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh insan IPCC, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. Pakta ini berfungsi sebagai pernyataan komitmen pribadi sekaligus ikatan moral untuk menjalankan aktivitas bisnis secara jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai standar etika tertinggi.

As a tangible manifestation of this commitment, the Company mandates the signing of an Integrity Pact by all IPCC personnel, including Board of Commissioners and Board of Directors members. This pact serves as both a personal commitment and a moral obligation to conduct business activities honestly, fairly, and responsibly in accordance with the highest ethical standards.

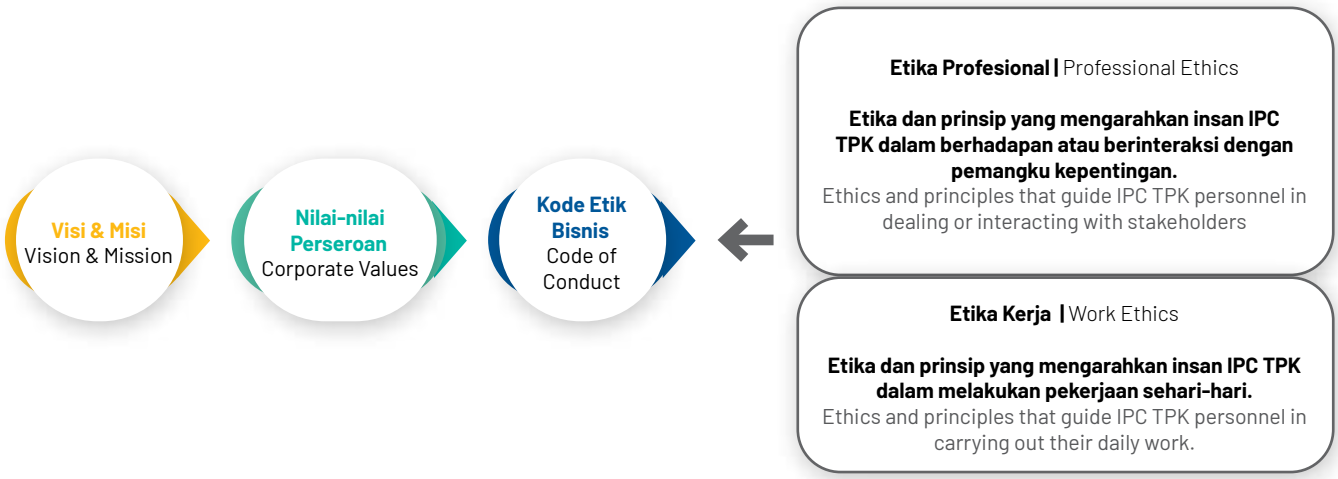

Pokok-Pokok Kode Etik

Pedoman Kode Etik dan Bisnis Perseroan mengatur 2 (dua) topik, yakni etika profesional dan etika kerja, yang bersifat mengikat bagi semua karyawan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Etika Profesional

1. Insan IPCC
   Mengatur perilaku seluruh insan Perseroan sebagai individu ataupun sebagai profesional sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
2. Pelanggan
   Selaras dengan salah satu *corporate values* Perseroan yaitu *customer centric*, di mana insan IPCC harus berkomitmen untuk memberikan perhatian, harga, kualitas, waktu dan keamanan yang setara melalui pemberian layanan dengan standar kualitas yang baik kepada pelanggan, yaitu di antaranya:
   a. Insan Perseroan diharapkan dapat secara konsisten memenuhi harapan pelanggan dan memberikan pelayanan yang luar biasa dan berkualitas.
   b. Insan Perseroan diharuskan untuk menjaga perilaku baik dan tekun dalam memberikan kepuasan pelanggan dan bekerja dengan pemikiran yang inovatif dan kreatif.
   c. Insan Perseroan diharuskan bekerja sama untuk menghilangkan perilaku arogan dan birokratis karena hal tersebut berpengaruh buruk bagi perkembangan dan keberhasilan Perseroan.
   d. Insan Perseroan harus yakin dengan prinsip penyempurnaan secara terus-menerus dengan mengikutsertakan pendapat serta saran dari para pelanggan dan menggunakannya sebagai cara untuk terus menyempurnakan proses dan kualitas pelayanan kami.
   e. Insan Perseroan harus memperhatikan keluhan-keluhan pelanggan dan mencoba menyelesaikannya memberikan solusi yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

Code of Conduct Principles

The main points of Code of Conduct are divided into 2 (two), namely Professional Ethics and Work Ethics, with the following description:

Professional Ethics

1. IPCC Personnel
   Regulate the behavior of all Company personnel as individuals or as professionals in accordance with applicable regulations and norms.
2. Customers
   In line with one of the Company's Corporate values, namely customer centric, where IPCC personnel must be committed to providing equal attention, price, quality, time and safety by providing services with good quality standards to customers, including:
   a. Company personnel are expected to consistently meet customer expectations and provide extraordinary and quality service.
   b. Company personnel are required to maintain good behavior and be diligent in providing customer satisfaction and work with innovative and creative thinking.
   c. Company personnel are required to work together to eliminate arrogant and bureaucratic behavior because this has a negative impact on the development and success of the Company.
   d. Company personnel must believe in the principle of continuous improvement by incorporating opinions and suggestions from customers and using them as a way to continuously improve our processes and service quality.
   e. Company personnel must pay attention to customer complaints and try to resolve them by providing solutions that can be implemented on an ongoing basis.

f. Insan Perseroan diharapkan untuk membangun pola komunikasi yang jujur dengan para pelanggan untuk mendorong terciptanya hubungan yang saling percaya dan transparan.
g. Insan Perseroan memperlakukan para pelanggan sebagai tumpuan bisnis Perseroan dan menjadikan kepuasan mereka sebagai pertimbangan yang utama, sehingga Insan Perseroan akan selalu berusaha untuk memberikan nilai berharga bagi para pelanggan.

3. Vendor
Perseroan terus berusaha membangun hubungan berbasis kepercayaan dan kemakmuran para vendor, berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu di antaranya:
a. Berkolaborasi dengan para vendor dengan cara menguraikan segala kesepakatan dalam dokumen tertulis yang didasari maksud baik dan menguntungkan kedua belah pihak.
b. Melakukan pendekatan yang terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku.
c. Percaya dalam memberikan kesempatan yang setara kepada para vendor dalam menjalankan bisnis.
d. Menghentikan hubungan bisnis dengan vendor mana pun apabila mereka tidak mematuhi Kode Etik Bisnis Perseroan dan menjalankan bisnis dengan cara yang dapat merusak reputasi Perseroan, mengancam lingkungan, dan masyarakat di mana kami beroperasi, atau melanggar hak asasi manusia.
e. Menciptakan transparansi dan membangun kepercayaan dengan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dapat membantu para vendor membangun pemahaman yang lebih baik mengenai bisnis kami.
f. Secara tegas mematuhi Kode Etik Bisnis Perseroan dan mendorong para vendor untuk mengikuti hal yang sama di mana Perseroan memiliki hak penuh untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka apabila terjadi pelanggaran.

4. Kompetitor
Perseroan berkomitmen untuk mematuhi hukum persaingan bisnis baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, yaitu di antaranya:
a. Tidak terlibat dalam praktik perdagangan terlarang, penyalahgunaan dominasi pasar atau aktivitas perdagangan tidak adil lainnya, berdasarkan peraturan dan arahan pemerintah.
b. Tidak akan menyampaikan informasi yang tidak benar tentang layanan kompetitor.
c. Mengutamakan keadilan, kebenaran, dan transparansi terhadap kompetisi bisnis dengan mengikuti aturan dan undang-undang yang berlaku.
d. Tidak diperkenankan menyampaikan komentar atau pendapat tentang layanan atau produk yang dihasilkan kompetitor.

5. Komunitas dan Lingkungan
Perseroan berkomitmen untuk mendukung kelangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial, yaitu di antaranya:
a. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekaligus mendorong kerapian dan membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitar tempat bekerja.
b. Dalam bekerja selalu menunjukkan perilaku yang baik dengan rekan kerja dan anggota komunitas lainnya.
c. Menjaga lingkungan dengan meminimalisasi dan mengurangi dampak lingkungan di area sekitar.

f. Company personnel are expected to build honest communication patterns with customers to encourage the creation of relationships of mutual trust and transparency.
g. Company Personnel treat customers as the foundation of the Company's business and make their satisfaction the main consideration, so that Company Personnel will always strive to provide valuable value to customers.

3. Vendors
The Company continues to strive to build relationships based on trust and prosperity with vendors, based on applicable laws, including:
a. Collaborate with vendors by outlining all agreements in written documents that are based on good intentions and benefit both parties.
b. Take an open, transparent and accountable approach in complying with applicable rules and laws.
c. Believes in providing equal opportunities to vendors in running business.
d. Terminate business relationships with any vendor if they do not comply with the Company's Code of Conduct in a manner that in a way that could damage the reputation of the Company's threaten the environment and the communities in which we operate or violate human rights.
e. Create transparency and build trust by providing information according to business needs that can help vendors build a better understanding of our business.
f. Strictly comply with the Company's Code of Conduct and encourage vendors to follow the same where the Company has the full right to take legal action against them if violations occur.

4. Competitors
The Company is committed to complying with business competition laws both written and unwritten, including:
a. Not engage in illicit trading practices, abuse of market dominance or other unfair trading activities, based on government regulations and directives.
b. Will not convey incorrect information about competitor services.
c. Prioritize fairness, truth and transparency in business competition by following applicable rules and laws.
d. It is not permitted to express comments or opinions about services or products produced by competitors.

5. Community and Environment
The Company is committed to supporting economic, environmental and social sustainability, including:
a. Maintain a clean and healthy environment while encouraging tidiness and building harmonious relationships with the community around the workplace.
b. When working, always show good behavior with colleagues and other community members.
c. Protect the environment by minimizing and reducing environmental impacts in the surrounding area.

d. Secara konsisten memberikan komitmen untuk membangun bangsa dengan cara yang bertanggung jawab dan memperhatikan keadaan lingkungan dan komunitas.
e. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah dan mengaplikasikan peraturan yang relevan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

6. Institusi Pemerintah
Perseroan berkolaborasi penuh dengan regulator dan institusi lain dengan tujuan membangun hubungan yang harmonis serta memastikan kelancaran fungsi bisnis, yaitu di antaranya:
a. Dalam berinteraksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan dan peraturan perusahaan yang berlaku.
b. Membangun hubungan yang harmonis dan positif dengan mengutamakan kejujuran dan saling menghormati.
c. Harus mendapatkan persetujuan yang dibutuhkan sebelum berinteraksi dengan regulator dan institusi terkait saat menjalankan bisnis.
d. Memastikan setiap informasi dan laporan yang diberikan kepada regulator dan pemerintah akurat dan lengkap.
e. Dilarang memberikan suap/gratifikasi yang mempengaruhi keputusan atau sebagai imbalan atas perlakuan yang diinginkan.

7. Aktivitas Politik
Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan sikap netral terhadap partai politik, tidak memberikan bantuan dana ke partai politik, politisi, atau calon pejabat mana pun di negara mana pun. Beberapa etika yaitu di antaranya:
a. Menghindari menjadi anggota atau pengurus Partai Politik.
b. Menghindari mengatasnamakan IPCC Terminal dalam aktivitas dan kontribusi pada kegiatan politik.
c. Menghindari menggunakan dana, harta benda, pelayanan atau sumber daya IPCC untuk aktivitas dan kontribusi politik.
d. Menghindari penggunaan atribut partai, melakukan kampanye dan aktivitas politik di lingkungan kerja.

Etika Kerja

Etika Kerja adalah pedoman etika yang mengatur perilaku yang diharapkan dari seorang insan Perseroan, terkait dengan pelaksanaan aktivitas pekerjaan sehari-hari:

1. Pendokumentasian dan Pencatatan Perusahaan
Mengikuti semua prinsip dan standar pendokumentasian dan pencatatan, melaporkan semua informasi dalam Perseroan secara akurat dan tepat waktu.
2. Kontrol Internal
Memiliki kontrol internal yang kuat untuk mematuhi hukum dan prosedur yang berlaku.
3. Perjalanan Dinas
Pedoman etika yang mengatur mengenai perjalanan dinas insan Perseroan.
4. Kerahasiaan Data dan/atau Informasi
Setiap insan Perseroan berkomitmen untuk melindungi informasi bisnis dan pribadi serta menjamin kerahasiaannya.
5. Setiap insan Perseroan berkomitmen untuk berperilaku etis sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan menghindari hubungan, aktivitas, atau perkumpulan yang akan mengurangi kemampuan pengambilan keputusan secara adil dan objektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

d. Consistently provide a commitment to develop the nation in a responsible manner and pay attention to the condition of the environment and community.
e. Comply with all government laws and regulations and apply relevant regulations in carrying out daily work.

6. Government Institutions
The Company collaborates fully with regulators and other institutions with the aim of building harmonious relationships and ensuring smooth business functions, including:
a. When interacting, you must comply with the provisions of applicable laws and Company regulations.
b. Building harmonious and positive relationships by prioritizing honesty and mutual respect.
c. Must obtain necessary approvals before interacting with regulators and relevant institutions while conducting business.
d. Ensure that all information and reports provided to regulators and the government are accurate and complete.
e. It is prohibited to give bribes/gratuities to influence decisions or in return for desired treatment.

7. Political Activities
The Company is committed to maintaining a neutral attitude towards political parties, not providing financial assistance to any political party, politician or candidate for office in any country. Some ethics include:
a. Avoid becoming a member or administrator of a political party.
b. Avoid using the name of IPCC Terminal in activities and contributions to political activities.
c. Avoid using IPCC funds, property, services or resources for political activities and contributions.
d. Avoid using party attributes, conducting campaigns and political activities in the work environment.

Work Ethics

Work Ethics are ethical guidelines that regulate the expected behavior of Company personnel, related to the implementation of daily work activities:

1. Company Documentation and Recording
Follow all documentation and recording principles and standards, report all information within the Company accurately and on time.
2. Internal Controls
Have strong internal controls to comply with applicable laws and procedures.
3. Business trips
Ethical guidelines governing official travel of Company personnel.
4. Confidentiality of Data and/or Information
Every member of the Company is committed to protecting business and personal information and ensuring its confidentiality.
5. Every member of the Company is committed to behaving ethically in accordance with the Company's interests by avoiding relationships, activities or associations that will reduce the ability to make decisions fairly and objectively in carrying out their duties and responsibilities.

6. Hubungan Pribadi
   Menghindari hubungan pribadi atau keterlibatan emosional dengan kompetitor, vendor atau bawahan yang akan mempengaruhi kemampuan membuat keputusan.
7. Memperlakukan Keluarga dan Teman
   Pedoman etika yang mengatur hubungan keluarga atau pertemanan dengan kompetitor, vendor, atau bawahan.
8. Donasi
   Setiap insan Perseroan tidak diperkenankan untuk mendukung atau memberikan donasi untuk kepentingan politik. Donasi hanya akan diberikan dengan dasar etika kerja dan profesional.
9. Anti-Penyuapan
   Perseroan secara tegas mengecam dan melarang segala bentuk penyuapan.
10. Media, Komunikasi dan Penyebaran Informasi
    Pedoman yang mengatur mengenai cara penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan.

Penegakan Kode Etik: Sosialisasi dan Internalisasi

1. Sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku
   Perusahaan senantiasa melakukan sosialisasi dalam penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan kepada seluruh pegawai, mulai dari level operasional sampai kepada *top management*. Sosialisasi ini dimaksudkan agar seluruh Insan IPCC senantiasa patuh terhadap Kode Etik Perusahaan. Perseroan melakukan penegakan terhadap Kode Etik Perusahaan yang dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap penegakan Pedoman Etika Perusahaan dan menyediakan fasilitas bagi pengaduan terhadap pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan.
2. Penandatanganan Pakta Integritas
   Perusahaan mewajibkan setiap karyawan dan manajemen untuk menandatangani pakta integritas mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik Perseroan untuk memastikan bahwa semua organ Perseroan memiliki komitmen untuk membangun etika dan kultur bisnis yang sehat serta membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen dari semua jajaran Perseroan.
3. *Management Review*
   Perusahaan secara konsisten menyelenggarakan *Management Review* bulanan dalam rangka mengevaluasi kinerja Perusahaan dan melakukan internalisasi pelaksanaan Kode Etik sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam Perusahaan serta memahami atas pelaksanaan pedoman dalam kegiatan sehari-hari.

6. Personal Relationships
   Avoid personal relationships or emotional involvement with competitors, vendors or subordinates that would influence decision-making ability
7. Treat Family and Friends
   Ethical guidelines governing family or friendship relationships with competitors, vendors or subordinates.
8. Donation
   Every member of the Company is not permitted to support or make donations for political interests. Donations will only be given on the basis of work ethics and professionalism.
9. Anti-Bribery
   The Company firmly condemns and prohibits all forms of bribery.
10. Media, Communication and Information Dissemination
    Guidelines that regulate how to convey information to stakeholders.

Enforcement of Code of Conduct: Socialization and Internalization

1. Socialization of Code of Conduct
   The Company always socializes the implementation of Code of Conduct to all employees, starting from the operational level to top management. This socialization is intended so that all IPCC personnel always comply with the Company Code of Conduct. The Company enforces the Company Code of Conduct by periodically monitoring the Company Code of Conduct and providing facilities for complaints against the Company Code of Conduct violations.
2. Integrity Pact Signing
   The Company requires every employee and management to sign an integrity pact regarding compliance with the Company Code of Conduct to ensure that all Company organs are committed to building a healthy business culture and ethics, as well as building understanding, care, and commitment from all levels of the Company.
3. Management Review
   The Company consistently organizes a monthly Management Review to evaluate the Company's performance and internalize the implementation of Code of Conduct so that a sense of ownership is formed among all parties in the Company and the implementation of guidelines in daily activities is understood.

Pernyataan Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis

Statement of Integrity Pact and Compliance with the Code of Conduct

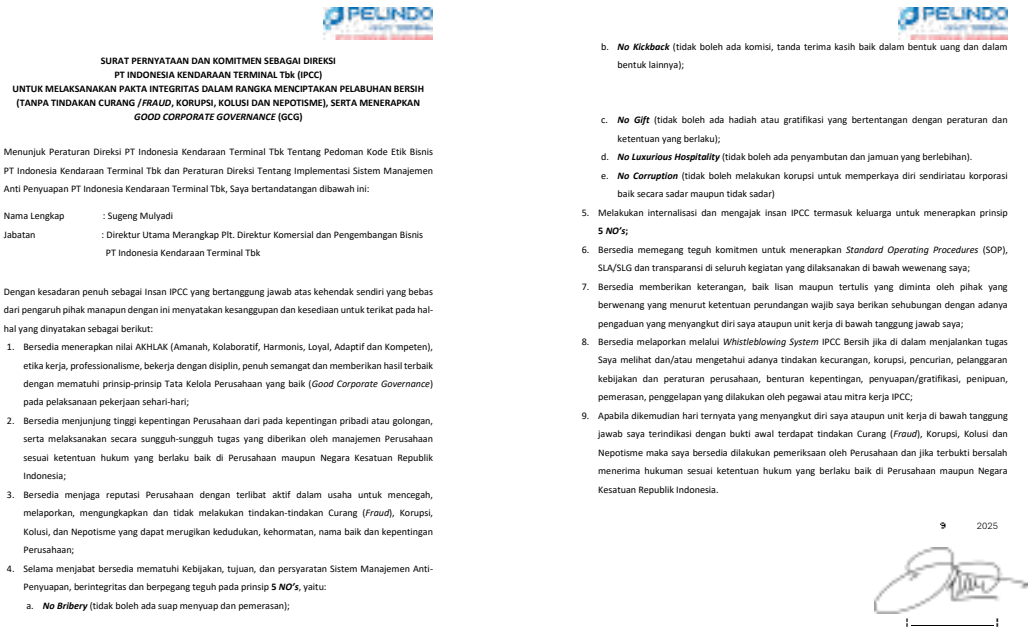

PELINDO

SURAT PERNYATAAN DAN KOMITMEN SEBAGAI DIREKSI
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk (IPCC)
UNTUK MELAKSANAKAN PAKTA INTEGRITAS DALAM RANGKA MENCIPTAKAN PELABUHAN BERSIH (TANPA TINDAKAN CURANG /*FRAUD*, KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME), SERTA MENERAPKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Menunjuk Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Tentang Pedoman Kode Etik Bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dan Peraturan Direksi Tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, Saya bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Sugeng Mulyadi
Jabatan : Direktur Utama Merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Dengan kesadaran penuh sebagai Insan IPCC yang bertanggung jawab atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak manapun dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Bersedia menerapkan nilai AKHLAK (Amanah, Kolaboratif, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kompeten), etika kerja, professionalisme, bekerja dengan disiplin, penuh semangat dan memberikan hasil terbaik dengan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari;
2. Bersedia menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan dari pada kepentingan pribadi atau golongan, serta melaksanakan secara sungguh-sungguh tugas yang diberikan oleh manajemen Perusahaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik di Perusahaan maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bersedia menjaga reputasi Perusahaan dengan terlibat aktif dalam usaha untuk mencegah, melaporkan, mengungkapkan dan tidak melakukan tindakan-tindakan Curang (*Fraud*), Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dapat merugikan kedudukan, kehormatan, nama baik dan kepentingan Perusahaan;
4. Selama menjabat bersedia mematuhi Kebijakan, tujuan, dan persyaratan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan, berintegritas dan berpegang teguh pada prinsip **5 *NO's***, yaitu:
   a. ***No Bribery*** (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);
   b. ***No Kickback*** (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
   c. ***No Gift*** (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku);
   d. ***No Luxurious Hospitality*** (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
   e. ***No Corruption*** (tidak boleh melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiriatau korporasi baik secara sadar maupun tidak sadar)
5. Melakukan internalisasi dan mengajak insan IPCC termasuk keluarga untuk menerapkan prinsip **5 *NO's***;
6. Bersedia memegang teguh komitmen untuk menerapkan *Standard Operating Procedures* (SOP), SLA/SLG dan transparansi di seluruh kegiatan yang dilaksanakan di bawah wewenang saya;
7. Bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang diminta oleh pihak yang berwenang yang menurut ketentuan perundangan wajib saya berikan sehubungan dengan adanya pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun unit kerja di bawah tanggung jawab saya;
8. Bersedia melaporkan melalui *Whistleblowing System* IPCC Bersih jika di dalam menjalankan tugas Saya melihat dan/atau mengetahui adanya tindakan kecurangan, korupsi, pencurian, pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi, penipuan, pemerasan, penggelapan yang dilakukan oleh pegawai atau mitra kerja IPCC;
9. Apabila dikemudian hari ternyata yang menyangkut diri saya ataupun unit kerja di bawah tanggung jawab saya terindikasi dengan bukti awal terdapat tindakan Curang (*Fraud*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka saya bersedia dilakukan pemeriksaan oleh Perusahaan dan jika terbukti bersalah menerima hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik di Perusahaan maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9 2025

Melalui penandatanganan pakta integritas tersebut, seluruh insan Perseroan telah menyatakan:

1. Bersedia menerapkan nilai AKHLAK (Amanah, Kolaboratif, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kompeten), etika kerja, profesionalisme, bekerja dengan disiplin, penuh semangat dan memberikan hasil terbaik dengan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari;
2. Bersedia menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan dari pada kepentingan pribadi atau golongan, serta melaksanakan secara sungguh-sungguh tugas yang diberikan oleh manajemen Perusahaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik di Perusahaan maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bersedia menjaga reputasi Perusahaan dengan terlibat aktif dalam usaha untuk mencegah, melaporkan, mengungkapkan dan tidak melakukan tindakan-tindakan Curang (*Fraud*), korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merugikan kedudukan, kehormatan, nama baik dan kepentingan Perseroan;
4. Selama menjabat bersedia mematuhi Kebijakan, tujuan, dan persyaratan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan, berintegritas dan berpegang teguh pada prinsip 5 NO's, yaitu:
   a. *No Bribery* (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);
   b. *No Kickback* (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
   c. *No Gift* (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku);
   d. *No Luxurious Hospitality* (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
   e. No Corruption (tidak boleh melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi baik secara sadar maupun tidak sadar).
5. Melakukan internalisasi dan mengajak insan Pelindo termasuk keluarga untuk menerapkan prinsip 5 NO's;

Through the signing of integrity pact, all Company personnel have stated:

1. Willing to apply AKHLAK values (Trustworthy, Collaborative, Harmonious, Loyal, Adaptive and Competent), work ethics, professionalism, work with discipline, full of enthusiasm and provide the best results by adhering to the principles of Good Corporate Governance in the daily work;
2. Willing to uphold the Company interests rather than personal or group interests, and seriously carry out the duties assigned by the Company's management in accordance with the legal provisions in force both in the Company and Unitary State of the Republic of Indonesia;
3. Willing to maintain the Company's reputation by being actively involved in efforts to prevent, report, disclose and not commit acts of fraud, corruption, collusion and nepotism which could harm the position, honor, good name and interests of the Company;
4. During the tenure, willing to comply with the Anti-Bribery Management System policies, objectives and requirements, have integrity and adhere to the 4 NO's principles, namely:
   a. No Bribervy (no bribery and extortion);
   b. No Kickback (no commissions, tokens of gratitude either in the form of money or in other forms);
   c. No Gift (no gifts or gratuities that conflict with applicable rules and regulations);
   d. No Luxurious Hospitality (no excessive reception or entertainment).
   e. No Corruption (must not engage in corruption to enrich oneself or a corporation, either consciously or unconsciously).
5. Internalize and invite Pelindo personnel, including families, to apply the 4 NO's principles;

6. Bersedia memegang teguh komitmen untuk menerapkan *Standard Operating Procedures* (SOP), SLA/SLG dan transparansi di seluruh kegiatan yang dilaksanakan di bawah wewenang saya;
7. Bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang diminta oleh pihak yang berwenang yang menurut ketentuan perundangan wajib saya berikan sehubungan dengan adanya pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun unit kerja di bawah tanggung jawab saya;
8. Bersedia melaporkan melalui Whistle Blowing System Pelindo Bersih jika di dalam menjalankan tugas Saya melihat dan/atau mengetahui adanya tindakan kecurangan, korupsi, pencurian, pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan, pemerasan, penggelapan yang dilakukan oleh pegawai atau mitra kerja PELINDO;
9. Apabila dikemudian hari ternyata yang menyangkut diri saya ataupun unit kerja di bawah tanggung jawab saya terindikasi dengan bukti awal terdapat tindakan Curang (*Fraud*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka saya bersedia dilakukan pemeriksaan oleh Perusahaan dan jika terbukti bersalah menerima hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik di Perusahaan maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tim KP2DK

Bertujuan untuk memastikan penegakan Kode Etik dan Bisnis dapat dilaksanakan secara konsisten dan terukur, Perseroan menetapkan mekanisme pengawasan melalui pembentukan Kelompok Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (KP2DK), yang berfungsi untuk:

1. Sebagai sumber informasi bagi para Insan Perseroan dan unit kerja tentang kebijakan dan standar perilaku yang diatur dalam pedoman ini.
2. Mengkaji secara berkala dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memperjelas perilaku.
3. Melaporkan penerapan dan kepatuhan terhadap pedoman ini serta masalah-masalah yang dihadapi secara periodik agar dapat dikaji lebih lanjut.
4. Membahas adanya pelanggaran dan mempertimbangkan sanksi yang dijatuhkan sesuai peraturan yang berlaku untuk dilaporkan dan direkomendasikan kepada:
   a. Direktur Keuangan dan SDM untuk kasus pelanggaran disiplin sedang atau berat dengan ancaman hukuman selain Pemutusan Hubungan Kerja;
   b. Tim Pertimbangan Disiplin Karyawan (TPDK) untuk kasus pelanggaran disiplin berat dengan ancaman hukuman berupa Pemutusan Hubungan Kerja.

Sanksi atas Pelanggaran

Jenis sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada karyawan yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin kerja adalah:

1. Hukuman Disiplin Ringan;
2. Hukuman Disiplin Sedang;
3. Hukuman Disiplin Berat.

6. Willing to uphold the commitment to implement Standard Operating Procedures (SOP), SLA/SLG and transparency in all activities carried out under my authority;
7. Willing to provide information, both verbal and written, requested by the competent authorities which according to statutory provisions I am obliged to provide in connection with complaints involving myself or the work unit under my responsibility;
8. Willing to report via Pelindo Bersih Whistle Blowing System if in carrying out my duties I see and/or become aware of any acts of fraud, corruption, theft, violations of Company policies and regulations, extortion, embezzlement committed by PELINDO employees or work partners;
9. If in the future it turns out that it concerns me or the work unit under my responsibility, it is indicated by initial evidence that there have been acts of Fraud, Corruption, Collusion and Nepotism, then I am willing to be investigated by the Company and if proven guilty, receive punishment in accordance with legal provisions. which applies both to the Company and Unitary State of the Republic of Indonesia.

KP2DK Team

To ensure that the Code of Conduct is enforced consistently and in a measurable manner, the Company has established an oversight mechanism through the establishment of Employee Disciplinary Violation Investigation Team (KP2DK), which serves to:

1. As a source of information for Company Personnel and work units regarding the policies and standards of behavior regulated in this guideline.
2. Review periodically and make necessary adjustments to clarify behavior.
3. Report on the implementation and compliance with these guidelines as well as problems encountered periodically so that they can be studied further.
4. Discuss any violations and consider sanctions imposed in accordance with applicable regulations to be reported and recommended to:
   a. Director of Finance and HC for cases of moderate or serious disciplinary violations with the threat of punishment other than Termination of Employment;
   b. Employee Discipline Consideration Team (TPDK) for cases of serious disciplinary violations with the threat of punishment in the form of Termination of Employment.

Sanctions for Violations

The types of sanctions or penalties that can be given to employees who are proven to have committed work discipline violations are:

1. Light Disciplinary Punishment;
2. Moderate Disciplinary Punishment;
3. Severe Disciplinary Punishments.

Jenis Hukuman yang Diberikan
Types of Punishment Imposed

Jenis Hukuman Disiplin Ringan Light Disciplinary Punishment	Jenis Hukuman Disiplin Sedang Moderate Disciplinary Punishment	Jenis Hukuman Disiplin Berat Severe Disciplinary Punishments
1. Teguran secara tertulis dari atasan langsung; 2. Pernyataan tidak puas secara tertulis dari Perseroan. 1. Written warning from direct superior; 2. Written statement of dissatisfaction from the Company.	1. Denda sebesar 10% dari Penghasilan sebulan selama 3 (tiga) bulan, sesuai peraturan yang berlaku; 2. Denda sebesar 20% dari Penghasilan sebulan selama 3 (tiga) bulan, sesuai peraturan yang berlaku. 1. A fine of 10% of monthly income for 3 (three) months, according to applicable regulations; 2. A fine of 20% of a month's income for 3 (three) months, according to applicable regulations.	1. Penurunan jabatan dan/atau kelas jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah dari jabatan dan/atau kelas jabatan semula; 2. Penurunan jabatan dan/atau kelas jabatan 2 (dua) tingkat lebih rendah dari jabatan dan/atau kelas jabatan semula; 3. Pengembalian Pekerja yang ditugaskan di Perusahaan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero).\ 1. Demotion of position and/or class of position to 1 (one) level lower than the original position and/or class of position; 2. Demotion of position and/or position class to 2 (two) levels lower than the original position and/or position class; 3. Return of employees assigned to the Company to PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Terhadap karyawan yang melanggar disiplin, selain hukuman di atas dilakukan pemotongan bonus untuk tahun saat jatuhnya hukuman sebagai berikut:
1. Untuk Hukuman Disiplin Ringan Bonus tahunan diberikan 70%;
2. Untuk Hukuman Disiplin Sedang Bonus tahunan diberikan 40%;
3. Untuk Hukuman Disiplin Berat tidak diberikan Bonus tahunan.

For employees who violate discipline, in addition to the above penalties, bonuses will be deducted for the year in which the penalty is imposed as follows:
1. For light disciplinary punishment, the annual bonus is given 70%;
2. For Moderate Disciplinary Punishments, the annual bonus is given 40%;
3. For Severe Disciplinary Punishments no annual Bonus is given.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, tidak terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh jajaran Manajemen Puncak maupun karyawan Perseroan.

Number of Code of Conduct Violations in 2025

Throughout 2025, there not violations of Code of Conduct committed by the Company's Top Management or employees.

Tren Kualitas Penerapan Kode Etik Perseroan Tahun 2024-2025

Trends in the Implementation Quality of the Company's Code of Conduct in 2024-2025

Jenis Pelanggaran Type of Violation	2025	2024
Pelanggaran Ringan Light Violation	0	0
Pelanggaran Sedang Moderate Violation	0	0
Pelanggaran Berat Severe Violation	0	0

Jenis Sanksi Types of Sanctions	2025	2024
Teguran secara tertulis dari atasan langsung; Written warning from direct superior;	0	0
Pernyataan tidak puas secara tertulis dari Perusahaan Written statement of dissatisfaction from the Company	0	0
Denda sebesar 10% dari Penghasilan sebulan selama 3 (tiga) bulan, sesuai peraturan yang berlaku. A fine of 10% of a month's income for 3 (three) months, according to applicable regulations.	0	0
Denda sebesar 20% dari Penghasilan sebulan selama 3 (tiga) bulan, sesuai peraturan yang berlaku. A fine of 20% of a month's income for 3 (three) months, according to applicable regulations	0	0
Penurunan jabatan. Demotion	0	0
Pengembalian Pekerja yang ditugaskan di IPCC kepada Pelindo. Return of employees assigned to Pelindo by IPCC.	0	0

Evaluasi atas Implementasi Kode Etik Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan berupaya keras untuk konsisten dalam menegakkan pokok-pokok Kode Etik dan penerapan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP), yang sekaligus juga berfungsi sebagai landasan kebijakan Sistem Anti Korupsi dan menjadi gerbang utama dalam sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan.

Evaluation of Code of Conduct Implementation in 2025

Throughout 2025, the Company strives to be consistent in upholding the principles of Code of Conduct and implementing ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System (ABMS), which also serves as the basis for Anti-Corruption System policy and is the main gateway in the Company's Whistleblowing system.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan

Policy on Long-Term Performance-Based Compensation to Management and/or Employees

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan belum memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen.

As of December 31, 2025, the Company does not have a share ownership program for employees and/or management.

Informasi Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Information on Share Ownership of Members of Board of Directors and Board of Commissioners

Kebijakan

Pengaturan mengenai pelaporan kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris diselaraskan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Sejalan dengan regulasi tersebut, setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, diwajibkan menyampaikan laporan kepada OJK apabila terjadi kepemilikan awal atau perubahan kepemilikan saham. Penyampaian laporan dimaksud dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak transaksi atau perubahan kepemilikan terjadi.

Selain pelaporan kepada regulator, Direksi dan Dewan Komisaris juga berkewajiban menyampaikan informasi yang sama kepada Perseroan sebagai bagian dari mekanisme tata kelola internal. Informasi tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham, sehingga Perseroan dapat melakukan pencatatan dan pemantauan secara tepat waktu.

Pelaksanaan atas Kebijakan Dimaksud

Pada tahun 2025, Direksi Perseroan melakukan pembelian saham Perseroan pada tanggal 18 Juli 2025 dan telah dilaporkan pada tanggal 23 Juli 2025 sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang dimaksud.

Policy

Regulations regarding the reporting of share ownership by Board of Directors and Board of Commissioners are aligned with the provisions of Financial Services Authority (OJK), specifically OJK Regulation No. 11/POJK.04/2017 on Reports of Share Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies.

In accordance with these regulations, every member of Board of Directors and Board of Commissioners who holds shares in the Company, whether directly or indirectly, is required to submit a report to the OJK in the event of an initial shareholding or a change in shareholding. The submission of such a report must be made no later than 10 (ten) days from the date the transaction or change in ownership occurs.

In addition to reporting to the regulator, Board of Directors and Board of Commissioners are also required to submit the same information to the Company as part of the internal governance mechanism. This information must be submitted no later than 3 (three) business days after the acquisition or change in share ownership occurs, so that the Company can record and monitor it in a timely manner.

Implementation of Intended Policy

In 2025, the Company's Board of Directors purchased the Company's shares on July 18, 2025 and reported this on July 23, 2025 in accordance with the policies and provisions referred to.

Kebijakan Terkait Perencanaan atas Suksesi Anggota Direksi dan Manajemen Kunci

Policy on Succession Planning for Board of Directors and Key Management

Sebagai entitas anak usaha yang berada di bawah kendali PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) selaku pemegang saham mayoritas dan anggota Pelindo Group, Perseroan menyelaraskan pengelolaan regenerasi kepemimpinan dengan arah kebijakan induk perusahaan. Penyelarasan ini mencakup perencanaan suksesi bagi jajaran Direksi maupun posisi manajemen kunci agar sejalan dengan standar dan visi strategis grup.

Selama pelaksanaan pergantian maupun pengangkatan anggota Direksi, Perseroan senantiasa berpedoman pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pertimbangan utama tidak hanya berfokus pada aspek formal kepatuhan, tetapi juga pada rekam jejak integritas, kecakapan profesional, pengalaman kerja yang relevan, serta kecocokan profil kepemimpinan dengan tantangan dan kebutuhan bisnis Perseroan ke depan.

Seiring dengan itu, Perseroan secara konsisten mengelola pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai program peningkatan kapasitas dan kompetensi. Upaya ini ditujukan untuk membentuk cadangan talenta internal yang kuat, sehingga Perseroan memiliki kesiapan sumber daya pemimpin dari dalam organisasi yang dapat mendukung kesinambungan manajemen dan keberlanjutan kinerja di masa mendatang.

As a subsidiary under the control of PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), which is the majority shareholder and a member of the Pelindo Group, the Company aligns its leadership succession planning with the parent Company's policy direction. This alignment includes succession planning for Board of Directors members and key management positions to ensure they are in line with the Group's standards and strategic vision.

During the process of replacing or appointing members of Board of Directors, the Company consistently adheres to the Good Corporate Governance principles. Key considerations focus not only on formal compliance aspects but also on track records of integrity, professional competence, relevant work experience, and the alignment of leadership profiles with the Company's future business challenges and needs.

In line with this, the Company consistently manages human capital development through various capacity-building and competency development programs. These efforts are aimed at building a strong internal talent pool, ensuring the Company has a ready supply of leaders from within the organization who can support management continuity and sustained performance in the future.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

Gambaran Umum
Perseroan telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan serta mekanisme pengendalian internal yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, objektif, dan profesional. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah penyediaan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana bagi karyawan maupun pihak terkait untuk menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam kegiatan operasional Perseroan.

Keberadaan WBS dirancang sebagai mekanisme preventif dan detektif untuk mengurangi potensi terjadinya praktik tata kelola yang tidak baik (*bad governance*). Melalui sistem ini, Perseroan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi seluruh pemangku kepentingan agar berani menyampaikan temuan atau dugaan pelanggaran secara bertanggung jawab tanpa rasa takut akan konsekuensi negatif. Dengan demikian, WBS diharapkan menjadi instrumen penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya ekosistem bisnis yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sepanjang laporan disampaikan dengan niat baik dan dilandasi fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pedoman WBS
Sebagai bentuk penguatan tata kelola pelaporan pelanggaran, implementasi WBS di Perseroan tidak berjalan secara *ad hoc*, melainkan berlandaskan pedoman yang telah ditetapkan secara bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Nomor HK.56/2/2/IKT-21 tanggal 1 September 2021 tentang Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar (Pungli) dan penerapan Whistle Blowing System (WBS) di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Pedoman ini disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh insan Perseroan, dengan cakupan pengaturan yang terbagi ke dalam 4 (empat) bagian yang saling berkaitan dan mendukung efektivitas sistem pelaporan pelanggaran di Perseroan, yaitu:
1. Latar belakang dan tujuan;
2. Alur Komunikasi Tim/Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) serta Pungli;
3. Program IPCC Bersih; dan
4. Alur Proses WBS berikut dengan langkah-langkah tindak lanjut pelaporan dan saluran serta media penyampaiannya.

Semua pedoman tersebut ditinjau secara berkala oleh manajemen untuk memastikan kesesuaiannya terhadap dinamika dan disrupsi bisnis yang terjadi.

General Description
The Company has established various policy instruments and internal control mechanisms aimed at creating a safe, objective, and professional work environment. One concrete manifestation of this commitment is the provision of a Whistleblowing System (WBS) as a means for employees and other stakeholders to report information if they encounter indications of irregularities in the Company's operational activities.

The WBS is designed as a preventive and detective mechanism to reduce the potential forbad governance. Through this system, the Company opens up broader participation opportunities for all stakeholders to courageously report findings or suspected violations responsibly without fear of negative consequences. Thus, WBS is expected to become a vital instrument in maintaining transparency and accountability, as well as supporting the realization of a business ecosystem free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN), provided that reports are submitted in good faith and based on verifiable facts.

WBS Guideline
To strengthen the governance of violation reporting, WBS implementation at the Company is not carried out on an ad hoc basis, but rather is based on guidelines jointly established by Board of Commissioners and Board of Directors. These provisions are set forth in Joint Decree No. HK.56/2/2/IKT-21 dated September 1, 2021, concerning the Management of Gratification, Reporting of Illegal Fees (Pungli), and Implementation of Whistle Blowing System (WBS) within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

These manual are systematically organized to ensure they are easily understood and implemented by all employees of the Company. The scope of regulations is divided into 4 (four) interrelated sections that support the effectiveness of the Company's violation reporting system, namely:
1. Background and objectives
2. Gratification Control Team/Unit (UPG) Communication Flow and Extortion
3. IPCC Bersih Program
4. WBS Process Flow along with follow-up reporting steps and delivery channels and media.

All these guidelines are reviewed regularly by management to ensure their suitability for the dynamics and business disruption that is occurring.

Ruang Lingkup WBS

Sebagaimana tercantum dalam Pedoman WBS, berikut ini adalah lingkup pelaporan/pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS, antara lain meliputi:

WBS Scope

As stated in the WBS Manual, the following is the scope of reporting/complaints regarding alleged violations that can be reported through the WBS, including:

Kategori Pelaporan Reporting Category	**Penjelasan** Explanation
Tindakan Curang (Tidak Adil) Fraudulent (unfair) Actions	Tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, ataupun menggerakkan orang lain untuk memberikan keuntungan kepadanya dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum. An act that aims to benefit oneself or others, by using a false name or false dignity, by trickery, or a series of lies, or by persuading others to give him/her an advantage in ways that are improper and against the law.
Korupsi Corruption	Tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal dengan tujuan untuk memperkaya diri atau memperkaya orang-orang yang memiliki hubungan istimewa dengannya dengan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Unlawful and unethical actions with the aim of enriching oneself or those with whom one has a special relationship by abusing the position and power entrusted to one.
Pencurian Thievery	Kegiatan/tindakan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. The act of taking an item, wholly or partially belonging to someone else, with the intention of unlawfully possessing it
Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan Violation of Company Policies and Regulations	Tindakan yang dilakukan baik disengaja maupun terencana yang bertentangan dengan kebijakan dan peraturan internal Perseroan. Actions taken, whether intentional or planned, that are contrary to the Company's internal policies and regulations.
Benturan kepentingan Conflict of Interest	Sebuah situasi dan kondisi karena kedudukan dan jabatan memiliki kewenangan yang berpotensi disalahgunakan baik sengaja maupun tidak disengaja untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis IPCC. A situation and condition where a person's position and title give them the potential to abuse their authority, whether intentionally or unintentionally, for their personal gain, creating a conflict between personal and/or group and/or family interests and IPCC's economic interests.
Penyuapan (Gratifikasi) Bribery (Gratification)	Suatu tindakan/kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan sadar, seperti menerima sesuatu atau janji, sedangkan seseorang tersebut mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya seseorang tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya. An action/activity carried out deliberately and consciously, such as receiving something or a promise, while a person knows or reasonably suspects that giving something or a promise is intended to make the person do something or not do something in their duties, which is contrary to their authority or obligations.
Penggelapan Embezzlement	Tindakan atau kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang saat ini ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Actions or activities carried out intentionally and consciously against the law to own something which wholly or partly belongs to another person, which is currently in his or her control, not because of a crime
Penipuan Fraud	Tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Actions or activities carried out intentionally and consciously with the intention of benefiting oneself or others unlawfully, by using a false name or false dignity with deception, or a series of lies, encouraging other people to hand over something to them, or to give them a debt. or write off receivables.
Pemerasan Blackmail	Kegiatan atau tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang tersebut atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Activities or actions carried out with the intention of unlawfully benefiting oneself or another person, forcing someone with violence or the threat of violence to give something, which in whole or in part belongs to that person or another person, or in order to create a debt or write off a receivable.
Pungutan Liar (Pungli) Illegal Levies (Extortion)	Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Illegal levies are acts carried out by someone by requesting payment of an amount of money that is not appropriate or not based on the regulations relating to the payment. This is often equated with acts of extortion, fraud or corruption. Illegal levies are also included in the category of office crimes, where the concept of office crimes explains that officials, in order to benefit themselves or others, abuse their power to force someone to give something, to pay or receive payment at a discount, or to do something for themselves.

Sosialisasi dan Upaya Peningkatan Kualitas Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perseroan secara berkelanjutan meningkatkan literasi dan pemahaman seluruh insan Perseroan mengenai *Whistleblowing System* melalui berbagai kegiatan edukasi dan komunikasi internal. Upaya ini bertujuan memastikan setiap karyawan tidak hanya mengetahui keberadaan WBS, tetapi juga memahami peran strategisnya serta tata cara pemanfaatannya secara tepat. Dalam pelaksanaannya, Perseroan memanfaatkan beragam kanal komunikasi internal yang telah tersedia sehingga pesan sosialisasi dapat tersampaikan secara merata ke seluruh unit kerja dan jenjang organisasi.

Seiring dengan penguatan pemahaman di lingkungan internal, Perseroan juga membuka akses informasi WBS kepada pihak eksternal sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan serta mekanisme WBS dipublikasikan melalui situs web resmi https://pelindobersih.pelindo.co.id, sehingga para pemangku kepentingan dapat mengetahui dan memanfaatkan sistem pelaporan tersebut apabila diperlukan.

Pihak Pengelola Aduan

Penyelenggaraan WBS di lingkungan Perseroan dibantu oleh Pengelola Eksternal yang merupakan pihak ketiga independen. Pengelolaan oleh pihak ketiga independen termasuk pada aktivitas penerimaan, administrasi dan konfirmasi kelengkapan laporan yang kemudian diteruskan kepada Komite Pelindo Bersih Induk Perseroan.

Tim Pengelola WBS bertugas untuk menerima laporan yang diteruskan Komite Pelindo Bersih Induk Perusahaan kepada Tim WBS, memonitoring tindak lanjut atas laporan yang diteruskan oleh Komite Pelindo Bersih Induk Perseroan, menindaklanjuti dan melakukan investigasi atas laporan yang diteruskan oleh Komite Pelindo Bersih Induk Perseroan selama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan dibantu oleh Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih Induk Perseroan setelah laporan diteruskan Komite Pelindo Bersih Induk Perseroan dan melaporkannya kepada Komite Pelindo Bersih Induk Perseroan, dan membuat laporan atas penyelesaian tindak lanjut laporan kepada Komite Pelindo Bersih Induk Perseroan.

Socialization and Efforts to Improve the Quality of Whistleblowing System

The Company continuously enhances the literacy and understanding of all its personnel regarding the Whistleblowing System through various internal education and communication activities. These efforts aim to ensure that every employee not only knows about the existence of WBS, but also understands its strategic role and how to use it properly. In its implementation, the Company utilizes various existing internal communication channels so that awareness messages can be conveyed evenly to all work units and organizational levels.

Along with strengthening understanding within the internal environment, the Company also provides access to WBS information to external parties as a form of transparency and accountability. WBS policies and mechanisms are published on the Company's official website at https://pelindobersih.pelindo.co.id, so that stakeholders can learn about and utilize the reporting system when necessary.

Complaint Management

The implementation of the Whistleblowing System (WBS) within the Company is supported by an External Administrator, which is an independent third party. Management by this independent third party includes activities such as receiving reports, administering them, and confirming the completeness of reports, which are then forwarded to the Company's Pelindo Bersih Committee at the parent level.

The WBS Management Team is responsible for receiving reports forwarded by the Parent Company's Pelindo Bersih Committee, monitoring the follow-up actions on such reports, and conducting follow-up actions and investigations on the reports within 30 (thirty) working days. This process is carried out with the assistance of the Follow-up Team of the Parent Company's Pelindo Bersih Committee after the reports are forwarded. The WBS Management Team is also responsible for reporting the results to the Parent Company's Pelindo Bersih Committee and preparing reports on the completion of follow-up actions.

Tim Pengelolaan WBS
Gratification Control Unit Team

Ketua Tim Unit Head	Senior Manager Sekretaris Perusahaan Senior Manager of Corporate Secretary
Wakil Ketua Tim Vice Unit Head	Senior Manager Audit Internal Senior Manager of Internal Audit and Risk Management
Sekretaris Secretary	Assistant Senior Manager Hukum dan Kepatuhan Assistant Senior Manager of Legal and Compliance
Anggota Member	Para Senior Manager Perusahaan Company Senior Managers

Mekanisme atau Prosedur Pelaporan Pelanggaran

Whistle Blowing Mechanism or Procedure

Sesuai Laporan Alur Utama
As per Main Flow Report

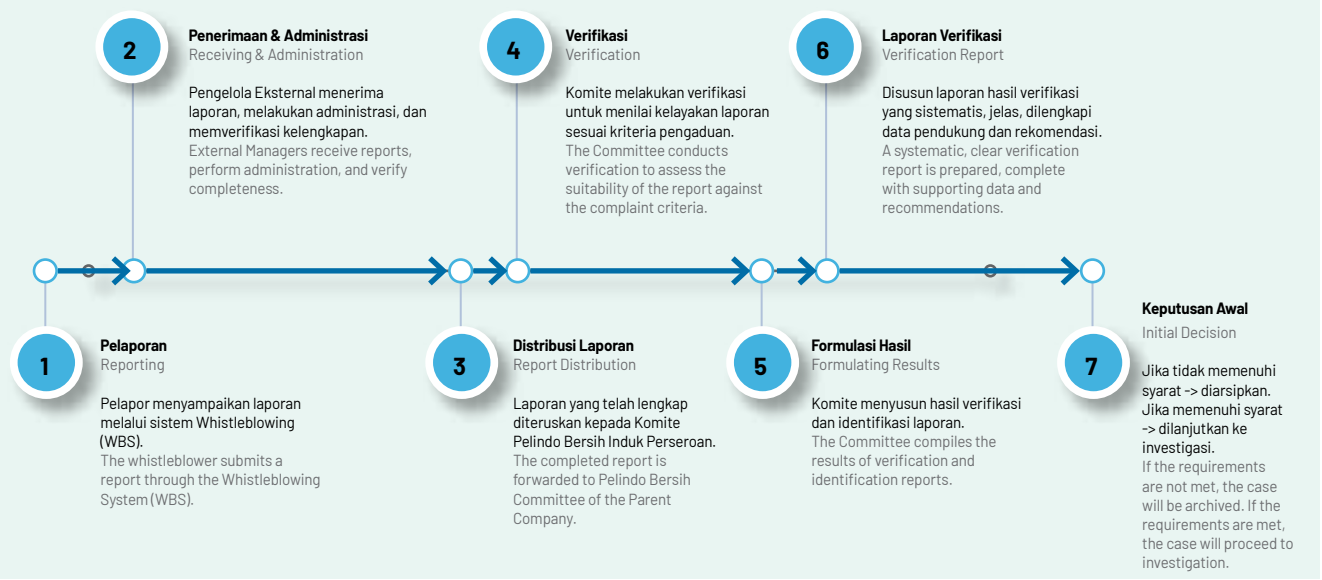

Alur Tindak Lanjut Laporan
Report Follow-up Flow

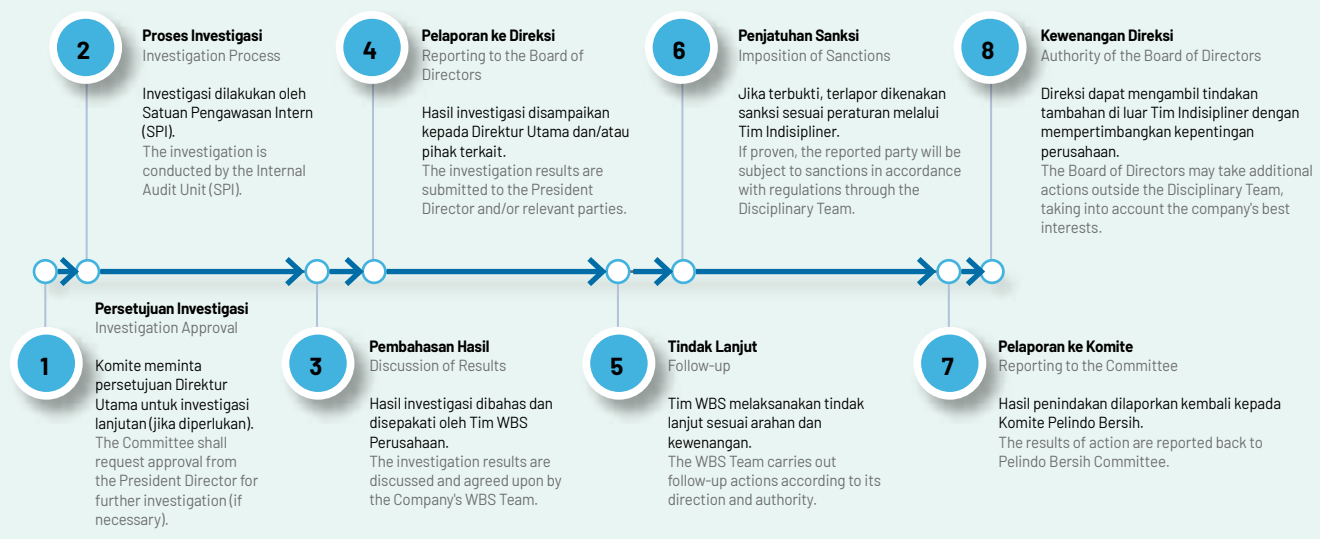

Mengacu pada alur proses yang ditampilkan dalam bagan tersebut, Perseroan telah menetapkan tahapan pelaporan yang terstruktur agar setiap pihak yang ingin menyampaikan pengaduan melalui WBS memiliki panduan yang jelas dan mudah diikuti. Adapun rincian mekanisme pelaporan pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Whistleblowing System Pelindo Bersih Induk Perseroan dibantu oleh Pengelola Eksternal yang merupakan pihak ketiga independen. Pengelolaan oleh pihak ketiga independen termasuk pada aktivitas penerimaan, administrasi, dan konfirmasi kelengkapan laporan yang kemudian diteruskan kepada Komite Pelindo Bersih Induk Perseroan;
2. Komite Pelindo Bersih Induk Perseroan melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor untuk menentukan pemenuhan syarat/kriteria pengaduan;

Referring to the process flow shown in the chart, the Company has established structured reporting stages, hence any party wishing to submit a complaint through the WBS has clear and easy-to-follow guidelines. The detailed reporting mechanism is as follows:

1. Management of the Whistleblowing System of the Parent Company's Pelindo Bersih Whistleblowing System is assisted by an External Manager, an independent third party. This independent third party management includes the receipt, administration, and confirmation of the completeness of the report, which is then forwarded to the Parent Company's Pelindo Bersih Committee;
2. The Parent Company's Pelindo Bersih Committee verifies the report submitted by the Whistleblower to determine whether the complaint meets the requirements/criteria;

3. Komite Pelindo Bersih Induk Perseroan selanjutnya memformulasikan hasil verifikasi dan identifikasi laporan;
4. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil verifikasi yang disusun secara sistematik, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan, serta dilengkapi data pendukung dan saran tindak lanjut;
5. Teknik verifikasi merupakan kerahasiaan dan kewenangan Komite Pelindo Bersih Induk Perseroan dengan prinsip-prinsip proporsional sebanding atas materi yang dilaporkan;
6. Jika diperlukan investigasi lebih lanjut, maka Komite Pelindo Bersih Induk Perseroan dapat meminta persetujuan Direktur Utama Induk Perseroan untuk pelaksanaan investigasi oleh fungsi Satuan Pengawasan Intern;
7. Apabila pengaduan tidak memenuhi syarat, maka Komite Pelindo Bersih Induk Perseroan tidak menindaklanjuti dan pengaduan disimpan dalam file berkas pengaduan;
8. Terhadap pengaduan yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama atau Direktur lainnya Induk Perseroan, Tim Whistleblowing System Perseroan melakukan tindak lanjut sesuai dengan tugas dan wewenangnya;
9. Hasil investigasi yang telah dibahas dan disepakati bersama Tim Whistleblowing System Perseroan disampaikan kepada Direktur Utama Perseroan dan/atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi investigasi;
10. Kepada pihak Terlapor yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perseroan dan/atau perundang-undangan. Penjatuhan hukuman dapat dilakukan oleh Tim Indisipliner. Tim Whistleblowing System Perseroan melaporkannya kepada Komite Pelindo Bersih Induk Perseroan;
11. Direksi Perseroan tetap mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan di luar Tim Indisipliner dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, terutama untuk menjaga nama baik Perseroan dan efektivitas penanganan pengaduan, tetapi tetap memberikan sanksi apabila terlapor terbukti bersalah.

3. The Holding Company's Pelindo Bersih Committee then formulates the results of verification and report identification;
4. The verification results are presented in a systematic, concise, clear, and accountable verification report containing conclusions, supporting data, and recommendations for follow-up actions;
5. Verification techniques are confidential and under the authority of the Parent Company's Pelindo Bersih Committee, with the principle of proportionality to the material reported;
6. If further investigation is required, Pelindo Bersih Committee of the Parent Company may request approval from the President Director of the Parent Company for the Internal Audit Unit to conduct an investigation;
7. If the complaint does not meet the requirements, Pelindo Bersih Committee of the Parent Company will not follow up and the complaint will be stored in the complaint file;
8. For complaints that have received approval from the President Director or other Directors of the Parent Company, the Company's Whistleblowing System Team will follow up in accordance with its duties and authorities;
9. The investigation results, discussed and agreed upon with the Company's Whistleblowing System Team, will be submitted to the Company's President Director and/or related parties for follow-up based on the results of the investigation evaluation;
10. Any reported party found guilty may be subject to sanctions in accordance with applicable Company regulations and/or laws. The imposition of sanctions may be carried out by the Disciplinary Team. The Company's Whistleblowing System Team will report the matter to Pelindo Bersih Committee of the Parent Company;
11. The Company's Board of Directors still has the authority to take action outside the Disciplinary Team by taking into account the interests of the Company, especially to maintain the Company's good name and the effectiveness of complaint handling, but still imposes sanctions if the reported party is proven guilty.

Media Pelaporan WBS

Para Pelapor baik dari pihak eksternal (masyarakat) dan internal (insan IPCC) dapat menyampaikan laporan pengaduan mereka melalui sarana berikut ini:

WBS Reporting Media

Whistleblowers from both external (community) and internal (IPCC personnel) parties can submit their complaint reports through the following means:

	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Telephone Phone	021-27822345
Faksimile Faximile	021-27823456
Surat Elektronik E-Mail	pelindobersih@whistleblowing.link
Situs Web Website	www.pelindobersih.pelindo.co.id
Surat Pos Letter	Pelindo Bersih, PO Box 1074, JKS 12010

Jumlah Laporan Pelanggaran Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Tim WBS Perseroan tidak menerima adanya laporan pengaduan terkait dengan tindakan pelanggaran aturan dan/atau kode etik, tindakan gratifikasi atau pun korupsi.

Number of Whistle Blowing Reports in 2025

Throughout 2025, the Company's UPG Team received no reports of complaints regarding violations of regulations and/or the code of conduct, acts of gratification or corruption.

No	Kejadian Mencurigakan Suspicious Incident	Jumlah Laporan Number of Reports
1	Tindakan Curang (Tidak Adil) Fraudulent (Unfair) Actions	0
2	Korupsi Corruption	0
3	Pencurian Thievery	0
4	Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan Violation of Company Policies and Regulations	0
5	Benturan Kepentingan Conflict of Interest	0
6	Penyuapan/Gratifikasi Bribery/Gratification	0
7	Penggelapan Embezzlemen	0
8	Penipuan Fraud	0
9	Pemerasan Extortion	0

Evaluasi Penerapan WBS Tahun 2025

Selama tahun 2025, Perseroan memandang bahwa pengelolaan WBS berjalan dengan baik selaras dengan ketentuan yang ditetapkan. Peran aktif Tim WBS terlihat dari berbagai upaya peningkatan pemahaman mengenai WBS, baik di lingkungan internal maupun kepada pihak eksternal seperti pelanggan dan mitra kerja, sehingga mekanisme pelaporan semakin dikenal dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

Di samping kegiatan sosialisasi, Tim WBS juga secara konsisten memastikan bahwa seluruh kanal pelaporan berfungsi sebagaimana mestinya serta melakukan penelaahan dan penanganan atas setiap pengaduan yang masuk sesuai prosedur yang berlaku. Berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan WBS sepanjang tahun 2025, Tim WBS IPCC menyimpulkan bahwa:

1. Tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran yang disampaikan melalui telephone 021-27822345.
2. Tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran yang disampaikan melalui surat elektronik pelindobersih@whistleblowing.link.
3. Tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran yang disampaikan melalui Faksimile 021-27823456.
4. Tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran yang disampaikan melalui situs web www.pelindobersih.pelindo.co.id.

Ketiadaan laporan pelanggaran yang tercatat melalui saluran resmi WBS sepanjang tahun 2025 dipandang Perseroan sebagai indikasi positif atas kualitas perilaku dan kepatuhan insan IPCC dalam menjalankan perannya masing-masing. Kondisi ini mencerminkan bahwa setiap karyawan telah melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, serta berpegang teguh pada nilai-nilai dan ketentuan yang termuat dalam Kode Etik IPCC. Dengan demikian, Perseroan menilai bahwa budaya etika dan kepatuhan telah terinternalisasi dengan baik dalam praktik kerja sehari-hari di seluruh lini organisasi.

Evaluation of WBS Implementation in 2025

Throughout 2025, the Company observed that WBS management proceeded smoothly in accordance with established regulations. The WBS Team's active role was evident in various efforts to enhance understanding of the WBS, both internally and among external parties such as customers and business partners, thereby increasing stakeholders' awareness of and trust in the reporting mechanism.

In addition to outreach activities, WBS Team consistently ensured that all reporting channels functioned properly and reviewed and addressed every complaint received in accordance with applicable procedures. Based on a comprehensive assessment of WBS implementation throughout 2025, IPCC WBS Team concluded that:

1. No violation reports were submitted by telephone at 021-27822345.
2. No violation reports were submitted by email at pelindobersih@whistleblowing.link.
3. No violation reports were submitted by fax at 021-27823456.
4. No violation reports were submitted through the website www.pelindobersih.pelindo.co.id.

No reports of violations were recorded through WBS's official channels throughout 2025, which the Company views as a positive indication of the quality of conduct and compliance among IPCC employees in carrying out their respective roles. This reflects that every employee has carried out their duties responsibly, upholding integrity, and adhering strictly to the values and provisions contained in the IPCC Code of Conduct. Consequently, the Company assesses that a culture of ethics and compliance has been well internalized in daily work practices across all levels of the organization.

Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services

Perseroan menyadari bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dari kelancaran operasional bisnis sehari-hari. Sebagai wujud penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan upaya mencegah potensi benturan kepentingan, Perseroan telah menetapkan Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang telah diperbarui dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.01/28/6/1/PGDN/DIRUT/IKT-24 tanggal 28 Juni 2024.

Pedoman ini menjadi acuan dalam menetapkan mekanisme pengadaan, penanggung jawab, serta prinsip-prinsip etika yang harus diikuti dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perseroan. Ruang lingkup pengadaan mencakup pembelian barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, serta layanan lain yang dibiayai dari dana internal Perseroan. Seluruh kegiatan pengadaan dilaksanakan dengan menekankan akuntabilitas, keadilan, dan kewajaran, sehingga mendukung terciptanya praktik bisnis yang transparan dan profesional.

Penanggung Jawab Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelola atau penanggung jawab kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa di Perusahaan adalah Unit Penyelenggara Pengadaan Perusahaan. Sementara proses pemilihan penyedia/pemasok/vendor dapat dilakukan oleh:

1. PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
2. PT Pelindo Multi Terminal (sebagai Sub-Holding);
3. Penyelenggara Pengadaan Perusahaan;
4. *Shared Service Centre* (SSC) Bidang Pengadaan; dan
5. Lembaga Profesional.

Adapun tugas dari penyelenggara pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Membuat dan memberitahukan Daftar Hitam (*Black List*) kepada Induk Perusahaan dan Subholding serta Pelaku Usaha Terseleksi yang masuk Daftar Hitam (*Black List*);
2. Melaksanakan proses Pemilihan Penyedia yang menjadi kewenangannya;
3. Membuat laporan atas setiap proses Pemilihan Penyedia maupun atas seluruh proses yang sedang dan sudah dilaksanakan secara periodik kepada Direktur Penyelenggara;
4. Menyimpan dan mengadministrasikan file/dokumen proses Pemilihan Penyedia;
5. Melakukan penanganan keluhan dari Peserta/Calon Penyedia selama Proses Pemilihan Penyedia; dan
6. Membuat daftar pencapaian baik (track record) Penyedia selama Proses Pemilihan Penyedia.

The Company recognizes that the procurement of goods and services is an essential part of the smooth operation of its daily business activities. As a manifestation of the implementation of Good Corporate Governance principles and efforts to prevent potential conflicts of interest, the Company has established updated Guidelines for Procurement of Goods and/or Services, which were approved via Board of Directors Decree No. HK.01/28/6/1/PGDN/DIRUT/IKT-24 dated June 28, 2024.

These Guidelines serve as a reference for establishing procurement mechanisms, assigning responsible parties, and outlining the ethical principles that must be followed in every goods and services procurement process within the Company. The scope of procurement covers the purchase of goods, construction work, consulting services, and other services funded from the Company's internal funds. All procurement activities are carried out with an emphasis on accountability, fairness, and reasonableness, thereby supporting the creation of transparent and professional business practices.

Unit in Charge for Procurement of Goods and Services

The manager or unit in charge of procurement of goods and/or services in the Company is the Company's Procurement Management Unit. Meanwhile, process of selecting providers/suppliers/vendors can be carried out by:

1. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
2. PT Pelindo Multi Terminal (as a Sub-Holding)
3. The Company's Procurement Management Unit
4. Procurement Shared Service Centre (SSC)
5. Professional Institutions.

The duties of procurement management unit are as follows:

1. Prepare and notify the Black List to the Parent Company and Subholding as well as Selected Business Actors who are on the Black List;
2. Carry out the Provider Selection process within its authority;
3. Prepare reports on each Provider Selection process and on all processes that are currently being and have been carried out periodically to Managing Director;
4. Storing and administering files/documents for Provider Selection process;
5. Handling complaints from Participants/Prospective Providers during Provider Selection Process;
6. Handling complaints from Participants/Prospective Providers during Provider Selection Process;

Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan harus menerapkan prinsip berikut:

1. Efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. dengan pengecualian untuk pengadaan barang dan jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan penghitungan semua biaya (*Total Cost of Ownership*);
2. Efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. Kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia yang berminat;
5. Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia yang memenuhi syarat;
6. Terbuka, berarti Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat; dan
7. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Etika Pengadaan Barang/Jasa

Para pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi etika dasar sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/Perusahaan.

Basic Principles of Procurement of Goods and Services

In the Procurement of Goods and Services, the Company must apply the following principles:

1. Efficient, means that the Procurement of Goods and Services must be managed to obtain the best and optimal results in a timely manner by using funds and capabilities as optimally as reasonably possible and not only based on the lowest price. An exception is made for the procurement of strategic goods and services that have significant value. An approach to calculating all costs (Total Cost of Ownership) can be made.
2. Effective, means that the Procurement of Goods and Services must be in accordance with predetermined needs and can provide maximum benefits in accordance with predetermined targets;
3. Competitive, means that the Procurement of Goods and Services must be open to Providers who meet the requirements and is carried out through fair competition among Providers who are equal and meet certain requirements/criteria based on clear and transparent provisions and procedures;
4. Transparent, means all provisions and information regarding the Procurement of Goods and Services, including technical procurement administration requirements, evaluation procedures, evaluation results, determination of prospective Providers, are open to interested Provider participants;
5. Fair and reasonable, means giving equal treatment to all eligible prospective Providers;
6. Openness, means that the Procurement of Goods and Services can be participated in by all qualified Providers; and
7. Accountable, means that it must achieve targets and be accountable so as to avoid potential abuse and irregularities.

Ethics in Procurement of Goods/Services

The parties involved in the process of implementing the Procurement of Goods/Services must adhere to the following basic ethics:

1. Carry out tasks in an orderly manner, full of a sense of responsibility responsibility to achieve the goals, smoothness and accuracy of procurement. purpose of Goods/Services Procurement.
2. Work professionally, independently, and maintain confidentiality of information that by its nature must be confidential to prevent irregularities in the Procurement of Goods and Services.
3. Not influencing each other either directly or indirectly not influence each other either directly or indirectly which results in unfair business competition;
4. Accept and be responsible for all decisions decisions made in accordance with the written agreement of the parties related parties.
5. Avoiding and preventing conflicts of interests of related parties, either directly or indirectly, which results in unfair business competition in the procurement of goods and services.
6. Avoiding and preventing waste and leakage of state/Company finances.

7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan/atau
8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa, serta secara konsisten menjalankan ISO 37001 Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Kebijakan Seleksi Pemasok

Kebijakan terkait seleksi pemasok di Perseroan diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diperbarui pada tahun sebelumnya. Berdasarkan pedoman tersebut, proses seleksi pemasok dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu tender/seleksi umum, tender terbatas/seleksi terbatas, dan penunjukan langsung. Tender atau seleksi umum dilakukan dengan pengumuman terbuka melalui minimal 1 (satu) surat kabar nasional dan situs web resmi Perseroan, sehingga memberikan kesempatan bagi seluruh Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi. Sementara itu, tender terbatas atau seleksi terbatas dilakukan dengan mengundang Pelaku Usaha yang sudah tercatat dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) sesuai bidang/sub-bidangnya. Metode penunjukan langsung diterapkan dengan menunjuk 1 (satu) Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria persyaratan penunjukan langsung, berdasarkan justifikasi dari Pengguna yang disetujui oleh Direktur atau Kepala Divisi Pengguna, atau melalui mekanisme *beauty contest*.

Hingga akhir tahun 2025, Unit Penyelenggara Pengadaan telah menyelesaikan 50 paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa, yang umumnya mencakup kebutuhan utama dan rutin untuk mendukung operasional Perseroan. Kegiatan ini meliputi pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, manage service, jasa konsultansi, jasa sertifikasi alat, pembangunan aplikasi, penyediaan tenaga kebersihan, dan layanan pendukung lainnya.

Total nilai seluruh paket pengadaan yang telah selesai hingga akhir 2025 mencapai Rp28.986.942.052, dari total Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate* (HPS/OE) sebesar Rp29.902.305.418. Selisih antara total nilai pekerjaan dan total HPS/OE menunjukkan adanya efisiensi sebesar Rp915.363.366, atau setara dengan 3,06% dari total HPS/OE. Hasil ini mencerminkan efektivitas Perseroan dalam mengelola proses pengadaan, sehingga mampu mencapai penghematan biaya tanpa mengurangi kualitas dan ruang lingkup pekerjaan, serta menunjukkan penerapan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam setiap tahapan pengadaan.

Dari sisi metode pemilihan penyedia, pengadaan barang dan jasa sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan melalui mekanisme yang beragam sesuai ketentuan Pedoman Pengadaan, yakni meliputi:
1. Tender Terbatas: 2 paket pekerjaan;
2. Penunjukan Langsung: 13 paket pekerjaan; dan
3. Pengadaan Langsung: 35 paket pekerjaan.

Sebagai bagian dari transformasi digital dalam pengadaan, Perusahaan telah mengimplementasikan aplikasi Pelindo Elektronik Procurement (P-Eproc) milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sejak 18 Agustus 2023. Dengan penggunaan sistem P-Eproc ini, seluruh pelaku usaha

7. Avoiding and preventing abuse of authority and/or collusion; and/or
8. Not accepting, not offering, or not promising to give or receive gifts, rewards, commissions, rebates, and anything from or to anyone who is known or suspected to be related to the Procurement of Goods and Services, and/or suspected to be related to the Procurement of Goods and Services, and consistently implement ISO 37001 Regarding Anti-bribery Management System.

Supplier Selection Policy

The Company's policies regarding supplier selection are set forth in the Guidelines for Procurement of Goods and Services, which were updated last year. In accordance with these guidelines, supplier selection is conducted through several mechanisms, namely open tender/selection, limited tender/selection, and direct appointment. Open tenders or general selection are conducted through public announcements in at least 1 (one) national newspaper and on the Company's official website, thereby providing an opportunity for all Business Entities that meet the requirements to participate. Meanwhile, limited tenders or limited selection are conducted by inviting Business Entities already listed in the List of Selected Business Entities (DPUT) according to their respective fields or sub-fields. The direct appointment method is applied by appointing one (1) business entity that meets the criteria for direct appointment, based on justification from the User approved by Director or Head of User Division, or through a beauty contest mechanism.

By the end of 2025, Procurement Unit had completed 50 procurement packages for goods and services, which generally covered primary and routine needs to support the Company's operations. These activities included repair and maintenance of facilities and infrastructure, managed services, consulting services, equipment certification services, application development, provision of cleaning staff, and other support services.

The total value of all completed procurement packages by the end of 2025 reached Rp28,986,942,052, out of a total Owner Estimate (HPS/OE) of Rp29,902,305,418. The difference between the total value of work and the total HPS/OE indicates an efficiency of Rp915,363,366.00, or equivalent to 3.06% of total HPS/OE. These results reflect the Company's effectiveness in managing the procurement process, enabling it to achieve cost savings without compromising the quality and scope of work, and demonstrating the application of principles of efficiency, accountability, and good governance at every stage of procurement.

In terms of the provider selection method, the procurement of goods and services in 2024 was carried out through several mechanisms as follows:
1. Limited Tender: 2 work packages;
2. Direct Appointment: 13 work packages;
3. Direct Procurement: 35 work packages.

As part of the digital transformation in procurement, the Company has implemented Pelindo Electronic Procurement (P-Eproc) application owned by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) since August 18, 2023. With the use of this P-Eproc system, all business actors who wish

yang ingin mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan diwajibkan untuk terdaftar dan memiliki status activated dalam sistem tersebut.

Survei Kepuasan Vendor

Perseroan melaksanakan survei kepuasan terhadap vendor dan pemasok sebagai upaya untuk memperoleh umpan balik yang konstruktif dari para mitra kerja. Hasil survei ini digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi dan menyempurnakan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perseroan, sehingga tercipta efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan yang lebih baik. Tujuan utama dari penyelenggaraan survei ini meliputi:

1. Mengukur nilai indeks kepuasan vendor terhadap layanan dan proses pengadaan Perseroan;
2. Mengidentifikasi aspek-aspek dalam proses pengadaan barang/jasa yang perlu ditingkatkan;
3. Mengukur nilai indeks engagement vendor terhadap hubungan kemitraan dengan Perseroan.

Pada tahun 2025, Perseroan tidak menyelenggarakan survei kepuasan vendor. Sebagai gambaran, berikut hasil survei terakhir yang dilakukan oleh Perseroan. Survei dilaksanakan pada 20 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024 terhadap 21 Perseroan/koperasi yang merupakan mitra/vendor Perseroan. Proses survei dilaksanakan oleh pihak independen, yaitu PT Multi Utama Risetindo.

to participate in the procurement process of goods and services within the Company are required to be registered and have activated status in the system.

Vendor Satisfaction Survey

The Company conducts a satisfaction survey of vendors and suppliers as part of its efforts to obtain constructive feedback from its business partners. The results of this survey are used as a basis for evaluating and improving the procurement process for goods and services within the Company, thereby fostering greater efficiency, transparency, and service quality. The primary objectives of this survey include:

1. Measuring the value of the vendor satisfaction index towards the Company's services and procurement process;
2. Identifying aspects in the procurement process of goods/services that need to be improved;
3. Measuring the value of the vendor engagement index towards the partnership relationship with the Company.

In 2025, the Company did not conduct a vendor satisfaction survey. For reference, the following are the results of the last survey conducted by the Company. The survey was conducted from December 20, 2023, to January 5, 2024, among 21 companies/cooperatives that are partners/vendors of the Company. The survey was conducted by an independent party, PT Multi Utama Risetindo.

Kebijakan Anti-Korupsi dan Anti-Gratifikasi
Anti-Corruption and Anti-Gratification Policy

Kebijakan

Perseroan berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam seluruh aspek operasional, termasuk mewujudkan lingkungan bisnis yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam interaksi dengan pihak ketiga, Perseroan menerapkan kebijakan pengelolaan gratifikasi yang disosialisasikan secara rutin kepada seluruh insan Perseroan agar memahami prosedur yang benar dalam menghadapi potensi suap atau hadiah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Seluruh aktivitas bisnis dijalankan dengan prinsip profesionalisme, integritas, independensi, dan keberlanjutan untuk meminimalkan risiko KKN serta memastikan praktik GCG berjalan optimal. Perseroan juga terus memperkuat kebijakan internal dan kapasitas sumber daya manusia agar program anti-korupsi dan anti-gratifikasi berjalan efektif, termasuk melalui penerapan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016.

Sebagai bagian dari implementasi program ini, Direksi dan Dewan Komisaris mendorong seluruh pihak yang mengetahui indikasi KKN untuk melaporkan temuan tersebut melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang dikelola oleh pihak eksternal independen, dengan ketentuan laporan gratifikasi disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan dan menyerahkan objek gratifikasi yang diterima. Selain itu, laporan terkait korupsi dan gratifikasi juga dapat disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL), di mana setiap laporan yang lengkap akan diproses dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur pelaporan dapat diakses melalui situs resmi GOL di www.gol.kpk.go.id dan situs web https://pelindobersih.pelindo.co.id

Prinsip Dasar Pengendalian Praktik Korupsi dan Gratifikasi di Lingkup Perusahaan

Perseroan menetapkan prinsip-prinsip dasar pengendalian korupsi dan gratifikasi sebagai pedoman strategis untuk mengarahkan seluruh kebijakan, prosedur, dan tindakan dalam mencegah, mengidentifikasi, serta menindak praktik-praktik yang tidak sesuai etika, seperti:

1. Korupsi, berupa penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi.
2. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas yang bisa memengaruhi objektivitas dan integritas seseorang dalam menjalankan tugasnya.
3. Suap, *kickbacks*, dan *fraud*, yaitu semua bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan etika dan hukum.

Policy

The Company is fully committed to implementing the principles of Good Corporate Governance in all aspects of its operations, including fostering a business environment free from corruption, collusion, and nepotism (KKN) in accordance with the provisions of Law No. 31 of 1999 concerning Corruption Crimes. In interactions with third parties, the Company implements a gratification management policy that is regularly communicated to all employees to ensure they understand the proper procedures for handling potential bribes or gifts that could lead to conflicts of interest.

All business activities are conducted based on the principles of professionalism, integrity, independence, and sustainability to minimize the risk of KKN and ensure that GCG practices operate optimally. The Company also continues to strengthen internal policies and human capital capacity to ensure that anti-corruption and anti-gratuity programs are effective, including through the implementation of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) Guidelines.

As part of the implementation of this program, Board of Directors and Board of Commissioners encourage all parties who are aware of indications of corruption, collusion, and nepotism to report these findings through the Whistleblowing System (WBS) managed by an independent external party, with the provision that the gratification report must be submitted no later than 7 (seven) working days from the date of receipt and delivery of the object of the gratification received. In addition, reports related to corruption and gratification can also be submitted to the Corruption Eradication Commission (KPK) through Gratification Online (GOL) application, where each complete report will be processed within a maximum of 30 (thirty) working days. Further information regarding reporting procedures can be accessed through the official GOL website at www.gol.kpk.go.id and the website https://pelindobersih.pelindo.co.id

Basic Principles of Controlling Corruption and Gratification Practices within the Company

The Company has established basic principles for controlling corruption and gratification as strategic guidelines to direct all policies, procedures, and actions aimed at preventing, identifying, and addressing unethical practices, such as:

1. Corruption, which involves the abuse of power or position for personal gain.
2. Gratification, referring to the giving of money, goods, or facilities that could influence a person's objectivity and integrity in performing their duties.
3. Bribery, kickbacks, and fraud, encompassing all forms of misconduct that violate ethics and the law.

Pengendalian praktik-praktik yang tidak etis tersebut dilaksanakan melalui berbagai kebijakan, program, dan prosedur yang terstruktur dan berkelanjutan, antara lain:

1. Penerapan Kebijakan Antikorupsi dan Antigratifikasi, yang menjadi pedoman bagi seluruh insan IPCC dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab;
2. Penerapan sistem pengendalian internal yang kuat guna memitigasi potensi terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan, pelayanan, maupun kegiatan operasional lainnya;
3. Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada karyawan mengenai etika bisnis, kebijakan antikorupsi, serta kewajiban pelaporan gratifikasi dan dugaan pelanggaran lainnya;
4. Pemberlakuan sistem pelaporan dugaan pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS) yang memberikan ruang aman bagi pelapor untuk menyampaikan indikasi praktik korupsi, penyuapan, gratifikasi, atau pelanggaran kode etik lainnya tanpa rasa takut terhadap pembalasan;
5. Penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk melalui penggunaan sistem elektronik (*e-procurement*) guna meminimalkan interaksi langsung yang berisiko membuka celah penyimpangan; dan
6. Pengawasan dan evaluasi berkala oleh unit pengawasan internal guna memastikan efektivitas implementasi kebijakan serta menindaklanjuti setiap laporan dan temuan terkait potensi penyimpangan.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan mekanisme pengendalian anti-korupsi serta anti-gratifikasi, Perseroan berupaya menanamkan budaya kerja yang transparan, profesional, dan berintegritas tinggi. Langkah ini tidak hanya mencegah terjadinya praktik korupsi dan gratifikasi, tetapi juga menjadi upaya strategis untuk menjaga kelangsungan operasional bisnis, memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, dan mendukung terciptanya iklim usaha yang etis, sehat, dan berkelanjutan di sektor kepelabuhanan.

Klasifikasi Gratifikasi dan Mekanisme Pelaporan

1. Menerima barang/jasa yang terindikasi objek Gratifikasi
   Penerimaan gratifikasi dapat diidentifikasi secara mandiri oleh karyawan sesuai dokumen gratifikasi perusahaan. Identifikasi penerimaan barang dapat dikonsultasikan langsung kepada Tim memastikan pemberian merupakan objek gratifikasi karyawan yang telah menerima gratifikasi dapat langsung melaporkan penerimaan gratifikasi.

   Laporan Gratifikasi disampaikan secara online melalui aplikasi Gratifikasi Laporan Gratifikasi akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK. Untuk informasi lebih lengkap dilihat di https://gol.kpk.go.id/

2. Mengisi Form Gratifikasi dan menyerahkan objek gratifikasi yang diterima
   Karyawan dapat juga melaporkan hasil penerimaan gratifikasi kepada Tim UPG dengan mengisi Form Gratifikasi selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi. Pelaporan gratifikasi beserta penyerahan objek gratifikasi yang telah diterima.

The control of these unethical practices is carried out through structured and continuous policies, programs, and procedures, including:

1. Implementation of Anti-Corruption and Anti-Gratification Policies, serving as guidelines for all IPCC personnel to perform their duties and responsibilities with honesty, transparency, and accountability;
2. Enforcement of a strong internal control system to mitigate potential deviations in procurement processes, services, and other operational activities;
3. Conducting regular awareness and education programs for employees on business ethics, anti-corruption policies, and the obligation to report gratifications and other suspected violations;
4. Implementation of a Whistleblowing System (WBS) that provides a safe channel for whistleblowers to report indications of corruption, bribery, gratification, or violations of code of conduct without fear of retaliation;
5. Applying principles of transparency and accountability in the procurement of goods and services, including the use of electronic systems (e-procurement) to minimize direct interactions that could create opportunities for misconduct;
6. Periodic monitoring and evaluation by the internal oversight unit to ensure the effectiveness of policy implementation and to follow up on any reports and findings related to potential misconduct.

By implementing anti-corruption and anti-gratification principles and control mechanisms, the Company strives to foster a work culture characterized by transparency, professionalism, and high integrity. This initiative not only prevents corruption and gratification but also serves as a strategic effort to ensure business continuity, strengthen stakeholder trust, and support the creation of an ethical, healthy, and sustainable business environment in the port sector.

Gratification Classification and Reporting Mechanisms

1. Receive goods/services that are indicated as Gratification objects
   Receiving gratuities can be identified independently by employees according to the Company's gratification documents. Identification of receipt of goods can be consulted directly with the Team to ensure that the gift is an object of gratification. Employees who have received gratification can immediately report receipt of gratification.

   Gratification reports are submitted online via the Gratification application. Gratification reports will be processed by the KPK within 30 (thirty) days when the report is declared complete and received by the KPK. For more information, see https://gol.kpk.go.id/

2. Filling out the Gratification Form and submit the object of gratification received
   Employees can also report the results of receiving gratuities to the UPG Team by filling in the Gratification Form no later than 7 working days after receiving the gratification. Gratification reporting along with delivery of gratification objects that have been received.

Untuk penerimaan Gratifikasi yang merupakan barang yang cepat kedaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda serah terima kepada Tim UPG selambat-lambatnya 7(tujuh)hari setelah tanggal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud.

For receipt of Gratification which are goods that expire quickly (for example: food and drink), it can be handed over to the Social Institution by submitting proof of handover to the UPG Team no later than 7 (seven) days after the date of receipt of the Gratification as intended.

3. Membuat laporan non-gratifikasi
Jika ternyata laporan karyawan atas pemberian yang diterimanya tidak masuk dalam objek gratifikasi maka Tim UPG membuat laporan atas hasil klarifikasi.

3. Making a non-gratification report
If it turns out that the employee's report regarding the gift they received is not included in the gratification object, the UPG Team will make a report on the clarification results.

4. Mengembalikan barang ke karyawan terkait
Tim UPG mengembalikan barang yang telah dilaporkan karyawan berdasarkan Form Gratifikasi yang diisi dan diserahkan ke Tim UPG.

4. Return the goods to the relevant employee
The UPT Team returns items that have been reported by employees based on the Gratification Form which is filled in and submitted to UPG Team.

5. Membuat laporan gratifikasi
Tim UPG menerima seluruh laporan gratifikasi dari Pegawai dan menyusun laporan gratifikasi serta hasil klarifikasi terhadap penerimaan barang. Untuk barang dalam kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporka ke KPK, maka Tim UPG dapat langsung memutuskan untuk menyalurkan barang gratifikasi ke pihak yang membutuhkan sesuai ketetapan KPK.

Penyaluran barang oleh Tim UPG disertai dengan bukti penyaluran barang.

5. Making a gratification report
The UPG Team receives all gratification reports from employees and prepares gratification reports as well as clarification results regarding the receipt of goods. For items in the gratification category that do not have to be reported to KPK, UPG Team can immediately decide to distribute gratuity items to parties who need them according to KPK regulations.

The distribution of goods by the UPG Team is accompanied by proof of distribution.

6. Melaporkan hasil penyaluran barang gratifikasi ke KPK
Setelah barang disalurkan, Tim UPG melaporkannya bersama dengan bukti penyaluran barang. Laporan gratifikasi harus disampaikan secara online dan akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web resmi KPK di https://gol.kpk.go.id/.

6. Report the distribution of gratuities to KPK
After the goods are distributed, the UPG Team reports it along with proof of distribution of the goods. Gratification reports must be submitted online and will be processed by the KPK within 30 working days after the report is declared complete and received by the KPK. For further information, visit the official KPK website at https://gol.kpk.go.id/.

7. Menunggu hasil ketetapan KPK oleh Tim UPG
Setelah laporan selesai dilakukan dan lengkap sesuai dengan ketentuan KPK, Tim UPG akan menunggu hasil ketetapan dari KPK.

7. Waiting for the results of KPK decision by UPG Team
After the report is completed and complete in accordance with KPK regulations, the UPG Team will wait for the results of KPK decision.

8. Melaksanakan hasil ketetapan KPK oleh Tim UPG
Berdasarkan hasil ketetapan KPK, Tim UPG akan menindaklanjuti seluruh putusan dan mempersiapkan bukti hasil tindakan yang berlaku.

8. Implementing the results of KPK decisions by the UPG Team
Based on the results of the KPK's decision, the UPG Team will follow up on all decisions and prepare evidence of the applicable actions results.

9. *Monitoring* dan Evaluasi efektivitas penanganan Gratifikasi
EVP Sekretariat Perusahaan secara rutin melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap efektivitas penanganan gratifikasi bersama dengan Tim UPG.

9. Monitoring and evaluating the effectiveness of handling gratification
EVP Corporate Secretariat routinely monitors and evaluates the effectiveness of handling gratuities together with the UPG Team.

10. Menyalurkan barang gratifikasi oleh karyawan
Karyawan dapat langsung menyalurkan barang yang diterima yang wajib dilaporkan ke KPK. Barang dalam kategori yang tidak wajib dilaporkan sesuai ketentuan KPK, maka dapat diserahkan kepada lembaga sosial dengan disertai bukti tanda serah terima.

10. Distributing gratuity by employees
Employees can directly distribute goods received which must be reported to the Corruption Eradication Commission. Goods in categories that do not have to be reported according to KPK regulations can be handed over to social institutions accompanied by proof of handover.

Sosialisasi Kebijakan Anti-korupsi Tahun 2025

Perseroan menerapkan pedoman pengendalian gratifikasi, pungutan liar (pungli), dan WBS yang wajib ditaati oleh seluruh karyawan. Agar memastikan pemahaman yang seragam mengenai penerapan pedoman tersebut di lingkungan Perseroan, kegiatan sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh pihak internal maupun eksternal, dengan ketentuan:

1. Pemahaman terhadap Pedoman Pengendalian Internal harus dijadikan acuan oleh seluruh insan IPCC maupun oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan Perseroan yang bebas dari praktik KKN dan IPCC bersih.
2. Bagi pihak internal, sosialisasi diarahkan agar seluruh karyawan mengambil sikap tegas terhadap praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi di Perseroan.
3. Bagi pihak eksternal, sosialisasi diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan oleh Perseroan sehingga terwujud proses bisnis yang sehat serta bebas dari aktivitas yang dapat merugikan Perseroan.
4. Sosialisasi yang berkelanjutan dilakukan untuk memudahkan dan memastikan bahwa seluruh insan IPCC maupun pihak lain mengetahui adanya Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Sepanjang tahun 2025, telah dilakukan beberapa kegiatan sosialisasi terkait kebijakan anti korupsi di Lingkungan Perseroan. Salah satu kegiatannya adalah Sosialisasi IPCC Bersih dengan Tema "IPCC Bersih: Satukan Aksi, Basmi Korupsi!" dengan Narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Perwakilan Group Head Manajemen Risiko dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Acara sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025 dan dihadiri lebih dari 85 (delapan puluh lima) peserta baik dari Pihak Eksternal dan Internal Peseroan.

Socialization of Anticorruption Policy in 2025

The Company has implemented guidelines on the control of gratuities, illegal levies (extortion) and WBS, which all employees must comply with. To ensure a uniform understanding of the implementation of these guidelines within the Company, awareness-raising activities are conducted on an ongoing basis for all internal and external parties, subject to the following conditions

1. An understanding of Internal Control Guidelines must be used as a reference by all IPCC personnel and by all stakeholders in realizing the management of the Company that is free from corrupt, collusive, and nepotistic practices and IPCC Bersih.
2. For internal parties, socialization is directed so that all employees take a firm stance towards the practice of accepting and giving gratuities in the Company.
3. For external parties, socialization is directed at providing an understanding of the Gratification Control Guidelines established by the Company so that a healthy business process is created and free from activities that could harm the Company.
4. Continuous outreach is carried out to facilitate and ensure that all IPCC personnel and other parties are aware of Gratification Control Guidelines.

Throughout 2025, several socialization activities related to anti-corruption policies have been carried out within the Company. One of the activities was IPCC Bersih Socialization with the theme "Clean IPCC: Unite Action, Eradicate Corruption!" with speakers from the Corruption Eradication Commission (KPK) and representatives of Group Head of Risk Management and Governance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). This socialization event was held on December 22, 2025 and was attended by more than 85 (eighty-five) participants from both External and Internal Parties of the Company.

Kebijakan Untuk Mencegah Terjadinya *Insider Trading*
Policy to Prevent Insider Trading

Perseroan menerapkan Kebijakan *Insider Trading* yang diatur melalui Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.01/19/8/1/SKPR/DIRUT/IKT-2024 tentang Pencegahan Transaksi oleh Orang Dalam (*Insider Trading*). Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan informasi non-publik yang dimiliki oleh pihak internal Perseroan dalam melakukan transaksi efek, termasuk tetapi tidak terbatas pada saham, *right*/HMETD, obligasi, dan surat utang menengah.

Insider trading terjadi ketika seseorang menggunakan informasi internal yang bersifat material dan belum dipublikasikan untuk memperoleh keuntungan di pasar modal, yang dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Oleh sebab itu, Perseroan secara tegas melarang setiap pemanfaatan informasi internal atau informasi orang dalam untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi di pasar modal. Larangan ini mencakup berbagai bentuk transaksi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau penyalahgunaan informasi Perseroan, termasuk:

1. Melakukan pembelian atau penjualan atas efek Perseroan;
2. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan efek Perseroan; atau
3. Memberi Informasi Pihak Internal/Orang Dalam kepada pihak lain yang patut diduga dapat memanfaatkan Informasi Pihak Internal/Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan efek Perseroan.

Pihak Internal/Orang Dalam Perseroan sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya yang memiliki akses terhadap informasi Perseroan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia, bertanggung jawab untuk:
1. Melindungi tnformasi Rahasia Perusahaan, baik saat masih aktif bekerja maupun sudah tidak bekerja atau tidak mempunyai ikatan kerjasama dengan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Menggunakan informasi Perseroan, baik yang bersifat umum maupun khusus, hanya untuk kepentingan Perusahaan; dan
3. Tidak melakukan penyebaran informasi yang bersifat rahasia, baik secara lisan maupun tulisan, kepada pihak lain berupa perseorangan, Perusahaan, asosiasi, atau badan hukum lainnya.

Pihak internal atau orang dalam Perseroan dilarang melakukan tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan Perseroan. Seluruh orang dalam juga diwajibkan untuk tidak melakukan transaksi jual-beli efek Perseroan selama Periode *Black Out* atau periode lain yang ditetapkan oleh Direksi, sehubungan dengan pengumuman informasi terkait aksi korporasi Perseroan.

The Company implements an Insider Trading Policy governed by PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Directors Regulation No. HK.01/19/8/1/SKPR/DIRUT/IKT-2024 on the Prevention of Insider Trading. This policy aims to prevent the misuse of non-public information held by the Company's internal parties in conducting securities transactions, including but not limited to shares, rights/HMETD, bonds, and medium-term notes.

Insider trading occurs when a person uses material, non-public internal information to gain an advantage in the capital market, which is classified as an illegal act. Therefore, the Company strictly prohibits any use of internal information or insider information for the purpose of obtaining personal gain in the capital market. This prohibition covers various forms of transactions that may give rise to conflicts of interest or the misuse of Company information, including:

1. Purchasing or selling the Company's securities;
2. Influencing others to purchase or sell the Company's securities; or
3. Providing Insider/Internal Party information to other parties who might reasonably be expected to use the information for purchasing or selling the Company's securities.

Internal Parties/Insiders of the Company, in accordance with their authority and scope of work and who have access to the Company's information, whether public or confidential, are responsible for:

1. Protecting the Company's Confidential Information, both while still employed and after the employment or contractual relationship with the Company has ended, in accordance with applicable laws and regulations;
2. Using the Company's information, whether public or confidential, solely for the interests of the Company; and
3. Refraining from disseminating confidential information, either verbally or in writing, to individuals, companies, associations, or other legal entities.

Internal Parties/Insiders of the Company are prohibited from engaging in actions that create conflicts of interest and from taking personal advantage other than for the benefit of the Company, in any decision-making and/or implementation carried out for the Company. Any Insider is not permitted to engage in trading activities (buying or selling) of the Company's securities during a Blackout Period or any other period as determined by the Company's Board of Directors from time to time, in connection with the disclosure of Corporate actions conducted by the Company.

Selain itu, setiap pihak yang dengan sengaja memperoleh atau memanfaatkan informasi orang dalam secara ilegal tunduk pada larangan yang sama dengan ketentuan bagi pihak internal Perseroan. Contoh tindakan yang tergolong melawan hukum mencakup berbagai bentuk, antara lain:

1. Berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara mencuri;
2. Berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara membujuk orang dalam; dan
3. Berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara kekerasan atau ancaman.

Kebijakan ini merupakan bagian dari penerapan praktik terbaik (*best practice*) GCG, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan informasi material oleh pihak internal Perseroan. Kebijakan *Insider Trading* IPCC berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan internal, khususnya anggota Direksi, Dewan Komisaris, pejabat struktural, serta karyawan lainnya yang memiliki akses terhadap informasi material Perseroan. Perseroan juga berupaya kuat meminimumkan peluang *Insider trading* antara lain dengan cara:

1. Memisahkan secara tegas data atau informasi yang dikategorikan Informasi Pihak Internal/Orang Dalam dengan data atau informasi yang bersifat publik;
2. Membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud; dan
3. Menandatangani *non-disclosure agreement* pada saat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

In addition, any party that unlawfully attempts to obtain, or ultimately obtains, Insider Information is subject to the same prohibitions that apply to the Company's Internal Parties/Insiders as mentioned above. Examples of unlawful acts include:

1. Attempting to obtain Insider Information by stealing;
2. Attempting to obtain Insider Information by persuading an insider; and
3. Attempting to obtain Insider Information through violence or threats.

This policy is part of the implementation of best practices in Good Corporate Governance (GCG), aimed at preventing the misuse of material information by the Company's internal parties. IPCC's Insider Trading Policy applies to all internal stakeholders, especially members of Board of Directors, Board of Commissioners, structural officers, and other employees who have access to the Company's material information. The Company also strives to minimize insider trading opportunities, including by:

1. Clearly separating data or information categorized as Insider/ Internal Party Information from public information;
2. Dividing tasks and responsibilities for the management of such information; and
3. Signing a non-disclosure agreement when engaging in cooperation with third parties.

Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Implementation of State Official Wealth Reporting (LHKPN)

Sebagai anak perusahaan BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta pejabat struktural Perseroan termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara. Oleh karena itu, mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan serta mengumumkan kekayaan sebelum memulai masa jabatan dan setelah mengakhiri masa jabatan. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

As a subsidiary of a State-Owned Enterprise (SOE) owned by the Government of Indonesia, members of Board of Directors, Board of Commissioners, and the Company's executive officials are classified as Public Officials. Therefore, they are obliged to report and disclose their assets before and after taking office. Provisions regarding this matter are set forth in Law No. 28 of 1999 concerning Implementation of a Clean State Free from Corruption, Collusion and Nepotism.

Pelaporan LHKPN Perusahaan

Perseroan telah menetapkan kebijakan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor HK.56/3/5/IKT-22 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN mencakup seluruh anggota Direksi serta pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Company LHKPN Report

The Company has established a policy for reporting the State Officials' Asset Reports (LHKPN) through the Board of Commissioners and Board of Directors Joint Decree No. HK.56/3/5/IKT-22 dated December 19, 2022 concerning Wealth Reporting Guidelines for Board of Commissioners and Board of Directors. Pursuant to these provisions, parties required to report the LHKPN are the Board of Directors and Officials 1 (one) level below the Board of Directors.

Pengelola LHKPN

Pengelolaan LHKPN di IPCC dilakukan oleh Senior Manager Sekretaris Perusahaan.

LHKPN Management

The LHKPN management in IPCC is carried by the Senior Manager of Corporate Secretary.

Transparansi LHKPN Pejabat Tahun 2025

Berikut disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perseroan yang berstatus wajib lapor di tahun 2025, yaitu level Dewan Komisaris dan Direksi dengan jumlah wajib lapor sebanyak 6 (enam) orang dan seluruh wajib lapor (100%) telah menyerahkan LHKPN kepada regulator.

Officials' LHKPN Transparency in 2025

The following is the transparency of LHKPN submission of Company officials with mandatory reporting status in 2025, i.e. the level of Board of Commissioners and Board of Directors with a total of 6 (six) mandatory reporters and all mandatory reporters (100%) have submitted LHKPN to the regulator.

Lewat Pejabat Office Position	Jumlah Wajib Lapor Number of Mandatory Reports	Jumlah yang Sudah Melaporkan Number of Persons Who Have Reported	
		Jumlah Total	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	3	3	100
Direksi Board of Directors	3	3	100

Informasi Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik
Donation to Political Activity

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak pernah mengikuti aktivitas perpolitikan dan tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik.

Throughout 2025, the Company has never participated in any political activities and has never provided funds for any political parties.

Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Direksi dan Dewan Komisaris Apabila Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan
Policy for Dismissal of Board of Directors and Board of Commissioners if Engaged in Financial Crimes

Kebijakan pengunduran diri maupun pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diatur secara jelas di dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual* PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Tahun 2022 yang telah disetujui dan ditandatangani bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

The policy of resignation and dismissal of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company has been clearly regulated in the Company's Articles of Association and the 2022 Board Manual of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk which has been approved and signed jointly by Board of Commissioners and Board of Directors

Transparansi Praktik *Bad Governance*
Transparency on Bad Governance Practices

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak mendapat laporan terkait aktivitas Perseroan yang mencemari lingkungan.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menghadapi permasalahan terkait perpajakan. Perseroan senantiasa berupaya menjalankan seluruh kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak secara patuh dan tepat waktu. Pengelolaan urusan pajak di lingkungan Perseroan berada di bawah tanggung jawab Senior Manager Keuangan, yang memiliki peran dan kewajiban antara lain:

1. Bertanggung jawab terhadap analisa pengaruh dari regulasi pajak terhadap Perseroan dan pembayaran serta pelaporan pajak;
2. Melakukan evaluasi pajak Perseroan seperti pelaksanaan audit pajak, penerapan ketentuan pajak dan sengketa pajak Perseroan; dan
3. Bertanggung jawab audit laporan keuangan Perseroan untuk mendukung pencapaian target sesuai dengan tugasnya.

Hingga akhir 2025, kontribusi Perseroan kepada negara sebesar Rp140.401 juta melalui pembayaran pajak, mengalami peningkatan 39,07% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp100.695 juta. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Report on Company Activities Polluting the Environment

Throughout 2025, the Company received no reports regarding the Company's activities that pollute the environment.

Disclosure of Tax Obligations Fulfillment

Throughout 2025, the Company did not encounter any tax-related issues. The Company consistently strives to fulfill all its tax obligations as a taxpayer in a compliant and timely manner. The management of tax matters within the Company falls under the responsibility of Senior Manager of Finance, whose roles and responsibilities include:

1. Responsible for analyzing the impact of tax regulations on the Company and tax payments and reporting;
2. Conducting evaluations of the Company's taxes such as implementing tax audits, implementing tax provisions and the Company's tax disputes;
3. Responsible for auditing the Company's financial statements to support the achievement of targets in accordance with its duties.

Until the end of 2025, the Company's contribution to the state amounted to Rp140,401 through tax payments, an increase/decrease of 39.07% from the previous year, amounting to Rp100,695 million. The details are as follows:

	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	**Pesentase (%)** Percentage
Pajak Penghasilan Income Tax				
PPh 21	13.350	16.377	(3.027)	18,48
PPh 23	4.938	3.966	972	24,51
PPh 25	51.486	36.213	15.273	42,18
PPh 4 (2)	2.806	1.235	1.571	127,21
PPh 26	1.311	771	540	70,04
Jumlah Setoran Pajak Penghasilan Amount of Income Tax Deposits	73.891	58.561	15.330	26,18
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Value Added Tax (VAT)	57.906	34.463	23.443	68,02
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Land and Building Tax (PBB)	8.244	7.671	573	7,47
Jumlah Setoran Pajak Amount of Tax Deposits	**140.041**	**100.695**	**39.346**	**39,07**

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Informasi, analisis, dan pembahasan kinerja pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan periode 2025 dan 2024 yang masing-masing telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja. Laporan Keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Keuangan

Berdasarkan ketentuan PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi, Perseroan mengelompokkan kegiatan operasionalnya menurut jenis usaha dan wilayah geografis untuk mendukung kebutuhan manajemen dalam pemantauan kinerja. Pengelompokan segmen ini disajikan secara rinci dalam Laporan Keuangan Audit tahun 2025, yang mencakup:

1. Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang;
2. Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas;
3. Segmen geografis.

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Digital

Laporan Tahunan IPCC baik yang disampaikan kepada pemegang saham, investor, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perseroan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perseroan.

Incompatibility in the Presentation of Annual Reports and Financial Statements with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

The information, analysis and discussion of performance in this annual report refers to the Company's Financial Report for the 2025 and 2024 periods, each of which has been audited by the Purwanto Susanti & Surja Public Accounting Firm. The Company's Financial Reports are prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), which includes Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Indonesian Accountants Association and Capital Market Regulations that applies, among other things, Regulation of the Capital Markets and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 concerning Guidelines for Presenting Financial Reports, Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 concerning Presentation and Disclosure of Financial Reports of Issuers or Public Companies.

Disclosure of Operating Segments in Financial Statements

In accordance with the provisions of PSAK No. 5 (2015 Amendment) on Operating Segments, the Company classifies its operating activities by business type and geographic region to support management's performance monitoring needs. This segment classification is presented in detail in the 2025 Audited Financial Statements, which include:

1. Terminal Services and Goods Services;
2. Miscellaneous Services, Facilities and Utility Operations;
3. Geographic segments.

Conformity of Annual Report Books and Digital Annual Reports

IPCC Annual Report, whether submitted to shareholders, investors, stakeholders, or uploaded on the Company's official website, is in accordance with the Annual Report book printed and published by the Company

PELINDO
MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN

07

Laporan Keuangan
Financial Report





PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements as of December 31, 2025 and
for the year then ended with independent auditor's report

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		*Statement of Directors*
Laporan Auditor Independen	i-x	*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan	1-2	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	4	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	5	*Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	6-77	*Notes to the Financial Statements*

****

PELINDO
MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/*Name*
   Alamat kantor/*Office address*

   Alamat domisili/*Domicile address*

   Nomor telepon/*Telephone number*
   Jabatan/*Title*
2. Nama/*Name*
   Alamat kantor/*Office address*

   Alamat domisili/*Domicile address*

   Nomor telepon/*Telephone number*
   Jabatan/*Title*

menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perusahaan") pada tanggal 31 Desember 2025
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
4. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili direksi

DIRECTOR'S STATEMENT ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND FOR
THE YEAR THEN ENDED
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

We, the undersigned:

1. Sugeng Mulyadi
   Jl. Sindang Laut No.100 RT.001/RW.011 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara 14110
   Jl. Haljan No. 302
   RT.005/ RW.001 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara
   021-43932251
   Direktur Utama/*President Director*
2. Wing Megantoro
   Jl. Sindang Laut No.100 RT.001/RW.011 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara 14110
   Jl. Guntur Raya B-2/12 RT.007/RW.019 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan
   021-43932251
   Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko/ *Finance, Human Resources & Risk Management Director*

declare that:

1. *Directors are responsible for the preparation and presentation of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (the "Company") financial statements December 31, 2025*
2. *The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements.*
   b. The Company's financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. *Directors are responsible for the Company's internal control systems*

This statement has been made truthfully.

For and on behalf of directors

Jakarta, 25 Maret/ *March* 25, 2026

Sugeng Mulyadi
Direktur Utama/ *President Director*

Wing Megantoro
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko/ *Finance, Human Resources and Risk Management Director*

Shape the future with confidence

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026

The Shareholders, the Boards of Commissioners and the Boards of Directors
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2025 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026 (lanjutan)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal-hal paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, memberikan dasar bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026 (continued)

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Hal audit utama (lanjutan)

Pengakuan pendapatan

Penjelasan atas hal audit utama:

Pendapatan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp929,96 miliar, terutama atas jasa bongkar muat serta penanganan kendaraan dan kargo di Pelabuhan, beserta jasa terkait lainnya. Hal ini merupakan ukuran penting yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Perusahaan dan merupakan pendorong utama profitabilitas. Pendapatan dicatat ketika kendali atas jasa telah dialihkan kepada pelanggan pada waktu tertentu dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Perusahaan dapat diperoleh sebagai pertukaran atas jasa tersebut.

Pendapatan mungkin diakui secara tidak tepat, sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya hasil usaha dan mencapai pertumbuhan pendapatan yang dapat meningkatkan risiko salah saji material. Karena signifikansi nilai keuangannya, kesalahan penyajian atas pendapatan dapat memiliki dampak substansial pada laporan keuangan secara keseluruhan dan keputusan yang dibuat oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan merupakan hal audit utama bagi kami. Catatan 2, 19 dan 28 pada laporan keuangan terlampir menyajikan pengungkapan atas pendapatan Perusahaan.

Key audit matters (continued)

Revenue recognition

Description of the key audit matter:

The Company's revenue for the year ended December 31, 2025 amounted to Rp929.96 billion, which primarily arising from stevedoring and handling services for vehicles and cargo in the port, and other related services. This is an important measure used to evaluate the performance of the Company and is the main driver of profitability. The revenue is recognized when control of the service is transferred to the customer at a point in time within the amount that reflects the consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for those services.

Revenue may be inappropriately recognized, which can lead to increased business results and revenue growth that may elevate the risk of material misstatement. Due to its financial significance, misstatement in revenue can have a substantial impact on the overall financial statements and the decisions made by stakeholders. Accordingly, revenue recognition is determined as a key audit matter. Notes 2, 19 and 28 to the accompanying financial statements provide the relevant disclosures on the Company's revenue.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Hal audit utama (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Respons audit:

Kami mengevaluasi dan menguji rancangan dan efektivitas kendali utama atas proses pendapatan. Kami melakukan pengujian rinci atas transaksi pendapatan berbasis sampel dengan melakukan verifikasi ke dokumen pendukungnya untuk memastikan keterjadian atas pendapatan dan apakah pendapatan tersebut telah diakui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta dicatat pada periode yang tepat. Kami juga melakukan pengujian rinci atas pendapatan yang dicatat menjelang dan tepat setelah tanggal 31 Desember 2025 untuk memastikan bahwa transaksi ini telah diakui pada periode yang tepat.

Kami melakukan pengujian rinci dengan menentukan akun buku besar yang digunakan untuk mencatat entri antara pendapatan, piutang usaha, serta kas dan bank, serta menggunakan korelasi (pencatatan entri jurnal) antara tiga akun tersebut untuk melakukan kembali (reperform) pencatatan entri jurnal. Kami melengkapi prosedur ini dengan pengujian informasi yang dihasilkan oleh Perusahaan atas entri jurnal kas untuk memastikan bahwa kas tersebut adalah kas sebenarnya yang berasal dari pelanggan. Kami juga mengevaluasi kecukupan penyajian dan pengungkapan yang relevan terkait pendapatan dalam catatan atas laporan keuangan terlampir.

Key audit matters (continued)

Revenue recognition (continued)

Audit response:

We evaluated and assessed the design and operating effectiveness of the key controls over the revenue process. We performed test of details on sample basis for the revenue transactions by verifying the supporting documents to ensure the occurrence of the revenue and whether such revenue has been recognized in accordance with the applicable accounting standards and recorded in the proper period. We also performed test of detail on revenues recorded immediately before and after December 31, 2025 to ensure that these transactions were recognized in the correct period.

We performed test of details by identifying which general ledger accounts are used to post entries between revenue, trade receivables and cash and banks, and use the correlation (journal entry postings) between three accounts to reperform the posting of journal entries. We supplemented this procedure by testing the information produced by the Company over cash journal entries to ensure it is real cash from customers. We also evaluated the adequacy of the presentation and relevant disclosures related to revenue in the notes to the accompanying financial statements.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2025 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam pelaksanaannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026 (continued)

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in 2025 Annual Report ("The Annual Report") other than the accompanying financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Company or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of such financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, serta mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Mento

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1562/*Public Accountant Registration No. AP.1562*

25 Maret 2026/*March 25, 2026*

A member firm of Ernst & Young Global Limited

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/*December 31,*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	1.082.282.254	4,24a,25,26	810.397.210	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto		5,25,26		*Trade receivables - net*
Pihak ketiga	69.283.162		79.921.135	*Third parties*
Pihak berelasi	1.233.153	24b	287.900	*Related parties*
Beban dibayar di muka	804.464		248.602	*Prepaid expenses*
Uang muka	1.654.592	6	1.426.726	*Advances*
Aset kontrak		7,25,26		*Contract assets*
Pihak ketiga	1.418.247		4.563.725	*Third parties*
Pihak berelasi	13.101.399	24c	4.590.265	*Related parties*
Pajak dibayar dimuka	1.430.088	14a	-	*Prepaid taxes*
TOTAL ASET LANCAR	**1.171.207.359**		**901.435.563**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap - neto	340.338.357	8	348.650.706	*Fixed assets - net*
Aset takberwujud - neto	1.903.229	9	3.224.301	*Intangible assets - net*
Aset hak-guna - neto	488.841.353	10	536.361.278	*Right-of-use assets - net*
Aset pajak tangguhan - neto	52.786.724	14e	57.911.494	*Deferred tax assets - net*
Aset tidak lancar lainnya	3.154.996	24d,25,26	3.154.996	*Other non-current assets*
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**887.024.659**		**949.302.775**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
TOTAL ASET	**2.058.232.018**		**1.850.738.338**	***TOTAL ASSETS***

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/*December 31,*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha		11,25,26		*Trade payables*
Pihak ketiga	10.915.012		6.688.005	*Third parties*
Pihak berelasi	35.465.738	24e	40.615.547	*Related parties*
Utang lain-lain		12,25,26		*Other payables*
Pihak ketiga	725.897		1.450.149	*Third parties*
Pihak berelasi	4.542.396	24f	4.037.966	*Related parties*
Beban akrual	96.300.539	15,25,26	65.690.863	*Accrued expenses*
Utang dividen	47.574.220	18,24h	-	*Dividen payable*
Utang pajak	18.595.791	14b	20.337.635	*Taxes payable*
Liabilitas jangka pendek lainnya		13,25,26		*Other current liabilities*
Pihak ketiga	5.129.134		4.728.244	*Third parties*
Pihak berelasi	1.692.206	24g	1.305.051	*Related parties*
Bagian lancar atas liabilitas sewa	55.623.690	10,25,26	40.418.552	*Current portion of lease liabilities*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**276.564.623**		**185.272.012**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas sewa	420.866.164	10,25,26	388.237.935	*Lease liabilities*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**420.866.164**		**388.237.935**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
TOTAL LIABILITAS	**697.430.787**		**573.509.947**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham				*Share capital - par value Rp100 (full amount) per share*
Modal dasar - 5.000.000.000 Saham				*Authorized capital - 5,000,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.818.384.820 saham	181.838.482	16	181.838.482	*Issued and fully paid capital - 1,818,384,820 shares*
Tambahan modal disetor	749.460.284	17	749.460.284	*Additional paid-in capital*
Saldo laba				*Retained earnings*
Cadangan umum	12.000.000	18	10.000.000	*General reserve*
Belum ditentukan penggunaannya	417.502.465		335.929.625	*Unappropriated*
TOTAL EKUITAS	**1.360.801.231**		**1.277.228.391**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**2.058.232.018**		**1.850.738.338**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
Pendapatan operasi	929.960.416	19,24i	824.595.836	*Operating revenues*
Beban pokok pendapatan	(530.701.854)	20,24j	(477.078.570)	*Cost of revenues*
LABA BRUTO	**399.258.562**		**347.517.266**	***GROSS PROFIT***
Beban umum dan administrasi	(95.810.901)	21	(89.423.994)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lainnya	14.587.400	22	12.745.546	*Other operating income*
Beban operasi lainnya	(17.175.852)	22	(14.249.520)	*Other operating expenses*
LABA USAHA	**300.859.209**		**256.589.298**	***INCOME FROM OPERATIONS***
Pendapatan keuangan	57.199.060	23	45.050.723	*Finance income*
Beban keuangan	(34.121.599)	23	(31.793.535)	*Finance expenses*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	**323.936.670**		**269.846.486**	***INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX***
PAJAK PENGHASILAN BADAN				***CORPORATE INCOME TAX***
Kini	(62.299.180)	14d	(59.779.205)	*Current*
Tangguhan	(5.124.770)	14d,14e	2.148.946	*Deferred*
LABA TAHUN BERJALAN	**256.512.720**		**212.216.227**	***INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	-		-	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**256.512.720**		**212.216.227**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	**141,07**		**116,71**	***BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Share Capital Issued and Fully Paid*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Saldo Laba/*Retained Earnings*		Total Ekuitas/ *Total Equity*	
				Cadangan umum/ *General reserve*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		**181.838.482**	**749.460.284**	**8.000.000**	**283.568.088**	**1.222.866.854**	***Balance as of December 31, 2023***
Pembagian dividen kas	18	-	-	-	(157.854.690)	(157.854.690)	*Distribution of cash dividend*
Pembentukan cadangan umum	18	-	-	2.000.000	(2.000.000)	-	*General reserve appropriation*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	212.216.227	212.216.227	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024		**181.838.482**	**749.460.284**	**10.000.000**	**335.929.625**	**1.277.228.391**	***Balance as of December 31, 2024***
Pembagian dividen kas	18	-	-	-	(172.939.880)	(172.939.880)	*Distribution of cash dividend*
Pembentukan cadangan umum	18	-	-	2.000.000	(2.000.000)	-	*General reserve appropriation*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	256.512.720	256.512.720	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025		**181.838.482**	**749.460.284**	**12.000.000**	**417.502.465**	**1.360.801.231**	***Balance as of December 31, 2025***

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2025
(Expressed in thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	935.226.943		806.170.205	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kerjasama mitra usaha	(212.386.655)		(195.079.258)	*Payments to partnerships*
Pembayaran pemasok, utilitas dan lainnya	(199.983.744)		(142.073.483)	*Payments to suppliers, utilities and others*
Pembayaran kepada karyawan	(75.933.732)		(71.869.005)	*Payments to employees*
Pembayaran pajak penghasilan	(68.520.649)		(53.024.094)	*Payments for income taxes*
Penerimaan pendapatan keuangan	44.780.556		36.065.425	*Proceeds from finance income*
KAS NETO DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI	**423.182.719**		**380.189.790**	***NET CASH PROVIDED FROM OPERATING ACTIVITIES***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembayaran atas perolehan aset tetap	(7.285.051)		(24.865.772)	*Payments for acquisition of fixed assets*
Penerimaan penjualan aset tetap	2.005.800		-	*Proceeds from sales of fixed assets*
KAS NETO DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	**(5.279.251)**		**(24.865.772)**	***NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran dividen	(125.365.660)	18	(197.313.434)	*Payments for dividends*
Pembayaran liabilitas sewa	(20.652.764)	10, 29	(17.794.990)	*Payments for lease liabilities*
KAS NETO DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN	**(146.018.424)**		**(215.108.424)**	***NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES***
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**271.885.044**		**140.215.594**	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**810.397.210**	4	**670.181.616**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**1.082.282.254**	4	**810.397.210**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-58515.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 4 Juni 2013. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 45 tanggal 18 Juli 2023, dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0149824.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.

Perusahaan menjalankan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan usaha bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi stevedoring, cargodoring, serta receiving/delivery atas kendaraan, alat berat dan suku cadang, termasuk namun tidak terbatas mendirikan/menjalankan anak perusahaan dan usaha lainnya yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha utama, penyediaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, khususnya terkait bidang usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yaitu sebagai berikut:

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (the "Company") was established based on the Company Establishment Deed No. 10 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta. The deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-58515.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 19, 2012 and published in the Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 45 dated June 4, 2013. The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest through Notarial Deeds No. 45 dated July 18, 2023 of Notary Ashoya Ratam, SH., M.Kn., a notary in Jakarta. The deed has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0149824.AH.01.11.Tahun 2023 dated July 24, 2023.

Based on Article 3 of its Articles of Association, the scope of the Company's purposes and objectives are conducting seaport service business activities, which are related to water transportation for passengers, animals or goods, such as the operation of terminal facilities such as ports and docks, navigation, inspection of cargo and/or containers using ionizing radiation sources (radioactive substances and ionizing radiation generators), waterway locking operations and others, navigation, shipping and berthing activities, mooring services, and pilotage services.

The Company carries out business activities in the supply and/or service of loading and unloading of ships in ports which include stevedoring, cargodoring, and receiving/ delivery of vehicles, heavy equipment and spare parts, including but not limited to establishing/running subsidiaries and other businesses has a direct or indirect relationship with the main business activities, providing and developing port facilities and optimizing the utilization of Company-owned resources, especially in relation to sea port service business, namely as follows:

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
- Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
- Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bantu bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering dan ro-ro;
- Penyediaan dan/atau jasa bongkar muat barang;
- Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yaitu penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Entitas induk Perusahaan adalah PT Pelindo Multi Terminal (Catatan 16).

Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersial pada tanggal 1 Desember 2012.

Kantor Perusahaan berlokasi di Jl. Sindang Laut No. 100, Cilincing, Jakarta Utara 14110, Indonesia.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and general information (continued)

- *To provide and/or serve dock services for mooring;*
- *To provide and/or serve refueling and clean water service;*
- *To provide and/or serve passenger and/or vehicles handling facilities;*
- *To provide and/or serve dock services for loading and unloading activities of goods and container;*
- *To provide and/or serve warehousing services and products hoarding location, loading and unloading tools and port equipment;*
- *To provide and/or serve terminal services for container, liquid bulk, dry bulk and ro-ro;*
- *To provide and/or serve loading and unloading services of goods;*
- *To provide and/or serve products distribution and consolidation center.*

In order to achieve the purpose and objectives mentioned above the Company can carry out supporting business activities by providing and/or tug service of vessel.

As of December 31, 2025 and 2024, The Company's parent is PT Pelindo Multi Terminal (Note 16).

The Company's ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

The Company started its commercial operations on December 1, 2012.

The Company's office is located at Jl. Sindang Laut No. 100, Cilincing, Jakarta Utara 14110, Indonesia.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum efek Perusahaan

Pada tanggal 9 Juli 2018, Perusahaan telah menawarkan 509.147.700 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan harga penawaran perdana sebesar Rp1.640 (nilai penuh) per saham.

c. Manajemen kunci dan karyawan

Susunan manajemen kunci Perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Public offering of the Company's shares of capital

As of July 9, 2018, the Company offered 509,147,700 shares with par value of Rp100 (full amount) per share to the public and subsequently registered in Indonesia Stock Exchange (IDX) at a subscription price of Rp1,640 (full amount) per share.

c. Key management and employees

The composition of the Company's key management which consists of The Board of Commissioners and The Board of Directors are as follow:

31 Desember 2025		***December 31, 2025***
Dewan Komisaris		*Board of Commissioners*
Komisaris Utama	Muhammad Said Bakhri	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Herry Ardianto	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Tri Hidayat	*Independent Commissioner*
Direksi		*Board of Directors*
Direktur Utama	Sugeng Mulyadi	*President Director*
Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis	Sugeng Mulyadi	*Act. Director of Commercial and Business Development*
Direktur Operasi dan Teknik	Bagus Dwipoyono	*Director of Operation and Engineering*
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko	Wing Megantoro	*Director of Finance, Human Resources, and Risk Management*

31 Desember 2024		***December 31, 2024***
Dewan Komisaris		*Board of Commissioners*
Komisaris Utama	Drajat Sulistyo	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Abdur Rahim Hasan	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	LM. Arya Bima Yudiantara	*Independent Commissioner*
Direksi		*Board of Directors*
Direktur Utama	Sugeng Mulyadi	*President Director*
Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis	Sugeng Mulyadi	*Act. Director of Commercial and Business Development*
Direktur Operasi dan Teknik	Bagus Dwipoyono	*Director of Operation and Engineering*
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia	Wing Megantoro	*Director of Finance and Human Resources*

Susunan Komite Perusahaan adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Committees are as follow:

	31 Desember 2025/ ***December 31, 2025***	**31 Desember 2024/** ***December 31, 2024***
Komite Audit/*Audit Committee*		
Ketua/*Head*	Tri Hidayat	Abdur Rahim Hasan
Anggota/*Member*	Kurniawan Eko Saputro	Kurniawan Eko Saputro
Anggota/*Member*	-	Noval Ali Abbas
Komite Manajemen Risiko/ ***Risk Management Committee***		
Ketua/*Head*	Herry Ardianto	LM. Arya Bima Yudiantara
Anggota/*Member*	Nurkholis Lukman	Nurkholis Lukman
Anggota/*Member*	Andy Surono	-
Komite Nominasi dan Remunerasi/ ***Nomination and Remuneration Committee***		
Ketua/*Head*	Muhammad Said Bakhri	Abdur Rahim Hasan
Anggota/*Member*	Handy	LM. Arya Bima Yudiantara
Anggota/*Member*	Ahmad Alyani Addarain	Ahmad Alyani Addarain

1. UMUM (lanjutan)

c. Manajemen kunci dan karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan masing-masing memiliki 82 dan 78 orang karyawan (tidak diaudit) yang merupakan karyawan Pelindo yang ditugaskan di Perusahaan (Catatan 27d).

d. Perizinan

Berikut adalah izin-izin penting yang diperoleh Perusahaan sehubungan dengan operasional pelabuhan:

1. GENERAL (continued)

c. Key management and employees (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, The Company has 82 and 78 employees (unaudited), respectively, which are the employees of Pelindo to the Company (Note 27d).

d. Permits

The following are significant permits obtained by the Company in relation to port operations:

Jenis Perizinan/ ***Type of Permits***	**Nomor Surat Perizinan/** ***Permits Letter Number***	**Tanggal pembaruan terakhir/** ***Latest renewal date***	**Tanggal berakhir/** ***Expiry date***
Penetapan Lapangan Penimbunan di Pelabuhan Laut sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas Nama Perusahaan/ *Stacking Yard in Port as Temporary Stacking Area on behalf of the Company*	1262/KM.4/KPU.1/2024	12 November 2024/ *November 12, 2024*	14 November 2027/ *November 14, 2027*
Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/ *Operational License for Stevedoring Company from the Investment and Integrated Services Office of the one door Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta*	6/N.13/31.72/-1.819.6/2018	31 Mei 2018/*May 31, 2018*	Berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya/*Valid for as long as the Company is still operating.*
Surat Izin Usaha Bongkar Muat dari Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/ *the Stevedoring Operating License from the Investment Management Unit and One-Stop Integrated Service of the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta*	No.2/N.13.7/31.72.04.1 004.01.001.I.1.e/2/ - 1.819.6/2020.	20 Februari 2020/*February 20, 2020*	Berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya/*Valid for as long as the Company is still operating.*
Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan Tentang Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan *(ISPS Code*) berdasarkan Wewenang Pemerintah Republik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ *Statement of Compliance with Port Facility Security Requirements No. 002-0185-DN issued under the provisions of the International Code for The Security of Ships and Port Facilities (ISPS Code) under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia by Directorate General of Sea Transportation.*	002-0185-DN	26 April 2023/*April 26, 2023*	24 Mei 2028/*May 24, 2028*
Surat Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Otoritas Pelabuhan Kelas Utama Tanjung Priok/ *Notification Letter of Conducting Business Activities from the Ministry of Transportation Directorate General of Sea Transportation Tanjung Priok Main Class Port Authority Office*	PMKU.IDJKT.0125.000 089	25 Januari 2026/*January 25, 2026*	25 Januari 2026/*January 25, 2026*

1. UMUM (lanjutan)

e. Operasi Bersama

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki operasi bersama dengan persentase kepemilikan seperti berikut:

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan / *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination*	
					31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2025/ *December 31, 2024*
Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia ("MKO MTKI")	Gresik, Jawa Timur/*East Java*	Terminal kendaraan/ *Car terminal*	2015	45,00%	3.264.171	3.234.432

Ringkasan informasi keuangan MKO MTKI tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Total aset	3.264.171	3.234.432	*Total assets*
Total liabilitas	134.381	135.534	*Total liabilities*
Total ekuitas	3.129.790	3.098.898	*Total equity*
Pendapatan	1.206.263	1.221.738	*Revenue*
Laba (rugi) usaha	100.392	(59.048)	*Profit (loss) from operations*
Total laba (rugi) komprehensif	30.893	(5.061)	*Total comprehensive income (loss)*

f. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajemen Perusahaan pada tanggal 25 Maret 2026. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

1. GENERAL (continued)

e. Joint operation

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has joint operation with effective percentage of ownership as follows:

The summary of MKO MTKI's financial information as of December 31, 2025 and 2024 and for the years then ended are as follows:

f. Completion of Financial Statements

The management is responsible for the preparation and presentation of the financial statements, which were completed and authorized for issuance by the Company's Management on March 25, 2026. The Company's Board of Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such financial statements.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI")) and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority ("Otoritas Jasa Keuangan" or "OJK").

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam Catatan yang relevan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata uang fungsional dan pelaporan Perusahaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Perusahaan telah menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha.

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared based on an accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts that were measured by using a basis as disclosed in the relevant Notes.

The statements of cash flows was prepared using direct method and present receipts and expenditures of cash and cash equivalents, which were classified into operating, investing and financing activities.

The Company used Rupiah as functional and reporting currency.

All figures in the financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

The Company has prepared the financial statements on the going concern basis.

b. Foreign currency transactions and balances

The financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current statements of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan tidak memiliki saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

c. Perubahan kebijakan akuntansi

Perusahaan menerapkan untuk pertama kalinya beberapa standar dan amandemen tertentu yang efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 (kecuali dinyatakan lain).

Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran

Amandemen tersebut menetapkan bagaimana entitas harus menilai apakah suatu mata uang dapat dipertukarkan serta bagaimana entitas harus menentukan kurs spot ketika ketertukaran (exchangeability) tidak tersedia. Amandemen tersebut juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana ketidakmampuan mata uang tersebut untuk dipertukarkan dengan mata uang lainnya memengaruhi, atau diharapkan akan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas.

Amandemen ini tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

PSAK 117: Kontrak Asuransi

PSAK 117 merupakan standar akuntansi baru yang komprehensif mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan untuk kontrak asuransi. PSAK 117 menggantikan PSAK 104: Kontrak Asuransi. PSAK 117 berlaku untuk seluruh jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan reasuransi), tanpa memandang jenis entitas yang menerbitkannya, serta berlaku pula untuk jenis garansi tertentu dan instrumen keuangan dengan fitur partisipasi diskresioner.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Foreign currency transactions and balances (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

c. Changes in accounting principles

The Company applied for the first-time certain standards and amendments, which are effective for annual periods beginning on or after 1 January 2025 (unless otherwise stated).

Amendment PSAK 221: The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability

The amendments specifies how an entity should assess whether a currency is exchangeable and how it should determine a spot exchange rate when exchangeability is lacking. The amendments also require disclosure of information that enables users of its financial statements to understand how the currency not being exchangeable into the other currency affects, or is expected to affect, the entity's financial performance, financial position and cash flows.

This amendment had no material impact on the Company's financial statements

PSAK 117: Insurance Contracts

PSAK 117 is a comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure. PSAK 117 replaces PSAK 104 Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts (i.e., life, non-life, direct insurance and re-insurance), regardless of the type of entities that issue them as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

PSAK 117: Kontrak Asuransi (lanjutan)

Tujuan utama PSAK 117 adalah menyediakan model akuntansi yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang lebih berguna dan konsisten bagi entitas asuransi, mencakup seluruh aspek akuntansi yang relevan. PSAK 117 didasarkan pada model umum yang dilengkapi dengan:

- Penyesuaian khusus untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (*variable fee approach*).
- Pendekatan yang disederhanakan (*premium allocation approach*) yang terutama berlaku untuk kontrak berdurasi pendek.

Standar baru tersebut tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

d. Transaksi dengan pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 224.

Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang mungkin tidak sama dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 24 atas laporan keuangan.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak-pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan merupakan pihak ketiga.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Kas dan setara kas tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Changes in accounting principles (continued)

PSAK 117: Insurance Contracts (continued)

The overall objective of PSAK 117 is to provide a comprehensive accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers, covering all relevant accounting aspects. PSAK 117 is based on a general model, supplemented by:

- *A specific adaptation for contracts with direct participation features (the variable fee approach) .*
- *A simplified approach (the premium allocation approach) mainly for short-duration contracts.*

This new standard had no material impact on the Company's financial statements

d. Transactions with related parties

The Company have transactions with related parties as defined in PSAK 224.

The transactions are made based on terms agreed by the parties which may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in Note 24 to the financial statements.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the notes to the financial statements are third parties.

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of 3 (three) months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value. Cash and cash equivalents were not used as collateral and unrestricted.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

i) Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Perusahaan telah menerapkan cara praktis, diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL"), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pengukuran selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:
- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLR).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

i) Financial assets

Initial recognition and measurement

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not measured at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:
- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *Fair value through profit or loss (FVTPL).*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Perusahaan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, aset kontrak, dan uang jaminan.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur melalui NWPKL dan NWLR.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:
- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Company's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalent, trade receivables, contract assets, and guarantee deposits.

The Company has no financial assets measured in FVOCI and FVTPL.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan Perusahaan) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir; atau
- Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan *'pass-through'*, dan salah satu dari (a) Perusahaan telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan *'pass-through'*, Perusahaan mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Perusahaan masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Perusahaan tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Perusahaan tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Perusahaan.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Perusahaan untuk membayar kembali.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Company's statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired; or*
- *The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Company also recognizes an associated liability. In such cases, the Company also recognizes an associated liability. The transferred assets and related liabilities are measured on a basis that reflects the rights and obligations that are still retained by the Company.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai

Perusahaan mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena aset kontrak dan piutang usaha tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menelurusi perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan *(forward-looking)* atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Impairment

The Company recognizes an allowance for Expected Credit Loss ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have not been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). However, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its contract assest and trade receivables do not contain significant financing component, the Company applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Perusahaan menerapkan penyederhanaan sehubungan dengan risiko kredit rendah. Setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Perusahaan menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut.

Selain itu, Perusahaan mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan ketika pembayaran kontraktual lebih dari 365 hari dari tanggal jatuh tempo.

Perusahaan menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 365 hari dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Perusahaan juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Perusahaan tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Perusahaan. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

ii) Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Impairment (continued)

For debt instruments at FVOCI, the Company applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Company evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Company reassesses the internal credit rating of the debt instrument.

In addition, the Company considers that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 365 days past due.

The Company considers a financial asset in default when contractual payments are 365 days past due. However, in certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

ii) Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Perusahaan menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas sewa dan liabilitas jangka pendek lainnya - utang dividen dan uang titipan.

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akusisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

ii) Financial liabilities (continued)

Initial recognition and measurement (continued)

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Company designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as trade payables, other payables, accrued expenses, lease liabilities, and other current liabilities - dividend payables and deposits received.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)

i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman) (lanjutan)

ii) Utang dan Akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Perusahaan tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

ii) Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below: (continued)

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings) (continued)

ii) Payables and Accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefit liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

The Company has not designated any financial liability measured as FVTPL.

Derecognition

A financial liability is derecognized when it is extinguished, that is when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Pengukuran nilai wajar

Perusahaan mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan pada nilai wajar, dan aset dan liabilitas yang diakuisisi pada kombinasi bisnis. Perusahaan juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan aset keuangan tertentu pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL").

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

i. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

ii. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perusahaan.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Fair value measurement

The Company initially measures financial instruments at fair value, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations. They also measure certain recoverable amounts of the cash generating unit ("CGU") using fair value less cost of disposal ("FVLCD") and certain financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

i. in the principal market for the asset or liability, or the loss of an active market for the financial asset due to financial difficulties.

ii. in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

i) Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
ii) Level 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
iii) Level 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terdapat perpindahan antara level dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Tim pelaporan keuangan Perusahaan bertanggung-jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar, seperti nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai) dan aset keuangan pada NWPKL.

Penilai eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tahun setelah dibahas dan disetujui oleh Direksi Perusahaan. Kriteria pemilihan termasuk pengetahuan pasar, reputasi, independensi dan kemampuan mematuhi standar profesi. Metode penilaian dan input yang digunakan dibahas dan diputuskan bersama oleh Perusahaan dan penilai eksternal.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Fair value measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.

ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

iii) Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The Company's financial reporting team in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at FVOCI.

External valuers are involved for valuation of significant assets. Involvement of external valuers is decided upon annually after discussion with and approval by the Company's Board of Directors. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and whether professional standards are maintained. Valuation techniques and inputs to use were discussed and decided by the Company and external valuers.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan level pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

h. Aset tetap

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penyisihan penurunan nilai.

Biaya perbaikan yang signifikan diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari 1 (satu) tahun.

Penyusutan dimulai pada saat aset telah siap digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Fair value measurement (continued)

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

h. Fixed assets

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises their purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for them to be capable of operating in the manner intended by management.

Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

The cost of major inspections is recognized in the carrying amount of the fixed asset as a replacement if the recognition criteria are met. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Major spare parts and stand-by equipment are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations for more than 1 (one) year.

Depreciation starts when the asset is already available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the asset as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan fasilitas pelabuhan	5-50	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	4-40	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	5-20	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	5-50	*Road and building*
Peralatan	4-5	*Equipment*
Emplasemen	3-25	*Emplacement*
Kendaraan	5	*Vehicles*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Aset tetap (lanjutan)

Mulai tanggal 1 Januari 2025, Perusahaan mengubah estimasi manfaat ekonomis atas aset sebagai berikut:

	Masa Manfaat Lama/ *Previous Useful Lives*	Masa Manfaat Baru/ *New Useful Lives*	
Bangunan fasilitas pelabuhan	10-30	5-50	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	4-10	4-40	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	5-10	5-20	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	10-25	5-50	*Road and building*

Manajemen berkeyakinan bahwa perubahan tersebut akan merefleksikan estimasi yang lebih akurat atas masa manfaat ekonomis aset tetap Perusahaan.

Pengaruh atas perubahan estimasi akuntansi ini diakui secara prospektif pada laporan laba rugi periode terjadinya perubahan tersebut dan periode selanjutnya sebagai berikut:

	Pengurangan (Penambahan) Beban Penyusutan/ *Deduction (Addition) of Depreciation Expense*	**Dampak Pajak Penghasilan/ *Income Tax Effect***	**Penambahan (Pengurangan) Laba Tahun Berjalan/ *Addition (Deduction) to Profit for the Year***	
Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember				*Years ended December 31,*
2025	12.785.983	(2.812.916)	9.973.067	*2025*
2026	12.774.453	(2.810.380)	9.964.073	*2026*
2027	12.611.929	(2.774.624)	9.837.305	*2027*
Setelah 2027 sampai berakhir manfaat ekonomis	(38.172.365)	8.397.920	(29.774.445)	*After 2027 until end of useful lives*

Aset dalam pembangunan dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset dalam pembangunan tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang sesuai pada saat konstruksi telah selesai dan tersedia untuk digunakan. Aset dalam pembangunan tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Fixed assets (continued)

Starting January 1, 2025, the Company changes the estimated useful lives of the assets as follow:

Management believes that such changes will reflect more accurate estimation of the fixed assets' useful lives of the Company.

The effect of this change in an accounting estimate, is recognized prospectively by including it in the statement profit or loss in the period of the change and future periods as follows:

Construction in progress is stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the construction in progress. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the construction is completed and available for use. Construction in progress is not depreciated as it is not yet available for use.

The carrying amount of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year in which the asset is derecognized.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Aset tetap (lanjutan)

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan jika diperlukan, disesuaikan secara prospektif. Perusahaan melakukan uji penurunan nilai aset tetap bila terdapat indikasi bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Aset tetap operasi bersama dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

i. Aset takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada pengakuan awal sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset takberwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal, tidak termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluaran terkait tercermin dalam laba rugi pada periode pengeluaran tersebut terjadi.

Masa manfaat aset takberwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan umur yang terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomi dan dinilai penurunan nilainya setiap kali terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas ditelaah setidaknya pada setiap akhir periode pelaporan.

Perubahan masa manfaat yang diharapkan atau pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset dianggap memodifikasi periode atau metode amortisasi, jika sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi atas aset takberwujud dengan umur terbatas diakui dalam laporan laba rugi dalam kategori beban yang sesuai dengan fungsi aset takberwujud tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Fixed assets (continued)

At each end of reporting period, the residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed, and adjusted prospectively, if appropriate. The Company conducts impairment test for the fixed assets when there is any indication that the carrying values may not be fully recoverable.

Joint operation fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of similar fixed assets.

i. Intangible assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is their fair value at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses. Internally generated intangibles, excluding capitalized development costs, are not capitalized and the related expenditure is reflected in profit or loss in the period in which the expenditure is incurred.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite.

Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period.

Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in the statement of profit or loss in the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji penurunan nilainya setiap tahun, baik secara individual maupun pada tingkat unit penghasil kas. Penilaian kehidupan tidak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah kehidupan tidak terbatas terus dapat didukung. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas dilakukan secara prospektif.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan (yaitu, pada tanggal penerima memperoleh kendali) atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi.

j. Pengaturan bersama

Perusahaan merupakan pihak dalam pengaturan bersama apabila terdapat pengaturan kontraktual yang memberikan pengendalian bersama atas aktivitas relevan kepada Perusahaan dan minimal satu pihak lainnya. Pengendalian bersama diuji dengan prinsip yang sama dengan penilaian pengendalian atas anak perusahaan.

Perusahaan mengklasifikasikan kepentingannya dalam pengaturan bersama sebagai berikut:
- Ventura bersama: ketika Perusahaan memiliki hak hanya pada net aset dari pengaturan bersama
- Operasi bersama: ketika Perusahaan memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas yang terkait dengan pengaturan bersama.

Dalam melakukan penilaian klasifikasi kepentingan dalam pengaturan bersama, Perusahaan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- Struktur pengaturan bersama
- Bentuk hukum pengaturan bersama apabila dibentuk melalui kendaraan terpisah
- Persyaratan pengaturan kontraktual dalam perjanjian
- Fakta dan keadaan lain (termasuk semua perjanjian kontraktual lainnya).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Intangible assets (continued)

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortized, but are tested for impairment annually, either individually or at the cash-generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

An intangible asset is derecognized upon disposal (i.e., at the date the recipient obtains control) or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising upon derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss.

j. Joint arrangements

The Company is a party to a joint arrangement when there is a contractual arrangement that confers joint control over the relevant activities of the arrangement to the Company and at least one other party. Joint control is assessed under the same principles as control over subsidiaries.

The Company classifies its interests in joint arrangements as either:

- *Joint ventures: where the Company has rights to only the net assets of the joint arrangement*
- *Joint operations: where the Company has both the rights to assets and obligations for the liabilities of the joint arrangement.*

In assessing the classification of interests in joint arrangements, the Company considers:

- *The structure of the joint arrangement*
- *The legal form of joint arrangements structured through a separate vehicle*
- *The contractual terms of the agreement*
- *Any other facts and circumstances (including any other contractual arrangements).*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Pengaturan bersama (lanjutan)

Perusahaan mencatat kepentingannya dalam operasi bersama pada MKO MTKI dengan mengakui hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban dalam ketentuan kontraktual.

k. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, atau apabila pengujian tahunan atas penurunan nilai aset tertentu disyaratkan, maka Perusahaan membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Perusahaan mendasarkan perhitungan penurunan nilai pada rincian perhitungan anggaran atau prakiraan yang disusun secara terpisah untuk masing-masing UPK Perusahaan atas aset individual yang dialokasikan. Perhitungan anggaran dan prakiraan ini secara umum mencakup periode selama lima atau sepuluh tahun sesuai dengan stabilitas arus kas perkebunan terkait. Setelah periode yang dianggarkan proyeksi arus kas diestimasi dengan melakukan ekstrapolasi proyeksi yang dianggarkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan jangka panjang yang tetap.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Joint arrangements (continued)

The Company accounts for its interests joint operations in MKO MTKI by recognizing its share of assets, liabilities, revenues and expenses in accordance with its contractually conferred rights and obligations.

k. Impairment of non-financial assets

At each end of reporting date, the Company assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for certain asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

The Company bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations which are prepared separately for each of the Company's CGUs to which the individual assets are allocated. These budgets and forecast calculations are generally covering a period of five or ten years in accordance with the stability of each estate's cash flows. Beyond the forecasted period, the estimated cash flows are determined by extrapolating the forecasted cash flows using a steady long term growth rate.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh pengali penilaian atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada peride/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai pada aset tetap dan aset non-keuangan tidak lancar lainnya yang disajikan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Impairment of non-financial assets (continued)

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, the Company uses an appropriate valuation model to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Management believes that there is no indication of impairment in values for fixed assets and other non-current non-financial assets presented in the statement of financial position as of December 31, 2025.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak lagi terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

m. Perpajakan

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212: *Pajak Penghasilan*.

Perusahaan menyajikan beban pajak final atas pendapatan keuangan dan pendapatan sewa atas penyewaan ruang kantor sebagai bagian dari beban operasi lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

l. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the liabilities and a reliable estimate can be made of the amount of the liabilities.

Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the liabilities, the provision is reversed.

m. Taxation

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 212: Income Tax.

The Company present the final tax expense arising from finance income and rent income from rent of the office room as part of other operating expenses in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Company operates and generates taxable income.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;

ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Taxation (continued)

Current Tax (continued)

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;

ii) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or

ii) in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:
- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:
- *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the statement of financial position.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Pendapatan dan beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Mengindentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
   - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak;
   - Perusahaan bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
   - Kontrak memiliki substansi komersial; dan
   - Besar kemungkinan Perusahaan akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Kriteria tertentu juga harus terpenuhi untuk setiap aktivitas Perusahaan seperti yang dijelaskan di bawah.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Revenue and expense

In determining revenue recognition, the Company perform analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. Identify contracts with customers with certain criteria as follows:
   - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract;*
   - *The Company can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;*
   - *The contract has commercial substance; and*
   - *It is probable that the Company will receive benefits for the goods or services transferred.*
2. Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.
5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).

The specific criteria also must be met for each of the Company's activities as described below.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari penjualan jasa diakui dalam laba rugi pada saat jasa diberikan dan seluruh seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Perusahaan;
- tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Bila hasil transaksi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya sebesar beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali. Taksiran rugi pada jasa segera diakui dalam laba rugi.

Saldo kontrak

Aset kontrak

Aset kontrak merupakan piutang kepada pelanggan atas jasa yang telah selesai dilakukan oleh Perusahaan, namun belum difakturkan (piutang belum difakturkan). Pada saat penyelesaian jasa pelayanan bongkar muat kendaraaan, jasa dermaga serta jasa terkait lainnya dan diterbitkannya nota kepada pelanggan, jumlah yang diakui sebagai aset kontrak direklasifikasi ke piutang usaha.

Aset kontrak tunduk pada penilaian penurunan nilai. Lihat kebijakan akuntansi tentang penurunan nilai aset keuangan di Catatan 2f Instrumen keuangan - pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Revenue and expense (continued)

Revenue from sales of services is recognized in profit or loss when the services are rendered and all of the following conditions are met

- *the amount of revenue can be measured reliably;*
- *it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Company;*
- *the stage of completion of the transaction at the reporting date can be measured reliably; and*
- *the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.*

When the outcome of a transaction involving the rendering of services cannot be estimated reliably, revenue is recognized only to the extent of the expenses recognized that are recoverable. An expected loss on a service is recognized immediately in profit or loss.

Contract balances

Contract assets

Contract assets represent receivables from customers for services that have been completed by the Company but have not yet been billed (unbilled receivables). Upon completion of stevedoring services, terminal services and other related services and subsequent issuance of invoice to the customer, the amount recognized as contract assets is reclassified to trade receivables.

Contract assets are subject to impairment assessment. Refer to accounting policies on impairment of financial assets in Note 2f Financial instruments - initial recognition and subsequent measurement.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Saldo kontrak (lanjutan)

Liabilitias kontrak

Liabilitas kontrak diakui ketika pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan melebihi kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

o. Informasi segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

p. Sewa

Perusahaan menilai pada saat insepsi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Perusahaan sebagai Penyewa

Perusahaan menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Perusahaan mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Revenue and expense (continued)

Contract balances (continued)

Contract liabilities

Contract liability is recognized when the payment by customer is more than the performance obligation satisfied.

Recognition of expenses

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

o. Segment information

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products or services (business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

p. Lease

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Company as Lessee

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai Penyewa (lanjutan)

Aset hak-guna

Perusahaan mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Perusahaan pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai.

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Perusahaan dan pembayaran pinalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Lease (continued)

The Company as Lessee (continued)

Rights-of-use assets

The Company recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.The right-of-use assets are also assessed for impairment.

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai Penyewa (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Perusahaan juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Perusahaan sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya.

Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontijensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana sewa kontijensi tersebut diperoleh.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Lease (continued)

The Company as Lessee (continued)

Lease liabilities (lanjutan)

In calculating the present value of lease payments, the Company uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Company also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The Company as Lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in operating income in the profit or loss due to its operating nature.

Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income. Contingent rent are recognized as revenue in the period in which they are earned.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan

Amandemen tersebut mencakup klarifikasi atas suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada "tanggal penyelesaian" serta memperkenalkan pilihan kebijakan akuntansi (apabila kondisi tertentu terpenuhi) untuk menghentikan pengakuan liabilitas keuangan yang diselesaikan melalui sistem pembayaran elektronik sebelum tanggal penyelesaian. Selain itu, panduan tambahan ditambahkan mengenai bagaimana arus kas kontraktual untuk aset keuangan dengan fitur lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) serta fitur serupa harus dinilai. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi apa saja yang merupakan fitur non-recourse dan karakteristik instrumen yang terkait secara kontraktual. Selain itu, amandemen tersebut memperkenalkan persyaratan pengungkapan untuk instrumen keuangan dengan fitur kontinjensi serta persyaratan pengungkapan tambahan untuk instrumen ekuitas yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (OCI).

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan hanya untuk klasifikasi aset keuangan dan pengungkapan terkait. Perusahaan tidak memperkirakan bahwa amandemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Accounting standards issued but not yet effective

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company's financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Company when they become effective.

Effective beginning on or after January 1, 2026

PSAK 109: Financial Instruments and PSAK 107 Financial Instruments: Disclosure on Classification and Measurement of Financial Instruments

The amendment includes a clarification that a financial liability is derecognised on the 'settlement date' and the introduction of an accounting policy choice (if specific conditions are met) to derecognise financial liabilities settled using an electronic payment system before the settlement date. Further, additional guidance is added on how the contractual cash flows for financial assets with environmental, social and corporate governance (ESG) and similar features should be assessed. The amendments also clarifiies what constitute 'non-recourse features and what are the characteristics of contractually linked instruments. The amendments also introduces of disclosures for financial instruments with contingent features and additional disclosure requirements for equity instruments classified at fair value through other comprehensive income (OCI).

The Amendments are effective for annual periods starting on or after January 1, 2026 with early adoption permitted for classification of financial assets and related disclosures only. The Company does not anticipate that the amendments will have a material effect on the Company's financial statements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 (lanjutan)

Penyesuaian tahunan 2024

DSAK IAI menerbitkan Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia), yang mencakup klarifikasi, penyederhanaan, koreksi, atau perubahan untuk meningkatkan konsistensi dalam PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 109 Instrumen Keuangan, PSAK 10 Laporan Keuangan Konsolidasian, dan PSAK 207 Laporan Arus Kas. Amandemen tersebut akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan lebih awal diperkenankan dan harus diungkapkan. Amandemen tersebut tidak diharapkan menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027

PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

PSAK 118 akan menggantikan PSAK 201. Standar baru ini memperkenalkan persyaratan baru terkait penyajian dalam laporan laba rugi, termasuk total dan subtotal tertentu. Selain itu, entitas diwajibkan untuk mengklasifikasikan seluruh pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi ke dalam salah satu dari lima kategori: operasi, investasi, pendanaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan.

Standar ini juga mensyaratkan pengungkapan ukuran kinerja yang didefinisikan manajemen, subtotal pendapatan dan beban, serta mencakup persyaratan baru terkait agregasi dan disagregasi informasi keuangan

PSAK 118 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan dan harus diungkapkan. PSAK 118 akan diterapkan secara retrospektif.

Perusahaan saat ini sedang mengidentifikasi seluruh dampak yang akan timbul atas laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan terkait implementasi amandemen tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2026 (continued)

Annual improvements 2024

The DSAK IAI issued Annual Improvements 2024 to SAK Indonesia, which include clarifications, simplifications, corrections or changes to improve consistency in, PSAK 107 Financial instruments: Disclosure, PSAK 109 Financial Instruments, PSAK 110 Consolidated Financial Statements and PSAK 207 Statements of Cash Flows. The amendments will be effective for reporting periods beginning on or after 1 January 2026. Earlier application is permitted and must be disclosed. The amendments are not expected to have a material impact on the Group's financial statements.

Effective beginning on or after January 1, 2027

PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements

PSAK 118 will replace PSAK 201. The new standard introduces new requirements for presentation within the statement of profit or loss, including specified totals and subtotals. Furthermore, entities are required to classify all income and expenses within the statement of profit or loss into one of five categories: operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations.

The standard requires disclosure of newly defined management-defined performance measures, subtotals of income and expenses, and it also includes new requirements for aggregation and disaggregation of financial information.

PSAK 118 are effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2027, but earlier application is permitted and must be disclosed. PSAK 118 will apply retrospectively.

The Company is currently working to identify all impacts the amendments will have on the primary financial statements and notes to the financial statements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar, yaitu sebesar Rp141,07 (nilai penuh) dan Rp116,71 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

s. Biaya emisi saham

Biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan modal saham Perusahaan kepada publik dikurangkan langsung dengan hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangan.

t. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:
1) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
2) untuk diperdagangkan,
3) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
4) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:
1) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
2) untuk diperdagangkan,
3) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
4) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Earnings per share

Earnings per share is computed by dividing income for the year by the weighted-average number of shares outstanding, amounting Rp141.07 (full amount) and Rp116.71 (full amount) shares as of December 31, 2025 and 2024 respectively.

s. Share issuance costs

Costs incurred in connection with the Company's issuance of share capital to the public were offset directly with the proceeds and presented as deduction to additional paid-in capital account in the statement of financial position.

t. Current and non-current classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:
1) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
2) held primarily for the purpose of trading,
3) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or
4) cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:
1) expected to be settled in the normal operating cycle,
2) held primarily for the purpose of trading,
3) due to be settled within 12 months after the reporting period, or
4) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Nilai tercatat neto utang pajak penghasilan badan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.567.065 (2024: Rp 12.063.283). Penjelasan lebih rinci mengenai pajak penghasilan diungkapkan dalam Catatan 14d.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by the management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements.

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. The net carrying amount of corporate income tax payable as of December 31, 2024 was Rp5,567,065 (2024: Rp12,063,283). Further details regarding taxation are disclosed in Note 14d.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities within the next reporting period are disclosed below. The Company based its assumption and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstantes and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis.

Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, laba rugi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2h.

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari KKE. Matriks provisi digunakan untuk menghitung KKE untuk piutang usaha dan lain-lain. Tarif provisi didasarkan pada hari tunggakan untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Matriks provisi awalnya didasarkan pada riwayat tingkat kerugian pelanggan. Perusahaan akan melakukan penyesuaian pengalaman kerugian historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi yang terkait erat dengan riwayat tingkat kerugian diperkirakan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar pada sektor-sektor pelanggan beroperasi, riwayat tingkat kerugian disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, riwayat tingkat gagal bayar yang diamati diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Estimate useful lives of fixed assets

The useful life of each of the item of the Company's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets.

The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets. The estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 2h.

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Company estimates impairment allowance for trade receivables using simplified approach of ECL. A provision matrix is used to determine ECL for trade and other receivables, where the provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns.

The provision matrix is initially based on the customers historical observed loss rates. The Company will adjust the historical observed loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions closely related to the historical observed loss are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the sectors where customers are operating, the historical losses are adjusted accordingly. At every reporting date, the historical observed loss rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha (lanjutan)

Evaluasi atas korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan KKE, adalah estimasi signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili tingkat gagal bayar pelanggan aktual di masa depan.

Nilai tercatat dari piutang usaha Perusahaan sebelum penyisihan untuk penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp93.811.008 (2024: Rp115.528.909). Penjelasan lebih lanjut atas piutang usaha diungkapkan dalam Catatan 5.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak, jika besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui, berdasarkan kemungkinan waktu realisasi dan jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2m dan 14.

Perhitungan pajak penghasilan tangguhan diungkapkan dalam Catatan 14e.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Allowance for Impairment of Trade Receivables (continued)

The assessment of the correlation between historical observed loss rates, forecast economic conditions and ECLs, is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical observed loss rate and forecast of economic conditions may not be representative of customer's actual default in the future.

The carrying amount of the Company's trade receivables before allowance for impairment as of December 31, 2024 was Rp93,811,008 (2024: Rp115,528,909). Further details on trade receivables are disclosed in Note 5.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 2m and 14.

The calculation of deferred income tax is disclosed in Note 14e.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Kas			***Cash on hand***
Rupiah	2.250	11.797	*Rupiah*
Bank			***Cash in banks***
Pihak berelasi (Catatan 24a)			*Related parties (Note 24a)*
Rupiah	32.280.004	35.385.413	*Rupiah*
Deposito berjangka			***Time deposits***
Pihak berelasi (Catatan 24a)			*Related parties (Note 24a)*
Rupiah	1.000.000.000	775.000.000	*Rupiah*
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	50.000.000	-	*Rupiah*
Total	**1.082.282.254**	**810.397.210**	***Total***

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank.

Accounts in bank earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank.

Tingkat bunga per tahun deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the time deposits are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Rupiah	4,90% - 7,25%	6,00% - 7,00%	*Rupiah*

Kas dan setara kas tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

Cash and cash equivalents were not used as collateral at the reporting date.

Saldo kas dan setara kas, pada tanggal pelaporan, tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents were not restricted to use at the reporting date.

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

a. Berdasarkan umur piutang / *a. Based on age*

Rincian umur piutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade from the date of invoice issuance are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Belum jatuh tempo	4.904.603	6.089.409	*Not yet due*
Telah jatuh tempo:			*Overdue:*
1 - 30 hari	62.292.672	54.415.521	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	2.248.955	11.001.472	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	148.692	5.764.327	*61 - 90 days*
91 - 180 hari	48.998	4.499.212	*91 - 180 days*
Lebih dari 180 hari	24.167.088	33.758.968	*More than 180 days*
Total	**93.811.008**	**115.528.909**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(23.294.693)	(35.319.874)	*Allowance for impairment*
Neto	**70.516.315**	**80.209.035**	***Net***

5. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *5. TRADE RECEIVABLES (continued)*

b. Berdasarkan pelanggan / *b. Based on customer*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Pihak ketiga	92.577.855	115.241.009	*Third parties*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(23.294.693)	(35.319.874)	*Allowance for impairment*
Pihak ketiga - neto	69.283.162	79.921.135	*Third parties - net*
Pihak berelasi (Catatan 24b)	1.233.153	287.900	*Related parties (Note 24b)*
Total piutang usaha - neto	**70.516.315**	**80.209.035**	***Total trade receivable - net***

c. Berdasarkan mata uang / *c. Based on currency*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Rupiah	93.811.008	115.528.909	*Rupiah*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(23.294.693)	(35.319.874)	*Allowance for impairment*
Neto	**70.516.315**	**80.209.035**	***Net***

d. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut: / *d. The movement in the allowance for impairment of receivables is as follows:*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Saldo awal	35.319.874	35.047.899	*Beginning balance*
Penambahan tahun berjalan (Catatan 21)	-	271.975	*Allowance for the year (Note 21)*
Pemulihan penyisihan (Catatan 22)	(12.025.181)	-	*Recovery of allowance (Note 22)*
Total	**23.294.693**	**35.319.874**	***Total***

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, manajemen berpendapat bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha cukup memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on management's evaluation regarding the collectability of each receivable account on December 31, 2025 and 2024, management believes that the allowances for impairment of trade receivables are adequate to cover possible expected credit losses that may arise from uncollectability of trade receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2025, tidak terdapat piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan.

As of December 31, 2025, there is no trade receivables used as collateral.

6. UANG MUKA / *6. ADVANCES*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo ini merupakan uang muka yang dikeluarkan untuk kegiatan bongkar muat di terminal serta kegiatan operasional Perusahaan lainnya.

As of December 31, 2025 and 2024, the balance represents advance payments for loading and unloading activities in terminal and other operational activities of the Company.

7. ASET KONTRAK / *CONTRACT ASSETS*

Aset kontrak merupakan piutang kepada pelanggan atas jasa yang telah selesai dilakukan oleh Perusahaan, namun belum difakturkan (piutang belum difakturkan).

Contract assets represents receivables from customers for services that have been completed by the Company but have not yet been billed (unbilled receivables).

Rincian akun ini pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Details of the account as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Pihak ketiga	1.418.247	4.563.725	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 24c)	13.101.399	4.590.265	*Related parties (Note 24c)*
Total	**14.519.646**	**9.153.990**	***Total***

Rincian umur aset kontrak dihitung sejak tanggal diakuinya adalah sebagai berikut:

The aging analysis of contract assets from the recognition dates are as follow:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
1 - 30 hari	14.519.646	9.153.990	*1 - 30 days*

Pada tanggal 31 Desember 2025, tidak terdapat aset kontrak yang digunakan sebagai jaminan.

As of December 31, 2025, there is no contract assets used as collateral.

8. ASET TETAP / *FIXED ASSETS*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2025					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan						***Cost***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan fasilitas pelabuhan	252.712.216	-	-	(13.792.240)	238.919.976	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	44.306.955	-	-	2.352.326	46.659.281	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	22.746.411	-	(5.418.825)	2.837.113	20.164.699	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	158.687.952	-	(1.973.090)	11.888.173	168.603.035	*Road and building*
Peralatan	15.616.746	-	-	(1.261.997)	14.354.749	*Equipment*
Emplasemen	22.348.526	-	-	5.855.490	28.204.016	*Emplacement*
Kendaraan	2.153.802	-	-	(1.846.222)	307.580	*Vehicles*
Aset dalam pembangunan	5.311.521	7.065.229	(800.400)	(7.065.228)	4.511.122	*Construction in progress*
Subtotal	523.884.129	7.065.229	(8.192.315)	(1.032.585)	521.724.458	*Sub-total*
Operasi bersama						***Joint operation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	4.680.537	-	-	-	4.680.537	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	151.857	-	-	-	151.857	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	438.750	-	-	-	438.750	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	643.361	-	-	-	643.361	*Road and building*
Peralatan	1.535.822	-	-	-	1.535.822	*Equipment*
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	*Emplacement*
Subtotal	11.980.847	-	-	-	11.980.847	*Sub-total*
Total biaya perolehan	**535.864.976**	**7.065.229**	**(8.192.315)**	**(1.032.585)**	**533.705.305**	***Total cost***
Dikurangi:						***Less:***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan fasilitas pelabuhan	61.298.043	6.251.036	-	(5.272.063)	62.277.016	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	34.097.910	974.525	-	379.944	35.452.379	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	19.152.184	832.395	(5.238.257)	2.707.193	17.453.515	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	40.836.307	4.119.192	(1.933.628)	3.265.422	46.287.293	*Road and building*
Peralatan	13.490.887	446.497	-	(2.207.981)	11.729.403	*Equipment*
Emplasemen	10.978.035	951.439	-	2.019.550	13.949.024	*Emplacement*
Kendaraan	1.723.041	276.933	-	(1.753.911)	246.063	*Vehicles*
Subtotal	181.576.407	13.852.017	(7.171.885)	(861.846)	187.394.693	*Sub-total*

8. ASET TETAP (lanjutan) / *8. FIXED ASSETS (continued)*

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2025

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Dikurangi: (lanjutan)						***Less: (continued)***
Akumulasi penyusutan (lanjutan)						***Accumulated depreciation (continued)***
Operasi bersama						***Joint operation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	1.403.862	151.575	-	-	1.555.437	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	148.820	-	-	-	148.820	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	429.975	-	-	-	429.975	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	551.734	5.221	-	-	556.955	*Road and building*
Peralatan	1.505.105	-	-	-	1.505.105	*Equipment*
Emplasemen	1.598.367	177.596	-	-	1.775.963	*Emplacement*
Subtotal	5.637.863	334.392	-	-	5.972.255	*Sub-total*
Total akumulasi penyusutan	**187.214.270**	**14.186.409**	**(7.171.885)**	**(861.846)**	**193.366.948**	***Total accumulated depreciation***
Nilai buku	**348.650.706**				**340.338.357**	***Net book value***

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2024

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Cost***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan fasilitas pelabuhan	234.793.134	-	-	17.919.082	252.712.216	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	41.324.491	-	-	2.982.464	44.306.955	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	22.746.411	-	-	-	22.746.411	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	150.856.163	-	-	7.831.789	158.687.952	*Road and building*
Peralatan	14.868.416	-	-	748.330	15.616.746	*Equipment*
Emplasemen	16.575.694	-	-	5.772.832	22.348.526	*Emplacement*
Kendaraan	2.153.802	-	-	-	2.153.802	*Vehicles*
Aset dalam pembangunan	24.968.761	16.661.876	(1.064.619)	(35.254.497)	5.311.521	*Construction in progress*
Subtotal	508.286.872	16.661.876	(1.064.619)	-	523.884.129	*Sub-total*
Operasi bersama						***Joint operation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	4.680.537	-	-	-	4.680.537	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	151.857	-	-	-	151.857	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	438.750	-	-	-	438.750	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	643.361	-	-	-	643.361	*Road and building*
Peralatan	1.535.822	-	-	-	1.535.822	*Equipment*
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	*Emplacement*
Subtotal	11.980.847	-	-	-	11.980.847	*Sub-total*
Total biaya perolehan	**520.267.719**	**16.661.876**	**(1.064.619)**	**-**	**535.864.976**	***Total cost***
Dikurangi:						***Less:***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan fasilitas pelabuhan	50.817.896	10.480.147	-	-	61.298.043	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	30.444.466	3.653.444	-	-	34.097.910	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	18.210.582	941.602	-	-	19.152.184	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	33.700.750	7.135.557	-	-	40.836.307	*Road and building*
Peralatan	12.324.967	1.165.920	-	-	13.490.887	*Equipment*
Emplasemen	8.442.476	2.535.559	-	-	10.978.035	*Emplacement*
Kendaraan	1.723.041	-	-	-	1.723.041	*Vehicles*
Subtotal	155.664.178	25.912.229	-	-	181.576.407	*Sub-total*
Operasi bersama						***Joint operation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	1.247.877	155.985	-	-	1.403.862	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	148.820	-	-	-	148.820	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	429.975	-	-	-	429.975	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	494.840	56.894	-	-	551.734	*Road and building*
Peralatan	1.505.105	-	-	-	1.505.105	*Equipment*
Emplasemen	1.420.771	177.596	-	-	1.598.367	*Emplacement*
Subtotal	5.247.388	390.475	-	-	5.637.863	*Sub-total*
Total akumulasi penyusutan	**160.911.566**	**26.302.704**	**-**	**-**	**187.214.270**	***Total accumulated depreciation***
Nilai buku	**359.356.153**				**348.650.706**	***Net book value***

Aset operasi bersama merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola oleh MKO MTKI berdasarkan perjanjian kontraktual dengan PT Maspion Industrial Estate ("MIE") (Catatan 27c).

Joint operation assets represent assets that are transferred to be managed by MKO MTKI based on a contractual agreement with PT Maspion Industrial Estate ("MIE") (Note 27c).

8. ASET TETAP (lanjutan)

Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2025 merupakan reklasifikasi aset tetap menjadi aset takberwujud dengan biaya perolehan sebesar Rp1.032.585 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp861.846.

Rincian aset dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

8. FIXED ASSETS (continued)

Reclassifications as of December 31, 2025 were the reclassifications of fixed assets into intangible assets amounted Rp1,032,585 and accumulated depreciation amounted Rp861,846.

The details of construction in progress are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2025			
	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	**Akumulasi biaya/ *Accumulated costs***	**Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion***	
Bangunan fasilitas pelabuhan	35.00%	4.511.122	Desember/December 2026	*Port facilities building*
		4.511.122		

	31 Desember/*December 31*, 2024			
	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	**Akumulasi biaya/ *Accumulated costs***	**Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion***	
Bangunan fasilitas pelabuhan	23.70%	5.311.521	Desember/*December* 2026	*Port facilities building*
		5.311.521		

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset dalam pembangunan yang dimiliki Perusahaan merupakan konstruksi aset tetap yang bersifat *multi-years*.

As of December 31, 2025 and 2024, assets under construction owned by the Company are multi-years construction of fixed assets.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan mengasuransikan aset tetap perusahaan terhadap berbagai risiko pada PT BRI Asuransi Indonesia dan PT Asuransi Ramayana Tbk. melalui asuransi bersama PT Pelindo Multi Terminal Grup yang melingkupi aset di wilayah kerja kantor pusat, cabang dan anak perusahaan PT Pelindo Multi Terminal. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan telah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul terkait dengan aset yang diasuransikan.

On December 31, 2025 and 2024, the Company insured its fixed asset against various risks with PT BRI Asuransi Indonesia and PT Asuransi Ramayana Tbk. through joint insurance with PT Pelindo Multi Terminal Group which covered assets in the working area of the head office, branches and subsidiaries of PT Pelindo Multi Terminal. Management believes that the coverage amount is sufficient to cover possible losses arising from the assets insured.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat aset tetap yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual atau yang dihentikan dari penggunaan aktif.

As of December 31, 2025 and 2024, there were no fixed assets classified as held for sale or terminated from active use.

Pada tanggal 31 Desember 2025, nilai perolehan aset tetap Perusahaan yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah sebesar Rp65.012.768 (2024: Rp63.095.848), yang terutama terdiri atas bangunan fasilitas pelabuhan, instalasi fasilitas pelabuhan, alat-alat fasilitas pelabuhan, jalan dan bangunan, peralatan, emplasemen, dan kendaraan.

As at December 31, 2025, the costs of the Company's fixed assets that have been fully depreciated but still being utilized were amounting to Rp65,012,768 (2024: Rp63.095.848), which mainly consist of port facilities buildings, port facilities installation, port facilities equipments, road and building, equipment, emplacement, and vehicles.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Management believes that there was no impairment in the value of directly owned fixed assets as of December 31, 2025 and 2024.

8. ASET TETAP (lanjutan) / *8. FIXED ASSETS (continued)*

Rincian alokasi beban penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of allocation of depreciation expenses for fixed assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban pokok pendapatan (Catatan 20)	13.337.462	24.223.824	*Cost of revenues (Note 20)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	848.947	2.078.880	*General and administrative expenses (Note 21)*
Total	**14.186.409**	**26.302.704**	***Total***

Aset tetap kepemilikan langsung dan aset operasi bersama tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

Directly owned fixed assets and joint operation assets were not used as collateral at reporting date.

Rincian rugi penjualan/pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of loss on sale/disposal of fixed assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Penerimaan penjualan aset tetap	2.005.800	-	*Proceeds from sales of fixed assets*
Nilai tercatat neto	(220.030)	-	*Net carrying value*
Laba penjualan aset tetap	**1.785.770**	**-**	***Gains from sales of fixed assets***

9. ASET TAKBERWUJUD / *9. INTANGIBLE ASSETS*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2025					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan						***Cost***
Studi tata kelola perusahaan	9.715.520	-	(9.715.520)	-	-	*Corporate governance study*
Piranti lunak	10.702.735	-	-	1.032.584	11.735.319	*Software*
Total biaya perolehan	**20.418.255**	**-**	**(9.715.520)**	**1.032.584**	**11.735.319**	***Total cost***
Dikurangi:						***Less:***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Studi tata kelola perusahaan	9.715.520	-	(9.715.520)	-	-	*Corporate governance study*
Piranti lunak	7.478.434	1.491.810	-	861.846	9.832.090	*Software*
Total akumulasi amortisasi	**17.193.954**	**1.491.810**	**(9.715.520)**	**861.846**	**9.832.090**	***Total accumulated amortization***
Nilai buku	**3.224.301**				**1.903.229**	***Net book value***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan						***Cost***
Studi tata kelola perusahaan	9.715.520	-	-	-	9.715.520	*Corporate governance study*
Piranti lunak	10.702.735	-	-	-	10.702.735	*Software*
Total biaya perolehan	**20.418.255**	**-**	**-**	**-**	**20.418.255**	***Total cost***
Dikurangi:						***Less:***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Studi tata kelola perusahaan	9.715.520	-	-	-	9.715.520	*Corporate governance study*
Piranti lunak	6.071.325	1.407.109	-	-	7.478.434	*Software*
Total akumulasi amortisasi	**15.786.845**	**1.407.109**	**-**	**-**	**17.193.954**	***Total accumulated amortization***
Nilai buku	**4.631.410**				**3.224.301**	***Net book value***

9. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi integrasi *autogate* untuk sistem operasi terminal, aplikasi *dashboard system* untuk menyajikan informasi mengenai performansi operasional, dan aplikasi *invoice* untuk sistem operasi keuangan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Beban amortisasi seluruhnya dialokasikan pada beban umum dan administrasi (Catatan 21).

9. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Software represents cost incurred for the development of autogate integration for terminal operating system, dashboard system application to present information regarding operational performance, and invoice application for finance system operation.

Management believes that there was no impairment in the value of directly owned intangible assets as of December 31, 2025 and 2024.

Amortization expenses are wholly allocated to general and administrative expenses (Note 21).

10. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

10. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

The movements in right-of-use assets are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2025

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan						***Acquisition Costs***
Tanah dan bangunan fasilitas pelabuhan	916.306.514	37.656.257	(50.558.552)	-	903.404.219	*Land and port facilities buildings*
Peralatan	98.962	-	(98.962)	-	-	*Equipments*
Kendaraan	6.419.622	2.054.275	(2.029.908)	-	6.443.989	*Vehicles*
Subtotal	922.825.098	39.710.532	(52.687.422)	-	909.848.208	*Sub-total*
Dikurangi:						***Less:***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Tanah dan bangunan fasilitas pelabuhan	380.901.516	80.482.225	(45.212.552)	-	416.171.189	*Land and port facilities buildings*
Peralatan	98.962	-	(98.962)	-	-	*Equipments*
Kendaraan	5.463.342	1.402.232	(2.029.908)	-	4.835.666	*Vehicles*
Subtotal	386.463.820	81.884.457	(47.341.422)	-	421.006.855	*Sub-total*
Nilai buku bersih	**536.361.278**				**488.841.353**	***Net book value***

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2024

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan						***Acquisition Costs***
Tanah dan bangunan fasilitas pelabuhan	904.461.561	11.844.953	-	-	916.306.514	*Land and port facilities buildings*
Peralatan	98.962	-	-	-	98.962	*Equipments*
Kendaraan	5.386.245	1.345.470	(312.093)	-	6.419.622	*Vehicles*
Subtotal	909.946.768	13.190.423	(312.093)	-	922.825.098	*Sub-total*
Dikurangi:						***Less:***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Tanah dan bangunan fasilitas pelabuhan	299.405.624	81.495.892	-	-	380.901.516	*Land and port facilities buildings*
Peralatan	98.962	-	-	-	98.962	*Equipments*
Kendaraan	4.154.796	1.486.885	(178.339)	-	5.463.342	*Vehicles*
Subtotal	303.659.382	82.982.777	(178.339)	-	386.463.820	*Sub-total*
Nilai buku bersih	**606.287.386**				**536.361.278**	***Net book value***

10. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan)

10. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (continued)

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The detail of lease liabilities is as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Liabilitas sewa			***Lease liabilities***
Bagian lancar	55.623.690	40.418.552	*Current portion*
Bagian jangka panjang	420.866.164	388.237.935	*Non-current portion*
Total	**476.489.854**	**428.656.487**	***Total***

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in statement of profit or loss are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Bunga atas liabilitas sewa (Catatan 23)	34.121.599	31.793.535	*Interest on lease liabilities (Note 23)*
Beban penyusutan aset hak-guna	81.884.457	82.982.777	*Depreciation of right-of-use assets*
Beban terkait liabilitas sewa dengan nilai rendah atau jangka pendek	408.748	1.101.893	*Expense related to short-term liabilities low-value assets*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, beban penyusutan aset hak guna dicatat sebagai bagian dari beban pokok pendapatan (Catatan 20).

As of December 31, 2025 and 2024, the depreciation expense of right-of-use assets was recorded as part of cost of revenues (Note 20).

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Perusahaan sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Perusahaan. Perusahaan mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Perusahaan mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Perusahaan.

Some leases contain extension options exercisable by the Company before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Company. The Company assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Company reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as folllow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Liabilitas sewa			***Lease liabilities***
Saldo awal	428.656.487	401.606.801	*Beginning balance*
Penambahan sewa	39.710.532	13.190.423	*Additional lease*
Terminasi sewa	(5.346.000)	(139.282)	*Lease termination*
Bunga	34.121.599	31.793.535	*Interest*
Pembayaran	(20.652.764)	(17.794.990)	*Payment*
Total	**476.489.854**	**428.656.487**	***Total***

11. UTANG USAHA / *11. TRADE PAYABLES*

a. Berdasarkan pemasok / *a. By supplier*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Pihak ketiga	10.915.012	6.688.005	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 24e)	35.465.738	40.615.547	*Related parties (Note 24e)*
Total	**46.380.750**	**47.303.552**	***Total***

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Rupiah	46.380.750	47.303.552	*Rupiah*

12. UTANG LAIN-LAIN / *12. OTHER PAYABLES*

Utang lain-lain kepada pihak ketiga dan pihak berelasi merupakan utang atas pembelian dan pembangunan aset tetap dan aset takberwujud.

Other payables to third parties and related parties are payable for purchase and construction of fixed assets and intangible assets.

13. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA / *13. OTHER CURRENT LIABILITIES*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Uang titipan:			*Deposits received*:
Pihak ketiga			*Third parties*
Vendor	2.823.957	1.342.400	*Vendors*
Pelanggan	1.607.634	2.354.843	*Customers*
Karyawan	697.543	1.031.001	*Employees*
Pihak berelasi (Catatan 24g)	1.692.206	1.305.051	*Related parties (Note 24g)*
Total	**6.821.340**	**6.033.295**	***Total***

14. PERPAJAKAN / *14. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid Tax*

Pada tanggal 31 Desember 2025, pajak dibayar dimuka merupakan kelebihan pembayaran pajak PPh Pasal 25 oleh Perusahaan selama tahun 2025. Pada tanggal 23 Januari 2026, Perusahaan telah menerima Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Pajak Penghasilan Pasal 25 sebesar Rp1.430.088. Pengembalian tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 2 Februari 2026.

As of December 31, 2025, prepaid tax is overpayment of Income Tax Article 25 by the Company during year 2025. On January 23, 2026, the Company received Tax Overpayment Refund Decision Letter (SKPKPP) for the Income Taxes Article 25 amounting to Rp1,430,088. The refund has been collected by the Company on February 2, 2026.

14. PERPAJAKAN (lanjutan) / *14. TAXATION (continued)*

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
Tahun berjalan	5.567.065	12.063.283	*Current year*
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 4(2)	1.276.078	123.327	*Article 4(2)*
Pasal 21	727.620	915.468	*Article 21*
Pasal 23	497.035	751.462	*Article 23*
Pasal 25	5.944.913	4.240.076	*Article 25*
Pasal 26	476.168	234.507	*Article 26*
Pajak Pertambahan Nilai	4.106.912	2.009.512	*Value Added Tax*
Total	**18.595.791**	**20.337.635**	***Total***

c. Beban pajak final / *c. Final tax expense*

Beban pajak final timbul dari pajak final atas pendapatan sewa ruang kantor.

The final tax expense arises from the final tax on rental income for rent of the office spaces.

d. Beban pajak penghasilan / *d. Income tax expense*

Beban (manfaat) pajak penghasilan terdiri dari: / *Income tax expense (benefit) consists of:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan	62.299.180	59.779.205	*Current tax expenses - current year*
Beban (manfaat) pajak tangguhan	5.124.770	(2.148.946)	*Deferred tax expense (benefit)*
Total	**67.423.950**	**57.630.259**	***Total***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income with the estimated taxable income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	323.936.670	269.846.486	*Income before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income*
Perbedaan temporer:			*Temporary differences:*
Penyisihan (pemulihan) penurunan nilai piutang usaha	(12.025.181)	271.977	*Allowance (recovery) for impairment of trade receivable*
Imbalan kerja pegawai	3.015.160	9.256.132	*Employee benefit*
Penyusutan dan amortisasi	(15.749.981)	(4.678.932)	*Depreciation and amortization*
Liabilitas sewa	(77.440.507)	(76.439.518)	*Lease liabilities*
Penyusutan aset hak-guna	81.884.457	82.982.777	*Right-of-use assets depreciation*

14. PERPAJAKAN (lanjutan) / *14. TAXATION (continued)*

d. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / *Income tax expense (continued)*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Reconciliation between income before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income with the estimated taxable income are as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Perbedaan tetap:			*Permanent differences:*
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	37.599.446	36.085.243	*Non-deductible expenses*
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(57.199.060)	(45.050.723)	*Finance income subject to final tax*
Pendapatan sewa dikenakan pajak final	(842.911)	(549.782)	*Rent income subject to final tax*
Taksiran penghasilan kena pajak	283.178.093	271.723.660	*Estimated taxable income*
Beban pajak penghasilan - kini	62.299.180	59.779.205	*Income tax expense - current*
Dikurangi: pajak penghasilan dibayar di muka	(56.732.115)	(47.715.922)	*Less: prepaid income taxes*
Taksiran utang pajak penghasilan	**5.567.065**	**12.063.283**	***Estimated income tax payable***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan yang dikalikan tarif pajak yang berlaku dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before corporate income tax multiplied by the applicable tax rate and income tax expense are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	323.936.670	269.846.486	*Income before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income*
Beban pajak penghasilan pada tarif pajak yang berlaku	71.266.067	59.366.227	*Income tax expense at the applicable tax rate*
Pengaruh perbedaan tetap pada tarif pajak yang berlaku:			*Effect of permanent differences at the applicable tax rate:*
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	8.271.878	7.938.753	*Non-deductible expenses*
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(12.583.793)	(9.911.159)	*Finance income subject to final tax*
Pendapatan sewa yang dikenakan pajak final	(185.440)	(120.952)	*Rent income subject to final tax*
Penyesuaian lain	655.238	357.390	*Other adjustments*
Beban pajak penghasilan	**67.423.950**	**57.630.259**	***Income tax expenses***

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Perhitungan taksiran penghasilan kena pajak pada tahun 2025 akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2025.

Perhitungan taksiran penghasilan kena pajak pada tahun 2024 telah dilaporkan sebagai dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2024.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia menandatangani UU No.7/2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan", yang menerapkan, antara lain, tarif pajak penghasilan badan sebagai berikut:

a. Sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 (sebelumnya 20% yang diatur dalam Perppu No.1 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020).

b. Perusahaan Terbuka dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif pada butir a di atas.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan tidak memenuhi persyaratan penurunan tarif pajak tersebut di atas.

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

e. Pajak penghasilan tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

14. TAXATION (continued)

d. Income tax expense (continued)

The calculation of estimated taxable income for the year 2025 will be used as a basis in filling the Annual Corporate Income Tax Return for the year 2025.

The calculation of estimated taxable income at the end of the year 2024 has been filed in the Annual Corporate Income Tax Return for the year 2024.

On October 29, 2021, the President of the Republic of Indonesia signed UU No.7/2021 regarding "Harmonization of Tax Regulation", which applies, among others, the corporate income tax rate as follows:

a. 22% effective starting fiscal year 2022 (previously 20% as stipulated in Perppu No.1 Year 2020 dated March 31, 2020).

b. Resident publicly-listed companies in Indonesia whose at least 40% or more of the total paid-up shares or other equity instruments are listed for trading in the Indonesia stock exchanges and meet certain requirements in accordance with the government regulations, can apply tariff of 3% lower than the rate as stated in point a above.

For the year ended December 31, 2025 and 2024, the Company did not comply to the requirements for lower tax rate as stated above.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company calculates and pays tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time tax becomes due.

e. Deferred income tax

The details of the Company's deferred tax assets (liabilities) are as follows:

	31 Desember 2025/ ***December 31, 2025***	**31 Desember 2024/** ***December 31, 2024***	
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	5.124.832	7.770.372	*Allowance for impairment of trade receivables*
Imbalan kerja pegawai	6.917.797	6.255.049	*Employee benefit*
Penyusutan dan amortisasi	(3.274.448)	735.791	*Depreciation and amortization*
Liabilitas sewa	151.563.640	161.149.763	*Lease liabilities*
Penyusutan aset hak-guna	(107.545.097)	(117.999.481)	*Right-of-use assets depreciation*
Neto	**52.786.724**	**57.911.494**	***Net***

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

e. Pajak penghasilan tangguhan (lanjutan)

e. Deferred income tax (continued)

Mutasi aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The movement of the Company's deferred tax assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025/*Year ended December 31, 2025*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dibebankan ke/*Charged to*			Saldo akhir/ *Ending balance*	
		Laba (rugi)/ *Profit (loss)*	Ekuitas/ *Equity*	Penyesuaian/ *Adjustments*		
Aset pajak tangguhan						***Deferred tax assets***
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	7.770.372	(2.645.540)	-	-	5.124.832	*Allowance for impairment of trade receivables*
Imbalan kerja pegawai	6.255.049	663.335	-	(587)	6.917.797	*Employee benefit*
Liabilitas sewa	161.149.763	(17.036.912)	-	7.450.789	151.563.640	*Lease liabilities*
Total	**175.175.184**	**(19.019.117)**	**-**	**7.450.202**	**163.606.269**	***Total***
Liabilitas pajak tangguhan						***Deferred tax liabilities***
Penyusutan dan amortisasi	735.791	(3.464.996)	-	(545.243)	(3.274.448)	*Depreciation and amortization*
Penyusutan aset hak-guna	(117.999.481)	18.014.581	-	(7.560.197)	(107.545.097)	*Right-of-use assets depreciation*
Total	**(117.263.690)**	**14.549.585**	**-**	**(8.105.440)**	**(110.819.545)**	***Total***
Aset pajak tangguhan - neto	**57.911.494**	**(4.469.532)**	**-**	**(655.238)**	**52.786.724**	***Deferred tax assets - net***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/*Year ended December 31, 2024*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dibebankan ke/*Charged to*			Saldo akhir/ *Ending balance*	
		Laba (rugi)/ *Profit (loss)*	Ekuitas/ *Equity*	Penyesuaian/ *Adjustments*		
Aset pajak tangguhan						***Deferred tax assets***
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	7.710.537	59.835	-	-	7.770.372	*Allowance for impairment of trade receivables*
Imbalan kerja pegawai	4.309.530	2.036.349	-	(90.830)	6.255.049	*Employee benefit*
Penyusutan dan amortisasi	1.682.653	(1.029.365)	-	82.503	735.791	*Depreciation and amortization*
Liabilitas sewa	175.443.053	(16.816.694)	-	2.523.404	161.149.763	*Lease liabilities*
Total	**189.145.773**	**(15.749.875)**	**-**	**2.515.077**	**175.910.975**	***Total***
Liabilitas pajak tangguhan						***Deferred tax liabilities***
Penyusutan aset hak-guna	(133.383.225)	18.256.211	-	(2.872.467)	(117.999.481)	*Right-of-use assets depreciation*
Total	**(133.383.225)**	**18.256.211**	**-**	**(2.872.467)**	**(117.999.481)**	***Total***
Aset pajak tangguhan - neto	**55.762.548**	**2.506.336**	**-**	**(357.390)**	**57.911.494**	***Deferred tax assets - net***

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan kembali melalui penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

The management believes that the deferred tax assets can be fully recovered through future taxable income.

15. BEBAN AKRUAL / *15. ACCRUED EXPENSES*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Kerjasama mitra usaha	42.080.275	28.785.179	*Partnerships*
Pegawai	19.964.423	13.934.198	*Employees*
Umum	15.839.265	3.927.836	*General*
Imbalan kerja	11.811.498	14.595.003	*Employee benefits*
Bahan	4.863.559	1.577.989	*Material*
Pemeliharaan	1.306.173	740.933	*Maintenance*
Administrasi kantor	435.346	674.560	*Office administration*
Asuransi	-	1.455.165	*Insurance*
Total	**96.300.539**	**65.690.863**	***Total***

Beban akrual - kerjasama mitra usaha merupakan beban akrual atas pembagian pendapatan yang diperoleh dari pencapaian besaran realisasi kegiatan pelayanan jasa bongkar muat.

Accrued expenses - partnership mainly represents accrued expenses from sharing revenue derived from the achievement of loading and unloading activities.

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk biaya bonus dan tantiem direksi.

Accrued expenses - employee mainly represents accrued expenses for employee's bonus and director's tantiem.

Beban akrual - imbalan kerja terutama merupakan akrual dari beban yang dialokasikan oleh Pelindo kepada Perusahaan atas imbalan pasca kerja pegawai perbantuan Pelindo yang ditempatkan di Perusahaan.

Accrued expenses - employee benefits mainly represents accrual from expenses allocated from Pelindo to the Company for post employment benefits expense of Pelindo's employee which placed in the Company.

Beban akrual - umum terutama merupakan beban akrual atas beban perjalanan dinas, renovasi ruangan, dan umum lainnya.

Accrued expenses - general mainly represents accrued expenses for business trip, room renovation, and others.

16. MODAL SAHAM / *16. SHARE CAPITAL*

Susunan kepemilikan saham pada Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of shares ownership in the Company as of December 31, 2025 and 2024, respectively, are as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Total nilai nominal/ *Total nominal amount*	*Shareholders*
PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT")	1.296.144.749	71,28%	129.614.475	*PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT")*
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	13.092.371	0,72%	1.309.237	*PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")*
Publik:				*Public:*
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	100.682.600	5,54%	10.068.260	*PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")*
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	408.465.100	22,46%	40.846.510	*Others (each less than 5% of shares)*
Total	**1.818.384.820**	**100,00%**	**181.838.482**	***Total***

17. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *17. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

Tambahan modal disetor merupakan agio saham yang berasal dari selisih lebih hasil penawaran umum perdana atas nilai nominal saham setelah dikurangi biaya penerbitan (Catatan 1b).

Additional paid-in capital represents premium on stock from excess of proceeds from the initial public offering of shares over par value after deducting the issuance costs (Note 1b).

18. CADANGAN UMUM DAN DIVIDEN

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan No.41 tanggal 17 Juni 2025 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2024 sebagai berikut:

- pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar Rp169.772.981, dimana sebesar Rp44.407.321 telah dibagikan sebagai dividen interim tahun 2024 sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan sebesar Rp125.365.660;
- cadangan umum sebesar Rp2.000.000;
- sisanya sebesar Rp40.443.246 akan digunakan sebagai laba ditahan.

Pembagian dividen final tersebut di atas telah dibayarkan lunas pada tanggal 7 dan 15 Juli 2025.

Pada tanggal 24 Desember 2025, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun 2025 sebesar Rp47.574.220.

Pada tanggal 25 November 2024, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun 2024 sebesar Rp44.407.321 dan telah dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2024 sebesar Rp12.434.049 kepada publik dan pada tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp31.653.540 kepada SPMT dan sebesar Rp319.732 kepada MTI.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan No.26 tanggal 10 Juni 2024 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2023 sebagai berikut:

- pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar Rp152.906.114, dimana sebesar Rp39.458.744 telah dibagikan sebagai dividen interim tahun 2023 sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan sebesar Rp113.447.369;
- cadangan umum sebesar Rp2.000.000;
- sisanya sebesar Rp35.948.730 akan digunakan sebagai laba ditahan.

Pembagian dividen final tersebut di atas telah dibayarkan lunas pada tanggal 8, 10, dan 11 Juli 2024, sedangkan atas dividen interim telah dibayarkan lunas pada tanggal 10 Januari, 1 Maret dan 11 Juni 2024.

18. GENERAL RESERVE AND DIVIDEND

Based on the Deed of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders No.41 dated June 17, 2025 of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company's shareholders determine the use of the Company's net profit for the year 2024 as follows:

- *distribution of dividends to shareholders amounting to Rp169,772,981, in which Rp44,407,321 has been distributed as interim dividend for 2024, therefore, the remaining amount will be distributed as final dividend amounting to Rp125,365,660;*
- *general reserves amounting to Rp2,000,000;*
- *the remaining amounting to Rp40,443,246 as retained earnings.*

The final dividend distribution above has been fully paid on July 7 and 15, 2025.

On December 24, 2025, the Company declared interim dividend for 2025 amounted Rp47,574,220.

On November 25, 2024, the Company declared interim dividend for 2024 amounted Rp44,407,321, and was paid on December 19, 2024 to Public amounted to Rp12,434,049 and was paid on December 30, 2024 amounted to Rp31,653,540 to SPMT and amounted to Rp319,732 to MTI.

Based on the Deed of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders No.26 dated June 10, 2024 of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company's shareholders determine the use of the Company's net profit for the year 2023 as follows:

- *distribution of dividends to shareholders amounting to Rp152,906,114, in which Rp39,458,744 has been distributed as interim dividend for 2023, therefore, the remaining amount will be distributed as final dividend amounting to Rp113,447,369;*
- *general reserves amounting to Rp2,000,000;*
- *the remaining amounting to Rp35,948,730 as retained earnings.*

The final dividend distribution above has been fully paid on July 8, 10, and 11, 2024, while for the interim dividen has been fully paid on January 10, March 1 and June 11, 2024.

19. PENDAPATAN OPERASI / *19. OPERATING REVENUES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pelayanan jasa terminal	834.977.437	743.014.654	*Terminal services*
Pelayanan jasa barang	75.813.882	53.735.491	*Cargo services*
Pelayanan rupa-rupa usaha	18.401.751	27.295.909	*Miscellaneous services*
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	767.346	549.782	*Land, building, water and electricity*
Total	**929.960.416**	**824.595.836**	***Total***

Pendapatan operasi - pelayanan jasa terminal terdiri dari kegiatan bongkar muat, pelayanan kargo serta penumpukan di area Perusahaan.

Operating revenues - terminal services consists of stevedoring, cargo handling and cargo stacking in the Company's area.

Pendapatan operasi - pelayanan jasa barang terutama merupakan pendapatan jasa dermaga atas penggunaan fasilitas pelabuhan Perusahaan.

Operating revenues - cargo services mainly represents revenue from usage of Company's port facilities.

Pendapatan operasi - pelayanan rupa-rupa usaha terutama merupakan atas kerjasama pelayanan penanganan kargo di area kerjasama dengan mitra usaha.

Operating revenues - miscellaneous services mainly represents revenue from cargo handling services at the partnership area with business partners.

Rincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of customers which represents more than 10% of the total revenues are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		Persentase terhadap jumlah Pendapatan/*Percentage to total Revenue*		
	2025	**2024**	**2025**	**2024**	
PT Bandar Krida Jasindo	230.577.094	208.077.100	24,79	25,23	*PT Bandar Krida Jasindo*
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia	95.800.534	117.007.818	10,30	14,19	*PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia*
Total	**326.377.628**	**325.084.918**	**35,09**	**39,42**	***Total***

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *20. COST OF REVENUES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Kerjasama mitra usaha	228.671.709	202.194.866	*Partnership*
Penyusutan (Catatan 8 dan 10)	95.221.919	107.206.601	*Depreciation (Note 8 and 10)*
Tenaga kerja alih daya	71.148.753	58.968.168	*Outsource labor*
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	58.822.374	53.582.006	*Salaries, wages, and employee benefits*
Konsesi	21.463.002	16.831.581	*Concession*
Bahan dan utilitas	17.793.203	14.037.834	*Supplies and utilities*
Pemeliharaan	15.415.591	14.838.033	*Maintenance*
Alokasi imbalan pasca kerja	6.531.064	4.459.541	*Allocation for post employment benefit*
Asuransi	1.473.852	1.835.178	*Insurance*
Beban eksploitasi lainnya	14.160.387	3.124.762	*Other exploitation expenses*
Total	**530.701.854**	**477.078.570**	***Total***

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada transaksi dari satu pemasok atau mitra dengan total pembelian kumulatif melebihi 10% dari total pendapatan Perusahaan.

During the year ended December 31, 2025 and 2024, there were no purchases made from any single supplier or partner with a cumulative amount exceeding 10% of total sales of the Company.

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *21. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	16.155.696	14.929.972	*Salaries, wages, and employee benefits*
Tenaga kerja alih daya	13.755.426	11.709.991	*Outsource labor*
Pemeliharaan	12.703.493	17.686.687	*Maintenance*
Pajak bumi dan bangunan	9.001.613	8.940.330	*Land and building taxes*
Perjalanan dinas	6.973.850	4.638.306	*Business travelling*
Konsultan	6.313.630	4.218.766	*Consultant*
Alokasi imbalan pasca kerja	5.280.435	3.698.156	*Allocation for post employment benefit*
Bahan dan utilitas	4.922.615	3.911.470	*Supplies and utilities*
Promosi dan pemasaran	2.336.629	2.372.166	*Promotion and marketing*
Administrasi kantor	2.003.515	1.607.070	*Office administration*
Amortisasi (Catatan 9)	1.491.810	1.407.109	*Amortization (Notes 9)*
Penyusutan (Catatan 8)	848.947	2.078.880	*Depreciation (Note 8)*
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha (Catatan 5)	-	271.977	*Allowance for impairment of trade receivables (Note 5)*
Beban umum lainnya	14.023.242	11.953.114	*Other general expenses*
Total	**95.810.901**	**89.423.994**	***Total***

22. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI LAINNYA / *22. OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pendapatan operasi lainnya:			***Other operating income:***
Pemulihan penyisihan Piutang (Catatan 5)	12.025.181	-	*Recovery of allowance of receivables (Note 5)*
Laba penjualan aset tetap (Catatan 8)	1.785.770	-	*Gain from sales of fixed asset (Note 8)*
Pendapatan denda	15.851	3.945.751	*Income from penalty*
Penyesuaian konsesi	-	3.877.647	*Concession adjustment*
Penyesuaian tantiem	-	1.591.947	*Tantiem adjustment*
Lain-lain	760.598	3.330.201	*Others*
Total	**14.587.400**	**12.745.546**	***Total***
Beban operasi lainnya:			***Other operating expenses:***
Pajak final pendapatan keuangan	11.479.042	8.972.294	*Final tax from finance income*
Denda/klaim	3.627.301	2.403.713	*Penalty/claim*
Rugi penghapusan aset tetap	800.400	1.064.619	*Loss on disposal fixed assets*
Lain-lain	1.269.109	1.808.894	*Others*
Total	**17.175.852**	**14.249.520**	***Total***

23. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN / *23. FINANCE INCOME AND EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pendapatan keuangan:			***Finance income:***
Bunga deposito berjangka	55.981.643	43.873.242	*Interests on time deposits*
Bunga jasa giro	1.217.417	1.177.481	*Interests on current accounts*
Total	**57.199.060**	**45.050.723**	***Total***
Beban keuangan:			***Finance expense:***
Bunga aset sewaan (Catatan 10)	34.121.599	31.793.535	*Interest on lease liabilities (Note 10)*
Total	**34.121.599**	**31.793.535**	***Total***

24. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

24. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

In the ordinary course of business, the Company engages in transactions with related parties, which are conducted based on prices and terms agreed between the parties. The nature of relationships and transactions with related parties are as follows:

Sifat relasi/ ***Nature of relationship***	**Nama pihak berelasi/** ***Name of related parties***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transaction***
Entitas induk PT Pelindo Multi Terminal/ *Parent entity of PT Pelindo Multi Terminal*	PT Pelabuhan Indonesia (“Pelindo”)	Imbalan kerja, konsesi, sewa, dan kerjasama mitra usaha/ *Employee benefit, concession, lease and business partnership*
Entitas induk/ *Parent Entity*	PT Pelindo Multi Terminal (“SPMT”)	Pemegang saham, kerjasama mitra usaha/ *Shareholder, business partnership*
Entitas sepengendalian Pelindo/ *Entities under common control Pelindo*	PT Menara Maritim Indonesia (“MMI”)	Layanan sewa ruang kantor/ *Office leases*
	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (“ILCS”)	Layanan teknologi informasi/ *Information technology services*
	PT Pelindo Solusi Maritim (“PSM”)	Pemeliharaan alat/ *Equipment maintenance*
	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (“PMLI”)	Pendidikan dan pelatihan/ *Training and education*
	PT Pelabuhan Indonesia Investama (“PII”)	Pemegang saham/ *Shareholder*
	PT Energi Pelabuhan Indonesia (“EPI”)	Penyedia listrik/ *Electricity provider*
	PT Electronic Data Interchange Indonesia (“EDII”)	Layanan sistem informasi/ *Information system services*
	PT IPC Terminal Petikemas (“IPC TPK”)	Kerjasama mitra usaha/ *Business partnership*
	PT Pelindo Daya Sejahtera (“PDS”)	Penyedia Tenaga Alih Daya/ *Outsourcing*
	PT Lamong Energi Indonesia (“LEGI”)	Penyedia listrik/ *Electricity provider*
	PT Pelabuhan Tanjung Priok (“PTP”)	Kerjasama mitra usaha/ *Business partnership*
	PT Multi Terminal Indonesia (“MTI”)	Kerjasama mitra usaha, pemegang saham/ *Business partnership, shareholder*
	PT Berkah Industri Mesin Angkat (”BIMA”)	Kerjasama mitra usaha / *Business partnership*
	PT Pelindo Jsa Maritim (”SPJM”)	Kerjasama mitra usaha / *Business partnership*
Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia/ *Entities under common control of the Government of the Republic of Indonesia*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Transaksi keuangan/*Financial transaction*
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Transaksi keuangan/*Financial transaction*
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Transaksi keuangan/*Financial transaction*

24. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

24. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

In the ordinary course of business, the Company engages in transactions with related parties, which are conducted based on prices and terms agreed between the parties. The nature of relationships and transactions with related parties are as follows: (continued)

Sifat relasi/ ***Nature of relationship***	**Nama pihak berelasi/** ***Name of related parties***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transaction***
Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia/ *Entities under common control of the Government of the Republic of Indonesia*	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Transaksi keuangan/*Financial transaction*
	PT Bank Jabar Banten Syariah	Transaksi keuangan/*Financial transaction*
	PT BRI Asuransi Indonesia	Transaksi keuangan/*Financial transaction*
	PT BNI Life Insurance	Asuransi tenaga kerja/*Employee insurance*
	PT Mandiri Sekuritas	Perantara perdagangan efek/*Securities broker*
	PT Rumah Sakit Pelabuhan ("RSP")	Layanan kesehatan/*Health services*
	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Lain-lain/*Others*
	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) ("KBN")	Sewa/*Lease*
	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ("ASDP")	Kerjasama mitra usaha/*Business partnership*

a. Kas dan setara kas (Catatan 4) / *a. Cash and cash equivalents (Note 4)*

	Jumlah/*Total*		**Persentase terhadap total Aset/*Percentage to total Assets***		
	31 Desember/ *December 31,2025*	**31 Desember/ *December 31,2024***	**31 Desember/ *December 31,2025***	**31 Desember/ *December 31,2024***	
Bank					***Bank***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22.210.917	26.141.275	1,08	1,41	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.510.189	8.826.303	0,46	0,48	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	558.898	417.835	0,03	0,02	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Deposito berjangka					***Time deposits***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	515.000.000	400.000.000	25,02	21,61	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	440.000.000	375.000.000	21,38	20,26	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Jabar Banten Syariah	45.000.000	-	2,19	-	*PT Bank Jabar Banten Syariah*
Total	**1.032.280.004**	**810.385.413**	**50,16**	**43,78**	***Total***

b. Piutang usaha (Catatan 5) / *b. Trade receivable (Note 5)*

	Jumlah/*Total*		**Persentase terhadap total Aset/*Percentage to total Assets***		
	31 Desember/ *December 31,2025*	**31 Desember/ *December 31,2024***	**31 Desember/ *December 31,2025***	**31 Desember/ *December 31,2024***	
Pelindo	1.090.689	240.882	0,05	0,00	*Pelindo*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	90.908	-	0,00	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
ASDP	50.331	33.266	0,00	0,00	*ASDP*
SPJM	1.225	-	0,00	0,00	*SPJM*
SPMT	-	8.348	-	0,00	*SPMT*
PTP	-	5.404	-	0,00	*PTP*
Total	**1.233.153**	**287.900**	**0,05**	**0,00**	***Total***

24. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

24. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

c. Aset kontrak (Catatan 7)

c. Contract assets (Note 7)

	Jumlah/*Total*		Persentase terhadap total Aset/*Percentage to total Assets*		
	31 Desember/ *December 31,2025*	31 Desember/ *December 31,2024*	31 Desember/ *December 31,2025*	31 Desember/ *December 31,2024*	
SPMT	12.931.550	4.232.539	0,63	0,23	*SPMT*
Pelindo	169.849	357.726	0,01	0,02	*Pelindo*
Total	**13.101.399**	**4.590.265**	**0,64**	**0,25**	***Total***

d. Aset tidak lancar lainnya

d. Other non-current assets

	Jumlah/*Total*		Persentase terhadap total Aset/*Percentage to total Assets*		
	31 Desember/ *December 31,2025*	31 Desember/ *December 31,2024*	31 Desember/ *December 31,2025*	31 Desember/ *December 31,2024*	
Uang jaminan					***Guarantee deposits***
KBN	2.359.191	2.359.191	0,11	0,13	*KBN*
EPI	305.805	305.805	0,01	0,02	*EPI*
RSP	300.000	300.000	0,01	0,02	*RSP*
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	190.000	190.000	0,01	0,01	*Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*
Total	**3.154.996**	**3.154.996**	**0,14**	**0,18**	***Total***

Aset tidak lancar lainnya merupakan uang jaminan pelayanan listrik, lapangan penumpukan dan pelayanan kesehatan.

Guarantee deposits represents deposits for electricity services, storage yard and health services.

e. Utang usaha (Catatan 11)

e. Trade payables (Note 11)

	Jumlah/*Total*		Persentase terhadap total Liabilitas/*Percentage to total Liabilities*		
	31 Desember/ *December 31,2025*	31 Desember/ *December 31,2024*	31 Desember/ *December 31,2025*	31 Desember/ *December 31,2024*	
Pelindo	14.844.015	28.586.311	2,13	4,99	*Pelindo*
PDS	13.507.297	5.791.956	1,94	1,01	*PDS*
EPI	2.312.765	1.088.969	0,33	0,19	*EPI*
ILCS	1.802.947	2.026.795	0,26	0,35	*ILCS*
SPMT	1.153.664	-	0,17	-	*SPMT*
IPC TPK	924.708	601.269	0,13	0,10	*IPC TPK*
PMLI	455.649	531.169	0,07	0,09	*PMLI*
BRI Asuransi Indonesia	393.958	-	0,06	-	*BRI Asuransi Indonesia*
BIMA	37.660	-	0,01	-	*BIMA*
PSM	15.949	225.307	0,00	0,04	*PSM*
LEGI	15.709	127.431	0,00	0,02	*LEGI*
MMI	1.417	10.351	0,00	0,00	*MMI*
KBN	-	1.148.795	-	0,20	*KBN*
RSP	-	477.194	-	0,08	*RSP*
Total	**35.465.738**	**40.615.547**	**5,10**	**7,07**	***Total***

f. Utang lain-lain (Catatan 12)

f. Other payables (Note 12)

	Jumlah/*Total*		Persentase terhadap total Liabilitas/*Percentage to total Liabilities*		
	31 Desember/ *December 31,2025*	31 Desember/ *December 31,2024*	31 Desember/ *December 31,2025*	31 Desember/ *December 31,2024*	
ILCS	3.820.000	2.982.464	0,55	0,52	*ILCS*
EPI	722.396	1.055.502	0,10	0,18	*EPI*
Total	**4.542.396**	**4.037.966**	**0,65**	**0,70**	***Total***

24. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *24. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)*

g. Liabilitas jangka pendek lainnya (Catatan 13) / *g. Other current liabilities (Note 13)*

	Jumlah/*Total*		Persentase terhadap total Liabilitas/*Percentage to total Liabilities*		
	31 Desember/ *December 31,2025*	31 Desember/ *December 31,2024*	31 Desember/ *December 31,2025*	31 Desember/ *December 31,2024*	
Uang titipan					***Deposits received***
PT BNI Life Insurance	1.692.206	1.123.303	0,24	0,20	*PT BNI Life Insurance*
PT Mandiri Sekuritas	-	181.748	-	0,03	*PT Mandiri Sekuritas*
Total	**1.692.206**	**1.305.051**	**0,24**	**0,23**	***Total***

h. Utang Dividen / *h. Dividen payable*

	Jumlah/*Total*		Persentase terhadap total Liabilitas/*Percentage to total Liabilities*		
	31 Desember/ *December 31,2025*	31 Desember/ *December 31,2024*	31 Desember/ *December 31,2025*	31 Desember/ *December 31,2024*	
SPMT	33.910.905	-	4,86	0,00	*SPMT*
MTI	342.535	-	0,05	0,00	*MTI*
Total	**34.253.440**	**-**	**4,91**	**0,00**	***Total***

i. Pendapatan operasi (Catatan 19) / *i. Operating revenues (Note 19)*

	Jumlah/*Total*		Persentase terhadap total Liabilitas/*Percentage to total Liabilities*		
	31 Desember/ *December 31,2025*	31 Desember/ *December 31,2024*	31 Desember/ *December 31,2025*	31 Desember/ *December 31,2024*	
SPMT	24.711.169	12.665.173	2,66	1,54	*SPMT*
Pelindo	285.685	394.020	0,03	0,05	*Pelindo*
Total	**24.996.854**	**13.059.193**	**2,69**	**1,59**	***Total***

j. Beban pokok pendapatan (Catatan 20) / *j. Cost of revenues (Note 20)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		Persentase terhadap total Beban Pokok Pendapatan/*Percentage to total Cost of Revenues*		
	2025	2024	2025	2024	
PDS	82.741.616	56.635.278	15,59	11,87	*PDS*
Pelindo	44.853.603	41.564.989	8,45	8,71	*Pelindo*
ILCS	14.729.323	14.350.503	2,78	3,01	*ILCS*
EPI	4.498.184	4.548.872	0,85	0,95	*EPI*
IPC TPK	3.302.838	3.160.198	0,62	0,66	*IPC TPK*
SPMT	2.033.579	-	0,38	0,00	*SPMT*
BIMA	520.944	31.735	0,10	0,01	*BIMA*
MMI	503.420	621.152	0,09	0,13	*MMI*
PMLI	446.137	600.586	0,08	0,13	*PMLI*
LEGI	190.483	196.257	0,04	0,04	*LEGI*
EDII	43.500	43.000	0,01	0,01	*EDII*
PSM	-	402.473	-	0,08	*PSM*
MTI	-	45.493	-	0,01	*MTI*
Total	**153.863.627**	**122.200.536**	**28,99**	**25,61**	***Total***

k. Kompensasi personil manajemen kunci / *k. Key management personnel compensation*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	2024	
Imbalan kerja jangka pendek	8.887.471	9.695.656	*Short-term employee benefits*

25. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Instrumen Keuangan

Nilai tercatat instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat (berdasarkan jumlah nosional) kas dan setara kas, piutang usaha, aset kontrak, uang jaminan, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, uang titipan, utang dividen, dan liabilitas sewa kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut berjangka pendek.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgemental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:
- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Perusahaan akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

Informasi Nilai Wajar

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, hierarki nilai wajar Perusahaan untuk aset yang nilai wajarnya diungkapkan adalah sebagai berikut:

25. FAIR VALUE MEASUREMENT

Financial Instruments

The carrying values of financial instruments presented in the statement of financial position approximate their fair values.

Management has determined that the carrying amounts (based on notional amounts) of cash and cash equivalents, trade receivables, contract assets, guarantee deposits, trade payables, other payables, accrued expenses, deposits received, dividend payables, and lease liabilities are reasonably approximate their fair values because they are mostly short-term in nature.

Fair value estimation is judgemental and involved various boundaries, including:

- *Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.*
- *Fair value estimation are not always indicating value that the Company will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.*

Fair Value Information

As of December 31, 2025 and 2024, fair value hierarchy of the Company for assets which fair value were disclosed are as follows:

	31 Desember 2025/*December 31, 2025*				
	Total/ ***Total***	**Level 1/** ***Level 1***	**Level 2/** ***Level 2***	**Level 3/** ***Level 3***	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					***Assets for which fair value are disclosed***
Aset tidak lancar					***Non-current Assets***
Aset tetap *)	12.350.000	-	12.350.000	-	*Fixed assets *)*

*) Untuk aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp6.008.592/*For fixed assets with net book value of Rp6,008,592*

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*				
	Total/ ***Total***	**Level 1/** ***Level 1***	**Level 2/** ***Level 2***	**Level 3/** ***Level 3***	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					***Assets for which fair value are disclosed***
Aset tidak lancar					***Non-current Assets***
Aset tetap *)	8.253.000	-	8.253.000	-	*Fixed assets *)*

) Untuk aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp6.342.984/For fixed assets with net book value of Rp6,342,984*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar Level 1 dan Level 2, dan tidak terdapat pengalihan dari Level 3 pengukuran nilai wajar.

Tidak terdapat aset dan liabilitas lain yang diukur dan diungkapkan selain yang telah dijelaskan diatas.

As of December 31, 2025 and 2024, there is no transfer between measurement of fair value of Level 1 and Level 2 and no transfer from Level 3 fair value measurements.

No other assets and liabilities have been measured and disclosed other than above explained.

26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko suku bunga. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Tabel berikut menunjukkan jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan.

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from the Company's financial instruments are liquidity risk, credit risk and interest rate risk. The operational activities of the Company are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Liquidity risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flows position of the Company is not enough to cover the liabilities which become due.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Company's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

The table below summarizes the maturity profile of financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

31 Desember 2025/*December 31, 2025*

	Kurang dari 1 tahun/ *Below 1 year*	1-3 tahun/ *1-3 years*	3-5 tahun/ *3-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Total/ *Total*	
Utang usaha	46.380.750	-	-	-	46.380.750	*Trade payables*
Utang lain-lain	5.268.293	-	-	-	5.268.293	*Other payables*
Beban akrual	96.300.539	-	-	-	96.300.539	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka pendek lainnya	6.821.340	-	-	-	6.821.340	*Other current liabilities*
Utang dividen	47.574.220	-	-	-	47.574.220	*Dividen payable*
Liabilitas sewa	55.623.690	493.788.639	-	-	549.412.329	*Lease liabilities*
Total	**257.968.832**	**493.788.639**	**-**	**-**	**751.757.471**	***Total***

31 Desember 2024/*December 31, 2024*

	Kurang dari 1 tahun/ *Below 1 year*	1-3 tahun/ *1-3 years*	3-5 tahun/ *3-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Total/ *Total*	
Utang usaha	47.303.552	-	-	-	47.303.552	*Trade payables*
Utang lain-lain	5.488.115	-	-	-	5.488.115	*Other payables*
Beban akrual	65.690.863	-	-	-	65.690.863	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka pendek lainnya	6.033.295	-	-	-	6.033.295	*Other current liabilities*
Liabilitas sewa	40.418.552	-	552.448.212	-	592.866.764	*Lease liabilities*
Total	**164.934.377**	**-**	**552.448.212**	**-**	**717.382.589**	***Total***

26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya.

Tabel berikut menyajikan eksposur posisi keuangan terkait risiko kredit.

Credit risk

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations.

The table below shows the Company's exposures related to credit risk.

	31 Desember/*December 31*, 2025		31 Desember/*December 31*, 2024		
	Total Bruto/ *Gross Amount*	Total Neto/ *Net Amount*	Total Bruto/ *Gross Amount*	Total Neto/ *Net Amount*	
Aset keuangan					***Financial Assets***
Lancar					*Current*
Bank dan deposito berjangka	1.082.280.004	1.082.280.004	810.385.413	810.385.413	*Cash in bank and time deposits*
Piutang usaha	93.811.008	70.516.315	115.528.909	80.209.035	*Trade receivables*
Aset kontrak	14.519.646	14.519.646	9.153.990	9.153.990	*Contract assets*
Tidak lancar					*Non-current*
Uang jaminan	3.154.996	3.154.996	3.154.996	3.154.996	*Guarantee deposits*
Total	**1.193.765.654**	**1.170.470.961**	**938.223.308**	**902.903.434**	***Total***

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga:

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates.

The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Company's financial assets that are exposed to interest rate risk:

	Suku bunga mengambang/ *Floating interest rate*		Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate*			
	<= 1 Tahun/ *<= 1 Year*	> 1 Tahun/ *> 1 Year*	<= 1 Tahun/ *<= 1 Year*	> 1 Tahun/ *> 1 Year*	Jumlah/*Total*	
31 Desember 2025						***December 31, 2025***
Bank dan deposito berjangka	1.082.280.004	-	-	-	1.082.280.004	*Cash in bank and time deposit*
31 Desember 2024						***December 31, 2024***
Bank dan deposito berjangka	810.385.413	-	-	-	810.385.413	*Cash in bank and time deposit*

Dampak perubahan tingkat suku bunga per tahun deposito berjangka terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The effect of changes in the annual interest rates of time deposits to profit before income tax is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	2024	
Kenaikan 50 basis poin	4.518.750	3.445.833	*Increase by 50 basis points*
Penurunan 50 basis poin	(4.518.750)	(3.445.833)	*Decrease by 50 basis points*

26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimumkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Perusahaan dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company manages its capital to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position to ensure optimal capital structure to reduce the cost of capital.

27. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Sewa

1) Pada 17 Desember 2018, Perusahaan dan Pelindo menandatangani Berita Acara Kesepakatan tentang sewa atas aset-aset berupa lahan dan dermaga Pelindo pada area Pelabuhan Tanjung Priok. Jangka waktu Perjanjian ini adalah 15 (lima belas) tahun dimulai dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2032.

   Total pembayaran sewa sebesar Rp1.312.560.791 akan dibayarkan setiap 5 (lima) tahun dengan nilai pembayaran sebesar Rp320.590.261, Rp439.522.318 dan Rp552.448.212 masing-masing di tahun 2018, 2023 dan 2028. Perusahaan telah melakukan pembayaran pertama pada tanggal 28 Desember 2018 dan pembayaran kedua pada tanggal 3 Mei 2023.

2) Pada 9 Maret 2022, Perusahaan dan Pelindo Regional 2 Tanjung Priok menandatangani Perjanjian tentang Pendayagunaan Aset Tetap Lahan Eks Dharma Karya Perdana (DKP). Jangka waktu dalam Perjanjian ini adalah selama 2 (dua) tahun dimulai dari tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 dan telah diperpanjang dari tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian antara Perusahaan dan Pelindo Regional 2 Tanjung Priok masih dalam proses perpanjangan.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Lease

1) On December 17, 2018, the Company and Pelindo signed an Agreement regarding rent for Pelindo's assets in the form of land and piers in the Tanjung Priok Port area. This Agreement is valid for 15 (fifteen) years starting January 1, 2018 until December 31, 2032.

   Total rent payment for the agreement amounting to Rp1,312,560,791 will be paid every 5 (five) years amounting to Rp320,590,261, Rp439,522,318 and Rp552,448,212 each in 2018, 2023 and 2028, respectively. The Company has made the first payment on December 28, 2018 and the second payment on May 3, 2023.

2) On March 9,2022, the Company and Pelindo Regional 2 signed an Agreement on the utilization of assets of Eks Dharma Karya Perdana (DKP) field. This Agreement is valid for 2 (two) years starting from November 1, 2022 until October 31, 2023 and has been extended starting from November 1, 2023 and until October 31, 2025. As of the date of completion of these financial statements, the agreement between the Company and Pelindo Regional 2 Tanjung Priok is still in the process of extension.

27. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Sewa (lanjutan)

3) Pada tanggal 6 November 2023, Perusahaan dan Pelindo menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Optimalisasi Aset Pelindo Regional 2 Tanjung Priok di Dermaga dan Lapangan Eks Presiden. Nilai kerja sama adalah revenue sharing sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan pengoperasian lapangan. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan, berlaku sampai dengan 14 November 2025 dan tidak diperpanjang.

4) Pada 4 Desember 2019, Perusahaan dan Pelindo menandatangani Perjanjian tentang pendayagunaan aset di Jalan Sindang Laut (Eks-PP) seluas 10.000 m2. Jangka waktu Perjanjian ini adalah 4 (empat) tahun dimulai dari tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dan berlaku mulai tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024.

Perjanjian ini terakhir diperpanjang pada tanggal 30 April 2025, dimana terdapat penambahan ruang lingkup kerja sama lahan Eks-PP masing-masing seluas 4.192,58 m² dan 4.317,77 m². Jangka waktu perjanjian ini terhitung sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan 30 September 2025.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian antara Perusahaan dan Pelindo masih dalam proses perpanjangan.

5) Pada 30 September 2022, Perusahaan dan Pelindo menandatangani Perjanjian tentang pendayagunaan aset di Jalan Sindang Laut (Eks-PP) seluas 13.274 m2. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dimulai dari tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian antara Perusahaan dan Pelindo masih dalam proses perpanjangan.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. Lease (continued)

3) On November 6, 2023, the Company and Pelindo signed an Agreement on Cooperation in Optimizing Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Assets in the Dock and Ex Presiden Field. The value of the cooperation is a revenue sharing of 30% (thirty percent) of the field operating income. This agreement has been amended several times, effective until November 14, 2025 and not extended.

4) On December 4, 2019, the Company and Pelindo signed an Agreement on the utilization of assets on Jalan Sindang Laut (Ex-PP) covering an area of 10,000 m2. This Agreement is valid for 4 (four) years starting November 1, 2018 until October 31, 2022. This agreement has been extended and valid from November 1, 2022 until October 31, 2024.

This agreement was last renewed on April 30, 2025, which included an expansion of the cooperation scope for the Ex-PP land areas, totaling 4,192.58 m² and 4,317.77 m², respectively. The term of this agreement is effective from February 15, 2025, until September 30, 2025.

As of the date of completion of these financial statements, the agreement between the Company and Pelindo is still in the process of extension.

5) On September 30, 2022, the Company and Pelindo signed an Agreement on the utilization of assets on Jalan Sindang Laut (Ex-PP) covering an area of 13,274 m2. The term of the agreement is valid for 3 (three) years starting October 1, 2022 until October 1, 2025.

As of the date of completion of these financial statements, the agreement between the Company and Pelindo is still in the process of extension.

27. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Sewa (lanjutan)

6) Pada 19 Agustus 2022, Perusahaan dan KBN menandatangani Perjanjian tentang sewa menyewa gudang terbuka/depo. Jangka waktu Perjanjian ini adalah 2 (dua) tahun dimulai dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan, berlaku sampai dengan 30 September 2025 dan tidak diperpanjang.

b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa pelayanan pelabuhan lainnya

1) Pada tanggal 8 April 2021, Perusahaan dan PT Anugrah Permata Samudra menandatangani perjanjian tentang pelayanan dan penanganan kargo passenger car (CBU), alat berat, bus & truck, spare parts di Terminal Internasional Perusahaan. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir kali pada tanggal 29 April 2024. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 30 April 2026.

2) Pada tanggal 8 April 2021, Perusahaan dan PT Bandar Krida Jasindo menandatangani perjanjian tentang pelayanan dan penanganan kargo passenger car (CBU), alat berat, bus & truck, spare parts di Terminal Internasional Perusahaan. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir kali pada tanggal 25 April 2024. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 30 April 2026.

3) Pada tanggal 10 Februari 2021, Perusahaan dan PT Adimas Bahtera Harapan menandatangani berita acara kesepakatan tentang kerja sama pelayanan dan penanganan kargo passenger car (CBU), truck & bus, alat berat dan general cargo di Terminal Domestik Perusahaan. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir kali pada tanggal 11 September 2024 dan berlaku sampai dengan 9 Februari 2026. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian antara Perusahaan dan PT Adimas Bahtera Harapan masih dalam proses perpanjangan.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. Lease (continued)

6) *On August 19, 2022, the Company and KBN signed an Agreement regarding the lease of an open warehouse/depot. This Agreement is valid for 2 (two) years starting August 1, 2022 until July 31, 2024. This agreement has been extended several times, effective until September 30, 2025 and not extended.*

b. Loading unloading services and other port services agreements

1) On April 8, 2021, the Company and PT Anugrah Permata Samudra entered into agreement regarding service and handling of cargo passenger car (CBU), heavy equipment, bus & truck, spare parts in International Terminal of the Company. This agreement has been amended and extended several times, last amendment on April 29, 2024. This agreement is valid from May 1, 2024 until April 30, 2026.

2) On April 8, 2021, the Company and PT Bandar Krida Jasindo entered into agreement regarding service and handling of cargo passenger car (CBU), heavy equipment, bus & truck, spare parts in International Terminal of the Company. This agreement has been amended and extended several times, last amendment on April 25, 2024. This agreement is valid from May 1, 2024 until April 30, 2026.

3) On February 10, 2021, the Company and PT Adimas Bahtera Harapan entered into an agreement regarding the cooperation in the service and handling of cargo passenger car (CBU), trucks/busses, heavy equipments and general cargo in Company's Domestic Terminal. This agreement has been amended and extended several times, last amendment on September 11, 2024 and valid until February 9, 2026. As of the date of completion of these financial statements, the agreement between the Company and PT Adimas Bahtera Harapan is still in the process of extension.

27. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa pelayanan pelabuhan lainnya (lanjutan)

4) Pada tanggal 10 Maret 2016, Perusahaan dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama Jasa Pelayanan Kepelabuhanan, Pelayanan Bongkar Muat dan Penyediaan Lahan di area Perusahaan. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir kali pada tanggal 14 Oktober 2024. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2027.

5) Pada tanggal 2 Mei 2016, Perusahaan dan PT Astra Daihatsu Motor menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Pelayanan Kepelabuhanan dan Pelayanan Bongkar Muat di area Perusahaan. Perjanjian telah beberapa kali diperpanjang dan terakhir diperpanjang berdasarkan addendum tertanggal 29 September 2025, dengan masa berlaku sampai dengan 31 Maret 2028.

6) Pada tanggal 21 Desember 2021, Perusahaan dan PT Toyota-Astra Motor menandatangani Perjanjian tentang jasa pelayanan pelabuhan di area Perusahaan. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan 15 November 2026.

7) Pada tanggal 9 Juni 2022, Perusahaan dan PT Roro Samudra Putra Harmonimas menandatangani Perjanjian tentang pelayanan dan penanganan kargo passenger car (CBU), alat berat, bus & truck dan general cargo di Terminal Domestik Perusahaan. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir kali pada tanggal 28 Juni 2024. Perjanjian berlaku untuk periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 30 September 2026.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Loading unloading services and other port services agreements (continued)

4) On March 10, 2016, the Company and PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia entered into a Partnership Agreement regarding port handling services, stevedoring and yard providing within the Company's area. This agreement has been amended and extended several times, last amendment on October 14, 2024. This agreement is valid from March 1, 2024 until February 28, 2027.

5) On May 2, 2016, the Company and PT Astra Daihatsu Motor entered into a partnership agreement regarding port handling services and stevedoring services within the Company's area. The agreement has been extended several times and was most recently extended pursuant to an addendum dated 29 September 2025, with a validity period until 31 March 2028.

6) On December 21, 2021, the Company and PT Toyota-Astra Motor entered into Agreement regarding port handling service within the Company's area. The agreement is valid for 5 (five) years starting from November 16, 2021 until November 15, 2026.

7) On June 9, 2022, the Company and PT Roro Samudra Putra Harmonimas, third party, entered into Agreement concerning service and handling of passenger car cargo (CBU), heavy equipment, bus & truck and general cargo at the Company's Domestic Terminal. The Agreement has been amended and extended several times, with last amendment on June 28, 2024 and valid untilSeptember 30, 2026. The agreement is valid for the period from 1 October 2024 until 30 September 2026.

27. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa pelayanan pelabuhan lainnya (lanjutan)

8) Pada tanggal 26 April 2022, Perusahaan dan IPC TPK sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang pengoperasian dermaga dan lapangan 107 dan 108 Pelabuhan Tanjung Priok. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir berdasarkan perubahan tertanggal 16 Juni 2025, dan berlaku sampai dengan 31 Maret 2026

9) Pada tanggal 31 Mei 2021, Perusahaan dan Pelindo Cabang Pontianak sepakat menandatangani Perjanjian tentang kerja sama pelayanan kapal ro-ro di Pelabuhan Pontianak. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir berdasarkan perubahan tertanggal 30 Juni 2025, dan berlaku sampai dengan 30 Juni 2026.

10) Pada tanggal 27 Desember 2021, Perusahaan dan PT Glovis Indonesia Logistic menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penanganan dan penumpukan kargo di Terminal Internasional. Kesepakatan ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 dan telah diperpanjang dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian antara Perusahaan dan PT Glovis Indonesia Logistic masih dalam proses perpanjangan.

11) Pada tanggal 23 Desember 2025, Perusahaan dan Hyundai Glovis Co., Ltd menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang pelayanan penanganan bongkar muat. Perjanjian berlaku untuk periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2027.

12) Pada tanggal 10 Desember 2021, Perusahaan dan Pelindo Regional I, menandatangani Perjanjian penyediaan jasa kepelabuhanan atas pengoperasian terminal ro-ro dan kendaraan di Pelabuhan Belawan. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir kali pada tanggal 15 Mei 2024. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Loading unloading services and other port services agreements (continued)

8) On April 26, 2022, the Company and IPC TPK agreed to signed Agreement regarding Collaboration on Dock and Field Operations 107 and 108 Tanjung Priok Port. The Agreement has been amended and extended several times, most recently pursuant to an amendment dated 16 June 2025, and is valid until 31 March 2026.

9) On May 31, 2021, the Company and the Pontianak Branch of Pelindo agreed to sign an Agreement on ro-ro vessel service cooperation at the Pontianak Port. The Agreement has been amended and extended several times, most recently pursuant to an amendment dated 30 June 2025, and is valid until 30 June 2026.

10) On December 27, 2021, the Company and PT Glovis Indonesia Logistic signed a cooperation agreement regarding the handling and stacking of cargo at the International Terminal. This agreement is valid from January 1, 2022 to December 31, 2023 and has been extended from January 1, 2024 to December 31, 2025. As of the date of completion of these financial statements, the agreement between the Company and PT Glovis Indonesia Logistic is still in the process of extension.

11) On December 23, 2025, the Company Hyundai Glovis Co.,Ltd signed a cooperation agreement regarding stevedoring services. The agreement is valid for the period from January 1, 2026 until December 31, 2027.

12) On December 10, 2021, the Company and Region I of Pelindo, signed an Agreement for the provide of port services for the operation of the ro-ro terminal and vehicles at the Belawan Port. The Agreement has been amended and extended several times, with last amendment on May 15, 2024. The agreement is valid until December 31, 2025.

27. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa pelayanan pelabuhan lainnya (lanjutan)

12) Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian antara Perusahaan dan Pelindo Regional I masih dalam proses perpanjangan.

13) Pada tanggal 31 Maret 2022, Perusahaan dan Pelindo Regional IV, menandatangani Perjanjian Kerja Sama penyediaan jasa kepelabuhanan atas pengelolaan dan pengoperasian terminal ro-ro dan kendaraan di Pelabuhan Makassar. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2024 dan telah diperpanjang dari tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2026.

14) Pada tanggal 29 September 2023, Perusahaan dan SPMT menandatangani Perjanjian Kerja Sama pengoperasian dan pemeliharaan terminal ro-ro Semayang di Pelabuhan Balikpapan. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2025. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian antara Perusahaan dan SPMT masih dalam proses perpanjangan.

15) Pada tanggal 8 Agustus 2023, Perusahaan dan PT Glovis Indonesia International menandatangani Perjanjian layanan operasi unit CBU Hyundai. Layanan tersebut diberikan di area eksternal dan area internal Perusahaan untuk unit CBU yang diterima dari pabrik sebelum didistribusikan ke tujuan akhir atau dealer. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan, berlaku sampai dengan 31 Agustus 2025 dan tidak diperpanjang.

16) Pada tanggal 6 Agustus 2021, Perusahaan dan PT Suzuki Indomobil Motor menandatangani Perjanjian Kerja Sama jasa pelayanan kepelabuhanan. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun. Perjanjian telah diperpanjang beberapa kali, dengan perpanjangan terbaru pada tanggal 1 September 2025 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2027.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Loading unloading services and other port services agreements (continued)

12) As of the date of completion of these financial statements, the agreement between the Company and Region I of Pelindo is still in the process of extension.

13) On March 31, 2022, the Company and Pelindo Regional IV, signed a cooperation agreement to provide port services for the management and operation of ro-ro terminals and vehicles at Makassar Port. This agreement is valid for 2 (two) years from March 31, 2022 to March 31, 2024 and has been extended from April 1, 2024 to December 31, 2026.

14) On September 29, 2023, the Company and SPMT signed an Agreement for the operation and maintenance of the ro-ro Semayang terminal in Balikpapan Port. This agreement is valid for 2 (two) years starting from October 1, 2023 until September 30, 2025. As of the date of completion of these financial statements, the agreement between the Company and SPMT is still in the process of extension.

15) On August 8, 2023, the Company and PT Glovis Indonesia International signed an Agreement for the operation service of Hyundai CBU units. The services provided in the external area and internal area of the Company for CBU units received from the factory before being distributed to the final destination or dealer. This agreement has been amended several times, effective until August 31, 2025 and not extended.

16) On August 6, 2021, the Company and PT Suzuki Indomobil Motor signed a Cooperation Agreement for port service activities. This agreement is valid for 2 (two) years. The agreement has been extended several times, with the latest extension on September 1, 2025 and valid until August 31, 2027.

27. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa pelayanan pelabuhan lainnya (lanjutan)

17) Pada tanggal 28 Desember 2021, Perusahaan dan PT Isuzu Astra Motor Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama jasa pelayanan kepelabuhanan. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun. Perjanjian telah diperpanjang beberapa kali, dengan perpanjangan terbaru pada tanggal 1 Januari 2026 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

18) Pada tanggal 5 April 2024, Perusahaan dan PT Honda Prospect Motor menandatangani Perjanjian Kerja Sama jasa pelayanan kepelabuhanan. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 dan telah diperpanjang sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025. Perjanjian telah diperpanjang sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2026.

19) Pada tanggal 3 Juni 2024, Perusahaan dan PT Tjahja Sakti Motor menandatangani Perjanjian Kerja Sama jasa pelayanan kepelabuhanan. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2026.

20) Pada tanggal 1 September 2025, Perusahaan dan PT BYD Auto Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama Layanan Cago Handling dan Penumpukan Unit di Terminal Internasional. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026.

c. Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik, Jawa Timur

Pada tanggal 9 April 2015, Perusahaan dan MIE mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik, Jawa Timur dengan membentuk MKO MTKI. Jangka waktu Perjanjian adalah 25 tahun dengan porsi pendanaan Perusahaan dan MIE masing-masing sebesar 45% dan 55%. Pada bulan Maret 2016, MKO MTKI telah beroperasi secara komersial.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Loading unloading services and other port services agreements (continued)

17) On December 28, 2021, the Company and PT Isuzu Astra Motor Indonesia signed a Cooperation Agreement for port service activities. This agreement is valid for 2 (two) years. The agreement has been extended several times, with the latest extension on January 1, 2026 and valid until December 31, 2027.

18) On April 5, 2024, the Company and PT Honda Prospect Motor signed a Cooperation Agreement for port service activities. This Agreement is valid for 2 (two) months, starting from April 19, 2024, to June 18, 2024 and has been extended starting from June 19, 2024, to June 18, 2025. The agreement has been extended for the period from 19 June 2025 until 18 June 2026.

19) On June 3, 2024, the Company and PT Tjahja Sakti Motor signed a Cooperation Agreement for port service activities. This Agreement is valid for 2 (two) years, starting from June 3, 2024, to June 2, 2026.

20) On 1 September 2025, the Company and PT BYD Auto Indonesia signed a Cooperation Agreemenr regarding Cargo Handling and Unit Storage Servic at the International Terminal. The agreement is valid for a period of 1 (one) year commencing from 1 September 2025 until 31 August 2026.

c. Construction and Operation of Car Terminal in Gresik, East Java

On April 9, 2015, The Company and MIE entered into an Agreement of Construction and Operation of Car Terminal in Gresik, East Java by establishing MKO MTKI. The period of agreement is 25 years with the funding portion for the Company and MIE amounting to 45% and 55%, respectively. On March 2016, MKO MTKI has operated commercially.

27. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Perjanjian pelaksanaan penugasan dan pembinaan pekerja Pelindo yang ditugaskan pada Anak Perusahaan di lingkungan Pelindo

Pada tanggal 15 November 2019, Pelindo dan Perusahaan menandatangani Perjanjian tentang penugasan dan pembinaan pekerja Pelindo yang ditugaskan pada Perusahaan. Perjanjian ini terakhir kali diubah pada tanggal 5 Januari 2024 dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d. Agreement on the assignment and development of Pelindo employees assigned to Subsidiaries of Pelindo

On November 15, 2019, Pelindo and the Company signed an Agreement on the assignment and development of Pelindo workers assigned to the Company. This agreement was last amended on January 5, 2024, and is valid for 5 (five) years.

28. INFORMASI SEGMEN

Perusahaan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam segmen-segmen yang meyediakan jasa pelayanan terminal, jasa pelayanan barang, jasa rupa-rupa dan pengusahaan fasilitas dan utilitas (Catatan 19).

Informasi yang menyangkut segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

28. SEGMENT INFORMATION

The Company operates and manages business in segments which provides terminal services, cargo services and miscellaneous, facilities and utilities services (Note 19).

Information concerning the Company's business segments are as follows:

	31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/ *December 31, 2025 and for the year then ended*				
	Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang/ *Terminal and Cargo Services*	**Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas/ *Miscellaneous, Facilities and Utilities Services***	**Non-segmen/ *Non-segment***	**Total/ *Total***	
Pendapatan operasi segmen	910.791.319	19.169.097	-	929.960.416	*Segment operating revenues*
Beban pokok pendapatan	(527.876.232)	(2.825.622)	-	(530.701.854)	*Cost of revenues*
Laba bruto	**382.915.087**	**16.343.475**	**-**	**399.258.562**	***Gross profit***
Beban umum dan administrasi	-	-	(95.810.901)	(95.810.901)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lainnya	-	-	14.587.400	14.587.400	*Other operating income*
Beban operasi lainnya	-	-	(17.175.852)	(17.175.852)	*Other operating expenses*
Laba usaha	**382.915.087**	**16.343.475**	**(98.399.353)**	**300.859.209**	***Income for operations***
Pendapatan keuangan	-	-	57.199.060	57.199.060	*Finance income*
Beban keuangan	-	-	(34.121.599)	(34.121.599)	*Finance expenses*
Laba sebelum pajak penghasilan badan	**382.915.087**	**16.343.475**	**(75.321.892)**	**323.936.670**	***Income before corporate income tax***
Pajak penghasilan badan					***Corporate income tax***
Kini				(62.299.180)	*Current*
Tangguhan				(5.124.770)	*Deferred*
Laba tahun berjalan				**256.512.720**	***Income for the year***
Penghasilan komprehensif lain				-	*Other comprehensive income*
Total laba komprehensif tahun berjalan				**256.512.720**	***Total comprehensive income for the year***

28. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

28. SEGMENT INFORMATION (continued)

Informasi yang menyangkut segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Information concerning the Company's business segments are as follows: (continued)

	31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/ *December 31, 2025 and for the year then ended*				
	Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang/ *Terminal and Cargo Services*	**Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas/ *Miscellaneous, Facilities and Utilities Services***	**Non-segmen/ *Non-segment***	**Total/ *Total***	
Aset dan Liabilitas					*Assets and Liabilities*
Aset segmen	917.845.013	1.428.883	1.138.958.122	2.058.232.018	*Segment assets*
Liabilitas segmen	576.690.366	-	120.740.421	697.430.787	*Segment liabilities*
Informasi lainnya					*Other information*
Pengeluaran modal	7.065.229	-	-	7.065.229	*Capital expenditure*
Penyusutan dan amortisasi segmen	94.944.998	276.920	2.340.757	97.562.676	*Segment depreciation and amortization*

	31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/ *December 31, 2024 and for the year then ended*				
	Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang/ *Terminal and Cargo Services*	**Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas/ *Miscellaneous, Facilities and Utilities Services***	**Non-segmen/ *Non-segment***	**Total/ *Total***	
Pendapatan operasi segmen	796.750.145	27.845.691	-	824.595.836	*Segment operating revenues*
Beban pokok pendapatan	(474.310.844)	(2.767.726)	-	(477.078.570)	*Cost of revenues*
Laba bruto	**322.439.301**	**25.077.965**	**-**	**347.517.266**	***Gross profit***
Beban umum dan administrasi	-	-	(89.423.994)	(89.423.994)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lainnya	-	-	12.745.546	12.745.546	*Other operating income*
Beban operasi lainnya	-	-	(14.249.520)	(14.249.520)	*Other operating expenses*
Laba usaha	**322.439.301**	**25.077.965**	**(90.927.968)**	**256.589.298**	***Income for operations***
Pendapatan keuangan	-	-	45.050.723	45.050.723	*Finance income*
Beban keuangan	-	-	(31.793.535)	(31.793.535)	*Finance expenses*
Laba sebelum pajak penghasilan badan	**322.439.301**	**25.077.965**	**(77.670.780)**	**269.846.486**	***Income before corporate income tax***
Pajak penghasilan badan					***Corporate income tax***
Kini				(59.779.205)	*Current*
Tangguhan				2.148.946	*Deferred*
Laba tahun berjalan				**212.216.227**	***Income for the year***
Penghasilan komprehensif lain				-	*Other comprehensive income*
Total laba komprehensif tahun berjalan				**212.216.227**	***Total comprehensive income for the year***
Aset dan Liabilitas					*Assets and Liabilities*
Aset segmen	964.471.601	13.486.167	872.780.570	1.850.738.338	*Segment assets*
Liabilitas segmen	513.372.308	-	60.137.639	573.509.947	*Segment liabilities*
Informasi lainnya					*Other information*
Pengeluaran modal	16.661.876	-	-	16.661.876	*Capital expenditure*
Penyusutan dan amortisasi segmen	106.911.620	294.980	3.485.990	110.692.590	*Segment depreciation and amortization*

28. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *28. SEGMENT INFORMATION (continued)*

Informasi yang menyangkut pendapatan berdasarkan segmen geografis Perusahaan adalah sebagai berikut:

Information concerning the Company's revenue based on geographical segments are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pendapatan			***Revenue***
Tanjung Priok, Jakarta	844.241.214	757.775.914	*Tanjung Priok, Jakarta*
Makassar, Sulawesi Selatan	25.053.467	18.406.579	*Makassar, South Sulawesi*
Pontianak, Kalimantan Barat	18.048.451	15.617.991	*Pontianak, West Kalimantan*
Belawan, Sumatra Utara	17.106.250	19.636.171	*Belawan, North Sumatra*
Balikpapan, Kalimantan Timur	14.097.995	11.823.453	*Balikpapan, East Kalimantan*
Banjarmasin, Kalimantan Selatan	10.870.221	864.097	*Banjarmasin, South Kalimantan*
Gresik, Jawa Timur	542.818	471.631	*Gresik, East Java*
Total	**929.960.416**	**824.595.836**	***Total***

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Aset tidak lancar			***Non-current assets***
Jakarta	881.016.067	942.959.791	*Jakarta*
Gresik, Jawa Timur	6.008.592	6.342.984	*Gresik, East Java*
Total	**887.024.659**	**949.302.775**	***Total***

29. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS / *29. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION*

Aktivitas signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas Perusahaan adalah sebagai berikut:

Significant activities which did not affect the Company's cash flows are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Penambahan aset melalui utang lain-lain	3.942.696	3.612.645	*Addition of fixed assets through other payable*
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	39.710.532	13.190.423	*Addition of right-of-use assets through lease liabilities*

Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Movement of liabilities arising from financing activities in the statement of cash flows are as follows:

			Non- arus kas/*Non-cash flow*			
	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Pengakuan bunga/ *Interest recognition***	**Lainnya/ *Others***	**31 Desember 2025/ *December 31, 2025***	
Liabilitas sewa (Catatan 10)	428.656.487	(20.652.764)	34.121.599	34.364.532	476.489.854	*Lease liabilities (Note 10)*

			Non- arus kas/*Non-cash flow*			
	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Pengakuan bunga/ *Interest recognition***	**Lainnya/ *Others***	**31 Desember 2024/ December 31, *2024***	
Liabilitas sewa (Catatan 10)	401.606.801	(17.794.990)	31.793.535	13.051.141	428.656.487	*Lease liabilities (Note 10)*

30. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Pada tanggal 6 Januari 2026, Perusahaan membayarkan dividen interim yang telah diumumkan sebesar Rp47.574.220 masing-masing kepada publik sebesar Rp13.320.780, kepada SPMT sebesar Rp33.910.905, dan kepada MTI sebesar Rp342.535.

30. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

On January 6, 2026, the Company paid the announced interim dividend amounting to Rp47,574,220, each to Public amounted Rp13,320,780, to SPMT amounted Rp33,910,905, and to MTI amounted Rp342,535, respectively.

Referensi Silang SEOJK No. 16 /SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Cross-Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing the Annual Report of Issuers or Public Companies

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
I. Ketentuan Umum General Terms	
2. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:	
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik. The Annual Report is a report on the board of directors and board of commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies.	✓
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Issuers are parties who make public offerings.	✓
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. A Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.	✓
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically-listed Company	72
e. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.	✓
f. Direksi: Board of Directors:	
i) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	✓
ii) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai badan hukum tersebut. for an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	✓
g. Dewan Komisaris: Board of Commissioners:	
i) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	✓
ii) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. for the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	✓

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:	
i) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and	✓
ii) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut. for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity. .	300
3. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.	✓
4. Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.	✓
5. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.	✓
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.	✓
II. Bentuk Laporan Report Format	
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik. The Annual Report is presented in the form of printed and electronic documents.	✓
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik. The Annual Report is presented in the form of a printed document, printed on light colored paper, of good quality, A4 size, bound, and can be reproduced with good quality.	✓
3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.	✓
4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam portable document format (PDF). The Annual Report presented in the form of an electronic document is the Annual Report converted into a portable document format (PDF).	✓
III. Isi Laporan Tahunan Annual Report Contents	
1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat: The Annual Report shall at least contain:	
ikhtisar data keuangan penting; overview of important financial data;	18-22
a. informasi saham (jika ada); stock information (if any);	25-27
b. laporan Direksi; report of the Board of Directors;	50-67
c. laporan Dewan Komisaris; report of the Board of Commissioners;	40-49
d. profil Emiten atau Perusahaan Publik; profile of the Issuer or Public Company;	72-141

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
e. analisis dan pembahasan manajemen; management analysis and discussion;	182-237
f. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; governance of Issuers or Public Companies;	240-507
g. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;	N/A
h. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan audited annual financial report; and	510-599
i. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding their responsibility for the Annual Report.	68-69
2. Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Annual Report Contents	
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Summary of Important Financial Data Summary of important financial data containing financial information that is presented in the form of a comparison for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the Issuer or Public Company has carried out its business activities for less than 3 (three) years, at least containing:	18-27
i) pendapatan/penjualan; income/sales;	18
ii) laba bruto; gross profit;	18
iii) laba (rugi); profit (loss);	18
iv) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; the amount of profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	N/A
v) total laba (rugi) komprehensif; total comprehensive profit (loss);	18
vi) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	N/A
vii) laba (rugi) per saham; earning (loss) per share;	18
viii) jumlah aset; total assets;	20
ix) jumlah liabilitas; total liabilities;	20
x) jumlah ekuitas; total equity;	20
xi) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; ratio of profit (loss) to total assets;	22
xii) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; ratio of profit (loss) to equity;	20
xiii) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; ratio of profit (loss) to revenue/sales;	22
xiv) rasio lancar; current ratio;	22
xv) rasio liabilitas terhadap ekuitas; ratio of liabilities to equity;	22
xvi) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan ratio of liabilities to total assets; and	22
xvii) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.	22
b. Informasi Saham Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Stock Information Stock information for a Public Company shall at least contain:	
i) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: shares that have been issued for each quarterly period presented in the form of a comparison for the last 2 (two) fiscal years, at least containing:	25-26

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
• jumlah saham yang beredar; number of shares outstanding;	25-26
• kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed;	25-26
• harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan the highest, lowest, and closing share prices based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and	25-26
• volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	25-26
Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on a stock exchange;	
ii) dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: in the event of a corporate actions that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) shall be added with at least an explanation regarding:	27
• tanggal pelaksanaan aksi korporasi; the date of implementation of the corporate action;	
• rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; the ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;	
• jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; the number of outstanding shares before and after the corporate action;	
• jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of convertible securities exercised (if any); and	
• harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; the share price before and after the corporate action;	
iii) dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan in the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the fiscal year, the reasons for the suspension and/or delisting of shares shall be explained; and	27
iv) dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. in the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, it explains the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation of the share listing (delisting).	27
c. Laporan Direksi Board of Directors' Report	51
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:	
1. kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: performance of the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;	53
b. peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	55
c. proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	56
d. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	57
e. kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; obstacles faced by Issuers or Public Companies;	58
2. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	59
3. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	60

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
d. Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	41
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:	
1. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; evaluation of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	42
2. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	45
3. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company.	46
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: The profile of the Issuer or Public Company contains at least the following information:	72
1. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; name of the Issuer or Public Company, including if there is a change in name, the reason for the change, and the effective date of the name change in the fiscal year;	72
2. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	74
a. alamat; address;	74
b. nomor telepon; telephone number;	74
c. alamat surat elektronik; dan e-mail address; and	74
d. alamat situs web; website address;	74
3. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;	75
4. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan; vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	82
5. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, as well as types of goods and/or services produced;	90
6. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	100
7. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	102
8. daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	99
9. profil Direksi, paling sedikit memuat: Directors' profile, at least containing:	
a. nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; name and position in accordance with the duties and responsibilities;	104
b. foto terbaru; recent photograph;	104

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
c. usia; age;	104
d. kewarganegaraan; nationality;	104
e. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	104
f. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	104
i) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; the legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;	104
ii) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	104
iii) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	104
iv) hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and	104
v) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	114
10. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: profile of the Board of Commissioners, at least containing:	108
a. nama dan jabatan; name and position;	108
b. foto terbaru; recent photograph;	108
c. usia; age;	108
d. kewarganegaraan; nationality;	108
e. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	108
f. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	108
i) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;	108
ii) dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;	108
iii) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	108
iv) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	108
g. hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;	108

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
h. pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and	344
i. perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;	114
11. dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the fiscal year ends up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;	115
12. jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	126
13. nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding:	132
a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;	131
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and	131
c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;	131
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.	131
14. persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	132
Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	132
15. jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: number of shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification:	133
a. kepemilikan institusi lokal; ownership in local institutions;	133
b. kepemilikan institusi asing; ownership in foreign institutions;	133
c. kepemilikan individu lokal; dan local individual ownership; and	133
d. kepemilikan individu asing; foreign individual ownership;	133
16. informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the form of a schematic or chart;	133
17. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. the name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	134

KETERANGAN DESCRIPTION	**HALAMAN** PAGE
18. kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	136
19. informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	137
20. informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: information on the use of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) services and their networks/associations/ alliances include:	137
a. nama dan alamat; name and address;	137
b. periode penugasan; assignment period;	137
c. informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; information on audit and/or non-audit services provided;	137
d. biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and	137
e. dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan in the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and	137
Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/aliances can be presented in tabular form.	137
21. nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP	137
a. Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Analysis and Discussion	182-237
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management analysis and discussion contains analysis and discussion of financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the fiscal year, which at least contains:	
1. tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a review of operations per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	184-198
a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; production, which includes the process, capacity, and development;	
b. pendapatan/penjualan; dan income/sales; and	
c. profitabilitas; profitability;	
2. kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:	
a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; current assets, non-current assets, and total assets;	206-209
b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; current liabilities, long term liabilities, and total liabilities;	209-212
c. ekuitas; equity;	212
d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan income/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and	213-216
e. arus kas; cash flows;	216-218

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
3. kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; ability to pay debts or obligations by presenting the relevant ratio calculations;	219-220
4. tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	221-222
5. struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies on the capital structure with the basis for determining the said policy;	222
6. bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: discussion of material ties for capital goods investment with an explanation that at least contains:	223
a. tujuan dari ikatan tersebut; the purpose of the bond;	
b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; the expected source of funds to fulfill the commitment;	
c. mata uang yang menjadi denominasi; dan the currency in which it is denominated; and	
d. langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; steps that are planned by the Issuer or Public Company to protect the risk from the related foreign currency position;	N/A
7. bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: discussion of capital goods investments realized in the last fiscal year, at least contains:	223-224
a. jenis investasi barang modal; type of capital goods investment;	
b. tujuan investasi barang modal; dan the purpose of capital goods investment; and	
c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; the total of capital goods investments;	
8. informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); information and material facts occurring after the date of the accountant's report (if any);	224
9. prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; the business prospects of the Issuer or Public Company are related to the conditions of the industry, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;	234
10. perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization), regarding:	225-226
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	
b. laba (rugi); profit (loss);	
c. struktur modal (capital structure); atau capital structure; or	
d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	
11. target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:	234-235
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	
b. laba (rugi); profit (loss);	
c. struktur modal (capital structure); capital structure;	
d. kebijakan dividen; atau dividend policy; or	
e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	
12. aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share;	199-202
13. uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:	227-228

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
a. kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;	
b. tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	
c. jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and	
d. jumlah dividen per tahun yang dibayar; the amount of dividends paid annually;	
e. Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	
14. realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:	231
a. dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan in the event that during the fiscal year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and	
b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; in the event that there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	
15. informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: material information (if any), regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing :	231-232
a. tanggal, nilai, dan objek transaksi; date, value, and object of the transaction;	
b. nama pihak yang melakukan transaksi; name of the party conducting the transaction;	
c. sifat hubungan afiliasi (jika ada); nature of the affiliation relationship (if any);	
d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi; explanation of the fairness of the transaction;	
e. pemenuhan ketentuan terkait; dan compliance with related provisions; and	
f. dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: in the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:	N/A
i) pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan a statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and	
ii) peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;	
g. untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously;	231-232
Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
h. untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	
i. dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;	
16. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes in the provisions of laws and regulations that have a significant effect on Issuers or Public Companies and their impact on financial statements (if any); and	232
17. perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).	233
a. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Governance	
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall at least contain a brief description of:	
1. RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at least contains:	
a. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:	301
i) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and	301
ii) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;	301
• dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	304
2. Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at least contains:	
a. tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;	321
b. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form	321
c. pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	317
d. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;	360
e. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	360
f. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: training and/or competency development of members of the Board of Directors:	324
i) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	324
ii) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	324
g. penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: the Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:	329

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
h. prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	329
i. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and	329
j. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	329
3. Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at least contains:	
a. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	335
b. pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; a statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	331
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;	360
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	360
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	339
i) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	339
ii) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	347
e. penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	347
i) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; procedures for implementing performance appraisals;	347
ii) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and	347
iii) pihak yang melakukan penilaian; dan party conducting the assessment; and	347
f. penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	342
i) prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	342
ii) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; the criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;	
iii) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	
• prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	342
• prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	352
» prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	352
» struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and	353

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
» besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	355
• Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain:	-
» nama; name;	-
» dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;	-
» periode penugasan dewan pengawas syariah; period of assignment of the sharia supervisory board;	-
» tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and	-
» frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies;	-
• Komite audit, paling sedikit memuat: The audit committee, at least contains:	
» nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	377
» usia; age;	377
» kewarganegaraan; nationality;	377
» riwayat pendidikan; educational history;	377
» riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	377
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	377
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee as well as other positions (if any); and	377
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	377
» periode dan masa jabatan anggota komite audit; period and term of office of the audit committee members;	377
» pernyataan independensi komite audit; statement of independence of the audit committee;	378
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	380
» kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and	379
» pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; the implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	387
• komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:	
» nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	383
» usia; age;	383
» kewarganegaraan; nationality;	383

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
» riwayat pendidikan; educational history;	383
» riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	383
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	383
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	383
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	383
» periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	383
» pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	394
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	398
» uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	391
» pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); a statement that it has a guideline or charter;	390
» kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	395
» uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and	396
» dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	396
1. alasan tidak dibentuknya komite; dan reasons for not forming the committee; and	-
2. pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; the party carrying out the nomination and remuneration function;	-
• komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing:	-
» nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	-
» usia; age;	-
» kewarganegaraan; nationality;	-
» riwayat pendidikan; educational history;	-
» riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	-
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	-
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	-
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	-
» periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	-
» pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	-

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and	-
» uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	-
» pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; a statement that the committee has had guidelines or charters;	-
» kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and	-
» uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; a brief description of the committee's activities for the fiscal year;	-
• Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate secretary, at least contains:	411
» nama; name;	411
» domisili; domicile;	411
» riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	411
» dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan legal basis for appointment as company secretary; and	413
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	411
» riwayat pendidikan; educational history;	411
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan training and/or competency improvement followed during the fiscal year; and	413
» uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; a brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the fiscal year;	412
• Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal audit unit, at least contains:	
» nama kepala unit audit internal; name of the head of the internal audit unit;	418
» riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	418
» dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan legal basis for the appointment as head of the internal audit unit; and	418
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	418
» kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); qualification or certification as an internal audit profession (if any);	418
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	426
» struktur dan kedudukan unit audit internal; structure and position of the internal audit unit;	417
» uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	421
» pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan a statement that the internal audit unit has had guidelines or charters; and	420
» uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; a brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	421
• uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	430
» pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	430

KETERANGAN DESCRIPTION	**HALAMAN** PAGE
» tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan review of the effectiveness of the internal control system; and	436
» pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	439
• sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least contains:	
» gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; general description of the risk management system of the Issuer or Public Company;	440
» jenis risiko dan cara pengelolaannya; types of risks and how to manage them;	455
» tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and	457
» pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	458
• perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:	
» pokok perkara/gugatan; subject matter/claim;	468
» status penyelesaian perkara/gugatan; dan status of settlement of cases/claims; and	468
» pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; effect on the condition of the Issuer or Public Company;	468
• informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any);	469
• informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: information regarding the code of ethics of the Issuer or Public Company includes:	
» pokok-pokok kode etik; main points of the code of ethics;	477
» bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and	481
» pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; a statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Issuers or Public Companies;	481
• uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); a brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP);	485
Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:	
» jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options;	485
» jangka waktu pelaksanaan; implementation period;	485
» persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements for eligible employees and/or management; and	485
» harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; exercise price or determination of exercise price;	485
• uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a brief description of the information disclosure policy regarding:	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
» kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and	486
» pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; implementation of the policy;	486
• uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least containing:	
» cara penyampaian laporan pelanggaran; method of submitting a violation report;	491
» perlindungan bagi pelapor; protection for whistleblowers;	491
» penanganan pengaduan; complaint handling;	490
» pihak yang mengelola pengaduan; dan party managing the complaint; and	490
» hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: result of complaint handling, at least:	
» jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan number of complaints received and processed in the fiscal year; and	493
» tindak lanjut pengaduan; follow-up on complaints;	493
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter is disclosed.	493
• uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:	498
• program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan a description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:	498
» pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and	498
» Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies;	498
• penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.	
» pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies, including:	244
» penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). a statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or	244
» Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	244
viii) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies	-
1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at at least includes:	
a. penjelasan strategi keberlanjutan; explanation of the sustainability strategy;	
b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
c. profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief profile of the Issuer or Public Company;	
d. penjelasan Direksi; explanation of the Board of Directors;	
e. tata kelola keberlanjutan; sustainability governance;	
f. kinerja keberlanjutan; sustainability performance;	
g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; written verification from an independent party, if any;	
h. lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan feedback sheet for readers, if any; and	
i. tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; the response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;	
2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	
3. informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat: information on the Sustainability Report in number 1) can:	
a. diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or	
b. merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; refers to other sections outside the social and environmental responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;	
4. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;	
5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:	
a. memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan contains all the information as referred to in number 1); and	
b. disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	
6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that information on social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and	
7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report.	
8. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Report	510-599

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial reports contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.	512
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report Statements of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding the responsibilities of the Annual Report are prepared in accordance with the format of Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report as contained in the Appendix I which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	68-69

2025 Annual Report
Laporan Tahunan

Developing an Integrated Vehicle Logistics Ecosystem

Mengembangkan Ekosistem Logistik Kendaraan yang Terintegrasi

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

Jl. Sindang Laut No. 100,
Cilincing - Jakarta Utara 14110
Phone: +62 21 4393 2251
Customer Service: +62 811 933 9930
Whistle Blowing: +62 21 4393 2251 ext 211
E-mail: corsec@indonesiacarterminal.co.id